



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban

LKPJ GUBERNUR DIY

Tahun

2023



Kata Pengantar



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan daerah. Melalui LKPJ, proses pembangunan dan hasilnya dapat dilihat dari tingkat keberhasilannya, objektivitas, kemanfaatan, dan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan selanjutnya. Oleh karenanya, LKPJ Gubernur DIY ini disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pembangunan daerah DIY selama tahun 2023. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen LKPJ DIY ini disusun untuk melaksanakan amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dokumen LKPJ Gubernur DIY Tahun 2023 akan menggambarkan hasil kinerja pelaksanaan APBD DIY pada Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari periode pelaksanaan perencanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 yang telah disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021. Efektivitas pelaksanaan pembangunan Pemda DIY dapat diukur berdasar capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda, Indikator Program Pemda, dan Indikator Kinerja Utama terhadap pelaksanaan urusan. Ruang lingkup dokumen LKPJ Tahun 2023 meliputi: (1) Pendahuluan; (2)

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; (4) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; (5) Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY; (6) Program Strategis DIY; (7) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah; dan (8) Penutup.

Pada tahun 2023, hasil penyelenggaraan urusan pembangunan Pemda DIY mendekati optimal, Capaian indikator-indikator kinerja yang telah melampaui target patut disyukuri dan perlu ditingkatkan. Pelaksanaan pembangunan tahun 2023, menghadapi berbagai tantangan baik pemulihan pasca pandemi, krisis global, persiapan menyongsong tahun politik 2024. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk berupaya lebih baik di tahun perencanaan berikutnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diharapkan laporan ini akan mendapatkan masukan dan saran perbaikan untuk rekomendasi pembangunan ke depan, terutama catatan dan rekomendasi dari DPRD DIY. Masukan dan saran tersebut diharapkan menjadi semangat kolaborasi bersama *Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh* membangun DIY. Mari kita senantiasa bersyukur dan berdoa untuk kemajuan masyarakat DIY, yang sejahtera dan bermartabat. “*Layaning Hyang Agung, Murcita Tisning Nugraha,*” atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita senantiasa mendapat anugerah. Sekian, Terima Kasih

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yogyakarta, Maret 2024

**GOVERNOR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



HAMENGKU BUWONO X

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	XXXII
DAFTAR GAMBAR	LIII
BAB I PENDAHULUAN	1-1
A. DASAR HUKUM	1-1
B. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG.....	1-7
1. Visi Jangka Panjang	1-7
2. Misi Jangka Panjang	1-9
C. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	1-9
1. Perumusan Tujuan dan Sasaran	1-9
2. Tujuan	1-19
3. Sasaran.....	1-21
D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPD 2023	1-22
1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023-2026.....	1-22
2. Program Pembangunan Daerah dan Indikator	1-26
E. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023.....	1-29
1. Tema Pembangunan Daerah	1-29
2. Prioritas Pembangunan Daerah	1-30
F. GAMBAR UMUM DAERAH.....	1-31
1. Kondisi Geografis Daerah	1-31
a. Batas Administrasi.....	1-31
b. Luas Wilayah	1-32

c.	Topografi.....	1-32
1)	Kemiringan Lahan	1-33
2)	Ketinggian Lahan	1-33
3)	Satuan Fisiografis.....	1-33
d.	Klimatologi	1-35
e.	Sumber Daya Air.....	1-36
1)	Sumber Daya Air Permukaan.....	1-36
2)	Sumber Daya Air Tanah	1-37
2.	Gambaran Umum Daerah	1-38
a.	Jumlah Penduduk	1-38
b.	Pertumbuhan Penduduk	1-39
c.	Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan	1-40
1)	Penduduk Usia Kerja.....	1-41
2)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	1-42
3)	Angkatan Kerja.....	1-43
4)	Penduduk yang Bekerja	1-43
5)	Pengangguran Terbuka	1-44
d.	Pendidikan.....	1-46
e.	Kondisi Ekonomi Daerah	1-51
1)	Sektor Unggulan	1-51
a)	Sektor Industri Pengolahan.....	1-51
b)	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1-52
c)	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1-58
2)	Pertumbuhan Ekonomi.....	1-66
3)	Inflasi	1-68
3.	Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan	1-69
a.	Gambaran Umum Birokrasi Pemda DIY	1-69
1)	Gambaran Kondisi ASN yang Dimiliki	1-73
2)	Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Dalam APBD P 2023	1-76

a)	Ringkasan Realisasi Pendapatan	1-76
b)	Ringkasan Realisasi Belanja	1-78
c)	Realisasi Pembiayaan	1-79

BAB II KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM

PERUBAHAN APBD2-1

A.	PERUBAHAN TERHADAP KEGIATAN	2-1
B.	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2-3
1.	Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah	2-3
2.	Target dan Realisasi Pendapatan	2-6
a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2-7
1)	Pajak Daerah	2-8
2)	Retribusi Daerah	2-9
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2-12
4)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2-14
b.	Pendapatan Transfer	2-16
1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2-17
a)	Dana Bagi Hasil (DBH)	2-18
b)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2-19
c)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2-20
d)	Dana Insentif Daerah (DID)	2-23
e)	Dana Keistimewaan (DAIS)	2-23
2)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2-24
3)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2-25
a)	Pendapatan Hibah	2-26
b)	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2-27
3.	Permasalahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Pendapatan	2-27
a.	Permasalahan	2-27
b.	Solusi	2-28

C.	PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	2-28
1.	Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah.....	2-28
2.	Target dan Realisasi Belanja	2-31
a.	Belanja Operasi	2-33
1)	Belanja Pegawai.....	2-34
2)	Belanja Barang dan Jasa	2-37
3)	Belanja Subsidi.....	2-39
4)	Belanja Hibah.....	2-40
5)	Belanja Bantuan Sosial	2-43
b.	Belanja Modal	2-44
c.	Belanja Dana Keistimewaan	2-48
d.	Belanja Tak terduga	2-54
e.	Belanja Transfer.....	2-54
1)	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	2-54
2)	Belanja Bantuan Keuangan.....	2-55
3)	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/ Kota.....	2-56
4)	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	2-57
3.	Permasalahan dan Solusi	2-59
a.	Permasalahan.....	2-59
b.	Solusi	2-59
D.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	2-60
1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	2-60
2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	2-60
E.	PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN	2-61
1.	Kinerja BUMD PT Bank BPD DIY.....	2-61
a.	PT Anindya Mitra Internasional (AMI).....	2-62
b.	PT Taru Martani.....	2-64
c.	Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.....	2-64
d.	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	2-65

F. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2-67
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah	2-67
a. Dasar Hukum Pelaksanaan	2-67
b. Tantangan dan Permasalahan	2-68
c. Upaya-upaya yang Dilaksanakan	2-69
d. Capaian.....	2-69
2. Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemda DIY.....	2-71
3. Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.....	2-72
a. Dasar dan Tujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	2-74
b. Penghapusan Aset Tidak Bergerak	2-75
c. Penghapusan Aset Bergerak.....	2-75
d. Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Penjualan dan Lelang	2-76
e. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2-86
f. Pemusnahan Barang Milik Daerah	2-89
4. Pendayagunaan Barang Daerah	2-90
a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.....	2-90
b. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah.....	2-101
1) Pembersihan Lahan	2-101
2) Asuransi Barang Milik Daerah.....	2-102
3) Pengamanan Fisik Bangunan Gedung	2-103

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH3-1

A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN PEMDA.....	3-1
1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat – Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI).....	3-1
2. Indeks Reformasi Birokrasi.....	3-3

B. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMDA.....	3-10
1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Pertumbuhan Ekonomi	3-11
2. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	3-12
3. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Indeks Gini	3-15
4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Indeks Williamson	3-18
5. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	3-19
6. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat – Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	3-22
7. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat – Tingkat Kemiskinan.....	3-27
8. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan – Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).....	3-29
9. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Opini BPK	3-31
10. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Nilai AKIP	3-33
C. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA	3-35
1. Program Pengembangan Sektor Unggulan (Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Akomodasi Makan Minum)	3-37
a. Sektor Pertanian.....	3-39
b. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	3-40
c. Industri Pengolahan dan Perdagangan.....	3-44
2. Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah – Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi	3-45
a. Permasalahan dan Solusi	3-47
1) Permasalahan	3-47
2) Solusi	3-48

3.	Program Penumbuhan Wirausaha Baru – Rasio Kewirausahaan	
	3-50	
a.	Pendukung Ketercapaian Sasaran	3-51
1)	Pengembangan Desa Preneur	3-51
2)	Saka Wirausaha	3-52
3)	Bantuan Free Ongkir (Markethub SiBakul)	3-52
b.	Permasalahan dan Solusi	3-53
1)	Permasalahan	3-53
2)	Solusi	3-53
4.	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan	
	Infrastruktur	3-54
a.	Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar	3-54
1)	Permasalahan dan Solusi	3-56
a)	Permasalahan	3-56
b)	Solusi	3-57
b.	Peningkatan PDRB pada Kabupaten/Kota yang Belum	
	Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	3-57
5.	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan – Capaian	
	Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah	
	Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	3-59
6.	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan	
	Bencana,	3-65
a.	Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan	
	Lingkungan	3-65
1)	Permasalahan dan Solusi	3-66
a)	Permasalahan	3-66
b)	Solusi	3-67
b.	Indeks Risiko Bencana	3-68
1)	Faktor yang mempengaruhi capaian	3-70
a)	Ancaman kawasan;	3-70
b)	Kerentanan kawasan yang terancam;	3-71

c) Kapasitas kawasan yang terancam.	3-72
2) Permasalahan dan Solusi.....	3-75
a) Permasalahan	3-75
b) Solusi.....	3-76
7. Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang – Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	3-77
a. Permasalahan dan Solusi	3-79
1) Permasalahan	3-79
2) Solusi	3-79
8. Program Pembangunan Rendah Karbon – Penurunan Emisi GRK.....	3-80
a. Permasalahan dan Solusi	3-81
1) Permasalahan	3-81
2) Solusi	3-82
9. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan – Harapan Lama Sekolah.....	3-83
10. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup,.....	3-85
a. Angka Harapan Hidup	3-85
b. Total Fertility Rate	3-88
11. Program Penanggulangan Kemiskinan – Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	3-90
12. Program Pelestarian Budaya Benda dan Takbenda – Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, dan internasional).....	3-92
13. Program Pembangunan Sosial Masyarakat,.....	3-96
a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	3-96
b. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	3-100
1) Permasalahan dan Solusi.....	3-102
a) Permasalahan	3-102
b) Solusi.....	3-103

14. Program Sinergis Tata Kelola Pemerintah Daerah,.....	3-103
a. Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	3-103
b. Survey Kepuasan Masyarakat.....	3-105
1) Permasalahan dan Solusi.....	3-107
a) Permasalahan	3-107
b) Solusi.....	3-108
15. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah – Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdas Kelembagaan.....	3-108
a. Permasalahan dan Solusi	3-110
1) Permasalahan	3-110
2) Solusi	3-111
D. PENGHARGAAN	3-111
E. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN.....	3-118
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	3-118
a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar.....	3-118
1) Urusan Pendidikan.....	3-118
a) Kondisi Umum.....	3-118
b) Permasalahan dan Solusi	3-122
c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-122
2) Urusan Kesehatan.....	3-137
a) Kondisi Umum.....	3-137
b) Permasalahan dan Solusi	3-140
c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-142
3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3-148
a) Sub Urusan Pekerjaan Umum	3-148
b) Sub Urusan Penataan Ruang.....	3-167
4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	3-181

a)	Kondisi Umum.....	3-181
b)	Permasalahan dan Solusi	3-183
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-184
5)	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3-189
a)	Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas	3-189
b)	Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	3-201
c)	Sub Urusan Penanggulangan Bencana	3-218
6)	Urusan Sosial	3-227
a)	Kondisi Umum.....	3-227
b)	Permasalahan dan Solusi	3-229
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-231
b.	Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	3-260
1)	Urusan Tenaga Kerja	3-260
a)	Kondisi Umum.....	3-260
b)	Permasalahan dan Solusi	3-263
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-264
2)	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	3-273
a)	Kondisi Umum.....	3-273
b)	Permasalahan dan Solusi	3-276
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-277
3)	Urusan Pangan.....	3-287
a)	Kondisi Umum.....	3-287
b)	Permasalahan dan Solusi	3-290
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-291
4)	Urusan Pertanahan.....	3-295
a)	Kondisi Umum.....	3-295
b)	Permasalahan dan Solusi	3-299
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-300

5)	Urusan Lingkungan Hidup	3-305
a)	Kondisi Umum.....	3-305
b)	Permasalahan dan Solusi	3-307
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-308
6)	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	3-314
a)	Kondisi Umum.....	3-314
b)	Permasalahan dan Solusi	3-319
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-320
7)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3-324
a)	Kondisi Umum.....	3-324
b)	Permasalahan dan Solusi	3-327
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-327
8)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	3-331
a)	Kondisi Umum.....	3-331
b)	Permasalahan dan Solusi	3-334
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-336
9)	Urusan Perhubungan.....	3-339
a)	Kondisi Umum.....	3-339
b)	Permasalahan dan Solusi	3-347
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-350
10)	Urusan Komunikasi dan Informatika	3-358
a)	Kondisi Umum.....	3-358
b)	Permasalahan dan Solusi	3-365
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-366
11)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3-370
a)	Kondisi Umum.....	3-370
b)	Permasalahan dan Solusi	3-376
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-378

12) Urusan Penanaman Modal	3-388
a) Kondisi Umum.....	3-388
b) Permasalahan dan Solusi	3-393
c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-394
13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	3-397
a) Kondisi Umum.....	3-397
b) Permasalahan dan Solusi	3-399
c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-400
14) Urusan Statistik.....	3-404
a) Kondisi Umum.....	3-404
b) Permasalahan dan Solusi	3-407
c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-408
15) Urusan Persandian	3-411
a) Kondisi Umum.....	3-411
b) Permasalahan dan Solusi	3-418
c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023	3-419
16) Urusan Kebudayaan.....	3-420
a) Kondisi Umum.....	3-420
b) Permasalahan dan Solusi	3-425
c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-426
17) Urusan Perpustakaan	3-436
a) Kondisi Umum.....	3-436
b) Permasalahan dan Solusi	3-440
c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-441
18) Urusan Kearsipan.....	3-444
a) Kondisi Umum.....	3-444
b) Permasalahan dan Solusi	3-446
c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-447

2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3-448
a. Urusan Kelautan dan Perikanan	3-448
1) Kondisi Umum	3-448
2) Permasalahan dan Solusi.....	3-450
a) Permasalahan	3-450
b) Solusi.....	3-450
3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	3-451
b. Urusan Pariwisata	3-458
1) Kondisi Umum	3-458
2) Permasalahan dan Solusi.....	3-460
a) Permasalahan	3-460
b) Solusi.....	3-460
3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	3-461
c. Urusan Pertanian.....	3-470
1) Kondisi Umum	3-470
2) Permasalahan dan Solusi.....	3-478
a) Permasalahan	3-478
b) Solusi.....	3-479
3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	3-479
d. Urusan Kehutanan.....	3-486
1) Kondisi Umum	3-486
2) Permasalahan dan Solusi.....	3-489
a) Permasalahan	3-489
b) Solusi.....	3-489
3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	3-490
e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	3-493
1) Kondisi Umum	3-493
2) Permasalahan dan Solusi.....	3-495
a) Permasalahan	3-495
b) Solusi.....	3-496

3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	3-497
f. Urusan Perdagangan	3-502
1) Kondisi Umum	3-502
2) Permasalahan dan Solusi.....	3-503
a) Permasalahan	3-503
b) Solusi.....	3-504
3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	3-505
g. Urusan Perindustrian	3-507
1) Kondisi Umum	3-507
2) Permasalahan dan Solusi.....	3-509
a) Permasalahan	3-509
b) Solusi.....	3-509
3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	3-510
h. Urusan Ketrasmigrasian	3-520
1) Kondisi Umum	3-520
2) Permasalahan dan Solusi.....	3-522
a) Permasalahan	3-522
b) Solusi.....	3-522
3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	3-522
3. PENUNJANG URUSAN	3-523
a. Perencanaan Pembangunan	3-523
1) Kondisi Umum	3-523
2) Permasalahan dan Solusi.....	3-524
a) Permasalahan	3-524
b) Solusi.....	3-524
3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	3-524
b. Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan.....	3-534
1) Kondisi Umum	3-534
2) Permasalahan dan Solusi.....	3-542

a)	Permasalahan	3-542
b)	Solusi.....	3-542
3)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023	3-543
c.	Administrasi Keuangan Daerah	3-548
1)	Kondisi Umum	3-548
2)	Permasalahan dan Solusi.....	3-551
a)	Permasalahan	3-551
b)	Solusi.....	3-551
3)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023	3-551
d.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	3-567
1)	Kepegawaian	3-567
a)	Kondisi Umum.....	3-567
b)	Permasalahan dan Solusi	3-572
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-573
2)	Pendidikan dan Pelatihan	3-581
a)	Kondisi Umum.....	3-581
b)	Permasalahan dan Solusi	3-584
c)	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	3-584
e.	Sekretariat Daerah	3-592
1)	Tata Pemerintahan	3-592
a)	Kondisi Umum.....	3-592
b)	Permasalahan dan Solusi	3-602
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-604
2)	Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum	3-614
a)	Kondisi Umum.....	3-614
b)	Permasalahan dan Solusi	3-626
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-628
3)	Fasilitasi Perekonomian dan SDA.....	3-633
a)	Kondisi Umum.....	3-633
b)	Permasalahan dan Solusi	3-640
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-641

4)	Fasilitasi Kesra.....	3-645
a)	Kondisi Umum.....	3-645
b)	Permasalahan dan Solusi	3-648
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023	3-649
5)	Kelembagaan dan Tata Laksana.....	3-663
a)	Kondisi Umum.....	3-663
b)	Permasalahan dan Solusi	3-665
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-668
6)	Fasilitasi Administrasi Pembangunan	3-673
a)	Kondisi Umum.....	3-673
b)	Permasalahan dan Solusi	3-675
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-675
7)	Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol	3-681
a)	Kondisi Umum.....	3-681
b)	Permasalahan dan Solusi	3-683
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-683
8)	Fasilitasi Pemerintahan.....	3-687
a)	Kondisi Umum.....	3-687
b)	Permasalahan dan Solusi	3-689
c)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	3-689
f.	Pengawasan.....	3-694
1)	Kondisi Umum	3-694
2)	Permasalahan dan Solusi.....	3-702
a)	Permasalahan	3-702
b)	Solusi.....	3-703
3)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023	3-703
g.	Penelitian dan Pengembangan.....	3-709
1)	Kondisi Umum	3-709
2)	Permasalahan dan Solusi.....	3-711

a) Permasalahan	3-711
b) Solusi.....	3-712
3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	3-712
h. Sekretaris Dewan	3-714
1) Kondisi Umum	3-714
2) Permasalahan dan Solusi.....	3-716
a) Permasalahan	3-716
b) Solusi.....	3-717
3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	3-717
F. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	3-726
G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2023	3-734
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	4-1
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA	4-1
B. DASAR HUKUM	4-2
C. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	4-3
D. OPD YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN	4-4
1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4-4
a. Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049087/Tanaman Pangan)	4-4
b. Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049088/Hortikultura).....	4-5
c. Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049089/Perkebunan)	4-6
d. Satker Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049090/ Pternakan dan Kesehatan Hewan)	4-6
e. Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049094/Sarana dan Sarana Pertanian)	4-7

f.	Permasalahan dan Solusi	4-7
1)	Permasalahan	4-7
2)	Solusi	4-8
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta	4-9
a.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY	4-9
b.	Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUP-ESDM DIY	4-10
1)	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, meliputi:.....	4-10
2)	Bidang Bina Marga, meliputi:	4-11
c.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY	4-12
1)	Pengelolaan Sumber Daya Air	4-12
2)	Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan	4-15
d.	Permasalahan dan Kendala	4-20
e.	Saran dan Tindak Lanjut	4-21
3.	Dinas Koperasi dan UKM DIY (Satker 049102)	4-21
a.	Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Satker 049102	4-22
b.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Satker 049102	4-22
1)	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/ Mesin Factory Sharing Pengolahan Susu di Yogyakarta	4-22
2)	Pembangunan Gedung Factory Sharing Pengolahan Komoditas Susu DIY	4-22
3)	Pengadaan Mesin Factory Sharing Pengolahan Komoditas Susu DIY	4-23
c.	Permasalahan dan Kendala	4-24
d.	Saran dan Tindak Lanjut	4-24

4.	Dinas Pariwisata	4-24
a.	Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Satker 640004	4-24
b.	Permasalahan dan Solusi	4-26
	1) Permasalahan	4-26
	2) Solusi	4-26
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4-26
a.	Permasalahan dan Solusi	4-27
	1) Permasalahan	4-27
	2) Solusi	4-27

BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY.....5-1

A.	URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	5-2
B.	URUSAN KELEMBAGAAN	5-3
1.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023	5-3
2.	Permasalahan dan Solusi	5-22
a.	Permasalahan	5-22
b.	Solusi	5-22
C.	URUSAN KEBUDAYAAN	5-23
1.	Kondisi Umum	5-23
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023	5-24
a.	BKK Papan Penanda Keistimewaan	5-48
b.	BKK Balai Dusun	5-48
c.	BKK Pengelolaan Sampah	5-49
d.	BKK Demplot Jogja Hijau	5-49
e.	BKK Kampung Berkah	5-50
f.	BKK Padat Karya Jogja Istimewa	5-50
g.	BKK Balai Budaya	5-51
h.	BKK Desa Mandiri Budaya	5-51

i.	BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (Kesejarahan)	5-52
j.	BKK WBTB.....	5-52
k.	BKK Desa Bahari atau Desa Maritim	5-52
l.	BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Budaya)	5-53
m.	BKK Desa Mandiri Pangan	5-53
n.	BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Prima).....	5-54
o.	BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Preneur)	5-54
p.	BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata)	5-55
q.	BKK Omah Jagawarga	5-55
r.	BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH).....	5-55
3.	Permasalahan dan Solusi	5-56
a.	Permasalahan.....	5-56
b.	Solusi	5-57
D.	URUSAN PERTANAHAN.....	5-57
1.	Kondisi Umum.....	5-57
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	5-58
a.	BKK Pertanahan.....	5-64
3.	Permasalahan dan Solusi	5-65
a.	Permasalahan.....	5-65
b.	Solusi	5-66
E.	URUSAN TATA RUANG.....	5-66
1.	Kondisi Umum.....	5-66
2.	Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	5-67
a.	Aksesibilitas	5-73
b.	Pelayanan Publik	5-73
c.	Pelayanan Dasar	5-74
d.	Prioritas Nasional	5-74
e.	BKK Kawasan Terpadu	5-74
3.	Permasalahan dan Solusi	5-75
a.	Permasalahan.....	5-75
b.	Solusi	5-75

BAB VI PROGRAM STRATEGIS DIY6-1

A.	JOGJA SMART PROVINCE	6-1
1.	Latar Belakang.....	6-1
2.	Progres sampai dengan Akhir Tahun 2023.....	6-2
3.	Permasalahan dan Solusi	6-6
a.	Permasalahan.....	6-6
b.	Solusi	6-7
B.	REFORMASI BIROKRASI.....	6-7
1.	Latar Belakang.....	6-7
2.	Progres sampai dengan Akhir Tahun 2023.....	6-8
3.	Permasalahan dan Solusi	6-16
C.	PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA	6-17
1.	Latar Belakang.....	6-17
2.	Progres sampai dengan Akhir Tahun 2023.....	6-18
a.	Tahap Jangka Pendek	6-19
b.	Tahap Jangka Menengah	6-20
c.	Tahap Jangka Panjang.....	6-20
3.	Permasalahan dan Solusi	6-21
a.	Permasalahan.....	6-21
b.	Solusi	6-21
D.	JOGJA AGRO PARK	6-21
1.	Latar Belakang.....	6-21
2.	Progres Sampai dengan Tahun 2023.....	6-22
3.	Permasalahan dan Solusi	6-22
a.	Permasalahan.....	6-22
b.	Solusi	6-23
E.	BANDARA YIA (YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT/YIA)	6-23
1.	Latar Belakang.....	6-23
2.	Kondisi Eksisting 2023.....	6-24
a.	Kondisi Lalu Lintas Angkutan Udara	6-25

b.	Isu Strategis: Aksesibilitas dari dan ke Bandar Udara Internasional Yogyakarta	6-27
1)	Aerotropolis.....	6-29
2)	Akses Jalan.....	6-30
3)	Progres Tol	6-31
c.	Layanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Menuju Bandara.....	6-32
d.	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	6-33
e.	VVIP Room.....	6-34
f.	SPAM Regional Kamijoro	6-34
3.	Permasalahan dan Solusi	6-35
a.	Permasalahan.....	6-35
b.	Solusi	6-35
F.	PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI	6-36
1.	Latar Belakang.....	6-36
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2023	6-38
a.	Penataan dan Pengendalian Lalu Lintas di Kawasan Semi Pedestrian Malioboro.....	6-38
b.	Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas	6-39
c.	Pengaturan Moda Transportasi Tradisional.....	6-40
d.	Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir.....	6-41
e.	Perwujudan Kawasan <i>Low Emission Zone</i>	6-41
f.	Peningkatan pelayanan Angkutan Umum menuju kawasan sumbu filosofi	6-42
g.	Perencanaan Jogja Planning Gallery	6-42
h.	Pengelolaan Toilet Titik Nol	6-43
i.	Pengadaan Tanah Akses Penghubung Tempat Parkiran Beskalan-Teras Malioboro 1	6-44
3.	Permasalahan dan Solusi	6-44
a.	Permasalahan.....	6-44
b.	Solusi	6-44

G.	PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN	6-45
1.	Latar Belakang.....	6-45
2.	Progres Sampai dengan Tahun 2023	6-47
a.	Pembebasan Lahan untuk Oprit (Jalan Pendekat) Jembatan Pandansimo	6-48
b.	Pembangunan Jembatan Pandansimo	6-48
c.	Pembangunan Ruas Jalan Kretek-Girijati.....	6-48
3.	Permasalahan dan Solusi	6-50
a.	Permasalahan.....	6-50
b.	Solusi	6-50
H.	PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY	6-51
1.	Latar Belakang.....	6-51
2.	Progres sampai dengan Tahun 2023	6-51
a.	Pembangunan Taman Budaya DIY.....	6-51
b.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo (TBK)	6-52
c.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul (TBG).....	6-53
d.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Sleman (TBS)	6-54
e.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul (TBB).....	6-55
f.	Pembangunan Taman Budaya Kota Yogyakarta	6-56
3.	Permasalahan dan Solusi	6-57
a.	Permasalahan.....	6-57
b.	Solusi	6-57
I.	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT RSUD WATES DAN RSUD SAPTOSARI	6-58
1.	RSUD Wates	6-58
2.	RSUD Saptosari	6-59

J.	PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA REGIONAL PIYUNGAN	6-60
1.	Permasalahan dan Solusi	6-62
a.	Permasalahan.....	6-62
b.	Solusi	6-62
K.	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	6-63
1.	Latar Belakang.....	6-63
2.	Capaian Angka Kemiskinan pada tahun 2023.....	6-66
a.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di DIY, Maret 2016- Maret 2023.....	6-66
b.	Perkembangan Kemiskinan Menurut Wilayah, pada periode Maret 22 – Maret 23.....	6-67
3.	Progres Sampai Dengan Tahun 2023	6-69
a.	Ulasan kegiatan penanggulangan kemiskinan di DIY	6-69
b.	Penanganan Kemiskinan Ekstrem DIY	6-75
4.	Permasalahan dan Solusi	6-77
a.	Permasalahan.....	6-77
b.	Solusi	6-77
L.	REFORMASI KALURAHAN	6-78
1.	Latar Belakang.....	6-78
	Tujuan	6-84
2.	Progres sampai dengan Tahun 2023	6-87
3.	Permasalahan dan Solusi	6-96
a.	Permasalahan.....	6-96
b.	Solusi	6-96
M.	PEMBINAAN KAWASAN PERBATASAN	6-98
1.	Latar Belakang.....	6-98
2.	Progres Pelaksanaan	6-98
a.	Urusan Pendidikan	6-98
b.	Urusan Kesehatan	6-102

c. Urusan Pekerjaan Umum	6-103
d. Permasalahan.....	6-104
e. Solusi	6-105
N. LAPORAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	6-108
1. Latar Belakang.....	6-108
2. Progres	6-109
3. Permasalahan dan Solusi	6-110
BAB VII PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	7-1
A. KERJA SAMA ANTAR DAERAH	7-1
1. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Pusat	7-1
a. Sinergi Dengan Pemerintah Pusat	7-1
2. Kerja Sama Antar-Daerah	7-6
a. Daerah yang Melakukan Kerja Sama	7-6
b. Bidang Kerja sama	7-7
c. Mitra Praja Utama (MPU).....	7-8
d. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	7-12
3. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	7-13
a. Pihak Ketiga/Badan/Swasta yang telah bekerjasama	7-13
b. Bidang Kerja Sama.....	7-17
4. Permasalahan dan Solusi	7-18
a. Permasalahan.....	7-18
b. Solusi	7-18
B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.....	7-18
1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).....	7-18
2. Komite Intelijen Daerah (Kominda).....	7-22
3. Permasalahan dan Solusi	7-23
a. Forkopimda	7-23
1) Permasalahan	7-23
2) Solusi	7-23

b. Kominda	7-24
1) Permasalahan	7-24
2) Solusi	7-24
C. PEMBINAAN BATAS DAERAH	7-24
1. Gambaran Umum	7-24
2. Program dan Kegiatan Pembinaan Batas Wilayah	7-25
3. Permasalahan dan Solusi	7-26
a. Permasalahan	7-26
b. Solusi	7-27
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	7-28
1. Gambaran Umum	7-28
2. Potensi Bencana	7-32
a. Banjir	7-33
b. Epidemid dan Wabah Penyakit	7-33
c. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	7-33
d. Gempa Bumi	7-34
e. Tsunami	7-34
f. Kegagalan Teknologi	7-34
g. Kekeringan	7-34
h. Letusan Gunung Api	7-35
i. Cuaca ekstrim	7-35
j. Tanah Longsor	7-35
k. Kebakaran Gedung dan Permukiman	7-36
l. Konflik Sosial	7-36
3. Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2023	7-36
4. Permasalahan dan Solusi	7-38
a. Permasalahan	7-38
b. Solusi	7-38

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7-39
1. Gambaran Umum	7-39
2. Permasalahan dan Solusi	7-42
a. Permasalahan	7-42
b. Solusi	7-42
F. TUGAS – TUGAS UMUM PEMERINTAH LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH	7-43
1. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY)	7-43
a. Narasi Umum	7-43
b. Permasalahan dan Solusi pelayanan	7-46
1) Keuangan	7-46
2) Pendidikan	7-47
3) Properti	7-47
4) Ketenagakerjaan	7-48
5) Pertanahan	7-48
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	7-49
a. Narasi Umum	7-49
b. Permasalahan dan Solusi	7-50
3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY	7-51
a. Narasi Umum	7-51
b. Permasalahan dan Solusi	7-52
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)	7-54
a. Narasi Umum	7-54
b. Permasalahan dan Solusi	7-57
1) Permasalahan:	7-57
2) Solusi:	7-57
5. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu)	7-58
a. Narasi Umum	7-58
b. Permasalahan dan Solusi	7-60

1) Permasalahan:	7-60
2) Solusi:	7-61
6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)	7-61
a. Narasi Umum	7-61
b. Permasalahan dan Solusi	7-62
1) Permasalahan	7-62
2) Solusi	7-63
7. Palang Merah Indonesia (PMI).....	7-63
a. Narasi Umum	7-63
b. Permasalahan dan Solusi	7-64
1) Permasalahan	7-64
2) Solusi	7-64
8. Kinerja Tim Penggerak PKK	7-65
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY	7-66
a. Pemantauan Isi Siaran Televisi dan Radio	7-67
b. Fasilitas Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)	7-68
c. DIY Pasca <i>Analog Switch Off</i> (ASO).....	7-69
d. Permasalahan dan Solusi	7-70
1) Permasalahan	7-70
2) Solusi	7-71
10. Komisi informasi Daerah (KID)	7-71
a. Narasi Umum	7-71
b. Penyelesaian Sengketa Informasi	7-72
c. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik.....	7-73
d. Permasalahan dan Solusi	7-74
1) Permasalahan	7-74
2) Solusi	7-75

11. Trans Jogja.....	7-75
e. Permasalahan dan solusi.....	7-77
1) Permasalahan	7-77
2) Solusi	7-78
BAB VIII PENUTUP	8-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Tahapan Keempat.....	1-13
Tabel 1.2.	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023-2026	1-21
Tabel 1.3.	Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2023-2026	1-21
Tabel 1.4.	Strategi dan Arah Pembangunan Tahun 2023-2026	1-22
Tabel 1.5.	Program Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Indikator Kinerjanya	1-26
Tabel 1.6.	Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota	1-32
Tabel 1.7.	Luas Wilayah Berdasarkan Jumlah Curah Hujan	1-36
Tabel 1.8.	Luas DAS di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	1-37
Tabel 1.9.	Jumlah Penduduk DIY Semester II Tahun 2023 Menurut Wilayah Administrasi Pemerintahan	1-38
Tabel 1.10.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2023	1-40
Tabel 1.11.	Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2019- 2023	1-41
Tabel 1.12.	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2023.....	1-46
Tabel 1.13.	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di DIY Tahun 2023	1-47
Tabel 1.14.	Jumlah Pendidik di DIY Tahun 2023	1-47
Tabel 1.15.	Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan di DIY Tahun 2019-2023	1-51
Tabel 1.16.	Perkembangan Jumlah Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2019-2023.....	1-53

Tabel 1.17.	Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara yang masuk Bandara YIA menurut Kebangsaan Tahun 2022-2023	1-56
Tabel 1.18.	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan Tahun 2022-2023**	1-59
Tabel 1.19.	Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2022-2023*	1-61
Tabel 1.20.	Produksi Komoditas Perkebunan Unggulan DIY Tahun 2022-2023**	1-62
Tabel 1.21.	Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2022-2023*	1-64
Tabel 1.22.	Realisasi Kunjungan Wisata Oleh Koperasi Notowono Tahun 2021-2023	1-65
Tabel 1.23.	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%)	1-67
Tabel 1.24.	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	1-68
Tabel 1.25.	Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Pengeluaran Tahun 2022-2023	1-69
Tabel 1.26.	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (<i>Unaudited</i>)	1-77
Tabel 1.27.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (<i>Unaudited</i>)	1-78
Tabel 1.28.	Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 (<i>Unaudited</i>)	1-80
Tabel 1.29.	Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 (<i>Unaudited</i>)	1-80
Tabel 2.2.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-8
Tabel 2.3.	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-9
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-10

Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>).....	2-13
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah DIY Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-14
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer DIY Tahun Anggaran 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-17
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DIY Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-18
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil tahun anggaran 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-19
Tabel 2.10.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-21
Tabel 2.11.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY tahun anggaran 2023 (<i>Unaudited</i>).....	2-22
Tabel 2.12.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>).....	2-24
Tabel 2.13.	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY tahun anggaran 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-25
Tabel 2.14.	Anggaran dan Realisasi Belanja menurut OPD DIY tahun anggaran 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-31
Tabel 2.15.	Realisasi Belanja DIY Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>).....	2-33
Tabel 2.16.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi DIY Tahun Anggaran 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-34
Tabel 2.17.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIY Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-35
Tabel 2.18.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-38
Tabel 2.19.	Realisasi Belanja Hibah dalam Bentuk Uang Tahun Anggaran 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-41
Tabel 2.20.	Realisasi Belanja Hibah dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-42

Tabel 2.21.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-44
Tabel 2.22.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-44
Tabel 2.23.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-45
Tabel 2.24.	Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-49
Tabel 2.25.	Rincian Belanja Tak Terduga 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-54
Tabel 2.26.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2023 (<i>Audited</i>)	2-55
Tabel 2.27.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-56
Tabel 2.28.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa DIY Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-57
Tabel 2.29.	Realisasi Dividen PT Bank BPD DIY TA 2018-2023	2-62
Tabel 2.30.	Realisasi Pembagian Dividen kepada Pemda DIY oleh PT Anindya Mitra Internasional (AMI) TA 2018-2023	2-63
Tabel 2.31.	Realisasi PT Taru Martani TA 2018-2022	2-64
Tabel 2.32.	Realisasi Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) TA 2018-2023	2-66
Tabel 2.33.	Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	2-70
Tabel 2.34.	Daftar Obyek Tanah yang disertifikatkan	2-72
Tabel 2.35.	Hasil Penjualan dan Lelang BMD Tahun Anggaran 2023	2-83
Tabel 2.36.	Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa	2-91

Tabel 2.37.	Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....	2-95
Tabel 2.38.	Barang Milik Daerah yang Dioptimalkan Melalui Pinjam Pakai	2-97
Tabel 3.2.	Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-4
Tabel 3.3.	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemda DIY.....	3-4
Tabel 3.4.	Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	3-8
Tabel 3.5.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2023.....	3-10
Tabel 3.6.	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023	3-11
Tabel 3.7.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023	3-12
Tabel 3.8.	Target dan Capaian Indikator Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023	3-13
Tabel 3.9.	Target dan Capaian Indikator Sasaran Indeks Gini Tahun 2023	3-16
Tabel 3.10.	Distribusi Pengeluaran Penduduk DIY, Maret 2022 – Maret 2023 (%)	3-18
Tabel 3.11.	Target dan Realisasi IKLH DIY Tahun 2019 - 2023.....	3-20
Tabel 3.12.	Komponen Penyusunan IKLH	3-21
Tabel 3.13.	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023.....	3-23
Tabel 3.14.	IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2023	3-26
Tabel 3.15.	IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2023	3-27
Tabel 3.16.	Target dan Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kemiskinan Tahun 2023.....	3-28

Tabel 3.17.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2023 (%)	3-29
Tabel 3.18.	Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023.....	3-30
Tabel 3.19.	Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019-2022	3-30
Tabel 3.20.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK Tahun 2021-2023	3-32
Tabel 3.21.	Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2022-2023	3-34
Tabel 3.22.	Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2023	3-36
Tabel 3.23.	Target dan Realisasi Indikator Program Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2023	3-38
Tabel 3.24.	Perkembangan Jumlah Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2019-2023.....	3-41
Tabel 3.25.	Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara menurut Kebangsaan Tahun 2022-2023 Melalui Bandara YIA.....	3-43
Tabel 3.26.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2023	3-45
Tabel 3.27.	Target dan Realisasi Komponen Penyusun Penghitungan Kinerja Indikator Sasaran Perangkat Daerah pada Program Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2023.....	3-46
Tabel 3.28.	Target dan Realisasi Indikator Rasio Kewirausahaan Tahun 2023	3-50
Tabel 3.29.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar Tahun 2023	3-54

Tabel 3.30.	Target dan Realisasi Indikator Program Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) Tahun 2023.....	3-58
Tabel 3.31.	PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2023	3-59
Tabel 3.32.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pemda Capaian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa Tahun 2023	3-60
Tabel 3.33.	Perhitungan Capaian Indikator Program Pemda Urusan Pertanahan Tahun 2023	3-60
Tabel 3.34.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan Tahun 2023.....	3-66
Tabel 3.35.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pemda Indeks Risiko Bencana Tahun 2023	3-69
Tabel 3.36.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pemda Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2023.....	3-77
Tabel 3.37.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pemda Penurunan Emisi GRK Tahun 2023	3-81
Tabel 3.38.	Target dan Realisasi Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2023	3-83
Tabel 3.39.	Target dan Realisasi Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2023	3-85
Tabel 3.40.	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) di DIY pada Tahun 2019-2023.....	3-89
Tabel 3.41.	Target dan Realisasi Indikator Program <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) Tahun 2023.....	3-89
Tabel 3.42.	Target dan Realisasi Indikator Program Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2023 (Maret)	3-91

Tabel 3.43.	Target dan Realisasi Indikator Program Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, dan internasional) Tahun 2023	3-93
Tabel 3.44.	Budaya benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional Tahun 2007 - 2023	3-94
Tabel 3.45.	Budaya takbenda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional.....	3-95
Tabel 3.46.	Target dan Realisasi Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2023.....	3-96
Tabel 3.47.	IDG Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022	3-97
Tabel 3.48.	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2022	3-98
Tabel 3.49.	IDG Nasional dan DIY Tahun 2020-2022	3-100
Tabel 3.50.	Target dan Realisasi Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa Mandiri Tahun 2023	3-102
Tabel 3.51.	Target dan Realisasi Indikator Program Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2023.....	3-104
Tabel 3.52.	Capaian Nilai Kepatuhan Tahun 2022 dan 2023	3-104
Tabel 3.53.	Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.....	3-105
Tabel 3.54.	Target dan Realisasi Indikator Program Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	3-107
Tabel 3.55.	Target dan Realisasi Indikator Program Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perda/Kelembagaan Tahun 2023	3-109
Tabel 3.56.	Regulasi Keistimewaan DIY Urusan Kelembagaan	3-110
Tabel 3.57.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-119

Tabel 3.58.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2023	3-123
Tabel 3.59.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-139
Tabel 3.60.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2023	3-143
Tabel 3.61.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-148
Tabel 3.62.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023	3-155
Tabel 3.63.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-168
Tabel 3.64.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2023.....	3-171
Tabel 3.65.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-183
Tabel 3.66.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023 ...	3-185
Tabel 3.67.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-191
Tabel 3.68.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas Tahun 2023	3-196
Tabel 3.69.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-206
Tabel 3.70.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.....	3-210
Tabel 3.71.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-219

Tabel 3.72.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2023	3-223
Tabel 3.73.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-228
Tabel 3.74.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2023.....	3-232
Tabel 3.75.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-261
Tabel 3.76.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023.....	3-264
Tabel 3.77.	Indeks Perlindungan Anak DIY berdasarkan Dimensi Pembentuknya	3-274
Tabel 3.78.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022-2023.....	3-275
Tabel 3.79.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023	3-278
Tabel 3.80.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-287
Tabel 3.81.	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2023 dibandingkan Skor PPH Ideal.....	3-288
Tabel 3.82.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2023.....	3-292
Tabel 3.83.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2023-2026 serta Capaian 2023	3-296
Tabel 3.84.	Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2023.....	3-300
Tabel 3.85.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023 serta Capaian 2023	3-305
Tabel 3.86.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023	3-309

Tabel 3.87.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-318
Tabel 3.88.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	3-320
Tabel 3.89.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023	3-325
Tabel 3.90.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023	3-328
Tabel 3.91.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-333
Tabel 3.92.	Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2020 – 2023.....	3-333
Tabel 3.93.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023	3-336
Tabel 3.94.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2023-2026 serta Capaian 2023	3-340
Tabel 3.95.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2023	3-350
Tabel 3.96.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-364
Tabel 3.97.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	3-366
Tabel 3.98.	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2019-2023	3-371
Tabel 3.99.	Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2019-2023	3-372
Tabel 3.100.	Jumlah UMKM menurut Sektor Usaha Tahun 2019 - 2023....	3-374

Tabel 3.101.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-375
Tabel 3.102.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023	3-379
Tabel 3.103.	Perkembangan Investasi di DIY 2019 – 2023.....	3-389
Tabel 3.104.	Perkembangan Investasi (PMA + PMDN) Kabupaten/Kota di DIY 2019 - 2023 (dalam rupiah)	3-391
Tabel 3.105.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-392
Tabel 3.106.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023	3-395
Tabel 3.107.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-398
Tabel 3.108.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023	3-400
Tabel 3.109.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-405
Tabel 3.110.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2023	3-408
Tabel 3.111.	Nilai <i>Assessment</i> Keamanan Informasi dan Persandian oleh BSSN tahun 2018-2023.....	3-413
Tabel 3.112.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Tahun 2023	3-419
Tabel 3.113.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-421
Tabel 3.114.	Jumlah Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum Tahun 2023.....	3-422
Tabel 3.115.	Penyelenggaraan <i>Event</i> Budaya tahun 2023	3-423
Tabel 3.116.	Peningkatan Kinerja Pengembangan Seni Budaya DIY tahun 2023	3-424

Tabel 3.117.	Jumlah Desa Mandiri Budaya sampai dengan tahun 2023	3-425
Tabel 3.118.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2023	3-427
Tabel 3.119.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-437
Tabel 3.120.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2023	3-441
Tabel 3.121.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2022- 2023 Capaian 2023.....	3-444
Tabel 3.122.	Jumlah Pemanfaatan Arsip Tahun 2023	3-445
Tabel 3.123.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2023	3-447
Tabel 3.124.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022-2023 Capaian 2023.....	3-449
Tabel 3.125.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.....	3-451
Tabel 3.126.	Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2022-2023	3-459
Tabel 3.127.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2022-2023	3-460
Tabel 3.128.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2023	3-462
Tabel 3.129.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2022- 2023 serta Capaian 2023.....	3-471
Tabel 3.130.	Capaian Produksi Sub Sektor Tahun 2022 dan 2023**	3-471
Tabel 3.131.	Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2022-2023	3-471
Tabel 3.132.	Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2022-2023	3-473
Tabel 3.133.	Populasi Ternak di DIY Tahun 2022-2023	3-475
Tabel 3.134.	Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2022-2023**	3-477

Tabel 3.135.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2023	3-480
Tabel 3.136.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2023 serta Capaian 2023.....	3-486
Tabel 3.137.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2023	3-490
Tabel 3.138.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-494
Tabel 3.139.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023	3-497
Tabel 3.140.	Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2019-2023 (dalam US\$ Juta)	3-502
Tabel 3.141.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-503
Tabel 3.142.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2023	3-505
Tabel 3.143.	Perkembangan PDRB Industri Pengolahan 2019-2023	3-508
Tabel 3.144.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-509
Tabel 3.145.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2023	3-510
Tabel 3.146.	Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023	3-520
Tabel 3.147.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-521
Tabel 3.148.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun 2023	3-523
Tabel 3.149.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-524

Tabel 3.150.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2023	3-525
Tabel 3.151.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-536
Tabel 3.152.	Realisasi Fisik Lembaga Pengampu Keistimewaan Tahun 2023	3-537
Tabel 3.153.	Pengukuran Indikator “Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik”	3-542
Tabel 3.154.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2023	3-543
Tabel 3.155.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-549
Tabel 3.156.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2023	3-552
Tabel 3.157.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Kepegawaian Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-571
Tabel 3.158.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2023.....	3-574
Tabel 3.159.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-583
Tabel 3.160.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023.....	3-585
Tabel 3.161.	Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY Tahun 2023	3-598
Tabel 3.162.	Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	3-599

Tabel 3.163.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-600
Tabel 3.164.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2023	3-605
Tabel 3.165.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-615
Tabel 3.166.	Kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah oleh Pemda DIY pada Tahun 2023	3-616
Tabel 3.167.	Rekapitulasi Jumlah Penanganan Perkara TA 2023	3-619
Tabel 3.168.	Rekapitulasi Penilaian Capaian Aksi RANHAM TA 2023	3-625
Tabel 3.169.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2023	3-628
Tabel 3.170.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA Tahun 2023	3-635
Tabel 3.171.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA Tahun 2023	3-641
Tabel 3.172.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Kesra Tahun 2023	3-648
Tabel 3.173.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Kesra Tahun 2023	3-649
Tabel 3.174.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Kesra Tahun 2023	3-655
Tabel 3.175.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2023-2027 serta Capaian 2023.....	3-665

Tabel 3.176.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2023.....	3-668
Tabel 3.177.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Administrasi Pembangunan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-673
Tabel 3.178.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Administrasi Pembangunan Tahun 2023.....	3-677
Tabel 3.179.	Rata-rata Hasil Survey Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan, Keprotokolan dan Kehumasan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY tahun 2023	3-681
Tabel 3.180.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2023 serta Capaian 2023.....	3-682
Tabel 3.181.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2023	3-684
Tabel 3.182.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Pemerintahan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023.....	3-688
Tabel 3.183.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Pemerintahan Tahun 2023	3-690
Tabel 3.184.	Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Tahun 2023 sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Pemda DIY	3-696
Tabel 3.185.	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Itjen kemendagri Tahun 2023 sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Pemda DIY	3-698
Tabel 3.186.	Risalah Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY	3-699
Tabel 3.187.	Pengukuran Capaian Sasaran	3-700

Tabel 3.188.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2022 serta Capaian 2023	3-700
Tabel 3.189.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2023	3-703
Tabel 3.190.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-710
Tabel 3.191.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023	3-713
Tabel 3.192.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023	3-715
Tabel 3.193.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2023	3-718
Tabel 4.1.	Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023	4-4
Tabel 4.2.	Pagu Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2023	4-10
Tabel 4.3.	Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2023.....	4-14
Tabel 4.4.	Lokasi Kegiatan Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan di DIY Tahun 2023	4-15
Tabel 4.5.	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2023	4-15
Tabel 4.6.	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kondisi di DIY Tahun 2023	4-15
Tabel 4.7.	Lokasi Kegiatan Penanganan Penunjang/Holding di DIY Tahun 2023.....	4-16
Tabel 4.8.	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2023.....	4-16

Tabel 4.9.	Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Penyelenggaraan Jalan Bina Marga Tahun 2023.....	4-17
Tabel 4.10.	Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2023.....	4-18
Tabel 4.11.	Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2023.....	4-19
Tabel 4.12.	Target dan Realisasi Tugas Pembantuan Satker 049102	4-23
Tabel 4.13.	Target dan Realisasi Tugas Pembantuan Satker Dinas Pariwisata DIY (640004)	4-25
Tabel 4.14.	Target dan Realisasi Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4-27
Tabel 5.15.	Alokasi dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023 Menurut Urusan.....	5-2
Tabel 5.1.	Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Kelembagaan TA 2023	5-4
Tabel 5.16.	Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Kebudayaan TA 2023.....	5-24
Tabel 5.17.	Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2023.....	5-58
Tabel 5.18.	Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Tata Ruang TA 2023.....	5-68
Tabel 6.1.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi Tahun 2023	6-8
Tabel 6.2.	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pada Tahun 2021-2022	6-11
Tabel 6.3.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi Tahun 2022	6-12
Tabel 6.4.	Skema dan Bobot Nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah	6-13
Tabel 6.5.	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	6-14
Tabel 6.6.	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	6-14

Tabel 6.7.	Usulan Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM Tahun 2023	6-15
Tabel 6.8.	Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM	6-16
Tabel 6.9.	Data Perbandingan Lalu Lintas Penerbangan Bandara YIA Tahun 2021-2022	6-32
Tabel 6.10.	Progres PembebasanLahan JJLS pada Sepanjang Wilayah Selatan DIY	6-49
Tabel 6.11.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, 2022 – Maret 2023	6-68
Tabel 6.12.	Rincian Realisasi Program/Kegiatan Yang Dilakukan OPD DIY Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023	6-71
Tabel 6.13.	Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di DIY Tahun 2023	6-74
Tabel 6.14.	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023	6-75
Tabel 6.15.	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DIY dalam upaya percepatan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023.....	6-76
Tabel 6.16.	Sasaran Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	6-80
Tabel 6.17.	Kegiatan Utama Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	6-82
Tabel 6.18.	Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	6-85
Tabel 6.19.	Jumlah Penerima Beasiswa Kartu Cerdas SMA dan SMK di Wilayah Perbatasan.....	6-99
Tabel 6.20.	Jumlah Siswa Domisili Wilayah Perbatasan Jawa Tengah yang Diterima	6-100
Tabel 6.21.	Data Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan	6-101
Tabel 6.22.	Daftar Fasyankes di Wilayah Perbatasan	6-102

Tabel 6.23.	Penanganan Ruas Jalan di Wilayah Perbatasan pada tahun 2023	6-103
Tabel 6.24.	Kondisi Jalan Eksisting di Wilayah Perbatasan DIY tahun 2023	6-104
Tabel 7.1.	Sinergi Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Pusat Tahun 2023	7-1
Tabel 7.3.	Kerja sama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2023	7-6
Tabel 7.4.	Rincian Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama	7-13
Tabel 7.5.	Progres Pembahasan dan Penelaahan Segmen Batas Wilayah DIY dan Jateng	7-25
Tabel 7.6.	Tabel Penerimaan Aduan dan Konsultasi di LO DIY.	7-45
Tabel 7.7.	Perbandingan Data Lembaga Penyiaran yang Menerima Teguran Tahun 2021 s/d 2023	7-67
Tabel 7.8.	Perizinan Lembaga Penyiaran Komunitas di DIY	7-68
Tabel 7.9.	Televisi Digital Yang Muncul di Alat Pemantauan KPID DIY	7-69
Tabel 7.10.	Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2023	7-72
Tabel 7.11.	Klasifikasi Berdasarkan <i>Cluster</i> Badan Publik DIY	7-74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY	1-32
Gambar 1.2.	Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/km ²) Tahun 2022 dan 2023	1-39
Gambar 1.3.	Struktur Ketenagakerjaan DIY	1-41
Gambar 1.4.	Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2019 -2023	1-44
Gambar 1.5.	TPT Nasional dan DIY Tahun 2019 -2023.....	1-45
Gambar 1.6.	Capaian APK dan APM DIY Tahun 2023.....	1-48
Gambar 1.7.	Pencapaian Rapor Pendidikan DIY Tahun 2023.....	1-50
Gambar 1.8.	Persentase Moda Transportasi yang Digunakan Wisatawan Nusantara ke DIY Tahun 2022.....	1-54
Gambar 1.9.	Jumlah Wisatawan Nusantara di DIY per Triwulan Tahun 2023	1-55
Gambar 1.10.	Jumlah wisatawan mancanegara di DIY per triwulan Tahun 2023	1-56
Gambar 1.11.	Data wisatawan di DIY yang menginap di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2023	1-57
Gambar 1.12.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019- 2023 (%)	1-67
Gambar 1.13.	Jumlah ASN Pemda DIY Tahun 2023	1-74
Gambar 1.14.	Jumlah PNS Pemda DIY Tahun 2019-2023	1-74
Gambar 1.15.	Jumlah PNS Pemda DIY berdasarkan Jenis Kelamin	1-75
Gambar 1.16.	Jumlah PNS Pemda DIY berdasarkan Golongan	1-75
Gambar 1.17.	Jumlah PNS Pemda DIY berdasarkan Pendidikan.....	1-76
Gambar 3.1.	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IGI) Tahun 2019- 2023	3-2

Gambar 3.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019-2023 (%)	3-11
Gambar 3.3. Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2019 - 2023	3-14
Gambar 3.4. Perkembangan Indeks Gini Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan Maret 2019 – Maret 2023	3-15
Gambar 3.5. Indeks Williamson DIY Tahun 2019-2023	3-19
Gambar 3.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2019-2023	3-23
Gambar 3.7. Perkembangan UHH DIY Tahun 2019-2023	3-24
Gambar 3.8. Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2019-2023	3-24
Gambar 3.9. Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan DIY (Ribu Rupiah) 2019–2023	3-25
Gambar 3.10. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2019-2023 per Maret (dalam persen)	3-28
Gambar 3.11. Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2023	3-34
Gambar 3.12. Rata-rata Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan dan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB DIY tahun 2019 - 2023	3-38
Gambar 3.13. Kontribusi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) terhadap PDRB DIY Tahun 2019-2023	3-39
Gambar 3.14. Persentase Moda Transportasi yang Digunakan Wisatawan Nusantara ke DIY Tahun 2022	3-41
Gambar 3.15. Jumlah wisatawan nusantara di DIY per triwulan Tahun 2023	3-42
Gambar 3.16. Jumlah Wisatawan Mancanegara di DIY per Triwulan Tahun 2023	3-43
Gambar 3.17. Data Wisatawan di DIY yang Menginap di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2023	3-44

Gambar 3.18. Perkembangan WUB Tahun 2018-2023	3-51
Gambar 3.19. Grafik Perwujudan Pola Ruang DIY Tahun 2018-2023	3-78
Gambar 3.20. Capaian Angka HLS Kabupaten/Kota dan DIY Tahun 2023 (Tahun)	3-83
Gambar 3.21. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023	3-84
Gambar 3.22. Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2019-2023 (Tahun)	3-86
Gambar 3.23. Jumlah Penduduk Miskin Maret 2019 s.d. Maret 2023 (Ribu Orang)	3-91
Gambar 3.24. Tren Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di DIY tahun 2018-2022.....	3-97
Gambar 3.25. Nilai SKM Pemda DIY Tahun 2018-2023.....	3-106
Gambar 3.26. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY Tahun 2018-2022	3-273
Gambar 3.27. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY Tahun 2018-2022	3-274
Gambar 3.28. Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi DIY Tahun 2019 – 2023 (Rp000)	3-390
Gambar 3.29. Realisasi Investasi Tahun 2023 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp).....	3-392
Gambar 3.30. Penilaian Indeks KAMI Tahun 2023	3-415
Gambar 3.31. Maturitas Keamanan Siber Tahun 2023	3-416
Gambar 3.32. Produksi Perikanan di DIY Tahun 2020-2023 (ton).....	3-449
Gambar 3.33. Sri Paduka Paku Alam X Menerima Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kemendagri, 29 April 2023 di Makassar, Sulsel	3-593
Gambar 3.34. Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Walikota Yogyakarta pada 22 Mei 2023	3-597
Gambar 3.35. Perkembangan Penyaluran KUR di DIY Tahun 2019-2023.....	3-637

Gambar 4.1.	Operasi Jaringan Irigasi	4-12
Gambar 4.2.	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	4-12
Gambar 4.3.	Perbaikan Jaringan Irigasi	4-13
Gambar 4.4.	Pemeliharaan Berkala DI Van Der Wijk	4-13
Gambar 4.5.	Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Yogyakarta – Bts Kota Bantul	4-19
Gambar 4.6.	Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Bolong	4-20
Gambar 4.7.	Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Arteri Selatan (Yogyakarta).....	4-20
Gambar 5.2.	TPS Amrih Lestari 2 Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari	5-50
Gambar 5.3.	Padat Karya Jogja Istimewa Kalurahan Kebonharjo	5-51
Gambar 5.4.	Lumbung Mataraman Kalurahan Kebonharjo	5-54
Gambar 5.5.	RTLH Kabupaten Bantul (Kiri), dan RTLH Kabupaten Gunungkidul (Kanan).....	5-56
Gambar 5.6.	BKK Tata Kelola Pertanahan di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo (kiri) dan di Kalurahan Pondokrejo, Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman (Kanan)	5-65
Gambar 5.7.	Pembangunan Jalan Cor Sanggar Among Lare.....	5-75
Gambar 5.8.	Pelatihan Peternak Sapi sebagai Operator Peternak Sapi	5-75
Gambar 6.1.	Dashboard pencapaian Jogja <i>Smart Province</i> fase 1 tahun 2019-2023	6-4
Gambar 6.2.	Penandatanganan Dukungan terhadap <i>Jogja Smart Province</i> dari Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY.....	6-4
Gambar 6.3.	Breakwater Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta	6-18
Gambar 6.9.	Grafik Pergerakan Lalu Lintas Udara di Bandara Internasional Yogyakarta	6-26

Gambar 6.10. Rencana Trase Jalan Tol Pada Kawasan Sekitar Bandara YIA	6-31
Gambar 6.11. Sertifikat Penetapan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta	6-37
Gambar 6.12. Peta JJLS di Pulau Jawa	6-46
Gambar 6.14. Pameran Lukis Art For Children dan Art For Milenial	6-53
Gambar 6.15. Pentas Seni Sepanjang Tahun: Gedruk Sanggar Mahasura, Kapanewon Patuk	6-54
Gambar 6.16. Kondisi Lahan Taman Budaya Sleman Tahun 2023	6-55
Gambar 6.17. <i>Entrance</i> Taman Budaya Embung Giwangan	6-57
Gambar 6.18. Kondisi Zona Pasif TPA pada akhir tahun 2023	6-61
Gambar 6.19. zona transisi I dan II	6-61
Gambar 6.20. Pengumpulan dan Pembakaran Gas Metan	6-63
Gambar 6.21. Instalasi Pengolahan Lindi	6-63
Gambar 6.22. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2016 sampai dengan Maret 2023	6-66
Gambar 6.23. Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan	6-97
Gambar 7.1. Data Kejadian Bencana di DIY tahun 2023	7-37
Gambar 7.2. Salah satu atlet angkat besi DIY dalam Babak Kualifikasi PON 2023	7-51
Gambar 7.3. Peresmian Kampung Pramuka di Girisekar, Panggang, Gunungkidul	7-54
Gambar 7.4. Persentase Peringkat Tiap Klaster Monev Badan Publik Tahun 2023	7-74
Gambar 7.5. Jumlah Penumpang Trans Jogja Berdasarkan Rute/ Trayek	7-76
Gambar 7.6. Jumlah Penumpang Trans Jogja 5 Tahun Terakhir	7-77





BAB I

Pendahuluan

LKPJ
Gubernur DIY

Tahun

2023

A. DASAR HUKUM

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.ⁱ Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah panjang sejak awal berdiri dalam bentuk Kasultanan dan Kadipaten pada masa pra-kemerdekaan hingga bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sikap seluruh rakyat Yogyakarta yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dinyatakan dalam Amanat 5 September 1945 dari Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Amanat tersebut menjadi kontribusi penting Yogyakarta untuk Indonesia yang baru saja merdeka dari kolonialisme. Kontribusi tersebut diakui dalam sejarah kemerdekaan Indonesia hingga ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi ini memiliki status istimewa atau otonomi khusus yang merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Landasan fundamental Keistimewaan DIY dapat dilihat dalam kontrak politik antara Nagari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman dengan Pemimpin Besar Revolusi Soekarno. Subtansi Istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tiga hal aspek yaitu aspek sejarah pembentukan Pemerintahan Daerah Istimewa, aspek bentuk Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dan aspek Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan UUD 1945, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 diakui hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan NKRI. Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY telah menguatkan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY tersebut.

Dalam rangka mewujudkan tujuan konstitusi dalam kerangka NKRI, Pemerintah Daerah (Pemda DIY) melaksanakan 2 kewenangan yaitu kewenangan keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Urusan keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Gubernur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja sesuai kewenangan yang telah diatur peraturan perundang-undangan dimaksud. Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ Tahun 2023 selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 34);

31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 30).

B. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG

1. Visi Jangka Panjang

Visi jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dicapai selama kurun waktu 20 tahun yaitu: “Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Visi pembangunan jangka panjang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.

Pada bidang pendidikan, visi untuk menjadi pusat pendidikan terkemuka menunjukkan keinginan agar DIY pada tahun 2025 dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia yang dilandasi dengan pengamalan agama yang didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. di samping itu, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya memiliki lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu.

Sebagai pusat budaya terkemuka, DIY diharapkan menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya.

Budaya DIY merupakan salah satu unsur keistimewaan DIY yang diakui dan menjadi wewenang tambahan yang diberikan kepada DIY melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIY.

Selanjutnya, sebagai daerah tujuan wisata terkemuka, DIY diharapkan menjadi daerah tujuan wisata yang diminati baik oleh wisatawan nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung nilai-nilai moralitas.

Masyarakat yang maju dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat yang makmur secara ekonomi, mempunyai tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi melalui sistem pendidikan yang tinggi, memiliki derajat kesehatan tinggi yang ditopang dengan angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang baik, memiliki sistem kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya dan keamanan ketenteramannya, serta kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap, dan memadai.

Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Tingkat kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

Masyarakat yang sejahtera dimaknai bahwa masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual secara layak dan adil sesuai perannya dalam kehidupan.

Tahun 2023 merupakan tahapan lima tahun ke-empat (2020-2025) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan lima tahun ke-empat (2020-2025) adalah untuk “penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.”

2. Misi Jangka Panjang

Upaya mencapai visi jangka panjang tersebut dilakukan dengan mengarusutamakan pendekatan pembangunan yang memiliki fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup warga DIY (*people-centered development*) melalui pembangunan di semua sektor secara sinergis, dan bertahap. Untuk mewujudkan visi tersebut maka diupayakan melalui empat misi pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
- 2) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
- 3) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- 4) Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

C. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Pada umumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada Visi dan Misi kepala daerah. Namun, perumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini tidak bisa mendasarkan kepada visi dan misi kepala daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah. Selanjutnya, agar tercipta kesinambungan dan keselarasan pembangunan daerah, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2026 ini mengacu kepada:

- 1) Visi Misi RPJPD DIY Tahun 2005-2025;
- 2) Analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap Keempat; dan
- 3) Isu strategis aktual.

Visi DIY sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 adalah: “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.” Untuk mewujudkan Visi tersebut, terdapat empat misi yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Mewujudkan Pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya Pendidikan yang handal.
- 2) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
- 3) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
- 4) Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci dari visi jangka panjang tersebut adalah pendidikan, budaya, pariwisata, pembangunan sosiokultural dan sosio-ekonomi. Selanjutnya Visi Misi tersebut diturunkan ke dalam sasaran pembangunan yang prioritasnya terbagi dalam tahapan lima tahunan.

Kemudian untuk dapat menggambarkan ketercapaian visi dan misi jangka panjang tersebut ditetapkan sasaran pokok pembangunan RPJPD DIY Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya DIY sebagai pusat Pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:
 - a. Terwujudnya Lembaga Pendidikan yang berstandar nasional dan internasional, serta pusat-pusat keunggulan ilmiah
 - b. Tersedianya sumber daya Pendidikan yang handal
 - c. Terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap Pendidikan

- d. Mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY
 - e. Lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia
 - f. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berbudaya
 - g. Meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah tinggi
- 2) Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:
- a. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat budaya yang didukung oleh pilar-pilar berupa pusat-pusat pengembangan budaya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berkembangnya konsep budaya, hasil budaya dan nilai-nilai budaya daerah secara berkesinambungan
 - c. DIY sebagai Pusat Gerakan Kebudayaan Nasional menuju terciptanya perilaku masyarakat DIY yang berbudaya luhur
 - d. Masyarakat mampu memilah, memilih dan memanfaatkan budaya modern yang positif
 - e. Melestarikan dan mengembalikan fungsi Kawasan Budaya dan benda Cagar Budaya
 - f. Mengembangkan budaya Yogyakarta untuk mendukung pariwisata
 - g. Masuknya DIY dalam *culture itinerary/culture map* tingkat Asia Tenggara
- 3) Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:
- a. Munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata
 - b. Tersedianya fasilitas pendukung Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang handal
 - c. Meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah dan TAU oleh pelaku wisata
 - d. Meningkatnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara

- e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi ODTW.
- 4) Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:
 - a. Terselenggaranya pemerintahan yang profesional, demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum
 - b. Terciptanya kelembagaan sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang mantap
 - c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya, dan dijamin hak-haknya oleh pemerintah.
 - d. Terpenuhinya infrastruktur dan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat yang memadai
 - e. Yogyakarta sebagai pusat keunggulan industri kreatif di Asia Tenggara
 - f. Terpenuhinya peningkatan keamanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama
 - g. Terpenuhinya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, anak dan remaja
 - h. Meningkatnya proporsi masyarakat yang makmur secara ekonomi
 - i. Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajat sosial dan kesehatan yang tinggi

Untuk mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang tersebut telah ditetapkan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan. Dokumen RPD 2023-2026 berada pada periode tahapan Ke-empat dari RPJPD DIY 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka Panjang tahap ke-empat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 ini. Penekanan pembangunan pada lima tahun ke-empat adalah “penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi”. Lebih lanjut, detail dari tahapan tersebut dapat disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Tahapan Keempat

Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
Terwujudnya DIY sebagai pusat Pendidikan terkemuka di Asia Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (<i>center of excellence</i>) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara, dengan prioritas pada pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran yang diarahkan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (<i>center of excellence</i>) dalam bidang pendidikan. b. Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya, dengan prioritas pada penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing c. Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator), dengan prioritas pada pencapaian pembangunan pendidikan yang mengarah kepada pemantapan citra Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator) yang handal, berdaya juang tinggi, berwawasan global, serta berjiwa kebangsaan. d. Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing, dengan prioritas pada peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan dengan mengembangkan sistem pendidikan, yang terstruktur dan berkesinambungan serta berorientasi global dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan berstandar internasional. e. Menjaga kapasitas jaringan kerjasama, dengan prioritas pada pemantapan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan kedudukan pendidikan Provinsi DIY ke posisi global melalui dukungan teknologi informasi. f. Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha, dengan prioritas pada penciptaan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi untuk membuka peluang usaha yang didukung oleh lembaga pendidikan yang berkualitas. g. Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional, dengan prioritas pada upaya penciptaan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional yang mampu bersaing dalam lingkup regional maupun global. h. Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (<i>knowledge society</i>), dengan prioritas pada perwujudan masyarakat yang madani dengan masyarakat yang berilmu pengetahuan.

Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
	<ul style="list-style-type: none"> i. Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan, dengan prioritas pada penciptaan riset unggulan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (<i>center of excellence</i>) dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. j. Menciptakan gerakan peduli pendidikan, dengan prioritas pada pembudayaan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip “pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua”. k. Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman, dengan prioritas pada perwujudan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman yang mampu mendukung kelancaran proses belajar mengajar. l. Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, dengan prioritas pada penciptaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan yang berpendidikan dan berketerampilan. m. Mewujudkan masyarakat tanggap bencana, dengan prioritas pada pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana melalui pendidikan kebencanaan. n. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, dengan prioritas pada pencapaian masyarakat yang sehat, berpendidikan dan berprestasi melalui olahraga.
Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya, dengan prioritas pada: <ul style="list-style-type: none"> 1) Mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya yang terjadi di dalam masyarakat serta memberi perlindungan akan kelestarian aset-aset budaya; 2) Memantapkan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya; 3) Mempertahankan masyarakat Yogyakarta yang cerdas, modern, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat. b. Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh, dengan prioritas pada: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memantapkan dan mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat DIY dalam proses pembangunan kebudayaan; 2) Mempertahankan dan mengembangkan “kantong-kantong” kebudayaan yang berkelas dunia di seluruh wilayah DIY yang berbasis masyarakat; 3) Mempertahankan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;

Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara	<p>4) Mempertahankan Yogyakarta aktif dalam <i>event</i> budaya tingkat internasional, sehingga eksistensinya termasuk dalam peta kebudayaan dunia.</p> <p>a. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman objek, atraksi dan budaya, termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisnus maupun wisman, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas wisata <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> (MICE); 2) Penerapan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh dan terpadu; 3) Peningkatan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional; 4) Peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata (darat, laut dan udara), dan keamanan sehingga tercipta kenyamanan dan kepuasan wisatawan; 5) Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional secara komprehensif dalam penyelenggaraan urusan pariwisata. <p>b. Tersedianya paket wisata terpadu antar objek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan produk Pariwisata; 2) Pengembangan pemberdayaan Masyarakat; 3) Pengembangan usaha pariwisata; 4) Terwujudnya jejaring wisata yang luas di dalam maupun di luar negeri, dengan titik berat: <ol style="list-style-type: none"> a) Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata; b) Pengembangan informasi pasar wisatawan; c) Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi. 5) Terwujudnya promosi wisata bermutu, menarik dan prospektif, dengan titik berat: <ol style="list-style-type: none"> a) Promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan; b) Pengembangan sarana; serta c) Prasarana promosi pariwisata.

Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025	<ol style="list-style-type: none"> 6) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku dan pendukung pariwisata, dengan titik berat pada peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukung pariwisata; 7) Terwujudnya fasilitas pendukung pariwisata yang handal, dengan titik berat: <ol style="list-style-type: none"> a) Pengembangan dan pemantapan kebijakan kemitraan pariwisata; b) Pengembangan kapasitas pengelolaan kepariwisataan. <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial, dengan prioritas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya; 2) Peningkatan peran masyarakat dalam antisipatif terhadap gejala dan kecenderungan munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial; 3) Peningkatan kualitas jaminan sosial masyarakat; 4) Profesionalisme kapasitas kelembagaan jaminan sosial masyarakat. b. Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan, dengan prioritas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kesehatan; 2) Peningkatan kepedulian masyarakat dalam peran aktif menjaga kesehatan sanitasi lingkungan rumah tangga, tempat-tempat pelayanan dan ruang publik; 3) Peningkatan wawasan masyarakat yang responsif terhadap penyakit menular. c. Menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standardisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun internasional dengan tetap mempertahankan jati diri kulturalnya, dengan prioritas peningkatan potensi ketenagakerjaan yang memenuhi basis kultural, standardisasi, kompetensi, dan profesionalisme agar mampu bersaing di pasar kerja regional maupun internasional. d. Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif, dengan prioritas pemenuhan pelayanan dan mekanisme perpindahan penduduk ke luar daerah penerima melalui program transmigrasi yang transparan berlangsung secara teratur.

Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
	<p>e. Meningkatkan keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender, dengan prioritas peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal.</p> <p>f. Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat, dengan prioritas penataan struktur ruang fungsional yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan terpenuhinya infrastruktur pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat.</p> <p>g. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya berkerajinan (<i>craftsmanship</i>) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpotensi memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemantapan budaya berkerajinan (<i>craftsmanship</i>) didukung pemantapan standar mutu dan orisinalitas (paten) produk-produk industri kecil dan kerajinan rakyat, serta industri kreatif. 2) Pemantapan industri kreatif dengan mewujudkan sentra industri kreatif terpadu untuk mendukung ekspansi pasar. <p>h. Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan, dengan prioritas perkuatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan petani yang berorientasi kemajuan, keuntungan, dan kesejahteraan serta berdasarkan kekhasan kultur gotong-royong.</p> <p>i. Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan, dengan prioritas pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan dalam kegiatan pendidikan, rekreasi, dan wisata.</p> <p>j. Mengintegrasikan wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata, dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan hutan untuk rekreasi wana wisata; 2) Pemanfaatan hutan untuk pendidikan dan penelitian. <p>k. Mewujudkan sistem kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis dalam penanganan masalah,</p>

Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
	<p>peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan hubungan dan sistem kelembagaan yang serasi dan profesional dalam kesamaan pandang yang bersifat dialogis untuk perencanaan dan implementasi program pembangunan; 2) Penanganan masalah pembangunan secara terpadu; 3) Peningkatan reputasi birokrasi serta kepercayaan masyarakat; 4) Perwujudan pembangunan daerah yang maju diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas; 5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang profesional, dengan titik berat pada: <ol style="list-style-type: none"> a) Terpenuhinya SDM Pemerintahan (PNS) yang profesional sesuai kebutuhan kerja dan bidang keahliannya; b) Tercapainya rasio kebutuhan pegawai pemerintahan (PNS) secara proporsional dalam pelayanan publik yang prima. 6) Perwujudan keadilan, ketenteraman, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat; 7) Membudayanya manajemen penanggulangan dan pencegahan bencana.

Selain mengacu pada sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahap keempat RPJPD 2005-2025 sebagaimana diuraikan di atas, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2026 juga memperhatikan isu strategis aktual saat ini. Beberapa isu strategis yang diangkat berdasarkan pada kondisi faktual saat ini adalah:

- 1) Percepatan penanggulangan kemiskinan
- 2) Pengembangan wilayah selatan DIY
- 3) Respon peluang transnasional
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi di segala bidang
- 5) Peningkatan kualitas dan daya saing SDM
- 6) Percepatan pembangunan perdesaan
- 7) Penyederhanaan birokrasi
- 8) Upaya pemajuan kebudayaan
- 9) Penanganan dan pemulihan dampak pandemi

10) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

2. Tujuan

Penyusunan RPD DIY Tahun 2023-2026 ini merupakan bagian dari kerangka mewujudkan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025 yaitu untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. RPD DIY 2023 – 2026 sebagai bagian dari RPJPD DIY irisan tahap 4, juga merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan tahun 2023-2026 akan difokuskan pada pembangunan sosio-ekonomi dan sosio-kultural serta tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosio-ekonomi dan sosio-kultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong mulai dari satuan unit wilayah terkecil agar tercipta pertumbuhan wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Dengan demikian, optimalisasi sumber daya ekonomi harus diikuti pula dengan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan faktor lain seperti pandemi memungkinkan terjadinya perubahan

struktur ekonomi DIY. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada seluruh sektor, tidak terkecuali pada dua sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian DIY yaitu pariwisata dan pendidikan. Merespon terhadap perkembangan pandemi hingga saat ini, pemulihan dan penanganan dampak pandemi masih akan menjadi bagian dalam pembangunan ke depan.

Tingginya pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk DIY. Distribusi kemakmuran diupayakan melalui pemerataan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, serta partisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Fungsi distribusi sebagai salah satu fungsi pemerintah diupayakan melalui perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yang akan bermuara pada kualitas pelayanan publik.

Perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dapat membuat perubahan atau pergeseran nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan sebagai *mainstream* pembangunan di DIY dimaksudkan agar kemajuan pembangunan yang dicapai tidak kemudian menghilangkan jati diri bangsa dan warganya.

Atas dasar landasan berpikir tersebut, perumusan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pada kurun waktu 2023 – 2026. Adapun rumusan tujuan pembangunan tahun 2023 – 2025 beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2023
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosio-ekonomi dan Sosio-kultural Masyarakat	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 6,15 (2021) menjadi 6,64 (2026)	6,31
2	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good government</i>)	Indikator reformasi Birokrasi dari 81,27 (A) (2021) menjadi 84,38 (A) (2026)	82,58

3. Sasaran

Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve* (SMART-C). Sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran pembangunan DIY dalam RPD DIY Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Base line	Target					Target Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,53	5,15	5,34	5,53	5,70	5,85	5,85
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,56	3,58	3,42	3,17	3,00	2,87	2,87
		Indeks Gini	0,436	0,426	0,423	0,419	0,415	0,411	0,411
		Indeks Williamson	0,4504	0,447	0,444	0,441	0,438	0,435	0,435
		Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik
2	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	80,22	80,63	81,07	81,52	81,96	82,40	82,40

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Base line	Target					Target Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
		Tingkat Kemiskinan	11,91	11,16	10,74	10,35	9,93	9,51	9,51
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan		74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	75,18
4	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA

D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPd 2023

1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023-2026

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, diperlukan langkah-langkah untuk mencapainya. Langkah-langkah tersebut berupa strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan yang disusun secara bertahap. Strategi merupakan pengerahan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada agar sumber daya tersebut dapat secara efektif dan efisien memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan.

Tabel 1.4. Strategi dan Arah Pembangunan Tahun 2023-2026

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru termasuk <i>start-up business</i> berbasis teknologi	1.1. Menumbuhkan dan mengembangkan gerakan kewirausahaan secara terpadu lintas sektor untuk sektor-sektor unggulan dan berbasis ekonomi kreatif dan teknologi 1.2. Menumbuhkan dan mengembangkan inkubasi bisnis

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.3. Menumbuhkan kelompok usaha berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemuda
	2. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru terutama di kawasan pedesaan dengan menawarkan <i>investment project ready to offer</i> dan pemerataan investasi	2.1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah yang relatif tertinggal terutama Kawasan Selatan secara terpadu lintas sektor dengan didukung kemitraan investasi, CSR, atau bentuk kerjasama lainnya 2.2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara Yogyakarta <i>International Airport</i> (YIA) 2.3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
	3. Meningkatkan daya saing produk unggulan DIY	3.1. Meningkatkan daya saing produk unggulan DIY dengan dukungan peningkatan produktivitas SDA, SDM melalui jalur formal dan informal, dan pemanfaatan teknologi aplikatif 3.2. Menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas dan konektivitas perhubungan serta peningkatan produktivitas sumber daya
	4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	4.1. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang melalui percepatan penyusunan RDTR, penyediaan informasi, pengawasan perizinan dan penindakan pelanggaran serta penerapan insentif dan disinsentif.
	5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengarusutamaan pembangunan rendah karbon

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat		1.2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan 1.3. Meningkatkan Konservasi SDA dan rehabilitasi lahan 1.4. Menangani permasalahan di kawasan kumuh
	2. Meningkatkan ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana	2.1. Meningkatkan ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana 2.2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dan penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap bencana terutama bagi kelompok rentan
	3. Mengembangkan sumber-sumber PAD dan pembiayaan pembangunan	3.1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset untuk menangkap peluang di sektor-sektor unggulan 3.2. Mengembangkan kerjasama dengan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi <i>stakeholder</i> untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan)	1.1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi <i>stakeholder</i> untuk perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya 1.2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat 1.3. Memperkuat ketahanan keluarga

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatkan daya saing SDM melalui jalur formal dan informal	2.1. Meningkatkan mutu layanan pendidikan sesuai standar yang berorientasi keunggulan lokal dan global 2.2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui jalur formal, nonformal serta informal dengan target lulusan yang kompeten untuk melanjutkan pendidikan, memasuki dunia industri atau berwirausaha
	3. Meningkatkan perilaku hidup sehat	1.1 Meningkatkan perilaku hidup sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi olahraga dan pengembangan sarana prasarana pendukung 1.2 Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 1.3 Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 1.4 Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan	1.1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	1.1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK 1.2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan 1.3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktivitas pemerintah
	2. Memperkuat manajemen ASN	1.1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan dan pengelolaan TIK 1.3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial
	3. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi	3.1. Mengembangkan sistem manajemen kinerja kelembagaan 3.2. Mendorong penyederhanaan birokrasi dan regulasi 3.3. Meningkatkan budaya organisasi yang mengakomodir alih ilmu pengetahuan 3.4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 3.5. Memperkuat kolaborasi <i>stakeholders</i> dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik
	4. Meningkatkan kemandirian fiskal	4.1. Meningkatkan kapasitas dan jiwa wirausaha pengelola unit usaha Pemda.

2. Program Pembangunan Daerah dan Indikator

Perwujudan dari strategi dan arah kebijakan berupa program pembangunan yang didesain untuk mencapai tujuan dan pembangunan secara efisien dan efektif dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Berikut adalah program strategis yang ditetapkan disertai dengan ukuran keberhasilannya.

Tabel 1.5. Program Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Indikator Kinerjanya

No	Program Pemda	Indikator	Base-line	Target					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan	2,50%	2,7%	2,9%	3,4%	3,6%	3,8%	3,8%

No	Program Pemda	Indikator	Base-line	Target					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
		dan Akomodasi Makan Minum (%)							
2	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah	Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	n/a	n/a	59,91%	67,03%	76,7%	86,37%	86,37%
3	Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Rasio Kewirausahaan (%)	3,53%	3,55%	3,60%	3,70%	3,80%	3,90%	3,90%
4	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar	n/a	94,34%	95,09%	95,93%	96,51%	97,18%	97,18%
		Peningkatan PDRB pada Kab/Kota yang belum maju** (Bantul, GK, KP)	40,08%	40,06%	40,07%	40,09%	40,13%	40,18%	40,18%
5	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Capaian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	12,41%	17,66%	20,94%	24,23%	27,51%	30,79%	30,79%
6	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan	30%	32,5%	35%	37,5%	40%	42,5%	42,5%
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,41	125	104,78	102,78	100,78	98,78	98,78
7	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,26%	80,38%	81,50%	82,62%	83,74%	84,86%	84,86%

No	Program Pemda	Indikator	Base-line	Target					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
8	Program Pembangunan Rendah karbon	Penurunan emisi GRK	2.603,00 CO ₂ -eq	2.605,00 CO ₂ -eq	2.607,00 CO ₂ -eq	2.609,00 CO ₂ -eq	2.611,00 CO ₂ -eq	2.613,00 CO ₂ -eq	2.613,00 CO ₂ -eq
9	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,64	15,68	15,72	15,74	15,76	15,77	15,77
10	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,09	75,12	75,15	75,17	75,25	75,27	75,27
		Total Fertility Rate (TFR)	1,9	1,8 s.d. 2,2	1,8 s.d. 2,2	1,8 s.d. 2,2	1,8 s.d. 2,2	1,8 s.d. 2,2	1,8 s.d. 2,2
11	Program Penanggulangan Kemiskinan	Penurunan jumlah penduduk miskin (dalam ribu orang)	474,49	441,76	429,05	417,14	403,61	389,70	389,70
12	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	312	318	323	332	339	344	344
13	Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,57	76,77	77,07	77,37	77,67	77,97	77,97
		Peningkatan Jumlah desa Mandiri	109 desa	114 desa	119 desa	124 desa	129 desa	134 desa	134 desa
14	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	95,65	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,73	86,07	87,43	89,03	90,74	92,05	92,05

No	Program Pemda	Indikator	Base-line	Target					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
15	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	-	100%	-	100%	-	-	100%
		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdais Kelembagaan	75%	100	100	100	100	100	100

E. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

1. Tema Pembangunan Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap ke-empat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan tahun 2023 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2023.

Tema pembangunan tahun 2023 yaitu:

**“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas
Sektor Unggulan”**

Tema tersebut dipilih dengan dasar pemikiran bahwa dalam rangka perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, maka DIY harus memiliki daya saing di berbagai sektor agar bisa mencapai cita-cita tersebut. Kualitas SDM menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global, termasuk dalam keterbukaan perekonomian antar negara. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif global.

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Mendasarkan pada tema pembangunan **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”** maka prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
- 2) Pemulihan ekonomi
- 3) Penurunan kemiskinan
- 4) Pengurangan *gap* ketimpangan wilayah
- 5) Peningkatan kualitas layanan publik
- 6) Menjaga daya dukung lingkungan

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2023 tersebut telah diselaraskan dengan Prioritas Nasional sebagai berikut:

	PN Nasional	Prioritas DIY
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	– Pemulihan ekonomi – Penurunan Kemiskinan
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan <i>gap</i> ketimpangan wilayah
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
PN 5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengurangan <i>gap</i> ketimpangan wilayah

	PN Nasional	Prioritas DIY
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Menjaga daya dukung lingkungan
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik

F. GAMBAR UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi

Secara astronomis, DIY terletak di antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Sedangkan secara geografis, DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa bagian selatan yang dikelilingi dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara, DIY berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali. Sebelah barat, DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, dan sebelah selatan, DIY berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur, DIY berbatasan dengan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau tanggal 9 November 2022, luas seluruh wilayah DIY adalah 3.170,645 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.892.555,47 km²). DIY merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Secara administratif, wilayah pemerintahan di DIY terdiri atas 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota, 64 kapanewon, 14 kemantren, dan 392 kalurahan dan 46 kelurahan. Pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, di DIY terdapat sejumlah 4.673 pedukuhan/kampung, 6.905 RW, dan 27.290 RT.

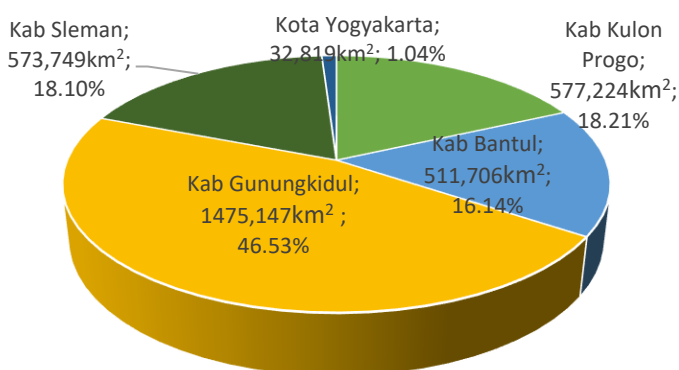
Tabel 1.6. Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Ibukota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan/ Kelurahan	Padukuhan/ Kampung	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	88	930	1.862	4.472
Bantul	Bantul	17	75	933	-	5.905
Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.429	1.492	6.822
Sleman	Sleman	17	86	1.212	2.934	7.556
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	169	617	2.535
DI Yogyakarta		78	438	4.673	6.905	27.290

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024 (data diolah)

b. Luas Wilayah

Kabupaten/Kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.475,147 km² atau 46% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil yaitu 32,819 km² atau 1% dari luas DIY. Proporsi luas masing-masing wilayah kabupaten/kota di DIY terhadap luas DIY secara keseluruhan berdasarkan Permendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1.1. Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2022 (data diolah)

c. Topografi

Secara topografi, bentang alam DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

1) ***Kemiringan Lahan***

Berdasarkan data hasil analisis tahun 2022 yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.126,48 km², lahan dengan kemiringan 2-8% seluas 522,73 km², lahan dengan kemiringan 8-15% seluas 302,80 km², lahan dengan kemiringan 15-25% seluas 516,52 km², lahan dengan kemiringan 25-40% seluas 332,83 km², lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 367,03 km². Wilayah DIY yang memiliki kemiringan lereng sedang hingga curam terletak di Kabupaten Kulon Progo bagian utara, Sebagian besar Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman bagian utara. Sedangkan wilayah dengan kemiringan landai hingga datar terletak di Kabupaten Kulon Progo bagian selatan, sebagian besar wilayah Kabupaten Bantul, dan seluruh wilayah Kota Yogyakarta

2) ***Ketinggian Lahan***

Ketinggian lahan wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori yaitu wilayah yang memiliki ketinggian lahan kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl) sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian lahan 100-499 mdpl sebesar 65,65%, dan wilayah dengan ketinggian lahan 500-999 mdpl sebesar 5,04%, serta wilayah dengan ketinggian lahan di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%.

3) ***Satuan Fisiografis***

Wilayah DIY terdiri dari beberapa satuan fisiografis bentang lahan, meliputi fisiografis bentang alam perbukitan karst di Kabupaten Gunungkidul, fisiografis vulkanik gunung api Merapi di Kabupaten Sleman, fisiografis dataran aluvial pada dataran rendah graben Kabupaten Bantul, perbukitan denudasional di Kabupaten Kulon Progo bagian utara, serta dataran aluvial pantai yang membentang pada kawasan pesisir di Kabupaten Kulon Progo hingga kawasan pesisir Bantul, menghadap ke Samudera Hindia yang kaya potensi

sumber daya alam. Penjelasan tentang satuan fisiografis di DIY sebagai berikut:

Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$, ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang.

Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80–2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul sisi utara, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan berfungsi sebagai kawasan resapan air.

Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY dari kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo sampai kawasan pesisir Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu di bagian timur, daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam *marine* dan *aeolin* yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir barchan.

Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

d. Klimatologi

Kondisi iklim sangat berpengaruh terhadap suatu daerah, baik pada potensi sumber daya alam maupun potensi kebencanaan alam. DIY terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari dua jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat yang basah bertiup sekitar bulan Oktober hingga April sehingga menyebabkan hujan. Sementara angin muson timur yang sifatnya kering bertiup sekitar bulan April hingga Oktober yang mengakibatkan musim kering/kemarau.

Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia pada tahun 2023, parameter klimatologi di DIY tercatat sebagai berikut; suhu udara rata-rata menunjukkan angka $26,3^\circ\text{C}$, dengan suhu terendah pada bulan Agustus $20,7^\circ\text{C}$ dan suhu tertinggi pada bulan Oktober $33,0^\circ\text{C}$. Sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata 80% dengan kelembaban tertinggi pada bulan November 87% dan kelembaban terendah pada bulan September 75%. Kecepatan angin rata-rata 3 knot, kecepatan tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 23 knot dengan arah angin 315° dan tekanan udara rata-rata 991,88 mbar. Pada tahun 2023, curah hujan terbesar terjadi di Kabupaten Bantul pada bulan Februari yaitu 671 mm^3 . Curah hujan terendah adalah 0 mm yang terjadi di semua kabupaten/kota pada waktu yang berbeda sebagai berikut; di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta pada bulan September dan

Oktober, di Kabupaten Bantul bulan Agustus, September, dan Oktober dan di Kabupaten Gunungkidul bulan Juni, bulan September, dan bulan Oktober. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi di Kota Yogyakarta pada bulan Januari sebanyak 25 hari.

Curah hujan per tahun di DIY dibagi ke dalam lima klasifikasi yaitu:

Tabel 1.7. Luas Wilayah Berdasarkan Jumlah Curah Hujan

No.	Range (mm ³ /tahun)	Luas (hektar)
1	1378-1625	31.914,42
2	1625-1871	78.965,65
3	1871-2117	72.228,22
4	2117-2363	97.994,57
5	2363-2610	35.739,57

Sumber: BMKG DIY, 2024

e. Sumber Daya Air

Sumber daya air di DIY terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah

1) Sumber Daya Air Permukaan

Sumber daya air permukaan ditentukan berdasarkan batasan satuan wilayah sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS). DIY mempunyai tujuh DAS yang bermuara di Samudra Hindia. Berdasarkan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak terdapat beberapa DAS di DIY, yaitu DAS Progo, DAS Opak, DAS Bogowonto, DAS Serang, DAS Bengawan Solo, DAS Solo Lama, dan DAS Songbanyu. Secara rinci luas wilayah DAS di DIY seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.8. Luas DAS di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Nama DAS	Luas (Hektar)
1	DAS Opak	206.363,29
2	DAS Progo	71.064,50
3	DAS Serang	23.519,01
4	DAS Bengawan Solo	8.963,26
5	DAS Solo Lama	3.110,45
6	DAS Bogowonto	3.094,69
7	DAS Songbanyu	650,47
Total Luas		316.765,67

Sumber: Data BBWS Serayu-Opak, 2024

2) **Sumber Daya Air Tanah**

Air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir di bawah permukaan tanah sebagai akibat dari gaya gravitasi bumi, struktur perlapisan geologi, dan beda potensi kelembaban tanah. Air tanah di DIY terbagi ke dalam beberapa cekungan air tanah (CAT) yang kemudian dibagi menjadi daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), daerah transisi (*transition zone*), dan daerah lepasan air tanah (*discharge area*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat tiga CAT di wilayah DIY yaitu CAT Yogyakarta–Sleman CAT Wates, dan CAT Wonosari. Sedangkan dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi, dan Sumber Daya Mineral DIY, terdapat lima CAT di wilayah DIY, yaitu:

- (1) CAT Yogyakarta–Sleman;
- (2) CAT Wates;
- (3) CAT Wonosari;
- (4) CAT Menoreh (belum ditetapkan);
- (5) CAT Oyo (belum ditetapkan).

2. Gambaran Umum Daerah

a. Jumlah Penduduk

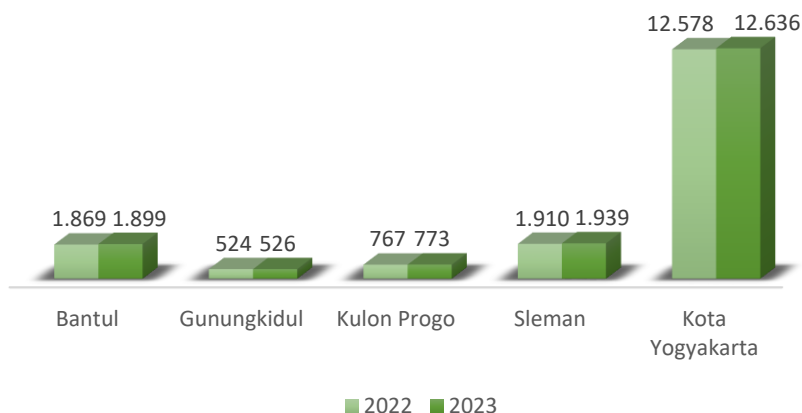
Jumlah penduduk DIY pada akhir semester II tahun 2023 menurut data Biro Tata Pemerintahan Setda DIY rilis bulan Februari tahun 2024 tercatat sebanyak 3.722.296 jiwa yang tersebar di lima kabupaten/kota. Kabupaten Sleman sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 1.112.616 jiwa atau 29,89% dari seluruh penduduk DIY. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Yogyakarta yakni sebanyak 414.705 jiwa atau 11,14% dari seluruh penduduk DIY. Lebih lanjut mengenai jumlah penduduk di DIY pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.9. Jumlah Penduduk DIY Semester II Tahun 2023 Menurut Wilayah Administrasi Pemerintahan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase
1.	Kulon Progo	446.192	11,99%
2.	Bantul	972.161	26,12%
3.	Gunungkidul	776.622	20,86%
4.	Sleman	1.112.616	29,89%
5.	Yogyakarta	414.705	11,14%
	Jumlah	3.722.296	100%

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

Secara umum, DIY dengan luas wilayah 3.170,645 km², pada tahun 2023 kepadatan penduduknya mencapai 1.173,99 jiwa/km² meningkat dari 1.164 jiwa/km² pada tahun 2022. Wilayah paling padat yaitu Kota Yogyakarta, yang meskipun jumlah penduduknya paling sedikit namun luas wilayahnya juga sangat kecil. Kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 tercatat sebesar 12.636 jiwa/km². Sedangkan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 526,47 jiwa/km². Grafik di bawah ini memberikan gambaran mengenai perbandingan kepadatan penduduk di wilayah administratif DIY pada tahun 2022 dan 2023.



Gambar 1.2. Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/km²) Tahun 2022 dan 2023

Sumber: Luas wilayah menurut Keputusan Kemendagri Kemendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022

b. Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu dalam satuan persen dapat disebut sebagai laju pertumbuhan penduduk per tahun yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertambahan penduduk sesuai dengan ilmu demografi ada dua jenis yaitu pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Pada pertambahan penduduk alami hanya dipengaruhi oleh kejadian alami, yaitu kelahiran dan kematian. Sedangkan pertambahan penduduk total dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi) yang dapat dihitung melalui rumus Pertambahan penduduk total yaitu: $P = (L - M) + (I - E)$

Menurut *data series* kependudukan yang dirilis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY beberapa kabupaten menunjukkan tingkat pertumbuhan negatif pada rentang tahun 2020-2021-2022. Kabupaten tersebut adalah Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Pertumbuhan negatif ini ditunjukkan cukup signifikan pada wilayah Kota Yogyakarta

pada tahun 2022. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman menunjukkan pertumbuhan positif secara konsisten sejak 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk di semua kabupaten mengalami pertumbuhan positif, dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Sleman. Secara total di wilayah DIY pertumbuhan penduduk juga konsisten menunjukkan angka positif dari tahun 2019-2023.

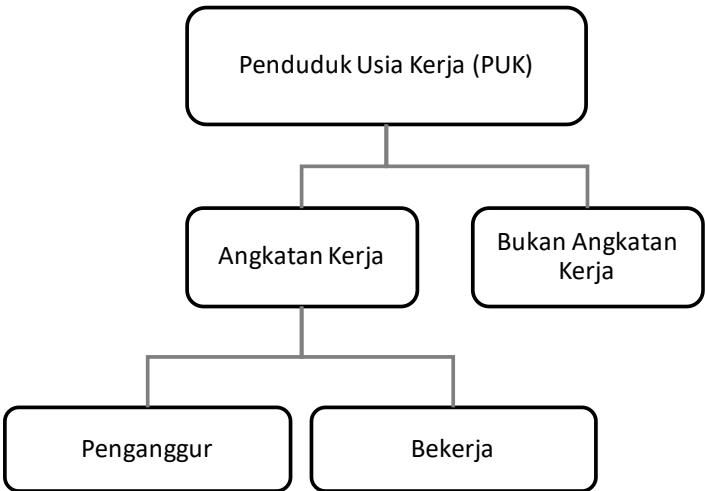
Tabel 1.10. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk DIY				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kulon Progo	-0,19%	-0,95%	-0,03%	0,16%	0,59%
2	Bantul	1,02%	0,57%	0,19%	0,81%	0,82%
3	Gunungkidul	0,60%	0,61%	-0,02%	0,10%	0,18%
4	Sleman	1,09%	0,67%	0,49%	0,90%	1,34%
5	Yogyakarta	0,02%	0,50%	-0,15%	-0,65%	0,46%
	DIY	0,69%	0,41%	0,17%	0,45%	0,77%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024 (Data Diolah)

c. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY mengalami perbaikan terutama pada penurunan jumlah penganggur, berdasarkan data Sakernas BPS Bulan Agustus 2023 Jumlah penduduk usia kerja DIY sebanyak 2.998.928 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut merupakan angkatan kerja yaitu 2.221.694 orang (74,08%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 777.234 orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 2.139.710 orang dan penduduk yang menganggur sebanyak 81.984 ribu orang.



Gambar 1.3. Struktur Ketenagakerjaan DIY
Sumber data: BPS DIY 2023

Bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah penduduk usia 15 tahun dan lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jumlah BAK dalam kurun lima tahun (2019-2023) fluktuatif dan kondisi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 904.592 orang.

1) **Penduduk Usia Kerja**

Yang masuk dalam golongan Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, terbagi ke dalam Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Perbandingan rata-rata selama 5 tahun (2019-2023) menunjukkan proporsi Angkatan Kerja 72,80% dan Bukan Angkatan Kerja 27,20%.

Tabel 1.11. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2019-2023

Kegiatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan kerja	2.246.194	2.228.162	2.334.955	2.336.076	2.221.694
Bekerja	2.174.712	2.126.316	2.228.523	2.241.131	2.139.710
Penganggur	71.482	101.846	106.432	94.945	81.984
Bukan angkatan kerja	842.635	904.592	840.832	881.798	777.234
Penduduk usia kerja	3.088.829	3.132.754	3.175.787	3.217.874	2.998.928
TPAK (%)	72,72	71,12	73,52	72,6	74,08

Kegiatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
TPT (%)	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69
TKK (%)	96,82	95,43	95,44	95,94	96,31

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Penduduk Usia Kerja dalam lima tahun terakhir fluktuatif, sejak tahun 2019 dimana jumlahnya 3.088.829 orang selalu mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022, selanjutnya tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2.998.928 orang. Hal tersebut dikarenakan karena adanya pengaruh migrasi Penduduk Usia kerja di DIY. Untuk itu perlu disiapkan agar penduduk usia kerja tersebut memiliki kualitas unggul sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja baik di dalam dan luar DIY yang berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan ketenagakerjaan DIY.

2) **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara Angkatan Kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja, yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. BPS mencatat bahwa TPAK DIY tahun 2019-2023 fluktuatif, mencapai angka terendah tahun 2020 sebesar 71,12% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan tertinggi menjadi 74,08%, peningkatan TPAK selain karena adanya pertumbuhan angkatan kerja baru, juga juga disebabkan karena perpindahan penduduk ke DIY terutama pada usia angkatan kerja, seperti lulusan Perguruan tinggi yang masuk menjadi angkatan kerja.

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu rantai perekonomian. TPAK DIY didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi, sehingga DIY mempunyai pasokan SDM berkualitas yang dapat difungsikan sebagai subyek

pembangunan. Pada tahun 2023 masih terdapat kesenjangan antara TPAK laki-laki dan perempuan dengan perbandingan TPAK laki-laki 83,76% dan TPAK perempuan 64,75%. Pemberian keterampilan bagi perempuan akan mendorong mereka untuk masuk ke pasar kerja dan melakukan kegiatan ekonomi.

3) **Angkatan Kerja**

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian, dalam kurun waktu lima tahun terakhir angkanya cenderung fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh jumlah Penduduk usia kerja dan tingginya migrasi di DIY, pada Tahun 2023 dengan jumlah 2.221.694 Orang .

Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas angkatan kerja. Angkatan kerja DIY kurun waktu 2019-2023 didominasi dengan tingkat pendidikan menengah ke atas. Kelompok ini perlu diintervensi melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sehingga siap masuk ke pasar kerja.

4) **Penduduk yang Bekerja**

Jumlah penduduk yang bekerja tahun 2023 dengan jumlah 2.139.710 Orang menurut sektor lapangan usaha didominasi oleh 3 sektor utama yaitu Perdagangan, Pertanian dan Industri pengolahan.

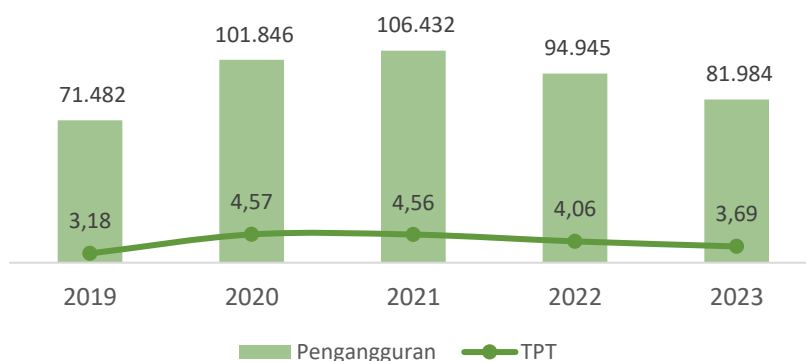
Pulihnya sektor industri Pariwisata dan Jasa pendidikan berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan sektor akomodasi dan makan minum 1,01% tertinggi kedua setelah sektor pertanian 1,71% dan tertinggi ketiga adalah sektor perdagangan 0,98%. Sementara sektor yang mengalami penurunan paling besar adalah sektor

Industri pengolahan -3,54% diikuti transportasi -0,73% dan jasa lainnya -0,52% .

Pada tahun 2023 penduduk bekerja di sektor formal sebesar 46,22% dan sektor informal sebesar 53,78%, dibandingkan tahun 2022 sektor formal mengalami penurunan dimana tahun 2022 sektor formal dengan jumlah 46,62%, penurunan sektor formal disebabkan keterbatasan kesempatan kerja dan juga peralihan dari sektor formal ke wirausaha mandiri melalui *online*.

5) *Pengangguran Terbuka*

Jumlah pengangguran terbuka di DIY sempat meningkat tajam pada tahun 2020 dan 2021, yang dipicu adanya pandemi Covid-19, sehingga banyak tenaga kerja formal dan informal kehilangan pekerjaan.

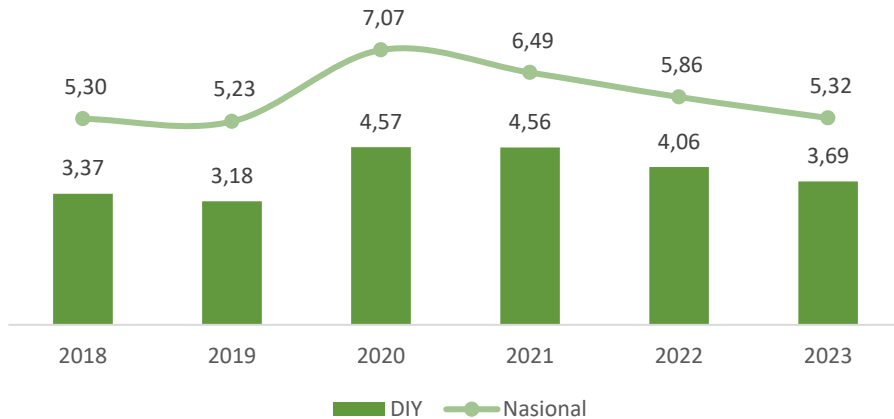


Gambar 1.4. Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2019 -2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Adanya pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja pada pasar kerja dibanding lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan. Data tiga tahun terakhir menunjukkan angkanya mengalami perbaikan pada tahun 2023 menjadi 81.984 orang. DIY sebagai kota pendidikan mendorong jumlah

pertambahan angkatan kerja pada jenjang pendidikan tinggi menyebabkan persaingan mendapatkan pekerjaan juga semakin besar. Sehingga tenaga kerja berpendidikan tinggi banyak yang tidak terserap pasar kerja dan menjadi pengangguran, selain faktor pendidikan juga kesiapan mereka dalam memasuki pasar kerja perlu didukung keterampilan dan karakter yang baik.



Gambar 1.5. TPT Nasional dan DIY Tahun 2019 -2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Selama lima tahun terakhir TPT DIY masih di bawah rata-rata TPT nasional, dengan capaian fluktuatif dan tertinggi 4,57% terjadi pada tahun 2020 dan di tahun yang sama capaian TPT nasional sebesar 7,07%. Selanjutnya capaian TPT terus menurun menjadi 3,69% di tahun 2023, tetapi capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan TPT sebelum pandemi Covid-19 yaitu sebesar 3,18 pada tahun 2019. Capaian TPT digunakan sebagai acuan untuk perluasan kesempatan kerja dan perkembangan TPT ini dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Tingginya angka TPT mencerminkan adanya kegagalan pasar kerja untuk menyerap angkatan kerja. Secara lebih luas indikator TPT digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Sehingga untuk menekan dan

menurunkan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan multi sektor.

d. Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan memastikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh penduduk usia sekolah. Pada tahun 2023 dari 3.677.446 jiwa total penduduk DIY sebanyak 17,26% atau 634.801 jiwa masih berada pada usia sekolah (7-18 tahun). Angka ini merepresentasikan potensi besar yang dimiliki oleh DIY dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Tabel 1.12. Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Penduduk Menurut Usia Sekolah									Total Penduduk Usia Sekolah
			7-12			13-15			16-18			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Bantul	956	42	40	83	23	21	44	20	19	40	168
		.513	.839	.597	.436	.167	.763	.930	.612	.672	.284	.650
2	Gunungkidul	774	30	28	58	16	15	32	15	14	30	121
		.441	.425	.340	.765	.764	.556	.320	.937	.732	.669	.754
3	Kulon Progo	442	18	17	36	10	9	20	9	9	18	75
		.874	.881	.589	.470	.350	.660	.010	.652	.267	.919	.399
4	Sleman	1.088	49	47	97	26	25	51	23	22	45	195
		.109	.964	.489	.453	.660	.245	.905	.404	.252	.656	.014
5	Yogyakarta	415	18	17	35	9	9	19	9	9	19	73
		.509	.031	.356	.387	.758	.645	.403	.867	.327	.194	.984
	DIY	3.677	160	151	311	86	81	168	79	75	154	634
		.446	.140	.371	.511	.699	.869	.568	.472	.250	.722	.801

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri (Semester 2 Tahun 2023), diolah oleh Biro Tapem Setda DIY

Dalam upaya menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, lembaga pendidikan negeri bersinergi dengan lembaga pendidikan swasta untuk memberikan layanan dan fasilitas pendidikan yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan seluruh penduduk usia sekolah di DIY. Untuk memberikan

gambaran lebih detail mengenai kapasitas pendidikan di wilayah tersebut, berikut disajikan data jumlah lembaga pendidikan formal di DIY pada tahun 2023:

Tabel 1.13. Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di DIY Tahun 2023

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Lembaga	
		Negeri	Swasta
1	TK/RA	53	2.339
2	SD/ MI	1.449	598
3	SMP/ MTs	251	355
4	SMA/ MA	83	168
5	SMK	48	152
6	SLB	9	72

Sumber: Disdikpora DIY, 2024

Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan formal ini didukung pula oleh adanya lembaga-lembaga kesetaraan seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan jumlah total 5 lembaga dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan jumlah 117 lembaga.

Sarana prasarana pembelajaran di lembaga pendidikan seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, ruang praktik siswa, laboratorium, UKS, dan toilet di DIY umumnya berada dalam kondisi baik dan hanya memerlukan pemeliharaan rutin berkala. Penyediaan jaringan listrik dan internet yang memadai juga terus diupayakan oleh Pemda DIY guna menjamin kelancaran pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran di sekolah.

Pemenuhan jumlah pendidik menjadi salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan. Berikut adalah rincian jumlah pendidik di DIY.

Tabel 1.14. Jumlah Pendidik di DIY Tahun 2023

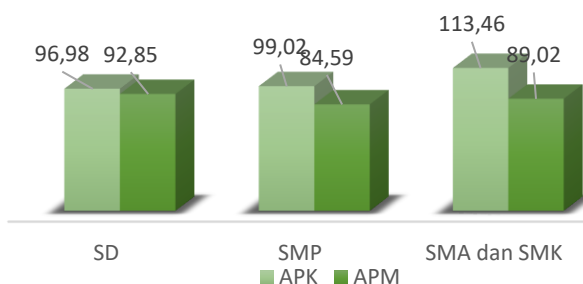
No	Satuan Pendidikan	Jumlah Guru		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	TK/RA	170	8.243	8.413
2	SD/ MI	6.593	15.788	22.381
3	SMP/ MTs	4.378	7.169	11.574

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Guru		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
4	SMA/ MA	2.681	3.700	6.381
5	SMK	2.873	3.445	6.318
6	SLB	310	836	1.146

Sumber: Disdikpora DIY, 2023

Berdasarkan data jumlah guru di atas, guru yang dinyatakan memiliki kelayakan mengajar atau memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 adalah 96,35% dari pendidik jenjang SMA/MA dan SMK, 95,99% dari pendidik jenjang SMP/MTs, 94,95% dari pendidik jenjang SD/MI, serta 92,5% dari pendidik SLB. Pemda DIY mendorong para pendidik yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 untuk menempuh studi lanjutan sehingga para pendidik tersebut dapat memenuhi persyaratan minimum kelayakan mengajar.

Dukungan sumber daya manusia pendidik dan sarana prasarana pendidikan yang memadai akan mengarah pada optimalisasi tingkat partisipasi penduduk usia sekolah dalam pendidikan. Partisipasi penduduk usia sekolah dapat digambarkan dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK memberikan gambaran proporsi penduduk bersekolah pada jenjang tertentu dalam kelompok usia sesuai ketentuan jenjang pendidikan tersebut, sedangkan APM menggambarkan proporsi penduduk bersekolah pada suatu kelompok usia tertentu dalam jenjang sesuai kelompok usianya. Berikut adalah capaian APK dan APM DIY tahun 2023.



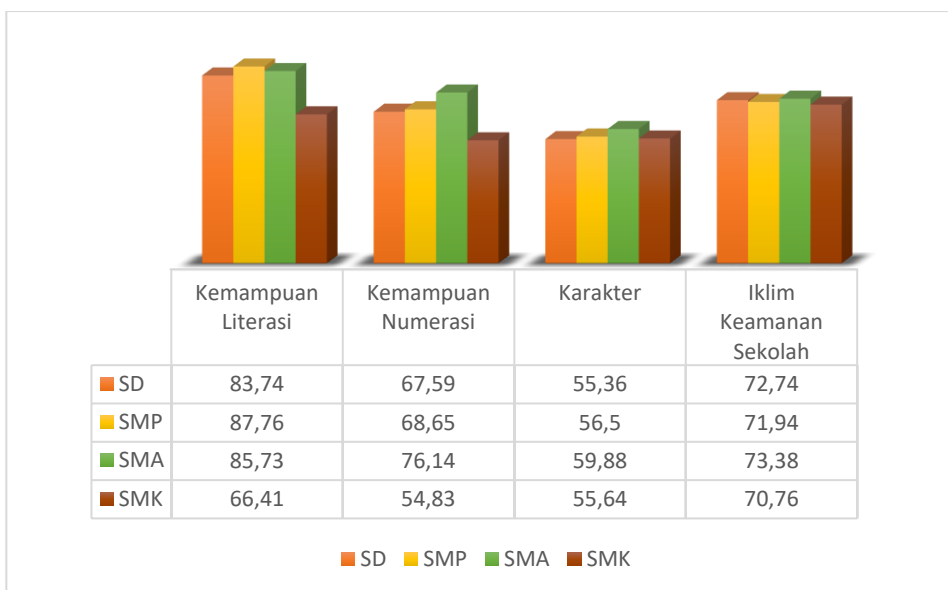
Gambar 1.6. Capaian APK dan APM DIY Tahun 2023

Sumber: Dikpora DIY, 2024

Dari gambar di atas diperoleh gambaran bahwa APK di DIY sudah cukup tinggi. Tingginya capaian APK tahun 2023 menunjukkan tingginya tingkat partisipasi penduduk DIY dalam menuntaskan pendidikan di jenjang menengah. Melalui data pencapaian APM DIY, dapat disimpulkan bahwa pada setiap jenjang pendidikan terdapat siswa dengan usia di luar kategori jenjang pendidikan tersebut.

Dalam upaya pemerataan pendidikan, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih terdapat anak putus sekolah, baik disebabkan alasan ekonomi maupun psikologis. Data Dinas Pendidikan DIY 2023 menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI adalah sebesar 0,04%, untuk jenjang SMP/MTs adalah sebesar 0,09%, dan jenjang pendidikan menengah adalah sebesar 0,23%. Pemda DIY berupaya untuk terus menekan penambahan angka putus sekolah melalui pemberian beasiswa retrieval utamanya kepada para siswa putus sekolah di jenjang pendidikan menengah dan menginstruksikan kepada sekolah untuk menarik kembali siswa putus sekolah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Dengan demikian diharapkan seluruh penduduk usia sekolah dapat menamatkan pendidikan minimal pada jenjang menengah.

Dalam rangka evaluasi kualitas pendidikan, pemerintah mengeluarkan instrumen Rapor Pendidikan. Rapor Pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Gambaran kualitas satuan pendidikan di DIY tahun 2023 tercantum pada Rapor Pendidikan DIY. Beberapa aspek dalam Rapor Pendidikan yang menjadi tolok ukur utama kualitas pendidikan antara lain kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, dan iklim keamanan sekolah. Berikut adalah gambaran umum capaian nilai dalam rapor pendidikan DIY tahun 2023.



Gambar 1.7. Pencapaian Rapor Pendidikan DIY Tahun 2023

Sumber: Dikpora DIY, 2024

Berdasarkan gambar di atas, kemampuan literasi dan numerasi SMK secara umum mendapatkan nilai paling rendah dibanding jenjang lain. Capaian kemampuan literasi dan numerasi SMK pada kategori Sedang. Menurut catatan Rapor Pendidikan capaian kategori Sedang tersebut berarti bahwa 40%-70% peserta didik SMK telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca dan numerasi, dan masih diperlukan upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Pada aspek penilaian karakter, seluruh jenjang pendidikan mendapatkan nilai yang relatif sama yang artinya peserta didik pada seluruh jenjang terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebhinnekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Capaian yang relatif sama juga terjadi untuk penilaian iklim keamanan sekolah semua jenjang pendidikan. Pada penilaian tersebut menunjukkan bahwa satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba.

Menindaklanjuti hasil Rapor Pendidikan tersebut, Pemda DIY terus berupaya mendorong penerapan pendidikan karakter bagi seluruh warga sekolah agar dapat mempertahankan pencapaian nilai karakter dan iklim kondusif bagi pembelajaran. Sedangkan terkait dengan kemampuan literasi dan numerasi siswa, Pemda DIY mengupayakan adanya perbaikan kapasitas pendidik sebagai fasilitator dalam pembelajaran melalui bimbingan teknis dan bimbingan penelitian tindakan kelas. Diharapkan pendidik mampu mengembangkan kemampuannya untuk mengidentifikasi hambatan yang dialami setiap siswa dan memberikan solusi terbaik yang akan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa.

e. Kondisi Ekonomi Daerah

1) Sektor Unggulan

a) Sektor Industri Pengolahan

Sektor Industri Pengolahan merupakan kontributor utama PDRB DIY dengan kontribusi sebesar 11,82% pada tahun 2023 dan tumbuh sebesar 4,26% dari tahun sebelumnya. Sektor industri pengolahan DIY didominasi Industri Makanan dan Minuman dengan PDRB sebesar Rp7,35 Triliun, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi dengan PDRB sebesar Rp1,59 Triliun, dan Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik dengan PDRB sebesar Rp859,35 Miliar.

Tabel 1.15. Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan di DIY Tahun 2019-2023

Kategori PDRB	2019	2020	2021	2022	2023*)
Industri Makanan dan Minuman	7.508.502,40	7.163.558,77	6.966.042,46	7.052.858,40	7.353.094,52
Industri Pengolahan Tembakau	523.804,61	567.978,81	631.428,78	645.789,32	673.280,20
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.439.852,52	1.372.243,47	1.494.396,28	1.521.632,65	1.586.407,67
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	305.131,26	251.673,82	256.987,72	273.190,11	284.819,66

Kategori PDRB	2019	2020	2021	2022	2023*)
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	209 .621,08	198 .957,67	187 .173,91	199 .561,20	208 .056,41
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	307 .555,54	296 .474,74	283 .778,97	286 .489,93	298 .685,64
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	157 .737,69	174 .644,04	175 .133,17	174 .783,13	182 .223,55
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	256 .768,10	249 .830,86	268 .043,34	263 .002,72	274 .198,59
Industri Barang Galian bukan Logam	369 .065,34	318 .837,06	332 .928,33	348 .124,31	362 .943,76
Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	785 .492,23	792 .349,73	806 .190,50	824 .263,23	859 .351,64
Industri Mesin dan Perlengkapan	471 .570,03	417 .445,61	411 .897,32	407 .793,48	425 .153,01
Industri Alat Angkutan	2 .770,57	2 .787,12	2 .428,24	2 .357,86	2 .458,23
Industri Furnitur	566 .496,19	542 .971,72	584 .490,84	610 .411,71	636 .396,58
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	296 .359,56	274 .360,95	269 .436,80	283 .131,78	295 .184,54
Jumlah	13.200 .727,12	12.624 .114,37	12.670 .356,66	12.893 .389,83	13.442 .254,00

Ket.: *) Angka Proyeksi

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

b) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor pariwisata DIY di tahun 2023 mengalami peningkatan dari jumlah wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Kontribusi peningkatan kunjungan wisatawan di DIY pada tahun 2023 tidak lepas dari dukungan dari berbagai sektor pendukung, *stakeholder* pariwisata, komunitas masyarakat pariwisata, akademisi, dan instansi/lembaga pemerintah bekerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan kepariwisataan. Pemasaran pariwisata melalui media

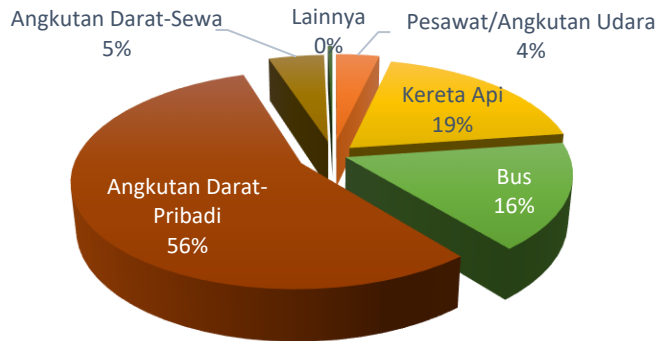
teknologi informasi seperti media sosial dan layanan digital lainnya, dilakukan dengan memanfaatkan kolaborasi berbagai pihak dengan turut memberikan dukungan terhadap kenaikan jumlah wisatawan. Pada tahun 2023 telah terlaksana sejumlah event pariwisata dan kebudayaan yang memperkuat identitas Keistimewaan DIY juga turut membantu pertumbuhan di sektor kepariwisataan DIY, sehingga dapat mendorong kunjungan wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan di DIY pada tahun 2023 sebesar 7.740.689, yang terdiri dari wisatawan mancanegara 149.414 wisatawan dan nusantara 7.591.275 wisatawan.

Tabel 1.16. Perkembangan Jumlah Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus		Wisman	Wisnus
2019	433.027	6.116.354	6.549.381	2,31	1,99
2020	69.968	1.778.580	1.848.548	1,95	1,65
2021	14.740	4.279.985	4.294.725	2,24	1,41
2022	47.080	6.427.035	6.474.115	2,40	1,44
2023	149.414	7.591.275	7.740.680	2,36	1,45

Sumber: BPS DIY & Dispar DIY, 2024 (data diolah)

Kunjungan wisatawan nusantara di DIY pada tahun 2023 juga sangat dipengaruhi oleh semakin terbukanya aksesibilitas moda transportasi menuju ke DIY. Pembangunan Tol Trans Jawa juga memberikan dorongan terhadap kunjungan wisatawan nusantara di DIY. Berdasarkan pendataan BPS RI pada dokumen Statistik Wisatawan Nusantara Tahun 2022, yang dirilis pada tahun 2023, menunjukkan wisatawan nusantara yang menggunakan moda transportasi angkutan darat-pribadi sebesar 55,93%, sangat mendominasi bila dibandingkan dengan penggunaan moda transportasi lainnya.

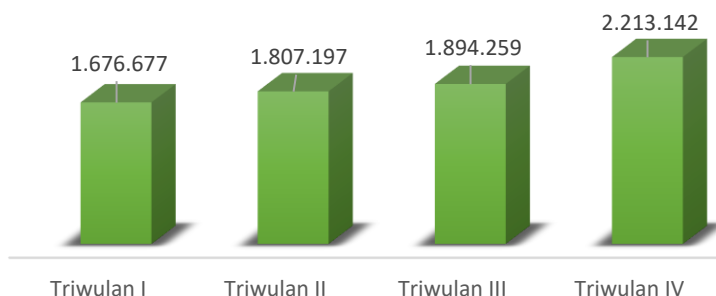


Gambar 1.8. Persentase Moda Transportasi yang Digunakan Wisatawan Nusantara ke DIY Tahun 2022

Sumber: BPS DIY, 2023

Penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama wisatawan nusantara ke DIY di tahun 2023 diperkirakan tidak berbeda jauh dengan kondisi di tahun 2022, sehingga keberadaan aksesibilitas terutama penyediaan jalan juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara di DIY. Penggunaan moda transportasi darat-pribadi juga didorong oleh pola perjalanan berwisata pada masa pandemi Covid-19.

Total kunjungan wisatawan nusantara yang menggunakan akomodasi/penginapan pada tahun 2023 sebesar 7.591.275 wisatawan. Kunjungan wisatawan nusantara terendah terjadi pada triwulan pertama yang hanya mencapai mencapai 1.676.677 wisatawan, sedangkan kunjungan wisatawan tertinggi terjadi pada triwulan keempat yang mencapai yang mencapai 2.213.142 wisatawan atau setara 29,15% di tahun 2023. Pada tahun 2023 terjadi perubahan pola perjalanan untuk wisatawan nusantara, jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 pola perjalanan wisatawan nusantara juga mengalami kenaikan yang tinggi di masa liburan Idul Fitri, namun pada tahun 2023 kenaikan tertinggi terjadi di triwulan ketiga dan triwulan keempat.



Gambar 1.9. Jumlah Wisatawan Nusantara di DIY per Triwulan Tahun 2023

Sumber: BPS DIY, 2024

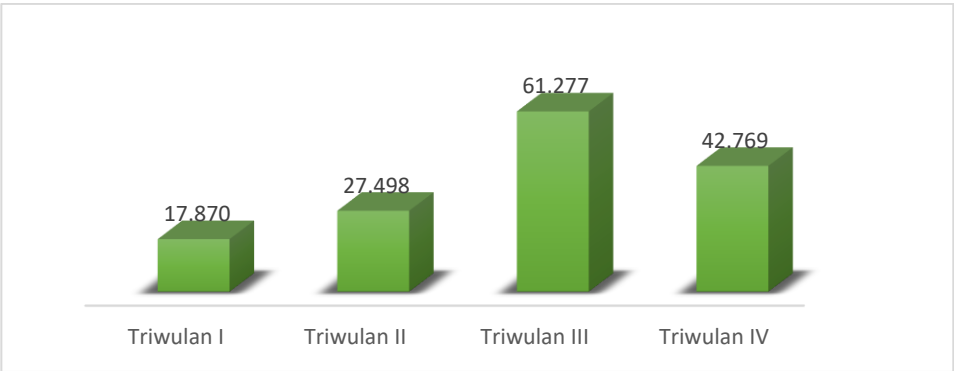
Wisatawan mancanegara yang berkunjung menggunakan jasa akomodasi di DIY pada tahun 2022 memperlihatkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Tahun 2022 bandara YIA mulai menerima penerbangan langsung (*direct flight*) dengan rute Kuala Lumpur-YIA dan Singapura-YIA. Ketersediaan penerbangan langsung berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Pada tahun 2023 kunjungan wisatawan mencapai 149.414 orang, meningkat sebanyak 102.334 wisatawan dibandingkan tahun 2022 yang baru mencapai 47.080 wisatawan. Wisatawan mancanegara yang datang ke DIY sebagian besar masuk melalui bandara YIA, tercatat pada tahun 2023 wisatawan mancanegara yang masuk melalui bandara YIA sebesar 105.486 orang, bila dibandingkan dengan data wisatawan mancanegara yang menggunakan akomodasi/penginapan terdapat 70,6 wisatawan mancanegara yang masuk melalui bandara YIA. Sepuluh negara asal wisatawan terbesar yang masuk melalui Yogyakarta International Airport (YIA) pada tahun 2023, berasal dari: Malaysia, Singapura, Tiongkok, Perancis, Amerika Serikat, India, Jerman, Jepang, Italia dan Inggris.

Tabel 1.17. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara yang masuk Bandara YIA menurut Kebangsaan Tahun 2022-2023

Negara	2022	2023	Pertumbuhan
Malaysia	6.228	42.094	576%
Singapura	1.634	17.215	954%
Tiongkok	110	4.492	3.984%
Perancis	186	2.830	1.422%
Amerika Serikat	324	2.711	737%
India	224	2.573	1.049%
Jerman	153	2.189	1.331%
Jepang	91	2.154	2.267%
Italia	78	2.033	2.506%
Inggris	178	1.942	991%
Lainnya	2.930	25.253	762%
Jumlah	12.136	105.486	769%

Sumber: BPS DIY, 2024

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbesar adalah wisatawan mancanegara yang berasal dari Malaysia yaitu 42.094 wisatawan, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara yang mengalami pertumbuhan tertinggi berasal dari Italia sebesar 2.506%. Tingginya kunjungan wisatawan mancanegara dari Malaysia dan Singapura terkait erat dengan keberadaan penerbangan langsung yang saat ini tersedia.

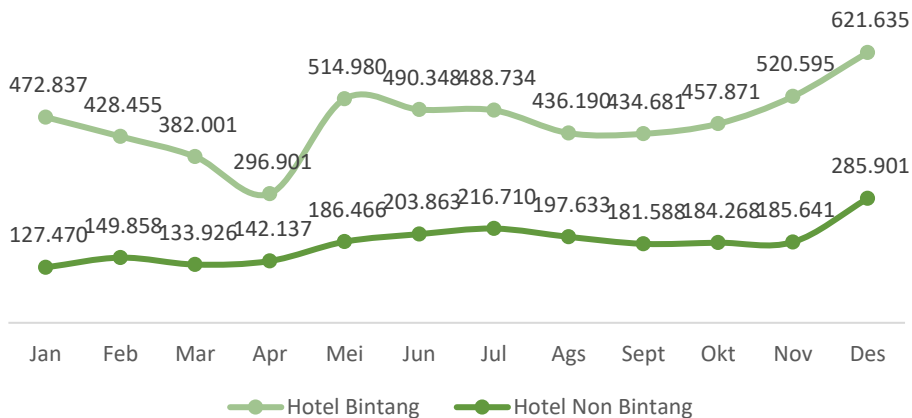


Gambar 1.10. Jumlah wisatawan mancanegara di DIY per triwulan Tahun 2023

Sumber: BPS DIY, 2024

Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami kenaikan yang cukup tinggi di triwulan ketiga. Pola perjalanan wisatawan mancanegara terjadi pada liburan musim panas. Kunjungan tertinggi terjadi di bulan Agustus sebesar 22.898 wisatawan dan bulan Juli sebesar 20.427 wisatawan. Sedangkan untuk kunjungan wisatawan mancanegara terendah terjadi di triwulan pertama, di bulan Januari sebesar 5.402 wisatawan dan Februari sebesar 5.330 wisatawan.

Preferensi wisatawan mancanegara dan nusantara di dalam menggunakan jasa akomodasi/penginapan lebih banyak memilih untuk menggunakan jasa akomodasi hotel berbintang, dari total kunjungan wisatawan yang menginap di jasa akomodasi/penginapan sebesar 7.740.689 wisatawan di tahun 2023, yang menginap di hotel bintang sebesar 5.545.228 wisatawan atau mencapai 72%, sedangkan jumlah wisatawan yang menginap di hotel non bintang pada tahun 2023 sebesar 2.195.461 wisatawan.



Gambar 1.11. Data wisatawan di DIY yang menginap di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2023

Sumber: BPS DIY, 2024

c) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor pertanian memiliki kontribusi terhadap pembangunan terutama di daerah, salah satunya di DIY. Tolok ukur keberhasilan pembangunan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap.

Kemampuan daerah untuk tumbuh tidak terlepas dari peranan beberapa sektor dalam suatu perekonomian. Sektor pertanian masih menjadi kontributor penting dalam perekonomian DIY dengan menempati 4 besar sebagai penyumbang PDRB terbesar. Data BPS sampai dengan triwulan IV tahun 2023, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menduduki posisi kedua dengan kontribusi sebesar 10,23%.

Keberhasilan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan didukung oleh kinerja sub kategori:

(1) Tanaman Pangan

Pembangunan sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan memiliki peran penting dikarenakan memiliki peranan strategis dalam menunjang kehidupan sebagian penduduk. Hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 menunjukkan jumlah rumah tangga usaha tanaman pangan (padi dan palawija) mencapai 285.621 rumah tangga atau 68,47% dari total rumah tangga usaha tani, yang mencapai 417.166 rumah tangga yang berusaha di sektor pertanian (BPS, 2023).

Komoditas utama tanaman pangan DIY adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Untuk menghindari berbagai macam persoalan yang timbul akibat kurangnya pasokan dari komoditas tanaman pangan utamanya padi, dilakukan upaya peningkatan produksi, antara lain dengan penyediaan benih unggul bersertifikat, penyediaan sarana produksi berupa pupuk dan pestisida, perlindungan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), serta pengolahan dan pemasaran hasil.

Tabel 1.18. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan Tahun 2022-2023**

No	Komoditas	LuasPanen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2022	2023**	2022	2023**	2022	2023**
1	Padi	110.926	105.853	50,64	50,61	561.699	535.714
2	Jagung	65.885	66.521	53,04	54,45	349.465	362.237
3	Ubi Kayu	45.593	46.422	231,24	228,84	1.054.322	1.062.334

Keterangan: **) Angka sangat sementara
Sumber: DPKP DIY, 2024

Komoditas yang mengalami peningkatan produksi pada tahun 2023 adalah jagung dan ubi kayu. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan produksi pada tahun 2023 adalah padi. Peningkatan produksi karena iklim yang mendukung sehingga meningkatkan minat petani jagung dan program pemerintah dalam pengembangan kawasan untuk meningkatkan luas panen dan produktivitas. di sisi lain, dampak El Nino dan operasional saluran *van der wijck* serta selokan mataram yang tidak optimal karena adanya perbaikan menyebabkan penurunan produksi padi.

(2) Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan Tangkap diperoleh dari produksi tangkap perairan laut dan perairan darat. Produksi Ikan unggulan perairan laut antara lain: Tongkol komo (KAW) 830 ton, Cakalang 673 ton, Lisong 538 ton, Layang 511 ton, Layur 485 ton, Manyung 295 ton, Kembung 231 ton, dan Madidihang (YFT) 206 ton. Selain itu, produksi Rumput laut sebesar 170 ton. Produksi Ikan unggulan di Perairan Umum Daratan antara lain: Nila 270 ton, Tawes 249 ton, Mas 143 ton, Gabus 129 ton, dan Mujair 128 ton. Faktor Pendukung capaian produksi perikanan tangkap diantaranya didukung oleh cuaca yang mendukung untuk mencari ikan, ketersediaan ikan yang cukup melimpah terutama pada akhir tahun, harga jual yang relatif stabil dan permintaan akan ikan laut yang cukup tinggi di pasaran.

di sisi lain, produksi Perikanan budidaya diperoleh dari produksi ikan hasil aktivitas pembudidayaan oleh masyarakat. Produksi perikanan budidaya unggulan diantaranya: Lele 48.026,39 ton, Nila 31.621,56 ton, Gurami 4.817,16 ton, Udang Galah 4.473,42 ton, Bawal 3.885,07 ton, dan Udang Vaname 3.693,55 ton. Faktor pendukung capaian produksi perikanan budidaya diantaranya penggunaan benih yang unggul, keberhasilan pengendalian hama penyakit ikan, permintaan pasar yang cukup tinggi untuk ikan hasil budidaya, dan penggunaan pakan mandiri.

(3) Hortikultura

Komoditas unggulan hortikultura di DIY pada tahun 2023 rata-rata mengalami peningkatan produksi. Cabai merah, cabai keriting, cabai besar, bawang merah, kelengkeng,

durian, dan alpukat adalah beberapa contoh komoditas dengan peningkatan produksi yang signifikan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti stimulan dari pemerintah baik melalui hibah atau kegiatan reguler, terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura dengan baik, harga di pasar yang baik, serta faktor iklim *el-nino* yang menyebabkan pembungaan tanaman buah tertentu tidak terganggu oleh hujan dan berkurangnya serangan penyakit akibat jamur. Selain itu, kurangnya pasokan air juga menjadi sebab peralihan penggunaan lahan non irigasi untuk menanam komoditas sayuran terutama aneka cabai dan bawang merah.

Namun demikian, terdapat komoditas hortikultura yang menurun produksinya seperti pisang di Gunungkidul dan Salak di Sleman. Komoditas pisang mengalami penurunan produksi karena kemarau panjang dan sistem irigasi yang terbatas. Adapun produksi salak dari tahun ke tahun mengalami tren penurunan karena alih komoditas, alih fungsi lahan untuk hunian, dan harga yang kurang bersaing dengan buah dan sayuran lainnya.

Tabel 1.19. Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2022-2023*

No	Komoditas	Produksi (Ton)		% Peningkatan/ Penurunan
		2022	2023*	
1	Cabai besar	1.719,39	2.423,66	40,96
2	Cabai rawit	15.197,69	21.427,30	40,99
3	Cabai keriting	33.665,07	44.443,49	32,02
4	Bawang merah	22.306,60	33.088,79	48,34
5	Pisang	78.045,27	75.541,69	-3,21
6	Durian	8.849,06	13.601,59	53,71
7	Kelengkeng	1.745,15	2.485,92	42,45
8	Salak	54.498,01	51.838,64	-4,88
9	Alpukat	11.501,67	11.734,96	2,03

Keterangan: *) Angka sementara
Sumber: DPKP DIY, 2024

(4) Perkebunan

Sektor perkebunan sebagai bagian dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional memiliki potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Usaha perkebunan strategis dalam kawasan maupun non kawasan serta komoditas unggul di DIY saat ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat yang mencapai lebih dari 90%. Pengembangan sub sektor perkebunan di DIY diarahkan pada *specialty product* berbasis *cluster*/kawasan serta diintegrasikan dengan sektor pariwisata (agrowisata).

Tabel 1.20. Produksi Komoditas Perkebunan Unggulan DIY Tahun 2022-2023**

No	Komoditas	Produksi (Ton)			Wujud Produksi
		2022	2023**	% Pertumbuhan	
1	Kelapa	52.760,76	53.225,62	0,88	Kopra
2	Tebu	6.410,79	6.137,39	-4,26	Gula hablur
3	Kakao	1.900,72	1.820,66	-4,21	Biji kering

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: DPKP DIY, 2024

Namun demikian, secara umum produktivitas tanaman perkebunan saat ini masih rendah yang disebabkan oleh kondisi tanaman yang sudah tua, penggunaan benih asalan, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) yang belum optimal. Bersamaan dengan itu, luas areal kebun rakyat yang perlu diremajakan/direhabilitasi karena tanamannya sudah tua dan/atau rusak sangat luas. Peremajaan tanaman perkebunan, bibit atau bahan tanam merupakan faktor penentu produktivitas dan kualitas produk usaha pekebun dalam jangka panjang atau satu musim tanam yang umumnya mencapai 25 tahun.

Tahun 2023 komoditas kelapa mengalami kenaikan produksi sebesar 0,88% salah satunya karena fenomena El Nino. Meski menjadi faktor keuntungan bagi komoditas perkebunan kelapa, namun El Nino justru merugikan untuk beberapa komoditas perkebunan lain seperti tebu dan kakao. El Nino menimbulkan suhu tinggi dan kurangnya persediaan air sehingga terjadi penurunan kualitas tanaman dan buah. Tanaman dan buah yang tumbuh dalam kondisi tidak ideal cenderung memiliki ukuran lebih kecil, hasil rendemen menurun, dan kualitas kurang baik secara keseluruhan.

(5) *Peternakan*

Subsektor peternakan merupakan bagian penting dari sektor pertanian secara keseluruhan dan berkontribusi pada ketahanan pangan, perekonomian pedesaan, serta keberlanjutan lingkungan. Peternakan memberikan sumber pendapatan bagi petani dan peternak. Banyak keluarga di pedesaan dan daerah agraris mendapatkan penghidupan dari aktivitas peternakan. Selain itu, peternakan menyediakan sumber daya pangan berupa daging, susu, telur, dan produk olahan lainnya melalui usaha budidaya sapi potong, sapi perah, kambing, ayam buras, ayam pedaging, maupun ayam petelur.

Jumlah keseluruhan populasi ternak dalam satuan ekor pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Komoditas strategis peternakan yang mengalami peningkatan populasi pada tahun 2023 yaitu Ayam Buras dan Ayam Ras Pedaging. Peningkatan populasi ayam ras pedaging dipengaruhi adanya permintaan pasar yang cukup tinggi sehingga minat untuk beternak juga meningkat. Demikian juga untuk peningkatan ayam buras sangat

dipengaruhi oleh potensi pasar yang cukup menguntungkan.

Tabel 1.21. Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2022-2023*

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2022	2023*
1	Sapi Potong	302.049	291.805
2	Sapi Perah	3.265	3.233
3	Kambing	466.759	417.512
4	Ayam Buras	3.388.456	3.584.421
5	Ayam Pedaging	6.779.316	8.120.576
6	Ayam Petelur	4.700.027	4.319.144

Keterangan: *) Angka sementara
Sumber: DPKP DIY, 2024

Di sisi lain, pada tahun 2023 terdapat penurunan populasi sapi potong, sapi perah, kambing, dan ayam petelur. Penurunan ini disebabkan karena sapi potong dan sapi perah masih terdampak oleh terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah DIY. *Lumpy Skin Diseases* (LSD) dan PMK menyebabkan kematian pada ternak dan banyak peternak yang menjual sapi terutama induknya. Selain itu karena sapi perah dan kambing merupakan hewan rentan PMK, petani belum berani melakukan penambahan populasi ternak. Saat ini peternak masih fokus dalam mencegah dan/atau menangani ternaknya dari serangan PMK.

Penurunan populasi sapi potong juga disebabkan oleh penurunan tindakan inseminasi buatan (IB) yang mengakibatkan penurunan jumlah kelahiran sapi potong. Sedangkan penurunan populasi sapi perah merupakan dampak berkurangnya kualitas indukan secara genetik karena sebagian besar induk seharusnya sudah diregenerasi dengan indukan baru dari Pusat Pembibitan yang tersertifikasi.

(6) **Kehutanan**

Hutan di DIY merupakan sumber daya alam yang harus dijaga dan katalisator pertumbuhan ekonomi potensial. Peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor kehutanan di DIY juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat setempat. Salah satu pola pengelolaan hutan yang dilakukan adalah melalui mekanisme kerjasama kemitraan. Mekanisme ini memberikan izin pemanfaatan sebidang kawasan hutan untuk diambil manfaat jasa lingkungan oleh kelompok masyarakat. Contoh keberhasilan dari pola ini adalah kawasan wisata alam mangunan yang dikelola oleh Koperasi Notowono. Selama tahun 2023, kawasan alam mangunan menerima sebanyak 1.076.118 kunjungan wisatawan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.22. Realisasi Kunjungan Wisata Oleh Koperasi Notowono Tahun 2021-2023

No	Lokasi	Jumlah Pengunjung (Orang)		
		2021	2022	2023
1	Gn Pengger	236.362	467.361	415.792
2	Puncak Becici	147.082	277.584	213.181
3	Lintang Sewu	14.855	13.676	9.023
4	Pinus Asri	15.106	14.141	8.711
5	Pinussari	222.755	339.069	346.915
6	Seribu Batu	87.763	94.822	68.426
7	Bukit Panguk	15.446	16.079	14.070
		739.369	1.222.732	1.076.118

Sumber: DLHK DIY, 2024

Berdasarkan jumlah kunjungan tersebut, pendapatan yang dihasilkan mencapai Rp6.282.554.000,00. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

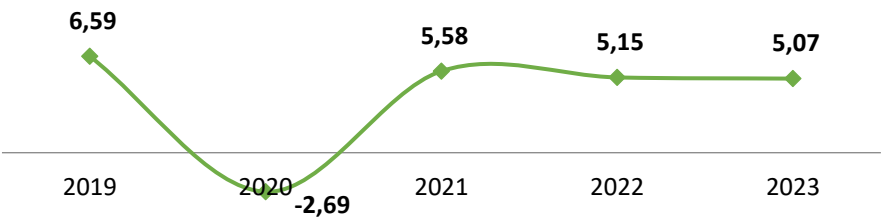
Pada tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisiasi perhitungan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) oleh kelompok tani hutan. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, terdapat nilai transaksi sebesar Rp5.234.184.920,00 untuk produk kehutanan di DIY sepanjang tahun 2023. Nilai transaksi terbesar ada di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar Rp3.116.456.920,00 dengan komoditas penyumbang terbanyak berupa produk olahan tanaman obat senilai Rp1.608.677.320,00.

Potensi yang luar biasa ini akan terus dikembangkan melalui identifikasi potensi sehingga akselerasi peningkatan nilai produksi kehutanan di DIY dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

2) *Pertumbuhan Ekonomi*

Perekonomian DIY menunjukkan peningkatan kinerja berupa pertumbuhan ekonomi positif atau ekspansif selama beberapa tahun terakhir. Hal itu mengindikasikan peningkatan kapasitas perekonomian DIY yang sempat berkontraksi di tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Meskipun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 kecenderungannya menurun.

Pada tahun 2020, ekonomi DIY tumbuh sebesar sebesar -2,69%, kemudian perekonomian senantiasa mengalami peningkatan kinerja di tahun berikutnya dengan tumbuh sebesar 5,53% (2021), 5,15% (2022) dan 5,07% (2023). Berikut ini gambar pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir.



Gambar 1.12. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019-2023 (%)
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Semua lapangan usaha mengalami ekspansi dengan tumbuh positif yang menunjukkan dinamika peningkatan aktivitas di semua sektor perekonomian. Pertumbuhan paling tinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh 10,29% dan diikuti pertumbuhan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan 15,04% dan Penyediaan Makan dan Minum 8,72%.

Tabel 1.23. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,03	4,19	0,61	5,12	1,14
Pertambangan dan Penggalian	3,04	-9,22	-3,11	1,72	3,25
Industri Pengolahan	5,73	-4,38	0,37	1,76	4,26
Pengadaan Listrik, Gas	5,43	-0,10	2,40	6,82	7,32
Pengadaan Air	8,90	0,51	6,82	3,29	3,43
Konstruksi	14,39	-15,64	10,82	4,81	4,81
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,16	-4,52	1,51	4,82	4,29
Transportasi dan Pergudangan	3,55	-20,21	1,93	18,26	10,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,89	-16,91	7,55	12,40	8,72
Informasi dan Komunikasi	7,45	19,70	16,69	3,54	4,68
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,62	-1,09	1,45	5,24	10,29
Real Estate	5,93	1,27	0,57	2,82	3,70
Jasa Perusahaan	6,75	-14,89	8,09	7,16	8,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,30	-2,22	-0,39	2,95	2,44
Jasa Pendidikan	6,57	4,47	5,00	0,98	4,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,61	19,18	4,47	3,99	6,32
Jasa lainnya	6,25	-15,74	21,53	15,04	6,97
PDRB	6,60	-2,69	5,53	5,15	5,07

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Lapangan usaha yang tumbuh terendah adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 1,14%. Berikutnya adalah Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh menjadi 2,44%.

Menurut PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran, jenis pengeluaran yang tumbuh tertinggi pada tahun 2023 adalah Pengeluaran Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PKLNPRT) yaitu sebesar 8,75% yang meningkat dari 5,58% di tahun sebelumnya. Diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 6,5% dan Konsumsi Rumah tangga sebesar 4,92%.

Tabel 1.24. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023

Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	3.77	-2.75	1.77	2.64	4,92
Konsumsi LNPRT	9.58	-6.56	0.39	5.58	8,75
Konsumsi Pemerintah	2.90	-0.92	0.26	0.52	2,35
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.86	-13.41	8.2	5.86	6,5
PDRB	6.59	-2.69	5.53	5.15	5,07

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

3) *Inflasi*

Tingkat Inflasi DIY diwakili oleh tingkat inflasi Kota Yogyakarta. Tingkat inflasi Pada tahun 2023, adalah 3,17% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,23 di tahun 2023 dan IHK tahun sebelumnya adalah 115,57. Kenaikan harga terbesar terjadi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yaitu sebesar 7,58% selama tahun 2023 dengan andil sebesar 1,72% dari total inflasi. Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks harga konsumen yaitu sebesar -0,06%.

Tabel 1.25. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Pengeluaran Tahun 2022-2023

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2022	IHK Desember 2023	Inflasi Tahun Kalender 2023 * (%)	Andil Inflasi Desember (y o y) 2023 (%)
Umum	115,57	119,23	3,17	3,17
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	119,47	128,53	7,58	1,72
2. Pakaian dan Alas Kaki	113,10	114,60	1,33	0,07
3. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	110,28	111,54	1,14	0,20
4. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	114,72	115,85	0,99	0,05
5. Kesehatan	115,73	120,82	4,40	0,11
6. Transportasi	119,10	120,18	0,91	0,14
7. Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	99,66	99,60	-0,06	0,00
8. Rekreasi, Olahraga dan Budaya	112,15	113,69	1,37	0,03
9. Pendidikan	116,44	120,00	3,06	0,20
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	114,96	119,47	3,92	0,48
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	130,66	134,39	2,85	0,16

Ket.: *) Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap bulan Desember 2022

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

3. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Gambaran Umum Birokrasi Pemda DIY

Seiring dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, Pemda DIY telah melakukan perubahan kelembagaan untuk merespon kebutuhan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Perubahan kelembagaan tersebut antara lain untuk menindaklanjuti penetapan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2023, Pemda DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur

yang merupakan pelaksanaan dari Perda No 1 Tahun 2022 tersebut, yaitu:

- 1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan;
- 2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan; dan
- 3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selain itu, telah dilaksanakan sinkronisasi tugas dan fungsi dengan melakukan *review* terhadap Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada 15 Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
- 2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- 3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Paniradya Keistimewan;
- 4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan;

- 5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pada Dinas Kesehatan;
- 6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral;
- 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral;
- 9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- 12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Dinas Pariwisata;

- 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 15) Rapergub Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Respira.

Berkenaan dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah DIY No 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, Pemda DIY telah menyesuaikan Peta Proses Bisnis (Peta Probis). Peta Probis tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 462/KEP/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 192/KEP/2023 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah DIY. Penyusunan dan penetapan peta proses bisnis dilaksanakan oleh Pemda DIY sebagai acuan untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Penetapan peta probis diharapkan akan menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta Probis Pemerintah Daerah DIY memuat dokumen antara lain: a) Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Istimewa level 0; b) Peta Sub Proses; dan c) Peta Relasi yang dalam penyusunannya merupakan penjabaran dari Program Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Penurunan Tingkat Kemiskinan;
- 2) Peningkatan Penghidupan Ekonomi yang Layak;
- 3) Peningkatan Kualitas SDM yang dapat diandalkan;
- 4) Peningkatan Kapasitas Ekonomi pada Kawasan Belum Maju;
- 5) Peningkatan *Good Governance*;
- 6) Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
- 7) Penurunan Risiko Bencana;
- 8) Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan;
- 9) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

- 10) Peningkatan Kualitas Kepegawaian Daerah;
- 11) Peningkatan Kualitas Pengawasan internal;
- 12) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum; dan
- 13) Peningkatan Keterbukaan informasi Publik dan Penyelenggaraan SPSE.

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah DIY no 2 Tahun 2023, Pemda DIY telah melaksanakan pencermatan terhadap kelembagaan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:

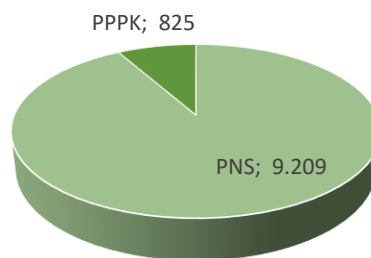
- 1) Pencapaian visi dan misi Gubernur dalam RPJMD;
- 2) Mandatory peraturan perundang-undangan;
- 3) Kewenangan daerah; dan
- 4) Hasil kajian kelembagaan.

Pencermatan kelembagaan Perangkat Daerah tersebut bertujuan untuk mengakomodir misi 1 RPJMD DIY 2022-2027 yaitu *“Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan.”* Oleh karenanya, Pemda DIY memerlukan dukungan Perangkat Daerah dengan kewenangan, tugas dan fungsi yang mengawal misi tersebut. Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

1) *Gambaran Kondisi ASN yang Dimiliki*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa setiap aparatur sipil negara harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka

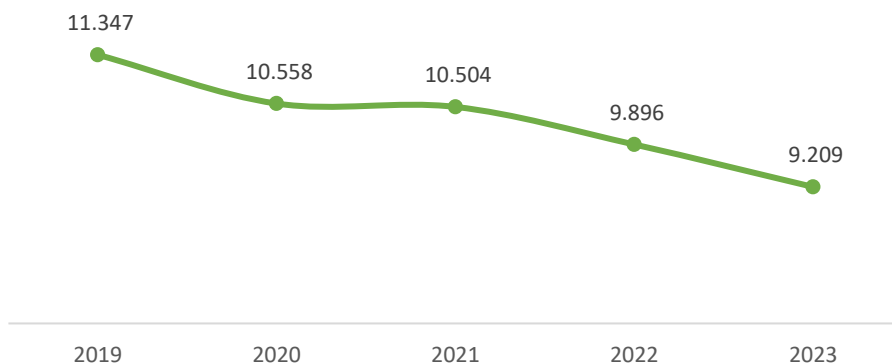
pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan amanat tersebut, Pemda DIY melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah. Kondisi ASN Pemda DIY Tahun 2023 sebagaimana tertera di bawah ini:



Gambar 1.13. Jumlah ASN Pemda DIY Tahun 2023

Sumber: BKD DIY, 2024

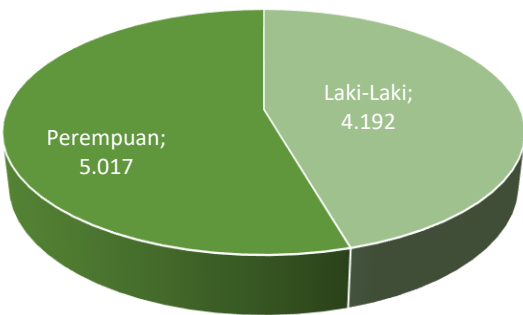
Berdasarkan gambar di atas, ASN di Pemda DIY per Desember 2023 sejumlah 10.034 orang, yang terdiri atas PNS sebanyak 9.209 orang (92%) dan PPPK sebanyak 825 orang (8%).



Gambar 1.14. Jumlah PNS Pemda DIY Tahun 2019-2023

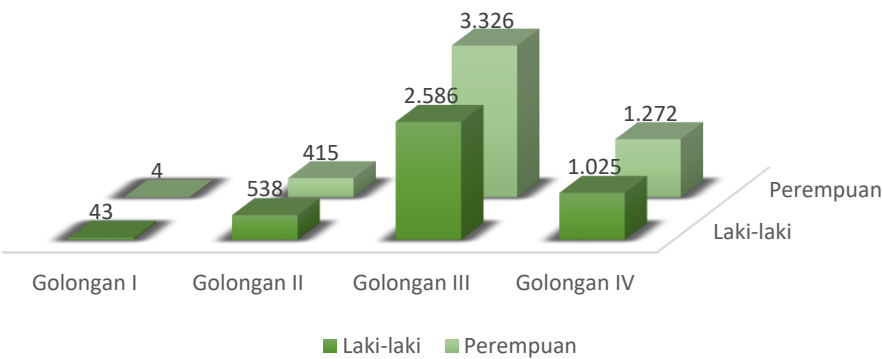
Sumber: BKD DIY, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah PNS Pemda DIY dari tahun ke tahun menurun. Jumlah PNS tahun 2023 menurun sebesar 6,9% dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan jumlah PNS pensiun tidak diimbangi dengan jumlah PNS yang masuk ke Pemda DIY.



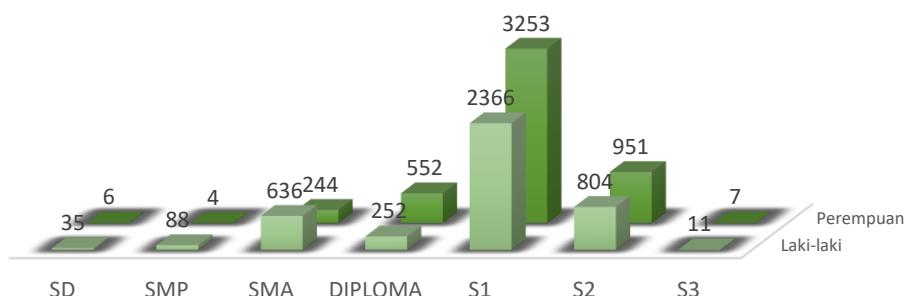
Gambar 1.15. Jumlah PNS Pemda DIY berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: BKD DIY, 2024

Pada tahun 2023, PNS Pemda DIY masih didominasi oleh PNS perempuan. PNS perempuan dengan jumlah 5.017 orang (54%) atau 9% lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki yang berjumlah 4.192 orang (46%).



Gambar 1.16. Jumlah PNS Pemda DIY berdasarkan Golongan
Sumber: BKD DIY, 2024

PNS Pemda DIY pada tahun 2023 didominasi oleh PNS golongan III dengan jumlah 5.912 orang atau sekitar 64% dari jumlah keseluruhan PNS. Hal ini dikarenakan Pemda DIY tidak membuka formasi CPNS dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.



Gambar 1.17. Jumlah PNS Pemda DIY berdasarkan Pendidikan

Sumber: BKD DIY, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa PNS Pemda DIY sebagian besar mempunyai latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) sebesar 61,02% dan Strata 2 (S2) sebesar 19,02%. Hal ini dipengaruhi oleh perekrutan CPNS yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S1 serta banyaknya PNS yang melakukan pengembangan kompetensi dengan menempuh sekolah lanjutan PNS tingkat S1 maupun S2, baik melalui beasiswa atau biaya mandiri.

2) Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Dalam APBD P 2023

a) Ringkasan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp5.855.271.928.290,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp5.840.561.001.091,65 atau 99,75%. Hal ini

menunjukkan bahwa realisasi pendapatan kurang dari anggaran sebesar Rp14.710.927.198,35. Berikut rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023:

Tabel 1.26. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (*Unaudited*)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	5.855.271.928.290,00	5.840.561.001.091,65	(14.710.927.198,35)	99,75
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.368.708.585.703,00	2.368.679.166.252,65	(29.419.450,35)	100,00
Pajak Daerah	2.088.941.497.868,00	2.069.612.267.000,57	(19.329.230.867,43)	99,07
Retribusi Daerah	33.564.359.756,00	33.213.267.052,00	(351.092.704,00)	98,95
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	109.070.217.574,00	109.790.680.460,56	720.462.886,56	100,66
Lain-lain PAD yang Sah	137.132.510.505,00	156.062.951.739,52	18.930.441.234,52	113,80
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.368.708.585.703,00	2.368.679.166.252,65	(29.419.450,35)	100,00
PENDAPATAN TRANSFER	3.478.957.842.587,00	3.463.926.176.823,00	(15.031.665.764,00)	99,57
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.478.121.936.167,00	3.463.090.270.403,00	(15.031.665.764,00)	99,57
Pendapatan Transfer Antar Daerah	835.906.420,00	835.906.420,00	-	100,00
Total Pendapatan Transfer	3.478.957.842.587,00	3.463.926.176.823,00	(15.031.665.764,00)	99,57
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.605.500.000,00	7.955.658.016,00	350.158.016,00	104,60
Pendapatan Hibah	7.605.500.000,00	7.950.630.000,00	345.130.000,00	104,54
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		5.028.016,00	5.028.016,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.605.500.000,00	7.955.658.016,00	350.158.016,00	104,60
JUMLAH PENDAPATAN	5.855.271.928.290,00	5.840.561.001.091,65	(14.710.927.198,35)	99,75

Sumber: BPKA DIY, 2024

b) Ringkasan Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp6.016.543.491.245,00. Hingga akhir tahun anggaran 2023 realisasi belanja daerah sebesar Rp5.708.080.855.492,41 atau 94,87%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah kurang dari anggaran sebesar Rp308.462.635.752,59. Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023:

Tabel 1.27. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (*Unaudited*)

Uraian	Tahun 2023			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	1.632.174.635 .343,00	1.572.346.950 .277,00	(59.827.685 .066,00)	96,33
Belanja Barang Jasa	1.370.269.758 .830,00	1.246.181.407 .244,20	(124.088.351 .585,80)	90,94
Belanja Subsidi	85.553.295 .477,00	75.470.221 .902,00	(10.083.073 .575,00)	88,21
Belanja Hibah	604.259.784 .839,00	584.093.037 .626,00	(20.166.747 .213,00)	96,66
Belanja Bantuan Sosial	29.461.324 .000,00	28.286.453 .932,00	(1.174.870 .068,00)	96,01
Jumlah Belanja Operasi	3.721.718.798 .489,00	3.506.378.070 .981,20	(215.340.727 .507,80)	94,21
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	177.970.845 .828,00	169.306.929 .192,00	(8.663.916 .636,00)	95,13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.623.864 .205,00	186.112.683 .018,00	(7.511.181 .187,00)	96,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.710.000 .225,00	150.930.255 .820,00	(15.779.744 .405,00)	90,53
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	234.751.635 .170,00	225.450.247 .009,00	(9.301.388 .161,00)	96,04
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.896.669 .487,00	13.437.651 .506,00	(459.017 .981,00)	96,70
Belanja Modal Aset Lainnya	174.635 .400,00	162.500 .000,00	(12.135 .400,00)	93,05

Uraian	Tahun 2023			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
Jumlah Belanja Modal	787.127.650.315,00	745.400.266.545,00	(41.727.383.770,00)	94,70
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	21.998.129.613,00	198.487.268,00	(21.799.642.345,00)	0,90
Jumlah Belanja Tak Terduga	21.998.129.613,00	198.487.268,00	(21.799.642.345,00)	0,90
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	904.030.830.780,00	886.411.063.641,00	(17.619.767.139,00)	98,05
Belanja Bantuan Keuangan	581.668.082.048,00	569.692.967.057,21	(11.975.114.990,79)	97,94
Jumlah Belanja Transfer	1.485.698.912.828,00	1.456.104.030.698,21	(29.594.882.129,79)	98,01
Jumlah	6.016.543.491.245,00	5.708.080.855.492,41	(308.462.635.752,59)	94,87

Sumber: BPKA DIY, 2024

c) *Realisasi Pembiayaan*

(1) *Penerimaan Pembiayaan*

Pada tahun anggaran 2023 Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp466.271.562.955,00 dengan realisasi Rp465.555.386.955,24 atau 99,85%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pembiayaan daerah kurang dari anggaran sebesar Rp716.175.999,76. Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp462.271.562.955,00 realisasi sebesar Rp462.271.562.955,24 atau 100%, dan Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp3.283.824.000,00 atau 82,10%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp716.176.000,00. Anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.28. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 (*Unaudited*)

Uraian	Tahun 2023			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	462.271.562.955,00	462.271.562.955,24	0,24	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	3.283.824.000,00	(716.176.000,00)	82,10
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	466.271.562.955,00	465.555.386.955,24	(716.175.999,76)	99,85

Sumber: BPKA DIY, 2024

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengeluaran Pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp305.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp305.000.000.000,00 atau 100%. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut digunakan untuk penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp300.000.000.000,00, dan pemberian pinjaman daerah dalam bentuk dana bergulir kepada Masyarakat melalui Lembaga keuangan non bank (BUKP) sebesar Rp5.000.000.000,00. Berikut anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2023:

Tabel 1.29. Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 (*Unaudited*)

Uraian	Tahun 2023			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	-	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00

Uraian	Tahun 2023			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	305.000.000.000,00	305.000.000.000,00	-	100,00

Sumber: BPKA DIY, 2024







BAB II

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Dalam Perubahan APBD

LKPJ
Gubernur DIY

Tahun

2023

BAB II

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Dalam Perubahan APBD

2023

A. PERUBAHAN TERHADAP KEGIATAN

Perencanaan pembangunan Tahun 2023 telah disusun pada Tahun Anggaran 2022 melalui Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2023, Pemda DIY memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, meliputi:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2023 dari masing-masing kegiatan;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2023 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Perubahan terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dilakukan pada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Penyesuaian belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan yang bersumber dari DAK sebagai tindak lanjut peraturan dari Pusat
2. Penyesuaian terhadap pergeseran baik antar obyek belanja, rincian objek sampai dengan sub rincian objek;
3. Penyesuaian terhadap Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai;
4. Penambahan anggaran terhadap kegiatan yang bersifat wajib mengikat;
5. Efisiensi dan rasionalisasi;
6. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023

B. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan Pendapatan Daerah yang harus dilakukan secara optimal dan akuntabel sesuai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu modal dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah adalah dengan peningkatan pendapatan daerah. Profil kemampuan keuangan Pemerintah Daerah akan tercermin dari PAD yang diperoleh, semakin besar persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil.

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Daerah terdiri atas PAD, dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan Pemerintah Daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Untuk meningkatkan pendapatan daerah diperlukan upaya-upaya inovasi

Terkait Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah, profil pendapatan daerah di DIY meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup empat komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana keistimewaan;

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang ditempuh dalam merealisasikan target penerimaan PAD adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI pada tataran kebijakan, dengan Kepolisian Daerah DIY dan kabupaten/kota di DIY termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan PAD;
- c. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak, meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak dan Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah;
- d. Melakukan koordinasi dengan OPD yang memiliki pendapatan dalam rangka pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas pemungutan PAD;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pemungut dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak dan retribusi daerah;
- f. Menerapkan sistem informasi berbasis teknologi dalam penatausahaan pendapatan daerah diantaranya melalui;
 - 1) Pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 2) Memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi info pkb diy serta melalui pesan Whatsapp, melakukan optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital termasuk melalui e-ticketing di Museum Sonobudoyo dan pembayaran pajak melalui *e-commerce*.

- g. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak daerah;
- h. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pemberian reward kepada Kalurahan yang taat pajak;
- i. Penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui berbagai media, baik media sosial, media cetak, dan media elektronik;
- j. Melaksanakan optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset serta meningkatkan fasilitas serta sarana terkait pendapatan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran demi peningkatan PAD;
- k. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD; serta
- l. Optimalisasi Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

Pengelolaan pendapatan transfer perlu dilaksanakan dengan cermat karena sumber pendapatan ini berasal dari pemerintah pusat dengan kebijakan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perpanjangan tangan pemerintah pusat terkait dengan penyaluran pendapatan transfer ke daerah.
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap penyaluran dan pengelolaan pendapatan transfer.
- c. Pelaporan dengan data yang valid serta tepat waktu untuk kebutuhan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Keistimewaan;

- d. Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri dari kelompok pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target pendapatan Pemda DIY pada APBD DIY tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp5.855.271.928.290,00 yang kemudian terealisasi sebesar Rp5.840.561.001.091,65 (capaian 99,75%). Atas hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran dengan selisih kurang sebesar Rp14.710.927.198,35. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah per jenis pendapatan tahun anggaran 2023:

Tabel 2.1. Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2023 (*Unaudited*)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
	2023	2023		
PENDAPATAN DAERAH	5.855.271.928.290,00	5.840.561.001.091,65	(14.710.927.198,35)	99,75
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.368.708.585.703,00	2.368.679.166.252,65	(29.419.450,35)	100,00
Pajak Daerah	2.088.941.497.868,00	2.069.612.267.000,57	(19.329.230.867,43)	99,07
Retribusi Daerah	33.564.359.756,00	33.213.267.052,00	(351.092.704,00)	98,95
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	109.070.217.574,00	109.790.680.460,56	720.462.886,56	100,66
Lain-lain PAD yang Sah	137.132.510.505,00	156.062.951.739,52	18.930.441.234,52	113,80
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.368.708.585.703,00	2.368.679.166.252,65	(29.419.450,35)	100,00
PENDAPATAN TRANSFER	3.478.957.842.587,00	3.463.926.176.823,00	(15.031.665.764,00)	99,57
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.478.121.936.167,00	3.463.090.270.403,00	(15.031.665.764,00)	99,57
Pendapatan Transfer Antar Daerah	835.906.420,00	835.906.420,00	-	100,00
Total Pendapatan Transfer	3.478.957.842.587,00	3.463.926.176.823,00	(15.031.665.764,00)	99,57

Uraian	Anggaran	Realisasi	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
	2023	2023		
LAIN-LAIN PENDAPATAN	7.605.500	7.955.658	350.158	104,60
DAERAH YANG SAH	.000,00	.016,00	.016,00	
Pendapatan Hibah	7.605.500	7.950.630	345.130	104,54
	.000,00	.000,00	.000,00	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		5.028 .016,00	5.028 .016,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan	7.605.500	7.955.658	350.158	104,60
Daerah yang Sah	.000,00	.016,00	.016,00	
JUMLAH PENDAPATAN	5.855.271.928	5.840.561.001	(14.710.927	99,75
	.290,00	.091,65	.198,35)	

Sumber: BPKA DIY, 2023

Berikut penjelasan atas anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan tahun anggaran 2023:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian daerah, kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer. Pendapatan daerah tahun 2023 didominasi dari pendapatan asli daerah sebesar 40,56%, pendapatan transfer sebesar 59,31%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,14%. Pada tahun anggaran 2023 tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah yang ditunjukkan dalam rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan angka 68,38% sehingga pemerintah daerah DIY dikategorikan dalam kemampuan keuangan sedang.

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.368.708.585.703,00 dan realisasi sebesar Rp2.368.679.166.252,65 atau 100%, akan tetapi terdapat selisih kurang dari anggaran sebesar Rp29.419.450,35. PAD Tahun 2023 masih didominasi penerimaan Pajak Daerah (87,37%), Retribusi Daerah (1,40%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah (4,64%), dan Lain-Lain PAD yang sah (6,59%).

Anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah per jenis pendapatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2023 (*Unaudited*)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.368.708.585 .703,00	2.368.679.166 .252,65	(29.419 .450,35)	100,00
Pajak Daerah	2.088.941.497 .868,00	2.069.612.267 .000,57	(19.329.230 .867,43)	99,07
Retribusi Daerah	33.564.359 .756,00	33.213.267 .052,00	(351.092 .704,00)	98,95
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	109.070.217 .574,00	109.790.680 .460,56	720.462 .886,56	100,66
Lain-lain PAD yang Sah	137.132.510 .505,00	156.062.951 .739,52	18.930.441 .234,52	113,80
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.368.708.585 .703,00	2.368.679.166 .252,65	(29.419 .450,35)	100,00

Sumber: BPKA DIY, 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa target PAD tahun anggaran 2023 telah tercapai sebesar 100%. Namun juga terdapat jenis pendapatan yang tidak tercapai yaitu Pajak Daerah dengan realisasi sebesar 99,07% dan Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar 98,95%. Hal ini dikarenakan khusus Pajak Rokok terdapat penurunan penerimaan cukai hasil tembakau. Anggaran dan realisasi per jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) *Pajak Daerah*

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.088.941.497.868,00 dan realisasi sebesar Rp2.069.612.267,000,57 atau 99,07%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp19.329.230.867,43. Anggaran dan realisasi pajak daerah menurut obyek pendapatan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran	Realisasi	Kurang/Lebih Anggaran Rp)	%
1	Pajak Daerah				
a	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	974.677.970 .600,00	978.969.042 .100,00	4.291.071 .500,00	100,44
b	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	439.737.136 .300,00	440.843.761 .300,00	1.106.625 .000,00	100,25
c	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	369.593.604 .698,00	369.593.604 .698,57	0,57	100,00
d	Pajak Air Permukaan	521.327 .500,00	612.386 .532,00	91.059 .032,00	117,47
e	Pajak rokok	304.411.458 .770,00	279.593.472 .370,00	(24.817.986 .400,00)	91,85
	Jumlah	2.088.941.497 .868,00	2.069.612.267 .000,57	(19.329.230 .867,43)	99,07

Sumber: BPKA DIY, 2023

Terlihat dari uraian tabel di atas, bahwa Realisasi Pajak Daerah yang belum sesuai target adalah dari Pajak Rokok dengan realisasi sebesar 91,85% dari target yang telah ditetapkan

2) *Retribusi Daerah*

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, definisi retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Obyek Retribusi Daerah yang dikelola oleh Pemda DIY terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi

Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Pengolahan limbah cair, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp33.564.359.756,00 dan realisasi sebesar Rp33.213.267.052,00 atau 98,95% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp351.092.704,00. Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah per rincian obyek pendapatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
a	Retribusi Jasa Umum	13.953.216	14.067.477	114.261	100,82
		.083,00	.391,00	.308,00	
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	52.203	189.475	137.272	362,96
		.000,00	.000,00	.000,00	
b	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.812.027	4.706.980	(105.046	97,82
		.083,00	.391,00	.692,00)	
c	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	866.984	1.023.690	156.706	118,07
		.000,00	.000,00	.000,00	
d	Retribusi Pelayanan Pendidikan	8.222.002	8.147.332	(74.670	99,09
		.000,00	.000,00	.000,00)	
b	Retribusi Jasa Usaha	19.588.703	19.123.024	(465.679	97,62
		.673,00	.661,00	.012,00)	
a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.805.645	9.683.316	1.877.670	124,06
		.623,00	.086,00	.463,00	
b	Retribusi Terminal	371.048	388.778	17.730	104,78
		.000,00	.000,00	.000,00	

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
c	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.615.071 .000,00	1.760.726 .000,00	145.655 .000,00	109,02
d	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	468.255 .000,00	603.180 .000,00	134.925 .000,00	128,81
e	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	105.480 .500,00	124.999 .000,00	19.518 .500,00	118,50
f	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.180.469 .000,00	3.422.890 .000,00	1.242.421 .000,00	156,98
g	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	7.042.734 .550,00	3.139.135 .575,00	(3.903.598 .975,00)	44,57
c	Retribusi Perizinan Tertentu	22.440 .000,00	22.765 .000,00	325 .000,00	101,45
a	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	19.740 .000,00	22.440 .000,00	2.700 .000,00	113,68
b	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	2.700 .000,00	325 .000,00	(2.375 .000,00)	12,04
	Jumlah	33.564.359 .756,00	33.213.267 .052,00	(351.092 .704,00)	98,95

Sumber: BPKA DIY, 2023

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah secara umum telah melampaui target anggaran yang ditetapkan, namun terdapat beberapa retribusi yang tidak mencapai target yaitu:

- a) Retribusi jasa umum berupa Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari anggaran sebesar Rp4.812.027.083,00 terealisasi sebesar Rp4.706.980.391,00 atau 97,82%. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penutupan TPA Piyungan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember yang mengakibatkan realisasi tidak tercapai sesuai target yang ditentukan

- b) Retribusi jasa umum berupa Retribusi pelayanan Pendidikan dari anggaran Rp8.222.002.000,00 realisasi Rp8.147.332.000,00 atau 99,09%. Hal ini disebabkan karena kegiatan pelatihan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja banyak dilakukan secara daring, meskipun ada tarif yang dikenakan namun pencatatan realisasinya bukan pada retribusi daerah. Pada Badan Kepegawaian Daerah juga terjadi beberapa uji kompetensi yang dibatalkan sehingga penerimaannya tidak bisa maksimal
- c) Retribusi jasa usaha berupa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dari anggaran Rp7.042.734.550,00 hanya terealisasi Rp3.139.135.575,00 atau 44,57%. Hal ini disebabkan karena rendahnya minat daya beli terhadap minyak kayu putih, dan ada sejenis minyak kayu putih yang harganya lebih murah di pasaran, yang menyebabkan volume penjualan menurun.
- d) Retribusi pemberian Izin kegiatan usaha penangkapan ikan dari anggaran Rp2.700.000,00 hanya terealisasi Rp325.000,00 atau 12,04%.

3) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yaitu:

- a) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN (PT. Asuransi Bangun Askrida)
- b) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan) (BUKP dan PT. Bank BPD DIY)

- c) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) (PT. AMI dan PT. Taru Martani)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp109.070.217.574,00 dan direalisasikan sebesar Rp109.790.680.460,56 atau 100,66%, sehingga realisasi melebihi dari target anggaran sebesar Rp720.462.886,56. Anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per rincian obyek tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran	Realisasi	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
a	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	209.497.429,00	209.497.429,00	-	100,00
	- PT Asuransi Bangun Askrida	209.497.429,00	209.497.429,00	-	100,00
b	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	102.473.198.838,00	103.220.503.521,56	747.304.683,56	100,73
	- BUKP	3.250.000.000,00	3.997.304.683,56	747.304.683,56	122,99
	- PT Bank BPD DIY	99.223.198.838,00	99.223.198.838,00	-	100,00
c	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka usaha)	6.387.521.307,00	6.360.679.510,00	(26.841.797,00)	99,58
	- PT AMI	751.612.284,00	724.770.494,00	(26.841.790,00)	96,43

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran	Realisasi	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
	- PT Taru Martani	5.635.909 .023,00	5.635.909 .016,00	(7,00)	100,00
	Jumlah	109.070.217 .574,00	109.790.680 .460,56	720.462 .886,56	100,66

Sumber: BPKA DIY, 2023

4) *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD Yang Sah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp137.132.510.505,00 dan realisasi sebesar Rp156.062.951.739,52 atau 113,80%, sehingga terdapat surplus realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp18.930.441.234,52. Anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2023 per rincian obyek pendapatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah DIY Tahun 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
a	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	325.735 .000,00	584.945 .979,00	259.210 .979,00	179,58
b	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	1.513.900 .000,00	2.330.982 .569,00	817.082 .569,00	153,97
c	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	128.102 .000,00	570.340 .000,00	442.238 .000,00	445,22
d	Hasil Penjualan Aset Lainnya	486.396 .969,00	619.037 .100,00	132.640 .131,00	127,27
e	Hasil Sewa BMD	13.589.786 .400,00	14.741.964 .505,00	1.152.178 .105,00	108,48
f	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	2.027.307 .441,00	2.785.097 .751,00	757.790 .310,00	137,38
g	Jasa Giro pada Kas Daerah	8.000.000	5.388.709	(2.611.290)	67,36

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
		.000,00	.174,00	.826,00)	
h	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	149.598	428.572	278.973	286,48
		.308,00	.186,00	.878,00	
j	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	100.223	100.265	41	100,04
		.759,00	.506,77	.747,77	
j	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.385.458	18.904.579	5.519.120	141,23
		.544,00	.186,00	.642,00	
k	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	8.000	8.000	
			.000,00	.000,00	
l	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	135	609	474	451,79
		.000,00	.917,00	.917,00	
m	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	327.455	821.835	494.379	250,98
		.631,00	.137,00	.506,00	
n	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	50.000.000	53.372.068	3.372.068	106,74
		.000,00	.600,00	.600,00	
o	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	843.524	1.060.233	216.709	125,69
		.350,00	.750,00	.400,00	
p	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	356	356	-	100,00
		.848,00	.848,00		
q	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	38.470	42.859	4.388	111,41
		.930,00	.740,00	.810,00	
r	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	75.335	182.984	107.648	242,89
		.570,00	.070,00	.500,00	
s	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.863.128	3.781.347	1.918.219	202,96
		.054,00	.486,75	.432,75	
t	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	190.633	396.731	206.098	208,11
		.051,00	.581,00	.530,00	
u	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	6.680	34.292	27.611	513,32
		.552,00	.352,00	.800,00	
v	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	51.963	61.684	9.721	118,71
		.098,00	.648,00	.550,00	

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
	Pembayaran Belanja Pemeliharaan				
w	Pendapatan dari	-	9.971	9.971	
	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung		.769,00	.769,00	
x	Pendapatan BLUD	43.973.198.000,00	49.376.262.884,00	5.403.064.884,00	112,29
y	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		71.000.000,00	71.000.000,00	
z	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	55.121.000,00	388.219.000,00	333.098.000,00	704,30
	Jumlah	137.132.510.505,00	156.062.951.739,52	18.930.441.234,52	113,80

Sumber: BPKA DIY, 2023

b. Pendapatan Transfer

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana keistimewaan. Transfer antar daerah terdiri dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pendapatan transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.478.957.842.587,00 dan realisasi sebesar Rp3.463.090.270.403,00 atau 99,57%, sehingga terdapat kekurangan realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.031.665.764,00. Anggaran dan realisasi pendapatan transfer per rincian obyek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer DIY Tahun Anggaran 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
a	Dana Bagi hasil	99.850.751 .272,00	106.084.972 .357,00	6.234.221 .085,00	106,24
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.267.722.324 .000,00	1.267.622.165 .192,00	(100.158 .808,00)	99,99
c	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	147.518.081 .000,00	134.151.614 .382,00	(13.366.466 .618,00)	90,94
d	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	509.428.815 .672,00	501.629.554 .248,00	(7.799.261 .424,00)	98,47
e	Dana Insentif Daerah (DID)	80.876.155 .000,00	80.876.155 .000,00	-	100,00
f	Dana Keistimewaan	1.372.725.809 .223,00	1.372.725.809 .224,00	1,00	100,00
	Jumlah	3.478.121.936 .167,00	3.463.090.270 .403,00	(15.031.665 .764,00)	99,57
2 Pendapatan Transfer Antar Daerah					
a	Bantuan Keuangan	835.906 .420,00	835.906 .420,00	-	100,00
	Jumlah	835.906 .420,00	835.906 .420,00	-	100,00
	Jumlah	3.478.957.842 .587,00	3.463.926.176 .823,00	(15.031.665 .764,00)	99,57

Sumber: BPKA DIY, 2023

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemda DIY terdiri dari: Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) fisik; Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) Non Fisik; Dana Insentif Daerah (DID); dan Dana Keistimewaan. Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp3.478.121.936.167,00 dengan realisasi Rp3.463.090.270.403,00 atau sebesar 99,57% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp15.031.665.764,00.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DIY Tahun Anggaran 2023 per rincian obyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DIY Tahun 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran(Rp)	%
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
a	Dana Bagi Hasil	99.850.751 .272,00	106.084.972 .357,00	6.234.221 .085,00	106,24
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.267.722.324 .000,00	1.267.622.165 .192,00	(100.158 .808,00)	99,99
c	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	147.518.081 .000,00	134.151.614 .382,00	(13.366.466 .618,00)	90,94
d	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	509.428.815 .672,00	501.629.554 .248,00	(7.799.261 .424,00)	98,47
e	Dana Insentif Daerah (DID)	80.876.155 .000,00	80.876.155 .000,00	-	100,00
f	Dana Keistimewaan	1.372.725.809 .223,00	1.372.725.809 .224,00	1,00	100,00
	Jumlah	3.478.121.936 .167,00	3.463.090.270 .403,00	(15.031.665 .764,00)	99,57
3 Pendapatan Transfer Antar Daerah					
a	Bantuan Keuangan	835.906 .420,00	835.906 .420,00	-	100,00
	Jumlah	835.906 .420,00	835.906 .420,00	-	100,00
	Jumlah	3.478.957.842 .587,00	3.463.926.176 .823,00	(15.031.665 .764,00)	99,57

Sumber: BPKA DIY, 2024

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil merupakan komponen dari dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar

Rp99.850.751.272,00 dengan realisasi sebesar Rp106.084.973.357,00 atau 106,24% sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp6.234.221.085,00. Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil per sub rincian objek tahun anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil tahun anggaran 2023 (Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran(Rp)	%
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	755.195.000,00	951.147.789,00	195.952.789,00	125,95
b	DBH PPh Pasal 21	86.797.183.000,00	91.018.441.712,00	4.221.258.712,00	104,86
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.763.727.000,00	8.977.648.728,00	1.213.921.728,00	115,64
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.450.067.272,00	5.044.330.272,00	594.263.000,00	113,35
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.555.000,00	4.848.340,00	2.293.340,00	189,76
f	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty		2.240.356,00	2.240.356,00	
g	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	82.024.000,00	86.315.160,00	4.291.160,00	105,23
Jumlah		99.850.751.272,00	106.084.972.357,00	6.234.221.085,00	106,24

Sumber: BPKA DIY, 2024

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Perimbangan terbesar pada Pemda DIY berasal dari DAU. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp1.267.722.324.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp1.267.622.165.192,00 atau 99,99% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp100.158.808,00. Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 (lampiran V) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dana alokasi umum dirinci menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya. DAU yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk penggajian formasi PPPK dan bidang pekerjaan umum. Rincian alokasi DAU tahun 2023 diklasifikasikan dalam 3 bagian yaitu: DAU yang tidak penggunaannya sebesar Rp1.206.102.520.000,00; DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK sebesar Rp45.114.804.000,00, dan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pekerjaan umum sebesar Rp16.505.000.000,00.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK fisik Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp147.518.081.000,00 direalisasikan sebesar Rp134.151.614.328,00 atau 90,94% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp13.366.466.618,00. Sedangkan realisasi DAK Non Fisik dianggarkan sebesar RpRp509.428.815.672,00 direalisasikan sebesar Rp501.629.554.248,00 atau 98,47% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp7.799.261.424,00. Berikut informasi anggaran dan realisasi DAK Fisik per sub rincian objek tahun anggaran 2023:

Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)				
a	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	13.906.148.000,00	11.710.453.398,00	(2.195.694.602,00)	84,21
b	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	6.074.321.000,00	5.234.118.503,00	(840.202.497,00)	86,17
c	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	60.609.135.000,00	55.685.192.641,00	(4.923.942.359,00)	91,88
d	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	20.048.877.000,00	17.328.640.312,00	(2.720.236.688,00)	86,43
e	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.397.336.000,00	1.964.094.150,00	(433.241.850,00)	81,93
f	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	35.657.263.000,00	35.547.565.584,00	(109.697.416,00)	99,69
g	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	8.825.001.000,00	6.681.549.794,00	(2.143.451.206,00)	75,71
	Jumlah	147.518.081.000,00	134.151.614.382,00	(13.366.466.618,00)	90,94

Sumber: BPKA DIY, 2024

Penyaluran DAK Fisik didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/ PMK.07/2021 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. DAK Fisik disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan nilai kontrak kegiatan.

Anggaran dan realisasi DAK Non Fisik per sub rincian objek pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY tahun anggaran 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)				
a	DAK Non Fisik-BOS Reguler	255.681.011 .914,00	254.105.494 .760,00	(1.575.517 .154,00)	99,38
b	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	8.232.500 .000,00	8.207.500 .000,00	(25.000 .000,00)	99,70
c	DAK Non Fisik-TPG PNSD	232.085.151 .000,00	225.936.904 .880,00	(6.148.246 .120,00)	97,35
d	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.236.250 .000,00	1.185.751 .850,00	(50.498 .150,00)	95,92
e	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000 .000,00	2.000.000 .000,00	-	100,00
f	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000 .000,00	2.000.000 .000,00	-	100,00
g	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.136.694 .031,00	3.136.694 .031,00	-	100,00
i	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	995.169 .000,00	995.169 .000,00	-	100,00
j	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	597.171 .250,00	597.171 .250,00	-	100,00
k	DAK Non Fisik-PK2UMK	3.464.868 .477,00	3.464.868 .477,00	-	100,00
	Jumlah	509.428.815 .672,00	501.629.554 .248,00	(7.799.261 .424,00)	98,47

Sumber: BPKA DIY, 2024

Realisasi DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Sekolah, TPG PNSD, dan Tamsil guru PNSD tahun anggaran 2023 tidak tercapai dikarenakan realisasi Penyaluran dana transfer dari pusat disesuaikan dengan data real yang dibuat oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tahun berkenaan.

d) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah merupakan insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar. Alokasi DID Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp80.876.155.000,00 dengan realisasi sebesar Rp80.876.155.000,00 atau 100%. Berdasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 tahun 2023 tentang rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan Masyarakat pada tahun anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemda DIY menerima tambahan alokasi insentif fiskal sebesar Rp12.147.741.000,00 untuk penurunan *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan investasi.

e) Dana Keistimewaan (DAIS)

Dana Keistimewaan (DAIS) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Alokasi Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp1.372.725.809.223,00 dengan realisasi sebesar Rp1.372.725.809.223,00 atau 100%.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ini merupakan sharing pembiayaan atas instalasi pengelolaan air limbah terpusat dimana pendapatan yang kita peroleh diperuntukan sepenuhnya untuk pengelolaan instalasi air limbah terpusat pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan Nomor 12/PK/Bt/2020 dan Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sesuai berita acara kontribusi (Sharing) biaya pengelolaan air limbah (IPAL) terpusat tahun anggaran 2023. Target Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp835.906.420,00 dengan realisasi sebesar Rp835.906.420,00 atau sebesar 100%.

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
a	Pemerintah Kota Yogyakarta	611.831.860,00	611.831.860,00	-	100,00
b	Pemerintah Kabupaten Bantul	100.151.140,00	100.151.140,00	-	100,00
c	Pemerintah Kabupaten Sleman	123.923.420,00	123.923.420,00	-	100,00
	Jumlah	835.906.420,00	835.906.420,00	-	300,00

Sumber: BPKA DIY, 2024

3) **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah; dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp7.605.500.000,00 dengan realisasi Rp7.955.658.016,00 atau 104,54% sehingga melebihi anggaran sebesar Rp350.158.016,00. Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut rincian obyek pendapatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY tahun anggaran 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	7.605.500.000,00	7.950.630.000,00	345.130.000,00	104,54
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	7.605.500.000,00	7.950.630.000,00	345.130.000,00	104,54
a	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	7.605.500.000,00	7.950.630.000,00	345.130.000,00	104,54
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	5.028.016,00	5.028.016,00	
a	Pendapatan atas Pengembalian Hibah		5.028.016,00	5.028.016,00	
	Jumlah	7.605.500.000,00	7.955.658.016,00	350.158.016,00	104,60

Sumber: BPKA DIY, 2024

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi.

Pendapatan hibah tahun anggaran 2023 terdiri Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi dalam negeri dianggarkan sebesar Rp7.605.500.000,00, realisasi sebesar Rp7.950.630.000,00 atau 104,54%. Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri tahun anggaran 2023 terdiri dari Dealer Otomotif dianggarkan sebesar Rp3.584.000.000,00, realisasi sebesar Rp3.929.130.000,00 atau 109,63%, Main Dealer dianggarkan sebesar Rp25.500.000,00, realisasi sebesar Rp25.500.000,00 atau 100%, dan Jasa raharja dianggarkan sebesar Rp3.996.000.000,00 realisasi sebesar 100%.

b) *Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp5.028.016,00. Pendapatan sebesar Rp5.028.016,00 berasal dari setoran oleh Yayasan kesejahteraan pekerja dan pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang semula Bernama Yayasan Dana Jaminan hari tua bagi pegawai Pemda DIY sebesar Rp629.000,00 dan Pengembalian hibah barang tahun sebelumnya dari DPU-ESDM akibat temuan pemeriksaan sebesar Rp4.399.016,00.

3. Permasalahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Pendapatan

a. Permasalahan

Pengelolaan Pendapatan Daerah selama tahun 2023 berjalan dengan baik, hanya ada sedikit permasalahan dan dapat ditindaklanjuti dengan solusi penyelesaian. Permasalahan tersebut ada pada sisi penatausahaan hingga pelaksanaannya. Adapun permasalahannya, antara lain:

- 1) Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk penatausahaan pendapatan baru dapat dilaksanakan secara penuh pada empat bulan terakhir di tahun anggaran 2023;
- 2) Kenaikan harga kendaraan bermotor baru, khususnya roda empat yang melebihi daya beli masyarakat, mengakibatkan masyarakat lebih memilih kendaraan bermotor roda dua dibandingkan roda empat, sehingga berpengaruh pada penerimaan bea balik nama kendaraan;
- 3) Kurangnya publikasi atas jasa layanan pemda yang berpotensi untuk meningkatkan retribusi daerah;

- 4) Penerapan penerimaan secara non tunai yang masih kurang dari sektor retribusi daerah.

b. Solusi

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, secara bertahap telah dilakukan upaya penyelesaiannya antara lain:

- 1) Mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI terkait aplikasi SIPD modul penatausahaan;
- 2) Menyelenggarakan kerjasama dengan dealer otomotif roda empat dalam kegiatan Pemda DIY, kerjasama tersebut berbentuk pameran otomotif roda empat;
- 3) Meningkatkan publikasi atas layanan pendapatan daerah yang diberikan termasuk mengoptimalkan publikasi melalui media sosial;
- 4) Melakukan optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal pembayaran digital.

C. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, di antaranya dalam penggunaan DAU dan DBH diarahkan untuk penggajian formasi PPPK, bidang pekerjaan umum serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, penggunaan DID diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi, penggunaan DAK sesuai petunjuk teknis masing-masing kementerian/lembaga teknis, penggunaan DBH-CHT diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, dan pemulihan perekonomian di daerah, serta memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan penggunaan belanja.

Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY, yaitu:

- a. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan yang bersumber dari DAK sebagai tindak lanjut peraturan dari Pusat, yaitu:
 - 1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil;
 - 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - 4) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023;
 - 5) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.01/I/10217/2022 tentang Pemetaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023; dan
 - 6) Berita Acara Pembahasan Pemetaan DAK Non Fisik Jenis Kesehatan Tahun 2022 tanggal 15 November Tahun 2021.
- b. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 pada Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Urusan/Kewenangan Kebudayaan, Urusan/Kewenangan Pertanahan, dan Urusan/Kewenangan Tata

Ruang dalam rangka optimalisasi anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023.

- c. Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan pegawai dengan realisasi gaji Bulan Juli Tahun 2023.
- d. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.
- e. Belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota disesuaikan dengan target penerimaan pajak daerah dan memperhitungkan kelebihan penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022.
- f. Adanya penyesuaian penggunaan SiLPA yang bersumber dari dana transfer yang ditentukan penggunaannya dan penyesuaian dari SiLPA BLUD.

Belanja daerah dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp6.016.543.491.245,00 dengan realisasi sebesar Rp5.708.080.855.892,41 atau terealisasi sebesar 94,87%. Berikut resume alokasi dan realisasi belanja tersebut:

- a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.721.718.798.489,00 dengan realisasi sebesar Rp3.506.378.070.981,20 atau terealisasi sebesar 94,21%.
- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp787.127.650.315,00 dengan realisasi sebesar Rp745.400.266.545,00 atau terealisasi sebesar 94,70%.
- c. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp21.998.129.613,00 dengan realisasi sebesar Rp198.487.268,00 atau terealisasi sebesar 0,90%.
- d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp1.485.698.912.828,00 dengan realisasi sebesar Rp1.456.104.030.698,21 atau terealisasi sebesar 98,01%.
- e. Belanja Dana Keistimewaan dianggarkan sebesar Rp1.420.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.396.163.539.431,75 atau terealisasi sebesar 98,32%.

2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja daerah tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp6.016.543.491.245,00, realisasi sebesar Rp5.708.080.855.492,41 atau 94,87%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp308.462.635.752,29. Belanja daerah digunakan dalam membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan serta dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Belanja tahun 2023 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran, dengan rincian anggaran dan belanja sebagai berikut:

Tabel 2.14. Anggaran dan Realisasi Belanja menurut OPD DIY tahun anggaran 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.618.640.835.262,00	1.556.296.936.999,00	(62.343.898.263,00)	96,15
2	Dinas Kesehatan	382.087.549.154,00	283.756.976.586,20	(98.330.572.567,80)	74,26
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	552.139.114.376,00	521.428.778.825,00	(30.710.335.551,00)	94,44
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	24.749.219.000,00	23.701.129.040,00	(1.048.089.960,00)	95,77
5	Satuan Polisi Pamong Praja	44.177.765.600,00	43.874.506.599,00	(303.259.001,00)	99,31
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.331.969.211,00	21.490.296.699,00	(841.672.512,00)	96,23
7	Dinas Sosial	91.580.305.849,00	89.318.655.612,00	(2.261.650.237,00)	97,53
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	20.283.633.181,00	19.477.288.532,00	(806.344.649,00)	96,02

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
	Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk				
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	89.899.924.667,00	85.118.963.301,00	(4.780.961.366,00)	94,68
10	Dinas Perhubungan	118.586.846.271,00	107.835.917.492,00	(10.750.928.779,00)	90,93
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.079.079.458,00	42.807.973.487,00	(271.105.971,00)	99,37
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	168.607.173.789,00	166.366.593.255,00	(2.240.580.534,00)	98,67
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.518.141.956,00	12.257.864.336,00	(260.277.620,00)	97,92
14	Dinas Kebudayaan	370.452.288.591,00	364.023.853.491,00	(6.428.435.100,00)	98,26
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	39.375.136.447,00	38.355.923.895,00	(1.019.212.552,00)	97,41
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	74.814.982.188,00	72.266.903.160,00	(2.548.079.028,00)	96,59
17	Dinas Pariwisata	38.577.323.413,00	37.927.927.780,00	(649.395.633,00)	98,32
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	118.413.740.928,00	113.882.734.619,00	(4.531.006.309,00)	96,17
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	52.246.564.760,00	50.939.273.835,00	(1.307.290.925,00)	97,50
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	56.797.521.047,00	56.001.416.368,00	(796.104.679,00)	98,60
21	Sekretariat Daerah	149.502.683.026,00	144.225.423.238,00	(5.277.259.788,00)	96,47
22	Sekretariat DPRD	132.046.355.298,00	123.407.532.422,00	(8.638.822.876,00)	93,46
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.672.969.651,00	21.575.052.621,00	(1.097.917.030,00)	95,16
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.617.715.591.343,00	1.564.688.622.422,21	(53.026.968.920,79)	96,72
25	Badan Kepegawaian Daerah	35.638.176.047,00	32.696.842.952,00	(2.941.333.095,00)	91,75
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan	24.677.311.001,00	21.730.619.263,00	(2.946.691.738,00)	88,06
27	Badan Penghubung Daerah	12.150.946.068,00	11.926.143.895,00	(224.802.173,00)	98,15

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
28	Inspektorat	25.097.426.893,00	24.117.893.470,00	(979.533.423,00)	96,10
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.555.721.047,00	29.791.832.848,00	(763.888.199,00)	97,50
30	Paniradya Kaistimewan	27.127.195.723,00	26.790.978.450,00	(336.217.273,00)	98,76
Jumlah		6.016.543.491.245,00	5.708.080.855.492,41	(308.462.635.752,59)	94,87

Sumber: BPKA DIY, 2024

Belanja tahun anggaran 2023 dapat dirinci sesuai dengan kelompok belanja sebagai berikut:

Tabel 2.15. Realisasi Belanja DIY Tahun 2023 (Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Operasi	3.721.718.798.489,00	3.506.378.070.981,20	(215.340.727.507,80)	94,21
2	Belanja Modal	787.127.650.315,00	745.400.266.545,00	(41.727.383.770,00)	94,70
3	Belanja Tidak Terduga	21.998.129.613,00	198.487.268,00	(21.799.642.345,00)	0,90
4	Belanja Transfer	1.485.698.912.828,00	1.456.104.030.698,21	(29.594.882.129,79)	98,01
Jumlah		6.016.543.491.245,00	5.708.080.855.492,41	(308.462.635.752,59)	94,87

Sumber: BPKA DIY, 2024

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang Jasa; (3) Belanja Subsidi; (4) Belanja Hibah; (5) Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.721.718.798.489,00 realisasi sebesar Rp3.506.378.070.981,20 atau 94,21%. Sehingga kurang dari anggaran

sebesar Rp215.340.727.507,80. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi sesuai dengan jenis belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi DIY Tahun Anggaran 2023 (Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Rencana	Realisasi	Selisih (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.632.174.635 .343,00	1.572.346.950 .277,00	59.827.685 .066,00	96,33
2	Belanja Barang dan Jasa	1.370.269.758 .830,00	1.246.181.407 .244,20	124.088.351 .585,80	90,94
3	Belanja subsidi	85.553.295 .477,00	75.470.221 .902,00	10.083.073 .575,00	88,21
4	Belanja Hibah	604.259.784 .839,00	584.093.037 .626,00	20.166.747 .213,00	96,66
5	Belanja Bantuan Sosial	29.461.324 .000,00	28.286.453 .932,00	1.174.870 .068,00	96,01
Jumlah		3.721.718.798 .489,00	3.506.378.070 .981,20	215.340.727 .507,80	94,21

Sumber: BPKA DIY, 2024

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Belanja Pegawai juga menampung uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya, belanja pegawai BLUD, dan honorarium yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Belanja Pegawai tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.632.174.635.343,00, realisasi sebesar Rp1.572.346.950.277,00 atau 96,33%. Sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp59.827.685.066,00. Berikut adalah anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023:

Tabel 2.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIY Tahun 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	653.385.540 .777,00	627.180.828 .764,00	26.204.712 .013,00	95,99
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	50.552.646 .568,00	46.996.336 .883,00	3.556.309 .685,00	92,97
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.068.151 .002,00	8.217.817 .000,00	1.850.334 .002,00	81,62
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	40.404.883 .066,00	34.366.314 .966,00	6.038.568 .100,00	85,05
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.264.265 .000,00	8.226.105 .000,00	38.160 .000,00	99,54
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	29.538.859 .041,00	27.151.214 .238,00	2.387.644 .803,00	91,92
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.852.076 .760,00	1.841.733 .844,00	10.342 .916,00	99,44
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.387 .722,00	7.164 .861,00	1.222 .861,00	85,42
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	51.698.437 .887,00	50.045.431 .303,00	1.653.006 .584,00	96,80
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.348.391 .373,00	1.275.716 .235,00	72.675 .138,00	94,61
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.655.434 .198,00	3.455.509 .143,00	199.925 .055,00	94,53
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	183.300.332 .074,00	181.610.009 .886,00	1.690.322 .188,00	99,08
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.964.683 .468,00	6.872.157 .200,00	92.526 .268,00	98,67
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	28.243 .401,00	28.240 .100,00	3 .301,00	99,99
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	235.560.288 .488,00	233.583.529 .160,00	1.976.759 .328,00	99,16
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	53.535.901 .173,00	53.520.261 .348,00	15.639 .825,00	99,97
17	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.006.335 .448,00	808.509 .541,00	197.825 .907,00	80,34

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
18	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	232.085.151 .000,00	220.432.261 .700,00	11.652.889 .300,00	94,98
19	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.236.250 .000,00	958.262 .500,00	277.987 .500,00	77,51
20	Belanja Honorarium	2.972.710 .000,00	2.837.525 .000,00	135.185 .000,00	95,45
21	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.807.875 .000,00	1.791.945 .000,00	15.930 .000,00	99,12
22	Belanja Uang Representasi DPRD	1.735.500 .000,00	1.728.750 .000,00	6.750 .000,00	99,61
23	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	185.530 .750,00	153.480 .000,00	32.050 .750,00	82,72
24	Belanja Tunjangan Beras DPRD	148.053 .600,00	120.651 .720,00	27.401 .880,00	81,49
25	Belanja Uang Paket DPRD	148.560 .000,00	148.110 .000,00	450 .000,00	99,70
26	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.516.475 .000,00	2.506.687 .500,00	9.787 .500,00	99,61
27	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	234.030 .000,00	231.650 .550,00	2.379 .450,00	98,98
28	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	71.688 .000,00	38.526 .863,00	33.161 .137,00	53,74
29	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.810.000 .000,00	9.780.000 .000,00	30.000 .000,00	99,69
30	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.460.000 .000,00	2.430.000 .000,00	30.000 .000,00	98,78
31	Belanja Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	86.402 .700,00	79.115 .819,00	7.286 .881,00	91,57
32	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	13.794.780 .259,00	13.745.876 .740,00	48.903 .519,00	99,65
33	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.640.000 .000,00	10.605.000 .000,00	35.000 .000,00	99,67
34	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	36.600 .000,00	36.600 .000,00	-	100,00
35	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.870 .000,00	75.600 .000,00	270 .000,00	99,64

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
36	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.587.000,00	7.560.000,00	27.000,00	99,64
37	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	-	100,00
38	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	4.055.520,00	-	100,00
39	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.501.541,00	4.489.036,00	12.505,00	99,72
40	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.680,00	1.680,00	-	100,00
41	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.516.800,00	7.516.800,00	-	100,00
42	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	-	100,00
43	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	-	100,00
44	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	348.000.000,00	348.000.000,00	-	100,00
45	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.514.000.000,00	3.214.000.000,00	300.000.000,00	91,46
46	Belanja Pegawai BLUD	16.933.936.967,00	15.737.702.297,00	1.196.234.670,00	92,94
Jumlah		1.632.174.635.343,00	1.572.346.950.277,00	59.827.685.066,00	96,33

Sumber: BPKA DIY, 2024

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain yang meliputi belanja barang berupa barang pakai habis, dan barang tak habis pakai. Belanja Jasa berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi.

Belanja pemeliharaan berupa belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri serta belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Anggaran Belanja barang dan Jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.370.269.758.830,00 realisasi sebesar Rp1.246.181.407.244,20 atau 90,94%. Sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp124.088.351.585,80.

Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2023 (Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	268.902.286 .525,00	257.329.530 .883,00	(11.572.755 .642,00)	95,70
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	30.990 .200,00	28.761 .200,00	(2.229 .000,00)	92,81
3	Belanja Jasa Kantor	486.211.283 .814,00	465.721.276 .039,00	(20.490.007 .775,00)	95,79
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	84.976.093 .444,00	48.064.553 .869,00	(36.911.539 .575,00)	56,56
5	Belanja Sewa Tanah	2.163.620 .700,00	1.971.370 .897,00	(192.249 .803,00)	91,11
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.542.088 .700,00	28.216.151 .533,00	(2.325.937 .167,00)	92,38
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.123.250 .345,00	20.209.619 .223,00	(1.913.631 .122,00)	91,35
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	242.000 .000,00	241.525 .500,00	(474 .500,00)	99,80
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.342.939 .700,00	4.234.901 .410,00	(108.038 .290,00)	97,51
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.996.761 .192,00	15.415.012 .845,00	(581.748.347,0 0)	96,36
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	26.480.916 .255,00	25.561.124 .621,00	(919.791 .634,00)	96,53

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.082.717.000,00	1.999.725.700,00	(82.991.300,00)	96,02
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.325.588.000,00	4.053.244.525,00	(272.343.475,00)	93,70
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.138.615.515,00	1.938.671.823,00	(199.943.692,00)	90,65
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.722.789.831,00	18.104.515.481,00	(618.274.350,00)	96,70
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.988.211.049,00	33.136.794.688,00	(851.416.361,00)	97,49
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.275.022.436,00	30.939.068.436,00	(335.954.000,00)	98,93
18	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.077.135.000,00	1.064.668.783,00	(12.466.217,00)	98,84
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	80.000.000,00	39.998.850,00	(40.001.150,00)	50,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.899.583.054,00	101.230.963.249,00	(10.668.619.805,00)	90,47
21	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	9.768.527.200,00	7.422.418.784,00	(2.346.108.416,00)	75,98
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.616.568.700,00	38.950.945.900,00	(665.622.800,00)	
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	112.227.337.033,00	111.698.238.045,00	(529.098.988,00)	99,53
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.055.433.137,00	28.608.324.960,20	(32.447.108.176,80)	46,86
Jumlah		1.370.269.758.830,00	1.246.181.407.244,20	(124.088.351.585,80)	90,94

Sumber: BPKA DIY, 2024

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp85.553.295.477,00 dan realisasi sebesar Rp72.548.542.632,00 atau sebesar 92,48%. Sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp10.083.073.575,00. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN,

BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

Belanja Subsidi pada Pemda DIY tahun 2023 diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAB) Tirtatama yang bertugas dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih dan PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pemberian subsidi pada PDAB Tirtatama mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Pada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama dan dalam pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI diatur dalam Pergub Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service*.

4) **Belanja Hibah**

Belanja Hibah pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp604.259.784.839,00 dengan realisasi sebesar Rp584.093.037.626,00 atau 96,66%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp20.166.747.213,00. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan sebesar Rp372.634.563.000,00 dan realisasinya sebesar Rp368.129.437.925,00 atau 98,79%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp4.505.125.075,00. Hibah dalam bentuk barang dianggarkan sebesar Rp231.625.221.839,00 dan

realisasinya sebesar Rp215.963.599.701,00 atau 93,24%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp15.661.622.138,00.

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang barang, dan jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah yang diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Hibah Dana BOS yang diterima oleh Sat Dikmen dan Sat Diskus swasta, dan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Belanja Hibah barang diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19. Realisasi Belanja Hibah dalam Bentuk Uang Tahun Anggaran 2023 (Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	57.497.348.000,00	54.480.013.215,00	(3.017.334.785,00)	94,75

No	Uraian	Tahun 2023			
		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
	Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	169.690.000 .000,00	169.690.000 .000,00	0,00	100,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	28.816.500 .000,00	28.816.500 .000,00	0,00	100,00
4	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sat Dikmen Swasta	88.979.520 .000,00	87.537.709 .005,00	(1.441.810 .995,00)	98,38
5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	17.315.620 .000,00	17.269.640 .705,00	(45.979 .295,00)	99,73
6	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	10.335.575 .000,00	10.335.575 .000,00	0,00	100,00
	Jumlah	372.634.563 .000,00	368.129.437 .925,00	(4.505.125 .075,00)	98,79

Sumber: BPKA DIY, 2024

Tabel 2.20. Realisasi Belanja Hibah dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran 2023
(Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	43.739.329 .019,00	40.047.845 .525,00	(3.691.483 .494,00)	91,56
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah	20.293.100 .200,00	20.094.724 .300,00	(198.375 .900,00)	99,02

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
	Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
3	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	167.592.792.620,00	155.821.029.876,00	(11.771.762.744,00)	92,98
	Jumlah	231.625.221.839,00	215.963.599.701,00	(15.661.622.138,00)	93,24

Sumber: BPKA DIY, 2024

5) **Belanja Bantuan Sosial**

Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp29.461.324.000,00 realisasi sebesar Rp28.286.453.932,00 atau 96,01%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp1.174.870.068,00.

Belanja bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang tahun anggaran 2023 berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya). Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang tahun anggaran 2023 berupa Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu dan belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang Tahun 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.104.600.000,00	1.104.600.000,00	-	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.136.000.000,00	1.136.000.000,00	-	100,00
Jumlah Bansos uang		2.240.600.000,00	2.240.600.000,00	-	100,00

Sumber: BPKA DIY, 2024

Tabel 2.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang Tahun 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.169.824.000,00	26.020.569.932,00	(1.149.254.068,00)	95,77
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada keluarga	50.900.000,00	25.284.000,00	(25.616.000,00)	49,67
Jumlah Bansos Barang		27.220.724.000,00	26.045.853.932,00	(1.174.870.068,00)	95,68

Sumber: BPKA DIY, 2024

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yaitu: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan Gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Nilai aset tetap berwujud

yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp787.127.650.315,00 dengan realisasi Rp745.400.266.545,00 atau 94,70%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp41.727.383.770,00. Anggaran dan realisasi belanja modal per rincian obyek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY Tahun 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran(Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah Persil	133.599.258.874,00	130.213.102.270,00	(3.386.156.604,00)	97,47
2	Belanja Modal Lapangan	44.371.586.954,00	39.093.826.922,00	(5.277.760.032,00)	88,11
3	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.960.957.800,00	1.832.020.650,00	(128.937.150,00)	93,42
4	Belanja Modal Alat Bantu	6.494.389.100,00	6.441.077.660,00	(53.311.440,00)	99,18
5	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.670.115.700,00	7.052.149.830,00	(617.965.870,00)	91,94
6	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.250.427.300,00	2.243.880.829,00	(6.546.471,00)	99,71
7	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	32.400.000,00	32.385.787,00	(14.213,00)	99,96
8	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	189.704.880,00	175.189.062,00	(14.515.818,00)	92,35
9	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	90.447.200,00	85.365.224,00	(5.081.976,00)	94,38
10	Belanja Modal Alat Ukur	71.023.600,00	67.498.015,00	(3.525.585,00)	95,04
11	Belanja Modal Alat Pengolahan	7.832.242.600,00	6.972.339.867,00	(859.902.733,00)	89,02
12	Belanja Modal Alat Kantor	7.681.827.810,00	7.118.760.983,00	(563.066.827,00)	92,67
13	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	28.391.821.764,00	27.714.617.192,00	(677.204.572,00)	97,61
14	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	333.944.600,00	283.309.600,00	(50.635.000,00)	84,84

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran(Rp)	%
15	Belanja Modal Alat Studio	4.800.619 .900,00	4.603.076 .911,00	(197.542 .989,00)	95,89
16	Belanja Modal Alat Komunikasi	581.426 .500,00	536.865 .213,00	(44.561 .287,00)	92,34
17	Belanja Modal Peralatan Pemancar	883.279 .650,00	775.741 .159,00	(107.538 .491,00)	87,83
18	Belanja Modal Alat Kedokteran	437.040 .600,00	419.238 .333,00	(17.802 .267,00)	95,93
19	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	97.557 .500,00	91.429 .000,00	(6.128 .500,00)	93,72
20	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	5.845.466 .700,00	5.656.912 .732,00	(188.553 .968,00)	96,77
21	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	13.179 .400,00	13.179 .000,00	(400,00)	100,00
22	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	28.325.392 .198,00	27.609.648 .751,00	(715.743 .447,00)	97,47
23	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	134.209 .200,00	133.409 .600,00	(799 .600,00)	99,40
24	Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya	120.330 .000,00	120.181 .000,00	(149 .000,00)	99,88
25	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	14.810 .400,00	14.803 .600,00	(6 .800,00)	99,95
26	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	94.103 .800,00	92.475 .335,00	(1.628 .465,00)	98,27
27	Belanja Modal Alat Laboratorium Standardisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.349.762 .400,00	1.069.876 .295,00	(279.886 .105,00)	79,26
28	Belanja Modal Komputer Unit	25.322.393 .625,00	24.515.691 .314,00	(806.702 .311,00)	96,81
29	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.578.662 .700,00	13.254.159 .049,00	(324.503 .651,00)	97,61
30	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	7.565 .000,00	7.564 .000,00	(1 .000,00)	99,99
31	Belanja Modal Sumur	60.670 .000,00	60.569 .016,00	(100 .984,00)	99,83
32	Belanja Modal Alat Pelindung	225.655 .800,00	225.596 .000,00	(59 .800,00)	99,97
33	Belanja Modal Alat SAR	200.451 .600,00	195.958 .379,00	(4.493 .221,00)	97,76

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran(Rp)	%
34	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	209.740 .200,00	205.837 .355,00	(3.902 .845,00)	98,14
35	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	1.564.500 .000,00	1.563.009 .871,00	(1.490 .129,00)	99,90
36	Belanja Modal Peralatan Olahraga	119.149 .400,00	114.156 .162,00	(4.993 .238,00)	95,81
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	39.022.025 .478,00	38.132.795 .800,00	(889.229 .678,00)	97,72
38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.616.569 .800,00	6.681.914 .444,00	(934.655 .356,00)	87,73
39	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.708.995 .190,00	137.181.029 .267,00	(13.527.965 .923,00)	91,02
40	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	10.436.624 .535,00	9.508.015 .442,00	(928.609 .093,00)	91,10
41	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.564.380 .500,00	4.241.211 .111,00	(1.323.169 .389,00)	76,22
42	Belanja Modal Jalan	107.259.586 .500,00	103.238.976 .090,00	(4.020.610 .410,00)	96,25
43	Belanja Modal Jembatan	57.037.970 .400,00	57.036.538 .572,00	(1.431 .828,00)	100,00
44	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	16.544.737 .950,00	14.099.350 .525,00	(2.445.387 .425,00)	85,22
45	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	52.887.430 .800,00	50.159.122 .577,00	(2.728.308 .223,00)	94,84
46	Belanja Modal Instalasi Pengaman	59.047 .100,00	53.997 .060,00	(5.050 .040,00)	91,45
47	Belanja Modal Instalasi Lain	10.000 .000,00	10.000 .000,00	-	100,00
48	Belanja Modal Jaringan Listrik	276.108 .500,00	274.060 .000,00	(2.048 .500,00)	99,26
49	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	676.753 .920,00	578.202 .185,00	(98.551 .735,00)	85,44
50	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	122.360 .300,00	104.196 .310,00	(18.163 .990,00)	85,16
51	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	30.000 .000,00	29.800 .000,00	(200 .000,00)	99,33
52	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	330.887 .700,00	326.172 .249,00	(4.715 .451,00)	98,57
53	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	4.621.854 .400,00	4.232.618 .767,00	(389.235 .633,00)	91,58

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran(Rp)	%
54	Belanja Modal Ternak	170.000 .000,00	169.400 .000,00	(600 .000,00)	99,65
55	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	507 .500,00	507 .500,00	-	100,00
56	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.621.059 .587,00	8.574.956 .680,00	(46.102 .907,00)	99,47
57	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	174.635 .400,00	162.500 .000,00	(12.135 .400,00)	93,05
Jumlah		787.127.650 .315,00	745.400.266 .545,00	(41.727.383 .770,00)	94,70

Sumber: BPKA DIY, 2024

c. Belanja Dana Keistimewaan

Belanja Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp6.016.543.491.245,00 dan realisasi sebesar Rp5.708.080.855.492,41 di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi Dana Keistimewaan tahun anggaran 2023 sesuai dengan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 (Lampiran V) tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp1.420.000.000.000,00 Penyaluran Dana Keistimewaan Tahun 2023 sebesar Rp1.372.725.809.224,00 berasal dari nilai alokasi sebesar Rp1.420.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan tahun anggaran 2022 sebesar Rp47.274.190.776,00.

Belanja Dana Keistimewaan tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemda DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kalurahan. Belanja Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dilakukan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan ditransfer dari rekening Kas Daerah Pemda DIY ke

rekening Pemda Kabupaten/Kota dan rekening Pemerintah Kalurahan untuk pembiayaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan Keistimewaan. Sisa Belanja Dana Keistimewaan pada Pemda Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan pada akhir tahun anggaran disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemda DIY.

Anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.420.000.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 telah terserap sebesar Rp1.396.163.539.431,75 atau 98,32%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp23.836.460.568,25. Rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2023
(Unaudited)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
I	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH				
1	KOTA YOGYAKARTA	658.789	628.611	30.177	95,42
		.750,00	.970,00	.780,00	
2	KABUPATEN BANTUL	3.959.409	3.878.462	80.946	97,96
		.000,00	.270,00	.730,00	
3	KABUPATEN KULON PROGO	3.088.691	2.964.498	124.193	95,98
		.400,00	.244,00	.156,00	
4	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	5.548.706	5.324.349	224.356	95,96
		.500,00	.774,00	.726,00	
5	KABUPATEN SLEMAN	1.845.238	1.791.277	53.960	97,08
		.500,00	.783,00	.717,00	
6	BIRO ORGANISASI SETDA DIY	1.834.872	1.774.285	60.587	96,70
		.850,00	.332,00	.518,00	
7	BIRO HUKUM	971.539	971.538	300,00	100
		.000,00	.700,00		
8	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	3.193.542	3.141.273	52.269	98,36
		.350,00	.300,00	.050,00	
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.321.250	1.296.804	24.445	98,15
		.200,00	.780,00	.420,00	
10	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.508.661	1.398.937	109.723	92,73
		.000,00	.297,00	.703,00	
11	PANIRADYA KAISTIMEWAN	19.600.573	19.359.721	240.852	98,77
		.300,00	.247,00	.053,00	

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
12	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	100.000 .000,00	97.506 .850,00	2.493 .150,00	97,51
13	DINAS SOSIAL	98.500 .000,00	86.832 .290,00	11.667 .710,00	88,15
14	BPTTG-DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	160.000 .000,00	159.999 .820,00	180,00	100
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100.000 .000,00	99.257 .300,00	742 .700,00	99,26
II KEBUDAYAAN					
1	KOTA YOGYAKARTA	59.887.519 .324,00	59.551.131 .562,00	336.387 .762,00	99,44
2	KABUPATEN BANTUL	34.798.847 .150,00	32.978.555 .216,65	1.820.291 .933,35	94,77
3	KABUPATEN KULON PROGO	78.148.581 .431,00	77.211.234 .102,00	937.347 .329,00	98,80
4	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	41.221.883 .500,00	40.617.008 .947,00	604.874 .553,00	98,53
5	KABUPATEN SLEMAN	54.795.380 .065,00	54.340.106 .199,88	455.273 .865,12	99,17
6	DINAS KEBUDAYAAN DIY	302.562.444 .592,00	297.915.166 .647,00	4.647.277 .945,00	98,46
7	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	14.272.496 .350,00	14.161.711 .150,00	110.785 .200,00	99,22
8	MUSEUM SONOBUDOYO YOGYAKARTA	18.571.461 .823,00	18.469.418 .613,00	102.043 .210,00	99,45
9	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	31.817.144 .700,00	31.253.302 .206,00	563.842 .494,00	98,23
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.021.034 .000,00	28.959.019 .132,00	62.014 .868,00	99,79
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	19.981.874 .430,00	19.336.425 .436,00	645.448 .994,00	96,77
12	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	4.461.325 .000,00	4.432.013 .880,00	29.311 .120,00	99,34
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.598.796 .000,00	2.471.305 .980,00	127.490 .020,00	95,09
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	4.856.533 .600,00	4.724.132 .768,00	132.400 .832,00	97,27
15	DINAS PARIWISATA DIY	24.456.775 .369,00	24.237.149 .872,00	219.625 .497,00	99,10
16	DINAS KESEHATAN	455.069 .000,00	441.056 .132,00	14.012 .868,00	96,92

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	4.659.648 .254,00	4.549.280 .070,00	110.368 .184,00	97,63
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	150.361.180 .102,00	148.719.630 .181,00	1.641.549 .921,00	98,91
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	9.858.124 .585,00	9.594.417 .096,00	263.707 .489,00	97,32
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	32.767.504 .280,00	31.299.212 .187,00	1.468.292 .093,00	95,52
21	DINAS SOSIAL	4.181.193 .864,00	3.877.968 .484,00	303.225 .380,00	92,75
22	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY	1.019.228 .060,00	1.019.228 .060,00	-	100
23	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.324.246 .150,00	1.291.073 .644,00	33.172 .506,00	97,49
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.714.081 .300,00	1.690.349 .486,00	23.731 .814,00	98,62
25	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.215.110 .000,00	1.198.450 .270,00	16.659 .730,00	98,63
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9.198.516 .000,00	9.152.419 .992,00	46.096 .008,00	99,50
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24.340.251 .700,00	24.298.156 .921,00	42.094 .779,00	99,83
28	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	24.134.475 .350,00	23.579.279 .811,00	555.195 .539,00	97,70
29	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY	1.844.119 .800,00	1.777.880 .418,00	66.239 .382,00	96,41
31	BIRO ADM PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA DIY	675.406 .900,00	673.520 .900,00	1.886 .000,00	99,72
32	BIRO TATA PEMERINTAHAN	385.850 .700,00	383.333 .100,00	2.517 .600,00	99,35
33	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	640.430 .000,00	581.946 .028,00	58.483 .972,00	
32	BKK KALURAHAN				
	BKK KALURAHAN-PAPAN PENANDA KEISTIMEWAAN	63.000 .000,00	63.000 .000,00	-	100
	BKK KALURAHAN-BALAI DUSUN KEISTIMEWAAN	15.150.000 .000,00	15.098.975 .775,00	51.024 .225,00	99,66

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
	BKK KALURAHAN-PENGELOLAAN SAMPAH KEISTIMEWAAN	6.000.000 .000,00	5.985.089 .940,00	14.910 .060,00	99,75
	BKK KALURAHAN-DEMPLLOT JOGJA HIJAU KEISTIMEWAAN	1.000.000 .000,00	1.000.000 .000,00	-	100
	BKK KALURAHAN-KAMPUNG BERKAH KEISTIMEWAAN	200.000 .000,00	200.000 .000,00	-	100
	BKK KALURAHAN-PADAT KARYA	21.525.000 .000,00	21.481.505 .124,00	43.494 .876,00	99,80
	BKK KALURAHAN-DESA BALAI BUDAYA	7.095.406 .000,00	7.010.967 .000,00	84.439 .000,00	98,81
	BKK KALURAHAN-DESA MANDIRI BUDAYA	24.500.000 .000,00	24.429.824 .688,00	70.175 .312,00	99,71
	BKK KALURAHAN-ARSITEKTUR	1.000.000 .000,00	1.000.000 .000,00	-	100
	BKK KALURAHAN-WBTB	1.000.000 .000,00	993.701 .785,72	6.298 .214,28	99,37
	BKK KALURAHAN-DESA BAHARI	3.500.000 .000,00	3.382.898 .500,00	117.101 .500,00	96,65
	BKK KALURAHAN-DESA BUDAYA	4.300.000 .000,00	4.246.463 .478,00	53.536 .522,00	98,75
	BKK KALURAHAN-DESA MANDIRI PANGAN	3.950.000 .000,00	3.940.065 .000,00	9.935 .000,00	99,75
	BKK KALURAHAN-DESA PRIMA	2.250.000 .000,00	2.239.479 .428,00	10.520 .572,00	99,53
	BKK KALURAHAN-DESA PREUNEUR	5.698.994 .000,00	5.660.769 .800,00	38.224 .200,00	99,33
	BKK KALURAHAN-DESA WISATA	9.600.000 .000,00	9.600.000 .000,00	-	100
	BKK KALURAHAN-OMAH JAGAWARGA KEISTIMEWAAN	2.050.000 .000,00	2.020.194 .000,00	29.806 .000,00	98,55
	BKK KALURAHAN-RTLH KEISTIMEWAAN	18.750.000 .000,00	18.732.961 .583,50	17.038 .416,50	99,91
III PERTANAHAN					
1	KOTA YOGYAKARTA	904.594 .000,00	850.646 .600,00	53.947 .400,00	94,04
2	KABUPATEN BANTUL	5.627.218 .000,00	4.906.894 .120,00	720.323 .880,00	87,20
3	KABUPATEN KULON PROGO	2.389.841 .700,00	1.931.893 .224,00	457.948 .476,00	80,84
4	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	5.383.653 .000,00	4.937.665 .372,00	445.987 .628,00	91,72

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
5	KABUPATEN SLEMAN	4.362.496 .325,00	3.887.315 .642,00	475.180 .683,00	89,11
6	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY	6.950.827 .550,00	6.430.895 .485,00	519.932 .065,00	92,52
7	BIRO HUKUM SETDA DIY	639.286 .000,00	580.196 .800,00	59.089 .200,00	90,76
8	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	355.231 .500,00	315.987 .441,00	39.244 .059,00	88,95
9	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	312.648 .500,00	287.029 .039,00	25.619 .461,00	91,81
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	218.000 .000,00	218.000 .000,00	-	100
11	BKK KALURAHAN-URUSAN PERTANAHAN	1.841.825 .000,00	1.827.681 .585,00	14.143 .415,00	99,23
IV TATA RUANG					
1	KOTA YOGYAKARTA	31.488.691. 700,00	31.214.386 .547,00	274.305 .153,00	99,13
2	KABUPATEN BANTUL	4.047.127 .140,00	3.703.349 .000,00	343.778 .140,00	91,51
3	KABUPATEN KULON PROGO	15.206.257 .238,00	14.760.302 .096,00	445.955 .142,00	97,07
4	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	18.056.076 .555,00	17.104.436 .857,00	951.639 .698,00	94,73
5	KABUPATEN SLEMAN	799.854 .770,00	729.771 .534,00	70.083 .236,00	91,24
6	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY	6.807.658 .800,00	6.505.749 .969,00	301.908 .831,00	95,57
7	DINAS PERTANIAN	698.030 .000,00	667.923 .106,00	30.106 .894,00	95,69
9	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	135.068.583 .160,00	133.730.397 .261,00	1.338.185 .899,00	99,01
10	DINAS PERHUBUNGAN DIY	9.258.156 .388,00	9.115.308 .276,00	142.848 .112,00	98,46
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	478.149 .545,00	475.205 .685,00	2.943 .860,00	99,38
12	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL	4.172.597 .900,00	4.159.970 .972,00	12.626 .928,00	99,70
13	DINAS PARIWISATA	2.084.488 .000,00	1.984.136 .820,00	100.351 .180,00	95,19
14	BKK KALURAHAN-KAWASAN TERPADU	1.000.000 .000,00	994.258 .450,00	5.741 .550,00	99,43

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
	JUMLAH	1.420.000.000	1.396.163.539	23.836.460	98,32
		.000,00	.431,75	.568,25	

Sumber: BPKA DIY, 2024

d. Belanja Tak terduga

Anggaran Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp21.998.129.613,00 dengan realisasi sebesar Rp198.487.268,00 atau 0,90%. Realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2023 digunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.25. Rincian Belanja Tak Terduga 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Jumlah
1	BTT-Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan untuk jatah hidup 63 mahasiswa dari Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang sedang menempuh pendidikan di DIY, yang terdampak bencana alam gempa bumi Cianjur pada 21 November 2022, bulan Januari-Juni 2023	189.000.000,00
2	Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana BOSP Tahun 2020 a.n SDN Tlogowareng Karangmojo, SDN Ngawu Playen, dan SDN Mulo I Wonosari dengan Total Nominal Rp9.487.268 ke Rekening Kas Umum Negara	9.487.268,00
	JUMLAH	198.487.268,00

Sumber: BPKA DIY, 2024

e. Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.485.698.912.828,00 dan realisasi sebesar Rp1.456.104.030.698,21 atau 98,01%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp29.594.882.129,79 dengan rincian sebagai berikut:

1) *Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota*

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota.

Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah. Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp904.030.830.780,00 dan realisasi sebesar Rp886.411.063.641,00 atau 98,05%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp17.619.767.139,00. Secara rinci, realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2023 (*Audited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran(Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta	155.478.334.844,00	153.071.631.950,00	(2.406.702.894,00)	98,45
2	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul	205.796.584.220,00	201.588.461.475,00	(4.208.122.745,00)	97,96
3	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	112.619.634.528,00	109.863.998.262,00	(2.755.636.266,00)	97,55
4	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	130.798.945.600,00	127.194.303.115,00	(3.604.642.485,00)	97,24
5	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Sleman	299.337.331.588,00	294.692.668.839,00	(4.644.662.749,00)	98,45
Jumlah		904.030.830.780,00	886.411.063.641,00	(17.619.767.139,00)	98,05

Sumber: BPKA DIY, 2024

2) *Belanja Bantuan Keuangan*

Belanja bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerja sama antardaerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan tersebut bersifat khusus yaitu khusus

digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp581.668.082.048,00 dan realisasi sebesar Rp569.692.967.057,21 atau 97,94%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp11.975.114.990,79. Belanja bantuan keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan rincian sebagai berikut:

3) *Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota*

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota tahun anggaran 2023 merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus daerah provinsi ke Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan khusus merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp443.648.258.748,00 dan realisasi sebesar Rp432.616.595.220,53 atau 97,51%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp11.031.663.527,47. Belanja Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk program padat karya infrastruktur, Jamban sehat masyarakat miskin, kunjungan gubernur, dan program untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan.

Tabel 2.27. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2023 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Bantuan Keuangan Ke Kota Yogyakarta	94.239.594.774,00	93.544.474.839,47	(695.119.934,53)	99,26
2	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Bantul	81.732.601.290,00	78.317.260.606,65	(3.415.340.683,35)	95,82
3	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Kulon Progo	108.078.371.769,00	105.512.927.666,00	(2.565.444.103,00)	97,63
4	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Gunung Kidul	81.710.319.555,00	78.813.460.950,00	(2.896.858.605,00)	96,45
5	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Sleman	77.887.371.360,00	76.428.471.158,88	(1.458.900.201,12)	98,13
	Jumlah	443.648.258.748,00	432.616.595.221,00	(11.031.663.527,00)	97,51

Sumber: BPKA DIY, 2024

4) **Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa**

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa tahun anggaran 2023 merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dianggarkan sebesar Rp138.019.823.300,00 dengan realisasi sebesar Rp137.076.371.836,68 atau 99,32%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp943.451.463,32.

Tabel 2.28. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa DIY Tahun 2023 (Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang Anggaran (Rp)	%
1	BKK KALURAHAN-PAPAN PENANDA KEISTIMEWAAN	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00
2	BKK KALURAHAN-BALAI DUSUN KEISTIMEWAAN	15.150.000.000,00	15.098.975.775,00	51.024.225,00	99,66
3	BKK KALURAHAN-PENGELOLAAN SAMPAH KEISTIMEWAAN	6.000.000.000,00	5.985.089.940,00	14.910.060,00	99,75

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang Anggaran (Rp)	%
4	BKK KALURAHAN-DEMPLOT JOGJA HIJAU KEISTIMEWAAN	1.000.000 .000,00	1.000.000 .000,00	-	100,00
5	BKK KALURAHAN-PADAT KARYA	21.525.000 .000,00	21.481.505 .124,00	43.494 .876,00	99,80
6	BKK KALURAHAN-DESA BALAI BUDAYA	7.095.406 .000,00	7.010.967 .000,00	84.439 .000,00	98,81
7	BKK KALURAHAN-DESA MANDIRI BUDAYA	24.500.000 .000,00	24.429.824 .688,00	70.175 .312,00	99,71
8	BKK KALURAHAN-kesejarahan	1.000.000 .000,00	1.000.000 .000,00	-	100,00
9	BKK KALURAHAN-WBTB	1.000.000 .000,00	993.701 .785,72	6.298 .214,28	99,37
10	BKK KALURAHAN-DESA Maritim	3.500.000 .000,00	3.382.898 .500,00	117.101 .500,00	96,65
11	BKK KALURAHAN-DESA BUDAYA	4.300.000 .000,00	4.246.463 .478,00	53.536 .522,00	98,75
12	BKK KALURAHAN-DESA MANDIRI PANGAN	3.950.000 .000,00	3.940.065 .000,00	9.935 .000,00	99,75
13	BKK KALURAHAN-DESA PRIMA	2.250.000 .000,00	2.239.479 .428,00	10.520 .572,00	99,53
14	BKK KALURAHAN-DESA PREUNEUR	5.698.994 .000,00	5.660.769 .800,00	38.224 .200,00	99,33
15	BKK KALURAHAN-DESA WISATA	9.600.000 .000,00	9.600.000 .000,00	-	100,00
16	BKK KALURAHAN-OMAH JAGAWARGA KEISTIMEWAAN	2.050.000 .000,00	2.020.194 .000,00	29.806 .000,00	98,55
17	BKK KALURAHAN-RTLH KEISTIMEWAAN	18.750.000 .000,00	18.732.961 .583,50	17.038 .416,50	99,91
18	Tata Kelola Pertanahan	1.841.825 .000,00	1.827.681 .585,00	14.143 .415,00	99,23
19	Kawasan Terpadu (DPTR)	1.000.000 .000,00	994.258 .450,00	5.741 .550,00	99,43
20	Kampung Berkah	200.000 .000,00	200.000 .000,00		100,00
1	Kompensasi Dampak Negatif TPA/TPST Regional	550.000 .000,00	550.000 .000,00	-	100,00
2	Kunjungan Gubernur	6.995.598 .300,00	6.618.535 .699,46	377.062 .600,54	94,61
Jumlah		138.019.823	137.076.371	943.451	99,32

No	Uraian	Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang Anggaran (Rp)	%
		.300,00	.836,68	.463,32	

Sumber: BPKA DIY, 2024

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Terjadi gagal lelang pada proses pengadaan barang dan jasa, sehingga harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian *output*.
- 2) Kriteria kesiapan (*Readiness Criteria*) yang belum terpenuhi/selesai menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu adanya dinamika kebijakan, antaranya perubahan prioritas dalam masa pelaksanaan APBD menjadi salah satu kendala dalam percepatan pencapaian target dan realisasi pelaksanaan APBD. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian belanja.

b. Solusi

- 1) Lelang dini saat proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan dalam rangka percepatan proses pelaksanaan kegiatan.
- 2) Optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan integrasi terkait sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam menindaklanjuti permasalahan.

D. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 2023 maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah juga merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan DIY yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Pada tahun 2023 penganggaran SiLPA mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya. Penganggaran penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah memperhatikan besarnya Pemberian Pinjaman Pemda DIY tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp466.271.562.955,00 yang berasal dari SiLPA sebesar Rp462.271.562.955,00 dan penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp4.000.000.000,00.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada BUMD

yang diprioritaskan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang dan pemberian pinjaman daerah berupa dana bergulir kepada masyarakat.

Pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp305.000.000.000,00 yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah yang diberikan kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp300.000.000.000,00. Tujuan dari hal ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan yang didasarkan atas Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Dalam peraturan daerah tersebut, disebutkan bahwa untuk dapat memenuhi kepemilikan modal dasar 51% dari modal dasar PT Bank BPD DIY sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), maka Pemda DIY mempunyai kewajiban penyertaan modal ke PT Bank BPD DIY sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah). Pemberian pinjaman daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan pemberian pinjaman kepada Masyarakat dalam bentuk dana bergulir yang disalurkan melalui Lembaga keuangan non-bank yakni Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

E. PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN

1. Kinerja BUMD PT Bank BPD DIY

Modal dasar BPD DIY sebesar Rp4.000.000.000.000,00 ditetapkan dengan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Dari total modal dasar tersebut, komposisi modal yang dimiliki oleh Pemda DIY sebesar 51% atau Rp2.040.000.000.000,00. Berdasarkan Perda maka modal dasar PT Bank BPD DIY harus dipenuhi mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. penambahan total modal yang telah disetorkan Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023

adalah sebesar Rp1.381.175.000.000,00. Penambahan setoran modal pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp300.000.000.000,00, sehingga kekurangan modal dasar dari Pemda DIY yang harus disetorkan pada PT. Bank BPD DIY sampai dengan tahun 2025, adalah sebesar Rp658.825.000.000,00.

Dalam hal kinerja keuangan, dapat dilihat salah satunya dari setoran deviden PT Bank BPD DIY kepada Pemda DIY.

Tabel 2.29. Realisasi Dividen PT Bank BPD DIY TA 2018-2023

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	79.201.315.077,80	79.201.315.077,80
2	2019	92.139.904.506,03	78.265.128.516,59
3	2020	49.462.265.608,35	94.001.713.614,26
4	2021	78.756.000.000,00	84.955.839.874,22
5	2022	94.001.713.614,00	95.761.065.417,29
6	2023	98.800.005.246,67	99.223.198.838,00
Jumlah		492.361.204.052,85	531.408.261.338,16

Sumber: BPKA DIY, 2024

Pada tahun anggaran 2023, PT Bank BPD DIY menyetorkan bagian laba kepada Pemda DIY sebesar Rp99.223.198,838,00 meningkat sebesar Rp3.462.133.420,71 atau 3,62% dibandingkan dengan dividen yang disetor tahun anggaran 2022. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian pada tahun buku 2022 sudah membaik dan mendorong kinerja perbankan turut meningkat.

a. PT Anindya Mitra Internasional (AMI)

Sejak ditetapkan Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka PD Anindya Mitra Internasional (PT AMI) berubah bentuk menjadi Perseroan terbatas. Lingkup usaha PT AMI terdiri dari Unit Percetakan, Unit Pertambangan, Unit Pariwisata, Unit *Realty*, Unit Air Minum dan Unit Transportasi. Modal dasar PT AMI sebesar Rp50.000.000.000,00 ditetapkan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan

Terbatas Anindya Mitra Internasional. Sampai dengan akhir tahun 2022 nilai penyertaan modal Pemda DIY yang telah disetorkan pada PT Anindya Mitra Internasional sebesar Rp31.144.910.000,00, sehingga masih terdapat kekurangan penyetoran penyertaan modal sebesar Rp18.854.090.000,00.

Pembagian laba yang diberikan kepada Pemda DIY tahun anggaran 2018-2023 diinformasikan berikut:

Tabel 2.30. Realisasi Pembagian Dividen kepada Pemda DIY oleh PT Anindya Mitra Internasional (AMI) TA 2018-2023

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	1.089.717.200,00	1.089.717.200,00
2	2019	1.378.492.258,00	1.218.478.750,00
3	2020	878.615.584,00	1.185.651.326,00
4	2021	878.615.584,00	1.044.717.700,00
5	2022	1.044.000.000,00	1.229.058.000,00
6	2023	1.829.733.291	724.770.494,00
Jumlah		7.099.173.917,00	6.492.393.470,00

Sumber: BPKA DIY, 2024

Sesuai dengan hasil RUPS dividen yang diberikan untuk Pemda DIY pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp724.770.494,00, menurun cukup signifikan dibandingkan dividen pada tahun anggaran 2022 dikarenakan bagian laba karena bagian laba yang diterima oleh Pemda DIY tahun anggaran 2023 merupakan kinerja perusahaan tahun buku 2022. Sedangkan pada tahun buku 2022 laba perusahaan menurun dikarenakan PT AMI harus membayar/mengeluarkan beberapa biaya yang cukup besar yaitu antara lain membayar kompensasi kepada PT YIS sebagai akibat tidak diperpanjangnya masa kerjasama Malioboro Mall serta mengembalikan sebagian dana subsidi Trans Jogja sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY pada tahun 2022.

b. PT Taru Martani

Bergerak di bidang usaha utama yaitu cerutu dan tembakau, PT Taru Martani diberikan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah) sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang penyertaan modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

Kinerja dari PT Taru Martani yang ditunjukkan dengan pembagian dividen kepada Pemda DIY tahun anggaran 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31. Realisasi PT Taru Martani TA 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	760.000.000,00	-
2	2019	772.650.000,00	925.083.150,00
3	2020	846.000.000,00	148.697.000,00
4	2021	2.700.000.000,00	3.837.562.289,00
5	2022	3.800.000.000,00	5.439.572.184,00
6	2023	5.624.705.987,00	5.635.900.016,00
Jumlah			15.986.814.639,00

Sumber: BPKA DIY, 2024

Bagian laba dari PT Taru Martani tahun anggaran 2023 meningkat dibandingkan tahun anggaran 2022 karena proporsi bagian laba tahun anggaran 2023 yang diberikan adalah 55% dari laba bersih perusahaan. Sedangkan bagian laba tahun anggaran 2022 dibagikan hanya 40%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun buku 2022 PT Taru Martani telah memiliki cadangan perusahaan yang mencukupi sehingga dapat membagi laba kepada Pemda DIY sesuai Perda sebesar 55%.

c. Perumda Air Bersih Tirtatama DIY

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Bersih Tirtatama merupakan BUMD Pemda DIY yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih dan didirikan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY.

Modal dasar sebesar Rp469.028.716.201,00 (empat ratus enam puluh sembilan Miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus satu rupiah) terdiri dari uang dan barang. Modal dasar yang telah disetorkan oleh Pemda DIY adalah berupa uang sebesar Rp12.500.000.000,00 dan barang/aset sebesar Rp163.896.691.000,00.

Perumda Air Bersih Tirtatama beroperasi sejak Januari 2021 dan sampai dengan Tahun 2023 masih mengalami defisit operasional. Defisit operasional Perumda Air Bersih Tirtatama disebabkan antara lain:

- 1) Tahun 2021 merupakan tahun pertama peralihan pengelolaan SPAM dari UPT Balai Pialam ke Perumda Air Bersih Tirtatama. Pada saat dikelola oleh UPT, SPAM Kartamantul merupakan unit *cost center*. Selanjutnya, ketika beralih menjadi BUMD, perlu adanya pengembangan agar dapat menjadi *profit center*.
- 2) Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, target penyerapan produksi air curah oleh PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman, dan PDAM Bantul masih belum optimal.
- 3) Pada tahun 2023, beban operasional Perumda Air Bersih Tirtatama bertambah dikarenakan adanya penyerahan SPAM Sistem Kebonagung dari Pemerintah Pusat. Penambahan beban tersebut dikarenakan penambahan biaya beban Listrik, biaya SDM dan biaya pemeliharaan.

Mulai tahun 2023, Pemda DIY telah memberikan subsidi kepada Perumda Air Bersih Tirtatama sebesar Rp5.241.600.000,00. Subsidi tersebut diperuntukkan untuk membayar biaya listrik yang merupakan salah satu biaya terbesar dalam operasional Perumda Air Bersih Tirtatama.

d. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)

BUKP merupakan badan usaha yang dibentuk oleh Pemda DIY dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan, dengan menyediakan dana pembangunan melalui prosedur sederhana, cepat, dan murah. Pada

saat ini terdapat sebanyak 75 BUKP yang berkedudukan di Kapanewon se-DIY. Dasar pendirian BUKP adalah Perda Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan, yang kemudian didirikan secara bertahap dengan Keputusan gubernur. Modal dasar BUKP dari Pemda DIY adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah) dan telah disetorkan sepenuhnya. Kinerja BUKP yang ditunjukkan dengan dividen mulai tahun anggaran 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32. Realisasi Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) TA 2018-2023

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	4.591.887.256,86	5.340.468.682,00
2	2019	5.340.468.682,72	6.032.373.104,80
3	2020	4.000.000.000,00	6.025.001.568,23
4	2021	3.975.033.928,00	6.385.055.910,53
5	2022	5.795.329.564,00	5.164.189.937,35
6	2023		3.997.304.683,73

Sumber: BPKA DIY, 2024

Bagian laba dari BUKP DIY tahun anggaran 2023 menurun dibandingkan tahun anggaran 2022 karena bagian laba tahun anggaran 2023 merupakan kinerja BUKP tahun buku 2022. Pada tahun buku 2022, BUKP telah menerapkan kebijakan suku bunga kredit yang baru dan berakibat menurunnya tingkat pendapatan BUKP. Kebijakan suku bunga tersebut merupakan tindak lanjut dari LHP BPK pada pemeriksaan kinerja BUKP di tahun 2021.

Dalam rangka mempersiapkan proses transformasi BUKP menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sesuai ketentuan peraturan perundangan, sejak tahun 2022 telah dilaksanakan audit terhadap laporan keuangan BUKP tahun buku 2021. Pada tahun 2022, Pemda DIY telah melaksanakan kajian terhadap transformasi BUKP yang kemudian dapat menjadi dasar perubahan kelembagaan BUKP. Kemudian, pada tahun 2023 Pemda DIY telah menyusun kajian kelayakan usaha dan kebutuhan daerah akan perubahan bentuk badan hukum BUKP

menjadi Perseroan terbatas LKM yang akan menjadi salah satu langkah pembentukan LKM.

F. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah meliputi Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam rangka menjamin terlaksananya Tertib Administrasi dan Tertib Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah yang secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, maka implementasi penatausahaan barang milik daerah yang saat ini dilaksanakan pada Pemda DIY juga harus menyesuaikan dengan aturan tersebut.

a. Dasar Hukum Pelaksanaan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggolongan dan
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- 6) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- 8) Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9) Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah;
- 10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan;
- 11) Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah;
- 13) Peraturan Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah;
- 14) Keputusan Gubernur DIY Nomor 375/KEP/2022 tentang Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027.

b. Tantangan dan Permasalahan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka dibutuhkan Sistem Informasi yang handal dan

pemahaman sumber daya manusia akan penatausahaan Barang Milik Daerah sehingga proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dapat dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel. Selama ini, pengurus barang terlambat menginput Barang Milik Daerah ke dalam Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset) yang ada dikarenakan keterlambatan penyampaian data realisasi Belanja Barang dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengurus Barang. Hal tersebut juga akan menyulitkan ketika diadakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah khususnya atas perolehan barang dari Pengadaan.

c. Upaya-upaya yang Dilaksanakan

Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset) Pemda DIY saat ini telah mengintegrasikan data realisasi belanja dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Dengan upaya ini dapat memudahkan pengurus barang dalam menginputkan dan melacak data barang yang akan dientrikan pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset) serta dapat membantu dalam berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran. Disamping itu untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah secara rutin yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Pejabat Penatausahaan Barang kepada Pengurus barang di masing-masing OPD dapat membantu pemahaman operasional aplikasi, kelancaran penatausahaan barang dan pelaporan barang milik daerah yang akuntabel dan handal.

d. Capaian

Pemda DIY telah mencatat BMD di tahun anggaran 2023, baik berupa aset tetap maupun aset lainnya, sebanyak 3.972.261 unit dengan nilai Rp15.689.172.391.761,90. Aset tersebut tersebar di seluruh OPD di lingkungan Pemda DIY. BMD tertuang dalam Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.33. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Tahun 2023 (*Unaudited*)

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.184.142	2.558.755.356.623,83
2	Dinas Kesehatan	23.804	380.554.669.120,86
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	12.701	7.132.808.681.744,65
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.376	130.709.918.279,88
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.264	5.088.069.131,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.544	23.820.823.816,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.209	63.363.746.917,69
8	Dinas Sosial	18.938	166.429.773.035,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.011	93.328.231.124,98
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.678	35.118.679.358,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.123	222.737.295.290,92
12	Dinas Perhubungan	19.868	336.395.567.248,23
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.533	138.137.257.401,02
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.173	335.347.216.216,95
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.341	11.359.772.815,53
16	Dinas Kebudayaan	91.183	713.580.614.987,76
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	434.384	234.316.584.046,62
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.222	394.658.735.456,30
19	Dinas Pariwisata	6.620	158.037.532.815,02
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	15.729	314.867.043.517,82
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.724	104.789.140.466,00
22	Biro Tata Pemerintahan	1.782	7.088.224.611,25
23	Biro Hukum	6.981	6.357.639.308,00
24	Biro Bina Mental Spiritual	593	2.544.787.850,00
25	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	785	2.679.338.981,00
26	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1.102	3.860.782.989,99
27	Biro Organisasi	787	3.997.899.905,03
28	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	9.711	291.672.302.745,85
29	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	285	1.705.800.168,00
30	Badan Penghubung Daerah	4.416	34.303.744.596,00
31	Sekretariat DPRD	4.578	607.169.894.240,10
32	Inspektorat	2.718	42.418.790.608,28
33	Paniradya Kaistimewan	2.301	18.814.400.081,96

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.493	26.747.733.385,96
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	27.203	1.007.209.085.181,40
36	Badan Kepegawaian Daerah	4.860	34.671.327.580,00
37	Badan Pendidikan dan Pelatihan	17.099	43.725.930.115,00
	Jumlah	3.972.261	15.689.172.391.761,90

Sumber: BPKA DIY, 2024

2. Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemda DIY

Dalam hal pengamanan hukum aset tanah, Pemda DIY telah melaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah dan balik nama sertifikat tanah atas nama Pemda DIY. Atas pengadaan tanah yang dilakukan oleh OPD teknis, proses pengadaan tanah sampai dengan pensertifikatannya dilakukan oleh OPD yang bersangkutan. Adapun aset tanah yang sudah tercatat dalam buku inventaris Pemda DIY namun belum ada dokumen sertifikat dan sudah bersertifikat tetapi belum atas nama Pemda DIY maka proses pensertifikatan dan balik nama sertifikat dilakukan oleh pengelola barang.

Sertifikat tanah adalah bukti otentik kepemilikan suatu tanah dengan status hukum yang jelas. Pengamanan Hukum BMD adalah kegiatan untuk mengamankan BMD dengan cara melengkapi dokumen status kepemilikan BMD. Pengamanan hukum untuk BMD tanah berupa dokumen sertifikat tanah. Pemda DIY sudah melakukan pengamanan hukum dengan melakukan pensertifikatan tanah dan balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama Pemerintah Daerah DIY. Mulai dari proses pengadaan tanah hingga proses pensertifikatan tanah dan balik nama tanah dilakukan oleh OPD teknis. Adapun untuk tanah yang sudah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemda DIY tetapi belum bersertifikat atau yang sudah bersertifikat bukan atas nama Pemda DIY, maka Pengelola Barang yang akan melakukan pensertifikatan dan balik nama sertifikat tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2023, dilakukan pensertifikatan dan balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemda DIY, dengan objek sebagai berikut:

Tabel 2.34. Daftar Obyek Tanah yang disertifikatkan

No	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
1	Tanah SMK N 1 Kasihan	83.247	Belum terbit sertifikat
2	Tanah SMK N 1 Bantul	947	Belum terbit sertifikat
3	Tanah SMA N 1 Sanden	546	Belum terbit sertifikat
4	Tanah SMA N 1 Sanden	180	Belum terbit sertifikat
5	Tanah Pertanian, Sebokarang, Wates, Kulon Progo	2.012	Belum terbit sertifikat
6	Tanah SMA N 1 Minggir	11.522	Belum terbit sertifikat
7	Tanah SMK N 1 Pandak	8.214	Belum terbit sertifikat
8	Tanah SMK N 1 Pandak	37.360	Belum terbit sertifikat
9	Tanah SMK N 1 Pandak	61.700	Belum terbit sertifikat
10	Tanah SMK N 1 Sewon	20.005	Belum terbit sertifikat
11	Tanah SMA N 1 Pleret, Kedaton Pleret Bantul	2.481	Hak Pakai 00037 tanggal 22 Februari 2023
12	Tanah SMA N 1 Pleret, Kedaton Pleret Bantul	7.392	Hak Pakai 00038 tanggal 22 Februari 2023
13	Tanah SMA N 1 Banguntapan, Ngentak, Baturetno, Banguntapan, Bantul	13.615	Hak Pakai 00187 tanggal 22 Februari 2023
14	Tanah SMA N 2 Banguntapan, Glondong, Wirokerten, Banguntapan, Bantul	935	Hak Pakai 00025 tanggal 22 Februari 2023
15	Tanah SMA N 1 Cangkringan, Bedoyo, Wukirsari, Cangkringan, Sleman	2.553	Hak Pakai 00052 tanggal 13 Oktober 2023
16	Tanah SMA N 1 Pajangan, Kedung, Guwosari, Pajangan, Bantul	10.128	Hak Pakai 00152 tanggal 22 Februari 2023
17	Tanah SMK N 1 Depok	15.492	Hak Pakai 00201 tanggal 20 Juli 2023
18	Tanah Lapangan Sepak Bola, Minggiran, Kota Yogyakarta	13.830	Hak Pakai 00041 tanggal 05 Juli 2023

Sumber: BPKA DIY, 2024

3. Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Konsep pemindahtanganan barang milik daerah berbeda dengan konsep penghapusan barang milik daerah, mendasar pada siklus pengelolaan barang milik daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemindahtanganan dan pemusnahan merupakan kegiatan yang

dilaksanakan sebelum proses penghapusan, atau menjadi salah satu sebab adanya penghapusan.

Penghapusan merupakan *ending point* dari semua siklus pengelolaan BMD yang membebaskan Pengguna Barang dan Pengelola Barang dari kewajiban untuk mengadministrasikan dan mengelola BMD.

Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

- a. Penyerahan barang milik daerah;
- b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- c. Pemindahtanganan atas barang milik;
- d. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemusnahan; atau
- g. Sebab lain.

Sebab lain sebagaimana dimaksud di atas merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Dengan melaksanakan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah, harapannya dapat terwujud pengelolaan barang milik daerah pada OPD Pengguna Barang maupun Pengelola Barang secara optimal, khususnya terhadap barang milik daerah yang dalam kondisi rusak berat, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, serta tidak lagi digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Sehingga secara ekonomis akan lebih menguntungkan bagi Daerah, serta lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran/biaya pemeliharaan.

Secara definisi, pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Barang milik daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah, dan
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Untuk menjamin bahwa proses pemindahtanganan BMD di Pemda DIY dapat berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan, telah disusun Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

a. Dasar dan Tujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Pada prinsipnya semua Barang Milik Daerah dapat dihapuskan. Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Tujuan dari Pemindahtanganan Barang Milik Daerah:

- 1) Menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar;
- 2) Mengurangi penggunaan ruangan untuk gudang/tempat penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai, dan kadaluarsa;
- 3) Mengurangi beban dalam penatausahaan barang.

b. Penghapusan Aset Tidak Bergerak

Penghapusan aset tidak bergerak yang dilakukan terhadap bangunan dan peralatan dan mesin yang dilakukan atas dasar pertimbangan/alasan sebagai berikut:

- 1) Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*;
- 2) Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);
- 3) Terkena planologi kota;
- 4) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- 5) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi; dan
- 6) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

c. Penghapusan Aset Bergerak

Penghapusan aset bergerak dilakukan atas dasar pertimbangan/alasan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan Teknis, antara lain:
 - a) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
 - b) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
 - c) Telah melampaui batas waktu kegunaannya/ kedaluwarsa.
 - d) Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
 - e) Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/ pengangkutan.
- 2) Pertimbangan Ekonomis, antara lain:
 - a) Untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau *idle*.
 - b) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

- c) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan:
 - (1) Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang, di luar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang.
 - (2) Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.
 - (3) Karena kecelakaan, bencana, atau alasan lainnya yang sifatnya tidak terduga (*force majeure*)

d. Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Penjualan dan Lelang

Salah satu bentuk dari pemindahtanganan adalah penjualan. Penjualan BMD dapat dilaksanakan dengan pertimbangan:

- 1) Untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- 2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- 3) Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum pelaksanaan pemindahtanganan BMD melalui penjualan ada tahapan yang harus dilaksanakan yaitu penilaian dengan tujuan untuk mendapatkan nilai wajar. Penilaian dalam rangka pemindahtanganan BMD melalui penjualan berupa bangunan gedung dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik, sedangkan untuk penilaian barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dapat dilaksanakan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan melibatkan penilai/penaksir dari instansi teknis.

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemda DIY membentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah sub kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 22/TIM/2023 tanggal 27 Februari 2023.

Sebelum masuk pada tahap pelaksanaan, proses pemindahtanganan barang milik daerah pada Pemda DIY melalui beberapa tahapan persiapan, sebagai berikut:

- 1) Verifikasi Usulan BMD yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi atau Berita Acara Pengecekan dan Penelitian;
- 2) Penilaian BMD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian atau Penaksiran Harga; dan
- 3) Persetujuan Pemindahtanganan BMD oleh Gubernur.

Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan proses pemindahtanganan dengan cara penjualan dan lelang sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, sebagai berikut:

- 1) Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Posko SAR Pantai Baron di Padukuhan Rejosari, Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 400/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada OPD di Lingkungan Pemda DIY dan telah diubah dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 418/KEP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 400/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan pada OPD di Lingkungan Pemda DIY.
- 2) Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY dan Dinas Kesehatan DIY yang terletak di Jl. Kyai Mojo No. 56 Kelurahan Bener, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 418/KEP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 400/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan pada OPD di Lingkungan Pemda DIY.

- 3) Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada SMAN 10 Yogyakarta yang terletak di Jl. Gadean No. 5 Ngupasan, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 378/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung Pendidikan Permanen pada SMAN 10 Yogyakarta.
- 4) Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian (BP3MBTP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY di Ngipiksari, Hargobinangun, Pakem, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 377/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY.
- 5) Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 379/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan dan Penghapusan Bangunan pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY.
- 6) Penjualan BMD berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen pada BPTTG Unit Fasilitas Kemasan di Jl. Laksda Adisucipto KM 8,5, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 49/KEP/2023 tentang Harga Dasar Penjualan Ulang Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen pada BPTTG Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.
- 7) Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 87/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin

serta Aset Tetap Lainnya dari Daftar Barang Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023.

- 8) Penjualan BMD berupa Kayu Hasil Penebangan Pohon dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Tepus-Jerukwudel I dan Tepus Jerukwudel II di Kabupaten Gunungkidul, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 91/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Hasil Penebangan Pohon dan Pembongkaran Bangunan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalan Baru Tepus-Jerukwudel I dan Tepus-Jerukwudel II di Kabupaten Gunungkidul .
- 9) Penjualan BMD berupa Sisa Material Bongkaran Bangunan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Tepus-Jerukwudel I dan Tepus Jerukwudel II di Kabupaten Gunungkidul, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 91/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Hasil Penebangan Pohon dan Pembongkaran Bangunan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalan Baru Tepus-Jerukwudel I dan Tepus-Jerukwudel II di Kabupaten Gunungkidul .
- 10) Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan (Besi Beton) yang terletak di Gudang Dinas PUP ESDM DIY d/a Jl. Kyai Mojo Nomor 70, Tegalrejo, Yogyakarta, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 105/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Sisa Bongkaran Material Bangunan di Jalan Perwakilan dalam Rangka Pembangunan Jogja Planning Gallery.
- 11) Penjualan BMD berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Tempat Usaha Hasil Pengadaan Tanah dalam Rangka Perluasan Teras Malioboro 1 dan Pembuatan Akses Penghubung Tempat Parkir Beskalan dan Teras Malioboro 1, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 244/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan BMD berupa Bangunan Rumah

Tinggal dan Tempat Usaha Hasil Pengadaan Tanah dalam Rangka Perluasan Teras Malioboro 1 dan Pembuatan Akses Penghubung Tempat Parkir Beskalan dan Teras Malioboro 1.

- 12) Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pabrik dan Rumah Kepala Pabrik pada UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang terletak di Kalurahan Dlingo dan Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 377/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY.
- 13) Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian (BP3MBTP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Bangunan Gedung pada SMKN 1 Kasihan dan Bangunan Gedung pada SLBN 1 Bantul, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 377/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY.
- 14) Penjualan BMD berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis – Girijati (Ds. Grogol IX, Parangtritis, Kec. Kretek, Kabupaten Bantul), yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 283/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis – Girijati dan Simpang Bundaran Planjan.

- 15) Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 281/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Bangunan dan Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemda DIY.
- 16) Penjualan BMD berupa Tebangan Pohon (Kayu) Hasil Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis-Girijati (Tahap I), yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 361/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan BMD berupa Tebangan Pohon Hasil Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis-Girijati.
- 17) Penjualan BMD berupa Hewan Ternak pada UPTD BPPTDK DPKP DIY, dengan rincian:
 - a) Sapi Perah sebanyak 10 ekor, berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a Jl. Kaliurang km. 23 Ngipiksari, Hargobinangun, Pakem, Sleman.
 - b) Sapi Bull sebanyak 2 ekor, berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a Jl. Palagan Tentara Pelajar km. 15 Sumedang, Purwobinangun, Pakem, Sleman, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 338/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan BMD berupa Hewan Ternak pada BPPTDK dan Balai Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian DPKP DIY.
- 18) Penjualan BMD berupa Hewan Ternak pada UPTD BPPTDK DPKP DIY, dengan rincian:
 - a) Kambing/Domba sebanyak 17 ekor, berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a Barongan, Sumberagung, Jetis, Bantul.

- b) Sapi Potong sebanyak 4 ekor , berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a Barongan, Sumberagung, Jetis, Bantul, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 338/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan BMD berupa Hewan Ternak pada BPPTDK dan Balai Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian DPKP DIY .
- 19) Penjualan BMD berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Simpang Bundaran Planjan, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 283/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan BMD berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis-Girijati dan Simpang Bundaran Planjan, dan telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 377/KEP/2023 tentang Harga Dasar Penjualan Ulang BMD berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis-Girijati dan Simpang Bundaran Planjan.
- 20) Penjualan BMD berupa Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 377/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY.
- 21) Penjualan BMD berupa Tebangan Pohon (Kayu Hasil Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis-

Girijati (Tahap II), yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 361/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan BMD berupa Tebangan Pohon Hasil Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis-Girijati.

- 22) Lelang BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda Empat sebanyak 6 unit dan Roda Dua sebanyak 14 unit, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2023 tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.35. Hasil Penjualan dan Lelang BMD Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Kegiatan Penjualan	Tanggal Pelaksanaan Lelang/Penjualan	Hasil Penjualan (Rp)
1.	Penjualan BMD berupa Penjualan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Posko SAR Pantai Baron di Padukuhan Rejosari, Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul	10 Januari 2023	550.000
2.	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung BKD DIY dan Dinas Kesehatan DIY yang terletak di Jl. Kyai Mojo No.56 Kelurahan Bener, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	13 Januari 2023	1.212.600.000
3.	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada SMAN 10 Yogyakarta yang terletak di Jl. Gadean No. 5 Ngupasan	25 Januari 2023	182.250.000
4.	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian (BP3MBTP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY di Ngipiksari, Hargobinangun, Pakem	31 Januari 2023	28.000.000
5.	Penjualan BMD berupa sisa bongkaran material bangunan pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes DIY	14 Februari 2023	45.696.969

No	Uraian Kegiatan Penjualan	Tanggal Pelaksanaan Lelang/Penjualan	Hasil Penjualan (Rp)
6.	Penjualan BMD berupa Penjualan BMD berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen pada BPTTG Unit Fasilitas Kemasan di Jl. Laksda Adisucipto KM 8,5	24 Februari 2023	90.500.000
7.	Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya	27 Maret 2023	265.735.000
8.	Penjualan BMD berupa Kayu Hasil Penebangan Pohon dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Tepus-Jerukwudel I dan Tepus Jerukwudel II di Kabupaten Gunungkidul	28 Maret 2023	194.000.000
9.	Penjualan BMD berupa Sisa Material Bongkaran Bangunan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Tepus-Jerukwudel I dan Tepus Jerukwudel II di Kabupaten Gunungkidul	28 Maret 2023	40.000.000
10.	Penjualan berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan (Besi Beton) yang terletak di Gudang Dinas PUP ESDM DIY d/a Jl. Kyai Mojo Nomor 70, Tegalrejo, Yogyakarta	17 April 2023	201.700.000
11.	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pabrik dan Rumah Kepala Pabrik pada UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang terletak di Kalurahan Dlingo dan Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY	4 Agustus 2023	1.610.000
12.	Penjualan Bangunan Rumah Tinggal dan Tempat Usaha Hasil Pengadaan Tanah dalam Rangka Perluasan Teras Malioboro 1 dan Pembuatan Akses Penghubung Tempat Parkir Beskalan dan Teras Malioboro 1	7 Agustus 2023	396.000.000
13.	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian (BP3MBTP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Bangunan Gedung pada SMKN 1 Kasihan, dan Bangunan Gedung pada SLBN 1 Bantul	15 September 2023	32.300.000

No	Uraian Kegiatan Penjualan	Tanggal Pelaksanaan Lelang/Penjualan	Hasil Penjualan (Rp)
14.	Penjualan berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis – Girijati (Ds. Grogol IX, Parangtritis, Kec. Kretek, Kabupaten Bantul).	6 Oktober 2023	50.000.000
15.	Penjualan berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY	4 Oktober 2023	148.725.600
16.	Penjualan berupa Tebangan Pohon (Kayu) Hasil Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis-Girijati (Tahap I)	10 November 2023	75.050.000
17.	Penjualan BMD berupa Hewan Ternak pada UPTD BPPTDK DPKP DIY, dengan rincian: 1. Sapi Perah sebanyak 10 ekor, berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a Jl Kaliurang km 23 Ngipiksari, Hargobinangun Pakem, Sleman. 2. Sapi Bull sebanyak 2 ekor, berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a Jl. Palagan Tentara Pelajar km. 15 Sumedang, Purwobinangun, Pakem, Sleman	8 November 2023	275.525.000
18.	Penjualan BMD berupa Hewan Ternak pada UPTD BPPTDK DPKP DIY, dengan rincian: 1. Kambing/Domba sebanyak 17 ekor, berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a Barongan, Sumberagung, Jetis, Bantul. 2. Sapi Potong sebanyak 4 ekor, berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a Barongan, Sumberagung, Jetis, Bantul	17 November 2023	91.111.000
19.	Penjualan berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Simpang Bundaran Planjan	20 November 2023	61.250.000

No	Uraian Kegiatan Penjualan	Tanggal Pelaksanaan Lelang/Penjualan	Hasil Penjualan (Rp)
20.	Penjualan berupa Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY, sebagai berikut: 1. Bangunan Gedung Kantor Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Disnakertrans DIY yang berlokasi di Jl. Kyai Mojo No. 5, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta. 2. Bangunan Rumah Daerah pada Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran, Dinas Perhubungan DIY yang berlokasi di Jl. Airport Adisucipto No. 340, Karangploso, Maguwoharjo, Depok, Sleman. 3. Bangunan Rumah Daerah yang berlokasi di Sekendal, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo. 4. Bangunan Gedung yang berlokasi di Gedongan, Sumberagung, Moyudan, Sleman.	1 Desember 2023	81.500.000
21.	Penjualan berupa Tebangan Pohon (Kayu) Hasil Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis-Girijati (Tahap II)	6 Desember 2023	42.000.000
22.	Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional, sebagai berikut: - Kendaraan Roda 4 = 6 Unit - Kendaraan Roda 2 = 14 Unit	11 Desember 2023	319.210.979
TOTAL HASIL PENJUALAN			3.893.817.148

Sumber: BPKA DIY, 2024

e. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sementara itu untuk penghapusan BMD, pada prinsipnya adalah penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, Daftar Barang Pengguna dan atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, serta dari Daftar Barang Milik Daerah. Dasar hukum untuk melakukan penghapusan adalah surat keputusan penghapusan BMD dari pejabat yang berwenang.

Salah satu alasan dilakukannya penghapusan BMD karena kondisinya sudah rusak berat, serta tidak bisa dimanfaatkan, jika dilakukan

perbaikan maka biaya pembetulannya lebih mahal jika dibandingkan beli baru, sehingga lebih tepat jika dihapuskan. Penghapusan BMN juga dilakukan ketika terjadi pemindahtanganan, meliputi: dijual, dihibahkan, tukar menukar, penyertaan modal pemerintah.

Pelaksanaan penatausahaan penghapusan BMD secara ringkas meliputi:

- 1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- 2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- 3) Penghapusan dari Daftar BMD.

Proses penghapusan BMD yang telah dilaksanakan Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan, adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Gubernur DIY Nomor 93/KEP/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengelola Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 320/KEP/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dari Daftar Barang Milik Daerah.
- 3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 321/KEP/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dari Daftar Barang Milik Daerah.
- 4) Keputusan Gubernur DIY Nomor 327/KEP/2023 tentang Penghapusan BMD yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dari Daftar Barang Milik Daerah.
- 5) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 7/SEKDA/I/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY .
- 6) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 26/SEKDA/III/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Bangunan Gedung Pos Jaga

Permanen pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 7) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 27/SEKDA/III/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- 8) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 28/SEKDA/III/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta.
- 9) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 35/SEKDA/V/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan DIY.
- 10) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 36/SEKDA/V/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Obat Kadaluarasa pada Dinas Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan DIY.
- 11) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 37/SEKDA/V/2023 tentang Penghapusan BMD pada Badan Kepegawaian Daerah DIY.
- 12) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 38/SEKDA/V/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Bangunan Gedung Laboratorium Permanen pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY.
- 13) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 42/SEKDA/VI/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.
- 14) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 44/SEKDA/VII/2023 tentang Penghapusan BMD berupa KDP di Lingkungan Pemda DIY.
- 15) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 47/SEKDA/VII/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya dari Daftar Barang Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023.
- 16) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 55/SEKDA/IX/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Alat Musik Tradisional/Daerah

pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang Dihilangkan kepada Akademi Angkatan Laut.

- 17) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 56/SEKDA/X/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37/SEKDA/V/2023 tentang Penghapusan BMD pada Badan Kepegawaian Daerah DIY.
- 18) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 66/SEKDA/XI/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan dan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul.
- 19) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 67/SEKDA/XI/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran.
- 20) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 68/SEKDA/XI/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 21) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 69/SEKDA/XI/2023 tentang Penghapusan BMD berupa Hewan Ternak pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan dan Balai Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian DPKP TA 2023.

f. Pemusnahan Barang Milik Daerah

Pemusnahan BMD dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud memenuhi unsur tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan dan ada alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan kegiatan pemusnahan, sebagai berikut:

- 1) Pemusnahan BMD berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 282/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan BMD berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran.
- 2) Pemusnahan BMD berupa Obat Kadaluarsa pada Dinas Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 933/19770 tanggal 25 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan.

Atas kegiatan pemusnahan dimaksud, telah terbit Keputusan Penghapusan BMD sebagai berikut:

- 1) Keputusan Sekda Nomor 67/SEKDA/XI/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran.
- 2) Keputusan Sekda Nomor 36/SEKDA/V/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Obat Kadaluarsa pada Dinas Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Pendayagunaan Barang Daerah

a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Dalam keseluruhan rangkaian pengelolaan BMD, kegiatan pemanfaatan BMD menjadi salah satu kegiatan yang cukup strategis. Pemanfaatan BMD bermakna sebagai pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan BMD sekaligus upaya optimalisasi aset

untuk dapat menjadi salah satu kontribusi pendapatan asli daerah. Selanjutnya, mekanisme dalam pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui 5 (lima) bentuk pemanfaatan, yakni: 1) Sewa; 2) Pinjam Pakai; 3) Kerja sama Pemanfaatan; 4) Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG); dan 5) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

di Tahun 2023, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan 2 (dua) bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah, yakni sewa dan pinjam pakai. Selain bentuk pemanfaatan tersebut di atas, Barang Milik Daerah juga dioptimalkan melalui mekanisme retribusi pemakaian kekayaan daerah. Rincian pemanfaatan BMD yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, meliputi:

- 1) BMD berupa Tanah dan/atau Bangunan yang dimanfaatkan melalui sewa sebanyak 30 obyek sebagaimana tersaji pada berikut

Tabel 2.36. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2023 (Rp)	Keterangan
1	Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulonprogo	PT. Formula Land	120.000.000	-
2	Bangunan Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 utk 5 th sekaligus (2022-2027)
3	Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo	PT. Selo Adi Karto	-	Pembayaran dilakukan pada tahun utk 2 th sekaligus (2022-2024)
4	Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji	Suprihanto, B.Sc	191.250.000	-
5	Tanah dan Bangunan eks Rumah Dinas Jl. Munggur No.32 Yogyakarta	BUKP Gondokusuman	20.000.000	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2023 (Rp)	Keterangan
6	Tanah di Jl. Wisata, Babarsari, Sleman	Yayasan Dharmapala	45.200.000	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2021-2026)
7	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	17.460.000	-
8	Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta	dr. Soedarman	188.125.000	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2023-2028)
9	Tanah di Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo	KPRI Sumber Rejeki	7.050.000	
10	Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Kelompok Tani Tirto Manunggal		- Pembayaran dilakukan pada tahun 2019 utk 5 tahun sekaligus (2019-2024)
11	Gedung Jogja Expo Center	PT. Surya Abhinaya Sentosa	2.700.000.000	-
12	Tanah, Bangunan dan Fasilitas di Jalan Malioboro Nomor 52-58 Yogyakarta	PT. Setia Mataram Tritunggal	7.650.000.000	-
13	Tanah di Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman	Pemerintah Kalurahan Widodomartani		- Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 5 th sekaligus (2021-2026)
14	Tanah di Jl. Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	PT. Daya Armada Nusantara		- Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 utk 5 tahun sekaligus (2022-2027)
15	Tanah di Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yogyakarta	Tien Setiantoro	12.500.000	-
		Aris Purnomo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 utk 3 tahun sekaligus (2022-2025)
		Sumartiningsih	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 utk 3 tahun sekaligus (2022-2025)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2023 (Rp)	Keterangan
16	Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman	Roos Ani	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 utk 3 tahun sekaligus (2022-2025)
		Hermawan	3.310.000	-
		Badan Anti Korupsi	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022
17	Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman	PT. Avo Innovation Technology	32.300.000	Pembayaran dilakukan utk 2 tahun sekaligus (2023-2025)
		Ir. Bambang Priambodo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 utk 2 tahun sekaligus (2022&2023)
18	Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden, Bantul	YB. Pratomo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 utk 5 th sekaligus (2022-2027)
19	Tanah dan bangunan di Jl. Janti (Eks Dinas Gedung Pertambangan)	PT. Anindya Mitra Internasional	336.651.000	-
20	Tanah di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 3 th sekaligus (2021-2023)
		Widodo Mulyo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 utk 3 th sekaligus (2022-2025)
21	Tanah dan bangunan di Jl. DI. Panjaitan No. 70 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 5 th sekaligus (2021-2026)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2023 (Rp)	Keterangan
22	Tanah dan bangunan di Komplek Griya Permata Hijau Nomor D.1 Purwomartani, Kalasan, Sleman	CV. Plainthing Group	25.600.000	-
23	Tanah dan bangunan di Jl. Sriti No. 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman	Lembaga Konsumen Yogyakarta	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 3 th sekaligus (2021-2024)
24	Tanah dan bangunan di Jl. Kusumanegara No. 168E Yogyakarta	LP2Desaku	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 2 th sekaligus (2021-2023)
25	Tanah eks Tanah Kas Desa Wates (± 67 Bidang Tanah)	103 Penyewa	369.691.986	Pembayaran untuk retribusi eks TKD Wates 2023-2024
26	Tanah dan Bangunan Eks Diklat Perindustrian, Malang, Ringroad Selatan	Yayasan Yogyakarta Angga Binangun	67.704.000	-
27	Tanah dan Bangunan EKS PPK Kulon Progo Jalan Wates-Purworejo km.10 Seworan, Triharjo, Wates	Koperasi Angkasa Pura I Avia	24.400.000	-
28	Tanah di Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Depri Priatna	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 untuk 5 th sekaligus (2022-2027)
28	Tanah di Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Uep Sumiarsah	5.000.000	-
		Juju	4.000.000	-
		Zuljasrifon	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 untuk 5 th sekaligus (2021-2026)
29	Tanah di Sumberagung, Moyudan, Sleman	Pemerintah Kalurahan Sumberagung	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2022 untuk 5 th sekaligus (2022-2027)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2023 (Rp)	Keterangan
30	Tanah di Hargobinangun, Pakem, Sleman	PT. Anindya Mitra Internasional	320.000.000	Pembayaran untuk 5 th sekaligus (2023-2028)

Sumber: BPKA DIY, 2024

Atas barang milik daerah berupa tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dan bangunan “Malioboro Hotel” beserta fasilitasnya di Jalan Margo Utomo d/h Jalan Malioboro No. 52-58 yang merupakan milik Pemda DIY dilakukan pemanfaatan melalui bentuk sewa kepada PT. Setia Mataram Tritunggal dengan nilai sewa Rp7.650.000.000,00 untuk jangka waktu sewa 13 September 2022 sampai dengan 12 September 2023. Atas Sewa tersebut kemudian dilakukan perpanjangan sewa kepada PT. Setia Mataram Tritunggal untuk jangka waktu sewa 13 September 2023 sampai dengan 12 September 2024 dengan nilai sewa Rp7.650.000.000,00. Pada tahun 2023 juga dilakukan persiapan pemanfaatan di 2024 dengan cara Kerjasama Pemanfaatan (KSP) untuk jangka waktu panjang 30 tahun.

- 2) BMD berupa Rumah Daerah yang dimanfaatkan melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Tabel 2.37. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2023 (Rp)	Ket
1	Jl. Colombo Nomor 59 Yogyakarta	Mrabawanati / Asep S	4.060.000	-
2	Jl. Colombo Nomor 60 Yogyakarta	Ir. Syahbenol Hasibuan	7.521.600	-
3	Jl. Colombo Nomor 61 Yogyakarta	Sugistiati	2.459.460	-
4	Jl. Janturan Nomor 29 Yogyakarta	Iwan Kurniawan, S.STPar	2.792.400	-
5	Jl. Janturan Nomor 29 A Yogyakarta	Asmita	698.100	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2023 (Rp)	Ket
6	Jl. Sriti Nomor 20 B Demangan, Yogyakarta	Ny. Dra. Sulistyaningsih	3.396.000	-
7	Jl. Sriti Nomor 20 C Demangan, Yogyakarta	Bambang Hermanto, SH, M.Hum	5.494.000	-
8	Jl. Sriti Nomor 20 E Demangan, Yogyakarta	Niken Styawati	1.464.000	
9	Jl. Bima Nomor 25 Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Eko Fajar Laksana	3.142.930	-
10	Jl. Bima Nomor 25 A Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Maria Kristina Budi	2.904.820	-
11	Jl. Bima Nomor 25 B Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Adjie Mardana	780.000	-
12	Jl. Bima Nomor 25 C Jurugentong, Banguntapan, Bantul	M. Ridwan S	1.878.000	-
13	Jl. D.I. Panjaitan No. 74 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Ny. Djaenab Murniati	8.797.600	-
14	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (1)	Monika Irene Donatirin	4.148.790	-
15	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (2)	Jaka Surana, SE	2.023.800	-
16	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Siti Mukaronah	2.286.000	-
17	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Arum Iswandari	630.000	-
18	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rini Setraparwati	3.505.200	-
19	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Dwi Nugroho	2.367.600	-
20	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Eko Supriyanto, SH	2.340.000	-
21	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Tri Mulyadi, S.Hut, MP	2.286.000	-
22	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Nitis Mito	2.286.000	-
23	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Hasan Khoiri, A.Md	3.103.200	-
24	Panggungharjo, Sewon, Bantul (1)	Suhartati	2.994.000	-
25	Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)	Mashudi	1.497.000	-
26	Panggungharjo, Sewon, Bantul (4)	Gutik Lestarna, SPT	2.994.000	-
27	Panggungharjo, Sewon, Bantul (5)	Wahyuningsih	3.493.000	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2023 (Rp)	Ket
28	Jalan Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman	Yasrizal, S.Sos, M.Si	2.292.010	-
29	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Purwiyani Dewi Admadja	3.160.800	-
30	Jl. Panembahan Romo Nomor 65 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	Dra. Rahayu Endang Pujiati	6.306.600	-
31	Jl. Podang No. 4 Caturtunggal, Depok, Sleman	Anastasia Sri Winarsi	2.415.600	-

Sumber: BPKA DIY, 2024

- 3) BMD yang dioptimalkan melalui pinjam pakai tertuang dalam 34 perjanjian pinjam pakai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.38. Barang Milik Daerah yang Dioptimalkan Melalui Pinjam Pakai

No	Objek Pinjam Pakai	Berdasarkan		Peminjam
		SK Gubernur	Perjanjian	
1	Barang Milik daerah Pemda DIY berupa 13 bidang tanah dan 2 bangunan gedung yang terletak di Kabupaten Kulon Progo	357/KEP/2020	43/PERJ/SEKDA/XII/2020	Pemkab Kulon Progo
2	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 10 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Kulon Progo	39/KEP/2020	11/PERJ/SEKDA/III/2020	Pemkab Kulon Progo
3	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Kulon Progo	228/KEP/2022	29/PERJ/SEKDA/VII I/2022	Pemkab Kulon Progo
4	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian bidang tanah di Kota Yogyakarta dan satu unit kendaraan dinas operasional roda empat.	125/KEP/2021	16/PERJ/GUB/V/2021	Kanwil BPN DIY

No	Objek Pinjam Pakai	Berdasarkan		Peminjam
		SK Gubernur	Perjanjian	
5	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sepuluh bidang tanah dan tiga unit bangunan yang terletak di Kabupaten Bantul	328/KEP/2020	41/PERJ/SEKDA/XI/2020	Pemkab Bantul
6	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian bidang tanah yang terletak di Kota Yogyakarta.	79/KEP/2020	15/PERJ/SEKDA/V/2020	BPS Kota Yogyakarta
7	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah di Kabupaten Gunungkidul	291/KEP/2019	5/PERJ/SEKDA/II/2020	Pemkab Gunungkidul
8	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa delapan belas bidang tanah yang terletak di Kabupaten Gunungkidul	40/KEP/2021	5/PERJ/SEKDA/III/2021	Pemkab Gunungkidul
9	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tiga bidang tanah dan satu unit bangunan yang terletak di Kota Yogyakarta	143/KEP/2020	24/PERJ/SEKDA/VII/2020	Pemkot Yogyakarta
10	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian bangunan/gedung di Kota Yogyakarta	308/KEP/2020	37/PERJ/SEKDA/X/2020	Sekber Kartamantul
11	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah yang terletak di Kota Yogyakarta	89/KEP/2020	18/PERJ/SEKDA/V/2020	ISI Yogyakarta

No	Objek Pinjam Pakai	Berdasarkan		Peminjam
		SK Gubernur	Perjanjian	
12	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sembilan bidang tanah yang terletak di Kabupaten Sleman	167/KEP/2023	19/PERJ/SEKDA/VII/2023	Pemkab Sleman
13	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tiga bidang tanah di kota Yogyakarta dan peralatan dan mesin	115/KEP/2023	14/PERJ/SEKDA/VI/2023	KPU DIY
14	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa lima kendaraan dinas operasional roda empat dan dua kendaraan dinas operasional roda dua.	31/KEP/2020	9/PERJ/SEKDA/III/2020	KPU DIY
15	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian bidang tanah di Kota Yogyakarta.	204/KEP/2023	15/PERJ/SEKDA/VI/2023	BNNP DIY
16	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu unit kendaraan dinas operasional roda empat.	284/KEP/2023	21/PERJ/SEKDA/X/2023	Pangkalan TNI AL Yogyakarta
17	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian tanah di Kabupaten Bantul dan di Kabupaten Sleman	430/KEP/2020	1/PERJ/SEKDA/I/2021	Detasemen Zeni Bangunan 2/IV Yogyakarta
18	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Yogyakarta.	86/KEP/2020	16/PERJ/SEKDA/V/2020	BSSN RI
19	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Sleman	245/KEP/2022	31/PERJ/SEKDA/IX/2022	BPS RI

No	Objek Pinjam Pakai	Berdasarkan		Peminjam
		SK Gubernur	Perjanjian	
20	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian bidang tanah dan sebagian bangunan yang terletak di Kota Yogyakarta.	363/KEP/2023	26/PERJ/SEKDA/XI/2023	Bawaslu DIY
21	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 3 unit kendaraan dinas operasional roda empat.	256/KEP/2022	32/PERJ/SEKDA/IX/2022	Korem 072/Pamungkas
22	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu unit kendaraan dinas operasional roda empat.	97/KEP/2020	19/PERJ/SEKDA/V/2020	Pangkalan TNI AU Adi Sutjpto
23	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu unit kendaraan dinas operasional roda empat.	60/KEP/2019	8/PERJ/SEKDA/V/2019	Pangkalan TNI AU Adi Sutjpto
24	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu unit kendaraan operasional dinas roda empat.	269/KEP/2020	49/PERJ/SEKDA/X/2022	Kejaksaaan Tinggi DIY
25	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu unit kendaraan operasional dinas roda empat.	268/KEP/2022	50/PERJ/SEKDA/X/2022	Polda DIY
26	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian bidang tanah yang terletak di Kabupaten Sleman.	31/KEP/2021	3/PERJ/SEKDA/II/2021	Kalurahan Bokoharjo
27	Barang Milik Daerah DIY berupa tiga bidang tanah dan satu unit bangunan yang berlokasi di Kota Yogyakarta.	347/KEP/2021	34/PERJ/SEKDA/XI/2021	Pemkot Yogyakarta

No	Objek Pinjam Pakai	Berdasarkan		Peminjam
		SK Gubernur	Perjanjian	
28	Barang Milik Daerah DIY berupa satu bidang tanah yang terletak di Kota Yogyakarta.	368/KEP/2021	35/PERJ/SEKDA/XI/2021	Pemkot Yogyakarta
29	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah dan satu unit bangunan yang terletak di Kabupaten Sleman.	257/KEP/2022	1/PERJ/SEKDA/I/2023	BAIS TNI
30	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah dan dua unit bangunan yang terletak di Kota Yogyakarta	97/KEP/2021	14/PERJ/SEKDA/IV/2021	KPPU RI
31	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Sleman	265/KEP/2022	66/PERJ/SEKDA/XII/2022	Polda DIY
32	Barang Milik Daerah berupa satu unit kendaraan dinas operasional roda empat.	52/KEP/2023	4/PERJ/SEKDA/III/2023	Sekber Kartamantul
33	Barang Milik Daerah berupa satu unit bangunan di Kota Yogyakarta.	399/KEP/2023	30/PERJ/SEKDA/XII/2023	Pemkot Yogyakarta
34	Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan satu unit bangunan di Kota Yogyakarta.	159/KEP/2021	21/PERJ/SEKDA/VII/2021	BKSDA Yogyakarta

Sumber: BPKA DIY, 2024

b. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah

1) Pembersihan Lahan

Pembersihan lahan dilaksanakan pada 3 (tiga) bidang tanah *idle* untuk menjaga kualitas dan kesiapan lahan agar dapat didayagunakan. Tiga bidang tanah yang dilakukan pembersihan

lahan meliputi (1). Tanah sisi timur Kawasan Jogja Expo Center, (2) Tanah di Gunung Sempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul dan (3) Tanah di Jalan Taman Siswa, Mergangsan, Yogyakarta. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembersihan lahan adalah Rp16.200.000,-

2) **Asuransi Barang Milik Daerah**

Asuransi Barang Milik Daerah bertujuan untuk mengalihkan resiko atau ketidakpastian atas Barang Milik Daerah bila terjadi sesuatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Asuransi barang milik daerah dilaksanakan terhadap kendaraan dinas operasional roda empat ke atas dan bangunan gedung. Pemilihan penyedia asuransi dilaksanakan dengan cara tender oleh Balai Layanan Pengadaan (BLP). Masa pertanggungan asuransi adalah 21 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2024 yang didanai melalui APBD tahun anggaran 2023 dengan anggaran tersedia sebesar Rp650.000.000,00. Pelaksanaan asuransi barang milik daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Asuransi kendaraan dinas operasional roda empat ke atas milik Pemda DIY, dengan penyedia jasa PT. Asuransi Sinar Mas dengan pagu anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan nilai kontrak asuransi kendaraan sebesar Rp287.195.903,00,00. Total kendaraan yang diasuransikan sebanyak 136 unit kendaraan, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Pertanggungan komprehensif dengan perluasan Banjir, Gempa Bumi, huru-hara Kerusuhan, terorisme dan sabotase, TJH pihak ketiga dan kecelakaan diri (pengemudi dan penumpang) sebanyak 8 unit kendaraan, dan;
 - (2) Pertanggungan komprehensif tanpa perluasan sebanyak 128 unit kendaraan.

- b) Asuransi bangunan gedung dilaksanakan dalam bentuk pertanggungan kebakaran (*Flexas*) dan pertanggungan gempa bumi dengan Penyedia jasa PT Asuransi Sinar Mas. Pagu Anggaran untuk asuransi bangunan gedung adalah Rp350.000.000,- dan nilai kontrak sebesar Rp348.176.579,00,00. Terdapat 73 unit bangunan yang diasuransikan dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Asuransi kebakaran (*Flexas*) dan asuransi gempa bumi dengan perluasan RSMDCC (*Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotions*) sebanyak 2 unit bangunan;
 - (2) Asuransi Kebakaran (*Flexas*) dengan perluasan RSMDCC (*Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotions*) sebanyak 28 unit bangunan; dan
 - (3) Asuransi kebakaran (*Flexas*) sebanyak 43 unit bangunan.

3) **Pengamanan Fisik Bangunan Gedung**

Pengamanan fisik bangunan gedung dilaksanakan dengan menyediakan satuan pengamanan (tenaga keamanan) pada 4 (empat) lokasi barang milik daerah, yakni (a) Tanah dan bangunan di Jalan Jenggotan, Jetis, Kota Yogyakarta, (b) Tanah dan bangunan di Jalan Cik di Tiro, Yogyakarta, (c) Tanah dan bangunan di Jalan Tunjung Baru, Yogyakarta dan (d) Tanah dan bangunan gudang di Jalan Abu Bakar Ali, Yogyakarta. Pengamanan dilaksanakan oleh 2 tenaga keamanan pada masing-masing lokasi bertujuan untuk memastikan terjaminnya keamanan, kebersihan dan ketertiban pada objek pengamanan. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pengamanan fisik bangunan gedung adalah Rp202.020.000,00.





BAB III

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah

LKPJ
Gubernur DIY

Tahun

2023

BAB III

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah

2023

A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN PEMDA

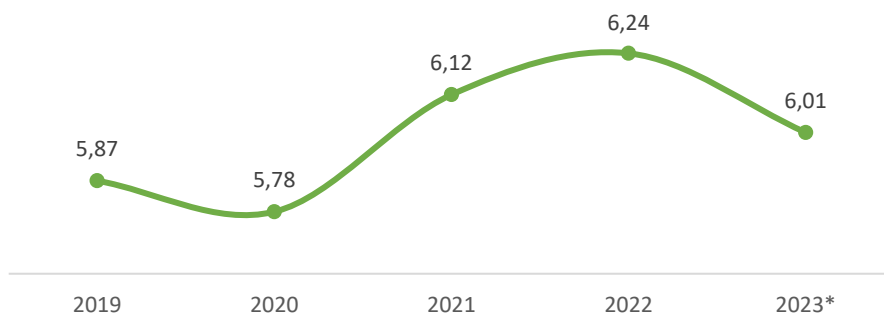
1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat – Angka *Inclusive Growth Index* (IGI)

Peningkatan kinerja perekonomian berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bahwa semua orang akan memperoleh manfaat yang sama. Ukuran keberhasilan pembangunan maupun dinamika perekonomian suatu daerah bukan hanya ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan tersebut juga ditentukan dari kemampuan daerah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta mengurangi permasalahan sosial ekonomi termasuk tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif atau yang selanjutnya dikenal sebagai *Inclusive Growth Index* (IGI) telah dikembangkan sebagai sebuah ukuran yang mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan masalah sosial. Indikator tersebut dikembangkan oleh beberapa lembaga internasional seperti *Asian Development Bank* (ADB), *World Economic Forum* (WEF), dan *United Nation Development Programme* (UNDP). Indikator yang diciptakan adalah sebuah set variabel dan formula untuk melakukan pengukuran pertumbuhan ekonomi alternatif yang menekankan pada kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.

Pengukuran ini disebut dengan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang mencerminkan suatu pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan kesempatan-kesempatan ekonomi yang sama bagi semua orang. Pertumbuhan ekonomi inklusif berfokus pada penciptaan kesempatan ekonomi dan akses yang sama bagi semua anggota masyarakat dari semua golongan. Menurut *Asian Development Bank* (ADB) dan Bappenas, setidaknya ada 3 pilar dalam kerangka kerja pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu: 1) pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi, efisien, dan berkelanjutan; 2) pilar inklusif sosial (pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan); serta 3) pilar jaring pengaman sosial (perluasan akses dan kesempatan). Ketiga pilar tersebut harus didasari oleh tata kelola dan kelembagaan yang baik.

Nilai IGI berkisar dari 0 s/d 10, jika nilainya < 4 berarti kurang memuaskan, nilai antara 4 s/d 7 berarti memuaskan sedangkan nilai 8 s/d 10 artinya sangat memuaskan. Capaian angka IGI DIY selama periode 2019 – 2023 dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah ini.



Gambar 3.1. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IGI) Tahun 2019-2023

Keterangan : Angka tahun 2023 adalah proyeksi

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data olahan)

Nilai IGI sempat menurun di tahun 2020 sebagai dampak pandemi. Meskipun demikian selama tahun 2020 sampai 2023, nilai IGI menunjukkan tren kenaikan pertumbuhan ekonomi inklusif di DIY. Selama periode 2020 sampai 2023, IGI meningkat sebesar 0,23 poin. Nilai IGI sebesar 6,01 mengindikasikan bahwa pembangunan inklusif DIY dikategorikan sebagai memuaskan. Tren peningkatan nilai IGI menunjukkan bahwa perkembangan

ekonomi DIY disertai dengan menurunnya tingkat kemiskinan serta perluasan akses dan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Indikator Tujuan Angka *Inclusive Growth Index* (IGI) Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Tujuan	Realisasi 2022	2023		
		Target	Realisasi	% Realisasi*
Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 6,15 (2021) menjadi 6,64 (2026)	6,24	6,31	6,01	95,25

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (angka proyeksi)

Capaian tahun 2023 adalah sebesar 6,01 yang menunjukkan realisasi di bawah target 6,31 dengan tingkat capaian 95,25%. Meskipun pada tahun 2023 persentase ketercapaian belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPD tahun 2023-2026 namun secara angka indeks mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusivitas pembangunan di DIY melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan sudah berjalan sesuai rencana meskipun masih perlu upaya lebih keras serta mengidentifikasi indikator-indikator pembentuk yang kurang optimal dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Reformasi Birokrasi merupakan indikator indeks yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB RI atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Indeks reformasi Birokrasi mencerminkan kualitas perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja bersih, bebas dari KKN, akuntabel, dan profesional melayani serta memberikan dampak nyata pada pencapaian program pembangunan.

Target dan capaian indikator tujuan berupa Indikator Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY tahun 2023 yang diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB RI tersaji dalam tabel di bawah:

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Tujuan	Realisasi 2022	2023		
		Target	Realisasi	% Realisasi
Indikator reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38 (A) (2026)	81,08 (A)	A	A	100

Sumber: Kemen PAN dan RB RI, 2024

Publikasi Kementerian PAN dan RB RI Nomor B/99/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Pemda DIY berada pada kategori dan Predikat **A (A- dengan catatan)** dengan nilai **88,15**. Capaian tersebut telah memenuhi target tujuan RPD Tahun 2023 yaitu Indeks dengan Predikat A. Hasil Evaluasi Komponen, Sub Komponen dan Indikator Penilaian Reformasi Birokrasi Pemda DIY tertanggal 1 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemda DIY

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,42	2,42
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5,65
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyerhanaan Struktur Organisasi	2	53	1,06
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyerhanaan Birokrasi	2	3	1,2
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,61	2,89
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	1,5	1,29

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	92,1	3,68
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,5	89,17	2,23
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0,4
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	88,91	2,22
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	4	2
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	2		0
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	2	96,64	1,93
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	3	1,2
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	88,37	1,33
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	349	3,4
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,57	1,37
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	94,18	1,41
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	4,22	7,6
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Makro	2	100	2

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	8	57,14	4,21
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	5	5
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	92	3,68
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	62,9	2,52
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	77,33	7,73
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	86,67	6,93
Capaian RB General				100		75,35
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Laju Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	79,46	0,45
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6	93,94	0,54
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan <i>Stunting</i> (Capaian Output)	0,6	53,56	0,31
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6	85,71	0,51
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Laju Inflasi (Capaian Output)	0,6	85,71	0,49

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
37	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Penurunan Tingkat Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,39	1,39
38	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Peningkatan Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,76	1,76
39	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,97	2,97
40	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0,46	0,46
42	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Tingkat Inflasi (Capaian Dampak)	3	2	2
Capaian RB Tematik				20		12,80
41	RB General	Koefisien	Koefisien	10	0	0
Indeks RB						88,15

Sumber: Kemenpan RB, 2024

Tingginya angka ketercapaian Indeks RB tahun 2023 dipengaruhi oleh Pelaksana Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui *double track* berdasarkan Peraturan menteri PAN dan RB RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Kedua *track* tersebut yaitu :

- Reformasi Birokrasi General yang merupakan merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah tata kelola pemerintahan di dalam birokrasi yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan di tingkat hulu;
- Reformasi Birokrasi Tematik yang merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah tata kelola pemerintahan di dalam birokrasi yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan di tingkat hilir atau target pembangunan nasional dan daerah. Terdapat 5 (lima) Tematik Pembangunan yang dirumuskan dalam Reformasi Birokrasi Tematik yaitu : Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian

Inflasi, Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Tematik Administrasi Pemerintahan (*Stunting*).

Pelaksanaan RB berdasarkan *double track* RB general dan RB tematik berdampak pada metode Evaluasi dan Klasifikasi Kriteria Indeks. Hal ini sebagaimana tertuang dalam berdasar PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

Tabel 3.4. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
				budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Sumber: KemenPAN RB, 2024

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sedemikian rupa sehingga seluruh unit kerja di Lingkungan Pemda DIY berkomitmen untuk membangun Zona Integritas.
- 2) Peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi bukan sekedar pada perbaikan tata kelola pemerintahan, namun dapat memberikan kontribusi pada hasil pembangunan.

b. Solusi

- 1) Meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas melalui upaya pembinaan unit layanan dan perumusan metodologi Survei mandiri.
- 2) Melakukan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik (Tematik Pengentasan Kemiskinan, Tematik Investasi, Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Tematik Prioritas Presiden) melalui implementasi lintas sektor dan lintas aktor di lingkungan Pemda DIY.

B. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMDA

Pada dokumen RPD DIY Tahun 2022-2027 terdapat 4 sasaran Pemda dengan 10 indikator kinerja sasaran Pemda dengan capaian indikator yang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2023

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya Aktivitas	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,15	5,34	5,07	94,94	Tidak Tercapai
2	Perekonomian yang Berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	4,06	3,42	3,69	92,11	Tidak Tercapai
3		Indeks Gini	indeks	0,439	0,423	0,449	93,85	Tidak Tercapai
4		Indeks Williamson	indeks	0,4916	0,444	0,4805	91,78	Tidak Tercapai
5		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	59,92	62,96	66,29	105,29	Tercapai
6	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	80,64	81,07	81,09	100,02	Tercapai
7		Tingkat Kemiskinan	persen	11,34	10,74	11,04	97,21	Tidak Tercapai
8	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks	66,52	74,58	66,52*	89,19	Tidak Tercapai
9	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai
10		Nilai AKIP	nilai	AA	AA	AA	100	Tercapai

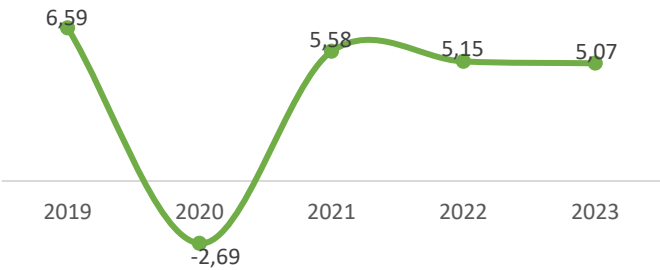
Ket.: *) Realisasi tahun 2023 adalah hasil IPK tahun 2022. Untuk rilis angka IPK tahun 2023 baru akan diterbitkan pertengahan tahun 2024

Sumber: Bappeda DIY, 2024 (data diolah)

Jika melihat tabel di atas, dari 10 indikator kinerja sasaran Pemda terdapat 6 indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan atau capaian masih di bawah 100%, diantaranya: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, Indeks Williamson, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir perekonomian DIY menunjukkan tren penurunan pertumbuhan. Pada tahun 2020 perekonomian DIY mengalami kontraksi karena dampak pandemi Covid-19 dengan tumbuh -2,69% (BRS Nomor 14/02/34/Th.XXIII, 5 Februari 2021). Pada tahun 2021, ekonomi DIY dapat *rebound* dengan tumbuh sebesar 5,58% dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sampai tahun 2023 dengan tumbuh sebesar 5,07%. Pertumbuhan Ekonomi DIY tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan nasional dengan selisih 0,02 poin.



Gambar 3.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019-2023 (%)
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Dengan realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07%, tingkat ketercapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah 94,94%. Adapun target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 adalah 5,34%.

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,34	5,07	94,94

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didukung oleh pertumbuhan positif di semua lapangan usaha. Pertumbuhan paling tinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh 10,29%

dan diikuti pertumbuhan lapangan Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 10,27% serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan sebesar 8,72%.

Berdasarkan sisi pengeluaran, jenis pengeluaran yang tumbuh terbesar adalah Pengeluaran Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PKLNPR) yaitu sebesar 8,75%. Ekspor luar negeri merupakan jenis pengeluaran yang tumbuh tertinggi di tahun 2022 yaitu sebesar 8,33%. Sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 6,5%.

Tingkat capaian pertumbuhan tahun 2023 menurun sebesar 0,05 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 adalah 5,07% dengan tingkat capaian sebesar 94,94% dari target pertumbuhan ekonomi dalam RPD 2022-2026 sebesar 5,34%.

Berdasar data terakhir tahun 2023, selama tiga tahun terakhir, semua kabupaten/kota se-DY tumbuh positif setelah mengalami kontraksi di tahun 2020. Pada tahun 2023, Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang tumbuh tertinggi yaitu 5,65%. Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah yang tumbuh terendah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,03%.

Tabel 3.7. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	13,49	-3,45	4,37	6,57	5,65
Bantul	5,53	-1,65	4,99	5,20	5,06
Gunungkidul	5,33	-0,68	5,29	5,37	5,03
Sleman	6,48	-4,05	5,61	5,15	5,09
Yogyakarta	5,96	-2,42	5,16	5,12	5,08

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

2. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan demikian, semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja atau menganggur. Tingginya jumlah pengangguran disebabkan oleh faktor utama terbatasnya

kesempatan kerja yang tersedia atau tidak siapnya angkatan kerja untuk masuk ke pasar kerja disebabkan tidak sesuainya kualifikasi kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan standar yang diharapkan oleh dunia kerja.

Tabel 3.8. Target dan Capaian Indikator Sasaram Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023

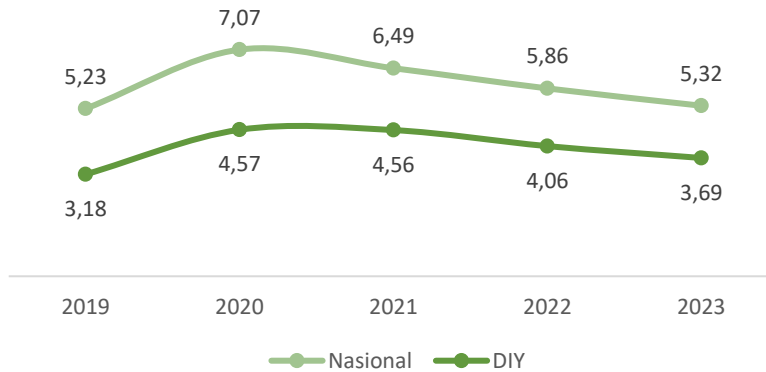
Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,06	3,42	3,69	92,11

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kerja akan berdampak pada besaran capaian TPT, dimana komponen angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Data Sakernas Agustus 2023 BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di DIY sebesar 2.221.694 orang dan jumlah kesempatan Kerja sebesar 2.139.710 orang. Berdasarkan data juga diperoleh informasi jumlah pengangguran sebanyak 81.984 orang, turun 12.691 orang jika dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 94.945 orang. Meskipun jumlah pengangguran mengalami penurunan namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19, sehingga tetap diperlukan kebijakan peningkatan perluasan kesempatan kerja untuk mengimbangi laju pertambahan jumlah angkatan kerja.

Terkait situasi ketenagakerjaan nasional di atas, data TPT DIY menunjukkan angka penurunan yang signifikan pasca pandemi Covid-19, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan ekonomi yang berdampak pada tumbuhnya kesempatan kerja dan juga peningkatan kualitas pencari kerja. Dalam kurun 2019 – 2023 capaian TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 4,57% naik 1,39% poin dari pra pandemi Covid-19 tahun 2019. Kemudian turun menjadi 3,69% pada tahun 2023 atau turun sebesar 0,37% point dibanding tahun 2022 yang mencapai angka 4,06%. Hal yang perlu dicatat bahwa capaian TPT DIY selama lima tahun terakhir masih berada dibawah rata-rata nasional. Pada periode yang sama tahun 2020 TPT nasional tertinggi 7,07% dan TPT DIY 4,57%. Pada tahun 2023 capaian TPT

DIY sebesar 3,69% dan lebih rendah dibanding TPT Nasional 5,32%, perkembangan TPT Nasional dan DIY Tahun 2019–2023 dapat dilihat pada Gambar 3. berikut.



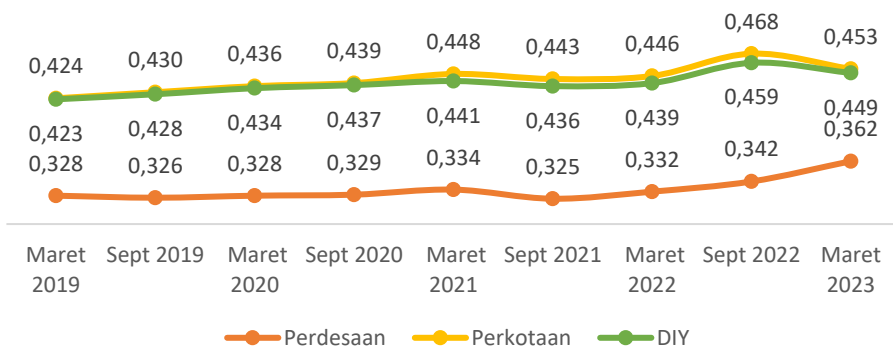
Gambar 3.3. Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2019 - 2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Target TPT yang ditetapkan dalam RPD pada tahun 2023 sebesar 3,42%, realisasi sebesar 3,69% atau capaian realisasi sebesar 92,68%. Tidak tercapainya target TPT ini disebabkan karena kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih, sementara musim kemarau panjang akibat pengaruh cuaca (El Nino) mempengaruhi kesempatan kerja di pedesaan khususnya sektor pertanian yang merupakan tiga sektor tertinggi sebagai penyerap tenaga kerja di DIY. Di samping itu juga disebabkan oleh penambahan penduduk usia kerja yang bermigrasi ke DIY. Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai macam pelatihan vokasi diharapkan mampu mengisi kesempatan kerja yang mulai tumbuh. Adanya upaya penciptaan kesempatan kerja melalui perluasan kerja diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor utama antara lain sektor pariwisata, industri, pertanian dan jasa. Selain itu keterpaduan antar sektor dan terjaganya kondusifitas iklim ketenagakerjaan di DIY diharapkan akan meningkatkan terciptanya perluasan kesempatan kerja yang lebih optimal.

3. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Indeks Gini

Perhitungan derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah salah satunya diukur menggunakan Indeks Gini atau Rasio Gini (*Gini Ratio*). Pada indikator tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh, angkanya berkisar antara 0 hingga 1. Indeks Gini diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama ditunjukkan dengan Indeks Gini bernilai 0. Tingkat ketimpangan yang semakin tinggi ditunjukkan dengan Indeks Gini yang semakin mendekati 1. Sedangkan ketimpangan yang sempurna atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki ditunjukkan dengan Indeks Gini bernilai 1. Perkembangan Indeks Gini menurut daerah tempat tinggal di DIY bulan Maret 2019 – Maret 2023 disajikan sebagai berikut.



Gambar 3.4. Perkembangan Indeks Gini Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan Maret 2019 – Maret 2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Dari data tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Gini sebesar 0,449 pada Maret 2023. Angka ini turun sebesar 0,01 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini September 2022 yang tercatat besarnya

0,459, namun meningkat 0,01 poin dibandingkan dengan Indeks Gini pada Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,439.

Berdasarkan data tersebut juga terlihat bahwa selama periode Maret 2019 sampai dengan Maret 2023, angka Indeks Gini DIY berfluktuasi dengan kecenderungan yang masih meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di DIY masih belum menunjukkan perbaikan. Tingkat ketimpangan DIY terus menunjukkan adanya peningkatan sejak Maret 2019. Bahkan sejak berjangkitnya wabah Covid-19, angka Indeks Gini DIY menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar 0,005 poin per semester. Pada Maret 2023, angka gini rasio di wilayah ini mulai menunjukkan adanya penurunan, dimana rasio gini tercatat sebesar 0,449. Meskipun angka Indeks Gini mengalami penurunan pada Maret 2023, namun angka ketimpangan ini tergolong masih relatif tinggi untuk periode Maret 2019 - Maret 2023. Angka ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY tersebut masih belum kembali turun pada level sebelum berjangkitnya Covid-19.

Tabel 3.9. Target dan Capaian Indikator Sasaran Indeks Gini Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Gini	-	0,439	0,423	0,449	93,85

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indeks Gini di daerah perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,453. Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka Indeks Gini sebesar 0,015 poin dibanding September 2022 yang angkanya sebesar 0,468. Meskipun mulai menunjukkan penurunan, tingkat ketimpangan di perkotaan relatif masih tinggi selama periode Maret 2019 – Maret 2023. Angka Indeks Gini Maret 2023 jika dibandingkan Indeks Gini Maret 2022 yang sebesar 0,446 terlihat masih adanya peningkatan sebesar 0,007 poin.

Sementara itu, angka Indeks Gini di daerah pedesaan menunjukkan kecenderungan yang meningkat sejak September 2021. Indeks Gini pada September 2021 tercatat sebesar 0,325 dan Maret 2022 meningkat menjadi

0,332. Selanjutnya, angka Indeks Gini pada September 2022 kembali meningkat menjadi 0,342. Pada Maret 2023, angka Indeks Gini semakin meningkat menjadi 0,362.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Indeks Gini mencapai 0,388 per Maret 2023. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini nasional tersebut, terdapat empat provinsi dengan angka Indeks Gini lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (0,449), DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,425), dan Gorontalo (0,417). DIY merupakan provinsi dengan Indeks Gini tertinggi pada level nasional.

Angka Indeks Gini di DIY masih tinggi karena dipengaruhi belum meratanya distribusi pendapatan antar kelompok. Saat ini, golongan ekonomi atas masih mendominasi total pengeluaran masyarakat di DIY. Pada Maret 2023, tingkat pengeluaran dari kelompok “40 persen penduduk pengeluaran terendah” di perkotaan tercatat sebanyak 15,21% dari total konsumsi yang dilakukan oleh seluruh penduduk perkotaan DIY. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan konsumsi pada kelompok penduduk ini dibandingkan kondisi September 2022 yang besarnya 14,91%. Namun demikian, jika dibandingkan selama satu tahun terakhir, proporsi konsumsi kelompok penduduk ini masih belum menunjukkan adanya peningkatan.

Sebaliknya di perdesaan terlihat adanya penurunan konsumsi pada kelompok penduduk 40% terbawah. Pada September 2022, kelompok “40% pengeluaran terbawah” perdesaan melakukan konsumsi sebesar 20,42% dari total pengeluaran. Namun, pada Maret 2023, proporsi konsumsi dari kelompok penduduk 40 persen terbawah ini berkurang menjadi 19,76%.

Secara keseluruhan terjadi peningkatan konsumsi pada kelompok penduduk 40% terbawah selama satu semester terakhir di D.I. Yogyakarta. Pada September 2022, kelompok penduduk ini melakukan konsumsi sebanyak 15,54% dari total konsumsi penduduk di provinsi ini. Adapun pada Maret 2023 konsumsi kelompok ini menjadi sebesar 15,58% dari total konsumsi penduduk DIY.

Peningkatan konsumsi penduduk DIY juga ditunjukkan oleh kelompok 40% menengah. Pada Maret 2023, konsumsi kelompok penduduk menengah tercatat sebesar 31,68%. Adapun pada September 2022, konsumsi kelompok ini sebesar 30,69%. Sementara itu, pada kelompok penduduk 20% teratas justru terjadi penurunan proporsi konsumsi. Pada kelompok ini, persentase konsumsi turun sebesar 1,03% poin dari September 2022 (53,77%) terhadap Maret 2023 (52,74%).

Tabel 3.10. Distribusi Pengeluaran Penduduk DIY, Maret 2022 – Maret 2023 (%)

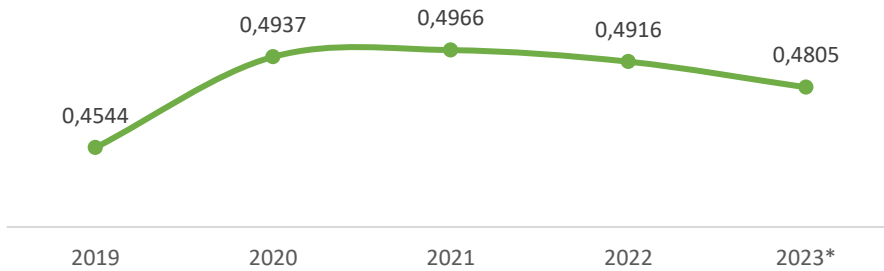
Daerah	Periode	Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Teratas
Perkotaan	Maret 2022	15,53	32,11	52,36
	September 2022	14,91	30,40	54,69
	Maret 2023	15,21	31,43	53,36
Perdesaan	Maret 2022	20,88	36,34	42,78
	September 2022	20,42	35,58	44,00
	Maret 2023	19,76	34,59	45,65
Perkotaan dan Perdesaan	Maret 2022	16,07	32,32	51,61
	September 2022	15,54	30,69	53,77
	Maret 2023	15,58	31,68	52,74

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Indeks Williamson

Kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang bervariasi antar wilayah menyebabkan kesenjangan secara umum. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di DIY, yaitu Indeks Williamson (dihitung dengan menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan jumlah penduduk per daerah). Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Pada Gambar 3.

berikut ini menunjukkan perkembangan nilai Indeks Williamson di DIY dari tahun ke tahun.



Gambar 3.5. Indeks Williamson DIY Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Data tahun 2023 adalah proyeksi

Data menggunakan jumlah penduduk hasil SP2020

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY berada di antara 0,35 dan 0,5. Artinya, kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY dapat dikategorikan dalam ketimpangan sedang. Ketimpangan meningkat pada periode 2019 sampai 2021 yaitu dari Indeks Williamson 0,4544 (2019) menjadi 0,4966 (2021). Setelah itu, ketimpangan mengalami penurunan menjadi 0,4916 di tahun 2022 dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 0,4805. Capaian indikator kinerja Indeks Williamson pada tahun 2023 sebesar 0,4805, jika dibandingkan dengan target pada RPD 2023 – 2026 sebesar 0,444 akan diperoleh persentase capaian sebesar 91,78%.

5. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari bahwa keberlanjutan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup adalah dua sisi dari koin yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat dan pelaku ekonomi telah bersatu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan fokus pada kelestarian lingkungan. Dengan adanya kesadaran yang meningkat tentang dampak ekonomi terhadap lingkungan, berbagai sektor mulai bergerak menuju praktik-praktik yang ramah lingkungan. Industri-industri mengadopsi teknologi hijau, pengarusutamaan penggunaan energi terbarukan, dan praktik-praktik produksi yang ramah lingkungan harus menjadi norma. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, seperti yang

tercermin dalam IKLH, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penanaman pohon, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan limbah yang lebih efektif telah menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi.

Penggunaan IKLH dalam kebijakan pembangunan sangatlah penting, salah satunya dapat menjadi panduan bagi pengambil keputusan dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan pembangunan. Dengan mempertimbangkan nilai IKLH, kebijakan dapat diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pelestarian lingkungan, menghindari dampak negatif jangka panjang. Realisasi angka IKLH di DIY sendiri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Target dan Realisasi IKLH DIY Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)		60,51	61,05	62,44	61,60	64,18	60,53	66,15	59,92	cukup baik	cukup baik/ sedang

Sumber: DLHK DIY, 2024

Pada tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi IKLH jika dibandingkan dengan tahun 2022 (59,92), dimana realisasinya mencapai 66,29 dari target sebesar 62,96. Perhitungan IKLH tahun 2023 menggunakan dasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut terdapat indeks baru berupa Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang secara signifikan mengungkit nilai IKLH di DIY. Rumus perhitungan IKLH tersebut adalah sebagai berikut :

$$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$$

Secara umum, capaian realisasi IKLH DIY ditunjang dari capaian IKA, IKU, dan IKAL yang juga melebihi target. Sedangkan capaian IKL masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Capaian untuk masing-masing komponen penyusun IKLH adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12. Komponen Penyusunan IKLH

No		Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	37,20	40,28
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,93	89,01
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,36	48,68
4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	63,36	81,11

Sumber: DLHK DIY, 2024

Untuk meningkatkan nilai IKLH, perlu diimplementasikan strategi-strategi yang berfokus pada pelestarian dan perbaikan kondisi lingkungan. Beberapa hal yang telah dilakukan DIY antara lain adalah :

- a. Upaya pengelolaan limbah baik domestik maupun padat yang lebih efektif dimana ada penerapan sistem daur ulang yang lebih luas, pengurangan limbah plastik, dan inisiatif pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Selain itu terdapat 185 usaha kegiatan di DIY yang menjadi target pengawasan, dimana selama tahun 2023 telah dilakukan upaya pengawasan terhadap 90 usaha kegiatan (48,65%) yang berpotensi menghasilkan limbah. Pembinaan kepada para pengelola sampah mandiri sebanyak 40 lokasi juga dilakukan sebagai salah satu upaya penanganan sampah.
- b. Rehabilitasi dan konservasi alam strategis untuk mengimbangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Program penanaman pohon, restorasi lahan yang terdegradasi, serta pelestarian kawasan hutan menjadi upaya nyata untuk memperbaiki ekosistem dan mendukung keberlanjutan alam. Selama tahun 2023, DIY melakukan penanaman seluas 406 ha dengan tujuan untuk mengurangi luas lahan kritis.
- c. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha kegiatan, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya pelestarian lingkungan. Melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan implementasi strategi akan menciptakan sinergi yang dapat menghasilkan perubahan positif yang lebih besar.

Peningkatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, ketika dikaitkan dengan IKLH yang meningkat dapat menjadi cerminan komitmen bersama untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Hal ini bukan hanya tentang

memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga tentang mewariskan planet yang sehat dan lestari kepada generasi mendatang. Dengan demikian, perubahan positif dalam aktivitas perekonomian dan lingkungan hidup saling mendukung, membentuk fondasi kuat untuk kemajuan yang berkelanjutan dan berdaya tahan.

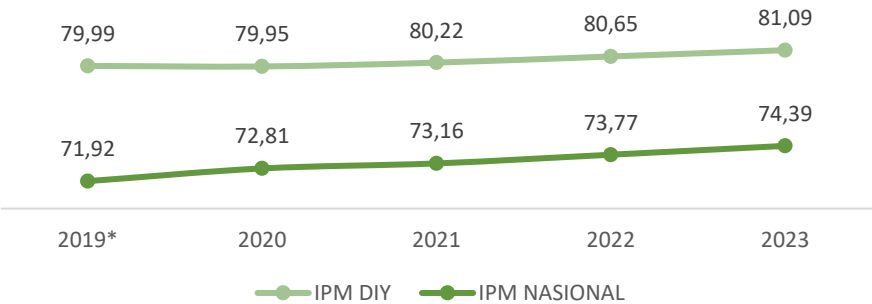
6. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat – Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) salah satunya dapat diukur menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dasar pengukuran IPM menggunakan sejumlah komponen dasar kualitas hidup sebagai basis. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yang mencakup umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan kehidupan yang layak (*decent standard of living*).

Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir sedangkan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan. Pada dimensi hidup layak diukur dengan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Dalam komponen IPM dapat diketahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM juga dapat berfungsi untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. Kesimpulannya bahwa IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 angka IPM DIY cenderung semakin meningkat. Walaupun capaian IPM DIY dari tahun 2019 ke tahun 2020 agak sedikit menurun dari 79,99 menjadi 79,95 (karena adanya pandemi Covid-19). Namun angka IPM DIY mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 yang mencapai angka 80,22 (pandemi Covid-19 mulai mereda). Mulai tahun 2021, status pembangunan manusia DIY sudah berada pada level “sangat tinggi”. Dalam rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun

2023, persentase IPM DIY secara rata-rata meningkat sebesar 0,47% per tahun (capaian angka IPM DIY dari 79,95 pada tahun 2020 menjadi 81,09 pada tahun 2023). Pada tahun 2023 ini terjadi peningkatan IPM DIY pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.



Gambar 3.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
*Jumlah penduduk 2019 menggunakan Proyeksi Supas2015
Tahun 2020-2023 menggunakan data penduduk SP2020

Kualitas pembangunan manusia yang semakin baik, tercermin pada perkembangan IPM DIY yang semakin meningkat. Pada kurun waktu 2017-2020 menunjukkan bahwa level IPM DIY selalu berada dalam kategori IPM tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), dan tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat tinggi ($\text{IPM} > 80$).

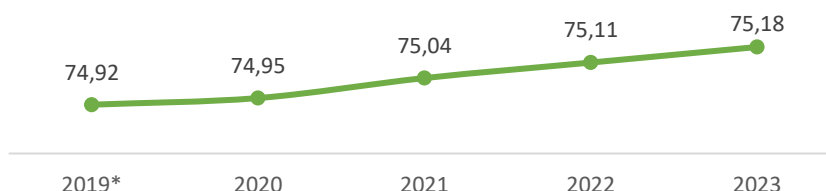
Secara umum perkembangan IPM DIY dari tahun 2019 – 2023 selalu berada di atas IPM nasional. Capaian IPM Nasional pada tahun 2023 menunjukkan angka 74,39, sedangkan capaian IPM DIY sudah mencapai angka 81,09.

Tabel 3.13. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,64	81,07	81,09	100,02

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Capaian IPM DIY yang tinggi didukung pula oleh capaian yang cukup tinggi dari semua indikator penyusun yang dimiliki. Pada tahun 2023, pengeluaran Riil per Kapita tumbuh sebesar 3,05% meningkat dibanding tahun 2022 (tumbuh sebesar 2,63%). Sedangkan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) tumbuh sebesar 0,09% dan Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh sebesar 0,06%, mengalami pertumbuhan yang cenderung stabil dibanding tahun 2022. Sementara pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 0,82%, melambat dibanding tahun 2022 yang tumbuh 1,14%.



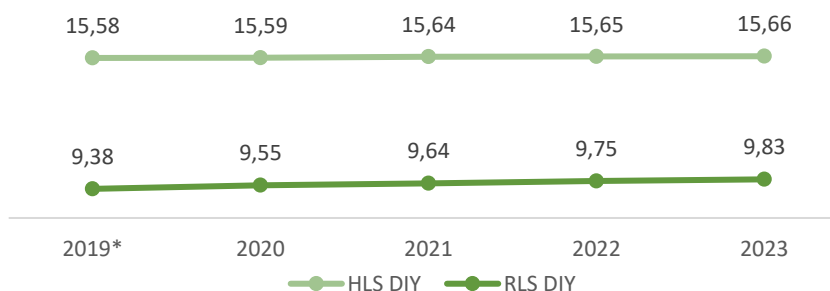
Gambar 3.7. Perkembangan UHH DIY Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

*Jumlah penduduk 2019 menggunakan Proyeksi Supas 2015

Tahun 2020-2023 menggunakan data penduduk SP2020

Dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun, selama periode 2020 hingga 2023. Capaian peningkatan angka UHH di DIY sebesar 0,23 tahun atau rata-rata tumbuh 0,10 persen per tahun. Secara umum UHH DIY tahun 2023 meningkat 0,07 tahun (0,09%) dibanding tahun sebelumnya, meskipun agak sedikit melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020 - 2022 (0,11% per tahun).



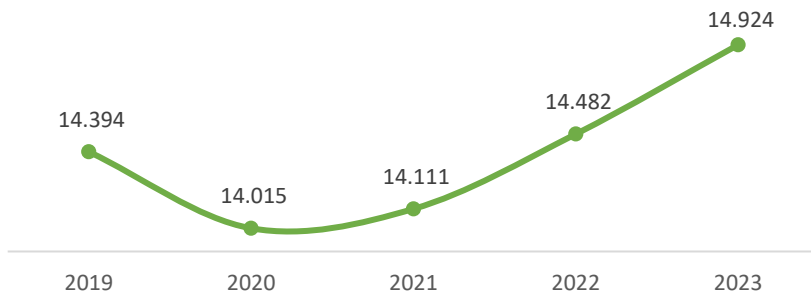
Gambar 3.8. Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

*Jumlah penduduk 2019 menggunakan Proyeksi Supas2015

Tahun 2020-2023 menggunakan data penduduk SP2020

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS DIY rata-rata meningkat 0,15% per tahun, sementara RLS meningkat 0,97% per tahun. HLS 2023 meningkat 0,01 tahun (0,06%) dibandingkan tahun 2022, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,19%). Sementara, RLS 2023 meningkat 0,08 tahun (0,82%) dibandingkan tahun 2022, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (1,04%).



Gambar 3.9. Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan DIY (Ribu Rupiah) 2019–2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Dimensi ketiga IPM yaitu standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2020, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat DIY mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (dampak pandemi Covid-19). Seiring dengan berbagai upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi pada berbagai sektor, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat DIY mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Sampai dengan tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat DIY mencapai Rp 14,92 juta per tahun. Capaian ini meningkat 442 ribu rupiah (3,05 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 1,65 persen per tahun.

Tabel 3.14. IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	IPM				
	2019*	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Bantul	80,01	80,36	80,63	81,04	81,74
Kabupaten Sleman	83,85	83,92	84,08	84,40	84,86
Kabupaten Gunungkidul	69,96	70,18	70,37	71,18	71,46
Kabupaten Kulon Progo	74,44	74,48	74,73	75,48	75,82
Kota Yogyakarta	86,65	86,93	87,50	88,00	88,61
DIY	79,99	79,95	80,22	80,66	81,09

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Capaian IPM kabupaten/kota di DIY sangat bervariasi selama kurun waktu lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pola pembangunan antar wilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas DIY dan sudah berada pada kategori “sangat tinggi” (IPM>80). Sedangkan IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori “tinggi” (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun terus menunjukkan peningkatan. Mulai tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul telah meningkat pada kategori “Tinggi”.

Pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota selama tahun 2019-2023 mengindikasikan pencapaian yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY sudah berstatus “sangat tinggi” dan “tinggi”. Sampai dengan tahun 2023 IPM Kota Yogyakarta mencapai 88,61, tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di DIY. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 84,86 dan 81,74. Ketiga kabupaten/ kota tersebut menjadi daerah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi”. Sementara IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-masing sebesar 75,82 dan 71,46 dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi”. Pertumbuhan IPM tertinggi tahun 2023 terjadi di Kabupaten Bantul (0,86%), sementara pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Gunungkidul (0,39%).

Tabel 3.15. IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2023

Komponen	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu rupiah)
Kabupaten Kulon Progo	75,35	14,48	9,18	10.723
Kabupaten Bantul	74,64	15,61	9,79	16.524
Kabupaten Gunungkidul	74,76	13,39	7,32	10.065
Kabupaten Sleman	75,26	16,77	11,01	16.976
Kota Yogyakarta	75,52	17,62	12,11	19.920
DIY	75,18	15,66	9,83	14.924

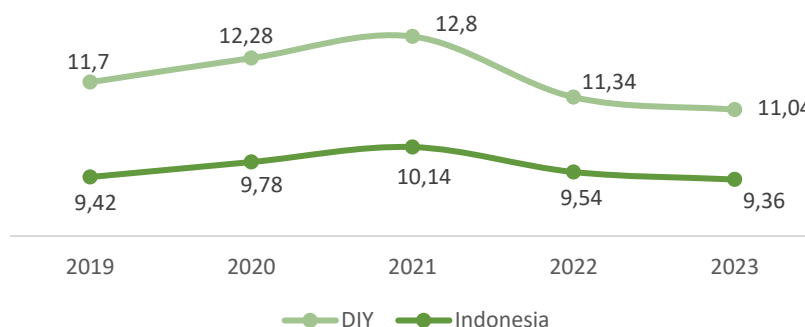
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Perkembangan indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota di DIY cukup bervariasi. Pada tahun 2023, dimensi umur yang panjang dan sehat (indikator UHH) tertinggi di Kota Yogyakarta (75,52 tahun) dan terendah di Bantul (74,64 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih cukup tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Pada indikator HLS penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul sebesar 13,39 tahun, Kulon Progo sebesar 14,48 tahun, dan Bantul sebesar 15,61 tahun. Ketiga kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata HLS provinsi. HLS Sleman (16,77 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,62 tahun) tercapai di atas rata-rata provinsi sekaligus tertinggi. Begitu juga, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas terendah sebesar 7,32 tahun berada di Gunungkidul, Kulon Progo beserta Bantul juga tergolong rendah di bawah rata-rata provinsi. RLS tertinggi di Kota Yogyakarta hingga mencapai 12,11 tahun. Sementara, capaian komponen pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan terendah sebesar Rp10.723 ribu per tahun di Gunungkidul.

7. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat – Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan di DIY merupakan salah satu masalah kesejahteraan masyarakat yang kompleks dan bersifat multidimensional. Hal ini menjadikan percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis pembangunan. Secara umum, tingkat kemiskinan di DIY lebih tinggi dibandingkan nasional. Selama periode 2019 sampai dengan 2021,

persentase penduduk miskin di DIY meningkat dari 11,7% menjadi 12,80% akibat dampak pandemi Covid-19. Namun pada tahun selanjutnya tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun. Pada Maret 2021 tercatat 12,80% kemudian pada Maret 2023 menurun menjadi 11,04%. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Angka Kemiskinan pada tahun 2023 adalah 97,21% dari target yang ditetapkan dalam RPD yang sebesar 10,74%.



Gambar 3.10. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2019-2023 per Maret (dalam persen)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Tabel 3.16. Target dan Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kemiskinan Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Tingkat Kemiskinan	%	11,34	10,74	11,04	97,21

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Persentase penduduk miskin di tingkat Kabupaten/Kota bervariasi dan cenderung menurun selama periode 2018-2019, namun meningkat pada periode 2020 - 2021. Peningkatan di semua wilayah di tahun 2020 dan 2021 diakibatkan dampak pandemi. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di semua kabupaten dan kota kembali mengalami penurunan karena perekonomian telah menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kulon Progo yang diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 adalah 16,39% dan Gunungkidul 15,86%. Kota Yogyakarta merupakan

wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah selama periode 2018 - 2022. Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta adalah 6,62% di tahun 2022.

Tabel 3.17. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2023 (%)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023*
Kulon Progo	17,39	18,01	18,38	16,39	15,64
Bantul	12,92	13,5	14,04	12,27	11,95
Gunungkidul	16,61	17,07	17,69	15,86	15,60
Sleman	7,41	8,12	8,64	7,74	7,52
Kota Yogyakarta	6,84	7,27	7,69	6,62	6,40

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
Ket.: *) akan rilis pada bulan Maret 2024

8. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan – Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang. Untuk menghitung tingkat keberhasilan Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan di DIY indikator sasaran yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

IPK merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data sehingga IPK merupakan alat ukur komprehensif yang bersifat multisektoral. Ada tujuh dimensi dalam IPK yang terdiri dari Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Karena bersifat lintas sektor maka faktor-faktor yang mempengaruhi angka IPK juga bersifat lintas sektor.

Tabel 3.18. Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Capaian 2022	2023		
		Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	66,52	74,58	66,52*	89,19

Ket.: *) Realisasi tahun 2023 adalah hasil IPK tahun 2022. Untuk rilis angka IPK tahun 2023 baru akan diterbitkan pertengahan tahun 2024

Sumber: Disbud DIY, 2024

Jika dilihat dari target tahun 2023, capaian kinerja IPK pada tahun 2023 adalah sebesar 89,19%, dengan demikian indikator kinerja sasaran ini tidak tercapai. Namun demikian, capaian IPK DIY ini merupakan capaian tertinggi di tingkat nasional. Penurunan IPK ini secara umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia terutama sejak adanya pandemi Covid-19.

Guna melihat pengaruh pandemi Covid-19 dalam capaian IPK, dapat diamati dari analisa komparasi perkembangan nilai IPK baik DIY maupun Nasional dalam 3 periode yaitu, Pra Pandemi Covid (2018-2019), Pandemi Covid (2019 – 2020), dan Pasca Pandemi Covid (2022) pada 7 dimensi penyusun nilai IPK.

Tabel 3.19. Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019-2022

No	Nama Dimensi	2019	2020	2021	2022	2022 Terhadap Pra Pandemi (2019)	2022 terhadap Pasca Pandemi (2021)
1	Ekonomi Budaya	71,51	64,79	56,79	67,32	-4,19	10,53
2	Pendidikan	78,17	79,99	80,68	80,88	2,71	0,2
3	Ketahanan Sosial Budaya	85,2	85,04	76,5	77,9	-7,3	1,4
4	Warisan Budaya	68,61	61,11	56,57	58,2	-10,41	1,63
5	Ekspresi Budaya	68,61	57,15	41,11	45,06	-23,55	3,95
6	Budaya Literasi	78,04	80,34	56,2	57,72	-20,32	1,52
7	Gender	59,39	64,53	64,61	64,05	4,66	-0,56
8	IPK DIY	73,98	71,74	64,22	66,52	-7,46	2,3
	NASIONAL	55,91	54,65	51,90	55,13	-0,78	3,23

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) DIY Tahun 2022 adalah sebesar 64,52. Angka tersebut di atas rata-rata nasional dan merupakan angka IPK tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia. Namun demikian, capaian tersebut belum dapat memenuhi target RPD Tahun 2023 yaitu sebesar 74,58. Hal ini dikarenakan beberapa dimensi penting IPK yaitu Ekspresi Budaya, Warisan Budaya dan Budaya Literasi mengalami penurunan yang signifikan selama pandemi tahun 2020 sampai dengan 2021.

Terdapat beberapa keterbatasan yang terkait dengan penentuan prioritas perencanaan dan pemenuhan kebutuhan nasional dalam mengantisipasi pandemi. Hal ini berdampak terhadap target capaian IPK yang telah ditetapkan sebelum terjadinya pandemi, atas dasar kecenderungan angka indeks pada situasi normal.

Berbagai upaya untuk memulihkan ekosistem kebudayaan pasca pandemi telah dilaksanakan, diantaranya adalah dengan pelaksanaan *event* kebudayaan secara hibrid pada tahun 2021 dan mulai dilaksanakan secara normal pada tahun 2022. Pada tahun 2023 semua aktivitas kebudayaan baik oleh pemerintah maupun masyarakat telah dilaksanakan secara normal. Namun demikian, intervensi kegiatan melalui *event* yang dilaksanakan oleh pemerintah belum cukup kuat untuk mengembalikan ekosistem kebudayaan sebagaimana sebelum adanya Pandemi Covid 2019. Ekosistem budaya yang terkait dengan dimensi ekspresi budaya, warisan budaya dan budaya literasi belum dapat pulih secara signifikan pasca pandemi, terlihat dari kenaikannya yang masih relatif kecil dibandingkan dengan penurunan saat pandemi. Namun demikian kenaikan secara signifikan justru ditunjukkan oleh dimensi ekonomi budaya pada masa pasca pandemi. Hal ini dapat dimaknai bahwa aktivitas ekosistem kebudayaan merupakan salah satu alternatif pemicu aktivitas ekonomi di DIY pasca pandemi.

9. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Opini BPK

Tujuan Pembangunan DIY tahun 2023-2026 yaitu Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good government*) didukung salah satunya dengan kontribusi atas kinerja Sasaran “Meningkatnya Kapasitas

Tata Kelola Pemerintahan”. Pada tahun 2023, atas Sasaran tersebut terdapat indikator berupa Opini BPK dengan target **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”**.

Opini BPK tersebut termuat dalam Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun Pemeriksaaan tersebut dilakukan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada tahun 2023, pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Laporan keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2022. Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2022 tersebut meliputi tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2022 memberikan opini **“WTP”**. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemda DIY untuk menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Atas capaian **“WTP”** tersebut telah sesuai dengan target Sasaran yang ditetapkan di Tahun 2023 dan merupakan pencapaian **“WTP”** untuk **ketiga-belas kalinya**.

Tabel 3.20. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja Sasaran Pemda	Satuan	Target Akhir RPD	Tahun					
			2021 (Baseline)		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKA DIY, 2024

Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut: a. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan

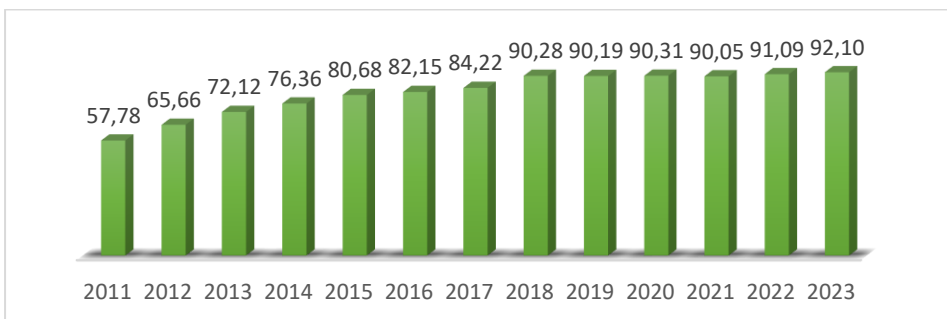
daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik. b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan review pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. c. Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.

10. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Nilai AKIP

Akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*, karena melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat maupun cara untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk ukuran kinerjanya. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai antara lain dengan perencanaan pembangunan yang semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; serta perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan, dan partisipatif.

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY pada tahun 2023 telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN dan RB RI Nomor B/355/AA.05/2023), dengan nilai sebesar 92,10 atau **Predikat AA**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Memuaskan”, yaitu telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (*reform*). Sampai dengan Penilaian terakhir yang

dikeluarkan KemenPAN dan RB, Pemda DIY merupakan satu-satunya institusi yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP.



Gambar 3.11. Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2023

Sumber: Bappeda DIY, 2024

Tabel 3.21. Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2022-2023

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	27,95	28,17
b. Pengukuran Kinerja	30	26,69	26,75
c. Pelaporan Kinerja	15	13,94	14,04
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,51	23,14
Nilai Hasil Evaluasi	100	91,09	92,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA	AA

Sumber: KemenPAN RB RI, 2024

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, masuk dalam predikat AA, yang berarti sepanjang periode RPJMD 2017-2022 dari tahun pertama (tahun 2018) sampai tahun kelima (tahun 2022) telah melebihi target (A) serta periode RPD 2023-2026 (tahun 2023), telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan target predikat AA. Dari Hasil Nilai terakhir Evaluasi AKIP yang dikeluarkan KemenPAN dan RB RI pada tahun 2023, Pemda DIY memperoleh nilai 92,10 (AA). Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP pada Tahun 2022, dari total semua komponen yang dinilai, terdapat kenaikan sebesar 1,01 poin. Kenaikan tersebut pada semua komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,22 poin; Pengukuran Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,06 poin; Pelaporan

Kinerja sebesar 0,1 poin; serta komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 0,63 poin.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda DIY tahun 2023 tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Pada komponen Perencanaan Kinerja, perumusan dokumen perencanaan kinerja Provinsi DIY yang baru telah berorientasi hasil dan telah dilengkapi dengan berbagai indikator kinerja yang relevan. Pada komponen Pengukuran Kinerja, Pergantian rencana jangka menengah yang menyebabkan perubahan dokumen perencanaan kinerja dilakukan dengan baik mulai dari peningkatan kualitas indikator yang digunakan, penetapan target yang mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, hingga penyusunan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menjelaskan indikator kinerja yang telah dipilih. Kemudian, dari komponen Pelaporan Kinerja Laporan kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah telah disusun dengan mekanisme yang baik sehingga kualitasnya semakin meningkat, pemanfaatannya juga dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari berbagai indikator tahun berjalan yang targetnya telah sesuai dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, dari komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan Pemda DIY telah cukup baik untuk menjaga keberhasilan implementasi SAKIP secara umum.

C. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA

Berdasarkan *cascading* RPD DIY 2023-2026, pencapaian indikator kinerja sasaran Pemda didukung oleh beberapa program Pemda. Evaluasi capaian indikator kinerja program Pemda DIY sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.22. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Keterangan
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, industri pengolahan dan Akomodasi dan Makan Minum	persen	6,43	2,9	4,71	162,41	Tercapai
2	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi	persen	44,81	59,91	64,05	106,91	Tercapai
3	Rasio Kewirausahaan	persen	3,54	3,6	4,07	113,06	Tercapai
4	Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar	persen	95,52	95,09	96,43	101,41	Tercapai
5	Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	persen	40,05	40,07	40,19	100,30	Tercapai
6	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	persen	17,66	20,94	21,89	104,54	Tercapai
7	Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	persen	56,25	35	27,78	79,37	Tidak Tercapai
8	Indeks Risiko Bencana	angka	119,56	104,78	108,15	96,78	Tidak Tercapai
9	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	82,62	81,50	84,87	104,13	Tercapai
10	Penurunan Emisi GRK	CO2-eq	n/a	2.607 ribu	212.085,19*	n/a**	Tidak Tercapai
11	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	15,65	15,72	15,66	99,62	Tidak Tercapai
12	Angka Harapan Hidup	tahun	75,11	75,15	75,18	100,04	Tercapai
13	Total Fertility Rate (TFR)	angka	1,93	1,8-2,2	1,81	100	Tercapai
14	Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	ribu orang	454,76	429,05	448,70	95,42	Tidak Tercapai
15	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	buah	337	323	368	113,93	Tercapai

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Keterangan
16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka indeks	76,87	77,07	76,87*	99,74	Tidak Tercapai
17	Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	desa	184	119	256	215,13	Tercapai
18	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	tingkat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100	Tercapai
19	Survei Kepuasan Masyarakat	nilai	85,36	87,43	86,67	99,13	Tidak Tercapai
20	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdais Kelembagaan	persen	100	100	100	100	Tercapai

Ket.: *) Realisasi tahun 2023 adalah hasil IDG tahun 2022, dikarenakan capaian tahun 2023 belum rilis

**) Realisasi Penurunan Emisi GRK tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan target karena terdapat perbedaan metode proyeksi penghitungan

Sumber: Bappeda DIY, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja indikator program Pemda tahun 2023 dari 20 indikator kinerja, terdapat 7 indikator kinerja yang tidak memenuhi target atau realisasi di bawah 100%. Selanjutnya, terdapat 13 indikator kinerja yang capaiannya telah sesuai target atau bahkan kinerja capaiannya telah melebihi 100%.

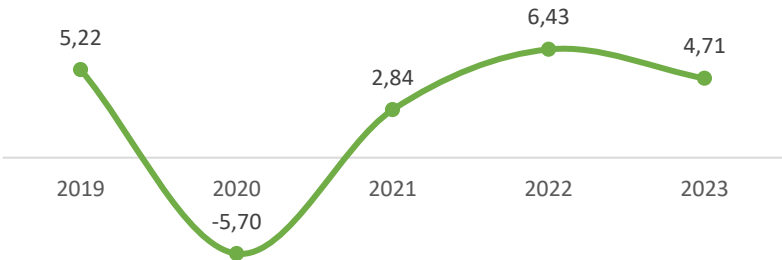
1. Program Pengembangan Sektor Unggulan (Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Akomodasi Makan Minum)

dengan indikator:

Pertumbuhan Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Akomodasi dan Makan Minum

Tiga sektor atau lapangan usaha penyumbang pangsa terbesar secara relatif dalam PDRB DIY selama beberapa tahun terakhir adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pertumbuhan tiga sektor atau

lapangan usaha tersebut secara rata-rata pada periode 2019-2023 mengalami dinamika. Pertumbuhan rata-rata ketiganya menurun di tahun 2020 akibat dampak Pandemi Covid-19 menjadi -5,70%, namun kemudian meningkat sampai tahun 2022 menjadi 6,43%. Pada tahun 2023, rata-rata pertumbuhannya menurun menjadi 4,71%. Adapun pertumbuhan masing-masing lapangan usaha adalah 1,14% (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), 4,26% (Industri Pengolahan) dan 8,72% (Akomodasi dan Makan Minum).



Gambar 3.12. Rata-rata Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan dan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB DIY tahun 2019 - 2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Tabel 3.23. Target dan Realisasi Indikator Program Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi dan Makan Minum	%	6,43	2,9	4,71	162,41

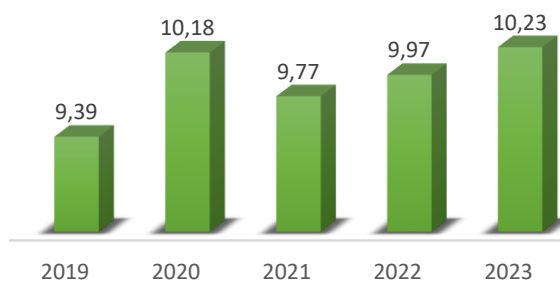
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (data diolah)

Capaian pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan dan Akomodasi dan Makan Minum di tahun 2023 adalah 4,71% yang mencapai sekitar 162,41% dari target sebesar 2,9%. Ketercapaian yang melebihi target tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum yang cukup tinggi yaitu sekitar 8,72% serta kenaikan

pertumbuhan lapangan usaha Industri Pengolahan yang meningkat sekitar 2,5 poin dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menurun signifikan dari 5,12% di tahun 2022 menjadi hanya 1,14% di tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh kendala cuaca yang menyebabkan masa tanam terganggu. Pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum menurun sebesar 3,68 poin dari 12,40% di tahun 2022. Keadaan tersebut mendorong capaian pertumbuhan tiga sektor dominan tersebut di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Sektor Pertanian

Keadaan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah dapat mengindikasikan kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di wilayah DIY masih menjadi salah satu kontributor utama dalam PDRB DIY. Pertanian yang akan dibahas terdiri dari sub kategori Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, dan Peternakan.



Gambar 3.13. Kontribusi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) terhadap PDRB DIY Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) terhadap PDRB DIY terlihat dalam grafik di atas mengalami sedikit penurunan pada saat pandemi Covid-19 yaitu periode tahun 2020 ke tahun 2021 dari 10,18 turun menjadi 9,77. Setelah itu mulai mengalami tren kenaikan dari tahun 2021 sebesar 9,77 menjadi 10,23 di tahun 2023. Peran penting pertanian dalam pembangunan ekonomi, antara lain: menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan mengendalikan inflasi. Dinamika kontribusi pertanian di DIY maupun di tingkat nasional hampir sama. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sinergitas program Pusat dan Daerah sudah cukup baik dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di wilayah DIY.

b. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Penyediaan akomodasi dan makan minum sangat terkait dengan perkembangan di sektor kepariwisataan. Sektor kepariwisataan di DIY mengalami perkembangan yang signifikan di tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Kondisi ini didukung oleh berbagai hal seperti: sinergi antar *stakeholder* bidang pariwisata, dukungan komunitas masyarakat pariwisata, akademisi hingga penyelenggaraan berbagai *event* kepariwisataan yang dilakukan oleh instansi/ lembaga pemerintah maupun swasta. Dukungan lain juga terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi atau media sosial untuk pemasaran pariwisata.

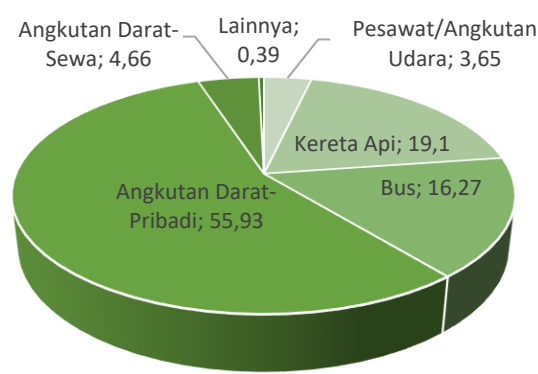
Kunjungan wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan di DIY pada tahun 2023 sebesar 7.740.689, yang terdiri dari wisatawan mancanegara 149.414 wisatawan dan nusantara 7.591.275 wisatawan. Berikut ini disajikan jumlah wisman dan wisnus.

Tabel 3.24. Perkembangan Jumlah Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus		Wisman	Wisnus
2019	433.027	6.116.354	6.549.381	2,31	1,99
2020	69.968	1.778.580	1.848.548	1,95	1,65
2021	14.740	4.279.985	4.294.725	2,24	1,41
2022	47.080	6.427.035	6.474.115	2,40	1,44
2023	149.414	7.591.275	7.740.680	2,36	1,45

Sumber: BPS DIY dan Dispar DIY, 2024 (data diolah)

Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kunjungan wisatawan nusantara di DIY pada tahun 2023 adalah peningkatan aksesibilitas dan moda transportasi menuju ke DIY. Berdasarkan Statistik Wisatawan Nusantara Tahun 2022, yang dirilis pada tahun 2023, menunjukkan wisatawan nusantara yang menggunakan moda transportasi angkutan darat-pribadi relatif dominan yaitu sebesar 55,93%. Hal ini didukung oleh pembangunan Tol Trans Jawa juga memberikan dorongan terhadap kunjungan wisatawan nusantara di DIY. Diperkirakan kondisi tersebut juga tidak jauh berbeda pada tahun 2023.

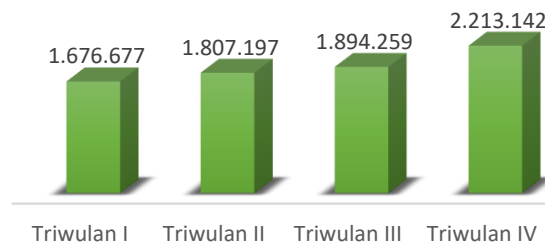


Gambar 3.14. Persentase Moda Transportasi yang Digunakan Wisatawan Nusantara ke DIY Tahun 2022

Sumber:Dispar DIY, 2024

Pada tahun 2023, total kunjungan wisatawan nusantara yang menggunakan jasa akomodasi sebesar 7.591.275 wisatawan. Kunjungan wisatawan nusantara terendah terjadi pada triwulan pertama yang hanya mencapai 1.676.677 wisatawan, sedangkan kunjungan wisatawan tertinggi terjadi pada triwulan keempat yang mencapai 2.213.142 wisatawan atau setara 29,15% di tahun 2023.

Pada tahun 2023 terjadi perubahan pola perjalanan untuk wisatawan nusantara, jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 pola perjalanan wisnus mengalami kenaikan yang tinggi di masa liburan Idul Fitri, namun hal tersebut tidak terjadi pada tahun 2023, di mana kenaikan tertinggi terjadi di triwulan ketiga dan triwulan keempat.



Gambar 3.15. Jumlah wisatawan nusantara di DIY per triwulan Tahun 2023

Sumber: BPS DIY, 2024

Wisatawan mancanegara yang berkunjung menggunakan jasa akomodasi di DIY pada tahun 2023 memperlihatkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penerbangan langsung (*direct flight*) di bandara YIA dengan rute seperti Kuala Lumpur - YIA dan Singapura - YIA. Pada tahun 2023 kunjungan wisatawan mancanegara yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan mencapai 149.414 wisatawan, meningkat sebanyak 102.334 wisatawan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 47.080 wisatawan. Wisatawan mancanegara yang datang ke DIY sebagian besar masuk melalui bandara YIA, tercatat pada tahun 2023 sebesar 105.486 orang. Jika dibandingkan dengan data wisatawan

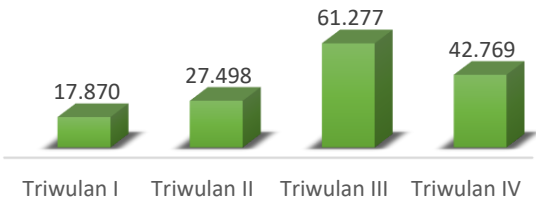
mancanegara yang menggunakan akomodasi/penginapan terdapat 70,60% wisatawan mancanegara yang masuk melalui bandara YIA. Sepuluh negara dominan yang menjadi asal wisman di DIY yang masuk melalui bandara YIA adalah Malaysia, Singapura, Tiongkok, Perancis, Amerika Serikat, India, Jerman, Jepang, Italia dan Inggris.

Tabel 3.25. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara menurut Kebangsaan Tahun 2022-2023 Melalui Bandara YIA

Negara	2022	2023	Pertumbuhan
Malaysia	6.228	42.094	576%
Singapura	1.634	17.215	954%
Tiongkok	110	4.492	3.984%
Perancis	186	2.830	1.422%
Amerika Serikat	324	2.711	737%
India	224	2.573	1.049%
Jerman	153	2.189	1.331%
Jepang	91	2.154	2.267%
Italia	78	2.033	2.506%
Inggris	178	1.942	991%
Lainnya	2.930	25.253	762%
Jumlah	12.136	105.486	769%

Sumber: BPS DIY, 2024

Jumlah kunjungan wisman terbesar adalah dari Malaysia sebesar 42.094 wisatawan, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara yang mengalami pertumbuhan tertinggi berasal dari Tiongkok sebesar 3.984%. Tingginya kunjungan wisatawan mancanegara dari Malaysia dan Singapura sangat berhubungan langsung dengan keberadaan penerbangan langsung yang ada (*direct flight*).

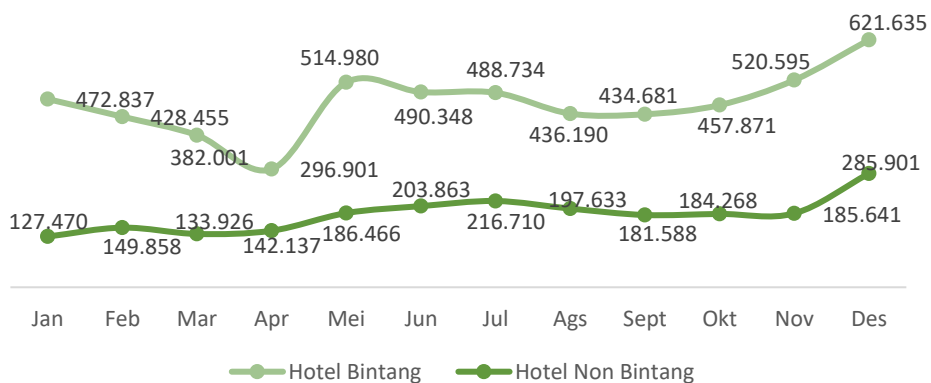


Gambar 3.16. Jumlah Wisatawan Mancanegara di DIY per Triwulan Tahun 2023

Sumber: BPS DIY, 2024

Kunjungan wisman mengalami kenaikan yang cukup tinggi di triwulan ketiga. Kunjungan tertinggi terjadi di bulan Agustus sebesar 22.898 wisatawan dan bulan Juli sebesar 20.427 wisatawan. Pola perjalanan wisman terjadi pada liburan musim panas, sedangkan untuk kunjungan wisman terendah terjadi di triwulan pertama, secara berturut-turut di bulan Januari sebesar 5.402 wisatawan dan Februari sebesar 5.330 wisatawan.

Preferensi wisatawan mancanegara dan nusantara di dalam menggunakan jasa akomodasi/penginapan lebih banyak memilih untuk menggunakan jasa akomodasi hotel berbintang, dari total kunjungan wisatawan yang menginap di jasa akomodasi/penginapan sebesar 7.740.689 wisatawan di tahun 2023 wisatawan, yang menginap di hotel bintang sebesar 5.545.228 wisatawan atau sebesar 72% dari total wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi, sedangkan jumlah wisatawan yang menginap di hotel non bintang di tahun 2023 sebesar 2.195.461 wisatawan.



Gambar 3.17. Data Wisatawan di DIY yang Menginap di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2023

Sumber: BPS DIY, 2024

c. Industri Pengolahan dan Perdagangan

Pada tahun 2023, Industri Pengolahan dan Perdagangan berkontribusi signifikan pada struktur perekonomian di DIY. Industri Pengolahan

memberikan kontribusi tertinggi pada PDRB DIY yaitu sebesar 11,82% atau sebesar 13,44 Triliun Rupiah dan meningkat 4,26% dari tahun 2022. Sementara itu, sektor perdagangan juga berkontribusi sebesar 8,17% atau sebesar 9,16 Triliun Rupiah dan meningkat sebesar 4,29% dari tahun sebelumnya.

Program pembinaan yang telah dirancang dari pemerintah tentu mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. Namun demikian kinerja sektor ini terkendala berbagai faktor eksternal diantaranya penurunan permintaan dari Amerika dan Eropa yang merupakan tujuan utama ekspor DIY akibat resesi, mahalnya logistik ekspor-impor, dan ketatnya aturan impor ke negara-negara Eropa terutama untuk produk kayu (*furniture, handicraft*) sehingga pelaku usaha menjadi lebih berat untuk memenuhi persyaratan.

2. Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah – Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi

Program pemda Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah dengan indikatornya yaitu Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi dihitung melalui rerata persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air dan infrastruktur transportasi. Faktor pembentuk dari indikator ini meliputi Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air, persentase aksesibilitas jalan, persentase capaian jalan berkeselamatan berbasis angkutan umum, dan Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di Koridor 2. Tabel ketercapaian program dengan indikator Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi tersaji di bawah ini.

Tabel 3.26. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi	%	44,81	59,91	64,05	106,91

Sumber: DPUPESDM DIY, 2024

Di tahun 2023, capaian Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi sebesar 64,05% dari target sebesar 59,91% atau tercapai sebesar 106,91% terhadap target. Komponen capaian indikator Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi tahun 2023 ini terdiri dari: 1) Persentase Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air sebesar 73,43%; 2) Persentase Aksesibilitas Jalan sebesar 99,18%; 3) Peningkatan Persentase Aksesibilitas Jalan sebesar 46,16% dan 4) Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di Koridor 2 (dua) sebesar 38,39%, sehingga jika dihitung reratanya menjadi $(73,43+99,18+46,16+38,39)\%/4=258,16\%/4 = 64,54\%$. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka didapatkan capaian tahun 2023 sebesar 64,05% meningkat 19,24% dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 44,81%. Kondisi ini masih sesuai dengan skenario dan target capaian tahunan sehingga harus dilakukan pengawalan dalam perencanaan, monitoring dan pengendalian kegiatan. Indikator Sasaran Perangkat Daerah pada Program Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.27. Target dan Realisasi Komponen Penyusun Penghitungan Kinerja Indikator Sasaran Perangkat Daerah pada Program Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Persentase Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	46,38	70,53	73,43	104,11
2	Peningkatan Persentase Aksesibilitas Jalan	%	98,87	97,80	99,18	101,41
3	Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	%	33,97	42,21	46,16	109,36
4	Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di Koridor 2 (dua)	%	0,00	27,88	38,39	137,70

Sumber: DPUPESDM DIY, 2024

a. Permasalahan dan Solusi

1) *Permasalahan*

- 1) Masih kurang optimalnya prasarana irigasi.
- 2) Meningkatnya beban volume lalu lintas yang melintasi ruas jalan provinsi.
- 3) Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum:
 - (1) Semakin meningkatnya kepemilikan serta penggunaan kendaraan pribadi berdampak pada peningkatan kepadatan lalu lintas serta peningkatan emisi kendaraan bermotor khususnya di kawasan strategis;
 - (2) Kecenderungan kejadian kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia. Sehingga harus terus dilakukan edukasi hingga masyarakat benar benar sadar akan pentingnya keselamatan lalu lintas;
 - (3) Masih terdapat pelanggaran oleh operator Trans Jogja terhadap SOP dan SPM penyelenggaraan Trans Jogja yang berakibat pemberlakuan denda/sanksi;
 - (4) Beberapa kondisi sarana penunjang Terminal yang belum lengkap, sesuai dengan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan dan PM 24 Tahun 2021 Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sehingga belum terpenuhinya standar operasional.
- 4) Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di Koridor 2 (dua):
 - a) Adanya potensi gesekan sosial khususnya dalam upaya penertiban parkir liar serta aktivitas becak motor di kawasan strategis;

- b) Masih belum optimalnya penyebaran informasi lokasi parkir yang tersedia di kawasan sumbu filosofi;
- c) Dinas perhubungan tidak memiliki kewenangan penindakan (tilang) sehingga pengendalian dan pengawasan masih bersifat persuasif;
- d) Banyak terjadi tindak kejahatan seperti pencurian, perusakan, serta vandalisme pada aset fasilitas keselamatan jalan yang telah dipasang.

2) **Solusi**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

- 1) Perlu adanya peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang.
- 3) Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum:
 - (1) Meningkatkan minat masyarakat untuk berpindah menggunakan layanan angkutan umum perkotaan Trans Jogja melalui beberapa terobosan seperti melakukan perpanjangan layanan rute Trans Jogja jalur 6A, 6B, 10 serta ekstensi jalur 15 ke Palbapang Bantul. Meningkatkan kemudahan layanan dengan menyediakan sistem pembayaran melalui kartu KMT (Kartu Multi Trip), dimana kartu tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang terintegrasi antara moda kereta dan Trans Jogja. Menerapkan tarif khusus bagi pelajar, mahasiswa, lansia serta penyandang disabilitas sebesar Rp 1 (satu rupiah);

- (2) Meningkatkan intensitas sosialisasi serta kampanye keselamatan lalu lintas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar lokasi Daerah Rawan Kecelakaan;
 - (3) Menerapkan pola yang sistematis dari verifikator subsidi BOK Trans Jogja dalam melakukan Pencermatan terhadap nilai tagihan BOK dengan bukti fisik serta pemberian denda kepada operator terhadap pelanggaran SPM (Standar Pelayanan Minimal) Trans Jogja sehingga dapat meningkatkan nilai efisiensi pemanfaatan BOK Trans Jogja;
 - (4) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung SPM (Standar Pelayanan Minimal) baik yang berada di Terminal Tipe B maupun di lokasi Tempat Khusus Parkir (TKP) serta memberikan kemudahan akses dalam memperoleh tiket bagi Penumpang.
- 4) Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di Koridor 2 (dua):
- (1) Meningkatkan kolaborasi, sinergitas antar pemangku kepentingan serta penyediaan infrastruktur pendukung khususnya dalam penyelenggaraan dan penyediaan becak bertenaga alternatif kayuh serta layanan bus listrik di kawasan strategis guna meningkatkan minat bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum ramah lingkungan serta kendaraan tidak bermotor.
 - (2) Meningkatkan intensitas sosialisasi melalui media sosial guna meningkatkan antusias masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya di Tempat Khusus Parkir (TKP) yang telah disediakan.
 - (3) Melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pengendalian dan pengawasan ketertiban serta manajemen dan rekayasa lalu lintas

seperti dari unsur Kepolisian, Satpol PP, serta TNI terutama di kawasan strategis seperti kawasan sumbu filosofi.

- (4) Melakukan sosialisasi pengamanan aset fasilitas keselamatan jalan kepada masyarakat, khususnya masyarakat disekitar lokasi rawan pencurian, perusakan dan vandalisme.

3. Program Penumbuhan Wirausaha Baru – Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan merupakan proporsi dari jumlah wirausaha dibandingkan populasi Angkatan Kerja. Pendekatan untuk mengukur rasio ini adalah dengan membandingkan penduduk yang melakukan kegiatan berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar dengan angkatan kerja dalam data SAKERNAS. Poin penting dalam meningkatkan Rasio kewirausahaan adalah motivasi untuk memiliki pola pikir dalam membangun usaha sendiri disamping dukungan kemudahan perizinan usaha di level pemerintah daerah. Pada tahun 2023, indikator Rasio Kewirausahaan terealisasi 4,07% dari target yang ditetapkan 3,60%, atau dengan persentase ketercapaian 113,06%.

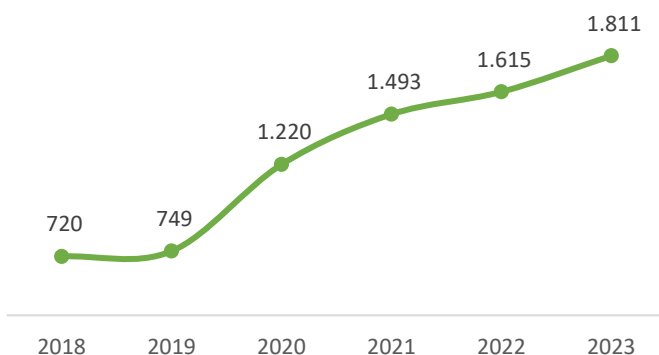
Tabel 3.28. Target dan Realisasi Indikator Rasio Kewirausahaan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Rasio Kewirausahaan	%	3,54	3,60	4,07	113,06

Sumber: BPS DIY

Penumbuhan Wirausaha Baru tidak hanya mencakup pembentukan usaha baru, tetapi juga melibatkan inovasi, kreativitas, dan semangat berani mengambil risiko dalam menghadapi perubahan. Dukungan Pemda DIY untuk mendorong semangat kewirausahaan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi spirit *entrepreneurship*, diantaranya melalui: inkubasi bisnis, penumbuhan Desa Preneur, Saka Wirausaha, promosi produk wirausaha, dan bantuan *free* ongkir melalui Markethub SiBakul yang tujuannya untuk meningkatkan penumbuhan wirausaha baru. Peningkatan

jumlah wirausaha baru di DIY selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 3.18. Perkembangan WUB Tahun 2018-2023

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2024

a. Pendukung Ketercapaian Sasaran

Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang telah dilakukan yang ditujukan untuk mendukung pencapaian penumbuhan kewirausahaan.

1) *Pengembangan Desa Preneur*

Desa Preneur merupakan skema pembinaan kewirausahaan dan pelaku UMKM berbasis perdesaan, dengan pelatihan dan pendampingan selama selama 3 tahun. Materi pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah Kalurahan. Strategi penumbuhan desa preneur diharapkan mampu memperkuat perekonomian lokal pedesaan yang mandiri dan dilakukan oleh wirausaha-wirausaha tangguh dari perdesaan. Untuk itu, skema pengembangan Desa Preneur juga merupakan salah satu pilar dari 4 pilar Desa Mandiri Budaya. Desa Preneur bersama dengan pilar desa budaya, desa wisata, dan desa prima diharapkan menjadikan desa atau kalurahan mampu berdaya dengan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalurahan.

2) **Saka Wirausaha**

Saka Wirausaha merupakan pembentukan lembaga yang mendorong terbentuknya wirausaha dengan menggandeng institusi kepramukaan pada bidang kewirausahaan dan KUMKM. Langkah strategis yang dilakukan oleh Pemda DIY ini dijalankan untuk mencapai indeks rasio kewirausahaan sebesar 5% pada akhir periode RPJN 2025-2045. Satuan Karya (Saka) Wirausaha sebagai upaya untuk menumbuhkan wirausaha pemula di usia Pramuka Penegak dan Pandega. Saat ini sudah terbentuk kelembagaan pada level daerah dan kabupaten/kota. Kegiatan perekrutan anggota diintegrasikan melalui skema inkubasi bisnis. Alur pembinaan dalam inkubasi bisnis, pun juga mengadopsi konsep pembinaan sebagaimana yang digariskan Kementerian Koperasi UKM RI, seperti skema pembentukan wirausaha baru dan wirausaha mapan. Harapannya, pada langkah berikutnya, Saka Wirausaha bisa menumbuhkan banyak wirausaha baru pada level kabupaten / kota dengan sokongan Kwarcab dan OPD KUMKM Kabupaten/Kota.

3) **Bantuan Free Ongkir (Markethub SiBakul)**

Bantuan *Free Ongkir* melalui Markethub SiBakul Jogja merupakan pemberian bantuan bebas ongkos kirim bagi pelaku usaha atau UMKM mitra SIBAKUL. Dengan diadakannya program MarketHub *Free Ongkir*, harapannya mampu menjadi stimulus dalam meningkatkan omset UMKM. Program ini memberikan subsidi ongkir kepada konsumen yang membeli produk UMKM Mitra SIBAKUL secara digital. Dalam pelaksanaan markethub gratis ongkir, Pemda DIY bekerjasama dengan beberapa ekspedisi dalam pelaksanaannya diantaranya Grab, Gojek, Jogja Kita, Difabike, dan PT POS. Jangkauan pengiriman bantuan ongkos kirim ini sudah mencapai seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Pemberian bantuan ongkos kirim ini terbukti mampu membantu meningkatkan omset pelaku UMKM sehingga dapat bertahan

menghadapi pandemi dan memasuki masa pemulihan ekonomi. Selain itu, kampanye markethub SIBAKUL ini juga melibatkan kaum difabel yang dilibatkan dengan menggandeng armada transportasi *online* melalui Difabike. Hal ini menunjukkan komitmen Pemda dalam melakukan skema afirmasi/keberpihakan pada golongan rentan.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Banyak wirausaha baru yang tumbuh masih memerlukan pendampingan pada beberapa aspek tata kelola bisnis secara berkelanjutan.
- b) Masih adanya kendala permodalan usaha karena terkendala *visibility*/kelayakan usaha yang ditunjukkan dengan *business proposal* yang kurang terukur atau belum *bankable*.

2) Solusi

- a) Kolaborasi antar instansi/lembaga baik dalam pembinaan maupun pendampingan wirausaha, mengadakan pendampingan kewirausahaan secara intens dalam perspektif inkubasi bisnis yang dilakukan secara massif oleh pentahelix serta Mengembangkan wirausaha milenial melalui Saka Wirausaha.
- b) Mengadakan pelatihan maupun pendampingan bagi wirausaha baru secara berjenjang agar bisa menguasai materi lebih mendalam termasuk dalam hal pengembangan rencana bisnis usaha sesuai dengan standar baku lembaga keuangan.

4. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur

dengan indikator:

a. Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar

Pembangunan infrastruktur periode 2020-2024 berdasarkan RPJMN berfokus pada tiga kerangka utama, yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan. Infrastruktur layanan dasar yang akan dibangun mencakup penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah).

Tabel 3.29. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satu- an	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar	%	95,52	95,09	96,43	101,41

Sumber: DPUPESDM DIY, 2024

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa capaian terhadap program pemda Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 95,09% telah tercapai sebesar 96,43% dengan persentase 101,41%. Indikator program pemda tersebut berupa capaian persentase penduduk yang menempati rumah layak huni, sanitasi layak dan air minum layak, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

- 1) Capaian Fasilitas Infrastruktur Layanan Dasar, dengan Meta Indikator: (persentase penduduk yang menempati rumah layak huni + sanitasi layak + air minum layak) dibagi 3
 - a) Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Huni dan Terjangkau: jumlah rumah tangga di DIY 1.287.207 unit dikurangi jumlah RTLH yang belum ditangani sampai thn 2023 sebanyak 55.595 unit, ditambahkan dengan penanganan RTLH tahun 2023 sebanyak 5.658 unit.

b) Persentase Penduduk Berakses Sanitasi:

No	Kabupaten	Babs	Akses Belum Layak	Akses Layak				Jumlah
				AKSES DASAR	INDIVIDU	BERSAMA	AKSES AMAN	
1	Kulon Progo	-	3.008	126.860	9.861	16.240	155.969	-
2	Bantul	-	13.682	239.046	3.667	83.379	339.774	-
3	Gunungkidul	-	9.494	178.857	51.931	22.469	262.751	-
4	Sleman	-	2.034	269.508	14.753	98.727	385.022	-
5	Yogyakarta	-	1.507	84.797	7.854	49.532	143.691	-
Total DIY		-	-	29.726	899.068	88.066	270.347	1.287.207
		0%	0,00%	2,31%	69,85%	6,84%	21,00%	100%
			2,31%	97,69%				

c) Persentase Penduduk Berakses Air Minum:

No	Kabupaten	Perpipaan	Non Perpipaan	Belum Ada Akses
1	Kulonprogo	67.751	81.459	6.759
2	Bantul	72.819	221.098	45.857
3	Gunungkidul	108.093	149.204	5.454
4	Sleman	90.489	294.533	-
5	Yogyakarta	31.396	112.295	-
Jumlah		1,665,834	370.548	858.589
Total Akses Air Minum		3,811,438	1.229.137	
Capaian Akses		95,49%		

Rerata persentase penduduk yang menempati rumah layak huni, sanitasi layak dan air minum layak

$$= (96,12\% + 97,69\% + 95,49\%) / 3 = 96,43\%$$

Berdasarkan data capaian di atas, dapat dilihat bahwa Capaian Fasilitas Infrastruktur Layanan Dasar, didukung oleh:

1) Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Huni dan Terjangkau

Penanganan RTLH tahun 2023 sebanyak 5.658 unit dengan rincian; Bantuan Stimulan Program Swadaya (BSPS) 938 unit, verifikasi rumah layak oleh BSPS 616 unit, APBD Kab/Kota 1.616 unit, Kemensos 17 unit, NGO Habitat 80 unit, dana Desa 8 unit, verifikasi

rumah layak oleh kab/kota 235 unit, verifikasi rumah layak oleh DIY 538 unit, BAZNAS 170 unit, BPD DIY 15 unit, APBD DIY Relokasi korban bencana 3 unit, Danais Arsitektur Khas Jogja 434 unit, APBD DIY 988 unit.

2) Persentase Penduduk Berakses Sanitasi

Sebagai upaya peningkatan persentase penduduk berakses sanitasi, telah dilakukan penanganan air limbah terpusat dengan masih memprioritaskan Pemasangan Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon s.d akhir tahun 2023 sebanyak 27.205 SR. Selain penyelenggaraan IPAL Regional Sewon, dalam rangka peningkatan akses sanitasi di DIY, adanya pendanaan dari APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY di tahun 2023 untuk melaksanakan Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Madurejo Kabupaten Sleman.

3) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum merupakan hasil keterpaduan program antara APBD dan APBN, diantaranya pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum Ibukota kecamatan (SPAM IKK), Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya Masyarakat.

1) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Terdapat beberapa calon penerima bantuan yang mengundurkan diri karena tidak mampu swadaya, meninggal dunia kondisi rumah kosong, dan konflik sengketa tanah sehingga menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya penyaluran bansos kepada yang bersangkutan.

- (2) Pendanaan untuk penyelenggaraan air minum di kabupaten/kota terkait investasi hilir berupa jaringan servis dan SR masih terbatas.
- (3) Terbatasnya anggaran kabupaten kota dalam pembiayaan penambahan sambungan rumah IPAL Sewon.

b) Solusi

- (1) Meningkatkan kualitas verifikasi calon penerima hibah.
- (2) Lebih matang berkoordinasi dengan masing-masing pengguna air curah SPAM Regional Kartamantul serta Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan penyerapan sesuai dengan PKS yang telah disepakati.
- (3) Diperlukan koordinasi yang lebih intens lagi untuk peningkatan infrastruktur sanitasi di masing-masing kabupaten/kota agar tujuan dari RPJMN yang bergeser menjadi akses aman bisa menjadi tujuan pembangunan bersama.

b. Peningkatan PDRB pada Kabupaten/Kota yang Belum Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)

Ketimpangan kesejahteraan di DIY masih terjadi baik ketimpangan pendapatan antar individu maupun antara wilayah (kabupaten/kota). Ketimpangan antar wilayah yang berbentuk ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten dan kota menjadi salah satu tantangan karena penurunan ketimpangan wilayah menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Ketimpangan wilayah menjadi salah satu pokok permasalahan dan terkait dengan isu strategis Pengembangan Wilayah Selatan di DIY. Terkonsentrasi aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman selama ini menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di DIY. Ketimpangan

tersebut disebabkan oleh struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten dan kota. Sumbangan PDRB ADHK Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta lebih 50% dari total PDRB DIY. Sementara itu, dua kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul yang luas wilayahnya 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang sekitar 21,4% dari keseluruhan *output* DIY selama periode 2018-2023.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah ditangani dengan intervensi melalui pemerataan pembangunan antar kabupaten dan kota. Upaya intervensi pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan wilayah diamanatkan di dalam RPD DIY 2023-2026. Kebijakan pembangunan dalam rangka melaksanakan intervensi tersebut adalah dengan mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah yang relatif tertinggal terutama Kawasan Selatan secara terpadu lintas sektor dengan didukung kemitraan investasi, CSR, atau bentuk kerjasama lainnya.

Tabel 3.30. Target dan Realisasi Indikator Program Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	%	40,05	40,07	40,19	100,30

Sumber: BPS Provinsi DIY dan BPPSD DIY, 2024 (angka proyeksi)

Ekonomi DIY sempat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, namun dapat *rebound* dengan pertumbuhan positif bahkan di atas lima persen selama tiga tahun terakhir. Ekonomi DIY tumbuh 5,58% (2021), 5,15% (2022) dan 5,07% (2023). Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi positif di tingkat kabupaten

dan kota. Kabupaten Sleman di tahun 2023 tumbuh paling cepat dibandingkan wilayah lainnya. Perkembangan kinerja ekonomi tersebut menunjukkan bahwa gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih di atas gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul. Pangsa dua wilayah yang lebih maju adalah 59,81%, sementara itu pangsa PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju hanya berkisar 40,19%, sedangkan nilai Perkembangan PDRB ADHK menurut wilayah pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.31. PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2023

Kab/Kota	PDRB ADHK (JutaRp)	Pangsa PDRB terhadap DIY (%)
Kulon Progo	9.907.951	8,35
Bantul	21.880.489	18,44
Gunungkidul	15.740.736	13,27
Sleman	39.551.388	33,34
Yogyakarta	31.401.154	26,47

Sumber: BPS DIY, 2024 (data diolah)

5. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan – Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu urusan yang mengatur keistimewaan DIY adalah terkait dengan urusan Pertanahan. Dalam dokumen RPD DIY Tahun 2023-2026 diatur bahwa target indikator program pembangunan daerah khususnya urusan pertanahan (asimetris keistimewaan), sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.32. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pemda Capaian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Capaian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	%	17,66	20,94	21,89	104,54

Sumber: Dinas PTR DIY, 2024

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa capaian terhadap program pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 20,94% telah tercapai sebesar 21,89% dengan persentase 104,54%. Indikator program pemda tersebut berupa capaian fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.33. Perhitungan Capaian Indikator Program Pemda Urusan Pertanahan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Keluaran	Capaian Kinerja Tahun 2023	Sumber Data
10	Pertanahan	Capaian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa <i>Rerata (Persentase pendaftaran sertifikat bidang tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa) + (Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa)</i>	1. Persentase pendaftaran sertifikat bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa a. Pendaftaran Tanah SG/PAG sejumlah 13.958 b. Pendaftaran Penyesuaian Sertipikat Tanah Kalurahan sejumlah 9.699 c. Pendaftaran sertipikat tanah kalurahan pertama kali sejumlah 2.336 bidang. jadi persentasenya $(13.958 + 9.699 + 2.336) = 25.993$ bidang $= 25.993 / 64.323 = 40,41\%$	Dispertaru DIY

No	Urusan Pemerintahan	Keluaran	Capaian Kinerja Tahun 2023	Sumber Data
			<p>2. Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah SG/PAG dan Tanah Desa</p> <p>a. Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah SG/PAG sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebanyak 2.007 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2023 sebanyak 67 rekomendasi yang sudah dikeluarkan);</p> <p>b. Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah desa sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebanyak 165 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2023 sebanyak 24 rekomendasi);</p> <p>Jadi persentasenya = $(2007 + 165)/64.323 \times 100\% = 3,38\%$</p> <p>Jadi secara rerata terhadap persentase pendaftaran sertipikat bidang Tanah Kasutanan, Tanah Kadipaten, Tanah Desa dan Persentase kesesuaian pendaftaran tanah SG, PAG dan TD, antara lain :</p> <p>$\Rightarrow (40,41\% + 3,38\%)/2 = 21,89\%$</p>	

Sumber: Dinas PTR DIY, 2024

Berdasarkan data hasil capaian di atas maka dapat terlihat bahwa

Indikator Kinerja Keluaran Kunci (IKK) Asimetris Urusan Pertanahan didukung oleh dua indikator, yaitu:

1. Pendaftaran sertifikat bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

Pendaftaran sertifikat bidang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian diatur secara lebih operasional dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Sebagaimana hasil identifikasi jumlah Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang dilakukan pada tahun 2015 bahwa jumlah keseluruhan tanah tersebut sejumlah 64.323 bidang. Rincian dari jumlah bidang tanah tersebut terdiri dari

- a. Tanah Kasultanan sejumlah 13.688 bidang;
- b. Tanah Kadipaten sejumlah 356 bidang;
- c. Tanah Desa sejumlah 50.279 bidang.

Sampai dengan tahun 2023 jumlah bidang tanah yang sudah dilakukan proses pendaftaran secara rinci dapat terlihat dalam rincian dibawah ini, antara lain:

- a. Pendaftaran Tanah SG/PAG sejumlah 13.958 (bertambah 121 bidang dari realisasi tahun 2022) bidang dengan rincian antara lain :
 - 1) Kota Yogyakarta sejumlah 798 bidang
 - 2) Kab. Bantul sejumlah 3.725 bidang
 - 3) Kab. Kulon Progo sejumlah 2.360 bidang
 - 4) Kab. Gunungkidul sejumlah 3.939 bidang
 - 5) Kab. Sleman sejumlah 3.136 bidang

- b. Pendaftaran Penyesuaian Sertifikat Tanah Kalurahan sejumlah 9.699 (bertambah 2.016 bidang dari realisasi tahun 2022) dengan rincian antara lain:
 - 1) Kab. Bantul sejumlah 1.805 bidang
 - 2) Kab. Kulon Progo sejumlah 2.411 bidang
 - 3) Kab. Gunungkidul sejumlah 2.941 bidang
 - 4) Kab. Sleman sejumlah 2.542 bidang
- c. Pendaftaran sertifikat tanah kalurahan pertama kali sejumlah 2.336 bidang (bertambah 1.195 bidang dari realisasi tahun 2022) dengan rincian antara lain:
 - 1) Kab. Bantul sejumlah 642 bidang
 - 2) Kab. Kulon Progo sejumlah 284 bidang
 - 3) Kab. Gunungkidul sejumlah 864 bidang
 - 4) Kab. Sleman sejumlah 546 bidang

2. Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

Setelah adanya legalitas tanah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat maka harus dilakukan pemantauan khususnya terhadap kesesuaian pemanfaatan baik tata ruang maupun jenis penggunaannya sesuai dengan regulasi yang ada. Berdasarkan data yang diambil dari sistem informasi yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (pertanahan.jogjapro.go.id). Didapatkan hasil antara lain:

- a. Akumulasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sampai dengan tahun 2023 sebanyak 2.007 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2023 sebanyak 67 rekomendasi yang sudah dikeluarkan);
- b. Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah desa sampai dengan tahun 2023 sebanyak 165 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2023 sebanyak 24 rekomendasi).

Rekomendasi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada pihak Kasultanan dan Kadipaten untuk dilakukan proses selanjutnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan. Hasil dari kesesuaian ini juga untuk memastikan bahwa Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa bisa bermanfaat untuk kemakmuran masyarakat khususnya kategori miskin.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian program pemda di urusan pertanahan, antara lain:

- 1) Pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa belum dapat diproses.
- 2) Belum adanya kesepakatan terhadap status keberadaan tanah wedi kengser, sehingga bidang tanah tersebut belum bisa didaftarkan sertifikasinya.
- 3) Terbatasnya ketersediaan peta bidang tanah dari Kantor Pertanahan sehingga belum bisa secara optimal dilakukan proses pendaftaran.

b. Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas antara lain:

- 1) Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pertanahan terkait pelaksanaan pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum.
- 2) Perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan kesultanan, kadipaten, Kabupaten/ Kota dan Kalurahan terkait dengan status keberadaan wedi kengser.

- 3) Mempercepat implementasi pelaksanaan kerjasama antara Pemda DIY dengan Kementerian ATR/BPN dalam hal berbagi data sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani dengan Nomor 119/13806 dan Nomor: 10/SKB-34.HP/XII/2023 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan terhadap data, Informasi dan Infrastruktur Geospasial untuk Pembangunan di Bidang Agraria/ Pertanahan dan Tata Ruang.

6. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana,

dengan indikator:

a. Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan

Berdasarkan Pasal 492 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa aspek pengawasan pada ketaatan terhadap usaha/kegiatan yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab usaha/atau kegiatan antara lain:

- 1) Ketaatan terhadap Perizinan Berusaha terkait dengan Persetujuan lingkungan,
- 2) Ketaatan terhadap Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah),
- 3) Ketaatan terhadap Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi,
- 4) Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen

lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3), Sampah dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3).

Pada tahun 2023, realisasi tingkat ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan sebesar 27,78% atau sejumlah 25 usaha dan/atau kegiatan dari 90 usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan pengawasan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka realisasi 2023 cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 sebesar 56,25% atau sejumlah 45 dari usaha dan/atau kegiatan yang taat. Penurunan realisasi capaian pada tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan ketentuan peraturan perundangan khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Banyak kewenangan Perizinan Berusaha yang mengalami perubahan dimana kewenangan pengawasan yang di Tahun 2022 masih menjadi kewenangan daerah, namun di Tahun 2023 berubah menjadi kewenangan pusat.

Tabel 3.34. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	%	56,25	35	27,78	79,37

Sumber: DLHK DIY, 2024

1) **Permasalahan dan Solusi**

a) **Permasalahan**

Berdasarkan tingkat ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan, masih terdapat banyak Usaha dan/atau Kegiatan yang termasuk kategori tidak taat yang disebabkan oleh faktor sebagai berikut :

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air/Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan/Pemanfaatan). Hal ini terkait dengan kendala jarak antara lokasi kegiatan/usaha dengan sumber air sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- (2) Masih terdapat Usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3 sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, Usaha dan/atau Kegiatan harus memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang terintegrasi dalam Persetujuan Lingkungan. Ini menjadi kendala bagi Usaha dan/atau Kegiatan karena harus melakukan Perubahan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Belum seluruh usaha dan/atau kegiatan melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dokumen lingkungan atau dokumen persetujuan lingkungan.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kualitas air limbah, masih terdapat parameter kualitas air limbah dari usaha dan/atau kegiatan yang melebihi baku mutu.

b) Solusi

- (1) Meningkatkan kegiatan pembinaan melalui ekspose hasil pengawasan dengan mengundang penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, OPD teknis terkait, dan pemangku wilayah setempat.

- (2) Pemberlakuan sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada pelaku Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan.
- (3) Memberikan Rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk memberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada 20 Usaha dan/atau Kegiatan yang dokumen lingkungannya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.
- (4) Memberikan Surat Tindak Lanjut hasil pengawasan kepada 61 Usaha dan/atau Kegiatan dari pengawasan tidak langsung.
- (5) Melakukan asistensi atau pendampingan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam proses penyampaian laporan melalui aplikasi SIMPEL (pelaporan online). Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki akun SIMPEL ataupun yang belum memiliki akun. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup melalui akun SIMPEL yang sudah terintegrasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
- (6) Melakukan pembinaan terkait dengan penyusunan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan arahan Penyusunan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air limbah.

b. Indeks Risiko Bencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah bagian dari pemenuhan hak warga. Oleh karena itu, Penanggulangan Bencana

bagian dari Sub Urusan Trantib Linmas yang merupakan 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan menghadirkan ketangguhan daerah, mengelola, dan meminimalisir risiko bencana. Ukuran atau indikator yang disepakati untuk menilai kemajuan dari pencapaian tujuan itu adalah Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana (atau dikenal dengan IRBI = Indeks Risiko Bencana Indonesia) dihitung berdasar rumus dasar Risiko = (ancaman x kerentanan) / kapasitas.

Pada perhitungan IRBI selama ini yang dikoordinasi oleh BNPB, faktor/variabel ancaman dan kerentanan dianggap konstan, yang dinilai dinamis adalah faktor/variabel kapasitas.

Penilaian IKD untuk Kabupaten/Kota se-DIY ini merupakan upaya kita bersama untuk menilai kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh DIY, yang secara agregat nantinya akan kita nilai seberapa laju kinerja pengurangan risiko bencana di DIY dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Tabel 3.35. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pemda Indeks Risiko Bencana Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	119,56	104,78	108,15	96,78

Sumber: Penyampaian Hasil IKD dan IRBI tahun 2023 (Surat BNPB Nomor: B-20.14/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2024)

Indeks risiko bencana (IRBI) dihitung berdasar rumus dasar risiko = (ancaman x kerentanan) / kapasitas. Faktor/variabel kapasitas dalam IRBI didapat dari nilai IKD yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator. Indeks Risiko Bencana DIY tahun 2023 adalah 108,15, angka tersebut merupakan rata-rata nilai IRBI Kabupaten/Kota se-DIY. Mengacu pada cascade RPJMD 2022-2027, target IRBI DIY adalah dengan kategori sedang dan target penurunan Indeks Risiko Bencana 1,5% - 2% per tahun. Tercatat ada 9 ancaman bencana prioritas dari total 14 ancaman bencana yang ada di DIY yaitu: 1) Gempa Bumi, 2) Cuaca ekstrem, 3) Erupsi Merapi, 4) Tanah Longsor, 5) Banjir, 6) Kebakaran Hutan dan Lahan, 7) Kekeringan, 8) Tsunami, 9) Gelombang ekstrem dan abrasi. Kerentanan Bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan belum semua aspek kapasitas terpenuhi. Efektifitas dan pencegahan mitigasi bencana dan kolaborasi multi-aktor (*Penta Helix*) masih belum optimal. Jika melihat lebih detail, nilai IRBI untuk Kabupaten/Kota se-DIY adalah sebagai berikut: 1) Kabupaten Kulon Progo 140,98; 2) Kabupaten Bantul 149,27; 3) Kabupaten Gunungkidul 106,55; 4) Kabupaten Sleman 77,33; dan 5) Kota Yogyakarta 66,62.

1) **Faktor yang mempengaruhi capaian**

a) **Ancaman kawasan;**

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana akan mengurangi dampak dan korban akibat bencana baik material maupun non material. Penanganan kedaruratan terhadap bencana harus ditingkatkan dengan konsep meningkatkan potensi hidup korban dan mengurangi korban jiwa terhadap bencana. Siklus penanganan bencana tidak berhenti hanya pada tahap ini tapi berlanjut pada penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengedepankan konsep *build back better and safer* pada masyarakat dan wilayah rawan bencana dengan outputnya adalah pengurangan resiko bencana. Ancaman Kawasan di DIY menjadi lebih tinggi

karena tercatat ada 3 bencana besar yang sudah melanda wilayah DIY, yaitu gempa tahun 2006, erupsi Merapi 2010 dan bencana banjir, longsor dan angin kencang akibat siklon Cempaka tahun 2017. Epidemi *Coronavirus Disease* 2019 pada tahun 2020 juga berpengaruh terhadap risiko bencana.

b) Kerentanan kawasan yang terancam;

Suatu Kawasan memiliki nilai ancaman terhadap bencana yang besar apabila Kawasan tersebut memiliki potensi bencana yang tinggi (parameter fisik seperti kemiringan lereng, jenis tanah, ketersediaan air tanah, jarak terhadap sesar aktif, dll) dan memiliki tingkat kapasitas atau ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana yang rendah. Misal pada suatu wilayah yang rentan terhadap bencana gempa bumi, seharusnya dibangun bangunan dengan mengedepankan konsep bangunan tahan gempa hingga Skala *Richter* tertentu. Hasil tersebut kemudian akan menjadi salah satu pedoman dalam memberikan suatu izin terhadap kegiatan yang akan dilakukan di atas lahan tersebut, demikian juga untuk peruntukan lahan lainnya. Apabila hal tersebut dapat diterapkan, maka akan meningkatkan kapasitas untuk mengurangi dampak dari potensi bencana yang ada. Karena secara geografis, potensi bencana fisik tidak dapat dihilangkan tapi dapat di manajemen untuk mengurangi dampak bencananya. Kondisi demografis masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk yang merupakan suatu keniscayaan, kecepatan perubahan lahan serta degradasi lahan harus menjadi perhatian bahwa indeks risiko merupakan angka yang bukan bersifat linier, tapi dapat berpotensi berubah tergantung pada upaya mitigasi struktural dan nonstruktural yang dilakukan untuk pengurangan resiko bencana.

c) Kapasitas kawasan yang terancam.

Kapasitas Kawasan merupakan salah satu faktor penting dalam pengurangan resiko bencana. Dengan peningkatan kapasitas suatu wilayah di daerah rawan bencana, maka akan mengurangi dampak terhadap bencana tersebut.

Dari analisis kajian risiko bencana menghasilkan rekomendasi tindakan penanggulangan bencana yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Rekomendasi tindakan tersebut diperoleh dari kajian kapasitas daerah berdasarkan kesiapsiagaan desa/kelurahan dan ketahanan daerah. Kajian kesiapsiagaan menghasilkan rekomendasi yang ditujukan untuk masyarakat, sedangkan ketahanan daerah ditujukan untuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemilihan rekomendasi tindakan perlu mempertimbangkan kondisi daerah terhadap penanggulangan bencana, baik dari segi kondisi masyarakat maupun pemerintah.

Beberapa rekomendasi tindakan penanggulangan bencana dapat dihasilkan dari analisis kajian risiko khususnya di bagian kajian kapasitas daerah. Rekomendasi tindakan tersebut dinilai dari kondisi daerah berdasarkan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang difokuskan untuk pemerintah daerah. Indikator tersebut hanya melingkupi 8 jenis bahaya yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bahaya tersebut yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan banjir bandang. Sementara itu, kajian kesiapsiagaan difokuskan terhadap masyarakat dengan 19 indikator pencapaian. Lingkup bahaya dalam kajian ini adalah selain dari 8 jenis bahaya pada 71 indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Adapun rekomendasi tindakan penanggulangan bencana berdasarkan 7 kegiatan Penanggulangan Bencana dibahas lebih lanjut sebagai berikut berikut.

Prioritas untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, dengan rekomendasi di antaranya adalah sebagai berikut :

- a) Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana.
- b) Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan Ruang Daerah untuk Pengurangan Risiko bencana.
- c) Penguatan 3 Pilar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana pada Daerah Berisiko.
- d) Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana.
- e) Pembangunan Desa Tangguh Bencana.

Prioritas tentang Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dengan rekomendasi di antaranya sebagai berikut :

- a) Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori.
- b) Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air.
- c) Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai.
- d) Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng.
- e) Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan.

- f) Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang.
- g) Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumber Daya untuk Penanganan Darurat bencana Gempa Bumi berdasarkan Perencanaan Kontijensi.
- h) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tsunami melalui Perencanaan Kontijensi.
- i) Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Tsunami.
- j) Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami.
- k) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi.
- l) Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Banjir.
- m) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi.
- n) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah.
- o) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi.
- p) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah.
- q) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi gunungapi melalui Perencanaan Kontijensi.
- r) Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana erupsi gunung api.
- s) Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunung Api.
- t) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi.

- u) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selama ini kalau ada kerusakan akibat bencana tidak bisa segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi karena mekanisme penganggaran mengharuskan usulannya n-1 sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selalu tertunda, padahal seharusnya segera tertangani agar dampaknya tidak semakin besar;
- (2) Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada;
- (3) Perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana/Destana dalam rangka pengurangan risiko bencana;
- (4) Banyaknya kawasan rawan bencana di DIY yang membutuhkan sistem peringatan dini bencana dan belum tersedianya informasi lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana;
- (5) Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya;
- (6) Belum optimalnya pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di DIY;
- (7) Belum tersedianya Sistem Data dan informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi/terpadu;
- (8) Masih kurangnya kapasitas dan pengelolaan SDM PB (Aparat dan masyarakat serta relawan);

- (9) Sarana dan prasarana PB belum semua memenuhi standar;
- (10) Logistik bencana belum memenuhi kebutuhan PB sesuai standar;
- (11) Penanganan kedaruratan kebencanaan di kawasan perbatasan perlu disinergikan;
- (12) Belum adanya Rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan;
- (13) Belum adanya SDM dan Sarana Prasarana Penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

b) Solusi

- (1) Dibuat regulasi berupa Peraturan Gubernur untuk penggunaan dana kebutuhan mendesak untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- (2) Dibuat *roadmap* pembentukan dan pengembangan SPAB serta memastikan implementasinya dengan melibatkan seluruh *stakeholder*;
- (3) Mengembangkan kapasitas Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk sebelumnya;
- (4) Pengelolaan Sistem Peringatan Dini yang komprehensif baik yang dimiliki instansi, lembaga maupun masyarakat, serta pemetaan kebutuhan sistem peringatan dini bencana. Selain itu, mendorong warga dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY untuk menyediakan lahan relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana;
- (5) Melengkapi rencana kontijensi sesuai dengan ancaman bencana di DIY;
- (6) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan strategis keistimewaan dari potensi bencana;
- (7) Menyediakan Sistem Data dan Informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi;

- (8) Melakukan peningkatan kapasitas dan pengelolaan SDM PB (Aparat dan masyarakat serta relawan);
- (9) Memastikan Sarana Prasarana PB memenuhi standar;
- (10) Memastikan logistik bencana memenuhi kebutuhan PB dan sesuai standar;
- (11) Melakukan pelatihan dan latihan penanganan kedaruratan kebencanaan di kawasan perbatasan;
- (12) Membuat Rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan;
- (13) Memenuhi SDM dan sarana prasarana penanganan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

7. Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang – Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang dilakukan melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan tujuan untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk penilaian terkait dengan perwujudan rencana tata ruang dilakukan dengan upaya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengukur capaian indikator program pemerintah daerah berupa kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.36. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pemda Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	82,62	81,50	84,87	104,13

Sumber: Dinas PTR DIY, 2024

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa capaian terhadap program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 81,50% telah tercapai sebesar 84,87% dengan

persentase 104,13%. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043 disebutkan bahwa luas keseluruhan meliputi wilayah darat termasuk pulau pulau kecil, wilayah laut, dan wilayah udara yang ada di DIY sejumlah 550.008 ha. Dalam proses perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang didapatkan dari perhitungan perbandingan dua aspek, yaitu:

- Total Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung** di Tahun 2023 sebesar 11.841,63 ha dari luas keseluruhan Kawasan lindung sebesar 12.123,58 ha sehingga presentase kesesuaian Kawasan lindung sebesar (97,67%);
- Total Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya** di Tahun 2023 sebesar 454.960,29 ha dari luas keseluruhan Kawasan budidaya sebesar 537.884,86 ha sehingga persentase kesesuaian Kawasan budidaya sebesar (84,58%).

Kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan tingkat perwujudan rencana pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang tersebut, dilakukan dengan melakukan *overlay* penggunaan lahan eksisting tahun penilaian dengan rencana pola ruang RTRW DIY. Data menunjukkan realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang DIY berdasarkan tingkat perwujudan rencana pola ruang dari kurun waktu 2018-2023 mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 77,05% pada tahun 2018 menjadi sebesar 84,87% pada tahun 2023 sebagaimana grafik di bawah ini:



Gambar 3.19. Grafik Perwujudan Pola Ruang DIY Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas PTR DIY, 2024

Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang pada tahun 2023 mendasar pada Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043, dimana terdapat integrasi antara ruang darat dan ruang laut, sehingga luas ruang wilayah DIY lebih kurang 550.008 ha. Berdasarkan hasil penilaian perwujudan pola ruang keseluruhan yang sesuai mencapai 84,87% atau kurang lebih 466.801,92 ha, yang belum terwujud sebesar 10,734% atau kurang lebih 59.039,37 ha, dan yang tidak sesuai mencapai 4,394% atau kurang lebih 24.167,16 ha. Perwujudan pola ruang dengan peruntukan belum terwujud terbesar pada Kawasan Peruntukan Industri sebesar 99,41% dengan luasan 5.211,66 ha. Peruntukan yang tidak sesuai terbesar pada kawasan lindung terdapat pada kawasan lindung geologi sebesar 47,19% dengan luasan 214,20 ha dan untuk kawasan budidaya terbesar pada kawasan pertanian sebesar 12,99% dengan luasan 23.752,36 ha.

a. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian program pemda di urusan tata ruang, antara lain:

- a) Masih banyaknya Rencana Detail Tata Ruang yang belum ditetapkan. Sampai dengan tahun 2023 dari 22 RDTR yang direncanakan sudah ditetapkan baru sebanyak 5 RDTR.
- b) Belum sepenuhnya data dan informasi pertanahan dan tata ruang terintegrasi dengan optimal.
- c) Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya menjadi acuan bagi sektor dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2) Solusi

Alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan dalam program pemda tersebut antara lain:

- a) Mendorong percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang melalui pendampingan terhadap kabupaten/ kota. Selain itu, penyusunan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Induk pada Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang serta pemanfaatan ruangnya.
- b) Mengintegrasikan data dan informasi pertanahan melalui sistem informasi data spasial.
- c) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Program Pembangunan Rendah Karbon – Penurunan Emisi GRK

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan fenomena alami yang terjadi ketika gas tertentu di atmosfer bumi menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi, lalu memancarkannya kembali ke semua arah yang menyebabkan suhu bumi mengalami peningkatan dan menjadi pemicu utama terjadinya perubahan iklim. Isu terkait perubahan iklim tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu global. Berdasarkan perjanjian Paris tahun 2015, kenaikan suhu bumi 2°C ditetapkan sebagai batas atas suhu pemanasan global dan mengupayakan membatasi kenaikan hingga 1,5°C dibandingkan era pra industri di sekitaran tahun 1850. Batas kenaikan suhu 1,5°C menjadi target atau tujuan yang ingin dicapai untuk dapat meminimalisir risiko dampak buruk perubahan iklim.

Berdasar *Updated Nationally Determined Contribution* (UNDC) penurunan GRK Indonesia pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri ditargetkan sebesar 29% meningkat menjadi 31,89% pada *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), sedangkan target dengan dukungan internasional pada UNDC sebesar 41% meningkat menjadi 43,20% pada ENDC. Kontribusi Pemda DIY dalam upaya penurunan emisi GRK, tercantum dalam RPD DIY Tahun 2023-2026 sebagai indikator kinerja Program Pemda

berupa Program Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Potensi penurunan emisi GRK bersumber dari kegiatan aksi mitigasi rendah karbon daerah yang dilaporkan pada tahun N-1 dengan bidang PRK meliputi energi, lahan, pengelolaan limbah, kawasan pesisir dan kelautan. Untuk memperoleh hasil potensi penurunan emisi GRK, kegiatan aksi mitigasi rendah karbon tersebut, dilakukan *entry* melalui *platform* www.pprk.bappenas.go.id/aksara.

Berdasarkan aplikasi Aksara, realisasi potensi penurunan emisi PRK DIY tahun 2023 (aksi mitigasi rendah karbon daerah) yang dilaporkan pada tahun 2022 mencapai sebesar 212.085,19 CO₂-eq. Pada RPD 2023-2026 target yang tercantum adalah sebesar 2.607,00 CO₂-eq. Namun demikian realisasi penurunan emisi PRK pada tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan target karena terdapat perbedaan metode proyeksi penghitungan. Realisasi penurunan emisi PRK tahun 2023 mengalami kenaikan 7 kali lipat jika dibandingkan dengan penurunan emisi PRK tahun 2022 yang mencapai 30.199,23 CO₂-eq.

Tabel 3.37. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pemda Penurunan Emisi GRK Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Penurunan Emisi GRK	CO ₂ -eq	n/a	2.607 ribu	212.085,19*	n/a**

Sumber: Bappenas RI, 2024

Ket.: *) Realisasi didapat dari www.pprk.bappenas.go.id/aksara

**) Realisasi Penurunan Emisi GRK tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan target karena terdapat perbedaan metode proyeksi penghitungan

a. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemda DIY terkait dengan pelaksanaan program pembangunan rendah karbon adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya peran serta Pemda DIY dan pemangku kepentingan baik di DIY maupun Kabupaten/Kota dalam upaya penurunan emisi rendah karbon.

- b) Belum optimalnya identifikasi kegiatan aksi mitigasi rendah karbon daerah yang masuk dalam kategori kegiatan inti maupun pendukung. Untuk dapat meningkatkan nilai potensi penurunan emisi rendah karbon daerah diperlukan aksi mitigasi rendah karbon yang masuk kategori kegiatan inti.
- c) Belum optimalnya kegiatan aksi mitigasi rendah karbon daerah yang dilaporkan melalui platform Aksara, termasuk pelibatan dari semua pemangku kepentingan dan sumber pendanaan yang berkontribusi dalam penurunan emisi rendah karbon.

2) **Solusi**

Untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan rendah karbon, beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Perlu dilakukan koordinasi, kolaborasi dan elaborasi peran serta Pemda DIY dan pelibatan pemangku kepentingan baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan aksi mitigasi rendah karbon daerah sebagai upaya penurunan emisi rendah karbon.
- b) Perlu melakukan identifikasi kegiatan aksi mitigasi rendah karbon daerah yang masuk kategori kegiatan inti maupun kegiatan pendukung. Pada tahun 2024 telah dianggarkan untuk melakukan kaji ulang pembangunan rendah karbon dengan salah satu tujuannya untuk memetakan kegiatan aksi mitigasi rendah karbon daerah.
- c) Melaporkan kegiatan aksi mitigasi rendah karbon daerah melalui platform Aksara yang berkoordinasi dengan pusat dan daerah hingga Kabupaten/Kota, termasuk pelibatan semua pemangku kepentingan dan sumber pendanaan yang berkontribusi dalam penurunan emisi rendah karbon sesuai *timeline* aksara.

9. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan – Harapan Lama Sekolah

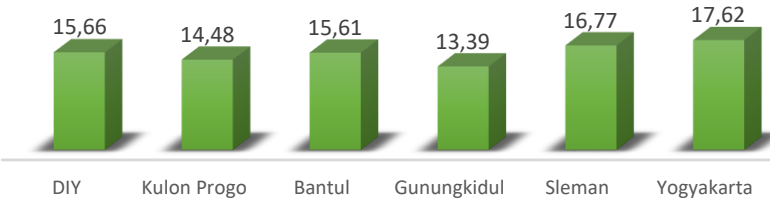
Dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, tolok ukur yang digunakan adalah pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan HLS sebagai lamanya masa bersekolah dalam perhitungan tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Mengacu kepada standar usia dimulainya pendidikan formal, angka HLS menunjukkan peluang anak berusia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Capaian angka HLS DIY pada tahun 2023 adalah 15,66 tahun, sehingga dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan 0,01 poin. Berikut adalah perbandingan capaian angka HLS tahun 2023 dengan target dan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.38. Target dan Realisasi Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	15,65	15,72	15,66	99,62

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

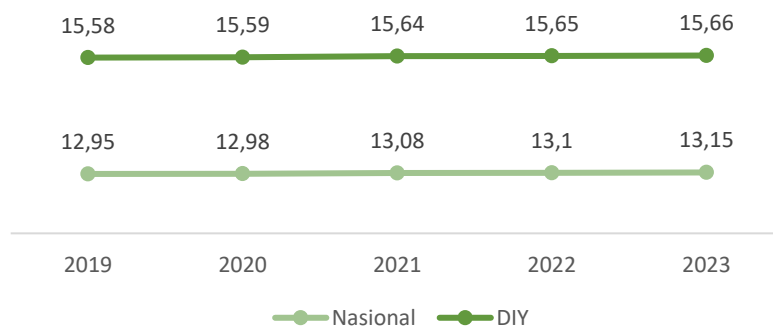
Capaian angka HLS pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 15,72 tahun. Salah satu penyebab ketidaktercapaian target ini adalah ketimpangan capaian angka HLS antar kabupaten/kota di DIY. Capaian angka HLS kabupaten/kota di DIY tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 3.berikut.



Gambar 3.20. Capaian Angka HLS Kabupaten/Kota dan DIY Tahun 2023 (Tahun)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Berdasarkan grafik di atas, terdapat tiga kabupaten yang memiliki capaian angka HLS di bawah capaian angka HLS DIY, yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Capaian angka HLS ketiga kabupaten ini turut menyumbang ketidaktercapaian target untuk angka HLS DIY tahun 2023. Meski demikian, capaian angka HLS DIY selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 masih berada di atas rata-rata nasional sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 3.21. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Dalam upaya untuk meningkatkan capaian angka HLS, yang juga berarti meningkatkan aksesibilitas pendidikan, Pemda DIY memberikan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kepada seluruh satuan pendidikan negeri maupun swasta jenjang pendidikan menengah dan khusus di DIY. Bantuan biaya pendidikan personal juga diberikan kepada para siswa kurang mampu maupun siswa putus sekolah sehingga diharapkan penuntasan pendidikan menengah tidak lagi terkendala oleh kondisi ekonomi. Dari sisi sarana prasarana pendidikan, Pemda DIY berupaya untuk menuntaskan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana di sekolah beserta pendukungnya seperti jaringan listrik dan internet. Diharapkan melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana ini, masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan lengkap dan berkualitas yang terjangkau dari tempat tinggal mereka.

10. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup,

dengan indikator:

a. Angka Harapan Hidup

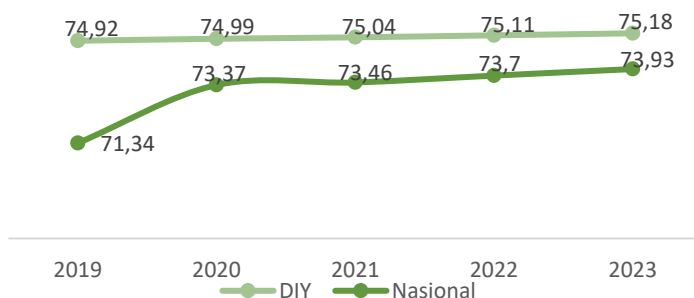
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) adalah perkiraan usia hidup yang bisa diharapkan seseorang sejak dilahirkan. AHH seringkali dijadikan indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat dan sekaligus sebagai perangkat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan harapan hidup saat lahir terkait dengan sejumlah faktor termasuk peningkatan standar hidup, gaya hidup yang lebih baik, Pendidikan yang lebih baik, serta akses layanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas. Tolok ukur dari keberhasilan pembangunan kesehatan di DIY dapat tergambarkan dari AHH.

Tabel 3.39. Target dan Realisasi Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Angka Harapan Hidup	Tahun	75,11	75,15	75,18	100,04

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Faktor pendukung tercapainya target AHH DIY dari bidang kesehatan yaitu: menurunnya kasus kematian (Ibu, bayi dan balita), menurunnya persentase balita gizi buruk, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya cakupan jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat atau *Universal Health Coverage* (UHC), dan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan angka kesakitan (morbiditas).



Gambar 3.22. Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2019-2023 (Tahun)

Sumber: BPS Indonesia, 2024

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk DIY merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang terus meningkat setiap tahunnya. AHH penduduk DIY konsisten berada di atas capaian nasional. Tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 75,15 dan tercapai sebesar 75,18 atau 100,04%. Pemda DIY terus berupaya untuk meningkatkan AHH dengan berbagai upaya antara lain: menekan angka kematian (ibu, bayi, balita), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, gerakan masyarakat untuk hidup sehat, serta memperbaiki pengendalian penyakit.

Kasus kematian ibu di DIY pada tahun 2023 sebanyak 22 kasus, mengalami penurunan cukup signifikan dibanding tahun 2022 yang mencapai sebesar 43 kasus. Hal ini tak lepas dari keberhasilan dari upaya strategis yang telah dilakukan untuk menekan angka kematian ibu diantaranya adalah terbentuknya jejaring kerja *pentahelix* dalam Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMPSR), kemitraan dengan institusi perguruan tinggi dalam pendampingan ibu hamil, serta Implementasi manual rujukan sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan. Penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2023 adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, penyakit paru, jantung dan penyakit tidak menular lainnya.

Kasus kematian bayi pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 303 kasus pada tahun 2022 turun cukup signifikan menjadi 272 kasus. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan kematian bayi antara lain dengan implementasi standar pelayanan manajemen terpadu bayi muda, dan terpenuhinya standar fasilitas pelayanan kesehatan, penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupannya, serta Implementasi manual rujukan berdasarkan Pergub DIY Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.

Perbaikan gizi masyarakat terus dilakukan untuk menekan angka stunting dan *underweight*. Kehamilan pada masa pandemi berdampak pada kelahiran bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Panjang badan lahir pendek yang berkontribusi secara nyata menjadi balita stunting, juga intervensi gizi spesifik dan sensitif yang kurang adekuat untuk menuntaskan stunting dan gizi buruk.

Jumlah penderita Penyakit Tidak Menular (PTM) di DIY termasuk dalam kategori tinggi di atas angka nasional berdasarkan Riskesdas tahun 2018, diantaranya prevalensi Diabetes Melitus, Hipertensi, Kanker, Jantung serta Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Penyakit menular yang masih menjadi perhatian adalah HIV/AIDS, *Tuberculosis* (TBC) dan Malaria.

Upaya pengendalian Angka Penyakit Menular dan Tidak Menular (PTM) di DIY mengedepankan program promotif preventif dengan mendorong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Skrining atau deteksi dini secara masif dan terpadu terus dilakukan untuk 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer dengan merevitalisasi jaringan dan standardisasi pelayanan di Puskesmas, Posyandu, kunjungan rumah, dan pengembangan laboratorium kesehatan masyarakat. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan sekunder dan tersier dengan

pengembangan jejaring pengampuan 6 layanan unggulan (kanker, jantung, stroke, ginjal, KIA), meningkatkan kecukupan dan kualitas SDM kesehatan, serta meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan. Akses dan mutu pelayanan kesehatan di DIY semakin baik yang ditunjukkan dengan rasio tempat tidur RS sebanyak 2 tempat tidur per 1.000 penduduk, rasio tersebut lebih baik dari standar WHO. Indikator mutu ditunjukkan dengan 80% RS terakreditasi, 100% Puskesmas terakreditasi dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS telah terakreditasi 100%.

Cakupan jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat atau *Universal Health Coverage* (UHC) bagi penduduk DIY meningkat dari tahun 2022 sebesar 97,76% menjadi 99,64% pada tahun 2023. Pemda DIY masih menyediakan *buffer* anggaran untuk pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat kurang mampu yang belum tercover oleh jaminan pembiayaan Kesehatan lain dan pembiayaan paket manfaat yang belum tercover oleh BPJS, serta penyediaan alat bantu Kesehatan bagi penyandang difabel sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Semesta.

Pos Binaan Terpadu (Posbindu) juga ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas terutama posbindu institusi di lingkungan kantor Perangkat Daerah (PD). Desa di DIY yang telah memiliki Posbindu sebanyak 96% dan akan ditingkatkan kualitasnya dengan berbagai upaya peningkatan kapasitas petugas dan penyediaan alat yang dibutuhkan.

b. Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) dihitung dari rata-rata jumlah bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama usia reproduksinya, yaitu umur 15-49 tahun. Semakin mendekati angka TFR 2,1 memperlihatkan bahwa penduduk tumbuh seimbang, atau mendekati ideal.

Tabel 3.40. *Total Fertility Rate (TFR)* di DIY pada Tahun 2019-2023

Capaian TFR	2019	2020	2021	2022	2023
DIY	1,88	1,81	1,91	1,93	1,81
Bantul	1,67	1,67	1,67	1,65	1,70
Sleman	1,20	1,62	1,82	1,89	n/a
Gunungkidul	2,30	n/a	1,93	n/a	n/a
Kulon Progo	1,62	1,58	1,75	1,48	1,27
Kota Yogyakarta	1,22	1,21	1,06	0,74	1,67

Sumber : BKKBN, Dataku Bappeda DIY, 2024

Data TFR DIY dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan capaian yang fluktuatif, yaitu berada pada rentang 1,81-1,93. Pencapaian tersebut masih di bawah angka ideal 2,1 yang akan mempengaruhi proyeksi penduduk DIY ke depan terutama dampak terhadap beban ketergantungan karena berkurangnya proporsi penduduk usia produktif (15 - 64 tahun).

Tabel 3.41. Target dan Realisasi Indikator Program *Total Fertility Rate (TFR)* Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	angka	1,93	1,8-2,2	1,81	100

Sumber: BKKBN, 2024

TFR menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kependudukan DIY yang tercantum pada RPD DIY 2023-2026. Pada tahun 2023 dari target 1,8-2,2 tercapai 1,81 atau terealisasi 100%.

Penduduk yang seimbang adalah salah satu kunci kesuksesan pembangunan. Penduduk yang terlalu padat akan menyebabkan produktifitas menjadi terhambat karena hambatan pada kesempatan dan akses yang terbatas. Untuk itu menjadi penting pengendalian penduduk utamanya melalui program Keluarga Berencana (KB) dilakukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang ini mengatur agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai

Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang.

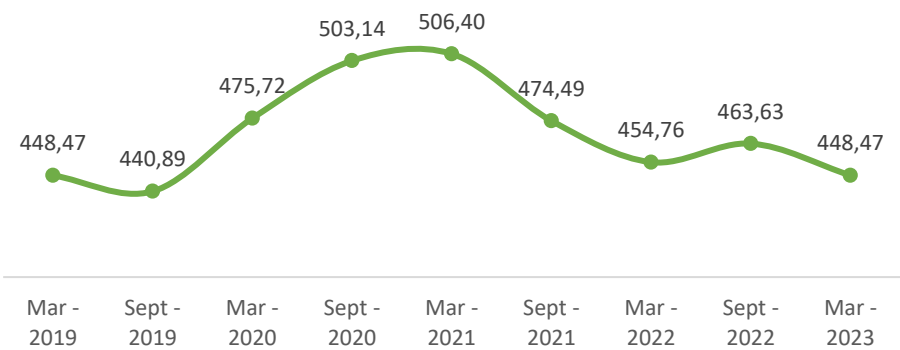
Program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator TFR dapat dilakukan melalui berbagai cara. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dan Sosialisasi Keluarga Berencana yang gencar dilaksanakan turut mendorong tercapainya indikator tersebut.

Dukungan sektor kesehatan dalam rangka mempertahankan keseimbangan pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan cakupan program keluarga berencana, upaya yang dilakukan antara lain: penyiapan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar, peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan reproduksi, edukasi kepada ibu hamil untuk mengikuti program KB pasca salin yang melekat di buku KIA sebagai amanat persalinan. Untuk meningkatkan cakupan KB pasca persalinan diterbitkan SE Gubernur DIY Nomor 11/SE/VII/2022 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Wilayah DIY.

11. Program Penanggulangan Kemiskinan – Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

Kejadian kemiskinan masih merupakan permasalahan sosial ekonomi di DIY. Fenomena kemiskinan diukur dengan jumlah penduduk miskin yang kemudian menjadi salah satu unsur pembentuk angka Tingkat Kemiskinan. Data jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk miskin yang mempunyai tingkat pengeluaran rata-rata per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Untuk mendukung pengurangan tingkat kemiskinan, intervensi ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yaitu kelompok penduduk yang pengeluaran rata-rata per bulannya di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin selama periode 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan dinamika. Selama periode September 2019 sampai dengan Maret 2021 menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin sampai mencapai puncak di Maret 2021 yaitu sebanyak 506.400 orang. Sementara itu, pasca Maret 2021 jumlah penduduk miskin cenderung menurun sampai dengan Maret 2023 dengan jumlah penduduk miskin adalah 448.470 orang.



Gambar 3.23. Jumlah Penduduk Miskin Maret 2019 s.d. Maret 2023
(Ribu Orang)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Tabel 3.42. Target dan Realisasi Indikator Program Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2023 (Maret)

Indikator Kinerja Program Pemda			Satuan	Capaian 2022	2023		
					Target	Realisasi	% Realisasi
Penurunan Miskin	Jumlah	Penduduk	Ribu orang	454,76	429,05	448,70	95,42

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

Capaian penurunan jumlah penduduk miskin tahun 2023 yang sebesar 448.700 orang tidak mencapai target sebanyak 429.500 orang atau hanya mencapai 95,42% dari target. Meskipun demikian capaian tahun 2023 telah menurun dibandingkan tahun 2022 dengan realisasi jumlah penduduk miskin sebanyak 454.760 orang. Ketidaktercapaian target penduduk miskin disebabkan oleh masih relatif tingginya ketimpangan pendapatan serta masih kurang terkendalinya tingkat

inflasi. Berdasarkan data ketimpangan per maret, Indeks Gini pada tahun 2022 adalah 0,439 yang kemudian meningkat menjadi 0,449 di tahun 2023. Sementara itu, meskipun tingkat inflasi sudah menurun namun tingkat inflasi tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan periode 2019 sampai 2021 dengan tingkat inflasi sebesar 3,17%.

12. Program Pelestarian Budaya Benda dan Takbenda – Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, dan internasional)

Objek kebudayaan, baik yang berwujud (benda) maupun yang tidak berwujud (takbenda), menjadi elemen penting dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan Pemda DIY menerapkan kebijakan untuk merawat dan mengembangkan warisan budaya. Keberhasilan dalam pemeliharaan dan pengembangan budaya benda dan takbenda dapat diukur dengan apresiasi yang diterima dalam hal budaya tersebut melalui pengakuan sebagai warisan budaya baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan usaha pemeliharaan dan pengembangan budaya, indikator yang digunakan adalah peningkatan jumlah budaya benda dan takbenda yang diakui dan diapresiasi. Artinya, jumlah warisan budaya yang mendapatkan pengakuan dan apresiasi baik secara lokal, nasional, maupun internasional menjadi tolok ukur keberhasilan Pemda DIY dalam memelihara dan mengembangkan kekayaan budaya.

Pengakuan dan apresiasi terhadap budaya benda dan takbenda tidak hanya menunjukkan nilai kekayaan budaya yang dimiliki suatu daerah, tetapi juga menandakan upaya serius dalam merawat dan mempromosikan keberagaman dan identitas budaya. Oleh karena itu, peningkatan jumlah budaya yang diakui dapat menjadi indikator efektif dalam mengevaluasi kesuksesan implementasi kebijakan kebudayaan di DIY.

Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran pemeliharaan budaya dalam memperkuat identitas lokal, meningkatkan kesadaran akan warisan budaya,

serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, usaha untuk memelihara dan mengembangkan budaya, baik yang berwujud maupun tak berwujud, menjadi bagian integral dari upaya mencapai tujuan keberlanjutan dan keberhasilan budaya di tingkat daerah maupun nasional.

Pada tahun 2023 target Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY ditetapkan sebesar 323 buah dengan realisasi sebesar 368 buah. Capaian pada tahun 2023 tersebut meningkat sebesar 9% dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang terealisasi sebesar 337 Buah.

Tabel 3.43. Target dan Realisasi Indikator Program Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, dan internasional) Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	buah	337	323	368	113,93

Sumber: Disbud DIY, 2024

Budaya benda kekayaan DIY yang diapresiasi di tingkat nasional dan internasional sampai dengan tahun 2023 mencapai 187 buah budaya benda. Budaya benda yang diapresiasi sampai dengan tahun 2022 adalah Rumah Indis Jl. Serma Taruna Ramli, Kotabaru, Yogyakarta; Rumah Tradisional Sendangsari, Bantul; Rumah Tradisional Sidomoyo, Sleman; Rumah Indis Selomartani, Sleman; Rumah Tradisional Bejiharjo, Gunungkidul; Rumah Tradisional Karanganom, Gunungkidul; Rumah Arsip eks tambang mangaan Kliripan, Kulon Progo; Kantor Kapanewon Galur; Kantor Kapanewon Tempel; Wisma RRI; Rumah Indis Nogosari, Bantul; Rumah Tradisional Bangunharjo, Bantul; Rumah Tradisional Ngawis, Gunungkidul; Rumah Tradisional Karangduwet, Gunungkidul; Kantor Kapanewon Temon; dan Rumah Tradisional Gulurejo, Kulon Progo. Tahun 2023 terdapat 4 budaya benda yang diapresiasi di tingkat nasional adalah Jembatan Kereta Api Mbeling di Kulonprogo, Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Situs Tamansari Kraton Yogyakarta, dan Gedung Pusat UGM Yogyakarta.

Warisan Budaya Benda yang ditetapkan di tingkat Internasional pada tahun 2023 adalah Sumbu Filosofi Yogyakarta. Penetapan *UNESCO* sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 18 September 2023 di Sidang ke-45 Komite Warisan Dunia atau *World Heritage Committee* (WHC) di Riyadh Arab Saudi. Sertifikat penetapannya sebagai Warisan Budaya Dunia tertanggal 24 September 2023.

Tabel 3.44. Budaya benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional Tahun 2007 - 2023

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2007	28	-	28
2	2010	16	-	16
3	2011	95	-	95
4	2013	1	-	1
5	2014	1	-	1
7	2016	1	-	1
8	2018	2	-	2
9	2019	6	-	6
10	2020	16	-	16
11	2021	-	-	-
12	2022	16	-	16
13	2023	4	1	5
Jumlah		186	1	187

Sumber: Disbud DIY, 2024

Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) DIY di tingkat Nasional telah mencapai 181 buah. Pada tahun 2023 sebanyak 25 buah WBTB DIY berhasil ditetapkan sebagai WBTB Nasional dan 1 buah WBTB DIY ditetapkan tingkat Internasional.

WBTB yang ditetapkan tingkat nasional tersebut terdiri dari lima domain yang berbeda. Domain yang pertama adalah Domain Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan yang terdiri dari : Sadranan Mbah Jobeh, Upacara Adat Kirim Dowa, Upacara Adat Wot Galeh, Nyadran Joyo Kusumo, Jamasan Pusaka Kyai Londoh, Nyadran Situs Tirto/ Ki Gonotirto, Upacara Grebeg Ngenep, Saparan Kalibuko Kalirejo Kokap, Labuhan Parangkusumo, Ritual Adat Gunung Lanang, dan Sadranan Gunung Gambar.

Domain kedua adalah Domain Seni Pertunjukan yang terdiri dari: Kesenian Thethelan, Bedhaya Bontit, Serimpi Merak Kasimpir, Bedhaya Genjong, Rodat, Serimpi Kandha Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Tari Klana Alus Dasalengkara, Srimpi Dhempel, dan Srimpi Gambir Sawit. Selanjutnya Domain ketiga adalah Domain Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta yang terdiri dari : Sego Pari Gogo dan Wader Liwet. Untuk domain keempat yakni domain Kemahiran dan Kerajinan Tradisional terdiri dari Jangan Lombok Ijo dan Abangan. Kemudian yang terakhir domain kelima adalah domain Tradisi Lisan dan Ekspresi yaitu Gendhing Sekaten.

Tabel 3.45. Budaya takbenda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2013	1	-	1
2	2014	5	-	5
3	2015	4	-	4
4	2016	9	-	9
5	2017	18	-	18
6	2018	27	-	27
7	2019	30	-	30
8	2020	14	-	14
9	2021	26	-	26
10	2022	21	-	21
11	2023	25	1	26
Jumlah		180	1	181

Sumber: Kemendikbud RI, 2024

WBTB yang ditetapkan di tingkat Internasional pada tahun 2023 adalah Jamu, sebagai salah satu WBTB DIY yang sudah ditetapkan menjadi WBTB Indonesia. UNESCO melalui Komite Konvensi Warisan Budaya Takbenda (*Intangible Cultural Heritage*) secara resmi menetapkan Jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, pada tanggal 6 Desember 2023 pada Sidang ke-18 *Intergovernmental Committee for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* di Kasane, Republik Botswana, Afrika Selatan.

13. Program Pembangunan Sosial Masyarakat,

dengan indikator:

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup: a. partisipasi berpolitik yang direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; b. partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta c. penguasaan sumber daya ekonomi yang direpresentasikan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Pada tahun 2023, indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terealisasi 76,87 dari target yang ditetapkan 77,07, atau dengan presentase ketercapaian 99,74%.

Tabel 3.46. Target dan Realisasi Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2023

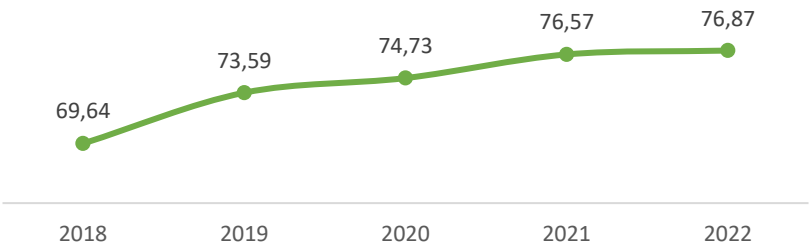
Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka indeks	76,87	77,07	76,87*	99,74

Ket.: *) Realisasi tahun 2023 adalah hasil IDG tahun 2022, dikarenakan capaian tahun 2023 belum rilis

Sumber: BPS DIY, 2024

Nilai IDG Nasional pada tahun 2022 adalah 76,59 sedangkan IDG DIY di tahun tersebut sebesar 76,87 yang berada di atas nilai nasional. Meskipun angka tersebut berada di atas angka nasional, namun secara target yang tercantum dalam RPD belum tercapai dengan realisasi capaian sebesar 99,74%. Capaian IDG DIY diatas nasional menunjukkan bahwa DIY telah mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusiannya dengan terus mencapai target dan meningkatkan nilai pemberdayaan gender setiap tahunnya dan bahkan data menunjukkan

bahwa dalam 5 tahun terakhir nilai IDG DIY terus naik seperti tampak pada grafik berikut.



Gambar 3.24. Tren Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di DIY tahun 2018-2022
Sumber: BPS DIY, 2023

Untuk sebaran Kabupaten/Kota di DIY, pada tahun 2022 Kabupaten Sleman memperoleh nilai IDG tertinggi sebesar 81,65 dan nilai IDG terendah sebesar 65,03 diperoleh Kabupaten Bantul. Kota Yogyakarta mencapai nilai IDG sedikit di bawah capaian nasional yaitu 75,5. Dua Kabupaten lain di DIY, mencapai nilai IDG di atas angka nasional yakni Kabupaten Gunungkidul sebesar 77,93 dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 72,27.

Tabel 3.47. IDG Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022

Indeks Pemberdayaan Gender					
Nasional/Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	72,1	75,24	75,57	76,26	76,59
D.I. Yogyakarta	69,64	73,59	74,73	76,57	76,87
Kulonprogo	63,36	71,68	71,45	71,41	72,27
Bantul	61,01	65,29	64,78	65,27	65,03
Gunungkidul	67,45	75,34	75,53	76,7	77,93
Sleman	78,47	80,4	81,25	81,31	81,65
Kota Yogyakarta	80,65	71,06	71,05	73,18	75,5

Sumber: BPS, 2023

IDG dibentuk dari tiga indikator yaitu Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan. Dengan kondisi masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2022

Kabupaten/ Kota	[IDG] Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)			[IDG] Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)			[IDG] Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
D.I. Yogyakarta	18,18	20	20	53,69	52,18	53,09	40,82	41,26	41,37
Kulonprogo	20	20	20	52,13	52,57	50,25	34,09	34,27	34,5
Bantul	8,89	8,89	8,89	55,37	56,03	57,58	38,75	39,28	38,89
Gunungkidul	22,22	24,44	24,44	46,13	44,59	46,04	39,9	39,52	39,32
Sleman	28	28	28	52,12	51,66	52,98	38,46	38,92	39,8
Kota Yogyakarta	12,82	15	17,5	53,67	52,51	50,78	44,63	44,72	43,78

Sumber: BPS, 2023

Dari tabel di atas, terlihat bahwa di seluruh Kabupaten/Kota di DIY terjadi perbaikan kondisi dari ke 3 indikator tersebut sejak 2020 sampai 2022. Keterlibatan Perempuan di parlemen mengalami kenaikan terus menerus selama 3 tahun di seluruh kabupaten/kota di DIY. Keterlibatan Perempuan di parlemen di DIY masih berada pada angka 20%. Angka ini masih kurang dari kebijakan *affirmative action* kuota keterwakilan perempuan 30%. Minimnya keterlibatan perempuan tercipta sebagai akibat dari kondisi patrilinealisme di masyarakat yang menempatkan lelaki seolah lebih tinggi dalam kepemimpinan, sehingga kecenderungan masyarakat memilih pemimpin lelaki. Perlu sosialisasi pengarusutamaan gender (PUG), melalui berbagai media dan tatap muka guna penyadaraan persamaan gender pada masyarakat pemilih dan pengambil kebijakan. Pada tahun 2023 telah disahkan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender. Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara; serta meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya Pembangunan.

Untuk indikator kedua yaitu perempuan sebagai tenaga profesional, Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 2,32% setelah naik sebesar 0,44% di tahun sebelumnya. Kabupaten Bantul selama 3 tahun berturut-turut terus naik, Kabupaten Gunungkidul kembali naik di tahun 2022 sebesar 1,45% setelah di tahun sebelumnya turun sebesar 1,54%, Kabupaten Sleman juga mengalami hal sama dimana menurun di tahun 2021 sebesar 0,46% dan naik kembali pada tahun 2022 sebesar 1,32%. Di Kota Yogyakarta angkanya terus menurun selama tiga tahun terakhir.

Rata-rata lama Sekolah (RLS) berpengaruh signifikan terhadap kondisi Perempuan sebagai Tenaga Profesional di DIY. RLS Perempuan di DIY masih lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini terlihat dari data BPS pada tahun 2022, bahwa RLS Perempuan sebesar 9,45 tahun dan RLS Laki-laki sebesar 10,06. Upaya lainnya dengan optimalisasi Satgas anak putus sekolah di dinas Pendidikan untuk memastikan tidak ada lagi anak putus Sekolah karena alasan biaya, pernikahan dini, dan permasalahan sosial lainnya. Dengan anak Perempuan berpendidikan tinggi maka akan memberi kesempatan Perempuan sebagai tenaga profesional di DIY.

Pada indikator ketiga yaitu Sumbangan Pendapatan Perempuan, Kulon Progo, Sleman dan Kota Yogyakarta terus naik sejak tahun 2020-2022, Bantul yang sempat naik di tahun 2021 turun 0,39% di tahun 2022 dan Gunungkidul terus menurun selama tiga tahun terakhir. Namun secara rata-rata IDG DIY tetap naik di tahun 2022. Perempuan kelompok rentan sebagai akibat dari kondisi perempuan sebagai kepala rumah tangga, perempuan eks buruh migran, perempuan dengan anggota keluarga dengan HIV/AIDs, ODGJ, penyakit menahun, dan perempuan penyintas tindak kekerasan mempunyai andil dalam kemiskinan Perempuan. Terkait dengan Sumbangan Pendapatan Perempuan, perempuan kelompok rentan menjadi fokus pemberdayaan melalui Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) Prima. Terhadap perempuan kelompok rentan dalam KEP Prima akan dilakukan pelatihan

peningkatan keterampilan, pendampingan usaha, dan bantuan modal usaha. KEP Prima sampai tahun 2023 telah terbentuk di 156 Kalurahan seluruh DIY.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, IDG DIY berada di atas rata rata nasional sejak tahun 2021. IDG DIY pada tahun 2022 sebesar 76,87 di atas angka nasional sebesar 76,59. Namun walaupun pencapaian hasil baik IDG, masih harus tetap diupayakan kinerja terbaik untuk meningkatkan IDG dan mencegah penurunan di tahun berikutnya.

Tabel 3.49. IDG Nasional dan DIY Tahun 2020-2022

NASIONAL/DIY	[IDG] Indeks Pemberdayaan Gender				
	2018	2019	2020	2021	2022
D.I. Yogyakarta	69,64	73, 59	74,73	76,57	76,87
Nasional	72,1	75,24	75,57	76,26	76,59

Sumber: BPS, 2023

Dari data BPS tersebut terlihat bahwa dalam 5 tahun terakhir melalui berbagai program kegiatan, DIY telah mampu meningkatkan nilai IDGnya dengan signifikan dimana pada tahun 2018 nilai IDG DIY masih dibawah IDG nasional. Pada dua tahun berikutnya DIY mampu menaikkan nilai IDGnya namun masih di bawah nilai IDG nasional. Mulai 2021 DIY telah mampu menaikkan nilai IDGnya menjadi di atas nilai IDG nasional. Tahun 2022 nilai IDG juga makin naik di atas IDG nasional. Nilai IDG ini diharapkan akan terus naik demi tercapainya peningkatan kualitas hidup SDM di DIY pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Serta tercapainya tujuan dari pemberdayaan gender yaitu meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif.

b. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa

Membangun, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan di Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tingkatan dalam IDM terdiri dari Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Di wilayah DIY sendiri semua desa sudah masuk kategori Desa Mandiri dan Desa Maju dengan jumlah pada tahun 2023 masing-masing 256 Desa Mandiri dan 136 Desa Maju.

IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

IDM disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuan penyusunan IDM adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 menetapkan status kemajuan dan kemandirian berdasarkan hasil pemutakhiran data IDM. Status kemajuan dan kemandirian desa digunakan sebagai instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi desa dan penyusunan prioritas penggunaan dana desa.

Secara nasional berdasarkan data yang diperoleh dari idm.kemendes.go.id ranking dan status IDM DIY menduduki peringkat kedua dari 36 Provinsi, dengan nilai sebesar 0,8322 naik dari status semula “Maju” menjadi “Mandiri” berada dibawah Provinsi Bali dengan nilai 0,8550.

Tabel 3.50. Target dan Realisasi Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa Mandiri Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	Desa	184	119	256	215,13

Sumber: Biro Bermas Setda DIY, 2024

Pada tahun 2023 Pemda DIY menargetkan Jumlah Desa Mandiri adalah sebanyak 119 desa. Namun, kinerja Pemda DIY dapat mencapai lebih dari target yang telah ditetapkan. Hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 256 Desa Mandiri atau sebesar 215,13% dari target yang diperjanjikan. Sehingga masih terdapat 136 desa yang masih dalam kategori Desa Maju.

1) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

Belum optimalnya koordinasi lintas level pemerintahan dalam rangka pembahasan sinergitas intervensi kegiatan yang dapat dilakukan berdasarkan Hasil Rekomendasi IDM.

b) Solusi

Optimalisasi koordinasi antar *stakeholder* lintas level pemerintahan dalam rangka pembahasan sinergitas intervensi kegiatan yang dapat dilakukan berdasarkan Hasil Rekomendasi IDM. Selain itu, memprioritaskan intervensi kepada Desa Maju dalam hal peningkatan skor/nilai yang masih dapat dioptimalkan berdasarkan Hasil Rekomendasi IDM.

14. Program Sinergis Tata Kelola Pemerintah Daerah,

dengan indikator:

a. Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mematuhi standar pelayanan. Standar Pelayanan merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolok ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik wajib memenuhi pelaksanaan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat perihal layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penilaian kepatuhan tersebut dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia sejak tahun 2015. Penilaian dilakukan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan dan kegiatan penilaian dilakukan sebagai wujud fungsi pencegahan maladministrasi. Mulai tahun 2022 Ombudsman melakukan penyempurnaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan. Penilaian ini diharapkan dapat menjadi lebih komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik yang dicermati dalam dimensi input dan proses (*service manufacturing*) hingga output dan dampak (*impactful public service*).

Adapun dimensi penilaian meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. Kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.

Berikut ini tabel capaian indikator Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dengan membandingkan realisasi dan target Tahun 2023, serta terhadap capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.51. Target dan Realisasi Indikator Program Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	tingkat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100

Sumber: Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023 Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Tabel 3.52. Capaian Nilai Kepatuhan Tahun 2022 dan 2023

No	Tahun	Nilai Kepatuhan	Zonasi	Kategori	Opini	Peringkat Provinsi
1.	2022	91,15	Hijau	A	Kepatuhan Tertinggi	4
2.	2023	94,18	Hijau	A	Kepatuhan Tertinggi	5

Sumber: Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023 Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemda DIY secara konsisten dapat mempertahankan kepatuhan standar pelayanan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Secara spesifik, nilai kepatuhan dari masing-masing lokus yang dievaluasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.53. Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

No	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1.	DISDIKPORA	19,59	29,46	21,97	18,88	89,90
2.	Dinas Sosial	18,50	31,54	23,18	21,54	94,77
3.	RS Paru Respira	20,69	31,11	22,21	21,54	95,55
4.	Dinas Kesehatan	20,21	30,98	22,63	21,54	95,36
5.	DPMPTSP	20,29	31,16	22,33	21,54	95,32
Nilai Akhir dan Zona		94,18				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Sumber: Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023 Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa aspek pengaduan di Dinas DIKPORA DIY dan aspek input di Dinas Sosial memperoleh nilai yang paling rendah di antara sesama lokus yang dievaluasi, serta secara perhitungan penilaian keseluruhan, nilai kepatuhan pada Dinas DIKPORA DIY memperoleh nilai yang terendah dan RS Paru Respira memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dengan unit layanan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan upaya penguatan untuk peningkatan kualitas kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik baik pada unit layanan yang telah dievaluasi maupun pada unit yang belum dievaluasi oleh Ombudsman Republik Indonesia.

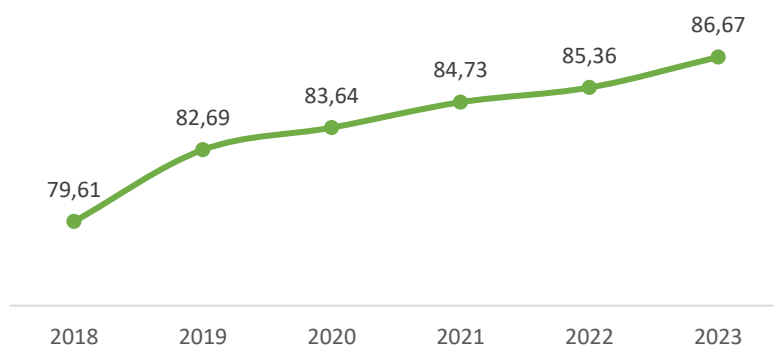
b. Survey Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Berdasarkan amanat Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, pelaksanaan SKM juga berfungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, umpan bagi penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Unsur pelayanan yang disurvei dalam SKM meliputi: 1) Persyaratan; 2) Sistem, mekanisme dan prosedur; 3) Waktu Penyelesaian; 4) Biaya/Tarif; 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6) Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana; 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dan 9) Sarana dan Prasarana.

Tabel di bawah menunjukkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan nilai hasil SKM atau nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemda DIY dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan 5.112 responden dari 25.394 responden pada tahun 2022 menjadi 28.506 responden. Peningkatan tersebut terjadi karena metode pelaksanaan SKM pada tahun 2023 lebih banyak menggunakan metode online, berbasis media sosial seperti *google form* yang disampaikan melalui aplikasi Whatsapp sehingga lebih banyak jumlah pengguna layanan yang dapat mengakses SKM dan memberikan respon dengan lebih cepat dan mudah.



Gambar 3.25. Nilai SKM Pemda DIY Tahun 2018-2023

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2024

Meskipun demikian, capaian nilai SKM tahun 2023 sebesar 86,67 belum memenuhi target capaian SKM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 87,43.

Tabel 3.54. Target dan Realisasi Indikator Program Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Survei Kepuasan Masyarakat	nilai	85,36	87,43	86,67	99,13

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2024

Merujuk pada hasil dari SKM pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa unsur pelayanan dengan nilai terendah adalah waktu pelayanan, produk layanan, dan prosedur, maka ketidaktercapaian target tersebut terkait dengan proses pemberian pelayanan yang masih dipersepsikan kurang efektif oleh masyarakat baik dari segi waktu, prosedur dan produk layanan. Inovasi pelayanan publik diperlukan bagi peningkatan kualitas pelayanan dalam ketiga unsur tersebut. Inovasi yang diciptakan dan diimplementasikan oleh unit pelayanan diharapkan bisa memangkas waktu dan prosedur layanan serta meningkatkan kualitas produk layanan.

1) **Permasalahan dan Solusi**

a) **Permasalahan**

- (1) Belum semua unit layanan memiliki atau melakukan replikasi inovasi dan mengimplementasikan inovasi tersebut dalam pelayanannya.
- (2) Pelaksanaan SKM dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dan dianalisis secara manual serta hasilnya diperoleh secara berkala. Diperlukan sistem SKM yang dapat mengukur nilai IKM di Pemda DIY

secara *real time* untuk mengetahui dinamika pelayanan publik.

b) Solusi

- (1) Menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik dengan tema percepatan dan peningkatan kualitas layanan yang wajib diikuti oleh seluruh unit layanan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi pelayanan publik di Pemda DIY.
- (2) Melakukan studi awal tentang SKM berbasis web yang dapat menyediakan data nilai IKM secara terpusat dan *real time*.

15. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah – Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan

Kewenangan kelembagaan Pemda DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Ketentuan mengenai penataan dan penetapan kelembagaan Pemda DIY diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022, urusan kelembagaan diberikan kewenangan untuk melaksanakan perumusan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana,

pola hubungan, eselon atau jabatan, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.

Dalam rangka mengukur ketercapaian implementasi kewenangan urusan kelembagaan terkait perumusan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, eselon atau jabatan, beban kerja, serta nomenklatur unit kerja serta pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Daerah, maka disusunlah indikator kinerja “Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan”. Indikator tersebut diukur melalui meta indikator “Kesesuaian pelaksanaan urusan kelembagaan istimewa dengan Perdais Kelembagaan (struktur organisasi Pemerintah Daerah, uraian tugas dan fungsi OPD, pedoman struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota, pedoman struktur kelembagaan Pemerintah Kalurahan/Desa)”. Berikut capaian indikator pada tahun 2023.

Tabel 3.55. Target dan Realisasi Indikator Program Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdais Kelembagaan	%	100	100	100	100

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, indikator “Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan” terealisasi sesuai target yaitu sebesar 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan urusan kelembagaan telah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut rincian Perdais dan Pergub Urusan Kelembagaan.

Tabel 3.56. Regulasi Keistimewaan DIY Urusan Kelembagaan

No	Jenis	Nomor	Tentang
1	Peraturan Daerah Istimewa DIY (Perdais)	1 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Peraturan Gubernur DIY (Pergub)	2 Tahun 2020	Pedoman Pemerintahan Kalurahan
3		30 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan
4		107 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)
5		114 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)
6		105 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
7		13 Tahun 2022	Penugasan Urusan Keistimewaan
8		19 Tahun 2022	Budaya Pemerintahan
9		40 Tahun 2023	Reformasi Kalurahan
10		8 Tahun 2023	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

a. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Terdapat dinamika kebijakan pusat terkait perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, sehingga menghendaki adanya penyesuaian terhadap kelembagaan Pemda DIY.
- Terdapat evaluasi kelembagaan baik oleh Pemda DIY maupun Kementerian Dalam Negeri, sehingga diperlukan penyesuaian sebagai tindak lanjut hasil evaluasi.

2) **Solusi**

- a) Sebagai tindak lanjut penajaman atas Perdais Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan. Pergub tersebut mengatur restrukturisasi kelembagaan pada Paniradya Kaistimewan. Selanjutnya, ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan sebagai pedoman implementasi Reformasi Kalurahan. Perubahan yang terjadi disesuaikan dengan semangat perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintah guna meningkatkan efektivitas kinerja Perangkat Daerah serta peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b) Melaksanakan koordinasi intensif, baik di lingkungan internal Pemda DIY maupun Kementerian Dalam Negeri RI terkait penataan kelembagaan DIY.

D. PENGHARGAAN

Pada tahun 2023 Pemda DIY memperoleh beberapa penghargaan sebagai apresiasi atas keberhasilan dalam melaksanakan kinerja urusan pemerintahan sesuai kewenangannya, antara lain:

1. Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP berkaitan dengan keberhasilan Kepala Daerah yang membawa Satuan Polisi Pamong Praja DIY sebagai instansi daerah yang berprestasi dan mengabdikan tanpa batas di Tingkat Nasional, penghargaan diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri RI.
2. Penghargaan dalam rangka Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi (KTKK) di Tingkat Nasional dalam Kategori Juru Ukur yang menempati Juara 2.
3. Penghargaan Bhumandala Ariti dalam rangka menerapkan inovasi pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) dalam tata kelola pemerintahan.

Penghargaan tersebut di Tingkat Nasional dengan menduduki Juara III yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.

4. Penghargaan dalam rangka Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Tingkat Nasional, dengan Kategori Terbaik Kedua yang diperoleh dari Kementerian Investasi/BKPM RI.
5. Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Tingkat Nasional sebagai nomine yang diperoleh dari Ombudsman RI.
6. Indonesia's SDGs Action Award 2023 sebagai Provinsi Terbaik di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Bappenas RI. Penghargaan dalam SDGs *Annual Conference* 2023 yang bertema "Air, Energi, dan Pertanian Menuju Pangan Berkelanjutan".
7. Lomba BPTPH Berprestasi dan POPT Inovatif Tahun Anggaran 2023 yang menempati Juara II di Tingkat Nasional diperoleh dari Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Kementerian Pertanian RI.
8. Anindhita Wistara Data, penghargaan diberikan sebagai Provinsi dengan Indeks Pembangunan Statistik Kategori Baik di Tingkat Nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tahun 2023 yang diperoleh dari BPS RI.
9. Penghargaan Program Kartu Tani BRI sebagai Provinsi Terbaik Klaster I di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia.
10. Penghargaan dalam rangka Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 yang diberikan pada tahun 2023, Pemda DIY sebagai Provinsi yang menduduki Peringkat I dengan Kategori AA "Sangat Memuaskan", yang diperoleh dari Arsip Nasional RI.
11. Penghargaan dalam rangka Simpul Jaringan Terbaik Nasional Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2023 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Arsip Nasional RI.
12. Penghargaan dalam rangka Persentase Perpustakaan Terakreditasi Terbanyak di Wilayah II (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) Tahun 2022 yang diberikan pada tahun 2023 di Tingkat Nasional yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI.

13. Penghargaan dalam Kategori Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2022 yang diberikan pada tahun 2023, Pemda DIY sebagai peraih Kategori Tinggi dengan nilai 83,63 di Tingkat Nasional, penghargaan diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI.
14. Penghargaan dalam Kategori Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2022 yang diberikan pada tahun 2023, Pemda DIY meraih Kategori Tertinggi dengan nilai 72,29 di Tingkat Nasional, penghargaan diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI.
15. Penghargaan dengan Predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) di Tingkat Nasional, sebagai apresiasi dan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Penghargaan diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
16. Penghargaan Primaniyarta dengan Kategori Kepala Daerah Pendukung Ekspor di Tingkat Nasional sebagai Pembina Ekspor.
17. Penghargaan atas Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dengan Kategori Terbaik Peringkat II berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang di Tingkat Nasional. Selain itu, IPK Terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja dan Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja.
18. Penghargaan Majalah Pemerintah Terbaik untuk Buletin SiBakul edisi III bulan November 2022 oleh Indonesia *Inhouse Magazine Awards* (InMa) Tahun 2023.
19. Penghargaan Rekor Dunia MURI Tingkat Nasional atas Rekor *Line Dance* dengan Mengenakan Busana Tradisional Nusantara dan Syal Motif Batik oleh Penari Terbanyak.
20. Penghargaan Pemda DIY sebagai Badan Publik Kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat RI. Penghargaan ini diterima Pemda DIY karena telah mengimplementasikan keterbukaan informasi sesuai amanat UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
21. Penghargaan dari Kemenkominfo RI sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan komunikasi publik dan dukungan hubungan masyarakat kementerian dan lembaga, pemerintah daerah serta BUMN dan perguruan tinggi dalam menyukseskan penyelenggaraan KTT ASEAN di Indonesia. Pemda DIY mendapatkan Juara 1 kategori Media Sosial Terbaik, Juara II

- Kategori Kampanye Komunikasi Publik, Juara II penerbitan Media Internal atau *Inhouse Magazine*, Juara III media Audio Visual.
22. Penghargaan dari BSSN atas Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Terbaik Sektor Pemerintah Provinsi.
 23. Penghargaan sebagai Pembina Terbaik ke-2 Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan oleh Kementerian Perhubungan RI.
 24. Penghargaan Pemerintah Daerah Penyelenggara Angkutan Perkotaan Terbaik oleh Kementerian Perhubungan RI.
 25. Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar Kategori Pemerintah Daerah Subkategori “Transformasi Anggaran dan Regulasi” Tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka Bulan Merdeka Belajar, memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023.
 26. Penghargaan Apresiasi Cerdas Berkarakter Kategori Pemerintah Daerah Inspiratif Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka Pekan Untuk Sahabat Karakter (PUSAKA) Tahun 2023 diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 27. Penghargaan Top 15 Kelompok Khusus Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 atas Inovasi “Melintasi Batas Ruang Kelas Bersama *Jogja Belajar Class*”, diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
 28. Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 atas Inovasi Model Manajemen Kelompok Usaha Siswa Partisipasi Berantas Kemiskinan Masyarakat (MOMENKU SIAP BERKEMAS), diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
 29. Penghargaan Atas Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Tertinggi Se-Indonesia Tahun 2023, diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
 30. Penghargaan “*World Heritage List – UNESCO: The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks on the World Heritage List*” berupa pengakuan internasional terhadap Kebudayaan Indonesia yang berkontribusi untuk dunia, dalam hal ini Sumbu Filosofi Yogyakarta.

31. Penghargaan Penetapan Warisan Budaya Takbenda dari Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
32. Penghargaan Penetapan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Cagar Budaya berstatus nasional.
33. Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2023, diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
34. Penghargaan dalam rangka Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan hasil Kualitan tertinggi (A).
35. Penghargaan PKM *Award*, Predikat Laboratorium Covid dengan Performa Terbaik.
36. Penghargaan Peringkat I Penggunaan Antibiotik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terbaik Tahun 2022.
37. Penghargaan Peringkat II Pelayanan Kefarmasian Terbaik Tahun 2022.
38. Penghargaan *Health Financing Award* Dinas Kesehatan DIY Kategori *Provincial Health Account* Terbaik.
39. Penghargaan Unit Kerja Dekonsentrasi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tertinggi ke 3 pada tahun 2022.
40. Penghargaan Peringkat Ketiga Pemeringkatan Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2023.
41. Piagam Penghargaan Terbaik 3 kategori Provinsi Dengan Pelibatan Fasyankes Swasta Terbaik Tahun 2023.
42. Penghargaan Provinsi DIY Kategori Indikator Surveilans Campak-Rubela Terbaik Tahun 2022.
43. Penghargaan Rumah Sakit Paru Respira Pemerintah Provinsi DIY sebagai Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2023.
44. Penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial UPT Dinas Kesehatan Provinsi DIY.
45. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan RI sebagai Pemda Panutan Kategori “Tervalid”.

46. Penghargaan dari Kemenko Perekonomian sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Terbaik III Wilayah Jawa-Bali.
47. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan RI sebagai Terbaik I Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022.
48. Penghargaan Juara I PPKM *Award* Kategori Pengendalian Pandemi Covid-19 dari Menteri dalam Negeri RI.
49. Penghargaan sebagai Juara I atas Inisiasi Pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana.
50. Penghargaan BKN *Awards* Kategori Implementasi NSPK Manajemen ASN Kategori Pemerintah Provinsi Terbaik se-Indonesia.
51. Penghargaan Juara I BKN *Awards* Kategori Pengembangan Kompetensi Pemerintah Provinsi Tipe Kecil.
52. Penghargaan Juara III BKN *Awards* Kategori Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT Pemerintah Provinsi Tipe Kecil.
53. Penghargaan Juara III BKN *Awards* Kategori Perencanaan kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Tipe Kecil.
54. Penghargaan Juara IV BKN *Awards* Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Pemerintah Provinsi Tipe Kecil.
55. Penghargaan Adarakarya DTS Tahun 2023 sebagai Mitra Pemerintah Terbaik *Government Transformation Academy* Tahun 2023.
56. Penghargaan Terbaik III *Public Relation* Indonesia Award 2023 Kategori Manajemen Krisis dan Pasca Krisis. Pemda DIY mampu menyampaikan kebijakan pemerintah sehingga bisa sampai dengan baik pada masyarakat dan mampu mengedukasi masyarakat untuk bisa menilai pemberitaan tidak hanya dari satu sisi saja, namun bisa lebih berimbang.
57. Penghargaan Terbaik I Anugerah Media Hubungan Masyarakat 2023 Kategori Media Sosial. Pemda DIY berhasil mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat luas khususnya kaum millennial bahwa Indonesia sedang menjadi tuan rumah serta menjabat keketuaan ASEAN pada tahun 2023 dengan tema “ASEAN MATTERS: *Epicentrum of Growth*” melalui konten di media sosial bertajuk “Bercanda” yang merupakan akronim dari Berbagi Cerita Keketuaan ASEAN di Indonesia.

58. Penghargaan Terbaik ke II atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan status Kinerja Tinggi.
59. Penghargaan Terbaik ke VI sebagai Pemerintah Provinsi Berkinerja Baik kategori Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022.
60. Penghargaan atas Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023 dari Badan Publik Informatif Kategori OPD Pemerintah Daerah DIY.
61. Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI dengan capaian “Kualitas Tertinggi” kategori Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.
62. Penghargaan Anugerah Pengadaan 2023 sebagai peringkat ke III kategori Persentase Nilai Transaksi PDN Terbesar.
63. Penghargaan JDIH Award sebagai terbaik ke V secara nasional dalam melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
64. Penghargaan Juara ke I Kategori Provinsi Dengan Tingkat Partisipasi Peserta Tertinggi. Penghargaan ini dianugerahkan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Peringkat 1 Provinsi Dengan Tingkat Partisipasi Peserta Tertinggi (99,72%) untuk Kategori III (Jumlah Peserta 840 s.d. 2770 Orang) Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023.
65. Penghargaan sebagai Finalis Kategori Wilayah Terbaik dalam Implementasi KEJAR tingkat Provinsi.
66. Penghargaan Terbaik ke II Tingkat Nasional Implementasi SDGs dalam Indonesia’s SDGs *Action Awards* 2023 Kategori Pemerintah Daerah Provinsi.
67. Peringkat Terbaik I Tingkat Nasional kategori Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022. BPS RI tidak memberikan penghargaan berupa sertifikat/piagam/piala secara resmi karena BPS hanya merilis nilai IDI pada website www.bps.go.id/id.
68. Peringkat Terbaik I Tingkat Nasional kategori Capaian Kinerja Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2022 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Namun demikian Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia belum memberikan penghargaan berupa sertifikat/piagam/piala secara resmi.

69. Peringkat Terbaik I dalam Parade Budaya Original pada acara Festival Parade Budaya Nasional dan Internasional 2023.
70. Peringkat III *Stand* Terbaik Kategori Pemda/BUMN pada Jakarta Fair 2023.
71. Penghargaan Rekor MURI sebagai Pendukung Kegiatan Pentas Seni Musik Campursari 120 Jam *Nonstop*.
72. Penghargaan atas Akuntabilitas Kinerja Pemda DIY Tahun 2023 meraih Predikat AA “Sangat Memuaskan” atau dengan nilai 92,10 yang diperoleh dari KemenPAN dan RB RI. Penghargaan ini telah diperoleh Pemda DIY sebanyak 6 kali berturut-turut dan menjadi satu-satunya di Indonesia sebagai peraih Predikat AA.
73. Penghargaan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Pemda DIY mendudukkan Kategori A- dengan nilai 88,15, yang diperoleh dari KemenPAN dan RB RI.

E. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar

1) *Urusan Pendidikan*

a) *Kondisi Umum*

Keberhasilan Pemda DIY untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat salah satunya ditandai dengan peningkatan pemerataan layanan, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan. Pemerataan layanan pendidikan diwujudkan melalui penyaluran berbagai beasiswa untuk mengurangi kendala ekonomi anak usia sekolah dalam menempuh pendidikan. Peningkatan kualitas diwujudkan melalui implementasi Kurikulum Merdeka sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi guna meningkatkan kompetensi peserta didik dan

mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Tahap final dari rangkaian pembangunan pendidikan adalah relevansi pendidikan yang diwujudkan melalui ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan pengukuran kualitas pendidikan, seluruh satuan pendidikan formal didorong untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan pencapaian rapor pendidikan. Perencanaan untuk peningkatan mutu satuan pendidikan didasarkan pada kompetensi numerasi dan literasi siswa, hasil penilaian karakter warga sekolah, serta kondisi lingkungan belajar di sekolah. Gambaran kinerja Pemda DIY urusan pendidikan ditampilkan di bawah ini.

Tabel 3.57. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	persen	89,95	100	91,17	91,17
2	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	persen	N/A	50	71,55	143,10
3	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	persen	N/A	50	62,07	124,14
4	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	persen	N/A	70,90	76,90	108,46

Sumber: Disdikpora DIY, 2024

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun di DIY tahun 2023 adalah sebesar 91,17%. Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16-18 tahun dihitung berdasarkan perbandingan jumlah anak sekolah pada usia jenjang

pendidikan menengah dengan jumlah anak pada kelompok usia 16 -18 tahun di DIY. Berdasarkan capaian APS tersebut, terdapat peningkatan sebesar 1,22% dibandingkan capaian APS DIY tahun 2022 sebesar 89,95% walaupun belum memenuhi target sebesar 100%. Capaian APS DIY juga telah melampaui rata-rata nasional sebesar 73,42%. Belum terpenuhinya target APS menunjukkan masih adanya anak berusia 16-18 tahun yang tidak menuntaskan jenjang pendidikan menengah.

Pemda DIY berupaya untuk meningkatkan angka partisipasi di jenjang pendidikan menengah salah satunya melalui penyaluran beasiswa bagi anak-anak yang putus sekolah. Diharapkan penyaluran beasiswa ini dapat membantu mengurangi beban ekonomi anak-anak putus sekolah sehingga mereka dapat menyelesaikan jenjang pendidikan menengah.

Mengacu pada implementasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik menjadi salah satu tolok ukur kualitas satuan pendidikan. Kompetensi literasi didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks, baik yang berbentuk teks informasional maupun teks fiksi. Kompetensi numerasi merupakan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Capaian untuk persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi Literasi memenuhi kompetensi minimum adalah sebesar 71,55%. Capaian ini melampaui target indikator sebesar 50% dan rata-rata nasional sebesar 49,26%. Salah satu faktor pendukung

untuk capaian ini adalah telah diterapkannya pengayaan materi literasi siswa di luar jam pelajaran.

Capaian untuk Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi Numerasi memenuhi kompetensi minimum adalah sebesar 62,07%. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 50% dan capaian nasional sebesar 41,14%. Salah satu faktor pendorong capaian indikator ini adalah adanya penerapan pembelajaran dalam bentuk proyek yang menuntut siswa untuk mengasah keterampilan numerasinya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini dengan meningkatkan penguasaan materi numerasi bagi pendidik.

Sejalan dengan konsep relevansi pendidikan yang menekankan pentingnya keterampilan dan kemandirian para lulusan jenjang pendidikan menengah khususnya pendidikan kejuruan, indikator kinerja bidang pendidikan mengukur pula tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK. Capaian indikator sesuai hasil rapor pendidikan adalah sebesar 76,9%, lebih tinggi daripada target yang ditetapkan sebesar 70,9%. Faktor pendukung capaian ini salah satunya adalah keberhasilan pelaksanaan *teaching factory* di SMK DIY yang didukung dengan penyelenggaraan praktik kerja industri bagi para siswa. Meski demikian, salah satu faktor penghambat bagi pencapaian indikator ini adalah masih banyak lulusan SMK yang belum mampu mengikuti perubahan budaya kerja yang diterapkan ketika memasuki dunia kerja.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Masih ditemukan adanya anak putus sekolah di DIY, baik di jenjang pendidikan menengah maupun khusus.

(2) *Solusi*

Pemda DIY berupaya menurunkan angka putus sekolah antara lain melalui:

- (a) Bantuan operasional sekolah bagi SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta di DIY melalui BOSDA guna pembiayaan operasional sekolah.
- (b) Penyaluran beasiswa Kartu Cerdas bagi siswa SMA dan SMK serta beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus untuk mencegah peningkatan angka putus sekolah karena alasan ekonomi.
- (c) Penyaluran beasiswa retrieval bagi anak-anak usia sekolah jenjang pendidikan menengah yang telah putus sekolah. Diharapkan beasiswa ini dapat membantu penuntasan pembelajaran di jenjang pendidikan menengah
- (d) Fasilitasi penyaluran DAK Fisik sebagai salah satu upaya penuntasan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Pada tahun 2023 anggaran Urusan Pendidikan adalah sebesar Rp1.561.100.256.822,00 yang dibagi dalam 6 program dan 102 sub kegiatan. Realisasi belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp1.500.560.986.869,00 (96,12%) sedangkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah sebesar 99,77%. Adanya deviasi pada realisasi fisik disebabkan tidak tercapainya target penyaluran beasiswa retrieval untuk anak

putus sekolah jenjang SMA dan SMK. Sulitnya pendataan untuk anak-anak putus sekolah menjadi faktor penghambat utama tidak tercapainya target kegiatan. Deviasi keuangan berasal dari hasil negosiasi untuk pengadaan barang/jasa serta adanya sisa anggaran dari tidak tersalurkannya beasiswa retrieval.

Tabel 3.58. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Gunungkidul)	persen	89.73	85.71
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BTKP)	persen	91.99	89.07
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Sekretariat)	persen	90.03	86.44
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BLPT)	persen	92.5	90.27
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPO)	persen	91.91	89.48
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kulon Progo)	persen	92.51	90.01
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kota Yogyakarta)	persen	89.7	87.9
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Sleman)	persen	89.37	90.8
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Bantul)	persen	88.84	84.96
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6

No	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyusunan Renja, Renja Perubahan, Renstra Perangkat Daerah	Dokumen	3	3
			Pendataan Bidang Pendidikan	Dokumen	3	3
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14	14
			Laporan Kinerja	Dokumen	13	13
			Penyelenggaraan Asesmen Daerah	Kegiatan	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	8201	8201
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	5
			Honor pengelola keuangan	Bulan	12	12
			Bimtek pengelolaan keuangan	Kegiatan	4	4
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	11	11
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	13	13
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			

No	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	35	35
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6
			Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	1
			Konsultasi dan koordinasi luar daerah	Tahun	1	1
			Pengadaan Mebel			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	37	37

No	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	21	21
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	23
			Pemeliharaan Mebel			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	50
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	111	111
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	193	193
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			

No	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/ Sederajat	persen	99	113.15
			Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	persen	90	90.42
			Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	persen	84.08	88.78
			Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasar-kan Asesmen Nasional	indeks	2.26	2.19
			Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasar-kan Asesmen Nasional	indeks	2.11	2.13
			Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasar-kan Asesmen Nasional	indeks	2.1	1.99
			Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	indeks	1.93	1.91
			Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasar-kan Asesmen Nasional	indeks	2.1	1.78
			Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasar-kan Asesmen Nasional	indeks	1.92	1.81
			Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasar-kan Asesmen Nasional	indeks	1.83	1.96
			Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	indeks	2.27	1.41
			Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	indeks	2.03	1.84
			Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	indeks	1.9	1.77
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	persen	52	56.5
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	persen	49.43	84.88

No	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	persen	46.95	89.36
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	persen	41.44	89.86
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	persen	46.8	94.55
			Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	persen	58.59	92.86
			Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik	orang	30	63
			Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	persen	45	98.69
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
			Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	1
			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi			
			Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	1	1
			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia			
			Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Ruang	1	1
			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer			
			Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Ruang	1	1
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	1
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	12	12
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			

No	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang	18	18
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
			Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang	8	8
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika			
			Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang	1	1
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia			
			Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang	1	1
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer			
			Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang	1	1
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa			
			Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang	2	2
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang	2	2
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	5	5
			Pengadaan Mebel Sekolah			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	9	9
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	62.337	61.818
			BOSDA Dikmen Swasta	peserta didik	62.037	61.394
			Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan	peserta didik	200	402
			Beasiswa Retrieval	peserta didik	100	22

No	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	140	140
			PPDB	satuan pendidikan	118	118
			Pendampingan Sekolah Penggerak	satuan pendidikan	22	22
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	880	891
			Penyelenggaraan dan Pembinaan OSN	peserta didik	400	403
			Penyelenggaraan dan Pembinaan FLS2N	peserta didik	131	139
			Penyelenggaraan dan Pembinaan Debat Bahasa	peserta didik	30	30
			Penyelenggaraan dan Pembinaan Penelitian Siswa	peserta didik	194	194
			Penyelenggaraan dan Pembinaan O2SN	peserta didik	50	50
			Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan.	peserta didik	75	75
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	245	245
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	904	904
			Penilaian Angka Kredit	orang	725	725
			Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi	orang	69	69
			Penyediaan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dikmen- sus Kerjasama dengan LPTK	orang	110	110

No	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	170	170
			Penyaluran hibah kelembagaan	lembaga	4	4
			Penyelenggaraan sekolah sehat	satuan pendidikan	170	170
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	170	170
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	170	170
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1	1
			Pembangunan Ruang Praktik Siswa			
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	12	12
			Pembangunan Ruang Laboratorium			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	11	11
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	1
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	1
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	12	12
			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	5	5
			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
			Jumlah ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa			
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	2
			Rehabilitasi Ruang Laboratorium			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	1
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	2
			Pengadaan Mebel Sekolah			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	19	19
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	23	23
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	900	815
			Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan	peserta didik	800	792
			Beasiswa Retrieval	peserta didik	100	23
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan			
			Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	212	212
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	875	875
			Jumlah siswa yang mengikuti LKS	peserta didik	634	634
			Jumlah siswa yang mengikuti FIKSI	peserta didik	100	100
			Jumlah siswa yang mengikuti O2SN	siswa	138	138
			Jumlah siswa yang mengikuti FLS2N	siswa	128	128

No	Ururan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	207	207
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	89	89
			Peningkatan Kompetensi Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	orang	40	40
			Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi	orang	49	49
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	156	156
			Sinkronisasi Kurikulum dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	satuan pendidikan	156	156
			Pendidikan dan Pelatihan <i>Basic Safety Training</i> (BST)	satuan pendidikan	3	3
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	208	210
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	210	208
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	2	2
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	10	10

No	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pembangunan Kantin Sekolah			
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	2
			Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas			
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	Ruang	1	1
			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	4	4
			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	1
			Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	1
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	1
			Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas			
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang	4	4
			Pengadaan Mebel Sekolah			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	14	14
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	6	6
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	10.248	10.248
			Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Khusus	peserta didik	5.272	5.272
			BOSDA Pendidikan Khusus	peserta didik	3.541	3.541
			PMTAS	peserta didik	1.435	1.435
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			

No	Ururan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	9	9
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	365	410
			Pembinaan dan Seleksi Bidang Dikdas	peserta didik	80	125
			Pembinaan dan Seleksi Bidang Diksus	peserta didik	285	285
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	1.505	1.505
			Pemberian Insentif GTY dan PTY	orang	1.264	1.264
			Bimtek Pemberkasan TPG	orang	170	170
			Penyediaan Tamsil Guru Agama	orang	71	71
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	207	207
			Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	orang	127	127
			Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi	orang	80	80
			Pelatihan Ke-PLB-an Guru NonPLB	orang	30	30
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	79	79
			Advokasi Pendidikan Khusus	Lokasi	15	15
			Operasional Pusat Layanan Autis	Tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Workshop Pencegahan Perundungan Kekerasan pada Satuan Pendidikan	satuan pendidikan	79	79
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	79	79
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang	79	79
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	persen	95.88	96.35
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	1	1
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
			Jumlah rekomendasi perizinan yang diproses oleh OPD terhadap satuan pendidikan menengah	dokumen	10	20
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik	persen	51.33	70.11
			Pembinaan Muatan Lokal			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Laporan	11	11
			Gladhi dan Ngudhar Kawruh	episode	8	8

No	Ururan Pemerintahan	Organsasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Gerakan Seniman Masuk Sekolah	jenjang	4	4
			Evaluasi dan monitoring pendidikan berbasis budaya	satuan pendidikan	388	388
			Pengembangan Model PAUD	lembaga	1	1
			Beasiswa Inklusi	peserta didik	720	720
			Beasiswa Kartu Cerdas	peserta didik	14.500	14.500
			Momenku Siap Berkemas	satuan pendidikan	20	20
			Internalisasi Nilai Nilai Pendidikan Berbasis Budaya	orang	300	300
			Pendidikan Khas Kejojjaan	Kegiatan	1	1
			Pengembangan Taman Siswa	Kegiatan	1	1
			Internalisasi Bahasa dan Aksara Jawa	orang	50	50
			Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit	2	2
			Kursi Auditorium SMKN 2 Kasihan	paket	1	1
			Rumah genset SMKN 2 Kasihan	unit	1	1
			Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Kesenian SMAN 1 Wonosari	dokumen	1	1
			Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta			
			Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Orang	105	102

2) *Urusan Kesehatan*

a) *Kondisi Umum*

Urusan Kesehatan menjadi sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memiliki efek jangka panjang yang berdampak pada psikologis dan sosial pada seluruh komunitas, maka pembangunan bidang kesehatan tahun 2023 diarahkan dalam rangka untuk

pemulihan pasca pandemi yang mempunyai fokus menerapkan strategi antisipasi dampak kesehatan.

Salah satu isu kesehatan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kasus kematian ibu dan bayi. Kasus kematian Ibu pada tahun 2023 terdapat 22 kasus, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 43 kasus. Penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2023 adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, serangan jantung, dan penyakit tidak menular lainnya. Kasus kematian bayi pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 303 kasus pada tahun 2022, turun cukup signifikan menjadi 272 kasus di tahun 2023.

Beberapa upaya Pemda DIY dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi antara lain dengan : a). melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil melalui Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak (SIMKIA); b). meningkatkan status gizi selama kehamilan; c). pemeriksaan ANC terpadu; d). pembentukan jejaring kerja *pentahelix* dalam Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMPSR); e). kemitraan dengan institusi perguruan tinggi dalam pendampingan ibu hamil; serta f). Implementasi manual rujukan sesuai Pergub DIY Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan. Selain itu, untuk menekan kasus kematian bayi dilakukan implementasi standar pelayanan manajemen terpadu bayi muda, pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan, penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupannya. Pada tahun 2023 cakupan imunisasi dasar lengkap di DIY telah mencapai 97,49%.

Selain persoalan angka kematian ibu dan anak, permasalahan *stunting* juga perlu mendapatkan perhatian. Hal tersebut karena anak merupakan investasi masa depan pembangunan

Indonesia. Untuk menekan angka *stunting* dan gizi buruk pada balita di DIY, upaya yang telah dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan pelayanan di posyandu, pemberian makanan pada ibu hamil, ibu hamil wajib mengkonsumsi tablet tambah darah, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, pemberian Makanan Pendamping ASI bagi anak usia 6-24 bulan, dan pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak.

Tabel 3.59. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Keluarga Sehat	Indeks	n/a	0,33	0,35	106,06

Sumber: Dinkes DIY, 2024

Untuk mengukur kesehatan masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks ini merupakan indeks komposit yang terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Pada tahun 2023 realisasi Indeks Keluarga Sehat di DIY sebesar 0,35 dari target sebesar 0,33 atau mencapai 106,06%. Upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Keluarga Sehat yaitu dengan meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat antara lain melalui kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan keluarga oleh mahasiswa terlatih (*One Student One Family*), pengembangan kampus sehat, dan penguatan layanan primer, serta perlu diimplementasikan transformasi sistem kesehatan secara menyeluruh yang terdiri dari 6 pilar yaitu: transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

b) Permasalahan dan Solusi**(1) Permasalahan**

- (a) Berdasarkan data Hasil Riskesdas 2018 prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) di DIY menunjukkan beberapa penyakit antara lain: stroke, hipertensi, diabetes, kanker, dan gangguan jiwa, angka masih tinggi dibandingkan angka nasional. Tingginya prevalensi penyakit tersebut banyak disebabkan perilaku/pola hidup masyarakat yang kurang sehat seperti konsumsi gizi tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi rokok, dan tidak memeriksakan kesehatannya secara berkala.
- (b) Angka Stunting masih cukup tinggi. Permasalahan balita stunting di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita stunting ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Prevalensi stunting di DIY terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 prevalensi stunting sebesar 20,1% turun 2,8% menjadi 17,3% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 turun 0,9% menjadi 16,4%. Berdasarkan persebaran antar kabupaten/kota di DIY, Kabupaten Gunungkidul masih memerlukan perhatian karena capaian stunting pada tahun 2022 masih jauh dari target RPJMN yaitu sebesar 23,5%. Sedangkan untuk Kota Yogyakarta di tahun 2022 capaian angka stunting sudah melebihi target RPJMN yaitu sebesar 13,8% dan untuk tiga kabupaten lain masih lebih tinggi dari target RPJMN tetapi dengan selisih yang kecil.
- (c) Kasus kematian bayi masih fluktuatif. Pada tahun 2021 kematian bayi sebanyak 270 kasus. Kemudian, pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun

2021 menjadi 303 kasus, dan pada tahun 2023 turun menjadi 274 kasus.

- (d) Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebarannya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

(2) Solusi

- (a) Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain pemberian layanan kesehatan juga dilakukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat. Strategi yang diupayakan dalam penanganan permasalahan PTM di DIY yaitu :

- Pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif secara komprehensif,
- Peningkatan kapasitas SDM,
- Mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, dan
- Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat.

Secara umum untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang perlu dilakukan yaitu perluasan cakupan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam surveilans berbasis masyarakat, serta penyediaan obat dan vaksin.

- (b) Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dan permasalahan gizi kurang atau KEP pada balita dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik untuk mengintervensi pada penyebab langsung stunting seperti layanan Kesehatan, dan layanan gizi, pemantauan pertumbuhan. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman, bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat.
- (c) Upaya menekan angka kematian bayi lebih diperkuat dalam pelayanan promotif-preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui optimalisasi ante natal care (ANC) sebanyak minimal 6 kali, pemberian suplemen ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan di fasilitas Kesehatan, serta pembentukan jejaring kerja lintas sektor, program, dan profesi.
- (d) Pemenuhan SDM Kesehatan perlu dilakukan dengan menyusun pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar layanan dan penguatan layanan kesehatan terutama di daerah-daerah yang akan menjadi pusat pertumbuhan seperti di daerah selatan DIY dan jalur perbukitan menoreh sebagai antisipasi terjadinya permasalahan kesehatan di daerah tersebut.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Urusan Kesehatan dilaksanakan melalui 5 Program dan 50 sub kegiatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp382.087.549.154,00. Secara keseluruhan realisasi keuangan sebesar Rp283.756.976.586,20 (74,26%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.60. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2023

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan DIY	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 260	Orang/ Bulan	100	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	100
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
		Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	100	100
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, dan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	100	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	100	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	100	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	100
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	100	100
		Dokumen hasil pembinaan sarana produksi dan distribusi makanan di sekolah	Dokumen	100	100
		Dokumen distribusi obat, vaksin dan alat kesehatan dari Instalasi Farmasi Dinkes DIY ke Kabupaten/Kota	Dokumen	100	100
		Dokumen pembinaan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar	Dokumen	100	100
		Dokumen pembinaan instalasi farmasi dalam pelaksanaan manajemen mutu	Dokumen	100	100
		Dokumen hasil kalibrasi sarana prasarana instalasi farmasi dinas kesehatan DIY	Dokumen	100	100
		Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			
		Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	100	100
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	100	100
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100	100
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	100	100
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	100	100
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	100	100

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	100	100
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	100	100
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	100	100
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	100	100
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	100	100
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	100	100
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	100	100
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	100	100
		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	100	100
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	100	100

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
		Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	100	100
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	100	100
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	100	100
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	100	100
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			
		Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Sarana	100	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
		Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	100	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional			

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	Unit	100	100

3) *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

a) *Sub Urusan Pekerjaan Umum*

(1) *Kondisi Umum*

Sub Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar tersebut meliputi pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Drainase, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciaptakaryaan (Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan Jasa Konstruksi).

RPD DIY Tahun 2026 menyebutkan sasaran Pembangunan Sub Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum meliputi: 1) Penduduk Berakses Sanitasi; 2) Penduduk Berakses Air Minum; 3) Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air; 4) Peningkatan Aksesibilitas Jalan; dan 5) Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi yang diukur menggunakan lima indikator kinerja sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.61. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Peningkatan Persentase Aksesibilitas Jalan	%	98,87	97,80	99,17	101,4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
2	Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses air Minum Layak dan Aman	%	94,77	95,28	95,49	100,22
3	Persentase Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	46,38	70,53	73,43	104,11
4	Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman	%	95,68	94,90	97,69	102,94
5	Peningkatan persentase Pembinaan Kinerja jasa konstruksi	%	99,57	57,12	90,65	158,70

Sumber: DPUPESDM DIY, 2024

(a) Peningkatan aksesibilitas Jalan

Indikator kinerja Peningkatan Aksesibilitas Jalan diperoleh dari persentase jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia terhadap kebutuhan panjang jalan yang direncanakan. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu terdapat penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 15,03 km. Realisasi sepanjang 15,03 km dari target 7,83 km yaitu : pembangunan jalan ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 dan 3 direncanakan 2,83 km terbangun 2,83 km, Pembangunan JJLS segmen Tepus - Jerukwudel Tahap II direncanakan sepanjang 5 km terbangun 10,925 km, Pembangunan Jalan Prambanan - Gayamharjo direncanakan sepanjang 0 km terbangun sepanjang 1,275 km, sehingga pada akhir tahun 2023 total panjang jalan yang terbangun adalah 1.012,93 km atau sebesar 99,17% terhadap kebutuhan panjang jalan yang direncanakan 1.021,36 km.

(b) Jumlah Penduduk Berakses Air Minum

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dilakukan dalam rangka untuk peningkatan pencapaian akses air minum layak. Indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total rumah tangga DIY.

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui kegiatan penyediaan air minum di DIY. Sampai dengan akhir hingga tahun 2023 jumlah rumah tangga berakses air minum secara kumulatif mencapai 95,49% dari jumlah rumah tangga DIY atau setara dengan 1.229.137 KK dari jumlah rumah tangga total sebesar 1.287.207 KK.

Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana APBN, dilakukan Pembangunan infrastruktur air minum sebagai berikut:

- Pembangunan SPAM Berbah kapasitas 30 l/det.
- Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.
- Peningkatan IPA Kapasitas SPAM Seropan Kabupaten Gunung Kidul dengan total sambungan sebanyak 16.857 unit.
- Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk 18 desa

(c) Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

Melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, hingga tahun 2023 jumlah Penyediaan Infrastruktur Air Baku tercapai 73,43% dari target 70,53%, di mana 152 infrastruktur Sumber Daya Air yang terdiri dari Irigasi, Embung, maupun sumur bor terbangun sampai dengan tahun 2023 dari target pada tahun 2026 sejumlah 207 Infrastruktur Sumber Daya Air. Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum ($> 77,50\%$) terhadap luas total daerah irigasi Kewenangan DIY tercapai sebesar 13,11% dari target 12,51%. Selain itu, indikator ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air dengan target 576 liter/detik tercapai sebesar 591,51 liter/detik.

(d) Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi

Indikator kinerja jumlah penduduk berakses sanitasi didukung melalui Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta melalui dukungan APBN dan APBD

Kabupaten sebagai upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY. Sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah 1.257.481 KK atau setara dengan 97,69% dari jumlah rumah tangga DIY sejumlah 1.287.207 KK, sehingga persentase capaian penduduk berakses sanitasi adalah 102,94% dari target sebesar 94,90%.

Pekerjaan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

- pemeliharaan rutin dan berkala jaringan air limbah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta untuk mengoptimalkan penyambungan Sambungan Rumah, telah terbangun 27.205 SR.
- Penanganan air limbah berbasis masyarakat dengan jumlah total IPAL Komunal sebanyak 461 unit.
- Penanganan TPA Piyungan.
- Pengurangan titik genangan.

(e) Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Sasaran peningkatan kinerja penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dirumuskan ke dalam indikator persentase capaian program, yang dihitung menggunakan 3 sub-capaian kinerja yang meliputi Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi dengan bobot 35%, Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan dengan bobot 35%, dan Persentase terlayannya

rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara dengan bobot dengan bobot 30%.

Pada tahun 2023 telah diberikan layanan pelatihan tenaga ahli kepada 150 orang dan jumlah tenaga ahli konstruksi yang tersertifikasi hingga akhir tahun 2023 juga sebanyak 34 orang. Adapun layanan sistem informasi jasa konstruksi telah diakses sejumlah 1.425.436 orang dari target 680.220 orang melalui website Klinik Konstruksi berikut media sosial terkait lainnya; serta melalui penyediaan data informasi di aplikasi SIPJAKI cakupan DIY yang mencapai 20%.

Sedangkan pada tahun 2023 layanan jasa pengujian yang dilakukan melalui penerbitan sertifikat/ Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 1.203 dokumen LHU yang terdiri dari 1.165 LHU dari pelayanan umum dan 38 LHU dari uji aspiratif.

Penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi merupakan kegiatan penyusunan rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara. Kegiatan tersebut berupa layanan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung negara dan penataan bangunan yang sampai akhir tahun 2023 telah terlayani 100%.

(2) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

- Meningkatnya beban volume lalu lintas yang melintasi ruas jalan provinsi.
- Pendanaan untuk penyelenggaraan air minum di kabupaten/kota terkait investasi hilir berupa jaringan servis dan SR masih terbatas.
- Terbatasnya anggaran kabupaten kota dalam pembiayaan penambahan sambungan rumah IPAL Sewon.
- Masih kurang optimalnya prasarana irigasi.
- Terhambatnya layanan jasa pengujian dikarenakan keterbatasan jumlah alat pengujian, sehingga alat yang ada digunakan untuk beberapa parameter pengujian.

(b) Solusi

- Adanya Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang.
- Koordinasi yang lebih matang dengan masing-masing pengguna air curah SPAM Regional Kartamantul serta Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan penyerapan sesuai dengan PKS yang telah disepakati.
- Diperlukan koordinasi yang lebih intens lagi untuk peningkatan infrastruktur sanitasi di masing-masing kabupaten/kota agar tujuan dari RPJMN yang bergeser menjadi akses aman bisa menjadi tujuan pembangunan bersama.

- Perlu adanya peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- Pemenuhan jumlah alat pengujian.

(3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Tahun 2023 jumlah alokasi dana untuk pelaksanaan Sub Urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp407.152.725.326,00 yang dilaksanakan melalui 10 program dan 54 sub kegiatan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi keuangan sebesar Rp388.752.563.844,00 atau 95,48% dan realisasi fisik sebesar 100%. Berikut tabel capaian program dan kegiatan:

Tabel 3.62. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	%	12.51	13.11
			Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	liter/detik	576.01	591.51
			Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	1	1
			Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sleman	Titik	1	1
			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	25	25

N o	Urusan Pemerintah- an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga	Unit	25	25
			Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga	Unit	25	25
			Padat Karya Penciptaan Lapangan Pekerjaan Embung/Telaga 1Embung/Telaga (DID)	unit	1	1
			Pemeliharaan Berkala Pada Embung/Telaga (DID) 2 Embung/ Telaga	unit	2	2
			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	doku- men	2	2
			Operasi dan Pemeliharaan 64 Pos Hidrologi	doku- men	1	1
			Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA	doku- men	1	1
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembag a	2	2
			Rekomendasi kebijakan pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi	Lemba- ga	1	1
			Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA	Lemba- ga	1	1
			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	doku- men	1	1
			Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY	doku- men	1	1
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	dokumen	0	0
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	km	1.93	2.66
			Pembangunan talud Padukuhan Sembung RT.03 RW. 30 , Balecatur, Gamping, Sleman	km	0.06	0.06
			Pembangunan talud Padukuhan Sembung RT.04 RW. 30 , Balecatur, Gamping, Sleman	km	0.35	0.39
			Peningkatan jaringan irigasi Padukuhan Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman	km	0.15	0.15
			Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman	km	0.15	0.15
			Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman	km	0.16	0.39
			Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Dukuh, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo	km	0.15	0.20
			Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Karang, Poncosari, Srandakan, Bantul	km	0.2	0.32
			Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Kuncen, Bendungan, Wates, Kulon Progo	km	0.25	0.38
			Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman	km	0.05	0.05
			Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Blawong	km	0.1	0.1
			Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Mergangsan	km	0.16	0.16
			Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Pendowo	km	0.05	0.39
			Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pijenan/Kamijoro (DID)	km	0.1	0.37
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			

N o	Urusan Pemerintah- an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	km	1.6	1.6
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Payaman	km	1.6	1.6
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY	dokumen	1	1
			Updating Database ePAKSI	dokumen	1	1
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	511.77	511.77
			Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY	km	511.77	511.77
			Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi DI Sembuh	km	0.2	0.2
			Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY	km	511.77	511.77
			Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY	km	511.77	511.77
			Padat Karya Penciptaan lapangan Pekerjaan di Daerah Irigasi 3.1 km (DID)	km	3.1	3.1
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi			
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung	67	67
			Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY	Bendung	67	67
			Pemeliharaan Berkala Bendung	Bendung	67	67
			Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY	Bendung	67	67
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi			
			Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI	41	41
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY	DI	41	41

N o	Urusan Pemerintah- an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	%	14.78	29.09
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			
			Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	doku- men	1	1
			Penyusunan Draft Rancangan Pergub tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DIY	Raper- gub	1	1
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan	m ³	541.212	298.882
			Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Rumah Tangga	163.934	166.883
			DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan (5,8 ha)	Paket	1	1
			Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II	paket	1	1
			Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III	ha	3.5	3
			Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan	doku- men	1	1
			DED TPA Transisi Tahap 3	Paket	1	1
			Pembebasan lahan di TPA Transisi Piyungan	Paket	1	1
			Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			
			Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi	Unit	0	0
			Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan	paket	1	1

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penanganan Lindi di TPA Piyungan			
			Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan	Paket	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Pengurangan luasan genangan (ha)	ha	3.83	5.03
			Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya			
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
			Pembangunan Saluran Drainase Padukuhan Dobangsan, Giripeni, Wates, Kulonprogo	unit	1	1
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			
			Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	2	2
			Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul	Unit	2	2
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Layanan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung negara dan penataan bangunan	%	100	100
			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi			
			Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	doku- men	0	0
			Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung negara (10 Bangunan)	doku- men	1	1
			Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung (4 Kabupaten/1 Kota)	Paket	1	1

N o	Urusan Pemerintah- an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara (20 Rekomendasi)	doku- men	1	1
			PROGRAM			
			PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase kemantapan jalan	%	68.61	70.582
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
			Tersusunnya rekomendasi teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan	doku- men	50	108
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
			Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	doku- men	2	2
			Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jalan (IRMS)	doku- men	1	1
			Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan (BMS)	doku- men	1	1
			Rehabilitasi Jalan			
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km	6.85	6.85
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	m	6	6
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km	1.5	1.5
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km	1	1
			Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong	km	1.5	1.5
			Penggantian Jembatan Bajing	m	6	6
			Preservasi Jalan Ruas Denggung-Wonorejo-Tambakan	km	2.5	2.5
			Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang	km	1.3	1.3
			Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan	km	3.05	3.05
			DED Ruas Jalan Wonosari-Karangmojo	doku- men	1	1
			DED Ruas Jalan Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis)	doku- men	1	1

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			DED Ruas Jalan Demak Ijo-Kebonagung 1 Sepanjang 3 km	dokumen	1	1
			DED Ruas Jalan Imogiri-Dodogan Sepanjang 3 km	dokumen	1	1
			DED Ruas Jalan Klangon-Tempel Sepanjang 3 km	dokumen	1	1
			DED Ruas Jalan Ngablak-Bawuran Sepanjang 1,03 km	dokumen	1	1
			DED Ruas Jalan Sentolo-Brosot-Ngremang Sepanjang 3 km	dokumen	1	1
			DED Ruas Jalan Terong-Dlingo Sepanjang 3 km	dokumen	1	1
			DED Ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang Sepanjang 3 km	dokumen	1	1
			Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Brosot-Toyan Sepanjang 3 km	dokumen	1	1
			Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Imogiri-Dodogan Sepanjang 2 km	dokumen	1	1
			Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Patuk-Terong Sepanjang 4,5 km	dokumen	1	1
			Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Wonosari-Mulo Sepanjang 4,9 km	dokumen	1	1
			Dokumen Lingkungan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Gading-Playen Sepanjang 2,83 km	dokumen	1	1
			Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ngablak-Bawuran Sepanjang 0,05 km	km	0.05	0.05
			Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis)	km	1	1
			Pemeliharaan Rutin Jalan			
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	km	674.585	674.585
			Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul	km	152.685	152.685
			Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul	km	244.905	244.905

N o	Urusan Pemerintah- an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo	km	154.44	154.44
			Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman	km	122.555	122.555
			Operasional Underpass Kulur dan YIA	Tahun	1	1
			Pemeliharaan Rutin Jembatan			
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	6.477	6.477
			Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul	m	1.545,2	1.545,2
			Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul	m	1.698,4	1.698,4
			Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo	m	2.089,7	2.089,7
			Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman	m	1.143,7	1.143,7
			PROGRAM			
			PENYELENGGARAAN			
			KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA			
			URUSAN TATA RUANG			
			Terlaksananya penambahan jaringan jalan baru	km	2.83	2.83
			Terlaksananya pengadaan tanah untuk penyelenggaraan jalan	m2	83.101,34	83.101,34
			Terlaksananya peningkatan jalan	km	10.52	10.52
			Terlaksananya pembangunan jembatan	meter	12	12
			Terlaksananya pemasangan patok aset tanah JJLS	buah	1060	550
			Terlaksananya tahapan pengadaan tanah	dokumen	1	1
			Terlaksananya rehabilitasi jalan	km	0	0
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	dokumen	0	0
			Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Pembangunan Jogja Planning Gallery	dokumen	2	2

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol	Tahun	1	1
			Penyusunan DED, Jogja Planning Gallery	dokumen	1	1
			Proses Pensertifikatan Tanah Beskalan	Terbayar-nya SPS Tanah di Beskalan	1	1
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	dokumen	6	6
			FS Aksesibilitas PPI Gesing	dokumen	1	1
			DED Aksesibilitas PPI Gesing	dokumen	1	1
			Pengamanan Aset Tanah JJLS di Gunungkidul	buah	550	550
			Proses Pensertifikatan JJLS	ls	1	1
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo	dokumen	1	1
			Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo	m ²	4251	4246
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	dokumen	5	5
			Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3	km	2.83	2.83
			Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah	m ²	57808	55969
			Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah	dokumen	1	1
			DED Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Gayamharjo - Gading	dokumen	1	1
			Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (15 Titik Sumur	Titik	165	165

N o	Urusan Pemerintah- an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Bor dan 150 Titik Sumur Resapan)			
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	doku- men	1	1
			Penyediaan air bersih dari air tanah dalam	titik resapan	70	70
			Penyediaan air bersih dari air tanah dalam	titik bor	7	7
			Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (7 Titik Sumur Bor dan 70 Titik Sumur Resapan)	Titik	77	77
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo	doku- men	1	1
			DED Jembatan Gayamharjo III	doku- men	1	1
		BALAI PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) yang diterbitkan	LHU	800	1203
			Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	%	63.48	95.01
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Orang	125	150
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang/ LHU	800	1.203
			Akreditasi Laboratorium	Akredita- tasi	1	1
			Kalibrasi Alat Laboratorium	Jenis	25	25

N o	Urusan Pemerintah- an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pemeliharaan Alat Laboratorium	Jenis	15	15
			Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium	Jenis	100	100
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi			
			Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	dokumen	1	1
			Penyebaran informasi dan teknologi ke-Puan	Laporan	5	5
			Penyusunan informasi teknis bahan bangunan	SK	10	10
		BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional	%	35.39	36.27
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional			
			Jumlah Paket Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Paket	2	2
			Review Dokumen Lingkungan Hidup IPAL Sewon	Paket	1	1
			Pembangunan Pagar IPAL Tahap II	Paket	1	1
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			
			Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	2	2
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	2	2
			Pemeliharaan Jaringan Air Limbah	km	324	324
			Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan	tahun	1	1
			Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL	tahun	1	1

N o	Urusan Pemerintah- an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	tahun	1	1
			Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform	tahun	1	1
			Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki	tahun	1	1
			Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge	tahun	1	1
			Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	tahun	1	1
			Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	unit	70	70
			Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan	tahun	1	1
			Pemantauan dan pengendalian kualitas udara	tahun	1	1

b) Sub Urusan Penataan Ruang

(1) Kondisi Umum

Penataan ruang merupakan suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan kondisi wilayah.

Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, salah satu keistimewaannya adalah terkait dengan urusan tata ruang. Keberadaan tata ruang yang begitu unik yang terbagi dalam 18 Satuan Ruang Strategis sebagai instrumen dalam pengembangan wilayah sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang

Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043.

Kinerja sasaran Sub Urusan Penataan Ruang pada tahun 2023 diukur menggunakan indikator Persentase capaian kinerja penataan ruang. Target dan realisasi kinerja untuk tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.63. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase capaian kinerja penataan ruang	%	n/a	56,75	58,90	103,79

Sumber: DPTR DIY, 2024

Perhitungan indikator kinerja sasaran Tercapaiannya kinerja penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ATR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun aspek yang dilakukan penilaian kinerja yaitu: (1) pengaturan penataan ruang; (2) pembinaan penataan ruang; (3) perencanaan tata ruang; (4) pemanfaatan ruang; (5) pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Realisasi indikator sasaran Persentase capaian kinerja penataan ruang pada tahun 2023 sebesar 58,90% atau dengan persentase capaian 103,79%. Kinerja tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan didukung: (1) aspek pengaturan penataan ruang sebesar 79,17%; (2) aspek pembinaan penataan ruang sebesar 46,50%; (3) aspek perencanaan tata ruang sebesar 100%; (4) aspek pemanfaatan ruang sebesar 35% dan (5) aspek pengendalian pemanfaatan ruang sebesar 10,63%.

(2) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemukan kaitannya dengan pelaksanaan penataan ruang antara lain :

- Pengenaan sanksi hasil dari audit tata ruang belum optimal.
- Masih banyaknya Rencana Detail Tata Ruang yang belum ditetapkan.
- Belum sepenuhnya data dan informasi pertanahan dan tata ruang terintegrasi dengan optimal.
- Dokumen Perencanaan Tata Ruang pada satuan ruang strategis berupa Rencana induk belum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.
- Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya menjadi acuan bagi sektor dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(b) Solusi

Alternatif solusi dalam menjawab permasalahan di atas antara lain :

- Untuk pengenaan sanksi akan dilakukan pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari audit yang telah dilakukan pada tahun 2023 dan juga perlu adanya tambahan aturan khusus kaitannya dengan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

- Mendorong percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang melalui pendampingan terhadap kabupaten/kota.
- Mengintegrasikan data dan informasi pertanahan melalui sistem informasi data spasial.
- Penyusunan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Induk pada Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang serta pemanfaatan ruangnya.
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pelaksanaan program dan sub kegiatan Urusan Penataan Ruang tahun 2023 telah berjalan dengan baik pada semua aspek antara lain: aspek pengaturan tata ruang, aspek pembinaan tata ruang, aspek perencanaan tata ruang, aspek pemanfaatan tata ruang, dan aspek pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pada tahun 2023 program dan sub kegiatan Sub Urusan Penataan Ruang didukung dengan anggaran sejumlah Rp7.146.858.800,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 2 program dan 5 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp6.835.371.969,00 atau 95,64%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.64. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	94.89	96.89
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Forum Perangkat Daerah	dokumen	1	1
			Renja PD 2024	dokumen	1	1
			Renja Perubahan PD 2023	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Penyusunan Dokumen RKA-P 2023	dokumen	1	1
			Penyusunan Dokumen DPA-P 2023	dokumen	1	1
			Penyusunan Dokumen RKA 2024	dokumen	1	1
			Penyusunan Dokumen DPA 2024	dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Penyusunan bahan LKJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Penyusunan LKJiP SKPD	Laporan	1	1
			Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	Laporan	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Terbayarkannya gaji pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tahun	1	1
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	71	71
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Penyusunan laporan keuangan bulanan	laporan	12	12
			Penyusunan laporan keuangan semester	Laporan	2	2
			Penyusunan laporan keuangan triwulan	Laporan	4	4
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	2
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	jenis	15	15
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	jenis	12	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Penggandaan untuk Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	bulan	12	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis	20	20

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	3	3
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Tersedianya dokumen penyelenggaraan penataan ruang	dokumen	24	24

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			
			Jumlah Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	kali	15	15
			Jumlah Sosialisasi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)	kali	15	15
			Jumlah Sosialisasi Produk Hukum Rencana Tata Ruang	kali	5	5
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Progran Pemanfaatan Ruang	dokumen	1	1
			Rumusan Bahan Kebijakan Penataan Ruang Daerah Melalui FPRD DIY	dokumen	1	1
			Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang oleh FPRD DIY	Laporan	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			
			Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	dokumen	30	30
			Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	5	5
			Harmonisasi Materi Teknis dan Rapergub Rencana Induk SRS Pantai Selatan Gunungkidul, SRS Pantai Samas-Parangtritis, SRS Pantai Selatan Kulon Progo	dokumen	1	1
			Evaluasi Rapergub Rencana Induk SRS Pantai Selatan Gunungkidul, SRS Pantai SamasParangtritis, SRS Pantai Selatan Kulon Progo	dokumen	1	1
			Materi Teknis Rencana Induk SRS Sokoliman	dokumen	1	1
			Harmonisasi Materi Teknis dan Rapergub Rencana Induk SRS Sokoliman dan SRS Karst Gunungsewu	dokumen	1	1

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Evaluasi Rapergub Rencana Induk SRS Sokoliman dan SRS Karst Gunungsewu	dokumen	1	1
			Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	dokumen	18	18
			Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama dan Kedua TA 2023, Penilaian Kelayakan Usulan TA 2024, dan Penilaian Kelayakan Usulan TA 2025 Urusan Tata Ruang	dokumen	4	4
			Bahan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang Tahap I, II, dan III (TA 2023)	dokumen	3	3
			Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang	dokumen	1	1
			Tersedinya dokumen perda rencana tata ruang wilayah DIY	dokumen	1	1
			Tersedinya dokumen peta dasar dan tematik tata ruang DIY	dokumen	1	1
			Terlaksananya Pendampingan Percepatan Penetapan RDTR Kabupaten	dokumen	4	4
			Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan Kalurahan Tertib Tata Ruang dan Pertanahan (Kalurahan Istimewa)	Kalurahan	11	11
			Terlaksananya Penilaian Kalurahan Tertib Tata Ruang dan Pertanahan	Kalurahan	4	4
			Tersusunnya Kajian Pengembangan Kawasan Strategis di Pantai Selatan DIY	dokumen	1	1
			Tersusunnya Kajian Pengembangan Terpadu Kawasan Gesing	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Fasilitasi Kesepakatan Pemenuhan Persyaratan Dokumen dan Tata Kala Waktu Penyelesaian Review RTRW Kabupaten/Kota	dokumen	4	4
			Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang			
			Jumlah Laporan	Laporan	6	6
			Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang			
			Sosialisasi Tata Ruang di SRS	Kali	18	18
			Jumlah Laporan Sosialisasi Tata Ruang di tingkat Pendidikan SMA	Kali	12	12
			Terlaksananya Lomba Pembuatan Konten Tata Ruang DIY	Kali	1	1
			Terlaksananya Publikasi urusan tata ruang keistimewaan	Tema Konten	8	8
			Terlaksananya Peringatan HANTARU 2023	Paket	1	1
			Terlaksananya ILM Intan Taru Berinfo	ILM	1	1
			Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang			
			Jumlah Dokumen	dokumen	9	9
			Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang			
			Tersusunnya Kajian Identifikasi Satuan Ruang Strategis Potensial di DIY	dokumen	1	1
			Tersusunnya Dokumen Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis	dokumen	1	1
			Tersusunnya Dokumen keterpaduan program pada satuan ruang strategis	dokumen	1	1
			Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis	dokumen	1	1
			Tersusunnya Kajian Instrumen Teknis Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Pantai Selatan DIY	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Tersusunnya Penilaian KKPR dan Pernyataan Mandiri	dokumen	1	1
			Tersusunnya Dokumen Audit Tata Ruang	dokumen	1	1
			Tersusunnya Dokumen Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah	dokumen	1	1
			Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	dokumen	1	1
			Tersusunnya Dokumen Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Di DIY	dokumen	1	1
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
			Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	dokumen	1	1
			Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			
			Jumlah Dokumen Pemberitahu-an, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	dokumen	1	1
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
			Jumlah dokumen kinerja reforma agraria	dokumen	1	1
			Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
			Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah	dokumen	38	38

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			kasultanan dan tanah kadipaten			
			Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
			Jumlah Dokumen Penata- usahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	dokumen	12	12
			Dokumen Evaluasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	dokumen	4	4
			Berita Acara Tim Verifikasi Dokumen Identifikasi	Bidang Keputusan	1.995 500	1.995 500
			Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah			
			Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Desa	Sertipikat	1.863	2.106
			Dukungan sarana dan prasarana dalam rangka percepatan pendaftaran tanah Kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	Bidang	4.258	4.258
			Kajian Standardisasi Pematokan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan	dokumen Kajian	1	1
			Penyerahan Sertifikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Event	1	1
			Penelusuran data pertanahan	dokumen	1	1
			Simposium Peringatan Hari Keistimewaan	Event	1	1
			Pemeliharaan Dokumen Pertanahan			
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	dokumen	1	1
			Dokumen Administrasi Pertanahan yang Terawat dan Terpelihara	Lembar	10.000	10.000
			Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa			

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	dokumen	23	23
			Supervisi dan Audit Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di DIY	dokumen	1	1
			Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah	dokumen	22	22
			Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan			
			Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	dokumen	4	4
			Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama dan Kedua TA 2023, Penilaian Kelayakan Usulan TA 2024, dan Penilaian Kelayakan Usulan TA 2025 Urusan Pertanahan	dokumen	4	4
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan	4	4
			Bahan Berita Acara Pemanatauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan Tahap I, II, III TA 2023	dokumen	3	3
			Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan	dokumen	1	1
			Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	dokumen	3	3
			Data Spasial Tanah Kasultanan dan Tanah	Sertipikat	2.714	2.714

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Kadipaten yang telah bersertifikat			
			Pengelolaan Data Spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Sistem	1	1
			Pembaruan data geospasial inventarisasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan	Kalurahan	97	97
			Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten			
			Jumlah Dokumen	dokumen	10	10
			Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten			
			Rekomendasi Kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	persen	100	100
			a. Penyebarluasan Informasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (1. Publikasi surat kabar, 2. Iklan layanan masyarakat, 3. Podcast, 4. Sosialisasi), b. Publikasi Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan	paket	5	5
			Fasilitasi Persiapan Pemanfaat-an Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan	Kalurahan	9	9
			Verifikasi Permohonan Pemanfaatan Tanah Kalurahan	dokumen	1	1
			Rekomendasi Kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan	persen	100	100
			Kajian Identifikasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	dokumen	1	1
			Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa			
			Jumlah Berita Acara Penyelesai-an Penanganan	Berita Acara	13	13

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa			
			Penanganan Permasalahan Keberatan dan Sengketa Dalam Hal Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	persen	100	100
			Verifikasi 12 Berkas Permohon-an Penyelesaian Tukar Menukar	dokumen	1	1
			Roadmap Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	dokumen	1	1
			Reforma Agraria Penyelesaian Permasalahan Tanah Tutupan - Penyusunan Desain Tanah Tutupan	dokumen	1	1
			Reforma Agraria Penyelesaian Permasalahan Tanah Tutupan - Sosialisasi Desain Tanah Tutupan	Kali	2	2
			Reforma Agraria Penyelesaian Permasalahan Tanah Enclave - Rekonstruksi sejarah tanah kasultanan dan tanah enclave	dokumen	1	1
			Reforma Agraria Penyelesaian Permasalahan Tanah Enclave - Penelusuran dokumen tanah kasultanan dan tanah enclave	dokumen	1	1
			Appraisal penghitungan kerugian sewa tanah kalurahan	Lokasi	4	6
			Kajian/pandangan hukum penanganan permasalahan pemanfaatan tanah kalurahan	dokumen	1	1

4) **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

a) **Kondisi Umum**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2023-2026 bahwa kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur menggunakan indikator Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau.

Data tahun 2023 dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III menunjukkan bahwa kondisi *backlog* di DIY yaitu 175.846 unit *backlog* kepemilikan dan 96.655 unit *backlog* (jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi dalam suatu kawasan/wilayah tertentu) penghunian dan *baseline* rumah tidak layak huni tahun 2022 yang tertuang dalam RPD 2023-2026 sejumlah 55.595 unit.

Jumlah Rumah Layak Huni di DIY sejumlah 1.237.270 unit yang berasal dari jumlah rumah tangga di DIY 1.287.207 unit dikurangi jumlah RTLH yang belum ditangani sampai dengan tahun 2023 sebanyak 55.595 unit, ditambahkan dengan penanganan RTLH pada tahun 2023 sebanyak 5.658 unit dengan rincian melalui BSPS sebanyak 938 unit, verifikasi rumah layak oleh BSPS sebanyak 616 unit, APBD Kabupaten/Kota sebanyak 1.616 unit, Kemensos sebanyak 17 unit, NGO Habitat sebanyak 80 unit, dana Desa sebanyak 8 unit, verifikasi rumah layak oleh Kabupaten/Kota sebanyak 235 unit, verifikasi rumah layak oleh DIY sebanyak 538 unit, BAZNAS sebanyak 170 unit, BPD DIY sebanyak 15 unit, APBD DIY untuk Relokasi korban bencana sebanyak 3 unit, Danais Arsitektur Khas Jogja sebanyak 434 unit, dan APBD DIY sebanyak 988 unit, sehingga capaian indikator Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau sudah tercapai sebesar 96,12%, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.65. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	%	95,65	96,12	96,12	100

Sumber: DPUPESDM DIY, 2024

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Tingginya harga lahan dan belum adanya regulasi berupa mekanisme dan insentif dalam pengembangan hunian vertikal di perkotaan menyebabkan kendala dalam upaya pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat miskin.
- (b) Belum terverifikasi sepenuhnya data penerima bantuan sosial pada *baseline* RTLH tahun 2022. Selain itu, upaya penanganan RTLH yang kurang terpadu, terintegrasi, dan sinergis antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten/Kota, serta swasta yang menyebabkan sulitnya pendataan yang akurat dan valid sehingga berdampak pada tumpang tindih data/tumpang tindih penanganan.
- (c) Peningkatan kualitas pada setiap kriteria kawasan kumuh di Kab/Kota tidak terintegrasi yang menyebabkan tidak tuntasnya penanganan di suatu lokasi. Serta, munculnya kawasan kumuh baru dengan luasan yang baru dan kurangnya data penanganan kawasan kumuh antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten/Kota yang terupdate dan terintegrasi, sehingga berdampak pada penanganan.

- (d) Pengukuran keberhasilan pembangunan PSU Permukiman di desa belum dapat diukur dengan baik.

(2) Solusi

- (a) Prioritas dalam upaya pengembangan perumahan bagi MBR melalui percepatan pengesahan RP3KP Kabupaten/kota. Serta mengoptimalkan sistem informasi perumahan dalam upaya efisiensi dan efektif untuk pengecekan data dan *updating* data.
- (b) Pelaksanaan verifikasi dan rencana penanganan RTLH dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi data penanganan RTLH di Kab/Kota. Serta perlu dilakukannya pendataan kembali data kemiskinan di Kabupaten/Kota khususnya terkait validitas Data Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
- (c) Menentukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah munculnya kawasan kumuh baru. Selain itu, mengintegrasikan program/kegiatan dalam satu program/kegiatan dan ditangani oleh satu unit kerja dan melakukan koordinasi terkait *updating* data capaian penanganan kawasan-kawasan kumuh yang menjadi masing-masing kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pusat (Balai) dan Provinsi.
- (d) Perlu adanya pengukuran keberhasilan pembangunan untuk PSU Permukiman.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tahun 2023 dalam APBD DIY dilaksanakan melalui 4 program dan 9 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp143.446.799.750,00 dan terealisasi sebesar

Rp131.182.561.239,00 atau 91,45%. Sementara, realisasi fisik yang dicapai sebesar 99,97%. Berikut capaian kinerja program dan sub kegiatan telah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.66. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	%	100	100
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi			
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	1
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi			
			Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	dokumen	1	1
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	unit	3	3
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	58,27	68,32
			Persentase penanganan kawasan kumuh	%	0	8,19
			Koordinasi dan Sinkronisasi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1	1
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) ha			
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) ha yang Diperbaiki	unit rumah	994	988
			Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul	unit rumah	175	174
			Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Kulon Progo	unit rumah	198	198
			Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman	unit rumah	198	194
			Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul	unit rumah	198	198
			Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta	unit rumah	153	152
			Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul	unit rumah	2	2
			Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Kulon Progo	unit rumah	16	16
			Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman	unit rumah	9	9

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul	unit rumah	39	39
			Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta	unit rumah	6	6
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	Lokasi	160	666
			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	dokumen	1	1
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	666	666
			Bantuan PSU Kota Yogyakarta	Lokasi	20	20
			Bantuan PSU Kab. Kulon Progo	Lokasi	48	48
			Bantuan PSU Kab. Bantul	Lokasi	219	219
			Bantuan PSU Kab. Gunungkidul	Lokasi	156	156
			Bantuan PSU Kab. Sleman	Lokasi	223	223
			Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau	Paket	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Arsitektur Khas Yogyakarta	unit	50	400
			Terlaksananya pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	laporan	1	4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	unit	1.090	1.090
			Monitoring dan Evaluasi BKK Arsitektur Khas Yogyakarta	dokumen	1	1
			Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan	lokasi	12	12
			Pembangunan Arsitektur Gaya Yogyakarta	unit rumah	30	30
			Monitoring dan Evaluasi BKK Balai Padukuhan	dokumen	1	1
			Kajian Peningkatan Kualitas untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan gaya arsitektur Tradisional Jawa	dokumen	1	1
			Kajian detail Kebutuhan Rehab Balai Padukuhan	dokumen	1	1
			Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta	dokumen	1	1
			Identifikasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi untuk penanganan kemiskinan dan ketimpangan wilayah di DIY	dokumen	1	1
			Peresmian Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan	dokumen	1	1
			Penyebarluasan Informasi Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Dana Keistimewaan	dokumen	1	1
			Pengembangan Lumbung Mataraman			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Laporan	4	4
			Peningkatan jaringan irigasi tersier	Lokasi	83	83
			Penyusunan Peraturan Gubernur tentang keirigasian	Dokumen	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Feasibility Study Jaringan Irigasi Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman	Dokumen	1	1
			Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Irigasi dan Pemanfaatan Air Baku	kali	15	15

5) *Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat*

a) *Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas*

(1) *Kondisi Umum*

DIY merupakan satu – satunya provinsi dengan status Istimewa di seluruh wilayah Nusantara. Keistimewaan ini terbentuk dengan berbagai aspek yaitu kebudayaan, kesejarahan, pendidikan, maupun keindahan alamnya yang mempesona. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta semakin memperkuat status keistimewaan tersebut di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebagaimana keistimewaan ini membuatnya termashur, maka muncul berbagai konsekuensi yang tak terelakan.

Sebagai destinasi wisata yang terkenal, baik domestik maupun global, Yogyakarta bagaikan magnet yang mampu mempesona dan menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Data yang tercatat pada aplikasi Dataku Bappeda DIY menunjukkan bahwa pada tahun 2023, angka wisatawan yang masuk ke DIY sejumlah total 7.750.689 jiwa, terdiri atas 149.414 wisatawan mancanegara dan 7.601.625 wisatawan nusantara. Dibandingkan dengan tahun 2022, sejumlah total

6.474.115 jiwa yang terdiri atas 47.080 wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara 6.427.035 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa ada kenaikan jumlah wisatawan sebesar 19,72%. Peningkatan tersebut bagaikan dua mata pisau. Di satu sisi, merupakan faktor penyumbang PAD dari sektor pariwisata yang mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi mikro pasca terpuruk akibat Covid-19. Di sisi lain, derasnya arus wisatawan tersebut berpengaruh kepada tingginya tingkat mobilitas penduduk di DIY. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi meningkatkan resiko kejahatan, dapat menimbulkan masalah pada pengelolaan keramaian, keterbatasan pelayanan publik serta pemeliharaan ketertiban umum yang akan berdampak pada pelanggaran Perda dan Perkada.

Selain itu, permasalahan yang menjadi *trending* isu di DIY selama tahun 2023 adalah pelanggaran atas penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Permasalahan tersebut berupa penyalahgunaan tanah desa yang tidak sesuai peruntukannya, dan penggunaan tanah desa tanpa surat izin Gubernur. Urusan Pertanahan adalah salah satu dari 5 urusan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIY. Dalam pelaksanaannya, penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diatur dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Dengan demikian pelanggaran atas Perda dan Perkada terkait urusan pertanahan menjadi tanggung jawab Pemda DIY dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja.

Di lain hal, adanya kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak atau remaja di bawah umur masih menjadi sorotan karena kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Sepanjang tahun 2023 di DIY tercatat ada 12 kasus tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak dan remaja di bawah umur (sumber data: *Jogja Police Watch*, 2023). Kejahatan jalanan menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, menurunnya rasa aman di masyarakat serta kurangnya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.

Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diukur melalui indikator kinerja kunci yaitu Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibum Linmas.

Tabel 3.67. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Presentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	n/a	65	65	100

Sumber: Satpol PP DIY, 2024

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemda DIY khususnya satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target 65% tersebut, di antaranya adalah:

- (a) Penegakan Perda dan Perkada melalui operasi yustisi dan non-yustisi terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada. Selama tahun 2023, terdapat 160 kasus jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang terdata. Unsur ini mengalami penurunan sebesar 57,89% dibandingkan dengan

tahun 2022 yaitu 382 kasus (sumber data: bappeda.jogjapro.go.id/dataku). Melalui operasi ini, hingga Desember tahun 2023, telah terkumpul denda atas pelanggaran Perda dan Perkada dengan jumlah total sebesar Rp284.219.000,00. Selain itu dalam rangka menertibkan penggunaan Tanah Kasultanan serta Tanah Kadipaten yang tidak berizin, telah dibentuk Satuan Tugas TKD yang bertugas melakukan operasi Yustisi penertiban Tanah Kas Desa.

- (b) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di masyarakat seperti fasilitasi pengamanan unjuk rasa serta pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk pengamanan aset Pemerintah Daerah serta objek vital daerah Satpol PP DIY bekerjasama dengan Ditpamobvit Polda DIY. Selain itu untuk mengatasi tindak kejahatan jalanan yang marak terjadi di DIY, dilakukan upaya preemtif berupa pembinaan, penyuluhan dan razia senjata tajam kepada anak – anak usia remaja melalui kegiatan Satpol PP *Goes To School*. Upaya pencegahan dilakukan dengan patroli wilayah dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan Patroli meliputi Patroli Sumbu Filosofi dan Patroli Kejahatan Jalanan (*Klithih*).
- (c) Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat melalui penguatan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat, Kelompok Jaga Warga maupun Omah Jaga Warga serta Satlinmas *Rescue* Istimewa. Selama tahun 2023, selain peningkatan kapasitas SDM berupa sosialisasi kepada Satlinmas dan Kelompok Jaga Warga juga

telah dilaksanakan pemberian hibah barang berupa Rompi Jaga Warga sebanyak 7.878 pcs dan alat komunikasi HT sebanyak 7.777 unit bagi kelompok Jaga Warga, pemberian Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada 41 Kalurahan untuk operasional Omah Jaga Warga masing-masing sebesar @Rp50.000.000,00. Selain itu, bagi Satlinmas *Rescue* Istimewa juga telah dilaksanakan penguatan kapasitas serta peningkatan sarana dan prasarana operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit yang melaksanakan pertolongan pertama dan pencarian korban kecelakaan dan musibah di tempat-tempat wisata. Kelompok Jaga Warga dan SRI merupakan wujud kearifan lokal yang didukung dengan Dana Keistimewaan.

- (d) Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP DIY melalui Bimbingan Teknis bagi Jabatan Fungsional Satpol PP DIY, pembinaan fisik yang dilakukan secara berkala dalam rangka meningkatkan kemampuan keterampilan dan kebugaran bagi anggota Satpol PP DIY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta pengembangan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

(2) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

- Masih rendahnya tingkat kepatuhan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dalam menaati Peraturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah

- Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang disebabkan oleh pelanggaran Perda dan Perkada, dalam bentuk gangguan kejahatan jalanan oleh anak dan remaja, penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten tanpa surat ijin Gubernur, pelanggaran terhadap SE Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik (skuter Listrik/otoped) di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo Kawasan Sumbu Filosofi.
- Belum optimalnya peran Kelompok Jaga Warga sebagai salah satu wujud kearifan lokal DIY dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Penerapan Standar Pelayanan Minimal Trantibum Linmas yang belum optimal.

(b) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan:

- Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat rentan pelanggaran Perda dan Perkada serta menggalakkan penertiban melalui operasi yustisi dan non-yustisi.
- Melakukan Tindakan preemtif (deteksi dini) maupun Tindakan preventif (pencegahan) melalui program “Satpol PP Goes to School” yaitu tindakan pembinaan dan pengarahan kepada siswa usia SMP dan SMA dilanjutkan

dengan Razia senjata tajam untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan, melakukan patroli wilayah pada jam malam dimulai pukul 23.00 hingga pukul 05.00 dini hari untuk mencegah kemungkinan terjadinya aksi kejahatan jalanan pada malam hari, membentuk Satuan Tugas Penertiban Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka melakukan operasi yustisi penertiban tanah kasultanan serta tanah kadipaten yang tidak berijin, melakukan patroli ketertiban wilayah sesuai SE Gubernur DIY Nomor 551/467 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kawasan Sumbu Filosofi.

- Mengoptimalkan peran Kelompok Jaga Warga melalui penguatan kelembagaan dan kemitraan dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Polisi RW Jaga Warga, diperkuat dengan disahkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga serta pemberian fasilitas berupa hibah alat komunikasi HT dan rompi Jaga Warga yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
- Melakukan proses inventarisasi data terhadap Standar Pelayanan Minimum Trantibum Linmas yang wajib dilakukan.

(3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023*

Pada Tahun Anggaran 2023, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas terdiri atas 4 Program dan 21 Sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp44.760.763.942,00, dengan realisasi sebesar

Rp43.874.506.599,00 atau 99,31%. Selanjutnya untuk kinerja fisik sudah terealisasi 100% sesuai dengan target.

Rincian capaian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.68. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	86,87	92,23
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5
			Dukungan 2,34% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	%	100	100
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	97	97
			Dukungan 2,34% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
			Dukungan 2,34% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
			Dukungan 2,34% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
			Dukungan 2.8% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Dukungan 19,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	30
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
			Dukungan 19,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Dukungan 80,47% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Dukungan 80,47% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Dukungan 92,17% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	%	100	100
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Dukungan 92,17% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	%	100	100
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	56	56
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3
			Dukungan 92,17% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	%	100	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			Dukungan 92,17% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	%	100	100
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Presentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	%	100	100
			Presentase pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani	%	100	100

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Presentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	%	50	50
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
			Dukungan 80 % terhadap Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	%	100	100
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kasus	168	168
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			
			Dukungan 80 % terhadap Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	%	100	100
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	9.195	9.195
			Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	5	5
			Dukungan 80 % terhadap Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	%	100	100
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
			Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	1
			Dukungan 80 % terhadap Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	%	100	100
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	39	39
			Dukungan 100 % terhadap Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani	%	100	100
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	12	12
			Dukungan 100 % terhadap Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani	%	100	100
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
			Persentase pelanggaran Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani	%	100	100
			Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
			Dukungan 100% terhadap persentase pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	%	100	100
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Laporan	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	%	60	60
			Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa	%	100	100
			Pembinaan Jagawarga			
			Dukungan 50% terhadap capaian peningkatan jumlah kelompok jaga warga yang terbina dan mampu menjalankan fungsinya	%	100	100
			Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Orang	18.396	18.396

b) Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**(1) Kondisi Umum**

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan umum, utamanya bidang kesatuan bangsa dan politik telah terlaksana secara optimal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Fungsi pokok dalam pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah telah diselenggarakan melalui pembentukan tim, kelompok kerja, maupun forum-forum kemitraan bersama unsur masyarakat dan pemangku kepentingan berkaitan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, Pemda DIY memiliki ketugasan menyelenggarakan pemantauan perkembangan politik di daerah guna mewujudkan situasi kondusif di wilayah.

Secara umum, situasi politik di DIY sepanjang tahun 2023 cenderung kondusif dan terkendali. Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang perlu diantisipasi

menjelang Pemilu 2024, di antaranya adanya potensi konflik internal partai politik; konflik antar partai politik, baik parpol lama maupun baru; serta konflik horizontal antar simpatisan partai politik. Di sisi lain, masa kampanye politik yang telah dimulai pada 28 November 2023 berdampak pada suhu politik di wilayah DIY yang mulai meningkat. Hal ini disebabkan mulai maraknya pergerakan massa pendukung calon tertentu yang dalam beberapa kasus sempat menimbulkan konflik sosial akibat ulah oknum tertentu. Beberapa potensi konflik tersebut menjadi perhatian bersama yang melibatkan unsur-unsur penyelenggaraan pemantauan perkembangan politik di wilayah DIY.

Sebagai miniatur suku bangsa Indonesia, kemajemukan di DIY tidak dapat dipungkiri terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Keanekaragaman etnis, suku, budaya, agama, bahasa dan budaya, menumbuhkan kultur toleran pada berbagai ruang dan dimensi. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti adanya benturan budaya yang menimbulkan batas-batas sosial di masyarakat, ketegangan sosial pada tingkat ekstrem yang dapat menimbulkan perpecahan, serta konflik sosial di masyarakat. Di sisi lain, penggunaan aspek simbolik dalam fasilitas umum yang berlebihan pun menjadi faktor penambah disintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam rangka cegah dan deteksi dini potensi konflik di DIY, Pemda DIY telah menyelenggarakan kegiatan untuk memfasilitasi forum kemitraan yang dibentuk dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas dan kondusifitas wilayah DIY. Forum tersebut senantiasa dilibatkan dalam berbagai program kerja Pemda DIY,

utamanya yang berkaitan dengan deteksi dan cegah dini potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum. Hasil pelaksanaan program kegiatan tersebut selanjutnya akan diolah menjadi rekomendasi forum kemitraan dan menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan oleh Pemda DIY terkait upaya cipta kondusif wilayah DIY.

Selain bekerja sama dengan lembaga mitra, Pemda DIY juga melaksanakan beberapa program kerja urusan pemerintahan umum, khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk menguatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga keharmonisan bermasyarakat serta mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.

Adapun kegiatan penguatan koordinasi dengan forum-forum kemitraan diwujudkan melalui:

(a) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DIY sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai peran penting sebagai lembaga yang berpartisipasi aktif dan memiliki pengaruh yang besar di masyarakat dalam upaya menciptakan pembauran kebangsaan. Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan DIY diwujudkan melalui Rapat Kerja yang menjadi sarana untuk komunikasi, koordinasi dan kolaborasi serta upaya membina, memelihara dan meningkatkan pembauran kebangsaan di wilayah DIY. Hal ini baik dalam konteks potret DIY sebagai miniatur Indonesia, sehingga terhadap setiap isu/permasalahan dalam pembangunan di wilayah DIY dapat didiskusikan dan dicari solusi

permasalahannya. Dalam prosesnya, diperoleh kesimpulan bahwa membangun kesadaran untuk menerima perbedaan kultur dan cara berpikir merupakan sikap hidup. Tantangan saat ini bukan mencari persamaan, melainkan menerima perbedaan dengan lebih positif serta mencari solusi terbaik agar pembauran tidak menjadi konflik sosial di masyarakat.

(b) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Sebagai upaya memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama di wilayah DIY yang dilandasi oleh sikap toleransi, saling pengertian, dan saling hormat menghormati, Pemda DIY secara intensif telah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hal tersebut ditujukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyikapi beberapa permasalahan keagamaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

(c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) merupakan suatu forum yang memiliki ketugasan untuk menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) sebagai laporan, informasi, rekomendasi dan bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat. Fasilitas FKDM diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Kerja FKDM bersama forum kemitraan lain, seperti FPK

dan FKUB serta Tim Kewaspadaan Dini Pemda DIY. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memastikan bahwa Pencegahan dan Penanganan konflik sosial di wilayah DIY tetap dapat diantisipasi agar isu daerah tidak menjadi isu nasional, terlebih yang berkaitan dengan isu agama, suku, dan ras. Menjelang gelaran Pemilu Serentak 2024, FKDM memiliki peran strategis dalam menjamin kondusivitas dan stabilitas wilayah DIY dalam setiap proses/tahapan Pemilu dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.

(d) Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS)

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) merupakan tim yang secara khusus dibentuk guna melakukan koordinasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta penyusunan Rencana Aksi Terpadu. Dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Terpadu, Pemda DIY berhasil menempati peringkat pertama secara nasional, dengan capaian nilai sebesar 101,57%. Dalam rapat kerja Tim PKS, ditekankan bahwa DIY merupakan barometer nasional dengan masyarakat yang heterogen, sehingga setiap permasalahan dengan potensi konflik di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya untuk dipetakan dari awal kerawanannya dan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan atau dengan kearifan lokal. Koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan juga perlu dikuatkan dalam rangka mewujudkan situasi aman dan damai di DIY.

Capaian DIY dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS RI pada 5 Juli 2023, capaian nilai IDI DIY tahun 2022 tercatat sebesar 85,62 (berada pada kategori tinggi dan menempatkan DIY pada tingkat demokrasi “Baik”) serta berhasil menempati peringkat pertama nilai IDI secara nasional.

Skor IDI DIY pada tahun 2023 juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja sasaran Badan Kesbangpol DIY, yakni “Meningkatnya Kualitas Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta” yang juga mendukung kinerja sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan”. Adapun target dan realisasi kinerja Pemda DIY sebagai berikut.

Tabel 3.69. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Skor Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	Angka	n/a	76,72	85,62	111,6

Sumber: Bankesbangpol DIY, 2024

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indikator Skor Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 111,6% dengan angka capaian 85,62 dari target kinerja sebesar 76,72.

(2) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

- Masih adanya ancaman berupa penyebaran paham-paham yang berusaha mengubah paradigma masyarakat DIY untuk tidak turut serta melestarikan nilai luhur beretika dan budaya asli bangsa. serta adanya perubahan dan perkembangan teknologi yang telah memudahkan nilai-nilai luhur Pancasila yang berujung pada dekadensi moral atau pengikisan jati diri bangsa.
- Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024, suhu perpolitikan di wilayah DIY mulai berangsur mengalami peningkatan yang disebabkan sudah dimulainya fase kampanye politik dan mulai maraknya geliat gerakan masyarakat yang menunjukkan keberpihakannya pada calon peserta pemilu tertentu.
- Adanya dinamika perubahan kebijakan nasional yang turut mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat DIY. Di sisi lain, masih ditemui beberapa permasalahan di wilayah DIY, utamanya yang berkaitan dengan izin pendirian rumah ibadah, pengelolaan sampah, serta isu ketimpangan ekonomi yang sampai saat ini masih menimbulkan berbagai gesekan/potensi konflik di masyarakat.
- Pembangunan karakter merupakan proses panjang yang bertahap dan kontinyu sehingga memerlukan kerja sama yang lebih luas dan mendalam dari seluruh unsur dan lapisan masyarakat.

(b) Solusi

- Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, Pemda DIY secara berkelanjutan terus melaksanakan kegiatan Sinau Pancasila dan Sinau Bhinneka Tunggal Ika untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa serta munculnya sikap intoleransi dan dekadensi moral yang saat ini mulai berkembang di kalangan generasi muda.
- Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemda DIY dalam mewujudkan Pemilu Damai 2024, Pemda DIY terus menggalakkan beberapa program kegiatan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, forum komunikasi, maupun siaran radio/*talkshow* yang diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan masyarakat DIY menuju pesta demokrasi yang aman, damai, dan tenteram.
- Guna mendeteksi, mencegah, dan menangani segala bentuk potensi konflik sosial di wilayah DIY secara lebih cepat dan akurat, Pemda DIY melalui Badan Kesbangpol berusaha hadir dengan berkolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kemenag DIY, POLDA DIY, FKUB kabupaten/kota di wilayah DIY dalam rangka penanganan berbagai potensi konflik yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan isu toleransi dan keberagaman melalui sosialisasi dan internalisasi kepada masyarakat. Selain itu, Pemda DIY juga terus berkoordinasi dengan berbagai instansi vertikal, seperti BINDA DIY, POLDA DIY, Kejaksaan Tinggi, dan unsur-

unsur lain yang memiliki tupoksi dalam penciptaan situasi kondusif wilayah DIY.

- Dalam upaya pembangunan mental dan karakter masyarakat DIY yang tetap berlandaskan pada budaya dan kearifan lokal, Pemda DIY melalui Badan Kesbangpol terus berupaya menyelenggarakan berbagai program kegiatan dengan sistem dan mekanisme yang lebih menarik untuk generasi muda dengan turut menjadikan tokoh kunci, sosok berpengaruh, dan pemegang kebijakan di level kapanewon/kemantren untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan PPWK.

(3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Pada tahun 2023, penanganan Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diwujudkan melalui penyelenggaraan 7 program dan 37 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.555.721.047,00 yang berasal dari APBD dan Dana Keistimewaan. Kinerja fisik sub kegiatan telah tercapai secara optimal sebesar 100% sesuai target, sedangkan realisasi keuangan tercapai dengan persentase 97,50% atau sebesar Rp29.791.832.848,00. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, dimana output kegiatan telah terlaksana sebesar 100% dan dalam proses pelaksanaannya terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,5%. Adapun rincian capaian kinerja program dan kegiatan Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3.70. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA			
			URUSAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	Objek	7	7
			Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya			
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	6	6
			Tersusunnya laporan Sinau Pancasila bagi masyarakat	dokumen	1	1
			Tersusunnya laporan Sinau Pancasila bagi Orpol/Ormas/Ormas Kepemudaan	dokumen	1	1
			Tersusunnya Laporan Sarasehan Pancasila	dokumen	1	1
			Tersusunnya Laporan Sinau Bhinneka Tunggal Ika	dokumen	1	1
			Tersusunnya Laporan Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Kader Pembauran Budaya	dokumen	1	1
			Tersusunnya Laporan Deklarasi Pemilu Damai 2024	dokumen	1	1
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	86.5	92.4
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5
			Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	dokumen	1	1
			Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja)	dokumen	1	1
			Tersusunnya Dokumen Renja Perubahan	dokumen	1	1
			Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja	dokumen	1	1
			Tersusunnya Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	dokumen	1	1
			Tersusunnya dokumen DPPA SKPD	dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3
			Tersusunnya Laporan LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	dokumen	1	1
			Tersusunnya laporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	dokumen	1	1
			Tersusunnya Laporan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)	dokumen	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	52	52
			Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN dan tenaga bantu	bulan	12	12
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	14
			Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan bulanan	laporan	12	12
			Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan semesteran	laporan	2	2
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	12
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	30
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	laporan	12	12
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0
			Pengadaan Mebel			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	9
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	19	19
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4
			Tersusunnya Laporan Pembayaran Tagihan Telepon	bulan	12	12
			Tersusunnya Laporan Pembayaran Akun Zoom Meeting	bulan	12	12
			Tersusunnya Laporan Pembayaran Tagihan Listrik	bulan	12	12
			Tersusunnya Laporan Penambahan Daya Listrik	laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2
			Laporan Penyediaan Jasa Keamanan yang Disediakan	bulan	12	12
			Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan yang Disediakan	bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Jumlah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16
			Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan	12	12
			Pemeliharaan Mebel			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	4
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY Indikator Nilai Kebebasan Berkeyakinan	Angka	88.95	88.36
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	3	3
			Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Forum Pembauran Kebangsaan	laporan	3	3
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY Indikator Nilai Pendidikan Politik pada kader partai politik	Angka	24.33	100
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Orang	3.150	3.150

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
			Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik	orang	3.150	3.150
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	2	2
			Tersusunnya Laporan FGD Indeks Demokrasi Indonesia	laporan	1	1
			Tersusunnya Laporan FGD Perkembangan Politik di Daerah	laporan	1	1
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat	Angka	34.19	100
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1
			Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pengembangan Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	dokumen	1	1
			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	240	240
			Terlaksananya Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan	orang	240	240
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1	1
			Tersusunnya laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	laporan	1	1
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY Indikator Nilai Anti monopoli sumber daya ekonomi	Angka	65.5	75
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1
			Dokumen Rencana Aksi Ketahanan Ekonomi DIY	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1.500	1.500
			Terlaksanakannya Kegiatan Sosialisasi P4GN	Orang	1.500	1.500
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	4
			Rekomendasi FKUB	Rekomendasi	1	1
			Rekomendasi GNRM	Rekomendasi	1	1
			Rekomendasi Ketahanan Ekonomi	Rekomendasi	1	1
			Rekomendasi P4GN	Rekomendasi	1	1
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara	Angka	67.34	93.02
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	laporan	11	11

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
			Tersusunnya Laporan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi	laporan	1	1
			Tersusunnya Rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) tentang peningkatan kewaspadaan dini masyarakat DIY	laporan	4	4
			Tersusunnya Laporan Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	laporan	2	2
			Tersusunnya Laporan Hasil Sosialisasi Anti Terorisme	laporan	1	1
			Tersusunnya Laporan Pemantauan Orang Asing (POA) di DIY	laporan	1	1
			Tersusunnya Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY	laporan	1	1
			Tersusunnya Laporan Update Aplikasi Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	laporan	1	1
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	3	3

c) Sub Urusan Penanggulangan Bencana

(1) Kondisi Umum

Wilayah DIY memiliki intensitas kejadian bencana yang cenderung tinggi. Hal tersebut dapat terlihat pada grafik kejadian bencana di DIY dalam lima tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai akhir 2023.

Selama tahun 2023, terjadi sejumlah kejadian bencana alam. Pada lima tahun terakhir periode tersebut, tiga kejadian terbanyak adalah bencana alam kebakaran,

tanah longsor, dan gempa. Berdasarkan data yang masuk ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) DIY, pada tahun 2023 terdapat data kejadian sebanyak 1.418 terjadi di wilayah DIY baik bencana alam maupun non alam.

Tabel 3.71. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	80	81	85,08	105,03

Sumber: BPBD DIY, 2024

Strategi yang dilakukan Pemda DIY untuk mencapai sasaran peningkatan indeks ketahanan daerah terarah pada pengembangan dan penguatan faktor: komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Capaian indeks ketahanan daerah sebesar 85,08 dari target 81 atau dengan persentase capaian 105,03%. Capaian target tersebut merupakan angka konversi dari hasil perhitungan BNPB yang sebesar 0,67. Capaian target tahun 2023 tercapai terutama karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu tetap menjadi perhatian bagi Pemda DIY ke depan, sebagai berikut: 1) Kerentanan bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perubahan pola pemanfaatan lahan dan perubahan iklim; 2) Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan masih memerlukan penguatan pada semua aspek kapasitas.

Ketercapaian kinerja sasaran didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Program SPAB tahun 2023 dengan target 5 SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) yang terdiri dari SMA/SMK Negeri dan swasta. Adapun Sekolah yang dilaunching pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1. MA Ali Maksum, Krapyak, Bantul; 2. SLB Citra Mulia Mandiri, Kalasan, Sleman; 3. SMKN 6 Yogyakarta; 4. SMAN 2 Yogyakarta; 5. SMA BOPKRI 1 Yogyakarta.
- (b) Pembentukan Desa Tangguh Bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Program Desa/Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu program utama BNPB yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dan terus dikembangkan sampai saat ini. Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana di 5 (lima) kalurahan/kelurahan yang tersebar di semua kabupaten/kota di DIY.
- (c) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dilaksanakan melalui berbagai pelatihan meliputi USAR, HKBN dan DMB. Pelatihan USAR melibatkan tim lintas sektor yang mempunyai skill keterampilan dan kompetensi dalam menangani kejadian darurat bencana yang melibatkan peserta dari BNPB, BPBD DIY, BPBD Kabupaten Bantul dan kru USAR dari Negara-negara ASEAN.

(d) Pelatihan Masyarakat Tanggap Bencana

Pelatihan Masyarakat Tanggap Bencana khususnya Daerah Rawan Bencana dikemas dalam bentuk penyampaian Materi/Paparan dan Diskusi kepada Masyarakat.

(e) Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan berupa peralatan penanggulangan bencana kepada Komunitas Relawan Pengurangan Risiko Bencana sebanyak 30 Organisasi Relawan Pengurangan Risiko Bencana di DIY.**(2) *Permasalahan dan Solusi*****(a) *Permasalahan***

- Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selama ini kalau ada kerusakan akibat bencana tidak bisa segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi karena mekanisme penganggaran mengharuskan usulannya n-1 sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selalu tertunda, padahal seharusnya segera tertangani.
- Perlunya strategi yang berkelanjutan dalam penanganan bencana kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dalam rangka pengurangan risiko bencana diperlukan peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana (Destana).

(b) Solusi

- Dibuat aturan atau Peraturan Gubernur untuk penggunaan dana kebutuhan mendesak untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- Melakukan Gerakan Memanen Air Hujan dengan Ger-TRAP (Gerakan Tangkap Resapkan Alirkan dan Pelihara) air hujan dalam rangka mengatasi bencana kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk dikembangkan kapasitasnya.

(3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Sub Urusan Penanggulangan Bencana mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD sebesar Rp20.617.887.911,00 dengan mengampu 3 program dan 33 sub kegiatan. Sedangkan dari Dana Keistimewaan sebesar Rp1.714.081.300,00 dengan mengampu 1 program dan 2 sub kegiatan. Untuk kinerja fisik, realisasi tahun 2023 tercapai sebesar 100%, dan realisasi keuangan 96,20%. Deviasi keuangan tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu penyesuaian kebutuhan belanja, penyesuaian gaji, bahan bakar kendaraan, penyesuaian belanja yang bersifat tagihan atau sesuai dengan kebutuhan, dan juga efisiensi anggaran. Pada tahun 2023 BPBD DIY melaksanakan hibah bansos dengan total anggaran Rp1.156.700.000,00, bantuan hibah bansos tersebut berupa alat penanggulangan bencana di tingkat desa di DIY untuk 27 penerima yang terdiri dari 25 forum pengurangan risiko bencana, 1 Kelompok Tagana, dan 1 kampung tangguh bencana sebesar Rp1.120.000.000,00. Kemudian untuk biaya pendaftaran hak hunian tetap korban erupsi

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	14
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	9	9
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	75	75
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	34
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	jenis	15	15
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)			
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota	Orang	810	810
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	2	2
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
			Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan	Orang	280	280

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1	1
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			
			Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	60	60
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	10	10
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			
			Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	orang	32	32
			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	1	1
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	5000	5000
			Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah			
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1
			Penanganan Pasca Bencana Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	2	2
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	1	1
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	1	1
			Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya			
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	2	2

6) *Urusan Sosial*

a) *Kondisi Umum*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi kewenangan Urusan Pemerintah Bidang Sosial baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan Pemerintah Bidang Sosial merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus ditangani bersama terkait hak dan pelayanan dasar bidang sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau

masyarakat karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Permasalahan sosial tersebut membutuhkan penanganan dan sinergi dalam lintas sektor. Solusi penanganan permasalahan sosial bukan hanya terhadap PPKS secara langsung, tetapi juga mendorong berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Terkait pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar tersebut telah diatur dalam Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Gambaran kinerja Urusan Sosial pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.73. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya	%	n/a	30,13	57,50	190,84
2.	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu	%	n/a	25,35	25,97	102,45

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
	mewujudkan nilai-nilai keberintisan keuangan dan kesetiakawanan sosial					

Sumber: Dinsos DIY, 2024

Seluruh target indikator sasaran Urusan Sosial di tahun 2023 telah tercapai. Keberhasilan ketercapaian seluruh indikator sasaran tidak lepas dari inovasi pada program/subkegiatan yang telah dilaksanakan serta adanya kerja sama lintas sektor yang baik.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Berkembangnya permasalahan sosial dan terbatasnya akses jangkauan yang bisa dilakukan oleh Pemda DIY, sehingga pelayanan kesejahteraan sosial memerlukan usaha yang lebih keras dan solusi yang lebih mendekat dengan masyarakat.
- (b) Permasalahan kenakalan anak di jalan dan di sekolah sempat merebak di DIY, hal ini berakibat pada munculnya keresahan masyarakat terkait keamanan diri maupun ketakutan akan keterlibatan anak-anaknya pada kenakalan anak/remaja yang telah menjurus ke tindakan kriminalitas.
- (c) Masih perlu dioptimalkannya koordinasi dan kerjasama antara Dinas Sosial dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang berkualitas.

- (d) Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan air dan kualitas tanah, yang berpotensi mempengaruhi produksi pangan sehingga produksi pangan menurun. Hal ini tentu saja berakibat terjadinya kerentanan sosial. Masyarakat miskin semakin sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

(2) Solusi

- (a) Dalam upaya mendekatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat maka dilakukan inovasi dengan menjalin kerjasama lintas sektor. Keterbatasan jangkauan layanan yang diberikan dapat dijembatani dengan melibatkan lintas sektor, baik dari Pemerintahan maupun dari Lembaga Kesejahteraan Sosial dan PSKS.
- (b) Upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja / anak sekolah menjadi tantangan bagi masyarakat dan Pemda DIY. Melalui Dinas Sosial DIY, pengembangan pelayanan bagi Remaja Bermasalah Sosial telah dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Remaja yang berpotensi melakukan kenakalan yang cenderung ke tindakan kriminal maupun yang sudah berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas keberfungsian sosialnya dalam keluarga dan masyarakat.
- (c) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Perlindungan, *Assessment* dan Rehabilitasi Sosial (SiPersis) sebagai sistem update

data pelayanan kesejahteraan yang dilakukan oleh unit pelaksana pelayanan dalam balai di Dinas Sosial DIY. Sistem ini dapat menjembatani alur informasi yang panjang menjadi lebih cepat. Sedangkan terkait kualitas layanan, pelayanan terus mempedomani Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

- (d) Optimalisasi Bantuan Sosial dengan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Sistem pengolahan data telah diinisiasi oleh Pemda DIY sebagai upaya untuk melakukan penyandingan data sehingga diperoleh data penerima bantuan sosial yang tepat. Monitoring penyaluran bantuan sosial juga telah dilakukan dengan melibatkan Mitra Dinas, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Pendamping Sosial.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY dan enam Balai yaitu Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, dan Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha. Pada tahun 2023, Urusan Sosial dilaksanakan melalui 9 program dan 98 sub kegiatan. Anggaran program dan sub kegiatan sebesar Rp91.580.305.849,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp89.318.655.612,00 atau sebesar 97,53%. Kinerja fisik telah terealisasi 100%.

Tabel 3.74. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	247	247
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	59	59
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	190	190

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang	%	21.9	21.9
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	78	78
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	lembaga	16	16
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
			Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan pemulangan	%	1.19	1.19
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	5	5
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	%	21.61	21.61
			Penyediaan Permakanan			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	orang	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Kewenangan Provinsi			
			Penyediaan Sandang			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	313	313
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	100	100
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	313	313
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	orang	100	100
			Penyediaan Makanan			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	313	313
			Penyediaan Sandang			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	100	100
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	313	313
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	100	100
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	orang	313	313
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	orang	13	13
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	orang	13	13
			Penyediaan Permakanan			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	127	127
			Penyediaan Sandang			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	100	100
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	75	75
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	127	127
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang	50	50
			Penyediaan Permakanan			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	1.610	1.610
			Penyediaan Sandang			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	127	127
			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses			
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	orang	127	127
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan	orang	127	127

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi			
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	1.125	1.125
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang	13	13
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang	127	127
			Pemulangan ke Daerah Asal			
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	orang	127	127
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase anak balita terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	%	3.68	3.68
			Pengangkatan Anak antar WNI			
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	orang	20	20
			Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	orang	1	1
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	1.841	1.841
			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	150	150
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS SOSIAL	memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar			
			Penyediaan Permakanan			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	250	250
			Penyediaan Sandang			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	orang	50	50
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	unit	1	1
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	orang	250	250
			Pelayanan Dukungan Psikososial			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	orang	1.000	1.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya	%	100	100
			Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen	7	7

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	90.08	92.21
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	48	48

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	24	24
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	2
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	2
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	36	36
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	15	15
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	4
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar-Pajak dan Perizinannya	unit	10	10
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	115	115
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	4
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	6
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	%	21.61	21.61
			Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan	%	21.61	21.61

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			meningkat/ dapat berfungsi sosial			
			Penyediaan Permakanan			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	115	115
			Penyediaan Sandang			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	155	155
			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses			
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi		185	185
			Penyediaan Alat Bantu			
			Jumlah Orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Provinsi		15	15
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	185	185
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	185	185
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang	185	185
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	orang	1	1
			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	orang	185	185
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
			Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	orang	1	1
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
			Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	90.08	91.10
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	12
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
			Pengadaan Mebel			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	24	24
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	13	13
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	4	4
			Pemeliharaan Mebel			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	33	33
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	85	85
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	46	46
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	%	21.61	21.61
			Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	%	21.61	21.61
			Penyediaan Permakanan			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	70	70
			Penyediaan Sandang			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	70	70
			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses			
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi		70	70
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	70	70
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	70	70

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang	70	70
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	orang	70	70
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	orang	70	70
			Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	orang	70	70
			Pemulangan ke Daerah Asal			
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	orang	30	30
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	dokumen	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
			PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Belanja Honorarium PenanggungjawabanPengelola Keuangan	Dokumen	12	12
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak MenghasilkanPendapatan	laporan	12	12
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor			
			Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Alat Listrik	paket	1	1
			PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	paket	1	1
			Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Kertas dan Cover	paket	1	1
			Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Bahan Komputer	paket	1	1
			PenyediaanPeralatan Rumah Tangga			
			Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Bahan Cetak	paket	1	1
			PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD			
			BelanjaMakanan dan MinumanRapat	Laporan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Jasa			
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Belanja Tagihan Telepon	Laporan	12	12
			Belanja Tagihan Air	Laporan	12	12
			Belanja Tagihan Listrik	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Laporan	12	12
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Laporan	12	12
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Laporan	12	12
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Unit	15	15
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Unit	15	15
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Unit	15	15
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Unit	15	15
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	paket	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Unit	57	57
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Unit	57	57
			Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Unit	57	57
			Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Unit	57	57

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			BelanjaPemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Unit	57	57
			BelanjaPemeliharaanKomputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Unit	57	57
			BelanjaPemeliharaanBangunan Gedung-Bangunan Gedung TempatKerja-BangunanGedung Kantor	Unit	57	57
			BelanjaPemeliharaanBangunan Gedung Bangunan Gedung TempatKerja-Bangunan Gedung Tempat KerjaLainnya.	paket	1	1
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentasewargabinaanbalai yang mampuberfungsi sosial dan hidupmandirisertakembalikekeluarga / masyarakat	%	21,64	21,64
			Persentasewargabinaanbalai yang mampuberfungsi sosial dan hidupmandirisertakembalikekeluarga / masyarakat	%	21,64	21,64
			PenyediaanPermakanan			
			Permakanan PPKS Balai RSBKL (Bina Laras)	orang	240	240
			PenyediaanSandang			
			Sandang PPKS Balai RSBKL (Bina Laras)	orang	240	240
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			
			Perlengkapan Asrama dan PeralatanKebersihan Asrama untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	Orang	240	240
			Penyediaan Alat Bantu			
			Alat Bantu untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	Orang	1	1
			PenyediaanPerbekalan Kesehatan di Dalam Panti			
			Pelayanan Kesehatan untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	Orang	240	240
			Obat-obatan untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	Orang	240	240
			PemberianBimbinganFisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
			BimbinganFisik, Mental, Spiritual dan Sosialuntuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	orang	240	240
			PemberianBimbinganAktivitas Hidup Sehari-Hari			
			Bimbinganaktifikatashidupsehari-hariuntuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	orang	240	240
			FasilitasiPembuatanNomorIndukKependudukanbagiPenyandang Disabilitas			
			FasilitasiAdministrasiKependudukanuntuk PPKS Bina Laras	orang	15	15

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
			Akses Pelayanan Kesehatan Dasar untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	orang	240	240
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
			Penelusuran Keluarga untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	orang	20	20
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
			Reunifikasi Keluarga untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	orang	5	100
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar PPKS (Bina Laras)	Dokumen	4	4
			Penyediaan Permakanan			
			Permakanan PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)	orang	40	40
			Penyediaan Sandang			
			Sandang PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)	orang	40	40
			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses			
			Perlengkapan Asrama & Peralatan Kebersihan Asrama	orang	40	40
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
			Obat-obatan	orang	40	40
			Perawatan Pengobatan Lokal bagi PPKS (Bina Karya)	orang	40	40
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
			Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)	orang	40	40
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
			Bimbingan aktivitas hidup sehari-hari PPKS	orang	40	40
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			
			Bimbingan Keterampilan Dasar PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)	orang	40	40
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			
			Fasilitasi Administrasi Kependudukan PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)	orang	5	5
			Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
			Akses pelayanan kesehatan dasar PPKS	orang	40	40
			Pemulangan ke Daerah Asal			
			Pemulangan PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)	orang	10	21
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar	dokumen	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar PPKS (Bina Karya)	dokumen	4	4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	90.08	92.05
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	15	15
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	%	21.61	21.61
			Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	%	21.61	21.61

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Permakanan			
			Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Provinsi	Orang	80	80
			Penyediaan Sandang			
			Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Provinsi	Orang	80	80
			Penyediaan Asrama/ Wisma yang Mudah Diakses			
			Jumlah orang yang terkases asrama/ wisma layak huni kewenangan Provinsi	Orang	80	80
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
			Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam Panti kewenangan Provinsi	Orang	80	80
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
			Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial kewenangan Provinsi	Orang	80	80
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
			Jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan Provinsi	Orang	80	80
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			
			Jumlah orang yang diberikan bimbingan keterampilan dasar kewenangan Provinsi	Orang	80	80
			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
			Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Provinsi	Orang	80	80

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	90.08	91.97
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penata-usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12
			Penyediaan alat listrik dan elektronik			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	5
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	6
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	36
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	44	44
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Presentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	%	21.61	21.61
			Pengasuhan			
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	orang	125	125

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Makanan			
			Jumlah Orang yang Mendapat-kan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	115	125
			Penyediaan Sandang			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	125	125
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	orang	125	125
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	125	125
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	120	120
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi	orang	120	120
			Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak			
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	orang	5	5
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	orang	125	125

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	orang	10	10
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	orang	24	24
			Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti			
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	orang	5	5
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	12
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Laporan	12	12
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik			
			Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	4
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	2
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
			Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	3
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	24	24
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	36
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	3
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	12	12
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	40	40
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	5
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase anak bermasalah social, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, lanjut usia terlantar, Wanita bermasalah social dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/dapat berfungsi sosial	%	0.07	0.84
			Penyediaan Permakanan			
			Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	orang	228	228
			Penyediaan Sandang			
			Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	orang	228	228
			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses			
			Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	orang	228	228
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			
			Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan Kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	Orang	228	228
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
			Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan social kewenangan provinsi	orang	228	228
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
			Jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan provinsi	Orang	228	228
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan provinsi	orang	72	72
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi	Orang	24	24
			Pemulasaraan			
			Jumlah pemulasaraan kewenangan provinsi	orang	30	30

b. Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) *Urusan Tenaga Kerja*

a) *Kondisi Umum*

Pemda DIY telah berupaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih baik dan kondusif. Hal ini ditandai dengan terciptanya hubungan industrial yang makin harmonis dan data-data statistik ketenagakerjaan menunjukkan angka ke arah positif. Data BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus 2023 menunjukkan angka jumlah penganggur terbuka sebesar 81.980 orang, mengalami penurunan sebesar 12.970 orang dibanding Agustus 2022 (94.950 orang). Dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,69% pada Agustus 2023, mengalami penurunan 0,37% poin dibanding Agustus 2022 (4,06%).

Jumlah penduduk bekerja sebesar 2.139.710 orang merupakan 96,31% dari total angkatan kerja (2.221.690 orang). Lapangan pekerjaan penduduk yang bekerja didominasi tiga lapangan pekerjaan utama yaitu sektor Perdagangan 20,82%, sektor pertanian 19,65% dan sektor industri pengolahan 13,74%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) periode Agustus 2023 sebesar 74,08% meningkat 1,48% dibanding Agustus 2022 sebesar 72,60%. Hal ini merupakan dampak dari banyak faktor antara lain semakin meningkatnya aktivitas pariwisata yang berpengaruh pada sektor akomodasi makan minum, transportasi dan sektor informal lainnya.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan mencapai hasil lebih baik terbukti dengan capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) DIY tahun 2023 sebesar 73,50, mengalami kenaikan 3,03 poin dari tahun 2022 sebesar 70,47 poin. Penghargaan IPK dari Kementerian Ketenagakerjaan diberikan untuk DIY pada kategori IPK Terbaik Peringkat kedua berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang dan penghargaan untuk 2 indikator utama terbaik, dari sembilan indikator utama yang diukur DIY terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja dan Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja.

Tabel 3.75. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	orang	n/a	1.020	1.116	109,41
2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	orang	n/a	11.100	13.452	121,19
3	Jumlah layanan sarana Hubungan Industrial, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3	layanan	n/a	3.441	3.534	102,70

Sumber: Disnakertrans DIY, 2024

Capaian indikator Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan merupakan keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja. Indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan tercapai 1.116 orang atau 109,41% dari target 1.020 orang. Capaian indikator ini merupakan capaian

pertama berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, dan Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena berbeda target. Lulusan pelatihan peningkatan ketrampilan telah ditempatkan baik di sektor formal, berusaha mandiri/berwirausaha maupun di sektor informal. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi dengan semakin meningkatnya kompetensi pencari kerja sehingga daya saing tenaga kerja meningkat.

Capaian indikator Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan merupakan keberhasilan sasaran Terwujudnya Kesempatan Kerja. Capaian indikator Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan sebesar 13.452 orang atau 121,19% dari target 11.100 orang. Indikator ini merupakan indikator baru dan capaian pertama berdasarkan target pada RPD 2023-2026. Dalam kurun 1 tahun sebanyak 13.452 tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan, baik di sektor formal, berusaha mandiri/berwirausaha maupun di sektor informal. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja di sektor formal maupun informal serta adanya kegiatan peningkatan kesempatan kerja (Padat Karya Infrastruktur).

Capaian indikator Jumlah layanan sarana Hubungan Industrial (HI), serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 merupakan keberhasilan sasaran Meningkatnya layanan ketenagakerjaan. Capaian indikator Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 sebesar 3.534 layanan atau 102,7% dari target 3.441 layanan. Indikator ini merupakan indikator baru dan capaian pertama dari target RPD 2023-2026. Pada tahun 2023 sebanyak 3.534 layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3, baik layanan yang diberikan secara langsung, layanan melalui pengaduan *online* maupun layanan di

Perusahaan. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi dengan semakin mudahnya fasilitas yang diberikan dalam menyampaikan/pengaduan permasalahan ketenagakerjaan, kualitas pelayanan dan SDM mediator yang menangani.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Kompetensi pencari kerja terutama dalam hal penguasaan keterampilan teknis masih kurang memadai serta belum memiliki karakter kerja yang mantap sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
- (b) Ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja terutama pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi.
- (c) Kurang memadainya penerapan perlindungan norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

(2) *Solusi*

- (a) Meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan, pemagangan, standardisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas serta pembangunan karakter.
- (b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Informasi Pasar Kerja, Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan (PBJ) serta perantaraan kerja.
- (c) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui pembinaan dan deteksi dini Hubungan Industrial, Implementasi Struktur Upah dan Skala Upah serta pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan norma kerja dan norma K3.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Urusan Tenaga Kerja mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD dan dana keistimewaan sebesar Rp56.477.949.047,00 dengan mengampu 6 program dan 41 sub kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp55.689.279.853,00 atau 98,60% dikarenakan adanya efisiensi dan sisa pengadaan, sedangkan realisasi fisiknya 100%.

Tabel 3.76. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Jumlah tenaga kerja yang kompeten	orang	1.415	1.433
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	20	20
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (BLKPP)			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	1.240	1.380
			Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			
			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	LPK	20	20
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLKPP)			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	5	5
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pember-	orang	14.745	15.322

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			dayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa			
			Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya			
			Jumlah Dokumen	Dokumen	9	9
			Pembangun-an Ketahanan Sosial Budaya			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIME WAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAK SANAAN			
			Implementasi Budaya Pemerintahan DIY (BLKPP)			
			Tercapainya implementasi budaya pemerintahan	Dokumen	1	1
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Jumlah perluasan kesempatan kerja yang diciptakan	orang	6.380	17.654
			Pelayanan Antar Kerja			
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	50	50
			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)			
			Jumlah Orang yang Mendapat-kan Pembinaan Operasionali-sasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	150	150
			Perluasan Kesempatan Kerja			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	6.330	8.294
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	540	540
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana Hubungan Industrial dan kebijakan pengupahan	perusahaan	2.100	2.109
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara	210	210
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	8	8
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi			
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1
			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi			
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	60	60
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			
			Jumlah Penetapan UMP	Keputusan	1	1
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	160	299
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
			Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3	perusahaan	262	277
			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenaga-kerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	880	880
			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan (BK3)			
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	85	89
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	88	92
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	178	178
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BLKPP)			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BK3)			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	6
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BLKPP)			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	14	14
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BK3)			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	6	6
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (BLKPP)			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (BK3)			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BLKPP)			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BK3)			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	29	29
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BLKPP)			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BK3)			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	13	13

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (BLKPP)			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (BK3)			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (BLKPP)			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (BK3)			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BLKPP)			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BK3)			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	16	16
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2
			Pengadaan Mebel (BK3)			
			Belanja Mebel	Unit	1	1
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	9
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BK3)			
			Belanja AC	Unit	5	5
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BLKPP)			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BK3)			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BLKPP)			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BK3)			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	5
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BLKPP)			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BK3)			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	8
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	40
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BLKPP)			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BK3)			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	13	13

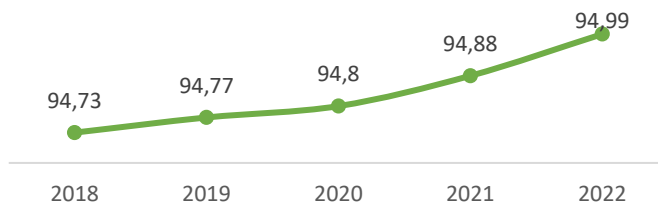
No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
			Pemeliharaan Mebel			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80	80
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	79	79
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BLKPP)			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	18	18
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BK3)			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BLKPP)			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKPP)			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	53	53
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BK3)			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3

2) **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a) **Kondisi Umum**

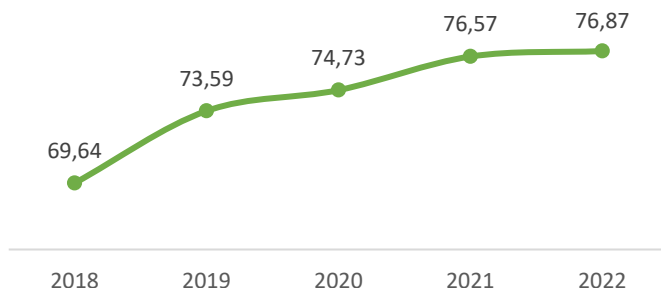
Pemberdayaan perempuan adalah upaya meningkatkan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indikator yang digunakan untuk memotret pencapaian pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Perlindungan Anak (IPA). IPG dan IDG DIY yang terus meningkat setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir serta IPA yang selalu berada di atas angka rata-rata nasional menunjukkan keseriusan Pemda DIY dalam mensukseskan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DIY. Berikut perkembangan data capaian IPG, IDG, dan IPA di DIY.



Gambar 3.26. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY Tahun 2018-2022

Sumber: BPS DIY, 2023



Gambar 3.27. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY Tahun 2018-2022

Sumber: BPS DIY, 2023

Tabel 3.77. Indeks Perlindungan Anak DIY berdasarkan Dimensi Pembentuknya

Tahun	Satuan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlin- dungan Khusus	IPA DIY	IPA Indone- sia
2018	Indeks	74,59	86,94	79,16	72,16	78,98	78,66	62,72
2019	Indeks	77,18	89,94	84,02	75,92	80,44	81,71	66,26
2020	Indeks	80,99	90,75	85,16	79,12	71,82	81,53	66,89
2021	Indeks	53,31	88,18	84,29	32,53	78,46	68,35	61,38

Sumber: BPS DIY, 2023

Sejak awal rilis di 2018, IPA DIY selalu lebih tinggi dari IPA Indonesia. Bahkan IPA DIY menjadi yang tertinggi secara nasional di tahun 2020. Namun, capaian IPA DIY masih fluktuatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika lingkungan DIY semasa pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak tidak bisa berjalan optimal di tahun 2020 dan 2021.

Pelaksanaan pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di DIY memiliki dua sasaran utama yaitu meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.

Peningkatan angka partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan diukur dengan presentase keterwakilan perempuan dalam politik. Capaian sasaran tersebut pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.78. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Presentase keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/Walikota dan Bamuskal)	%	18,22	18	18,24	101,33
2	Presentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	%	n/a	80	85,75	107,19
3	Umur menikah pertama perempuan	tahun	25,17	21-30	26,28	100

Sumber: DP3AP2 DIY, 2024 (data diolah)

Persentase keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal) telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 18,24%. Jumlah anggota DPRD DIY perempuan adalah 53 dari total keseluruhan 276 anggota DPRD, Bupati/walikota perempuan sejumlah 1 dari 5 bupati/walikota, Bamuskal perempuan sebanyak 609 dari total keseluruhan 3.353 anggota Bamuskal. Dengan demikian, jumlah keseluruhan perempuan sebagai anggota DPRD, bupati/walikota, dan anggota Bamuskal adalah 663 orang atau sebesar 18,24% dari keseluruhan 3.634 orang perempuan yang berpartisipasi dalam politik.

Selanjutnya, Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY telah mencapai 85,75% dari target sebesar 80%. Keberhasilan capaian ini didorong oleh adanya regulasi di tingkat Pemda DIY dan Pemkab/kota se-DIY tentang perlindungan terhadap perempuan termasuk adanya komitmen dari pimpinan daerah; terbentuknya jejaring kerja

perlindungan terhadap perempuan dan anak; serta adanya Forum Data Gender dan Anak yang menyediakan sistem data pelaporan.

Capaian Umur menikah pertama perempuan pada tahun 2023 dengan target umur 21 - 30 tahun telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan dengan rata-rata umur menikah pertama perempuan yaitu 26,28 tahun. Tugas selanjutnya adalah mempertahankan umur ideal menikah pertama perempuan antara umur 21 sampai dengan 30 tahun sebagaimana usia idealnya perempuan untuk bereproduksi (kemampuan reproduksi) agar menghasilkan keturunan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluarga.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Semakin tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik jumlah dan ragam bentuknya. Data Dataku Bappeda DIY menyebutkan di tahun 2023 terdapat 2.374 kasus kekerasan di DIY.
- (b) Angka perkawinan usia anak masih terus meningkat. DIY juga merupakan salah satu daerah dengan angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Sepanjang waktu 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta mencatat sebanyak 757 dispensasi perkawinan dan pada 2022 tercatat sebanyak 597 dispensasi perkawinan.
- (c) Rendahnya partisipasi perempuan dalam ranah politik dan pengambilan keputusan. Partisipasi perempuan dalam lembaga parlemen di DIY saat ini baru 20 persen. Capaian ini masih jauh dari yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik, yaitu kuota perempuan dalam politik 30%.

(2) Solusi

- (a) Adanya upaya-upaya pencegahan dan kampanye anti kekerasan oleh semua pihak dan elemen. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga tidak kalah penting.
- (b) Melembagakan pemenuhan hak anak di seluruh lembaga layanan anak. Pendampingan anak dan keluarga melalui Telekonsultasi Sahabat Anak dan Keluarga (TeSAGa), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan SAPA 129. Mendorong pembentukan UPT PPA dan PUSPAGA di seluruh kabupaten/kota di DIY. Optimalisasi kapasitas anak, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pencegahan perkawinan anak, serta meningkatkan aksesibilitas dan perluasan layanan. Meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak.
- (c) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen dengan meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 dilaksanakan melalui 8 Program dan 56 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.650.518.391,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp17.908.840.782,00 atau 96,02%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya, rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.79. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	87.82	88,04
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3
			Dokumen Renstra 2023-2027	dokumen	1	1
			Dokumen Renja 2024	dokumen	1	1
			Dokumen RPJMD	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapor-an	5	5
			LKjIP	Lapor-an	1	1
			LKPJ	Lapor-an	1	1
			LPPD	Lapor-an	1	1
			Monev Program Kegiatan	Lapor-an	1	1
			Capaian Kinerja Eselon II dan III	Lapor-an	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	49	49
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Lapor-an	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Lapor-an	18	18
			Laporan Keuangan Bulanan	Lapor-an	12	12
			Laporan Keuangan Triwulanan	Lapor-an	4	4
			Laporan Keuangan Semesteran	Lapor-an	2	2
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapor-an	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	doku- men	2	2
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor-an	2	2
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	doku- men	1	1
			Pengadaan Mebel			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	3
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	12
			Pengadaan Aset Tak Berwujud			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	5	5
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	18
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapor-an	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor-an	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor-an	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	18
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45	45
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	107	107
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	%	38.75	39.28
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	37	37

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputeraan/Kota	Organisasi	5	5
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	3	3
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	10	10
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani	%	90	100
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 5	Perangkat Daerah	5	5
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	1	1
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	3	3
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	30	30
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola	sistem	3	3
			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi			
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	doku- men	1	1
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi			
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	doku- men	1	1
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Jumlah lembaga layanan yang dilakukan pembinaan	buah	50	190
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organi- sasi	16	16
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	doku- men	1	1
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	10	10

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	%	90	100
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1
			Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	Orang	1	1
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Layanan	3	3
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	Obyek	7	7
			Pengembangan Ekonomi Perempuan			
			Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya	Orang	250	250
			Pembinaan Kelompok Ekonomi Perempuan	Kalurahan	30	30
			Pembinaan dan Pengembangan Desa Prima	Kabupaten Kota	5	5
			Publikasi dan Dokumentasi Perempuan, Anak dan Pengendalian Penduduk	Kali	50	50
			Expose Produk Kelompok Ekonomi Perempuan	paket	1	1
			Peringatan Hari Anak Nasional dan Jogja Creative Care	Kegiatan	2	2
			Fasilitasi Puspaga dan Tesaga	Bulan	12	12
			Pendewasaan Usia Pernikahan	Lokasi	60	60
			Monitoring dan Evaluasi DMB dan Rintisan DMB	Kalurahan	13	13
			Penyusunan Masterplan Desa Mandiri Budaya Tahun 2023	dokumen	1	1
			Implementasi Prima Setara	Kalurahan	50	50
			Penilaian Inisiator Responsif Isu Gender, Perempuan, anak dan dalduk bagi Peroangan dan Desa	paket	3	3

3) **Urusan Pangan**

a) **Kondisi Umum**

Penyelenggaraan Urusan Pangan di DIY diukur dengan indikator kinerja sasaran berupa capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari.

Tabel 3.80. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022*	2023**		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	96,80	94,40	96,30	102,01

Ket.: *) berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi 2.000 kkal/kapita/hari

**) berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi 2.100 kkal/kapita/hari

Sumber: DPKP DIY, 2024

Kinerja sasaran “Terwujudnya Ketahanan Pangan” dihitung menggunakan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tercapai 96,3 melebihi target tahun 2023 dengan persentase capaian 102,01%. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2022 karena perbedaan penggunaan *baseline* dalam penghitungan Skor PPH. Tahun 2022 menggunakan *baseline* AKG 2.000 kkal/kapita/hari sedangkan tahun 2023 menggunakan AKG 2.100 kkal/kapita/hari sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan. Capaian Skor PPH DIY masih lebih tinggi dibanding capaian Nasional sebesar 94,1. Dengan hasil tersebut, tahun 2023 ini DIY sudah enam tahun berturut-turut dapat mempertahankan prestasi peringkat pertama untuk capaian Skor PPH tingkat Provinsi.

Skor Pola Pangan Harapan merupakan parameter penilaian terhadap keseimbangan dan keanekaragaman pangan didasarkan pada komposisi pangan utama.

Terlihat dari tabel di bawah, Skor PPH untuk umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula masih di bawah angka standar. Sehingga masyarakat masih perlu didorong untuk meningkatkan konsumsi beberapa golongan pangan yang masih belum mencapai angka ideal. Masyarakat juga perlu didorong meningkatkan konsumsi pangan lokal agar kebutuhan energi tercukupi dengan memperhatikan kaidah konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

Tabel 3.81. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2023 dibandingkan Skor PPH Ideal

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	
		Ideal	2023
1.	Padi-padian	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	2,5	1,1
3.	Pangan Hewani	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	1,0	0,6
6.	Kacang-kacangan	10,0	8,4
7.	Gula	2,5	2,1
8.	Sayur dan Buah	30,0	30,0
9.	Lain-lain	-	-
Total		100,0	96,3

Sumber: DPKP DIY, 2024

Keberhasilan pencapaian target Skor PPH didukung oleh keberhasilan kinerja 3 sub sistem ketahanan pangan (ketersediaan – keterjangkauan – pemanfaatan pangan) selama tahun 2023. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik, didukung oleh peningkatan produksi pertanian dan adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait. Tingkat ketersediaan energi tahun 2023 tercapai 3.735 kkal/kapita/hari dengan tingkat konsumsi energi sebesar 2.053 kkal/kapita/hari.

Selama tahun 2023 tidak ada penyaluran Cadangan Pangan Pemda DIY. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi DIY selama tahun 2023 aman, baik dari dampak bencana alam, gejolak harga pangan, maupun gejolak sosial yang dapat memicu kerawanan pangan. Sejalan dengan hal tersebut cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus ditingkatkan. Sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras telah mencapai 305,749 ton, seluruhnya dikelola di PT Taru Martani.

Distribusi dan akses pangan juga terus ditingkatkan. Harga pangan pokok di DIY relatif terkendali dengan adanya dukungan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Harga pokok dipantau secara rutin dan apabila diperlukan, dilakukan operasi pasar untuk pengendalian harga.

Meningkatnya Skor PPH juga didukung dengan adanya gerakan B2SA, Desa B2SA, pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan (Pekarangan Pangan Lestari dan Lumbung Mataraman), serta penjaminan mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Pada tahun 2023 juga telah dilakukan pengawasan keamanan pangan dan pengujian *post-market* terhadap 58 produk PSAT berupa sayur dan beras curah yang beredar di 5 kabupaten/kota di DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa 100% PSAT yang menjadi sampel, aman untuk dikonsumsi. Khusus untuk pengawasan *pre-market* berupa penjaminan keamanan pangan dan dukungan peningkatan ekspor PSAT.

Selanjutnya, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) DIY telah menerbitkan 28 izin edar Produk Domestik (PD) PSAT dan 4 Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik (SPPB) PSAT. Selain itu dilakukan pula *Surveillance* kepada beberapa pelaku usaha PSAT yang sudah mendapatkan

sertifikat/register dengan hasil semuanya dinyatakan masih konsisten dalam pemenuhan standar keamanan pangan.

Berdasarkan analisis yang menghasilkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas–FSVA*), hingga akhir tahun 2023 masih ada 3 Kemantren di Kota Yogyakarta yang masuk dalam daerah rentan rawan pangan, berada pada skala prioritas penanganan ke-3 (kategori agak rentan) dari 6 skala prioritas yang ada dan perlu mendapat penanganan lintas sektor secara berkelanjutan sesuai penyebabnya, yaitu: Kemantren Gedongtengen karena kemiskinan dan *stunting* serta Kemantren Gondomanan dan Danurejan disebabkan oleh akses air bersih. Belum terpenuhinya indikator akses air bersih di kedua Kemantren tersebut dipengaruhi oleh jarak sumber air ke jamban yang syarat minimalnya 10 meter. Hal ini sulit untuk terpenuhi mengingat luas lahan perumahan/ pekarangan yang cukup sempit di kota. Berdasarkan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sampai dengan triwulan IV tahun 2023 tidak ada desa yang masuk dalam kategori rawan pangan.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Secara keseluruhan produksi pangan tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022. Namun adanya perubahan iklim menyebabkan ketersediaan dan pasokan pangan terganggu dalam waktu tertentu, serta terjadinya fluktuasi harga pangan.
- (b) Skor PPH DIY merupakan yang tertinggi di level nasional, namun konsumsi pangan berdasarkan pola konsumsi B2SA masih belum seimbang.

- (c) Hasil pengujian menunjukkan bahwa 100% PSAT yang menjadi sampel aman untuk dikonsumsi, namun masih ada produk PSAT yang belum ada izin edar.
- (d) Masih adanya kecamatan yang rentan rawan pangan.

(2) Solusi

- (a) Mengintensifkan Gerakan Pasar Murah, optimalisasi Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Center (TTIC), serta pelaksanaan pasar tani secara rutin.
- (b) Sosialisasi, edukasi, promosi, pendampingan, konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA serta Gerakan penganeekaragaman pangan dan konsumsi pangan lokal (umbi, kacang-kacangan).
- (c) Sosialisasi, edukasi, pendampingan, promosi terkait perizinan PSAT oleh OKKPD melalui OSS.
- (d) Pengurangan kecamatan rawan pangan melalui Desa Mandiri Pangan, lembaga akses pangan, Lumbung Mataraman, serta mengoptimalkan koordinasi lintas sektor.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Urusan Pangan terdiri dari 3 Program Reguler dan 1 Program Dana Keistimewaan. Program Reguler yaitu: 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan pagu Rp1.045.465.000,00; 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan pagu Rp100.750.000,00; dan 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan pagu Rp159.000.000,00. Jumlah total pagu Program reguler Rp1.305.215.000,00 serta realisasi Program reguler keseluruhan mencapai Rp1.231.407.793,00 atau 94,34%. Program Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan dengan

pagu anggaran Rp9.858.124.585,00 dapat terealisasi Rp9.771.806.292,00 atau 99,12%. Jika digabungkan rata-rata realisasi Program reguler dan Dana Keistimewaan mencapai 98,56%. Realisasi kinerja fisik baik Program reguler maupun Dana Keistimewaan mencapai 100%, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 1,44%. Rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.82. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	Kkal/kap/hari	3.735	3.735
			Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	Kkal/kap/hari	2.145	2.053
			Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
			Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			
			Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	6	6
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			
			Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Laporan	4	4
			Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Promosi			
			Sub kegiatan Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	1
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	1
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)	Persentase	93.18	93.18
			Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			
			Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	5	5
			Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	1	1
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	Persentase	88,2	100
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi			
			Kelembagaan keamanan pangan segar provinsi yang dibina	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	Sertifikat	5	5
			Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA			
			URUSAN KEBUDAYAAN			
			Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			
			Sub Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman			
			1. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman :	Laporan	29	29
			2. Lumbung Mataraman Tahap	Desa	15	15
			3. Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian	Desa	11	11
			4. Festival Lumbung Mataraman	Event	1	1
			5. Gerakan Stop Boros Pangan	Video	1	1
			6. Pengamatan dan pengendalian hama secara alami	ha	700	700
			7. Peningkatan cadangan pangan masyarakat	Kelompok	8	8
			8. Pengembangan Pertanian di Lahan Sempit Perkotaan	Kelompok	2	2
			9. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Lumbung Mataraman Desa Mandiri Budaya	Desa	6	6
			10. Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Unit	1	1
			11. Budidaya tanaman jagung sistem sabuk gunung	Kelompok	2	2
			12. Bimtek Olahan Pangan Lokal	Lokasi	60	60
			13. Surveilent sertifikasi organik (salak)	Lokasi	3	3
			14. Keikutsertaan dalam Pekan Nasional (PENAS) KTNA	Kali	1	1
			15. Lumbung Pangan Tradisional	Kelompok	4	4
			16. Bimtek keamanan pangan lokal	Lokasi	16	16

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			17. Kajian Lanscape Jogja Agro Park	Dokumen	1	1
			18. Pembangunan sarana prasarana Jogja Agro Park	Jenis	1	1
			19. Vidio Dokumenter Lumbung Tani Istimewa	Video	1	1
			20. Pengembangan budidaya kambing Saanen	Kegiatan	1	1
			21. Lomba Pekarangan Lestari Tanaman Hortikultura	Kali	1	1
			22. Pameran Promosi Produk-Produk Olahan Petani	Kali	1	1
			23. Video Edukasi Perawatan Pemupukan dan Panen (hidroponik)	Kali	1	1
			24. Podcast Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kali	13	13
			25. Pengolahan frozen food	Kelompok	5	5
			26. Sarasehan Among Tani	Lokasi	13	13
			27. Monev dan pendampingan BKK Lumbung Mataraman	Desa	6	6
			28. Grand desain Lumbung Mataraman DIY	Dokumen	1	1
			29. Masterplan Desa Rintisan Mandiri Budaya Lumbung Mataraman	Dokumen	1	1
			30. Pemeliharaan/pengembangan aplikasi direktori petani milenial	Aplikasi	1	1
			31. Expose BKK Lumbung Mataraman	Kali	1	1
			32. Sosialisasi Lumbung Mataraman	Kali	1	1
			33. Sosialisasi Olahan Pangan Lokal	Kali	1	1
			34. Publikasi Lumbung Jogja	Kali	3	3
			35. Sosialisasi Budidaya Peternakan	Kali	2	2
			36. Gelar Pangan Lokal	Kali	1	1

4) **Urusan Pertanian**

a) **Kondisi Umum**

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, menyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten berwenang

dalam mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Sasaran dari pengelolaan dan pemanfaatan tersebut ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Aspek Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sementara aspek Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terdiri dari perlindungan, penggunaan, dan pelepasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, realisasi kinerja Urusan Pertanahan ditentukan dengan satu indikator kinerja sasaran, yaitu Persentase penyelenggaraan Penataan Agraria dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai regulasi.

Tabel 3.83. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2023-2026 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase penyelenggaraan Penataan Agraria dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	%	58,83*	60,47	60,95	100,79

Ket.: *) Capaian tahun 2022 merupakan konversi dari capaian dari tahun 2022 yang tersaji dalam LKPJ 2022 dengan perhitungan baru yang memasukkan aspek Reforma Agraria
 Sumber: DPTR DIY, 2024

Indikator Persentase penyelenggaraan penataan agraria dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai regulasi. Capaian indikator ini didapatkan dari Persentase penyelenggaraan penataan agraria yang ditindalanjuti serta persentase pengelolaan (penatausahaan melalui pendaftaran) dan pemanfaatan (kesesuaian pemanfaatan) Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah desa.

Pada tahun 2023 kinerja Urusan Pertanahan dengan indikator kinerja sasaran berupa Persentase penyelenggaraan Penataan Agraria dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai regulasi, hasil capaian telah melampaui target, yaitu dari target sebesar 60,47% sudah tercapai sebesar 60,95% (100,79%) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$[(\text{Persentase penyelenggaraan penataan agraria yang ditindaklanjuti}) \times 50\% + [\text{Rerata (Persentase pendaftaran sertifikat bidang tanah SG/PAG/TD)} + (\text{Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah SG/PAG/TD})] \times 50\%$$

$$=[(100\% \times 50\%)] + [(40,41\% + 3,38\%)/2] \times 50\%$$

Jadi persentasenya sejumlah 60,95%

Sebagaimana formulasi perhitungan di atas, bahwa capaian sampai dengan akhir tahun 2023 didapatkan dari realisasi pendaftaran sertifikasi tanah kasultanan dan kadipaten sebanyak 13.958 bidang ditambah dengan pendaftaran sertifikasi tanah desa sebanyak 12.035 bidang, jadi jumlahnya 25.993 dibagi dengan jumlah keseluruhan target akhir RPD Tahun 2023, yaitu 64.323 bidang tanah kasultanan dan kadipaten dan tanah desa, dengan rincian antara lain:

1. Persentase pendaftaran sertifikat bidang Tanah SG/PAG/TD sebesar 40,41% dari perhitungan jumlah pendaftaran sebesar 25.993 bidang terhadap 64.323 bidang yang terdiri dari :
 - a. Pendaftaran Tanah SG/PAG sejumlah 13.958 (bertambah 121 bidang dari realisasi tahun 2022) bidang;
 - b. Pendaftaran Penyesuaian Sertifikat Tanah Kalurahan sejumlah 9.699 (bertambah 2.016 bidang dari realisasi tahun 2022);

- c. Pendaftaran sertifikat tanah kalurahan pertama kali sejumlah 2.336 bidang (bertambah 1.195 bidang dari realisasi tahun 2022).
2. Persentase kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sebesar 3,38% dari perhitungan jumlah rekomendasi yang masuk sebesar 2.172 rekomendasi terhadap keseluruhan bidang tanah 64.323 bidang yang terdiri dari:
 - a. Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah SG/ PAG sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebanyak 2.007 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2023 sebanyak 67 rekomendasi yang sudah dikeluarkan);
 - b. Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah desa sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebanyak 165 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2023 sebanyak 24 rekomendasi).
3. Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi sebesar 100% dari dua permohonan layanan pertanahan yang masuk terhadap keseluruhan permohonan yang telah ditindaklanjuti, yaitu:
 - a. Keputusan Gubernur DIY Nomor: 235/Kep/2023 Tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo Seksi Yogyakarta - Kulon Progo di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul;
 - b. Keputusan Gubernur DIY Nomor: 378/KEP/2023 tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi Yogyakarta-Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo.

b) Permasalahan dan Solusi**(1) Permasalahan**

Beberapa permasalahan terkait dengan sasaran terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah, antara lain:

- (a) Pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa belum dapat diproses, karena masih perlu konfirmasi lebih lanjut sehubungan dengan kelengkapan administrasi status tanah pengganti tersebut.
- (b) Belum adanya kesepakatan terhadap status keberadaan tanah *wedi kengser*, sehingga bidang tanah tersebut belum bisa didaftarkan sertifikasinya.
- (c) Terbatasnya ketersediaan peta bidang tanah dari Kantor Pertanahan sehingga belum bisa secara optimal dilakukan proses pendaftaran.

(2) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas antara lain :

- (a) Perlu dilakukan koordinasi dan sosialisasi lebih lanjut dengan Kantor Pertanahan terkait pelaksanaan pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum.
- (b) Melakukan koordinasi secara intensif dengan kasultanan, kadipaten, Kabupaten/Kota dan Kalurahan terkait dengan status keberadaan *wedi kengser*.

- (c) Mempercepat implementasi pelaksanaan kerjasama antara Pemda DIY dengan Kementerian ATR/BPN dalam hal berbagi data sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani dengan Nomor 119/13806 dan Nomor 10/SKB-34.HP/XII/2023 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan terhadap data, Informasi dan Infrastruktur Geospasial untuk Pembangunan di Bidang Agraria/ Pertanahan dan Tata Ruang.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 kegiatan Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.001.251.550,00 yang dibagi ke dalam 3 Program dan 10 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp6.476.319.535,00 (92,50%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Sementara untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp10.601.108.650,00 yang terdiri dari 1 Program dan 21 Sub Kegiatan. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp10.389.437.536,00 (98,00%) dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.84. Capaian Program dan Sub Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
			Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	dokumen	1	1
			Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
			Jumlah dokumen kinerja reforma agraria	dokumen	1	1
			Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
			Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	dokumen	38	38
			Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	dokumen	12	12
			Dokumen Evaluasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	dokumen	4	4
			Berita Acara Tim Verifikasi Dokumen Identifikasi Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah	bidang Keputusan	1.995 500	1.995 500
			Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Desa	Sertipikat	1.863	2.106
			Dukungan sarana dan prasarana dalam rangka percepatan pendaftaran tanah Kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	Bidang	4.258	4.258

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Kajian Standardisasi Pematokan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan	Dokumen Kajian	1	1
			Penyerahan Sertifikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Event	1	1
			Penelusuran data pertanahan	Dokumen	1	1
			Simposium Peringatan Hari Keistimewaan	Event	1	1
			Pemeliharaan Dokumen Pertanahan			
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Dokumen	1	1
			Dokumen Administrasi Pertanahan yang Terawat dan Terpelihara	Lembar	10.000	10.000
			Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa			
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen	23	23
			Supervisi dan Audit Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di DIY permohonan serat kekancingan yang ditindaklanjuti (100%) 4. Penerbitan rekomendasi dokumen pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten (100%)	Dokumen	1	1
			Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah	Dokumen	22	22
			Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan			
			Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen	4	4
			Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama dan Kedua TA 2023, Penilaian Kelayakan Usulan TA 2024, dan Penilaian	Dokumen	4	4

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Kelayakan Usulan TA 2025 Ururan Pertanian			
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Ururan Pertanian			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Ururan Pertanian	Lapor-an	4	4
			Bahan Berita Acara Pemanatauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Ururan Keistimewaan Pertanian Tahap I, II, III TA 2023	Doku-men	3	3
			Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Ururan Keistimewaan Pertanian	Doku-men	1	1
			Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanian			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanian	doku-men	3	3
			Data Spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertifikat	sertipikat	2.714	2.714
			Dokumen Sinkronisasi Data Pertanian	doku-men	1	1
			Pengelolaan Data Spasial Tanah Kasultanan dan Tanah KadipatenKekancingan	sistem	1	1
			Pembaruan data geospasial inventarisasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan	Kalurah-an	97	97
			Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten			
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Doku-men	10	10
			Rekomendasi Kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persen	100	100
			Penyebarluasan Informasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (1. Publikasi surat kabar, 2.	Paket	5	5

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Iklan layanan masyarakat, 3. Podcast, 4. Sosialisasi), b. Publikasi Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan			
			Fasilitasi Persiapan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan	Kalurahan	9	9
			Verifikasi Permohonan Pemanfaatan Tanah Kalurahan	Dokumen	1	1
			Rekomendasi Kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan	Dokumen	100	100
			Kajian Identifikasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	dokumen	1	1
			Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa			
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	13	13
			Penanganan Permasalahan Keberatan dan Sengketa Dalam Hal Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Persen	100	100
			Verifikasi 12 Berkas Permohonan Penyelesaian Tukar Menukar	Dokumen	1	1
			Roadmap Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	dokumen	1	1
			Reforma Agraria Penyelesaian Permasalahan Tanah Tutupan - Penyusunan Desain Tanah Tutupan	dokumen	1	1
			Reforma Agraria Penyelesaian Permasalahan Tanah Tutupan - Sosialisasi Desain Tanah Tutupan	Kali	2	2
			Reforma Agraria Penyelesaian Permasalahan Tanah Enclave - Rekonstruksi sejarah tanah kasultanan dan tanah enclave	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Reforma Agraria Penyelesaian Permasalahan Tanah Enclave - Penelusuran dokumen tanah kasultanan dan tanah enclave	Dokumen	1	1
			Appraisal penghitungan kerugian sewa tanah kalurahan	Lokasi	4	6
			Kajian/pandangan hukum penanganan permasalahan pemanfaatan tanah kalurahan	Dokumen	1	1

5) *Urusan Lingkungan Hidup*

a) *Kondisi Umum*

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di DIY pada tahun 2023 diukur dengan menggunakan indikator berupa ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.85. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	n/a	77,15	84,75	109,85

Sumber: DLHK DIY, 2024

Secara umum, kinerja program lingkungan hidup selama tahun 2023 berjalan dengan baik. Secara detail, kinerja masing-masing program kegiatannya adalah sebagai berikut :

- (1) Program perencanaan lingkungan hidup : pada tahun 2023, DIY telah menyusun dokumen inventarisasi lingkungan hidup sebagai salah satu materi dalam penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Selain itu, tahun

- 2023 DIY juga menyelesaikan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJPD.
- (2) Program pembinaan dan pengawasan izin lingkungan hidup : Selama tahun 2023, terdapat 89 dokumen izin lingkungan yang terlayani dimana 34 diantaranya telah diterbitkan persetujuan lingkungannya. Pengawasan terhadap izin lingkungan juga dilakukan ke 95 usaha kegiatan selama tahun 2023. Hal ini dilakukan agar aktivitas pemegang izin tetap sesuai dengan dokumen lingkungan sehingga mengurangi resiko pencemaran lingkungan.
 - (3) Program penghargaan lingkungan hidup : DIY mendapatkan 3 penghargaan yaitu (1) Kalpataru (Kelompok Tani Hutan Wanapaksi Desa Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo masuk sebagai 20 nominasi penerima penghargaan Kalpataru Tahun 2023 kategori penyelamat lingkungan), (2) Adiwiyata (Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 sebanyak 25 sekolah, dan 3 sekolah jenjang SD, SMP ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri), (3) Program Kampung Iklim (Terdapat 2 lokasi ProKlim di DIY yang memperoleh sertifikat Utama yaitu Padukuhan Kroco, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, dan Dusun Plosokuning, Padukuhan Wonosari, Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman)
 - (4) Program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup : Keluaran dari kegiatan ini adalah ketersediaan data kualitas air, udara, air laut, data gas rumah kaca, dan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD). Kinerja Pelayanan pengujian Laboratorium Lingkungan selama tahun 2023 mencapai 16.269 parameter uji yang berasal

dari 1.867 sampel dengan jumlah LHU sebanyak 810 LHU.

- (5) Program pengendalian B3 dan limbah B3 : Selama tahun 2023 terdapat total 54 pengajuan rincian teknis (rintek) limbah B3 yang masuk. Dari 54 pengajuan tersebut sudah terdapat 26 dokumen yang sudah selesai dan keluar rekomendasinya, dan 28 dokumen masih dalam proses. Permohonan rintek B3 datang dari berbagai sektor antara lain sektor pariwisata (hotel, dan lain-lain), sektor kesehatan, sektor industri, dan lain sebagainya.
- (6) Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat : Target pembinaan tahun 2023 adalah meningkatkan kapasitas dari para pengelola sampah mandiri. Pendampingan dilakukan ke 40 lokasi dengan melibatkan anggota dewan sebagai salah satu bentuk komitmen legislatif dalam upaya perbaikan pengelolaan lingkungan hidup.
- (7) Program pengelolaan persampahan : Realisasi tonase sampah sampai dengan Desember 2023 adalah sebesar 181.753,57 ton yang terlayani. Jumlah layanan sampah ini meningkat karena sejak 6 September 2023 TPA dibuka lagi tetapi secara terbatas.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Isu pengelolaan sampah regional menjadi permasalahan yang menjadi perhatian selama tahun 2023. Hal ini terjadi karena kapasitas penampungan sampah yang ada sudah *overload* sehingga tidak mampu lagi menampung sampah dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
- (b) Kondisi lahan yang terbatas menyebabkan DIY sangat sulit untuk bisa menambah luas tutupan vegetasi

secara masif. Hal ini tentunya berdampak terhadap nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang tidak optimal. IKL sendiri menjadi salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

(2) Solusi

- (a) Beberapa solusi dalam mengatasi permasalahan persampahan regional di DIY adalah sebagai berikut :
 - Memaksimalkan penggunaan zona transisi I dan II.
 - Melakukan penutupan dan pembatasan kuota sampah sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2023, sehingga usia pakai TPA semakin panjang dan diharapkan persiapan desentralisasi Kota/Kabupaten sudah siap.
 - Selanjutnya, pengelolaan sampah akan dilakukan secara mandiri (desentralisasi persampahan) oleh Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Surat Gubernur DIY Nomor 658/11898 perihal Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota se DIY.
- (b) Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap lahan-lahan kritis yang selanjutnya dapat dijadikan sasaran lokasi prioritas penambahan luas tutupan vegetasi.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Alokasi anggaran Urusan Lingkungan Hidup tahun 2023 sebesar Rp81.213.616.147,00. Secara fisik, pelaksanaan kegiatan telah tercapai 100%, sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar Rp77.950.106.172,00 atau dengan persentase capaian 95,98%. Capaian kinerja program kegiatan secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.86. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	skor	94.24	93.34
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	doku- men	4	4
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			RKA	doku- men	1	1
			DPA	doku- men	1	1
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	doku- men	2	2
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	22
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	369	369
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	doku- men	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	20
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	32	32
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	94	94
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	258	258
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	%	30	30
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi			
			Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun 1	dokumen	1	1
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	dokumen	1	1
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	dokumen	1	1
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	%	100	100
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	4	4
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	dokumen	2	2
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			
			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	2	2
			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	50	50
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	%	100	100
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	1	1
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	%	87.5	89.93
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan			
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			
			Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	35	35
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
			Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	1	1
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	21.05	21.05
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan			
			Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	45	150
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup	%	100	100
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 50	Entitas	23	23
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	%	100	100
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	dokumen	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelolaan sampah yang beroperasi (%)	%	92.86	100
			Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional			
			Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	750	499.605
			Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional			
			Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	11	11
			Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			
			Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Ton	750	499.605
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Unit	6	6

6) *Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*

a) *Kondisi Umum*

Program nasional di bidang administrasi kependudukan (adminduk) dan pencatatan sipil (capil) yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri senantiasa menjadi referensi dalam penyusunan rencana penyelenggaraan urusan adminduk di DIY dengan tujuan agar target sasaran pembangunan di tingkat daerah dapat sejalan dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, fokus pelaksanaan program kerja urusan adminduk menitikberatkan pada persiapan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yakni peningkatan cakupan perekaman biometrik bagi penduduk yang sudah memenuhi syarat memilih dan terdaftar dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) serta sosialisasi penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat untuk memperluas akses terhadap layanan adminduk secara daring. Beberapa kegiatan yang dapat mendukung fokus utama juga dilaksanakan. Di bidang pendaftaran penduduk telah diselenggarakan pendataan bagi penduduk rentan adminduk terutama anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang membutuhkan fasilitasi Akta Kelahiran maupun Kartu Identitas Anak (KIA), sosialisasi terkait regulasi adminduk di beberapa kalurahan, serta fasilitasi perubahan status pekerjaan bagi anggota TNI/POLRI yang telah purna tugas agar dapat ikut serta dalam Pemilu.

Kemudian dalam bidang pencatatan sipil telah dilaksanakan fasilitasi pelayanan itsbat nikah bagi penduduk yang membutuhkan dengan melibatkan instansi lintas sektor dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai unit usaha terkait pemberian insentif bagi pemegang KIA yang dinilai dapat meningkatkan cakupan KIA di daerah. Di bidang penyediaan dan pemanfaatan data juga telah dilaksanakan rilis data kependudukan tahun 2023 untuk semester 1 dan 2, layanan dan sosialisasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DIY yang akan dan telah mengadakan PKS pemanfaatan data kependudukan, serta penyusunan Buku Profil Kependudukan Tahun 2022.

Upaya meningkatkan cakupan angka perekaman biometrik KTP-el, selama tahun 2023 dilakukan dalam bentuk kegiatan

pelayanan terpadu jemput bola terhadap siswa/siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di DIY yang berusia 16 tahun ke atas dengan melibatkan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Ditjen Dukcapil masih banyak penduduk berusia di bawah 17 tahun yang telah memenuhi syarat memilih namun belum dilakukan perekaman biometrik. Target kegiatan spesifik menyasar siswa sekolah dilaksanakan dalam rangka mencegah hilangnya hak mereka sebagai pemilih pemula pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Jemput bola pelayanan terpadu perekaman biometrik KTP-el, diselenggarakan di 4 SMA/SMK di kabupaten Gunungkidul yaitu SMA Negeri 1 Wonosari (148), SMK Negeri 2 Wonosari (168), SMK Negeri 3 Wonosari (270), dan SMA Negeri 2 Playen (91) sehingga total sebanyak 677 siswa telah merekam data biometriknya ke dalam database. Siswa tersebut akan memperoleh KTP-el pada waktu mereka berusia 17 tahun dan tidak perlu melakukan perekaman ulang. Sampai dengan akhir tahun 2023, dari 2.891.488 penduduk yang berstatus wajib KTP sebanyak 2.859.810 penduduk telah melakukan perekaman biometrik atau sebesar 99,74%. Adapun jumlah penduduk DIY pada semester II tahun 2023 yaitu 3.722.296 jiwa.

Dalam hal peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan, pelaksanaan urusan adminduk di tingkat DIY diselenggarakan melalui koordinasi dan fasilitasi kepada Dinas Dukcapil di daerah untuk memperluas cakupan registrasi aplikasi IKD oleh penduduk wajib KTP yang memiliki perangkat telepon pintar. Provinsi mendorong daerah untuk menggiatkan pelayanan registrasi IKD di setiap event yang mengundang banyak masyarakat sekaligus memberikan sosialisasi kemanfaatan aplikasi tersebut. Apalagi setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital

Nasional dimana layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan IKD menjadi salah satu dukungan penyelenggaraan aplikasi SPBE prioritas. Selama tahun 2023 ini jemput bola pelayanan registrasi IKD telah dilaksanakan di berbagai lokasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan menysasar ASN, sivitas akademika, serta masyarakat pada umumnya dan telah mengaktifkan user IKD sebanyak 108.812 penduduk atau sebesar 3,80% dari total penduduk wajib KTP-el (2.859.810).

Terkait peningkatan cakupan akta kelahiran, berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu: sosialisasi regulasi, kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang membuka layanan persalinan untuk percepatan pengurusan akta kelahiran bagi bayi baru lahir, berbagai inovasi pelayanan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, dan fasilitasi penduduk rentan adminduk di LKSA yang lahir tanpa diketahui asal-usulnya. Selama tahun 2023, Pemda DIY bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota berhasil memfasilitasi penerbitan 73 dokumen kependudukan bagi 61 anak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tersebar di 2 LKSA dan 2 balai rehabilitasi sosial milik Dinas Sosial DIY. Lebih rinci dokumen kependudukan yang dimaksud terdiri atas: 3 Kartu Keluarga (KK), 37 KTP, 9 Akta Kelahiran, dan 24 KIA diberikan kepada anak panti asuhan dan penyandang disabilitas. Kegiatan ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjamin hak-hak keperdataan dan memberikan perlindungan hukum bagi penduduk rentan adminduk. Sampai akhir 2023 angka kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun di DIY telah mencapai 99,21% atau sebanyak 868.470 jiwa dari total penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 875.406 jiwa. Di sisi lain, cakupan kepemilikan KIA di DIY pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang relatif baik yakni sebesar 84,96% anak usia 0-17 tahun di DIY telah

memiliki KIA dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 79,12%. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran orang tua terhadap pentingnya kepemilikan KIA bagi anak-anak mereka semakin tinggi. Berbagai program intervensi pemerintah juga turut mendukung peningkatan ini. Salah satunya adalah PKS pemberian insentif bagi pemegang KIA oleh lembaga-lembaga penyedia layanan publik di DIY. Inovasi kerja sama yang telah dirintis sejak tahun 2018 ini hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 22 lembaga/unit usaha yang ikut andil dalam PKS.

Pada lingkup pemanfaatan data kependudukan, pada tahun 2023 ini kegiatan lebih difokuskan kepada pemantauan penggunaan hak akses pemanfaatan data yang telah diberikan kepada OPD sesuai PKS serta telaah terhadap perubahan regulasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Hasil pemantauan penggunaan hak akses selama tahun 2023 penggunaan akses paling banyak pada Dinas Sosial DIY untuk verifikasi dan validasi penduduk penerima bantuan sosial dan RS Grhasia untuk verifikasi dan validasi pasien. OPD yang telah menggunakan hak akses telah diminta untuk mengirimkan data balikan sesuai dengan isi dari PKS.

Tabel 3.87. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	n/a	92,20	95,90	104,01

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

Capaian persentase kepemilikan dokumen kependudukan dihitung dari persentase perekaman KTP-el, persentase kepemilikan KIA, persentase kepemilikan Akta Kelahiran, serta persentase penerbitan akta kematian berdasarkan peristiwa kematian yang dilaporkan. Keempat elemen tersebut dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya. Capaian 95,90% dengan rincian: 99,51% wajib KTP-el telah direkam; 84,91% anak usia 0-16 tahun telah memiliki KIA; 99,18% anak usia 0-18 tahun telah memiliki akta kelahiran; serta 100% pelaporan peristiwa kematian telah diterbitkan akta kematiannya.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Adanya penduduk wajib KTP-el yang tidak berdomisili di DIY namun belum mengurus kepindahan sehingga masih terhitung sebagai penduduk DIY.
- (b) Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya *aware* dengan fungsi Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran.
- (c) Penghitungan persentase kepemilikan Akta Kematian terkendala dalam mengetahui jumlah peristiwa kematian yang terjadi.

(2) Solusi

- (a) Penyisiran secara *by name by address* untuk menyasar penduduk secara spesifik yang membutuhkan fasilitasi penerbitan dokumen.
- (b) Variasi metode sosialisasi agar semakin banyak cakupan masyarakat yang terpapar informasi, seperti publikasi via media elektronik, media cetak, sosialisasi di kemantren/kapanewon, dan melalui

program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) dengan metode *video conference*.

- (c) Penerapan Buku Pokok Pemakaman pada kompleks pemakaman di daerah.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp401.176.700,00 bersumber dari APBD murni yang digunakan untuk membiayai 4 program dan 9 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasikan sebesar Rp394.487.291,00 (98,33%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Dilaporkan pula bahwa untuk tahun ini, pelaksanaan kegiatan seluruhnya menggunakan APBD dikarenakan tidak ada pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Administrasi Kependudukan.

Tabel 3.88. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			1.1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			
			1.1.1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi			
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi (DPA SIPD)	Dokumen	50	74
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (KK, KIA, KTP-El, Akta Kelahiran)	Dokumen	49	73

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen	Dokumen	1	1
			1.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			
			1.2.1. Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rapat Kerja Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1
			1.2.2. Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk			
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1
			2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			2.1. Pelayanan Pencatatan Sipil			
			2.1.1. Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Terpadu Fasilitas Dokumen Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1
			2.2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			
			2.2.1. Fasilitas terkait Pencatatan Sipil			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pelayanan Fasilitas Isbat Nikah	Laporan	1	1
			2.2.2. Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerin-tah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil (DPA SIPD)	Doku- men	3	7
			Jumlah Dokumen Kerjasama Pemberian Insentif Bagi Anak Pemilik KIA di Wilayah DIY	Doku- men	3	7
			3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			3.1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			
			3.1.1. Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggara-an Urusan Administrasi Kependudukan (DPA SIPD)	Lapor- an	1	1
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan Perawatan Operasional SIAK	Lapor- an	1	1
			3.1.2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan (DPA SIPD)	Doku- men	4	4
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan	Doku- men	2	2
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Rapat Kerja Terkait Pemilu	Doku- men	2	2
			4. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			4.1. Penyediaan Profil Kependudukan			
			4.1.2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain			
			Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	Doku- men	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Serta Kebutuhan Lain (DPA SIPD)			
			Jumlah Dokumen Profil Data dan Proyeksi Kependudukan DIY Tahun 2022	Dokumen	1	1



7) *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

a) *Kondisi Umum*

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di desa melalui kebijakan program yang relevan. Titik tolak dari konsep pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada periode tahun 2023-2026 diukur dengan 3 indikator kinerja yaitu Rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti, Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan model Gotong Royong

Tabel 3.89. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	Dokumen	4	4	4	100
2	Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	Lembaga	4	4	4	100
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan model Gotong Royong	Desa/Kelurahan	12	10	10	100

Sumber: Biro Bermas Setda DIY, 2024

Indikator yang pertama adalah “Rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti”. Dari target 4 rumusan bahan kebijakan, telah terealisasi 4 rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti. Rumusan-rumusan bahan kebijakan tersebut yaitu:

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- (3) Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
- (4) Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 463/13420 Tentang Rekomendasi Penanganan Kasus Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya, indikator yang kedua adalah “Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan”. Indikator ini muncul sebagai wujud komitmen dalam penyelenggaraan upaya penguatan kelembagaan, penguatan potensi masyarakat serta pemberdayaan masyarakat oleh Pemda DIY. Dari target 4 lembaga kemasyarakatan, pada tahun 2023 dapat terlaksana pembinaan terhadap seluruh lembaga kemasyarakatan yang ditargetkan, yaitu Tim Penggerak PKK; Posyandu; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan LPMD/K. Rincian pembinaan adalah sebagai berikut:

- (1) Fasilitasi terhadap TP PKK DIY serta DPD LPM melalui pemberian hibah dan pendampingan. Dampak nyata yang telah terwujud dari fasilitasi dan pendampingan tersebut yaitu semakin aktifnya TP PKK DIY dalam berkolaborasi bersama berbagai OPD Pemda DIY dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta telah terselenggaranya Kongres LPM se-DIY.
- (2) Pembinaan terhadap posyandu dilaksanakan melalui lomba evaluasi Posyandu tingkat DIY. Dalam lomba ini dilaksanakan pembinaan terhadap 5 Posyandu pemenang Lomba Posyandu di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan Bumdes dilaksanakan melalui Pelatihan Badan Usaha Milik Kalurahan yang dilaksanakan pada 7-21 Februari 2023. Pelatihan ini dilaksanakan pada 6 BUMDesa dengan perincian 2 BUMDesa di Kabupaten Gunungkidul, 3 BUMDesa di kabupaten Kulon Progo dan 1 BUMDesa di kabupaten Bantul.
- (4) Pembinaan LPMD/K dilaksanakan melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat baik di bidang fisik maupun non fisik. Kegiatan ini melibatkan unsur Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan,

Pemerintah Desa, TNI, dan masyarakat baik dari segi sumber daya maupun anggaran. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini meliputi 15 lokasi yang tersebar di lima Kabupaten/Kota di DIY.

Indikator terakhir adalah “Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Model Gotong Royong”. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan model Global Gotong Royong (G2R) dan Gerakan *Paseduluran Segoro Amarto* pada 10 Desa/Kelurahan.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Menurunnya nilai-nilai kegotongroyongan di dalam masyarakat.
- (b) Angka kemiskinan DIY masih cukup tinggi.

(2) *Solusi*

- (a) Mendorong kegotongroyongan masyarakat dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Tentara Manunggal Membangun Desa serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat Desa, khususnya masyarakat yang kurang mampu.
- (b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan pemberdayaan masyarakat yang berasaskan semangat gotong royong masyarakat.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Pada Tahun 2023 secara keseluruhan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui program kegiatan dengan alokasi anggaran Rp5.224.570.200,00. Pengalokasian

anggaran tersebut dibagi dalam 3 program dan 15 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp5.177.855.784,00 (99,11%) dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.90. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Urusan Sekretariat Daerah	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Implementasi Desa/Kalurahan model Global Gotong Royong	Desa/Kalurahan	4	4
			Pengembangan Kewirausahaan Desa			
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa			
			Laporan Implementasi Desa/Kalurahan model Global Gotong Royong Tetrpreneur 4 Desa	Laporan	1	1
			Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Laporan	1	1
			Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa			
			Laporan Terfasilitasinya pendampingan pemberdayaan masyarakat 245 orang	Laporan	4	4
			Laporan Fasilitasi kapasitas SDM dan Kelembagaan Kalurahan/Kelurahan 50 orang	Laporan	1	1
			Laporan Peningkatan kapasitas pengelola potensi Desa/Kalurahan dan Kelurahan 150 Orang	Laporan	1	1
			Laporan Kongres LPM	Laporan	1	1
2	Urusan Sekretariat Daerah	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Laporan	1	1
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks	88.3	91.93
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Dokumen	14	14
			Jumlah Dokumen penatausahaan / pengujian verifikasi keuangan skpd			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	12	12
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	Laporan	14	14
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	6	6
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	5	5
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan	1	1
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Unit	4	4
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Laporan	1	1
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Unit	5	5

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Rumusan bahan pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat			
			Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Dokumen	4	4
			Implementasi Kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto	Lembaga	4	4
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kelurahan	6	6
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			
			Dokumen Implementasi gerakan gotong royong Segoro Amarto 6 Kelurahan	Dokumen	4	4
			Rumusan Kebijakan bidang Sosial	Dokumen	1	1
			Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang sosial	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang sosial	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	1	1
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
			Dokumen Bantuan Kelembagaan LPMK pada Lokasi TMMD	Dokumen	16	16
			Dokumen Hibah TP-PKK	Dokumen	1	1
			Dokumen Hibah DPD-LPM:	Dokumen	1	1
			Dokumen Pelatihan BUMDes	Dokumen	1	1
			Dokumen Evaluasi Posyandu:	Dokumen	1	1

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Dokumen	1	1
			Dokumen Penyusunan Juknis Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Dokumen	1	1
			Dokumen Koordinasi & Sinkronisasi Bidang Keluarga Berencana-Keluarga Sejahtera	Dokumen	1	1
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rumusan Kebijakan Keluarga Berencana-Keluarga Sejahtera	Dokumen	1	1
			Dokumen Hasil Kajian Rumusan Kebijakan Bidang Keluarga Berencana-Keluarga Sejahtera	Dokumen	1	1
			Dokumen Koordinasi & Sinkronisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:	Dokumen	1	1
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	1	1
			Dokumen Hasil Kajian Rumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	1	1
			Dokumen Koordinasi & Sinkronisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rumusan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1
			Dokumen Hasil Kajian Rumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat:	Dokumen	1	1

8) *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana*

a) *Kondisi Umum*

Angka fertilitas atau *Total Fertility Rate* di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin rendah dari tahun sebelumnya. Dataku Bappeda DIY menyebutkan bahwa nilai TFR DIY tahun 2023 adalah 1,81. Terus turunnya angka fertilitas ini mempengaruhi komposisi penduduk DIY. Berdasarkan data BPS proyeksi penduduk periode 2010-2035, penduduk yang belum

produktif semakin menurun jumlahnya dari tahun ketahun. Pada tahun 2010 jumlahnya tercatat sekitar 22,1% dari total keseluruhan penduduk dan diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 18,6% pada tahun 2035. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang pada 2010 tercatat sekitar 68,6% akan menurun perlahan pada kisaran 67,4 di tahun 2035 mendatang. Penurunan ini akan memberikan dampak terhadap beban ketergantungan yang semakin meningkat di tahun-tahun mendatang.

DIY juga merupakan salah satu daerah dengan angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Tahun 2022 Pengadilan Agama Yogyakarta mencatat sebanyak 597 dispensasi perkawinan. Banyak faktor yang disinyalir menjadi penyebabnya, diantaranya faktor ekonomi, konstruksi sosial budaya yang berkembang di masyarakat, kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD) akibat pergaulan bebas dan seks pra nikah dan kurangnya pemahaman di bidang Kesehatan serta kurangnya pemahaman mengenai peraturan pemerintah dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan internet dan sosial media yang tidak sehat memiliki andil dalam peningkatan pergaulan bebas di kalangan remaja. Pernikahan usia anak ini kemudian akan bisa berdampak pada kehidupan rumah tangga yang tidak sehat dan berakhir dengan fenomena sosial baru yaitu perceraian dini karena kurangnya kematangan ekonomi fisik dan mental dalam berumah tangga. Perceraian dini ini semakin meningkatkan kasus perceraian di DIY yang sudah tinggi juga dampak dari masa pandemi Covid-19 yang banyak berpengaruh pada kehidupan ekonomi masyarakat. Gambaran kinerja Pemda DIY urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditampilkan di bawah ini.

Tabel 3.91. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Jumlah Lembaga Layanan Puspaga di Provinsi dan kab/kota	lembaga	n/a	3	3	100

Sumber: DP3AP2 DIY, 2024

Urusan pengendalian penduduk dalam RPD 2023-2026 memiliki satu sasaran utama yaitu meningkatnya kualitas keluarga yang dipotret dengan indikator “Jumlah lembaga layanan Puspaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Tugas selanjutnya adalah mengadvokasi Kabupaten/Kota agar seluruh Kabupaten/Kota di DIY memiliki minimal satu lembaga Puspaga.

Dalam hal sarana pelayanan KB di DIY, upaya memperluas jangkauan pelayanan dan mendekatkan tempat pelayanan medis KB kepada akseptor dilaksanakan di Rumah Sakit. Sedangkan, pelayanan non medis dilaksanakan melalui Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.92. Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2020 – 2023

No	Klinik KB	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	PKBRS	50	45	51	65
2	Pemerintah	149	147	150	148
3	Swasta	193	221	199	192
4	PPKBD	438	438	442	437
5	Sub PPKBD	5.361	5.358	5.337	5.339

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Sarana pelayanan KB ini siap melayani 345.409 akseptor KB di DIY untuk menekan angka *unmet need* di DIY yang sempat naik cukup tinggi di tahun 2022. Keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Kesejahteraan keluarga tidak

hanya menyangkut kemakmuran, melainkan juga menyangkut ketentraman spiritual dan keharmonisan keluarga. Selain Keluarga Sejahtera ada juga program Bina Keluarga, yang terdiri Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) agar keluarga mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang diperlukan dalam rangka membina tumbuh kembang balita, mendidik anak remaja yang benar, serta upaya-upaya mengembalikan peran keluarga dalam perawatan orang tua.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Meningkatnya rasio ketergantungan (*dependency ratio* atau DR)

DIY merupakan provinsi di Indonesia yang paling tinggi nilai ketergantungannya, berdasarkan data BPS DIY, nilai *dependency ratio* di DIY tahun 2022 adalah 44,42%. Tingginya *dependency ratio* dapat menjadi faktor penghambat pembangunan, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah tidak produktif, tanggungan penduduk yang tinggi akan mempersulit memobilisasi dana masyarakat dan anggaran pemerintah untuk investasi lebih produktif. Rasio ketergantungan penduduk yang tinggi juga akan mempersulit penghematan bahan makanan dan bahan baku lainnya yang akan berdampak pada menurunnya angka harapan hidup penduduk.

- (b) Permasalahan keluarga yang dominan terjadi adalah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Dataku Bappeda DIY menyebutkan pada tahun 2023 angka perceraian di DIY sebesar 5.638 kasus dan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 472 kasus. Permasalahan keluarga ini jika tidak disikapi dengan bijak akan berdampak buruk pada psikis anggota keluarga dan membuat mereka berperilaku buruk di masyarakat, hal ini dapat menimbulkan permasalahan sosial baru seperti kejahatan jalanan dan kriminalitas lain.

(2) Solusi

- (a) Kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjalankan program Keluarga Berencana (KB) untuk mencegah dan menurunkan angka kelahiran. Angka DR akan menurun jika angka kelahiran semakin kecil dan angka kematian tinggi. Angka kelahiran yang tinggi menyebabkan semakin besar penduduk di usia 0-14 tahun, sehingga beban yang harus ditanggung usia produktif juga semakin besar begitu pun sebaliknya. Selain itu, Pemda DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sehingga diharapkan lansia di DIY lebih berdaya.
- (b) Pendampingan permasalahan anak dan keluarga melalui Telekonsultasi Sahabat Anak dan Keluarga (TeSAGa), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan SAPA 129. Mendorong pembentukan UPT PPA dan PUSPAGA di seluruh kabupaten/kota di DIY.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 3 Program dan 8 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.633.114.790,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.568.447.750,00 atau 96%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya, rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.93. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	doku- men	2	2
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perang- kat Daerah	34	34
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Doku- men	1	1
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Lembaga	3	3

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	10	10
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	2	2
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			CWR (<i>Child Women Rate</i>). jumlah		250	237
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	1	1
			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat			
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat			
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i>	%	63.17	57.1
			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja			
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Dokumen	1	1
			Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	5	5
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	%	0.33	0.33
			Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1
			Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana			
			Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Orang	10	10
			Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)			
			Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Organisasi	15	15

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan			
			Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Organisasi	15	15

9) *Urusan Perhubungan*

a) *Kondisi Umum*

Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan atau barang baik dalam suatu wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan mobilitas tersebut harus dapat diwujudkan dalam suatu penyelenggaraan layanan transportasi yang aman, nyaman, mudah, murah, selamat dan berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, guna mendukung prioritas Gubernur DIY Tahun 2023 – 2026 yang meliputi tiga hal besar yaitu penanganan kawasan selatan DIY, pemanfaatan teknologi informasi serta budaya sebagai *mainstreaming* dalam pembangunan di DIY.

Sesuai dengan dokumen RPD DIY 2023 - 2026 arah kebijakan Urusan Perhubungan mendukung tujuan Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY. Tujuan tersebut memiliki 2 indikator sasaran yakni Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum dan Terwujudnya

Struktur Ruang Untuk Jaringan Transportasi. Kedua indikator tersebut mencerminkan fokus utama dalam penataan transportasi di wilayah DIY, antara lain: Peningkatan Pelayanan Angkutan, Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Peningkatan Keselamatan Transportasi, Perwujudan Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor, Penggunaan Angkutan Ramah Lingkungan serta Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran.

Pada tahun 2023, target dan realisasi kinerja Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.94. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2023-2026 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	%	n/a	42,21	46,16	109,36
Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di Koridor 2	%	n/a	27,88	38,39	137,70

Sumber: Dishub DIY, 2024

Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja sasaran pertama yakni Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum telah melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 42,21% dengan realisasi capaian yakni sebesar 46,16% atau dengan persentase 109,36%.

Pada capaian indikator kinerja sasaran kedua yakni Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di Koridor 2 juga telah melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 27,88% dengan realisasi capaian yakni sebesar 38,39% atau dengan persentase 137,70%.

Persentase Capaian Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum pada tahun 2023 diperoleh dari hasil Rerata Intervensi Perwujudan Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, dimana Rerata Intervensi tersebut diperoleh dari rerata capaian 10 indikator kinerja program sebagai berikut.

(1) Persentase Jumlah Trayek Layanan AKDP yang beroperasi.

Dari target sebesar 42,86%, realisasi capaian sebesar 42,86%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Jumlah Trayek Layanan AKDP yang beroperasi dalam waktu 4 tahun dibagi Jumlah Target Trayek Layanan AKDP Optimal.

(2) Persentase Kualitas Layanan (SPM) Trans Jogja.

Dari target sebesar 82,00%, realisasi capaian sebesar 94,20%. Realisasi tersebut melampaui target dikarenakan capaian nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trans Jogja Tahun 2022 lebih besar dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trans Jogja berdasarkan variabel- variabel yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

(3) Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi

Dari target sebesar 45,52%, realisasi capaian sebesar 45,52%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Jumlah Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan dibagi Jumlah Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan ditambah Persentase Mempertahankan Fungsi Fasilitas Perlengkapan Jalan. Pada tahun 2023 realisasi penyediaan fasilitas perlengkapan jalan sebagai berikut:

- (a) Realisasi penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Listrik sebesar 27,50%
- (b) Realisasi penyediaan APJ Surya sebesar 10,25%
- (c) Realisasi penyediaan *Warning Light* sebesar 32,45%
- (d) Realisasi penyediaan Rambu Lalu Lintas sebesar 76,19%
- (e) Realisasi penyediaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPI) sebesar 60,39%
- (f) Realisasi penyediaan Cermin Tikungan sebesar 58,82%
- (g) Realisasi penyediaan *Guardrail* sebesar 29,61%
- (h) Realisasi penyediaan *Delinator* sebesar 47,44%
- (i) Realisasi Persentase mempertahankan Fungsi Fasilitas Perlengkapan Jalan sebesar 67,05%. Realisasi tersebut berupa penyediaan suku cadang fasilitas keselamatan jalan, penyediaan petugas teknis serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan.

(4) Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS (*Intelligent Transportation System*).

Dari target sebesar 24,71%, realisasi capaian sebesar 25,10%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta

indikator Persentase Tahapan Penerapan Teknologi Berbasis ITS. Pada tahun 2023 realisasi tahapan Penerapan Teknologi Berbasis ITS sebagai berikut:

- (a) Ketersediaan operator *Area Traffic Control System* (ATCS) terealisasi 100% (16 personel tersedia dari kebutuhan total 16 personel);
 - (b) Telah dilaksanakan pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) ATCS sebanyak 6 dari target 32 unit APILL ATCS yang dipelihara, realisasi tersebut sebesar 18,75%;
 - (c) Telah dilaksanakan pemeliharaan *software E-traffic* (realisasi 1 (satu) *software*, realisasi tersebut sebesar 50%;
 - (d) Telah dilaksanakan pemasangan sistem AI (*Artificial Intelligence*) di simpang UPN, realisasi sebesar 3,13%);
 - (e) Telah dilaksanakan pemenuhan Suku Cadang APILL ATCS sebanyak 160 unit, realisasi tersebut sebesar 28,93%.
- (5) Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B.

Dari target sebesar 0,78%, realisasi capaian sebesar 9,16%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B Jombor ditambah Terminal Tipe B Wates. Pada tahun 2023 capaian jumlah penumpang yang terlayani di Terminal Tipe B Jombor sebanyak 9.716 penumpang per hari. Sedangkan capaian jumlah penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B Wates sebanyak 629 penumpang per hari.

Meningkatnya jumlah penumpang karena DIY menjadi salah satu tujuan wisata primadona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu juga dipengaruhi oleh momentum libur lebaran, natal dan tahun baru.

(6) Persentase Pemenuhan Layanan Kendaraan Yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP).

Dari target sebesar 72,39%, realisasi capaian sebesar 75,13%. Realisasi tersebut melampaui target dikarenakan capaian kendaraan yang melakukan aktifitas parkir di lokasi TKP mengalami peningkatan. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Tahapan Pemenuhan Layanan Kendaraan yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP) di *Park and Ride* Bandara Adi Sutjipto, TKP Beskalan serta *Park and Ride* Gamping.

(7) Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan

Dari target sebesar 50,00%, realisasi capaian sebesar 50,00%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Tahapan Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan. Enam kawasan tersebut meliputi 5 kawasan di sekitar lokasi pintu *exit* tol yakni *exit* tol Purwomartani, *exit* tol Maguwo, *exit* tol Trihanggo, *exit* tol Gamping, *exit* tol Sentolo serta 1 kawasan Patuk-Terong.

(8) Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran per-7.000 Kendaraan Terperiksa

Dari target sebesar 1,00%, realisasi capaian sebesar 16,82%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggar Setiap

Tahun Pada Angkutan Barang dan Angkutan Umum. Pada tahun 2023 telah diperiksa kendaraan angkutan barang dan angkutan umum sebanyak 7.012 kendaraan dari target 7.000 kendaraan diperiksa dalam satu tahun.

(9) Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan.

Dari target sebesar 2,85%, realisasi capaian sebesar 2,85%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Tahapan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan. Pada tahun 2023 realisasi tahapan penanganan daerah rawan kecelakaan adalah sebagai berikut:

- (a) Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dengan porsi target 2% telah tercapai sebesar 2%;
- (b) Penegakan Hukum LLAJ dengan porsi target 2,5% telah tercapai sebesar 2,5%.
- (c) Edukasi dan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas dengan porsi target 2,5% telah tercapai sebesar 2,5%. Edukasi dan Kampanye tersebut dilakukan di 10 lokasi DRK (Berdasarkan Studi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi Tahun 2021) yang meliputi:
 - Jalan Yogyakarta – Barongan;
 - Jalan Bantul - Srandakan Segmen 1;
 - Jalan Bantul - Srandakan Segmen 2;
 - Jalan Bantul - Srandakan Segmen 3;
 - Jalan Yogyakarta - Bakulan Segmen 1;
 - Jalan Palbapang – Samas;
 - Jalan Bantul - Srandakan Segmen 4;
 - Jalan Yogyakarta – Barongan;
 - Jalan Yogyakarta – Kebonagung;
 - Jalan Yogyakarta - Bakulan Segmen 2

(d) Studi Evaluasi Keselamatan Jalan di DIY dengan porsi target 7,25% telah tercapai sebesar 7,25%. Studi tersebut sebanyak 1 dokumen yang rutin dilakukan setiap tahun guna mengevaluasi keselamatan jalan di DIY serta mengaudit lokasi Daerah Rawan Kecelakaan. Pada tahun 2023 studi evaluasi tersebut tertuang di dalam Dokumen Rencana Aksi Keselamatan LLAJ DIY.

(10) Persentase Capaian Pengelolaan Angkutan Perkeretaapian di DIY.

Dari target sebesar 100%, realisasi capaian sebesar 100%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Angkutan Perkeretaapian.

Persentase Capaian Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di Koridor 2 pada tahun 2023 diperoleh dari hasil Rerata Intervensi Perwujudan Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di Koridor 2 (Kawasan Sumbu Filosofi). Rerata intervensi tersebut diperoleh dari rerata capaian 4 indikator kinerja program sebagai berikut:

(1) Persentase terwujudnya angkutan umum bahan bakar non fosil (Kendaraan Tidak Bermotor dan Bus).

Dari target sebesar 12,50%, realisasi capaian sebesar 12,50%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata Dari Persentase Tahapan Penyediaan Bus Listrik ditambah Persentase Tahapan Penyediaan Becak Bertenaga Alternatif.

(2) Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Pada tahun 2023 belum terdapat target penyediaan fasilitas perlengkapan jalan yang mendukung

perwujudan Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang meliputi penyediaan Marka Jalan, *Pelican Crossing*, serta Rambu Lalu Lintas.

(3) Persentase Kendaraan yang Terlayani di Tempat Khusus Parkir per Hari

Dari target sebesar 11,52%, realisasi capaian sebesar 41,08%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Tahapan Pemenuhan Layanan Kendaraan Yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Ketandan, TKP Beskalan serta TKP Abu Bakar Ali.

(4) Persentase Pengendalian dan Pengawasan

Dari target sebesar 100%, realisasi capaian sebesar 100%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Persentase Pengendalian dan Pengawasan di Kawasan Sumbu Filosofi. Pada tahun 2023 realisasi capaian tersebut telah mencapai 100%. Realisasi capaian tersebut berasal dari tersedianya petugas Jogo Margo yang bertugas melakukan pengendalian dan Pengawasan di Kawasan Sumbu Filosofi secara rutin. Kebutuhan petugas Jogo Margo sebanyak 72 orang telah terpenuhi sebanyak 72 orang pada tahun 2023.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Semakin meningkatnya kepemilikan serta penggunaan kendaraan pribadi berdampak pada peningkatan kepadatan lalu lintas serta peningkatan emisi kendaraan bermotor khususnya di kawasan strategis.

- (b) Kecenderungan kejadian kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia karena masih banyak yang belum sadar akan pentingnya keselamatan lalu lintas.
- (c) Masih terdapat pelanggaran oleh operator Trans Jogja terhadap SOP dan SPM penyelenggaraan Trans Jogja yang berakibat pemberlakuan denda/sanksi.
- (d) Beberapa kondisi sarana penunjang Terminal yang belum lengkap, sesuai dengan Permenhub No 40 tahun 2015 tentang standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan dan PM 24 Tahun 2021 Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sehingga belum terpenuhinya standar operasional.
- (e) Adanya potensi gesekan sosial khususnya dalam upaya penertiban parkir liar serta aktivitas becak motor di kawasan strategis. Serta masih belum optimalnya penyebaran informasi lokasi parkir yang tersedia di kawasan sumbu filosofi.
- (f) Dinas perhubungan tidak memiliki kewenangan penindakan (tilang) sehingga pengendalian dan pengawasan masih bersifat persuasif.
- (g) Banyak terjadi tindak kejahatan seperti pencurian, perusakan, serta vandalisme pada aset fasilitas keselamatan jalan yang telah dipasang.

(2) Solusi

- (a) Meningkatkan minat masyarakat untuk berpindah menggunakan layanan angkutan umum perkotaan Trans Jogja melalui beberapa terobosan seperti melakukan perpanjangan layanan rute Trans Jogja jalur 6A, 6B, 10 serta ekstensi jalur 15 ke Palbapang Bantul. Meningkatkan kemudahan layanan dengan

menyediakan sistem pembayaran melalui kartu KMT (Kartu Multi Trip), dimana kartu tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang terintegrasi antara moda kereta dan Trans Jogja. Menerapkan tarif khusus bagi pelajar, mahasiswa, lansia serta penyandang disabilitas sebesar Rp 1 (satu rupiah).

- (b) Meningkatkan intensitas sosialisasi serta kampanye keselamatan lalu lintas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar lokasi Daerah Rawan Kecelakaan.
- (c) Menerapkan pola yang sistematis dari verifikator subsidi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Trans Jogja dalam melakukan Pencermatan terhadap nilai tagihan BOK dengan bukti fisik serta pemberian denda kepada operator terhadap pelanggaran SPM Trans Jogja sehingga dapat meningkatkan nilai efisiensi pemanfaatan BOK Trans Jogja.
- (d) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung SPM baik yang berada di Terminal Tipe B maupun di lokasi Tempat Khusus Parkir (TKP) serta memberikan kemudahan akses dalam memperoleh tiket bagi Penumpang.
- (e) Meningkatkan kolaborasi, sinergitas antar pemangku kepentingan serta penyediaan infrastruktur pendukung khususnya dalam penyelenggaraan dan penyediaan becak bertenaga alternatif kayuh serta layanan bus listrik di kawasan strategis guna meningkatkan minat bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum ramah lingkungan serta kendaraan tidak bermotor. Selain itu, perlu pula meningkatkan intensitas sosialisasi melalui media sosial guna meningkatkan antusias

masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya di Tempat Khusus Parkir (TKP) yang telah disediakan.

- (f) Melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pengendalian dan pengawasan ketertiban serta manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti dari unsur Kepolisian, Satpol PP, serta TNI terutama di kawasan strategis seperti kawasan sumbu filosofi.
- (g) Melakukan sosialisasi pengamanan aset fasilitas keselamatan jalan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar lokasi rawan pencurian, kerusakan dan vandalisme.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Pada tahun 2023 Urusan Perhubungan dilaksanakan melalui 4 Program dan 24 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp118.586.846.271,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp107.834.901.456,00 atau 91,00%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya, rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.95. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			
			Persentase terwujudnya angkutan umum bahan bakar non fosil (KTB dan Bus)	%	12.5	12.5
			Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	%	0	0
			Persentase Kendaraan yang Terlayani di tempat khusus parkir per hari	%	11.52	41.08
			Persentase Pengendalian dan Pengawasan	%	100	100

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen	23	23
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu			
			Perwujudan Kawasan Ramah Pejalan Kaki	Orang	72	72
			Penyediaan tempat khusus parkir	Paket	7	7
			Pengaturan moda transportasi tradisional	Paket	6	6
			Uji Coba Pelaksanaan Contra Flow Trans Jogja	Paket	2	2
			Studi Dampak Exit Toll Terhadap Kawasan Strategis	Dokumen	1	1
			Kajian Perencanaan dan Pengelolaan Bus Listrik dan Prasarana Pendukungnya di Kawasan Strategis	Dokumen	1	1
			Publikasi Penataan Transportasi di Kawasan Strategis	Paket	1	1
			Pengadaan dan Pemasangan PTIS (Public Transport Information Systems)	Lokasi	2	2
			Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Kali	11	11
			Sosialisasi Penggunaan Angkutan Umum	Kali	8	8
			Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kali	6	6
			Sosialisasi Pengamanan Aset Perlengkapan Jalan	Kali	8	8
			Sosialisasi Pemanfaatan Tempat Khusus Parkir	Kali	3	3
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase Jumlah Trayek Layanan AKDP yang Beroperasi	%	42.86	42.86
			Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja	%	94.2	94.2
			Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi	%	45.52	45.52

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS	%	24.71	25.1
			Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B	%	0.78	9.16
			Persentase Pemenuhan Layanan Kendaraan Yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP)	%	72.39	75.13
			Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan	%	50	50
			Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran per-7000 kendaraan Terperiksa	%	1	16.82
			Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	%	2.85	2.85
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Doku- men	7	7
			Kampanye Keselamatan LLAJ	Kali	27	27
			Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kali	15	15
			Podcast Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kali	4	4
			Pengarusutamaan Penggunaan Angkutan Umum	Kali	15	15
			Sosialisasi Perencanaan Urusan Perhubungan	Kali	5	5
			Sosialisasi Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Pilar ke 3	Kali	3	3
			Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan DIY	Doku- men	1	1
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	110	110
			APJ Tenaga Listrik	Unit	99	99
			APJ Tenaga Surya	Unit	2	2
			Warning Light	Unit	2	2
			Cermin Tikungan	Unit	7	7
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	64	64
			Suku Cadang APJ Listrik	Unit	200	200
			Suku Cadang APJ Tenaga Surya	Unit	245	245
			Suku Cadang Warning Light dan Pelican Crossing	Unit	42	42
			Ketersediaan teknisi	Orang	6	6
			Perlengkapan Jalan			
			Pengadaan Suku Cadang APILL	Unit	191	191
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	164	164
			Ketersediaan Operator ATCS	Orang	16	16
			Pemeliharaan APILL ATCS	Paket	1	1
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Lapor-an	4	4
			Pengendalian pada masa lebaran dan natal	Hari	10	10
			Penegakan hukum lalu lintas jalan	Kali	20	20
			Penegakan hukum angkutan jalan	Kendaraan	6600	7054
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	95	95
			Jasa Kebersihan Halte TransJogja	Bulan	12	12
			Pemeliharaan Halte TransJogja	Halte	113	113
			Appraisal Bus Trans Jogja Tahun 2024	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
3	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	DINAS PERHUBUNGAN	Penghitungan BOK Trans Jogja Tahun 2024	Doku- men	1	1
			Subsidi Operasional Trans Jogja (95 Bus)	Tahun	1	1
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Lapor-an	37	37
			Olah Data Penumpang TransJogja	Lapor-an	12	12
			Pemantauan dan Pengawasan CCTV TransJogja	Bulan	12	12
			Suku Cadang CCTV TransJogja	Jenis	4	4
			Quota jaringan CCTV TransJogja	Bulan	12	12
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			
			Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2	2
			Ketersediaan Fasilitas Utama dan Penunjang di Terminal yang Berfungsi dengan Baik	Paket	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
			Persentase Capaian Pengelolaan Angkutan Perkeretaapian di DIY	%	100	100
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	94.62	96.28
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 122	Bulan	12	12
			Gaji ASN dan Naban di Dishub DIY	Tahun	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	18
			Tersedianya ATK	Jenis	11	11

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Tersedianya bahan kertas dan Cover	Jenis	2	2
			Tersedianya bahan komputer (Cartridge dan keyboard)	Jenis	2	2
			Tersedianya bahan material (Bendera dan Umbul2)	Jenis	2	2
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor-an	79	79
			Rapat Koordinasi	OS	720	720
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	55	55
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36
			Tersedianya jasa komunikasi	Bulan	12	12
			Tersedianya jasa sumber daya listrik	Bulan	12	12
			Langganan akun zoom	Bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor-an	24	24
			Jasa kebersihan kantor induk	Orang	6	6
			Jasa keamanan kantor induk	Orang	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	54	54
			Terpeliharanya Kendaraan Roda 4	Unit	16	16
			Terpeliharanya Kendaraan Roda 2	Unit	10	10
			Genset	Unit	2	2
			Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	26	26
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya	Jenis	7	7
			Pemeliharaan Timbangan Portable Type PSD25 (Non Wireless)	Paket	1	1
			Pemeliharaan Timbangan Portable (AXLE LOAD TESTER) M6-A (Wireless)	Paket	1	1
			Pemeliharaan Alat Uji Emisi	Paket	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			Jasa pemeliharaan kantor induk	Tahun	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran)			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	13
			Ketersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	10	10
			Ketersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran)			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor-an	24	24
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi	Orang	720	720
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran)			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor-an	36	36
			Tersedianya Jaringan Telepon	Tahun	1	1
			Tersedianya Jasa Sumber Daya Air	Tahun	1	1
			Tersedianya Jasa Sumber Daya Listrik	Tahun	1	1
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran)			

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	14	14
			Ketersediannya Perlengkapan Kantor	Jenis	2	2
			Ketersediannya Peralatan Kantor	Jenis	2	2
			Ketersediannya Jaringan LAN dan Internet	Paket	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran)			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor-an	24	24
			Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan	Bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	Bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran)			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6
			Pemeliharaan Genset	Tahun	1	1
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Roda 4	Unit	3	3
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	3	3
			Pendukung Pemeliharaan kendaraan dinas	Tahun	1	1
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua	Unit	3	3
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat	Unit	3	3
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran)			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2
			Terbayarnya Sewa Lahan Tempat Kerja	Tahun	1	1

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Tersedianya kebutuhan bangunan gedung tempat kerja	Paket	1	1

10) *Urusan Komunikasi dan Informatika*

a) *Kondisi Umum*

Sejalan dengan era keterbukaan informasi dimana masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui segala sesuatu yang dilakukan Badan Publik. Maka peran Badan Publik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, wajib untuk mengumumkan dan menyediakan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan. Mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan tidak hanya secara konvensional, melainkan juga memerlukan keterlibatan teknologi informasi untuk memperluas sebarannya. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2018, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemda DIY mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik di lingkup Pemda DIY. Berkenaan dengan ketugasan pelayanan informasi tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya WhatsApp, Instagram (@kominfodiy), Twitter (@kominfodiy), Youtube (Kominfo DIY), dan Facebook *fanspage* (Kominfo DIY), selain itu publik juga dapat mengakses portal ppid.jogjaprovo.go.id.

Pemda DIY juga mengelola layanan informasi berbasis mobile yakni Jogja Istimewa, yang didalamnya berisi informasi tentang Jogja Budaya, Jogja Wisata, Jogja Layanan Publik, Jogja Belajar, Jogja Kuliner, Jogja Info, Jogja Transportasi, Jogja Event, Jogja Galeri, Jogja 360, Jogja *Doeloe Augmented Reality* (AR), dan Jogja Streaming. 'Jogja Istimewa Apps' dapat diakses melalui telepon pintar (smart phone) dengan penambahan fitur pembayaran tiket elektronik (E-ticket) pada Museum Sonobudoyo sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi pengguna. Demikian juga untuk dapat mengetahui kondisi secara *real time* di berbagai obyek wisata telah dibangun kamera pengawas yang dapat diakses melalui mam.jogjaprov.go.id maupun melalui layanan aplikasi 'Jogja Istimewa'.

Bagi masyarakat yang belum tersentuh teknologi informasi, penyebaran informasi juga dilakukan melalui seni pertunjukan rakyat. Selain itu terkait hasil pembangunan dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemda diinformasikan melalui portal resmi Pemda DIY (jogjaprov.go.id). Portal jogjaprov.go.id menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan, serta berita terkait kegiatan Pemda DIY.

Upaya untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan dengan meta indikator Skor Monev Keterbukaan Informasi Publik. Monev keterbukaan informasi bagi Badan Publik adalah suatu tools yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengetahui sejauh mana Badan Publik melakukan pengelolaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 17 /KEP/KIP/XII/2023 bahwa penilaian monev Keterbukaan informasi Badan Publik PPID

Pemda DIY berhasil mempertahankan predikat informatif dengan skor nilai 95,35.

Untuk pengelolaan data, Pemda DIY sudah mempunyai berbagai macam aplikasi/sistem informasi sebagai sarana dalam proses pengambilan kebijakan, namun semuanya masih terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, sehingga diperlukan suatu proses integrasi dari berbagai aplikasi tersebut agar memudahkan dalam penyajian datanya. Pada akhirnya dibuat suatu sistem informasi eksekutif dalam bentuk IDMC yang dirancang untuk dapat membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan pembangunan secara cepat yang berbasis data yang akurat.

Pada tahun 2023 diintegrasikan urusan ke dalam Sistem Informasi Eksekutif melalui *Integrated Development Management Center* (IDMC) (idmc.jogjaprovo.go.id), antara lain Urusan Kominfo, Urusan Perhubungan, Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Urusan tata ruang, Urusan Pertanahan, Urusan Sosial, Urusan Kesehatan, Urusan Pangan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Pariwisata, Urusan Perkebunan dan Urusan Pendidikan. Didalam IDMC ini juga mengintegrasikan aplikasi layanan e-Lapor yang merupakan aplikasi pengaduan pelayanan publik dan informasi surveillance yang terkoneksi ke 26 titik CCTV yang ada di wilayah DIY serta adanya sosial media *analytic*.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemda DIY telah menerapkan SPBE dengan mengeluarkan regulasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2022

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan beberapa regulasi yang menjadi acuan penerapannya, seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan TIK, Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK, Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah *Jogja Smart Province* Tahun 2019-2023, Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut menjadi pijakan dasar dalam melaksanakan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan layanan kepada publik maupun kepada internal pemerintah daerah secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan. Upaya peningkatan tingkat kematangan masing-masing indikator penilaian SPBE terus dilakukan oleh Pemda DIY. Hal tersebut dapat dilihat dengan hasil penilaian evaluasi eksternal oleh Kementerian PANRB yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan oleh Kemenpan RB. Pada tahun 2018 Pemda DIY mendapatkan nilai 3,33, pada tahun 2019 mendapatkan nilai 3,43 dan tahun 2021 menempatkan Pemda DIY pada peringkat 2 level Pemerintahan Provinsi dengan nilai 3,49 atau berpredikat Baik dan tahun 2023 mendapatkan nilai 4,22 atau berpredikat Memuaskan. Hasil Evaluasi SPBE dari tahun ke tahun semakin naik dengan perbaikan pemenuhan nilai indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Hasil dari evaluasi SPBE dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi

pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Tahun 2023 telah disusun Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan TIK untuk akselerator pembangunan akan terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai lalu lintas data tersedia dengan baik. Aksesibilitas Jaringan Internet untuk Kemanfaatan dan Keberdayaan Masyarakat Jogja (Aji Mandaya), bertujuan menyediakan akses internet untuk seluruh lapisan masyarakat. Memastikan teknologi informasi dapat bermanfaat bagi sosial dan ekonomi oleh semua masyarakat. Untuk lebih memudahkan dalam komunikasi berjalan dengan baik dan lancar difasilitasi dengan aplikasi server video konferensi dan 15 user aplikasi client video konferensi yang dapat digunakan secara bersamaan.

Selain itu untuk lebih memperluas akses masyarakat terhadap informasi melalui penggunaan jaringan internet, sampai tahun 2023 telah membangun 283 titik jaringan. Untuk mendukung pendidikan di masa pandemi, seluruh sekolah SMA/SMK Negeri se DIY telah terkoneksi dengan jaringan yang dimiliki oleh Pemda DIY. Selain itu, untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi melalui penggunaan jaringan internet, telah disediakan 270 titik WiFi gratis diantaranya di kawasan Malioboro sentra industri, kelompok UMKM, pasar, kampung/desa wisata dan tempat budaya sehingga diharapkan nantinya fasilitas tersebut mempermudah akses informasi dalam melakukan *digital marketing* sehingga juga dapat meningkatkan penjualan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Selain itu akses jaringan internet dan wifi publik dapat mendukung layanan Sistem Informasi Kalurahan sehingga pelayanan pemerintah lebih cepat, efektif dan efisien.

Pemda DIY pada tahun 2023 membangun layanan khusus yang menangani kebutuhan TIK OPD secara terpusat yaitu Pusat layanan transformasi digital. Dalam hal ini dapat berupa tanya jawab mengenai troubleshoot dan problem-solving permasalahan TIK maupun konsultasi mengenai investasi TIK. Diskominfo DIY juga belum memiliki entitas yang *dedicated* yang turun langsung melakukan pembuatan dan perbaikan aplikasi milik OPD, sehingga selama ini dalam pembuatan dan pengelolaan aplikasi masih sangat bergantung pada pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, Diskominfo DIY perlu membuat pusat layanan transformasi digital bagi OPD dan Masyarakat DIY. Adapun lingkup dalam pekerjaan ini meliputi rehab ruangan dan interior untuk pusat layanan transformasi digital serta belanja modal peralatan IT (PC, *video wall*, monitor, dll) sebagai sarana pendukung programmer di pusat layanan transformasi digital. Adanya Pusat layanan transformasi digital dapat membantu pemda DIY dalam mengatasi kendala/permasalahan digital yang dihadapi, baik dalam hal analisis dan konsultasi mengenai investasi TIK, pembuatan, *troubleshoot*, serta *problem solving* tentang aplikasi.

Pada tahun 2023 terdapat inovasi yang mendukung pelayanan PPID Pemda DIY, yaitu adanya layanan jaringan Aksesibilitas Jaringan Internet untuk Kemanfaatan dan Keberdayaan Masyarakat Jogja (Aji Mandaya) Layanan Bandwith Publik. Dengan adanya Aji Mandaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Aji Mandaya bertujuan menyediakan akses internet untuk seluruh lapisan masyarakat. Memastikan teknologi informasi bermanfaat bagi sosial dan ekonomi oleh semua masyarakat. Salah satunya pemanfaatan wifi publik dan wifi UMKM. Aji Mandaya tersebut dapat diakses melalui *Integrated*

Development Management Centre (IDMC) dengan alamat <https://idmc.jogjaprovo.go.id/>.

Tabel 3.96. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Skor Monev Keterbukaan Informasi Publik	skor	n/a	92	95,35	103,64
2	Indeks Kematangan SPBE Pemda DIY	indeks	n/a	3,54	4,94	139,55

Sumber: Diskominfo DIY, 2024

Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, Pemda DIY mendapatkan skor 95,35 pada *cluster informatif* atau peringkat ke-5 pada level Pemerintah Provinsi, sehingga sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan tercapai dan terlampaui targetnya.

Dalam hal penilaian indeks SPBE, hasil evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, indeks SPBE tahun 2023 melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemda DIY memperoleh indeks 4,22 dengan predikat “Memuaskan”. Pemda DIY berada pada ranking ke 2 level Pemerintah Daerah Provinsi. Dibandingkan dengan tahun 2022 hasil evaluasi indeks SPBE Pemda DIY yang dilakukan oleh Kementerian PANRB sebesar 3,02. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 nilai indeks Kematangan SPBE Pemda DIY yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB ada peningkatan sebesar 1,10.

b) Permasalahan dan Solusi**(1) Permasalahan**

- (a) Adanya perubahan syarat pemenuhan indikator penilaian SPBE;
- (b) Adanya perubahan jumlah tolok ukur penilaian SAQ pada keterbukaan informasi publik dari 40 menjadi 180 indikator;
- (c) Data/informasi BPJ belum dilakukan pendokumentasian dengan baik dalam setiap tahapan, sehingga terkendala dalam pengumpulan data PBJ;
- (d) Pengadaan PBJ terkait P3DN, barang teknologi informasi tersedia dipasaran banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga pembelian dari luar negeri, menjadikan indikator pada P3DN nilainya lebih sedikit.

(2) Solusi

- (a) Meningkatkan koordinasi dalam pendampingan penilaian SPBE untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi;
- (b) Meningkatkan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Tenaga Ahli bidang Komunikasi Publik agar memberikan arahan tentang peningkatan nilai monev keterbukaan informasi;
- (c) Meningkatkan pendokumentasian dalam setiap tahapan dengan menambahkan sharing folder dokumen sebagai media dalam pengumpulan dokumen;
- (d) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo terkait penyediaan barang teknologi informasi yang hanya dapat disediakan oleh luar negeri.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan alokasi Rp43.079.079.458,00. Anggaran bersumber dari APBD sebesar Rp14.143.108.971,00 untuk membiayai Urusan Komunikasi dan Informatika dengan 3 program dan 33 sub kegiatan. Anggaran bersumber pada dana keistimewaan sebesar Rp21.084.576.713,00 untuk membiayai 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp42.803.058.238,00 atau 99,36%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp276.021.220,00 atau 0,64% antara lain dari sisa pengadaan barang dan jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas dan efisiensi honor narasumber. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.97. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	92	94,76
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku Renstra	doku- men	1	1
			Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku ROPK	doku- men	1	1
			Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku Renja	doku- men	1	1
			Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku Perjanjian Kinerja	doku- men	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku DPA-OPD	dokumen	1	1
			Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku RKA-OPD	dokumen	1	1
			Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku DPPA-OPD	dokumen	1	1
			Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku RKAP-OPD	dokumen	1	1
			Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku LKJIP	dokumen	1	1
			Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku LKPJ	dokumen	1	1
			Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku LPPD	dokumen	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	tahun	1	1
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
			Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	tahun	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
			Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
			Laporan Keuangan Triwulanan	dokumen	4	4
			Laporan Keuangan bulanan	dokumen	12	12
			Laporan Prognosis	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Laporan Keuangan Semester	doku- men	2	2
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	3	3
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
			Tersedianya makan minum rapat	bulan	12	12
			Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis	1	1
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jenis	1	1
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Bukti pembayaran Jasa surat menyurat	bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Bukti pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Gedung kantor seluas 51.882m2 yang terpelihara kebersihannya	bulan	12	12
			Keamanan kantor yang terjaga dengan baik	bulan	12	12
			Mobilitas operasional perkantoran berjalan dengan baik	bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	unit	17	17
			Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	17	17
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	jenis	9	9
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu	Persen	84	87,4
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Doku- men	1	1
			Bimtek Pengelolaan Pengaduan	kali	2	2
			Diseminasi Konten Positif	kali	13	13
			Sosialisasi Kanal Pengaduan	kali	1	1
			Podcast Diseminasi Konten Positif	kali	3	3
			Rakor Pengelolaan E-Lapor DIY	kali	1	1
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Doku- men	1	1
			Literasi Digital Kepemiluan	kali	78	78
			Sosialisasi Regulasi Pemilu	kali	78	78
			Pelatihan Pembuatan Aplikasi Android	kali	4	4
			Pelatihan Pembuatan Konten	kali	4	4
			Bimtek PPID	kali	15	15
			Kelurahan/Kalurahan			
			Raker Uji Konsekuensi	kali	1	1
			Forum Komunikasi PPID Pemda DIY	kali	2	2
			Pengelolaan Media Sosial	bulan	5	5
			Pemeliharaan Website PPID	kali	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (HIBAH KPID)	Doku- men	1	1
			Pengawasan konten siaran (HIBAH KPID)	tahun	1	1
			Pembinaan Lembaga Penyiaran (HIBAH KPID)	tahun	1	1
			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Doku- men	1	1
			Penyelesaian Sengketa Informasi	kali	6	8
			Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	kali	1	1
			Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	kali	2	2
			Pemilihan Anggota KID DIY	kali	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Indeks Kematangan SPBE Pemda DIY pada domain Kebijakan	indeks	2,98	5
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	267	267
			Pemeliharaan dan Pemantauan Jaringan	unit	267	267
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Doku- men	1	1
			Sosialisasi SPBE	kali	2	2
			Forum SPBE se-DIY	kali	1	1
			Pendampingan Penilaian SPBE	kali	1	1

11) *Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

a) *Kondisi Umum*

Pemda DIY telah melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di DIY dengan skema pembinaan enam aspek yaitu sumber daya manusia, produksi, pemasaran,

kelembagaan, keuangan, dan pemasaran *online* (digitalisasi). Penguatan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM) diselaraskan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perkembangan koperasi di DIY, baik koperasi yang berbadan hukum provinsi maupun kabupaten/kota selama kurun waktu lima tahun, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.98. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Koperasi Aktif	1.722	1.758	1.717	1.698	1.734
2	Koperasi Pasif	196	180	271	310	352
3	Modal Sendiri (Rp Juta)	1.625.568	1.595.511	1.630.287	1.587.752	2.020.705
4	Modal Luar (Rp Juta)	2.512.343	2.188.554	2.372.549	3.132.602	3.363.762
5	Volume Usaha (Rp Juta)	4.325.218	4.141.871	4.272.359	4.404.185	4.867.928
6	Koperasi Primer	1.890	1.728	1.950	1.972	2.049
7	Koperasi Sekunder	28	30	28	36	37

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2024

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menyebutkan bahwa koperasi yang tidak melaksanakan RAT dua kali berturut-turut direncanakan akan dilakukan pembubaran. Koperasi yang tidak aktif adalah koperasi yang tidak melakukan RAT sebanyak 2 kali berturut-turut.

Pada tahun 2023 koperasi aktif mengalami peningkatan 2,12% bila dibandingkan dengan jumlah di tahun 2022. Hal ini disebabkan kondisi dunia usaha termasuk koperasi sudah kembali beroperasi seperti semula paska pandemi. Demikian juga dengan tingkat pendirian koperasi yang meningkat seiring dengan peningkatan modal sendiri, modal luar, dan volume usaha koperasi.

Selanjutnya, pada tahun 2023 koperasi pasif meningkat dengan rasio sebesar 13,55% dari tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika usaha simpan pinjam oleh koperasi. Namun demikian masih ditemukan beberapa kasus penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku karena beberapa oknum. Kasus ini awalnya ditemukan di tingkat nasional disusul dengan kasus-kasus di daerah. Hal ini melatarbelakangi terbitnya Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 tentang Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, yang terus diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 terbit Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Surat edaran pencabutan moratorium menjelaskan bahwa pengurusan izin Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi dapat dilakukan kembali secara mandiri oleh Pengurus/Pengelola Koperasi melalui OSS dengan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Tabel 3.99. Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2019-2023

No	Skala Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Usaha Mikro	143.385	188.033	311.540	324.745	324.408
2	Usaha Kecil	65.533	58.980	16.064	16.069	16.069
3	Usaha Menengah	39.581	30.665	2.110	2.110	2.109
	Jumlah	248.499	277.678	329.719	342.924	342.586

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2024

Data pada sektor UMKM sangat dinamis karena komitmen pelaku usaha sering dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan data usaha yang dinamis masih menjadi kelemahan pendataan UMKM. Pada tahun 2020-2022 terdapat pertumbuhan jumlah usaha mikro sebagai dampak

ikutan dari pandemi. Banyaknya pemutusan hubungan kerja karena operasional terhenti karena pandemi Covid-19 menyebabkan banyak angkatan kerja yang menganggur, sehingga beralih menjadi pelaku usaha. Penurunan jumlah UMKM pada tahun 2023 ini dipengaruhi oleh banyaknya usaha mikro yang tidak bertahan. Pemulihan pasca pandemi Covid-19 sudah berhasil dilalui sehingga kondisi perekonomian semakin stabil. Banyak instansi maupun perusahaan mulai melakukan rekrutmen untuk pemulihan operasional, sehingga banyak pelaku usaha mikro menghentikan usahanya karena diterima bekerja kembali di perusahaan.

Sedangkan untuk jumlah usaha menengah dan usaha kecil sulit bertambah. Hal ini disebabkan oleh aturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengklasifikasikan usaha kecil adalah yang nilai penjualan sebesar Rp 2 Miliar s.d. Rp 15 Miliar per tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa usaha kecil memiliki nilai penjualan Rp 300 Juta sd Rp 2,5 Miliar per tahun. Sehingga klasifikasi skala usaha juga mengalami penyesuaian termasuk dalam pendataan di Aplikasi *SiBakul* Jogja.

Pemda DIY melakukan pendataan UMKM sejak tahun 2020 mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam peraturan tersebut terdapat 18 sektor usaha untuk pendataan UMKM. Saat ini aplikasi *SiBakul* Jogja masih dalam proses integrasi penyesuaian data sesuai dengan pembaharuan acuan pendataan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 47 Tahun

2022 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengubah klasifikasi data UMKM sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020. KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Tabel 3.100. Jumlah UMKM menurut Sektor Usaha Tahun 2019 - 2023

No	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perdagangan	40.834	48.157	53.941	n/a	n/a
2	Aneka Usaha	31.374	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Industri Pertanian	37.012	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Industri Non Pertanian	34.165	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Industri Pengolahan	n/a	177.720	214.398	250.385	114.694
6	Pertanian	n/a	31.352	1.593	1.641	4.011
7	Kelautan dan Perikanan	n/a	1.076	855	456	1.310
8	Kehutanan	n/a	25	14	14	14
9	Energi dan Sumber Daya Mineral	n/a	79	97	99	96
10	Transportasi	n/a	6.927	6.670	6.668	6.988
11	Komunikasi	n/a	85	116	120	115
12	Pariwisata	n/a	520	146	159	157
13	Jasa Kesehatan	n/a	141	206	210	205
14	Konstruksi	n/a	694	699	705	697
15	Real Estate, Usah Persewaan	n/a	529	872	871	1.528
16	Pendidikan	n/a	191	212	224	409
17	Ekonomi Kreatif	n/a	17.606	11.891	10.057	13.455
18	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	n/a	2.580	11.089	11.147	20.834
Jumlah		248.499	277.678	329.719	342.924	342.586

Sumber : Diskop dan UKM DIY, 2024

Kinerja dan Sasaran strategis Urusan Koperasi dan UKM tahun 2023 terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.101. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022*	2023**		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Kontribusi koperasi modern terhadap koperasi	%	n/a	3,5	3,75	107,14
2	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya	UMKM	n/a	1.150	2.006	174,43
3	Kontribusi jumlah wirausaha pemula terhadap jumlah usaha kecil	%	0,47	0,4	0,56	140

Sumber: Diskop dan UMK DIY, 2024

Indikator pertama yaitu Kontribusi koperasi modern terhadap koperasi dengan target 3,5% tercapai 3,75% atau dengan persentase capaian 107,14%. Ketercapaian ini didukung oleh kesadaran koperasi dan kemampuan finansial untuk menerapkan aspek koperasi modern, salah satunya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan operasional dan pengembangan pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Adapun 11 koperasi modern berbadan hukum provinsi DIY yaitu KSPPS BMT UMY, KSPPS Artha Amanah Sanden, Koperasi Konsumen Utama, KSPPS Dana Insani, Koperasi Istiqomah, Koperasi Pelita, Koperasi Gemah Ripah, Koperasi Marsudi Mulyo, KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri, Koperasi Produsen Wahana Mandiri Indonesia, dan KSPPS Giri Artha Syariah.

Indikator kedua adalah Jumlah UMKM yang berkembang usahanya dengan target 1.150 UMKM tercapai 2.006 UMKM atau dengan persentase capaian 174,43%. Ketercapaian ini didukung oleh antusiasme dan partisipasi pelaku UKM yang cukup meningkat di akhir tahun 2023 dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis CPPOB (sertifikasi MD), bantuan hukum bagi UMKM, sertifikasi halal, fasilitasi Informasi Nilai Gizi (ING) bagi UKM, fasilitasi pemasaran melalui *event* pameran, fasilitasi pemasaran melalui gerai UMKM, serta

fasilitasi lainnya yang diselenggarakan Pemda DIY untuk pelaku UMKM.

Indikator ketiga adalah Kontribusi jumlah wirausaha pemula terhadap jumlah usaha kecil dengan target 0,4% tercapai 0,56% atau dengan persentase capaian 140%. Ketercapaian ini didukung oleh antusiasme wirausaha pemula dalam mengakses fasilitasi dan dukungan yang telah disediakan oleh Pemda DIY serta kerja sama yang baik antar *stakeholder* untuk berkolaborasi dalam memberikan fasilitasi kepada wirausaha pemula. Dukungan fasilitasi dari Pemda DIY menjadikan wirausaha baru memiliki semangat dan optimisme dalam membuka maupun mengembangkan skala usaha dan diversifikasi produk.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Saat ini pelaku KUKM masih dalam kondisi pemulihan pasca pandemi, ada yang berhasil namun ada juga yang masih tertinggal karena masyarakat sedang dihadapkan dengan isu resesi global, sehingga penghematan konsumsi lebih ditekan dan dialihkan ke investasi sebagai tindakan preventif.
- (b) Inisiasi wirausaha baru sudah baik namun terkendala permodalan usaha karena *business proposal* yang kurang terukur atau tidak memiliki agunan.
- (c) Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kesadaran dalam mengurus legalitas, standardisasi, maupun sertifikasi usaha.

- (d) Koperasi simpan pinjam mengalami penurunan rasio likuiditas yang disebabkan oleh banyaknya anggota koperasi yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran.
- (e) Regenerasi dan restrukturisasi pengurus koperasi sulit dilaksanakan karena daya tarik generasi muda untuk mengelola koperasi masih rendah. Banyaknya aspek penilaian koperasi yang belum dipahami oleh SDM koperasi, menyebabkan apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menghambat proses penilaian koperasi.
- (f) Transformasi digital selalu dikaitkan dengan teknologi, namun yang paling utama dibenahi adalah *mindset* pelaku untuk mau beradaptasi, mau berubah, mau berinovasi untuk menyelaraskan dengan kondisi pasar.

(2) Solusi

- (a) Percepatan pemulihan koperasi dan UMKM dilaksanakan dengan kolaborasi antar instansi/lembaga baik dalam pembinaan maupun pendampingan Koperasi dan UMKM. Dengan memperkuat skema pembinaan enam aspek yaitu sumber daya manusia, produksi, pemasaran, kelembagaan, keuangan, dan pemasaran online (digitalisasi) melalui program pembinaan dan pendampingan.
- (b) Mengadakan sosialisasi kewirausahaan, pelatihan pengembangan bisnis, pendampingan usaha baru.

- (c) Memberikan fasilitasi pengurusan legalitas, standardisasi, sertifikasi UMKM untuk memperluas pasar, seperti pemberian sertifikat halal, MD dan PIRT.
- (d) Memberikan fasilitasi akses pembiayaan terhadap pelaku KUMKM sehingga diharapkan usahanya berjalan Kembali dengan lancar sehingga dapat Kembali mengangsur pinjamannya.
- (e) Memberikan sosialisasi tentang perkoperasian terhadap generasi muda melalui kegiatan-kegiatan yang diminati.
- (f) Pengembangan aplikasi Sibakul Jogja sebagai aplikasi tata kelola pembinaan UMKM melalui semua aspek pembinaan dan semua fasilitasi yang diberikan pada koperasi dan UMKM. Serta melakukan pengawasan pemanfaatan *platform marketplace* agar pelaku KUMKM tidak terjebak dalam kejahatan *cyber*.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Urusan Koperasi dan UKM dicapai melalui pelaksanaan 9 program dan 39 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran Reguler Rp18.245.993.687,00 dan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Rp150.361.180.102,00 total anggaran Rp168.607.173.789,00. Realisasi tahun 2023 Rp166.374.950.455,00 atau sebesar 98,68% dari total pagu, efisiensi sebesar Rp2.232.223.334,00 diantaranya adalah sisa lelang untuk pematangan lahan Rumah Produksi Bersama, Belanja tagihan listrik, pajak kendaraan dinas, sisa kontrak pemeliharaan atap, sisa pengadaan lahan, sisa tagihan air dan listrik Teras Malioboro 1. Adapun realisasi fisik telah mencapai 100%.

Tabel 3.102. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN UMUM	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Program 01-06	%	100	100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Renja 2024	Dokumen	1	1
			Renja Perubahan 2023	Dokumen	1	1
			Renstra 2022-2027	Dokumen	1	1
			ROPK	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
			RKA-Perubahan Tahun 2024	Dokumen	1	1
			RKA Tahun 2025	Dokumen	1	1
			DPA Tahun 2024	Dokumen	1	1
			DPPA Tahun 2025	Dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Konsep/Bahan LPPD	Dokumen	1	1
			Konsep/Bahan LKPJ	Dokumen	1	1
			Dokumen LKJip dengan nilai AKIP "82" (skor)	Dokumen	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	56	56
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD			
			Laporan Keuangan Bulanan	Laporan	12	12
			Laporan Keuangan Semester	Laporan	2	2
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4
			Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas	Paket	1	1
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Barang Cetak dan Penggandaan Dinas	paket	1	1
			Barang Cetak dan Penggandaan UPT	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
			Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 Bulan	Laporan	12	12
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Peralatan ruang layanan konsultasi pemasaran UMKM	Jenis	2	2
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	11
			Sarana ruang layanan UMKM	Jenis	8	8
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2
			Surat Masuk	Laporan	1	1
			Surat Keluar	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3
			Jasa Listrik, Telepon, Zoom selama 1 Tahun	Laporan	3	3
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3
			Jasa Keamanan, Kebersihan, dan Retribusi Sampah selama 1 Tahun	Laporan	3	3
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15
			Kendaraan Roda 4	Unit	7	7
			Kendaraan Roda 2	Unit	8	8
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8
			Pemeliharaan Mesin Ketik	Unit	4	4
			Pemeliharaan LCD Proyektor	Unit	2	2
			Pemeliharaan Jaringan Internet	Unit	5	5
			Pemeliharaan Komputer	Unit	4	4
			Pemeliharaan Laptop	Unit	5	5
			Pemeliharaan Printer	Buah	5	5
			Pemeliharaan Lift	Kqli	2	2
			Pemeliharaan Genset	Kali	2	2
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			Rehabilitasi ruang layanan usaha terpadu bagi UMKM	Jenis	3	3
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3
			Pemeliharaan AC, Sofa, dan Pompa Air	Unit	3	3

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	5	5
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat	Dokumen	3	3
			Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel			
			Jumlah Koperasi Yang Meme-nuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Unit Usaha	20	20
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Mengukur tingkat kesehatan Koperasi			
			Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	Koperasi	70	70
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	540	540
			Terlaksananya Diklat Sertifikasi Pengurus Koperasi Konvensional	Orang	90	90
			Terlaksananya Diklat Sertifikasi Pengurus Koperasi Syariah	Orang	90	90
			Terlaksananya Diklat Sertifikasi Social Media Marketing	Orang	90	90
			Terlaksananya Diklat Sertifikasi Pelayanan Prima (Excelent Service)	Orang	90	90
			Diklat Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi	Orang	30	30

No	Urusan Pemerintah- an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Terlaksananya Diklat Sertifikasi Pengawas Koperasi Konvensional	Orang	90	90
			Terlaksananya Diklat Sertifikasi Kasir (Ritel)	Orang	90	90
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM			
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM	Orang	450	450
			Pelatihan UMKM Pemasaran Ekspor dan Sertifikasi Kewirausahaan Global	Akun	4	4
			Diklat Manajemen Keuangan	Orang	30	30
			Diklat Manajemen Pemasaran	Orang	30	30
			Diklat Kompetensi Pendamping UKM	Orang	30	30
			Diklat Analisa Kepuasan Konsumen	Orang	30	30
			Diklat Kompetensi Customer Service	Orang	30	30
			Diklat Pengembangan Produk Bagi Pelaku Usaha Mikro	Orang	30	30
			Diklat Digitalisasi Keuangan	Orang	30	30
			Diklat Marketing Bagi Pelaku Usaha Mikro	Orang	30	30
			Diklat Kompetensi Sosial Media Marketing	Orang	30	30
			Pelatihan Digitalisasi Pemasaran 1	Orang	30	30
			Pelatihan Digitalisasi Pemasaran 2	Orang	30	30
			Pelatihan Uji Kompetensi Digitalisasi Pemasaran	Orang	30	30
			Diklat Prinsip Dasar Layanan	Orang	30	30
			Diklat Teknik Negosiasi	Orang	30	30
			Inkubasi Kewirausahaan	Orang	30	30
			Diklat Handling Complain dan Uji Kompetensi Pelayanan Pelanggan	Orang	30	30
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit usaha	3	3
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan			

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Pencipta-an Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	5	5
			Sosialisasi Akses Pembiayaan KUMKM	Kali	6	6
			Bimtek Akses Pembiayaan bagi UMKM menuju Bankable	Angkatan	5	5
			Pasar murah produk UMKM	Kali	10	10
			Bantuan biaya pengiriman bahan produksi bagi UMKM	pengiriman	15.000	15.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	550	550
			Bimtek CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik)	Unit usaha	550	550
			Sosialisasi Perijinan Usaha dan Sertifikasi Produk bagi KUMKM	Unit usaha	250	250
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA			
			URUSAN KEBUDAYAAN			
			Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya			
			Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek	1	1
			Pengadaan Tanah/Bangunan untuk penataan PKL Malioboro	kali	1	1
			Rehab Bangunan Eks Cirebon	unit	1	1
			Pengamanan dan Pemeliharaan ex Hotel Mutiara 1	Bulan	12	12
			Rehab Bangunan Eks Hotel Mutiara 1	Unit bangunan	1	1
			DED Pengembangan Teras Malioboro 1	Dokumen	1	1
			DED Perluasan Teras Malioboro 1 di Lahan Beskalan	Dokumen	1	1
			Pengadaan tanah pengembangan TM 2 (penataan PKL)	Kali	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			UKL UPL Perluasan TM 1di Lahan Beskalan	Paket	1	1
			Andalalin Perluasan TM 1di Lahan Beskalan	Paket	1	1
			UKL UPL Perluasan TM 1 di Lahan Ketandan	Paket	1	1
			Andalalin Perluasan TM 1 di Lahan Ketandan	Paket	1	1
			Pembangunan Pagar Perluasan TM 1 di Site Beskalan	Paket	1	1
			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	1	1
			Operasional UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM	Bulan	12	12
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenant	Angkatan	16	16
			Promosi dan Pemasaran	Bulan	12	12
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya			
			Jumlah Sarana Prasarana Budaya	Unit	38	38
			Paket Pengadaan Mebel Interior Balai Layanan Bisnis	Paket	1	1
			Penataan Interior Kantor Balai Layanan Bisnis UMKM (Cirebon dan Cendrawasih)*	Paket	1	1
			Pengawasan penataan Interior Kantor Balai Layanan Bisnis UMKM (Cirebon dan Cendrawasih)*	Paket	1	1
			Rehab Fasilitas Toilet Khusus Disabilitas	Paket	1	1
			Sarpras Ruang Laktasi Teras Malioboro 1	Jenis	2	2
			Penyediaan Ruang Merokok Teras Malioboro 1	Paket	1	1
			Penyediaan Ruang Display TM 1	Paket	1	1
			Sarpras operasional Teras Malioboro I	Jenis	3	3
			Rebranding Galeri Pasar Kotagede YIA	Paket	1	1
			Tenda Pameran	Buah	20	20
			Peralatan Penunjang Kegiatan Sertifikasi Halal UKM	Buah	2	2
			Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Layanan Klinik Koperasi	Jenis	3	3

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Sistem Pemasaran Online Produk UMKM (Beli Creative SiBakul)	Unit	1	1
			Pengadaan Pompa Air	Unit	2	2
			Pengembangan Kewirausahaan Desa			
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan	66	66
			Fasilitasi Promosi dan Pemasaran	UMKM	500	500
			Pameran Gerai Produk UMKM DIY	UMKM	40	40
			Sertifikasi Halal	UMKM	500	500
			Ekspor Produk UMKM	Kg	2.000	2.000
			Gebyar Hari UKM	Event	1	1
			Semarak Sibakul KUMKM	Event	1	1
			Penguatan Produk Lokal Istimewa	Produk	60	60
			Pameran UMKM mendukung ATF	Event	1	1
			Sarasehan UMKM Produk Khas Jogja	Kali	30	30
			Fasilitasi Pasar Tiban UMKM	Kali	15	15
			Bimtek dan Fasilitasi Sertifikasi P-IRT	Angkatan	60	60
			Peningkatan Kapasitas UMKM di Desa Mandiri Budaya (Tahap Penumbuhan)	Desa	17	17
			Peningkatan Kapasitas UMKM di Desa Mandiri Budaya (Tahap Pengembangan)	Desa	11	11
			Peningkatan Kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Maju)	Desa	24	24
			Pameran Produk UMKM di destinasi Wisata	Event	5	5
			Rembug Desa Usaha Gotong Royong di Desa Wisata	Paket	5	5
			Sarasehan UMKM	Kali	63	63
			Inkubator Bisnis	WUB	10	10
			Fasilitasi Ongkos Kirim	Kiriman	58.750	58.750
			Sumbang Swara Radio Blusuk	Paket	25	25
			Kampung Jajah Desa Milang Kori			
			Pelatihan dan Pendampingan Digital Campaign	UMKM	25	25
			Masterplan Desa Mandiri Budaya Tahun 2023	Dokumen	2	2
			Pelatihan Kemasan & Branding Produk untuk Produk Unggulan Agrobisnis	Kali	1	1
			Gelar Pameran Wirausaha Baru	Kali	1	1
			Pameran Produk Unggulan Desa Preneur	Kali	1	1
			SIBAKUL Sport Festival 2023	Kali	1	1

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pelatihan kewirausahaan di sentra UKM khas Jogja	Kali	15	15
			Vidio Dokumenter Si Bakul	Vidio	1	1
			Klinik Koperasi	Koperasi	35	35
			Sosialisasi Perkoperasian	Kali	38	38
			Pemeliharaan Aplikasi SIBAKUL	Aplikasi	1	1
			Festival Enterpreneur Malioboro Menari	Event	1	1
			Inkubasi Bisnis SAKA Wirausaha	Orang	100	100
			Kajian Kontribusi KUMKM dalam PDRB DIY	Dokumen	1	1
			Kajian Rasio Kewirausahaan	Dokumen	1	1
			Peningkatan kapasitas UMKM di Kawasan Perkotaan Tahap Pengembangan	Lokasi	3	3
			Gelar Potensi Budaya Wirausaha (3 titik)	Lokasi	3	3
			Kajian Manajemen Bisnis Operasional Pelataran Jogja Kreatif	Dokumen	1	1
			Pelatihan Mentoring UKM	Orang	150	150
			Kajian Pengembangan Kurikulum Inkubasi Bisnis dan Kurikulum SAKA Wirausaha	Dokumen	1	1
			Penumbuhan Wirausaha Perempuan	Orang	30	30
			Bursa Pembiayaan SiBakul (SiBakul Finance Fair)	Kali	1	1
			Obrolan SiBakul	Paket	1	1
			SiBakul Jelajah Nusantara	Event	1	1
			Pemberdayaan Lembaga Ekonomi KUMKM	Paket	1	1
			Gebyar Koperasi Istimewa	Event	1	1
			Buletin SiBakul	Eksemplar	750	750
			Masterplan Rumah Produksi Bersama Pengolahan Susu	Dokumen	1	1
			Bisnis Plan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama Pengolahan Susu	Dokumen	1	1
			Peningkatan Kinerja Koperasi Sektor Riil dgn Metode Score Training	Paket	1	1
			Masterplan Rintisan DMB Hargo Binangun	Dokumen	1	1
			Vidio Profil Wirausaha Tangguh	Vidio	1	1
			Pameran ASEAN Halal Fest	Event	1	1
			Pelatihan Wirausaha Tangguh	Kali	1	1
			Sosialisasi Kemitraan	Kali	10	10
			Klinik Koperasi Istimewa	Paket	2	2

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Obrolan Program Pembiayaan untuk UKM Naik Kelas	Kali	2	2
			Sosialisasi Fasilitasi PIRT bagi UMKM DIY	Kali	2	2
			Pameran Expo Si Bakul	Event	3	3
			Branding Saka Wirausaha	Vidio	1	1
			Gelar Ekonomi Wirausaha Kreatif	Kali	1	1
			BKK Kelurahan Mandiri Budaya	Kalurahan	7	7
			BKK Rintisan Kelurahan Mandiri Budaya	Kalurahan	13	13
			Peningkatan Kapasitas Produk Unggulan	Paket	1	1
			Pameran Wirausaha Berbasis Desa	Paket	1	1
			Pasar Tiban	Kali	1	1

12) *Urusan Penanaman Modal*

a) *Kondisi Umum*

Wilayah yang strategis menjadi faktor menarik bagi investor dalam menentukan keputusan berinvestasi seperti DIY yang mampu menawarkan lokasi usaha yang strategis, *cost competitive*, serta adanya infrastruktur yang berkelanjutan yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang pro-bisnis dan ekonomi. Berkembangnya keberadaan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri mencerminkan kepercayaan investor bahwa masih tingginya potensi investasi di DIY.

Penanaman Modal di DIY pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang positif dengan nilai pertumbuhan nilai realisasi investasi sebesar 16% atau mencapai 5,6 triliun rupiah. Nilai realisasi investasi yang dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal tersebut banyak didukung oleh pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kenaikan realisasi investasi ini didorong oleh pembangunan Proyek

Strategis Nasional (PSN) seperti Jalan tol Yogya-Solo dan Yogya-Bawen serta Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Kondisi investasi lima tahun terakhir di DIY menunjukkan nilai realisasi yang variatif, dimulai tahun 2019 mencapai 6,5 Triliun rupiah, lalu pada tahun 2020 mencapai 2,8 Triliun rupiah. Investasi masih tumbuh pada tahun 2020 dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi meskipun di tengah kondisi pandemi. Pada tahun 2021, 2022, dan 2023 kembali mengalami peningkatan dengan nilai realisasi investasi setiap tahun berturut-turut sebesar 3,078 Triliun rupiah, 3,9 Triliun rupiah, dan 5,6 Triliun rupiah.

Tabel 3.103. Perkembangan Investasi di DIY 2019 – 2023

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Tambahan Investasi (Rp000)	Pertumbuhan Investasi
s.d 2019	17.248.001 .993	9.345.955 .081	26.593.957 .074	6.518.285 .700	32,47%
s.d 2020	19.931.377 .693	9.485.961 .961	29.417.339 .654	2.823.382 .580	10,62%
s.d 2021	22.692.647 .593	9.803.584 .510	32.496.232 .103	3.078.892 .969	10,46%
s.d 2022	24.967.647 .193	11.437.953 .245	36.405.600 .439	3.909.367 .815	12,00%
s.d 2023	29.983.131 .093	12.118.877 .346	42.102.008 .440	5.696.408 .001	16,00%

Sumber: DPMPTSP DIY, 2024

Pergerakan pertumbuhan investasi DIY selama kurun waktu 2019 – 2023 terlihat pada grafik pertumbuhan realisasi investasi berikut.



Gambar 3.28. Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi DIY Tahun 2019 – 2023 (Rp000)

Sumber: DPMPTSP DIY, 2024

Persebaran Investasi DIY

Dalam konteks persebaran lokasi investasi, secara kumulatif hingga tahun 2023 investasi terbesar berlokasi di kabupaten Sleman disebabkan terutama pada sektor tersier seperti jasa pergudangan hingga properti. Kemudian, lokasi terbesar selanjutnya adalah Kabupaten Kulon Progo terutama disebabkan adanya pembangunan Bandara YIA pada tahun 2018-2019. Sementara Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul secara kumulatif hingga tahun 2023 menduduki tiga terbawah.

Apabila dilihat dari peningkatan realisasi investasi setiap tahun khususnya pada tahun 2023, wilayah yang cukup signifikan berkontribusi menyumbang investasi di DIY yaitu Kabupaten Sleman. Realisasi tersebut terutama didorong oleh proyek pembangunan tol Jogja-Bawen serta usaha sektor transportasi, Gudang dan Telekomunikasi. Tambahan investasi terbesar selanjutnya tahun 2023 ada di Kota Yogyakarta terutama disebabkan berkembangnya sektor usaha dibidang perhotelan dan restoran.

Tabel 3.104. Perkembangan Investasi (PMA + PMDN) Kabupaten/Kota di DIY
2019 - 2023 (dalam rupiah)

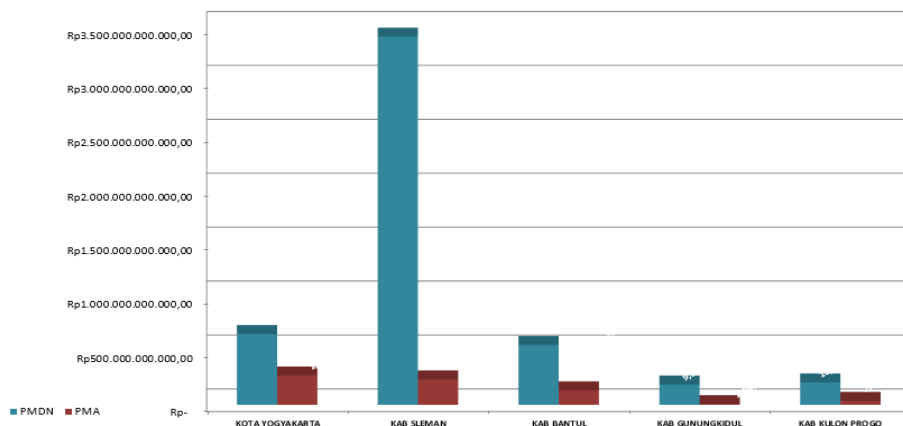
Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab.Bantul	149.052 .000.000	130.879 .300.000	57.500 .940.000	112.673 .164.558	422.920 .234.908	687.291 .289.576
Kab.Gunungkidul	15.004 .740.000	78.408 .200.000	31.904 .860.000	290.612 .425.936	272.013 .023.431	192.264 .077.359
Kab.Kulon Progo	4.578.561 .380.000	4.868.884 .400.000	1.866.540 .980.000	506.615 .067.362	609.773. 375.210	242.386 .898.531
Kab.Sleman	1.517.233 .260.000	902.392 .800.000	624.203 .480.000	1.920.518 .963.401	1.271.960 .088.066	3.647.986 .885.097
Kota Yogyakarta	961.845 .620.000	537.721 .000.000	243.232 .320.000	248.473 .347.912	1.332.701 .093.441	926.478 .850.857

Sumber: DPMPTSP DIY, 2024

Apabila diklasifikasikan berdasarkan kategori Jenis Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2023 Kabupaten Sleman menempati posisi teratas dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 3,4 Triliun. Hal tersebut bersumber dari aktivitas bisnis di sektor transportasi, Gudang dan Telekomunikasi. Posisi kedua adalah Kota Yogyakarta dengan nilai realisasi sebesar Rp 655,6 Miliar didominasi oleh hotel dan restoran lalu dilanjutkan Kabupaten Bantul sebesar Rp 553,4 Miliar didominasi oleh sektor konstruksi, Kabupaten Kulon Progo Rp 206,7 Miliar dapat dikatakan semakin menurun, diakibatkan proyek strategis nasional seperti bandara sudah tinggal berfokus pada fasilitas pendukung, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 187 Miliar bersumber dari usaha jasa lainnya.

Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2023 Kota Yogyakarta menduduki posisi teratas dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 270,8 Miliar yang didukung oleh investasi di sektor Telekomunikasi, Gudang, dan Transportasi. Posisi Kedua adalah Kabupaten Sleman sebesar Rp 235,3 Miliar kontribusi dari pendirian usaha sektor Hotel dan Restoran lalu dilanjutkan Kabupaten Bantul mencapai Rp 133,8 Miliar bersumber dari industri tekstil, Kabupaten Kulon

Progo sebesar Rp 35,6 Miliar dan yang terakhir Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 5,1 Miliar, keduanya didominasi dari industri barang dari kulit dan alas kaki.



Gambar 3.29. Realisasi Investasi Tahun 2023 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp)

Sumber: DPMPTSP DIY, 2024

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2022-2023

Kinerja Urusan Penanaman Modal direpresentasikan melalui akumulasi nilai realisasi investasi hingga tahun 2023. Pertambahan realisasi investasi setiap tahun dapat menjadi dasar untuk melihat kondisi dan dinamika penanaman modal di DIY. Pencatatan realisasi investasi melalui pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) menunjukkan komitmen Perusahaan dalam negeri maupun asing melakukan aktivitas bisnis di wilayah DIY yang salah satunya dapat berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tabel 3.105. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Realisasi Investasi	Triliun rupiah	36,4	35,4	42,1	118,9

Sumber: DPMPTSP DIY, 2024

Nilai realisasi investasi secara kumulatif hingga tahun 2023 mencapai Rp42.102.008.440.449,80. Nilai tersebut sudah melampaui target tahun. Pencapaian tersebut didorong oleh proyek strategis nasional pembangunan Tol Yogya-Bawen dan Tol Yogya-Solo di Kabupaten Sleman yang memberikan *impact* pada pertumbuhan investasi di sektor hotel-restoran, industri-tekstil, dan jasa lainnya serta dampak berkelanjutan Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport yang terakumulasi pada sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi. Dalam upaya pemerataan investasi perlu langkah optimalisasi dalam mengidentifikasi dan mempromosikan potensi investasi kota/kabupaten di DIY.

Keberhasilan peningkatan investasi di DIY saling berkaitan dengan kemudahan berusaha dan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha. Selain itu, perlu komitmen memberikan pelayanan prima untuk memfasilitasi konsultasi bagi investor, fasilitasi kerjasama antara Perusahaan skala besar dengan skala kecil atau UMKM serta perizinan yang mudah.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Penyusunan RDTR di seluruh kabupaten kota di DIY masih berproses belum lengkap 100%.
- (b) Perkembangan Penanaman Modal di wilayah kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul belum signifikan.
- (c) Masih adanya pelaku usaha yang belum memperhatikan risiko lingkungan sehingga berdampak negatif di area sekitar tempat usaha.
- (d) Optimalisasi Kawasan industri dan Kawasan peruntukan industri belum maksimal.

(2) Solusi

- (a) Advokasi permasalahan-permasalahan di sistem OSS khususnya yang berkaitan dengan dokumen RDTR kepada Kementerian Investasi dan instansi terkait baik pusat dan daerah baik yang sifatnya kendala sistem (teknis) sampai dengan kendala regulasi yang masih harus diselaraskan dengan seluruh *stakeholder*/Kementerian teknis sehingga *single submission* ini dapat benar-benar terwujud.
- (b) Penyusunan Peta Potensi Investasi dan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) di wilayah Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul pada sektor unggulan serta melakukan fasilitasi dan *chanelling* dalam pengembangan usaha, kemitraan dan rencana investasi untuk calon investor ataupun investor yang sudah ada di DIY.
- (c) Penyelenggaraan izin yang cepat, reliabel sehingga mendukung percepatan pelaksanaan perizinan berusaha calon investor yang akan berusaha di DIY namun dengan tetap mengkomunikasikan regulasi terkait perizinan dan penyelesaian pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
- (d) Kerja bersama diantara seluruh *stakeholder* di DIY terkait strategi pengembangan Kawasan industri/Kawasan Peruntukan Industri sehingga membuka peluang untuk investasi.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2023 didukung dengan 6 program dan 33 sub kegiatan yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Total pagu anggaran belanja selama satu tahun sebelum perubahan APBD sebesar Rp12.491.981.215,00 dan setelah perubahan APBD dalam rangka peningkatan perekonomian dan peningkatan pelayanan menjadi Rp12.518.141.956,00. Pada tahun 2023 ini terhitung penyerapan anggaran belanja sebesar Rp12.257.864.336,00 atau 97,92% dengan realisasi fisik kegiatan tercapai 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.106. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINDU DIY	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Izin Usaha	izin	400	6.994
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			
			Jumlah Izin Usaha	izin	400	6.994
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi			
			Jumlah Peta Potensi	dokumen	2	2
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Nilai Rencana Investasi (Rp)	Triliun	1,3	32,4
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
			Nilai Rencana Investasi (Rp)	Triliun	1,3	32,4
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	dokumen	2	2
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86	88,33
			Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86	88,33
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu	Pelaku usaha	500	1.417

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi			
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan usaha	48	71
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Orang	1.000	1.207
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Proyek yang Patuh Memberikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Proyek	3.900	8.863
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
			Jumlah Proyek yang Patuh Memberikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Proyek	3.900	8.863
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha	400	800
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan usaha	20	60
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jenis data yang tersaji	Jenis	5	5
			Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			
			Jenis data yang tersaji	Jenis	5	5
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	5	5

13) *Urusan Kepemudaan dan Olahraga*

a) *Kondisi Umum*

Pembangunan kepemudaan mempunyai peran penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas, dan berdaya saing. Sebagai modal sumber daya manusia yang utama, kemandirian dan kompetensi para pemuda perlu terus ditingkatkan melalui pembentukan karakter serta perluasan kewirausahaan pemuda. Pada bidang olahraga, peningkatan pemasaran olahraga dan pembinaan olahraga prestasi masih menjadi fokus utama guna membangun generasi yang sehat, menjunjung tinggi sportivitas, dan terus berupaya mencetak prestasi sampai ke tingkat nasional maupun internasional. Guna mendukung pencapaian tersebut, Pemda DIY menetapkan beberapa indikator kinerja dengan target dan capaian sebagai berikut.

Tabel 3.107. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Persentase pemuda bekerja	%	57,56	55,61	59,33	106,69
2	Jumlah capaian medali pada kejuaraan <i>multievent</i>	medali	n/a	22	72	327,27

Sumber: Disdikpora DIY, 2024

Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia 2023, Persentase pemuda bekerja di DIY adalah sebesar 59,33%. Capaian ini diperoleh dari perbandingan jumlah pemuda yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan jumlah pemuda dikalikan 100%. Terdapat kenaikan capaian sebesar 1,77% dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 57,56% yang menunjukkan kenaikan tingkat partisipasi pemuda baik sebagai pekerja maupun pelaku kewirausahaan. Capaian DIY juga melampaui rata-rata nasional sebesar 55,14%. Faktor pendorong tercapainya target indikator antara lain adalah terbukanya kesempatan bagi para pemuda untuk berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan guna mengembangkan usaha mandiri mereka didukung dengan bekal pembelajaran kewirausahaan yang menjadi salah satu subjek pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah. Faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini adalah diperlukannya modal cukup dalam perintisan usaha dan masih perlunya peningkatan keterampilan bagi para lulusan jenjang pendidikan menengah ketika memasuki dunia kerja.

Pada jumlah capaian medali pada kejuaraan *multievent*, DIY berhasil memperoleh 59 medali pada kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) yang digelar di Sumatera Selatan dan 13 medali pada kejuaraan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPEDA) X yang digelar di Sumatera

Selatan. Dalam kejuaraan POPNAS kontingen DIY berhasil meraih peringkat ke-5 dengan total raihan medali sebanyak 59 medali yang terdiri dari 19 medali emas, 17 medali perak, dan 23 medali perunggu. Dalam kejuaraan PEPARPENAS kontingen DIY berhasil meraih peringkat ke-9 dengan total raihan medali sebanyak 13 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 7 medali perak, dan 2 medali perunggu. Faktor pendorong untuk capaian indikator ini adalah adanya sistem pembinaan intensif sebagai persiapan para atlet yang akan mewakili DIY di ajang nasional. Faktor penghambat untuk capaian ini adalah kurang lengkapnya sarana prasarana bagi beberapa cabang olahraga sehingga membatasi frekuensi pelatihan.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Jumlah pemuda yang memiliki rintisan wirausaha mandiri masih relatif sedikit.
- (b) Capaian prestasi olahraga bagi pelajar di DIY masih belum maksimal.

(2) *Solusi*

- (a) Perintisan wirausaha mandiri oleh para pemuda mendapatkan dukungan dari Pemda DIY dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan pemasaran online serta pemberian hibah barang sebagai modal rintisan usaha, terutama di daerah kantong kemiskinan.
- (b) Pemda DIY mendukung pengembangan bakat para calon atlet pelajar melalui kegiatan Pembinaan Atlet Berbakat serta pembukaan Kelas Khusus Olahraga di beberapa satuan pendidikan. Pembinaan juga dilakukan melalui dukungan pendanaan untuk

penyelenggaraan uji coba tanding dan pengiriman kontingen pada kejuaraan tingkat regional maupun nasional guna mengasah kompetensi dan mental para atlet.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 anggaran Urusan Pemuda dan Olahraga adalah sebesar Rp57.540.578.440,00 yang dialokasikan ke dalam 4 program dan 27 sub kegiatan. Realisasi belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp55.764.600.284,00 (96,91%) dengan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 adalah sebesar 99,12%. Adanya deviasi pada realisasi fisik disebabkan tidak disalurkannya hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DIY. Pada tahun 2023 kepengurusan KNPI DIY belum mendapatkan pengesahan dari KNPI pusat karena adanya kepemimpinan ganda sehingga hibah untuk KNPI DIY tidak dapat disalurkan. Adanya deviasi keuangan berasal dari hasil negosiasi pengadaan barang/jasa dan hibah kepada KNPI yang tidak dapat disalurkan.

Tabel 3.108. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPO)	persen	91.91	89.48
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	7
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2
			Pengadaan Mebel			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	618	618
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	19	19

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9
			Pemeliharaan Mebel			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	156	156
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	85	85
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	9
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	70	70
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Jumlah kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	kelompok	3	3

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi			
			Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	1.690	1.690
			Kantong Kemiskinan	orang	90	90
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Orang	80	80
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dokumen	2	2
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	atlet	365	367
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	3	3
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event			
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	365	365
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi			
			Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	265	265
			Pengembangan Organisasi Keolahragaan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	3	3
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan	persen	100	100
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi			
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	1

14) *Urusan Statistik*

a) *Kondisi Umum*

Sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), program dan kegiatan Urusan Statistik di Pemda DIY dilaksanakan oleh Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Bappeda DIY .

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan statistik di lingkup pemerintah. Kebijakan Satu Data Indonesia yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Diamanatkan dalam kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir,

terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Kebijakan Satu Data Indonesia di DIY telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan telah diperbarui dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi statistik tersebut Pemda DIY telah memiliki *tool* dalam pengelolaan data berupa Portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY yang merupakan portal resmi data terbuka tingkat daerah untuk data statistik dapat diakses melalui Aplikasi Jogja Dataku dengan alamat <https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>. dan Aplikasi Geoportal untuk data spasial dengan alamat <https://geoportal.jogjaprov.go.id/>.

Sesuai RPD DIY 2023-2026, kinerja Urusan Statistik Tahun 2023 diukur dengan indikator Persentase data statistik sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Target dan realisasi kinerja Urusan Statistik secara rinci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.109. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase data statistik sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Pembangunan Daerah	%	n/a	50	68,44	136,88

Sumber: Bappeda DIY, 2024

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan dengan empat prinsip, yang meliputi:

- (1) Data harus memenuhi standar data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan. Standar data untuk statistik lintas instansi ditetapkan oleh Pembina Data Statistik dalam hal ini adalah BPS RI.
- (2) Data harus memiliki metadata, yaitu sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.
- (3) Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas, yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau dibagi pakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi.
- (4) Data harus menggunakan kode referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, prinsip Satu Data Indonesia yang dapat dihitung sesuai kewenangan daerah pada indikator persentase data statistik sektoral adalah ketersediaan metadata. Capaian dari indikator tersebut di tahun 2023 telah melebihi target yakni sebesar 68,44% dari target 65% (telah tersedia 5.135 metadata dari total 7.503 elemen data).

Selain pemenuhan terhadap prinsip-prinsip satu data Indonesia Urusan Statistik juga menghasilkan analisis yang mendukung perencanaan pembangunan, antara lain: 1) Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2024; 2) Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian; 3) Penyediaan Data Statistik Geospasial Perencanaan dan Pengendalian; 4) Fasilitasi Satu Data Indonesia dan 5) Buku Profil Daerah DIY.

b) Permasalahan dan Solusi**(1) Permasalahan**

- (a) Prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dalam tata kelola penyelenggaraan data statistik belum terpenuhi seutuhnya, terutama untuk Metadata. Hal ini disebabkan karena belum semua produsen data mampu menyusun metadata, terutama untuk tambahan data baru yang diusulkan oleh OPD.
- (b) Pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial belum optimal disebabkan oleh : 1). Kompetensi SDM di bidang Geospasial masih kurang dan formasi personil pengelolaan data informasi geospasial (jabatan fungsional tertentu surveyor pemetaan atau jabatan fungsional umum) belum tersedia; 2). Literasi Geospasial terutama tentang kualitas dan standardisasi data geospasial masih rendah; 3). Pengelolaan data/informasi geospasial belum memiliki fasilitas yang memadai berupa sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JIGD.

(2) Solusi

- (a) Menyelenggarakan bimtek penyusunan metadata bagi produsen data agar dapat meningkatkan tata kelola penyelenggaraan data statistik, utamanya terkait prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;
- (b) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1). Menyelenggarakan bimtek Geospasial dan mengupayakan tersedianya formasi personil yang membidangi pengelolaan data informasi geospasial (jabatan fungsional tertentu surveyor pemetaan atau jabatan fungsional umum); 2). Menyediakan

buku, dokumen, atau aturan yang mendukung peningkatan literasi dalam hal pengelolaan data geospasial dan standardisasi data; 3). Mengupayakan secara bertahap penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penyesuaian tata kelola penyelenggaraan data geospasial sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Urusan Statistik dilaksanakan melalui 2 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, terdiri dari 19 sub kegiatan. Alokasi anggaran tersebut sebesar Rp747.131.350,00 dapat direalisasikan sebanyak Rp711.533.932,00 atau 95,24%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Berikut rincian capaian program dan sub kegiatan Urusan Statistik.

Tabel 3.110. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN UMUM	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen dokumen	100 1	100 1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen	100	100
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	6
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	laporan	3	3
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	9	9
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
2	STATISTIK	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	1
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	1
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	2	2
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	18	18
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	8	8
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
			Persentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah	persen	50	68,44
			Dokumen Analisis Makro Ekonomi sebagai bahan Penyusunan RKPD 2024	dokumen	1	1
			Dokumen Fasilitasi Satu Data Indonesia	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengumpulan dan Penyajian Data Geospasial	dokumen	1	1
			Pengumpulan dan Penyajian Data Statistik	dokumen	1	1
			Dokumen Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	dokumen	1	1
			Dokumen Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian	dokumen	1	1
			Update Aplikasi Jogja Dataku	aplikasi	1	1
			Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi	persen	100	100

15) *Urusan Persandian*

a) *Kondisi Umum*

Urusan keamanan informasi di Pemda DIY sudah dimulai sejak terbentuknya bidang Manajemen Informasi, yang kemudian direvisi menjadi Bidang Keamanan Informasi dan Persandian sejak 2019. Diskominfo DIY dalam hal pengelolaan keamanan informasi melakukan koordinasi secara vertikal dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Diskominfo DIY telah memiliki *data center* yang tersertifikasi ISO 27001:2013 sejak tahun 2016, selanjutnya telah dilakukan perpanjangan di tahun 2019, dan diperpanjang kembali pada tahun 2022 yang aktif sampai dengan tahun 2025.

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE. Demikian juga pembentukan ekosistem *Jogja Smart Province* dimana

pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting harus didukung dengan sistem keamanan informasi yang baik. Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Persandian dilaksanakan sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Pemda DIY telah melakukan berbagai aktivitas pengamanan informasi dan persandian diantaranya: a) penyusunan berbagai kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi; b) melaksanakan kegiatan pengamanan persandian dan keamanan informasi seperti pengamanan sinyal pada event strategis pimpinan, kunjungan pejabat tinggi, sterilisasi ruang kerja dan ruang rapat pimpinan di Pemda DIY dan Kabupaten/Kota, dan pengamanan komunikasi VIP (Gubernur dan Wakil Gubernur); c) melakukan *assessment* kerentanan aplikasi yang dikelola Pemda DIY; d) melakukan monitoring dan respon terhadap insiden siber; e) melakukan

pengamanan *logic* maupun fisik pada pusat data yang dikelola Pemda DIY; dan f) melakukan *assessment* indeks keamanan informasi dan tingkat kematangan keamanan siber serta evaluasi pelaksanaan kegiatan persandian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasil *assessment* keamanan informasi dan persandian oleh BSSN tahun 2018-2023 didapatkan penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.111. Nilai *Assessment* Keamanan Informasi dan Persandian oleh BSSN tahun 2018-2023

No	Tahun	Nilai <i>Assesment</i>
1.	2018	Indeks Kemanan Informasi dengan <i>score</i> 547 dari maksimum <i>score</i> 645
2.	2019	Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 2,18 pada Level Kematangan Tingkat III (<i>Establishing</i>) dari V
3.	2020	Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 4,39 pada Level Kematangan Tingkat IV (<i>Managed</i>) dari V
4.	2021	626 (Baik) dari maksimum <i>score</i> 645 Kategori Sistem Elektronik Strategis Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 4,4 pada level Kematangan tingkat IV (<i>Managed</i>) dari V
5.	2022	627 (Baik) dari maksimum <i>score</i> 645 Kategori Sistem Elektronik Strategis Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 4,52 masuk kategori dikelola optimal
6.	2023	632 (Baik) dari maksimum <i>score</i> 645 Kategori Sistem Elektronik Strategis Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 4,54 pada Level Kematangan Tingkat V (<i>Optimized</i>) dari V

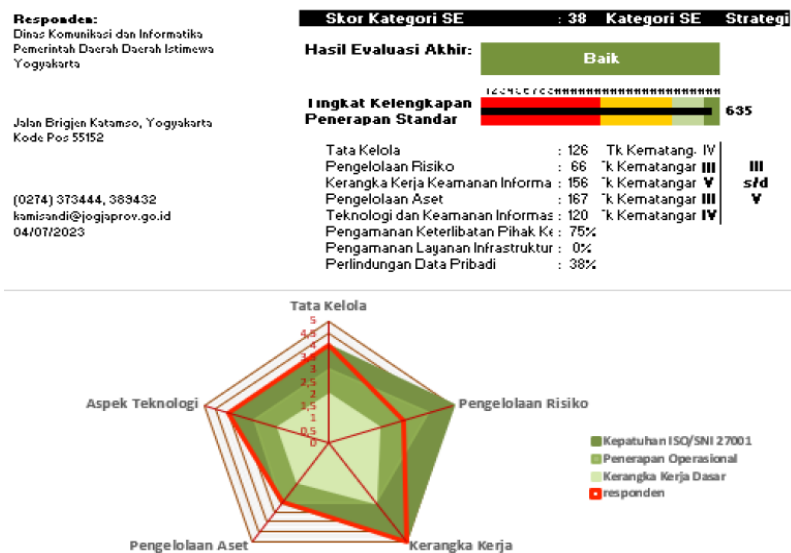
Sumber: BSSN, 2024

Pada tahun 2023 Urusan Persandian di Pemda DIY dilaksanakan melalui program Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik. Adapun pelaksanaan Urusan Persandian di Pemda DIY pada Tahun 2023 sebagai berikut:

- (1) Pada tahun 2023, urusan persandian dilaksanakan melalui program penyelenggaraan persandian untuk

- pengamanan informasi dengan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal kebijakan teknis, telah disusun berbagai kebijakan dan prosedur terkait implementasi sistem manajemen keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi yang dikelola Pemda DIY.
 - (3) Terkait penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selaku pengelola *Data Center* dan Jaringan Intra Pemerintah telah melaksanakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022 dengan ruang lingkup *The Provision of Information Security Management Systems for Data Center and Intra Government and Informatics Network for the Yogyakarta Special Region*. Selain itu, juga telah dilaksanakan verifikasi pengukuran Indeks Keamanan Informasi dan Tingkat Maturitas Keamanan Siber oleh Badan Siber dan Sandi Negara dengan hasil penilaian.
 - (4) Terkait penerapan dan audit keamanan informasi, Dinas Kominfo DIY berkoordinasi dengan BSSN melakukan audit-audit berikut :

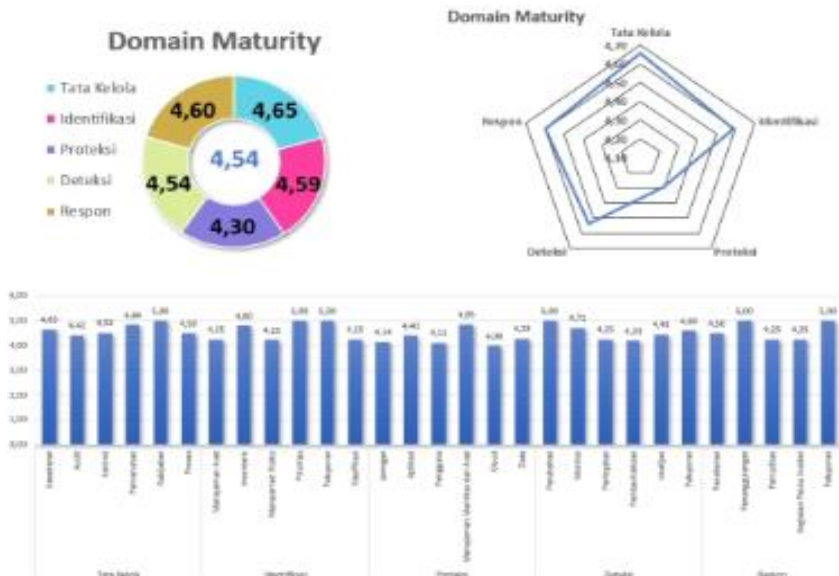
- (a) Penilaian Indeks Keamanan Informasi (2023)
- Ruang Lingkup: tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset, teknologi dan keamanan informasi
- Hasil Penilaian: Tata Kelola IV; Pengelolaan Risiko III; Kerangka Kerja Keamanan Informasi V; Pengelolaan Aset III; Teknologi dan Keamanan Informasi IV (Total score 635 dari maksimum score 645)



Gambar 3.30. Penilaian Indeks KAMI Tahun 2023

Sumber: Diskominfo DIY, 2024

- (b) Penilaian Maturitas Keamanan Siber (2023)
- Ruang Lingkup : aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respon.
- Hasil Penilaian :4,53 (Level Kematangan Tingkat V (Optimized) dari V).



Gambar 3.31. Maturitas Keamanan Siber Tahun 2023

Sumber: Diskominfo DIY, 2024

- (5) Untuk melakukan pemantauan, penanganan dan pelaporan insiden, dibentuk Tim JOGJAPROVCSIRT berdasarkan SK Gubernur Nomor 29/TIM/2023 tentang Pembentukan *Jogjapro Computer Security Incident Response Team* Tahun 2023 yang melibatkan unsur Dinas Kominfo Kab/Kota di wilayah DIY, Polda DIY, Korem 072/Pamungkas, dan Kejati DIY. Setiap insiden siber yang terjadi dicatat dan ditindaklanjuti untuk kemudian dilakukan pelaporan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dibangun ruang SOC *Security Operation Center* (SOC) yang menjadi pusat pemantauan insiden di Pemda DIY. Sepanjang tahun 2023 tercatat terjadi 185 insiden yang didominasi antara lain oleh *web defacement*, *email spamming*, *cross site scripting*, dan *injection*.
- (6) Di bidang pengelolaan infrastruktur dan layanan *Data Center*, hingga akhir tahun 2023 tercatat ada kurang lebih 286 sub domain aktif yang dikelola di *Data Center* Pemda DIY. Dalam penerapan keamanan informasi, *Data*

Center Pemda DIY telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2013 sejak tahun 2016. Untuk mendukung proses keberlanjutan bisnis, Diskominfo DIY juga menggunakan fasilitas *Disaster Recovery Center* (DRC) dan saat ini sedang berproses untuk melakukan *backup* di Pusat Data Nasional;

- (7) Untuk melaksanakan layanan keamanan informasi dan persandian, dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - (a) Layanan *Counter Surveillance* (kontra penginderaan) yaitu layanan pengamanan ruang kerja dan ruang rapat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati se-DIY, Sekda DIY, Asisten Setda DIY, serta Sekda dan Asisten Kabupaten/Kota se-DIY serta OPD di lingkungan Pemda DIY dalam rangka meminimalisir adanya kebocoran informasi dari ruang kerja atau ruang rapat pimpinan. Pada tahun 2023 dilakukan kontra penginderaan untuk 38 lokasi;
 - (b) Layanan Pengamanan Sinyal (*Signal Jamming*) pada pelaksanaan *event* tertentu di Pemda DIY dan di Kabupaten/Kota se-DIY. Pada tahun 2023, terdapat 3 *event* yang dilakukan pengamanan sinyal;
 - (c) Fasilitasi peralatan persandian untuk mendukung kegiatan pimpinan (HT dan laptop berenkripsi);
 - (d) Fasilitasi layanan *encrypted email* atau surel terenkripsi bagi pimpinan, baik enkripsi surel yang akan dikirim maupun dekripsi surel yang diterima untuk diteruskan kepada pimpinan;
 - (e) Layanan Sertifikat Elektronik termasuk instalasi *Secure Socket Layer* (SSL) pada website dan aplikasi yang dikelola Pemda DIY dan penerbitan 889 Sertifikat Elektronik untuk keperluan Tanda Tangan Elektronik bagi 889 ASN di lingkungan Pemda DIY.

- (8) Untuk meningkatkan kapasitas SDM dan literasi keamanan informasi dan persandian dilaksanakan melalui pengiriman personil dalam bimbingan teknis, *workshop* dan sosialisasi terkait keamanan informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara), Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dan Lembaga lainnya. Selain itu, literasi juga dilaksanakan melalui media sosial dan kanal-kanal informasi digital lainnya yang dikelola oleh Diskominfo DIY.
- (9) Untuk pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program, setiap bulan dilaksanakan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Setiap tahun disusun laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan persandian *Pemda DIY*, laporan evaluasi penyelenggaraan *Jogjaprovsirt* dan laporan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemda DIY yang dilaporkan kepada Gubernur DIY dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Semakin berkembangnya teknologi telekomunikasi dan informasi saat ini menuntut peningkatan kemampuan personil dalam penguasaan teknologi yang digunakan untuk mengantisipasi potensi - potensi celah keamanan yang akan timbul.
- (b) Kesadaran terkait pentingnya untuk menjaga keamanan informasi belum dipahami secara maksimal.

- (c) Pengamanan teknologi informasi seiring berkembangannya teknologi membutuhkan penambahan sarana dan prasarana untuk mengoptimalakan pengamanan informasi.

(2) Solusi

- (a) Pengembangan kompetensi personil saat ini dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun bimtek yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara maupun dengan pelatihan internal.
- (b) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya keamanan siber yang berkaitan dengan perlindungan dan privasi data terutama data pribadi di dunia maya.
- (c) Melakukan optimalisasi perangkat yang ada dan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang bersifat *open source* untuk mengefisiensikan pengeluaran.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Urusan Persandian memiliki 1 program dan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp104.067.000,00. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp102.719.800,00 atau 98,71%, dengan capaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.112. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1
			Sterilisasi Ruang Kerja Pimpinan	Bulan	12	12
			Implementasi SMKI	Kali	1	1

16) *Urusan Kebudayaan*

a) *Kondisi Umum*

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang.

Visi Pemda DIY dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 yaitu menjadikan “Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Penekanan pada tujuan pembangunan budaya dalam visi tersebut, menjadikan Urusan Kebudayaan sebagai unsur strategis untuk pencapaian visi tersebut. Selanjutnya, pembangunan kebudayaan juga didukung dengan amanah keistimewaan DIY sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 3.113. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	%	n/a	4,14	5,2	125,6
2	Peningkatan penyelenggaraan <i>event</i> budaya tingkat provinsi, nasional, internasional.	<i>Event</i>	n/a	14	14	100
3	Peningkatan Kinerja pengembangan seni budaya DIY.	Lembaga	n/a	375	375	100
4	Jumlah desa budaya yang naik status menjadi desa mandiri budaya	Desa	n/a	25	32	128

Sumber: Disbud DIY, 2024

Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan Urusan Kebudayaan pada tahun 2023 dihitung melalui 4 indikator capaian sasaran sebagai berikut :

(a) *Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum*

Indikator sasaran meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum merupakan indikator sasaran yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja yang terkait dengan sektor kesejarahan, bahasa sastra, permuseuman dan warisan budaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman dan melalui kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya.

Pada tahun 2023 capaian sebesar 5,2% dari target 4,14%. Capaian diperoleh melalui beberapa komponen data pendukung, seperti komponen data yang didapat dari kinerja pengembangan sejarah, bahasa sastra, museum,

dan realiasi penetapan warisan budaya baik benda maupun warisan budaya takbenda. Di antaranya tercakup pula 4 budaya benda yang diapresiasi tingkat nasional yakni: Jembatan Kereta Api Mbeling di Kulon Progo, Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Situs Tamansari Kraton Yogyakarta, dan Gedung Pusat UGM Yogyakarta. Serta, Warisan Budaya Benda yang ditetapkan di tingkat Internasional yakni Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta pada sidang ke-45 *World Heritage Committe* di Riyadh, Arab Saudi.

Tabel 3.114. Jumlah Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Realisasi Kinerja Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum	889
2	Penetapan Cagar Budaya	774
3	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda	181
	Jumlah	1.844

Sumber: Disbud DIY, 2024

(b) Peningkatan Penyelenggaraan Event Budaya Tingkat Provinsi, Nasional, Internasional

Indikator sasaran peningkatan penyelenggaraan *event* budaya tingkat provinsi, nasional, internasional merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja yang terkait dengan sektor penyelenggaraan *event* budaya dalam rangka menciptakan ekosistem budaya yang berkelanjutan.

Pada tahun 2023 indikator sasaran tersebut memiliki target sebesar 14 *event* dan dapat terealisasi 100%. *Event* kebudayaan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri dari 9 *event* bersekala regional, 2 *event* berskala nasional, dan 3 *event* berskala internasional. *Event* berskala regional tersebut antara lain seperti Festival

Langencarita Tingkat DIY, Festival Karawitan Tingkat DIY, Jogja Joget, Muhibah Budaya, Selendang Sutera, Catur Sagatra, Muhibah Budaya di Madiun, Festival Upacara Adat, dan Pasar Kangen. Sedangkan event bersekala nasional tersebut antara lain Perayaan Penegakan Hari Kedaulatan Rakyat dan Festival Kebudayaan Yogyakarta. Untuk *event* bersekala internasional tersebut antara lain ARTJOG, *Melbourne Symphony Orchestra*, dan *International Art Forum*.

Tabel 3.115. Penyelenggaraan *Event* Budaya tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	<i>Event</i> Budaya Tingkat Regional	9
2	<i>Event</i> Budaya Tingkat Nasional	2
3	<i>Event</i> Budaya Tingkat Internasional	3
Jumlah		14

Sumber: Disbud DIY, 2024

(c) *Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY*

Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY di dukung dalam bentuk berbagai kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Pengembangan seni budaya dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana lembaga budaya. Selain itu pengembangan juga dilaksanakan melalui pemberian fasilitasi penyelenggaraan *event* bagi lembaga penggiat seni. Obyek pengembangan seni budaya tidak berhenti kepada kelompok atau organisasi seni budaya. Pengembangan juga dilakukan terhadap upacara-upacara adat tradisi yang masih rutin dilaksanakan oleh masyarakat. Tercatat pada tahun 2023 telah dilakukan pengembangan Seni Budaya kepada 375 lembaga Seni Budaya yang ada di wilayah DIY. Jumlah tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sasaran Indikator.

Tabel 3.116. Peningkatan Kinerja Pengembangan Seni Budaya DIY tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Upacara Adat	76
2	Organisasi Seni Pertunjukan	266
4	Lembaga Budaya	6
5	Organisasi Perfilman	6
6	Organisasi Penghayat Kepercayaan	15
7	Upacara Tradisi	6
Jumlah		375

Sumber: Disbud DIY, 2024

(d) Jumlah Desa Budaya yang naik status menjadi Desa Mandiri Budaya

Salah satu indikator Keberhasilan dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan, dapat dilihat dari indikator peningkatan jumlah Desa Budaya yang naik status menjadi Desa Mandiri Budaya. Desa Mandiri Budaya menjadi tujuan akhir dalam pengembangan desa budaya. Tujuan dalam pembangunan Desa Mandiri Budaya adalah untuk mewujudkan kemandirian desa dalam menyejahterakan masyarakat desa melalui pengembangan budaya, wisata, kewirausahaan, upaya ketahanan pangan dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa.

Pada tahun 2023 target akumulatif yang ditetapkan untuk indikator desa budaya yang naik status menjadi Desa Mandiri Budaya adalah 25 Desa dan dapat terealisasi sebesar 32 Desa Mandiri Budaya. Terdapat penambahan sebanyak 7 Desa Mandiri Budaya pada tahun 2023. Desa Mandiri Budaya tersebut antara lain Desa Mandiri Budaya Mulyodadi, Desa Mandiri Budaya Kepek, Desa Mandiri Budaya Srigading, Desa Mandiri Budaya Katongan, Desa Mandiri Budaya Argomulyo, Desa Mandiri Budaya Giripurwo dan Desa Mandiri Budaya Sidorejo. Penetapan desa mandiri budaya

tersebut tertuang dalam SK GUB DIY Nomor 245/kep/2023.

Tabel 3.117. Jumlah Desa Mandiri Budaya sampai dengan tahun 2023

No	Nama Desa Mandiri Budaya	Tahun Penetapan
1	Desa Mandiri Budaya Putat	SK GUB 364/KEP/2020
2	Desa Mandiri Budaya Girikerto	SK GUB 364/KEP/2020
3	Desa Mandiri Budaya Pagerharjo	SK GUB 364/KEP/2020
4	Desa Mandiri Budaya Sabdodadi	SK GUB 364/KEP/2020
5	Desa Mandiri Budaya Bejiharjo	SK GUB 364/KEP/2020
6	Desa Mandiri Budaya Jatimulyo	SK GUB 364/KEP/2020
7	Desa Mandiri Budaya Bangunkerto	SK GUB 364/KEP/2020
8	Desa Mandiri Budaya Margodadi	SK GUB 364/KEP/2020
9	Desa Mandiri Budaya Wedomartani	SK GUB 364/KEP/2020
10	Desa Mandiri Budaya Pandowoharjo	SK GUB 364/KEP/2020
11	Desa Mandiri Budaya Tuksono	SK GUB 383 KEP 2021
12	Desa Mandiri Budaya Banjarharjo	SK GUB 383 KEP 2021
13	Desa Mandiri Budaya Jerukwudel	SK GUB 383 KEP 2021
14	Desa Mandiri Budaya Tanjungharjo	SK GUB 383 KEP 2021
15	Desa Mandiri Budaya Bangunjiwo	SK GUB 383 KEP 2021
16	Desa Mandiri Budaya Hargomulyo	SK GUB 383 KEP 2021
17	Desa Mandiri Budaya Giring	SK GUB 383 KEP 2021
18	Desa Mandiri Budaya Glagah	SK GUB 383 KEP 2021
19	Desa Mandiri Budaya Panggungharjo	SK GUB 234 KEP 2022
20	Desa Mandiri Budaya Gilangharjo	SK GUB 234 KEP 2022
21	Desa Mandiri Budaya Kemadang	SK GUB 234 KEP 2022
22	Desa Mandiri Budaya Sinduharjo	SK GUB 234 KEP 2022
23	Desa Mandiri Budaya Sendangmulyo	SK GUB 234 KEP 2022
24	Desa Mandiri Budaya Semanu	SK GUB 234 KEP 2022
25	Desa Mandiri Budaya Trimurti	SK GUB 234 KEP 2022
26	Desa Mandiri Budaya Mulyodadi	SK GUB 235 KEP 2023
27	Desa Mandiri Budaya Argomulyo	SK GUB 235 KEP 2023
28	Desa Mandiri Budaya Kepek, Wonosari	SK GUB 235 KEP 2023
29	Desa Mandiri Budaya Sidorejo	SK GUB 235 KEP 2023
30	Desa Mandiri Budaya Srigading	SK GUB 235 KEP 2023
31	Desa Mandiri Budaya Katongan	SK GUB 235 KEP 2023
32	Desa Mandiri Budaya Giripurwo	SK GUB 235 KEP 2023

Sumber: Disbud DIY, 2024

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Awareness masyarakat khususnya generasi muda merupakan tantangan dalam pembangunan

kebudayaan di DIY. Hal ini terlihat dengan lunturnya nilai-nilai budaya tradisional ditengah globalisasi dan modernisasi di kalangan generasi muda.

- (b) Luasnya cakupan urusan kebudayaan baik dari aspek obyek kebudayaan maupun pengampu urusan kebudayaan baik sektoral maupun kewilayahan yang menyebabkan belum optimalnya cakupan obyek kebudayaan yang mendapatkan intervensi melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pengampu urusan kebudayaan.

(2) Solusi

- (a) Meningkatkan inovasi dan publikasi dalam proses pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dengan menyesuaikan tren generasi muda untuk memperkuat kesadaran dan apresiasi generasi muda terhadap warisan budaya tradisional.
- (b) Penetapan skala prioritas dalam proses perencanaan dan penganggaran urusan kebudayaan dan pendelegasian pelaksanaan urusan kebudayaan dengan pengampu urusan kebudayaan di DIY (sektoral) maupun kabupaten/kota (kewilayahan). Selain itu, pelaksanaan *event-event* unggulan yang berskala regional dan nasional dan festival berjenjang untuk menggerakkan ekosistem budaya di DIY.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Urusan Kebudayaan pada tahun 2023 dilaksanakan melalui 2 program dan 55 sub kegiatan terdiri dari belanja APBD dan dana keistimewaan urusan kebudayaan dengan nilai pagu total sebesar Rp302.562.444.592,00 sedangkan realisasi

anggaran sebesar Rp297.022.057.827,00 (sebesar 98,17%) dengan realisasi fisik mencapai 100%.

Tabel 3.118. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2023

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65	Bulan	0	12
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	1	1

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	99	99
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	69	69
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
		Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran	Dokumen	7	7
		BKK Desa Kesenjajaran	kalurahan	1	1
		Kajian Sejarah	dokumen	2	2
		Kompetisi Kesenjajaran	event	3	3
		Lawatan Sejarah	event	4	4

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Pembinaan Komunitas Sejarah	komunitas	5	5
		Peringatan Peristiwa Bersejarah	event	4	4
		Publikasi dan Promosi Sejarah Lokal	event	3	3
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra			
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	Laporan	11	11
		Even Kesustraaan	Kali	8	8
		Pengembangan Kethoprak Kekinian dan Sandiwara Radio Bahasa Jawa	Jenis	2	2
		Kompetisi Bahasa dan Sastra	Jenis Kompetisi	8	8
		Pawiyatan Bahasa dan Sastra Jawa	Angkatan	5	5
		Promosi dan Publikasi Bahasa Sastra	cetak	16	16
		Aplikasi Digital Bahasa dan Sastra	Aplikasi	1	1
		Revitalisasi Sastra Lisan	Buku	2	2
		Sosialisasi Perda Pengembangan Bahasa Sastra dan Aksara Jawa	Kali	92	92
		Kontinuasi Kongres Kebudayaan Jawa	event	1	1
		Kajian SLD (Second Level Domain) Aksara Jawa	kajian	1	1
		Selebrasi Aksara Kawi	event	1	1
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman			
		Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Museum	40	40
		Wajib Kunjung Museum	peserta	15.000	15.000
		Lomba Cerdas Cermat Museum	Even	1	1
		Kajian Permuseuman	Kajian	1	1
		Duta Museum	event	6	6
		Pelatihan SDM Permuseuman	event	2	2
		Fasilitasi Museum	Fasilitasi	5	5
		Pengembangan Museum Kotagede	Museum	1	1
		Pengembangan Museum Pleret	Museum	1	1
		Festival Museum	Even	5	5
		Registrasi Museum	Museum	2	2
		Pengadaan Tanah untuk Museum	m ²	1.266	1.266
		Seniman Girisapta			
		Talkshow Permuseuman TV Nasional	event	1	1
		Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya			

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek	15	15
		Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB	Objek	50	50
		Pengkajian WBCB	Dokumen	2	2
		Penetapan CB	CB	15	15
		Penyelamatan WBCB	Obyek	1	1
		Pengamanan WBCB	Objek	1	1
		Perawatan WBCB	Objek	15	15
		Rehabilitasi WBCB	objek	1	1
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya			
		Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek	8	8
		Rekomendasi Pelestarian WBCB	Dokumen	50	92
		Publikasi WBCB	Edisi	2	2
		Pembinaan Pelestarian WBCB	Even	2	2
		Pemanfaatan Pengelolaan WBCB	KCB	3	3
		Penelitian WBCB	dokumen	5	5
		Pengawasan dan Pengendalian WBCB	Wilayah	5	5
		Jogja Heritage Track	Trip	1.360	1.360
		Penataan Fasad Malioboro	Unit	23	23
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			
		Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	21	21
		Publikasi dan Promosi Nominasi Warisan Budaya Dunia	Kali	809	809
		Penyiapan Yogyakarta sebagai Nominasi Warisan Budaya Dunia	Even	7	7
		Perencanaan Yogyakarta Warisan Dunia	Dokumen	2	2
		Kajian Nominasi Warisan Dunia	Dokumen	5	5
		Pencatatan, inventarisasi, dan penetapan Warisan Budaya Tak Benda	Dokumen	1	1
		Perayaan WBTB di Jakarta	Even	1	1
		Sosialisasi Warisan Budaya Dunia	kali	16	16
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	10	10
		Pemeliharaan	Jenis	3	3

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Sarpras	Jenis	7	7
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit	89	89
		Gamelan besi	Unit	67	67
		Pakaian Seni	Set	4	4
		Peralatan Seni	Set	22	22
		Gamelan Perunggu	Set	3	3
		Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dokumen	1	1
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen	3	3
		Penyusunan Regulasi Kebudayaan	Dokumen	2	2
		Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan			
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****)	Laporan	4	4
		Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kebudayaan TW I, II, III dan IV	Dokumen	4	4
		Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya			
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Dokumen	14	14
		Melbourne Symphony Orchestra	Even	1	1
		Penguatan lembaga budaya	Lembaga Budaya	14	14
		Kemitraan	Lembaga	6	6
		International Art Forum	Even	1	1
		Penguatan Dewan Kebudayaan	Bulan	9	9
		Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya			
		Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	Desa	76	76
		Pendampingan Desa Budaya	Bulan	12	12
		Gelar Potensi Desa Budaya	Desa Budaya	76	76
		Workshop SDM Desa Budaya	Kali	1	1
		Workshop Pendamping Budaya	Kali	3	3

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Sarpras Desa Budaya Gamelan Perunggu	Set	6	6
		Sarpras Desa Budaya Pakaian Pengrawit	Desa	20	20
		Pentas Seni Desa Budaya du Bandara YIA	Even	8	8
		Fasilitasi Upacara Adat	Desa Budaya	76	76
		BKK Balai Budaya	Balai Budaya	5	5
		BKK Kalurahan Mandiri	Kalurahan	7	7
		BKK Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya	Kalurahan	7	7
		Pentas Seni Desa Budaya Selasa Wagen	Desa Budaya	76	76
		Masterplan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya	Dokumen	5	5
		Review Pergub Desa Budaya	Kali	1	1
		Muhibah Budaya	Kali	1	1
		Akreditasi Rintisan Desa Budaya	Kali	1	1
		Buletin Desa Budaya	Edisi	2	2
		Kajian Pola Hubungan Desa Budaya	Dokumen	1	1
		Masterplan DMB Mulyodadi	Dokumen	1	1
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni			
		Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Lembaga	9	9
		ARTJOG	Even	1	1
		JAFF, FFD, FFPJ	Even	3	3
		Jogja Street Sculpture Project	Even	1	1
		Moekti	Lembaga	4	4
		Pekan Seni Grafis Yogyakarta	Even	1	1
		Pembuatan Film	Film	5	5
		Pemutaran Film	Kali	20	20
		Bioskop Jum'at	Kali	30	30
		Jogja Komik Week	Even	1	1
		Pengembangan Perfilman	Even	1	1
		Yogyakarta Gamelan Festival	Even	1	1
		Pembinaan Tari	Sanggar	5	5
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan	4	3

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Terlaksananya Pengiriman Tim Kesenian DIY	Destinasi	2	1
		Penghargaan Seniman dan Budayawan			
		Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang	36	36
		Gelar Karya Penerima Penghargaan Seniman dan Budayawan	Even	2	2
		Jumlah Penerima Penghargaan	Orang	26	26
		Penerima Penghargaan (apresiasi seni dan budaya anak)	Orang	10	10
		Festival Kebudayaan Yogyakarta			
		Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan	1	1
		Pawai	Even	1	1
		Pameran	Even	1	1
		Pasar Seni	Even	1	1
		Pentas Seni	Even	1	1
		Kompetisi	Kompetisi	1	1
		Pekan Kebudayaan Nasional	Even	1	1
		Gelar Budaya Yogyakarta			
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1	1
		Gelar Budaya Catur Sagatra	Even	1	1
		Festival Berjenjang DIY	Even	6	6
		Lomba Lukis DIY/Kyoto	Orang	100	100
		Pekan Budaya Difabel	Even	1	1
		Aubade	Even	1	1
		GSBY	Even	1	1
		Muhibah Budaya	Kali	2	2
		GBN	Even	1	1
		Jogja Joget	Even	1	1
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah			
		Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	8	8
		Sensus Data Budaya	Dokumen	1	1
		Publikasi Melalui Pentas Ketoprak	Kali	22	22
		Publikasi Melalui Dialog Budaya	Kali	19	19
		Publikasi Melalui Pengembangan Budaya	Kali	20	20
		Pengembangan Aplikasi Website	Aplikasi	0	0
		Live Streaming Agenda Budaya	Kali	30	29
		Pentas Budaya	Even	2	2
		Publikasi Media Cetak	Kali	72	72
			Tayang		

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Iklan Layanan Masyarakat	Kali Tayang	17	17
		Muhibah Budaya	Kali	2	2
		Pengelolaan Media Sosial	Bulan	12	12
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi			
		Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang	340	340
		Adat Suran Kepatihan	Even	1	1
		Festival Upacara Adat	Even	1	1
		Fasilitasi Ritual Penghayat dan Masyarakat	Kali	15	15
		Gelar Daur Hidup	Even	1	1
		Peningkatan SDM Adat Tradisi	Kali	1	1
		Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Kali	3	3
		Cetak Buletin Wening	Edisi	2	2
		Lomba Permainan Tradisional	Even	1	1
		Kajian Permainan Tradisional	kali	1	1
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat			
		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	5	5
		Pentas wayang klasik di Sasono Hinggil YK	Kali	12	12
		Pentas representasi pembinaan pedalangan	Kali	12	12
		Pentas pengembangan pedalangan	Kali	12	12
		Muhibah budaya ke luar DIY	Kali	1	1
		Wayang Wong Gagrak Yogyakarta	Kali	6	6
		Sosialisasi Tata Nilai Budaya DIY	Orang	150	150
		Perayaan WBTB DIY	Even	1	1
		JHIF (jogja international heritage festival)	Even	1	1
		Perayaan Hari Keris	Even	1	1
		Pemeliharaan dan Pengembangan Wayang dan Keris	Dokumen	1	1
		Omah Wayang	kali workshop	25	25
		. Sarasehan pedalangan	Kab/Kota	5	5
		Seleksi Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY dan Pengiriman ke Tingkat Nasional	Even	2	2
		BKK WBTB	Kalurahan	1	1
		Selendang Sutera			

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		Jumlah Laporan Selendang Sutera	Laporan	1	1
		Dialog Etnis	Kali	5	5
		Pentas Seni Budaya Nusantara	Even	3	3
		Kemah Budaya	Kali	1	1
		Penyelenggaraan Even Penggiat Seni			
		Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan	2	2
		Pentas Seni Budaya	Kelompok	274	274
		Pembinaan Sanggar	Kelompok	60	60
		Penguatan Lembaga Pelestari Budaya			
		Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Laporan	2	2
		Dukungan pelestarian budaya di Kraton dan PA	Lembaga	2	2
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi			
		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan	8	8
		Dukungan prosesi labuhan	Even	2	2
		Penerimaan Gunung Garebeg	Kali	3	3
		Mubeng Benteng	Kali	1	1
		Festival Bregodo	Kali	1	1
		Dukungan Pembantu Pelestari Lembaga Warisan Budaya	Bulan	11	11

17) *Urusan Perpustakaan*

a) *Kondisi Umum*

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perpustakaan merupakan salah satu unsur penting dalam hal ini karena merupakan media pendukung pendidikan secara nasional dan sekaligus sebagai fasilitas belajar sepanjang hayat. Selain itu, perpustakaan berperan penting dalam mengembangkan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi manusia yang memiliki pengetahuan luas, cakap, sehat, sejahtera beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 7 ayat 1b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pada Urusan Perpustakaan, Pemda DIY memiliki sasaran strategis yang tercantum di dalam RPD 2023-2026, yakni Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan. Indikator ini diukur dengan indikator Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan.

Tabel 3.119. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	%	28,66	28	28,75	102,68

Sumber: DPAD DIY, 2024

Pada tahun 2023, target indikator Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan ditetapkan sebesar 28% dengan realisasi sebesar 28,75%. Nilai absolut pengunjung perpustakaan pada tahun 2023 sebesar 1.010.437 pemustaka. Sedangkan jumlah penduduk usia potensial DIY (usia 5-69 tahun) menurut proyeksi BPS pada tahun 2023 adalah sebesar 3.514.577 orang. Sehingga persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan tahun 2023 adalah jumlah pengunjung perpustakaan dibagi dengan jumlah

penduduk usia potensial dikali 100% hasil yang diperoleh adalah sebesar 28,75%.

Statistik data pengunjung merupakan jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun 2023 baik kunjungan fisik maupun virtual. Kunjungan fisik berasal dari:

(1) Kunjungan dari Layanan Perpustakaan Menetap

(a) Kunjungan di unit Grhatama Pustaka (GTP)

Memberikan berbagai layanan perpustakaan seperti Layanan Koleksi Buku Anak, Layanan Koleksi Buku Braile, Layanan Koleksi Umum, Layanan Referensi Umum, Layanan Koleksi Digital, Layanan Koleksi Buku Langka, dan Layanan Koleksi Deposit.

(b) Kunjungan di unit *Jogja Library Center* (JLC)

disediakan Jenis layanan Yogyasiana, Majalah dan Surat Kabar, *Kyoto Corner*, Internet, Audio Visual, dan *Center of Excellent* (CoE) Budaya Jawa.

(c) Kunjungan di unit Rumah Belajar Modern (RBM).

Selain menyediakan buku juga menyediakan kegiatan interaktif yaitu perpustakaan anak, mendongeng, wisata pustaka, internet, permainan edukatif, dan peningkatan kreativitas.

(2) Kunjungan dari Layanan Perpustakaan Ekstensi

(a) Kunjungan dari Layanan Pojok Baca.

diselenggarakan di sepuluh titik lokasi yang sering dikunjungi masyarakat, yaitu RSUP dr. Sardjito, RS. YAP, RS. Bethesda, RS. PKU Muhammadiyah Gamping, RSUD Kota Yogyakarta, SAMSAT Yogyakarta, SAMSAT Kulon Progo, Pengadilan Negeri

Yogyakarta, BPJS Kesehatan, dan Kantor Pajak Pratama.

(b) Kunjungan dari Layanan Perpustakaan Keliling.

Layanan Perpustakaan Keliling pada area publik seperti pasar, alun-alun, puskesmas, sekolah, kantor kecamatan, dan pantai khususnya hari Minggu.

(c) Layanan Paket Buku dan *Delivery Order* (Pemustaka Istimewa)

Data Kunjungan virtual berasal dari *website* DPAD DIY dan Balai Layanan Perpustakaan, *website Jogja Library for All*, *website Center of Excellence (COE)*, aplikasi si Yokca, aplikasi iJogja, serta jangkauan media sosial.

Untuk mencapai target sasaran peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan, telah dilakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan animo pemustaka diantaranya dengan menambahkan layanan dongeng terutama pada layanan keliling yang menyasar pada pemustaka anak-anak. Upaya penambahan layanan mendongeng ini cukup memberikan pengaruh pada naiknya pemustaka yang menggunakan layanan keliling. Data pemustaka layanan keliling pada tahun 2022 tercatat sebesar 16.755 pemustaka, dengan menerapkan inovasi mendongeng ini hingga akhir triwulan IV tahun 2023 pemustaka yang menggunakan layanan keliling tercatat mencapai 31.203 pemustaka, atau meningkat sebesar 186,23%.

Pada tahun 2023, Pemda DIY meraih penghargaan sebagai daerah dengan Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tertinggi Nasional. DIY mendapat penghargaan setelah mampu meraih IPLM dengan nilai 83,63 dengan kategori

“Tinggi” pada tahun 2022 dan dinobatkan menjadi daerah dengan nilai IPLM tertinggi secara nasional. Upaya pembinaan perpustakaan dan juga penggalakan Budaya gemar membaca menjadi faktor yang mendorong DIY meraih penghargaan tersebut. Selain nilai IPLM tertinggi nasional, Pemda DIY mendapatkan penghargaan sebagai peraih Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) terbaik nasional dan instansi yang melakukan akreditasi terbanyak se-nasional.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam negara berkewajiban melindungi seluruh aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam karya cetak dan karya rekam yang bernilai intelektual dan/atau artistik sebagai hasil karya bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, semakin banyak penerbit yang menyerahkan terbitannya dalam bentuk digital. Mengingat DPAD DIY belum ada sarana dan prasarana yang memadai untuk Karya dalam bentuk digital, karya rekam dan atau karya dalam bentuk digital belum dapat diterima oleh DPAD DIY. Hal ini dikarenakan kekhawatiran terkait dengan keamanan karya yang memiliki hak cipta digital. Kondisi tersebut berpotensi membuat penerbit dan perusahaan karya rekam kehilangan kepercayaan kepada DPAD DIY, sekaligus aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam karya cetak dan karya rekam tidak dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

(2) Solusi

Mengupayakan pengembangan sistem repositori digital (e-deposit) yang aman, dapat diakses secara terbatas, transparan dan akuntabel sesuai undang-undang yang sekaligus dapat mengelola penerimaan karya dalam bentuk cetak (fisik). Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada penerbit dan pengusaha rekaman tentang sistem repositori digital (e-deposit), sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya bagi penerbit dan pengusaha rekaman sekaligus mendorong semangat kolaborasi dengan DPAD DIY.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui 2 program dan 8 sub kegiatan yang didanai oleh APBD. Alokasi anggaran tersebut sebesar Rp7.067.765.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp6.974.100.865,00 (98,67%), serta realisasi fisik mencapai 100%, seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.120. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	1	1
			Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah tenaga perpustakaan yang	orang	50	50

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi			
			Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			
			Subkegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Masyarakat	lokus	149	149
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	lokus	23	23
			Subkegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	orang	10	10
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			
			Subkegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	2.500	6.979
			Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah			
			Subkegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah			
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	entri	2.500	2.500
			Subkegiatan Penerbitan Bibliografi Daerah			
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	naskah	4	4
			Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Subkegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			
			Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	100	100



18) **Urusan Kearsipan**

a) **Kondisi Umum**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menunjukkan bahwa kearsipan dapat menunjang roda organisasi, mendorong tersedianya data-data maupun sebagai bukti pertanggungjawaban di daerah maupun skala nasional untuk menjelaskan identitas bangsa ini kepada generasi berikutnya.

Pemda DIY berupaya melaksanakan Urusan Kearsipan dengan sasaran strategis Meningkatkan pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi dengan indikator Jumlah arsip yang dimanfaatkan masyarakat.

Tabel 3.121. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2022-2023
Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Jumlah arsip yang dimanfaatkan masyarakat	Berkas	n/a	7.900	8.047	101,86

Sumber: DPAD DIY, 2024

Jumlah arsip yang dimanfaatkan masyarakat pada tahun 2023 tercapai sebanyak 8.047 berkas atau sebesar 101,86% dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, Pemda DIY mendapatkan tiga penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Diantaranya adalah Penghargaan Peringkat I Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 dengan kategori AA “sangat memuaskan”. Penghargaan selanjutnya adalah Simpul jaringan terbaik Nasional Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2023, dan yang terakhir penghargaan “Arsip Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia 1946-1949 Khazanah

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta” yang ditetapkan menjadi Arsip Memori Kolektif Bangsa (MKB).

Proses Pembinaan dan pengawasan kearsipan dibantu oleh pengembangan aplikasi pembinaan dan pengawasan kearsipan yang dinamakan Kinarya, yang dapat diakses pada <https://kinarya.jogjaprov.go.id/>. Pengembangan aplikasi ini merupakan upaya untuk memudahkan proses pembinaan dan pengawasan kearsipan di 88 OPD dan UPTD Pemda DIY. Sistem aplikasi ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka Reformasi Birokrasi. Aplikasi Kinarya ini juga sudah mengintegrasikan instrumen pembinaan dari ANRI dan membantu pengolahan data, penilaian pengelolaan kearsipan dan juga validasi data.

Tabel 3.122. Jumlah Pemanfaatan Arsip Tahun 2023

Statistik jumlah pemanfaatan arsip	Jumlah
a. Jumlah pemanfaatan arsip DPAD DIY	914
b. Jumlah pemanfaatan arsip Digital (Media Akses)	211
c. Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)	6.922
JUMLAH	8.047

Sumber: DPAD DIY, 2024

b) Permasalahan dan Solusi**(1) Permasalahan**

- (a) Pemanfaatan arsip yang belum optimal mengingat banyak arsip yang dikelola (termasuk arsip Kraton dan Pakualaman) yang masih menggunakan aksara Jawa, berbahasa Jawa, Belanda dan Arab pegon, sedangkan di sisi lain saat ini masih sangat sedikit orang/pihak yang memahami bahasa/aksara tersebut. Selain itu juga banyak arsip yang belum dapat dipreservasi sehingga terancam kelestariannya, termasuk arsip kartografi, film, *microfilm*, *video betamax*, *Video Home System*. (VHS), klise/negatif film, kaset, dan lain-lain.
- (b) Masih terdapat sekitar 58% arsip yang belum terolah. Kondisi ini membuat arsip bernilai sejarah tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

(2) Solusi

- (a) Mengupayakan pelaksanaan kegiatan alih media, alih bahasa dan alih tulisan serta pengadaan perlengkapan sarana media pembaca arsip tertentu seperti arsip dalam bentuk *betamax*, arsip mikrofilm, ataupun arsip audio. Sehingga kedepannya semakin banyak pihak yang dapat mengakses dan mengambil manfaat arsip-arsip tersebut.
- (b) Menggalakkan kegiatan pengolahan arsip baik itu arsip koleksi Kraton, Pakualaman maupun koleksi DPAD DIY. Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut arsip dapat dikelola dengan baik, tersedia daftar arsipnya sehingga penyelamatan dan pemanfaatannya lebih optimal.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui 2 program dan 7 sub kegiatan yang didanai oleh APBD dan Dana Keistimewaan (Danais) dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.620.922.600,00. Secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp5.458.899.638,00 atau 97,12% dan realisasi fisik mencapai 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.123. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			
			Subkegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	10.000	10.000
			Subkegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	laporan	2	2
			Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi			
			Subkegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	arsip	10.000	15.589
			Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			
			Subkegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	pengguna	750	2.059
			Subkegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	laporan	3	3
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten			
			Subkegiatan Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten			
			Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	32.000	33.002
			Subkegiatan Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya			
			Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	unit	39.500	39.500

2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

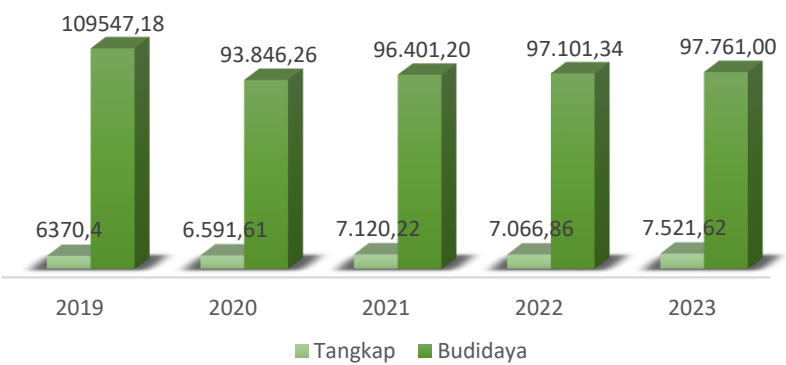
a. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) *Kondisi Umum*

Produksi perikanan di DIY terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Target indikator kinerja produksi perikanan tangkap sebesar 7.188 ton mampu dicapai dengan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar 7.521,62 ton (104,64%). Faktor Pendukung capaian produksi perikanan tangkap diantaranya didukung oleh cuaca yang mendukung untuk mencari ikan, ketersediaan ikan yang cukup melimpah terutama pada akhir tahun, harga jual yang relatif stabil dan permintaan akan ikan laut yang cukup tinggi dipasaran.

Target indikator kinerja produksi perikanan budidaya sebesar 97.446 ton mampu dicapai dengan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar 97.761 ton (100,32%). Produksi Perikanan budidaya diperoleh dari produksi ikan hasil aktivitas pembudidayaan oleh

masyarakat dalam kurun waktu satu tahun. Faktor pendukung capaian produksi perikanan budidaya diantaranya penggunaan benih yang unggul, keberhasilan pengendalian hama penyakit ikan, permintaan pasar yang cukup tinggi untuk ikan hasil budidaya dan penggunaan pakan mandiri.



Gambar 3.32. Produksi Perikanan di DIY Tahun 2020-2023 (ton)

Sumber: Dislautkan DIY, 2024

Tabel 3.124. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022-2023 Capaian 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap	juta rupiah	2.270.188	2.276.954	2.715.387	119,26
2	Persentase status pengelolaan kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan	persen	25	25	25	100

Sumber: Dislautkan DIY, 2024 (data sementara)

Target nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 2.276.954 juta Rupiah mampu dicapai dengan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar 2.715.387 juta Rupiah dengan tingkat capaian 119,26%. Hal ini antara lain didukung oleh faktor-faktor: (a) Harga ikan relatif stabil dan cenderung naik pada tahun 2023 (b) Harga pakan naik, namun sudah diimbangi dengan produksi pakan mandiri.

Meningkatnya status pengelolaan kawasan konservasi perairan tercapai 25%, sehingga persentase realisasi terhadap target sebesar 100% (terlampai). Hal ini didukung selesainya penyusunan Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Gunungkidul. Selain itu, terbentuknya Satuan Unit Organisasi Pengelola dan Penguatan Kelembagaan Pengelola yang disahkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 413/KEP/2022 tentang Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pantai Selatan Bantul DIY. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 25,00%.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta belum dapat beroperasi karena masih terdapat sedimentasi yang menutupi alur masuk dan kolam pelabuhan.
- (2) Harga pakan ikan pabrikan terus mengalami kenaikan sehingga biaya produksi untuk budidaya terus naik. Hal ini menyebabkan margin keuntungan bagi pembudidaya semakin kecil.
- (3) Penurunan kualitas benih dan calon induk ikan nila yang dihasilkan oleh Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) Cangkringan.

b) *Solusi*

- (1) Sudah dilakukan Kajian Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta melalui anggaran dana keistimewaan. Berdasarkan hasil dari analisis kelayakan dalam berbagai aspek di Kawasan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, dapat dihasilkan rekomendasi terkait zonasi pemanfaatan yaitu zona Pelabuhan tidak bisa digabung di tempat yang sama dengan zona budidaya

perikanan mengingat dampak yang akan ditimbulkan memiliki pertentangan dan diperkirakan akan memberikan efek yang buruk satu sama lainnya. Selain itu, berdasarkan rekomendasi jangka waktu pemanfaatan menyatakan bahwa skala prioritas jangka pendek dengan rentang waktu satu hingga empat tahun untuk pemanfaatan sementara hingga Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta siap dioperasikan.

- (2) Pembinaan kepada pelaku pembudidaya ikan untuk menerapkan budidaya secara intensif sehingga produksi semakin meningkat.
- (3) Dilakukan pemuliaan ikan nila dari 4 *strain* yang berbeda untuk mendapatkan *strain* ikan nila yang baik.

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran Rp74.814.982.188 dan terdiri dari 8 program dan 45 sub kegiatan. Capaian realisasi fisik Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 adalah 99,50%. Adapun anggaran terealisasi Rp72.266.903.160,00 atau 96,59% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp2.548.079.028,00 atau 3,41% yang bersumber dari sisa pengadaan barang dan jasa lewat *e-purchasing*, efisiensi belanja perjalanan dinas dan efisiensi honor narasumber.

Tabel 3.125. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi perikanan tangkap	7.188 Ton	7.521 ton	104,64%
	1.1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas				

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	10 GT sampai dengan 30 GT				
	1.1.1. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	10 Reko-mendasi	10 Reko-mendasi	100%
	1.2. Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				
	1.2.1. Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	2 Reko-mendasi	2 Reko-mendasi	100%
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi perikanan budidaya	97.446 ton	97.568 ton	100,32%
	2.1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
	2.1.1. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 reko-mendasi	10 reko-mendasi	100%
	2.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				
	2.3. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	174 unit	174 unit	100%

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	25%	25%	100%
	3.1. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				
	3.1.1. Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	10 objek	10 objek	100%
4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Tingkat konsumsi ikan masyarakat	32,70 kg/kap/ tahun	35,57 kg/kap/ tahun	108,78%
	4.1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
	4.1.1. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahandan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	100%

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		(Satu) Daerah Provinsi			
	4.1.2. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	4.2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				
	4.2.1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	197 Unit	197 unit	100%
	4.2.2. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan	50 unit usaha	50 unit usaha	100%

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing			
	4.3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
	4.3.1. Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	26 Unit Usaha	26 Unit Usaha	100%
	4.3.2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	10%	10%	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	5.1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				
	5.1.1 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	3 dokumen	3 dokumen	100
	5.1.2 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	33 Kelompok	33 Kelompok	100
	5.2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
	5.2.1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan di Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	20 dokumen	20 dokumen	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	5.2.2.Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Dokumen	20 Dokumen	100
6. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan	33,00	33,00	100
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				
	1.1.Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	695,9 ha	695,9 ha	100
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				
	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis	46,11%	46,11%	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Kasultanan dan Kadipaten			
	5. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				
	5.1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100

b. Urusan Pariwisata

1) Kondisi Umum

Sektor pariwisata di DIY di tahun 2023 menunjukkan adanya pemulihan dari masa pandemi Covid-19. Beberapa indikator telah menunjukkan peningkatan capaian dan bahkan ada yang melampaui capaian sebelum pandemi Covid-19. Indikator jumlah wisatawan nusantara yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan, tingkat penghunian kamar hotel bintang, serta PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum telah memperlihatkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, dan bahkan juga melampaui capaian di tahun 2019.

Namun demikian, masih ada beberapa indikator yang masih belum mencapai kondisi di masa sebelum pandemi Covid-19. Indikator tersebut adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan. Namun demikian, kondisi di tahun 2023 sudah memperlihatkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022.

Perkembangan dunia usaha di sektor pariwisata juga memperlihatkan adanya perkembangan, salah satunya jumlah akomodasi (hotel bintang dan non bintang) di tahun 2023. Pada

tahun 2023 jumlah akomodasi di DIY bertambah sebanyak 41 usaha, yang terdiri dari hotel bintang bertambah 19 usaha dan hotel non bintang/akomodasi lainnya bertambah 22 usaha.

Tabel 3.126. Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2022-2023

Kabupaten/Kota	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang		Jumlah Total	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kulon Progo	1	3	36	55	37	58
Bantul	3	3	303	345	306	348
Gunungkidul	2	3	143	150	145	153
Sleman	62	71	551	503	613	574
Yogyakarta	100	107	495	497	595	604
Jumlah	168	187	1.528	1.550	1.696	1.737

Sumber: Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya DIY 2023, BPS DIY, 2024

Pertumbuhan investasi untuk usaha akomodasi juga terlihat adanya penyebaran di beberapa kabupaten. Berdasarkan perbandingan data akomodasi tahun 2023 dan tahun 2022, dapat dilihat bahwa kabupaten Kulon Progo mengalami pertumbuhan sebesar 57%, kabupaten Gunungkidul meningkat 14% dan kabupaten Bantul meningkat 6%. Pertumbuhan dan penyebaran investasi untuk usaha akomodasi di kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di kabupaten terkait, serta diharapkan juga meningkatkan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

Perkembangan perekonomian dari sektor pariwisata ditandai dengan kontribusi PDRB DIY. Perekonomian DIY pada tahun 2022 sesuai dengan rilis BPS Provinsi DIY telah tumbuh 5,07%. Pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,72%, menempati peringkat ketiga di dalam pertumbuhan PDRB di DIY.

Indikator kinerja urusan pariwisata di Pemda DIY dibagi menjadi tiga sasaran yaitu, rata-rata lama tinggal wisatawan, rata-rata belanja wisatawan. Kedua indikator tersebut diharapkan dapat

mendukung pertumbuhan ekonomi di DIY. Berikut ini capaian kinerja urusan pariwisata di tahun 2023.

Tabel 3.127. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Rata-rata Lama tinggal wisatawan	Hari	1,90	1,90	1,94	102
2	Rata-rata belanja wisatawan (Rata-rata Tertimbang)	Rupiah	2.199.279	2.600.000	2.450.095	94,23

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi DIY dan Dispar DIY, 2024 (data diolah)

2) **Permasalahan dan Solusi**

a) **Permasalahan**

- (1) Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara.
- (2) Rendahnya lama tinggal wisatawan & belanja wisatawan/*spending money*.

b) **Solusi**

- (1) Pada tahun 2023 Pemda DIY telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, merujuk kajian yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan kajian Analisa Belanja Wisatawan tahun 2023, bahwa media promosi yang paling banyak digunakan oleh wisatawan mancanegara adalah media digital, seperti media sosial, *website*, dan sarana teknologi informasi lainnya. Seiring dengan hasil kajian tersebut, Pemda DIY terus meningkatkan penggunaan media digital seperti media sosial, *buzzer*, *sponsored content* dan *website* untuk menyebarkan informasi pariwisata di dalam dan luar negeri. Selain itu, upaya peningkatan kunjungan juga dilakukan dengan mengembangkan kemitraan. Melalui kemitraan maka promosi pariwisata dapat dikerjasamakan secara efektif baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

(2) Berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan dan belanja wisatawan antara lain:

- a) Melaksanakan dan menyelenggarakan *event* pariwisata dan kebudayaan di sepanjang tahun 2023, yang diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan, yang terdiri dari:
 - *Event* Pariwisata skala Internasional sebanyak 3 *event*
 - *Event* Pariwisata skala Nasional sebanyak 12 *event*
 - *Event* Pariwisata skala Lokal sebanyak 16 *event*
- b) Meningkatkan kualitas SDM Pariwisata dengan cara melaksanakan pelatihan dan sertifikasi kepada pekerja pariwisata, seperti pemandu wisata, pekerja SPA, pengelola destinasi dan desa wisata, pekerja hotel, pekerja restoran, kafe dan rumah makan.
 - Peningkatan kualitas untuk memperbaiki mutu produk dan memberikan pelayanan prima serta berupaya di dalam pelaksanaan kemudahan perizinan berusaha, seperti dengan meningkatkan kualitas Usaha Jasa Pariwisata (UJP) dengan cara bimbingan dan pengawasan serta Bimtek kepada enam jenis UJP di DIY.

3) ***Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023***

Pada tahun 2023 Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 7 Program dan 43 Sub kegiatan dengan total anggaran Rp38.577.323.413,00. Alokasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp35.850.187.877,00 dan Belanja Modal sebesar Rp2.727.137.536,00 dengan rincian sumber dana dari APBD sebesar Rp12.036.060.044,00 dan sumber Dana Keistimewaan sebesar Rp26.541.263.369,00. Secara keseluruhan Realisasi

Keuangan 2023 sebesar Rp37.927.927.780,00 (98,32%), yang terdiri dari Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp35.201.918.780,00 (98,19%) dan realisasi belanja modal sebesar Rp2.726.009.000,00 (99,96%). Realisasi fisik tahun 2023 adalah 100%.

Tabel 3.128. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	orang	6.000.000	6.100.000
			Jumlah lembaga wisata budaya yang dibina	lembaga	126	126
			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi (Pengelolaan Hotel Mutiara Bagian Selatan)	objek	1	1
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya.			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	unit	1	1
			Pengelolaan Gedung Hos Cokroaminoto	bulan	12	12
			Rehab Gedung Hos Cokroaminoto	paket	1	1
			Pengembangan Atraksi Wisata Budaya			
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	objek	264	264
			Event Skala Lokal (Atraksi wisata budaya di kawasan strategis 100 kali; Atraksi Wisata budaya Prajurit Puro PA; Pentas Kesenian di TIC Malioboro TIC Stasiun dan TIC Bandara 3 lokasi; Bergodo Jogo Malioboro ; Lomba Jemparingan Piala PA; Lomba Jemparingan piala HB; Pemilihan Dimas Diajeng 2023; Visiting Jogja Cycling Tour; Sriten Festival; Yogyakarta Symphny Orchestra; Tourism Photograph Hunting; Keroncong Kotagede; Visiting jogja 150K; Event Promosi	event	16	16

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Kawasan Wisata (Classic Rock), Abinaya Reksa Buwana, Semarak Watu Gagak)			
			Event Skala Nasional (Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta; Jogja Tourism Day; Jogja Fashion Carnival; Lomba Burung Perhutut Piala PA; Lomba Burung Perhutut Piala HB; Lomba Burung Berkicau Piala PA; Lomba Burung Berkicau Piala HB; Lomba Pacuan Kuda Piala HB; Simfoni Keroncong Plesir; Jogja Batik Carnival; Lomba Burung Derkuku Piala PA; Lomba Burung Derkuku Piala HB-12 event)	event	12	12
			Event Skala Internasional (Asean Tourism Forum; Jogja International Heritage Walk; Festival Layang Layang)	event	3	3
			Bakti Saka Pariwisata	kali	2	2
			Publikasi dan Promosi Pariwisata	jenis	5	5
			BKK Kalurahan Desa Mandiri Budaya	kelurahan	7	7
			BKK Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya	kalurahan	12	12
			Atraksi Kesenian	kali	69	69
			Penyusunan Master Plan DMB Tahun 2023	dokumen	3	3
			Atraksi wisata di Destinasi Wisata	kali	5	5
			Fasilitasi Penyelenggaraan Even Penggiat Seni Paket “ C	kali	5	5
			Fasilitasi Penyelenggaraan Even Penggiat Seni Paket - B	kali	5	5
			Monev BKK DMB dan Rintisan DMB	kalurahan	19	19
			Jogja Cultural Wellness Festival	kali	1	1
			Event Industri Pariwisata Berbasis Cluster (Shibori On The Street), (Jumputan On The Street)	event	2	2
			Wonderful Jogja	event	1	1
			Peningkatan Lembaga Wisata Budaya			
			Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	lembaga	191	191
			Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di calon Desa	orang	150	150

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Mandiri Budaya 2023 (Tahap Pengembangan)			
			Pelatihan Kuliner SDM Homestay di Desa Mandiri Budaya	orang	150	150
			Pengelolaan Media Sosial / Penambahan jumlah follower media sosial dinas pariwisata (instagram, facebook, twitter, youtube channel)	followers	35 .000	66 .199
			Storytelling Destinasi Wisata	dokumen	1	1
			Pelatihan dan Sertifikasi SPA	usaha	30	30
			Lomba Desa Wisata Tingkat DIY	desa/ kampung wisata	15	15
			Klasifikasi Desa/Kampung Wisata dan Homestay	dokumen	1	1
			Pendampingan Dimas Diajeng	lokasi	2	2
			Kajian Wellnes Tourism DIY	dokumen	1	1
			Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu di Obyek Wisata	orang	30	30
			Sosialisasi Sadar Wisata	kali	65	65
			Promosi pariwisata melalui media elektronik	kali	60	60
			Sosialisasi Perijinan usaha industri pariwisata	kali	16	16
			Talk Show Media TV	kali	16	16
			Workshop Unique Selling Point (USP) di Kampung Wisata	lokasi	15	15
			Sosialisasi Kelembagaan di Desa/Kampung Wisata	kali	5	5
			Sosialisasi Nilai-nilai Keistimewaan Bagi Pengelola Desa Wisata/Wisata Budaya	kali	8	8
			Promosi Destinasi Wisata Melalui Influencer	lokasi	4	4
			Pendampingan Desa Wisata	lembaga	2	2
			Journey to Wonderful Jogja	lembaga	2	2
			Updating Manajemen Event	lembaga	1	1
			Sosialisasi Keistimewaan untuk pelaku Ekraf	kali	5	5
			Sosialisasi Ekraf	kali	7	7
			Workshop Unique Selling Point (USP) di Desa Wisata	lokasi	5	5
			Workshop USP Ekraf di Kampung Wisata	lokasi	5	5
			Talk Show Bincang Wisata	kali	4	4

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Talk Show Bicara Potensi Ekraf Jogja Istimewa	kali	3	3
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	89,25	89,25
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4
			dokumen RENSTRA DISPAR DIY	dokumen	1	1
			Dokumen Renja 2024 Dispar DIY	dokumen	1	1
			Dokumen Renja Perubahan 2023 Dispar DIY	dokumen	1	1
			Dokumen ROPK dan PK	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4
			DPA Tahun 2023	dokumen	1	1
			Dokumen DPPA 2023	dokumen	1	1
			dokumen RKA Perubahan Dispar DIY	dokumen	1	1
			Dokumen RKA TA 2024	dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4
			Dokumen LKjIP dengan nilai AKIP A	dokumen	1	1
			Konsep/bahan LKPJ	dokumen	1	1
			Konsep/Bahan LPPD	dokumen	1	1
			Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan: 100%	dokumen	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ Bulan	73	66
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18
			Laporan Keuangan Bulanan	laporan	12	12
			Laporan Keuangan Triwulanan	laporan	4	4
			Laporan Keuangan Semesteran	laporan	2	2
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	29	29
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	UJP	275	282
			Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)	orang	13.900.000	15.462.343
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	1
			Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	4	4
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara tahun ke n	orang	5.500.000	6.833.153
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	2
			Pelayanan Informasi Pariwisata di 4 Lokasi	dokumen	1	1
			Pengelolaan Media Sosial	dokumen	1	1
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	1
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	1
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	produk	5	30
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	2	2
			Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif	laporan	1	1
			Sosialisasi sertifikasi pelaku usaha ekonomi kreatif	laporan	1	1
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Jumlah SDM yang sudah tersertifikasi	orang	3.566	3.941
			Jumlah Desa Wisata yang naik kelas / Jumlah objek yang difasilitasi oleh Kemitraan	lokasi	5	5
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	670	670
			Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan			
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Orang	240	240
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	99	99

c. Urusan Pertanian

1) *Kondisi Umum*

El Nino yang terjadi sepanjang tahun 2023 menjadi tantangan besar pada sektor pertanian dimana peningkatan suhu permukaan laut dan penurunan curah hujan di beberapa wilayah menyebabkan:

- a) Kekeringan yang berkepanjangan dan berkurangnya ketersediaan air untuk pertanian.
- b) Perubahan pola tanam yang menyebabkan penundaan dalam penanaman tanaman, penurunan luas tanam, atau bahkan kegagalan panen.
- c) Perubahan kondisi cuaca dapat menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi beberapa penyakit dan hama dimana penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang lebih cepat dan lebih luas dari serangan penyakit dan hama, yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen.
- d) Di sisi yang lain, meskipun El Nino mempunyai dampak negatif terhadap pertanian namun El Nino juga dapat menguntungkan bagi produksi komoditas hortikultura khususnya Tanaman Buah-Buahan dan Tanaman Sayuran. Produksi tanaman buah-buahan meningkat karena sinar matahari cukup sehingga pertumbuhan dan produktivitasnya maksimal. Untuk tanaman sayuran pada wilayah-wilayah yang sumber airnya berasal dari sumber air permukaan dangkal maka ketersediaan air dapat tercukupi sehingga pertumbuhan tanaman sayuran menjadi lebih baik dan produksi maksimal. Selain itu dengan adanya El Nino maka hama penyakit khususnya jamur dan bakteri menurun sehingga dapat mengurangi kehilangan hasil pada saat budidaya tanaman hortikultura.

Berikut ini capaian kinerja Urusan Pertanian tahun 2023

Tabel 3.129. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023**		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	%	n/a	0,45	1,21**	268,89

Ket.: **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS DPKP DIY, 2024

Indikator kinerja “Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan” terealisasi 1,21%, dengan persentase capaian 268,89% dari target 2023.

Pencapaian hasil indikator kinerja “Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan” diperoleh dari penghitungan rata-rata persentase peningkatan produksi empat sub sektor sebagai berikut:

Tabel 3.130. Capaian Produksi Sub Sektor Tahun 2022 dan 2023**

No	Capaian Produksi Sub Sektor	Realisasi 2022	Realisasi 2023**	Rata-rata % Realisasi**
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d-c)/c x 100%
1.	Tanaman pangan (ton)	2.046.837,00	2.051.082,00	0,21
2.	Hortikultura (ton)	412.332,00	429.773,64	4,23
3.	Perkebunan (ton)	63.922,46	63.934,77	0,02
4.	Peternakan (Animal Unit)	625.021	627.512	0,40
Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)				1,21

Ket.: **) Angka Sangat Sementara

Sumber: DPKP DIY, 2024

Tabel 3.131. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2022-2023

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2022	2023**
1	Padi	561.699	535.714
2	Jagung	349.465	362.236
3	Kedelai	6.956	10.306
4	Kacang Tanah	71.421	76.159

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2022	2023**
5	Kacang Hijau	614	467
6	Ubi Kayu	1.054.322	1.062.333
7	Ubi Jalar	2.360	3.831
8	Sorghum	0	45

Ket.: **) Angka sangat sementara

Sumber: DPKP DIY, 2024

Komoditas yang berkontribusi paling dominan terhadap produksi tanaman pangan di DIY adalah ubi kayu, padi, jagung dan kacang tanah. Komoditas ubi kayu menyumbang 51,79% dari total produksi tanaman pangan tahun 2023, disusul dengan komoditas padi sebesar 26,12%, jagung sebesar 17,66%, dan kacang tanah sebesar 3,71%.

Produksi tanaman pangan tahun 2023 sebesar 2.051.091 ton, mengalami peningkatan sebesar 4.254 ton (0,21%) dari tahun 2022. Peningkatan tersebut disumbang oleh tujuh komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan sorgum.

Faktor pendorong peningkatan produksi jagung, kedelai, dan kacang tanah terkait kondisi iklim yang mendukung untuk budidaya tanaman tersebut. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pada tahun 2023 terjadi fenomena El Nino sehingga kebutuhan airnya lebih sedikit dibanding tanaman padi. Selain itu didukung adanya program pemerintah dalam pengembangan kawasan jagung dan kedelai, penyediaan benih unggul bersertifikat, penyediaan sarana prasarana, serta pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Produksi ubi kayu meningkat sebesar 0,76% karena adanya penambahan luas tanam 829 ha (1,82%). Produksi ubi jalar meningkat 62,33% dibanding tahun 2022 seiring dengan meningkatnya minat petani melakukan budidaya karena tingginya permintaan pasar.

Komoditas yang mengalami penurunan yaitu padi dan kacang hijau. Produksi Padi menurun dibanding tahun 2022 karena dampak El Nino dan gangguan operasional saluran *van der wijck* dan selokan mataram yang sedang diperbaiki menyebabkan pengairan sawah menjadi terhambat sehingga luas panen berkurang 5.073 ha (-4,57). Selain itu, alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah yang besar menyebabkan luas baku sawah berkurang 9.227 ha (12,10%). Sedangkan untuk komoditas kacang hijau yang menurun disebabkan ketersediaan benih unggul berlabel terbatas dan rendahnya minat petani untuk melakukan budidaya kacang hijau.

Tabel 3.132. Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2022-2023

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2022	2023*
1	Cabai besar	Ton	1.719,39	2.423,66
2	Cabai rawit	Ton	15.197,69	21.427,30
3	Cabai keriting	Ton	33.665,07	44.443,49
4	Bawang merah	Ton	22.306,60	33.088,79
5	Pisang	Ton	78.045,27	75.541,69
6	Durian	Ton	8.849,06	13.601,59
7	Kelengkeng	Ton	1.745,15	2.485,92
8	Salak	Ton	54.498,01	51.838,64
9	Alpukat	Ton	11.501,67	11.734,96
10	Semangka	Ton	8.298,44	11.940,42
11.	Melon	Ton	7.001,43	10.884,86
12.	Jahe	Ton	4.969,77	4.821,59
13.	Kencur	Ton	2.675,17	2.697,54
14.	Kunyit	Ton	3.287,54	3.539,39
15.	Aglonema	Pohon	53.721	57.252
16	Anggrek Pot	Pohon	66.684	87.109

Ket.: *) Angka sementara

Sumber: DPKP DIY, 2024

Hortikultura merupakan salah satu sektor yang menarik generasi muda untuk menghasilkan pendapatan dengan siklus cepat atau *Cash Crop* seperti sayur-buah semusim dan tanaman hias, maupun yang bersifat investasi jangka panjang (buah-sayuran tahunan). Produksi Hortikultura dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh faktor iklim atau cuaca, hama penyakit,

ketersediaan sarana prasarana pendukung, dan harga pasar atau permintaan pasar.

Tahun 2023 produksi komoditas hortikultura yang terdiri dari sayur dan buah semusim, buah dan sayuran tahunan, serta tanaman biofarmaka mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Total produksi berdasarkan angka estimasi di akhir triwulan IV mencapai 429.773 ton, sementara produksi total tahun 2022 mencapai 412.332 ton sehingga mengalami kenaikan 4,2%.

Komoditas sayuran strategis seperti cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah mengalami kenaikan signifikan produksinya setelah mengalami penurunan pada tahun 2022. Kenaikan produksi cabai besar mencapai 40,96%, cabai rawit 40,99%, bawang merah 48,34%, semangka 40%, dan melon 50%.

Produksi kelompok buah dan sayuran tahunan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2022 mencapai sekitar 8-10% (data sementara). Produksi durian, kelengkeng, alpukat naik berturut-turut 53%, 42%, dan 2%. Sementara pisang dan salak mengalami penurunan. Penurunan produksi pisang -3% disebabkan sentra pisang di Gunungkidul mengalami penurunan produksi akibat musim kering yang panjang dan kurangnya irigasi. Salak yang sebagian besar di Sleman produksinya turun -4,88% disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi perumahan, dikonversi dengan tanaman lain, serta harganya yang kurang ekonomis dibanding komoditas hortikultura yang lain sehingga kurang dirawat dengan baik.

Produksi aneka tanaman biofarmaka tahun 2023 tidak mengalami banyak perubahan dibanding tahun 2022. Komoditas utama biofarmaka seperti jahe produksinya menurun sebesar -2,98%, sedangkan kunyit meningkat sebesar 7,66% dan kencur meningkat sebesar 0,80%. Sistem budidaya yang kurang intensif menyebabkan produktivitas tanaman biofarmaka tidak optimal.

Tanaman hias yang merupakan tanaman dekoratif mengalami pertumbuhan yang lambat cenderung stagnan. Hanya jenis-jenis utama seperti aglonema dan anggrek pot yang masih naik produksinya masing-masing sebesar 6% dan 30%. Jenis lain justru mengalami penurunan produksi seperti mawar turun -90%, krisan turun 4,64% , dan anggrek potong turun -44%.

Populasi ternak di DIY pada tahun 2023 sebanyak 627.512 Animal Unit (AU), mengalami peningkatan jika dibanding dengan populasi tahun 2022 sebanyak 615.558 AU. Rincian populasi peternakan tahun 2022 dan 2023 di DIY disajikan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.133. Populasi Ternak di DIY Tahun 2022-2023

No	Komoditas	PopulasiTernak			
		2022 (ekor)	2022 (AU)	2023* (ekor)	2023 (AU)
1	Sapi Potong	323.308	245.714	303.191	230.425
2	Sapi Perah	3.500	2.660	3.371	2.562
3	Kuda	1.757	1.212	1.632	1.126
4	Kerbau	471	429	418	380
5	Babi	9.299	1.860	9.096	1.819
6	Kambing	417.386	45.912	428.157	47.097
7	Domba	144.617	18.800	140.164	18.221
8	Ayam buras	3.463.921	69.278	3.506.066	70.121
9	Ayam Ras Petelur	4.712.467	94.249	4.835.021	96.700
10	Ayam Ras Pedaging	6.841.974	136.839	7.156.738	143.135
11	Itik	445.699	13.371	447.849	13.435
	TOTAL	16.364.399	630.326	16.831.703	625.021

Ket.: *) Angka sangat sementara

Sumber: DPKP DIY, 2024

Komoditas peternakan yang mengalami peningkatan populasi pada tahun 2023, meliputi: kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, dan itik. Populasi kambing mengalami peningkatan sebesar 5,14%, ayam buras sebesar 5,78%, ayam ras pedaging sebesar 19,78% dan itik sebesar 10,74%. Peningkatan populasi kambing dan ayam ras pedaging dipengaruhi adanya permintaan pasar yang cukup tinggi untuk olahan makanan atau kuliner sehingga minat untuk beternak juga meningkat. Adanya program

bantuan hibah ternak ayam juga memberikan peran bagi bertambahnya populasi ayam di DIY.

Komoditas strategis peternakan yang mengalami penurunan populasi, meliputi: sapi potong, sapi perah, kuda, kerbau, domba, babi, dan ayam ras petelur. Populasi sapi potong mengalami penurunan sebanyak 7.785 AU atau sebesar 3,39% terhadap populasi tahun 2022. Penurunan ini disebabkan sapi potong masih terdampak oleh terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah DIY yang telah menyerang ternak sapi pada tahun 2022-2023. Penyakit Mulut dan Kuku dan *Lumpy Skin Diseases* (LSD) yang menyebabkan kematian pada ternak, memberikan dampak pada penurunan kualitas reproduksi pada induk/sapi betina dewasa. Wabah PMK dan *Anthrax* di Kabupaten Gunungkidul juga berdampak pada terjadinya penjualan sapi potong “*panic selling*” yang berimbas pada penurunan populasi. Penurunan populasi sapi potong juga disebabkan oleh penurunan tindakan inseminasi buatan (IB) yang berakibat pada penurunan jumlah kelahiran sapi potong.

Penurunan populasi sapi perah merupakan dampak dari berkurangnya kualitas indukan secara genetik karena sebagian besar induk yang ada sudah harus diganti dengan generasi indukan dari Pusat Pembibitan yang tersertifikasi. Adanya PMK dan LSD juga menyebabkan penurunan populasi sapi perah karena banyak peternak yang menjual sapi terutama induknya. Sapi perah dan kambing merupakan hewan rentan PMK sehingga peternak masih fokus untuk mencegah dan/atau menangani ternaknya dari serangan PMK dan belum berani melakukan penambahan populasi ternak.

Data kasus kematian ternak di DIY akibat PMK dan LSD masih ditemukan pada tahun 2023. Jumlah ternak mati akibat LSD per Desember 2023 sebanyak 157 kasus. Kematian ternak akibat PMK pada sapi sebanyak 666 ekor. Kasus kematian pada kambing

sebanyak 13 ekor dan kematian pada domba sebanyak 39 ekor per 22 Desember 2023. Adapun kasus kematian ternak sapi akibat *anthrax* sebanyak 6 ekor, dan pada kambing sebanyak 6 ekor.

Penurunan populasi babi disebabkan adanya penjualan besar-besaran ternak babi di akhir tahun 2023 untuk wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pengalihan usaha ternak babi ke sektor lain di wilayah Kota Yogyakarta juga berimbas pada penurunan populasi babi, mengingat permasalahan lingkungan dan pengaduan oleh warga terkait pembuangan limbah peternakan babi yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan.

Penurunan populasi ayam ras petelur disebabkan karena penurunan Harga Pokok Penjualan (HPP) telur beserta ketidakstabilan harga telur di pasar sehingga menurunkan motivasi beternak ayam ras petelur di lapangan. Adanya *replacement* ternak ayam ras petelur yang sudah afkir juga disinyalir menyumbang terjadinya penurunan populasi.

Tabel 3.134. Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2022-2023**

No	Komoditas	Produksi (Ton)			Wujud Produksi
		2022	2023**	% Pertumbuhan	
1	Kelapa	52.760,76	53.225,62	0,88	kopra
2	Tebu	6.410,79	6.137,39	-4,26	gula hablur
3	Kakao	1.900,72	1.820,66	-4,21	biji kering
4	Cengkeh	658,17	661,02	0,43	bunga kering
5	Tembakau Rakyat	253,55	253,61	0,02	daun kering
6	Kopi	536,65	534,00	-0,49	biji kering
7	Jambu Mete	290,97	280,25	-3,68	biji kering
8	Teh	198,12	151,04	-23,76	daun kering

Ket.: **) Angka Sangat Sementara

Sumber: DPKP DIY, 2024

Komoditas kelapa, cengkeh, dan tembakau merupakan 3 komoditas unggulan perkebunan yang mengalami peningkatan produksi pada tahun 2023 ini. Peningkatan produksi kelapa dan cengkeh didukung oleh kegiatan intensifikasi dan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang dilakukan secara

swadaya oleh petani, sedangkan tembakau rakyat secara khusus didukung adanya fasilitasi peningkatan kualitas tembakau dari Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Pada tahun 2023 dilakukan peremajaan tanaman rusak untuk komoditas kelapa melalui hibah bibit kelapa genjah kopyor di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 2.500 bibit, Gunungkidul 500 bibit, dan Sleman 1.000 bibit.

Komoditas perkebunan unggulan lainnya seperti tebu, kakao, kopi, jambu mete, dan teh di tahun 2023 mengalami penurunan produksi. Dampak perubahan iklim El Nino sepanjang tahun 2023 menyebabkan berkurangnya ketersediaan air dan mengakibatkan tingginya serangan hama penyakit, sementara upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swadaya pekebun belum mampu mengatasi seluruh serangan yang ada. El Nino juga menyebabkan mundurnya pola tanam untuk komoditas kopi dan kakao dimana di tahun 2023, melalui dana APBD Provinsi dilakukan peremajaan tanaman rusak melalui hibah bibit kopi robusta sebanyak 2.000 bibit dan kakao sebanyak 5.000 bibit di Gunungkidul.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2023, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (1) Perubahan iklim menyebabkan El Nino sepanjang tahun 2023.
- (2) Kasus PMK yang mewabah di DIY sejak awal Mei 2022 hingga Desember 2023 masih perlu mendapatkan penanganan yang cukup serius dalam pengendaliannya. Ancaman penyakit LSD yang mulai menyerang sebagian wilayah DIY juga harus mendapatkan penanganan yang

baik agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak.

- (3) Belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

b) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas.

- (1) Meningkatkan kapasitas petani dalam rangka mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim misalnya dengan Sekolah Lapangan (SL).
- (2) Melaksanakan pencegahan dan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) secara berkelanjutan, untuk PMK dengan terus melaksanakan peningkatan biosekuriti, vaksinasi sesuai target, penandaan dan pendataan ternak serta untuk LSD dengan melaksanakan sosialisasi serta berbagai tindakan pencegahan melalui peningkatan biosekuriti, pengendalian vektor, peningkatan pengawasan lalu lintas ternak, dan vaksinasi.
- (3) Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan dengan pemerintah kabupaten dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian agar kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan upaya menjaga LP2B.

3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Urusan Pertanian pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran Rp33.449.720.012,00 yang terdiri dari anggaran reguler sebesar Rp32.751.690.012,00 dan Dana Keistimewaan sebesar Rp698.030.000,00. Dana Keistimewaan melalui urusan tata ruang terdiri dari 1 program dan 1 sub kegiatan dan murni/reguler terdiri dari 5 program dan 19 sub kegiatan. Realisasi anggaran terealisasi Rp32.567.046.927,00 atau 97,36% sehingga dapat dikatakan

terdapat efisiensi Rp882.673.085,00 atau 2,64% yang bersumber dari sisa pengadaan barang dan jasa lewat *e-purchasing*, efisiensi belanja perjalanan dinas dan efisiensi honor narasumber. Kemudian untuk realisasi fisik mencapai 100%. Rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.135. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik	Skor	97,5	98,4
			Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	%	91	93,88
			Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	%	100	100
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	2	2
			Bimtek Sarana dan Prasarana PPH Perkebunan (Cukai)	dokumen	1	1
			Hibah Sarana dan Prasarana PPH Perkebunan (Cukai)	kelompok	4	4
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	dokumen	7	7
			Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Hasil Perkebunan	lokasi	4	4
			Budidaya tanaman perkebunan	kelompok	3	3
			Budidaya tanaman kopyor	kelompok	8	8
			Pengembangan tanaman pangan (budidaya tanaman ubi kayu)	kelompok	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Koordinasi Pengawasan Sarana Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan	kelompok	79	79
			Bimtek pembuatan dan penggunaan pupuk organik	lokasi	4	4
			Fasilitasi pupuk organik untuk lahan sawah	kelompok	5	5
			Budidaya tanaman buah	kelompok	45	45
			Budidaya tanaman hidroponik	kelompok	1	1
			Bimtek pasca panen/pengolahan hortikultura	lokasi	4	4
			Registrasi kebun	sertifikat	100	100
			SL GAP Hortikultura	lokasi	5	5
			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	dokumen	1	1
			Pengembangan ternak ruminansia besar	kelompok	96	96
			Pengembangan ternak ruminansia kecil	kelompok	163	163
			Pengembangan ternak unggas	kelompok	35	35
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih			
			Jumlah Sertifikat Benih	sertifikat	135	135
			Luas areal yang mengajukan sertifikasi untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	ha	430	436,67
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			
			Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	laporan	2	2
			Produksi Benih Cabai	kg	35	35
			Produksi Benih Tomat	kg	35	35
			Produksi Benih Jamur Edibel	botol	4.500	4.500
			Produksi Benih Tanaman Buah	batang	7.000	7.000

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Produksi Benih Tanaman Hias	batang	25.000	25.000
			Rekomendasi Produsen dan Pongedar Benih Hortikultura	rekome ndasi	7	7
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan			
			Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	dokume n	2	2
			Produksi Benih Padi	kg	51.510	59.100
			Produksi Benih Jagung	kg	4.000	4.000
			Produksi Benih Kedelai	kg	2.000	2.000
			Produksi Benih Kacang Tanah	kg	700	700
			Produksi Benih Kacang Hijau	kg	700	700
			Rekomendasi Produsen dan Pongedar Benih Tanaman Pangan	rekome ndasi	14	41
			Operasional Jogja Benih	tahun	1	1
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			
			Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	laporan	2	2
			Produksi Benih Kelapa	batang	3.000	3.000
			Produksi Benih Kakao	batang	5.000	5.000
			Rekomendasi produsen dan pongedar benih Perkebunan	rekome ndasi	1	1
			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan	2	2
			Produksi bibit ternak (ekor) besertifikat SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	ekor	65	65
			Produksi HMT rata-rata pertahun untuk ternak di UPTD	kg	971.000	1.113.156
			Semen beku (dosis) yang sesuai SNI	dosis	40.000	65.979
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Indeks prasarana pertanian yang dibangun	Skor	0,018	0,018

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			
			Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	dokumen	2	2
			Bimtek Budidaya Tanaman Tembakau sesuai GAP (Cukai)	kelompok	3	3
			Pembangunan sistem informasi agribisnis	dokumen	1	1
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	dokumen	1	1
			Sarana prasarana rehab jaringan irigasi tersier	unit	41	41
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis/PHMS	%	100	100
			Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			
			Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	laporan	1	1
			Fasilitasi obat dan vaksin	botol (140)/ sachet (50)	190	190
			KIE Zoonosis	lokasi	5	5
			Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan			
			Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	laporan	1	1
			Bimtek pemotongan hewan qurban	orang	100	100
			Pembekalan pengawasan pemotongan hewan qurban & pemantauan zoonosa	orang	200	200
			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi			
			Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengamanan hewan ternak melalui Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT)	lokasi	7	7
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)			
			Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	sertifikat	2	2
			Jumlah sertifikat yang dihasilkan pada pelaksanaan audit NKV terhadap unit usaha produk asal hewan	sertifikat	2	2
			Jumlah unit usaha yang terawasi dalam penerapan standart teknis kesmavet	unit usaha	10	10
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	dokumen	1	1
			Hasil uji penyakit hewan	sampel	18.200	18.200
			Hasil uji sampel produk asal hewan	sampel	300	300
			Terpeliharanya Status Akreditasi Laboratorium	ruang lingkup	4	4
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase pertanaman aman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	95	95,4
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	ha	0	0
			Layanan laboratorium LPMPP	tahun	1	1
			Dokumen data, dan informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Kecamatan	67	67

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	dokumen	1	1
			Rekomendasi tingkat residu pada produk pertanian	rekomendasi	40	40
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Tingkat penerapan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	%	60	64,45
			Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN			
			Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	orang	300	300
			Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan	angkatan	1	1
			Pelatihan Agribisnis Hortikultura	angkatan	1	1
			Pelatihan Agribisnis Perkebunan	angkatan	1	1
			Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan	angkatan	1	1
			Temu tugas penyuluh	kali	1	1
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	dokumen	1	1
			Operasional Jogja Agro Park	tahun	1	1
			Programa Penyuluhan	dokumen	1	1
			Publikasi dan Informasi	kali	1	1
			Pembangunan/Rehab Fisik JAP	paket	1	1
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	kelompok	1	1
			Data Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok	dokumen	1	1
			Penghargaan Bidang Pertanian	kategori	5	5
			Publikasi dan informasi	kali	1	1
			Magang petani milenial	kali	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA			
			URUSAN TATA RUANG			
			Jumlah Luas Penanaman komoditas cabai, bawang merah,	ha	20	20

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			dan kakao di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten			
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	dokumen	4	4
			Budidaya tanaman kakao sesuai Good Agriculture Practices (GAP)	ha	10	10
			Pemeliharaan tanaman kakao	ha	8	8
			Festival coklat Nglanggeran	kali	1	1
			Bimtek pengolahan pasca panen kakao	kelompok	2	2

d. Urusan Kehutanan

1) Kondisi Umum

Pada tahun 2023, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Urusan Kehutanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.136. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	%	n/a	68,6	71,4	104,08

Sumber: DLHK DIY, 2024

Realisasi kinerja Urusan Kehutanan berasal dari capaian di masing-masing program dengan perincian sebagai berikut :

a) Program Pengelolaan Hutan

Secara umum, program pengelolaan hutan ini meliputi tahapan perencanaan pengelolaan kawasan hutan, realisasi nilai produksi sektor kehutanan, penanganan lahan kritis,

kejelasan tata batas kawasan, pembinaan usaha kehutanan, dan pendampingan usaha pembibitan yang bersertifikat.

- (1) Dari tahap perencanaan, tahun 2023 Pemda DIY menyusun dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek. Kedua dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kedepannya.
- (2) Dari sisi produksi sektor kehutanan, tahun 2023 Pemda DIY dapat merealisasikan produksi kayu yang terdiri dari kayu jati sebanyak 350,90 m³ dan kayu rimba campuran sebanyak 6,54 m³. Produksi minyak kayu putih sebanyak 19.529 liter. Selain itu juga berasal dari pengelolaan wisata alam.
- (3) Rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan sepanjang tahun 2023 mencapai 406 ha yang berasal dari kegiatan penanaman hutan rakyat seluas 106 ha dan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 4 unit atau setara dengan 300 ha.
- (4) Pada tahun 2023 telah dilakukan pemantapan batas kawasan sepanjang 22 km dengan rincian (1) pemantauan batas kawasan di KPHP Tahura Bunder Yogyakarta, RPH Dlingo-Mangunan BDH Kulonprogo Bantul, dan (2) kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan di RPH Candi BDH Karangmojo.
- (5) Patroli pengamanan hutan dilakukan secara rutin selama 12 bulan dengan luasan yang diawasi adalah 15.581 ha. Selama tahun 2023 terdapat 1 kali kejadian pencurian dan 3 kasus kebakaran.
- (6) Jumlah pemegang izin perizinan berusaha pengolahan hasil hutan yang diberikan pendampingan selama tahun 2023 adalah sebanyak 13 usaha yang tersebar di Kabupaten Bantul (8 usaha), Kabupaten Sleman (2 usaha), Kabupaten Gunungkidul (2 usaha), dan Kota

Yogyakarta (1 usaha). Seluruh usaha kegiatan tersebut telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai pemegang izin.

- (7) Usaha pengelolaan perbenihan pada tahun 2023 terdapat tambahan 1 usaha yang memiliki sertifikat baru. Dengan demikian maka total sudah terdapat 16 usaha perbenihan yang ada di DIY.

b) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Komponen penyusun dari ketercapaian program ini adalah nilai *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Pada tahun 2023 ini nilai METT yang didapatkan atas pengelolaan kawasan Tahura Bunder adalah sebesar 66%. Realisasi ini berasal dari aspek *context* senilai 3, *planning* senilai 13, *input* sebesar 15, *process* sebesar 30, *outputs* senilai 1 dan *outcomes* sebesar 1.

Selain itu, juga dilakukan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di 3 lokasi yaitu mangrove baros, mangrove jangkaran, dan habitat burung migran trisik. Pembinaan petani serta sosialisasi KEE di Trisik, Baros, dan Jangkaran dilakukan dengan dukungan dari KLHK.

c) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM anggotanya. Pada tahun 2023 terdapat 17 KTH yang berhasil ditingkatkan kelasnya. Dengan kelas KTH yang meningkat maka diharapkan fasilitasi dan bantuan ke KTH akan semakin terbuka untuk diakses.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Salah satu potensi besar yang ada di sektor kehutanan adalah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), tetapi dalam pengembangannya ditemukan beberapa permasalahan antara lain :

- (1) Masih terdapat keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan KTH sehingga masih kurang pemahaman bagaimana potensi dan cara mengoptimalkan pengembangan HHBK.
- (2) Keterbatasan dalam infrastruktur dan aksesibilitas pendanaan KTH sehingga sarana dan prasarana untuk mengembangkan hasil produknya masih minim. Selain itu juga terbatasnya informasi dalam mengakses sumber-sumber dana alternatif yang digunakan sebagai modal pengembangan.
- (3) Pasar dan Pemasaran masih menjadi tantangan terbesar KTH dalam pengembangan produk HHBK di DIY.

b) Solusi

Untuk mengoptimalkan pengembangan HHBK, berikut ini beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- (1) Pada tahun 2023 telah dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada 17 KTH dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas SDM anggotanya. Dalam pelatihan tersebut KTH juga didorong untuk bisa melakukan inovasi terhadap HHBK yang menjadi potensi di wilayahnya masing-masing.
- (2) Terdapat 3 KTH yang telah mendapatkan fasilitasi dari APBN yang digunakan untuk pembentukan dan pengembangan wanawiyata widyakarya.

- (3) Pengembangan pasar dilakukan melalui penyelenggaraan *Virtual Exhibition* berbasis web sehingga dapat menjadi alternatif pemasaran yang modern.

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Alokasi anggaran Urusan Kehutanan tahun 2023 sebesar Rp5.766.474.126,00. Secara fisik, pelaksanaan kegiatan telah tercapai 100%, sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar Rp5.563.978.344,00 atau dengan persentase capaian 96,49%. Capaian kinerja program kegiatan secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.137. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
			Jumlah dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanian	dokumen	1	1
			Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	dokumen	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	entitas	7	7
			Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman			
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit	1	1
			Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	Objek	2	2
			Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat			
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase kesesuaian pengelolaan hutan	%	69.33	76.7
			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)			
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	2	2
			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	75	75
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	5	5
			Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			
			Jumlah Bibit Tanaman Yang Bersertifikat	batang	100 .000	100 .000
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	ha	15 .581	15 .581
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	1	1
			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi			
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi			
			Sertifikasi Sumber Benih			
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	1	1
			Sertifikasi Mutu Benih			
			Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	1	1
			Sertifikasi Mutu Bibit			
			Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat	1	1
			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit			
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	1	1
			Pembangunan Sumber Benih			
			Luas Sumber Benih yang Dibangun	ha	5	5
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
			Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di TAHURA dan KEE	%	68,53	69,07
			Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	laporan	1	1
			Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi			
			Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	ha	6	6
			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi			
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	4	4
			Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Dokumen	4	4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi			
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	ha	5	5
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	%	22,17	25,13
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	59	59
			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	10	10

e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1) *Kondisi Umum*

Dalam penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2023 tetap berfokus kepada peningkatan pelayanan publik dengan mengusung tujuan membangun keamanan energi, keadilan energi, peningkatan akses energi masyarakat serta keberlanjutan lingkungan melalui pembinaan, penataan perizinan, fasilitasi infrastruktur, peningkatan pengawasan dan pengendalian pada sub urusan geologi air tanah, mineral dan batubara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan.

Adapun indikator yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026 beserta capaian pada tahun 2023, dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran urusan energi dan sumber daya mineral disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.138. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,99	99,99	99,99	100
2	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	%	n/a	40,31	40,31	100

Sumber: DPUPESDM DIY, 2024

Persentase rumah tangga berakses listrik terjabarkan dalam rasio elektrifikasi. Capaian rasio elektrifikasi di DIY tahun 2023 yaitu sebesar 99,99% (data SILM PT.PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM). Data capaian tersebut menggambarkan masih terdapat sebagian kecil rumah tangga di DIY yang belum berakses listrik dengan alasan yaitu masih adanya sebagian kecil RumahTangga yang menolak akses listrik karena kondisi tertentu seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Manula dan Penganut Kepercayaan (Kejawen).

Capaian indikator Kesesuaian izin air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang sampai dengan 2023 sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 40,31% (setara dengan 44 izin pengusahaan air tanah sesuai ketentuan dan 144 izin usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik terhadap 315 izin pengusahaan air tanah dan 130 izin usaha pertambangan berdasarkan *baseline* tahun 2022). Indikator ini bertujuan agar pelaksanaan pengusahaan air tanah dan usaha pertambangan dilakukan dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya mineral, lingkungan, dan tata ruang sehingga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator tersebut diantaranya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha air tanah maupun pertambangan baik berizin maupun tidak berizin serta pembentukan tim terintegrasi lintas sektor serta melakukan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).

Pada kegiatan pengawasan usaha pertambangan, telah dikirimkan 30 surat peringatan (SP) terhadap izin usaha pertambangan yang melanggar ketentuan dalam dokumen izin serta 40 surat himbauan terhadap Penambangan Tanpa Izin (PETI). Dalam hal perizinan telah dilakukan penyediaan Data Zona Konservasi Air Tanah sebagai dasar penerbitan perizinan dan pelaksanaan pendampingan teknis terhadap izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan Badan Geologi, serta memberikan rekomendasi/persetujuan dalam penerbitan perizinan pengusahaan pertambangan.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Belum terbitnya peraturan teknis yang mengatur penataan perizinan sumur produksi eksisting yang belum berizin dan sumur produksi yang habis masa berlaku izinnya sehingga dikhawatirkan pengambilan air tanah tidak sesuai dengan zona konservasi air tanah;
- (2) Porsi penggunaan air tanah cenderung masih lebih besar daripada air permukaan dikarenakan harga air baku untuk air tanah lebih rendah daripada tarif air permukaan;
- (3) Seiring dengan adanya peningkatan Pembangunan, terjadi peningkatan permintaan atas material mineral dan batuan, apabila tidak diantisipasi dengan baik maka dapat mendorong maraknya kegiatan penambangan tidak berizin (PETI);
- (4) Masih terdapat beberapa rumah tangga di DIY yang masih belum memiliki sambungan listrik secara mandiri/menyalur listrik dari rumah tangga yang lain sehingga belum sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

- (5) Masih terdapat beberapa bangunan rumah yang berkelompok/berdekatan satu sama lain dalam suatu dusun yang jaraknya > 60 meter dari tiang listrik terdekat.
- (6) Masih terdapat adanya ketidaksesuaian data antara Data Terpadu dan Data Subsidi Listrik dengan kondisi rumah tangga miskin belum berlistrik sesungguhnya di lapangan.
- (7) Masih terdapat adanya kelompok masyarakat tertentu yang tidak menghendaki aliran listrik di rumahnya.

b) Solusi

- (1) Mendorong Badan Geologi bersama dengan Pemda DIY untuk segera menerbitkan peraturan teknis penataan perizinan air tanah dan agar dapat segera diaplikasikan di daerah;
- (2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama intensif dengan Pemerintah Pusat (Badan Geologi), Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam mensosialisasikan dan upaya pemantauan pemanfaatan air tanah dengan terlebih dahulu mengutamakan air permukaan khususnya untuk kegiatan usaha;
- (3) Perlu terus ditingkatkan sinergitas antara Tim Gubernur dan Pemerintah Pusat dengan Aparat Penegak Hukum dalam mengatasi permasalahan pertambangan, khususnya penertiban PETI dan menyusun peraturan penerbitan perizinan yang aplikatif namun tetap mengutamakan kelestarian lingkungan;
- (4) Akselerasi program bantuan instalasi listrik dan sambungan rumah yang sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (5) Melakukan survey kebutuhan perluasan jaringan listrik yang mengikuti pertumbuhan penduduk/kawasan permukiman dan penyampaian usulan perluasan

jaringan listrik perdesaan kepada Kementerian ESDM dan PT PLN.

- (6) Melakukan penjarangan data secara terpadu dan masif dengan melibatkan kapanewon dan kalurahan terhadap rumah tangga miskin yang belum memiliki akses listrik yang sesuai dengan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2).
- (7) Perlu adanya pendekatan secara khusus pada masyarakat yang tidak menghendaki aliran listrik di rumahnya, tentang manfaat listrik dapat membawa dampak kehidupan yang lebih baik.

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Pada tahun 2023 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan melalui 4 program dan 11 sub kegiatan dengan alokasi Rp1.539.589.300,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.489.629.726,00 atau 96,76% dan pencapaian fisik sebesar 99,47%.

Tabel 3.139. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
			Rerata penurunan muka air tanah dalam kategori aman	Persen	20	20
			Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan	Persen	45.45	45.45
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	5	5
			Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah	Laporan	1	1
			Pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah Dalam	Paket	1	1
			Pendampingan Teknis Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	Laporan	1	1
			Workshop pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah	Laporan	1	1
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah			
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen	2	2
			Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah di DIY	Dokumen	2	2
			Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah			
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	2	2
			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Laporan	1	1
			Tenaga Ahli Penyusunan Instrumen Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah	laporan	1	1
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	3	3
			Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah di DIY	laporan	2	2
			Pengelolaan Aplikasi SIPATA	laporan	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
			Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	Persen	7,84	9,17
			Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	%	33,61	33,61
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan	3	3
			Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY	laporan	2	2
			Sosialisasi Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertambangan	Laporan	1	1
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	4	4
			Pembinaan Pelaksanaan Usaha pertambangan	Laporan	1	1
			Penyusunan Materi Teknis Rancangan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dokumen	1	1
			Rekomendasi Teknis/Persetujuan Izin Usaha Pertambangan	Laporan	1	1
			Workshop Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan	laporan	1	1
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	5	5
			Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan di DIY	laporan	2	2
			Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di DIY	laporan	2	2
			Pengelolaan Aplikasi SIPBANG	aplikasi	1	1
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	4	4
			Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	laporan	2	2
			Survey harga patokan mineral bukan logam dan batuan di DIY	laporan	2	2
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			
			Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan	TOE	2 .000	6 .169
			Terpantaunya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	%	100	100
			Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Laporan	2	2
			Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan di DIY	laporan	2	2
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
			Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	%	46,88	46,88
			Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	SR	14 .448	16 .147
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	dokumen	3	3
			Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota	dokumen	1	1
			Rekomendasi Teknis Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota	dokumen	1	1
			FGD Penyusunan Draft Rapergub Pelaksanaan RUED DIY 2020 - 2050	dokumen	1	1
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	4
			Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di DIY	laporan	2	2
			Pengelolaan Aplikasi SIPGELIS	aplikasi	1	1
			Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan	Laporan	1	1
			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	116	105
			Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga (Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman)	unit	47	47
			Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga DIY 1	unit	69	58

f. Urusan Perdagangan

1) Kondisi Umum

Pada tahun 2023 PDRB sektor perdagangan mencapai Rp9,16 Triliun dan tumbuh sebesar 4,29% dari tahun sebelumnya. Sektor ini memberi kontribusi sebesar 8,17 % pada PDRB DIY. Sektor ini diantaranya ditopang oleh aktivitas ekspor. Nilai ekspor DIY di tahun 2023 sebesar US\$ 472,3 Juta dan terdiri dari Produk Industri Pengolahan sebesar US\$ 469,3 Juta dan produk pertanian sebesar US\$ 3,0 Juta. Komoditas utama ekspor DIY adalah pakaian jadi bukan rajutan, perabot dan penerangan rumah, barang-barang dari kulit, barang-barang rajutan, serta Jerami/bahan anyaman. Adapun negara-negara tujuan ekspor utama DIY adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Australia dan Belanda. Tabel berikut adalah perkembangan ekspor DIY dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3.140. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2019-2023 (dalam US\$ Juta)

No	Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	144,3	131,4	185,2	213,5	176,9
2	Perabot, Penerangan Rumah	55,3	58,9	76,4	68,1	56,8
3	Barang-barang Rajutan	39,2	36,9	50,9	62,7	51
4	Barang-barang dari Kulit	31,5	29,4	48,6	64,4	36,9
5	Jerami / Bahan Anyaman	18,7	24,8	45	38	25,5
6	Kayu, Barang dari Kayu	15,5	17,7	24,8	27,8	20,5
7	Plastik dan Barang dari Plastik	13,3	14,1	22,6	12,5	19,6
8	Kertas / Karton	13,3	12,2	14,8	16,1	13,8
9	Bulu Unggas	12,6	9,4	12,3	11,2	13,4
10	Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian	11,9	9,5	11,8	15,2	10,5
11	Lainnya	48,3	54,4	64,6	53,8	47,4
	Total Ekspor	403,9	398,7	557	583,3	472,3

Sumber: Disperindag DIY, 2024

Terkait dengan kinerja Urusan Perdagangan pada tahun 2023, berikut target dan realisasi kinerja Urusan Perdagangan:

Tabel 3.141. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Nilai Ekspor Tahun n	US \$ Juta	583,3	630	472,3	74,97

Sumber: BPS DIY, 2024 (capaian tahun 2022 <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/8/275/2/nilai-ekspor-dan-impor.html>)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kinerja sektor ini di tahun 2023 hanya tercapai sebesar 74,97% dari target. Pencapaian kinerja sektor ini terhambat berbagai faktor eksternal di antaranya penurunan permintaan dari Amerika dan Eropa yang merupakan tujuan utama ekspor DIY akibat resesi global, mahalnya logistik ekspor-impor akibat adanya perubahan geopolitik di Eropa, dan ketatnya aturan impor ke negara-negara Eropa terutama untuk produk kayu (*furniture, handicraft*).

2) **Permasalahan dan Solusi**

a) **Permasalahan**

- (1) Krisis ekonomi di negara tujuan utama ekspor DIY seperti Amerika dan Eropa yang menyebabkan penurunan permintaan ekspor komoditas pakaian jadi dan tekstil, dimana kedua komoditas tersebut merupakan komoditas utama ekspor DIY.
- (2) Ketatnya aturan impor di negara-negara Eropa terutama untuk produk kayu (*furniture, handicraft*) sehingga pelaku usaha menjadi lebih berat untuk memenuhi persyaratan.
- (3) Adanya perang Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel menyebabkan biaya logistik ekspor impor mahal.
- (4) Permasalahan internal nasional masih menjadi kendala bagi para pelaku usaha seperti pajak dan perizinan usaha.
- (5) Ekspor produk Salak ke negara Vietnam, terkendala belum adanya Perjanjian Kerjasama *Government to*

Government yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- (6) Sebagian pelaku usaha belum memiliki kemampuan untuk melakukan pemasaran secara *online*.
- (7) Inflasi bahan pokok akibat kekeringan panjang akibat El Nino yang berdampak pada produktivitas pertanian, seperti komoditas cabai, bawang merah, dan termasuk komoditas impor, seperti gula pasir dan terbatasnya pasokan beras seiring mundurnya musim tanam dan baru dimulainya musim penghujan pada bulan November 2023.

b) Solusi

- (1) Mendorong ekspor ke negara tujuan ekspor baru seperti Timur Tengah dan Afrika serta peningkatan pemasaran domestik.
- (2) Meningkatkan edukasi dan layanan konsultasi serta mendorong para pelaku usaha dalam hal perizinan usaha dan pajak.
- (3) Mendorong Pemerintah Pusat untuk membuat Perjanjian Kerjasama *Government to Government* diantaranya untuk ekspor produk Salak ke negara Vietnam.
- (4) Mendorong membina pelaku usaha DIY untuk dapat memasarkan produknya melalui *e-purchasing*.
- (5) Menjamin ketersediaan stok komoditas pokok penting serta kepastian harga yang tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan. Penyediaan data harga terkini dan informasi stok barang pokok penting sebagai pendukung *early warning system* Serta penyelenggaraan Operasi Pasar, bazar dan Pasar Murah.

3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 5 program dan 7 sub kegiatan pada tahun 2023 dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100%. Pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp3.843.220.900,00 dengan realisasi sebesar Rp3.797.663.790,00 atau 98,81%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.142. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Jumlah Perusahaan Ekspor	Perusahaan	515	546
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	24.900	12.566
			Sosialisasi Tata Niaga Ekspor	orang	30	30
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			
			Inflasi pangan bergejolak	%	2.21	6.47
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			
			Jumlah Laporan	Laporan	1	1
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			
			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Jumlah Laporan	Laporan	1	1
			Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
			Pasar Murah	kali	16	16
			Bazar Ramadhan	kali	1	1
			Operasi Pasar Beras	kali	2	2
			Operasi Pasar Komoditas Lainnya	kali	2	2
			Operasi Pasar Murah	Kali	10	10
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	%	17	45
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor			
			Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	230	230
			Terlaksananya fasilitasi KADIN DIY	tahun	1	1
			Pelatihan Ekspor	orang	30	30
			Forum Komunikasi EXIM dan JBSC	kali	2	2
			Sosialisasi Perizinan Ekspor Bagi Eksportir Pemula	orang	200	200
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standar	%	2,21	2,19
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen			
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	35	40
			Operasional BPSK	tahun	1	1
			Sosialisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (5 angkatan @ 45 orang)	orang	225	225
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (Rp Miliar)	Rp Miliar	2,63	9,17
			Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			
			Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	1.090	1.155
			Pelatihan Manajemen Toko Kelontong (17 angkatan @ 20 orang)	orang	340	340
			Pelatihan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Sektor Industri dan Perdagangan (32 angkatan @ 20 orang)	orang	640	640
			Pelatihan Pemasaran Online (7 angkatan @ 25 orang)	orang	175	175

g. Urusan Perindustrian

1) *Kondisi Umum*

Sektor industri pengolahan merupakan kontributor utama PDRB DIY dengan kontribusi sebesar 11,78%. Laju pertumbuhan sektor ini sebesar 4,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Sub sektor utama pendukung sektor industri pengolahan adalah Industri Makanan dan Minuman, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, serta Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik.

Tabel 3.143. Perkembangan PDRB Industri Pengolahan 2019-2023

Sub Sektor	2019 (Rp Juta)	2020 (Rp Juta)	2021 (Rp Juta)	2022 (Rp Juta)	2023 (Rp Juta)
Industri Makanan dan Minuman	7.508 .502,40	7.163 .558,77	6.966 .042,46	7.052 .858,40	7.392 .384,80
Industri Pengolahan Tembakau	523 .804,61	567 .978,81	631 .428,78	645 .789,32	686 .350,77
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.439 .852,52	1.379 .243,47	1.494 .396,28	1.521 .632,65	1.573 .954,32
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	305 .131,26	252 .673,82	257 .087,72	273 .190,11	284 .206,47
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	209 .621,08	198 .957,67	187 .173,91	199 .561,20	199 .670,47
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	307 .555,54	296 .474,74	283 .778,97	286 .489,93	311 .905,82
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	157 .737,69	174 .644,04	175 .133,17	174 .783,13	166 .876,58
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	256 .768,10	249 .830,86	268 .043,34	263 .002,72	258 .698,71
Industri Barang Galian bukan Logam	369 .065,34	318 .837,06	332 .928,33	348 .124,31	367 .348,75
Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	785 .492,23	792 .349,73	806 .190,50	824 .263,23	887 .281,45
Industri Mesin dan Perlengkapan	471 .570,03	417 .445,61	411 .897,32	407 .793,48	410 .040,64
Industri Alat Angkutan	2 .770,57	2 .787,12	2 .428,24	2 .357,86	2 .400,23
Industri Furnitur	566 .496,19	542 .971,72	584 .490,84	610 .411,71	615 .885,20
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	296 .359,56	274 .360,95	269 .436,80	283 .131,78	285 .249,47
Jumlah	13.200 .727,12	12.632 .114,36	12.670 .456,67	12.893 .389,82	13.442 .253,68

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Pada tahun 2023 capaian kinerja sektor ini mampu melampaui target dengan capaian sebesar 134,35%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kinerja sektor ini mengalami peningkatan dari Rp33.298.184,45 menjadi Rp45.675.344,89. Kinerja sektor ini didukung berkembangnya media pemasaran *online*, tumbuhnya wirausaha baru di sektor perindustrian, pulihnya aktivitas perekonomian, meningkatnya aktivitas kepariwisataan dan

meningkatnya aktivitas *Meeting Incentive, Conference and Exhibition* (MICE) yang berdampak terhadap tumbuhnya IKM pangan.

Tabel 3.144. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Produktivitas tenaga kerja industri	Juta Rupiah	n/a	34	45,68	134,35

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

2) **Permasalahan dan Solusi**

a) **Permasalahan**

- (1) Industri pengolahan tertentu terkendala kenaikan harga bahan baku akibat peningkatan biaya logistik, peningkatan harga komoditas dunia, terganggunya pasokan gandum akibat perang Ukraina-Rusia dan tingginya tingkat inflasi dalam negeri.
- (2) Penurunan permintaan produk industri pengolahan DIY dari negara tujuan ekspor utama DIY (Amerika dan Eropa) akibat adanya resesi di negara-negara tersebut.
- (3) Kapasitas SDM khususnya dalam penggunaan teknologi informasi, standardisasi produk, inovasi produk dan kemampuan akses pasar khususnya di sektor Industri Kecil Menengah masih harus ditingkatkan.

b) **Solusi**

- (1) Mendorong penyediaan dan penggunaan bahan baku lokal serta peningkatan kemitraan dengan penyedia bahan baku dari provinsi lain.
- (2) Membuka dan mendorong ekspor ke negara tujuan baru dan peningkatan pemasaran domestik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan implementasi

kebijakan Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

- (3) Peningkatan kapasitas IKM dalam pemanfaatan teknologi, inovasi produk, strategi pemasaran, standardisasi dan sertifikasi produk untuk meningkatkan daya saing.

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Kinerja Urusan Perindustrian ditopang empat Program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp48.403.343.860,00 dan terealisasi sebesar Rp47.172.910.045,00 atau 97,24%.

Tabel 3.145. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2023

N o	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Nilai Produksi IKM Industri Kreatif (Rp Triliun)	Rp Triliun	6,8	6,804
			Nilai Produksi IKM Industri Kreatif (Rp Triliun)	Rp Triliun	6,8	6,804
			Nilai Produksi IKM Industri Kreatif (Rp Triliun)	Rp Triliun	6,8	6,804
			Nilai Produksi IKM Industri Kreatif (Rp Triliun)	Rp Triliun	6,8	6,804
			Nilai Produksi IKM Industri Kreatif (Rp Triliun)	Rp Triliun	6,8	6,804
			Nilai Produksi IKM Industri Kreatif (Rp Triliun)	Rp Triliun	6,8	6,804
			Pengembangan Industri Kreatif			
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit	7.099	7.974

N o	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jogja Internasional Batik Biennale	IKM	125	125
			Pameran Dalam Negeri (Jakarta Fair 40, Pameran HUT Dekranas 4, Pameran Tetap 40, dan Pameran Kraton 6)	IKM	90	90
			Pameran Orientasi Ekspor (Jogja Trade Expo, IFEX, Innacraft, JIFFINA)	IKM	45	45
			Fasilitasi Pendaftaran HKI (Hak Cipta, Merk, Merk Kolektif, dan Paten)	orang	170	170
			Jogja Fashion Week	IKM	150	150
			Expo Cobranding	IKM	20	20
			Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Produk IKM Pangan (MD)	IKM	45	45
			Edukasi dan Advokasi HKI	orang	2.250	2.250
			Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja (Kayu, Bambu, Limbah Kayu, Limbah Bambu, Pande Besi, Sandang, Pangan)	orang	400	400
			Sosialisasi penerapan alat tepat guna dan pelayanan jasa kemasan bagi IKM	orang	560	560
			Tes Pasar Produk UMKM Khas Jogja	IKM	40	40
			Sarasehan Industri kreatif Yogyakarta	orang	250	250
			Gelar Potensi Kampung Batik Istimewa	orang	250	250
			Sosialisasi Standardisasi Produk	orang	550	550
			Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	orang	600	600
			Bimtek Produksi Produk Khas Jogja	IKM	200	200
			Bimtek Penumbuhan IKM Baru Bidang Sandang, pangan	orang	200	200
			Bimtek Penumbuhan IKM Baru Bidang Kerajinan, Kimia & Aneka	orang	120	120
			Fasilitasi Kemasan Bagi IKM Baru	IKM	100	100
			Pelatihan IKM Bambu	orang	60	60
			Pelatihan IKM Kayu	orang	100	100

N o	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Fasilitasi Pasar Tiban UMKM Pangan Lokal	orang	500	500
			Fasilitasi Pasar Tiban Pengrajin Jamu Tradisional	orang	250	250
			Misi Dagang ISABC Arab Saudi	IKM	5	5
			Rehabilitasi Gedung Pengemasan	unit	1	1
			Partisipasi Jakarta Muslim Fashion Fest	IKM	4	4
			Rehabilitasi dan Operasional Griya Batik	Unit	1	1
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Workshop Gamelan	Jenis	7	7
			Fashion Young Entrepreneur Academy	IKM	25	25
			Talkshow TV	Kali	16	16
			Penyusunan DED Rehab Griya Batik	Dokumen	1	1
			Setting Mesin Produksi Pengemasan Kaleng	Paket	1	1
			Peresmian Gedung Pengemasan	Kali	1	1
			Business Matching P3DN	Perusahaan	15	15
			Sosialisasi Sengketa Konsumen	Paket	3	3
			Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Paket	10	10
			Bimbingan Teknis IKM Baru Bidang Pangan	Paket	5	5
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	100	91.85
			Nilai PKKI Program Penunjang (BPTTG)	Skor	100	89.84
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	100	91.85
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4
			Forum OPD	kali	1	1
			Forum Penyusunan Renstra	kali	1	1
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	dokumen	4	4
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			

N o	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4
			RKA Tahun 2024	dokumen	1	1
			DPA Tahun 2024	dokumen	1	1
			RKA-Perubahan Tahun 2023	dokumen	1	1
			DPPA Tahun 2023	dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3
			Dokumen LKJIP	dokumen	1	1
			Dokumen LPPD	dokumen	1	1
			Dokumen LKPJ	dokumen	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	97	89
			Tersedianya Gaji Tenaga Bantu Daerah	Orang	39	39
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	18	18

N o	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan	Laporan	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	16
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	52	52
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	26	26
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	21	21
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

N o	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	412.630	294.030
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			

N o	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1
			Fasilitasi Pendaftaran HKI (Merek Individu)	IKM	60	60
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4	4
			Jumlah IKM peserta Bimtek IKM Bambu yang meningkat keterampilannya	kelompok	6	6
			Jumlah IKM peserta Bimtek IKM kayu yang meningkat keterampilannya	kelompok	7	7
			Jumlah IKM peserta Bimtek/Pelatihan Olahan Ikan yang meningkat keterampilannya	kelompok	2	2
			Jumlah IKM peserta Bimtek/Pelatihan Olahan Minuman Segar yang meningkat keterampilannya	kelompok	3	3
			Jumlah IKM peserta Bimtek/Pelatihan Pangan yang meningkat keterampilannya	kelompok	63	63
			Jumlah IKM peserta Bimtek/Pelatihan Olahan Tembakau yang meningkat keterampilannya	kelompok	7	7
			Jumlah IKM peserta Bimtek/Pelatihan IKM Biofarmaka yang meningkat keterampilannya	kelompok	3	3
			Jumlah IKM peserta Bimtek/Pelatihan IKM Ecoprint, Shibori, dan Jumputan yang meningkat keterampilannya	kelompok	39	39
			Jumlah IKM peserta Bimtek/Pelatihan IKM Kerajinan yang meningkat keterampilannya	kelompok	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Jumlah IKM peserta Bimtek/Pelatihan IKM Kulit yang meningkat keterampilannya	kelompok	2	2
			Jumlah IKM peserta Bimtek/Pelatihan IKM Sandang yang meningkat keterampilannya	kelompok	14	14
			Jumlah IKM peserta Bimtek/Pelatihan IKM Las yang meningkat keterampilannya	kelompok	1	1
			Jumlah IKM peserta Bimtek/Pelatihan IKM Perak yang meningkat keterampilannya	kelompok	1	1
			Fasilitasi Dekranasda	tahun	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	Perusahaan	365	1253
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1
			Sosialisasi SIINas (5 angkatan @ 25 orang)	orang	125	125
			Sosialisasi Perijinan Usaha Industri (6 angkatan @ 30 orang)	orang	180	180
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	100	91.85
			Nilai PKKI Program Penunjang (BPTTG)	Skor	100	89.84
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan	Laporan	12	12
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	15
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1

N o	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	11
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	13
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	412.630	294.030
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1
			Jumlah Pelayanan Jasa Bengkel Alat Produksi	dokumen SPK	120	137
			Jumlah Pelayanan Teknologi Perak dan Logam	dokumen SPK	24	29
			Jumlah Penerapan ATG Hasil Rekayasa kepada IKM di DIY	ATG	5	6
			Jumlah Pelayanan Generator Oksigen	dokumen	12	12
			Jumlah Pelayanan Teknologi Kemasan	kali	243	243
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
			Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik (BPTTG)	%	40	40
			Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	40	40
			Implementasi Budaya Pemerintahan DIY			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	1	1

h. Urusan Ketransmigrasian

1) Kondisi Umum

Kebijakan transmigrasi selain untuk penataan persebaran penduduk dan pemerataan pembangunan juga menjadi salah satu instrumen memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran. Transmigrasi menjadi kesempatan bagi penduduk yang memiliki keterbatasan lahan namun memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan kegiatan budidaya. Bagi daerah pengirim, kesempatan tersebut bisa menjadi salah satu strategi untuk bisa mengentaskan calon transmigran dari kondisi kemiskinan. Bagi wilayah lokasi transmigrasi, kegiatan budidaya yang dilakukan oleh penduduk di lokasi akan menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru.

Tabel 3.146. Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2019	50
2	2020	0
3	2021	10
4	2022	30
5	2023	20

Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pemberangkatan transmigrasi selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 pemerintah pusat menghentikan sementara penempatan transmigrasi dampak dari pandemi Covid-19 sehingga tidak ada pengiriman transmigran. Pengiriman transmigran kembali dilakukan pada tahun 2021 dengan memberangkatkan 10 KK.

Selanjutnya pada tahun 2022 pengiriman transmigran menjadi 30 KK. Namun pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 20 KK. Dengan demikian selama tahun 2019 – 2023 sebanyak 110 KK transmigran telah diberangkatkan ke luar Pulau Jawa.

Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026, Urusan Ketransmigrasian mendukung sasaran Terwujudnya kesempatan kerja pada urusan tenaga kerja dengan indikator Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan dengan strategi perluasan kesempatan kerja yang dilakukan melalui peningkatan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi.

Tabel 3.147. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	orang	n/a	11.100	13.452	121,19

Sumber: Disnakertrans DIY, 2024

Capaian indikator Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan sebesar 13.452 orang atau 121,19% dari target 11.100 orang. Indikator ini merupakan indikator baru dari target RPD 2023-2026. Dalam kurun 1 tahun sebanyak 13.452 tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. Jumlah capaian ini akumulasi dari penempatan dan pemberdayaan baik di sektor formal, berusaha mandiri/berwirausaha maupun sektor informal, serta penempatan transmigran.

Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh semakin bertambahnya kesempatan kerja di sektor formal maupun informal, serta adanya kegiatan pemberdayaan/peningkatan kesempatan kerja. Untuk penempatan transmigran tahun 2021 dan 2022 tidak ditemukan laporan adanya transmigran yang kembali. Hal ini didukung oleh terpenuhinya hak-hak transmigran, diterimanya bantuan-bantuan

kebutuhan hidup dan usaha yang membuat transmigran kerasan, untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan di lokasi transmigrasi.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

Sebagian transmigran yang berminat bekerja di sektor pertanian sulit memperoleh akses lahan pertanian yang memadai. Hal ini disebabkan oleh semakin terbatasnya lahan pertanian yang tersedia akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi non pertanian. Kondisi ini telah memicu kenaikan harga sewa maupun kepemilikan lahan. Dengan demikian mengikuti program transmigrasi menjadi solusi yang efektif, meskipun alokasi penempatan transmigran yang diberikan oleh pemerintah pusat tahun 2023 ini relatif masih terbatas.

b) *Solusi*

Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah tujuan transmigrasi agar ada perhatian jumlah kuota pengiriman transmigran bagi DIY.

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Sesuai RPD 2023-2026 Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan melalui Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan 2 sub kegiatan. Pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD sebesar Rp319.572.000,00 dan terealisasi sebesar Rp312.136.515,00 atau 97,67% dikarenakan adanya efisiensi dan sisa pengadaan, sedangkan realisasi fisiknya 100%. Penempatan transmigrasi tahun 2023 sebanyak 20 KK dengan rincian 2 KK ke Tempirai Selatan SP 1, Kab. Pali, Prov. Sumatera Selatan, 8 KK ke Raimuna Kab. Muna, Prov.

Sulawesi Tenggara dan 10 KK ke Salulisu Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat.

Berikut tabel rincian capaian program dan sub kegiatan di tahun 2023.

Tabel 3.148. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun 2023

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahannya di kawasan transmigran	%	80	100
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	2	2
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			
			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Keluarga	20	20

3. PENUNJANG URUSAN

a. Perencanaan Pembangunan

1) Kondisi Umum

Terdapat dua Sasaran Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD DIY 2023-2026 yaitu: a) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dan b) Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan, yang diukur dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran

perangkat daerah. Target dan realisasi kinerja sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.149. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase Ketercapaian Sasaran Perangkat Daerah	%	86,42	86	98,17	114,15

Sumber: Bappeda DIY, 2024

Sampai dengan tahun 2023, capaian kinerja sasaran Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan dengan indikator kinerja Persentase Ketercapaian Sasaran Perangkat Daerah sebesar 114,15% atau tercapai 98,17% dari target 86%. Jumlah indikator sasaran perangkat daerah yang tercapai sebanyak 107 indikator, dan total jumlah indikator sebanyak 109 indikator.

2) **Permasalahan dan Solusi**

a) **Permasalahan**

Perubahan kebijakan perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat, sehingga memerlukan waktu bagi daerah untuk menyesuaikan.

b) **Solusi**

Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan antar perangkat daerah.

3) **Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

Sampai dengan tahun 2023, alokasi anggaran pada Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan melalui 4 Program dan 37 sub kegiatan sebesar Rp21.689.639.201,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp20.641.796.641,00 atau 95,17%, dengan kinerja fisik tercapai 100%.

Rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.150. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Orgsnisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95.35	93.14
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4
			Dokumen Renstra Bappeda	dokumen	1	1
			Forum Perangkat Daerah	dokumen	1	1
			Renja Perangkat Daerah 2024	dokumen	1	1
			Renja Perangkat Daerah Perubahan 2023	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD DPA 2024	Dokumen	4	4
			DPA-P 2023	dokumen	1	1
			RKA 2024	dokumen	1	1
			RKA-P 2023	dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	22
			Laporan Kinerja (LKjIP, Bahan LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2022)	laporan	3	3
			Laporan Monitoring dan Evaluasi Bappeda	laporan	19	19
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 109	orang/bulan	109	109
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan	bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Orgsnisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
			Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	bulan	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Gabungan dan Audited)	laporan	2	2
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	13
			Laporan Keuangan Bulanan	laporan	12	12
			Laporan Keuangan Semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya	laporan	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6
			Pembayaran Honorarium Pengurus Barang Barang Pengguna	bulan	12	12
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	13	13
			Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	12	12
			Jurnal Perencanaan	dokumen	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Pengadaan Alat-Alat Listrik	paket	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Orgsnisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	paket	2	2
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	paket	2	2
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket	2	2
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3
			Langgangan Surat Kabar	dokumen	3	3
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	3
			Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	laporan	1	1
			Tersedianya makan dan minuman rapat	laporan	1	1
			Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD: - Penataan Arsip	laporan	1	1
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1
			Update Sistem Informasi Internal	dokumen	1	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	11
			Pengadaan LCD Proyektor	unit	1	1
			Pengadaan Kamera Conference	unit	1	1
			Pengadaan Microphone Wirelles	unit	1	1
			Pengadaan Pesawat Televisi	unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Orgsnisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengadaan Background Green Screen	unit	1	1
			Pengadaan Layar Screen Projector	unit	1	1
			Pengadaan Kursi Roda	unit	1	1
			Pengadaan Access Point	unit	1	1
			Pengadaan Switch	unit	3	3
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5
			Pengadaan Pompa Air	unit	1	1
			Pengadaan Dehumidifier	unit	2	2
			Pengadaan AC Split 1 PK	unit	0	0
			Pengadaan AC Split 1,5 PK	unit	0	0
			Pengadaan FAXIMILE	unit	0	0
			Pengadaan Pesawat Telepon	unit	0	0
			Pengadaan Thermo Hygro Barometer Humidity Temperature Meter	unit	2	2
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Materai	buah	702	702
			Pengiriman surat-surat dinas/dokumen lainnya melalui jasa pengiriman	bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
			Biaya Telepon Bappeda DIY	bulan	12	12
			Langganan Akun Zoom Meeting	bulan	12	12
			Langganan Google Cloud Storage	bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
			Sewa Tanaman Hias	bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2
			Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Bappeda DIY	bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Orgsnisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Bappeda DIY	bulan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Lapangan	unit	10	10
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	1	1
			Pemeliharaan Generator Set	unit	1	1
			Pemeliharaan Mebel			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	56	56
			Pemeliharaan Almari	buah	10	10
			Pemeliharaan Filling Kabinet	unit	8	8
			Pemeliharaan Kursi	buah	16	16
			Pemeliharaan Meja	unit	21	21
			Pemeliharaan Meja Kursi Tamu	set	1	1
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	38
			Pemeliharaan LCD Proyektor	unit	3	3
			Pemeliharaan Sound System	paket	1	1
			Pemeliharaan Faksimile	unit	1	1
			Pemeliharaan Jaringan Komputer/Internet	paket	1	1
			Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop	unit	6	6
			Pemeliharaan Komputer PC Desktop	unit	20	20

No	Urusan Pemerintahan	Orgsnisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pemeliharaan Printer	unit	6	6
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bappeda	unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	34	34
			Pemeliharaan/Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	tabung	6	6
			Pemeliharaan CCTV	paket	1	1
			Pemeliharaan Air Conditioner (AC Floor Standing dan AC Split)	unit	27	27
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2
			Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	dokumen	1	1
			Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2025 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	dokumen	1	1
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	Orgsnisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	3
			RKPD 2024	dokumen	1	1
			RPJMD	dokumen	1	1
			Perubahan RKPD 2023	Dokumen	1	1
			Rancangan Awal RPJPD	dokumen	0	0
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	20	20
			Evaluasi SAKIP Pemda DIY	Kegiatan	2	2
			Dokumen LKJ DIY Tahun 2022	Dokumen	1	1
			Laporan evaluasi Hasil RKPD DIY Semester II/ 2022 dan Semester I/2023	Dokumen	2	2
			Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2022	Dokumen	1	1
			Laporan evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan	Dokumen	1	1
			Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2022 dan TW I-III 2023	Dokumen	4	4
			Updating Sengguh Tahun 2023	Aplikasi	1	1
			Penyerahan DIPA APBN Tahun 2023	Dokumen	1	1
			Dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2023	Dokumen	1	1
			Laporan Kinerja APBN (dekon/TP) triwulan IV/2022 dan Triwulan I-III/2023	Dokumen	4	4
			Laporan Evaluasi Hasil RPJPD DIY	Dokumen	1	1
			Laporan Pelaksanaan DAK 2023	Dokumen	1	1
			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	3	3

No	Urusan Pemerintahan	Orgsnisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2022	Dokumen	1	1
			Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota	Dokumen	2	2
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)	%	90	90
			Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan	%	27,59	27,59
			Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)	%	91	91
			Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan	%	93,75	93,75
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kelompok Substansi Administrasi Publik	dokumen	1	1
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kelompok Substansi Pemerintahan Umum	dokumen	1	1
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			

No	Urusan Pemerintahan	Orgsnisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4
			Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2024, serta Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Perencanaan 2025	dokumen	1	1
			Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2024, serta Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Perencanaan 2025	dokumen	1	1
			Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	dokumen	1	1
			Dokumen Pelaksanaan TSLP/CSR	dokumen	1	1
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3
			Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Dunia Usaha sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2024, serta Perubahan RKPD tahun 2023 dan Perencanaan 2025	dokumen	1	1
			Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2024, serta Perubahan RKPD tahun 2023 dan Perencanaan 2025	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Orgsnisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi DIY Tahun 2022	dokumen	1	1
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	1
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pada Kelompok Substansi PIWESDM	dokumen	1	1
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada Kelompok Substansi PTRLHK	dokumen	1	1
			Penyusunan Peta Jalan Perwujudan Kawasan Aerotropolis YIA	dokumen	1	1

b. Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan

1) *Kondisi Umum*

Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya diberi kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, melainkan juga harus melaksanakan urusan keistimewaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan Keistimewaan DIY sebagaimana termuat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 adalah Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang.

Menindaklanjuti Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 terkait kelembagaan, maka ditetapkan Perdas Nomor 1 Tahun 2018 tentang kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Perdas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan aturan tersebut dibentuklah *Paniradya Kaistimewan* yang memiliki beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. *Paniradya Kaistimewan* mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan.

Perencanaan pembangunan daerah urusan keistimewaan yang disusun dengan sasaran terukur, dan berorientasi hasil diharapkan dapat memenuhi tujuan Keistimewaan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dalam penyusunan program/ kegiatan, perencanaan pembangunan daerah urusan keistimewaan mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam melaksanakan tugasnya *Paniradya Kaistimewan* memiliki sasaran strategis sebagai berikut,

- (a) Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan.
- (b) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.

Capaian kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan di DIY Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.151. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	%	n/a	95	100	105,26

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

Indikator “Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik” digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis “Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan”.

Indikator kinerja ini terealisasi sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 105,26% dari target yang ditetapkan sebesar 95% pada tahun 2023. Hasil capaian diperoleh melalui rumus perhitungan (Jumlah lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik/ jumlah seluruh lembaga pengampu keistimewaan) dikali 100%. Lembaga pengampu keistimewaan dikatakan memiliki capaian kinerja yang baik jika capaian fisik sama dengan atau lebih besar dari 90%.

Sampai dengan tahun 2023, terdapat lembaga pengampu keistimewaan sejumlah 200 OPD yang terdiri dari 35 OPD DIY, 8 OPD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 26 OPD Kabupaten Bantul, 17 Kapanewon Kabupaten Bantul, 18 OPD Kabupaten Kulon Progo, 12 Kapanewon Kabupaten Kulon Progo, 22 OPD Kabupaten Gunungkidul, 18 Kapanewon Kabupaten Gunungkidul, 13 OPD Kabupaten Sleman, dan 17 Kapanewon Kabupaten Sleman. Berikut tabel realisasi fisik lembaga pengampu keistimewaan tahun 2023,

Tabel 3.152. Realisasi Fisik Lembaga Pengampu Keistimewaan Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Realisasi Fisik (%)
DIY		
1	Biro Organisasi	100
2	Biro Hukum	100
3	Biro Tata Pemerintahan	100
4	Badan Kepegawaian Daerah	100
5	Badan Pendidikan dan Pelatihan	100
6	Paniradya Kaistimewan	100
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100
8	Dinas Sosial	100
9	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	100
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100
11	Dinas Kebudayaan	99,97
12	Taman Budaya Yogyakarta	100
13	Museum Negeri Sonobudoyo	100
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	100
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100
16	Badan Penghubung Daerah	100
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	100
19	Dinas Pariwisata	100
20	Dinas Kesehatan	100
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	100
22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	100
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	97,24
25	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	100
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100
28	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	100
29	Satuan Polisi Pamong Praja	100
30	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	100
31	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	100
32	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100
33	Biro Bina Mental Spiritual	100
34	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	99,62
35	Dinas Perhubungan	97,95
KOTA YOGYAKARTA		
1	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	100
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta	100
3	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	100
4	Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	100

No	Perangkat Daerah	Realisasi Fisik (%)
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	100
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	99,25
7	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	100
8	Kemantren Jetis Kota Yogyakarta	100
9	Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta	100
10	Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta	100
11	Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta	100
12	Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta	100
13	Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta	100
14	Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta	100
15	Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	100
16	Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta	100
17	Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta	100
18	Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta	100
19	Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta	100
20	Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta	100
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	100
22	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	100
KABUPATEN BANTUL		
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	100
2	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	100
3	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	100
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	100
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	100
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	100
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	100
8	Inspektorat Kabupaten Bantul	100
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100
10	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	99,88
11	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	100
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	100
13	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	100
14	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul	100
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	100
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	100
17	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	100
18	Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	100
19	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	100
20	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	100
21	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	100
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100
23	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	93,25

No	Perangkat Daerah	Realisasi Fisik (%)
24	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	100
25	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	100
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	100
27	Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul	100
28	Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul	100
29	Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul	100
30	Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul	100
31	Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul	100
32	Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul	100
33	Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul	100
34	Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul	100
35	Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul	100
36	Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul	100
37	Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul	100
38	Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul	100
39	Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul	100
40	Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul	100
41	Kepenawon Sewon Kabupaten Bantul	100
42	Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul	100
43	Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul	100
KABUPATEN KULON PROGO		
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulonprogo	100
2	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulonprogo	100
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo	100
4	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulonprogo	100
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo	100
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo	100
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulonprogo	100
8	Inspektorat Kabupaten Kulonprogo	100
9	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	100
10	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo	100
11	Dinas Koperasi dan Ukm Kabupaten Kulon Progo	100
12	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo	100
13	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo	100
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kulonprogo	100
15	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulonprogo	99,68
16	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulonprogo	93,00
17	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	100
18	Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo	100
19	Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo	100
20	Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo	100
21	Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo	100
22	Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo	100
23	Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo	100

No	Perangkat Daerah	Realisasi Fisik (%)
24	Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo	100
25	Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo	100
26	Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo	100
27	Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo	100
28	Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo	100
29	Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo	99,81
30	Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo	99,85
KABUPATEN GUNUNGKIDUL		
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	100
2	Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Gunungkidul	100
3	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gunungkidul	100
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul	100
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	100
6	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul	100
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul	100
8	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	100
9	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul	100
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul	100
11	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul	100
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Ukm dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul	100
13	Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul	100
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul	100
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	98
16	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	100
17	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gunungkidul	100
18	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	100
19	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul	100
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul	100
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul	100
22	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul	100
23	Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul	100
24	Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul	100
25	Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul	100
26	Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul	100
27	Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul	100
28	Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul	100
29	Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul	100
30	Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul	99,37
31	Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul	100
32	Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul	100
33	Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul	100
34	Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul	100

No	Perangkat Daerah	Realisasi Fisik (%)
35	Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul	100
36	Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul	100
37	Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul	100
38	Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul	100
39	Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul	100
40	Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul	100
KABUPATEN SLEMAN		
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Sleman	100
2	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	100
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	100
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman	100
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	100
6	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	100
7	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	100
8	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman	100
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman	100
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman	100
11	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	100
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman	100
13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	90,95
14	Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman	100
15	Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman	100
16	Kapanewon Depok Kabupaten Sleman	100
17	Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman	100
18	Kapanewon Godean Kabupaten Sleman	100
19	Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman	100
20	Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman	100
21	Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman	100
22	Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman	100
23	Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman	100
24	Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman	100
25	Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman	100
26	Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman	100
27	Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman	100
28	Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman	100
29	Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman	100
30	Kapanewon Turi Kabupaten Sleman	100

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2024

Berdasarkan tabel diatas, seluruh lembaga pengampu dana keistimewaan memperoleh capaian fisik lebih dari 90% sehingga indikator “Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan

Keistimewaan” tercapai 100% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.153. Pengukuran Indikator “Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik”

Jumlah lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	Jumlah seluruh lembaga pengampu keistimewaan	Perhitungan
(1)	(2)	(3= 1/2*100)
200	200	100%

Sumber:Paniradya Kaistimewan, 2024

2) **Permasalahan dan Solusi**

a) **Permasalahan**

- (1) Terdapat regulasi baru yaitu PMK Nomor 16/PMK.07/2023 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diperlukan penyesuaian lebih lanjut terkait implementasinya baik pada proses perencanaan maupun pengendalian.
- (2) Belum semua kalangan mengetahui hasil-hasil pembangunan keistimewaan yang dilaksanakan Pemda DIY, sedangkan harapan masyarakat terhadap capaian tujuan keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat sangat besar.
- (3) Semakin banyak pemangku kepentingan yang melaksanakan Dana Keistimewaan sehingga rentang kendali semakin panjang.

b) **Solusi**

- (1) Bimbingan dan coaching perencanaan dan pengendalian yang dilaksanakan secara masif agar kesenjangan pemahaman dalam perencanaan dan pengendalian berkurang.

- (2) Mewajibkan penggunaan logo dana keistimewaan untuk produk barang/jasa maupun penyelenggaraan acara yang didanai dana keistimewaan.
- (3) Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan keistimewaan secara berjenjang sehingga penyaringan terhadap kualitas program dan kegiatan berlangsung optimal, termasuk dengan pemanfaatan Sistem Informasi Pengendalian Keistimewaan (Kenes).

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Pada tahun 2023 Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp27.127.195.723,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 2 Program dan 33 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat terealisasi sebesar Rp26.790.852.045,00 atau 98,76%, dengan pencapaian fisik mencapai 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.154. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	SEKRETARIAT DAERAH	PANIRADYA KAISTIMEWAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	skor	88.25	92.36
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Penyusunan Dokumen	persen	100	100
			Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	6	6
			Perangkat Daerah			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	persen	100	100
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dokumen	4	4
			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	3	3
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persen	100	100
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	52	52
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	persen	100	100
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	persen	100	100
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD	persen	100	100
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	18	18
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	persen	100	100
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persen	100	100
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persen	100	100
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persen	100	100
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	7	7
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persen	100	100
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	5	5
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	persen	100	100
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persen	100	100
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persen	100	100
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persen	100	100
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persen	100	100
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	16
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persen	100	100
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	18	18
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persen	100	100
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	persen	90	97.37
			Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara			
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	persen	100	100
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun	Dokumen	6	6
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	persen	100	100
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Laporan	5	5
			Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
			Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen	5	5
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	persen	100	100
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Laporan	6	6
			Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang			
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	persen	100	100
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Dokumen	9	9
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	persen	100	100
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Laporan	8	8
			Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	persen	100	100
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen	7	7
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	persen	100	100
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Laporan	9	9
			Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	persen	100	100
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	8	8

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	persen	100	100
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan	28	28
			Sarana dan Prasarana Keistimewaan			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	persen	100	100
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	unit	13	13
			Peningkatan Pelayanan Parampara Praja			
			Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	persen	100	100
			Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan	Rekomendasi	3	3
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan			
			Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	persen	100	100
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Dokumen	4	4

c. Administrasi Keuangan Daerah

1) Kondisi Umum

Dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran Pemda DIY yang tertuang dalam RPD DIY Tahun 2023-2026 berupa Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, BPKA DIY mengampu 3 sasaran OPD yaitu Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Optimalisasi Aset Pemda DIY. Capaian keberhasilan kinerja sasaran penunjang pemerintahan di Perangkat Daerah diukur dengan indikator kinerja sasaran berupa

Kategori RB Perangkat Daerah. Sementara capaian keberhasilan kinerja sasaran penunjang urusan keuangan diukur dengan indikator kinerja sasaran berupa Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY beserta target dan realisasinya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.155. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100
2	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	Rupiah	15.486.233.611	9.016.589.475	16.108.924.464*	178,66

Sumber: BPKA DIY, 2024 (angka unaudited)

Sasaran pertama BPKA DIY yakni “Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan” didukung dari pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memberikan penghargaan kepada Pemda DIY atas diraihnya Opini WTP atas laporan keuangan Pemda DIY sebanyak 13 kali berturut-turut. Penyusunan Laporan Keuangan sampai dengan disahkan sebagai Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD melalui serangkaian proses yang didukung oleh kolaborasi aktif dan sinergitas seluruh Perangkat Daerah dalam penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan dan barang milik daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan keuangan daerah yang diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi merupakan wujud akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Terkait dengan pendapatan daerah sudah dilakukan beberapa tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) diantaranya adalah telah disusun regulasi berupa Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian terkait pengelolaan pajak terdapat upaya optimalisasi Pajak daerah melalui program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di DIY sebagaimana amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023. Dengan adanya program pembebasan denda pajak tersebut dapat menjadi faktor pendorong masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

Pemda DIY pada tahun 2023 juga telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan tujuan untuk mempercepat dan memperkuat digitalisasi daerah khususnya untuk implementasi elektronifikasi transaksi Pemda sehingga dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital.

Sasaran kedua BPKA DIY "Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah" pada tahun 2023 telah berkinerja dengan optimal dan melampaui target. Hal ini didukung dari pelaksanaan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan upaya optimalisasi aset-aset Pemda DIY yang berasal dari retribusi rumah dinas, tanah dan bangunan, sewa lahan dan hasil penjualan barang milik daerah.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Dinamika regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan daerah yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terkait aplikasi baru, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis yang membutuhkan waktu penyelesaian yang tidak bisa dipastikan.
- (2) Kendala eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan Program diantaranya seperti kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhi kinerja Pendapatan Asli Daerah dan faktor dinamika teknis pelaksanaan pengelolaan BMD.

b) Solusi

- (1) Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Pusat dengan didukung pula upaya tindak lanjut kebijakan di daerah dan meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang terintegratif lebih baik.
- (2) Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan, pendapatan, dan Barang Milik Daerah secara lebih intens dengan para pihak terkait dan juga mengoptimalkan dukungan sistem informasi (termasuk aplikasi pengolahan data, sistem pembayaran digital, dan media sosial).

3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Guna menyelenggarakan fungsi pada Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah dilaksanakan melalui 4 program dan 65 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.617.715.591.343,00 dan telah terealisasi sebesar

Rp1.564.688.622.422,00 atau 95,19%, sedangkan kinerja fisik terealisasi 100%. Rincian capaian program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.156. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	Keuangan	BPKA DIY	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	%	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	30	30
			Koordinasi, Penyusunan dan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	30	30

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
			Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	30	30
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	6	6
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	30	30
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	%	100	100
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	5	5

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
			APBD Kabupaten/Kota				
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	5	5
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	5	5
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	2
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	2	2
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	8 .000	8 .000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindakan lanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
				Penyelesaian TPTGR;Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD			
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	12	12
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	2
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	2	2
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	1
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	80	80
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	8	8
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan,; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	%	100	100
			Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	10	10

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	1
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	1	1
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendapatan daerah			
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.	%	100	100
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	1
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
			Kebijakan Pajak Daerah				
				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1	1
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	60	60
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	60	60
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	1
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	2
2	Optimalisasi aset Pemda DIY		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	%	100	100
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
				Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	3	3
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	2
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	3
3	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	85,9	85,9

N o	Urusan Peme- rintahan	Organi- sasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Real- isasi
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	85,9	85,9
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	85,9	85,9
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	85,9	85,9
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	85,9	85,9
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	85,9	85,9
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku- men	6	6
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku- men	30	30
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Doku- men	30	30
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi	%	100	100

N o	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
				dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	240	240
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	72
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	100
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72	72
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD	%	100	100
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
				Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	34	34
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	36	36
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	19	19
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	16	16
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	17	17
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	72

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
				Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5.000	5.000
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	%	100	100
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Undefined	0	0
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	4
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	44	44
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	143	143
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	105	105
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	6
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	72
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	al	6	6
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
				Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	67	67
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	58	58
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	117	117
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	25

d. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1) Kepegawaian

a) Kondisi Umum

Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat ini menjadi wacana yang mengemuka baik pada sektor publik maupun privat. Pada sektor penyelenggaraan pemerintahan, upaya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dunia usaha (*Corporate Governance*) dan masyarakat (*Civil Society*) dapat terlayani dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemda DIY selalu berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individu pegawai menuju perspektif manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis (*strategic human resource management*). Pengembangan ini bertujuan untuk menyediakan sumber daya aparatur sipil negara unggulan yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Salah satu pokok pengaturan pada Undang-Undang tersebut yaitu penguatan *pengawasan* Sistem Merit. Sejak tahun 2020, Pemda DIY sudah mendapatkan predikat “sangat baik” dalam penerapan Sistem Merit. Pengelolaan Manajemen ASN dengan Sistem Merit dinilai dari 8 aspek yaitu perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karir; promosi dan

mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan dan disiplin; *perlindungan* dan pelayanan; serta sistem informasi.

(1) *Perencanaan Kebutuhan*

Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa yang dimaksud *dengan* Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan peraturan tersebut maka tenaga honorer untuk dihapus dan instansi pemerintahan tidak diperbolehkan untuk mengangkat tenaga honorer. Pemda DIY masih terus melakukan penataan sampai dengan akhir Tahun 2024 berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat.

(2) *Pengadaan*

Pemda DIY melaksanakan seleksi PPPK pada tahun 2023 dan menghasilkan PPPK Guru sejumlah 697 orang, PPPK Teknis 85 orang, dan PPPK Nakes 58 orang.

Pada tahun 2023, Pemda DIY melakukan evaluasi terkait pengelolaan tenaga bantu diganti menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemda DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemda DIY telah melaksanakan pengangkatan kembali PPPK DIY sejumlah 2.928 orang.

(3) *Pengembangan Karier*

Saat ini, pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*Corporate University*). Strategi pembelajaran melalui

Corporate University mengedepankan pada pemanfaatan teknologi informasi agar berlangsung secara fleksibel dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan kinerja individu dan organisasi yang melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY. Komitmen Pemda DIY dalam pengembangan kompetensi ini terwujud dalam nilai IP ASN Tahun 2022 memperoleh nilai 72,90 dan masuk pada kategori “Sedang”. Hal ini menunjukkan peningkatan dari Tahun 2021, dimana Pemda DIY masuk dalam kategori “Rendah” (nilai di bawah 70).

Pemda DIY *memperhatikan* pengembangan kompetensi bagi semua pegawai tanpa terkecuali termasuk untuk PPPK DIY.

(4) *Mutasi dan Promosi*

Sebagai upaya peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, maka Pemda DIY melaksanakan pengelolaan mutasi ASN. Beberapa aspek yang dilakukan yaitu meliputi pengisian jabatan kosong pada formasi Jabatan Tinggi, *Jabatan* Administrasi, dan pemrosesan PNS luar Pemda DIY yang mengajukan pindah wilayah kerja ke lingkungan Pemda DIY. Urgensi dari pengisian kekosongan pegawai pada formasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi adalah untuk mengoptimalkan target capaian kinerja organisasi. Pemenuhan SDM melalui jalur pindah wilayah kerja dilakukan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan agar tidak menghambat penataan dan pembinaan kepegawaian di Pemda DIY. Pengelolaan mutasi bertujuan menempatkan pegawai yang tepat pada tempat yang tepat (*the right man on the right place*) baik dengan mutasi horizontal maupun vertikal (promosi).

Selama Tahun 2023, Pemda DIY telah melaksanakan mutasi dan rotasi jabatan pelaksana sebanyak 338 orang dan melaksanakan *pengangkatan* PNS mutasi masuk ke Pemda DIY sebanyak 36 orang. Pemda DIY telah melaksanakan pengangkatan ASN ke dalam jabatan baik Pengawas, Administrator, JPT Pratama dan JPT Madya kepada sebanyak 218 orang.

(5) *Manajemen Kinerja*

Pemda DIY telah melakukan pengelolaan kinerja PNS dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu berupa aplikasi si-informan.jogjaprovo.go.id. Di dalam aplikasi tersebut telah ada e-SKP sehingga penilaian target kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien dan dapat dilakukan Dialog *Kinerja* Individu (DIARINDU) antara pimpinan dengan pejabat dan pegawai di bawahnya.

(6) *Penggajian, Penghargaan dan Disiplin*

Pemda DIY melaksanakan pemberian penghargaan kepada ASN sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berupa penghasilan, *penghargaan* yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Selain itu pembinaan disiplin pegawai dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

(7) *Perlindungan dan Pelayanan*

Pemda DIY *memberikan* perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua kepada seluruh pegawai Pemda DIY. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan dalam

program jaminan sosial yang diatur sebagaimana sistem jaminan nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Selain itu, Pemda DIY melalui BKD DIY memberikan fasilitas bagi *seluruh* pegawai berupa konseling baik berupa konseling pribadi maupun dari instansi.

(8) *Sistem Informasi*

Era Industri 4.0 memberikan banyak peluang dan kesempatan untuk menjadikan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi dengan menggalakkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pemda DIY melalui BKD DIY terus mengembangkan sistem informasi layanan kepegawaian “ASN Memayu” agar proses administrasi *kepegawaian* menjadi lebih efisien, efektif dan akurat sehingga pimpinan dapat secara tepat dalam mengambil keputusan manajemen ASN.

Tabel 3.157. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Kepegawaian Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	%	n/a	70,1	81,71	116,56

Sumber: BKD DIY, 2024

Persentase kualitas manajemen SDM aparatur merupakan tolak ukur dari keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN. Indikator ini diukur dengan meta indikator rata-rata persentase pemenuhan pegawai ditambah *persentase* pemenuhan pemutakhiran data pegawai ditambah persentase pemenuhan kompetensi pegawai ditambah persentase kompetensi individu yang terpetakan.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja Tahun 2023 telah melampaui target, yaitu sebesar 116,56%. Hal ini didukung oleh *komitmen* pimpinan dan *stakeholder* untuk menyelenggarakan manajemen ASN secara profesional dan secara berkelanjutan.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Alokasi dan distribusi ASN secara kuantitas dan kualitas masih belum seimbang dan merata.
- (b) Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi ASN sehingga Indeks Profesionalitas ASN belum maksimal.
- (c) Masih adanya *mismatch* penempatan PNS dalam jabatan.
- (d) Dinamika Perubahan Regulasi Kepegawaian yang sangat cepat.
- (e) Integritas dan Kinerja ASN dinilai belum optimal oleh masyarakat.
- (f) *Minus Growth*, dimana jumlah pegawai pensiun lebih banyak dari pegawai masuk.

(2) Solusi

- (a) Melaksanakan redistribusi ASN dengan memperhatikan kualifikasi jabatan dan ketersediaan SDM.
- (b) Memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pengembangan kompetensi ASN yang didukung dengan infrastruktur yang memadai; Selain itu perlu meningkatkan kesempatan bagi ASN dalam upaya pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang disediakan.
- (c) Rotasi dan mutasi PNS Pemda DIY secara periodik dan pengembangan kompetensi PNS bentuk pendidikan untuk penyesuaian penempatan PNS dalam jabatan.
- (d) Responsif/adaptif terhadap perubahan regulasi kepegawaian yang sangat cepat, menyusun regulasi daerah sebagai tindak lanjut dari dinamika perubahan regulasi kepegawaian pusat jika diperlukan.
- (e) Melakukan kegiatan lintas sektor yang melibatkan partisipasi banyak pihak.
- (f) Melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur yang dimiliki dengan memperluas kompetensi ASN melalui sistem kerja yang *agile*.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Penunjang Urusan Kepegawaian dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp35.638.176.047,00. Pengalokasian anggaran tersebut ada dalam 3 program dan 45 sub kegiatan. Secara *keseluruhan* belanja dapat direalisasi sebanyak Rp32.696.842.952,00 atau 91,74%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Terdapat

deviasi keuangan dikarenakan adanya efisiensi belanja dan beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.158. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
			Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	persen	66.67	66.67
			Implementasi Budaya Pemerintahan DIY			
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	3	3
			Terlaksananya Update Sistem Informasi Internal (ASN Memayu) dan Alih Data Kepegawaian	Dokumen	1	1
			Terlaksananya Kajian penataan SDM Aparatur	Dokumen	1	1
			Tersedianya Name Tag bagi ASN Pemda DIY	Dokumen	1	1
			Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan			
			Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	Orang	690	690
			Terlaksananya Internalisasi pegawai baru yang memahami Keistimewaan DIY	Orang	60	60
			Terlaksananya Pembekalan calon pensiun 1 th sebelum BUP	Orang	630	630
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	85.66	89.11
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5
			Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Tersusunnya dokumen Renstra Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Tersusunnya dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Tersusunnya dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Tersusunnya ROPK Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4
			Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1
			Tersusunnya dokumen RKAP-SKPD	Dokumen	1	1
			Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1
			Tersusunnya dokumen DPPA-SKPD	Dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3
			Tersusunnya Bahan LPPD	Dokumen	1	1
			Tersusunnya Bahan LKPJ	Dokumen	1	1
			Tersusunnya dokumen LKjIP BKD DIY (Nilai AKIP: A)	Dokumen	1	1
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	97	89
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	13
			Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan	Laporan	12	12
			Tersusunnya Laporan Keuangan Prognosis	Laporan	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2
			Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BKD DIY)	Laporan	1	1
			Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Balai PKP)	Laporan	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2
			Tersedianya peralatan kantor	Paket	1	1
			Tersedianya perlengkapan kantor	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
			Jumlah lembar hasil penggandaan	Paket	1	1
			Jumlah dokumen yang tercetak	Paket	1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan untuk BKD DIY	Dokumen	2	2
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan untuk Balai PKP	Dokumen	2	2
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2
			Tersedianya Makan dan Minum Rapat Koordinasi SKPD	Laporan	1	1
			Terselenggaranya Fasilitas Konsultasi SKPD	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	9
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3
			Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	Dokumen	1	1
			Tersusunnya Laporan Penyediaan Sumber Daya Air	Dokumen	1	1
			Tersusunnya Laporan Penyediaan Listrik	Dokumen	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2
			Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	Laporan	1	1
			Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	Laporan	1	1
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11
			Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4	Unit	7	7
			Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2	Unit	4	4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	32
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase pemenuhan pegawai sesuai formasi, kelengkapan data pegawai, pemenuhan kompetensi pegawai, dan pemetaan kompetensi individu	persen	77.3	85.05
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2	2
			Tersusunnya Laporan Formasi Pegawai	Dokumen	1	1
			Tersusunnya Laporan/Kajian proyeksi Kebutuhan Pegawai	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	2	2
			Tersusunnya Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Periode Juli s.d. Desember 2023	Laporan	1	1
			Tersusunnya Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Periode Januari s.d. Juni 2024	Laporan	1	1
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	2
			Tersusunnya LaporanÂ Pengembangan Aplikasi Layanan Kepegawaian dan Pemeliharaan Mesin Presensi	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Tersusunnya Laporan monev kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota	Dokumen	1	1
			Pengelolaan Data Kepegawaian			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	3	3
			Tersedianya Kartu Identitas (Karis/Karsu dan Karpeg) (300 Kartu)	Dokumen	1	1
			Tersusunnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1	1
			Terlaksananya Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif (350 SK)	Dokumen	1	1
			Pengelolaan Mutasi ASN			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	200	374
			Terlaksananya Mutasi dan Rotasi Jabatan Pelaksana	Dokumen	185	338
			Terlaksananya Pengangkatan Aparatur (mutasi) PNS masuk Pemda DIY	Dokumen	15	36
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	2	2
			Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Periode 1 April 2023	Laporan	1	1
			Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Periode 1 Oktober 2023	Laporan	1	1
			Pengelolaan Promosi ASN			
			Pengangkatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	Dokumen	1	1
			Pengelolaan Assessment Center			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	3	3
			Laporan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pegawai	Dokumen	1	1
			Laporan Pelaksanaan Bimbingan Konseling	Dokumen	1	1
			Laporan Penyusunan Perjanjian Kerja Sama	Dokumen	1	1
			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1	1
			Terbitnya Ijin dinas luar negeri	Surat	12	58
			Terlaksananya Ujian Dinas bagi ASN	Orang	305	276
			Terlaksananya Ujian Penyesuaian Ijazah	Orang	130	141
			Tersusunnya Laporan Rencana Pengembangan Kompetensi (RPK)	Dokumen	1	1
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1	1
			Tersedianya Beasiswa APBD Pendidikan Tugas Belajar / Ijin Belajar Program S1 / D4	Orang	114	95
			Tersedianya Beasiswa APBD Pendidikan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Program S2	Orang	48	45
			Tersedianya Beasiswa APBD Pendidikan Tugas Belajar / Ijin Belajar Program S3	Orang	2	2
			Tersedianya fasilitasi surat ijin/keterangan belajar mandiri dan tugas belajar beasiswa APBN bagi ASN	Orang	50	174
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1	1
			Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	5	123
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	50	854
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1	Dokumen	1	1
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	7	7
			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	450	604
			Pembinaan Disiplin ASN			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	100	103
			Terselesaikannya penetapan hukum PNS dan pejabat negara	Orang	20	23
			Terlaksananya Bimtek LHKPN	Orang	40	40
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Orang	40	40
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	1

2) Pendidikan dan Pelatihan

a) Kondisi Umum

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan merupakan tema pembangunan DIY tahun 2023. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing *untuk* menghadapi tantangan global. Sedangkan peningkatan produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetisi global dan di masa pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung.

Sebagai unsur sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintahan, ASN turut dituntut untuk terus meningkatkan kualitasnya demi mewujudkan target/tujuan organisasi. Adapun peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

Pengembangan kompetensi ini salah satunya dilakukan melalui pelatihan. Hal paling utama dalam pelatihan adalah output program pengembangan kompetensi yang mampu menghasilkan perubahan sikap dan perilaku. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN, agar menjadi ASN yang profesional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Pelatihan untuk pengembangan kompetensi ASN dibagi dalam dua bentuk, yakni pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal. Pelatihan klasikal menekankan *pada* kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas, seperti pelatihan struktural, seminar, lokakarya, *kursus* dan sebagainya. Sementara pelatihan non klasikal menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, seperti *coaching*, *mentoring*, *e-learning*.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan *Pelatihan* bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan fungsi antara lain perumusan kebijakan dan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis, fungsional, manajerial dan sosial kultural bagi ASN.

Sebagai *upaya* untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pendidikan dan pelatihan Pemda DIY, maka kinerja Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.159. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase ASN yang telah mendapatkan pelatihan 20 JPL dalam 1 tahun	%	n/a	13,90	80,39	578,35

Sumber: Bandiklat DIY, 2024

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase ASN yang telah mendapatkan *pelatihan* 20 JPL dalam 1 tahun pada tahun 2023 ini adalah sebesar 80,39%. Capaian realisasi tersebut sesuai dengan perhitungan meta indikator Jumlah ASN Pemda DIY yang telah mendapatkan pelatihan 20 JPL dalam 1 tahun sebanyak 8.070 orang dibagi Jumlah ASN Pemda DIY sebanyak 10.038 orang dikali 100%. Peningkatan realisasi tersebut dipengaruhi oleh pengembangan *Corporate University* yang bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur secara terintegrasi melalui pelatihan *smart learning*.

Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 6 Tahun 2022 tentang *Corporate University* (Corpu), sebagai sekretariat Corpu Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY memiliki tugas dan fungsi dalam mengakomodir pengembangan kompetensi melalui *pelatihan* secara terintegrasi sehingga banyak ASN di Pemda DIY yang dapat mengakses pelatihan secara mandiri baik yang dilaksanakan oleh Bandiklat DIY maupun pelatihan di OPD masing-masing.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Belum optimalnya manajemen *Corporate University* dalam upaya pemenuhan hak ASN untuk mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun.

(2) Solusi

Untuk mendorong pelatihan berbasis *smart learning*, Pemda DIY telah mengembangkan *Corporate University* dengan tahapan yang telah dilakukan yaitu:

- (a) Telah diterbitkan SE No.893/1854 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*).
- (b) Koordinasi, fasilitasi edukasi berkala dengan tim penyelenggara di OPD (sosialisasi SE No. 893/1854, sinkronisasi implementasi kebijakan *Corporate University*, koordinasi persiapan pelatihan di OPD berbasis *Corporate University*, koordinasi dan pelaporan capaian pelatihan OPD berbasis Corpu).
- (c) Pembentukan tim penjaminan mutu pelatihan pada instansi di lingkungan Pemda DIY SK Kepala Badan No. 893/1300/KPTS/Diklat/2023.
- (d) Penyelenggaraan pelatihan *smart learning*, baik yang diselenggarakan oleh OPD sendiri maupun yang diselenggarakan oleh Bandiklat DIY.

c) Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023

Melalui APBD pada tahun anggaran 2023, Pemda DIY telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebanyak 49 angkatan yang *terdiri* dari Diklat Penjenjangan (Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 10 angkatan, Diklat Kepemimpinan

Tingkat II/Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II sebanyak 1 angkatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 3 angkatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) sebanyak 5 angkatan, Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 1 angkatan, Diklat Keistimewaan sebanyak 9 angkatan dan Orientasi PPPK sebanyak 20 angkatan.

Jumlah anggaran untuk Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan melalui dana APBD tahun 2023 sebesar Rp24.677.311.001,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp24.440.177.901,00 dan belanja modal sebesar Rp237.133.100,00. Jumlah program yang didanai melalui APBD yang dilaksanakan meliputi 3 program dan 28 sub kegiatan. Capaian kinerja anggaran belanja untuk tahun 2023 sejumlah 88,06%. Dari total anggaran sebesar Rp24.677.311.001,00 terserap Rp21.731.331.763,00. Rendahnya serapan anggaran tersebut dipengaruhi adanya efisiensi anggaran dalam kegiatan seperti efisiensi kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan. Selain itu, adanya beberapa regulasi menyebabkan tidak semua anggaran belanja dalam kegiatan dapat terserap secara maksimal. Sementara, realisasi fisik mencapai 100%. Berikut disajikan tabel jumlah anggaran belanja langsung melalui program dan kegiatan tahun 2023.

Tabel 3.160. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Peningkatan Budaya Pemerintahan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Persen	100	100

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			1 Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan: 269 Orang dari 270 Orang	Orang	270	269
2	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	100
			1 Tersusunnya Dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: ROPK: 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			2 Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja: 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			3 Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renstra : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			4 Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Perjanjian Kinerja: 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			5 Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja Perubahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persen	100	100
			1 Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : DPPA-SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			2 Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : RKA-SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			3 Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : RKPA-SKPD	Dokumen	1	1

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Perubahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen			
			4 Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : DPA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100
			1 Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Dokumen LKjIP Tahun 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			2 Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/Bahan LPPD Tahun 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			3 Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/Bahan LKPJ Tahun 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	100
			1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 972 Orang/12 Bulan dari 12 Bulan	Orang/ Bulan	972	972
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persen	100	100
			1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	Dokumen	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persen	100	100
			1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persen	100	100
			1 Laporan Keuangan Semester : 2 laporan dari 2 laporan	Laporan	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			2 Laporan Keuangan bulanan : 12 laporan dari 12 laporan	Laporan	12	12
			3 Laporan Keuangan Triwulanan : 4 laporan dari 4 laporan	Laporan	4	4
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persen	100	100
			1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 4 Laporan dari 4 Laporan	Laporan	4	4
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persen	100	100
			1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 14 Dokumen dari 14 Dokumen	Dokumen	14	14
			2 Jumlah Dokumen penilaian Angka Kredit bagi JFT Widyaiswara : 25 Dokumen dari 14 Dokumen	Dokumen	14	25
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persen	100	100
			1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persen	100	100
			1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persen	100	100
			1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persen	100	100
			1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Paket	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persen	100	100

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 127 Laporan dari 24 Laporan	Laporan	24	127
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persen	100	100
			1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 59 unit dari 59 unit	Unit	59	59
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen	100	100
			1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 12 Laporan dari 12 Laporan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen	100	100
			1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 12 Laporan dari 12 Laporan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persen	100	100
			1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 12 Laporan dari 12 Laporan	Laporan	12	12
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persen	100	100
			1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya: 1 Unit dari 1 Unit	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persen	100	100
			1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	Unit	12	12

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			dan Perizinannya: 12 Unit dari 12 Unit			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persen	100	100
			1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1 Unit dari 1 Unit	Unit	1	1
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persen	100	100
			1 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 60 Unit dari 60 Unit	Unit	60	60
3	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Pengembangan Kompetensi Teknis			
			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100
			1 Pedoman penyelenggaraan pelatihan (kurikulum dan silabus): 3 Dokumen dari 3 Dokumen	Dokumen	3	3
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Persen	100	100
			1 Akreditasi PKN II : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			2 Akreditasi Perpustakaan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			3 Penjaminan mutu pelatihan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			4 Evaluasi pasca pelatihan : 5 Dokumen dari 5 Dokumen	Dokumen	5	5
			5 Pelaksanaan kajian : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Persen	100	100
			1 Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar : 1 Laporan dari 1 Laporan	Laporan	1	1
			Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Persen	100	100
			1 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga : 36 Dokumen dari 14 Dokumen	Dokumen	14	36
			2 Mentor Yang Memahami Peran dan Tugas Dalam Memberikan Pendampingan Peserta Diklat : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	Dokumen	4	4
			3 Hasil Rapat Kerja Monitoring Diklat Kemitraan Tk. Regional : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			4 Hasil Kesepakatan Diklat Kemitraan : 30 Dokumen dari 6 Dokumen	Dokumen	6	30
			5 Laporan Monitoring Diklat Kemitraan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Dokumen	1	1
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persen	100	100
			1 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan : 1639 Orang dari 1639 Orang	Orang	1.639	1.639

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			2 Pelatihan Dasar CPNS : 409 orang dari 409 orang	Orang	409	409
			3 Pelatihan Kepemimpinan Administrator : 120 orang dari 120 orang	Orang	120	120
			4 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas : 200 orang dari 200 orang	Orang	200	200
			5 Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II : 60 orang dari 60 orang	Orang	60	60
			6 Diklat Pengadaan Barang/Jasa : 30 orang dari 30 orang	Orang	30	30
			7 Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 820 orang dari 820 orang	Orang	820	820

e. Sekretariat Daerah

1) Tata Pemerintahan

a) Kondisi Umum

Tata Pemerintahan di dalamnya meliputi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). LPPD dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2022 telah disampaikan kepada Presiden melalui Kemendagri dengan Surat Gubernur DIY kepada Presiden RI Nomor

120/3808 Tanggal 27 Maret 2023 Perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. Selain itu juga telah disusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) DIY Tahun 2022 dan telah dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui media *online* maupun media cetak. Berkaitan dengan hal tersebut juga telah disampaikan Hasil EPPD Tahun 2022 Terhadap LPPD DIY Tahun 2021 bahwa memperoleh skor kinerja tinggi yaitu 3,62 menduduki peringkat kedua di Indonesia. Pada tanggal 29 April 2023 di Kota Makassar Pemda DIY meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah dengan Status Kinerja Tinggi dan mendapatkan peringkat ke-2 se-Indonesia.



Gambar 3.33. Sri Paduka Paku Alam X Menerima Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kemendagri, 29 April 2023 di Makassar, Sulsel

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

Selanjutnya terkait SPM dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM maupun Peraturan Teknis SPM dari Kementerian Teknis/Sektoral, Pemda DIY juga telah melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, pendampingan, dan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial. DIY juga telah memiliki Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal DIY Tahun 2023-2027. Laporan SPM Tahun 2022 telah disampaikan kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor 120/3043 Tanggal 9 Maret 2023 *Perihal* Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022. Pada Tahun 2023 Pemda DIY juga telah melaksanakan Pelaporan SPM Secara Triwulan dalam Aplikasi eSPM Bangda tepat waktu dan Pendataan/pemutakhiran data SPM. Pada Gelaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards Tahun 2023 Tanggal 21 Maret 2023 di Jakarta, DIY masuk dalam kategori 10 Provinsi Terbaik Peringkat ke-6 Penerapan SPM se-Indonesia dengan nilai 93,77.

Dalam rangka mempercepat Penerapan Standar Pelayanan Minimal di DIY, sejak Tahun 2020 Pemda DIY telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, namun demikian pengaturan dalam Pergub tersebut didasarkan *pada* ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang saat ini sudah tidak berlaku sehingga perlu dicabut/disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu

Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Untuk itu pada Tahun 2023 Pemda DIY telah menyusun Rancangan Peraturan Pergub DIY tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Pengganti Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2020 yang pada Tanggal 29 November 2023 telah ditetapkan/diundangkan dan diumumkan dalam Lembaran Berita Daerah DIY Tahun 2023 Nomor 76 yaitu Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urgensitas disusunnya Peraturan Gubernur tersebut yaitu:

- (1) Sebagai Landasan dan Pedoman Penerapan SPM di DIY;
- (2) Digunakan dalam Penetapan Kebijakan Prioritas Perencanaan Pembangunan;
- (3) Pengalokasian Anggaran APBD untuk Pemenuhan SPM;
- (4) Penyelarasan Penerapan SPM dengan Urusan Non-SPM;
- (5) Penilaian Kinerja, Binwas dan Evaluasi SPM di DIY.

Pada tahun 2023 di DIY, terdapat 2 pejabat bupati/walikota yang berakhir masa jabatannya di bulan Mei, yaitu Pj. Bupati Kulon Progo dan Pj. Walikota Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 201 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan *Pemerintah* Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, pada ayat (9) menyebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022, maka diangkat Penjabat Bupati dan Walikota sampai terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada

tahun 2024. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Penjabat Bupati Kulon Progo (Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T.) dilantik menggantikan (Drs. Tri Saktiyana, M.Si.) serta Penjabat Walikota Yogyakarta (Singgih Rahardjo, S.H., M.Ed.) dilantik menggantikan (Sumadi S.H., M.H.) berdasarkan pada :

- (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1193 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1192 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pasal 164 ayat (1), Bupati dan Wakil Bupati serta *Walikota* dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibukota Provinsi. Menindaklanjuti UU tersebut, Pemda DIY melaksanakan agenda Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Walikota Yogyakarta oleh Gubernur yang dilaksanakan di Bangsal Kepatihan Yogyakarta pada hari Senin, 22 Mei 2023 pukul 12.00 WIB – selesai di Bangsal Kepatihan, Danurejan Yogyakarta.



Gambar 3.34. Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Walikota Yogyakarta pada 22 Mei 2023

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

Pada tahun 2023 juga terdapat aktivitas fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk anggota DPRD. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 140 ayat (3), dan pasal 144 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan peresmian pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi setelah mendapat usulan dari Pimpinan DPRD. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (4) dan 195 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD paling lama 14 Hari sejak usul pemberhentian dan pengangkatan pengganti anggota DPRD antar waktu kabupaten/kota dari bupati/walikota diterima. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut data Pemberhentian Antar Waktu dan Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tahun 2023 yang difasilitasi Pemda DIY antara lain :

Tabel 3.161. Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY
Tahun 2023

No	DPRD Prov/ Kabupaten/Kota	Partai	Nama	Pengganti
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	Partai Nasional Demokrat	Suparja, S.IP (meninggal dunia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3107 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY, tanggal 31 Juli 2023	Christina Ari Retnaningsih Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3135 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD DIY, tanggal 3 Agustus 2023
2	Daerah Istimewa Yogyakarta	Partai Amanat Nasional	drg. Hj. Hanum Salsabiela, MBA (diberhentikan oleh partai politik). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3188 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY, tanggal 15 Agustus 2023	Madiyono, SE, MEK Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3189 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD DIY, tanggal 15 Agustus 2023.
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	Partai Amanat Nasional	Suharwanta, ST. (meninggal dunia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3812 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua DPRD DIY, tanggal 13 September 2023	Ir. Atmaji Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3813 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 13 September 2023.
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	Partai Amanat Nasional	Suharwanta, ST (meninggal dunia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.4-4225 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY, 26 Oktober 2023	Sigit Pribadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.4-4226 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 26 Oktober 2023.
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	Partai Amanat Nasional	H. Ahmad Baihaqy Rais, B.Bus., M.A. (diberhentikan oleh partai politik). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4073 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY, tanggal 4 Oktober 2023	Susilawati Lestari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4074 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 Oktober 2023.

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

Tabel 3.162. Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	DPRD Prov/ Kabupaten/Kota	Partai	Nama	Pengganti
1	Kabupaten Kulon Progo	Partai Gerindra	Suprpto R. (meninggal dunia) Keputusan Gubernur DIY Nomor: 7/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 6 Januari 2023	Kalis Gatot Raharjo Keputusan Gubernur DIY Nomor: 13/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 9 Januari 2023.
2	Kabupaten Bantul	Partai Gerindra	Sukardiyono, S.H (diberhentikan oleh partai politik) Keputusan Gubernur DIY Nomor: 32/KEP/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 31 Januari 2023	Sefti Indradewi, S.Pd Keputusan Gubernur DIY Nomor: 70/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 1 Maret 2023
3	Kabupaten Bantul	Partai Amanat Nasional	H.R. Ichwan Tamrin Murdiyanta, S.E (diberhentikan oleh partai politik) Keputusan Gubernur DIY Nomor 260/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 15 Agustus 2023	Padmini Karyanti Keputusan Gubernur DIY Nomor 265/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 23 Agustus 2023.
4	Kabupaten Gunungkidul	Partai Demokrat	H. Suyanto, S.E (meninggal dunia) Keputusan Gubernur DIY Nomor: 375/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 10 November 2023.	Eli Santoso Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 376/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 13 November 2023

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu salah satu peran yang dilaksanakan pemerintah daerah yaitu melaksanakan sosialisasi terkait regulasi dan seluk-beluk Pemilu. Berkenaan *dengan* hal tersebut, tahun 2023 Pemda DIY mulai mensosialisasikan tahapan pemilu serentak Tahun 2024 yang sudah berjalan dengan sasaran para pengurus dan anggota Tim Penggerak PKK di tingkat Kapanewon/Kemantren.

Pemda DIY dalam rangka mendukung upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kalurahan, pada tahun 2023 sesuai visi dan *misi* Bapak Gubernur DIY Tahun 2022-2027 memiliki upaya untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan, dalam penyiapan rumusan kebijakan dilakukan Kajian Pedoman Pengembangan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. Kajian ini penting untuk memberikan pengayaan kedalaman salah satu kegiatan utama Reformasi Birokrasi Kalurahan, yakni Penguatan Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan. Kegiatan utama Reformasi Birokrasi Kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Kalurahan tersebut diarahkan untuk terwujudnya peningkatan kecakapan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Tabel 3.163. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/ Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren yang direspons dengan kebijakan	%	388,23	100	259,52	259,52

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

Sasaran Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan adalah Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang memiliki indikator kinerja sasaran “Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspons dengan kebijakan”, dengan formulasi perhitungan Jumlah dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang direspons dengan kebijakan dibagi jumlah dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus direspons sesuai dengan kewenangan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dikali 100%.

Pada sasaran tersebut tercapai 259,52%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 259,52% (sangat terlampaui). *Dibandingkan* realisasi tahun lalu sebesar 388,23%, terdapat penurunan sebesar 128,71%. Penurunan tersebut tidak menjadi kendala yang berarti karena target tahun 2023 juga sudah sangat melampaui target, hal tersebut dikarenakan menurunnya jumlah pengajuan kerjasama dari luar instansi ke Pemda DIY karena sifatnya insidental. Selain itu pada tahun 2023 jumlah target rumusan bahan kebijakan naik signifikan yakni sebanyak 42 rumusan bahan kebijakan, sedangkan pada tahun 2022 target hanya sebanyak 17 rumusan bahan kebijakan. Jumlah rumusan bahan kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2023 sebanyak 109, sedangkan pada tahun 2022 dihasilkan sebanyak 66 rumusan bahan kebijakan. Sehingga dapat dibandingkan bahwa jumlah pembilang dan penyebut pada perhitungan meta indikator sasaran Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerjasama serta

Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren jelas berbeda signifikan sehingga menghasilkan nilai akhir yang berbeda namun tidak menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 259,52% yang mana sudah sangat melampaui target tahun 2026.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Pendataan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dilaksanakan belum dapat menghasilkan data yang lengkap dan valid khususnya terkait dengan data *By Name By Address* (BNBA) seperti yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 disebabkan adanya pembatasan akses data informasi administrasi kependudukan oleh Ditjen Dukcapil (Kebijakan Siak Terpusat) dan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- (b) Pelaksanaan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu DPRD DIY atau Kabupaten/Kota dalam hal penyerahan kelengkapan berkas administrasi ke Tim Verifikasi di lingkungan Sekretariat Daerah DIY seperti yang diamanatkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, masih ditemukan berkas yang belum lengkap;

- (c) Sebagai implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023 perihal kesepahaman unsur tim pelaksana Reformasi Kalurahan tingkat Kabupaten yang masih memerlukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan DIY. Sampai akhir tahun 2023, baru Kabupaten Kulon Progo yang sudah membentuk Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten.

(2) Solusi

- (a) Pendataan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan data di OPD. Perlu dilaksanakan konsolidasi data secara rutin dengan mitra kerja mulai dari tingkat Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan Kalurahan/Kelurahan;
- (b) Tim Verifikasi di lingkungan Sekretariat Daerah DIY berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota terkait belum lengkapnya berkas Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY atau Kabupaten/Kota untuk dilengkapi kembali;
- (c) Melakukan koordinasi intensif dengan unsur perangkat daerah kabupaten sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 agar segera membentuk tim reformasi kalurahan dengan keputusan Bupati. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan DIY sesuai ketegasannya melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi secara intensif terkait pembentukan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023, Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan dilaksanakan melalui 6 program dan 29 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp3.240.007.400,00 dan *pada* APBD perubahan menjadi Rp5.005.206.950,00, atau bertambah sebesar Rp1.765.199.550,00. Pertambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk urusan keistimewaan seperti urusan pertanahan yang menambah suboutput laporan sinkronisasi garis batas daerah perbatasan DIY dengan Jawa Tengah pada segmen batas daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang. Urusan Kebudayaan yang menambah suboutput pemasangan *QR code* pada Penanda Keistimewaan sebanyak, Kajian Standar Penanda Wilayah Keistimewaan DIY, serta tambahan subkegiatan baru terkait pembahasan hari jadi DIY. Urusan selanjutnya yakni kelembagaan yang digunakan untuk menambah kegiatan pendukung reformasi kalurahan seperti *Kick Off* Reformasi Kalurahan serta tambahan subkegiatan baru terkait sarana dan prasarana pendukung reformasi kalurahan di DIY.

Pada Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan secara keseluruhan anggaran belanja dapat direalisasikan sebanyak Rp4.759.308.653,00 dari Rp5.005.206.950,00, secara persentase terealisasi sebesar 95,09% dan untuk realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan terdapat efisiensi sebesar Rp245.898.297,00 (4,91%) yang bersumber dari:

- (1) Sisa pengadaan barang dan jasa.
- (2) Efisiensi belanja perjalanan dinas.
- (3) Efisiensi honor narasumber.

- (4) Terdapat Efisiensi belanja karena harga di bawah DPA sehingga menyebabkan keuangan tidak terserap seluruhnya.

Tabel 3.164. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
			1.1. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
			1.1.1. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY	Dokumen	1	1
			Penyusunan peta batas daerah pada kawasan strategis Suroloyo	Dokumen	1	1
			Laporan pembinaan serta pengawasan penetapan dan penegasan batas kalurahan	Dokumen	1	1
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	Laporan Pembahasan Revisi Permendagri Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah	Dokumen	1	1
			Laporan Sinkronisasi garis batas daerah perbatasan DIY dengan Jawa Tengah pada segmen batas daerah kab. Kulon Progo dengan Kab. Magelang	Dokumen	1	1
			2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			2.1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			
			2.1.1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi			
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas	Dokumen	50	74

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi (DPA SIPD)			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (KK, KIA, KTP-EI, Akta Kelahiran)	Dokumen	49	73
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen	Dokumen	1	1
			2.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			
			2.2.1. Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rapat Kerja Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1
			2.2.2. Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk			
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1
			3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			3.1. Pelayanan Pencatatan Sipil			
			3.1.1. Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Terpadu Fasilitas Dokumen Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1
			3.2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			
			3.2.1. Fasilitas terkait Pencatatan Sipil			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pelayanan Fasilitas Isbat Nikah	Laporan	1	1
			3.2.2. Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga	Dokumen	3	7

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil (DPA SIPD)			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemberian Insentif Bagi Anak Pemilik KIA di Wilayah DIY	Dokumen	3	7
			4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			4.1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			
			4.1.1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan Perawatan Operasional SIAK	Laporan	1	1
			4.1.2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan (DPA SIPD)	Dokumen	4	4
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	2	2
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Rapat Kerja Terkait Pemilu	Dokumen	2	2
			5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			5.1. Penyediaan Profil Kependudukan			
			5.1.2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain			
			Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Jumlah Dokumen Profil Data dan Proyeksi Kependudukan DIY Tahun 2022	Dokumen	1	1
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	6. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			6.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
			6.1.1. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	N MASYARAKAT DAN DESA		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			6.1.2. Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa			
			Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			6.1.3. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	7. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			7.1. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
			7.1.1. Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan (DPA SIPD)	Dokumen	2	2
			Naskah Akademik Penetapan Hari Jadi DIY	Dokumen	1	1
			Draft Raperda tentang Penetapan Hari Jadi DIY	Dokumen	1	1
			7.2. Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman			
			7.2.1. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan			
			Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan (DPA SIPD)	Unit	303	304
			Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Kalurahan	1	1
			Kajian Standar Penanda Wilayah Keistimewaan	Dokumen	1	1
			Pemasangan Quick Response System (QRS) Code	Kalurahan	302	302
5	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			8.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			8.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD)	Dokumen	5	8

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Rencana Strategis Biro Tapem Tahun 2022-2027	Dokumen	1	1
			Rencana Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2024	Dokumen	2	2
			Rencana Kinerja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023	Dokumen	1	1
			Tersusunnya ROPK	Dokumen	2	2
			Tersusunnya Perjanjian Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023	Dokumen	2	2
			8.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD)	Laporan	2	14
			Dokumen LKj IP	Dokumen	1	1
			Laporan monev bulanan/tahunan (LKPI)	Dokumen	1	13
			8.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			8.2.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD)	Dokumen	1	3
			Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Jenis	1	1
			Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Jenis	1	1
			Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD	Jenis	1	1
			8.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Laporan Keuangan Tahunan	Laporan	1	1
			8.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	4	4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD)			
			Laporan Keuangan Bulanan	Laporan	1	1
			Laporan Keuangan Triwulanan	Laporan	1	1
			Laporan Keuangan Semester	Laporan	1	1
			Laporan Prognosis	Laporan	1	1
			8.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
			8.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Laporan Aset SKPD	Laporan	1	1
			8.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			8.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	1	1
			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1
			8.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	2	2
			Alat Tulis Kantor	Paket	1	1
			Tabung Pemadam Kebakaran	Paket	1	1
			8.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	1	1
			Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Paket	1	1
			8.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD)	Paket	2	2
			Barang cetak	Paket	1	1
			Penggandaan	Paket	1	1

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			8.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (DPA SIPD)	Dokumen	2	2
			Bahan bacaan Jawa Post	Dokumen	1	1
			Bahan bacaan Kedaulatan Rakyat	Dokumen	1	1
			8.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Laporan konsultasi dan koordinasi	Laporan	1	1
			8.4.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Pemeliharaan Website Tahun 2023 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Website	1	1
			8.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			8.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD)	Laporan	1	1
			Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1
			8.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			8.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (DPA SIPD)	Unit	1	1
			Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	Unit	1	1
			8.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD)	Unit	11	11
			Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Unit	4	4
			Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit	7	7
			8.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD)	Unit	3	5
			Air Conditioner	Jenis	1	1
			Peralatan Komputer	Jenis	1	3
			LCD Proyektor	Jenis	1	1
			9. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
			9.1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
			9.1.1. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (DPA SIPD)	Dokumen	3	6
			Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD penggantian antar waktu	Usulan SK	3	4
			Pengusulan dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah (Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta)	Dokumen	1	1
			Laporan hasil Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024	Dokumen	1	1
			9.1.2. Fasilitasi Penataan Wilayah			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	1	1
			Laporan penyelarasan pembangunan di wilayah perbatasan	Dokumen	1	1
			9.2. Pelaksanaan Otonomi Daerah			
			9.2.1. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (DPA SIPD)	Laporan	2	2
			9.3. Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
			9.3.1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (DPA SIPD)	Dokumen	2	56
10. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						
10.1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan						
10.1.1. Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan						
			Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina (DPA SIPD)	Dokumen	8	8
			Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Laporan	1	1
			Laporan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Laporan	1	1
			Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	Aplikasi	1	2
			Sosialisasi Kelembagaan Asli Daerah	Kali	60	60
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kalurahan	Aparatur	98	196
			Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan	Kali	4	5
			Kajian Pedoman Pengembangan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan	Dokumen	1	2
			Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan pada 392 Kalurahan (392 Kalurahan sudah mengisi co reform space)	Laporan	1	3
10.2. Sarana dan Prasarana Keistimewaan						
10.2.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan	Unit	14	14

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan / Subkegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Keistimewaan yang Disediakan (DPA SIPD)			
			Rehab Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY	Paket	1	1
			Air Conditioner	Unit	6	6
			Printer	Unit	2	2
			Televisi	Unit	1	1
			Personal Komputer	Unit	2	2
			Laptop	Unit	1	1
			LCD Proyektor	Unit	1	1

2) *Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum*

a) *Kondisi Umum*

Pemerintah Daerah melaksanakan pembentukan produk hukum daerah, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, *“Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”* Ketentuan ini diatur lebih teknis pada Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa, *“Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.”* Selanjutnya ditegaskan kembali pada Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa, *“Untuk menyelenggarakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.”* Sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

Kontribusi pembangunan terkait fasilitasi perundang-undangan dan hukum dilakukan dengan tujuan “Terwujudnya layanan hukum yang berkualitas” yang kemudian memiliki sasaran kinerja yaitu “Meningkatnya produk hukum daerah serta bantuan dan layanan hukum yang *berkualitas*.” Dimana dalam mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Pemda DIY melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang peraturan perundang-undangan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota untuk meningkatkan persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Target dan *realisasi* kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum pada Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.165. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Layanan Hukum yang Berkualitas	%	100	100	100	100

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2024

Pemda DIY melaksanakan kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam kegiatan tersebut terdapat pelaksanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Istimewa, Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan Keputusan Gubernur. Penetapan produk hukum daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di bidang regulasi serta menciptakan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan Keputusan DPRD DIY Nomor 80/K/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan DPRD DIY Nomor 71/K/DPRD/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD DIY Nomor 80/K/DPRD/2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 menetapkan sebanyak 9 Rancangan Peraturan *Daerah* dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Prioritas Tahun 2023 yang menjadi target pembahasan di luar target 3 Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Kumulatif Terbuka Tahun 2023.

Tabel 3.166. Kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah oleh Pemda DIY pada Tahun 2023

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Pembahasan Raperda	9 Rancangan Peraturan Daerah	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022- Tahun 2027 Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	1. Raperda tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta belum ditetapkan, namun telah mendapatkan hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri RI 2. Raperda tentang Ekonomi Hijau belum ditetapkan, namun telah mendapatkan hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri RI 3. Raperda tentang Pemajuan dan Pembangunan Desa Atau

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah	4. Kalurahan dan Kelurahan dalam proses permohonan fasilitasi kepada Kementerian Dalam Negeri RI
		Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043	
		Raperda tentang Pengelolaan Sampah Regional	
		Raperda tentang Ekonomi Hijau	
		Raperda tentang Pemajuan dan Pembangunan Desa Atau Kalurahan dan Kelurahan	
		Raperda tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta	
		Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2024

Tahun 2023, Pemda DIY telah menetapkan sebanyak 94 Peraturan Gubernur dan 457 Keputusan Gubernur. Selain menetapkan Rancangan Peraturan Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Keputusan Gubernur, Pemda DIY juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap rancangan produk hukum dan produk hukum Kabupaten/Kota. Pembinaan dan *pengawasan* tersebut dilaksanakan melalui konsultasi, fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi pada produk hukum Kabupaten/Kota. Tahun 2023, target kinerja yang ditetapkan untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 110 produk hukum dengan capaian realisasi 100%.

Pendokumentasian informasi serta produk hukum daerah di DIY dilakukan oleh Pemda DIY melalui penyebarluasan Produk Hukum dan digitalisasi Produk Hukum. Beberapa kegiatan teknis penyebarluasan produk hukum tersebut adalah: 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan di lima kabupaten/kota se-DIY; 2) Pengunggahan 352 produk hukum ke dalam website JDIH (12 Peraturan Daerah, 94 Peraturan Gubernur, dan 457 Keputusan Gubernur); dan 3) Penyampaian Lembaran Daerah dan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 1.100 buku ke Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Pedukuhan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemda DIY tidak luput dari risiko adanya keberatan dari masyarakat yang memungkinkan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri. Demikian juga tidak *menutup* kemungkinan Pemda DIY menjadi penggugat apabila kepentingannya telah dirugikan pihak lain. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya menyatakan bahwa, *“Gubernur mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY mempunyai fungsi salah satunya fasilitasi pemberian bantuan

hukum bagi aparat sipil negara di lingkungan Pemda DIY yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Tabel 3.167. Rekapitulasi Jumlah Penanganan Perkara TA 2023

Perkara	Tk. I	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
Perdata	1	-	-	1
Tata Usaha Negara	4	-	1	-

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2024

Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Smn antara Emy Rahmawati Hapriyani sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Bupati Sleman Cq. Panewu Depok Cq. Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Turut Tergugat I, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Turut Tergugat II, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kantor Wilayah Pertanahan D I Yogyakarta Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai Turut Tergugat III. Tanah yang disengketakan adalah tanah tegal Persil 57/d.II seluas kurang lebih 4.000 m², dan tanah tegal Persil 58/d.II seluas kurang lebih 3.620 m², letter C No.576 Kalurahan Caturtunggal. Dalam perkara ini, Majelis Hakim yang mengadili di Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- (1) Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;
- (2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

- (3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.465.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Oleh karena tidak dilakukan upaya hukum lebih lanjut oleh para pihak berperkara maka keputusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perkara Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor 6/G/2023/PTUN YK, dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor: 359/HAK/KPTS/1985 Tanggal 31-10-1985, Surat Keputusan Nomor: 680/SK/HM/BPN/1992 Tanggal 28 Desember 1992, dan Sertifikat Tanah Hak Milik SHM Nomor: 4426/Caturtunggal antara Ny. Wardi Wiyono sebagai Penggugat Melawan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai Tergugat III, serta Ika Pambudiasih sebagai Tergugat II Intervensi. Dalam perkara ini, Majelis Hakim yang mengadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- (1) Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang Kompetensi absolut pengadilan;

- (2) Dalam Pokok Sengketa:

- (a) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- (b) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp454.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Oleh karena tidak dilakukan upaya hukum lebih lanjut oleh para *pihak* berperkara maka keputusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- (1) Perkara Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor 10/G/2023/PTUN YK, dengan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00069/Bener tertanggal 01 Agustus 2022, nama pemegang hak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Luas 468 m² antara Suginem, Ny. Pairah Sumedi Rahardjo, Suradal, Ponirah, Suraji, Supardi sebagai Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai Tergugat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat II Intervensi. Dalam perkara ini, Majelis Hakim yang mengadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

(a) Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing/Persona Standi In Judicio*;

(b) Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.014.000,00 (Satu Juta Empat Belas Ribu Rupiah);

Oleh karena tidak dilakukan upaya hukum lebih lanjut oleh para pihak berperkara maka putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- (2) Perkara Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor 11/G/2023/PTUN.YK, dengan objek sengketa berupa Surat Nomor 027/1231 tentang Jawaban Atas Sanggah Banding tertanggal 28 Maret 2023 antara Alvian Ramadhani sebagai Penggugat melawan KPA Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul sebagai Tergugat I, POKJA Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul pada BLP DIY sebagai Tergugat II, dan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul sebagai Tergugat III. Oleh karena dalam acara proses dismissal atau *dismissal procedure* ternyata objek sengketa *a quo* bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menyelesaikan perkaranya maka tidak memenuhi aspek formal pengajuan gugatan. Dengan demikian dalam perkara ini, Majelis Hakim yang mengadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menetapkan sebagai berikut:
 - (a) Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 - (b) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.500,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Perkara Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor 1/G/2023/PTTUN.SBY, dengan objek sengketa berupa Surat Nomor 027/1231 tentang Jawaban Atas Sanggah Banding tertanggal 28 Maret 2023 antara Alvian Ramadhani sebagai Penggugat melawan KPA Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul sebagai Tergugat I dan POKJA Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul

pada BLP DIY sebagai Tergugat II. Dalam perkara ini, Majelis Hakim yang mengadili di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

(a) Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Para Tergugat tentang Para eksepsi kewenangan absolut;

(b) Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap putusan ini, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (masih berproses).

- (4) Perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN. Yyk Jo No. 64/PDT/2020/PT. YYK. Jo. Nomor 1840 K/Pdt/2021 Jo. 757 PK/Pdt/2022 Jo. No. 1214 PK/Pdt/2023 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY, dkk sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali melawan Sulcha Prihasti, SE. MM sebagai Termohon Peninjauan Kembali dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali. Perkara ini telah diputus di tingkat Peninjauan Kembali pada tahun 2022. Terhadap putusan Peninjauan Kembali tersebut, PT. BPD DIY mengajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya. Gubernur dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan kontra memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Selain dari perkara *perdata* dan tata usaha negara, Pemda DIY melakukan penanganan sengketa informasi publik yang diselesaikan melalui mekanisme adjudikasi non-litigasi oleh Komisi Informasi Daerah.

Terkait dengan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan (P5) Hak Asasi Manusia (HAM) di DIY telah dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025. Peraturan tersebut *merupakan* landasan kebijakan nasional yang memuat sasaran strategis untuk melaksanakan dan mempercepat kemajuan HAM di Indonesia khususnya hak-hak kelompok rentan yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Pada Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 mengatur bahwa Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan aksi hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang tercermin melalui penyampaian laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) kepada Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) setiap 4 bulan sekali pada bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023. Pelaksanaan dan pelaporan RANHAM pada tahun 2023 telah dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah dan seluruh *stakeholders* termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di DIY. Pelaksanaan dan pelaporan atas RANHAM di DIY tahun 2023 menjadi salah satu tolok ukur komitmen penyelenggaraan P5 HAM baik di Pusat maupun di Daerah dan merupakan upaya konkrit Pemerintah dalam pengarusutamaan HAM di seluruh bidang Pembangunan

baik infrastruktur, perekonomian dan bidang pembangunan lainnya yang merupakan sebuah upaya untuk memajukan bangsa dan senantiasa diorientasikan kepada penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara secara komprehensif baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pemda DIY bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, DP3AP2 DIY, Dinas Sosial DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga DIY, dan Dinas Kebudayaan DIY melaksanakan pemenuhan Aksi RANHAM pada Tahun 2023 dengan kelompok sasaran yang meliputi Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Adat. Berdasarkan *pemenuhan* aksi RANHAM diatas, memperoleh nilai total keseluruhan sebagai berikut :

Tabel 3.168. Rekapitulasi Penilaian Capaian Aksi RANHAM TA 2023

AKSI			NILAI TOTAL
B.04	B.08	B.12	
94.375	93.13	96.875	94.793

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2024

Di samping RANHAM, terdapat pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2023, Gubernur DIY memperoleh penghargaan sebagai Pembina Daerah Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan tersebut diberikan atas upaya Gubernur membina dan membangun penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan P5) di seluruh Kabupaten dan Kota di DIY sehingga atas seluruh Kabupaten dan Kota di DIY tersebut meraih predikat “Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia” pada Tahun 2022.

Dalam hal pemenuhan HAM, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, Pemda DIY turut menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Melalui P2HAM dilakukan pemenuhan hak atas pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik bagi setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Layanan publik tersebut dilakukan sesuai standar pelayanan publik yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur *penyelenggaraan* pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur. Pemda DIY bersama dengan Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) memberikan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian pelayanan telah memperhatikan aspek HAM, sehingga pelayanan menjadi berkualitas dan tidak diskriminatif.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Permohonan fasilitasi rancangan Peraturan Bupati/Walikota belum sesuai dengan tata kala waktu yang telah ditentukan dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, belum optimalnya masukan teknis substansi materi untuk fasilitasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.

- (b) Substansi materi rancangan produk hukum daerah yang diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum didukung dengan hasil kajian teknis.
- (c) Ketercapaian penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Selain itu belum semua personil mendapatkan pengembangan kompetensi dalam penyelesaian permasalahan secara litigasi dan nonlitigasi.
- (d) Keterbatasan dalam mengakses data dan bahan pendukung dalam proses penyelesaian permasalahan hukum, serta belum optimalnya penerapan keamanan dan pengembangan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi hukum berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2) Solusi

- (a) Menyampaikan surat klarifikasi kepada kabupaten/kota terkait tata kala waktu penyampaian permohonan fasilitasi rancangan peraturan daerah. Dilakukan pula optimalisasi pelibatan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait di DIY dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum kabupaten/kota.
- (b) Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penataan Produk Hukum Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah.
- (c) Optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum dengan meminimalisir pengaruh eksternal. Selain hal itu, personil yang terlibat dalam penyelesaian

permasalahan secara litigasi dan nonlitigasi, secara mandiri mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

- (d) Optimalisasi koordinasi dengan pihak yang memiliki data dan bahan pendukung yang diperlukan dalam proses penyelesaian masalah hukum, serta optimalisasi penerapan keamanan dan pengembangan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi hukum berbasis Teknologi Informasi secara berkala dan terstruktur.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah *Fasilitasi* Perundang-undangan dan Hukum pada tahun 2023 dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.461.015.880,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 4 program dan 37 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp5.329.317.590,00 atau 97,59%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.169. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	KELEMBAGAAN DAERAH ISTIMEWA	BIRO HUKUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Indikator Kinerja: Persentase capaian produk hukum daerah	Persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)		tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
			KEGIATAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN			
			SUB KEGIATAN PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEWENANGAN KEISTIMEWAAN			
			Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi	Dokumen	20	20
			SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN			
			Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	17	17
2	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)	BIRO HUKUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
			Indikator Kinerja : Persentase capaian bantuan hukum terkait Penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	Persen	100	100
			KEGIATAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN			
			SUB KEGIATAN PENYIAPAN BAHAN PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN PENGGUNAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN			
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	1	1
			SUB KEGIATAN PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA PERTANAHAN TANAH KASULTANAN, TANAH KADIPATEN, DAN TANAH DESA			
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	1	1
			SUB KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO HUKUM	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
			Indikator Kinerja: Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	Persen	100	100
			KEGIATAN PENYUSUNAN PERUNDANG - UNDANGAN			
			SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN			
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	18	18
			SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN			
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	35	35
			SUB KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA			
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	3	3
			SUB KEGIATAN FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA			
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO HUKUM	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	110	110
			KEGIATAN BANTUAN HUKUM			
			SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH			
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	1	1
			SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM			
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	100	100
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indikator Kinerja : Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
			SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH			
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO HUKUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6
			SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4
			SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3
			KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
			SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN OPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
			SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	12	12
			KEGIATAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			
			SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4
			KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
			SUBKEGIATAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1
			KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
			SUBKEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2
			SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
			SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	2	2
			SUBKEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
			KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
			SUBKEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7
			SUBKEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2
			KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			SUBKEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
			KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			SUBKEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN JABATAN			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1
			SUBKEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN OPERASIONAL			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6
			SUBKEGIATAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	7
			SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1

3) *Fasilitas Perekonomian dan SDA*

a) *Kondisi Umum*

Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian daerah dilaksanakan untuk pemantauan maupun pencerminan secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Koordinasi, monitoring, evaluasi yang dilakukan serta rumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian daerah merupakan beberapa bentuk upaya dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi DIY melalui langkah-langkah tertentu, untuk memperkuat daya tahan perekonomian daerah terhadap berbagai kendala yang terjadi.

Stabilitas ekonomi dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dibutuhkan strategi mewujudkan stabilitas perekonomian

melalui pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perekonomian ke arah yang lebih baik.

Dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah, Pemda DIY menempatkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan dan budaya sebagai sektor yang penting. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua sektor penunjang *perekonomian* di DIY yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terbesar dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan melalui pengembangan ekonomi daerah terhadap sektor-sektor penunjang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Sumber Daya alam sebagai salah satu faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa amatlah penting perannya dalam pembentukan pendapatan nasional/daerah. Kekayaan alam yang cukup bukanlah jaminan pendapatan nasional menjadi tinggi. Diperlukan keterampilan, keahlian dan kapital yang cukup dalam mengolah sumber daya alam agar menghasilkan keluaran yang tinggi. Terkait permasalahan lingkungan, pengelolaan sumber daya *alam* khususnya yang terbaru harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana agar tetap lestari hingga generasi selanjutnya.

Untuk mengukur kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perekonomian dan SDA digunakan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru.

Tabel 3.170. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru	%	n/a	100	100	100

Sumber: Biro Adm. Perkonomian dan SDA Setda DIY, 2024

Capaian kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA tahun 2023, terealisasi sebesar 100% dari target. Angka tersebut diperoleh dari lima dokumen kebijakan yang ditindaklanjuti. Lima dokumen tersebut yaitu Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah, Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah, Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, dan Rekomendasi *Green Economic*.

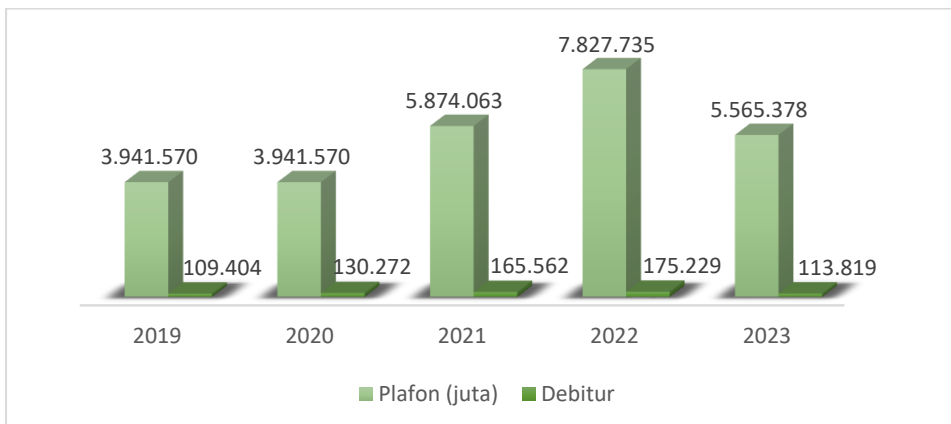
Pemda DIY berupaya melakukan pengendalian inflasi salah satunya melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tim ini telah melakukan upaya inovasi dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah, yang diharapkan dapat menjaga stabilitas inflasi di daerah. Inflasi yang stabil dan terkendali akan berdampak positif bagi *perekonomian* DIY. Hal ini terbukti dengan melandainya inflasi di DIY pada tahun 2023. Berdasarkan rilis BPS, inflasi DIY pada 2023 DIY secara tahunan cenderung landai dan kembali masuk ke sasaran inflasi nasional 3 ± 1 % dibandingkan bulan September 2022 yang mencapai 6,81% (y-o-y).

Sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi DIY, diperlukan upaya bersama dalam rangka meningkatkan produksi, kelembagaan serta efisiensi pemasaran produk pertanian. TPID DIY memiliki komitmen bersama dengan Kabupaten/Kota untuk mendorong kemandirian pangan dalam rangka menjaga kestabilan inflasi dan pertumbuhan ekonomi DIY, yaitu: 1) Menyuksesan reformasi Kawasan Pertanian Pangan *Berkelanjutan* dari sisi hulu hingga hilir; 2) Meningkatkan serapan produksi pertanian lokal melalui penguatan kerjasama antar daerah antar provinsi dalam rangka pemenuhan pasokan komoditas pangan utama bagi masyarakat di DIY; 3) Mengupayakan sinergi antar daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah serta ekonomi kreatif di wilayah masing-masing.

Selanjutnya juga dilakukan optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) DIY dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah melalui sinergi program kerja yang lebih luas melibatkan lintas Perangkat Daerah dan lintas sektor di luar dan dalam lingkup Pemda DIY. Beberapa program kerja TPAKD Tahun 2023 antara lain: 1) Program Unggulan Penguatan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital di Pesisir Pantai Selatan Gunungkidul (Pantai Gesing, Ngrenean, Drini, dan Siung) dengan hasil jaringan nirkabel telah terpasang di Pantai Gesing dan Drini, dan Pelatihan dan pendampingan UMKM telah dilaksanakan bagi masyarakat dan sekolah dalam cakupan kecamatan objek program antara lain pelatihan dan sertifikasi navigasi kapal, pelatihan pengolahan produk makanan berbahan baku ikan, pendaftaran NIB dan Sibakul Jogja, pelatihan pengolahan rumput laut dan pendampingan sertifikasi halal; 2) Program Tematik Program Lingkup Sekolah Berbudaya Menabung &

Wirausaha (Lilah Dana dan Usaha); 3) Program Tematik Program KURjogja Mode Pembiayaan Pengembangan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM DIY (KURjogja Motor UMKM DIY); 4) Program tematik Program K/PMR Kredit Pembangunan Ekonomi Daerah “PEDE” DIY; 5) Program Tematik Program Pengembangan Ekosistem Ekonomi Inklusif di Wilayah Pedesaan; dan 6) Program Pemberdayaan Usaha Perempuan *Go Digital*.

Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. Tim TPAKD pada tahun 2023 menerima penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas prestasi berupa Finalis Wilayah Terbaik dalam Implementasi KEJAR tingkat Provinsi.



Gambar 3.35. Perkembangan Penyaluran KUR di DIY Tahun 2019-2023

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), 2024

Penyaluran KUR tahun 2023 sebesar Rp5.565.378.140.086,00 pada 113.819 debitur atau 48,8% dari target 11,47 Triliun atas penyaluran 14 LJK terdiri dari Bank BPD DIY, BNI, BRI, BTN, BSI, Bank Mandiri, BCA, Bank Sinarmas, Bank Jateng, BPD Papua, Bank Nobu, Bukopin, Kospin Jasa, dan Pegadaian. Sedangkan

capaian sektor produksi tahun 2023 sebesar 61% dengan nominal Rp3.392.551.536.715,00 pada 65.636 debitur dan sektor perdagangan sebesar Rp3.392.551.536.715,00 pada 48.183 debitur. Sektor dominan lainnya selain sektor perdagangan besar dan eceran antara lain sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp1.122.115.975.400,00 pada 27.153 debitur dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya sebesar Rp783.123.300.000,00 pada 15.207 debitur.

Jumlah debitur KUR juga terus meningkat dari tahun ke tahun. KUR menjadi pembiayaan usaha yang tergolong sangat terjangkau oleh UMKM, dengan bunga rendah dan kemudahan *berkelanjutan* yang menguntungkan UMKM. Terlihat jumlah debitur KUR bergerak naik dari masa pandemi Covid-19 tahun 2019, peningkatan debitur sangat signifikan. Yang artinya usaha UMKM cenderung terus berkembang dan keinginan pelaku UMKM untuk bangkit dan berkembang lebih meningkat.

Pemda DIY berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar, dengan mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemda DIY telah menetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Program Prioritas Pembangunan yang meliputi 17 Program Prioritas untuk dipercepat pelaksanaannya, yang terbagi dalam 3 kelompok yaitu Kelompok Pembangunan Infrastruktur, Kelompok Penataan/Pengembangan Kawasan dan Kelompok Pembangunan Program Strategis Lainnya.

Perkembangan pembentukan dan penetapan Desa/*kalurahan* Mandiri Budaya, dimulai pada tahun 2020, dengan ditetapkan 10 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021 ditetapkan 8 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Nomor 234/KEP/ 2022 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 7 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Berikutnya melalui Keputusan Gubernur Nomor 245/KEP/2023 tentang Penetapan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023 ditetapkan 7 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Sebagai dukungan terhadap komitmen pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, disusunlah Dokumen Kajian *Grand Design* Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan maksud untuk mereview tata kelola sumber daya alam yang ada di DIY. Selain itu, disusun juga landasan konseptual mengenai pengelolaan SDA di DIY yang berkelanjutan. Dalam menyusun konsep tersebut, telah dibentuk dalam sebuah *rancang* bangun *roadmap* pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di DIY. Diharapkan dengan adanya kajian tersebut, seluruh *stakeholder* pengampu tata kelola sumber daya alam di DIY dapat melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Hijau disusun dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dalam membuat *kebijakan* dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam

dalam kerangka ekonomi hijau demi mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, dengan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan program kegiatan dalam kerangka implementasi ekonomi hijau, diharapkan dapat menentukan arah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2023, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (a) Belum terintegrasinya sistem informasi harga pangan DIY dan Kabupaten/Kota.
- (b) Adanya kebijakan HET dan HPP beras mendorong naiknya inflasi di DIY.
- (c) Belum meratanya jaringan internet di wilayah DIY sehingga sulit untuk mengimplementasikan program digitalisasi layanan keuangan.
- (d) Masih terbatasnya dokumentasi program/kegiatan pelaksanaan program/ kegiatan Desa Mandiri Budaya yang tertata dan jelas di kalurahan/desa.

(2) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas

- (a) Koordinasi yang intens TPID DIY dengan TPID Kabupaten/Kota.
- (b) Melakukan koordinasi antar Kabupaten/Kota guna menyeragamkan mekanisme pemantauan (waktu dan objek pantauan).

- (c) Pengembangan sistem digitalisasi pemantauan harga dan pasokan sehingga data yang diperoleh lebih terjaga validitas dan kecepatan penyajian datanya.
- (d) Partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait dalam pengumpulan data dan bahan materi pendukung dalam penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.
- (e) Melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait lebih intensif serta mendorong pemanfaatan dan optimalisasi teknologi informasi di tingkat desa.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA dilaksanakan dengan alokasi Rp2.190.276.100,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 3 program dan 12 kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp2.174.775.188,00 atau 99,29%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.171. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Desa	25	25
			Penetapan Desa Mandiri Budaya Tahun 2023	Dokumen	1	1
			Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Desa Mandiri Budaya	Dokumen	1	1
			Sarana Prasarana Keistimewaan urusan Budaya			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	1	1
2	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
		DAN SUMBER DAYA ALAM	Renja	Dokumen	1	1
			Renja Perubahan	Dokumen	1	1
			ROPK	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			DPA Tahun 2024	Dokumen	1	1
			DPPA Tahun 2023	Dokumen	1	1
			RKA Perubahan Tahun 2023	Dokumen	1	1
			RKA Tahun 2024	Dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Konsep/Bahan LKPJ	Laporan	1	1
			Konsep/Bahan LPPD	Laporan	1	1
			Laporan LKJIP	Laporan	1	1
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
			Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	3
			Laporan Keuangan Bulanan	Laporan	1	1
			Laporan Keuangan Triwulanan	Laporan	1	1

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Laporan Keuangan Semester	Laporan	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1
			Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1
			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	21	21
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	paket	21	21
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	15	15
			Tersedianya peralatan rumah tangga	Paket	15	15
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	3	3
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Paket	3	3
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	4	4
			Tersedianya bahan bacaan	Dokumen	4	4
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Laporan	1	1
			Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	Laporan	1	1
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1
			Pemeliharaan dan Pengembangan Website Biro Perekonomian	Dokumen	1	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3	3
			Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Unit	3	3
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	1
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1
			Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5	5
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5	5
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Unit	32	32
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	8	8
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	4	4
			Rekomendasi Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Stabilitas Perekonomian Daerah	Dokumen	1	1
			Rekomendasi Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	Dokumen	1	1
			Rekomendasi Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan	Dokumen	1	1
			Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen	1	1
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	3	3
			Penyusunan Rapergub Rencana Induk Kewirausahaan	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Rekomendasi Kebijakan KUR	Dokumen	1	1
			Rekomendasi Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Dokumen	1	1
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	3	3
			Penyusunan Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Alam	Dokumen	1	1
			Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Hijau	Dokumen	1	1
			Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Dokumen	1	1
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	1	1
			Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Optimalisasi Pengelolaan BUMD	Dokumen	1	1
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah			
			Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Optimalisasi Pengelolaan BLUD	Dokumen	1	1

4) **Fasilitasi Kesra**

a) **Kondisi Umum**

Kebijakan strategis dalam rangka Fasilitasi Kesra pada Penunjang Urusan Sekretariat Daerah, antara lain adalah penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh OPD terkait, yang meliputi bidang Bina Mental Spiritual,

Kesejahteraan Rakyat *Pelayanan* Dasar (kebijakan terkait pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat), dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (antara lain kepemudaan dan keolahragaan, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan).

Pada tahun 2023 telah dihasilkan sebanyak 9 produk naskah bahan kebijakan, yang terdiri dari:

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil jenazah DIY;
- (2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2027;
- (3) Peraturan Gubernur DIY Nomor 88 Tahun 2023 tentang Desain Olahraga Daerah Periode Tahun 2022-2027;
- (4) Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Pedoman Pembinaan Kaum (Rois) di Kalurahan.
- (5) SE Gubernur DIY Nomor 45/SE/3686/2023 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1444 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (6) SK Gubernur DIY Nomor 138/KEP/2023 tentang Penetapan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2023;
- (7) SK Gubernur DIY Nomor 183/KEP/2023 tentang Penetapan Ketua Kafilah Haji DIY Tahun 1444 H/ 2023 M;
- (8) SK Gub DIY No.106/KEP/2023 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari;
- (9) SK Gub No 81/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya telah berhasil disusun 4 laporan kegiatan kajian, yaitu: 1) Kajian penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan DIY; 2) Kajian Penyusunan Desain Olahraga Daerah 2022-2027 DIY; 3) Kajian Optimalisasi Peran dan Fungsi *Kaum Rois* dalam Menjaga Harmonisasi Kebudayaan di DIY; dan 4) Kajian Penyusunan Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAD PIJAR).

Selain itu, telah dihasilkan pula beberapa produk naskah kebijakan yang berupa *Policy Brief* dan *Research Brief* terkait aspek tugas pokok dan fungsi Biro, antara lain berkenaan tema pokok Desain Olahraga di DIY (dalam berbagai aspek tinjauan), dan *Research Brief* tentang RAD dan isu-isu strategis dalam pelayanan kepemudaan di DIY.

Dalam melaksanakan fasilitasi kehidupan beragama, telah dirumuskan naskah bahan kebijakan, yang terdiri dari 4 jenis layanan kegiatan, yaitu: 1) Pembinaan Mental Umat Beragama, antara lain kegiatan Pengajian Pejabat dan Aparat, Peringatan Hari Besar Keagamaan (Perayaan Nyepi, Peringatan Isra Miraj, Nuzulul Quran, Maulid Nabi, Natal, dan Waisak); 2) Pelayanan Jamaah Haji (Pengiriman Petugas Haji, Penghantaran Jamaah Haji, Pamitan Jamaah Haji, dan Penyambutan Kembali Jamaah Haji); 3) Penyelenggaraan Festival Keagamaan (Penyelenggaraan STQ Daerah di DIY, Pengiriman Peserta Lomba STQ Nasional di Jambi); dan 4) Fasilitasi Peribadatan dan Lembaga Keagamaan, yang meliputi penyaluran bantuan hibah sebanyak 1.085 tempat ibadah, dan 8 Lembaga bina spiritual.

Capaian kinerja sasaran tahun 2023 berdasarkan indikator Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi *naskah* bahan kebijakan sebesar 43% dari target

14% sehingga persentase total capaian terhadap target sebesar 307,14%. Selain itu, Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan tercapai 100% dari target 76%, atau total capaian kinerja terhadap target sebesar 131,58%.

Adapun kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra pada tahun 2022 tidak dapat dimunculkan karena adanya perbedaan indikator kinerja sasaran dengan perubahan *rumusan* baru tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 secara umum dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.172. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi aspek bahan kebijakan	%	n/a	14	43	307,14
2.	Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	%	n/a	76	100	131,58

Sumber: Biro Bintel Setda DIY, 2024

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023 diantaranya adalah: 1) Adanya ketidakpastian akibat dinamika kebijakan pusat yang sering kali berubah secara mendadak dan menuntut segera dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program/kegiatan di daerah; 2) Belum maksimalnya sinergitas antara pemerintah daerah dengan instansi swasta maupun *non governmental organization* dalam penanganan isu-isu strategis yang berhubungan dengan bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia.

(2) Solusi

Menjawab tantangan tersebut, beberapa langkah yang diambil antara lain: 1) Membangun jejaring dan melakukan koordinasi intensif dengan *stakeholder* mitra baik di level pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaring informasi terkait potensi perubahan kebijakan yang akan dihadapi; 2) Meningkatkan kolaborasi intensif antar *stakeholder* khususnya instansi swasta, *non governmental organization*, maupun akademisi dalam memetakan isu strategis dan permasalahan yang berkaitan dengan bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Pada tahun 2023 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Kesra dilaksanakan melalui 3 program dan 30 sub kegiatan. Realisasi fisik tercapai 100%, sedangkan realisasi *keuangan* tercapai 98,22% atau sebesar Rp32.554.459.710,00 dari Rp33.142.390.700,00 pagu yang dianggarkan. Terdapat deviasi keuangan sebesar 1,78%, yang disebabkan oleh kebijakan pusat yang disesuaikan dengan dinamika di lapangan.

Tabel 3.173. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Kesra Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Urusan Sekretariat Daerah	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	3	3
			Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat			
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	3	3

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Laporan Pesparani	Laporan	1	1
			Laporan Kampung Berkah (BKK)	Laporan	1	1
			Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung Berkah	Laporan	1	1
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	90.36	90.28
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2
			Dokumen Renstra 2022-2027	dokumen	1	1
			Dokumen Renja 2024	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4
			Dokumen RKA 2024	dokumen	1	1
			Dokumen DPA 2024	dokumen	1	1
			Dokumen RKA Perubahan 2023	dokumen	1	1
			Dokumen DPA Perubahan 2023	dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4
			Dokumen LKJIP	laporan	1	1
			Dokumen LPPD	laporan	1	1
			Dokumen LKPJ	laporan	1	1
			Dokumen Laporan Monev Pertriwulan	laporan	1	1
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
			Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1
			Laporan Penatausahaan Barang Milik SKPD	laporan	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Komponen Instalasi Listrik	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			Peralatan Rumah Tangga	paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
			Barang Cetak dan Penggandaan	paket	2	2
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Belanja Langganan Surat Kabar	dokumen	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dokumen	1	1
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1
			Pengembangan Website SKPD	dokumen	1	1
			Pengadaan Mebel			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1
			Pengadaan Mebel (meja dan kursi tamu)	paket	1	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8
			Pengadaan Bracket standing monitor : 1 buah, Microphone meja : 2 unit, Mic wireless : 2 unit, speaker portable : 1 buah, Web cam : 2 unit	unit	8	8
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	20	20
			Belanja Buku Perpustakaan	unit	20	20
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
			Pengadaan Sarpras Gedung Kantor (AC)	unit	1	1
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Pengadaan materi)	paket	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
			Belanja Akun Zoom Premium	laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
			Sewa Tanaman Hias	laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD)	Unit	6	6
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Kantor (BBM, Oli Gardan, Oli Mesin, Oli Transmisi, Penggantian Suku Cadang Roda 2, Penggantian Suku Cadang Roda 4)	unit	6	6

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pemeliharaan Mebel			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (DPA SIPD)	Unit	48	48
			Pemeliharaan Mebel (Filling cabinet 14 unit dan meja 34 buah)	unit	48	48
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD)	Unit	85	85
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Mesin ketik, LCD, Faximili, Laptop, Komputer, Printer)	unit	85	85
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	30
			Pemeliharaan Sarpras Kantor (AC)	unit	30	30
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	3
			Persentase pelaksanaan fasilitas kehidupan beragama yang dilaksanakan	Persen	76	100
			Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	3
			Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	7
			Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual			
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	1.128	1.100
			Fasilitasi Peribadatan dan Lembaga Keagamaan	lembaga	1.121	1.093
			Pelayanan Jamaah Haji	kelompok	1	1
			Penyelenggaraan Festival Keagamaan	hari raya	1	1
			Pembinaan Mental 5 Agama	Agama	5	5
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	4	4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Peran TP UKS/M dalam Rangka Pembiasaan Hidup Bersih	dokumen	1	1
			Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan	dokumen	1	1
			Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan Inklusif di DIY	dokumen	1	1
			Laporan Hasil Kajian Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAD PIJAR)Â	dokumen	1	1
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	5	5
			Laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1
			Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	dokumen	1	1
			Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1
			Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	dokumen	1	1
			Laporan Pelayanan Posbindu SATRIYA	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	5	5
			Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Desa/ Kelurahan Budaya	dokumen	1	1
			Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Organisasi Tari Klasik	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Laporan Hasil Kajian Optimalisasi Peran Kaum Rois dan Pengurus Takmir Masjid dalam Harmonisasi Kehidupan Beragama Melalui Pendekatan Kultural	dokumen	1	1
			Laporan hasil Kajian Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta	dokumen	1	1
			Laporan Kajian Pembinaan Olahraga di Daerah - Kajian Pembinaan Olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta	dokumen	1	1

Tabel 3.174. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Kesra Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Urusan Sekretariat Daerah	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	3	3
			Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat			
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	3	3
			Laporan Pesparani	Laporan	1	1
			Laporan Kampung Berkah (BKK)	Laporan	1	1
			Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung Berkah	Laporan	1	1
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	90.36	90.28
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2
			Dokumen Renstra 2022-2027	dokumen	1	1
			Dokumen Renja 2024	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4
			Dokumen RKA 2024	dokumen	1	1
			Dokumen DPA 2024	dokumen	1	1
			Dokumen RKA Perubahan 2023	dokumen	1	1
			Dokumen DPA Perubahan 2023	dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4
			Dokumen LKjIP	laporan	1	1
			Dokumen LPPD	laporan	1	1
			Dokumen LKPJ	laporan	1	1
			Dokumen Laporan Monev Pertriwulan	laporan	1	1
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
			Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1
			Laporan Penatausahaan Barang Milik SKPD	laporan	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Komponen Instalasi Listrik	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
			Peralatan Rumah Tangga	paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	2	2
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Belanja Langganan Surat Kabar	dokumen	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD)	Dokumen	1	1
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dokumen	1	1
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1
			Pengembangan Website SKPD	dokumen	1	1
			Pengadaan Mebel			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1
			Pengadaan Mebel (meja dan kursi tamu)	paket	1	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8
			Pengadaan Bracket standing monitor : 1 buah, Microphone meja : 2 unit, Mic wireless : 2 unit, speaker portable :1 buah, Web cam : 2 unit	unit	8	8
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	20	20

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Belanja Buku Perpustakaan	unit	20	20
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
			Pengadaan Sarpras Gedung Kantor (AC)	unit	1	1
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Pengadaan materai)	paket	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
			Belanja Akun Zoom Premium	laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
			Sewa Tanaman Hias	laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD)	Unit	6	6
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Kantor (BBM, Oli Gardan, Oli Mesin, Oli Transmisi, Penggantian Suku Cadang	unit	6	6

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Roda 2, Penggantian Suku Cadang Roda 4)			
			Pemeliharaan Mebel			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (DPA SIPD)	Unit	48	48
			Pemeliharaan Mebel (Filling cabinet 14 unit dan meja 34 buah)	unit	48	48
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD)	Unit	85	85
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Mesin ketik, LCD, Faximili, Laptop, Komputer, Printer)	unit	85	85
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	30
			Pemeliharaan Sarpras Kantor (AC)	unit	30	30
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	3
			Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	Persen	76	100
			Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	3
			Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	7
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	1.128	1.100
			Fasilitasi Peribadatan dan Lembaga Keagamaan	lembaga	1.121	1.093
			Pelayanan Jamaah Haji	kelompok	1	1
			Penyelenggaraan Festival Keagamaan	hari raya	1	1
			Pembinaan Mental 5 Agama	Agama	5	5
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	4	4
			Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Peran TP UKS/M dalam Rangka Pembiasaan Hidup Bersih	dokumen	1	1
			Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan	dokumen	1	1
			Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan Inklusif di DIY	dokumen	1	1
			Laporan Hasil Kajian Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAD PIJAR)Â	dokumen	1	1
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan	Dokumen	5	5

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			
			Laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1
			Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	dokumen	1	1
			Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1
			Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	dokumen	1	1
			Laporan Pelayanan Posbindu SATRIYA	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	5	5
			Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Desa/ Kelurahan Budaya	dokumen	1	1
			Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Organisasi Tari Klasik	dokumen	1	1
			Laporan Hasil Kajian Optimalisasi Peran Kaum Rois dan Pengurus Takmir Masjid	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			dalam Harmonisasi Kehidupan Beragama Melalui Pendekatan Kultural			
			Laporan hasil Kajian Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta	dokumen	1	1
			Laporan Kajian Pembinaan Olahraga di Daerah - Kajian Pembinaan Olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta	dokumen	1	1

5) **Kelembagaan dan Tata Laksana**

a) **Kondisi Umum**

Pada tahun 2023, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi dalam upaya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan dan *kepuasan* penerima pelayanan atau masyarakat sangatlah dinamis. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat, tantangan yang dihadapi oleh Pemda DIY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY Tahun 2022-2027 perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi kebijakan kelembagaan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur telah melahirkan isu-isu strategis yang harus direspons dan diakomodir dalam penetapan dan pencapaian sasaran organisasi;
- (2) Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat mengharuskan setiap personil untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

- (3) Reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan seluruh pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti dengan rumusan konsep arah dan strategi reformasi birokrasi dalam bentuk *Roadmap* Reformasi Birokrasi. *Roadmap* tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan arah perubahan dalam 8 area perubahan yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Selanjutnya koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi.
- (4) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan di Pemda DIY telah dilaksanakan pengangkatan jabatan administrasi ke dalam beberapa jabatan fungsional termasuk analis kebijakan pada beberapa OPD. Sehubungan dengan hal tersebut Biro Organisasi mendapat tugas tambahan baru sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Pemda DIY. Tugas baru tersebut, dalam rangka memfasilitasi pembinaan karier, dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis kebijakan, dalam kondisi tanpa anggaran dan instansi pembina yang kurang responsif dengan kesulitan yang dihadapi oleh daerah. Disisi lain regulasi yang mengatur SDM aparatur sangat dinamis, dimana baru saja memproses tindak lanjut aturan, sudah terbit aturan lain.

- (5) Terdapat transformasi dan penataan pada jabatan pelaksana dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah, yang membagi jabatan pelaksana ke dalam 3 klasifikasi dan terdiri dari 232 nomenklatur. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian peta jabatan dan hasil evaluasi jabatan yang ada di lingkungan Pemda DIY, evaluasi jabatan dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam penentuan kelas jabatan. Diharapkan dengan adanya penyederhanaan nomenklatur jabatan pelaksana akan memudahkan gerak birokrasi, menjadi lebih *agile*, dan lebih adaptif terhadap dinamika zaman.

Tabel 3.175. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2023-2027 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi Kategori ‘Sangat Baik’ (A)	%	n/a	75	100	133,33

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2024

Capaian indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi Kategori ‘Sangat Baik’ (A) pada tahun 2023 sudah mencapai 133,33% dari target yang ditetapkan, yaitu dari 37 Perangkat Daerah sudah semuanya mencapai kategori A dengan predikat “Sangat Baik”.

b) Permasalahan dan Solusi

Dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah sebagai institusi pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang gesit

(*agile governance*) melalui penguatan kelembagaan istimewa Pemda DIY, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

(1) Permasalahan

- (a) Penerapan Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) masih memerlukan perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek struktur, tugas, fungsi, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (b) Perbedaan pemahaman terkait tata cara pengelolaan dana keistimewaan, beragam persepsi dalam memaknai keistimewaan urusan kelembagaan serta belum adanya *Roadmap* pelaksanaan urusan kelembagaan;
- (c) Dinamisnya perubahan peraturan yang berkaitan dengan transformasi jabatan pelaksana, dalam kurun waktu 1 tahun terdapat 3 kali perubahan Keputusan Menteri PAN RB tentang nomenklatur jabatan pelaksana yang harus diterapkan oleh Instansi Pemerintah.
- (d) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memerlukan perbaikan berkelanjutan untuk merespon Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi. Selain itu, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan Kondisi yang kurang stabil pasca penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan dan mekanisme kerja.
- (e) Kualitas pelayanan publik masih terus memerlukan peningkatan, khususnya terkait keterbukaan informasi pelayanan publik dan Standar Pelayanan. Selain itu penyediaan fasilitas dan sarana prasarana

pelayanan publik untuk masyarakat rentan perlu ditingkatkan sesuai dengan ketentuan minimal penyediaan sarana prasarana tersebut.

(2) Solusi:

- (a) Melakukan fasilitasi/pendampingan sesuai asas-asas pembentukan perangkat daerah pada Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (b) Optimalisasi penyelenggaraan urusan keistimewaan bidang kelembagaan masih memerlukan fasilitasi intensif terkait perencanaan, monitoring dan evaluasi.
- (c) Sejalan dengan perubahan kelembagaan khususnya pada aspek struktur, tugas, fungsi, dan tata kerja maka perlu dilakukan review terhadap analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DI Yogyakarta, sehingga mampu menentukan jenis jabatan dan penghitungan kebutuhan ASN yang tepat dan proporsional untuk masing-masing perangkat daerah.
- (d) Pelembagaan Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi dalam Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja. Selain itu juga adanya mekanisme kerja dan sistem kerja yang mengakomodir tatalaksana kelembagaan yang *agile* untuk merespon tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks; selanjutnya tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan terlebih pasca penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan dan mekanisme kerja yang

menuntut sinergi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang terkait perubahan sistem kerja, SOP internal perangkat daerah, tata naskah dinas, serta proses bisnis.

- (e) Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan perlu direview secara berkelanjutan melalui monitoring dan pendampingan untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Selain itu juga perlu menciptakan inovasi baru dalam pengembangan sistem pelayanan, kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik serta kelengkapan sarana prasarana pelayanan publik yang dapat memperluas akses pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Pada tahun 2023 pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.530.188.750,00 (Pagu Belanja Perubahan). Pengalokasian anggaran *tersebut* dibagi dalam 3 program dan 27 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp2.279.077.315,00 atau 90,07%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.176. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN UMUM	BIRO ORGANISASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
			Persentase penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Tersusunnya Renja Perubahan Biro Organisasi Tahun 2023	Dokumen	1	1
			Tersusunnya Renstra Biro Organisasi Tahun 2022-2027	Dokumen	1	1
			Tersusunnya ROPK Biro Organisasi Tahun 2023	Dokumen	1	1
			Tersusunnya PK Biro Organisasi Tahun 2023	Dokumen	1	1
			Tersusunnya Renja Biro Organisasi Tahun 2023	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
			Tersusunnya DPA Biro Organisasi Tahun 2023	Dokumen	1	1
			Tersusunnya DPA Perubahan Biro Organisasi Tahun 2023	Dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Konsep/Bahan LPPD	Dokumen	1	1
			Dokumen LkjiP	Dokumen	1	1
			Konsep/Bahan LKPJ	Dokumen	1	1
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
			Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Biro Organisasi	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
			Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (laporan keuangan tahunan)	Dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
			Laporan Keuangan Bulanan	Laporan	12	12
			Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	2	2
			Laporan Prognosis	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Laporan Keuangan Triwulanan	Laporan	4	4
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
			Laporan Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Triwulan I	Laporan	1	1
			Laporan Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Triwulan II	Laporan	1	1
			Laporan Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Triwulan III	Laporan	1	1
			Laporan Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Triwulan IV	Laporan	1	1
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Tersedianya peralatan rumah tangga	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Dokumen hasil penggandaan dan barang cetakan	Paket	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
			Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	Laporan	1	1
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			
			Terkelolanya website OPD	Dokumen	1	1
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Bukti pembayaran jasa surat menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKBMD	Unit	1	1
			Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	Unit	1	1

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	7	7
			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKBMD	Unit	7	7
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Terpeliharanya saana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jenis	8	8
2	KELEMBAGAAN DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)	BIRO ORGANISASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
			Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional	%	88	88
			Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah			
			Regulasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT	Rapergub	15	15
			Regulasi Penataan Lembaga Non Struktural	Rapergub	1	1
			Penyusunan Proses Bisnis Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
			Penyusunan SOP Internal Satuan Pendidikan	Dokumen	69	69
			Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/ Kota			
			Rapergub Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
			Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
			Perumusan kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan			
			Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen	1	1
			Dokumen Evaluasi Jabatan	Dokumen	1	1
			Monitoring Analisis Jabatan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
			Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan			
			Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Tahun 2023	Dokumen	1	1
			Bahan Berita Acara Penilaian Kelayakan Usulan Tahun 2024	Dokumen	1	1

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO ORGANISASI	Bahan Berita Acara Penilaian Kelayakan Usulan Tahun 2025	Dokumen	1	1
			Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2023	Dokumen	1	1
			Implementasi Budaya Pemerintahan DIY			
			Agen Perubahan yang meningkat kapasitasnya	Agen	215	215
			Pemenang Kompetisi Budaya Pemerintahan SATRIYA (OPD, UPT, dan Sekolah)	Kelompok	15	15
			Training of Trainer Fasilitator Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Fasilitator	75	75
			Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	Laporan	1	1
			Pedoman Fasilitasi Pembinaan Inovasi Strategis	Dokumen	1	1
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
			Jumlah Unit Pelayanan Publik pada Kategori B (A: Prima, B: Bak)	Unit	2	2
			Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	%	73,33	94,6
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
			Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi (8 area perubahan) pada 37 OPD	Dokumen	1	1
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			
			Dokumen LKjIP dan PK	Dokumen	37	37
			Berita Acara serah terima LKjIP dan PK	BA	1	1
			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			
			Dokumen Rapergub Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara	Rapergub	1	1
			Dokumen Rapergub Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rapergub	1	1
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			
			Laporan jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dibina (Sesuai Pergub Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi)	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Laporan jumlah Inovasi yang diikutsertakan dalam Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB RI	Inovasi	1	15
			Rekomendasi hasil Monev Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	1	1
			Rekomendasi Monev Kepatuhan Standar Pelayanan	Laproan	1	1

6) **Fasilitasi Administrasi Pembangunan**

a) **Kondisi Umum**

Pemda DIY telah melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pengadaan *barang* dan jasa. Melalui Sasaran Tersedianya Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yaitu Persentase rumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.177. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Administrasi Pembangunan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase rumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	%	n/a	33,33	33,33	100

Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2024

Capaian terhadap indikator Persentase rumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti *pada* tahun 2023 mencapai 33,33% dari target yang ditetapkan sebesar 33,33% atau dengan persentase

capaian sebesar 100%. Angka tersebut diperoleh dari 2 program pemda yang didukung di tahun 2023 dari total program pemda yang didukung sampai akhir periode yaitu 6 program pemda.

Kedua program pemda yang didukung di tahun 2023 yaitu: 1) Program *Pengembangan* Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur; dan 2) Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Sedangkan 6 program Pemda yang didukung sampai tahun 2026 adalah: 1) Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur; 2) Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; 3) Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah; 4) Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan; 5) Program Pembangunan Rendah Karbon; dan 6) Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

Bahan *kebijakan* yang dihasilkan/dikeluarkan dari 2 program pemda tersebut yaitu :

1. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur dengan bahan kebijakannya yang telah dihasilkan :
 - a. Draft Instruksi Gubernur tentang Penguatan Kebijakan dan Strategi Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Melalui Skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP).
 - b. Nota Dinas Rekomendasi Hasil Kebijakan kepada Bapak Sekda terkait Monev Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dengan bahan kebijakannya yang telah dihasilkan :

- a. Rancangan Peraturan Gubernur tentang *Roadmap* Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027.
- b. Instruksi Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Pada Daerah Aliran Sungai Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 3 November 2023.
- c. Nota Dinas Rekomendasi Kebijakan Hasil Monev Pengelolaan Persampahan di Kalurahan di DIY kepada Bapak Sekda terkait Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Dalam implementasi kebijakan masih membutuhkan komitmen dan konsistensi pada pelaksanaan Kebijakan yang telah dikeluarkan.

(2) *Solusi*

Memantau pengaplikasian kebijakan melalui format monitoring dan evaluasi terkait kebijakan yang telah dihasilkan dalam upaya memperoleh timbal balik terhadap kebijakan tersebut serta peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan melalui *reward* dan *punishment*, *MoU* serta nota kesepakatan.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Pada tahun 2023 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Administrasi Pembangunan dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp1.602.183.360,00. Pengalokasian

anggaran tersebut dibagi dalam 5 Program dan 28 Sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung terealisasi sebesar Rp1.518.273.186,00 atau 94,76%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Indikator kinerja Persentase rumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti, merupakan hasil dari pelaksanaan program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

(1) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program Kebijakan Administrasi Pembangunan mengampu 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

(2) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, mengampu tiga kegiatan yaitu: Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; serta Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.

Melalui Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, sebanyak 242 paket pengadaan OPD Pemda DIY yang dilimpahkan ke BLP telah diselesaikan dengan baik *melalui* mekanisme tender, seleksi, maupun pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Selain itu, terdapat penayangan 35 etalase komoditas katalog elektronik lokal sebagai upaya implementasi strategi pengadaan. Pada tahun 2023 juga telah dilakukan sosialisasi serta pendampingan kepada OPD Pemda DIY untuk dapat melakukan melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai prinsip-prinsip pengadaan.

Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan melalui pembinaan pelaku pengadaan (PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan *atau* Pelaku Usaha/Penyedia), serta dilakukan pemenuhan unsur kematangan level strategis pada UKPBJ.

Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dilaksanakan melalui pelayanan kepada pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Jenis layanan pada kegiatan ini antara lain pendaftaran akun pelaku pengadaan, pelayanan *keluhan* penggunaan sistem, tata cara penggunaan sistem, dan lain-lain.

Rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.178. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Administrasi Pembangunan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			
			Pengelolaan Geopark di DIY	dokumen	1	1
			Penyusunan <i>Roadmap</i>	dokumen	1	1
			Pengelolaan Gestana			
			Fasilitasi Kegiatan COE (<i>Center of Excellence</i>)	dokumen	1	1
			Penelitian dan Pendidikan Kebumian			
			Kajian Geopark di DIY	dokumen	1	1
			Lanjutan Pengusulan	dokumen	1	1
			Penetapan Geopark Jogja sebagai Geopark Nasional			
			Penguatan Jejaring Kemitraan	dokumen	1	1
			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Geopark di DIY	dokumen	1	1

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
2	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Tersusunnya Renstra 2022-2027	dokumen	1	1
			Tersusunnya Renja Perubahan Th 2023	dokumen	1	1
			Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2024	dokumen	1	1
			Tersusunnya ROPK	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
			Tersusunnya RKA Tahun 2024	dokumen	1	1
			Tersusunnya DPA Perubahan Tahun 2023	dokumen	1	1
			Tersusunnya DPA Tahun 2024	dokumen	1	1
			Tersusunnya RKA-P Tahun 2023	dokumen	1	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2	laporan	1	1
			Tersusunnya Konsep LKPI dan LPPD Tahun 2022	laporan	1	1
			Tersusunnya LKJIP Tahun 2022	laporan	1	1
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
			Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan	bulan	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
			Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	laporan	1	1
			Tersedianya Laporan keuangan tahunan audited	laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
			Tersedianya Laporan Keuangan Semester	laporan	2	2
			Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan	laporan	4	4
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan	bulan	12	12
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
			Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			dengan ketentuan yang berlaku			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	paket	1	1
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Terlaksananya Barang cetak dan Penggandaan/Fotokopi	paket	1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	laporan	4	4
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan (roda empat)	unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional	unit	6	6
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	jenis	12	12
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	jenis	3	3
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
			Kinerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	%	58,99	67,52
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			
			Terlaksananya Tender/Seleksi	laporan	1	1
			Terlaksananya BeLa Pengadaan dan Katalog Lokal	laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik			
			Pengelolaan Sistem Informasi PBJ	laporan	1	1
			Realisasi Pemanfaatan SPSE dalam Proses PBJ Sampai Dengan Penyelenggaraan Kontrak	laporan	1	1
			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			
			Pendampingan dan Konsultasi	laporan	1	1
			Realisasi Pemenuhan Unsur Kematangan menuju Level Strategis	laporan	1	1
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia PBJ	laporan	1	1
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
			Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda sektor Pembangunan	%	40	40
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			
			Laporan Monev Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman	laporan	1	1
			Laporan Monev Kebijakan terhadap Kerusakan Lingkungan akibat Aktivitas Pertambangan	laporan	1	1
			Laporan Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	laporan	1	1
			Laporan Fasilitas KPBU	laporan	1	1
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			
			Dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	dokumen	1	1
			Kajian Pembiayaan Pembangunan daerah melalui skema Penugasan BUMD dan TSLP	dokumen	1	1

7) **Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol**

a) **Kondisi Umum**

Dalam menjalankan peran sebagai penunjang urusan, Pemda DIY melaksanakan fungsi fasilitasi umum, kehumasan dan protokol di lingkup Sekretariat Daerah DIY melalui Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol. Dalam hal ini Fasilitasi umum, kehumasan dan protokol yang dilaksanakan *berupa* pelayanan kepada pimpinan dalam melaksanakan pertemuan/rapat/upacara maupun penerimaan kunjungan tamu-tamu yang berkunjung ke Pemda DIY.

Selama kurun waktu tahun 2023, Pemda DIY menerima 162 kali kunjungan tamu yang terdiri dari kunjungan Presiden/Wakil *Presiden* sebanyak 4 kali, kunjungan Menteri (Kementerian)/DPR RI/DPD RI sebanyak 54 kali, kunjungan Kepala Daerah/DPRD Provinsi/Instansi Daerah lain sebanyak 18 kali, kunjungan Tamu Luar Negeri sebanyak 18 kali, dan kunjungan Universitas/Perguruan Tinggi/Tamu Lain-lain sebanyak 68 kali.

Tabel 3.179. Rata-rata Hasil Survey Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan, Keprotokolan dan Kehumasan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY tahun 2023

No	Jenis Layanan	Satuan	Indeks Kepuasan Masyarakat Th 2023
1	Layanan Keprotokolan	%	90,57
2	Layanan Kerumahtanggaan	%	91,64
3	Layanan Kehumasan	%	94,40

Sumber : Biro UHP Setda DIY, 2024

Selain yang telah disebutkan diatas, fungsi fasilitasi yang dilaksanakan oleh Biro *Umum*, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY berupa fasilitasi persuratan, fasilitasi keprotokolan, fasilitasi kerumahtanggaan dan fasilitasi kehumasan. Fasilitasi persuratan berupa pengelolaan surat-

surat untuk pimpinan baik itu surat masuk maupun surat keluar. Fasilitas keprotokolan berupa penyusunan acara/upacara dan pengaturan protokoler acara yang dihadiri oleh pimpinan. Fasilitas kerumahtanggaan berupa penyiapan tempat acara, penyiapan dan penyajian jamuan. Sementara untuk fasilitas kehumasan berupa peliputan dan publikasi acara/kegiatan pimpinan maupun *event-event* yang diselenggarakan oleh OPD teknis yang dihadiri oleh pimpinan.

Pada tahun 2023, kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Umum, Kehumasan dan Protokol realisasi melebihi target yang telah *ditetapkan*. Berikut tabel target dan realisasi kinerja tahun 2023 serta capaian 2023 terhadap target akhir RPD (2023).

Tabel 3.180. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran			Satuan	Capaian 2022	2023		
					Target	Realisasi	% Realisasi
Kategori Reformasi Birokrasi			%	A	BB	A	133,33
Perangkat Daerah							

Sumber : Biro UHP Setda DIY, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator Hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar BB dan terealisasi sebesar A sehingga masuk dalam kategori sebagai Sangat Baik. Persentase realisasi terhadap target (target dibagi capaian dikalikan 100%) dengan metode invert mencapai 133,33%.

Koordinasi *internal* yang baik antar bagian dalam penyusunan laporan evaluasi SAKIP RB serta adanya dukungan pimpinan dalam mendorong terwujudnya reformasi birokrasi baik berupa motivasi, teguran dan contoh nyata dalam

Permasalahan dan Solusi, merupakan faktor-faktor yang mendorong tercapainya indikator sasaran pada tahun 2023.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kepada pimpinan dan tamu yang tersedia saat ini masih kurang memadai seiring dengan perkembangan zaman.
- (b) Frekuensi tamu-tamu Pemda yang tinggi dengan jadwal yang tidak dapat diprediksi dan tingginya tuntutan dan kebutuhan pelayanan keprotokolan yang belum sesuai dengan dinamika di lapangan.

(2) *Solusi*

- (a) Melakukan pemeliharaan Gedung, bangunan dan aset lain (diantaranya adalah PC, printer, meja, dan sebagainya) secara efisien dengan anggaran minimal yang tersedia.
- (b) Meningkatkan koordinasi sebelum pelaksanaan acara, melakukan manajemen SDM dan memperkuat pelaksanaan SOP terkait kegiatan penerimaan kunjungan tamu sehingga dapat mengoptimalkan alokasi SDM dan Sarpras yang terbatas untuk fasilitasi acara-acara.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Pada tahun 2023, Pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah *Fasilitasi Umum*, *Kehumasan* dan *Protokol* mengampu 3 program dan 35 sub kegiatan. Total pagu anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD sebesar Rp30.785.397.150,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp29.223.191.585,00 atau 94,93%, sedangkan

kinerja fisik terealisasi 100%. Rincian capaian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.181. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	%	100	100
2.	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Skor	87,85	93,52
				Dokumen	7	7
				Dokumen	3	3
				Dokumen	2	2
				Laporan	1	1
				Dokumen	12	12

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	13	13
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
			1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	6
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	2
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33	33
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	111	111
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			
			1. Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	12	12

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Publikasi Seni dan Budaya Daerah			
			1. Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	5	5

8) *Fasilitasi Pemerintahan*

a) *Kondisi Umum*

Pelayanan penunjang yang dilaksanakan lingkup Pemda DIY meliputi pelayanan protokoler pimpinan, pelayanan kendaraan untuk tamu dan pimpinan, mengelola penginapan Griya Jogja dan Wisma Jogja, pelayanan penggunaan pendopo Anjungan DIY di TMII, fasilitasi silaturahmi Diaspora Yogyakarta di Jakarta dengan pimpinan *daerah*, fasilitasi pameran promosi potensi daerah, fasilitasi pawai budaya daerah, penyelenggaraan diklat dan pentas seni budaya daerah, serta pelaksanaan festival seni budaya daerah di Jakarta.

Pada tahun 2023 bersama Forum Komunikasi Kantor Penghubung Seluruh Indonesia (FORKAPPSI) dengan dipimpin oleh Deputy Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN telah dilakukan Kunjungan Lapangan ke Ibu Kota Negara (IKN) *Nusantara* di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Badan Penghubung Seluruh Indonesia mendapatkan alokasi perkantoran di wilayah pengembangan area Zona 1A seluas 1,01 ha yang rencananya di atasnya akan didirikan Gedung Bersama Badan Penghubung seluruh Indonesia. Diharapkan gedung dapat disiapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan pemeliharaannya dilakukan oleh masing-masing Pemda.

Pada tahun 2023 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Sekretariat Negara dan *Pemerintah* Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pinjam Pakai Tanah Milik Kementerian Sekretariat Negara NOMOR:PKS-53/KSN/S/11/2023 yang menjadi dasar dipakainya tanah milik Sekretariat Negara sebagai Anjungan DIY di TMII.

Hampir seluruh kegiatan pada tahun 2023 diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, melibatkan Masyarakat yang lebih luas, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan dan lebih tepat sasaran. Mitra kerja sama dalam penyelenggaraan event seni budaya antara lain : Forkappsi, PT. Angkasa Pura II, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Cilegon, Perum Perhutani KBM Ekowisata Jawa Barat dan Banten, Ikatan Keluarga Gunung Kidul, Badan Koordinasi Paguyuban Keluarga Kulon Progo, Paguyuban Warga Kota Yogyakarta, Paguyuban Keluarga Bantul, Warga *Bantul* Manunggal, Paguyuban Sleman Manunggal Sembada, Kulon Progo di Jakarta, dan Paguyuban Warga Jogja Istimewa, Praja Jogja, Sanggar Tari Surya Kirana, Sanggar Karawitan Trah HB, Korps Brimob RI, serta Kagama Depok.

Tabel 3.182. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	Angka indeks	n/a	91	92,29	101,42

Sumber: Banhubda DIY, 2024

Indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung diukur dari Jumlah seluruh IKM layanan yang diberikan dibagi jumlah jenis layanan yang diberikan. Capaian indikator sasaran tahun 2023

sebesar 92,29 angka indeks mencapai target yang ditetapkan yaitu 91 angka indeks.

Ketercapaian indikator tersebut disebabkan adanya koordinasi dan *kerjasama* dengan Forkappsi, Diaspora Yogyakarta di Jakarta, dan berbagai pemangku kepentingan terkait yang semakin intens.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Hambatan teknis dalam pembuatan kartu pas bandara yang menyebabkan tidak diterbitkannya Kartu Pas Bandara sesuai rencana sehingga pelayanan pimpinan di Bandara Soekarno Hatta sempat terhambat;
- (b) Kendala teknis pada pengadaan kendaraan listrik sehingga ketersediaannya dalam memberikan pelayanan kepada tamu di Anjungan TMII terlambat.

(2) Solusi

- (a) Berkoordinasi dengan Kantor Otorita Bandar Udara Wilayah 1 – Kelas Utama dalam penerbitan kartu Pas Bandara kedepan.
- (b) Memperkaya referensi kendaraan Listrik untuk area tempat wisata sehingga dapat dilakukan percepatan pengadaan kendaraan listrik.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Pemerintahan *dilaksanakan* dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.150.946.068,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 3 program dan 24 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp11.926.143.895,00 atau 98,15%, dengan realisasi

fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.183. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Pemerintahan Tahun 2023

N o	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	KEBUDAYA- AN (KEISTIME- WAAN)	BADAN PENGHU- BUNG DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah layanan pelestarian seni budaya daerah	%	100	100
			Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	unit	4	4
			Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				
			Sub Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang dikembangkan	unit	1	1
			Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				
			Sub Kegiatan Gelar Seni Budaya Daerah	Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	Dokumen	33	33
2	SEKRETARIA T DAERAH	BADAN PENGHUB UNG DAERAH	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Jumlah Layanan yang diberikan Banhubda DIY	persen	100	100
			Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
			Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	laporan	5	5

N o	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Masyarakat yang Ditingkatkan			
			Sub Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	laporan	2	2
3	URUSAN UMUM	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90,6	90,6
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bulan	60	60
			Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
			Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	12	12
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
			Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
			Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
			Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
			Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2
			Subkegiatan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Laporan	2	2

N o	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12
			Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	3
			Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2	2
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	11	11
			Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3
			Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	4	4

N o	Urusan Pemerintah an	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Dipelihara/Direhabilitasi			

f. Pengawasan

1) *Kondisi Umum*

Dalam membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Inspektorat DIY.

Keputusan Gubernur DIY Nomor 401/KEP/2022 Tahun 2022 tentang *Penetapan* Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 (PKPT 2023) diterbitkan sebagai acuan pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023. Selain Pengawasan yang telah direncanakan dalam PKPT 2023, Inspektorat juga melaksanakan pengawasan khusus yang wajib dilaksanakan berdasarkan amanat ketentuan pemerintah pusat, respons atas isu sosial yang berkembang maupun aduan masyarakat.

Dalam *rangka* mengawal pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah, kinerja pengawasan Pemda DIY diukur dengan indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terdiri dari hasil pengawasan dari BPK RI Perwakilan DIY, Inspektorat Jenderal Kemendagri RI dan pengawasan internal oleh Inspektorat DIY. Dalam mencapai sasaran tersebut didukung melalui beberapa kegiatan yang dikelompokkan ke dalam kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, monev serta pendampingan dan asistensi.

Adapun objek pemeriksaan baik di Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota selama *tahun* 2023 disajikan sebagai berikut:

(a) Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY

Pada Tahun 2023, BPK RI Perwakilan DIY menerbitkan 6 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima oleh Pemda DIY. Adapun LHP yang terbit yaitu:

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2022 Nomor 06/LHP/XVIII.YOG/03/2023;
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12A-B/LHP/XVIII.YOG/04/2023;
- (3) Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2023 Pada Pemda DIY di Yogyakarta Nomor 13/LHP/XVIII.YOG/07/2023 tgl.03 Juli 2023;
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Aset Yang Bersumber Dari Dana keistimewaan TA 2019 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemda DIY dan Instansi Lainnya di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates dan Wonosari Nomor 19/LHP/XVIII.YOG/10/2023;
- (5) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Infrastruktur TA 2023 Pada Pemda DIY Nomor 25/LHP/XVIII.YOG/12/2023;
- (6) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemda Dalam Penyelenggaraan Jalan Untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 Pada Pemda DIY Nomor 26/LHP/XVIII.YOG/12/2023.

Khusus untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Infrastruktur TA 2023 Pada Pemda DIY Nomor 25/LHP/XVIII.YOG/12/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemda Dalam Penyelenggaraan Jalan Untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 Pada Pemda DIY Nomor 26/LHP/XVIII.YOG/12/2023, Pemda DIY baru menerima fisik Laporan Hasil Pemeriksaan di Januari 2024.

Atas hasil pemeriksaan yang telah diterima di Tahun 2023 tersebut, Pemda DIY telah menindaklanjuti secara keseluruhan rekomendasi yang diberikan. Berdasarkan rekap dari Inspektorat, sampai dengan Semester II Tahun 2023 ditampilkan dalam rincian penyelesaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.184. Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Tahun 2023 sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Pemda DIY

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
LHP Terbit	60		
Temuan	613	87.875.832.990	
Rekomendasi	1225	82.372.374.396	
Tindak Lanjut			
Sesuai	1.106	73.628.199.100	90,29%
Belum Sesuai	98	8.656.240.933	8%
Belum Tindak Lanjut	20	0	1,63%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Sah	1	87.934.363	0,08%

Sumber: Inspektorat DIY, 2024 (data diolah)

Sampai dengan 31 Desember 2023 belum ada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I/Semester II tahun 2023 yang diterbitkan BPK RI. Risalah terakhir yang diterbitkan BPK RI adalah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022, sehingga masih belum ada data capaian terbaru di 2023 berdasar BPK RI.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dapat disampaikan sebagai

berikut: 1) Sistem Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut (SIPTL) yang digunakan BPK belum dapat mengakomodasi penambahan bukti tindak lanjut sebelum bukti tindak lanjut yang dikirim sebelumnya selesai di BPK Pusat dan mendapatkan status; 2) Jadwal Koordinasi Tindak Lanjut yang diberikan BPK masih terbatas setahun 2 kali; 3) Temuan dan rekomendasi yang berupa kebijakan/ peraturan membutuhkan waktu penyusunan dan melibatkan pihak eksternal sehingga tindak lanjut harus menunggu hasil kebijakan/peraturan tersebut; 4) Terdapat Rekomendasi berupa penyelesaian kerugian oleh penyedia barang/jasa dan/atau non ASN di mana belum terdapat regulasi yang jelas terkait dengan mekanisme tuntutan ganti ruginya.

(b) Pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri)

Pada Tahun 2023, Itjen Kemendagri menerbitkan 2 laporan hasil pemeriksaan yang diterima oleh Pemda DIY. Adapun LHP yang terbit yaitu:

- (1) Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 700.1.2.1/267/IJ tertanggal 2 Desember 2022;
- (2) Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 700.1.2.1/139/IJ tertanggal 4 Juli 2023

Untuk tindak lanjut *Hasil* Pemeriksaan Itjen Kemendagri di Tahun Anggaran 2021 dan sebelumnya Pemda DIY telah selesai menindaklanjuti rekomendasi (100%).

Untuk Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 700.1.2.1/267/IJ tertanggal 2 Desember 2022, Pemda DIY telah menyelesaikan 100% tindak lanjut rekomendasi yang diberikan.

Sedangkan untuk Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 700.1.2.1/139/IJ sampai dengan 31 Desember 2023 ditampilkan dalam rincian penyelesaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.185. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Itjen kemendagri Tahun 2023 sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Pemda DIY

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
Temuan	13	0	
Rekomendasi	22	0	
Tindak Lanjut			
Sesuai	12	0	54,54%
Belum Sesuai	10	0	45,46%
Belum Tindak Lanjut	0	0	0%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Sah	0	0	0%

Sumber: Inspektorat DIY, 2024 (data diolah)

Secara teknis penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri tidak mengalami kendala. Namun terdapat tindak lanjut yang masih belum bisa diselesaikan terkait Reviu pengalihan kegiatan penanganan stunting, Kinerja BUMD dan Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan. Penyampaian dokumen tindak lanjut bisa dilakukan setiap saat melalui aplikasi SIWASIAT.

(c) *Pemeriksaan Inspektorat DIY*

Sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan pemeriksaan operasional dan kinerja sebanyak 112 pemeriksaan. Pemeriksaan reguler dilaksanakan pada objek pemeriksaan (obrik) di lingkungan Pemda DIY meliputi OPD, UPTD,

SMAN/SMKN dan Kalurahan. Sementara pada Pemda Kabupaten/Kota se-DIY dilaksanakan Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai Bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Daerah di Kabupaten/ Kota. Adapun rincian hasil pemeriksaan operasional reguler dan tindak lanjutnya sebagai berikut:

Tabel 3.186. Risalah Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
LHP Terbit	112		
Temuan	310	639.198.941	
Rekomendasi	735	639.198.941	
Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan			
Sesuai	733	638.048.784	99,7%
Dalam Proses Tindak Lanjut	2	1.150.158	0,3%
Belum Tindak Lanjut	-	-	0%

Sumber: simhp.jogjapro.go.id, 2024 (data diolah)

Selain pemeriksaan operasional reguler pada tahun 2023 Inspektorat DIY telah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya meliputi: 1) Audit Ketaatan berupa *Probity Audit*; 2) Tata Kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan berupa Pendampingan Manajemen Risiko; 3) Audit Investigasi meliputi laporan atas aduan, pengembangan temuan hasil pemeriksaan, dsb; 4) Rekomendasi pengenaan sanksi daftar hitam; 5) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu meliputi: (Reviu DAK; Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; Evaluasi meliputi SAKIP, Dana Desa, LPPD; Pemantauan/Monitoring meliputi Penanganan atas Covid-19, Pengadaan PPPK, Promosi/Rotasi ASN, *Whistle Blowing System* (WBS)/Benturan Kepentingan dan Gratifikasi); 6) Pendampingan/Asistensi meliputi Pendampingan LK dan *Cash Opname* dan *Stock Opname*; serta 7) Pengawasan lainnya yang merupakan *mandatory* dari peraturan yang berlaku.

Hasil perhitungan sub indikator di atas diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel 3.187. Pengukuran Capaian Sasaran

Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	Persentase Capaian
Rekomendasi BPK RI : 1.225	= 1.106	95,91%
Rekomendasi Itjen Kemendagri: 45	= 35	
Rekomendasi Inspektorat DIY : 1.956	= 1.953	

Sumber: Inspektorat DIY, 2024 (data diolah)

Kinerja Sasaran Penunjang Urusan Pengawasan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.188. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2022 serta Capaian 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	95,85	91	95,91	105,4
2	Persentase Kepatuhan pelaporan triwulanan Gratifikasi, <i>Whistle Blowing System</i> dan Benturan Kepentingan	%	n/a	100	100	100

Sumber: Inspektorat DIY, 2024

Pada Sasaran Kinerja “Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal” dengan indikator “Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan” pada tahun 2023 tercapai sebesar 95,91% dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 105,4%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 95,85%, namun demikian jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sudah melebihi target.

Keberhasilan kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal” ini didukung oleh kegiatan pengawasan berkala yang mencakup pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan umum serta monitoring tindak lanjut

pengawasan. Dengan adanya pengawasan ke objek pemeriksaan diharapkan agar pelaksanaan kegiatan di OPD/unit kerja yang diperiksa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau pedoman yang berlaku sehingga akan meminimalkan *risiko* terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan intern/ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat DIY.

Pada sasaran “Meningkatnya efektivitas pengendalian internal” dengan indikator “Persentase Kepatuhan Pelaporan Triwulanan, Gratifikasi, *Whistle Blowing System* dan Benturan Kepentingan” tercapai 100% dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100% (terlampai). Pada capaian sasaran ini, pendampingan dan asistensi dilakukan dalam segala aspek pelaksanaan ketugasan di OPD Pemda DIY sebagai salah satu bentuk hubungan kemitraan antara auditor dengan *auditee*. Dengan menginformasikan hasil pengawasan dan kebijakan pengawasan diharapkan agar pihak-pihak terkait menyadari pentingnya fungsi pengawasan guna terwujudnya *good governance* dan *clean goverment*. Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja lain dalam melakukan kegiatan pengawasan sehingga dapat mencapai sasaran meningkatnya efektivitas pengendalian internal.

Selain fungsi *quality assurance* yang diwujudkan dalam audit, evaluasi, reviu maupun monev, ketercapaian kinerja didukung oleh berjalannya fungsi *consulting* dan sebagai mitra bagi Perangkat Daerah maupun *stakeholder* lainnya dengan membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka melalui diskusi dan *sharing* dengan semangat pendampingan kepada OPD untuk mengawal tujuan pembangunan Pemda DIY.

Komitmen dan integritas diperlukan untuk mampu meningkatkan kinerja dan kemampuan sesuai dengan regulasi terkini. Selain itu, koordinasi intensif dengan *stakeholder* baik internal maupun eksternal Pemda DIY dalam melaksanakan ketugasan dan pencapaian tujuan kinerja Pemda DIY.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Volume pengawasan yang telah direncanakan dalam PKPT dan ketugasan tambahan dari Kementerian/ Lembaga di antaranya Reviu DAU, Reviu Dana Keistimewaan, Hibah/ Bansos, belum dapat diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara memadai;
- (2) Pemeriksaan oleh Kementerian Teknis/ Lembaga pada Pemda DIY belum sepenuhnya dapat dikoordinasikan oleh kementerian dalam negeri sesuai harapan, sehingga masih terjadi satu perangkat daerah diperiksa oleh berbagai aparat pengawas (BPK, BPKP, Inspektorat), bahkan APH untuk tema pengawasan yang sejenis;
- (3) Regulasi untuk pembentukan struktur Inspektur Pembantu Khusus yang menangani investigasi belum dapat direalisasikan karena membawa konsekuensi pada kebutuhan penambahan SDM yang tidak dapat serta merta dipenuhi;
- (4) Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

b) Solusi

- (1) Terus membangun komunikasi dengan stakeholder terkait (Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian Teknis, BPKP, Inspektorat Kabupaten/Kota) untuk dapat semakin menyelaraskan kegiatan pengawasan sehingga dapat meminimalkan pengawasan bertabrakan pada objek pemeriksaan yang sama;
- (2) Senantiasa meningkatkan kapasitas SDM dengan mengikutsertakannya dalam pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi keahlian yang terakreditasi oleh badan akreditasi yang terpercaya;
- (3) Mendorong OPD untuk terus-menerus memperkuat sistem pengendalian internal dengan mengedepankan analisis manajemen risiko dan faktor risiko pada setiap masing-masing manajemen OPD sehingga mampu melakukan *self-diagnostic assessment* untuk mengantisipasi risiko yang mungkin datang dalam pelaksanaan program kegiatan.
- (4) Memanfaatkan teknologi informasi yang memperbesar peran serta masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pengawasan khususnya dalam pengelolaan pengaduan.

3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Anggaran Penunjang Urusan Pengawasan pada tahun 2023 sebesar Rp25.097.426.893,00 yang terdiri dari 3 program dan 41 sub kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp24.117.893.470,00 atau 96,10%, serta realisasi fisik sebesar 100% sesuai target.

Tabel 3.189. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	A	91	92,76
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4
			Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA SKPD Tahun 2024	dokumen	2	2
			Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Perubahan DPA SKPD Tahun 2023	dokumen	2	2
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	90	87
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	16
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (4 paket ATK, 4 paket kertas, 3 paket kearsipan, 1 paket bahan komputer)	Paket	12	12
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (5 paket tempat sampah, 1 paket sabun cair, 2 paket tissue, 2 paket hand sanitizer, 1 paket keset, 1 paket wastafel)	Paket	12	12
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1
			Pengadaan Mebel			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	28	28
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	1
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	111.35
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	16	16
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	174	174

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan cash opname dan stock opname OPD	laporan	37	37
			jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	137	137
			Reviu Laporan Kinerja			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	113	113
			jumlah Laporan Evaluasi Kinerja OPD	laporan	37	37
			Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Resiko OPD	laporan	37	37
			Jumlah Laporan Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY	laporan	2	2
			Jumlah Laporan Reviu Dokumen Perencanaan SKPD DIY sebelum tanggal persetujuan RAPBD Tahun 2024	laporan	37	37
			Reviu Laporan Keuangan			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	38	38
			Jumlah Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	laporan	37	37
			Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda DIY	laporan	1	1
			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	21	21
			Jumlah Laporan EKPPD Kabupaten/Kota	laporan	5	5
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Umum/Teknis Pemerintah Kab/Kota	laporan	16	16
			Kerjasama Pengawasan Internal			
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	2	2
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	2	2
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	4	4
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	120	120
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Persentase kepatuhan pelaporan LHKASN	Persen	100	100
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan			
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	37	37
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	37	37
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	4
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	laporan	1	1
			Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	laporan	1	1
			Jumlah Laporan Tindakanlanjutan APIP dan APH	laporan	1	1
			Jumlah Laporan triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Saberpungli	laporan	4	4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	0	0

g. Penelitian dan Pengembangan

1) *Kondisi Umum*

Dalam melaksanakan Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan di Pemda DIY, mendasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) merupakan Unit Pengelola Teknis (UPT) di bawah Bappeda DIY.

Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan memegang peran penting agar konsep atau strategi perencanaan pembangunan daerah dirancang berdasarkan data empiris penelitian, dan bukan sekedar asumsi atau kebiasaan yang sudah ada. Data empiris *penelitian* membantu Pemda DIY untuk mengetahui permasalahan nyata di masyarakat sehingga diketahui apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Temuan tersebut akan mempertajam kebijakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Pemerintah.

Dalam Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan, dilaksanakan beberapa ketugasan antara lain: penelitian, pengembangan dan statistik sektoral serta inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan di DIY untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang *ditindaklanjuti* dan persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan

daerah. Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan direpresentasikan dengan Program Penelitian dan Pengembangan dengan indikator program Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah.

Tabel 3.190. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	%	n/a	70	81,74	116,77

Sumber: BPPSD DIY, 2024

Indikator Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung Pembangunan daerah sebagai capaian kinerja program Penelitian dan Pembangunan Daerah. Perhitungan indikator ini berdasarkan meta indikator yang telah ditetapkan, yaitu jumlah hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan Pembangunan daerah dibagi jumlah hasil kelitbangan yang terseleksi dikalikan 100%.

Secara spesifik, yang dimaksud hasil kelitbangan disini adalah rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh setiap kegiatan kelitbangan untuk *menyelesaikan* tantangan permasalahan pemerintah daerah.

Pada tahun 2023 terdapat 197 rekomendasi terpilih dari keseluruhan sejumlah 241 *rekomendasi* yang relevan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan. Dari 197 rekomendasi terpilih tersebut terdiri dari urusan pendidikan sebanyak 3 rekomendasi, kesehatan sebanyak 8 rekomendasi, pekerjaan umum dan penataan ruang sebanyak 13 rekomendasi, energi dan sumber daya sebanyak 6 rekomendasi, perumahan rakyat dan permukiman sebanyak 13 rekomendasi, pangan sebanyak 7 rekomendasi, lingkungan hidup sebanyak 8 rekomendasi,

komunikasi dan informatika sebanyak 20 rekomendasi, koperasi dan usaha kecil menengah sebanyak 1 rekomendasi, kebudayaan sebanyak 6 rekomendasi, pariwisata sebanyak 39 rekomendasi, pertanian sebanyak 25 rekomendasi, kehutanan sebanyak 8 rekomendasi, perencanaan Pembangunan sebanyak 22 rekomendasi, keuangan sebanyak 5 rekomendasi, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 5 rekomendasi, perdagangan sebanyak 2 rekomendasi, keistimewaan-kelembagaan sebanyak 2 rekomendasi, dan keistimewaan-tata ruang sebanyak 4 rekomendasi.

Sebagai upaya agar hasil kelitbangan selaras dengan dokumen perencanaan, maka penyusunan rencana kegiatan kelitbangan perlu memedomani Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang telah disusun. Pemda DIY juga telah menyusun RIK DIY 2022-2027 sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan kelitbangan oleh seluruh perangkat daerah. Selain itu perlu dilakukan koordinasi terus-menerus dengan para pemangku kepentingan sejak dari penyusunan perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Sumber Daya yang dimiliki terbatas tetapi kebutuhan akan hasil kelitbangan sangat luas dan kompleks;
- (2) Penelitian dari Perguruan Tinggi memiliki potensi besar dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah. Tetapi arah hasil penelitiannya cenderung bersifat akademis sehingga hasil penelitian tersebut belum dapat diterapkan secara langsung dalam rekomendasi perencanaan pembangunan;
- (3) Perguruan Tinggi menganggap topik penelitian yang dibutuhkan Pemda DIY kurang diminati karena kurang menarik untuk kepentingan publikasi jurnal akreditasi.

b) Solusi

- (1) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan unit kelitbangan kabupaten/kota se-DIY, salah satunya melalui koordinasi rutin setiap triwulan untuk bersinergi dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di DIY secara bersama-sama.
- (2) Melakukan koordinasi dan kolaborasi serta memperluas jejaring penelitian dan pengembangan, terutama dengan instansi kelitbangan vertikal dan perguruan tinggi.
- (3) Merancang skema penelitian gabungan antara Perguruan Tinggi dan Pemda DIY dengan topik penelitian yang relevan dengan perencanaan pembangunan daerah dan memiliki kualitas layak terbit untuk jurnal ilmiah akreditasi. Serta mendorong Perguruan Tinggi agar menjadikan permasalahan nyata di masyarakat sebagai salah satu prioritas topik penelitian.

3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Alokasi anggaran sebesar Rp236.199.100,00 sampai dengan tahun 2023 pada Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pembangunan Daerah dengan Program Penelitian dan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan serta Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Secara keseluruhan realisasi fisik mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 93,87%.

Tabel 3.191. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
3	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	Persen	70	81,74
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%	100	100
			Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	dokumen	1	1
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	100	100
			Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	dokumen	1	1
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
			Terlaksananya Pengembangan Inovasi Teknologi	%	100	100
			Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	dokumen	5	5
			Inventarisasi Hasil Penelitian Tahun 2023	dokumen	1	1
			Rekomendasi Hasil Penelitian Tahun 2023	dokumen	1	1
			Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelitbangan 2023	dokumen	1	1
			Rumusan Bahan Kebijakan Kelitbangan	dokumen	1	1
			Publikasi prosiding ilmiah	dokumen	1	1

h. Sekretaris Dewan

1) Kondisi Umum

Pemda DIY mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD DIY diatur terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD DIY. Kedudukan Sekretariat DPRD DIY diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 132 Tahun 2021, sebagai berikut:

- a) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- b) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah

Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023 Sekretariat DPRD DIY melaksanakan tugas rutin yang sudah diatur dalam peraturan perundangan, selain itu *Sekretariat* DPRD memfasilitasi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019-2024 dikarenakan ada 2 anggota DPRD DIY yang meninggal dunia dan 2 anggota DPRD DIY yang mengundurkan diri.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Sekretariat *DPRD* DIY telah disusun dokumen Rencana Strategis sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY setiap tahun dalam kurun waktu 4 tahun yang menjabarkan tentang isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

Tabel 3.192. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	128,44	95,50	137,09	143,55

Sumber: *Setwan DIY, 2024*

Indikator Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 terealisasi sebesar 137,09% atau dengan persentase capaian 143,55% dari target 95,50%. Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar 128,44%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya fasilitasi proses PAW anggota DPRD DIY sehingga menambah jumlah Bahan Acara yang menambah jumlah agenda yang terselesaikan.

2) **Permasalahan dan Solusi**

a) **Permasalahan**

- (1) Adanya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 September 2023 yang merupakan dasar pemberian Lumpsum bagi anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas biasa dalam negeri dan adanya perubahan beberapa harga satuan untuk tiket dan hotel bagi anggota DPRD sehingga menjadikan jumlah anggaran yang tersedia untuk perjalanan dinas anggota DPRD menjadi kurang dikarenakan pada tanggal tersebut proses APBD Perubahan Pemda DIY sudah sampai dengan tahapan menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk mencukupi hal tersebut maka harus dilakukan pergeseran anggaran dari sisa anggaran perjalanan dinas yang tidak terpakai.
- (2) Terlambatnya penyampaian hasil evaluasi Perubahan APBD DIY TA 2023 dan hasil Evaluasi RAPBD DIY TA 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri menyebabkan tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut juga mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi pelaksanaan APBD DIY tidak tepat waktu dan menghambat kegiatan DPRD DIY.
- (3) Kegiatan pelaksanaan *Medical Check Up* bagi anggota DPRD DIY ada 10 orang Anggota DPRD DIY tidak menggunakan fasilitas *Medical Check Up* tanpa ada konfirmasi sejak awal.

b) Solusi

- (1) Meningkatkan koordinasi antar Alat Kelengkapan DPRD sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD lebih meningkat.
- (2) Penjadwalan/perencanaan kegiatan menyesuaikan tata kala yang diatur dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan evaluasi RAPBD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan *Medical Check Up* menyesuaikan hasil pendataan/*checklist* yang dilakukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk dilakukan perubahan target kinerja dalam perubahan APBD.

3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Penunjang Urusan Sekretaris Dewan melaksanakan 2 Program dan 55 sub kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp132.046.355.298,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp123.408.999.422,00 atau 93,46%. Sementara, realisasi fisik mencapai 99,98%.

Perbandingan target anggaran dengan realisasi anggaran tahun 2022 terdapat *deviasi* sebesar 6,54%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa anggaran tidak terealisasi yang bersumber dari:

- a) Anggaran makan minum rapat yang tidak terserap karena komunikasi lebih banyak sosial media dan untuk makan minum rapat yang melibatkan anggota DPRD menyesuaikan kebutuhan;
- b) Anggaran Penggandaan karena sudah banyak menggunakan sistem *paperless*;
- c) Sisa pengadaan barang dan jasa (lelang/selisih antara nilai Kontrak dengan Pagu yang ada);

- d) Anggaran gaji anggota DPRD DIY karena Beberapa Anggota DPRD DIY mengalami proses PAW (meninggal dunia dan mengundurkan diri) sehingga ada waktu jeda pembayaran gaji
- e) Anggaran *Medical Check Up* (MCU) anggota DPRD karena ada beberapa anggota yang tidak melaksanakan MCU;
- f) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri karena ada beberapa anggota dewan yang tidak mengikuti kunjungan dan sisa dari *at cost* tiket karena ada yang menggunakan moda kereta api dan sisa dari penginapan 30%;
- g) Anggaran honor narasumber karena beberapa kegiatan ada yang tidak menggunakan narasumber dan beberapa kegiatan yang menggunakan narasumber ASN Pemda DIY sehingga tidak diberikan honor.

Berikut disampaikan rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah.

Tabel 3.193. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Kategori	A	A
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	4
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	3
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	80	80
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	13	13
			ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	laporan	14	14
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	16	16
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	21	21
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	6
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	5
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	4
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	24	24
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
			Pengadaan Mebel			
			Jumlah Paket mebel yang disediakan	paket	2	2
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	108	107
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	50	50
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	60
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	5	5
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	29	29
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	274	274
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3
			LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD			
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	orang/ bulan	55	55
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang DisediakanPenyediaan pakaian dinas dan atribut sesuai PP 18/2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD	paket	55	55
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	51	41
			LAYANAN ADMINSTRASI DPRD			
			Fasilitasi Fraksi DPRD			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	laporan	196	217
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	14	14
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,50	137,09
			PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD			
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	10	10
			Pembahasan Rancangan Perda			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	dokumen	16	16
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	8	8
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	158	195

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN			
			Pembahasan KUA dan PPAS			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	2	2
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan	dokumen	2	2
			Pembahasan APBD			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	1	1
			Pembahasan Perubahan APBD			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	dokumen	1	1
			Pembahasan Laporan Semester			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	dokumen	1	1
			Pembahasan Pertanggung jawaban APBD			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen	1	1
			PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	laporan	6	6
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	laporan	4	4
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	laporan	4	4
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	laporan	4	4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			PENINGKATAN KAPASITAS DPRD			
			Pendalaman Tugas DPRD			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	5	5
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan			
			Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	18	18
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	18	18
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	7	7
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	dokumen	33	43
			PENERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT			
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	dokumen	1	1
			Pelaksanaan Reses			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	3	3
			PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD			
			Pengawasan Kode Etik DPRD			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	laporan	3	3
			FASILITASI TUGAS DPRD			
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	20	20
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan	1	1
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	14	14
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	13	13



F. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Pada tahun 2023, Pemda DIY menetapkan beberapa kebijakan strategis sebagai upaya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di DIY.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum*	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Rumusan Bahan Kebijakan Reformasi Kalurahan yang tercantum pada Peraturan Gubernur DIY tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Tahun 2023-2027	Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi dari Visi Gubernur DIY pada masa jabatan 2022-2027 yakni Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Misi 1 Gubernur DIY pada masa jabatan 2022-2027 yakni Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan. 2. Mengupayakan penyelesaian masalah kemiskinan dan masalah ketimpangan pendapatan antara wilayah perkotaan dengan perdesaan. Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pendekatan pembangunan diupayakan berangkat dari entitas Kalurahan, melalui pendekatan Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
2	Pedoman dalam koordinasi pelaksanaan Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pasca Konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023	Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengkoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan	Pedoman pelaksanaan bagi Tim pembangunan Wilayah Perbatasan dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan Pembangunan Wilayah Perbatasan. Pedoman bagi masyarakat dalam berperan serta terhadap Pembangunan Wilayah Perbatasan.
3	Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemda DIY.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum*	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
4	Penyusunan Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdais DIY No 1 Tahun 2022	a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran. 3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM. 4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM. a. Perubahan dan Penguatan Kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian, serta ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi rumah sakit khusus Daerah Provinsi yang terdiri dari Kelas A dan Kelas B b. Restrukturisasi Kelembagaan pada Paniradya Kaistimewan c. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mewajibkan Daerah menyesuaikan nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
5	Penetapan Rencana Induk Geopark Jogja Tahun 2023-2032	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 40/KEP/2023 tentang Penetapan Rencana Induk Geopark Jogja Tahun 2023-2032 tanggal 2 Februari 2023	Memberikan arahan dan pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan Geopark Jogja untuk periode tahun 2023-2032



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum*	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
6	Pembentukan Komite Geopark Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2025	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 35/KEP/2023 tentang Pembentukan Komite Geopark Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2025 tanggal 1 Februari 2023	Membentuk wadah untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Geosite di kawasan Geopark Nasional dan pengembangan Geopark di DIY serta penguatan keterpaduan pengelolaan Geopark di DIY
7	Penetapan Identitas Visual Geopark Jogja	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 34/KEP/2023 tentang Penetapan Identitas Visual Geopark Jogja tanggal 1 Februari 2023	Memberikan arahan dan pedoman terkait identitas visual Geopark Jogja, termasuk maskot dan juga logo.
8	Pembentukan Badan Pengelola Geopark Jogja Periode Tahun 2023-2025	Surat Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 14/SEKDA/II/2023 tentang Pembentukan Badan Pengelola Geopark Jogja Periode Tahun 2023-2025 tanggal 9 Februari 2023	Membentuk wadah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan Geopark Jogja periode 2023-2025
9	Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Pada Daerah Aliran Sungai Progo Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda DIY No.3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2003 tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Provinsi DIY 	Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Pada Daerah Aliran Sungai Progo Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
10	Rancangan Pergub DIY tentang <i>Roadmap</i> Sanitasi DIY 2023-2027	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Tahun 2022-2024. 	<p>Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Sanitasi Provinsi adalah dokumen perencanaan sanitasi yang memuat/berisi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen <i>Roadmap</i> Sanitasi DIY nantinya akan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pedoman dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan sanitasi. b. acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum*	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
11	Peningkatan Implementasi Pengelolaan Persampahan Tingkat Kalurahan/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda DIY Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 	<p>Berdasarkan amanat peraturan bahwa kewajiban pengelolaan persampahan merupakan tanggung jawab bagi setiap sumber sampah yang menghasilkan timbulan sampah; Dalam dokumen kebijakan dan strategis daerah, terdapat sasaran pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%;</p> <p>Guna mendorong terciptanya kondisi pengelolaan sampah yang optimal di DIY, maka implementasi pengelolaan sampah tingkat kalurahan/kelurahan di DIY perlu didorong pelaksanaannya;</p> <p>Mendorong implementasi pengelolaan sampah di kalurahan/kelurahan dapat dilaksanakan dengan penguatan peraturan tingkat kalurahan/kelurahan tentang pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta penguatan lembaga tingkat kalurahan/kelurahan.</p>
12	<ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) di Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Penguatan keterlibatan dan peran <i>stakeholder</i> dalam optimalisasi dana TSLP; c. Optimalisasi kesesuaian bidang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) dengan Program Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur DIY di wilayah yang termasuk dalam Kawasan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, Miskin Ekstrem dan/atau kawasan yang membutuhkan penanganan mendesak dan segera; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 	<p>Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi skema pembiayaan alternatif pembangunan melalui Tanggung jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) di DIY.</p>



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum*	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	<ul style="list-style-type: none"> d. Optimalisasi kesesuaian bidang Tanggung jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) dengan Program Strategis Pembangunan Infrastruktur DIY; dan e. Perumusan konsep sharing anggaran berkolaborasi dengan CSR untuk wilayah yang termasuk dalam Kawasan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, kawasan Miskin Ekstrem, dan/atau kawasan yang membutuhkan penanganan mendesak dan segera; f. Penguatan keterpaduan data Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) pada level Pemda DIY dan Kabupaten/Kota. 		
13	Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1444 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemda DIY	SE Gubernur DIY Nomor 45/SE/3686/2023 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1444 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Menetapkan jam kerja pada bulan ramadhan kepada ASN di lingkungan pemda DIY untuk menjaga kedisiplinan pegawai selama bulan Ramadhan
14	Penetapan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2023	SK Gubernur DIY Nomor 138/KEP/2023 tentang Penetapan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2023	Menjamin kelancaran jamaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan ibadah haji mulai dari persiapan, keberangkatan ke Arab Saudi sampai kembali ke tanah air.
15	Penetapan Ketua Kafilah Haji DIY Tahun 1444 H/ 2023 M	SK Gubernur DIY Nomor 183/KEP/2023 tentang Penetapan Ketua Kafilah Haji DIY Tahun 1444 H/ 2023 M	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin penyelenggaraan ibadah haji di DIY berjalan aman, tertib dan lancar. b. Terlaksananya koordinasi yang baik pada saat persiapan, pelaksanaan, maupun kepulangan.
16	Penanganan Kasus Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta	Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 463/13420 Tentang Rekomendasi Penanganan	Beberapa rekomendasi umum berdasarkan hasil kajian tersebut antara lain Pengarusutamaan pembangunan keluarga melalui upaya <i>promotive, preventive, curative</i> dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum*	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Kasus Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta	<i>rehabilitative</i> , pencegahan perkawinan di usia anak, peningkatan SDM, sarana dan prasarana dalam memberikan layanan dan mediasi pada keluarga sebagai upaya pencegahan perceraian, memperkuat kolaborasi lintas sektor antar <i>stakeholder</i> dalam upaya pencapaian dan pelaksanaan program ketahanan keluarga, serta memperkuat program pengentasan kemiskinan.
17	Penataan Produk Hukum Daerah / Deregulasi Hukum	Surat Sekretaris Daerah DIY Nomor 188/2443 tentang Penataan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur	Penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dari perencanaan, penyusunan dan pembahasan usulan Produk Hukum Daerah agar mendukung arah kebijakan pembangunan hukum di daerah serta dalam mewujudkan cita-cita hukum dalam pembangunan daerah.
18	Penataan Produk Hukum Daerah / Deregulasi Hukum	Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penataan Produk Hukum Daerah	Mewujudkan reformasi birokrasi di bidang regulasi serta menciptakan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan hukum di daerah serta dalam mewujudkan cita-cita hukum dalam pembangunan daerah.
19	Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	SE Nomor 7/SE/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY	Dalam rangka Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
20	Percepatan peningkatan nilai literasi dan inklusi keuangan di DIY	Surat Edaran Gubernur Nomor 900/8644 tanggal 28 Juli 2023 perihal Optimalisasi Program KEJAR	Program Satu Rekening Satu Pelajar “KEJAR” menjadi salah satu Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi program bertujuan membangun pendidikan karakter budaya menabung sejak dini di lembaga keuangan formal dan mempersiapkan peserta didik menghadapi era digital, serta dalam rangka percepatan peningkatan nilai literasi dan inklusi keuangan di DIY



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum*	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
21	Kemandirian pangan dalam rangka menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi	Berita Acara Nomor 500/2847 tanggal 15 Juni 2023 tentang Komitmen Bersama Mendorong Kemandirian Pangan Dalam Rangka Menjaga Kestabilan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi DIY	<p>Perlunya upaya bersama dalam rangka meningkatkan produksi, kelembagaan serta efisiensi pemasaran produk pertanian sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah istimewa Yogyakarta (DIY), kabupaten/kota berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyukseskan reformasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari sisi hulu hingga hilir 2. Meningkatkan serapan produksi pertanian lokal melalui penguatan kerjasama antar daerah antar provinsi dalam rangka pemenuhan pasokan komoditas pangan utama bagi masyarakat di DIY 3. Mengupayakan sinergi antar daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah serta ekonomi kreatif di wilayah masing-masing
22	Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022	KepGub DIY Nomor: 245/KEP/2023, tanggal 24 Juli 2023 Tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023	Penetapan daftar Desa/Kelurahan Mandiri Budaya sebagai tindak lanjut atas target Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.
23	Pengendalian peredaran/perdagangan daging anjing dan hewan penular rabies	Surat Edaran Gubernur Nomor 510/13896 tanggal 7 Desember 2023 tentang Pengendalian Peredaran/Perdagangan Daging Anjing dan Hewan Penular Rabies Lainnya di DIY	<p>Daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Daerah Bebas Penyakit Rabies berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 892/kpts/TN.560/9/1997 tentang pernyataan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies), mengonsumsi daging dari hewan penular rabies (HPR) seperti anjing, kucing, dan kera berisiko menularkan penyakit rabies, kolera, dan zoonosis lainnya seperti <i>Salmonellosis</i> dan <i>Trichinellosis</i>, memperhatikan hal tersebut maka dihimbau untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat himbauan/edaran secara tertulis untuk tidak melakukan peredaran/perdagangan HPR dan produknya untuk tujuan konsumsi di kabupaten/kota

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum*	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Melarang pemasukan HPR yang tidak disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan/SKKH dari wilayah lain ke wilayah kabupaten/kota 3. Tidak menerbitkan Surat Rekomendasi Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan (SKKH) terhadap HPR yang berasal dari daerah yang masih berstatus tertular Rabies atau sedang terjadi wabah Rabies serta tidak menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH) untuk daging yang berasal dari HPR 4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang resiko penularan zoonosis melalui anjing dan HPR lainnya Secara ahif melakukan pengawasan dan pemantauan peredaran/perdagangan daging anjing dan HPR lainnya bersama jajaran terkait di kabupaten/kota
24	Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Nonperizinan	Sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan dan Non perizinan



G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2023

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
II. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah				
A. Urusan Penyusunan Peraturan Perundangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	1. Implementasi kebijakan seringkali terkendala oleh belum adanya payung hukum pelaksanaan teknis karena belum diterbitkannya Peraturan Gubernur sesuai dengan amanah dalam Peraturan Daerah yang telah disusun	1. Dibutuhkan adanya payung hukum yang mewajibkan serta mengatur dengan tegas batas waktu penerbitan Peraturan Gubernur serta peraturan teknis lain yang diamanahkan dalam penyusunan Peraturan Daerah maksimal 2 tahun sejak Peraturan Daerah disahkan. Agar dapat segera ditindaklanjuti pelaksanaan teknisnya dan segera dirasakan <i>output</i> -nya oleh masyarakat.	Ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Tidak diperlukan untuk membentuk payung hukum yang mengatur batas waktu penerbitan Peraturan Gubernur serta peraturan teknis lain, karena kewajiban pengaturan dan penyebutan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur atau peraturan turunan lain yang diamanatkan Peraturan Daerah sudah diatur secara jelas pada pasal ketentuan di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pembahasan ketentuan batas waktu penerbitan Produk Hukum Daerah dilakukan pada saat pembahasan dengan DPRD DIY.	Penyusunan Produk Hukum Daerah yang mewajibkan serta mengatur dengan tegas batas waktu penerbitan Peraturan Gubernur serta peraturan teknis lain yang diamanahkan dalam penyusunan Peraturan Daerah maksimal 2 tahun sejak Peraturan Daerah disahkan tidak perlu dilakukan.
2	2. Aksi kejahatan jalanan anak masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan	2. Pemerintah Daerah DIY harus membuat skema penyelesaian masalah aksi kejahatan jalanan anak	Pemda DIY telah melakukan serangkaian koordinasi terkait penanganan anak jalanan yang melibatkan APH (Aparat Penegak Hukum), OPD terkait, dan LSM peduli anak yang menghasilkan beberapa skema penanganan kenakalan anak di jalan. Skema penanganan anak di jalanan, antara lain: 1. Kegiatan Patroli rutin oleh kepolisian dan Pol PP yang di tingkatkan 2. Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak pada Tingkat SLTA guna melakukan pencegahan kekerasan, bullying, dan penerapan disiplin positif oleh DP3AP2 DIY 3. Pembinaan anak Sekolah dengan Korem Pamungkas oleh Dikpora DIY 4. Optimalisasi Pembinaan Remaja Bermasalah Sosial di BPRSR DIY Penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak Bersama Jagawarga, Satgas PPA DIY, Pemerintah Kelurahan dll,	Penurunan kenakalan anak di jalan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		3. Pemerintah Daerah DIY harus segera membuat Program Penegakan melalui peningkatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk menertibkan dan mengantisipasi permasalahan kejahatan jalanan.	1. Melakukan Program Satpol PP DIY Goes To School, yakni melakukan operasi non yustisi di sekolah (SLTP dan SLTA) dengan cara sidak kendaraan dan barang bawaan siswa, dilanjutkan dengan penyuluhan kepada siswa dan tenaga pengajar. 2. Melakukan giat patroli malam pada pukul 23.00 s/d 04.00 untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan/klithih 3. Melakukan pembinaan kepada pengurus Jaga Warga dan Satlinmas di masing-masing Kalurahan agar proaktif dalam pencegahan dan penanganan klithih di wilayahnya masing-masing, dengan cara patroli bersama dengan aparat Desa dan aparat keamanan.	
3	Pemanfaatan SG, PAG, tanah kas desa yang tidak sesuai peraturan, tidak berijin, atau tidak sesuai peruntukannya perlu diprioritaskan penyelesaiannya	4. Pemerintah Daerah DIY harus melakukan pemetaan potensi pelanggaran Perda/Perkada dan kemampuan untuk antisipasi, serta membuat program strategis penanganannya secara terukur dan berkesinambungan	Satpol PP DIY telah mengagendakan giat Deteksi Dini dan cegah dini untuk melakukan pemetaan terhadap potensi serta lokasi yang rawan terjadi gangguan trantibum serta pelanggaran perda. Pada tahun anggaran 2023, Satpol PP DIY mengagendakan kegiatan deteksi dini dan cegah dini sebanyak 24 kali.	Giat Deteksi Dini dan Cegah Dini
4	Pelanggaran larangan operasional kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di jalan Margo Utomo, Malioboro, Margo Mulyo, spanduk dan reklame tanpa ijin, melintang jalan masih banyak dijumpai	5. Pemerintah Daerah DIY harus membuat skema penyelesaian masalah penertiban reklame	Melakukan operasi penertiban reklame yang tidak berizin, dimana Pemda DIY melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan Satuan Kerja Balai Besar Jalan Nasional DIY.	Penertiban Reklame



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
5	Gelandangan, pengemis, manusia silver, pengamen akustik di persimpangan jalan masih belum teratasi dengan maksimal	6.Pemerintah Daerah DIY harus membuat skema penyelesaian gelandangan, pengemis, manusia silver, pengamen akustik di persimpangan jalan	Dinas Sosial DIY sesuai ketugasan memberikan upaya rehabilitasi di dalam panti melalui Camp Assessment berupa layanan asesmen awal, rehabilitasi sementara serta pemulangan ke daerah asal bagi PPKS yang berasal dari luar DIY. Sedangkan Gelandangan Pengemis dari dalam DIY yang memerlukan rehabilitasi lanjutan akan ditangani di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY.	Pada tahun 2014 telah diterbitkan Peraturan Daerah DIY tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis nomor 1 tahun 2014. Kemudian pada tahun 2017 diterbitkan Peraturan Gubernur DIY tentang SOP Penanganan Gelandangan Pengemis, nomor 36 tahun 2017
			Melakukan operasi non yustisi dan yustisi terhadap gelandangan dan pengemis, serta kepada masyarakat yang memberi berdasarkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.	Operasi Non Yustisi dan Yustisi terkait Gelandangan dan Pengemis
6	Masalah penambangan liar daerah aliran sungai belum sepenuhnya teratasi	7.Pemerintah Daerah DIY harus membuat skema penyelesaian penambangan liar daerah aliran sungai	Melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan secara non yustisial terhadap pelanggar Perda penambangan liar yang terjaring melalui operasi penertiban perijinan.	Operasi Non Yustisi terkait Penambangan Liar
		8.Pemerintah Daerah DIY harus membuat Program Preventif melalui gerakan budaya tertib di masyarakat dengan melibatkan Pemkot/Pemkab setempat berupa penguatan program kegiatan yang ada di masyarakat.	Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi Perda / Perkada kepada Masyarakat Umum, Pembinaan kepada Kelompok Jagawarga dan pembinaan / peningkatan kapasitas kepada personil Satlinmas.	Sosialisasi Perda / Perkada
B. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik				

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
1	Belum sinergisnya penetapan sasaran kegiatan Sinau Pancasila.	1. Pemerintah Daerah DIY harus membuat rencana strategis pembudayaan Pancasila.	Perda DIY No.1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi salah satu acuan/dasar dalam perumusan rencana kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Sesuai mandat peraturan tersebut, Badan Kesbangpol DIY telah menyelenggarakan kegiatan Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran peserta kegiatan yang meliputi masyarakat, ormas, orpol dan ormas kepemudaan.	Terjadinya dekadensi moral akibat pengaruh globalisasi yang membuat pengamalan dan penghayatan Pancasila oleh masyarakat DIY belum terlaksana secara optimal.
2	Peningkatan koordinasi unsur Forkompimda dalam menghadapi permasalahan aktual di daerah.	2. Pemerintah Daerah DIY harus membuat gerakan dan suri tauladan untuk membumikan Pancasila.	Upaya membumikan Pancasila melalui gerakan dan suri tauladan telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Badan Kesbangpol DIY melalui kegiatan Sinau Pancasila, Sarasehan Pancasila, dan Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Adapun target pelaksanaan Sinau Pancasila tahun 2023 adalah sebanyak 78 kali yang dilakukan di seluruh kapanewon/kemantren di wilayah DIY dan 9 kali Sinau Pancasila yang dilakukan untuk ormas/orpol/ormas kepemudaan. Sementara itu, Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika dilakukan sebanyak 60 kali dengan sasaran peserta dari golongan pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum. Adapun kegiatan Sarasehan Pancasila dilaksanakan sebanyak satu kali	Terjadinya dekadensi moral akibat pengaruh globalisasi yang membuat pengamalan dan penghayatan Pancasila oleh masyarakat DIY belum terlaksana secara optimal.
3	Masih adanya potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum.	3. Pemerintah Daerah DIY harus meningkatkan koordinasi Forkompimda dalam berbagai bentuk kegiatan baik kegiatan formal maupun non formal.	Pembentukan Forkopimda merupakan salah satu perwujudan dari amanat Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Koordinasi Forkopimda di wilayah DIY pada tahun 2023 telah terlaksana sebanyak 3 (tiga) kali yang dilaksanakan pada bulan April dalam rangka menjaga stabilitas di seluruh lini menjelang hari raya Idul Fitri, bulan November dalam rangka Fasilitas pelaksanaan kegiatan deklarasi pemilu damai 2024, serta bulan Desember jelang Natal dan Tahun Baru 2024	Pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah di lingkup Pemda DIY melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dirasa belum optimal



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		4. Pemerintah Daerah DIY harus melakukan deteksi dini dan cegah dini potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum dengan program kegiatan yang bekerjasama dengan berbagai forum binaan.	Sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan fasilitasi forum-forum kemitraan yang mendukung kondusifitas wilayah DIY (FKDM, FKUB, dan FPK), Badan Kesbangpol senantiasa melibatkan forum-forum tersebut dalam berbagai program kerja Badan, utamanya yang berkaitan dengan deteksi dini dan cegah dini potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, forum-forum tersebut akan menyusun rekomendasi-rekomendasi yang selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan oleh Pemda DIY terkait upaya cipta kondusifitas wilayah DIY	Pelaksanaan fasilitasi terhadap forum kemitraan seperti FKDM, FKUB, dan FPK dirasa belum optimal karena adanya keterbatasan sumber daya.
C. Urusan Penanggulangan Bencana				
1	Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana kebutuhan mendesak untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal ini agar segera tertangani agar dampaknya tidak semakin besar.	1. Pemerintah Daerah DIY harus membuat Rencana Induk Penanggulangan Bencana DIY dalam bentuk Peraturan Daerah DIY.	Rencana Induk Penanggulangan Bencana DIY belum dibuat, tetapi pada tahun 2023 BPBD DIY membuat Rencana Penanggulangan Bencana 2022-2027 dan telah di Pergubkan.	Telah terbit Peraturan Gubernur terkait Rencana Penanggulangan Bencana 2022-2027.
2	Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat	2. Pemerintah Daerah DIY harus membuat Bank Data SDM pelaksana dan relawan bencana se-DIY dan mengklasifikasikannya agar memudahkan dalam pembinaan lebih lanjut.	Pada tahun 2023 BPBD DIY membentuk 5 SPAB yaitu 1) SMK N 6 Jogja; 2) SMA 2 Jogja; 3) SMA Bopkri 1 Jogja; 4) SLB Citra Mulia Mandiri Kalasan Sleman; 5) MA Ali Maksum Krapyak Bantul.	Pada tahun 2023 BPBD DIY membentuk 5 SPAB.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada.			
3	Perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana/ Destana dalam rangka pengurangan risiko bencana	3. Pemerintah Daerah DIY harus melakukan peningkatan kapasitas SDM pelaksana dan relawan yang bertugas dalam menangani kebencanaan.	Pada tahun 2023 BPBD DIY melakukan penguatan kapasitas kawasan Kaltana sebanyak 5 lokasi. Adapun Desa/Kalurahannya adalah sebagai berikut: 1. Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman; 2. Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman; 3. Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo; 4. Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, kabupaten Gunungkidul; 5. Kalurahan Giripanggung, Kapanewon tepus, Kabupaten Gunungkidul.	Pada tahun 2023 BPBD DIY melakukan penguatan kapasitas kawasan Kaltana sebanyak 5 lokasi.
4	Banyaknya Kawasan Rawan Bencana di DIY yang membutuhkan sistem peringatan dini bencana.	4. Pemerintah Daerah DIY harus mengkonsolidasikan dan mensinergikan organisasi relawan yang dibentuk Kabupaten/Kota dalam Kalurahan/ Kelurahan Tanggap Bencana dan Kapanewon/Kemantren dalam forum koordinasi, komunikasi.	Terdapat sistem peringatan dini (EWS) yang tersebar di DIY. EWS yang berada di Kulon Progo ada 3 lokasi (1. Desa Ngrancak, Pendoworejo; 2. Desa Klepu, Banjar arum; 3. Desa Jeruk, Gerbosari), Bantul 3 lokasi (1. Desa Tambalan, Srimartani; 2. Desa Bojong, Wonolelo; 3. Desa Lemah Rubuh, Selopamiro), dan Gunung Kidul 6 lokasi (1. Balai Desa Pengkok, Patuk; 2. Balai Desa Nglegi, Patuk; 3. Desa Semoyo, Patuk; 4. Desa Mertelu, Gedangsari; 5. Desa Watugajah, Gedangsari; 6. Desa Sampang, Gedangsari).	Pemasangan Sistem peringatan dini (EWS) yang tersebar di DIY.
5	Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya.	5. Pemerintah Daerah DIY harus melakukan penguatan sumber daya dan sinergitas Kampung Tangguh Bencana, Desa Tangguh Bencana, Forum Pengurangan Resiko Bencana.	BPBD DIY telah menyusun Rencana Kontingensi gunung Merapi (2019), gempa bumi (2021), tanah longsor (2021), tsunami (2016), banjir (2021), kekeringan (2017), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2022-2027 (2022), Kajian Pemetaan Kawasan Rawan Kebakaran (2023), Kajian Penyelamatan Non Kebakaran (2023), Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan IRBI (2023).	BPBD DIY telah menyusun beberapa Rencana Kontingensi.
6	Belum optimalnya pengelolaan pengurangan risiko bencana pada	6. Pemerintah Daerah DIY harus membuat SOP kebencanaan dan gladi lapang perlu ditingkatkan dalam simulasi beragam bencana.	Pada tahun 2023 BPBD DIY membuat kajian mitigasi bencana pada bangunan cagar budaya tahap 3 pada sumbu filosofi dengan maksud untuk mengkaji dampak bencana di wilayah cagar budaya terhadap kekuatan fisik bangunan cagar budaya di DIY dengan sasaran wilayah cagar budaya yang rawan bencana di jalur sumbu filosofi dan masyarakat	Pada tahun 2023 BPBD DIY membuat kajian mitigasi bencana pada bangunan cagar budaya



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	Kawasan Strategis Keistimewaan di DIY.		yang tinggal di sekitar bangunan cagar budaya di kawasan sumbu filosofi. Kajian mitigasi bencana tersebut ditetapkan untuk 20 bangunan cagar budaya yang berada di kawasan sumbu filosofi mulai dari tugu Pal Putih ke selatan sampai dengan panggung Krapyak.	tahap 3 pada sumbu filosofi.
7	Belum tersedianya informasi lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana.	7. Pemerintah Daerah DIY harus memberikan fasilitasi organisasi relawan kebencanaan baik untuk peningkatan SDM maupun operasional organisasi.	BPBD DIY telah mempunyai kajian risiko bencana (KRB) Nasional 2022-2026 yang menyajikan data dan informasi tentang kondisi risiko bencana yang ada di DIY dielaborasi dari parameter ancaman, kerentanan dan kapasitas mengacu pada metode umum pengkajian risiko bencana dalam dokumen ini yaitu banjir, banjir bandang, covid-19, cuaca ekstrim, epidemic wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, letusan gunung merapi, tanah longsor, tsunami dan likuifaksi. Pengkajian tersebut mengacu pada 7 prioritas program pengurangan risiko bencana dan 71 indikator. Dokumen KRB ini mempunyai masa berlaku 5 tahun sesuai tujuan sebagai dasar penyusunan dokumen penanggulangan risiko bencana 5 tahun.	BPBD DIY telah mempunyai kajian risiko bencana (KRB) Nasional 2022-2026.
8	Belum tersedianya Sistem Data dan informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi/terpadu.	Pemerintah Daerah DIY harus melakukan pendidikan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat, serta perlu meningkatkan kuantitas program dan sasaran, baik di tingkat masyarakat maupun sekolah melalui kerjasama dengan Palang Merah Indonesia DIY/Kabupaten/Kota.	BPBD DIY telah melakukan pendidikan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Diharapkan melalui pendidikan tersebut upaya pengurangan risiko bencana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat dikenalkan sejak dini kepada seluruh peserta didik dengan mengintegrasikan pendidikan PRB ke dalam kurikulum sekolah dan ekstrakurikuler. Pada tahun 2023 BPBD DIY membentuk 5 SPAB yaitu 1) SMK N 6 Jogja; 2) SMA 2 Jogja; 3) SMA Bopkri 1 Jogja; 4) SLB Citra Mulia Mandiri Kalasan Sleman; 5) MA Ali Maksum Krapyak Bantul.	BPBD DIY telah melakukan pendidikan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat.
9	Masih kurangnya kapasitas dan pengelolaan SDM PB		Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 Pemerintah mengatur Penanggulangan Bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan	Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 Pemerintah mengatur

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	(Aparat dan masyarakat serta relawan).		bencana di daerah. Memperhatikan hal tersebut, BPBD DIY dipandang perlu melakukan kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Hal tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, menyiapkan diri untuk selalu siap dan siaga dan juga bagian dari upaya pengurangan risiko bencana terhadap persoalan . Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan diharapkan berperan dalam mencapai target pengurangan risiko bencana, SDM memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan juga meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dalam menghadapi ancaman bencana secara bertahap dan berkelanjutan.	Penanggulangan Bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Memperhatikan hal tersebut, BPBD DIY dipandang perlu melakukan kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Hal tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, menyiapkan diri untuk selalu siap dan siaga dan juga bagian dari upaya pengurangan risiko bencana terhadap persoalan . Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan diharapkan berperan dalam mencapai target pengurangan risiko bencana, SDM memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar dalam penyelenggaraan



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
10	Sarana dan prasarana PB belum semua memenuhi standar.		BPBD DIY melalui sub kegiatan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana menyediakan: 1) Kendaraan operasional penanggulangan bencana selalu siap pakai; 2) Peralatan berat dan pendukung sesuai dengan rencana kebutuhan; 3) Peralatan shelter/ pengungsian dan peralatan pendukung sesuai rencana kebutuhan; 4) Peralatan komunikasi dan elektronik sesuai rencana kebutuhan; 5) Peralatan perlindungan diri sesuai rencana kebutuhan. Oleh karena itu, peralatan PB memerlukan dukungan pemeliharaan yang besar dan dukungan operasional terutama pada saat respon kejadian bencana. Sampai saat ini ketersediaan peralatan PB di DIY baru 60% dari kebutuhan standar peralatan PB, sehingga masih jauh dari minimal kebutuhan.	penanggulangan bencana dan juga meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dalam menghadapi ancaman bencana secara bertahap dan berkelanjutan. Sampai saat ini ketersediaan peralatan PB di DIY baru 60% dari kebutuhan standar peralatan PB, sehingga masih jauh dari minimal kebutuhan.
11	Logistik bencana belum memenuhi kebutuhan PB sesuai standar.		Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah dalam penanggulangan bencana adalah menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dukungan logistik yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas dan SPM.	Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah dalam penanggulangan bencana adalah menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
12	Penanganan kedaruratan kebencanaan di kawasan perbatasan perlu disinergiskan.		Pada tahun 2023 BPBD DIY melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di DIY terkait penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di DIY.	<p>minimum dukungan logistik yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas dan SPM.</p> <p>Pada tahun 2023 BPBD DIY melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di DIY terkait penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di DIY.</p>
13	Belum adanya Peta Kawasan rawan kebakaran dan rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan.		Sudah ada. Pada tahun 2023 BPBD DIY membuat kajian pemetaan rawan bencana kebakaran dan kajian penyelamatan non kebakaran di DIY. Dengan adanya kajian pemetaan rawan bencana kebakaran DIY tersebut diharapkan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan.	Sudah ada. Pada tahun 2023 BPBD DIY membuat kajian pemetaan rawan bencana kebakaran dan kajian penyelamatan non kebakaran di DIY. Dengan adanya kajian pemetaan rawan bencana kebakaran DIY tersebut diharapkan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan.



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
14	Belum adanya SDM dan Sarana Prasarana Penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.		Pada tahun 2023 BPBD DIY mendapat tambahan pegawai PPPK pemadam kebakaran sebanyak 6 orang. Sarana prasarana penunjang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan belum sesuai dengan standar.	Pada tahun 2023 BPBD DIY mendapat tambahan pegawai PPPK pemadam kebakaran sebanyak 6 orang. Sarana prasarana penunjang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan belum sesuai dengan standar.
D. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				
1	Kami mengapresiasi dalam paparan LKPJ 2022 telah banyak program kegiatan yang dilaksanakan dan kemitraan yang dilakukan serta melihat capaian target yang dilakukan. Permasalahan yang perlu menjadi perhatian adalah syarat kepemilikan ISO 27001 tentang standar keamanan informasi oleh Ditjen Kemendagri kepada OPD yang akan mengajukan akses data kependudukan.	1. Pemerintah Daerah DIY harus membuat program kegiatan tentang ISO 27001 tentang standar keamanan informasi.	Kegiatan terkait keamanan informasi dalam lingkup Dukcapil di tahun 2023 telah dilaksanakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam bentuk penyusunan SOP Keamanan Informasi sebagai implementasi dari sertifikasi ISO 27001 yang telah didapatkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri mengingat Dinas Dukcapil merupakan instansi pelaksana urusan admindukcapil di daerah sehingga masih berada di dalam ruang lingkup penerapan ISO tersebut.	Keamanan informasi dalam lingkup Dukcapil di tahun 2023

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		2. Pemerintah Daerah DIY harus membuat program kegiatan tentang ISO 27001 tentang standar keamanan informasi.	Telah dilakukan sosialisasi dan bimtek kepada OPD terkait dengan standar keamanan informasi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan bimtek tersebut dapat meminimalisir terhadap serangan keamanan informasi.	Bahwa dengan telah ditetapkan standar ISO 27001:2013 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) secara konsisten dan berkesinambungan terhadap seluruh prosedur kegiatan Pengelolaan Pusat Data dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Melihat kondisi terkait Kurangnya Security Awareness dari para pemangku kepentingan dan pelaksana di lapangan sehingga menimbulkan celah kerawanan pada informasi yang ada di Pemerintah Daerah, maka pada tahun 2023 disusun sebuah program kegiatan berupa sosialisasi terkait keamanan informasi bagi



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
				Organisasi Perangkat Daerah, adapun pendanaan terdapat dalam sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, Kegiatan PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, Program PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
E. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan terhadap BUMDES perlu dibuat detail agar memudahkan dalam membaca perkembangan BUMDES yang ada di DIY.	1. Pemerintah Daerah DIY harus membuat payung hukum tentang BUMDES yang mengatur dan mengklasifikasikan BUMDES agar ke depan menjadi lokomotif ekonomi desa yang profesional dan terkemuka	itindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Provinsi hanya memiliki kewenangan membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMDes Kabupaten/Kota dan lembaga kerjasama antar-Desa. Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1): "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			<p>membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Diatur lebih lanjut pada Pasal 114 “Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi: Huruf k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMDes Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.”</p> <p>Dengan demikian, Pemerintah Daerah DIY tidak mempunyai kewenangan dan/atau amanat untuk menyusun regulasi terkait pengaturan dan klasifikasi BUMDes.</p>	
2	Perlu adanya klasifikasi atau penjenjangan BUMDES untuk memudahkan dalam pembinaan.	2. Pemda DIY harus membuat payung hukum tentang BUMDES yang mengatur dan mengklasifikasikan BUMDES agar ke depan menjadi lokomotif ekonomi desa yang profesional dan terkemuka	<p>Regulasi tentang BUMDES telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Peraturan ini juga dilengkapi dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2022 tentang Formula Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Kedua regulasi ini telah mengatur secara detail semua aspek BUMDes/BUMDesMa dan tidak ada amanat untuk menyusun pengaturan lebih lanjut di tingkat daerah. Pemda DIY akan menyusun regulasi teknis terkait pedoman pembinaan dan pengembangan BUMDes pada tahun 2024 untuk lebih memberdayakan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Adanya Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan merupakan salah satu tindak lanjut atas kebutuhan payung hukum tentang BUMDes. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY sebagai <i>leading sector</i> Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berupaya melakukan perbaikan dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,</p>	Regulasi tentang BUMDes sebagai Lembaga ekonomi desa telah dicantumkan dalam Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan, dimana salah satu fokus intervensinya adalah penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian. Dalam Rencana Aksi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023-2027 Pada Level Pemerintah Daerah, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat terlibat dalam pembinaan dan pengawasan, penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Perekonomian dimana indikatornya adalah Jumlah BUMKAL yang mampu memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat Kalurahan.	
3	Perlu adanya dukungan terhadap profil desa yang terintegrasi dengan teknologi informasi yang datanya selalu <i>update</i> .	3. Pemerintah Daerah DIY harus memberikan dukungan dana yang terukur terhadap pembuatan data profil desa.	Pemda DIY memberikan dukungan dana terhadap pembuatan data profil desa melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan, Subkegiatan Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didanai melalui Dana Keistimewaan DIY. Pada subkegiatan tersebut salah satu <i>suboutputnya</i> adalah Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan (Sinkal) yang di dalamnya terdapat menu data profil desa. Sinkal dapat diakses oleh masyarakat melalui website https://sinkal.jogjaprov.go.id/ , serta diupdate oleh masing-masing pemerintah kalurahan yang sudah memiliki <i>user id</i> dan <i>password</i> .	Pembuatan data profil desa
		4. Pemerintah Daerah DIY harus melakukan penguatan sumber daya manusia lembaga kemasyarakatan di Kalurahan/Kelurahan.	Pemda DIY melakukan penguatan sumber daya manusia lembaga kemasyarakatan di Kalurahan/Kelurahan melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan, Subkegiatan Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didanai melalui Dana Keistimewaan DIY. Pada subkegiatan tersebut salah satu <i>suboutputnya</i> adalah Sosialisasi kelembagaan asli daerah sebanyak 60 kali. Pelaksanaan sosialisasi tersebut melibatkan unsur Lurah/Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan serta Ketua Dukuh.	Penguatan sumber daya manusia lembaga kemasyarakatan di Kalurahan/Kelurahan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		5. Pemerintah Daerah DIY harus membuat rencana aksi penanggulangan kemiskinan Kalurahan/Kelurahan yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota dan Pemda DIY.	<p>Angka kemiskinan di DIY dinilai semakin menurun pada Tahun 2022. Pada tahun 2023 bulan Maret, kemiskinan di DIY sebesar 11,04%. Angka kemiskinan ini berangsur menurun apabila dibandingkan dengan masa pandemi Covid-19 yang berada di titik 11,44%. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat DIY memiliki daya ungkit dan adaptasi ekonomi secara baik dan cepat. Pengutamaan terhadap penanggulangan kemiskinan telah diarahkan pada lokasi dan fokus di 15 Kapanewon sebagai penanggulangan kemiskinan dan telah didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pemetaan lokasi dan fokus berbasis Kapanewon bertujuan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat lebih terarah.</p> <p>Secara umum langkah dan strategi yang diambil oleh Pemda DIY dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan akses terhadap sumber daya. Strategi ini dikuatkan melalui mekanisme kolaborasi lintas OPD dan wilayah.</p> <p>Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan memiliki 5 fokus intervensi, dimana salah satunya adalah penguatan kegiatan untuk penanganan Kemiskinan. Maka telah disusun juga Rencana Aksi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023-2027 pada setiap level baik di level Kalurahan, Kabupaten dan Pemerintah Daerah. Peran Pemda DIY dalam fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten memegang kendali langsung terhadap fungsi pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pemerintah kalurahan antara lain melalui dukungan teknis dan asistensi yang dilaksanakan baik oleh perangkat daerah yang membidangi urusan maupun perangkat daerah yang mengampu kewilayahan (Kapanewon). Pemerintah Kalurahan sebagai subjek atau aktor utama melaksanakan Reformasi Kalurahan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Kalurahan.</p>	Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi telah disusun dalam Rencana Aksi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023-2027, dimana pada setiap level baik di level Kalurahan, Kabupaten dan Pemerintah Daerah.



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		6. Pemerintah Daerah DIY harus membuat rencana aksi penanggulangan kemiskinan Kalurahan/Kelurahan yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota dan Pemda DIY.	Pemda DIY sedang menyusun Rapergub Reformasi Kalurahan yang di dalamnya juga termasuk Reformasi Pemberdayaan Masyarakat dengan salah satu kegiatan utama adalah Penanggulangan Kemiskinan, hal ini juga dilengkapi dengan penyusunan Petunjuk Teknis Reformasi Pemberdayaan Masyarakat	Adanya rencana aksi penanggulangan kemiskinan kalurahan/kelurahan
		7. Pemerintah Daerah DIY harus membuat rencana aksi penanggulangan kemiskinan Kalurahan/Kelurahan yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah DIY.	Pemda DIY melakukan fasilitasi dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk yang berada di LKSA/LKSLU/LKSPD. Saat ini telah sukses menerbitkan 65 dokumen kependudukan berupa KTP-el, Akta lahir, dan KIA bagi anak-anak panti. Kemudian ada juga fasilitasi sidang itsbat nikah bagi penduduk yang telah melakukan perkawinan namun belum tercatat dalam catatan sipil. Kegiatan tersebut diselenggarakan di kalurahan Jetis dan Kepek Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul dengan menggandeng beberapa instansi seperti: Pengadilan Agama, KUA, serta Dinas Dukcapil Gunungkidul. Harapannya penduduk yang telah disahkan perkawinannya dapat mengakses pelayanan publik yang lain.	Masih ada masyarakat rentan yang belum memiliki dokumen kependudukan dan melaksanakan itsbat nikah
		8. Pemerintah Daerah DIY harus mendampingi Kalurahan/Kelurahan untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang berupa Master Plan Kalurahan/Kelurahan yang mengacu RPJMD dan RPJPD DIY	Pemda DIY telah melakukan penguatan sumber daya manusia lembaga kemasyarakatan di Kalurahan/Kelurahan melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa. Pada setiap subkegiatan tersebut telah dilaksanakan Rapat Kerja Pembinaan Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Desa dengan melibatkan Balai PMD dan IRE Yogyakarta.	Penguatan sumber daya manusia lembaga kemasyarakatan di Kalurahan/Kelurahan
		8. Pemerintah Daerah DIY harus mendampingi Kalurahan/Kelurahan untuk membuat Rencana	Kalurahan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan masyarakat	Pendampingan kalurahan/kelurahan untuk membuat rencana

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang berupa Master Plan Kalurahan/Kelurahan yang mengacu RPJMD dan RPJPD DIY	<p>kalurahan diperlukan reformasi kalurahan. Secara operasional, Reformasi Kalurahan kemudian diterjemahkan dalam dua pendekatan yakni: (1) Reformasi Birokrasi Kalurahan dan (2) Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.</p> <p>Reformasi Birokrasi Kalurahan (RB Kalurahan) mengacu pada perbaikan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang menekankan pada kegiatan yang sederhana namun memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perubahan diharapkan pada Pemerintahan Kalurahan, yakni meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan penyelenggaraan pelayanan sosial.</p> <p>Sementara itu Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diarahkan pada transformasi keadaan atau hasil yang ingin dicapai di Kalurahan, yaitu masyarakat Kalurahan yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.</p> <p>Untuk memastikan Reformasi Kalurahan dapat terwujud, Pemda DIY menyusun rencana aksi yang tertuang dalam <i>Road Map</i> Reformasi Kalurahan, tentunya termasuk didalamnya menyangkut peningkatan kapasitas dari sisi SDM, kelembagaan dan tata kelola kalurahan. Pelaksanaan Reformasi kalurahan tidak hanya melibatkan Pemda DIY, namun juga pemerintah kabupaten/kota serta pihak-pihak lain yang terkait.</p>	pembangunan jangka menengah dan panjang
F. Urusan Komunikasi dan Informatika				
1	Belum terintegrasinya semua layanan publik berbasis teknologi informasi	1. Perkembangan pemanfaatan teknologi dan komunikasi di segala sektor saat ini sudah sangat signifikan dan <i>progressive</i> mengubah dan	Ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.	



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	baik dalam internal Pemerintah Daerah DIY (antar Dinas/Badan) maupun secara eksternal dengan Kota Kabupaten.	menggeser paradigma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan pemanfaatan kecerdasan buatan (<i>artificial intelligence</i>) sudah mulai merevolusi berbagai sektor seperti pendidikan, riset pengetahuan dan <i>development</i> , sosial, ekonomi, kesehatan bahkan sektor pemerintahan. Sehingga diperlukan adanya Peraturan Daerah <i>Jogja Smart Province</i> di DIY sebagai Peraturan Daerah yang dapat menaungi dan menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif.	Telah ada penetapan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah <i>Jogja Smart Province</i> Tahun 2019 – 2023.	
2	Masih adanya zona <i>blank</i> yang memungkinkan seseorang tidak bisa melakukan komunikasi akibat tidak ada sinyal, perlu segera ditindak lanjuti.	2. Perkembangan pemanfaatan teknologi dan komunikasi di segala sektor saat ini sudah sangat signifikan dan progresive mengubah dan menggeser paradigma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan pemanfaatan kecerdasan buatan (<i>artificial intelligence</i>) sudah mulai merevolusi berbagai sektor	DIY telah mengadopsi teknologi bigdata dalam platform Jogjacenter. Namun memang masih diperlukan penyempurnaan di beberapa sisi, seperti SDM, teknologi, serta pembiayaan dan optimalisasi pemanfaatannya. Regulasi tentang pemanfaatan TIK melalui Perda 3 tahun 2019 dipandang masih cukup relevan, kemudian juga didukung dengan adanya pergub 46 tahun 2019 tentang JSP (<i>Jogja Smart Province</i>). Pada tahun 2023 ini juga telah dilakukan penyusunan masterplan JSP fase 2 bekerjasama dengan kemenkominfo yang nantinya hasil masterplan tersebut akan ditetapkan menjadi pergub lanjutan dari pergub 46 tahun 2019 tentang JSP (<i>Jogja Smart Province</i>) dan diperjelas melalui SK Kepala Dinas Kominfo Nomor 118/01367 tentang Pedoman Teknis Standar Pembangunan dan Pengembangan TIK SPBE	Pemanfaatan teknologi dan AI telah memiliki payung hukum, pedoman, dan standar di Pemda DIY. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pemerintahan, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, dll

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		seperti pendidikan, riset pengetahuan dan development, sosial, ekonomi, kesehatan bahkan sektor pemerintahan. Sehingga diperlukan adanya Peraturan Daerah Jogja Smart Province di DIY sebagai Peraturan Daerah yang dapat menaungi dan menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif.		
3	Banyaknya opini masyarakat yang muncul di media sosial yang terkait dengan pelayanan publik, pariwisata, pendidikan perlu disikapi dengan cepat dan bijak agar tidak berkembang luas dan berlarut-larut di media sosial.	3. Pemerintah Daerah DIY harus mengintegrasikan Program Jogja Smart Province semua aplikasi di DIY yang dikelola oleh OPD.	Dalam masterplan JSP fase 2 telah disusun rencana pengintegrasian aplikasi yang dimiliki oleh Pemda DIY secara bertahap.	Melalui integrasi aplikasi akan dapat meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi pekerjaan bahkan dapat memberikan penghematan belanja TIK
		4. Pemda DIY harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota untuk	Pemda DIY telah memasukkan rencana integrasi layanan digital dengan kabupaten kota se DIY dalam masterplan JSP fase 2. Pelaksanaan akan dimulai pada tahun 2024 sesuai timeline dalam masterplan JSP	Melalui integrasi aplikasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan digital



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		mengintegrasikan berbagai layanan digital kabupaten/ kota dalam satu sentuhan di Pemda DIY.		pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan
		5. Pemerintah Daerah DIY harus melakukan pengembangan dan penambahan jaringan penguatan sinyal telekomunikasi agar di DIY tidak ada zona blank	- Pemda DIY sudah menginisiasi pembangunan infrastruktur di area blankspot terutama di kawasan selatan. Kawasan ini tidak menarik secara ekonomi, sehingga tidak ada operator telekomunikasi yang masuk. Sehingga menjadi area blankspot. Beberapa pantai di kecamatan girisubo, kabupaten gunungkidul diinisiasi pembangunan infrastruktur Pemda DIY. Sehingga meskiun tdk ada sinyal seluler, masyarakat bisa menggunakan wifi Pemda DIY untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Selain itu dengan BKK Wifi Padukuhan pada Diskominfo Kab/Kota melalui anggaran keistimewaan juga menyasar pada kawasan-kawasan blankspot yang tidak diminati operator seluler maupun ISP Swasta.	a. Blank spot adalah daerah-daerah yang belum terjangkau atau masih kurangnya infrastruktur telekomunikasi yang ada. Dalam mengatasi pengurangan area blankspot Dinas Kominfo DIY melakukan pembangunan jaringan internet secara bertahap. Pada tahun 2023 pembangunan infrastruktur di area blankspot yaitu pada free wifi pokdarwis dan jaringan kantor SAR pantai Jungwok Gunungkidul. Untuk kedepannya Diskominfo DIY akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Diskominfo kab/kota untuk dapat menyediakan akses internet di daerah blankspot dengan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
				berkolaborasi memanfaatkan infrastruktur TIK yang sudah dibangun oleh Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot. b. Membangun semua jaringan internet SMA/SMK di wilayah Pemda DIY c. Terfasilitasi jaringan internet 438 kantor desa/kalurahan yaitu dengan cara bekerjasama dengan Diskominfo kab/kota dan menghimbau dari kantor kalurahan untuk jaringan internet dapat diturunkan dan digunakan sampai ke pedukuhan.
		6. Pemerintah Daerah DIY harus membentuk tim/unit kerja yang memantau dan menindaklanjuti setiap opini dan HOAX yang beredar di masyarakat agar segera ada jawaban/solusi.	- Secara berkala Diskominfo DIY melalui melakukan klarifikasi berita HOAX yang beredar di masyarakat, dengan mengunggah informasi yang salah di saluran informasi yang dimiliki (media sosial dan videotron) kemudian disandingkan dengan berita yang terverifikasi kebenarannya. - Diskominfo DIY Secara berkala melakukan peningkatan literasi digital kepada masyarakat, baik pelajar, komunitas maupun masyarakat secara umum, tema yang diangkat pada tahun politik ini adalah literasi digital kepemiluan agar masyarakat terhindar dari paparan berita bohong, ujaran kebencian dan hasutan yang dapat mengganggu stabilitas menjelang pelaksanaan pemilu.	Melalui kegiatan peningkatan literasi masyarakat yang bekerjasama dengan pegiat anti HOAX (MAFINDO), diharapkan masyarakat memiliki kemampuan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca, menulis



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			- Diskominfo DIY berkolaborasi dengan komunitas media sosial DIY dan pegiat anti HOAX (mafindo) untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan menengkal HOAX yang beredar di masyarakat	atau saat menyampaikan kembali informasi. Masyarakat yang semakin meningkat kemampuan literasinya akan tidak mudah terpaapr berita hoax karena dapat menajamkan nalar, memperbaiki sudut pandang dan baik dalam berkomunikasi.
	G. Kepegawaian Daerah			
1	Tidak berimbangnya kebutuhan ASN dan rekrutmen ASN yang disetujui Kemenpan-RB berdampak pada kurangnya ASN, terlebih pada setiap tahun jumlah ASN yang memasuki pensiun selalu lebih besar daripada jumlah ASN baru (rekrutmen). Untukantisipasi tersebut diangkat tenaga teknis sesuai kebutuhan yang bisa mendukung program pemerintah daerah.	1. Pemerintah Daerah DIY harus meningkatkan kualitas SDM tenaga teknis	Sudah dilakukan kolaborasi peningkatan kompetensi ASN Pemda DIY melalui: 1. Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi ASN. 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Bandiklat baik secara luring maupun daring, dan implementasi corporate university Pemda DIY di masing-masing OPD antara lain dengan webinar, bimtek dan coaching mentoring.	Terpenuhinya kompetensi SDM tenaga teknis sehingga bisa mendukung program pemerintah daerah.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		2. Pemerintah Daerah DIY harus meningkatkan kualitas SDM tenaga teknis	<p>Untuk mengatasi keterbatasan anggaran kita mendorong pelatihan menggunakan pelatihan smart learning yaitu dengan mengembangkan corporate university, sesuai Pergub No.6 Tahun 2022 tentang Corporate University.</p> <p>Tahapan yang telah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan SE No.893/1854 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University); 2. Koordinasi, fasilitasi edukasi berkala dengan tim penyelenggara di OPD (sosialisasi SE No.893/1854, sinkronisasi implementasi kebijakan corporate university, koordinasi persiapan pelatihan di OPD berbasis Corpu, koordinasi dan pelaporan capaian pelatihan OPD berbasis Corpu); 3. Pembentukan tim penjaminan mutu pelatihan pada instansi di lingkungan Pemda DIY SK Kepala Badan No. 893/1300/KPTS/Diklat/2023; Penyelenggaraan pelatihan (khususnya dalam bentuk webinar), baik yang diselenggarakan oleh OPD sendiri maupun yang diselenggarakan oleh Bandiklat DIY. 	Pelatihan teknis sudah dapat diselenggarakan oleh masing-masing OPD melalui Corporate University.
		3. Pemerintah Daerah DIY harus meningkatkan kualitas SDM pemberian jaminan kesehatan dan Jamkesos (kecelakaan kerja, Kematian, Tunjangan Hari Tua, Pensiun). Hal ini sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.	<p>ASN Pemda DIY sudah sebagai anggota Jaminan Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PNS-BPJS Kesehatan dan JKK JKM Taspen, 2. PPPK-BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 	Tersedianya jaminan kesehatan dan jamkesos SDM Pemda DIY.
H. Pendidikan dan Pelatihan				
1	Peningkatan kapasitas SDM tenaga kediklatan maupun penyelenggara melalui pelatihan,	1. Pemerintah Daerah DIY harus membuat pendidikan dan pelatihan secara berjenjang. Tujuan penjenjangan selain untuk meningkatkan pengetahuan dan promosi	Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan. Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menjadi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketugasan yang diberikan tersebut, setiap tahun Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan bentuk-bentuk	Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan dalam rangka persyaratan promosi jabatan, tetapi



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	pendidikan melalui tugas belajar dan ijin belajar, serta peningkatan kapasitas tenaga pengajar/Widyaiswar a.	jabatan juga punya tujuan lain yaitu para ASN mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan yang selalu berkembang.	Pendidikan dan Pelatihan untuk aparatur, baik Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, maupun Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas), Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Pelatihan Kepemimpinan Administrator). Pada awal tahun 2023 Bandiklat telah mendapatkan akreditasi B yang berlaku 3 tahun untuk program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II (PKN II) sehingga dapat secara mandiri menyelenggarakan pelatihan PKN II. Terkait dengan pengembangan kapasitas SDM tenaga kediklatan, untuk mengakomodir perkembangan yang ada. Bandiklat DIY telah menyelenggarakan Diklat Training Officer Course (TOC). Diklat Management of Training (MoT) baik dengan menyelenggarakan sendiri maupun melalui skema pengiriman, dan untuk peningkatan kapasitas tenaga pengajar/Widyaiswara dilaksanakan melalui diklat ToF/Workshop pengajar/penyelenggara untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas), Diklat Latsar CPNS berkerjasama dengan LAN RI. Selain itu secara aktif Widyaiswara mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pengajar, contoh: penyusunan buku, penyusunan karya ilmiah.	juga menasar pada kompetensi yang dibutuhkan didalam menjalankan tugas jabatan. Salah satunya dengan reuiu kurikulum untuk menyikapi perkembangan kebutuhan kompetensi jabatan.
I. Urusan Persandian				
1	Pengembangan program-program persandian agar ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah DIY, dimana banyak hal yang membutuhkan	Pemerintah Daerah DIY harus meningkatkan SDM persandian.	Telah mengikuti peningkatan SDM persandian yang diselenggarakan oleh BSSN.	Melalui peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, diharapkan dapat

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	program persandian seperti ini.			menambah pengetahuan dan keterampilan personil Persandian sehingga mampu memberikan manfaat dalam menjalankan tugasnya terkait pengamanan informasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
III. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan				
A. Urusan Kerjasama Antar Daerah				
1	Membangun komunikasi dan koordinasi dengan daerah perbatasan telah dilakukan dengan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten di perbatasan wilayah.	1. Pemerintah Daerah DIY harus melakukan peningkatan kerjasama dalam membangun jaringan pariwisata.	<p>Kerjasama yang sudah dilakukan selama ini dalam format Pentahelix (Akademisi, Pelaku pariwisata, Komunitas, Media, Pemerintah) baik dengan Perjanjian Kerjasama maupun tidak. Dinas Pariwisata juga melakukan kolaborasi dengan pelaku pariwisata dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Keterlibatan dan peran <i>stakeholder</i> pariwisata adalah sebagai Narasumber, Tim Juri, Tim Kelompok Kerja (Pokja), Tim Asesor, dan Tim Pendamping kegiatan Dinas Pariwisata DIY.</p> <p>Dinas Pariwisata DIY berkoordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam rangka memfasilitasi penyusunan MoU/KSB Pemda DIY dengan STIPRAM Yogyakarta tentang Kerja Sama Peningkatan dan Pengembangan Potensi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p><i>Stakeholder</i> pariwisata yang terlibat antara lain:</p> <p>-BAPPEDA DIY, BPKA DIY, Inspektorat DIY, DPRD DIY, Sekretariat DPRD DIY, Biro Adm. Perekonomian dan SDA, Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Koperasi & UMKM DIY, DP3AP2 DIY, DPMPTSP DIY/Kab/Kota, Dinas Pariwisata Kab/Kota</p> <p>-GIPI DIY, HPI DIY, BPPD DIY, HILDIKTIPARI DIY, KADIN DIY, Pawiyatan Pamong, LSP Gunadarma, LSP PARS, PAPINDO DIY, Kwarda DIY</p>	Tindak lanjut yang dilakukan Dinas Pariwisata DIY dapat mengatasi permasalahan kerjasama dalam membangun jejaring pariwisata.



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			<p>-PUSPAR UGM, SV UGM, USD, UBSI, STP AMPTA, STIEPAR API</p> <p>-Forkom Desa Wisata DIY, Forkom Pokdarwis DIY</p> <p>Pemda DIY juga menjadi anggota MPU (Mitra Praja Utama) dimana anggotanya saling berkolaborasi dalam peningkatan sektor pariwisata. Selain itu, Pemda DIY juga tergabung dalam forum kerjasama pariwisata EATOF (East Asia Inter Regional Tourism Federation) yang beranggotakan 10 negara Asia Timur dengan maksud untuk melakukan kerjasama di bidang pariwisata dengan provinsi anggota EATOF .</p>	
		<p>2. Pemerintah Daerah DIY harus melakukan peningkatan kerjasama dalam membangun jaringan transportasi.</p>	<p>Koordinasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan kerjasama untuk pembangunan jaringan transportasi telah dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas PUP ESDM Provinsi, Dinas PU ESDM Kabupaten Kota, Unsur Kepolisian, Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas III DIY (Kementerian Perhubungan) serta instansi terkait lainnya</p>	<p>Beberapa hasil Keputusan Forum LLAJ yang telah dilaksanakan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penutupan U turn di Depan RSUD Sleman dengan menggunakan water barrier guna meningkatkan keselamatan lalu lintas. 2. Pemasangan ulang water barrier di Simpang Mirota Godean sebagai pengganti median sementara guna meningkatkan kelancaran lalu lintas. 3. Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Underpass Kentungan bersama dengan PjN dan BPTD Kelas III DIY berupa penutupan bukaan jalur

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
				<p>lambat dan cepat sebelah timur underpass kentungan guna mengurangi Tingkat kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi Underpass Kentungan</p> <p>4. Melakukan Uji Coba Contra Flow di depan Stasiun Tugu (Jalan Pasar Kembang) guna meningkatkan integrasi antara layanan kereta api dengan bus Trans Jogja Melakukan perpanjangan rute Trans Jogja jalur 6A, 6B, 10 serta ekstensi jalur 15 ke Palbapang Bantul.</p>
		3. Pemerintah Daerah DIY harus melakukan peningkatan kerjasama dalam membangun jaringan transportasi yang menyatu dengan Provinsi Jawa Tengah dalam optimalisasi Bandara YIA.	Pemda DIY dengan Pemda Jateng telah ada Kerjasama yg MoU-nya telah ditandatangani pada tahun 2019, dan telah ditindak lanjuti dengan beberapa Perjanjian Kerja Sama. Atas rekomendasi DPRD akan dikoordinasikan dengan BAPPEDA DIY (Cq. Bidang Sarpras) dan Dinas Teknis Sektor yg membidangi utk melakukan kajian dalam rangka mewujudkan jaringan transportasi yg menyatu wilayah DIY-Jateng dlm rangka optimalisasi keberadaan Bandara YIA.	Tindak lanjut kerja sama
B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah				
1	Forkompimda merupakan sebuah forum komunikasi di tingkat provinsi dan	1. Pemerintah Daerah DIY harus melakukan peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketentraman,	Satpol PP terus melakukan kerjasama dengan instansi yang memiliki keterkaitan dengan usaha penanganan gangguan trantibum serta penegakan hukum, seperti Polda DIY, Polairud, Basarnas, Kejaksaan Tinggi. Selain itu dilakukan pula Forum Komunikasi antar Satpol PP	Penanganan Gangguan Trantibum serta Penegakan Hukum



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	kabupaten/kota untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Pembentukan Forkopimda diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26 dan dibentuk setiap satu tahun sekali.	hendaknya dilakukan setiap tahun dan pencapaian kesepakatan agenda program dan kegiatan, khususnya beberapa tindakan untuk pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.	Kabupaten/Kota di DIY guna menjaga sinergitas dalam peningkatan ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di DIY.	
		1. Pemerintah Daerah DIY harus melakukan peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketentraman, hendaknya dilakukan setiap tahun dan pencapaian kesepakatan agenda program dan kegiatan, khususnya beberapa tindakan untuk pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.	Peningkatan koordinasi di bidang keamanan, ketertiban, dan ketentraman telah dilaksanakan secara rutin dalam rangka pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui optimalisasi FKDM, Raker tim Penanganan Konflik Sosial, serta Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik yang dikoordinasikan secara langsung oleh Badan Kesbangpol DIY.-Optimalisasi aplikasi Sidasiscam (sistem informasi update data potensi konflik berbasis kecamatan) yang berfungsi untuk menyampaikan update data potensi konflik di wilayah DIY secara real time untuk menjadi bahan masukan dalam proses perumusan kebijakan yang cepat, efektif dan tepat sasaran.	Masih ditemui konflik sosial budaya yang terjadi di wilayah DIY, utamanya menjelang gelaran Pemilu Serentak Tahun 2024 yang membuat suhu politik di wilayah DIY mulai menghangat.
1	C. Pembinaan Batas Daerah Penetapan batas wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa	1. Pemda DIY harus mempertegas batas daerah dan mengimplementasikannya pada	Berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan batas Desa (Tim PPBD) tingkat Provinsi oleh Gubernur dan	Penegasan batas daerah

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	<p>Tengah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006.</p> <p>Kegiatan yang dilakukan adalah memelihara batas-batas kawasan, memperjelas batas kawasan, dan kerjasama daerah antar kawasan.</p> <p>Perhatian Pemerintah Daerah DIY untuk membangun kawasan desa dalam wilayah perbatasan dengan provinsi lainnya, harus menjadi perhatian khusus. Kantong-kantong kemiskinan dan ketertinggalan infrastruktur pembangunan banyak ada di kawasan perbatasan.</p> <p>Tentu saja prioritas pembangunan desa kawasan perbatasan</p>	<p>peta geospasial desa untuk kepentingan pemerintah desa yang berbatasan agar dapat menjadi pedoman masyarakat dalam melakukan tata batas daerah, khususnya untuk pemerintahan desa yang berbatasan dan kepentingan penduduknya</p>	<p>bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Provinsi. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan oleh Tim PPBD Kabupaten/Kota. Seluruh Kabupaten/Kota di DIY telah melaksanakan kegiatan penegasan batas Kalurahan/Kelurahan dan masih berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kab. Kulon Progo sudah melaksanakan penegasan batas Kalurahan pada 17 Kalurahan dan penyusunan peraturan bupati tentang batas kalurahan pada 12 kalurahan; Kab. Bantul sudah menyusun peraturan bupati tentang batas kalurahan pada 75 kalurahan, hanya saja perlu dilakukan revisi pada peraturan bupati tersebut karena belum sesuai dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016; Kab. Gunungkidul sudah melaksanakan penegasan batas Kalurahan pada 54 Kalurahan; Kab. Sleman sudah melaksanakan penegasan batas Kalurahan pada 53 Kalurahan dan penyusunan peraturan bupati tentang batas kalurahan pada 15 kalurahan; dan Kota Yogyakarta sudah melaksanakan penegasan batas Kelurahan pada 13 Kelurahan. <p>Pembinaan dan pengawasan sebagaimana tugas Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa Provinsi dilaksanakan dengan cara pemberian pedoman umum, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan supervisi. Pada tahun 2023 Pemda DIY telah melaksanakan Sosialisasi dan Asistensi teknis serta verifikasi hasil pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/kelurahan dengan peserta Tim PPBD Kabupaten/Kota dan perwakilan Kalurahan/Kelurahan dan menghadirkan narasumber dan verifikator dari Badan Informasi Geospasial. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Februari 2023 dan September 2023. Hasil dari pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa yang sudah dilaksanakan, dilaporkan oleh Pemda DIY kepada Menteri Dalam Negeri</p>	



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	menjadi penting, khususnya untuk menyongsong rencana pembangunan jangka panjang hingga 2038 yang melakukan konsolidasi sumberdaya kawasan pedesaan.		minimal 2 (dua) kali setiap tahun. Selain itu, melalui Dana Keistimewaan urusan Pertanahan, Pemda DIY juga mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa di Kabupaten/Kota se DIY.	
			Pemda DIY mempertegas batas daerah melalui Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didanai melalui Dana Keistimewaan DIY. Pada subkegiatan tersebut telah diterbitkan Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023 yang sudah diunggah pada website: https://birotapem.jogjaprovo.go.id/ dan dapat diakses melalui http://sipilar-birotapem.jogjaprovo.go.id/kode_wilayah . Seluruh masyarakat dapat mengakses website tersebut untuk menjadi pedoman dalam melakukan tata batas daerah, khususnya untuk pemerintah desa yang berbatasan dan kepentingan penduduknya.	Perlu membuat pedoman tata batas daerah
D. Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya Yang Dilaksanakan Oleh Daerah				
1	Kinerja lembaga pelaksana di atas telah memenuhi target realisasi dari program yang direncanakan pada masing-masing lembaga.	1.Munculnya tantangan peningkatan kasus ODHA pada difabel, Orang dengan Gangguan Jiwa, Ibu Rumah Tangga perlu disikapi dengan bijak dan langkah taktis oleh KPAD DIY agar mampu menekan laju pertumbuhan	Dalam rangka menghadapi peningkatan kasus ODHA pada difabel, ODGJ, ibu rumah tangga telah dilakukan upaya sebagai berikut: a. Program peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan partisipasi warga/keompok masyarakat termasuk kelompok difabel telah dilaksanakan oleh Pemda DIY, dengan kolaborasi pentahelix melibatkan Akademisi, LSM HIV, dunia usaha dan masyarakat. KPAD terus melakukan pendampingan dan memberikan edukasi kepada kelompok difabel terkait	Meningkatkan pemahaman dan koordinasi dalam menangani kasus ODHA pada difabel, Orang dengan Gangguan Jiwa, dan Ibu Rumah Tangga.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		ODHA di DIY. Oleh karena itu Pemda DIY harus membuat program peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan partisipasi warga/keompok masyarakat.	<p>kesehatan reproduksi beserta upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.</p> <p>b. Program tersebut juga diintegrasikan dengan Program Penanggulangan Kesehatan Jiwa yang dikoordinasikan oleh Tim Pengarah Kesehatan Jiwa DIY yang mendorong penguatan partisipasi warga/keompok masyarakat melalui program Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat dalam Penanggulangan Kesehatan Jiwa.</p> <p>c. Dalam melakukan tatalaksana pada balita sakit, dilakukan pendekatan dengan manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Saat ini, dalam MTBS telah dilakukan penambahan untuk masalah HIV pada anak. Pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil dilakukan secara komprehensif, termasuk pemeriksaan HIV. Upaya pencegahan penularan dilakukan melalui Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA).</p>	
			Dinas Sosial memberikan bimbingan dan pendampingan psikososial, khususnya ODHIV untuk membangun ketahanan mental sosial mereka setelah kembali ke masyarakat. Akan tetapi Shelter tersebut masih memerlukan peningkatan aksesibilitas terutama bagi penyandang disabilitas Layanan yang diberikan berupa pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan aktifitas hidup sehari-hari, bimbingan fisik, mental, dan sosial, layanan perbekalan kesehatan dasar, rujukan ke fasyankes dan pemulangan bagi PPKS yang siap untuk kembali ke masyarakat.	Dinas Sosial DIY yang berperan dalam mengembalikan fungsi sosial Orang dengan HIV/AIDS telah menyediakan Shelter bekerjasama dengan Yayasan Kebaya. Dinas Sosial DIY juga bekerjasama dengan LSV Victory dalam upaya penjangkauan kepada kelompok khusus. Sesuai Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, Dinas Sosial dapat memfasilitasi koordinasi dan mendukung ODHIV dari sisi pemberdayaan



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		4. Pemerintah Daerah DIY harus membuat kajian yang komprehensif agar layanan umum menjadi lebih efektif dan efisien	<p>Kondisi pelayanan publik di Pemda DIY menuju kepada arah positif peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Pemda DIY yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB RI pada tahun 2023 menunjukkan angka 4,57 yang masuk dalam kategori Pelayanan Prima dengan unit lokus sampel evaluasi adalah KPPD DIY di Kab. Bantul (4,68), Dinas Sosial (4,59) dan RS Paru Respira (4,54).. Indeks pelayanan publik meliputi penilaian/evaluasi terhadap aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.</p> <p>Selanjutnya, berdasarkan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2022 dari lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menunjukkan bahwa pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY masuk dalam kategori Zona Hijau (nilai 91.15) Kategori A dengan Opini “Kualitas Tertinggi”. Indikator penilaian/evaluasi oleh ORI meliputi Kompetensi Penyelenggara Layanan, Sarana Prasarana, Pengelolaan Pengaduan, dan Ketersediaan Standar Pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p> <p>No Tahun Hasil Evaluasi ORI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2016 Zona Merah 2. 2017 Zona Kuning 3. 2018 Zona Hijau 4. 2021 Zona Hijau 5. 2022 Zona Hijau 6. 2023 Zona Hijau <p>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada tahun 2022 menunjukkan angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemda DIY sebesar 86,67, dengan kategori B (Baik). SKM dilaksanakan oleh 97</p>	<p>Berdasarkan hasil tindak lanjut sebagaimana tersebut dalam kolom tindak lanjut OPD, Pemda DIY telah mendampingi unit layanan untuk konsisten meningkatkan kualitas layanannya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (dokumen pelayanan, kebijakan layanan, kondisi SDM, Sarpras, Pengaduan, dan Inovasi Pelayanan) dengan hasil predikat tertinggi kepatuhan oleh ORI, dan urutan pertama Indeks Pelayanan Publik kategori Pemda secara nasional. 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh unit layanan dengan hasil nilai IKM konsisten naik dari tahun ke tahun Inventarisasi, pendampingan, dan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			<p>(sembilan puluh lima) unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah responden sebanyak 28.506, meningkat dari jumlah responden 2022 sebesar 25.394 . SKM dilaksanakan sampai dengan bulan Agustus 2023. Hal ini berarti bahwa kinerja pelayanan publik di Pemerintah Daerah DIY mengalami peningkatan kearah yang lebih baik.</p> <p>Tahun Nilai IKM Mutu Layanan Kinerja Layanan 2014 75,02 B Baik 2015 77,11 B Baik 2016 78,26 B Baik 2017 77,97 B Baik 2018 79,61 B Baik 2019 82,69 B Baik 2020 83, 64 B Baik 2021 84,73 B Baik 2022 85,35 B Baik 2023 86,67 B Baik</p> <p>Dalam hal inovasi pelayanan publik, Pemda DIY melalui Biro Organisasi telah mendampingi Perangkat Daerah dan UPT dalam rangka seleksi dan keikutsertaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) sejak tahun 2014 s.d. tahun 2023. Proses seleksi menggunakan alat kertas kerja inovasi sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik. Pada tahun 2022 terdapat 40 kertas kerja inovasi pelayanan publik yang telah diimplementasikan lebih dari 2 tahun dan 38 kertas kerja inovasi pelayanan publik yang diimplementasikan kurang dari 2 tahun. Berdasarkan hasil pencermatan terdapat 18 kertas kerja inovasi pelayanan publik kategori umum dan 2 kertas kerja inovasi pelayanan publik kategori khusus yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan pendampingan intensif dalam penyusunan proposal sebagai persiapan kompetisi inovasi tahun</p>	pemantauan inovasi pelayanan publik.



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			<p>2023. Adapun hasil dari keikutsertaan Pemda DIY dalam KIPP dari tahun ke tahun ditunjukkan dalam data berikut:</p> <p>2014 TOP 99 inovasi Pelayanan Publik pada Pengembangan Aplikasi Database Klien <i>Online</i> Panti Sosial Karya Wanita TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik</p> <p>2015 TOP 25 inovasi Pelayanan Publik dengan judul “Jogja Plan”</p> <p>2016 TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dengan judul “Proses Pengesahan 5 Tahunan di SAMSAT Pembantu Maguwo”</p> <p>2017 Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dengan judul Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas Terpadu</p> <p>2018 TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dengan judul " E posti dan Samsat Desa, Solusi terbaik Layanan Anda"</p> <p>2019 TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dan UNSPA 2020 dengan judul "Menggapai Mimpi sahabat Rimba Kolaborasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam" – Balai KPH DIY</p> <p>TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik dan UNPSA 2020 "SEPATU JOLIFA" (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) – Balai Layanan Perpustakaan DIY</p> <p>2020 Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dengan judul "Melintas Batas Ruang Kelas Bersama JOGJA BELAJAR CLASS" – Balai TEKKOMDIK DIY</p> <p>5 Outstanding Achievement Of Public Service Innovation 2020 dengan judul "JOGJAPLAN: Perencanaan Pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ORDINATE(Konsisten, Responsif, Dinamis, dan Akuntabel) dengan e-planning" – BAPPEDA DIY</p> <p>2021 TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik dengan judul “Rajutan Sibakul Jogja” Cara Jitu Usaha Tangguh dengan Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha"-Dinas Koperasi dan UKM DIY</p> <p>2022 TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik dengan judul "Difabel Siaga bencana" – Dinas Sosial DIY</p> <p>2023 TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dengan judul "Momenku Siap</p>	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			Berkemas" – Dinas Dikpora DIY TOP 15 Inovasi Pelayanan Publik dengan judul "Jogja Belajar Class" – Balai Tekkomdik Disdikpora DIY	
		Pemerintah Daerah DIY harus membuat Konsep Mitigasi Bencana Berbasis masyarakat yang terukur yang dimiliki oleh PMI seyogyanya menjadi acuan dalam pendidikan kebencanaan berbasis sekolah maupun masyarakat, guna membangun masyarakat tangguh dan tanggap bencana. Perlu penguatan penanaman jiwa kerelawanan melalui jalur pendidikan (Palang Merah Remaja).	Tindak lanjut dengan koordinasi Dengan Kabupaten dan Kwarda untuk pelibatan Generasi Muda yaitu anak-anak Muda baik melalui masyarakat/ komunitas/ Sekolah dapat dilakukan rekrutment, pendampingan, pelatihan untuk menguatkan kapasitas bagaimana dalam Penanggulangan Bencana, sehingga sejak dini di usia muda masyarakat sudah dapat berperan dalam PB. Sebagaimana yang sudah dilakukan Plan Indonesia yang telah membantu dalam pembentukan SPAB melakukan pergerakan dalam bentuk Jogja Muda Tangguh Bencana (komunitas Muda Peduli Bencana)	
IV. Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan				
1. Urusan Kelembagaan				
1	BKK Dana Keistimewaan diberikan kepada Pemerintahan Kalurahan yang memiliki atribut tertentu.	1.Pemerintah Daerah DIY harus meningkatkan intensitas koordinasi dengan lembaga di tingkat kabupaten/kota agar capaian maksimal dan juga monitoring secara berkala. Selaras dengan mandat Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 bahwa Pemerintah Daerah DIY bertugas melakukan	Telah dilakukan koordinasi bulanan dengan kabupaten/kota setiap awal bulan melalui Bappeda dan BKAD kabupaten/kota. Selain itu monitoring evaluasi bulanan dilakukan melalui sistem informasi kenes.jogjaprovo.go.id sehingga permasalahan lebih cepat teridentifikasi. secara berkala juga dilakukan koordinasi ke lapangan untuk mengetahui progres secara fisik.	Kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan dapat secara cepat teridentifikasi sehingga penyelesaian permasalahan lebih cepat pula.



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		monitoring pelaksanaan urusan keistimewaan.		
		2. Pemerintah Daerah DIY harus membuat produk hukum tentang Pemanfaatan Dana Keistimewaan di Kelurahan/ Kalurahan guna pemeratakan pembangunan Kelurahan/ Kalurahan di DIY. agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara Kelurahan/ Kalurahan yang memiliki atribut tertentu dan yang belum memiliki atribut	Sudah ditetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan.	Pemerintah Kalurahan mempunyai pedoman terkait tata cara pengajuan dana keistimewaan, apa saja yang bisa diakses hingga proses perencanaan dan pelaporannya. Hal ini memudahkan pengusulan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan keistimewaan oleh pemerintah kalurahan.
		3. Pemerintah Daerah DIY harus membuat produk hukum tentang Pemanfaatan Dana Keistimewaan di Kelurahan/ Kalurahan guna pemeratakan pembangunan Kelurahan/ Kalurahan di DIY. agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara Kelurahan/ Kalurahan yang memiliki atribut tertentu dan yang belum memiliki atribut	Ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY melakukan pemantapan dan pembulatan substansi materi yang diatur dalam Produk Hukum Daerah	
2	Banyak lembaga yang memiliki platform	5. Pemerintah Daerah DIY harus mensinergikan dan mengintegrasikan platform	Terkait dengan keistimewaan sudah dilakukan integrasi sistem perencanaan dengan aplikasi “Pangripta” dan sistem pengendalian dengan aplikasi “Kenes”.	Satu data informasi perencanaan keistimewaan untuk

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	digital dan belum terintegrasi.	digital Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota agar tidak menimbulkan potensi kebingungan di masyarakat.		Pemda DIY, Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Pangripta) serta Satu data informasi pengendalian keistimewaan untuk Pemda DIY, Kabupaten/Kota (Kenes).
3	Masih ada ketidakselarasan penyebutan dalam produk hukum daerah, diantaranya Desa, Kalurahan dan Kalurahan.	4. Pemerintah Daerah DIY harus membuat <i>grand design</i> dan target seluruh Kalurahan dan Kalurahan memiliki atribut Mandiri Budaya, misal pada akhir jabatan tahun 2027, seluruh Kalurahan dan Kalurahan memiliki atribut Mandiri Budaya.	Pemda DIY sudah menetapkan Pergub Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Pergub ini memberikan pedoman terkait penetapan desa/keluarahan budaya serta pengembangan, pemberdayaan dan pelestarian segala kekayaan budaya yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan Budaya. Terkait target desa mandiri budaya sudah ada targetnya pada Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY Tahun 2022-2027	Terdapat pedoman bagi pemerintah kalurahan terkait dengan tahapan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai desa/kalurahan mandiri budaya. hal ini memudahkan kalurahan dalam mempersiapkan tahapan tersebut.
2. Urusan Kebudayaan				
1	Penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat diwujudkan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	1. Pemerintah Daerah DIY harus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh Kalurahan di DIY untuk menjadi ujung tombak dalam rangka menerjemahkan kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.	Dengan mengalokasikan penganggaran dana Keistimewaan langsung BKK ke Kalurahan.	Mengoptimalkan potensi budaya yang ada di masyarakat.
		2. Pemerintah Daerah DIY harus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh Kalurahan di	Dalam rangka pelestarian, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal di DIY, telah dilakukan upaya-upaya strategis antara lain melalui revitalisasi Kalurahan/Kelurahan Berpotensi Budaya. Upaya	Pada tahun 2023, dilakukan pendampingan terhadap 76 Kalurahan



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		DIY untuk menjadi ujung tombak dalam rangka menerjemahkan kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.	tersebut dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kalurahan/Kelurahan Budaya. Peraturan tersebut mengamanatkan perlunya Pembinaan dan Pengembangan Kalurahan/Kelurahan Budaya. Amanat tersebut direalisasikan melalui kegiatan pelestarian, pembinaan dan pengembangan antara lain dilakukan dengan pendampingan tenaga teknis, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penyelenggaraan even dan kompetisi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan harapan sebagai sarana untuk melestarikan, membina dan mengembangkan budaya yang ada di masyarakat. Dalam rangka pengembangan kebudayaan secara luas, program kegiatan Kalurahan/Kelurahan budaya ini merupakan salah satu bentuk program pengembangan budaya yang bersifat <i>intangible</i> . Program pengembangan Kalurahan/Kelurahan budaya ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter dan nilai-nilai keyogyakartaan sehingga terangkat dan terimplementasi dalam kehidupan masyarakat di lingkungan Kalurahan/Kelurahan budaya.	Budaya dan 23 BKK Kalurahan (Kalurahan WBTB, Arsitektur Kesejarahan, Desa Mandiri Budaya, Rintisan Desa Mandiri Budaya, dan pembangunan Balai Budaya. Pada akhir tahun 2023, jumlah Desa/Kalurahan Budaya meningkat menjadi 100 Kalurahan yang akan dikembangkan dan dibina di tahun 2024 melalui subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya.
2	BKK Kalurahan diberikan dengan kriteria tertentu (Desa Balai Budaya, Desa Mandiri Budaya, Desa Maritim, dll)	3. Pemerintah Daerah DIY harus melakukan pemerataan pelibatan Kelurahan dan Kalurahan di DIY untuk mensukseskan agenda Kebudayaan.	Melakukan pengalokasian anggaran dana Keistimewaan untuk mensukseskan agenda budaya baik untuk OPD DIY, OPD Kabupaten/Kota dan BKK Kalurahan.	Menggerakkan potensi yang ada di masyarakat serta dapat melestarikan kearifan lokal di masyarakat seperti acara Gelar Merti Dusun yang sudah dilaksanakan di semua Dusun di Kabupaten Kulon Progo.
		4. Pemerintah Daerah DIY harus melakukan pemerataan pelibatan Kelurahan dan Kalurahan di DIY untuk	Pemda DIY mendukung pemerataan pelibatan Kelurahan dan Kalurahan di DIY untuk menyukseskan agenda Kebudayaan melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang memiliki dua kegiatan, yakni:	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		mensukseskan agenda Kebudayaan.	<p>1. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Subkegiatan Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan telah menghasilkan pembangunan Papan Penanda Keistimewaan di setiap kalurahan serta Pemasangan Quick Response System (QRS Code) Pada Papan Penanda Keistimewaan untuk memudahkan aksesibilitas profil kalurahan.</p> <p>2. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman, Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan menghasilkan pembahasan Hari Jadi DIY pada Propemperda Tahun 2023.</p>	
3	Selama ini Dana Keistimewaan masih condong pada pembangunan fisik (taman budaya dan sarpras), event dan pementasan.	5. Pemerintah Daerah DIY harus mengawal dan mendampingi Kelurahan dan Kalurahan/Desa untuk menjadi Desa Mandiri Budaya dan atau Desa dengan predikat yang lain.	Mengalokasikan anggaran dana Keistimewaan untuk mensukseskan pengembangan Desa Mandiri Budaya salah satunya melalui rintisan Desa Mandiri Budaya terdiri dari Desa Preneur, Desa Prima, Desa Budaya, Desa Wisata .	Desa Mandiri Budaya semakin meningkat dari tahun ke tahun .
		6. Pemerintah Daerah DIY harus mengawal dan mendampingi Kelurahan dan Kalurahan/Desa untuk menjadi Desa Mandiri Budaya dan atau Desa dengan predikat yang lain.	<p>Pemda DIY mendukung tata kelola kalurahan melalui penguatan aparatur pemerintahan kalurahan pada aspek manajemen, pengelolaan keuangan, perencanaan hingga monev melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Subkegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa; Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa; dan Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>Pada setiap subkegiatan tersebut telah dilaksanakan:</p> <p>1. Rapat Kerja Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa dengan penguatan manajemen pada aspek inovasi pelayanan publik di Kalurahan.</p>	Penguatan aparatur pemerintahan kalurahan



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			<p>2. Rapat Kerja Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>3. Rapat Kerja Pembinaan Penyusunan Rancangan Perencanaan</p> <p>4. Pembangunan Desa dengan melibatkan Balai PMD dan IRE Yogyakarta.</p> <p>5. FGD Kajian Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan yang melibatkan akademisi dan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta, melibatkan <i>audience</i> dari Dinas PMK Kabupaten dan Pawiyatan Pamong.</p> <p>Selain itu, Pemda DIY juga mendukung melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan, Subkegiatan Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didanai melalui Dana Keistimewaan DIY. Pada subkegiatan tersebut salah satu <i>suboutputnya</i> adalah Peningkatan kapasitas aparaturnya Pemerintah Kalurahan melalui pelaksanaan Focuss Group Discussion Kajian Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan yang menghadirkan narasumber dari akademisi dan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta, melibatkan <i>audience</i> dari Dinas PMK Kabupaten dan Pawiyatan Pamong.</p>	
		7. Pemerintah Daerah DIY harus mengawal dan mendampingi Kelurahan dan Kalurahan/Desa untuk menjadi Desa Mandiri Budaya dan atau Desa dengan predikat yang lain.	<p>Salah satu indikator keberhasilan dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan, dapat dilihat dari indikator peningkatan jumlah Desa Budaya yang naik status menjadi Desa Mandiri Budaya yang merupakan tujuan akhir dalam pengembangan desa budaya. Tujuan dari pembangunan Desa Mandiri Budaya adalah untuk mewujudkan kemandirian desa dalam menyejahterakan masyarakat desa melalui pengembangan budaya, wisata, partisipasi secara inklusif terhadap perempuan, pengembangan wirausaha desa, dan ketahanan pangan. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk indikator Desa Budaya yang naik status menjadi Desa Mandiri Budaya adalah 25 Desa dan dapat terealisasi sebesar 32 Desa Mandiri Budaya. Terdapat penambahan sebanyak 7 Desa Mandiri Budaya pada tahun 2023. Desa mandiri budaya tersebut antara lain Desa Mandiri Budaya Mulyodadi, Desa Mandiri</p>	<p>Dimulai tahun 2023 dan selanjutnya dalam tiga tahun ke depan, Pemerintah Daerah DIY melakukan pendampingan dan mengampu Desa Mandiri Budaya Mulyodadi dan Desa Mandiri Budaya Argomulyo, melalui kegiatan BKK Kalurahan Dana Keistimewaan. Disamping melakukan</p>

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			<p>Budaya Kepek, Desa Mandiri Budaya Srigading, Desa Mandiri Budaya Katongan, Desa Mandiri Budaya Argomulyo, Desa Mandiri Budaya Giripurwo, dan Desa Mandiri Budaya Sidorejo. Penetapan Desa Mandiri Budaya tersebut tertuang dalam SK GUB DIY Nomor 245/kep/2023. Kegiatan di luar predikat Desa Budaya sesuai dengan Kebijakan Keistimewaan "12 Peta Jalan Grand" yang salah satunya adalah Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan potensi Kalurahan (Pelaksanaan 11 Kebijakan strategis Gubernur) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan, Pasal 6:</p> <p>(1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat; dan 2. Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dalam Urusan Keistimewaan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya; 2. Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya; 3. Balai Budaya; 4. Arsitektur Yogyakarta; 5. Cagar Budaya; 6. Warisan Budaya tak Benda; 7. Karangkopek; 8. Pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis; 9. Penerapan administrasi tanah desa; 10. Penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan; dan/atau 11. Budaya Maritim. 	<p>pendampingan Desa Mandiri Budaya, juga dilakukan pendampingan pada BKK Kalurahan di Kalurahan Wonokromo (Warisan Budaya takBenda; Sate Klathak), dan Kalurahan Pleret (Arsitektur Yogyakarta; Situs dan Kawasan Kerajaan Mataram Islam Kerta-Plered).</p>
		8.Pemerintah Daerah DIY harus membuat produk hukum tentang Pemanfaatan Dana Keistimewaan di Kelurahan/	Produk hukum berupa Peraturan Gubernur No.37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan.	Tata Kelola pemanfaatan dana Keistimewaan semakin tertata .



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		Kalurahan guna pemeratakan pembangunan Kelurahan/ Kelurahan di DIY.		
		9.Pemerintah Daerah DIY harus membuat produk hukum tentang Pemanfaatan Dana Keistimewaan di Kelurahan/ Kelurahan guna pemeratakan pembangunan Kelurahan/ Kelurahan di DIY.	Ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sesuai dengan tugas dan fungsi, melakukan pemantapan dan pembulatan substansi materi yang diatur dalam Produk Hukum Daerah.	
		10.Pemerintah Daerah DIY perlu segera memaksimalkan Taman Budaya untuk mensosialisasikan kebudayaan DIY.	Menyelenggarakan <i>event-event</i> pagelaran kesenian rutin di Taman Budaya.	Melalui penyelenggaraan even pagelaran seni dapat turut serta mensejahterakan masyarakat khususnya para seniman.
		11.Pemerintah Daerah DIY perlu segera memaksimalkan Taman Budaya untuk mensosialisasikan kebudayaan DIY.	Pada tahun 2021 dilaksanakan penyelesaian Kajian Materi Teknis Perencanaan Pusat Pengembangan Kebudayaan (PPK) Yogyakarta. Dengan adanya pergantian tahun dan perkembangan berbagai kebutuhan maka dilakukan review Materi Teknis Perencanaan PPK Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2023. Review dilaksanakan untuk menguatkan dan memperbaharui konsep, arahan, dan pedoman (<i>guidelines</i>) aspek-aspek strategis yang akan menjadi acuan perencanaan dan pembangunan Pusat Pengembangan Kebudayaan (PPK) Yogyakarta agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini. Pada level kabupaten/kota, Taman Budaya Gunungkidul dan Taman Budaya Kulonprogo sudah beroperasi, sementara Pembangunan Taman Budaya Bantul dan Taman Budaya Sleman masih dalam proses pembangunan, sedangkan Taman Budaya Kota Yogyakarta sudah selesai dibangun di akhir tahun 2023. Terselenggaranya event lokal, regional, nasional, internasional di Taman Budaya Yogyakarta (TBY).	Ekosistem kebudayaan secara garis besar didukung oleh tiga hal, yaitu sarana prasarana budaya, even budaya, dan sumberdaya manusia atau talenta budaya. Ketiga hal tersebut saling terkait dan saling mendukung satu dan lainnya. Sarana prasarana budaya yang cukup penting adalah keberadaan <i>venue</i> untuk melaksanakan even atau aktifitas budaya. Salah

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
				satu program strategis Gubernur DIY berkaitan dengan hal tersebut adalah pembangunan Taman Budaya se-DIY. Diharapkan di DIY dan setiap kabupaten/kota tersedia taman budaya yang representatif untuk aktifitas kebudayaan di level kabupaten/kota dan DIY. Dengan adanya Taman Budaya di DIY dan kabupaten/kota, diharapkan dapat mendorong peningkatan aktifitas kebudayaan di masing-masing kabupaten/kota dan DIY.
		12. Pemerintah Daerah DIY harus mengoptimalkan pembangunan SDM tidak hanya pada pelaku seni, namun juga masyarakat desa.	Mengikutsertakan masyarakat serta para pelaku UMKM pada setiap acara even kebudayaan.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
		13. Pemerintah Daerah DIY harus membuat regulasi yang mengatur pembudayaan Budaya Mataram berbasis dusun/ kampung.	- Melalui pengelolaan Desa Budaya - Pembudayaan Budaya Mataram dengan adanya rembug desa, Jaga Warga, dan Musrenbang.	Penguatan budaya lokal bercirikan kebudayaan Mataram seperti kegiatan rembug desa, Jagawarga.
3. Urusan Pertanahan				



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
1	Pemda DIY telah melaksanakan Urusan Pertanahan untuk memfasilitasi:	1.Selaras amanat UU Nomor 13 Tahun 2012, maka Pemerintah Daerah DIY harus segera melakukan penataan tentang Pertanahan—Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten— di DIY guna memberikan sumbangsih maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat DIY.	Kegiatan yang sudah dilakukan sebagai amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2012 dan turunannya melalui Perdais Nomor 1 Tahun Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, antara lain berupa upaya pensertifikatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan dimana sampai dengan tahun 2023 ini sudah tercapai sekitar 25.993 bidang tanah yang sudah didaftarkan untuk sertifikasi dengan rincian antara lain: 1. Pendaftaran Tanah SG/PAG sejumlah 13.958 (bertambah 121 bidang dari realisasi tahun 2022); 2. Pendaftaran Penyesuaian Sertifikat Tanah Kalurahan sejumlah 9.699 (bertambah 2.016 bidang dari realisasi tahun 2022) ; 3. Pendaftaran sertifikat tanah kalurahan pertama kali sejumlah 2.336 bidang (bertambah 1.195 bidang dari realisasi tahun 2022)	Proses sertifikasi tanah kalurahan, kadipaten dan dan tanah kalurahan ini bertujuan untuk tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum terhadap bidang tanah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan khususnya untuk peningkatan kesejahteraan.
		2.Selaras amanat UU Nomor 13 Tahun 2012, maka Pemerintah Daerah DIY harus segera melakukan penataan tentang Pertanahan—Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten— di DIY guna memberikan sumbangsih maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat DIY.	Kegiatan Penatausahaan pertanahan (pendaftaran tanah), penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan pertanahan menjadi prioritas kegiatan pertanahan di setiap tahunnya	Kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan dapat teridentifikasi dan telah tersusun rentang target penyelesaian permasalahan pertanahan kasultanan dan kadipaten DIY
2	Penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten b.	3.Pemda DIY harus memaksimalkan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten agar	Setiap tahun melalui dukungan dana keistimewaan telah dilakukan sosialisasi terkait dengan regulasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kalurahan, yaitu: 1. Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan; 2. Pergub Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;	Menyebarluaskan informasi dan juga memberikan pemahaman kepada <i>stakeholder</i> terkait dan masyarakat terkait dengan regulasi pengelolaan dan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	Pembentukan regulasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang belum dimanfaatkan dapat digunakan oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.	3. Pergub Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
		4. Pemda DIY harus memaksimalkan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten agar Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang belum dimanfaatkan dapat digunakan oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.	Adanya kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Tanah SG PAG dan Tanah kalurahan dan produk produk hukum yang terkait dengan pertanahan baik PERDAIS No 1 tahun 2017 dan Pergub 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah kalurahan	Melalui kegiatan sosialisasi dapat memberikan pandangan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3	Masih ada ketidakselarasan penyebutan dalam produk hukum daerah, diantaranya Desa, Kelurahan dan Kalurahan, misalnya dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY No 1 Tahun 2017	5. Pemda DIY harus melakukan perubahan Peraturan Daerah/Istimewa, terutama Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, khususnya terkait kata Desa agar selaras dengan kelembagaan di DIY yang	Proses review akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan OPD terkait, yaitu Paniradya Kaistimewan, Bappeda DIY, Biro Organisasi dan Biro Tata Pemerintahan terkait dengan perubahan kelembagaan menyesuaikan dengan Perda is DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Memberikan kesamaan dalam penyebutan nomenklatur kelembagaan sehingga selaras dengan regulasi kelembagaan yang terbaru. Sehingga terhadap regulasi yang masih menggunakan penyebutan nomenklatur



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didalamnya masih menggunakan kata Desa.	menggunakan Kelurahan dan Kalurahan.		kelembagaan yang lama, maka perlu untuk dilakukan penyeselarasan.
		6. Pemda DIY harus melakukan perubahan Peraturan Daerah/Istimewa, terutama Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, khususnya terkait kata Desa agar selaras dengan kelembagaan di DIY yang menggunakan Kelurahan dan Kalurahan.	Akan ditindaklanjuti melalui review perda no 1 tahun 2018 tentang kelembagaan karena yang mengatur nomenklatur Kata desa menjadi Kalurahan secara spesifik di urusan kelembagaan	Terjadi keselarasan dalam penggunaan nomenklatur untuk wilayah setingkat desa/kelurahan di DIY agar menghindari terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari
	4. Urusan Tata Ruang			
1	Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan	1. Pemerintah Daerah DIY dalam melakukan Urusan tata ruang harus memberikan ruang ekspresi bagi nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta. Agar identitas Keistimewaan Yogyakarta benar-benar terbaca oleh masyarakat DIY maupun dari luar DIY. Selain itu penting dilakukan	1. Penyusunan RDTR, RTBL, KLHS 2. Pemrioritasan kegiatan di Satuan Ruang Strategis 3. Pembangunan RTLH	Kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah DIY maupun Kabupaten/kota mengenai perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang telah ada payung hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	dengan sumber daya manusia, dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, proyeksi rencana penataan ruang nasional dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut telah selaras dengan rencana tata ruang DIY yang tertuang dalam RTRW DIY Tahun 2019-2039 yaitu sebagai berikut: (a) Pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi; (b) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya; (c) Pengembangan, pembangunan, pemantapan dan	pengendalian dalam hal pemanfaatan tata ruang di DIY		



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	<p>revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus; (d) Perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan kawasan; (e) Pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan; (f) Peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budi daya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada; dan (g) Penataan kawasan sesuai dengan daya</p>			

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
2	<p>dukung dan daya tampung kawasan.</p> <p>Pemerintah mensyaratkan RTH (Ruang Terbuka Hijau) untuk Kota adalah 30% (dengan rincian 20% ruang publik dan 10% ruang privat) dari luas wilayah sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. di dalam rencana penyediaan RTH di wilayah Kota Yogyakarta sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta. Terkait kriteria RTH yang direncanakan dalam RTRW Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan</p>	<p>2. Pemda DIY dalam melakukan Urusan tata ruang harus memberikan ruang ekspresi bagi nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta. Agar identitas Keistimewaan Yogyakarta benar-benar terbaca oleh masyarakat DIY maupun dari luar DIY. Selain itu penting dilakukan pengendalian dalam hal pemanfaatan tata ruang di DIY.</p>	<p>Dalam upaya untuk menindaklanjuti terkait dengan pengaturan dalam Perdas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten telah keluar beberapa regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan nilai-nilai keistimewaan di Yogyakarta, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043, yang didalamnya mengatur terkait dengan ruang darat wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Pelaksanaannya maka perlu diatur strategi pengembangan wilayah satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebagai satu kesatuan ruang yang harmonis demi menjaga keserasian dan keterpaduan kawasan strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Telah ditetapkannya Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043 yang didalamnya telah mengacu pada pengaturan tata ruang laut dan darat; 3. Telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Penataan Ruang sebagai wujud dalam peningkatan pengendalian pemanfaatan tata ruang di DIY; 	<p>Dengan adanya regulasi yang sudah ditetapkan pada tahun 2023 terkait dengan pengaturan tata ruang. Hal ini diharapkan bisa memberikan kepastian baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian tata ruang.</p>



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.	3. Penyelenggaraan penataan ruang harus bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan.		Terwujudnya penyelenggaraan tata ruang yang sesuai dengan regulasi sehingga diharapkan bisa terwujudnya keselarasan antara pembangunan dan kesesuaian tata ruang.
		4. Penyelenggaraan penataan ruang harus bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan	1. Beberapa aktivitas yang dilakukan yaitu penataan sempadan pantai yang ditetapkan melalui Pergub 2. Penanganan Monyet Ekor Panjang	1. Kendala/ permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah DIY maupun Kabupaten/kota di sepanjang sempadan pantai telah ada payung hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan 2. Penanganan Monyet Ekor Panjang agar tidak terjadi kerusakan terhadap lahan pertanian masyarakat dan menjadikan daya tarik potensi wisata baru
		6. Pemda DIY harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	Sebagai wujud dukungan dan komitmen dalam penyediaan Ruang terbuka Hijau (RTH), maka dalam Perda 10 Tahun 2023 telah diatur secara lebih rinci salah satunya bahwa pengembangan kegiatan yang diperbolehkan haruslah mengembangkan ruang terbuka hijau di dalamnya. Misalnya	Terwujudnya Ruang terbuka Hijau di DIY yang semakin banyak dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			dalam Pasal 88, bahwa kegiatan arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri salah satunya adalah kegiatan ruang terbuka hijau.	peningkatan kualitas hidup manusia.
		7. Pemerintah Daerah DIY harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang	Telah terbangunnya RTH (Ruang Terbuka Hijau) Patuk di Kabupaten Gunungkidul	Adanya Ruang Terbuka Hijau di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas warga masyarakat
REKOMENDASI PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN				
		Pemerintah Daerah DIY harus memiliki data tunggal yang saling terintegrasi antar OPD sehingga dalam pelaksanaan program tidak saling tumpang tindih tapi saling melengkapi	Data program dan kegiatan keistimewaan merupakan data tunggal yang berisi program kegiatan yang dilaksanakan OPD DIY, Kab Kota, Kalurahan. Pelaksana Dana Keistimewaan berpedoman pada Berita Acara Kesepakatan antara Pusat dan Pemda DIY. Data dalam berita acara tersebut kemudian diturunkan dalam BA BKK Kabupaten Kota dan Kalurahan . Setiap pencermatan sudah dilakukan antisipasi agar tidak ada tumpang tindih kegiatan	Rentang kendali yang semakin panjang
		Pemerintah Daerah DIY harus meningkatkan kerjasama program dengan Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota yang bersinergi satu sama lain dalam satu kesatuan langkah	Pemerintah Daerah telah meningkatkan kerjasama dengan Pemkab dan Pemkot dalam menyelenggarakan keistimewaan, menyelesaikan permasalahan -permasalahan krusial seperti kemacetan, kemiskinan, persampahan, pengangguran dengan mendorong pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk inovasi dalam penyelesaian persoalan persoalan tersebut. Contoh: Penyelesaian PKL Malioboro.	kurangnya antusias dan kreativitas pelaksana keistimewaan
		Pemerintah Daerah DIY harus membuat Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang terukur.	Pemerintah Daerah DIY dalam penyelenggaraan keistimewaan telah mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Daerah dengan program program lebih tepat sasaran dan terukur, menentukan kapanewon-kapanewon percontohan untuk data kondisi sosial ekonomi.	Parameter pengukuran kemiskinan yang berbeda.
			Pemda DIY telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2023-2027 yang saat ini sedang dalam masa fasilitasi Kemendagri. juga dengan dokumen Rencana Aksi Tahunan sesuai Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. juga	Rencana Aksi penanggulangan kemiskinan yang terukur



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			dengan melakukan monev berkala secara triwulan melalui mekanisme Pengendalian Pembangunan. Selain itu, dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan di DIY, DIY menyusun Rencana Aksi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan (KEPGUB 414 Th 2022) yang memuat 7 rencana aksi.	
		Pemerintah Daerah DIY harus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan di DIY. Kesejahteraan yang digambarkan melalui indikator-indikator ekonomi seperti tingkat kemiskinan, tingkat kesenjangan, tingkat pengangguran dan sebagainya merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta dukungan dari masyarakat merupakan bentuk upaya mewujudkan tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.	Pemerintah Daerah DIY telah berupaya meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan di DIY. Kesejahteraan yang digambarkan melalui indikator-indikator ekonomi seperti tingkat kemiskinan, tingkat kesenjangan, tingkat pengangguran dan sebagainya merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta dukungan dari masyarakat merupakan bentuk upaya mewujudkan tujuan negara dan tujuan pengaturan keistimewaan.	perbedaan persepsi dampak even even budaya.
			Pemda DIY telah melibatkan Pemerintah Pusat dalam hal ini TNP2K dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan melakukan koordinasi secara rutin baik tematis kemiskinan maupun Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan secara rutin di semua sektor pembangunan	Peningkatan koordinasi dalam mengatasi kemiskinan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		Pemerintah Daerah DIY harus membuat Rencana Aksi Daerah pemanfaatan dana keistimewaan yang terukur dengan mengedepankan keterbukaan, kesesuaian antara tujuan dengan jenis program.	Pemerintah DIY sudah menyusun dokumen perencanaan grand desain keistimewaan melalui Pergub 131 tahun 2021 tentang Grand Desain Keistimewaan DIY 2022-2042, rencana pemanfaatan Dana Keistimewaan mendukung indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD, RKPD.	ketidaksinkronan arah kebijakan penyelenggaraan urusan keistimewaan.
		Optimalisasi pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengentasan kemiskinan khususnya dalam urusan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat DIY.	Pemerintah Daerah telah mengarahkan pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk pengentasan kemiskinan khususnya dalam urusan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat DIY melalui optimalisasi pemanfaatan SRS keistimewaan sesuai potensi kawasan dan dipadukan dengan pariwisata, misalnya durian di Tonogoro, kakao di Nglanggeran, Kleco, Hargowilis, Lumbung Mataraman, Budaya Bahari, BKK Desa Mandiri Pangan.	terlalu sempitnya pemahaman tentang orientasi pemanfaatan Dana Keistimewaan dan pemahaman tentang kebudayaan.
		Pemerintah Daerah DIY harus memiliki data tunggal yang saling terintegrasi antar OPD sehingga dalam pelaksanaan program tidak saling tumpang tindih tapi saling melengkapi.	Data program dan kegiatan keistimewaan merupakan data tunggal yang berisi program kegiatan yang dilaksanakan OPD DIY, Kab Kota, Kalurahan. Pelaksana Dana Keistimewaan berpedoman pada Berita Acara Kesepakatan antara Pusat dan Pemda DIY. Data dalam berita acara tersebut kemudian diturunkan dalam BA BKK Kabupaten Kota dan Kalurahan . Setiap pencermatan sudah dilakukan antisipasi agar tidak ada tumpang tindih kegiatan.	Rentang kendali yang semakin Panjang.
		Pemerintah Daerah DIY harus meningkatkan kerjasama program dengan Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota yang bersinergi satu sama lain dalam satu kesatuan Langkah.	Pemerintah Daerah DIY telah meningkatkan kerjasama dengan Pemkab dan Pemkot di DIY dalam menyelenggarakan keistimewaan, menyelesaikan permasalahan -permasalahan krusial seperti kemacetan, kemiskinan, persampahan, pengangguran dengan mendorong pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk inovasi dalam penyelesaian persoalan persoalan tersebut. Contoh: Penyelesaian PKL Malioboro.	Kurangnya antusias dan kreativitas pelaksana keistimewaan.
		Pemerintah Daerah DIY harus melakukan pengukuran keberhasilan Dana Keistimewaan yang lebih	Pemerintah Daerah DIY sudah mulai melakukan pemetaan, menganalisa dampak keberhasilan pemanfaatan dana Keistimewaan baik langsung maupun langsung, bahkan sejak dalam perencanaan sudah ditanyakan	Dapat diketahui dampak kinerja program keistimewaan pada pembangunan di DIY.



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		proporsional yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengukur dampak langsung (<i>direct impact</i>) dari lima urusan yang menjadi kewenangan dalam pengimplementasian Dana Keistimewaaan DIY.	proyeksi dampak yang akan diperoleh dengan program dan kegiatan tersebut. Bappeda (Bidang Pengendalian) dalam melaksanakan desk timbal balik kinerja triwulanan selalu menempatkan agenda pelaksanaan lima urusan keistimewaan menjadi salah satu topik bahasan yang utama. Baik pada evaluasi kinerja OPD maupun Kab/Kota, termasuk evaluasi efektivitas, dampak dan keberlanjutan program yang didanai dari dana keistimewaan.	Pengukuran dampak dana keistimewaan
		Pemerintah Daerah DIY harus melakukan monitoring dan evaluasi dampak kinerja program keistimewaan.	Pemda sudah melakukan monitoring dan evaluasi dampak kinerja program keistimewaan melalui kunjungan lapangan, verifikasi kinerja, membuat kajian dampak keistimewaan.	Dapat diketahui dampak kinerja program keistimewaan pada pembangunan di DIY.
V. Kinerja Bidang Ekonomi Pemerintah DIY				
	1. Pendapatan Asli Daerah DIY tahun 2022 telah mencapai angka di atas tahun 2019, angka tertinggi sebelum Pandemi Covid-19.	1. PAD Pemerintah Daerah DIY harus ditingkatkan.	Dalam penyusunan target pendapatan pada penyusunan APBD Pemda DIY selalu berupaya untuk meningkatkan PAD, hal ini dapat terlihat pada penyusunan APBD Perubahan TA 2023 dimana Target PAD ditentukan sebesar 2.343.114.981.005,00 atau naik sebesar 3,52% dari realisasi PAD TA 2022 yaitu sebesar 2.263.431.316.669,58	1. Pendapatan Asli Daerah DIY tahun 2022 telah mencapai angka di atas tahun 2019, angka tertinggi sebelum Pandemi Covid-19.
	2. Dibandingkan dengan proyeksi dalam RPJMD Tahun 2017-2022, PAD Tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak mencapai target dalam RPJMD DIY	2. Capaian PAD tahun lalu menjadi bahan target tahun berikutnya dengan nilai yang lebih besar dalam APBD Pemerintah Daerah DIY.	Capaian PAD tahun anggaran sebelumnya dijadikan dasar dalam menentukan target PAD pada tahun anggaran berikutnya, pada penentuan target PAD tahun anggaran 2023 perubahan ditargetkan PAD sebesar 2.343.114.981.005,00 atau naik sebesar 3,52% dari realisasi PAD TA 2022 yaitu sebesar 2.263.431.316.669,58	
	3. Porsi PAD dalam APBD DIY harus ditingkatkan, capaian	3. Prosentase PAD dalam APBD DIY ditingkatkan menjadi 43% pada tahun 2023.	Prosentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada TA 2023 Perubahan adalah sebesar 40,28% atau meningkat sebesar 1,45% dari	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	dari rerata 34%, tahun 2022 sudah di atas 38%.		kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD murni tahun 2023 sebesar 38,83%.	
VI. Pertumbuhan Ekonomi				
	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi DIY yang positif harus dipertahankan agar perekonomian DIY pertumbuhannya terus di atas pertumbuhan nasional dan bisa berdampak mengurangi angka kemiskinan di DIY.	Penanggulangan Kemiskinan di DIY juga melibatkan OPD sektor perekonomian dengan harapan meningkatkan perekonomian warga baik warga miskin maupun warga potensial ekonomi sebagai pengungkit kesejahteraan	Peningkatan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan
		2. Sektor yang tumbuh positif tertinggi pada tahun 2022 yaitu lapangan usaha transportasi dan pergudangan, jasa lainnya dan penyediaan makan dan minum harus dipertahankan.	Sesependapat dengan rekomendasi yang disampaikan bahwa capaian pertumbuhan PDRB yang tinggi perlu dipertahankan atau lebih tingkatkan kembali. Berdasarkan data pertumbuhan PDRB DIY menurut lapangan usaha bahwa dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan PDRB untuk usaha transportasi dan pergudangan merupakan capaian tertinggi yaitu mencapai 18, 26%. hal ini juga berarti bahwa jenis lapangan usaha transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDRB DIY sebesar 5,15% disusul oleh jasa lainnya sebesar 15,04% dan penyediaan akomodasi, makanan dan minum sebesar 12,40% di tahun 2022.	Mempertahankan pertumbuhan positif sektor ekonomi
		3. Sektor pariwisata dan dunia Pendidikan di DIY harus dijaga kondusifitas bagi pertumbuhan ekonomi DIY.	Beberapa upaya guna menjaga kondusifitas dunia pendidikan di DIY dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi DIY antara lain yaitu dengan peningkatan mutu pendidikan, pengembangan program keahlian dalam pembelajaran siswa, serta pengembangan muatan kewirausahaan. Peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan meningkatkan kualitas calon tenaga kerja, yaitu dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, inovatif, dan siap bersaing di pasar tenaga kerja. Pengembangan program keahlian dalam pembelajaran siswa dilakukan bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri guna menerapkan	Adanya upaya peningkatan mutu pendidikan, pengembangan program keahlian dalam pembelajaran siswa, serta pengembangan kewirausahaan diharapkan dapat



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Melalui sistem pembelajaran ini diharapkan para lulusan menjadi calon-calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mampu memperkuat ekonomi terutama di tingkat lokal. Melalui pengembangan kewirausahaan, para siswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dalam berkreasi merintis usaha mandiri dan diharapkan dapat membuahkan para wirausaha-wirausaha muda mandiri.	menghasilkan lulusan pendidikan menengah yang kompeten, baik dalam penerapan keilmuan yang dimiliki maupun untuk pengembangan kapasitas dalam dunia kerja
		4.Sektor pariwisata dan dunia Pendidikan di DIY harus dijaga kondusifitas bagi pertumbuhan ekonomi DIY.	Untuk menjaga kondusifitas sektor pariwisata, Pemda DIY telah melakukan kolaborasi dengan pelaku pariwisata sebagai upaya deteksi dini dan tindak lanjut atas segala isu yang sekiranya bisa berdampak bagi citra pariwisata DIY. Manajemen informasi dan pemasaran dilakukan juga untuk memperkuat branding pariwisata DIY. Tentu saja, pemasaran tersebut disertai dengan aktivitas penciptaan produk pariwisata yang berkualitas seperti melalui peningkatan kapasitas SDM, industri, destinasi hingga penyelenggaraan daya tarik/ <i>event</i> pariwisata. Perhatian terhadap situasi pariwisata di DIY juga menjadi perhatian Pemerintah Pusat juga mengingat DIY merupakan bagian kunci dari Destinasi Super Prioritas Borobudur. Dengan berkolaborasi bersama, Pemerintah Daerah dan Pusat melakukan program/kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan DPSP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan menjadi berskala internasional. Intervensi yang telah dan sedang berproses mencakup pembangunan infrastruktur, konektivitas, kapasitas SDM/Industri dan pengembangan daya tarik wisata itu sendiri	Kondusifitas sektor pariwisata di DIY
		5.Sektor pariwisata dan dunia Pendidikan di DIY harus dijaga kondusifitas bagi pertumbuhan ekonomi DIY.	Dispar DIY bekerjasama dan bersinergi dengan <i>stakeholder</i> terkait dengan menggelar kegiatan bersama antar sekolah/kampus untuk menumbuhkan sikap bersahabat antar pelajar. Sebagai salah satu komitmen Dinas Pariwisata DIY terhadap potensi pariwisata dari para pelajar, maka pada tahun 2023, Dinas Pariwisata menyelenggarakan LOLA Fest yang dilaksanakan pada tanggal 22 September bertempat di Fakultas Filsafat UGM.	Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY berupa penyelenggaraan LOLA Fest yang bertempat di Fakultas Filsafat UGM dapat mengatasi

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan																																																
				permasalahan kerukunan antar pelajar di DIY sebagai upaya dalam mempertahankan kondusifitas pertumbuhan ekonomi di DIY																																																
VII. Kinerja BUMD DIY																																																				
A. PT Bank BPD DIY																																																				
Laba untuk Pemerintah Daerah DIY;	1. Pemenuhan Modal Pemerintah Daerah DIY yang harus dipenuhi sampai tahun 2025 sebesar Rp958.832.000.000,00 harus diberikan kajian kemampuan keuangan Daerah dan Analisa keuntungan untuk Pemerintah Daerah DIY berdasarkan Kajian dalam situasi pasca Pandemi Covid-19 dan pemulihannya.	Kapasitas fiskal merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD, yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan kemampuan keuangan Daerah sebesar Rp2,33 T. Mendasarkan pada kemampuan tersebut maka dimungkinkan untuk pemenuhan kewajiban penyertaan modal pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Perda Nomor 14 Tahun 2018. Proyeksi kinerja PT. Bank BPD DIY setelah terpenuhi modal dasar sebesar Rp4 T adalah sebagai berikut:																																																		
<table><tr><th>Tahun</th><th>Aset</th><th>Kredit</th><th>Laba Bersih</th><th>Modal Inti</th><th>ATMR</th></tr><tr><td>2021</td><td>15.765.333</td><td>8.468.086</td><td>271.549</td><td>2.733.792</td><td>9.335.744</td></tr><tr><td>2022</td><td>16.850.899</td><td>9.120.398</td><td>223.072</td><td>3.222.290</td><td>10.265.855</td></tr><tr><td>2023</td><td>17.766.000</td><td>10.488.458</td><td>373.000</td><td>3.551.404</td><td>11.805.733</td></tr><tr><td>2024</td><td>20.000.000</td><td>12.061.726</td><td>392.000</td><td>4.000.000</td><td>13.576.593</td></tr><tr><td>2025</td><td>22.000.000</td><td>13.870.985</td><td>412.000</td><td>4.290.587</td><td>15.613.082</td></tr><tr><td>2026</td><td>23.835.576</td><td>15.951.633</td><td>441.714</td><td>4.822.994</td><td>17.955.045</td></tr><tr><td>2027</td><td>25.824.304</td><td>18.344.378</td><td>473.571</td><td>5.421.466</td><td>20.648.301</td></tr></table>					Tahun	Aset	Kredit	Laba Bersih	Modal Inti	ATMR	2021	15.765.333	8.468.086	271.549	2.733.792	9.335.744	2022	16.850.899	9.120.398	223.072	3.222.290	10.265.855	2023	17.766.000	10.488.458	373.000	3.551.404	11.805.733	2024	20.000.000	12.061.726	392.000	4.000.000	13.576.593	2025	22.000.000	13.870.985	412.000	4.290.587	15.613.082	2026	23.835.576	15.951.633	441.714	4.822.994	17.955.045	2027	25.824.304	18.344.378	473.571	5.421.466	20.648.301
Tahun	Aset	Kredit	Laba Bersih	Modal Inti	ATMR																																															
2021	15.765.333	8.468.086	271.549	2.733.792	9.335.744																																															
2022	16.850.899	9.120.398	223.072	3.222.290	10.265.855																																															
2023	17.766.000	10.488.458	373.000	3.551.404	11.805.733																																															
2024	20.000.000	12.061.726	392.000	4.000.000	13.576.593																																															
2025	22.000.000	13.870.985	412.000	4.290.587	15.613.082																																															
2026	23.835.576	15.951.633	441.714	4.822.994	17.955.045																																															
2027	25.824.304	18.344.378	473.571	5.421.466	20.648.301																																															



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan																														
			<p>Proporsi realisasi deviden terhadap realisasi penyertaan modal selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut (dalam Miliar)</p> <table><thead><tr><th>No</th><th>Tahun</th><th>Realisasi Penyertaan Modal (Rp)</th><th>Realisasi Deviden (Rp)</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>2019</td><td>164,44</td><td>74,98</td><td>47,62</td></tr><tr><td>2.</td><td>2020</td><td>101</td><td>93,86</td><td>48,97</td></tr><tr><td>3.</td><td>2021</td><td>112,06</td><td>83,67</td><td>49,26</td></tr><tr><td>4.</td><td>2022</td><td>173,675</td><td>89,81</td><td>47,24</td></tr><tr><td>5.</td><td>2023</td><td>300</td><td>106,60</td><td>51,93</td></tr></tbody></table>	No	Tahun	Realisasi Penyertaan Modal (Rp)	Realisasi Deviden (Rp)	%	1.	2019	164,44	74,98	47,62	2.	2020	101	93,86	48,97	3.	2021	112,06	83,67	49,26	4.	2022	173,675	89,81	47,24	5.	2023	300	106,60	51,93	
No	Tahun	Realisasi Penyertaan Modal (Rp)	Realisasi Deviden (Rp)	%																														
1.	2019	164,44	74,98	47,62																														
2.	2020	101	93,86	48,97																														
3.	2021	112,06	83,67	49,26																														
4.	2022	173,675	89,81	47,24																														
5.	2023	300	106,60	51,93																														
1. Tahun 2019 karena jumlah setoran modal Pemerintah Daerah lebih kecil dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (prosentase).	2. Hasil laba pada Bulan April-Desember 2022 mohon dijelaskan.		<div><p>Laba Bank BPD DIY Periode April - Desember 2022</p><table><thead><tr><th>Periode</th><th>Laba (Rp Miliar)</th></tr></thead><tbody><tr><td>April</td><td>111,798</td></tr><tr><td>Mei</td><td>133,869</td></tr><tr><td>Juni</td><td>177,551</td></tr><tr><td>Juli</td><td>202,016</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>232,805</td></tr><tr><td>September</td><td>262,020</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>291,188</td></tr><tr><td>November</td><td>321,525</td></tr><tr><td>Desember</td><td>362,452</td></tr></tbody></table></div> <p>Laba Bank BPD DIY pada bulan April-Desember telah memenuhi target sesuai rencana Bisnis Bank tahun 2022.</p>	Periode	Laba (Rp Miliar)	April	111,798	Mei	133,869	Juni	177,551	Juli	202,016	Agustus	232,805	September	262,020	Oktober	291,188	November	321,525	Desember	362,452											
Periode	Laba (Rp Miliar)																																	
April	111,798																																	
Mei	133,869																																	
Juni	177,551																																	
Juli	202,016																																	
Agustus	232,805																																	
September	262,020																																	
Oktober	291,188																																	
November	321,525																																	
Desember	362,452																																	
2. Deviden Tahun 2021 menurun karena Pandemi Covid-19	3. Kinerja PT Bank BPD DIY dalam periode 2022-2027 mohon disampaikan target kinerja dividen untuk DPRD DIY.		<p>Proyeksi Dividen PT Bank BPD DIY sesuai dengan RPJMD DIY tahun 2024-2027 adalah:</p> <p>Tahun 2024: Rp104.643.245.025,00 Tahun 2025: Rp114.496.683.839,00 Tahun 2026: Rp117.757.060.150,00 Tahun 2027: Rp123.644.913.158,00</p>																															

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan						
	3. Tahun 2022 meningkat Rp10.805.225.543,07 (11,28%) karena kebijakan pemerintah terhadap Pandemi Covid-19 sudah stabil.	4. Tugas Bank BPD DIY dalam ikut mengatasi problem DIY: angka kemiskinan, rasio gini, ketimpangan wilayah perlu diterjemahkan dalam program dan target yang jelas.	<p>Bank BPD DIY turut membantu penanganan permasalahan sosial ekonomi melalui penyaluran KUR dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat DIY. Penyaluran dana CSR Bank BPD DIY terbagi ke dalam empat sektor sebagai berikut:</p> <p>Sektor Pendidikan: Beasiswa pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi di wilayah DIY, Bantuan sarana & prasarana sekolah, Bantuan sekolah ramah anak, Bantuan modal wirausaha muda & pengembangan entrepreneurship di beberapa perguruan tinggi</p> <p>Sektor Kesehatan: Bantuan pengadaan ambulance, Bantuan pembuatan sumur bor & pipanisasi, Bantuan pengadaan armada pengangkut sampah, Sektor Lingkungan Hidup, Sosial & Ekonomi, Bantuan pembangunan taman, jalan & trotoar (fasilitas publik), Bantuan renovasi rumah tidak layak huni, Bantuan pembangunan infrastruktur obyek wisata</p> <p>Berdasarkan Perda DIY Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perda DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD dan PT Asuransi Bangun Askrida, maka rencana penambahan modal pada PT Bank BPD DIY pada tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut:</p> <table> <tr> <th>Tahun Anggaran</th> <th>Jumlah Setoran Modal</th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Rp300.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>Rp358.825.000.000</td> </tr> </table>	Tahun Anggaran	Jumlah Setoran Modal	2024	Rp300.000.000.000	2025	Rp358.825.000.000	
Tahun Anggaran	Jumlah Setoran Modal									
2024	Rp300.000.000.000									
2025	Rp358.825.000.000									
	4. Modal yang telah disetor Pemda DIY Pada PT BPD DIY sampai Tahun 2022 Rp1.081.175.000.000,00									
	5. Data dalam Buku LKPJ 2022 tabel 2.31 (hal 2-56 sama dengan data dalam buku LKPJ AMJ tahun 2017-2022 tabel 3.25 hal 43, sementara data dihitung sampai per Mei tahun 2022.		Deviden BUMD yang disetor kepada Pemda DIY pada tahun anggaran 2022 merupakan kinerja perusahaan pada tahun buku 2021. Pada LKPJ AMJ tahun 2017-2022, menggunakan data per Mei 2022 yang mana pada bulan Mei 2022 laporan keuangan BUMD tahun buku 2021 telah disusun dan telah didapatkan angka bagian laba dari tahun buku 2021 yang akan disetorkan kepada Pemda DIY di tahun anggaran 2022. sehingga ketika penyusunan LKPJ Pemda tahun anggaran 2022 di bulan Desember 2022, angka bagian laba yang diterima tidak mengalami perubahan.							



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	Data ini menimbulkan laba pada bulan April-Desember 2022, kenapa tidak dicantumkan?			
	B. PT Anindya Mitra Internasional (AMI)			
	1. Unit usaha; Unit Percetakan, Unit Pertambangan, Unit Pariwisata, Unit Realty, Unit Air Minum dan Unit Transportasi.	1. Laporan dari unit usaha yang menghasilkan laba harus dijelaskan sehingga bisa dilihat unit penghasil laba yang efisien.	Unit Usaha yang menghasilkan laba pada tahun 2022 yaitu Unit Percetakan sebesar Rp162,374,335.14 Unit Tambang sebesar Rp300,688,207.05 Unit Air Minum sebesar Rp240,938,738.31 Unit Realty sebesar Rp2,521,925,501.69 Unit Transportasi sebesar Rp1,424,517,623.38	
	2. Mohon penjelasan laba PT AMI bulan April – Desember 2022 karena data sama dengan LKPJ AMJ 2022 terhitung pada Mei 2022	2. Mohon penjelasan laba PT AMI bulan April – Desember 2022 karena data sama dengan LKPJ AMJ 2022 terhitung pada Mei 2022	Deviden BUMD yang disetor kepada Pemda DIY pada tahun anggaran 2022 merupakan kinerja perusahaan pada tahun buku 2021. Pada LKPJ AMJ tahun 2017-2022, menggunakan data per Mei 2022 yang mana pada bulan Mei 2022 laporan keuangan BUMD tahun buku 2021 telah disusun dan telah didapatkan angka bagian laba dari tahun buku 2021 yang akan disetorkan kepada Pemda DIY di tahun anggaran 2022. sehingga ketika penyusunan LKPJ Pemda tahun anggaran 2022 di bulan Desember 2022, angka bagian laba yg diterima tidak mengalami perubahan.	
	3. Modal Pemda DIY pada PT AMI sampai Tahun 2021 Rp31.144.910.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan penyeteroran moda sebesar	3. Kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah DIY perlu disampaikan Analisa keuntungan dan Analisa dampak Pandemi Covid-19 pada kemampuan keuangan DIY.	sesuai Perda Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyertaan modal kepada PT AMI, Pemda DIY belum memenuhi penyertaan modal kepada PT AMI dikarenakan pada saat ini belum ada rencana pengembangan usaha di PT AMI. Pemenuhan penyertaan modal akan dilakukan pada saat ada rencana pengembangan usaha yang feasible.	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	Rp18.854.090.000,00			
	4. Rata-rata laba Deviden pertahun Rp1,153,524,595.20	4. Kinerja PT AMI dalam menghasilkan laba harus ditingkatkan minimal naik 10%.	Pada tahun 2022 laba PT AMI menurun dikarenakan ada beberapa beban biaya yang harus dibayarkan antara lain pengembalian bagian keuntungan dari subsidi dan biaya kompensasi sebagai akibat berakhirnya Kerjasama Malioboro Mall Dimana PT AMI memiliki Sebagian lahan dan harus membayar kompensasi sesuai perjanjian yang dibuat.	
	5. Laba tertinggi diperoleh pada tahun 2019 dan tahun 2022 sudah melebihi target	5. Laporan Laba sebelum dibagi Deviden untuk Pemerintah Daerah DIY perlu dicantumkan dalam LKPJ.	Laba bersih setelah pajak PT AMI tahun 2022 adalah sebesar Rp1,407,321,347.12	
	Prosentasi kinerja laba pertahun dibandingkan modal disetor 3,7 %	Perluasan layanan Bus Trans Jogja sampai Kulon Progo dan fasilitas di Bandara New Yogyakarta perlu dilakukan.	Layanan Angkutan Trans Jogja merupakan angkutan perkotaan, sehingga cakupan pelayanan menyesuaikan zonasi kawasan perkotaan dimana dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo bukan kawasan perkotaan, jika diperlukan tambahan layanan angkutan menuju Kulon Progo maka dapat difasilitasi dengan layanan angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)	Fasilitasi layanan angkutan umum menuju Bandara YIA pada saat ini telah dilayani oleh angkutan DAMRI yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.
C. PT Taru Martani				
	1. Penyertaan modal total Pemda DIY pada PT Taru Martani belum disampaikan datanya baik dalam Buku LKPJ AMJ 2017-2022 maupun dalam LKPJ 2022, masih secara global (Berdasarkan Peraturan Daerah DIY	1. Strategi bisnis yang dijalankan PT Taru Martani pada tahun 2022 dipertahankan	strategi bisnis PT Taru Martani pada tahun 2022 akan dipertahankan dan ditingkatkan dalam hal perluasan pasar khususnya pada pasar tembakau iris.	



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang penyertaan modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida ditetapkan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah)			
	2. Perusahaan memberikan laba mulai tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 dalam periode 2017-2022	2. penyertaan modal yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah DIY perlu dijelaskan dalam buku LKPI	penyertaan modal Pemda DIY kepada PT Taru Martani telah disetorkan secara penuh pada tahun 2019. sehingga modal dasar PT Tarumartani sebesar Rp50.000.000.000,00 telah terpenuhi	
	3. Laba tahun 2019 merupakan laba tahun 2018 dan tahun 2019	3. Keterlambatan setor laba tahun 2018 harus diberikan penjelasan kenapa terlambat.	keterlambatan setoran dividen pada tahun 2018 dikarenakan pada tahun 2018 PT Taru Martani harus menyelesaikan kewajiban pembentukan cadangan untuk pesangon pegawai yang pada tahun-tahun sebelumnya belum dibentuk sesuai ketentuan. Sehingga bagian laba tahun 2018 disetorkan pada tahun 2019 bersamaan dengan setoran bagian laba tahun tersebut.	
	4. Laba tertinggi akan dicapai tahun 2022, memberikan laba		Dividen BUMD yang disetor kepada Pemda DIY pada tahun anggaran 2022 merupakan kinerja perusahaan pada tahun buku 2021. Pada LKPI AMJ tahun 2017-2022, menggunakan data per Mei 2022 yang mana pada	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	Rp5.439.572.184,00 angka ini sama data dengan Buku LKPI AMJ tahun 2017-2022, yang dihitung sampai Mei 2022. Mohon dijelaskan laba pada bulan April- Desember 2022.		bulan Mei 2022 laporan keuangan BUMD tahun buku 2021 telah disusun dan telah didapatkan angka bagian laba dari tahun buku 2021 yang akan disetorkan kepada Pemda DIY di tahun anggaran 2022. sehingga ketika penyusunan LKPI Pemda tahun anggaran 2022 di bulan Desember 2022, angka bagian laba yang diterima tidak mengalami perubahan.	
	D. PERUMDA AIR BERSIH TIRTATAMA DIY			
	1. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirta Tama DIY.	1. Defisit kerugian tahun 2021 dan 2022 sampai bulan Mei 2022 harus dijelaskan.	PDAB Tirtatama mulai beroperasi sejak Januari 2021, adalah peralihan operasional dari Balai Pialam (Dinas PU ESDM DIY) yang merupakan UPT dinas pemda. Peralihan operasional tersebut juga diikuti dengan peralihan pembiayaan keuangan. Layaknya OPD pemerintahan, Balai Pialam melakukan pelayanan penyediaan air bersih dan dan tidak berorientasi keuntungan atau dapat disebut sebagai cost center. sehingga ketika beralih menjadi BUMD PDAB Tirtatama, pada laporan keuangan nampak adanya kerugian.	
	2. Modal dasar sebesar Rp469.028.716.201,00 terdiri uang dan barang. Modal Pemda yang sudah disetor Rp12.500.000.000,00 , barang Rp163.896.691.000,00	2. Belum optimalnya produksi harus dijelaskan.	Produksi pada PDAB Tirtatama belum optimal dikarenakan penyerapan dari PDAM yang belum sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan. pada tahun 2022 total serapan dari PDAM Kabupaten/kota kurang lebih 30% dari kapasitas yang seharusnya. belum optimalnya serapan tersebut dikarenakan PDAM Kab/kota masih menggunakan sumber air masing-masing dan juga belum terpenuhinya ketersediaan jaringan hilir (kewenangan Kab/kota).	



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	3. Mulai operasional tahun 2021 mengalami defisit operasional atau kerugian karena;	3. Kesepakatan dengan PDAM Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman harus dijelaskan.	PDAB Tirtatama telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PDAM Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta tahun 2021 dan telah diperbarui pada bulan Januari tahun 2023. Pada perjanjian dengan PDAM Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta telah disepakati penyerapan air dari PDAB sebesar proporsi. Namun pada realisasinya penyerapan dari PDAM Kabupaten/kota belum sesuai kesepakatan.	
	E. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)			
	1. Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan	1. Status Badan Hukum diperjelas agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI setiap tahunnya	Terkait status bentuk hukum BUKP, BPKA DIY selaku pembina BUKP telah melakukan beberapa langkah untuk mempersiapkan perubahan kelembagaan tersebut yaitu antara lain: 1. melakukan audit laporan keuangan BUKP, yg nantinya akan menjadi saldo awal ketika lembaga BUKP berubah bentuk sesuai ketentuan yang berlaku 2. melaksanakan kajian transformasi kelembagaan BUKP pada tahun 2022 3. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kemendagri untuk perubahan kelembagaan BUKP, dengan mengirimkan syarat-syarat rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku (masih menunggu jawaban dari Kemendagri) setelah mendapatkan ijin rekomendasi dari Kemendagri tersebut, maka Pemda DIY dapat melangkah ke tahap selanjutnya dalam perubahan lembaga BUKP.	
	2. sebanyak 75 BUKP di Kapanewon se DIY	2. Terdapat data yang membingungkan dalam Buku LKPJ 2022 dan Buku LKPJ AMJ 2017-2022 sama, mohon dikoreksi dan dibenarkan.	Deviden BUMD yang disetor kepada Pemda DIY pada tahun anggaran 2022 merupakan kinerja perusahaan pada tahun buku 2021. Pada LKPJ AMJ tahun 2017-2022, menggunakan data per Mei 2022 yang mana pada bulan Mei 2022 laporan keuangan BUMD tahun buku 2021 telah disusun dan telah didapatkan angka bagian laba dari tahun buku 2021 yang akan disetorkan kepada Pemda DIY di tahun anggaran 2022. sehingga ketika penyusunan LKPJ Pemda tahun anggaran 2022 di bulan Desember 2022, angka bagian laba yang diterima tidak mengalami perubahan.	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	3. Modal dasar Rp20.000.000.000,00	3. Peran strategis BUKP dalam membantu mengatasi masalah rentenir di pasar tradisional yang rentan menjerat pada pedagang pasar tradisional.	peran BUKP dalam mengatasi masalah rentenir salah satunya adalah dapat memberikan pinjaman tanpa agunan kepada masyarakat untuk nominal s.d 5 juta rupiah. BPKA selaku pembina BUKP telah membuat ketentuan terkait suku bunga pinjaman pada BUKP, salah satu ketentuan tersebut adalah adanya bunga pinjaman yang ringan atau disebut bunga masa promosi yang berlaku untuk pencairan pinjaman pada beberapa masa tertentu antara lain pada saat lebaran, natal, Nyepi, peringatan hari jadi Kabupaten/kota, peringatan Hari Keistimewaan, peringatan hari jadi BUKP, HUT RI, tahun ajaran baru.	
	4. Realisasi laba di atas rencana			
	5. Terdapat data yang membingungkan dalam Buku LKPJ 2022 dan Buku LKPJ AMJ 2017-2022 mohon dikoreksi dan dibenarkan.			
	6. Nasabah BUKP masyarakat mikro dan pedagang pasar tradisional yang memilih kredit di BUKP lebih mudah dari Bank	8. Pemberantasan Rentenir di pasar tradisional yang beroperasi pada pagi hari jam 05.30-07.00 WIB agar dilakukan pemberantasan dengan melibatkan Satpol PP DIY, Kabupaten/kota dan aparat penegak hukum	Perkara mengenai rentenir merupakan ranah perdata yang bukan menjadi kewenangan dari tugas, pokok, dan fungsi Satpol PP (Pergub No. 100 Tahun 2022)	Pemberantasan Rentenir



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
F. BUMD Penerima Belanja Subsidi				
		1. Biaya Belanja Subsidi Pemerintah Daerah DIY yang diterima PT AMI perlu dijelaskan PT AMI dalam laporan LKPJ AMJ dan setiap tahun laporan LKPJ untuk mengetahui keterserapan Belanja Subsidi.		
		2. Perlu melakukan inovasi dengan melakukan pendataan pelanggan PT Trans Jogja melalui aplikasi <i>online</i> untuk memudahkan dan meningkatkan layanan kepada pelanggan seperti KAI access.	Inovasi perhitungan pelanggan transjogja pada saat ini terus dikembangkan, selain dengan memanfaatkan <i>device</i> sistem pembayaran, jumlah penumpang juga dapat diketahui melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas olah data yang sudah ada saat ini.	1. Pada saat ini dilaksanakan pengembangan perhitungan jumlah pelanggan melalui aplikasi transjogja . 2. Kemudahan pelayanan penumpang juga sudah dapat dinikmati penumpang dengan adanya pembayaran melalui kartu KMT, kartu tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran kereta dan transjogja
		3. Layanan Bus Trans Jogja agar menjangkau Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul secara bertahap.	Layanan Angkutan Trans Jogja merupakan angkutan perkotaan, sehingga cakupan pelayanan menyesuaikan zonasi kawasan perkotaan dimana dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul bukan termasuk dalam kawasan perkotaan. Sehingga apabila diperlukan tambahan layanan angkutan menuju Kabupaten Kulon Progo dan	Fasilitasi layanan angkutan umum menuju Bandara YIA pada saat ini telah dilayani oleh angkutan DAMRI yang

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			Kabupaten Gunungkidul maka dapat difasilitasi dengan layanan angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)	diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Dinas Perhubungan DIY telah melakukan Kajian Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di DIY, guna mengetahui potensi <i>demand</i> penumpang serta rencana trayek angkutan AKDP di Kabupaten- Kabupaten wilayah DIY. Kajian tersebut diharapkan mampu menjadi bahan bagi calon operator untuk mengetahui potensi <i>demand</i> penumpang khususnya di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo.
		4.Layanan Bus Trans Jogja pada Bandara <i>New Yogyakarta Airport</i> perlu dilakukan kajian dan perencanaan.	Fasilitasi layanan angkutan umum menuju Bandara YIA pada saat ini telah dilayani oleh angkutan DAMRI yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.	Dinas Perhubungan DIY telah melakukan Kajian Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di DIY, guna mengetahui potensi <i>demand</i> penumpang serta rencana trayek angkutan AKDP di Kabupaten- Kabupaten



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
VIII. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				wilayah DIY. Kajian tersebut diharapkan mampu menjadi bahan bagi calon operator untuk mengetahui potensi <i>demand</i> penumpang khususnya di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo.
1	Omzet Koperasi Tahun 2018-2022 tercapai di atas target (hal 3-488)	1. Peningkatkan program pembinaan dan pendampingan aspek kelembagaan, usaha koperasi, keuangan, permodalan dan manajemen koperasi	Dilaksanakan kegiatan klinik koperasi untuk memberikan layanan konsultasi, aduan, dan pembinaan koperasi berdasarkan 6 aspek yang ada di SiBakul (Produksi, Pemasaran, Digital Marketing, Kelembagaan, Keuangan, SDM) yang dibutuhkan oleh koperasi	Dengan program pembinaan koperasi ini maka permasalahan kelembagaan, keuangan dan manajemen perkoperasian dapat diselesaikan, sehingga usaha perkoperasian dapat meningkat yang berdampak pada kesejahteraan anggotanya.
2	Omzet UMKM Tahun 2018 tercapai di atas target (hal 3-489)	2. Peningkatan Akses pembiayaan koperasi melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Bukan Bank (LKBB).	Dilaksanakan pendampingan ke koperasi untuk mengakses LPDB oleh pendamping koperasi.	Peningkatan akses pembiayaan koperasi dapat menambah modal untuk memenuhi kebutuhan anggota. Misal untuk Koperasi Simpan Pinjam bisa memberikan pinjaman secara maksimal, Koperasi Sektor

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
3	Jumlah koperasi aktif pada tahun 2021 ada 1.717, menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu 1.758	3. Fasilitasi hibah melalui pasar komunitas seperti tahun 2021 harus ditambah jumlahnya	Evaluasi pelaksanaan pasar komunitas dikategorikan memiliki resiko tinggi karena ketersediaan bahan baku yang memiliki masa pakai terbatas, dan harga pasar yang dinamis. untuk itu fokus pasar komunitas dialihkan pada pemberdayaan koperasi susu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2021 dan dikembangkan dalam pengembangan Rumah Produksi Bersama pengolahan susu	Riil bisa membantu pemasaran / memaksimalkan penjualan. Dengan adanya Rumah Produksi Bersama bisa menampung dan bisa memenuhi kebutuhan susu di Yogyakarta sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta karena banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti sektor pertanian, peternakan, pariwisata (kuliner) dan lainnya.
4	Jumlah koperasi tidak aktif bertambah tahun 2021; 271 tahun 2020: 180	4. Pemberian modal hibah pada koperasi perlu ditingkatkan karena banyak koperasi yang belum dapat hibah dampak Pandemi Covid-19.	Pemetaan untuk mengetahui koperasi yang belum mendapat hibah dan sangat terdampak sehingga dapat membantu pemulihan akibat dampak pandemi tersebut.	Dengan adanya bantuan hibah, koperasi yang terdampak Pandemi Covid 19 dapat melakukan pelayanan kembali pasca pandemi.
5	Modal sendiri bertambah tahun 2021 Rp1.630.287 Juta, tahun 2020: Rp1.595.511 juta	5. Modal luar dan Volume Usaha koperasi, pelaku UMKM perlu ditambah dari berbagai sumber.	Dinas Koperasi dan UKM DIY memfasilitasi Koperasi dan pelaku UMKM dalam mengakses permodalan baik melalui Bank maupun Lembaga Non Bank.	KUMKM bisa mengakses akses permodalan dengan baik dan proses lebih jelas sehingga tidak terjebak dalam pinjaman dengan bunga tinggi (renternir)
IX Perkembangan UMKM di DIY				



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
1	Omzet UMKM Tahun 2018-2022 tercapai di atas target	1. Fasilitasi permodalan UMKM melalui program pemerintah pusat LPDB.	-Bimtek Akses Pembiayaan Bagi UMKM Menuju <i>Bankable</i> - Sosialisasi Akses Pembiayaan KUMKM - Bursa Pembiayaan bagi UMKM	Dengan memfasilitasi UMKM dengan Lembaga keuangan baik bank maupun non bank maka UMKM akan lebih mengetahui dan paham dalam mengakses permodalannya.
2	Usaha Mikro tahun 2021 bertambah menjadi 284.263 (tahun 2020: 188.033).	2. Peningkatan fasilitasi; sertifikasi PIRT dan halal, subsidi kemudahan ongkos kirim atau <i>free-ongkir</i> dalam program Sibakul <i>Market hub</i> ditingkatkan	-Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan (Bimtek PKP) - Fasilitasi Sertifikasi P-IRT dan halal dengan skema <i>self declare</i> dan reguler - Fasilitasi uji laboratorium produk usaha mikro -Pemberian fasilitas Free Ongkir setiap tahun mengalami peningkatan anggaran	Dengan dilakukannya pemberian bimtek PKP dan fasilitasi sertifikasi PIRT secara <i>online</i> dengan <i>Self declare</i> maka akan mempermudah pelaku usaha dalam penerbitan sertifikat halal dan PIRT. Pemberian fasilitas gratis ongkos kirim membantu pelaku usaha dalam pemasaran produk secara <i>online</i> .
3	Usaha Kecil tahun 2021 menurun menjadi 16.066 (2020: 58.980)	3. Pembinaan UMKM yang telah berhasil ekspor keluar negeri agar bisa mempertahankan usahanya (banyak yang berhenti ekspor).	-Memfasilitasi ongkos kirim ke luar negeri bagi UKM untuk meningkatkan daya saing di pasar Internasional - Pemberian pelatihan digitalisasi Pemasaran untuk memperluas pasar ke luar negeri - Berlangganan akun Alibaba sebagai etalase produk premium lokal untuk ekspor ke LN - Fasilitasi ijin edar PBOM MD dan Informasi Nilai Gizi (ING) bagi produk makanan untuk meningkatkan daya saing pasar di luar negeri	Pemberian fasilitas gratis ongkos kirim ke luar negeri dan fasilitasi penerbitan ijin edar serta penyediaan akun Alibaba sebagai etalase produk premium lokal untuk ekspor luar negeri telah mengatasi permasalahan eksportir yang terhambat

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
4	Usaha Menengah Tahun 2021 menurun menjadi 2.110 (2020: 30.665)	Pembinaan UMKM yang telah berhasil ekspor keluar negeri agar bisa mempertahankan usahanya (banyak yang berhenti ekspor).	UMKM yang telah berhasil ekspor biasanya berhenti ekspor karena menurunnya atau berhentinya order dari negara tujuan ekspor. Untuk mengantisipasi hal ini Disperindag DIY telah melakukan berbagai upaya, diantaranya penyelenggaraan pameran berskala ekspor, misi dagang ke negara tujuan ekspor baru seperti Arab Saudi untuk membuka pasar baru. Sosialisasi perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor yang diantaranya berkaitan dengan preferensi tarif bea masuk juga dilakukan agar dapat mendukung ekspor mereka. Kemudahan layanan penerbitan Surat Keterangan Asal sebagai syarat mendapatkan preferensi bea masuk ke negara tujuan ekspor juga dilakukan agar mendukung ekspor yang dilakukan UMKM tersebut. Selain itu, Disperindag bekerjasama dengan Bank Indonesia dan berbagai Instansi terkait menyelenggarakan layanan konsultasi bisnis satu pintu secara <i>online</i> untuk mendukung kelangsungan ekspor DIY.	pemasaran dan tingginya biaya ekspor. Usaha Menengah Tahun 2021 menurun menjadi 2.110 (2020: 30.665)
5	Usaha Besar data tahun 2021 tidak dicantumkan tahun 2020:10.005	5. Peran keberhasilan fasilitasi UMKM dalam pengentasan kemiskinan di DIY berbasis data Kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan (Bimtek PKP) - Fasilitasi Sertifikasi P-IRT - Fasilitasi Uji Laboratorium Produk Usaha Mikro - Bimtek Akses Pembiayaan Bagi UMKM Menuju Bankable - Sosialisasi Akses Pembiayaan KUMKM - Fasilitasi Pasar Tiban UMKM 	Fasilitasi untuk usaha mikro berupa Bimtek PKP dan Sertifikasi P-IRT memberikan dampak positif berupa legalitas produk bagi usaha mikro sehingga produk olahan makanan keamanannya bisa terjamin. Fasilitasi akses pembiayaan dengan Lembaga Bank dan Non Bank memberikan akses yang jelas kepada usaha



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
6	Peningkatkan jumlah usaha mikro dan penurunan usaha kecil, menengah dan besar karena PP Nomor 7 tahun 2021 pasal 31 ayat (3) mengenai kriteria modal usaha UMKM penyesuaian skala usaha berdasarkan modal, menurunnya ekonomi masyarakat adanya pandemik Covid-19 menyebabkan sebagian UMKM mengurangi jumlah usaha atau menutup usahanya.	6. Lahirnya pengusaha baru UMKM per kabupaten/kota di DIY masing-masing 100 UMKM.	Pemberian pelatihan kepada UMKM pemula berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan (Bimtek PKP) - Fasilitasi Sertifikasi P-IRT - Fasilitasi Uji Laboratorium Produk Usaha Mikro - Bimtek Akses Pembiayaan Bagi UMKM Menuju Bankable - Sosialisasi Akses Pembiayaan KUMKM - Fasilitasi Pasar Tiban UMKM 	mikro agar tidak terjerat pada renternir. Dengan adanya bimbingan kepada UMKM pemula maka UMKM pemula mampu bersaing dengan pelaku umkm lainnya.
X. Urusan Penanaman Modal				
1	1. Investasi di DIY dalam kurun 5 tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Tahun 2017 sebelum dibangunnya	1. Peningkatan jumlah penanaman modal PMA dan PMDN agar terus ditingkatkan dengan meningkatkan daya tarik investasi di DIY	1. Penyusunan Dokumen Potensi Investasi DIY 2. Penyusunan Buku Promosi Potensi Investasi DIY 3. Penyusunan Export Directory 4. Pelaksanaan Promosi Potensi Investasi DIY	1. Anggaran Penyusunan IPRO tidak tersedia di atasi dengan penyusunan dokumen peta investasi DIY dengan mengkoordinir Kab/Kota 2. Anggaran untuk melakukan promosi tidak

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	Bandara Baru Yogyakarta International Airport (NYIA) pertumbuhan investasi DIY berkisar di angka 0,776 triliun rupiah.			tersedia, di atasi dengan menyampaikan buku dan video promosi yang disusun untuk dipromosikan melalui Web DPMPTSP, Kemlu, dan OPD yang memiliki kegiatan promosi
2	Tahun 2018, 2019 investasi mengalami lonjakan dimulainya pembangunan NYIA sebesar 12 triliun.	2. Pembangunan Tol Jogja-Solo dan Jogja-bandara NYIA-Cilacap diharapkan meningkatkan investasi di DIY yang membawa dampak kesejahteraan masyarakat di DIY dengan akses tenaga kerja, bahan material dari DIY bisa terserap dengan maksimal dalam proyek tersebut.	1. Inspeksi Lapangan kepada pelaku Usaha untuk memastikan kewajiban dan persyaratan terpenuhi 2. Identifikasi dan fasilitasi permasalahan Penanaman Modal untuk mengetahui dan menemukan Solusi atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan penanaman modal di DIY	1. Masih ada beberapa pelaku usaha yang belum memahami tentang OSS dan pemenuhan kewajiban dan persyaratan, saat inspeksi lapangan dilakukan bersama dengan Pokja PTSP dan OPD Teknis terkait 2. Berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, difasilitasi dengan menghadirkan narasumber terkait permasalahan yang dihadapi
3	Tahun 2020, 2021 realisasi investasi di DIY 2,823 triliun dan 3,078 triliun meningkat rata-rata	3. Ketimpangan Penanaman Modal pada Kabupaten Gunung Kidul harus dicarikan solusi agar penanaman modal di kabupaten /kota di DIY seimbang.	1. Pembuatan video promosi Kajian IPRO Resort Cottage Pantai Silli & Industri Garmen Candirejo 2. Promosi Potensi Investasi	



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	10% dari tahun sebelumnya.			
XI. Urusan Pariwisata (Urusan Pemerintah Pilihan)				
1	Sektor Pariwisata mengalami dampak sejak awal dari Pandemi Covid-19.	Mengembalikan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara seperti pada tahun 2019.	<p>Berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi di DIY pada tahun 2022 tercatat sejumlah 6,4 juta sedangkan pada sampai dengan bulan Juni 2023 tercatat sejumlah 3,5 juta. Angka ini sudah menunjukkan peningkatan yang menggembirakan dengan harapan bahwa pada akhir tahun 2023 dapat mencapai angka 7 juta. Dinas Pariwisata DIY bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kab/Kota juga <i>stakeholder</i> pariwisata lainnya untuk mengembalikan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Pengembangan destinasi wisata yang mengacu pada target pasar dan usaha untuk meraih ceruk pasar dengan mempersiapkan SDM dan kelembagaan pariwisata terus dilakukan sambil menyiapkan industri pariwisata yang siap bersaing di pasar nasional, regional maupun internasional. Penyelenggaraan event juga menjadi salah satu cara strategis untuk mendatangkan wisatawan karena DIY memiliki even kreatif yang berskala lokal hingga internasional sehingga memungkinkan wisatawan untuk memiliki banyak pilihan jika berkunjung ke DIY. Selain itu, publikasi melalui cara konvensional maupun medsos terus dilakukan.</p> <p>Kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 masih belum pulih, hal tersebut dikarenakan masih dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global. Berdasarkan data dari United Nation World Tourism Organization (UNWTO), tercatat kunjungan wisatawan internasional untuk Regional Asia Tenggara di tahun 2023 hanya mencapai 70% bila dibandingkan dengan kunjungan wisatawan internasional di tahun 2019. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara khususnya di Indonesia juga memperlihatkan kondisi yang belum pulih seperti di tahun 2019. Kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia pada tahun 2023 baru mencapai 73% dari capaian kunjungan wisatawan mancanegara di tahun</p>	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			2019 Capaian jumlah Kunjungan wisatawan 2023 (yang menggunakan jasa Akomodasi/penginapan 1. Wisatawan Nusantara 7.591.275 wisatawan 2. Wisatawan Mancanegara 149.414 wisatawan	
2	Tahun 2018, 2019 tercapai target RPJMD, Tahun 2020, 2021, 2022 belum tercapai target kinerja Bidang Pariwisata (hal 206)	Mengembalikan citra wisata DIY yang aman dan nyaman .	Memperbanyak promosi dan event yang menggambarkan kondisi DIY saat ini sebagai daya tarik utama kunjungan wisatawan disertai dengan narasi dan romantisme Jogja. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan: 1. Berdasarkan kajian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Kajian Analisis Belanja Wisatawan, bahwa wisatawan pada masa setelah pandemi COVID-19 lebih banyak mengakses informasi pariwisata melalui sarana media digital, maka di sepanjang tahun 2023 Dinas Pariwisata DIY telah melaksanakan kegiatan promosi melalui media sosial, website serta pembuatan konten video promosi tentang daya tarik pariwisata DIY, yang dapat mencitrakan pariwisata DIY yang aman dan nyaman. Melakukan kemitraan di dalam organisasi EATOF dan ikut serta dalam acara Standing Committee Meeting di TUV, Mongolia, yang dilaksanakan pada tanggal 26-29 Juli 2023.	Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan citra pariwisata DIY yang dianggap menurun kenyamanannya
3	Pada Tahun 2021 pelaku pariwisata tidak mampu mempertahankan kegiatan usahanya ditandai menurunnya jumlah hotel non bintang.	Memberikan dukungan tempat wisata yang baru dibangun kelompok masyarakat dan desa wisata dengan indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar.	Dinas Pariwisata melakukan pendampingan, membuat juknis, melakukan monitoring & evaluasi di lapangan atas bantuan keuangan ke kabupaten/kalurahan agar pembangunan desa wisata/tempat wisata dapat sesuai dengan perencanaan & tujuan yang akan dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain hal tersebut, Dinas Pariwisata juga memberikan bantuan fasilitasi berbagai paket event agar mampu mengangkat & menambah daya tarik wisata di tempat wisata yang baru dibangun oleh kelompok masyarakat dan desa wisata.	Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY dapat mengatasi ketimpangan pendapatan akibat sebaran pariwisata yang tidak merata.
4	Jumlah wisatawan tahun 2021 mencapai 4.294.725	Pemanfaatan Bandara NYIA bagi dunia pariwisata di DIY	Memaksimalkan keberadaan Tourist Information Center di Bandara YIA sebagai pusat informasi dan promosi bagi wisatawan atau penumpang maskapai yang singgah atau datang ke DIY. Bandara YIA sebagai pintu	Tindak lanjut yang dilakukan Dinas Pariwisata DIY tentu saja



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	terdiri wisatawan nusantara 4.279.985 dan wisatawan luar negeri 14.740 orang September-Desember peningkatkan jumlah wisatawan. Angka ini lebih baik dari pada tahun 2020 sebesar 1.848.548.		keluar masuk wisatawan sangat berpotensi menjadi "hub" atau penghubung dengan mulai dibukanya beberapa penerbangan internasional dari dan menuju DIY. hal yang telah dilakukan antara lain: 1. TIC Bandara YIA dioperasikan oleh dua personil yang memiliki kemampuan bahasa asing, sehingga dapat memberikan informasi seputar kepariwisataan DIY. 2. Pada tahun 2023, melalui Dana Keistimewaan juga dilakukan pertunjukkan kesenian sebanyak 290 kali untuk menyambut kedatangan wisatawan yang masuk melalui bandara YIA.	dalam rangka meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan di DIY melalui Bandara YIA. Bandara sebagai pintu gerbang utama wisatawan di berbagai daerah, sehingga sudah sangat lazim bila pemanfaatan bandara dimanfaatkan dalam meningkatkan jumlah wisatawan.
5	Tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan DIY sudah melampaui angka pada tahun 2019 angka tertinggi sebelum pandemi Covid-19.	Data wisatawan luar negeri agar dirinci berasal dari negara mana saja.	BPS sudah mempunyai data asal wisatawan mancanegara berdasarkan kedatangan di Bandara YIA dan setiap bulan diumumkan melalui Berita Resmi Statistik oleh BPS DIY, yang dapat menjadi acuan Dispar DIY untuk mengambil arah kebijakan pariwisata. Sepuluh besar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DIY melalui bandara YIA, yaitu: 1. Malaysia 42.094 orang 2. Singapura 17.215 orang 3. Tiongkok 4.492 orang 4. Perancis 2.830 orang 5. Amerika Serikat 2.711 orang 6. India 2.573 orang 7. Jerman 2.189 orang 8. Jepang 2.154 orang 9. Italia 2.033 orang 10. Inggris 1.942 orang	
6	Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam	6. Menjaga kondusifitas dunia pariwisata DIY merupakan keharusan karena DIY bersaing	Kerjasama dengan seluruh instansi dan pihak terkait menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjaga Jogja tetap aman dan kondusif sehingga nyaman dikunjungi wisatawan. Seluruh elemen masyarakat Jogja perlu	Tindak lanjut yang dilakukan Dinas Pariwisata DIY dapat

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	PDRB DIY terhadap target akhir RPJMD 2022 sebesar 77,79%	dengan kota-kota lain yang terdekat dalam menarik wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.	menjadi tuan rumah yang sopan dan interaktif dan menjadi duta wisata yang komunikatif. Pada tahun 2023 Dinas Pariwisata DIY secara aktif berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polda DIY, terutama berkaitan dengan persiapan masa liburan panjang, seperti Idul Fitri dan Nataru (Natal & Tahun Baru), agar tercipta kondusifitas dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke DIY. Polda DIY dan Dinas Pariwisata juga telah membuat MoU. Nomor Surat: Nomor: 119/03529/2023, tanggal 13 November 2023, Tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas, Fungsi di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	mengatasi permasalahan terkait dengan daya saing pariwisata di DIY
7	Nilai sektor meningkatnya jumlah belanja wisatawan terhadap target akhir RPJMD 2022 sebesar 24,39%	7. DIY ramah, murah dan aman bagi wisatawan harus pulihkan agar kunjungan wisatawan di DIY meningkat.	Keramahan masyarakat Jogja dengan budaya yang adiluhung didukung dengan biaya berwisata ke DIY yang relatif murah menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan untuk menjatuhkan pilihan berwisata ke Jogja. Kondisi ini juga yang membuat sektor pariwisata DIY tetap bertahan di masa pandemi dibandingkan dengan daerah lain. Akses yang mudah, amenities yang lengkap serta atraksi wisata yang beragam dan menarik menjadi kekuatan lain bagi DIY untuk mendatangkan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Pemahaman Sadar Wisata dan Sapta Pesona masih minim dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat yang bersinggungan langsung dengan sektor pariwisata, maka pada tahun 2023 Dinas Pariwisata DIY melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata sebanyak 50 lokasi yang tersebar di DIY, dengan peserta dari masyarakat sekitar.	
XII. Urusan Perdagangan				
1	Pertumbuhan sektor perdagangan 4,82%, nilai ekspor DIY tahun 2022 sebesar US\$ 566,42 juta atau naik sebesar 4,90 % dibanding tahun sebelumnya.	1. Perlunya usaha peningkatan kualitas manajemen pelaku perdagangan di DIY	Pemda DIY telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen pelaku perdagangan di DIY. Hal ini dilakukan melalui penyelenggara pelatihan manajemen bagi pelaku perdagangan. Manajemen pemasaran <i>online</i> sebanyak 7 Angkatan dengan jumlah peserta 25 per angkatan, Manajemen Toko Kelontong sebanyak 17 angkatan dengan peserta sebanyak 20 orang per angkatan. Selain mendapatkan pelatihan peserta juga menerima hibah barang berupa etalase besar dan kecil sebanyak 20 buah setiap kelompok. Selain itu,	Dengan dilakukannya pemberian pelatihan manajemen bagi pelaku perdagangan maka dapat mengatasi permasalahan kualitas manajemen pelaku perdagangan yang belum baik.



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
2	Jumlah komoditas ekspor menurun menjadi 48 dari sebelumnya 75	2.Memanfaatkan peluang perdagangan melalui akses Bandara Internasional NYIA	Disperindag juga menyelenggarakan pelatihan Manajemen Pemasaran Bagi Pelaku Usaha Sektor Industri dan Perdagangan bagi 32 kelompok dengan peserta 20 orang untuk setiap kelompok. Dengan adanya Bandara Internasional NYIA tentu saja membuka peluang pasar internasional bagi produk-produk DIY. Pemda DIY telah berupaya mendorong maskapai penerbangan asing agar membuka rute ke NYIA sehingga semakin banyak rute penerbangan internasional yang melalui NYIA. Dengan demikian dukungan logistik untuk keperluan ekspor ke berbagai negara tersedia melalui NYIA. Selain itu, Pemda DIY melalui Disperindag telah mendorong para eksportir agar memanfaatkan NYIA dalam pengiriman produknya. Dengan demikian akan berdampak pada peningkatan jumlah komoditas ekspor DIY.	Dengan adanya kerjasama antara Pemda DIY dengan Angkasa Pura terkait dengan pemanfaatan ekspor melalui Bandara NYIA maka dapat mengatasi permasalahan ekspor yang selama ini dilakukan di luar DIY.
3	Jumlah negara tujuan ekspor menurun sedikit menjadi 108 dari 110 negara.	3.Peningkatan jumlah volume ekspor penjualan, komoditas, dan tujuan negara pembeli	Dalam rangka peningkatan jumlah volume ekspor penjualan, komoditas, dan tujuan negara pembeli, Pemda DIY melalui Disperindag telah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas produk melalui pelatihan dan bantuan mesin peralatan, peningkatan promosi dan pemasaran ke pasar internasional melalui pameran dan misi dagang ke negara tujuan ekspor baru, peningkatan kemampuan manajemen ekspor bagi pelaku melalui pelatihan ekspor, dan kemudahan layanan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk mendapatkan preferensi bea masuk ekspor.	Dengan dilakukan pelatihan dan pemberian bantuan mesin peralatan, bantuan promosi dan pemasaran ke pasar internasional, maka permasalahan masih rendahnya volume ekspor dan kualitas ekspor dapat terselesaikan.
4	Jumah eksportir menurun sedikit menjadi 329 dari sebelumnya 330	4.Perlu dukungan sarana perdagangan <i>online</i> di DIY berupa sarana pusat media industri <i>online</i> .	Dalam rangka mendukung sarana perdagangan <i>online</i> maupun sarana pusat media industri <i>online</i> , Pemda DIY melalui Disperindag telah membangun aplikasi JogjaPlaza sebagai media pemasaran <i>online</i> , Jogja Business Service Centre (JBSC) sebagai media konsultasi bisnis satu pintu secara <i>online</i> , Jogja sebagai media untuk mendapatkan informasi dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual secara <i>online</i> , serta aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SI-KONCER) sebagai media aduan konsumen secara <i>online</i> .	Dengan telah terbangunnya aplikasi JogjaPlaza sebagai media pemasaran <i>online</i> , Jogja Business Service Centre (JBSC) sebagai media konsultasi bisnis satu pintu secara <i>online</i> , JogjaKI sebagai media

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
				untuk mendapatkan informasi dan fasilitas perlindungan Kekayaan Intelektual secara <i>online</i> , serta aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SI-KONCER) sebagai media aduan konsumen secara <i>online</i> , maka dapat mengurangi permasalahan terkait dengan sarana prasarana perdagangan secara <i>online</i> .
		4. Perlu dukungan sarana perdagangan <i>online</i> di DIY berupa sarana pusat media industri <i>online</i> .	1. Diskominfo DIY memfasilitasi wifi publik UMKM untuk mendukung pemasaran produksi secara <i>online</i> di 75 titik UMKM 2. Dilakukan pelatihan E-business di 60 lokasi untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam pemasaran secara <i>online</i>	memberikan pelatihan Ebusiness dan memfasilitasi wifi publik UMKM diharapkan dapat mempermudah akses informasi dalam melakukan digital marketing sehingga juga dapat meningkatkan penjualan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut
5	Nilai sektor Perdagangan dalam PDRB Capaian tahun 2022 terhadap target	5. Pembinaan pelaku ekspor yang mengalami penurunan usaha dan berhenti.	Pelaku ekspor yang mengalami penurunan usaha dan berhenti diantaranya karena menurunnya atau berhentinya order dari negara tujuan ekspor. Untuk mengantisipasi hal ini Pemda DIY melalui Disperindag telah melakukan berbagai upaya, diantaranya penyelenggaraan pameran berskala ekspor, misi dagang ke negara tujuan	Dengan dilakukannya penyelenggaraan pameran berskala ekspor, misi dagang ke negara tujuan ekspor baru



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	RPJMD 2022 sebesar 88,96 %		ekspor baru seperti Arab Saudi untuk membuka pasar baru. Sosialisasi perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor yang diantaranya berkaitan dengan preferensi tarif bea masuk juga dilakukan agar dapat mendukung ekspor mereka. Kemudahan layanan penerbitan Surat Keterangan Asal sebagai syarat mendapatkan preferensi bea masuk ke negara tujuan ekspor juga dilakukan agar mendukung ekspor yang dilakukan UMKM tersebut. Selain itu, Disperindag bekerjasama dengan Bank Indonesia dan berbagai instansi terkait menyelenggarakan layanan konsultasi bisnis satu pintu secara <i>online</i> untuk mendukung kelangsungan ekspor DIY.	seperti Arab Saudi untuk membuka pasar baru, sosialisasi perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor, dapat menyelesaikan permasalahan penurunan jumlah ekspor yang dilakukan oleh eksportir asal DIY.
6	Banyaknya praktek rentenir di pasar-pasar tradisional	6. rentenir di pasar tradisional dengan melibatkan Sat Pol PP DIY dan kabupaten kota, serta aparat penegak hukum lainnya. Dengan target tidak ada lagi rentenir di pasar tradisional di DIY dalam 3 tahun ke depan.	Berkaitan dengan rentenir di pasar tradisional, diantaranya disebabkan karena kurangnya literasi pedagang pasar tradisional mengenai akses keuangan yang legal. Berkaitan dengan ini, Pemda DIY telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY yang diantaranya berupaya meningkatkan literasi keuangan dan inklusi masyarakat keuangan melalui sosialisasi, sehingga masyarakat mengetahui produk dan layanan industri jasa keuangan yang legal dan terhindar dari rentenir.	Pemda DIY telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY yang diantaranya berupaya meningkatkan literasi keuangan dan inklusi masyarakat keuangan melalui sosialisasi, sehingga masyarakat mengetahui produk dan layanan industri jasa keuangan yang legal dan terhindar dari rentenir.
		6. Pemberantasan rentenir di pasar tradisional dengan melibatkan Sat Pol PP DIY dan kabupaten kota, serta aparat penegak hukum lainnya.	Perkara mengenai rentenir merupakan ranah perdata yang bukan menjadi kewenangan dari tugas, pokok, dan fungsi Satpol PP (Pergub No. 100 Tahun 2022)	Pemberantasan Rentenir

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		Dengan target tidak ada lagi rentenir di pasar tradisional di DIY dalam 3 tahun ke depan.		
XIII. Urusan Industri				
1	Target Nilai Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB DIY Tahun N (atas dasar konstan) tahun 2018, 2019 tercapai di atas target, untuk tahun 2020, 2021 tidak tercapai target, tahun 2022 tercapai 90,70%	1.Pemulihan dampak Covid-19 pada dunia industri pengolahan dan IKM di DIY	Dalam rangka pemulihan dampak Covid-19 pada dunia industri pengolahan dan IKM di DIY, Pemda DIY melalui Disperindag telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya pelatihan produksi, pelatihan pemasaran, sertifikasi produk, pelatihan ekspor, fasilitasi pameran, dan misi dagang untuk membuka pasar baru. Sasaran dari berbagai kegiatan ini adalah pelaku industri pengolahan dan IKM di DIY.	Pemberian pelatihan produksi, pelatihan pemasaran, sertifikasi produk, pelatihan ekspor, fasilitasi pameran, dan misi dagang untuk membuka pasar baru. Sasaran dari berbagai kegiatan ini adalah pelaku industri pengolahan dan IKM di DIY dapat mengatasi permasalahan terkait dengan pemulihan ekonomi pasca Covid 19
2	Industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar dalam struktur PDRB DIY mencapai 11,93% di tahun 2022 dengan laju pertumbuhan 1,76%.	2.Program pembinaan bagi pelaku IKM harus ditingkatkan .	Pemda DIY selalu berupaya untuk meningkatkan program pembinaan bagi pelaku IKM. di samping tetap memberikan pembinaan berupa pelatihan produksi, pelatihan pemasaran, fasilitasi pameran, perlindungan kekayaan intelektual dan peningkatan teknologi produksi, Disperindag melalui BPTTG telah menambah layanan baru pada tahun 2023 ini. Layanan baru tersebut adalah layanan pengemasan produk dan layanan service keliling untuk alat tepat guna IKM.	
3	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri Tekstil dan Pakaian jadi, serta industri	3.Sektor industri pengolahan tiap tahunnya dinamis yang tumbuh perlu dilakukan pendampingan pada masing-masing pelaku industri	Pelaku Industri Pengolahan memang memerlukan pendampingan agar pertumbuhannya stabil. Disperindag DIY selalu berupaya memberikan pembinaan melalui berbagai metode, diantaranya pendampingan. Disperindag DIY telah memiliki sejumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian yang diantaranya diberi tugas untuk melakukan	



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	barang logam, komputer, barang elektronik, <i>optic</i> dan peralatan listrik merupakan tiga kontributor terbesar dalam PDRB sektor industri pengolahan.	pengolahan agar stabil pertumbuhannya.	pendampingan kepada pelaku industri pengolahan terutama di skala usaha mikro kecil. Kegiatan pendampingan ini diwadahi dalam kegiatan Unit Pendampingan Langsung (UPL) yang didanai dengan dana dekonsentrasi kementerian perindustrian. Selain itu, Instruktur dari pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Disperindag bersedia meluangkan waktu untuk melakukan pendampingan pasca pelatihan kepada IKM peserta pelatihan meskipun secara <i>online</i> .	
4	Capaian Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRD DIY terhadap target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 90,70 %.	4.Peningkatan dan pendampingan manajemen IKM.	Disperindag DIY memiliki sejumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian yang diantaranya diberi tugas untuk melakukan pendampingan kepada pelaku industri pengolahan terutama di skala usaha mikro kecil. Kegiatan pendampingan ini diwadahi dalam kegiatan Unit Pendampingan Langsung (UPL) yang didanai dengan dana dekonsentrasi kementerian perindustrian. Materi pendampingan dapat berupa aspek produksi dan manajerial. Selain pendampingan, berkaitan dengan manajemen disperindag juga menyelenggarakan pelatihan manajemen pemasaran dan sosialisasi legalitas usaha. Selain itu, Instruktur dari pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Disperindag bersedia meluangkan waktu untuk melakukan pendampingan pasca pelatihan kepada IKM peserta pelatihan meskipun secara <i>online</i> .	
5	Realisasi belanja Urusan Perindustrian Rp37.460.405.147,00 atau 94,08%	5.Fasilitasi Pemerintah Daerah DIY untuk menumbuhkan kerjasama IKM dengan industri besar.	Kemitraan antara IKM dengan Industri besar sangat diperlukan dalam pengembangan IKM. Upaya untuk memfasilitasi kemitraan ini dilakukan Disperindag secara terus menerus. Hal ini dilakukan diantaranya dengan mengundang pelaku usaha besar untuk menjadi narasumber pada kegiatan dengan peserta IKM seperti seminar, sosialisasi, dan pelatihan. Melalui kegiatan ini, selain IKM mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari pelaku usaha tersebut, peluang kemitraan antara mereka juga terjalin.	
		6.Bahan baku industri pengolahan DIY bergantung dari bahan dari luar DIY, perlu	Berkaitan dengan penyediaan bahan baku lokal, telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan Kabupaten untuk penanaman dan pengembangan bambu dan kayu rakyat	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		usaha dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyediaan bahan baku industri ini	di DIY atas lahan lahan milik rakyat. Selain itu, telah dilakukan upaya mendorong pelaku IKM Olahan pangan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku lokal yang merupakan <i>output</i> dari sektor pertanian dan perkebunan DIY. Disperindag DIY juga telah berupaya mendorong pelaku IKM untuk secara optimal memanfaatkan bahan baku yang dimiliki, diantaranya dengan pemanfaatan limbah kayu sebagai bahan baku produksi produk kerajinan.	
XIV. Urusan Tenaga Kerja				
1	Indikator Urusan Tenaga Kerja DIY yaitu jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan dan jumlah kasus tenaga kerja yang ditempatkan memiliki kinerja yang baik.	1.Peningkatan Kinerja Urusan Tenaga Kerja harus ditingkatkan.	Dalam rangka peningkatan kinerja urusan ketenagakerjaan pada TA 2023 telah diupayakan berbagai upaya seperti: penambahan jumlah paket-paket pelatihan, uji sertifikasi kompetensi, mengupayakan optimalisasi penempatan peserta paska kegiatan pelatihan dan pemagangan, meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan yang lain, terus mengupayakan konduktivitas hubungan industrial dan meningkatkan pengawasan implementasi regulasi normal kerja dan Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) di perusahaan yang ada di DIY	Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY berupaya untuk meningkatkan kinerja urusan tenaga kerja
2	Nilai Upah Minimum Provinsi DIY tahun 2022 sudah naik 4 % dibanding tahun sebelumnya.	2.Kenaikan UMP DIY harus ditingkatkan dalam merespon kenaikan inflasi dan kesejahteraan pekerja di DIY	Nilai Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2023 naik 7,65% dan UMP tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,27% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan kesejahteraan pekerja di DIY, Disnakertrans DIY melakukan Bimbingan Teknis Struktur dan Skala Upah untuk 180 perusahaan dan Diseminasi Jaminan Sosial untuk 30 perusahaan serta pembinaan pengupahan untuk 60 perusahaan	
3	Nilai UMP DIY dibandingkan provinsi lain masih rendah.	3.Program Padat Karya ditambah agar bisa menyerap tenaga kerja.	Pada TA 2023 Padat Karya BKK Kab/Kota sebanyak 458 paket/lokasi naik/bertambah 236 paket/lokasi dari TA 2022 yaitu 222 paket	Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di DIY



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
XV. Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional-RSUD WATES				
1	Pelayanan RSUD Wates menurun dengan kebijakan rujukan berjenjang BPJS yang menyebabkan pasien di sekitar RSUD Wates tidak bisa langsung berobat di RSUD Wates.	1.Kebijakan RSUD Wates sebagai Rumah Sakit tipe B dengan kebijakan rujukan BPJS menyebabkan turunnya jumlah pelayanan dan menurunnya penghasilan RSUD Wates, kebijakan tersebut harus dicarikan solusi agar RSUD Wates bisa optimal melayani masyarakat Kulon Progo dengan dibangunnya RSUD Wates bertaraf internasional pemanfaatan Gedung, Kamar Ruang Inap harus bisa optimal.	Strategi RSUD Wates sebagai RS rujukan tipe B dengan meningkatkan kompetensi SDM, penerapan pelayanan <i>service excellent</i> , memberikan pelayanan berkualitas yang berpedoman pada standar serta pemenuhan sarana prasarana dan alat medis untuk penunjang pelayanan. RSUD Wates juga telah berupaya meningkatkan jumlah SDM kesehatan dengan melakukan rekrutmen dokter umum, dokter spesialis anesthesiologi, dokter spesialis forensik, dokter spesialis jantung pembuluh darah, dokter spesialis THT, dokter spesialis patologi klinik, perawat, radiografer, dan terapis gigi dan mulut.	Mengurangi dampak Regulasi Rujukan berjenjang BPJS bagi RSUD Wates terhadap penurunan pendapatan di Rumah Sakit.
2	Sarana dan prasarana di RSUD Wates perlu ditingkatkan.	2.Peningkatkan sarana dan prasarana RSUD Wates harus ditingkatkan.	Pemda DIY terus mendorong RSUD Wates untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, baik secara kualitas maupun kuantitas serta penggunaan alat kesehatan dengan teknologi terkini agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat lebih optimal. dalam rangka mendukung pelayanan. Pada tahun 2023 pengadaan alat kesehatan sebanyak 146 buah alat medis.	Penyediaan sarana dan prasarana di RSUD Wates yang sesuai standar untuk meningkatkan pelayanan.
3	Kesejahteraan karyawan kontrak RSUD Wates yang masih di bawah Upah Minimum Provinsi harus ditingkatkan dan dimonitor oleh Pemda DIY.	3.Pelatihan SDM dan kerja sama dengan RS di atasnya seperti RS Sardjito harus dioptimalkan.	Pengiriman pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi SDM di RSUD Wates terus dilakukan dan ditingkatkan sebagai upaya untuk terus meningkatkan kompetensi SDM. Selain bekerja sama dengan eksternal (RSUP dr Sardjito dan lembaga lain), diklat juga dilaksanakan secara internal sebagai upaya penguatan SDM agar mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pada tahun 2023 RSUD Wates mengirimkan 128 orang pegawai mengikuti Diklat eksternal dan melaksanakan 13 diklat secara <i>inhouse training</i> bagi 1.516 peserta.	Peningkatan kompetensi karyawan RSUD Wates.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
4	Ada SK Bupati Kulon Progo yang tidak memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada Aparat Sipil Negara, sementara ada beberapa ASN di RSUD Wates yang posisi sebagai penunjang yang nilai Jasa Medisnya di bawah ASN Pemerintah Daerah pada umumnya. Sementara jumlah hari kerja dan faktor resiko ASN di RSUD Wates dibandingkan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo lainnya, bisa jadi lebih berat ASN di RSUD Wates, karena ASN yang bekerja pada pelayanan kesehatan masyarakat.	5.Peningkatan gaji karyawan kontrak di RSUD Wates yang belum setara Upah Minimal Provinsi harus dikawal dan dimonitoring Pemda DIY dan dicarikan solusi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.	Peningkatan kesejahteraan pegawai kontrak di RSUD Wates dengan menyesuaikan UMP diupayakan melalui kajian dan pembahasan bersama antara RSUD Wates, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemda DIY.	Peningkatan kesejahteraan karyawan RSUD Wates
		6.Peningkatan gaji karyawan kontrak di RSUD Wates yang belum setara Upah Minimal Provinsi harus dikawal dan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY telah melakukan monitoring ke RSUD Wates dan telah mengirimkan surat himbauan ke Direktur RSUD Wates tertanggal 20 Januari 2024 agar dapat memberikan upah tidak kurang dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Kulonprogo. Karena	Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		dimonitoring Pemda DIY dan dicarikan solusi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.	status RSUD Wates sebagai BLU pemerintah (bukan perusahaan) maka surat berupa himbauan bukan nota pemeriksaan.	diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengupahan di RSUD Wates
		7.Perlu dilakukan simulasi penanganan kondisi darurat dari Bandara <i>Yogyakarta International Airport</i> dengan RSUD Wates.	Simulasi penanganan kedaruratan antara RSUD Wates dan pengelola bandara Yogyakarta International Airport (Angkasa Pura) telah dilaksanakan secara periodik. Pada tahun 2023 dilaksanakan simulasi penanganan bencana gempa bumi. Selain itu, tim Medis RSUD Wates selalu disiagakan di YIA untuk tamu VVIP/pejabat negara.	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas dalam penanganan kondisi darurat dari Bandara <i>Yogyakarta International Airport</i>
		8.Pemda DIY mendorong Revisi Peraturan Bupati Kulon Progo tentang TPP yang membatasi ASN di RSUD Wates dan RS Nyi Ageng Serang dalam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019.	<p>Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diatur dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 Pasal 2 bahwa salah satu kriteria pemberian TPP pada PNS adalah tidak memperoleh jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah kecuali Puskesmas. Salah satunya adalah RSUD, karena sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.</p> <p>Terhadap rancangan produk hukum Kabupaten/Kota dan Produk Hukum Kabupaten/Kota, dilakukan pembinaan dan pengawasan melalui sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum Kabupaten/Kota agar</p>	<p>Berdasarkan hasil tindak lanjut sebagaimana tersebut dalam kolom tindak lanjut OPD, Pemda DIY telah mendampingi penyusunan pemberian tambahan penghasilan pegawai Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diantaranya:</p> <p>1. Pemberian penghargaan atas pekerjaan dan kinerja tenaga kesehatan telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 625/Menkes/SK/V/2010</p>

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai kebijakan pemerintah.	yang diberikan dalam bentuk remunerasi. Adapun pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
			Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di RSUD Wates dan RSUD Nyi Ageng Serang dan sebagai apresiasi terhadap kinerja diberikan <i>reward</i> melalui pemberian remunerasi. Regulasi yang mengatur formulasi remunerasi dalam pengalokasiannya didorong untuk memperhatikan asas proporsional, setara, patut, wajar, dan berbasis kinerja.	Peningkatan kesejahteraan karyawan RSUD Wates
		8. Pemda DIY mendorong Revisi Peraturan Bupati Kulon Progo tentang TPP yang membatasi ASN di RSUD Wates dan RS Nyi Ageng Serang dalam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019.	Ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Gubernur DIY melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY selaku wakil pemerintah pusat di daerah, melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan Bupati dan/atau Walikota yang mengatur mengenai TPP. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui proses fasilitasi produk hukum Kabupaten/kota. Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dapat melakukan klarifikasi kepada Kabupaten/Kota, apabila terdapat ketidaksesuaian penetapan dan/atau pelaksanaan Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bupati tentang TPP.	
XVI. Urusan Pangan				
1	Masih belum beragamnya cadangan pangan di DIY, hanya bertumpu	1. Menjadikan ketahanan pangan bagi masyarakat DIY sebagai prioritas program urusan pangan.	Mencukupi CPPD (beras) sesuai target yang ditetapkan dan menyalurkannya. selain itu untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan di dalam keluarga dengan produk yang beragam dilakukan program percontohan Lumbung Mataraman, falsafah dari lumbung mataraman yaitu “Nandur apa sing di pangan, Mangan apa sing ditandur”	Tersedianya pangan pokok (beras) untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, akibat bencana alam,



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	pada gabah kering giling dan beras.		atau artinya tanam yang dimakan, makan yang ditanam. Dari falsafah itu, diharapkan masyarakat mau menanam tanaman yang bisa dimakan. Mulai dari menanam tanaman sayur dan buah serta memelihara ternak dan ikan dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Harapannya lumbung mataraman menjadi percontohan untuk mengatasi persoalan pangan di dalam keluarga. Lumbung Mataraman menghidupkan kembali tradisi pertanian di Yogyakarta yaitu memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan prinsip: kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber daya genetik pangan, dan kebun bibit.	gangguan pasokan. Membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan dan gizi melalui bantuan pangan.
2	Masih terdapat desa/kalurahan yang waspada pangan.	2. Terwujudnya ketahanan pangan perlu didorong melalui ketersediaan pangan, distribusi pangan, pemanfaatan pangan yang beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, promosi, kampanye yang berkesinambungan dengan target dan sasaran yang jelas dan terukur agar memberikan dampak yang jelas terhadap tercapainya ketahanan pangan di DIY.	Melakukan sosialisasi, koordinasi, kolaborasi dengan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan intervensi di kalurahan waspada pangan	Mengintervensi kalurahan yang mengalami waspada pangan
3	Belum terjadi sinergi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan di DIY.	3. Meningkatkan penganeekaragaman cadangan pangan yang tidak hanya pada gabah kering giling maupun beras.	<ul style="list-style-type: none"> - Mencukupi CPPD (beras) sesuai target yang ditetapkan dan menyalurkannya. - Melakukan Program Aksi Desa Mandiri Pangan yang merupakan salah satu program yang difokuskan di daerah rawan pangan dengan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan masyarakat dan gizi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan 	Tersedianya pangan pokok (beras) ketika ada masalah kekurangan pangan, akibat bencana alam, gangguan pasokan. Membantu masyarakat miskin yang mengalami

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
4	Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan untuk pengentasan kemiskinan di DIY khususnya dalam urusan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat DIY.	4. Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan baik di kawasan perkotaan yang berlahan sempit maupun pedesaan untuk pemenuhan gizi keluarga. Dengan pemanfaatan lahan pekarangan tentunya dapat mengurangi pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, sehingga kesejahteraan rumah tangga akan pangan semakin meningkat. Kegiatan ini harus dilakukan dengan target dan sasaran yang jelas, terukur serta berkesinambungan agar memberikan dampak yang jelas	<p>subsistem: ketersediaan, distribusi dan konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.</p> <p>- Melakukan Program Lumbung Mataraman, falsafah dari lumbung mataraman yaitu “Nandur apa sing di pangan, Mangan apa sing ditandur” atau artinya tanam yang dimakan, makan yang ditanam. Dari falsafah itu, diharapkan masyarakat mau menanam tanaman yang bisa dimakan. Mulai dari menanam tanaman sayur dan buah serta memelihara ternak dan ikan dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Harapannya lumbung mataraman menjadi percontohan untuk mengatasi persoalan pangan di dalam keluarga. Lumbung Mataraman menghidupkan kembali tradisi pertanian di Yogyakarta yaitu memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan prinsip: kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber daya genetik pangan, dan kebun bibit.</p> <p>Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan di rumah tangga/ kelompok tani/ KWT</p>	<p>rawan pangan dan gizi melalui bantuan pangan.</p> <p>Tersedianya pangan dan gizi yang cukup untuk keluarga, masyarakat melalui optimasi pemanfaatan pekarangan/ tanah kas desa. Mengurangi pengeluaran keluarga untuk makanan.</p>



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		sehingga pencapaian persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk pangan dapat sesuai target yang diharapkan.		
		5. Pemerintah Daerah DIY harus segera melakukan standarisasi kualifikasi hewan ternak untuk bantuan hibah ternak ke kelompok untuk peningkatan hasil dan tercapainya tujuan kegiatan.	Setiap melakukan pengadaan ternak untuk bantuan hibah telah ditetapkan spesifikasi umum dan persyaratan teknis untuk masing-masing komoditas ternak yang akan dibantukan ke kelompok penerima banhi	Tersedianya ternak yang sesuai dengan spesifikasi umum maupun persyaratan teknis dari masing-masing komoditas ternak sehingga ternak yang diterima kelompok telah sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk peningkatan populasi dan produksi ternak di kelompok.
		6. Pengentasan 11 (sebelas) desa /kalurahan waspada pangan pada tahun 2022.	Melakukan sosialisasi, koordinasi dengan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan intervensi di kalurahan waspada pangan	Mengintervensi kalurahan yang mengalami waspada pangan, terutama dari aspek askes pangan.
		7. Mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi antar <i>stakeholder</i> baik di tingkat DIY, Kabupaten/kota, kementren/kanewon, kelurahan/kalurahan dalam membangun ketahanan pangan di DIY.	Mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi antar <i>stakeholder</i>	Memperkuat pilar ketahanan pangan dari aspek ketersediaan (meningkatkan produksi pertanian), keterjangkauan (mengadakan gerakan pangan murah, bantuan pangan) dan pemanfaatan pangan (sosialisasi,

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
				edukasi B2SA), dengan melakukan kolaborasi, sinergi dan intervensi
		8. Optimalisasi pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengentasan kemiskinan khususnya dalam urusan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat DIY.	Mengembangkan lumbung mataram yang diperluas lingkupnya menjadi skala yang lebih besar dengan konsep integrated farming dalam upaya mendukung ketersediaan pangan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya produksi pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan perikanan). - Terwujudnya pengelolaan pertanian hulu-hilir menuju agrowisata
		9. Optimalisasi pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengentasan kemiskinan khususnya dalam urusan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat DIY.	Pemerintah Daerah telah mengarahkan pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk pengentasan kemiskinan khususnya dalam urusan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat DIY melalui optimalisasi pemanfaatan SRS keistimewaan sesuai potensi kawasan dan dipadukan dengan pariwisata, misalnya durian di Tonogoro, kakao di Nglanggeran, Kleco, Hargowilis, Lumbung Mataraman, Budaya Bahari, BKK Desa Mandiri Pangan.	terlalu sempitnya pemahaman tentang orientasi pemanfaatan Dana Keistimewaan dan pemahaman tentang kebudayaan.
XVI. Urusan Pertanian				
1	Masih rendahnya SDM pertanian.	1. Perlunya peningkatan kesejahteraan petani di DIY dengan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 11/2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan program-program yang berkesinambungan, terukur dan jelas target dan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan penyuluh terkait penerapan teknologi pertanian mulai dari budidaya hingga pengolahan pasca panen melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan pertanian baik bersumber dari APBD maupun APBN.	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan penyuluh dalam menerapkan teknologi pertanian mulai dari budidaya hingga pengolahan pasca panen, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah pertanian,



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		sasarannya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada petani di DIY.		meningkatkan pendapatan petani, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
2	Faktor cuaca (curah hujan tinggi), keterbatasan bibit unggul, adanya OPT sehingga gagal panen, PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).	2. Perlu adanya regenerasi petani muda. Pemerintah Daerah DIY perlu memberikan insentif kepada generasi muda yang masuk dalam sektor pertanian, sehingga anak-anak muda akan tertarik bekerja di sektor pertanian. Program-program pemberdayaan petani milenial perlu dirancang dengan memperhatikan target dan sasaran yang jelas dan dilakukan secara berkesinambungan dengan sinergi dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> lain.	Mengenalkan kepada generasi muda bahwa peluang kerja dibidang pertanian adalah menjanjikan dengan mengajak petani milenial yang sukses untuk menyampaikan perjalanan <i>success story</i> nya Mengenalkan teknologi dan digitalisasi di sektor pertanian kepada petani muda melalui DANA APBN	Pemahaman terhadap generasi muda bahwa peluang kerja pertanian masih terbuka luas dan menjanjikan.
3	Rendahnya minat generasi muda (generasi milenial) untuk terjun pada kegiatan pertanian.	3. Perlunya optimalisasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah DIY dengan kabupaten terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan dalam mengurangi laju alih fungsi lahan di DIY.		Petani muda mengenal dan memanfaatkan penggunaan teknologi dan digitalisasi di sektor pertanian baik on farm maupun off farm

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
4	Tata kelola dan distribusi subsidi pupuk yang mengalami banyak kendala di lapangan, yang sangat merugikan petani baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pupuk.	4. Perlunya optimalisasi dan sinergi antar Pemda DIY dengan kabupaten terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan dalam mengurangi laju alih fungsi lahan di DIY.	Terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah khususnya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dalam mengurangi laju alih fungsi lahan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043 khususnya pada pasal 95 ayat (5) bahwa dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan.	Terlindungnya lahan sawah dilindungi sehingga dapat mewujudkan pertanian pangan berkelanjutan sehingga ketahanan pangan dapat terwujud dengan baik.
5	Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan untuk kegiatan pertanian.	5. Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten perlu menyusun peta usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seperti yang dimandatkan oleh Peraturan Daerah DIY Nomor 6/2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah DIY Nomor 10/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan aturan-aturan turunannya untuk mendukung implementasi di lapangan, serta mendorong kabupaten untuk menetapkan Perda PLP2B.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY bersama dengan Ditjen PSP Kementan, DPTR DIY, BAPPEDA DIY, Biro Perekonomian DIY, Biro Hukum DIY melakukan kegiatan Rekomendasi LP2B di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul melalui DANA APBN	SK Bupati Luasan LP2B di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul, yang menjadi dasar dalam penyusunan Review RTRW di masing-masing Kabupaten
		6. Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten perlu menyusun peta usulan Lahan Pertanian Pangan	Akan ditindaklanjuti dengan lintas sektor terkait khususnya terkait dengan regulasi yang disesuaikan terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043. Disamping itu juga melaksanakan amanat	Sinergitas pemanfaatan dana keistimewaan dalam sektor pertanian khususnya untuk



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		Berkelanjutan (LP2B) seperti yang dimandatkan oleh Peraturan Daerah DIY Nomor 6/2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah DIY Nomor 10/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan aturan-aturan turunannya untuk mendukung implementasi di lapangan, serta mendorong kabupaten untuk menetapkan Perda PLP2B.	dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang antara lain bertujuan untuk: a. Mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional b. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat c. Memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah d. Menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan	meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
		7. Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten perlu menyusun peta usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seperti yang dimandatkan oleh Peraturan Daerah DIY Nomor 6/2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah DIY Nomor 10/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan aturan-aturan turunannya untuk mendukung implementasi di lapangan, serta mendorong kabupaten untuk menetapkan Perda PLP2B.	Ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sesuai dengan tugas dan fungsi, melakukan pemantapan dan pembulatan substansi materi yang diatur dalam Produk Hukum Daerah.	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		8. Pemerintah Daerah DIY lebih mendorong pelatihan, fasilitasi petani untuk melakukan inovasi pada nilai tambah produk olahan hasil pertanian.	Pemberian fasilitasi dalam kegiatan bimbingan dan pelatihan olahan produk pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing	Harga produk pertanian yang turun terutama pada saat panen raya dapat di atasi dengan menjadikannya sebagai produk olahan yang dapat dijual dengan harga yang lebih stabil dan meminimalisir kerugian
		9. Pemerintah Daerah DIY perlu mengatur tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani baik di tingkat regulator, fasilitator maupun petani agar penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani menjadi efektif, efisien, merata baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.	Tata kelola dan distribusi pupuk subsidi diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah mengatur terkait dengan pupuk yang diberikan kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan alokasi pupuk yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah kabupaten mengatur pupuk yang diberikan kepada petani.	Melaksanakan pendampingan pengisian aplikasi e RDKK oleh petugas kabupaten dan sosialisasi kartu tani melalui DANA APBN dan melaksanakan monitoring pupuk subsidi bersama dengan tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) yang terdiri dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, POLDA DIY, Kejaksaan DIY, Inspektorat DIY, Disperindag DIY melalui DANA APBN.
		10. Adanya pengembangan pupuk organik sebagai alternatif penyediaan pupuk bagi petani yang lebih efektif dan efisien.	Pemberian bantuan pupuk organik dan sosialisasi pemanfaatan pupuk organik	Pemanfaatan pupuk organik sebagai alternatif berkurangnya alokasi pupuk subsidi



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		11. Perlunya optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan dalam urusan pertanian termasuk pengembangan saluran irigasi.	Bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	Air irigasi lancar masuk petak sawah
		12. Perlunya optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan dalam urusan pertanian termasuk pengembangan saluran irigasi.	Telah terbangun peningkatan saluran irigasi tersier sejumlah 83 lokasi di DIY. Maupun dukungan dalam bentuk Penyusunan Rapergub tentang Irigasi dan Sosialisasi Perda tentang Irigasi, Desa Mandiri Pangan dan Lumbung Mataraman di 6 lokasi yaitu: 1. Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo 2. Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo 3. Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul 4. Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul 5. Kalurahan Balong, Kapanewon Giriubon, Kabupaten Gunungkidul 6. Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul	Penguatan ekosistem pertanian dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola irigasi yang baik.
		13. Pemerintah Daerah DIY perlu melakukan mitigasi terhadap gagal panen dan kematian ternak yang disebabkan karena faktor cuaca, OPT maupun virus dan bakteri.	Pengamatan pengendalian dan peramalan OPT tanaman pertanian, gerakan penanganan DPI	Pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
		14. Pemerintah Daerah DIY perlu melakukan peningkatan kualitas hibah barang kepada kelompok sasaran sehingga barang yang dihibahkan dapat dipergunakan untuk jangka panjang dan memberikan manfaat kepada penerima sasaran.	Hibah barang diberikan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kualitas barang	Kelompok tani mendapatkan fasilitasi sesuai kebutuhan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
XVIII. Urusan Kelautan dan Perikanan				
1	Belum selesainya pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sampai sekarang karena adanya kesalahan desain pembangunan.	1.Melakukan re-design Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto agar bisa segera dimanfaatkan sehingga tidak menjadi proyek mangkrak, mengingat banyak permasalahan terkait dengan konstruksi Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adi Karto. Perlunya dibuat tata kala (tenggat waktu) terkait keberlangsungan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sehingga jelas target yang akan dicapai dengan proses pembangunan Pelabuhan Adikarto tersebut.	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto saat ini sedang sudah menjadi prioritas pusat melalui koordinasi Kemenkomarves karena harus menyusun Kajian penyelesaiannya. Selain itu, sudah dilakukan Kajian Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto pada tahun 2023. Sebagai alternatif pendaratan ikan di DIY, sedang dibangun Pelabuhan Perikanan Gesing melalui pendanaan Dana Keistimewaan urusan kebudayaan mulai tahun 2020 sampai dengan saat ini. Harapannya pada akhir tahun 2023 , Pelabuhan Perikanan Gesing dapat dioperasikan untuk menampung kapal nelayan DIY.	Optimalisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Gesing perlu segera diwujudkan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan di DIY.
2	Adanya gap produksi perikanan budidaya dan perikanan ikan tangkap di DIY.	2.Meningkatkan budaya bahari masyarakat di DIY yang ada untuk mengoptimalkan potensi alam yang ada dengan peningkatan kapasitas SDM nelayan, pemanfaatan teknologi tangkapan ikan, insentif bagi nelayan.	Melalui anggaran Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung produksi perikanan tangkap antara lain: a) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Gesing yang dimulai tahun 2020 dengan penyusunan Masterplan. Selanjutnya pada tahun 2021 dilakukan proses pembebasan lahan serta penyusunan DED dan Amdal. Pada tahun 2022 dilaksanakan proses pembangunan konstruksi meliputi Kolam Dermaga, Seawall, Gedung TPI, MCK Umum, Power House, musholla, Gudang Pengepakan Ikan, Pos Jaga, Bangunan Sampah, dan Tempat parkir.	Optimalisasi potensi alam yang ada dengan peningkatan kapasitas SDM nelayan, pemanfaatan teknologi tangkapan ikan, insentif bagi nelayan.



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
3	Keterbatasan SDM kelautan dan perikanan.	3.Mengoptimalkan program-program kelautan dan perikanan yang berkesinambungan, tepat sasaran dan terukur sehingga memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan PDRB sektor perikanan di DIY.	<p>b) Pelatihan kenelayanan berupa magang nelayan perahu motor tempel untuk menjaring calon-calon nelayan baru sehingga mampu meningkatkan jumlah nelayan yang ada di DIY. Selain itu juga ada magang nelayan sekoci yang diharapkan mampu menaikkan kelas nelayan di DIY dalam menangkap ikan. Selain itu juga telah dilaksanakan pelatihan keterampilan nelayan lainnya seperti Basic Safety Training, Perbengkelan mesin kapal, Cara penanganan ikan di atas kapal, dan perijinan perikanan tangkap.</p> <p>c) Hibah sarana prasarana penangkapan ikan yang ditujukan untuk kelompok nelayan berupa alat tangkap seperti jaring yang bertujuan untuk membantu nelayan dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap.</p> <p>d) Lomba produktivitas nelayan dilakukan untuk memberikan apresiasi terhadap nelayan yang mendapatkan hasil tangkapan tertinggi dan diberikan hadiah berupa mesin kapal dan alat tangkap.</p> <p>1) Dalam mendukung peningkatan PDRB subsektor perikanan di DIY ditopang dari produksi tangkap dan budidaya telah dilakukan berbagai macam intervensi. Pada bidang perikanan budidaya dilakukan pelatihan budidaya ikan berbagai komoditas seperti ikan lele, ikan nila, dan ikan hias, pelatihan pakan mandiri, pelatihan CPIB dan CBIB serta hama penyakit ikan. Selain itu diberikan bantuan hibah perikanan budidaya untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di DIY.</p> <p>2) Dalam bidang perikanan tangkap dilakukan pembinaan KUB nelayan, pelatihan kenelayanan dan bantuan hibah alat tangkap untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap.</p>	Optimalisasi program kegiatan yang tepat sasaran dan terukur untuk meningkatkan PDRB sektor kelautan dan perikanan
4	Tingginya biaya operasional kegiatan kelautan.	4.Optimalisasi untuk memberikan fasilitasi secara optimal bagi	Pelatihan Pakan mandiri telah dilaksanakan dan memfasilitasi praktek di kelompok yang telah melaksanakan program pakan mandiri. Selain itu akses untuk informasi bahan baku dan formulasi pakan mandiri telah disampaikan. Selain itu fasilitasi untuk pembudidaya ikan berupa pelatihan budidaya ikan, pelatihan pakan mandiri, pelatihan Cara	Penyediaan pakan mandiri, pelatihan, pemasaran, dan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		pembudidaya ikan untuk dapat membuat pakan sendiri dari bahan baku lokal yang murah dan terjangkau, pelatihan, pemasaran dan akses pasar serta bibit ikan yang berkualitas baik, diupayakan agar dapat dilakukan di wilayah DIY.	Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), sarasehan kemitraan budidaya perikanan yang mempertemukan pelaku usaha, perbankan, dan pemasar. BPTPB Cangkringan telah mengupayakan penyiapan benih unggul, calon induk dan induk unggul untuk pembudidaya DIY utamanya ikan nila, lele, mas, tawes, dan udang galah.	akses pasar serta bibit ikan berkualitas
5	Belum adanya pemanfaatan teknologi penangkapan ikan bagi nelayan.	5. Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur Pelabuhan Perikanan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan di DIY. 6. Melakukan optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan untuk urusan perikanan dan kelautan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan di DIY.	Dalam rangka mendukung visi Gubernur DIY “ menyongsong abad samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja, telah dianggarkan Dana Keistimewaan urusan kebudayaan untuk kegiatan pengembangan budaya bahari yang meliputi pengembangan kawasan Selatan melalui BKK Desa Maritim, hibah alat tangkap dan kapal sekoci, pembangunan pelabuhan Gesing, peningkatan SDM nelayan melalui bimtek dan magang, serta pelestarian konservasi penyu dan mangrove di sepanjang pesisir DIY. Selain itu, Dana Keistimewaan urusan tata ruang untuk mewujudkan penetapan zonasi pesisir dan pengelolaannya.	Peningkatan SDM dan kapasitas nelayan Penyediaan sarpras nelayan
		7. Melakukan optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan untuk urusan perikanan dan kelautan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan di DIY.	Telah terlaksananya pembangunan PPP Gesing, PPI Sadeng, TPI Congot, beragam hibah sarpras kepada nelayan (PMT, dsb), penguatan kelembagaan dan kemampuan nelayan, beragam rehab pendukung perikanan di kab/kota, maupun pengembangan 34 kalurahan maritim melalui skema BKK Maritim.	Mendukung visi dan misi Gubernur DIY dalam penguatan kawasan selatan sebagai halaman muka DIY (baik dari peningkatan produksi perikanan maupun peningkatan konsumsi makan ikan).
XIX. Urusan Kehutanan				



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
1	Berkurangnya area hutan konservasi.	1. Naiknya PDRB sektor kehutanan tahun 2022 banyak produk primer kayu yang dihasilkan tentunya perlu segera dilakukan penanaman pohon kembali (reforestasi).	Jumlah produksi kayu bulat sebagian besar berasal dari luar kawasan hutan (hutan rakyat). Manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat setelah produksi kayu menjadikan masyarakat secara swadaya menanam kembali lahan-lahan yang ada dengan tanaman kayu-kayuan.	Deforestasi dapat diminimalisir
2	Minimnya SDM pengelola hutan rakyat.	2. Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan hutan yang berperspektif lingkungan.	Paradigma utama dalam pengelolaan hutan di DIY saat ini memang dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Penanaman yang dilakukan oleh DLHK tidak lagi fokus pada produksi namun pada upaya konservasi, salah satunya adalah dengan penanaman di sekitar sumber mata air, rehabilitasi hutan dan lahan yang antara lain dengan KBR di Purwosari, penanaman vegetasi daerah penyangga di KEE trisik dan lainnya. Selain itu perencanaan untuk lahan bekas tambang yang akan dilakukan pada tahun 2024	Menuju pengelolaan hutan lestari
3	Belum optimalnya penggunaan dana keistimewaan untuk sektor kehutanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kehutanan.	3. Perlunya pendampingan kepada kelompok pengelola hutan rakyat dalam terus melakukan pelembagaan hutan rakyat, mendorong kelompok hutan rakyat untuk terus menjalin sinergi sehingga saling mendorong melakukan sertifikasi penatausahaan hasil hutan.	Dalam rangka pengelolaan hutan negara dan hutan rakyat, sampai dengan saat ini sudah terbentuk 711 KTH dengan target tahunan akan dilakukan peningkatan kapasitas sehingga akan memunculkan KTH yang naik kelasnya. Peningkatan kapasitas KTH maupun KUPS potensial untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari DAIS. DLHK telah mengembangkan SIKARYO (Sistem Informasi Kayu Rakyat Yogyakarta) yaitu sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat di wilayah DIY. Dengan SIKARYO, maka pengelola hutan rakyat (kelompok tani hutan rakyat) lebih mudah dalam melakukan penatausahaan hasil hutan. Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan atas produksi dan peredaran hasil hutan. Sehingga hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat lebih terjamin legalitasnya. Hal ini mendukung dalam terwujudnya sertifikasi hasil hutan, karena pencatatan dan pelaporan hasil hutan yang merupakan syarat	Penguatan kelembagaan KTH

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			sertifikasi menjadi lebih mudah dilakukan oleh pengelola hutan rakyat (kelompok tani hutan rakyat)."	
		4. Penambahan lahan tutupan vegetasi di DIY.	Penambahan tutupan vegetasi mutlak dilakukan karena menjadi salah satu indikator dalam penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Beberapa yang sudah dilakukan pada tahun 2023 antara lain dengan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang dapat menghasilkan 15.000 batang. Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo (BPDASHL-SOP) juga berkontribusi terhadap penambahan luas tutupan vegetasi dengan memberikan fasilitasi melalui 4 unit KBR dimana setiap unitnya dapat menghasilkan 35.000 batang.	Rehabilitasi hutan dan lahan untuk mengurangi luas lahan kritis
		5. Perlunya pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengelolaan hutan lestari.	Pemanfaatan DAIS dalam pengelolaan hutan sudah dilakukan. Beberapa kegiatannya antara lain: 1. Pengkayaan dan penambahan koleksi di KPHK Tahura Bunder 2. Pemulihan ekosistem hutan pantai 3. Sosialisasi pemanfaatan hutan rakyat 4. Kajian kayu budaya langka 5. Virtual Exhibition Produk Olahan hutan istimewa Pada tahun 2024 direncanakan juga akan dilakukan penanaman di lahan bekas tambang yang berlokasi di sekitar merapi dengan luas 10 ha menggunakan dana keistimewaan.	Pendanaan alternatif dalam upaya pengelolaan hutan di DIY
		6. Perlunya pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengelolaan hutan lestari.	Penguatan ekosistem hutan melalui berbagai dukungan fisik maupun sosialisasi baik tentang pemanfaatan hutan rakyat maupun terhadap kelompok tani hutan. Didukung juga dengan penyusunan Rapergub Jogja Hijau, pengelolaan KPHK Tahura Bunder dan BKK Jogja Hijau di 2 lokasi yaitu Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Gunungkidul dan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari Gunungkidul	Terciptanya upaya pelestarian hutan berikut dengan pemanfaatannya kepada masyarakat.
XX. Urusan Pendidikan				
	Urusan Pendidikan	1. Pemerintah Daerah DIY perlu melakukan upaya-upaya <i>upgrading</i> dan langkah-langkah	Terdapat beberapa upaya <i>upgrading</i> yang dilakukan Pemda DIY guna mendukung peningkatan status akreditasi sekolah. Pemda DIY mendampingi sekolah melalui para pengawas sekolah untuk melakukan	Kunjungan dan supervisi rutin dari pengawas diharapkan mampu



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		yang terukur, terhadap sekolah-sekolah yang masih mendapatkan akreditasi rendah. Sebagai Kota Pendidikan, seharusnya seluruh sekolah di DIY memiliki akreditasi yang sama.	analisis mendalam terhadap kondisi sekolah, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT analysis) guna mendapatkan identifikasi area yang perlu ditingkatkan di sekolah. Berdasarkan hasil analisis SWOT ini, dilakukan identifikasi prioritas, yaitu menentukan area prioritas yang perlu diperbaiki. Area prioritas umumnya berfokus pada aspek-aspek seperti kurikulum, pengajaran, manajemen sekolah, fasilitas, dan keterlibatan orang tua. Selanjutnya sekolah melalui komite sekolah didorong untuk membantu merancang dan melaksanakan langkah-langkah perbaikan. Rancangan langkah-langkah perbaikan mencakup tahapan spesifik perbaikan, penanggung jawab tahapan perbaikan, dan tenggat waktu yang realistis. Sebagai pendukung dalam peningkatan status akreditasi, sekolah didorong untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada guru guna meningkatkan keterampilan pengajaran melalui pengembangan strategi pengajaran yang efektif, penggunaan teknologi pendidikan, dan penilaian yang tepat. Sekolah juga didorong untuk meninjau kembali dan melakukan perbaikan penerapan kurikulum sekolah agar sesuai dengan standar akreditasi, kebutuhan siswa, dan mencakup keterampilan yang relevan untuk abad ke-21. Dalam proses perbaikan ini diharapkan sekolah melibatkan orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait dalam menggalang dukungan dan membangun kemitraan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Guna memantau sejauh mana keberhasilan proses perbaikan, sekolah perlu melakukan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil memberikan dampak positif. Selain itu, sekolah juga perlu mempersiapkan diri untuk evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Seluruh hasil evaluasi harus dijadikan siklus pembelajaran berkelanjutan yaitu sekolah terbuka terhadap umpan balik dan terus melakukan perbaikan sesuai kebutuhan yang muncul.	membantu sekolah untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap hambatan yang dihadapi dan kekuatan yang dimiliki, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang ada.
	Urusan Pendidikan	2. Pemda DIY perlu menyediakan fasilitas sekolah khusus bagi warga miskin	Penyediaan fasilitas pendidikan bagi warga DIY yang kurang mampu telah dilakukan oleh Pemda DIY melalui penyaluran beasiswa. Beberapa beasiswa yang disalurkan Pemda DIY antara lain beasiswa Kartu Cerdas bagi siswa SMA dan SMK yang kurang mampu, beasiswa Retrieval bagi	Pemberian beasiswa Kartu Cerdas bagi siswa SMA dan SMK yang kurang mampu, beasiswa

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di DIY	penduduk usia sekolah yang putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan sekolah, beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan bagi para lulusan SMA dan SMK yang masih memiliki beban administratif di sekolah, dan beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus bagi para siswa SLB yang berasal dari keluarga kurang mampu.	Retrieval bagi penduduk usia sekolah yang putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan sekolah, beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan bagi para lulusan SMA dan SMK yang masih memiliki beban administratif di sekolah, dan beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus bagi para siswa SLB yang berasal dari keluarga kurang mampu diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi akibat biaya pendidikan dan membantu para siswa untuk menuntaskan pendidikan mereka.
	Urusan Pendidikan	3.Masih adanya anak putus sekolah, kesulitan biaya pendidikan menengah dan sumbangan yang bermakna pungutan di DIY, untuk itu, Pemda DIY perlu meningkatkan bantuan operasional sekolah menuju Wajib Belajar 12 Tahun pada tahun 2025.	Bagi masyarakat DIY yang masih memiliki kendala ekonomi dalam menempuh pendidikan, Pemda DIY telah menyediakan berbagai beasiswa pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan khusus. Terkait dengan sumbangan bermakna pungutan, terdapat perbedaan definisi sumbangan dan pungutan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Permendikbud RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari peserta didik atau	Pengawasan terhadap satuan pendidikan menengah negeri diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pungutan. Pengawasan terutama terhadap pengelolaan dana operasional satuan pendidikan negeri yang



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			<p>orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Sumbangan, sebagaimana dijelaskan pada ayat (3), adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Sekolah yang diselenggarakan pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang mengambil pungutan bagi biaya satuan pendidikan, hal itu secara tegas diatur dalam Pasal 9 Permendikbud RI Nomor 44 Tahun 2012. Bahkan sekolah-sekolah yang dimungkinkan melakukan pungutan seperti sekolah dikembangkan/dirintis bertaraf internasional dan sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah tetap tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; untuk dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik; penilaian hasil belajar/kelulusan peserta didik; serta tidak diperbolehkan memungut untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan lainnya. Hal yang dapat dilakukan oleh sekolah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah hanya menerima sumbangan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan. Dimensi sumbangan dalam Permendikbud 44 Tahun 2012 adalah bersifat sukarela (tidak wajib), tidak memaksa, tidak mengikat dan jumlah maupun jangka waktunya tidak ditentukan oleh pihak sekolah, komite sekolah atau lembaga lain pemangku kepentingan satuan pendidikan. Dengan demikian bentuk-bentuk pungutan semacam uang komite dan uang pembangunan yang ditentukan jumlah dan jangka waktu pembayarannya tidak boleh dilakukan.</p>	<p>diterima dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan mampu membantu satuan pendidikan mengoptimalkan anggaran yang dimiliki sehingga tidak terjadi pungutan di lingkungan satuan pendidikan tersebut.</p>
	Urusan Pendidikan	4. Pemda DIY perlu untuk melakukan terobosan-	<p>Pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 telah menyebabkan learning loss pada siswa. <i>Learning loss</i> adalah fenomena dimana siswa</p>	<p>Penerapan Kurikulum Merdeka, sebagaimana</p>

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		terobosan dalam proses pembelajaran seiring dengan persoalan yang menyertai akibat pembelajaran jarak jauh/ <i>online</i> .	kehilangan atau mengalami penurunan kemampuan belajar akibat absensi sekolah yang berkepanjangan atau pembelajaran jarak jauh yang tidak efektif. Langkah awal yang ditempuh Pemerintah Daerah DIY dalam mengatasi learning loss adalah mendukung penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dan meminta pendidik untuk melakukan identifikasi area dimana siswa mengalami kesulitan atau kekurangan melalui evaluasi akademik, tes, tugas, atau observasi kelas. Setelah memahami kesulitan siswa, pendidik perlu membuat rencana pembelajaran yang terperinci dan berfokus pada konsep dan keterampilan yang hilang, mengembangkan strategi pengajaran yang berfokus pada pembelajaran aktif, partisipatif, dan interaktif, serta melakukan riset yang mendalam untuk menemukan pendekatan dan metode terbaru yang efektif dalam memulihkan <i>learning loss</i> . Setelah ditemukan metode yang sesuai, pendidik wajib menerapkan program pemulihan yang dirancang khusus untuk mengatasi kekurangan siswa. Program ini dapat mencakup sesi pemulihan tambahan, tutor pribadi, kelompok kecil, atau program remedial yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan individu siswa. Sebagai dampak dari pembelajaran jarak jauh, siswa mungkin mengalami stres atau kecemasan akibat learning loss. Pendidik perlu memberikan dukungan psikososial yang memadai kepada siswa, seperti konseling atau bimbingan serta membuat lingkungan belajar yang inklusif, ramah, dan mendukung dimana siswa merasa aman untuk berbagi dan belajar. Pendidik juga perlu mengkomunikasikan learning loss kepada orang tua atau wali siswa agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses pemulihan. Orang tua atau wali perlu dilibatkan dalam pengawasan tugas siswa, memberikan dukungan belajar di rumah, dan melibatkan mereka dalam program pemulihan. Sebagai tahapan akhir, pendidik akan melakukan evaluasi berkala untuk memantau kemajuan siswa. Apabila masih ada area yang masih memerlukan perbaikan, pendidik dapat menyesuaikan strategi dan rencana pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi siswa seperti latar belakang budaya, ekonomi, dan lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar.	diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diharapkan mampu mendorong siswa untuk tidak hanya mengejar ketertinggalan selama masa pandemi, namun juga meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi siswa serta memberikan siswa lingkungan belajar yang lebih kondusif



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	Urusan Pendidikan	5. Pemberian insentif bagi GTT/PTT perlu ditingkatkan nominalnya sebagai wujud penghargaan kepada mereka yang telah berperan dalam penyelenggaraan Pendidikan.	Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berada di SMA, SMK, SLB Negeri di lingkungan Pemda DIY telah difasilitasi sebagai Tenaga Bantu (Naban) dengan sistem penggajian terbaru sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Pasal 20 disebutkan bahwa hak Naban meliputi gaji dan tabungan masa kerja. Gaji sesuai Pasal 21 merupakan gaji pokok sesuai dengan jenjang pendidikan pada formasi jabatan. Gaji pokok ditetapkan paling rendah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota domisili tempat kerja pada tahun berjalan. Sedangkan Tabungan Masa Kerja diterimakan setelah selesainya masa kerja Naban yang bersangkutan. Bagi Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Pegawai Tetap Yayasan (PTY) yang berada di SMA, SMK, dan SLB Swasta di lingkungan Pemda DIY telah difasilitasi pemberian insentif sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sesuai Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang antara lain meliputi GTY dan PTY. Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa Pemberian Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian pemberian insentif bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Pemda DIY akan mengacu kepada kondisi keuangan Pemda DIY.	Penyaluran insentif bagi GTY PTY SMA/SMK Swasta dan GTY PTY SLB serta guru inklusif diharapkan dapat menjadi suatu bentuk apresiasi atas kerja keras dan peran serta aktif para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah swasta serta sekolah inklusi dalam mendukung pembelajaran yang berkualitas
	Urusan Pendidikan	6. Kebijakan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan institusi pendidikan mohon ditinjau ulang agar lebih memperhatikan proporsi fungsi, peran, dan beban	Kebijakan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemda DIY didasarkan kepada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. Pada Pasal 4 telah disebutkan bahwa PNS jabatan Guru yang tidak mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, calon Guru, dan pengawas Sekolah yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru diberikan TPP sebesar 50%. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai	Penyaluran TPP diharapkan dapat menjadi suatu bentuk apresiasi atas kerja keras dan peran serta aktif para pendidik dan tenaga kependidikan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	Urusan Pendidikan	<p>tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>7. Jumlah pengangguran terbuka di DIY dalam dua tahun terakhir 48,60% nya merupakan penganggur berpendidikan menengah (SMA dan SMK). Dari data ini, dapat diperoleh informasi bahwa lulusan SMA/SMK tidak memenuhi persyaratan untuk dapat bekerja atau diserap oleh sektor usaha/industri baik itu di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di luar DIY.</p>	<p>ini tentunya didasarkan pada kemampuan keuangan atau kemampuan fiskal Pemda DIY.</p> <p>Upaya menurunkan angka pengangguran terbuka di DIY yang ditempuh Pemda DIY antara lain yaitu dengan peningkatan mutu pendidikan, pengembangan program keahlian dalam pembelajaran siswa, serta pengembangan kewirausahaan. Peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan meningkatkan kualitas calon tenaga kerja, yaitu dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, inovatif, dan siap bersaing di pasar tenaga kerja. Pengembangan program keahlian dalam pembelajaran siswa dilakukan bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri guna menerapkan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Melalui sistem pembelajaran ini diharapkan para lulusan menjadi calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mampu memperkuat ekonomi terutama di sektor lokal. Melalui pengembangan kewirausahaan, para siswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dalam berkreasi merintis usaha mandiri dan diharapkan dapat membuahkan para wirausaha-wirausaha muda mandiri. Dengan demikian para lulusan pendidikan menengah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan menurunkan angka pengangguran yang bersumber dari lulusan SMA dan SMK.</p>	<p>Adanya upaya peningkatan mutu pendidikan, pengembangan program keahlian dalam pembelajaran siswa, serta pengembangan kewirausahaan diharapkan dapat menghasilkan lulusan pendidikan menengah yang kompeten, baik dalam penerapan keilmuan yang dimiliki maupun untuk pengembangan kapasitas dalam dunia kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran terbuka</p>
	Urusan Pendidikan	<p>8. Nilai-nilai luhur budaya Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan di DIY untuk meningkatkan pemahaman dan membentuk karakter generasi penerus DIY yang lebih bermartabat, berbudaya, toleran, humanis</p>	<p>Implementasi nilai-nilai luhur budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurikulum pendidikan di DIY telah diawali oleh Pemda DIY melalui penyusunan panduan Pendidikan Khas Kejogjaan oleh kalangan pakar akademis (perguruan tinggi), budayawan, ahli pendidikan religi, dan kalangan institusional (Dewan Pendidikan Kota dan Kabupaten di DIY). Panduan ini diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan Khas Kejogjaan berusaha membentuk moralitas siswa menjadi pribadi yang memiliki keutamaan hidup (jalma</p>	<p>Pendidikan Khas Kejogjaan diharapkan mampu memberikan contoh bagi implementasi nilai-nilai budaya dalam pembelajaran sehingga mampu membentuk pribadi yang memiliki karakter baik sekaligus</p>



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		dan juga memiliki keterampilan/kemampuan yang sesuai dengan perkembangan jaman.	utama) melalui pengembangan aspek kecerdasan spiritual yang sudah lama hidup, tumbuh, dan berkembang dalam wujud kearifan lokal masyarakat Yogyakarta. Peserta didik tidak hanya dibekali ilmu, pengetahuan, maupun keterampilan teknis, melainkan ditanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat mendasar supaya menjadi pribadi yang baik. Pengetahuan yang dikembangkan bukan hanya untuk mengungkap kebenaran, tetapi sekaligus mengembangkan kebaikan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai motor penggerak pembentukan peradaban yang luhur.	terampil dalam keilmuannya
XXI. Urusan Kesehatan				
		1. Pemda DIY perlu meningkatkan asupan gizi seimbang dan meningkatkan intensitas pendampingan khususnya bagi ibu hamil melalui Posyandu di tiap padukuhan. Hal ini disebabkan masih tingginya angka <i>stunting</i> dan masih ditemukan kasus kematian ibu hamil di DIY pada tahun 2022 sebanyak 43 kasus.	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan asupan gizi seimbang dan meningkatkan intensitas pendampingan khususnya bagi ibu hamil adalah: a. Meningkatkan pemantauan status gizi balita. Dengan peningkatan pemantauan status gizi, maka permasalahan gizi akan ditemukan/diidentifikasi sejak awal, b. Pemantauan status gizi balita melalui ePPGBM dan hal tersebut termasuk sebagai salah satu penilaian lokal intervensi <i>stunting</i> kabupaten/kota c. Melakukan intervensi gizi terhadap seluruh tahapan siklus kehidupan (ibu hamil, menyusui, bayi, balita, hingga remaja) d. Pemberian Makanan Tambahan lokal bagi balita bermasalah gizi e. Pemberian Tablet tambah darah bagi remaja putri f. Melakukan upaya skrining kayak hamil bagi usia produktif g. Meningkatkan cakupan kunjungan ibu hamil dan kualitas layanan melalui Antenatal Care (ANC) Terpadu., termasuk edukasi gizi dan pemantauan gizi ibu hamil h. Melakukan pencatatan kesehatan ibu hamil hingga bersalin dan layanan kesehatan balita melalui SIMKIA i. Implementasi DIY sistem rujukan khusus untuk ibu dan anak (Peraturan Gubernur DIY Nomor 63 Tahun 2021) j. Tersedianya buffer pembiayaan untuk ibu dan anak melalui Jamkesta	Peningkatan asupan gizi ibu hamil dan menekan angka kematian ibu (AKI)

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			<p>k. Terbentuknya jejaring kerja dalam Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMPSR) dan pokja AKI AKB di DIY melibatkan seluruh sektor, akademisi, dan organisasi profesi terkait.</p> <p>l. Telah dilakukan model Integrasi Layanan Primer di 5 kabkota, termasuk di dalamnya adalah layanan klaster ibu dan anak.</p>	
		<p>2. Perlunya kerja-kerja terukur Pemerintah Daerah DIY untuk meningkatkan tingkat kebugaran masyarakat DIY dengan basis tingkat kesehatan yang juga meningkat. Nalar berpikir yang harus terus dibangun bahwa dengan tingkat kesehatan dan kebugaran yang semakin membaik, maka bukan saja akan menekan biaya kesehatan untuk pengobatan/kuratif, namun kebugaran harus didudukkan sebagai faktor penting peningkatan produktivitas.</p>	<p>Gambaran kualitas kebugaran masyarakat DIY menurut SDI (Sport Development Indeks) tahun 2021, DIY peringkat ke 31 dari 34 provinsi di Indonesia. SDI diukur menggunakan parameter SDM OR, Ruang Terbuka Olahraga, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi. Capaian SDI berbanding lurus dengan berbagai indikator kesehatan terkait PTM. Agar urusan kebugaran mendapatkan dukungan memadai dari masing-masing OPD baik dari sisi anggaran, kebijakan, maupun kelembagaan maka perlu dibangun kolaborasi antar level pemerintahan, pemangku kepentingan, antar OPD. Pemda DIY telah mengeluarkan SE Sekda DIY tentang Germas yaitu Surat Edaran Nomor 440/4023 tahun 2023 tentang himbauan pola hidup sehat bagi aparatur sipil negara dalam rangka pengendalian PTM di Lingkungan Instansi Pemerintah di DIY.</p> <p>Melalui surat edaran tersebut, Pemda DIY menghimbau seluruh pegawai di lingkungan kerja untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1) melaksanakan kegiatan olahraga bersama secara rutin dengan melakukan senam bersama setiap hari Jumat pagi, (2) melaksanakan peregangan selama 5 menit di tempat kerja 2 (dua) kali setiap hari pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB bagi seluruh pegawai, (3) melakukan pemeriksaan kesehatan dan fasilitasi deteksi dini penyakit (Posbindu) secara rutin secara berkala berupa pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol dan berat badan secara berkala, (4) menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) di seluruh gedung instansi, (5) menyajikan menu makanan/minuman tradisional yang sehat dengan menyertakan sayur dan/ buah pada setiap hidangan rapat / pertemuan, (6) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (per semester)</p>	<p>Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan PHBS, terutama terkait dengan kualitas kebugaran masyarakat.</p>



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			<p>pelaksanaan surat edaran ini dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.</p> <p>Upaya ini juga didukung dan diperkuat dengan keluarnya Peraturan Gubernur nomor 103 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Lestari</p>	
		<p>3. Perlu dukungan yang nyata dan serius untuk menemukan dan mengobati penyakit menular terutama TB untuk mencapai tujuan <i>zero TB</i> ditahun 2030. Adanya pandemi COVID-19 di tahun 2021 dan hingga sekarang tercatat di bulan Maret 2022 masih status level 3, harus memberi pelajaran berharga pada kita bahwa penyakit menular seperti TB dan HIV AIDS perlu ditangani secara serius agar tidak terjadi penularan.</p>	<p>Program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di DIY dari tahun ke tahun semakin berhasil dalam menemukan kasus TBC, mengobati sampai sembuh dan memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada orang dengan infeksi laten TBC (ILTb). Semakin banyak kasus TBC yang ditemukan dan diobati, diharapkan sumber penularan TBC di masyarakat semakin sedikit sehingga jumlah kasus baru yang muncul juga semakin sedikit. Semakin banyak pemberian pengobatan pencegahan TBC kepada orang dengan ILTB akan memberikan perlindungan sehingga tidak berkembang menjadi sakit TBC. Dengan upaya yang semakin baik, diharapkan pada tahun 2030 akan tercapai Eliminasi TBC dengan indikator angka insidensi TBC hanya sebesar 65 per 100.000 penduduk.</p> <p>Upaya yang telah dilakukan antara lain memperkuat kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan baik klinik, puskesmas, maupun rumah sakit dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif khususnya tentang TBC. Upaya lainnya adalah melibatkan mitra non pemerintah baik bidang kesehatan maupun non kesehatan seperti LSM, Organisasi Penyintas TBC, Perusahaan Swasta serta melibatkan mitra perguruan tinggi. Semua komponen tersebut juga sudah terkoordinasi dalam Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis DIY melalui SK Gubernur DIY Nomor 55/TIM/2022 tanggal 21 Maret 2022.</p>	<p>Terdeteksi dan tertanganinya penyakit menular: TBC dan HIV/AIDS melalui peningkatan kualitas layanan dan upaya kolaboratif lintas <i>stakeholder</i>.</p>
		<p>4. Peningkatan kasus penyakit degeneratif dan kasus ODGJ perlu mendapatkan penanganan serius dengan kampanye pola hidup bersih</p>	<p>Untuk menangani penyakit degeneratif dan kasus ODGJ dilakukan langkah-langkah berikut:</p> <p>a. DIY telah memiliki Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Amanat dari prda tersebut adalah Menyusun RAD bunuh diri, rehabilitasi sosial dan pasung.</p>	<p>Penanganan penyakit degeneratif dan ODGJ melalui deteksi dini dan intervensi.</p>

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		dan sehat serta langkah-langkah koordinatif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	<p>b. Upaya skrining kesehatan jiwa pada setiap tahapan siklus kehidupan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada balita dengan Stimulai Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), yang di dalamnya terdapat skrining masalah perilaku pada anak. • Skrining pada masa anak sekolah, melalui aplikasi mobscreen, (khusus DIY) dengan kuesioner SDQ. • Skrining pada masa usia produktif dengan kuesioner SRQ • Skrining pada lansia dengan <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS) • Implementasi dari skrining tersebut melekat pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. <p>c. Tatalaksana kasus melibatkan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak. Tenaga kesehatan, baik dokter, psikiater, psikolog, pendamping, konselor, pihak sekolah/kampus /masyarakat dan tentunya dukungan dari orangtua dan lingkungan.</p> <p>d. Semua puskesmas di wilayah DIY mampu melakukan tatalaksana kasus kejiwaan. Bahkan puskesmas di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sudah menyediakan tenaga psikolog. Semua RSUD di kabkota di DIY juga sudah menyediakan psikolog dan psikiater. dan di DIY juga terdapat RS Jiwa Ghrasia sebagai pusat pengobatan masalah kejiwaan sudah menyediakan tenaga psikolog. Semua RSUD di kabkota di DIY juga sudah menyediakan psikolog dan psikiater. dan di DIY juga terdapat RS Jiwa Ghrasia sebagai pusat pengobatan masalah kejiwaan.</p> <p>e. Rehabilitasi medis dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, sedangkan rehabilitasi bersumber daya masyarakat dilakukan melalui Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang berada di tingkat propinsi hingga kecamatan.</p> <p>f. DIY sudah melakukan <i>launching</i> pedoman TPKJM pada tanggal 12 Desember 2023. Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan program Kampus Sehat, yang di dalamnya termasuk sehat jiwa.</p>	



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			<p>Kerjasama dilakukan dengan pihak sekolah/kampus, dalam melakukan tatalaksana kesehatan jiwa secara komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Program yang sudah dilakukan adalah sekolah/madrasah sehat, sekolah sehat jiwa, kampus sehat, dan kampus sehat jiwa.</p>	
		<p>6. Penanganan HIV juga perlu mendapatkan perhatian lebih serius mengingat kasus HIV meningkat untuk anak dan ibu rumah tangga di DIY. Penguatan peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DIY sebagai lembaga <i>supporting</i> Pemerintah Daerah, perlu untuk terus dimaksimalkan peran dan fungsinya.</p>	<p>Kasus kumulatif di DIY dari tahun 1993 sampai dengan bulan September 2023, terdapat 7.446 kasus HIV dan 2.212 kasus AIDS. Untuk penemuan kasus HIV baru tahun 2023 sebanyak 662 kasus dengan faktor risiko terbesar adalah heteroseksual sebanyak 53 % dan homoseksual 31 %, sisanya adalah faktor risiko lainnya. Berdasarkan golongan umur kasus tahun 2023 paling banyak terjadi pada usia 20 – 29 tahun.</p> <p>Upaya untuk penanganan penanggulangan HIV di sektor kesehatan meliputi promotif preventif, penemuan kasus dan pengobatan. Peningkatan dan perluasan akses masyarakat pada layanan skrining, diagnostik dan pengobatan HIV, AIDS, dan IMS yang komprehensif dan bermutu;</p> <p>Dalam penanggulangan HIV ini peran lintas sektor sangat diperlukan sehingga Penguatan, peningkatan, dan pengembangan kemitraan dan peran serta lintas sektor, swasta, organisasi kemasyarakatan/komunitas, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;</p> <p>Terkait KPA Perlu dilakukan restrukturisasi kelembagaan KPA DIY melalui pembaruan Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DIY, telah ditindaklanjuti dengan usulan Rapergub tentang KPA dan telah dilakukan pembahasan di Biro Hukum Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY yang kemudian menghasilkan rekomendasi pembentukan tim/satgas.</p>	<p>Penanganan kasus HIV/AIDS pada ibu rumah tangga dan anak melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas <i>stakeholder</i>.</p>
XXII. Urusan Sosial				

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
1	Berdasarkan pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Dinas Sosial DIY tahun 2022 jumlah lanjut usia DIY sebanyak 26.525. sementara itu warga masyarakat senior/lansia belum tersentuh dengan kebijakan yang memadai.	1. DPRD DIY merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah DIY untuk menyusun kebijakan pengurangan kemiskinan yang mendasarkan pada basis potensi, kemampuan masyarakat sesuai situasi dan kondisi, sehingga memiliki keberhasilan yang tinggi. Pemerintah Daerah DIY harus memiliki target yang jelas untuk pengurangan angka kemiskinan sebagaimana target dalam RPJMD 2017-2022.	Pada level makro telah terjadi penurunan angka kemiskinan. Persentase Penduduk Miskin Maret 2023 turun menjadi 11,04 persen. turun 0,45 persen poin dibandingkan September 2022. Lanjut Usia terlanjar DIY dalam Pemutakhiran Data Tahun 2022 sebanyak 26.252 jiwa juga mengalami penurunan dari tahun 2021 yang berjumlah 33.129 jiwa. Dinas Sosial DIY melakukan updating data setiap tahun termasuk melakukan update pada data lanjut usia miskin.	Dalam upaya penurunan penduduk miskin, Pemda DIY 2023 melalui Dinas Sosial DIY memberikan bantuan Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) pada 1010 lansia. Bantuan JSLU ini merupakan bantuan rutin dalam rangka memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia terlanjar. Konsep JSLU ini kemudian disempurnakan menjadi Bantuan Jaminan Hidup dan akan diberikan pada 8.000 lanjut usia pada tahun 2024 mendatang.
2	Kasus anak terlanjar tahun 2022 sebanyak 5.200 kasus. Tingginya kasus berdampak pada bertambahnya jumlah pengemis dan anak-anak jalanan serta kasus anak yang berhadapan dengan hukum.	2. Program-program pembangunan yang didanai dari Dana Keistimewaan, perlu pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan agar tepat sasaran dan tepat program. Sehingga orientasi pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan memiliki	Dinas Sosial DIY telah mengakses Dana Keistimewaan untuk penanganan kemiskinan melalui Urusan Kebudayaan yaitu dalam bentuk pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sejak tahun 2021. Sampai dengan tahun 2023 telah disasar sebanyak 35 kelompok atau sebanyak 350 orang.	Penggunaan Dana Keistimewaan untuk penanganan Anak, sudah dilakukan pada tahun 2021 yaitu dalam Bentuk Bantuan Sosial bagi Anak terdampak Covid-19 sebanyak 1.734 anak dengan nilai bantuan Rp500.000,- per-anak dalam satu tahun. Terkait Penanganan Anak Berhadapan Dengan



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		tingkat keberhasilan yang tinggi.		Hukum, Dinas Sosial DIY memberikan penanganan melalui pelayanan dalam panti, yaitu melalui Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), Dana Keistimewaan telah digunakan untuk menyusun Kajian Pengembangan Pelayanan BPRSR, hal ini juga merespon terkait maraknya kasus kenakalan anak dan remaja sehingga banyak anak-anak dan remaja yang terlibat kasus hukum.
		4. Pemerintah Daerah DIY perlu segera menyusun agenda Rencana Aksi Daerah dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia guna menjamin keberlangsungan hidup lanjut usia. Perlunya penguatan pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lanjut Usia.	Dinas Sosial DIY bersama Komda LU DIY telah menyerahkan draf RAD Kelanjutusiaan kepada Biro Bermas pada Rakorsin tanggal 26 Januari 2022 di ruang rapat Gedung Indiche Kepatihan Danurejan untuk ditindaklanjuti dikarenakan misi draf RAD Kelanjutusiaan memerlukan konsolidasi dari lintas OPD, sehingga memerlukan peran Biro sebagai fasilitator. RAD Kelanjutusiaan telah diserahkan ke Biro Hukum oleh Biro Bermas pada Oktober 2023 sebagai dokumen RAPEMPERDA untuk ditindaklanjuti dan disempurnakan menuju kelayakan penetapan.	Dinas Sosial sebagai inisiator bersama dengan Komisi Daerah (Komda) Lanjut Usia DIY telah menyusun Draf Awal Rencana Aksi Daerah sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Daerah DIY nomor 3 tahun 2023.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		5. Pemerintah Daerah DIY perlu menyediakan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang memadai untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.	Dinas Sosial DIY sebagai pengampu rehabilitasi sosial berbasis Panti telah menyelenggarakan perlindungan, pengasuhan dan rehabilitasi sosial anak telantar dan anak dalam kondisi khusus yang dilayani melalui Pelayanan Dalam Panti. Pelayanan ini dilakukan baik melalui Panti Pemerintahan maupun Panti Swasta. Melalui Panti Pemerintah dilakukan dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan sesuai kebutuhan anak, reunifikasi dan pengasuhan melalui keluarga pengganti. Sementara di Panti Swasta diberikan melalui Bantuan Sosial	Dinas Sosial DIY sebagai pengampu rehabilitasi sosial berbasis Panti telah menyelenggarakan perlindungan, pengasuhan dan rehabilitasi sosial anak telantar dan anak dalam kondisi khusus melalui BRSPA, serta memberikan layanan rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Remaja Bermasalah Sosial melalui BPRSR. Selain itu anak-anak yang baru saja mendapatkan penjangkauan dilayani di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) untuk dilakukan assesment sebelum akhirnya mendapatkan layanan yang sesuai, baik berupa reunifikasi, maupun rujukan ke Panti Sosial. Dinas Sosial juga memfasilitasi 2 unit pengelolaan Asrama SLB untuk anak dengan disabilitas yang sedang menempuh



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
XXIII. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				pendidikan di SLB N 1 Kulon Progo dan SLB N 2 Gunungkidul. Melalui layanan Dalam Panti ini Dinas Sosial memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan sesuai kebutuhan anak.
1	Capaian prestasi olahraga baik pendidikan maupun PON di DIY belum menggembirakan. Demikian pula dengan pengembangan olahraga masyarakat sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan belum terasa kebijakan dari Pemda DIY. Seiring diterbitkannya Undang-Undang	1.Capaian prestasi olahraga pelajar DIY masih belum optimal, sehingga DPRD DIY merekomendasikan kepada Pemda DIY untuk merancang kebijakan di bidang olahraga melalui DBOD secara komprehensif.	Tahapan rancangan kebijakan terkait pengembangan prestasi olahraga baru akan disusun oleh Pemda DIY melalui DBOD dengan mengacu kepada DBON, termasuk di dalamnya adalah <i>grand design</i> pembinaan olahraga prestasi. Diharapkan DBOD dapat disusun berdasarkan beberapa tahapan, yaitu identifikasi potensi dan tantangan, pengembangan infrastruktur olahraga, perancangan program pelatihan dan pembinaan, kolaborasi dengan pihak terkait, serta pemantauan dan evaluasi. Pada tahapan identifikasi potensi dan tantangan dilakukan pengumpulan data tentang profil atlet, fasilitas olahraga, program pelatihan, partisipasi masyarakat, dan prestasi olahraga sebelumnya sebagai bahan analisis data untuk mengidentifikasi potensi olahraga yang ada, seperti bakat individu, infrastruktur yang dapat digunakan, dan komunitas olahraga yang aktif. Selain itu juga dilakukan identifikasi tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya fasilitas, pendanaan terbatas, atau rendahnya partisipasi masyarakat. Tahap selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur olahraga seperti perbaikan lapangan, arena, atau pusat pelatihan sehingga infrastruktur dapat memfasilitasi latihan dan kompetisi olahraga yang efektif. Tahapan ini dilanjutkan dengan pelaksanaan program pelatihan dan pembinaan yang berfokus pada pengembangan bakat olahraga lokal	Melalui penetapan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) DIY, diharapkan langkah-langkah teknis untuk meningkatkan prestasi dan daya saing daerah dalam bidang keolahragaan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai nilai-nilai keistimewaan yang melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta dapat segera disusun dan diimplementasikan.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah dalam sebuah desain olahraga daerah. Secara spesifik olahraga masyarakat mendapatkan pengaturan yang memadai setara dengan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.		berdasarkan data tentang potensi atlet. Perekrutan dan pembinaan pelatih yang berkualitas juga dilakukan untuk membimbing atlet muda. Dalam pelatihan dan pembinaan juga diperlukan kolaborasi dengan klub olahraga, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Klub olahraga dan lembaga pendidikan dapat menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan. Seiring dengan itu, sektor swasta dapat memberikan sponsor atau program kemitraan untuk mendukung atlet dan program olahraga. Sebagai tahapan akhir, dilakukan pemantauan dan evaluasi prestasi olahraga di daerah serta program yang telah diimplementasikan. Dengan demikian dapat dilakukan penyesuaian strategi dan tindakan yang diperlukan demi meningkatkan efektivitas program pembinaan.	
		2. Pemda DIY harus membuat <i>grand design</i> pembinaan olahraga di DIY dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga di kegiatan <i>multi event</i>	Tahapan rancangan kebijakan terkait pengembangan prestasi olahraga baru akan disusun oleh Pemda DIY melalui DBOD dengan mengacu kepada DBON, termasuk di dalamnya adalah <i>grand design</i> pembinaan olahraga prestasi. Diharapkan DBOD dapat disusun berdasarkan beberapa tahapan, yaitu identifikasi potensi dan tantangan, pengembangan infrastruktur olahraga, perancangan program pelatihan dan pembinaan, kolaborasi dengan pihak terkait, serta pemantauan dan evaluasi. Pada tahapan identifikasi potensi dan tantangan dilakukan pengumpulan data tentang profil atlet, fasilitas olahraga, program pelatihan, partisipasi masyarakat, dan prestasi olahraga sebelumnya sebagai bahan analisis data untuk mengidentifikasi potensi olahraga yang ada, seperti bakat individu,	Melalui penetapan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) DIY, diharapkan langkah-langkah teknis untuk meningkatkan prestasi dan daya saing daerah dalam bidang keolahragaan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			infrastruktur yang dapat digunakan, dan komunitas olahraga yang aktif. Selain itu juga dilakukan identifikasi tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya fasilitas, pendanaan terbatas, atau rendahnya partisipasi masyarakat. Tahap selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur olahraga seperti perbaikan lapangan, arena, atau pusat pelatihan sehingga infrastruktur dapat memfasilitasi latihan dan kompetisi olahraga yang efektif. Tahapan ini dilanjutkan dengan pelaksanaan program pelatihan dan pembinaan yang berfokus pada pengembangan bakat olahraga lokal berdasarkan data tentang potensi atlet. Perekrutan dan pembinaan pelatih yang berkualitas juga dilakukan untuk membimbing atlet muda. Dalam pelatihan dan pembinaan juga diperlukan kolaborasi dengan klub olahraga, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Klub olahraga dan lembaga pendidikan dapat menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan. Seiring dengan itu, sektor swasta dapat memberikan sponsor atau program kemitraan untuk mendukung atlet dan program olahraga. Sebagai tahapan akhir, dilakukan pemantauan dan evaluasi prestasi olahraga di daerah serta program yang telah diimplementasikan. Dengan demikian dapat dilakukan penyesuaian strategi dan tindakan yang diperlukan demi meningkatkan efektivitas program pembinaan.	(RPJMD) sesuai nilai-nilai keistimewaan yang melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta dapat segera disusun dan diimplementasikan.
		3. Pemda DIY didorong untuk terus mengembangkan pelatihan-pelatihan	Pelatihan-pelatihan olahraga yang telah diselenggarakan oleh Pemda DIY meliputi Pelatihan Atlet Berbakat bagi para pelajar serta penguatan pembinaan olahraga melalui Kelas Khusus Olahraga yang ada di 9 SMA Negeri di DIY. Disamping itu secara rutin dilaksanakan pula pemusatan latihan bagi para atlet yang akan mengikuti kejuaraan regional dan nasional.	Pelatihan keolahragaan diharapkan mampu mengasah bibit-bibit olahragawan berbakat baru yang kelak akan membawa nama DIY pada kejuaraan nasional maupun internasional
		4. Pemda DIY perlu melakukan pengembangan olahraga masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas	Pemda DIY telah berupaya melakukan pengembangan olahraga masyarakat melalui pemassalan senam pagi hari Jumat. Diharapkan pemassalan senam ini dapat menjadi langkah awal bagi promosi olahraga	Pemassalan olahraga, salah satunya melalui kegiatan senam ataupun jalan pagi telah

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		kesehatan dan kebugaran masyarakat, serta dalam upaya untuk menguatkan interaksi sosial antar warga yang kondusif guna memperkuat ketahanan nasional.	kepada masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk hidup lebih sehat.	dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan secara rutin sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
2	Persentase pemuda wirausaha masih cukup rendah serta belum maksimalnya pelaksanaan pelatihan kewirausahaan maupun workshop kepemudaan yang melibatkan banyak peserta dan praktik intensif di lapangan. Akibatnya, kegiatan lebih banyak dilaksanakan dalam forum alumni kegiatan tahun sebelumnya secara daring maupun tatap muka yang sangat terbatas.	5. Pemda DIY harus menambah kegiatan yang berbasis pada pemuda dalam rangka penyiapan generasi muda yang tangguh dan siap menghadapi tantangan zaman	Dalam rangka penyiapan generasi muda yang tangguh dan siap menghadapi tantangan zaman, Pemda DIY telah mempersiapkan beberapa bentuk kegiatan yang sesuai untuk membantu mempersiapkan generasi muda, diawali dengan pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik berfokus kepada pendidikan yang melampaui pelajaran akademis, seperti pengembangan keterampilan kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Pendidikan holistik juga didukung oleh pendidikan karakter dan etika yang penting untuk membentuk generasi muda yang berintegritas. Konsep-konsep pendidikan ini sejalan dengan konsep Merdeka Belajar yang fokus utamanya adalah pembentukan Profil Pelajar Pancasila. Sebagai pendukung pendidikan holistik, Pemda DIY melalui pengembangan pendidikan vokasi juga membuka kesempatan bagi para pemuda untuk mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja masa depan, antara lain dengan penyelenggaraan pelatihan teknologi informasi serta pelatihan kewirausahaan. Penguasaan teknologi informasi bersama dengan pengembangan kewirausahaan dapat membantu mempersiapkan generasi muda tangguh, adaptif, kreatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.	Pembentukan Profil Pelajar Pancasila merupakan salah satu upaya yang telah diterapkan di seluruh satuan pendidikan guna mendidik para pelajar menjadi pelajar yang kreatif, inovatif, berwawasan global, mandiri, dan toleran terhadap sesama. Watak-watak karakter ini diharapkan mampu membentuk pemuda menjadi pribadi tangguh yang cerdas dalam menghadapi tantangan zaman
		6. Meminta kepada Pemda DIY untuk membangun fasilitas-fasilitas publik sebagai ruang ekspresi dan kreativitas	Pemda DIY dalam kaitannya dengan penyediaan fasilitas publik sebagai ruang ekspresi dan kreativitas pemuda di seluruh DIY telah berupaya mengoptimalkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai fasilitas publik	Penyediaan sekolah dan lembaga pendidikan sebagai fasilitas publik untuk ruang ekspresi dan



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		pemuda di seluruh DIY. Fasilitas publik ini harus bersifat komprehensif dan paripurna dalam memenuhi kebutuhan pemuda.	sekaligus ruang ekspresi dan kreativitas peserta didik melalui perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana di sekolah.	kreativitas pemuda telah diupayakan agar mampu menampung gagasan-gagasan pemuda, khususnya bagi pengembangan diri mereka.
XXIV. Urusan Kebudayaan				
1	Kurangnya apresiasi masyarakat, khususnya generasi muda terhadap kebudayaan daerah, ditandai dengan mulai lunturnya nilai-nilai budaya daerah di kalangan generasi muda.	1. Pemerintah Daerah DIY hendaknya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan DIY untuk memasukan materi kebudayaan dalam kurikulum pendidikan di DIY, agar keterpaduan spirit Keistimewaan itu betul-betul nyata dan menyatu, sejak usia dini hingga Lansia, sejak PAUD hingga Perguruan Tinggi. Selain itu agar <i>output</i> kebudayaan dengan spirit keistimewaan dapat terlihat pada insan milenial melalui pendidikan.	Pendidikan Khas Kejojgaan telah diimplementasikan di seluruh jenjang pendidikan di DIY, Pendidikan Khas Kejojgaan (PKJ) ini diharapkan mampu memberikan penguatan di dalam proses pendidikan di DIY. Bentuk implementasi secara teknis dalam kegiatan belajar mengajar yaitu dengan menyisipkan materi PKJ berupa penguatan nilai-nilai kekhasan Jogja pada kurikulum yang ada, atau jika terpisah, dapat diterapkan pada ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Materi PKJ juga dapat diakses pada aplikasi daring melalui Sistem JBClass, ini merupakan sebuah aplikasi <i>learning management system</i> berbasis website yang di design sebagai media tambahan atau pengayaan pembelajaran yang akan melengkapi pembelajaran konvensional melalui kelas maya. Sistem ini merupakan media efektif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, serta dapat memudahkan guru untuk mengelola kelas dengan berbagai konten dan fitur yang dapat menunjang kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Aplikasi web ini dibuat dan disentralkan di Balai Teknologi Pendidikan Yogyakarta. Aplikasi web ini dapat dikelola oleh guru, siswa, dan orangtua dimana mereka berperan aktif dalam berjalannya sistem ini. Seorang guru, dapat mengelola kelas dan manajemen kelasnya seperti halnya kelas konvensional pada umumnya, siswa juga dapat mengikuti berbagai kelas dari guru guru lainnya tentunya sudah di tambahkan oleh guru-guru masing kelas, selain itu orangtua juga dapat memantau nilai-nilai dari tugas dan ujian anaknya. Website JBClass ini dapat diakses di http://jbclass.jogjabelajar.org/ . Salah satu menu pada	Pendidikan Khas Kejojgaan merupakan pelengkap pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek pendidikan di DIY, untuk pendidikan formal mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Sedangkan untuk pendidikan non-formal mulai dari PAUD non formal, kejar paket A, B, C, serta pendidikan orang dewasa yang diselenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Subjek didik tersebut mendapatkan substansi

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
			Sistem JBClass ini adalah Jogjabelajar Budaya (JB Budaya), yang merupakan salah satu bagian dari Portal Jogjabelajar yang didalamnya berisi konten-konten budaya asli khas DIY, dapat diakses melalui link https://jbbudaya.jogjabelajar.org/ .	kurikulum nasional dalam Sistem Pendidikan Nasional plus PKJ. Siapapun yang pernah mengenyam Pendidikan di Yogyakarta diharapkan memahami dan menginternalisasi PKJ. Secara kontekstual tidak mungkin pendidikan di Yogyakarta menjadi eksklusif karena berbagai tantangan perkembangan zaman, gaya hidup, sirkulasi budaya nasional dan global tidak lepas pada kehidupan masyarakat dan Subyek didik Yogyakarta. Itulah sebabnya PKJ menjadi salah satu variabel penting dalam mengantisipasi dan mereduksi pengaruh perilaku negatif.
		2. Pemerintah Daerah DIY hendaknya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan DIY untuk memasukan materi kebudayaan dalam kurikulum pendidikan di DIY, agar keterpaduan spirit	Pemda DIY telah berupaya melakukan implementasi nilai-nilai luhur budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurikulum pendidikan di DIY yang telah diawali oleh Pemda DIY melalui penyusunan panduan Pendidikan Khas Kejojgaan oleh kalangan pakar akademis (perguruan tinggi), budayawan, ahli pendidikan religi, dan kalangan institusional (Dewan Pendidikan Kota dan Kabupaten di DIY). Panduan ini diterapkan	Pendidikan Khas Kejojgaan yang telah diujicobakan mulai dari jenjang PAUD hingga Perguruan Tinggi diharapkan mampu memberikan contoh bagi



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		Keistimewaan itu betul-betul nyata dan menyatu, sejak usia dini hingga Lansia, sejak PAUD hingga Perguruan Tinggi. Selain itu agar <i>output</i> kebudayaan dengan spirit keistimewaan dapat terlihat pada insan milenial melalui pendidikan.	pada berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.	implementasi nilai-nilai budaya dalam pembelajaran sehingga mampu membentuk pribadi yang memiliki karakter baik sekaligus terampil dalam keilmuannya.
2	Luasnya cakupan urusan kebudayaan baik dari aspek obyek kebudayaan maupun pengampu urusan kebudayaan baik sektoral maupun kewilayahan yang menyebabkan belum semua obyek kebudayaan mendapatkan intervensi melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pengampu urusan kebudayaan.	3. Pemerintah Daerah DIY harus menambah program dan kegiatan untuk kelompok seni dan budaya religi yang ada di DIY. 4. Pemerintah Daerah DIY perlu untuk memaksimalkan sosialisasi kebudayaan melalui kanal Youtube dengan	Pada tahun 2023 terdapat subkegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi dengan Tolak Ukur Kinerja (TUK) yang memfasilitasi pembinaan dan penguatan terhadap organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 40 organisasi penghayat (nama-nama kelompok penghayat bisa dilihat di link https://bit.ly/penghayatDIY). Kolaborasi dalam sosialisasi kebudayaan telah dilaksanakan Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY melalui kanal youtube Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, dengan memberikan konten-konten kebudayaan, misalnya	Telah dilakukan upaya regenerasi supaya kelompok-kelompok tersebut keberadaannya tetap lestari. Kegiatan yang lain berupa hibah gamelan dan alat kesenian bernapaskan agama kepada gereja dan kelompok seni religi, antara lain berupa 2 set gamelan kepada gereja katolik di Kotagede, dan GKJ di Wonosari, serta 16 set alat hadrah kepada 16 kelompok hadroh yang tersebar di seluruh DIY (https://bit.ly/gamelanhadroh). Kolaborasi sosialisasi di bidang kebudayaan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		kolaborasi bersama Dinas Pendidikan untuk sosialisasi kepada peserta didik (siswa dan mahasiswa).	dapat dilihat melalui link berikut; https://youtu.be/tku8fJaN2c4?si=v9R2RAWpcAIFGTgj	
		5. Pemerintah Daerah DIY perlu untuk memaksimalkan sosialisasi kebudayaan melalui kanal Youtube dengan kolaborasi bersama Dinas Pendidikan untuk sosialisasi kepada peserta didik (siswa dan mahasiswa).	Pemda DIY telah melakukan sosialisasi kebudayaan antara lain melalui kanal Youtube maupun melalui kanal Jogja Belajar, yaitu Jogja Belajar Budaya, yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kebudayaan lokal Yogyakarta.	Sosialisasi kebudayaan telah dilaksanakan oleh Pemda DIY melalui media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada seluruh masyarakat, khususnya terkait pendidikan yang sarat nilai-nilai budaya
		6. Pemerintah Daerah DIY secepatnya membuat perencanaan dan melaksanakan sosialisasi kebudayaan dengan media <i>virtual</i> , seperti halnya Perencanaan <i>Virtual Museum</i> .	Museum Negeri Sonobudoyo melalui kegiatan tahun 2023 telah melaksanakan grand opening wahana interaktif berupa permainan VR jemparingan, alat musik "gamelan hero", mapping miniatur Sumbu Filosofi, video 3D kepahlawanan Sultan Agung menyerang Batavia, dan sebagainya. Sementara itu museum-museum di Kota Yogyakarta telah memiliki virtual tour museum.	Sosialisasi kebudayaan melalui media Virtual Reality (VR) dilaksanakan melalui subkegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman dengan melaksanakan kegiatan pameran museum baik di DIY maupun luar DIY, VR yang diangkat adalahinggalan budaya Kerajaan Mataram Islam Kerta-Pleret.
		7. Pemerintah Daerah DIY perlu untuk terus melakukan upaya-upaya pemulihan ekosistem sebagai akibat adanya pandemi	Sejak tahun 2022, kebijakan kegiatan dari yang semula daring telah diubah menjadi luring. Dalam kurun waktu tahun 2023 telah diluncurkan agenda budaya serta menyusun laporan infografis yang ditayangkan melalui kanal youtube serta sosial media Instagram @dinaskebudayaandi	Diharapkan dengan kegiatan luring tersebut mampu memulihkan



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		Covid-19 sehingga aktivitas kebudayaan bisa kembali maksimal.	dan @tasteofjogja_ , berisi tentang laporan kegiatan yang melibatkan jumlah pelaku seni/budaya, sarana prasarana yang digunakan, jenis-jenis kegiatan, hibah/bansos kepada masyarakat, kontribusi pada 7 objek pemajuan kebudayaan, sampai pada omset jika terjadi proses bisnis ekonomi pada kegiatan tersebut. Salah satu konten tersebut dapat dilihat di link http://bit.ly/infografisbulanandisbuddiy	ekosistem budaya pasca pandemi.
XXIV. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Perlu diperhatikan atas pemenuhan hak anak belum terlembagakan dengan baik di berbagai lembaga layanan anak serta perkawinan usia anak masih terus meningkat setiap tahun dan menjadi penyebab utama anak putus Sekolah.	1. Pemerintah Daerah DIY harus terus melakukan berbagai upaya dalam rangka menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Pemda DIY telah dan sedang melakukan berbagai upaya dalam rangka menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui: 1. Pembentukan FPKK dan Satgas tingkat Desa 2. Penguatan jejaring Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (FPKK, GTTPPO, Satgas PPA, LSM, Perguruan Tinggi) 3. Pengembangan satuan Pendidikan ramah anak 4. Sosialisasi Pencegahan KTPA (Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak).	Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan anak
2	Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pencapaian target perlindungan perempuan dan anak, antara lain: belum terbangunnya sistem pencegahan yang komprehensif, baik di keluarga, sekolah/ Lembaga	2. Mendorong kepada Pemerintah Daerah DIY untuk lebih serius dan terukur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Kebijakan penguatan ketahanan keluarga didesain untuk membentengi pengaruh negatif di kalangan remaja berupa maraknya	Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya melaksanakan amanat Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan keluarga dan yaitu Pergub DIY No. 106 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan keluarga Antara lain: 1. Sosialisasi Ketahanan Keluarga dimana di dalamnya terdapat materi terkait fungsi keluarga dan juga indeks ketahanan keluarga; 2. <i>Launching</i> Pusat Pembelajaran Keluarga, dengan nama PUSPAGA PRIMA DIY. PUSPAGA PRIMA DIY merupakan tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas keluarga dengan mendorong peningkatan	Permasalahan keluarga: 1. Kekerasan dalam rumah tangga 2. <i>Stunting</i> Pengasuhan dan tumbuh kembang anak

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	Pendidikan, maupun masyarakat; perkembangan teknologi informasi yang pesat; serta adanya pandemi Covid-19.	kekerasan remaja/kejahatan di jalan. Demikian pula keluarga memiliki tanggungjawab yang besar untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.	kapasitas orangtua, keluarga, atau orang yang bertanggung jawab mengasuh demi kepentingan terbaik anak; Telah disusun Renstra Pembangunan Keluarga	
3	Belum adanya kebijakan spesifik yang mengatur upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif kasus kejahatan jalanan.	3. Pemerintah Daerah DIY perlu untuk terus melakukan koordinasi dalam penanganan hukum terhadap persoalan kekerasan remaja/kejahatan jalanan.	Pemda DIY telah melakukan serangkaian koordinasi terkait penanganan anak jalanan yang melibatkan APH (Aparat Penegak Hukum), OPD terkait, dan LSM peduli anak yang menghasilkan beberapa skema penanganan kenakalan anak di jalan. Skema penanganan anak di jalanan, antara lain: 1. Kegiatan Patroli rutin oleh kepolisian dan Pol PP yang di tingkatkan 2. Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak pada Tingkat SLTA guna melakukan pencegahan kekerasan, bullying, dan penerapan disiplin positif oleh DP3AP2 DIY 3. Pembinaan anak Sekolah dengan Korem Pamungkas oleh Dikpora DIY Optimalisasi Pembinaan Remaja Bermasalah Sosial di BPRSR DIY	Penurunan kenakalan anak di jalan
XXIV. Urusan Perpustakaan				
1	Masih kurang optimalnya kunjungan fisik pengunjung di bidang perpustakaan. Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, jumlah ideal kunjungan ke perpustakaan umum tiap hari adalah 2%	1. Pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah perlu untuk terus dilakukan antara lain dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bacaan yang lebih aplikatif dengan era kekinian.	Tindak lanjut yang dilaksanakan untuk mengatasi hal tersebut adalah melaksanakan Layanan Perpustakaan Menetap di unit Grhatama Pustaka (GTP), di unit Jogja Library Center (JLC), di unit Rumah Belajar Modern (RBM). Serta Layanan Perpustakaan Ekstensi berupa Layanan Pojok Baca, Layanan Perpustakaan Keliling, Layanan Delivery Order (Pemustaka Istimewa)	Pemenuhan Kebutuhan Bacaan Masyarakat



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
2	<p>dari jumlah penduduk di suatu wilayah. Dari data website Dataku DIY jumlah kunjungan ke perpustakaan pada tahun 2022 sebanyak 2.223.606 orang dengan jumlah yang harus dilayani 3.265.200 orang. Jika dikonversi secara harian maka jumlah kunjungan ke perpustakaan setiap hari rata-rata 0,18% masih lebih rendah dari kondisi ideal yang diharapkan.</p> <p>Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan International</p>	<p>2. Pemerintah Daerah DIY melalui instansi terkait, perlu untuk terus mengembangkan layanan <i>online</i> bagi pengguna/anggota Perpustakaan DIY.</p>	<p>Meningkatkan layanan Perpustakaan virtual berupa website DPAD DIY, website Jogja Library for All, Website Center of Excellence (COE), dan aplikasi iJogja.</p>	<p>Pengembangan layanan <i>online</i> bagi pengguna/anggota Perpustakaan DIY</p>

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	<p>Association for the Evaluation of Education Achievement, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Untuk tingkat DIY, indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih terhitung rendah yaitu hanya mencapai 0,049 atau dari setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat. Guna meningkatkan literasi</p>			



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	masyarakat, diperlukan upaya yang lebih gencar dalam memasyarakatkan gemar membaca.			
		3. Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah didorong untuk terus mengembangkan inovasi layanan serta peningkatan literasi kepada masyarakat terhadap kemanfaatan perpustakaan DIY.	Pengembangan inovasi layanan serta peningkatan literasi kepada masyarakat dilakukan dengan peningkatan layanan aplikasi Si Yokca. dan pengadaan bahan bacaan berupa buku fisik dan juga ebook sepanjang tahun	Pengembangan inovasi layanan serta peningkatan literasi kepada masyarakat
XXIVII. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
1	Transmigran yang siap kerja dan terlatih dengan bekal ketrampilan yang tertunda karena dampak COVID-19 kami berharap mendapatkan jalan keluarnya dengan tambahan pembekalan ketrampilan sehingga mampu bergeser bekerja di sektor informal. Sedangkan pelaksanaan strategi	1. Pemerintah Daerah DIY perlu untuk membangun kerjasama dengan kasultanan dan Kadipaten Paku Alaman Kerja guna pemanfaatan tanah SG dan PAG untuk melaksanakan program transmigrasi lokal ke daerah pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul, Bantul maupun Kulon Progo.	Sesuai dengan Permenakertrans Nomor PER 15/MEN/VI/2007 tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi pada > pasal 1 ayat (8) Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. > pasal 7 ayat (2) "Tanah HPL (Hak Pengelolaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukan bagi transmigran diberikan dengan status Hak Milik". Penyelenggaraan Transmigrasi merupakan kebijakan Pemda, karena status tanah akan menjadi hak milik transmigran dan sesuai dengan rencana Tata Ruang Pemda DIY.	Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dapat berkolaborasi dengan menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat, dimana pada tahun 2020 tidak melakukan pengiriman transmigrasi.			
2	Masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai dengan kurangnya keterampilan, kurangnya kompetensi dan kurangnya daya juang/karakter. Tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi masih mendominasi serta kurang memadainya perlindungan norma kerja dan norma Keselamatan dan	2. Pemerintah Daerah DIY perlu untuk membangun kerjasama dengan kasultanan dan Kadipaten Paku Alaman Kerja guna pemanfaatan tanah SG dan PAG untuk melaksanakan program transmigrasi lokal ke daerah pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul, Bantul maupun Kulon Progo.	Dalam upaya peningkatan kualitas angkatan kerja pada TA 2023 terdapat penambahan jumlah peserta uji kompetensi tenaga kerja, yaitu sebanyak 200 orang. Disamping itu mulai dirintis untuk melaksanakan program pemagangan dalam negeri melalui dana keistimewaan, pada TA 2023 sebanyak 21 orang. Penyelenggaraan Pelatihan MTU TA 2023 sebanyak 67 paket naik 13 paket dari TA 2022 (54 paket) Upaya pencegahan kasus perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan kegiatan pembinaan sarana hubungan industrial dan syarat-syarat kerja di perusahaan serta meningkatkan layanan pengaduan perselisihan hubungan industrial baik secara <i>online</i> maupun layanan di LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) di Disnakertrans.	



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
3	Kesehatan Kerja (K3) serta penyelesaian Hubungan Industrial. Alokasi penempatan transmigran yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat terbatas walaupun sebenarnya animo masyarakat untuk melakukan transmigrasi cukup tinggi.	3.Mendorong Pemerintah Daerah DIY melalui program transmigrasi di tahun 2023 bagi yang sudah siap melaksanakan transmigrasi diluar Jawa. Tentunya dengan pendekatan pendampingan terhadap masyarakat DIY sebagai peserta transmigrasi.	Calon transmigran dari DIY telah lulus seleksi dibekali dengan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dalam proses penempatan juga dilakukan pendampingan dokter dan petugas sampai ke lokasi tujuan	Tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan juknis tentang pelaksanaan transmigrasi sehingga dapat mengatasi permasalahan kurang siapnya transmigran yang transmigrasi ke luar Jawa
4	Melakukan pendataan dan kerja sama dengan Kasultanan dan Paku Alaman untuk tanah-tanah sepanjang pantai selatan yang masuk kategori tanah SG dan PAG. Kerja sama yang dibangun guna pemanfaatan tanah SG dan PAG untuk melaksanakan program transmigrasi lokal ke daerah pantai selatan Gunung Kidul dengan	4.Pemerintah Daerah DIY harus lebih serius dalam mempersiapkan angkatan kerja DIY untuk memiliki ketrampilan lebih memasuki dunia kerja. Hal ini untuk mengurangi angka pengangguran terbuka di DIY dimana tahun 2022 gagal memenuhi target.	Pada tahun 2023 kepada peserta pelatihan berbasis kompetensi (PBK) diberikan pelatihan langsung di tempat kerja (On the Job Training) dan dari hasil evaluasi dari pengguna/perusahaan bahwa materi pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.	Tindak lanjut yang telah dilakukan diharapkan mampu mengatasi permasalahan tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	pembekalan diklat transmigrasi yang telah disiapkan. Transmigrasi lokal dapat dikembangkan sebagai salah satu pilihan peningkatan kesejahteraan masyarakat guna menekan angka kemiskinan masyarakat.			
XXIVIII. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Terjadinya kejahatan jalanan yang dilakukan oleh penduduk usia anak dengan dilatari oleh kondisi keluarga yang tidak dapat menjalankan fungsi keluarga dengan baik.	1. Pemerintah Daerah DIY secara berkesinambungan perlu untuk terus mensosialisasikan Peraturan Gubernur DIY Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Kesehatan Reproduksi Remaja di DIY. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama bagi perempuan diantaranya melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja, dan fasilitasi forum penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja.	Pemda DIY telah melakukan berbagai Upaya dalam menurunkan kenakalan remaja di jalanan melalui peningkatan kualitas keluarga, dengan Implementasi Peraturan Gubernur DIY nomer 102 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomer 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja, antara lain: 1) Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di 60 kelurahan dan kalurahan di DIY 2) Sosialisasi Kesehatan Reproduksi di 33 Sekolah Ramah Anak (SRA) 3) Sosialisasi KB di 18 kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan angka pernikahan dini Meningkatnya kualitas keluarga sehingga keluarga dapat berfungsi dengan baik bagi seluruh anggotanya
2	Masih adanya kasus administrasi	2. Melakukan percepatan pembuatan dan pelaksanaan	Pemda DIY telah menindhalanjuti Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan keluarga, dengan menerbitkan	Menurunnya jumlah keluarga bermasalah



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
3	<p>kependudukan karena pernikahan siri dan anak yang lahir dengan asal usul yang kurang jelas.</p> <p>Kami melihat adanya kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah masih adanya perkawinan yang tidak dilaporkan dan dicatatkan serta kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Upaya itu adalah untuk mendorong tercapainya target dilakukan melalui Pembinaan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan</p>	<p>Peraturan Gubernur DIY atas mandat Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan keluarga, yaitu: tentang Fungsi Keluarga, Indeks Ketahanan Keluarga, Rencana Strategis Pembangunan Keluarga, Konselor Ketahanan Keluarga dan Pergub tentang Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga.</p> <p>3. Pemerintah Daerah DIY harus memiliki agenda terukur dalam peningkatan angka harapan hidup masyarakat DIY agar mampu memenuhi target.</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.</p> <p>Implementasi dari peraturan tersebut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan buku dan sosialisasi pengasuhan berbasis budaya jawa 2. Sosialisasi dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebanyak 15 lokasi di DIY 3. Layanan konseling tatap muka dengan PUSPAGA PRIMA 4. Layanan telekonseling dengan TESAGA DIY <p>Dalam rangka peningkatan angka harapan hidup masyarakat DIY telah diupayakan langkah-langkah terukur dengan program/kegiatan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan peningkatan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Layanan kesehatan minimal tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal. b. Meningkatkan kunjungan ibu hamil dan kualitas layanan (saat ini standar meningkat menjadi minimal 6 kali). c. Persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. d. Memberikan layanan kesehatan balita, usia sekolah remaja dan usia produktif agar menjadi calon ibu yang sehat di kemudian hari. e. Melakukan pencatatan kesehatan ibu hamil melalui SIMKIA, pencatatan gizi balita melalui ePPGBM dan pencatatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja melalui mobscreen. 	<p>Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalaui pendekatan siklus hidup.</p>

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
	Ketahanan Keluarga serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga belum sepenuhnya berjalan optimal.			
XXIX. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
A. Sub Urusan Pekerjaan Umum				
		1.Pemda DIY harus melakukan upaya peningkatan jalan yang mengalami kerusakan sehingga memperkuat kondisi jalan untuk menghindari terjadinya kerusakan berulang guna menjamin Kenyamanan dan Keselamatan warga pengguna jalan.	Upaya perkuatan kondisi jalan di Ta. 2023 ini dengan adanya kegiatan peningkatan jalan di ruas Jalan Provinsi dan adanya Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Jalan Provinsi DIY. Peningkatan Jalan sendiri dilakukan dengan beberapa sumber dana seperti APBD, DAK, IJD, dan Dana IF. Kondisi jalan mantap DIY pada akhir tahun 2023 sebesar 70,582%	Upaya Peningkatan Jalan sudah dilakukan
		2.Pemda DIY harus segera memiliki peta potensi kerusakan jalan baik dari aspek beban yang berlebih atau dari aspek cuaca pada periode tertentu sehingga dapat menyiapkan langkah antisipasinya.	Bidang Bina Marga mempunyai paket Survei kondisi jalan dengan <i>output</i> peta (<i>stripmap</i>) seluruh jalan provinsi beserta kondisi kemantapannya. Sedangkan untuk Potensi kerusakan didapatkan dari kombinasi data peta bencana yang sering terjadi di ruas jalan provinsi yang dipunyai masing-masing sektor di bidang bina marga. Kondisi jalan mantap DIY pada akhir tahun 2023 sebesar 70,582%	Peta Kerusakan Jalan sesuai hasil survey kondisi Jalan Ta.2023



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		3. Pemda DIY segera menetapkan Peraturan Gubernur DIY sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.	Dinas PUPESDM DIY pada TA. 2023 telah melaksanakan penyusunan materi teknis serta Rancangan Peraturan Gubernur DIY yang merupakan turunan Perda DIY Nomor 7/2022, yaitu: (1). Rancangan Pergub DIY tentang Pemberdayaan Organisasi P3A; dan (2). Rancangan Pergub DIY tentang Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Progres sampai dengan bulan Februari Tahun 2024, adalah: (1). Terbit Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang ditetapkan Gubernur DIY pada tanggal 9 Januari 2024; (2). Harmonisasi Rancangan Pergub DIY tentang Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, yang difasilitasi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.	Penguatan kapasitas kelembagaan organisasi P3A sebagai unsur dari kelembagaan pengelola irigasi melalui: (1). Fasilitasi pembentukan dan legalitas kelembagaan; (2). Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan; dan (3). Fasilitasi pelaksanaan tata nilai budaya Yogyakarta dalam pengelolaan sistem irigasi.
		4. Pemda DIY harus segera melakukan perbaikan sistem drainase yang menjadi kewenangannya serta mengoordinasikan perbaikan sistem drainase baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.	Dinas PUPESDM DIY sampai dengan TA. 2023 telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin pada 2 unit jaringan drainase perkotaan (yaitu di kawasan MM UGM, Sleman dan kawasan Ngestiharjo, Bantul) serta melaksanakan pembangunan 2 unit jaringan drainase perkotaan di kawasan Bodon, Jagalan, Banguntapan, Bantul dan kawasan Dobongsan, Giripeni, Kulon Progo. Koordinasi penanganan drainase perkotaan (khususnya Kawasan Perkotaan Yogyakarta) secara rutin dilaksanakan pada Forum Koordinasi Sekretariat Bersama Yogyakarta Sleman Bantul (Sekber Kartamantul) yang didalamnya terdapat wakil dari Pemda DIY dan BBWS Serayu Opak sebagai wakil Pemerintah Pusat. Namun demikian perlu disusun kebijakan operasional antara pemda kab./kota, provinsi dan pusat dalam penanganan genangan di perkotaan DIY, sebagai bagian dari landasan hukum penyelenggaraan drainase perkotaan di wilayah DIY.	Penanganan genangan perkotaan melalui penyelenggaraan sistem drainase perkotaan khususnya di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dapat secara cepat terkoordinasi dalam Forum Sekber Kartamantul.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
B. Sub Urusan Penataan Ruang				
		1. Pemda DIY wajib merumuskan strategi pengendalian pemanfaatan ruang dengan didahului pemetaan permasalahan yang didukung data dan informasi pelanggaran pemanfaatan tata ruang sehingga pengendalian pemanfaatan tata ruang bisa berjalan secara efektif.	Melalui penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pengenaan Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang, antara lain bertujuan untuk: a. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW; b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW; c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang.
		2. Pemda DIY harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemangku Kepentingan Pertanahan dan Tata Ruang untuk mengintegrasikan data dan informasi pertanahan dan tata Ruang DIY.	Dalam rangka pengintegrasian data pertanahan dan tata ruang di DIY telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Integrasi Data Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis pada Sistem Informasi. Sebagai wujud dari implementasi tersebut adalah telah terbangun command center pertanahan dan tata ruang sebagai wujud dari integrasi data dari seluruh lintas sektor.	Terjalinnnya koordinasi lintas sektor dengan baik sehingga kebijakan yang dihasilkan diharapkan selaras antara provinsi dan kabupaten/ kota. Perlu adanya sarana Bersama antara <i>stakeholder</i> terkait khususnya dalam integrasi data pertanahan dan tata ruang sehingga dalam proses pengambilan kebijakan dapat dilaksanakan dengan sistematis, transparan, terstruktur, efisien dan efektif.



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		3. Pemda DIY harus secara tegas mengimplementasikan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2017 ttg Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya memperkokoh keistimewaan DIY.	Akan ditindaklanjuti dengan OPD lintas sektor terkait kaitannya dengan implementasi arsitektur berciri khas daerah istimewa yogyakarta	Terjaganya ciri khas arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.
		4. Pemerintah Daerah DIY harus secara tegas mengimplementasikan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2017 ttg Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya memperkokoh keistimewaan DIY.	<p>Peran penting warisan budaya dan cagar budaya sebagai penanda keistimewaan DIY merupakan perwujudan dari identitas dan jati diri masyarakat DIY. Dinas Kebudayaan DIY memiliki kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berupaya untuk mempertahankan kelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya penanda-penanda keistimewaan DIY. Adapun beberapa indikator kegiatan yang akan dilakukan antara lain: Rekomendasi Pelestarian WBCB, Pemanfaatan Pengelolaan WBCB, Penelitian WBCB, Pengawasan dan Pengendalian WBCB, Penataan Fasad Malioboro, dan Jogja Heritage Track.</p> <p>Pada tahun 2023, dilakukan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Warisan Budaya Cagar Budaya sebanyak 119 bangunan di Kawasan Cagar Budaya dalam rangka penegakan Perda Arsitektur berciri khas bangunan DIY, yaitu dengan pengawasan rekomendasi IMB yang sudah ditetapkan oleh Dewan Warisan Budaya, dikendalikan sesuai dengan kertas kerja rancang bangun terhadap praktiknya di lapangan.</p>	Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya merupakan tugas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya, serta untuk menerapkan kebijakan yang menjamin terlindungi dan termanfaatkannya Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
XXX. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
		1. Pemda DIY harus melakukan integrasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat terutama terkait masalah data Rumah Tidak Layak Huni di wilayah DIY.	Pemda DIY dan pusat, yang dalam hal ini Balai P2P Jawa III, serta Pemkab/pemkot telah berkoordinasi setiap semester untuk melakukan sinkronisasi data penanganan dan rencana penanganan melalui berbagai sumber pendanaan meliputi APBN, APBD prov, APBD kab/kota, CSR, DAK, DAIS, dan dana lainnya	Meminimalisir tumpang tindih penanganan serta memudahkan dalam proses penghitungan capaian program
		2. Integrasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni harus didukung dengan integrasi sistem informasi pendataan terpadu yang tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten/Kota,	Pemda DIY melalui Dinas PUPESDM DIY berupaya mengembangkan sistem informasi perumahan yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses pendataan, rencana penanganan, dan pengecekan bila adanya tumpang tindih data. Aplikasi yang digunakan adalah NDALEM. tautan: https://ndalem.jogjaprovo.go.id/ Namun untuk saat ini belum dapat diakses dikarenakan terdapat permasalahan pada sistem yaitu mengalami <i>defacement</i> yang berdampak pada halaman website NDALEM disusupi halaman ilegal berupa judi <i>online</i> . Sehingga untuk mencegah dampak kerentanan yang lebih luas sampai tindakan perbaikan selesai dilakukan, Diskominfo DIY melakukan <i>takedown</i> (menutup akses pada sistem). Berdasarkan rekomendasi dari Diskominfo DIY perlu dilaksanakan: 1. sanitasi input untuk memastikan keamanan data dan membatasi jenis berkas yang dapat diunggah hanya pada berkas yang dibutuhkan. 2. Mengganti sistem secara keseluruhan jika sistem yang sekarang dipakai sudah lama tidak dilakukan update dan pemeliharaan. Progres saat ini masih dilaksanakan evaluasi dan perbaikan di lingkup internal OPD.	Meminimalisir adanya tumpang tindih penanganan atau adanya calon penerima bantuan yang menerima bantuan dalam secara berturut yang berasal dari sumber pendanaan yang berbeda. Serta memudahkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		3. Pemda DIY harus melakukan integrasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanganan permukiman di kawasan kumuh.	Pemda DIY melakukan monitoring dan evaluasi rutin secara berkala dengan Pusat (Balai), Kabupaten/Kota dan Bappeda untuk mengetahui capaian penanganan kawasan kumuh kewenangan masing-masing.	Berbagai kendala yang terjadi dalam melakukan penanganan kawasan kumuh dapat teridentifikasi dan segera melakukan koordinasi untuk tindak lanjut penanganannya. Selain itu data capaian penanganan kawasan kumuh masing-masing Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dapat selalu diperbaharui, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penanganan.
		4. Pemerintah Daerah DIY Perlu meningkatkan upaya pengendalian terhadap arsitektur bangunan perumahan dan permukiman berciri khas DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperkuat identitas suatu kawasan yang dapat mendorong peningkatan sektor pariwisata.	Dengan ditetapkannya Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO, terdapat tugas dan kewajiban yang mengikuti sebagai tindak lanjut atas manajemen plan yang sudah disusun. Pada tahun 2023, dilakukan kegiatan penataan Fasad Malioboro sebanyak 25 bangunan toko agar sesuai dengan kekhasan arsitektur yang melekat pada kawasan di jalan Malioboro. Sementara itu pada subkegiatan yang lain yaitu Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan, dalam 3 tahun terakhir, dilakukan pendampingan kegiatan BKK Kalurahan di Kalurahan Pleret. Pada tahun 2023 melakukan kegiatan pembangunan bangunan paduraksa di Kawasan Makam Ratu Malang, penataan fasad pagar, pembangunan rumah limasan, pembangunan pusat UMKM yang mengaju pada arsitektur bangunan permukiman khas Kerajaan Mataram Islam Kerta-Plered.	Kegiatan ini merupakan salah satu usaha peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
		5. Pemda DIY Perlu meningkatkan upaya	Pemda DIY melalui Dana Keistimewaan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan BKK Arsitektur Khas Yogyakarta Tahun Anggaran	Pembangunan baru rumah layak huni dengan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		pengendalian terhadap arsitektur bangunan perumahan dan permukiman berciri khas DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2017 ttg Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperkuat identitas suatu kawasan yang dapat mendorong peningkatan sektor pariwisata.	<p>2023 kepada 66 Kalurahan penerima agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan petunjuk teknis OPD</p> <p>1. Pekerjaan penyusunan Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan untuk Perencanaan Teknis pra-rancangan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat DIY di Jalan Kenari Yogyakarta</p> <p>Penyelesaian:</p> <p>a. Dalam rangka Pekerjaan penyusunan Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan untuk perencanaan teknis pra-rancangan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, Dinas PUP-ESDM DIY mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dewan Warisan Budaya sesuai pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah DIY Nomor 1 tahun 2017 mengenai ketentuan-ketentuan penerapan gaya arsitektur bangunan milik pemerintah daerah.</p> <p>Arahan Arsitektur Bangunan</p> <p>a. Gaya Arsitektur bangunan yang diterapkan pada Pra rancangan Gedung DPRD DIY menggunakan Gaya Arsitektur Tradisional Jawa dengan pola arsitektur selaras Parsial (kombinasi dan modifikasi) telah sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah;</p> <p>b. Desain/ perencanaan teknis pra-rancangan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY yang diajukan disetujui;</p>	<p>gaya khas tradisioal Jawa telah telaksana dan diharapkan mampu memberikan ciri khas kawasan</p> <p>Pelaksanaan BKK Arsitektur khas Yogyakarta diutamakan pada Kalurahan yang termasuk ke dalam 15 kapanewon prioritas penanggulangan miskin, kalurahan yang masuk dalam desa mandiri budaya dsb, serta kawasan yang menjadi prioritas penanganan RTLH dari Kabupaten. Sehingga diharapkan pelaksanaan BKK dapat mengurangi angka kemiskinan dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman serta meningkatkan potensi perekonomian kawasan.</p> <p>Permasalahan:</p> <p>a. Dinas PUPESDM DIY merencanakan melakukan Pekerjaan penyusunan</p>



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
				<p>Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan untuk perencanaan teknis pra-rancangan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat DIY;</p> <p>b. Lokasi pra-rancangan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat DIY berada di Jalan Kenari Yogyakarta berada diluar Kawasan Cagar Budaya. Sesuai ketentuan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 4 ayat (4) dinyatakan bahwa Gaya Arsitektur Bangunan di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa.</p> <p>c. Gedung DPRD DIY sebagai bangunan Pemerintah Daerah DIY harus mengikuti</p>

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
				ketentuan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 9 ayat (1) Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus menggunakan Arsitektur Bangunan yang bergaya Arsitektur Tradisional Jawa.; dan Pasal 9 ayat (3) Penerapan gaya Arsitektur Bangunan pada Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa wajib mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya.
		6. Pemda DIY Perlu meningkatkan upaya pengendalian terhadap arsitektur bangunan perumahan	Dengan ditetapkannya Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO, terdapat tugas dan kewajiban yang mengikuti sebagai tindak lanjut atas manajemen plan yang sudah disusun. Pada tahun 2023, dilakukan kegiatan penataan Fasad Malioboro sebanyak 25 bangunan toko	Kegiatan ini merupakan salah satu usaha peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		dan permukiman berciri khas DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2017 ttg Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperkuat identitas suatu kawasan yang dapat mendorong peningkatan sektor pariwisata.	agar sesuai dengan kekhasan arsitektur yang melekat pada kawasan di jalan Malioboro. Sementara itu pada subkegiatan yang lain yaitu Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan, dalam 3 tahun terakhir, dilakukan pendampingan kegiatan BKK Kalurahan di Kalurahan Pleret. Pada tahun 2023 melakukan kegiatan pembangunan bangunan paduraksa di Kawasan Makam Ratu Malang, penataan fasad pagar, pembangunan rumah limasan, pembangunan pusat UMKM yang mengaju pada arsitektur bangunan permukiman khas Kerajaan Mataram Islam Kerta-Plered.	Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
XXXI. Urusan Lingkungan Hidup				
		1. Pemerintah Daerah DIY harus mempercepat skema pengelolaan sampah di TPA Piyungan termasuk pengelolaan IPAL di TPA Regional Piyungan	Skema pengelolaan sampah di DIY akan diarahkan untuk dilakukan desentralisasi. Melalui kebijakan pelimpahan pengelolaan sampah ke kab/kota, maka Pemda DIY mendorong agar pemerintah kab/kota untuk segera melakukan finalisasi peta jalan dan mengawal pelaksanaan menuju desentralisasi melalui pembinaan dan fasilitasi. Pemda DIY melakukan kajian penutupan zona pasif TPA Regional Piyungan, dimana salah satu parameter yang dikaji adalah terkait dengan lindi. Apabila indeks risiko berdasar kajian tersebut besar maka akan dilakukan langkah-langkah lanjut dalam pengolahan lindi	Permasalahan persampahan regional
		2. Pemerintah Daerah DIY harus secara serius berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pengurangan timbulan sampah dengan melibatkan secara aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.	Pemberlakuan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di kabupaten/kota dilakukan di sisi hilir dengan membatasi kuota ke TPA Piyungan yang berasal dari Kabupaten/Kota, dan di sisi hulu dengan melakukan pembinaan dalam hal pengurangan maupun penanganan sampah berupa TPST/TPS3R yang memiliki teknologi pengolah sampah (RDF, Incinerator skala kecil) dan dapat melibatkan masyarakat sekitar untuk menjadi tenaga pemilah sampah	Percepatan upaya pengurangan timbulan sampah

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		3. Pemerintah Daerah DIY wajib meningkatkan program pengelolaan sampah yang ditangani oleh Kalurahan/Kelurahan sebagai lembaga pemerintah terdekat dengan sumber sampah rumah tangga untuk mengurangi volume timbulan sampah yang masuk ke TPA Regional Piyungan	Pada tahun 2023 ini sudah dilakukan upaya untuk optimalisasi TPS3R di tingkat kalurahan. Beberapa diantaranya melalui dana keistimewaan dengan BKK Jogja Hijau ke 2 kalurahan dan BKK Persampahan ke 4 kalurahan. Selain itu juga dilakukan pilot project kerjasama dengan swasta di 1 kalurahan. Pada tahun 2024, direncanakan akan 4 kalurahan lagi yang mendapatkan fasilitasi BKK Jogja hijau. Selanjutnya diperlukan adanya komitmen bersama Kabupaten/Kota untuk mengembangkan pengolahan sampah di tingkat kalurahan	Percepatan upaya penanganan sampah dari sumbernya
		4. Pemerintah Daerah DIY harus meningkatkan pembangunan TPS3R di wilayah Kalurahan/Kelurahan sebagai terminal pemilahan sampah rumah tangga.	Pada tahun 2021, DLHK DIY telah menyusun Kajian Evaluasi Pengurangan Sampah dari Pengelolaan Sampah Mandiri di DIY (Optimalisasi TPS3R). Berdasarkan kajian tersebut, terdapat 64 TPS3R di DIY terdiri dari 53 unit yang aktif, 9 unit tidak aktif, dan 2 unit sedang tahap pembangunan (Data 2021). TPS3R tsb dievaluasi berdasarkan indikator dalam Juknis PU meliputi aspek Teknis-Teknologi, Kebijakan, kelembagaan, Keuangan, dan Partisipasi. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh data sebanyak 9 unit dalam status Baik, 34 Sedang, 10 unit Kurang, dan 11 lainnya tidak dapat dievaluasi karena tidak aktif /tahap pembangunan. Kendala yang dihadapi dalam dalam pengelolaan TPS3R antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kelembagaan, SDM, partisipasi masyarakat termasuk jumlah pelanggan, serta kondisi sosial masyarakat. TPS3R dapat menjadi solusi sebagai salah satu sarana pemilahan dan pengolahan sampah, namun demikian pembangunan TPS3R baru harus memperhatikan banyak aspek sebagaimana hasil kajian di atas. Selain itu pembangunan TPS3R tidak hanya untuk tempat pemilahan, sebaiknya didukung dengan teknologi pengolahan sampah yang bertujuan mengurangi volume residu yang dibuang ke TPA.	Percepatan upaya penanganan sampah dari sumbernya
		5. Pemerintah Daerah DIY harus mengantisipasi potensi tumpukan berlebih timbulan	Pada Bulan September pembukaan darurat TPA Regional Piyungan, berdasarkan kesepakatan Pemda DIY dengan Pemkab/Pemkot membatasi	Penanganan darurat sampah di DIY



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		sampah di TPA Piyungan pada masa transisi sampai dengan terealisasinya pengolahan sampah di TPA Piyungan.	kuota sampah yang masuk ke TPA yaitu 360 ton/hari yang dibagi kepada kabupaten/kota KARTAMANTUL	
XXXII. Urusan Perhubungan				
	1. Pemerintah Daerah DIY agar melakukan terobosan dan inovasi terkait aspek budaya transportasi masyarakat sehingga dapat beralih ke transportasi publik dalam mobilitas keseharian dan mobilitas ke tempat-tempat wisata di DIY.	<p>1. Pada saat ini telah dilakukan <i>rerouting</i> beberapa trayek angkutan perkotaan Trans Jogja, khususnya yang melintasi Kawasan pusat kota. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah mobilitas penumpang maupun wisatawan untuk menjangkau pusat – pusat kegiatan Masyarakat seperti perkantoran, pasar, layanan kesehatan serta lokasi wisata.</p> <p>2. Guna meningkatkan minat Masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, Dinas Perhubungan DIY mengupayakan pemanfaatan teknologi pada layanan angkutan umum, seperti pemasangan PTIS (Public Transport Information System) dimana teknologi tersebut mampu memberikan informasi jam kedatangan, rute serta informasi lainnya secara <i>real time</i> sehingga mempermudah penumpang dalam menggunakan layanan Trans Jogja.</p> <p>Memberikan tarif khusus layanan angkutan Trans Jogja pada waktu maupun event-event tertentu.</p>	<p>1. Penyediaan layanan informasi berupa PTIS (Public Transport Information System) yang di pasang pada lokasi Halte di Kawasan Malioboro.</p> <p>2. Melakukan perpanjangan rute Trans Jogja jalur 6A, 6B, 10 serta ekstensi jalur 15 ke Palbapang Bantul.</p> <p>3. Penerapan tarif khusus sebesar Rp1,00 yang berlangsung dari tanggal 12-31 Agustus 2023 dalam rangka Pekan QRIS Nasional.</p> <p>Penerapan tarif khusus bagi pengguna layanan Teman Bus yakni pelajar/mahasiswa, lansia, dan penyandang disabilitas mulai tanggal 1 Juli 2023.</p>	

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		2. Perlu dibuat kebijakan parkir bus wisata di luar wilayah Kota Yogyakarta yang didukung dengan angkutan-angkutan umum sebagai penghubung ke tempat-tempat wisata Kota Yogyakarta.	1. Dinas Perhubungan DIY telah melakukan kajian terhadap skema maupun potensi pemanfaatan <i>Park and Ride</i> Bandara Adisutjipto sebagai salah satu titik lokasi perpindahan para wisatawan yang menggunakan bus pariwisata dengan memanfaatkan integrasi moda KRL dan angkutan Trans Jogja menuju lokasi-lokasi wisata di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. <i>Park and Ride</i> Bandara Adisutjipto juga direncanakan memiliki penambahan fasilitas seperti <i>Gallery Transport</i> sebagai daya tarik bagi wisatawan yang transit serta fasilitas istirahat bagi wisatawan yang menunjang konsep <i>Bed and Breakfast</i>	1. Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan berkaitan dengan potensi perpanjangan layanan Kereta Api Bandara YIA hingga ke Stasiun Maguwo guna meningkatkan integrasi layanan angkutan. Telah disusun dokumen DED <i>Park and Ride</i> Bandara Adisutjipto yang memuat rencana pengembangan <i>Park and Ride</i> Bandara Adisutjipto
		3. Pemerintah Daerah DIY harus membangun sistem transportasi yang terintegrasi antar-moda transportasi yang menjangkau kawasan kerja, pendidikan, wisata, dan kawasan lainnya.	Dinas Perhubungan DIY berupaya melakukan integrasi layanan antar moda transportasi dengan melakukan koordinasi, pemenuhan infrastruktur serta uji coba layanan yang melibatkan berbagai pengampu kepentingan terkait seperti operator layanan angkutan baik yang berbasis jalan, rel dan udara, BUMN serta Kementerian Perhubungan	Bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan integrasi layanan antar moda meliputi: 1. Akseptasi layanan kartu KMT pada comutter line dengan layanan Bus Transjogja sehingga pengguna layanan comutter line dapat langsung menggunakan layanan trans jogja dengan satu kartu



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
				<p>2. Penyediaan layanan angkutan menuju Simpul atau Destinasi wisata yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta ke daerah yang belum terlayani oleh layanan angkutan dengan melibatkan operator BUMN yaitu DAMRI</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan berkaitan dengan potensi perpanjangan layanan Kereta Api Bandara YIA hingga ke Stasiun Maguwo guna meningkatkan integrasi layanan angkutan</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan aplikator penyedia layanan transportasi untuk menciptakan layanan <i>First mile</i> dan <i>Last mile</i> yang dapat terintegrasi antara layanan trans jogja dengan Ojek</p>

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
XXXIII. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral				Online/ASK atau sebaliknya. 5. Melakukan Uji Coba Contra Flow di depan Stasiun Tugu (Jalan Pasar Kembang) guna meningkatkan integrasi antara layanan kereta api dengan Bus Trans Jogja.
		1. Pemda DIY segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan PLN guna mensinkronkan data DTKS khususnya terkait dengan data penerima subsidi listrik	Dinas PUPESDM DIY telah berupaya membangun koordinasi dan kolaborasi lebih baik lagi dengan PLN (baik UP3 Yogyakarta maupun UID Jateng-DIY) dalam rangka pemberian akses listrik bagi masyarakat (melalui APBD, APBN dan CSR PLN) serta telah berupaya membangun jejaring verifikasi data subsidi listrik terhadap calon penerima bantuan listrik. Dinas PUPESDM DIY juga telah berkirin surat hasil verifikasi data DTKS kepada PLN UID Jateng-DIY untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan PLN Pusat dan Kementerian ESDM agar dapat di-inject ke dalam data subsidi listrik melalui Surat Nomor: 671/10827 tanggal 16 Maret 2023. Data tersebut merupakan hasil inventarisasi usulan dari temuan di lapangan, masyarakat, kalurahan, kapanewon maupun Bappeda kabupaten.	Telah dilakukan pemadanan dan verifikasi data oleh PT. PLN dan Kementerian ESDM berdasarkan usulan Dinas PUPESDM DIY.
		2. Pemda DIY harus melakukan verifikasi faktual terhadap izin-izin tambang yang sudah <i>existing</i> mengingat adanya perubahan regulasi dimana peran dan kewenangan Pemerintah Provinsi	Verifikasi sudah dilakukan terhadap 58 IUP dan 5 SIPB yang diterbitkan pusat, dan memerlukan kembali rekomendasi kesesuaian tata ruang dan dokumen lingkungan sesuai dengan arahan Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2022. Sedangkan mengenai status IUP /IPR Existing yang dicabut BKPM RI sebanyak 42 izin, sudah dilakukan proses pemulihan izin sebanyak 14 izin sedangkan sisanya menerima proses pencabutan tersebut. Sampai dengan akhir 2023 Jumlah Izin Usaha Pertambangan	Konfirmasi ke BKPM terkait pemulihan IUP OP/IPR yang dicabut izinnya dan proses tindak lanjut serah terima perizinan dari Kementerian ESDM yaitu



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		dikembalikan untuk menerbitkan izin pertambangan.	Operasi Produksi yang telah diterbitkan berjumlah 119 IUP OP sedangkan yang masih berlaku berjumlah 43 IUP OP. Untuk Izin Pertambangan Rakyat berjumlah 75 IPR sedangkan yang masih berlaku berjumlah 51 IPR.	dengan melaksanakan proses verifikasi izin, pemberian rekomendasi dan penerbitan izin serta proses perpanjangan izin
		3. Pemda DIY harus konsisten dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan izin pertambangan.	Telah dilaksanakan pengawasan pada izin usaha pertambangan. Pengawasan izin usaha pertambangan dilakukan agar sesuai kaidah pertambangan yang baik. Pengawasannya meliputi 2 (dua) aspek yaitu aspek Teknis Penambangan yang pengawasannya dilakukan oleh Inspektur Tambang (Kementerian ESDM) dan aspek Tata Kelola Perusahaan yang pengawasannya dilakukan oleh Pengawas Daerah (DPUPESDM). DPUPESDM melakukan inventarisasi penambangan tanpa izin dan diberikan himbauan agar melakukan pengurusan izin sebelum melakukan kegiatan penambangan dan ditembuskan ke Aparat Penegak Hukum yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum. Dalam rangka kegiatan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, Pemda DIY membentuk Tim Terpadu sesuai Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan di DIY.	Pemda DIY telah mengirimkan 30 surat peringatan (SP) terhadap izin usaha pertambangan yang melanggar ketentuan dalam dokumen izin serta 40 surat himbauan terhadap penambangan tanpa izin (PETI).
		4. Pemda DIY harus konsisten dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan izin pertambangan.	Melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan secara non yustisial terhadap pelanggar Perda penambangan liar yang terjaring melalui operasi penertiban perijinan.	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Perda terkait Penambangan Liar
XXXIV. Urusan Perencanaan Pembangunan				
		1. Pemda DIY harus mendorong peningkatan kualitas aparatur perencanaan pembangunan sampai dengan tingkat Kalurahan/Kelurahan,	Terkait dengan kualitas perencanaan di tingkat kalurahan, dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dilaksanakan salah satunya melalui reformasi kalurahan. Reformasi kalurahan terdiri atas dua aspek yaitu reformasi birokrasi kalurahan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan reformasi birokrasi kalurahan,	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan hingga tingkat kalurahan/ kalurahan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		Dusun/RW/RT agar dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas program-program pembangunan sebagai solusi permasalahan yang ada.	<p>diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kalurahan pada berbagai aspek termasuk di bidang perencanaan pembangunan, yang akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sudah diwadhahi mulai sejak dari Kalurahan/Kelurahan melalui forum Musrenbang Kalurahan/Kelurahan. Komponen-komponen masyarakat ikut dilibatkan di dalam proses penyusunan program prioritas Kalurahan/Kelurahan yang dituangkan dalam RKP Kalurahan/Kelurahan dan selanjutnya akan diusulkan secara berjenjang ke tingkat Kapanewon/Kemantren, Kabupaten/Kota, dan provinsi sesuai dengan kewenangannya. Skema keterlibatan masyarakat tersebut juga digunakan dalam proses penyusunan usulan pendanaan program kegiatan yang nantinya akan didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>Selain itu, dalam pertemuan resmi selama proses penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti forum konsultasi publik, forum OPD, musrenbang juga mengundang <i>stakeholder</i> pembangunan di DIY sebagai wujud pengejawantahan prinsip partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Tak hanya berhenti disitu, Pemda DIY juga menyediakan kanal bagi masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan usulan-usulan pembangunan melalui fitur Usulan Masyarakat di aplikasi Jogjaplan, media sosial Pemda DIY (Instagram, Twitter, Youtube), serta aplikasi lainnya.</p>	
		2. Pemda DIY harus mendorong peningkatan kualitas aparatur perencanaan pembangunan sampai dengan tingkat Kalurahan/Kelurahan, Dusun/RW/RT agar dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif yang mencerminkan kebutuhan	Pemda DIY melakukan penguatan sumber daya manusia lembaga kemasyarakatan di Kalurahan/Kelurahan melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa. Pada setiap subkegiatan tersebut telah dilaksanakan Rapat Kerja Pembinaan Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Desa dengan melibatkan Balai PMD dan IRE Yogyakarta.	Penguatan sumber daya manusia lembaga kemasyarakatan di Kalurahan/Kelurahan



No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD	Permasalahan yang diselesaikan
		riil masyarakat atas program-program pembangunan sebagai solusi permasalahan yang ada.		



BAB IV

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

LKPJ
Gubernur DIY

Tahun

2023

BAB IV

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

2023

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diamanatkan bahwa penganggaran program dan kegiatan yang melalui mekanisme Tugas Pembantuan harus memperhatikan kemampuan keuangan Negara, keseimbangan pendanaan di daerah serta kebutuhan pembangunan daerah. Tujuan pengalokasian Tugas Pembantuan yaitu untuk menjamin tersedianya sebagian anggaran Kementerian/Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Total alokasi Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY pada Tahun 2023 dengan sebesar Rp50.345.481.000,00 atau turun 33,01% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp75.158.835.000,00. Kinerja keuangan berhasil direalisasikan sebesar Rp49.731.854.183,00 atau mencapai sebesar 98,78%, sedangkan realisasi capaian kinerja fisik mencapai 100%. Pelaksanaan Tugas Pembantuan selama Tahun 2023 secara detail akan disampaikan pada Sub Bab OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pembantuan, secara umum adalah:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri;
12. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun

2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;

C. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Pemda DIY selama tahun 2023, menerima beberapa Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui 5 (lima) Kementerian, yaitu:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Kementerian Koperasi dan UKM; dan
5. Kementerian Ketenagakerjaan.

Uraian selengkapnya akan dijelaskan pada sub bab berikut.

D. OPD YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pada tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian salah satunya melalui dana APBN Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian. Program dan kegiatan tersebut dialokasikan melalui 5 (lima) Satuan Kerja (Satker) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2023

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Satuan Kerja	Pagu Anggaran
1	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.03.4. 049087/2023	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	14.075.807.000
2	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.04.4. 049088/2023	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	2.709.050.000
3	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.05.4. 049089/2023	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DIY	2.018.481.000
4	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.06.4. 049090/2023	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	15.575.557.000
5	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.08.4. 049094/2023	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	842.344.000

Sumber: DPKP DIY, 2024

Adapun rincian pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:

a. Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049087/Tanaman Pangan)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.257.941.000	1.217.856.038	96,81	100
Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1.257.941.000	1.217.856.038	96,81	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	12.206.512.000	12.014.017.886	98.42	100

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	8.648.762.000	8.626.656.700	99,74	100
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealiala Tanaman Pangan	1.428.750.000	1.270.695.786	88,94	100
Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	2.129.000.000	2.116.665.400	99,42	100
Program Dukungan Manajemen	611.354.000	586.164.710	95,88	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	611.354.000	586.164.710	95,88	100

Sumber: DPKP DIY, 2024

b. Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049088/Hortikultura)

Kegiatan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.455.000.000	1.436.796.600,00	98,75	100
Kegiatan: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1.455.000.000	1.436.796.600,00	98,75	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.084.050.000	1.080.834.471,00	99.70	100
Kegiatan:Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1.084.050.000	1.080.834.471,00	99.70	100
Program Dukungan Manajemen	170.000.000	168.710.614,00	99.24	100
Kegiatan: Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	170.000.000	168.710.614,00	99.24	100

Sumber: DPKP DIY, 2024

c. Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049089/Perkebunan)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.865.748.000	1.858.888.667	99.63	100
Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan	1.178.653.000	1.174.690.883	99.66	100
Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	463.754.000	462.672.580	99.77	100
Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	223.341.000	221.525.204	99.19	100
Program Dukungan Manajemen	152.733.000	152.443.177	99.81	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	152.733.000	152.443.177	99.81	100

Sumber: DPKP DIY, 2024

d. Satker Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049090/ Peternakan dan Kesehatan Hewan)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	535.000.000	523.951.123	97.93	100
Kegiatan Pengembangan Pengelohan dan Pemasaran Hasil Ternak	535.000.000	523.951.123	97.93	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	14.784.965.000	14.613.128.665	98.84	100
Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak	480.000.000	465.544.920	96.99	100
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	6.015.400.000	5.969.505.788	99.24	100
Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	7.872.565.000	7.782.678.807	98.86	100
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	417.000.000	395.399.150	94.82	100
Program Dukungan Manajemen	255.592.000	244.673.400	95.73	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	255.592.000	244.673.400	95.73	100

Sumber: DPKP DIY, 2024

e. **Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049094/Sarana dan Sarana Pertanian)**

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	292.494.000	288.271.172	98,56	100
Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	100.000.000	95.975.172	95,98	100
Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	164.460.000	164.262.000	99,88	100
Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	28.034.000	28.034.000	100	100
Program Dukungan Manajemen	549.850.000	523.036.030	95,12	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	549.850.000	523.036.030	95,12	100

Sumber: DPKP DIY, 2024

f. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

- Adanya *refocusing* dan rasionalisasi anggaran saat kegiatan sudah dilaksanakan.
- Adanya syarat dan ketentuan dari pusat bahwa bantuan pemerintah (banpem) harus menggunakan *polygon* yang diinput melalui *e-reporting* Kementerian Pertanian (Kementan), tetapi belum semua data *polygon* calon penerima calon lokasi masuk di aplikasi *e-reporting* untuk banpem tahun 2023.
- Belum semua kelompok tani membentuk Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) sehingga pengelolaan dan pemanfaatan alsintan belum optimal di setiap Kecamatan.
- Perubahan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi sehingga memerlukan penyesuaian baik bagi petani, kios pengecer maupun petugas.

- e) Perubahan Petunjuk Teknis (Juknis) saat kegiatan sudah berlangsung menyebabkan re-alokasi kegiatan dan penundaan pelaksanaan.
- f) Target awal untuk vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berdasarkan data statistik tidak sesuai dengan data populasi di lapangan sehingga target vaksinasi sulit dicapai.
- g) Masih adanya keterlambatan revisi petunjuk teknis (juknis) kegiatan dari pusat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;

2) **Solusi**

- a) Pelaksanaan kegiatan selanjutnya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan target baru yang ditetapkan.
- b) Bekerjasama dengan Penyuluh selaku admin *e-reporting* untuk melakukan penginputan data poligon Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) pada aplikasi *e-reporting* Kementerian Pertanian (Kementan).
- c) Kelompok tani yang menerima bantuan dipersyaratkan untuk membentuk Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).
- d) Penyebaran informasi penebusan pupuk bersubsidi melalui sosialisasi kepada petani, kios pengecer, dan petugas.
- e) Memberikan masukan ke Direktorat Teknis untuk menyusun dan menetapkan Juknis sebelum pelaksanaan kegiatan serta tidak melakukan perubahan Juknis di tengah jalan.
- f) Mengusulkan perubahan target vaksinasi PMK menyesuaikan dengan ketersediaan hewan target vaksinasi di lapangan.
- g) Koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal dan apabila ditemukan kendala dan permasalahan dapat segera diantisipasi dan diselesaikan

2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY memiliki dua tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dan oleh Bidang Bina Marga. Tugas pembantuan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (SKPD TP-OP) Dinas PUPESDM DIY dengan kode Satker 049136. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, di wilayah administratif Pemerintah Daerah DIY terdapat dua Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang luas areanya lebih dari 3.000 Ha yang menjadi objek Tugas Pembantuan, yaitu Jaringan Irigasi Van der Wijck (luas 5.159 Ha) dan Jaringan Irigasi Kalibawang (7.152 Ha).

Tugas pembantuan bidang Bina Marga TA 2023 dilaksanakan oleh satker Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi D.I.Yogyakarta dengan kode satker 049029, meliputi kegiatan penanganan drainase, trotoar, dan fasilitas keselamatan jalan sepanjang 0.031 km, preservasi pemeliharaan rutin jalan sepanjang 50,89 km, preservasi rutin jembatan sepanjang 1.903,5 m, melalui Perjanjian Kinerja TA. 2023 untuk SKPD Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pagu Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Pagu Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2023

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	5.759.488.000,00	5.702.631.484,00
2	Direktorat Jenderal Bina Marga	7.774.365.000,00	7.761.702.893,00
	Jumlah	13.533.853.000	13.464.334.377

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

b. Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUP-ESDM DIY

Program dan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, dilakukan melalui Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dan Bidang Bina Marga meliputi:

1) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, meliputi:

- a) Monitoring dan Evaluasi E-PAKSI
 - (1) Monitoring dan Evaluasi E-PAKSI Jaringan Irigasi Van Der Wijck
 - (2) Monitoring dan Evaluasi E-PAKSI Jaringan Irigasi Kalibawang
- b) Operasi Rutin
 - (1) Operasi Jaringan Irigasi Van Der Wijck seluas 5.152 Ha.
 - (2) Operasi Jaringan Irigasi Kalibawang seluas 7.159 Ha.
- c) Pemeliharaan Berkala.
 - (1) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Van Der Wijck sepanjang 4,38 km.
 - (2) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Kalibawang sepanjang 8,36 km.
- d) Pemeliharaan Rutin.
 - (1) Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi Van Der Wijck sepanjang 45,41 km.
 - (2) Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi Kalibawang sepanjang 176,25 km.

e) Penyusunan.

Penyusunan Pelaporan Sistem manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Jaringan Irigasi Van Der Wijck di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul 1 Laporan.

f) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.

(1) Administrasi Kegiatan yaitu untuk Operasional kegiatan administrasi perkantoran seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), bahan komputer, surat menyurat, jilid dan fotocopy, makan minum rapat, perjalanan dinas, dan pembuatan pelaporan maupun pertanggungjawaban keuangan.

(2) Sistem Pelaporan Secara Elektronik (*E-Monitoring*) yaitu kegiatan pelaporan progres fisik dan keuangan secara elektronik yang diinput sebulan 2 (dua) kali melalui aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan aplikasi *e-proc* dari LKPP sebagai monitoring dan evaluasi (monev) oleh Kementerian PUPR.

g) Operasional Satker.

Operasional Satker yaitu kegiatan yang hanya untuk pembayaran honorarium Pejabat Perbendaharaan internal satker setiap bulannya selama 1 (satu) tahun anggaran.

2) ***Bidang Bina Marga, meliputi:***

a) Penyelenggaraan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta;

b) Koordinasi keterpaduan terhadap kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan fungsional OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program

Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY

1) Pengelolaan Sumber Daya Air

Tujuan Program Ketahanan Sumber Daya Air melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana adalah untuk mengoperasikan, menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi, perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan, sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air adalah melaksanakan tata kelola internal melalui administrasi umum dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.



Gambar 4.1. Operasi Jaringan Irigasi

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023



Gambar 4.2. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023



Gambar 4.3. Perbaikan Jaringan Irigasi

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023



Gambar 4.4. Pemeliharaan Berkala DI Van Der Wijk

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Bina OP Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp5.759.488.000,- dengan perincian untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rp9.600.000,- terealisasi Rp9.600.000,- atau 100% Kegiatan Operasi Rutin Rp2.961.665.000,- terealisasi Rp2.961.665.000,- atau 100% untuk Pemeliharaan Berkala sebesar Rp1.179.837.000,- terealisasi sebesar Rp1.177.873.000,- atau 99,83% untuk Pemeliharaan Rutin Rp1.099.651.000,- terealisasi Rp1.099.643.815,- atau 100% untuk Penyusunan Rp6.720.000,- terealisasi sebesar Rp6.720.000,- atau 100% dan sedangkan untuk kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp502.015.000,- yang terealisasi sebesar Rp447.129.669,- atau 85,36% sehingga total keseluruhan realisasi anggaran di Satker Dinas PUP ESDM DIY pada tahun 2022 adalah sebesar Rp6.357.690.990 atau 89,07% yang kesemua anggaran kegiatan tersebut dialokasikan pada DIPA APBN (Rupiah Murni)

Satuan Kerja TPOP Dinas PUPESDM DIY Tahun Anggaran 2023, sedangkan rincian realisasi pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN/ AKUN		JUMLAH	REALISASI TOTAL	SISA PAGU	KEUANGAN %	FISIK %
049136	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY	5.759.488 .000	5.702.631 .484	56.856 .516	99,01	100
5300. CDR .001	Irigasi yang dioperasi dan dipelihara (irigasi permukaan, rawa, & tambak)	5.257.473 .000	5.255.501 .815	1.971 .185	99,96	100
069	MONITORING DAN EVALUASI	9.600 .000	9.600 .000	-	100	100
A	Monitoring dan Evaluasi E- PAKSI Jaringan Irigasi Van Der Wijck	5.400 .000	5.400 .000	-	100	100
B	Monitoring dan Evaluasi E- PAKSI Jaringan Irigasi Kalibawang	4.200 .000	4.200 .000	-	100	100
071	OPERASI JARINGAN IRIGASI	2.961.665 .000	2.961.665 .000	-	100	100
A	Operasi Jaringan Irigasi Van Der Wijck	1.085.915 .000	1.085.915 .000	-	100	100
B	Operasi Jaringan Irigasi Kalibawang	1.875.750 .000	1.875.750 .000	-	100	100
094	PEMELIHARAAN BERKALA JARINGAN IRIGASI	1.179.837 .000	1.177.873 .000	1.964 .000	99,83	100
A	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Van Der Wijck	178.500 .000	178.500 .000	-	100	100
B	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Kalibawang	1.001.337 .000	999.373 .000	1.964 .000	99,80	100
095	PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI	1.099.651 .000	1.099.643 .815	7.185	100	100
A	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Van Der Wijck	601.663 .000	601.662 .815	185	100	100
B	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang	497.988 .000	497.981 .000	7.000	100	100
122	PENYUSUNAN	6.720 .000	6.720 .000	-	100	100

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN/ AKUN		JUMLAH	REALISASI TOTAL	SISA PAGU	KEUANGAN %	FISIK %
A	Penyusunan Pelaporan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Jaringan Irigasi Van Der Wijck	6.720 .000	6.720 .000	-	100	100
WA. 2421	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	502.015 .000	447.129 .669	54.885 .331	89,07	100

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

2) Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan

Tabel 4.4. Lokasi Kegiatan Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan di DIY Tahun 2023

Ruas Penanganan Drainase		
No.	Ruas	Panjang
1	Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)	14 m
2	Jalan Bantul – SP. Weden	7 m
3	Jalan SP. Weden – Bakulan	10 m
TOTAL		31 m

Sumber: Dinas PUPESDM DIY,2023

Tabel 4.5. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2023

Ruas Penanganan Pemeliharaan Rutin		
No.	Ruas	Panjang
1	Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)	14,62 km
2	Jalan Yogyakarta – Bts Kota Bantul	4,9 km
3	Jalan Pemuda (Bantul)	1,79 km
4	Jalan Kol. Sugiyono (Bantul)	1,0 km
5	Jalan Brigjen Katamso (Bantul)	1,0 km
6	Jalan P. Senopati (Bantul)	0,25 km
7	Jalan Bantul – Sp. Weden (Bantul)	1,6 km
8	Jalan Sp. Weden – Bakulan	0,88 km
9	Jalan Bakulan – Kretek	8,36 km
10	Jalan Kretek-Parangtritis	2,9 km
TOTAL		37,30 km

Sumber: Dinas PUPESDM DIY,2023

Tabel 4.6. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kondisi di DIY Tahun 2023

Ruas Penanganan Pemeliharaan Rutin Kondisi		
No.	Ruas	Panjang
1	Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)	2,8 km
2	Jalan Yogyakarta – Bts Kota Bantul	1,41 km
3	Jalan Kol. Sugiyono (Bantul)	0,24 km
4	Jalan Brigjen Katamso (Bantul)	0,74 km
5	Jalan P. Senopati (Bantul)	0,9 km
6	Jalan Bantul – Sp. Weden (Bantul)	0,6 km
7	Jalan Sp. Weden – Bakulan	0,6 km
8	Jalan Bakulan – Kretek	0,6 km
9	Jalan Kretek-Parangtritis	2,3 km
TOTAL		10,19 km

Sumber: Dinas PUPESDM DIY,2023

Tabel 4.7. Lokasi Kegiatan Penanganan Penunjang/Holding di DIY Tahun 2023

Ruas Penanganan Penunjang/Holding		
No.	Ruas	Panjang
1	Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)	0,9 km
2	Jalan Kol. Sugiyono (Bantul)	0,1 km
3	Jalan Bantul – Sp. Weden (Bantul)	2,2 km
4	Jalan Kretek-Parangtritis	1,08 km
TOTAL		4,28 km

Sumber: Dinas PUPESDM DIY,2023

Tabel 4.8. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2023

NO.	NAMA JEMBATAN	PANJANG		PENANGANAN
1	FO JANTI	455,5	m	Pemel Rutin
2	FO JANTI	502,5	m	Pemel Rutin
3	FO JANTI	455,5	m	Pemel Rutin
4	GAJAH WONG	45,9	m	Pemel Rutin
5	TEKIK	6,7	m	Pemel Rutin
6	CODE	32,3	m	Pemel Rutin
7	WINONGO A	31,6	m	Pemel Rutin
8	WIDURI	22,5	m	Pemel Rutin
9	BEDOG	45,2	m	Pemel Rutin
10	WINONGO	31	m	Pemel Rutin
11	BAKULAN	21,5	m	Pemel Rutin
12	KRETEK	246,4	m	Pemel Rutin
13	BOLONG	6,9	m	Pemel Rutin
JUMLAH		1.903,5	m	

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY,2023

Tabel 4.9. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Penyelenggaraan Jalan Bina Marga Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Paket	Sasaran	Pagu	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
			Total *)	Rp*)	%	%
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY (049029)		7.774.365.000	7.761.702.893	99,84	100
	(GA) Program Infrastruktur Konektivitas		7.075.179.000	7.064.001.207	99,84	100
	(GA.2409) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		7.075.179.000	7.064.001.207	99,84	100
	CDC OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		5.102.219.000	5.092.137.017	99,80	100
1	Penanganan Drainase	0,031 km	776.000.000	776.000.000	100	100
2	Pemeliharaan Rutin	37,3 km	2.539.829.000	2.529.747.017	99,60	100
3	Pemeliharaan Rutin Kondisi	10,19 km	808.961.000	808.961.000	100	100
4	Penunjang/Holding	4,28 km	977.429.000	977.429.000	100	100
	CDF OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)					
5	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.903,5 m	1.972.960.000	1.971.864.190	99,94	100
	(033.04.WA) Program Dukungan Manajemen		699.186.000	697.701.686	99,79	100
	(4484) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	2 Layanan	699.186.000	697.701.686	99,79	100
	(EBA 962) Layanan Umum	1 Layanan	337.246.000	335.817.317	99,58	100
6	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		8.400.000	8.400.000	100	100
7	Pengelola Perbendaharaan		294.607.000	293.184.405	99,52	100
8	Penyusunan Laporan BMN		34.239.000	34.232.912	99,98	100
	(EBA 962) Layanan Perkantoran	1 Layanan	361.940.000	361.884.369	99,98	100
9	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		361.940.000	361.884.369	99,98	100

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Tabel 4.10. Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2023

Uraian	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)
	Jalan		Jembatan (m)	Jalan		Jembatan (m)	
	Efektif (km)	Fungsional (km)		Efektif (km)	Fungsional (km)		
Cakupan TP	-	50,89	1.903,5	-	50,89	1.903,5	100,00

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2023

Pada tahun 2023 ini wajib dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses pengukuran kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran indikator kinerja di Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.11. Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	Indikator Kinerja Output			
		Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	0,031 m	0,031 m	100
		Pemeliharaan Rutin Jalan	51,77 km	51,77 km	100
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.903,5 m	1.903,5 m	100

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY,2023

Satker yang diampu Bidang Bina Marga Dinas PUP & ESDM DIY mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp7.774.365.000,00. Berdasarkan laporan data SAI realisasi keuangan secara total sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.761.702.893,00 dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp12.662.107,00 dan rata-rata persentase realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 100%. Secara keseluruhan penerapan sistem akuntabilitas kinerja tugas pembantuan penyelenggaraan bidang jalan pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.



Gambar 4.5. Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Yogyakarta – Bts Kota Bantul

Sumber: Dinas PUPESDM DIY,2023



Gambar 4.6. Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Bolong

Sumber: Dinas PUPESDM DIY,2023



Gambar 4.7. Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Arteri Selatan (Yogyakarta)

Sumber: Dinas PUPESDM DIY,2023

d. Permasalahan dan Kendala

- 1) Permasalahan Program Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu:
 - a) Masih adanya konflik kepentingan pemakai air, antara petani ikan dan petani padi terutama di Jaringan Irigasi Van der Wijck, sehingga mengakibatkan alokasi air ke lahan sawah terganggu;
 - b) Masih kurangnya penertiban pada pelanggaran pemanfaatan sempadan saluran, serta bangunan liar diatas saluran.
- 2) Permasalahan Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan yaitu:
 - a) Masih ada jalan yang mengalami perubahan status dari jalan nasional ke jalan provinsi belum diserahkan sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan permasalahan dalam pemeliharannya. Ada aset jalan yang seharusnya sudah menjadi kewenangan Pemda DIY tetapi belum diserahkan/ masih tercatat menjadi aset pemerintah pusat (Kementerian PUPR).

e. Saran dan Tindak Lanjut

- 1) Untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air diperlukan:
 - a) Perlu pelatihan para petugas Operasi dan Pemeliharaan secara berkesinambungan, selain untuk penyegaran ketugasan, juga sebagai bahan evaluasi hasil kerja;
 - b) Melaksanakan penertiban pada pelanggaran pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air yang belum berizin ke BBWS Serayu Opak selaku pemegang kewenangan.
- 2) Untuk Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan perlu segera dilaksanakan serah terima aset jalan dari Kementerian PUPR RI kepada Pemda DIY khususnya aset jalan yang mengalami perubahan status dari jalan nasional ke jalan provinsi.

3. Dinas Koperasi dan UKM DIY (Satker 049102)

Pada tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan dengan kode Satker 049102 melaksanakan program dan kegiatan pembangunan melalui dana APBN Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah. Tugas Pembantuan tersebut diwujudkan dengan Pengembangan Rantai Pasok UKM berupa Program Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin Pengolahan Susu (Pagu anggaran sebesar Rp8.310.561.000,00). Program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan antara lain; Pembangunan Gedung, Pengadaan Peralatan/Mesin dan Pengawasan *Factory Sharing* Pengolahan Susu.

a. Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Satker 049102

- 1) Pembangunan Gedung *Factory Sharing* Pengolahan Komoditas Susu DIY, meliputi: Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pembongkaran, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan Elektrikal, Pekerjaan Mekanikal dan Pekerjaan Pasang Daya Listrik.
- 2) Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Komoditas Susu DIY, terdiri dari: Penyedia jasa konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Susu di Yogyakarta; dan Kegiatan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Susu di Yogyakarta.

b. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Satker 049102

1) *Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin Factory Sharing Pengolahan Susu di Yogyakarta*

Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, handal, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Pengembangan kawasan UMKM telah dilakukan melalui konsep kemitraan UMKM dalam satu kawasan terpadu dan bersinergi dalam memanfaatkan sumber daya bersama dalam suatu rantai pasok dari hulu ke hilir dalam bentuk *Factory Sharing*/Rumah Produksi Bersama (RPB). RPB tersebut diinisiasi melalui *Major Project*.

2) *Pembangunan Gedung Factory Sharing Pengolahan Komoditas Susu DIY*

Pembangunan ini menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga dicapai wujud bangunan dan kelengkapan yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.

3) **Pengadaan Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Komoditas Susu DIY**

RPB memerlukan sarana dan prasarana yang saling menunjang antara satu dengan yang lainnya dan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, penyediaan mesin yang sesuai standar produksi susu yang baik sangat diperlukan guna menjamin kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan.

Tabel 4.12. Target dan Realisasi Tugas Pembantuan Satker 049102

No	Program/Kegiatan/Komponen	Pagu DIPA (Rp 000,-)	Realisasi Keuangan (Rp 000,-) (%)		Realisasi Fisik (%)
1	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Susu di Yogyakarta	258.466	240.703	93,13	100
2	Pembangunan <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Komoditas Susu DIY	3.170.000	2.789.467	87,99	100
3	Pengadaan Mesin <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Komoditas Susu DIY	4.740.781	4.622.844	97,51	87,22
4	Operasional <i>Factory Sharing</i> Pengolahan Komoditas Susu DIY	141.314	141.266	99,96	100
JUMLAH		8.310.561	7.794.282	93,78	96,80

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2023

Dilihat dari tabel di atas, pada kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan/Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Susu di Yogyakarta serta Pembangunan *Factory Sharing* Pengolahan Komoditas Susu DIY terdapat selisih antara Pagu DIPA dengan Realisasi Keuangan dikarenakan proses lelang yang harus dilalui masing-masing penyedia melalui LPSE. Sedangkan untuk Pengadaan Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Komoditas Susu DIY realisasi keuangannya masih rendah dikarenakan dana bersumber dari APBN dimungkinkan lewat tahun 2023 ke tahun 2024 dan sampai dengan awal tahun 2024 proses pengadaan peralatan masih berjalan. Terkait realisasi keuangan Pengadaan Mesin *Factory Sharing* Pengolahan Komoditas Susu DIY, SPM pembayaran mesin sudah dilakukan mekanisme RPATA (masuk rekening penampungan akhir tahun), walaupun pembayaran riilnya menunggu sampai BAST ditahun berikutnya 2024.

Berdasarkan laporan data SAI realisasi keuangan secara total sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.794.282.550,00 dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp516.278.450,00 dan persentase realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 93,78%. Secara keseluruhan penerapan sistem akuntabilitas kinerja tugas pembantuan pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

c. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan Program Pembangunan *Factory Sharing* pada Sentra UKM DIY yaitu: Proses pembuatan dan pengiriman mesin mengalami keterlambatan;

d. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk Program Pembangunan *Factory Sharing* pada Sentra UKM DIY diperlukan percepatan beberapa pengiriman barang/peralatan dan melaksanakan mitigasi resiko sehingga tidak meleset dari jadwal yang sudah ditetapkan.

4. Dinas Pariwisata

Pada tahun 2023 Dinas Pariwisata DIY melaksanakan program dan kegiatan melalui dana APBN Tugas Pembantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Nomor DIPA SP DIPA- 040.01.4.640004/2023 dan pagu anggaran sebesar Rp1.080.000.000,00. Program dan kegiatan tersebut dialokasikan melalui 1 Satuan Kerja (Satker).

a. Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Satker 640004

Program dan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata, dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

Bimbingan Teknis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan dengan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan adalah jenis kegiatan penambahan kompetensi baru (*New Skilling*) yang

diselenggarakan untuk memahami prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif Di Daerah dengan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif adalah jenis kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor ekonomi kreatif (*Upskilling*) yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas sektor ekonomi kreatif, mengenali dan mendorong serta meningkatkan potensi ekonomi kreatif di daerah.

Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata-Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (SISPARNAS). Bentuk dan Ruang Lingkup Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi yaitu Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pengembangan Tata Kelola Destinasi dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023 di JHL Solitaire Gading Serpong. Jl. Gading Serpong Boulevard, Kab Tangerang, Banten.

Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (*Events*): *Event Lola Fest* dan *Event Sound of Destination*.

Adapun rincian pelaksanaan pada satuan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13. Target dan Realisasi Tugas Pembantuan Satker Dinas Pariwisata DIY (640004)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	970.000.000	964,570,933	99.44	100
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	85.000.000	84,418,845	99.32	100
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	85.000.000	84,898,110	99.88	100
Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	300.000.000	297,994,371	99.33	100
Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	500.000.000	497,259,607	99.45	100
Program Dukungan Manajemen	110.000.000	108,756,200	98.87	100
Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	110.000.000	108,756,200	98.87	100

Sumber: DISPAR DIY, 2024

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Juknis pelaksanaan anggaran terlambat disampaikan ke satker atau baru diserahkan pada TW II;
- b) Anggaran perjalanan dinas narasumber utama dari Kemenparekraf melebihi pagu. Pembengkakan anggaran terjadi pada komponen tiket pesawat dari dan ke tempat domisili narasumber;
- c) Keterbatasan waktu dari para *stakeholders* terkait dalam menyeleksi pelaku ekonomi kreatif yang jumlahnya ribuan untuk dijadikan calon peserta pelatihan.

2) Solusi

- a) Satker melakukan penyesuaian RKAKL sesuai dengan Juknis.
- b) Merevisi rincian anggaran untuk menutupi kekurangannya dengan mengurangi anggaran di komponen lainnya. Revisi anggaran yang terjadi di tahap akhir kegiatan tidak mudah dilakukan.
- c) Data peserta diseleksi secara ketat oleh stakeholder terkait di kabupaten/ kota sehingga kuota peserta dapat terpenuhi.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian salah satunya melalui dana APBN Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan nomor DIPA SP DIPA- 067.07.4.350107/2023. Program dan kegiatan tersebut dialokasikan kepada Satuan Kerja (Satker 350107) dengan pagu sebesar Rp510.389.000,00.

Adapun rincian pelaksanaan pada satuan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14. Target dan Realisasi Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	438.029.000	433.451.400	98,95	100
Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	438.029.000	433.451.400	98,95	100
Program Dukungan Manajemen	72.360.000	72.168.200	99,68	100
Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	72.360.000	72.168.200	99,68	100

Sumber: Disnakertrans DIY, 2024

a. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Sebagian besar penyerapan di Triwulan IV Tahun 2023 karena Surat Siap Terima Penempatan dari daerah tujuan dan Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dikeluarkan pada Triwulan IV.

2) Solusi

Melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta daerah tujuan transmigrasi agar pembagian pemukiman dapat diselesaikan sebelum bulan Desember 2023.





BAB V

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

LKPJ
Gubernur DIY

Tahun

2023

BAB V

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

2023

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan memiliki kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan daerah, baik visi pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Pengaturan Keistimewaan DIY beraras pada pengakuan atas hak asal-usul; kerakyatan; demokrasi; *ke-bhinneka-tunggal-ika-an*; efektivitas pemerintahan; kepentingan nasional; dan pendayagunaan kearifan lokal. Pengaturan Keistimewaan bertujuan untuk (1) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin *ke-bhinneka-tunggal-ika-an* dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY tahun 2023, Pemda DIY menerima alokasi dana keistimewaan sebesar Rp1.420.000.000.000,00. Pengelolaan dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai program/kegiatan pada urusan keistimewaan tahun 2023. Berikut anggaran dan realisasi keuangan program/kegiatan tahun 2023 pada tiap urusan:

Tabel 5.15. Alokasi dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023 Menurut Urusan

No.	Urusan	Jumlah			Realisasi			
		Prog	Keg	Sub Keg	(Rp)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
1.	Kelembagaan	1	10	30	43.989.773.850	42.973.356.957	97,69	100
2.	Kebudayaan	1	10	51	1.117.858.933.379	1.101.864.693.593,75	98,57	99,91
3.	Pertanahan	1	3	9	28.985.621.575	26.174.205.308	90,30	96,51
4.	Tata Ruang	1	3	19	229.165.671.196	225.145.196.573	98,25	99,89
5.	Tata Cara	-	-	-	-	-	-	-
Total		4	26	109	1.420.000.000.000	1.396.157.452.431,75	98,32	99,84

Sumber: Paniradya Kaistimewan 2024

A. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Berdasarkan amanat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY merupakan kewenangan keistimewaan dalam melaksanakan proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kewenangan keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur dijawantahkan setiap 5 tahun sekali menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2022-2027 telah dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2023 tidak diselenggarakan program dan kegiatan pada Urusan Tata Cara.

B. URUSAN KELEMBAGAAN

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY merupakan Kewenangan keistimewaan dalam melaksanakan pengorganisasian yang diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah antara lain:

perumusan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, eselon atau jabatan, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Daerah; perumusan kebijakan urusan kelembagaan; pengelolaan sumber daya manusia; peningkatan budaya pemerintahan; penyediaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan urusan kelembagaan. Kewenangan tersebut dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.

1. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Urusan kelembagaan pemerintah daerah dilaksanakan oleh 10 OPD Pemda DIY, 8 OPD Pemkab Bantul, 4 OPD Pemkab Sleman, 8 OPD Pemkab Kulonprogo, 6 OPD Pemkab Gunungkidul, 2 OPD Pemkot Yogyakarta, dan 58 Kapanewon. Urusan kelembagaan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp43.989.773.850. Persentase realisasi keuangan sampai dengan tahap Akhir sebesar 97,69% (Rp42.973.356.957,00), sedangkan persentase realisasi fisik sebesar 100%.

Tabel 5.1. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Kelembagaan TA 2023

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
PROGRAM PENYELENGGAR A-AN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA -AN	PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA					
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	100.000.000	97.506.850	97,51	100
	DINAS SOSIAL	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	98.500.000	86.832.290	88,15	100
	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	160.000.000	159.999.820	100	100
	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	100.000.000	99.257.300	99,26	100
	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	2.874.183.550	2.829.789.200	98,46	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	319.358.800	311.484.100	97,53	100
	BIRO HUKUM	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/ Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	387.576.000	387.575.700	100	100
		Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	583.963.000	583.963.000	100	100
	BIRO ORGANISASI	Perumusan Kebijakan	400.307.000	399.097.000	99,7	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
		Kelembagaan Perangkat Daerah				
		Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/ Kota	159.029.000	158.516.300	99,68	100
		Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	402.618.400	396.304.820	98,43	100
		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	315.674.000	302.688.450	95,89	100
		Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	557.244.450	517.678.762	92,9	100
		Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	501.250.200	491.412.293	98,04	100
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyelenggaraa n Diklat Keistimewaan	820.000.000	805.392.487	98,22	100
	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PANIRADYA KAISTIMEWAN	Penyelenggaraa n Diklat Keistimewaan	1.508.661.000	1.398.937.297	92,73	100
		Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	630.323.000	619.581.797	98,3	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	385.399.000	368.431.449	95,6	100
		Koordinasi Penyusunan Rencana	780.348.000	757.416.478	97,06	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
		Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan				
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	590.790.000	574.029.698	97,16	100
		Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	600.000.000	591.639.475	98,61	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	400.000.000	393.783.300	98,45	100
		Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	498.488.000	481.050.875	96,5	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	946.586.000	919.516.729	97,14	100
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.790.382.000	1.785.888.747	99,75	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	1.948.975.000	1.919.149.475	98,47	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	3.608.900.000	3.570.577.524	98,94	100
		Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	703.842.000	702.573.200	99,82	100
		Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	6.716.540.300	6.676.082.500	99,4	100
		PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL				
	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BANTUL	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	180.008.000	178.701.750	99,27	100
		Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	55.445.000	54.919.640	99,05	100
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	241.541.000	232.678.700	96,33	100
		Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	225.334.000	223.192.080	99,05	100
		Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	137.740.000	135.690.000	98,51	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	70.800.000	65.696.500	92,79	100
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH					

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
	KABUPATEN BANTUL					
	INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	175.000.000	170.439.300	97,39	100
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BANTUL	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan	170.000.000	170.000.000	100	100
	KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.770.000	96,49	100
	KAPANEWON BAMBANGPUR O KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.070.000	94,49	100
	KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.220.000	94,91	100
	KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.795.000	96,56	100
	KAPANEWON BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan	35.000.000	34.951.500	99,86	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
	KABUPATEN BANTUL	Kegiatan Keistimewaan				
	KAPANEWON JETIS	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.777.500	96,51	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON IMOGIRI	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.070.000	94,49	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON DLINGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	32.898.000	93,99	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON BANGUNTAPAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.140.000	94,69	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON PLERET	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	335.000.000	331.903.000	99,08	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON PIYUNGAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.070.000	94,49	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KEPENAWON SEWON	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.327.500	98,08	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON KASIHAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.960.000	99,89	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON SEDAYU	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.212.500	94,89	100
	KABUPATEN BANTUL					
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	100.000.000	90.640.000	90,64	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	281.830.000	273.017.600	96,87	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	171.711.000	169.304.200	98,6	100
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	1.041.000.000	1.034.217.500	99,35	100
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANTUL	Penyelenggaraa n Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	214.000.000	205.800.000	96,17	100
	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN					
	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SLEMAN	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	110.050.000	107.670.809	97,84	100
		IMPLEMENTASI BUDAYA PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	356.200.000	338.883.626	95,14	100
	KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.949.875	97	100
	KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.994.000	99,98	100
	KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON GAMPING	Penyusunan Rencana	35.000.000	34.982.250	99,95	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
	KABUPATEN SLEMAN	Program dan Kegiatan Keistimewaan				
	KAPANEWON GODEAN	Penyusunan Rencana	35.000.000	32.193.900	91,98	100
	KABUPATEN SLEMAN	Program dan Kegiatan Keistimewaan				
	KAPANEWON KALASAN	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN	35.000.000	33.210.300	94,89	100
	KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON MLATI	Penyusunan Rencana	35.000.000	31.502.300	90,01	100
	KABUPATEN SLEMAN	Program dan Kegiatan Keistimewaan				
	KAPANEWON MOYUDAN	Penyusunan Rencana	35.000.000	33.146.664	94,7	100
	KABUPATEN SLEMAN	Program dan Kegiatan Keistimewaan				
	KAPANEWON NGAGLIK	Penyusunan Rencana	35.000.000	34.946.000	99,85	100
	KABUPATEN SLEMAN	Program dan Kegiatan Keistimewaan				
	KAPANEWON NGEMPLAK	Penyusunan Rencana	35.000.000	33.468.150	95,62	100
	KABUPATEN SLEMAN	Program dan Kegiatan Keistimewaan				
	KAPANEWON PAKEM	Penyusunan Rencana	35.000.000	34.599.600	98,86	100
	KABUPATEN SLEMAN	Program dan Kegiatan Keistimewaan				
	KAPANEWON PRAMBANAN	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN	35.000.000	33.889.900	96,83	100
	KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana	35.000.000	35.000.000	100	100
	KABUPATEN SLEMAN	Program dan Kegiatan Keistimewaan				

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
	KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.957.200	97,02	100
	KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	335.000.000	334.323.000	99,8	100
	KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.980.200	99,94	100
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN	55.900.500	55.612.775	99,49	100
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN KABUPATEN SLEMAN	PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELAKSANA KEISTIMEWAAN	153.800.000	136.939.000	89,04	100
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	218.403.000	217.757.592	99,7	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	55.885.000	55.270.642	98,9	100
	PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO					
	INSPEKTORAT KABUPATEN KULONPROGO	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	143.000.000	125.206.258	87,56	100
	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KULONPROGO	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	272.880.000	235.176.191	86,18	100
		Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	160.000.000	147.858.200	92,41	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	228.915.600	210.903.771	92,13	100
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDA KABUPATEN KULONPROGO	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	101.290.000	100.224.917	98,95	100
	KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.907.408	99,74	100
	KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.947.378	96,99	100
	KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.400.000	28.374.530	99,91	100
	KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.795.749	99,42	100
	KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.797.840	99,42	100
	KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.863.226	99,61	100
	KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.806.986	99,45	100
	KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.290.626	97,97	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
	KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.998.110	99,99	100
	KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	31.800.000	31.631.820	99,47	100
	KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.751.300	99,29	100
	KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.417.472	98,34	100
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KULONPROGO	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	100.000.000	99.467.261	99,47	100
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENEGNDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KULONPROGO	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	1.138.000.000	1.117.584.997	98,21	100
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULONPROGO	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	163.072.000	162.312.186	99,53	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	63.833.800	63.713.963	99,81	100
	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULONPROGO	Implementasi Budaya Pemerintah Kabupaten/ Kota	100.000.000	94.231.254	94,23	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KULONPROGO	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	207.500.000	201.236.801	96,98	100
	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	277.824.000	223.850.908	80,57	100
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	508.750.000	508.387.223	99,93	100
		Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	80.000.000	76.015.898	95,02	100
	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kelurahan dan Kalurahan/ Kelurahan	47.335.000	45.020.000	95,11	100
	BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	162.572.500	143.679.146	88,38	100
	KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.349.900	98,14	100
	KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.598.109	98,85	100
	KAPANEWON PATUK	Penyusunan Rencana Program dan	35.000.000	35.000.000	100	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Kegiatan Keistimewaan				
	KAPANEWON PALIYAN	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	35.000.000	100	100
	KAPANEWON PANGGANG	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.500.000	98,57	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.930.000	99,8	100
	KAPANEWON SEMANU	Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang didampingi	35.000.000	34.940.000	99,83	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.990.000	99,97	100
	KAPANEWON PONJONG	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.985.050	99,96	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	34.755.000	99,3	100
	KAPANEWON PURWOSARI	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	530.000.000	476.711.200	89,95	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Monitoring dan Evaluasi	110.000.000	109.480.000	99,53	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi s.d. Tahap Akhir (Rp)	%	
	PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pelaksanaan Dana Keistimewaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	840.090.000	819.673.500	97,57	100
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	1.321.035.000	1.314.405.000	99,5	100
	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA					
	BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA YOGYAKARTA	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	206.529.750	203.252.790	98,41	100
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	254.500.000	250.493.180	98,43	100
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	197.760.000	174.866.000	88,42	100
	TOTAL		43.989.773.850	42.973.356.957	97,69	100

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Inovasi pelayanan publik sebagai perwujudan Budaya Pemerintahan SATRIYA sebanyak 15 inovasi yang terdiri dari 4 inovasi dari Pemda DIY dan 11 inovasi dari Pemkab/Pemkot. Inovasi-inovasi tersebut antara lain:
 - a. Pembuatan Mini Teater TMPN (Taman Makam Pahlawan Nasional) Kusumanegara oleh Dinas Sosial DIY yang dilaksanakan selama 3 Tahun (2023-2025). Pada tahun 2023, dilaksanakan perencanaan pembuatan dan pengadaan sebagian peralatan Mini Teater TMPN Kusumanegara.

- b. Si Keling (Servis Keliling) oleh Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Disperindag DIY. Kegiatan ini sudah dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten antara lain Kabupaten Gunungkidul: Playen (Ngleri), Patuk (Nglanggeran dan Putat); Kabupaten Kulonprogo: Kalibawang (Tonogoro), Lendah (Tubin), Sentolo (Kaliagung); Kabupaten Bantul: Imogiri (Sriharjo), Jetis (Kiringan dan Trimulya), Singosaren; Kabupaten Sleman: Tempel (Merdikorejo), Seyegan, Gamping (Ambarketawang, Balecatuur).
- c. SIBUKIN (Sistem Informasi Buku Induk) oleh Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Disnakertrans DIY. Sistem Informasi Buku Induk (Sibukin) merupakan aplikasi BLKPP yang terintegrasi mulai dari informasi pelatihan, pendaftaran, validasi data, *Curriculum Vitae* (CV), *rekomendasi On The Job Training* (OJT) dan fasilitasi penempatan alumni. Saat ini Sibukin telah merekam data sebanyak 3.504 peserta.
- d. GAPURA (Gerakan Aktif dan kreatif Produktif Unggul Relasi Asli) oleh SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Inovasi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik dan alumni sekolah berkebutuhan khusus melalui dukungan operasional yang memadai. Dukungan operasional tersebut dapat berupa penyediaan bahan pembuatan produk, quality control produk, rehab interior dan eksterior *showroom* serta penambahan sarana prasarana *showroom*, publikasi *showroom*, serta melakukan studi banding dalam provinsi ke pihak terkait.
- e. Branding ECHO (ENAK CETHO) sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Wisata Kuliner Angkringan di Kota Yogyakarta oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Program ECHO (Enak Cetho) merupakan inovasi berbentuk pemberian standar operasional dengan melakukan beberapa pengujian dan form SKP (Skor Keamanan Pangan), antara lain mengkaji kualitas kuliner PKL Angkringan di sekitar objek wisata Kota Yogyakarta menggunakan form SKP (skor keamanan pangan). Selanjutnya, angkringan yang

memiliki kriteria SKP baik, akan diuji E Coli pangan dan uji Staphylococcus pangan serta uji organoleptik.

- f. **Projek Ruang Laktasi Portabel “SEHATI” di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta** oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Ruang laktasi “SEHATI” merupakan sebuah ruang laktasi portable, didesain untuk gedung wisata dan atau kawasan wisata terbuka di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki cukup ruang untuk ruang laktasi permanen.
- g. **GELAS BERLIAN SINURI (Gerakan Lansia Sehat Berdaya Lindungi Ancaman Aksi Bunuh Diri)** oleh UPT Puskesmas Semanu II Kabupaten Gunungkidul. Inovasi Gelas Berlian Sinuri (Gerakan Lansia Sehat Berdaya Lindungi Ancaman Aksi Bunuh Diri) merupakan salah satu upaya promotif dan preventif pada kasus bunuh diri yang terjadi di wilayah kerja UPT Puskesmas Semanu II yang sebagian besar korbannya adalah lansia. Kegiatan yang diberikan berfokus pada pendampingan kesehatan fisik maupun mental serta pemberdayaan masyarakat khususnya lansia yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Semanu II.
- h. **LAJANG CAKAP (Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka)** oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul. Layanan Inovasi LAJANG CAKAP adalah layanan untuk antar dan jemput pemustaka dari sekolah-sekolah mulai dari KB/TPA, SPS/PAUD, TK/RA, dan SD/MI.
- i. **TAGANA (Taruna Tanggap Bencana)** oleh Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul. TAGANA merupakan program tanggap bencana yang dilakukan oleh Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul. Dalam pelaksanaan program TAGANA melibatkan dan memberdayakan para pemuda Tanjungsari.
- j. **POSBINDU SENTOSA (Semua penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan terpadu, holistik, sehat, dan aman)** oleh UPT Puskesmas Sentolo I, Kulon Progo. POSBINDU SENTOSA adalah layanan inovasi berupa kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko PTM terintegrasi serta gangguan akibat

kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu untuk para penyandang disabilitas di wilayah Sentolo, Kulon Progo.

- k. SI PERI MANIS KAPANEWON (Sistem Perizinan yang Mendekat dan Terintegrasi Secara Elektronik sampai Kapanewon) oleh DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo. SI PERI MANIS KAPANEWON merupakan sistem pengintegrasian layanan perizinan secara elektronik di 12 kapanewon yang ada di Kulon Progo melalui OSS (*Online Single Submission*) dan SIM BG (Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung).
- l. HALLO BANGGA (Hamemayu Aplikasi Layanan *Online* Puskesmas Banguntapan III) oleh Puskesmas Banguntapan III Bantul. HALLO BANGGA adalah layanan aplikasi *online* yang dikembangkan oleh UPTD Puskesmas Banguntapan III untuk meningkatkan mutu dan memudahkan pelayanan rawat jalan di Puskesmas tersebut. Aplikasi ini dapat melayani berbagai keperluan seperti pendaftaran pasien, informasi antrian, informasi kesehatan, hasil pemeriksaan, pembiayaan digital, dan lainnya.
- m. GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) oleh DPMPTSP Kabupaten Bantul. GAMPIL adalah inovasi yang dibuat oleh DPMPTSP Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk memberikan fasilitasi pelayanan perizinan usaha dengan mudah, cepat, dan gratis tanpa harus datang ke kantor DPMPTSP secara langsung.
- n. LASAMBA (Layanan Sambang Warga) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk memperbaiki aksesibilitas layanan sosial agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan layanan sosial tetapi kesulitan untuk datang langsung ke kantor Dinas Sosial. *Output* dari layanan ini yaitu pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), pengusulan data kemiskinan, serta penanganan untuk kelompok rentan.
- o. MATA HATI (Masyarakat Tangguh Sehat Jiwa) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Salah satu implementasi dari

inovasi ini yaitu penyediaan layanan pada setiap puskesmas untuk konsultasi psikolog yang ditujukan untuk melayani pasien yang rentan. Selain itu, implementasi juga dilaksanakan pada masyarakat dengan berbagai kegiatan, antara lain melatih agen perubahan, konseling kelompok rentan, trauma healing, penyelamatan ODGJ terlantar, rehabilitasi jiwa. MATA HATI juga memiliki layanan telekonsultasi secara *online* yang bekerja sama dengan Siklus Indonesia menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan e-rekam medik puskesmas di Kabupaten Sleman.

- 2) Selain mendorong pelaksanaan inovasi, dilaksanakan pula Diklat Internalisasi Keistimewaan yang diselenggarakan di Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot dengan total peserta 1260 orang ASN yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional sebanyak 570 orang, calon pensiun sebanyak 630 orang, dan pegawai baru sebanyak 60 orang.
- 3) Pengukuran Evaluasi Budaya Pemerintah Tahun 2023 telah dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian perubahan dalam implementasi Budaya Pemerintahan, tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan oleh ASN, dan dampak perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan. Analisis data yang melibatkan 37 Perangkat Daerah dalam penelitian ini menghasilkan nilai rata-rata sebesar 4,18 atau setara dengan 84% (kategori "Baik") dan hal ini menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam Intensitas Penerapan Budaya Pemerintahan.
- 4) Beberapa sistem pendataan sosial ekonomi yang dilaksanakan dan didanai dengan Dana Keistimewaan yakni (1) SiNTA GADIS TEMPEL (Sistem Pendataan Keluarga Digital di Tempel), (2) SiKesa (Sistem Kesejahteraan Istimewa) Kapanewon Pleret, dan (3) SI PEDET CANTIK (Sistem Pendataan Desa Cantik Statistik). Tujuan dari pendataan sosial ekonomi *full population* untuk menyediakan data sosial ekonomi masyarakat DIY yang riil dan sesuai kondisi masyarakat. Harapannya, informasi yang tersaji dapat diakses dengan mudah, sinergis, integratif, transparan, informatif, dan *up to date* sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan khususnya sebagai ketersediaan data atau bahan

bagi para pemangku kebijakan dan *stakeholders* dalam menyusun kebijakan.

Penyelenggaraan Reformasi Kalurahan dalam mewujudkan tujuan keistimewaan sebagaimana dimandatkan dalam UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Reformasi Kalurahan merupakan upaya konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY melalui peningkatan kapasitas Pemerintahan Kalurahan dan keberdayaan masyarakat Kalurahan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusi, dan pengemabngan kebudayaan. Pada tataran praktisnya, Reformasi Kalurahan merupakan integrasi dan sinergi dua pendekatan yakni (1) Reformasi Birokrasi Kaluarahan dan (2) Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Terbitnya PMK Nomor 16/PMK.07/2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pasal 11A ayat (4) huruf e bahwa “Dana keistimewaan tidak dapat digunakan untuk mendanai peningkatan kapasitas sumber daya pegawai negeri sipil”. Pembatasan penggunaan Dana Keistimewaan tersebut berdampak pada kegiatan implementasi budaya pemerintahan yakni pelaksanaan Diklat Keistimewaan tidak dapat dilaksanakan.

b. Solusi

Penyusunan Telaah Biro Hukum Setda DIY Nomor 188/3250 tanggal 24 Agustus 2023 Tentang Telaah Hukum Terkait Catatan BA Pembahasan Perubahan Pertama Dana Keistimewaan 2023, yang menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur SDM merupakan salah satu arah kebijakan nasional terkait dana keistimewaan yang tercantum dalam Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasar

telaah tersebut, Diklat Keistimewaan tahun 2023 tetap dilaksanakan dengan penyesuaian jumlah peserta disesuaikan dengan waktu yang tersisa.

C. URUSAN KEBUDAYAAN

1. Kondisi Umum

Kewenangan keistimewaan urusan kebudayaan merupakan urusan yang penting dalam mendukung percepatan visi dan tujuan pembangunan daerah baik pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah, yang tertuang pada RPJPD DIY 2005-2025 dan RPD DIY 2023-2026. Peran besar ini menjadikan kebudayaan masuk dalam konteks pembangunan secara menyeluruh mulai dari aktivitas ekonomi, pangan, dan penguatan praktik dari nilai-nilai filosofis. Selain mendukung percepatan pembangunan daerah, kewenangan keistimewaan juga menjadi alat bagi Pemerintah DIY dalam mendorong tercapainya Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Urusan Kebudayaan menjadi pendorong percepatan Agenda Pembangunan Nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Segala aktivitas yang berada dalam lingkup penugasan urusan kebudayaan diarahkan dan dikelola sesuai dengan amanat Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang bertujuan untuk menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia; mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Pada tahun 2023 urusan kebudayaan menjadi urusan yang dominan dari segi jumlah program/kegiatan. Urusan kebudayaan terdiri dari 1 program, 10 kegiatan, dan 30 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp1.117.858.933.379,00. Pengampu urusan Kebudayaan terdiri atas 27 OPD Pemda DIY, 14 OPD Pemkab Bantul, 9 OPD Pemkab Sleman, 8 OPD Pemkab Kulonprogo, 10 OPD Pemkab Gunungkidul, 4 OPD Pemkot, 14 Kemantren, 65 Kapanewon, dan PPKD-BKK KALURAHAN. Persentase realisasi fisik sampai dengan tahap akhir pada urusan kebudayaan sebesar 99,91% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap Akhir sebesar Rp1.101.864.693.593,75 (98,57%).

Tabel 5.16. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Kebudayaan TA 2023

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA					
	DINAS	Pembinaan Muatan Lokal	27.487.809.800	27.283.467.286	99,26	100
	PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	1.275.000.000	1.270.742.657	99,67	100
		Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3.054.334.900	2.699.092.263	88,37	97,14
	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	455.069.000	441.056.132	96,92	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	11.762.598.800	11.625.078.793	98,83	100
		Pengembangan Lumbung Mataraman	12.371.876.550	11.954.201.018	96,62	100
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pembinaan Jagawarga	24.340.251.700	24.298.156.921	99,83	100
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	231.149.000	231.215.000	100,03	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	DINAS SOSIAL	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1.482.932.300	1.459.134.486	98,4	100
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	4.181.193.864	3.877.968.484	92,75	100
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengembangan Ekonomi Perempuan	4.659.648.254	4.549.280.070	97,63	100
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	92.516.150	92.516.150	100	100
		Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	462.480.000	455.366.279	98,46	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	769.250.000	743.191.215	96,61	100
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	29.021.034.000	28.959.019.132	99,79	100
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	103.403.122.137	102.591.782.830	99,22	100
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	7.164.575.000	7.107.049.350	99,2	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.843.579.665	1.836.898.622	99,64	100
	DINAS KEBUDAYAAN	Pengembangan Kewirausahaan Desa	37.949.903.300	37.183.899.379	97,98	100
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	3.450.054.600	3.417.161.200	99,05	100
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	6.487.862.600	6.471.160.900	99,74	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	7.578.632.852	7.356.712.404	97,07	100
		Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	15.492.231.220	14.650.574.752	94,57	100
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	5.203.687.400	4.859.937.879	93,39	100
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	6.309.323.000	5.950.105.542	94,31	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.366.943.600	1.331.899.300	97,44	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	12.725.582.100	12.598.159.058	99	100
		Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	720.000.000	703.581.620	97,72	100
		Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	400.000.000	377.791.746	94,45	100
		Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	5.334.202.270	5.287.044.150	99,12	100
		Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	19.480.745.500	19.130.756.715	98,2	100
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	6.224.659.100	6.204.540.200	99,68	100
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	2.810.321.000	1.206.249.000	42,92	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.478.652.450	2.464.260.260	99,42	100
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	4.925.000.000	4.872.973.200	98,94	100
		Gelar Budaya Yogyakarta	6.705.479.900	6.659.014.698	99,31	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	5.257.539.200	5.221.519.950	99,31	100
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	2.203.349.000	2.176.884.650	98,8	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	7.257.371.300	7.100.367.680	97,84	100
		Selendang Sutera	1.750.000.000	1.743.903.743	99,65	100
		Penyelenggaraa n Even Penggiat Seni	7.528.300.000	7.524.937.400	99,96	100
		Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	169.200.000.000	169.200.000.000	100	100
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.672.507.500	1.405.630.600	84,04	100
	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	6.788.848.050	6.701.267.503	98,71	100
	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	Pengembangan Museum Sonobudoyo	11.782.613.773	11.768.151.110	99,88	100
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	14.272.496.350	14.161.711.150	99,22	100
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	2.778.791.200	2.769.369.934	99,66	100
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	2.077.742.400	1.954.762.834	94,08	100
		Pengembangan Budaya Bahari	32.767.504.280	31.299.212.187	95,52	97,20

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	DINAS PARIWISATA	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.267.270.833	1.219.619.960	96,24	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	2.858.753.536	2.796.205.100	97,81	100
		Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	14.556.691.300	14.502.124.219	99,63	100
		Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	5.774.059.700	5.719.200.593	99,05	100
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pengembangan Lumbung Mataraman	9.858.124.585	9.594.417.096	97,33	100
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pengembangan Industri Kreatif	19.981.874.430	19.336.425.436	96,77	100
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	9.198.516.000	9.152.419.992	99,5	100
	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	133.725.000	133.503.000	99,83	100
		Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	252.125.700	249.830.100	99,09	100
	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	640.430.000	581.946.028	90,87	100
	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	461.000.000	461.000.000	100	100
		Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	214.406.900	212.520.900	99,12	100
	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.019.228.060	1.019.228.060	100	100
	BIRO UMUM, HUBUNGAN	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1.844.119.800	1.777.880.418	96,41	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	MASYARAKAT DAN PROTOKOL					
	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pengembangan Kewirausahaan Desa	240.000.000	229.296.300	95,54	100
		Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	975.110.000	969.153.970	99,39	100
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	606.600.000	606.440.098	99,97	100
		Pengembangan Industri Kreatif	673.431.000	667.152.560	99,07	100
		Gelar Seni Budaya Daerah	3.181.294.000	3.158.421.222	99,28	100
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.598.796.000	2.471.305.980	95,09	100
	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	94.479.050	94,48	100
	KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON BANTUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON JETIS	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON IMOGIRI	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON DLINGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.425.000	98,43	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON BANGUNTAPAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON PLERET	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON PIYUNGAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON SEWON	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.415.000	98,42	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON KASIHAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.942.000	99,94	100
	KABUPATEN BANTUL					
	KAPANEWON SEDAYU	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN BANTUL					
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	332.315.000	329.915.000	99,28	100
	KABUPATEN BANTUL					
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pengembangan Lumbung Mataraman	189.252.500	186.721.500	98,66	100
	KABUPATEN BANTUL					

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL	Pengembangan Budaya Bahari	200.000.000	199.321.200	99,66	100
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL	Pembinaan Jagawarga	388.525.000	378.087.500	97,31	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	130.000.000	112.111.500	86,24	100
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3.875.000.000	3.858.008.240	99,56	100
	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran	754.499.000	746.089.050	98,89	100
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	2.217.299.250	2.184.559.636	98,52	100
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	700.637.000	697.726.200	99,58	100
		Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.409.840.000	1.387.291.550	98,4	100
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.104.024.000	1.099.917.500	99,63	100
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	200.000.000	190.782.500	95,39	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	1.647.332.750	1.621.370.000	98,42	100
		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.198.528.500	830.620.773	69,3	100
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	2.073.773.000	1.813.603.680	87,45	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1.049.586.250	881.813.452	84,02	100
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	301.600.000	294.509.800	97,65	100
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	363.755.000	72,75	100
		Gelar Budaya Jogja	2.940.507.200	2.877.643.200	97,86	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	254.265.000	246.624.200	96,99	100
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	91.000.000	77.610.400	85,29	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	395.984.000	344.029.000	86,88	100
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	4.365.920.000	3.975.456.025	91,06	100
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.585.288.000	1.485.586.000	93,71	98,33
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL	Pengembangan Industri Kreatif	420.111.500	418.069.375	99,51	100
		Pengembangan Kewirausahaan Desa	496.180.000	493.064.650	99,37	100
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	150.000.000	148.250.000	98,83	100
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BANTUL	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	1.025.250.000	1.012.896.020	98,8	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1.097.750.000	1.092.616.040	99,53	100
		Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	100.000.000	99.765.690	99,77	100
	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1.472.060.000	1.416.154.286	96,2	100
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL	Pembinaan Muatan Lokal	158.904.200	154.854.200	97,45	100
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	273.415.000	268.471.000	98,19	100
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN						
	KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.807.040	99,81	100
	KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.599.800	98,6	100
	KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.853.750	99,85	100
	KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.979.600	99,98	100
	KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	96.399.800	96.399.800	100	100
	KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN	GELAR BUDAYA JOGJA	100.000.000	99.999.900	100	100
	KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.999.800	100	100
	KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.999.800	100	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.932.800	99,93	100
	KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.986.500	99,99	100
	KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.946.625	99,95	100
	KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.999.800	100	100
	KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	97.379.900	97,38	100
	KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.906.000	99,91	100
	KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.793.600	99,79	100
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN	PEMBINAAN JAGA WARGA	1.284.970.000	1.266.460.000	98,56	100
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	14.232.767.500	14.070.442.500	98,86	100
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SLEMAN	Pengembangan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	1.395.707.750	1.395.707.750	100	100
	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	989.871.000	989.836.000	100	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	1.120.843.800	1.039.034.500	92,7	100
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	494.661.208	98,93	100
		Gelar Budaya Jogja	3.431.762.800	3.390.566.150	98,8	100
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	140.000.000	136.897.675	97,78	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat	1.642.757.030	1.637.982.399	99,71	100
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	9.189.205.172	9.180.068.673	99,9	100
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4.521.702.513	4.505.651.825	99,65	100
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	477.000.000	470.164.945	98,57	100
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	885.858.300	885.842.550	100	100
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	1.437.395.000	1.404.918.451	97,74	100
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.043.620.000	1.038.187.180	99,48	100
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	100.000.000	87.897.349	87,9	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	2.030.602.800	2.015.458.904	99,25	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	417.607.900	415.891.576	99,59	100
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	250.000.000	249.936.419	99,97	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	227.190.000	224.259.700	98,71	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SLEMAN	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	59.096.900	48.520.100	82,1	100
		Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi	6.248.584.000	6.247.475.000	99,98	100
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN	PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	450.000.000	449.365.900	99,86	100
	DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	462.437.800	461.864.281	99,88	100
	DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN	Pengembangan Lumbung Mataraman	350.000.000	342.917.600	97,98	100
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	210.000.000	198.512.850	94,53	100
	PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO					
	KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.306.560	98,31	100
	KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	97.206.962	97,21	100
	KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY	100.000.000	99.980.000	99,98	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.940.193	99,94	100
	KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.622.200	99,62	100
	KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.995.120	100	100
	KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.909.776	99,91	100
	KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.804.164	99,8	100
	KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.698.000	98,7	100
	KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.871.740	99,87	100
	KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.899.086	99,9	100
	KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	250.000.000	250.000.000	100	100
	KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	97.006.260	97,01	100
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KULON PROGO	Pembinaan Jagawarga	670.750.000	651.705.876	97,16	100
	DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGO	Pengembangan Industri Kreatif	221.590.000	220.584.552	99,55	100
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO	Pengembangan Budaya Bahari	5.196.082.720	5.110.883.425	98,36	100
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Nominasi warisan Budaya	1.943.815.700	1.931.573.952	99,37	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	KABUPATEN KULONPROGO	Nasional dan Dunia				
		Pengembangan Lumbung Mataraman	811.128.200	786.850.237	97,01	100
		Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	792.677.500	767.571.158	96,83	100
	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON PROGO	Penghargaan Seniman dan Budayawan	313.000.000	308.248.288	98,48	100
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	433.033.000	421.015.861	97,22	100
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	772.000.000	769.326.876	99,65	100
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.229.982.100	1.216.670.794	98,92	100
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri	1.369.273.500	1.309.721.595	95,65	100
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	2.993.227.200	2.965.034.277	99,06	100
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	584.485.562	575.587.186	98,48	100
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	4.199.483.234	4.012.154.831	95,54	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	844.957.200	838.588.026	99,25	100
		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.562.282.200	1.561.302.104	99,94	100
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	667.094.400	665.711.919	99,79	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	495.952.673	99,19	100
		Gelar Budaya Jogja	4.487.876.200	4.467.002.008	99,53	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	299.575.000	293.585.127	98	100
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	887.053.400	885.514.402	99,83	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1.662.842.200	1.643.395.102	98,83	100
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	10.917.245.800	10.907.901.187	99,91	100
	DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULONPROGO	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	19.610.321.174	19.381.634.158	98,83	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	7.390.700.000	7.350.537.044	99,46	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	5.218.423.241	5.115.095.966	98,02	100
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULONPROGO	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1.016.813.900	1.015.208.532	99,84	100
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KULONPROGO	Pengembangan Industri Kreatif	102.868.000	102.636.885	99,78	100
	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KAPANEWON NGLIPAR	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON PLAYEN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.999.950	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON PATUK	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON PALIYAN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON PANGGANG	Gelar Budaya Jogja	98.750.000	98.750.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON TEPUS	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON SEMANU	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON KARANGMOJO	Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Keistimewaan DIY	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON PONJONG	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON RONGKOP	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON SEMIN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON NGAWEN	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON GEDANGSARI	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	97.300.000	97,3	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON SAPTOSARI	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON GIRISUBO	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON TANJUNGSARI	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	KAPANEWON PURWOSARI	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.880.000	99,88	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pembinaan Jagawarga	581.795.000	581.794.110	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Pembangunan Ekosistem Kultural	700.000.000	699.990.000	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	424.310.000	422.170.000	99,5	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pengembangan Lumbung Mataraman	521.250.000	515.217.800	98,84	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	303.220.000	278.721.055	91,92	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	DINAS PERDAGANGAN	Pengembangan Industri Kreatif	500.000.000	499.998.281	100	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	Pengembangan industri kreatif	297.315.000	297.217.416	99,97	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.200.000.000	2.198.983.909	99,95	100
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	150.000.000	149.000.000	99,33	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	DINAS PARIWISATA	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	217.297.500	216.838.027	99,79	100
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1.001.690.000	994.029.500	99,24	100
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	736.000.000	733.910.180	99,72	100
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.130.000.000	1.098.131.180	97,18	100
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	400.000.000	399.459.549	99,86	100
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.679.419.000	1.635.854.360	97,41	100
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	3.980.000.000	3.798.165.026	95,43	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	450.000.000	436.998.000	97,11	100
		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.329.950.000	1.329.920.000	100	100
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	882.000.000	877.000.000	99,43	100
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1.521.000.000	1.424.114.980	93,63	100
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	300.000.000	300.000.000	100	100
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	498.000.000	99,6	100
		Gelar Budaya Jogja	6.428.387.000	6.413.530.740	99,77	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	175.000.000	174.405.000	99,66	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	320.000.000	300.294.000	93,84	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	2.250.500.000	2.233.817.620	99,26	100
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	7.517.000.000	7.516.490.084	99,99	100
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	2.927.000.000	2.797.028.180	95,56	100
	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA					
	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTA YOGYAKARTA	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	10.806.746.324	10.753.274.416	99,51	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	8.804.053.000	8.793.269.124	99,88	100
	KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA	gelar budaya jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA	GELAR BUDAYA JOGJA	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Yogyakarta	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN GEDONGTENGGEN KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.885.000	99,89	100
	KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	KEMANTREN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	95.488.000	99,89	100
	KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.950.000	98,95	100
	KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA	Â Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
	KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA	Gelar Budaya Yogyakarta	100.000.000	100.000.000	100	100
	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	Pembinaan Jagawarga	134.120.000	133.120.000	99,25	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	17.708.285.000	17.686.012.740	99,87	100
	DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	960.000.000	959.009.750	99,9	100
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.652.535.000	1.649.789.750	99,83	100
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	900.000.000	887.706.950	98,63	100
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.887.500.000	1.849.010.430	97,96	100
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	600.000.000	592.780.000	98,8	100
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	953.580.000	940.226.780	98,6	100
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	350.000.000	342.973.750	97,99	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	492.500.000	98,5	100
		Gelar Budaya Yogyakarta	4.960.340.000	4.930.674.750	99,4	100
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	840.000.000	836.298.200	99,56	100
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1.870.000.000	1.866.192.922	99,8	100
		Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	2.500.000.000	2.493.209.000	99,73	100
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	930.000.000	911.248.000	97,98	100
		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	2.130.360.000	2.035.000.000	95,52	100
	BKK Kalurahan	BKK KALURAHAN-PAPAN PENANDA KEISTIMEWAAN	63.000.000	63.000.000	100	100
		BKK KALURAHAN-BALAI DUSUN KEISTIMEWAAN	15.150.000.000	15.098.849.775	99,66	100
		BKK KALURAHAN-PENGLOLAAN SAMPAH KEISTIMEWAAN	6.000.000.000	5.985.089.940	99,75	100
		BKK KALURAHAN-DEMPLLOT JOGJA HIJAU KEISTIMEWAAN	1.000.000.000	1.000.000.000	100	100
		BKK-KAMPUNG BERKAH	200.000.000	200.000.000	100	100
		BKK KALURAHAN-PADAT KARYA	21.525.000.000	21.481.505.124	99,80	100
		BKK KALURAHAN-BALAI BUDAYA	7.095.406.000	7.010.967.000	98,81	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		BKK KALURAHAN-DESA MANDIRI BUDAYA	24.500.000.000	24.428.375.688	99,71	100
		BKK KALURAHAN-ARSITEKTUR	1.000.000.000	1.000.000.000	100	100
		BKK KALURAHAN-WBTB	1.000.000.000	993.701.786	99,37	100
		BKK KALURAHAN-DESA BAHARI	3.500.000.000	3.382.898.500	96,65	100
		BKK KALURAHAN-DESA BUDAYA	4.300.000.000	4.246.463.478	98,75	100
		BKK KALURAHAN-DESA MANDIRI PANGAN	3.950.000.000	3.940.065.000	99,75	100
		BKK KALURAHAN-DESA PRIMA	2.250.000.000	2.239.479.428	99,53	100
		BKK KALURAHAN-DESA PRENEUR	5.698.994.000	5.660.769.800	99,33	100
		BKK KALURAHAN-DESA WISATA	9.600.000.000	9.600.000.000	100	100
		BKK KALURAHAN-OMAH JAGAWARGA KEISTIMEWAAN	2.050.000.000	2.020.194.000	98,55	100
		BKK KALURAHAN-RTLH KEISTIMEWAAN	18.750.000.000	18.732.961.584	99,91	100
		TOTAL	1.117.858.933.379	1.101.870.780.594	99,57	99,91

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan antara lain:

- a) Revitalisasi Pojok Beteng (Lor Wetan). Tujuan dari revitalisasi pojok beteng adalah untuk memperkuat penanda-penanda keistimewaan DIY, dalam rangka meningkatkan pemanfaatannya melalui bentuk-bentuk revitalisasi kawasan cagar budaya.
- b) Pengembangan pada Museum Sonobudoyo berupa pengembangan Virtual Museum dan pembaruan tata pameran pada gedung pameran lama serta pembaruan koleksi pameran.
- c) Penanganan *Stunting* dengan pemberian 2 telur per hari yang dialokasikan kepada 3.663 keluarga di 113 kalurahan.
- d) Pembangunan sarana penunjang dalam rangka operasional PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Gesing diantaranya Bangunan Konstruksi Batas Area PPP Gesing, Shelter Nelayan, Gedung Kesyahbandaran, Tangga Mitigasi, Taman Kawasan dan Signage.
- e) Pengembangan Teras Malioboro 1 berupa rehabilitasi bangunan Eks Cirebon dan Cendrawasih yang akan difungsikan sebagai Kantor Balai Layanan Bisnis UMKM.
- f) Mengembangkan kawasan *Integrated Farming System* WBTB Sate Klathak Wonokromo. Target dan sasaran dari kegiatan ini adalah pelestarian, pengembangan dan optimalisasi potensi Sate Klathak Wonokromo sebagai WBTB yang terintegrasi dengan pemberdayaan kelompok ternak kambing.
- g) Penyelenggaraan Pasar TBY (Taman Budaya Yogyakarta) yang dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu pasar Kangen TBY dan Pasar Budaya. Peserta Pasar Kangen 2023 sejumlah 172 stand yang terdiri dari 85 stand kuliner dan 87 stand kerajinan dan barang – barang antik.
- h) Penyelenggaraan kegiatan supporting program SiBakul Jogja berupa Buletin SiBakul, SiBakul Sport Festival, Video Dokumenter SiBakul, Pemeliharaan Aplikasi SiBakul, Obrolan SiBakul, Bursa Pembiayaan SiBakul, SiBakul Jelajah Nusantara, Pameran Expo SiBakul, serta Sistem Pemasaran *Online* Produk UMKM (Beli Creative SiBakul).

Aktivitas lain yang menjadi keluaran pada urusan kebudayaan di tahun 2023 dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan, yaitu BKK-Kalurahan yang dijabarkan lebih rinci sebagai berikut.

BKK Kalurahan

Pada tahun anggaran 2023, alokasi Dana Keistimewaan untuk Bantuan Khusus Keuangan ke Kalurahan sebesar Rp130.474.225.000,00 yang dialokasikan ke dalam 20 jenis BKK pada Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang. Adapun rincian Bantuan Keuangan Khusus Urusan Kebudayaan pada Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2023 adalah sebagai berikut.

a. BKK Papan Penanda Keistimewaan

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Papan Penanda Keistimewaan pada TA 2023 diberikan kepada 1 Kalurahan yaitu Kalurahan Selomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman dengan pagu anggaran Rp63.000.000 yang diampu oleh Biro Tata Pemerintahan DIY. Untuk progres hingga Tahap Akhir Kalurahan Selomartani telah melakukan pencairan sebesar Rp63.000.000 adapun kegiatan fisik yang telah dilaksanakan yaitu sudah dilaksanakan pembangunan papan penanda dengan presentase 100%.

b. BKK Balai Dusun

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Balai Dusun pada TA 2023 diberikan kepada 144 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dengan total pagu anggaran Rp15.150.000.000,00 yang diampu oleh Dinas PUPESDM DIY. Untuk capaian hingga Tahap Akhir total sebesar Rp15.098.975.775,00 (99,66%), sedangkan target fisik tercapai 100%.



Gambar 5.1. Balai Padukuhan yang sudah direhabilitasi (Balai Padukuhan Jerukwudel Kalurahan Jerukwudel)

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

c. BKK Pengelolaan Sampah

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Pengelolaan Sampah diberikan kepada 3 kalurahan yaitu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan total pagu anggaran Rp6.000.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Untuk capaian hingga Tahap Akhir seluruh kalurahan telah melaksanakan pencairan dengan total realisasi keuangan sebesar Rp5.985.089.940,00 (99,75%) serta realisasi fisik 100%.

d. BKK Demplot Jogja Hijau

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Demplot Jogja Hijau diberikan kepada 2 kalurahan yaitu Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dengan total pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Untuk capaian hingga Tahap Akhir ini total realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (100%), demikian juga untuk realisasi fisik 100%.



Gambar 5.2. TPS Amrih Lestari 2 Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

e. BKK Kampung Berkah

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Kampung Berkah diberikan kepada 1 Kalurahan yaitu Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dengan total pagu anggaran Rp200.000.000,00 yang diampu oleh Biro Bina Mental dan Spiritual DIY. Hingga Tahap Akhir realisasi keuangan Rp200.000.000,00 (100%) demikian juga realisasi fisik sebesar 100%.

f. BKK Padat Karya Jogja Istimewa

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Padat Karya Jogja Istimewa pada TA 2023 diberikan kepada 112 kalurahan yaitu 39 kalurahan di Kabupaten Bantul, 13 kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, 36 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan 24 kalurahan di Kabupaten Sleman dengan total pagu anggaran Rp21.700.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Hingga Tahap Akhir realisasi keuangan Rp21.481.505.124,00 (99,80%), sedangkan capaian fisik 100%.



Gambar 5.3. Padat Karya Jogja Istimewa Kalurahan Kebonharjo

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

g. **BKK Balai Budaya**

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Balai Budaya pada TA 2023 diberikan kepada lima Kalurahan yaitu Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulonprogo; Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kapanewon Kulon Progo; Kalurahan Taman Martani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman dan Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman dengan total pagu anggaran Rp7.989.840.000,00 yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY. Sampai dengan Tahap Akhir sudah ada lima kalurahan yang melaksanakan pencairan dengan realisasi keuangan BKK Balai Budaya sebesar Rp7.010.967.000,00 (98,81%), sedangkan capaian fisik sebesar 100%.

h. **BKK Desa Mandiri Budaya**

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Desa Mandiri Budaya pada TA 2023 diberikan kepada 25 Kalurahan yaitu 5 Kalurahan di Kabupaten Bantul, 7 Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo dan 7 Kalurahan di Kabupaten Sleman serta 6 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dengan total pagu anggaran Rp24.500.000,00 yang diampu oleh 4 OPD Pengampu yaitu Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi dan UMKM DIY, DP3AP2 DIY. Hingga Tahap Akhir ini total realisasi sebesar Rp24.429.824.688,00 (99,71%), sedangkan untuk realisasi fisik 100%.

i. BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (Kesejarahan)

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (Kesejarahan) pada TA 2023 diberikan kepada 1 Kalurahan yaitu Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dengan pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY. Untuk progres BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta Kalurahan Pleret hingga Tahap Akhir ini realisasi keuangan sebesar Rp1.000.000.000,00 (100%) dengan capaian fisik 100%.

j. BKK WBTB

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK WBTB pada TA 2023 diberikan kepada 1 Kalurahan yaitu Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dengan pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY. Untuk capaian BKK WBTB Kalurahan Wonokromo hingga Tahap Akhir, realisasi keuangan sebesar Rp993.701.785,72 (99,37%) dengan capaian fisik 100%.

k. BKK Desa Bahari atau Desa Maritim

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Desa Maritim pada TA 2023 ini diberikan kepada 6 kalurahan yaitu Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, Kalurahan Banaran Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo dan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dengan total pagu anggaran Rp3.500.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Kelautan DIY dan Perikanan. Untuk capaian hingga Tahap Akhir, realisasi keuangan Rp3.382.898.500,00 (96,65%), sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

l. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Budaya)

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Budaya) pada TA 2023 diberikan kepada 9 Kalurahan yaitu Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Sukoreno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Argomulyo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman, Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman, Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul dengan total pagu anggaran Rp4.300.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY. Untuk capaian BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Budaya) hingga Tahap Akhir total realisasi keuangan sebesar Rp4.246.463.478,00 (98,75%), sedangkan untuk realisasi fisik 100%.

m. BKK Desa Mandiri Pangan

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Desa Mandiri Pangan pada TA 2023 ini diberikan kepada 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Gulurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul dengan total pagu anggaran Rp3.950.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Pertanian DIY. Untuk capaian hingga Tahap Akhir total realisasi keuangan sebesar Rp3.940.065,000,00 (99,75%), sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.



Gambar 5.4. Lumbung Mataraman Kalurahan Kebonharjo

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

n. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Prima)

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Prima) pada TA 2023 ini diberikan kepada 9 Kalurahan yaitu Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Bedoyo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Kenteng Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Karangsewu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Sidorejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman dan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dengan total pagu anggaran Rp2.250.000.000,00 yang diampu oleh DP3AP2 DIY. Untuk capaian hingga Tahap Akhir, total realisasi keuangan Rp2.239.479.428,00 (99,53%), sedangkan progres fisik 100%.

o. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Preneur)

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Preneur) pada TA 2023 ini diberikan kepada 12 Kalurahan yaitu 3 Kalurahan di Kabupaten Bantul, 1 Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, 2 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan 6 Kalurahan di Kabupaten Sleman dengan total pagu anggaran Rp5.900.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Untuk capaian hingga Tahap Akhir

dengan total Rp5.660.769.800,00 (99,33%), sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

p. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata)

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata) pada TA 2023 ini diberikan kepada 11 Kalurahan yaitu 4 Kalurahan di Kabupaten Bantul, 1 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan 6 Kalurahan di Kabupaten Sleman dengan total pagu anggaran Rp9.600.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Pariwisata DIY. Untuk capaian hingga Tahap Akhir, seluruh kalurahan yang mendapatkan BKK Desa Wisata telah melaksanakan pencairan dengan total Rp9.600.000.000,00 (100%), demikian juga realisasi fisik sebesar 100%.

q. BKK Omah Jagawarga

Alokasi Dana Kesitimewaan untuk BKK Omah Jagawarga pada TA 2023 diberikan kepada 41 kalurahan yaitu 10 kalurahan di Kabupaten Bantul, 10 Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, 10 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan 11 Kalurahan di Kabupaten Sleman dengan total pagu anggaran Rp2.050.000.000,00 yang diampu oleh Satpol PP DIY. Untuk capaian hingga Tahap Akhir, total realisasi keuangan sebesar Rp2.020.194.000,00 (98,55%), sedangkan capaian fisik sebesar 100%.

r. BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH)

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta pada TA 2023 diberikan kepada 66 Kalurahan yaitu 21 kalurahan di Kabupaten Bantul, 11 kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, 14 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan 20 kalurahan di Kabupaten Sleman dengan total pagu anggaran Rp18.750.000.000,00 yang diampu oleh Dinas PUPESDM DIY. Untuk pelaksanaan BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH) pada Tahap Akhir, total realisasi keuangan Rp18.732.961.583,50 atau sebesar 99,91%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.



Gambar 5.5. RTLH Kabupaten Bantul (Kiri), dan RTLH Kabupaten Gunungkidul (Kanan)

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi pembangunan Sarpras Kebudayaan, diantaranya kondisi alam yang mempengaruhi pekerjaan pembuatan kolam sandar pelabuhan PPI Gesing. Selain itu terdapat kinerja Penyedia yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak, hingga putus kontrak pada Pembangunan Kantor Syahbandar PPP Sadeng. Selain itu, terkait kondisi Sosial dan Politik Luar Negeri yang mempengaruhi diantaranya adalah pembatalan kegiatan oleh mitra atau tuan rumah acara kebudayaan di Qatar. Pembatalan acara misi kebudayaan di Qatar terjadi karena situasi kondisi politik di Semenanjung Arab yang tidak kondusif.
- 2) Pelibatan Mitra Kegiatan Eksternal. Kegiatan yang melibatkan sasaran kelompok masyarakat sering kali didapati beragam konflik sosial yang dapat menyebabkan suatu kegiatan dapat terlambat hingga tidak dapat mencapai target yang direncanakan. Misalnya: Kegiatan Merti Dusun oleh Disbud Bantul yang tidak dapat tercapai targetnya dikarenakan menyesuaikan jadwal dari masyarakat yang berubah-ubah hingga adanya penundaan dan pembatalan yang dilakukan oleh masyarakat.

- 3) Terdapat kendala perijinan yang mempengaruhi kinerja pekerjaan fisik, diantaranya Balai Budaya Tuksono dan Bangunan UMKM di Dlingo.

b. Solusi

- 1) Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan sumber daya, masalah teknis, atau perubahan yang terjadi.
- 2) Konsultasi dengan melibatkan pihak terkait termasuk Kalurahan dan OPD Pengampu dalam mengembangkan solusi untuk kendala-kendala tersebut.
- 3) Melaksanakan pelaporan berkala termasuk progres perizinan seperti pada Balai Budaya Tuksono dan Bangunan UMKM di Dlingo untuk menjaga semua pihak terkait tetap terinformasi tentang status dan perkembangan penanganan kendala.

D. URUSAN PERTANAHAN

1. Kondisi Umum

Kewenangan keistimewaan urusan pertanahan memiliki peran besar dalam optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Sesuai amanat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pada pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup penugasan urusan pertanahan mencakup penatausahaan pertanahan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, pemberian izin pemanfaatan tanah desa, dan fasilitasi sistem informasi pertanahan.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Urusan Pertanahan pada tahun 2023 terdiri dari 1 program, 3 kegiatan, dan 9 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp28.985.621.575,00. Urusan Pertanahan diampu oleh 5 OPD Pemda DIY, 2 OPD Pemkab Bantul, 1 OPD Pemkab Sleman, 2 OPD Pemkab Kulonprogo, 2 OPD Pemkab Gunungkidul, 1 OPD Pemkot Kota, dan 11 Kalurahan pengampu BKK Pertanahan. Persentase realisasi fisik urusan pertanahan sampai dengan tahap akhir mencapai 96,51%. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap akhir sebesar 90,30% (Rp26.174.205.308,00).

Tabel 5.17. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2023

PROGRAM	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi Fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	946.817.000	902.231.090	99,17	100
		Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	662.895.000	635.942.207	96,15	100
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	237.000.000	232.725.600	98,2	99
		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	453.967.300	428.492.613	95,45	100
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	229.595.000	217.198.453	97,08	100
		Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	794.864.000	794.457.774	99,95	100
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	2.102.105.300	1.935.505.225	92,07	100

PROGRAM	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi Fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1.523.583.950	1.284.342.523	84,3	98
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	218.000.000	218.000.000	100	100
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	355.231.500	315.987.441	88,95	100
	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	312.648.500	287.029.039	91,81	100
	BIRO HUKUM	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kulunaskan dan Kadipaten	14.861.800	14.861.800	100	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	378.250.000	321.300.000	84,94	100
	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL					
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	245.200.000	245.200.000	100	100
		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4.542.818.000	3.824.372.770	84,19	91
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	154.000.000	146.824.850	95,34	100
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin	145.200.000	152.360.000	104,93	100

PROGRAM	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi Fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				
		Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	90.000.000	89.799.000	99,78	100
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	450.000.000	448.337.500	99,63	100
	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN					
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	3.846.824.325	3.375.959.219	87,76	87,85
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	200.000.000	198.365.981	99,18	100
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	84.375.000	82.319.287	97,56	100
		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	231.297.000	230.671.155	99,73	100
	PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO					
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULONPROGO	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.670.588.700	1.230.731.489	73,67	94
		Pengawasan Tanah kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	91.628.000	91.249.342	99,59	96
		penyiapan bahan pertimbangan teknis izin	100.000.000	86.853.600	86,85	100

PROGRAM	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi Fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
		penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten				
		Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	227.625.000	226.517.242	99,51	100
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	300.000.000	296.541.551	98,85	100
	PENEGNDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KULONPROGO					
	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	623.518.000	595.866.146	95,57	100
		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4.172.529.000	3.784.196.520	90,69	100
		Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	150.000.000	128.176.979	85,45	100
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	200.000.000	196.778.555	98,39	100
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	116.000.000	114.073.122	98,34	100
		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	121.606.000	118.574.050	97,51	100
	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA					
	DINAS PERTANAHAN	Penatausahaan Tanah Kasultanan	600.471.000	578.750.900	96,38	100

PROGRAM	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi Fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA	dan Tanah Kadipaten				
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	106.862.000	100.010.000	93,59	100
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	142.000.000	135.679.700	95,55	100
		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	55.261.000	36.206.000	65,52	100
		BKK Pertanahan	Rp1.841.825.000	1.827.681.585	99,23	100
	1. Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul					
	2. Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo					
	3. Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman					
	4. Kalurahan Argodadi Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul					
	5. Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman					
	6. Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul					

PROGRAM	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi Fisik %
			Pagu	Realisasi s.d. Tahap Akhir	%	
	7. Kalurahan Pondokrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Gunungkidul					
	8. Kalurahan Bulurejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul					
	9. Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo					
	Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo					
	10. Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo					
	11. Kalurahan Giritirto Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul					
	TOTAL		28.739.447.375	25.930.170.308	90,23	96,51

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

Sejak 2018-2023 jumlah bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terkelola dan termanfaatkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, terdapat penambahan 3.332 bidang tanah sehingga total bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terkelola dan termanfaatkan di Provinsi DI Yogyakarta sejumlah 25.993 bidang tanah. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang dimaksud diwujudkan pada beberapa aspek diantaranya penatausahaan tanah yang aktivitasnya mencakup pendaftaran tanah dan penelusuran data

tanah; pengawasan tanah yang aktivitasnya mencakup pengawasan perizinan terhadap tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah desa yang dimanfaatkan oleh pihak lain; pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah yang aktivitasnya mencakup pemberian ijin pemanfaatan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah desa kepada pihak lain; penanganan keberatan dan sengketa tanah yang aktivitasnya mencakup pemberian bantuan penanganan sengketa kepemilikan dan pemanfaatan tanah antara pemerintah dengan pihak lain; pemeliharaan dokumen pertanahan yang aktivitasnya mencakup penyimpanan dan pemeliharaan dokumen tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah desa; dan pengembangan sistem informasi pertanahan yang aktivitasnya mencakup pengolahan data geospasial inventarisasi tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah desa.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten tidak terbatas pada itu, melainkan diselenggarakan juga melalui BKK-Pertanahan.

a. BKK Pertanahan

Pada tahun anggaran 2023, alokasi Dana Keistimewaan untuk Bantuan Khusus Keuangan ke Kalurahan sebesar Rp130.474.225.000,00 yang dialokasikan ke dalam 20 jenis BKK yang dialokasikan ke dalam Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang. Pada Urusan Pertanahan terdapat 1 jenis BKK Kalurahan yaitu BKK Tata Kelola Pertanahan.

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Tata Kelola Pertanahan diberikan kepada 9 kalurahan yaitu Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman, Kalurahan Pondokrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman, Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan Kalurahan Bulurejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul dengan

total pagu anggaran Rp1.841.825.000,00 yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. BKK Tata Kelola Pertanahan masuk dalam sub kegiatan Pemanfaatan Tanah Kas Desa dan sub kegiatan Perlindungan Tanah Kas Desa sampai dengan Tahap Akhir total realisasi keuangan yaitu Rp1.827.681.585,00 (99,23%), sedangkan capaian fisik sebesar 100%.



Gambar 5.6. BKK Tata Kelola Pertanahan di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo (kiri) dan di Kalurahan Pondokrejo, Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman (Kanan)

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Dalam upaya Pengelolaan Hutan Khusus DIY, belum ada arahan/rekomendasi dari Kementerian LHK terkait penatausahaan tanah kasultanan yang di atasnya merupakan hutan;
- 2) Terbatasnya data kekancingan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sehingga menghambat proses penatausahaan dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Selain itu pembuatan Peta Bidang Tanah (PBT) pada beberapa tanah Kasultanan dan Kadipaten tidak dapat dilaksanakan karena terdapat kendala teknis di lapangan antara lain bidang tanah terindikasi tumpang tindih dengan bidang K3, batas bidang kurang tepat sehingga perlu pengukuran ulang, terdapat beberapa bidang yang sudah bersertifikat Hak Milik, dan kesalahan dalam pembuatan sertifikat.

b. Solusi

- 1) Melaksanakan sinkronisasi lintas sektor dengan Perangkat Daerah, Kanwil ATR BPN DIY, Kemenkumham Kanwil DIY, Kemendagri RI, dan Kementerian ATR BPN RI. Khususnya untuk menyatukan pemahaman bahwa terdapat hutan yang merupakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, sehingga memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan regulasi keistimewaan DIY;
- 2) Meningkatkan koordinasi antar *stakeholders* khususnya dengan Kasultanan dan Kadipaten dalam menelusuri data kekancingan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

E. URUSAN TATA RUANG

1. Kondisi Umum

Kewenangan keistimewaan urusan tata ruang terbatas pada upaya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Tujuan pengaturan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yaitu untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak terbatas itu, pengaturan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan pula untuk kelestarian lingkungan serta dipergunakan untuk membangun harmonisasi dengan satuan ruang lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY dalam melaksanakan harmonisasi Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten dijabarkan melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043. Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten ditujukan untuk mewujudkan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten sebagai kesatuan ruang yang harmonis dengan mengedepankan pada pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten yang dimaksud terdiri dari 18 wilayah SRS (Satuan Ruang Strategis) yang tersebar pada seluruh wilayah DIY dari wilayah utara, timur, barat, dan selatan DIY.

Kewenangan keistimewaan merupakan urusan yang vital dalam mendukung percepatan visi dan tujuan pembangunan daerah baik pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah. Urusan Tata Ruang tidak hanya mempunyai kontribusi dalam percepatan visi dan tujuan pembangunan daerah, namun juga pada memberikan sokongan yang besar pada pencapaian Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024. Urusan Tata Ruang sendiri berkontribusi pada 3 (tiga) poin Agenda Pembangunan Nasional, antara lain 1) Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; 2) Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan 3) Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

2. Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Urusan tata ruang terdiri dari 1 program dan 19 sub kegiatan yang dibiayai dengan pagu sebesar Rp229.165.671.196. Urusan Tata Ruang diampu oleh 7 OPD Pemda DIY, 5 OPD Pemkab Bantul, 1 OPD Pemkab Sleman, 5 OPD Pemkab Kulonprogo, 7 OPD Pemkab Gunungkidul, dan 3 OPD Pemkot. Persentase realisasi fisik urusan tata ruang sampai dengan tahap akhir mencapai 99,89% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap akhir sebesar Rp225.145.196.573,00 atau sebesar 98,25%.

Tabel 5.18. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Tata Ruang TA 2023

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu	Realisasi s,d, Tahap Akhir	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA					
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.468.618.010	2.333.892.534	94,54	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	3.630.291.000	2.561.122.071	70,55	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	125.479.681.700	125.345.761.997	99,89	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	3.200.969.800	3.200.719.329	99,99	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	289.022.650	288.901.330	99,96	100
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	543.284.000	530.127.021	97,58	100
		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	3.438.032.400	3.285.464.721	95,56	100
		Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	823.400.000	766.622.000	93,1	100
	DINAS PERHUBUNGAN	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.002.942.400	1.923.536.227	96,04	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	9.258.156.388	9.115.308.276	98,46	100
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	478.149.545	475.205.685	99,38

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu	Realisasi s,d, Tahap Akhir	%	
	DINAS PARIWISATA	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.000.000.000	946.872.070	94,69	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	600.000.000	597.110.000	99,52	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	484.488.000	440.154.750	90,85	100
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	698.030.000	667.923.106	95,69	100
	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	4.172.597.900	4.159.970.972	99,7	100
	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL					
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	397.825.730	359.780.630	90,44	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	142.214.930	109.462.280	76,97	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	273.959.860	213.491.160	77,93	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	568.209.720	440.845.520	77,59	100
	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	500.000.000	495.755.000	99,15	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu	Realisasi s,d, Tahap Akhir	%	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	367.665.400	367.098.900	99,85	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	510.100.000	499.477.160	97,92	100
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	582.801.500	571.836.400	98,12	100
		Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	300.000.000	292.790.450	97,6	100
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	404.350.000	352.811.500	87,25	100
	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN					
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	125.897.000	115.988.636	92,13	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	673.957.770	613.782.898	91,07	100
	PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO					
	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.169.980.060	1.169.247.207	99,94	100
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULONPROGO	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	157.465.760	157.332.105	99,92	100
		Perencanaan Program/Kegiatan	569.061.548	568.388.918	99,88	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu	Realisasi s,d, Tahap Akhir	%	
		n Urusan Tata Ruang				
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULONPROGO	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	4.113.241.400	3.886.601.419	94,49	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KULONPROGO	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	8.942.918.470	8.729.756.303	97,62	100
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULONPROGO	Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang	253.590.000	248.976.144	98,18	100
	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	269.313.800	263.966.500	98,01	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	394.035.000	393.884.355	99,96	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	759.000.000	758.068.095	99,88	100
	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	2.297.299.000	2.294.504.434	99,88	100
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	250.000.000	249.964.200	99,99	100
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis pantai selatan	5.237.300.000	4.362.283.160	83,29	95
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1.593.832.000	1.547.136.919	97,07	100

Program	OPD	Nomenklatur Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran			Realisasi fisik (%)
			Pagu	Realisasi s,d, Tahap Akhir	%	
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	297.977.940	284.750.610	95,56	100
	DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	6.717.851.815	6.710.411.584	99,89	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	239.467.000	239.467.000	100	100
	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA					
	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	150.000.000	149.654.000	99,77	100
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	200.000.000	199.926.000	99,96	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	401.835.000	399.418.000	99,4	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kraton	4.178.853.700	3.953.840.767	94,62	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	26.558.003.000	26.511.547.780	99,83	100
	BKK Kawasan Terpadu	BKK Kawasan Terpadu Kalurahan Sendangsari	500.000.000	494.258.450	98,85	100
		BKK Kawasan Terpadu Kalurahan Sumberagung	500.000.000	500.000.000	100,00	100
	TOTAL		229.165.671.196	225.145.196.573	98,25	99,89

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2024

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung pembangunan dalam 3 aspek yaitu aspek Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Pelayanan Dasar, dan Prioritas Nasional yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Aksesibilitas

- 1) Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang-Ngalang Segmen 2 dan 3 (2,83 km). Lokasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang – Ngalang Segmen 2 dan 3 mencakup dua Kalurahan antara lain Kalurahan Nglanggeran dan Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan jembatan bentang 200 m dan 100 m dengan lebar perkerasan 8 m dan pembangunan jalan baru dengan lebar perkerasan 7,5 m.
- 2) Pembangunan kawasan Parkir Nglanggeran Tahap I (7.000m²)-Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul.
- 3) Rekonstruksi Jalan Ps. Bendo-Beku (Lanjutan) seluas 935 meter. Ruas Jalan ini terletak di pegunungan Menoreh di wilayah Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang.
- 4) Rehabilitasi jalan menuju kawasan objek wisata bendung Khayangan sebesar 725 meter. Rehabilitasi jalan berupa pelebaran jalan dan penyambungan konektivitas jalan dengan jalan kabupaten.

b. Pelayanan Publik

- 1) Pelaksanaan revitalisasi Pasar Sentul dalam rangka penataan ruang di kawasan Puro Pakualaman. Pengadaan Bus Sekolah Si BONA. Pada Tahun Anggaran 2023 menambah 1 (satu) Unit Bus Sekolah Medium dioperasikan untuk melayani rute Semin – Karangmojo – Wonosari.
- 2) Pengadaan Becak Tenaga Alternatif. Pelaksanaan kegiatan pengaturan moda transportasi tradisional meliputi Penilaian dan pengujian prototipe becak; Terselenggaranya Event *Launching* Becak Tenaga Alternatif; Tersedianya moda Tradisional tenaga

alternatif (becak); Terselenggaranya Penilaian dan Pengujian Becak; Pemeliharaan Becak Tenaga Alternatif; Terselenggaranya Fasilitas Kelembagaan Becak; Pembangunan *Charging Station*.

c. Pelayanan Dasar

- 1) Penyediaan Air Bersih dari Air Tanah Dalam di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan penyediaan air bersih di Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui pembangunan 15 titik sumur bor dan 150 titik sumur resapan. Sedangkan untuk kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui pembangunan 7 titik sumur bor dan 70 titik sumur resapan.
- 2) Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Bersih Masyarakat berupa penyediaan air minum layak di wilayah Kulonprogo. Pekerjaan peningkatan air minum di Kabupaten Kulon Progo yaitu Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Bersih Masyarakat di Kalurahan Hargotirto, Kokap; Kalurahan Ngargosari, Samigaluh; Kalurahan Purwosari, Girimulyo; Kalurahan Pendoworejo, Girimulyo; Kalurahan Banjararum, Kalibawang.

d. Prioritas Nasional

- 1) Pendampingan percepatan penetapan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kabupaten yaitu RDTR Bantul Timur Kabupaten Bantul, RDTR Kulon Progo Utara Kabupaten Kulon Progo, RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah Kabupaten Gunungkidul, dan RDTR Pantai Selatan Bagian Barat Kabupaten Gunungkidul.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan tata ruang tidak terbatas itu, melainkan juga melalui BKK Kawasan Terpadu.

e. BKK Kawasan Terpadu

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK Kawasan Terpadu diberikan kepada 2 kalurahan yaitu Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul dan Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dengan total pagu anggaran

Rp1.000.000.000,00 yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Untuk progres sampai dengan Tahap Akhir ini Kalurahan Sumberagung telah melakukan pencairan dengan total Rp994.258.450,00 atau setara dengan 99,43% sementara progres fisik kumulatif 100%.



Gambar 5.7. Pembangunan Jalan Cor Sanggar Among Lare



Gambar 5.8. Pelatihan Peternak Sapi sebagai Operator Peternak Sapi

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Proses pengadaan revitalisasi Pasar Sentul terkendala karena terdapat sanggah dari penyedia yang tidak terpilih, sehingga pelaksanaan revitalisasi mundur dari jadwal yang direncanakan;
- 2) Pada proses pendampingan penyusunan RDTR dalam proses penyusunan tata kala waktu masih perlu menunggu kesiapan kabupaten, sehingga waktu penyelesaian yang telah ditentukan menjadi lebih lama.

b. Solusi

- 1) Prosedur pemberian jawaban sanggah segera dilaksanakan oleh BPBJ Setda Kota Yogyakarta, sehingga penandatanganan kontrak

dapat dilaksanakan dalam rentang waktu yang masih dapat ditolerir.

- 2) Adanya dukungan dari Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian RDTR melalui pendampingan dan senantiasa akan bekerja sama dalam percepatan penyelesaian RDTR yang telah ditentukan.





BAB VI

Program Strategis DIY

LKPJ
Gubernur DIY

Tahun

2023

A. JOGJA SMART PROVINCE

1. Latar Belakang

Smart Province merupakan provinsi yang mengembangkan dan mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dan terintegrasi satu sama lain. Dalam perencanaan *Smart Province* terdapat enam dimensi terpadu, antara lain; *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society* dan *smart environment*. Untuk dapat menjalankan *smart province* dengan baik perlu dibentuk Dewan *Smart Province* sebagai gugus tugas dalam mengimplementasikan *Smart Province*. Anggota *smart province* terdiri dari perangkat daerah, masyarakat dan *stakeholder* pendukung lainnya.

Salah satu Program Prioritas Pembangunan DIY yaitu pembangunan Sarana dan Prasarana Jogja *Smart Province* telah dimulai sejak tahun 2017, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 163/KEP/2017 dan Nomor 353/KEP/2021. Program prioritas tersebut kemudian salah satunya ditindaklanjuti, dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* 2019-2023. Rencana Aksi Daerah tersebut, disusun berlandaskan nilai kearifan lokal *Hamemayu Hayuning Bawana*. Selanjutnya, berpegang pada Visi Misi Gubernur Tahun 2023-2027, program yang kini dikenal dengan sebutan Jogja *Smart Province* (JSP), akan dilanjutkan dengan percepatan transformasi spasial atau model transformasi kelembagaan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dimana nilai harmonisasi manusia dengan teknologi sebagai fokusnya.

Sampai dengan tahun 2023, capaian JSP dari sisi tata kelola pemerintahan antara lain terwujudnya *Data Center* yang tersertifikasi, terwujudnya *Security Operation Center*, terbentuknya Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dan inovasi layanan publik terintegrasi. Hal ini berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan yang mendukung capaian Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan memperoleh predikat “AA”, Indeks Reformasi Birokrasi memperoleh predikat “A”, Keterbukaan Informasi Publik pada kluster “Informatif”, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada kategori “Baik”, Indeks Keamanan Informasi “Terbaik se-Indonesia”, dan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemda dengan capaian 98,4%.

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2023

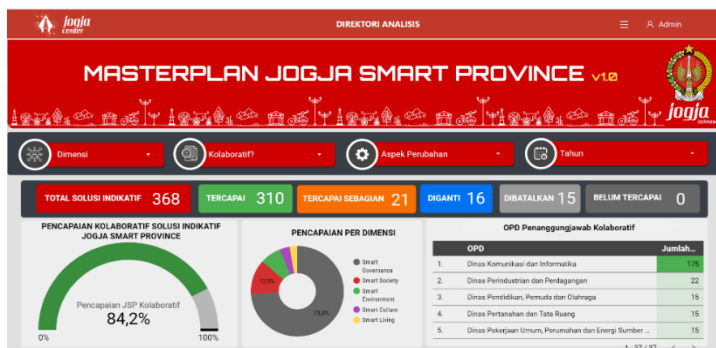
Tahun 2023 merupakan periode akhir pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas mandat JSP beserta solusi indikatif yang ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province*. Selain itu, pasca ditetapkannya kembali Pemda DIY masuk dalam program *Smart Province* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, tentu perlu dilakukan langkah strategis untuk semakin membuat dampak positif kehadiran teknologi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan memfinalisasi desk evaluasi solusi indikatif di perangkat daerah dan analisis dampak pada dimensi JSP.

JSP yang merupakan salah satu program strategis Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tertuang didalam SKEP Gubernur DIY Nomor 353 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Pembangunan DIY. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan program nasional dan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, saat ini telah dikuatkan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Roadmap dan aktivitas strategis yang tertuang didalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023, harus segera difinalisasi progres pelaksanaannya untuk dirancang *quick win* dan inovasi-inovasi baru baik di lingkungan perangkat daerah maupun di Kabupaten Kota dalam lingkup Pemda DIY.

Desk JSP dilakukan dan dianalisis berdasarkan isu strategis yang melatarbelakangi, arah kebijakan, rumusan strategi dan solusi alternatif yang ditawarkan. Rencana Induk Jogja *Smart Province* dibagi kedalam 5 area, yaitu *Smart Governance*, *Smart Living*, *Smart Society*, *Smart Environment*, dan *Smart Culture*. Area yang ditangani di setiap OPD sesuai dengan program dan kegiatan yang bersesuaian dan tahun aktif yang sudah ditetapkan pada Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019. Terdapat 368 solusi indikatif yang harus diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun sampai 2023. Secara umum pencapaian solusi indikatif sampai dengan tahun keempat adalah 310 tercapai, 21 tercapai sebagian, 16 diganti, dan 15 dibatalkan. Kemudian dilakukan analisis deskriptif terhadap dampak penerapan JSP selama 5 tahun dengan metode survey pada *output* yang merupakan bagian dari hasil di setiap dimensi yang ada di JSP. Adapun hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Smart Governance*: Pemasangan Wifi gratis di beberapa ruang publik sudah dirasakan manfaatnya namun belum memberikan hasil yang optimal. Banyak kendala yang dialami masyarakat seperti sinyal tidak stabil dan jangkauan yang kurang luas, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya Wifi gratis;
- b. *Smart Living*: Pengetahuan tentang Web CCTV masih rendah karena kurangnya sosialisasi. Namun Pemasangan CCTV sangat bermanfaat untuk keamanan. Masih terdapat kendala seperti kualitas yang kurang baik dan pemerataan titik pemasangan CCTV;
- c. *Smart Society*: Mayoritas UMKM sudah memiliki pengetahuan dan sudah cukup teredukasi tentang literasi digital. Dari segi pelajar, internet fiber juga sudah sangat bermanfaat, namun masih terdapat kendala seperti susah sinyal;
- d. *Smart Culture*: Website Jogja Belajar sudah banyak diketahui oleh pelajar namun intensitas penggunaannya masih rendah. Masih diperlukan sosialisasi terkait teknis penggunaan website agar dapat dimanfaatkan secara maksimal;

- e. *Smart Environment*: Sudah sering dilaksanakan pelatihan literasi digital, namun mayoritas masyarakat belum merasakan manfaat optimal dari pelatihan tersebut. Penggunaan layanan internet dari pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 6.1. Dashboard pencapaian Jogja *Smart Province* fase 1 tahun 2019-2023

Selanjutnya JSP pada tahun 2024 akan memasuki fase ke-2 dengan konsep JSP 2.0: Harmonisasi Manusia dan Teknologi. Dengan didasari Nota Kesepakatan antara Dirjen Aptika Kementerian Kominfo RI dengan Pemda DIY Nomor 557/2584 yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2023, dilakukan kerjasama terkait Implementasi Gerakan Menuju Provinsi Cerdas serta penandatanganan dukungan pelaksanaan JSP dari pemerintah kabupaten dan Kota se DIY.



Gambar 6.2. Penandatanganan Dukungan terhadap *Jogja Smart Province* dari Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY

Pelaksanaan JSP 2.0 dilanjutkan dengan pembuatan SK Gubernur terkait Dewan JSP Nomor 60/TIM/2023, Pokja JSP Nomor 61/TIM/2023, dan Tim Pelaksana JSP Nomor 62/TIM/2023. Berbeda dengan JSP sebelumnya yang menerapkan 5 dimensi, pada JSP 2.0 ini menerapkan 6 dimensi yakni *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment*. Pelaksanaan JSP 2.0 diharapkan akan lebih memperkuat aspek pelayanan publik kepada masyarakat DIY karena baik dalam penyusunan masterplan maupun dalam implementasi nantinya akan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di wilayah DIY yang juga sebelumnya telah mengimplementasikan *smart city*.

Salah satu tahapan awal dari rangkaian gerakan implementasi Gerakan Menuju Provinsi Cerdas yang telah dilaksanakan tahun 2023 adalah Bimtek dan FGD Penyusunan *Masterplan Smart Province* Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 4 kali dan menghasilkan 3 buah dokumen yang merupakan bagian dari Masterplan JSP 2.0, yaitu:

- a. Buku 1 Analisis Strategis *Smart Province* DIY: berisikan data dan informasi secara umum berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan provinsi, tinjauan kesiapan dan kesenjangan provinsi sehingga dapat dianalisis arah kebijakan dan strategi pembangunan *Smart Province*. Analisis *Smart Province* DIY dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal dengan penekanan pada implikasi terhadap strategi yang akan dilakukan dan diwujudkan dalam analisis *Gap* dan analisis SWOT. Dokumen ini menjadi dokumen awal dalam penyusunan dokumen-dokumen selanjutnya.
- b. Buku 2 *Master Plan Smart Province* DIY: disusun sebagai pedoman, panduan, maupun alat bantu bagi pemerintah dan *stakeholder* dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi implementasi Program Kerja *Smart Province* di DIY. Dokumen ini terdiri dari pendahuluan, arah pembangunan *Smart Province*, strategi pembangunan *Smart Province*, rencana aksi *Smart Province* untuk

masing-masing dimensi, peta jalan pembangunan *Smart Province*, dan program kerjasama lintas daerah (joint program).

- c. Buku 3 *Quickwin Smart Province* DIY: memuat 12 program inovasi yang terdiri dari 6 program *quick win* tingkat Provinsi dan 6 program *quick win* kolaborasi tingkat Kabupaten/Kota untuk masing-masing dimensi. Inovasi program *quick win* terpilih berdasarkan hasil kesepakatan masing-masing dimensi. Program inovasi *quick win* memiliki urgensi kebutuhan untuk dapat dilaksanakan pada jangka pendek, memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, dan tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Secara umum, evaluasi *quick win* perlu dilaksanakan setiap tahun. Adapun karakteristik profil *quick win Smart Province* pada setiap dimensi berisikan gambaran umum, penjelasan status inovasi saat ini, manfaat dari inovasi, keunikan/kreativitas, kemitraan, potensi untuk pengembangan, strategi menjaga keberlangsungan, sumber daya yang digunakan, dan analisis risiko, sedangkan untuk manajemen risiko *quick win* berisikan identifikasi risiko, analisis risiko, penanganan risiko, dan mitigasi risiko.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Implementasi rencana aksi JSP memiliki beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Adanya permasalahan Isu strategis di wilayah DIY yang terus bergerak secara dinamis sehingga memunculkan beberapa kondisi yang sudah tidak relevan maupun muncul kondisi-kondisi baru yang belum terakomodir.
- 2) Terdapat beberapa perubahan ketugasan dan wewenang OPD karena perubahan regulasi.
- 3) Pada tahun 2023 dilaksanakan penyusunan masterplan JSP fase 2.0 yang melibatkan kabupaten/kota di wilayah DIY yang memunculkan beberapa harapan dan tujuan yang berbeda dari tiap kabupaten/kota.

b. Solusi

- 1) Melakukan perbaikan maupun peninjauan kembali *masterplan* JSP yang disesuaikan dengan kondisi/isu terkini.
- 2) Permasalahan – permasalahan yang masih membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya akan dilanjutkan kembali pada pelaksanaan Masterplan JSP fase 2.0 mendatang.
- 3) Melakukan koordinasi yang lebih intensif terkait rencana implementasi JSP pada seluruh kabupaten/kota di wilayah DIY.

B. REFORMASI BIROKRASI

1. Latar Belakang

Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu tujuan prioritas RPD DIY Tahun 2023-2026, sejalan dengan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sampai dengan Tahun 2023 capaian tata kelola pemerintahan yang baik ditargetkan mencapai Indeks Reformasi Birokrasi A (Memuaskan). Indeks Reformasi Birokrasi A mencerminkan kualitas perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja bersih, bebas dari KKN, akuntabel, dan profesional melayani serta memberikan dampak nyata pada pencapaian program pembangunan. Sejak Tahun 2023, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui *double track* yaitu:

1. Reformasi Birokrasi General yang merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah tata kelola pemerintahan di dalam birokrasi yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan di tingkat hulu
2. Reformasi Birokrasi Tematik yang merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah tata kelola pemerintahan di dalam birokrasi yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan di tingkat hilir atau target pembangunan nasional dan daerah. Terdapat 5 (lima) Tematik Pembangunan yang dirumuskan

dalam Reformasi Birokrasi Tematik yaitu: Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi, Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Tematik Administrasi Pemerintahan (*Stunting*)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik diimplementasikan pada seluruh Perangkat Daerah dengan mengutamakan mekanisme kerja lintas sektor.

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2023

Berdasarkan hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB RI yang disampaikan melalui portal RB Nasional pada tanggal 6 Februari 2024, Kementerian PAN dan RB RI Nomor B/99/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Pemda DIY berada pada kategori dan Predikat **A-** dengan nilai 88,15. Capaian tersebut telah memenuhi target tujuan RPD Tahun 2023 yaitu Indeks dengan nilai 82,58.

Tabel 6.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi Tahun 2023

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,42	2,42
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5,65
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	53	1,06
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	3	1,2
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,61	2,89
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	1,5	1,29

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	92,1	3,68
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,5	89,17	2,23
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0,4
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	88,91	2,22
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	4	2
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	2		0
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	2	96,64	1,93
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	3	1,2
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	88,37	1,33
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	349	3,4
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,57	1,37
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	94,18	1,41
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	4,22	7,6

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Makro	2	100	2
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	8	57,14	4,21
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	5	5
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	92	3,68
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	62,9	2,52
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	77,33	7,73
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	86,67	6,93
Capaian RB General				100		75,35
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan <i>Stunting</i> (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Laju Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian <i>Output</i>)	0,6	79,46	0,45
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian <i>Output</i>)	0,6	93,94	0,54
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan <i>Stunting</i> (Capaian <i>Output</i>)	0,6	53,56	0,31

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian <i>Output</i>)	0,6	85,71	0,51
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Laju Inflasi (Capaian <i>Output</i>)	0,6	85,71	0,49
37	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Penurunan Tingkat Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,39	1,39
38	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Peningkatan Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,76	1,76
39	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,97	2,97
40	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan <i>Stunting</i> (Capaian Dampak)	3	0,46	0,46
42	RB Tematik	Capaian Dampak RB Tematik	Tingkat Inflasi (Capaian Dampak)	3	2	2
Capaian RB Tematik				20		12,80
41	RB General	Koefisien	Koefisien	10	0	0
Indeks RB						88,15

Sumber: Kemenpan-RB, 2024

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemda DIY telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan adanya peningkatan nilai pada komponen pengungkit.

Tabel 6.2. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pada Tahun 2021-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
I	Komponen Pengungkit			
1	Pemenuhan	20,00	17,56	18,22
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,77	7,27
3	Reform	30,00	22,36	22,79
	Total Komponen Hasil	60,00	47,69	48,28
II	Komponen Hasil			

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	9,32	9,38
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,47	8,43
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,18	8,57
4	Kinerja Organisasi	10,00	7,61	6,96
Total Komponen Hasil		40,00	33,58	33,34
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	81,27	81,62

Sumber: Kemenpan-RB, 2023

Terdapat 10 unsur yang dinilai sebagai hasil antara dari capaian Indeks RB di atas. Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2022, hasil indeks antara dari masing-masing instansi *leading sector* adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi Tahun 2022

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	342,00 (Sangat Baik)	349 (Sangat Baik)	Komisi Aparatur Sipil Negara
2	ASN Profesional	0-100	69,06 (Rendah)	52,09 (Sangat Rendah)	Badan Kepegawaian Negara
3	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	3,49 (Baik)	3,02 (Baik)	Kementerian PANRB
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	80,64	78,90	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,58	4,61	Kementerian PANRB
6	Kapabilitas APIP	0-5	3 (Integrated)	3 (Integrated)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7	Maturitas SPIP	0-5	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	97,05 (Zona Hijau)	91,15 (Zona Hijau)	Ombudsman RI

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	93,91 (Sangat Memuaskan)	96,16 (Sangat Memuaskan)	Arsip Nasional Republik Indonesia
10	Kualitas Reformasi Hukum	0-100	-	34,60	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sumber: Kemenpan-RB, 2023

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2023 diatur menggunakan Keputusan Gubernur DIY Nomor 458/KEP/2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi merupakan kebijakan yang bersifat adaptif, kolaboratif, sistemik dan partisipatif sebagaimana tercermin dalam *Road Map*.

Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilakukan secara bertahap, terukur, lintas sektor melibatkan peran aktif OPD Koordinator RB General, OPD Koordinator RB Tematik dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah DIY secara berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemda DIY terhadap 37 OPD tetap intensif dilakukan. Upaya yang dilakukan antara lain pendampingan penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi, pendampingan pengusulan Unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta layanan konsultasi dan pendampingan reformasi birokrasi. Pada akhir tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi OPD dengan metode sebagai berikut:

Tabel 6.4. Skema dan Bobot Nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah

No	Uraian	Bobot	Keterangan
Reformasi Birokrasi General			
A	Capaian Sasaran Strategis	50	Diukur dengan indikator turunan Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 739
	Sasaran 1: Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	26	
	Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	24	
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40	

No	Uraian	Bobot	Keterangan
	Sasaran 1: Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	28	Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023
	Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	12	
Total RB General		100	
Reformasi Birokrasi Tematik			Diukur dengan memetakan kontribusi peran Perangkat Daerah dalam pencapaian target RB Tematik
A	Sasaran Pelaksanaan RB Tematik	5	
B	Capaian Dampak RB Tematik	15	
Total RB Tematik		20	
Total Nilai RB		120	

Perkembangan hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	AA	>90-100	Istimewa			
2.	A	>80-90	Sangat Baik	20	22	35
3.	BB	>70-80	Baik	13	15	2
4.	B	>60-70	Cukup Baik	4		
5.	CC	>50-60	Cukup			
6.	C	>30-50	Buruk			
7.	D	0-30	Sangat Buruk			
Total				37	37	37

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2023

Tabel 6.6. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Tahun 2023
1.	AA	>100	Sangat Memuaskan	37
2.	A	>80-100	Memuaskan	
	A-		Memuaskan dengan catatan	
3.	BB	>70-80	Baik	
4.	B	>60-70	Cukup Baik	

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Tahun 2023
5.	CC	>50-60	Cukup	
6.	C	>30-50	Buruk	
7.	D	0-30	Sangat Buruk	
Total				37

Hasil evaluasi Tahun 2023 menunjukkan seluruh Perangkat Daerah sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kriteria A.

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah DIY mengusulkan 10 (sepuluh) unit kerja dalam pengusulan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pemerintah Daerah DIY berdasarkan surat Sekretaris Daerah DIY atas nama Gubernur DIY Nomor 356/6275 tanggal 31 Mei 2023 2022 tentang Usulan Unit/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM mengusulkan 10 (sepuluh) unit kerja sebagai berikut.

Tabel 6.7. Usulan Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM Tahun 2023

No	Unit Kerja	Predikat
1	Badan Kepegawaian Daerah	WBBM
2	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY	WBBM
3	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman	WBBM
4	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo	WBBM
5	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul	WBK
6	Balai Latiha Kerja dan Pengembangan Produktivitas	WBK
7	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	WBK
8	Badan Pendidikan dan pelatihan	WBK

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 866 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023 , terdapat 1 (satu) unit kerja usulan Pemerintah Daerah DIY berhasil meraih predikat WBBM Tahun 2023, yaitu Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY. Sehingga, sampai dengan Tahun 2023 perkembangan

unit kerja pelayanan yang telah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah sebagai berikut:

Tabel 6.8. Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM

No	Unit Kerja	Predikat	Tahun
1	Balai laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	WBK dan WBBM	2016 dan 2021
2	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY	WBK dan WBBM	2020 dan 2023
3	RS paru Respira Dinas Kesehatan DIY	WBK	2017
4	Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	WBK	2020
5	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman	WBK	2020
6	Badan Kepegawain Daerah DIY	WBK	2021
7	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta	WBK	2021
8	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo	WBK	2021
9	Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY	WBK	2021

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2023

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah sebagai institusi pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang gesit (*agile governance*) melalui penguatan kelembagaan istimewa Pemda DIY, permasalahan yang dihadapi Pemda DIY dalam Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi antara lain:

a. Permasalahan

- 1) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memerlukan perbaikan berkelanjutan untuk merespon Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi.
- 2) Peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sedemikian rupa sehingga seluruh unit kerja di Lingkungan Pemda DIY berkomitmen untuk membangun Zona Integritas.

- 3) Peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi bukan sekedar pada perbaikan tata kelola pemerintahan, namun dapat memberikan kontribusi pada hasil pembangunan.

b. Solusi

- 1) Pelembagaan Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi dalam Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja.
- 2) Meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas melalui upaya pembinaan unit layanan dan perumusan metodologi Survei mandiri.
- 3) Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik (Tematik Pengentasan kemiskinan, Tematik Investasi, Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Tematik Prioritas Presiden) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

C. PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA

1. Latar Belakang

Program prioritas pembangunan infrastruktur terkait sektor kelautan dan perikanan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi berupa Program Pengembangan Infrastruktur Prioritas Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta di Kabupaten Kulon Progo dan Program Penataan/Pengembangan Kawasan Prioritas berupa Pengembangan kawasan Pantai Selatan DIY di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta yang berlokasi di Pantai Glagah–Karangwuni dimaksudkan untuk memicu pengembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Jawa Tengah bagian Selatan, khususnya pada pengembangan bisnis perikanan. Pembangunannya direncanakan dilakukan secara terpadu dengan beberapa kegiatan lain, seperti perikanan, pariwisata, pengendalian banjir, tambak dan industri.



Gambar 6.3. Breakwater Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta

Sumber: Dislautkan DIY, 2024

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2023

Dibangun sejak tahun 2006, saat ini pembangunan fisik fasilitas fungsional dan penunjang sudah selesai 95% sedangkan fasilitas pokok yang belum selesai yaitu konstruksi *breakwater*. Konstruksi *breakwater* belum memenuhi kebutuhan panjang ideal sehingga belum bisa dimanfaatkan untuk operasi kapal. *Breakwater* sisi timur dari rencana panjang 390 m, baru terbangun 220 m; sedangkan *breakwater* sisi barat panjang ideal 350 m, baru terbangun 200 m.

Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto telah masuk dalam RIPP (Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional) sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 132 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Jangka waktu RIPP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2023 telah disusun Kajian Pemanfaatan PPP Tanjung Adikarta untuk usaha terkait pariwisata dan budidaya yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

a. Tahap Jangka Pendek

- 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana kawasan pelabuhan sebagai Zona Wisata, melalui beberapa kegiatan:
 - a) Sentra Budidaya Ikan Air Payau Tradisional
 - b) Zona Rekreasi Pemancingan
 - c) Zona Rekreasi Kuliner Ikan Laut/Payau, Cafe dan Restoran
 - d) Zona Rekreasi Pelabuhan, Rekreasi Melihat Jeti, Pemecah Ombak dan Pantai Karangwuni Kab. Kulon Progo
 - e) Pusat Pameran, Event Tempat Informasi Wisata , Festival /Acara, Kegiatan Seni dan Budaya
 - f) Pusat Penelitian, Inovasi, Pelatihan dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan
 - g) Zona Rekreasi Pasar Ikan (Skala Kecil) dan Sentra Ikan Olahan Hasil Budidaya, Kerajinan/Souvenir
- 2) Estimasi Investasi dan Pendapatan
 - a. Estimasi investasi sarana dan prasarana sebesar Rp5.231.545.000,- dengan rincian:
 - Sentra Budidaya Ikan Air Payau Tradisional: Rp260.315.000,-
 - Zona Rekreasi Pemancingan: Rp372.070.000,-
 - Zona Rekreasi Kuliner Ikan LauVPayau: Rp1.855.200.000,-
 - Zona Rekreasi Pelabuhan. Rp2.743.960.000,-
 - b. Estimasi pendapatan per tahun sebesar Rp687.393.000,- / tahun dengan rincian:
 - Sentra Budidaya Ikan Air Payau Tradisional: Rp59.155.920,- / tahun
 - Zona Rekreasi Pemancingan: Rp280.800.000,- / tahun
 - Zona Rekreasi Kuliner Ikan Laut/Payau: Rp64.800.000,- / tahun
 - Zona Rekreasi Pelabuhan: Rp240.300.000,- / tahun

- c. Estimasi nilai BEP (*Break Even Point*) dicapai dalam kurun waktu 8,11 tahun.

b. Tahap Jangka Menengah

1. Mengoptimalkan kawasan pelabuhan dengan budidaya ikan secara intensif yaitu dengan budidaya Ikan Bandeng Sistem Keramba Jaring Apung, dengan pengerukan kolam pelabuhan sedalam 3 meter.
2. Estimasi Investasi
Estimasi investasi sarana dan prasarana budidaya Ikan secara Intensif dilakukan dengan Dengerukan sedimentasi pasir sedalam 3 meter:
 - a) Biaya investasi untuk budidaya ikan secara intensif sebesar
 - b) Rp7.182.426.750,-
 - c) Apabila dilakukan pengerukan secara mandiri diperlukan anggaran sebesar Rp20.573.700.000,-
 - d) Apabila dilakukan Pengerukan dengan keqasama pihak ketiga dengan asumsi keuntungan 30°/ untuk Pemda DIY sebesar Rp4.384.024.000,- dan 70°/+ bagi pihak ketiga sebesar Rp10.229.388.000,-
3. Estimasi Pendapatan
 - a) Estimasi pendapatan dari budidaya ikan secara intensif Rp4.732.473.600,- / tahun
 - b) Estimasi pendapatan jika pengerukan dilakukan oleh pihak ketiga sebesar Rp4.384.024.000,-

c. Tahap Jangka Panjang

Mengoptimalkan operasional pelabuhan seara penuh dengan estimasi investasi sebesar Rp410.051.700.000,- (pengerukan alur masuk, penataan tetrapod. memperpanjang *breakwater*) yang merupakan kewenangan BBWSO.

Selain itu perlu dilakukan kajian pemanfaatan sedimentasi pasir yang ada di alur dan kolam pelabuhan Tanjung Adikarta. Bersama tim *Provincial Project Management Unit* DIY (PPMU DIY) terus dilakukan diskusi dan pembahasan solusi terbaik untuk pemanfaatan PPP Tanjung Adikarta dengan berbagai sumber pendanaan.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta belum beroperasi karena adanya sedimentasi baik di alur pelayaran maupun di kolam pelabuhan.

b. Solusi

Mengupayakan kajian PP Tanjung Adikarta sebagai kawasan penyangga Bandara Internasional Yogyakarta. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan kajian Pemanfaatan PPP Tanjung Adikarta agar dapat dimanfaatkan sebagai usaha pariwisata ataupun budidaya.

D. JOGJA AGRO PARK

1. Latar Belakang

Rendahnya minat generasi muda (generasi milenial) untuk terjun pada kegiatan pertanian dan tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian merupakan beberapa masalah utama yang dihadapi sektor pertanian di DIY. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 2023, jumlah pengelola usaha pertanian perorangan di DIY yang berusia di atas 45 tahun sebesar 83,15% dari total 417.166 orang. Hal ini menunjukkan jumlah generasi muda yang berusaha dalam sektor pertanian sangat rendah (BPS, 2023). Sementara itu, rata-rata alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian empat tahun terakhir mencapai 2.306 hektar per tahun (DPKP DIY, 2024). Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut berbagai upaya dilakukan oleh Pemda DIY diantaranya dengan menetapkan *Jogja Agro Park* (JAP) sebagai program prioritas Gubernur DIY berdasarkan SK Gub Nomor

353/KEP/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan. Dengan keberadaan JAP diharapkan dapat membantu mengurangi alih fungsi lahan dan memberdayakan petani dalam mengoptimalkan lahan pertaniannya melalui kegiatan pertanian terpadu mulai dari teknologi pembibitan, peternakan, pertanian, sarana pengairan, pengolahan pasca panen, dan pemasaran hasilnya. Kegiatan tersebut dipadukan dengan wisata minat khusus, kegiatan inkubator agribisnis dan program desa mandiri, sehingga dapat meningkatkan kualitas petani dan kelembagaan pertanian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.

2. Progres Sampai dengan Tahun 2023

Pengelolaan JAP dilakukan melalui pemanfaatan sarana prasarana yang sudah terbangun dalam rangka pembudidayaan hortikultura (sayur, buah, dan tanaman hias), ternak, dan ikan. Selain itu, JAP juga menjadi wahana pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pertanian serta sarana percontohan penerapan teknologi pertanian. Pengelola JAP juga secara rutin ditingkatkan kapasitasnya melalui bimbingan teknis.

Guna pengembangan JAP ke arah yang lebih baik dan agar dapat berfungsi sesuai yang diharapkan, tahun 2022 telah dilakukan Kajian Kelembagaan *Jogja Agro Park* dengan hasil menunjukkan bahwa *Jogja Agro Park* memenuhi kriteria untuk menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Permasalahan yang dihadapi JAP sampai dengan saat ini yakni
- 2) Belum menjadi lembaga struktural yang profesional.
- 3) Sarana prasarana penunjang operasional JAP masih perlu dilengkapi sesuai dengan desain yang direncanakan.

b. Solusi

Solusi yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Menindaklanjuti hasil dari Kajian Kelembagaan *Jogja Agro Park* tahun 2022 untuk membentuk UPTD dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait.
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan desain yang direncanakan melalui anggaran APBD, APBN, maupun skema penganggaran yang lain.

E. BANDARA YIA (YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT/YIA)

1. Latar Belakang

Bandar Udara Internasional Adisutjipto yang sudah tidak mampu lagi menampung kapasitas penumpang dan pesawat. Oleh karenanya, dibangun Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) yang berdiri di tanah seluas 600 ha dan menelan biaya 9 triliun rupiah. Bandara ini memiliki terminal seluas 210.000 m² dengan kapasitas 20 juta penumpang per tahun. Selain itu, bandar udara tersebut memiliki hanggar seluas 371.125 m² dengan kapasitas mampu menampung 28 unit pesawat. Bandara ini juga dapat menampung pesawat berbadan lebar, seperti B777, B747, A380 sehingga berperan cukup signifikan dalam mewujudkan konektivitas udara serta mendorong pertumbuhan wilayah DIY dan Pulau Jawa bagian Selatan. Pada 28 Agustus 2020 Bandar Udara YIA diresmikan oleh Presiden RI dan beroperasi penuh pada tanggal 29 Maret 2020. Seluruh penerbangan domestik dan internasional di Bandara Adisucipto Yogyakarta dipindahkan ke Bandara YIA.

Dengan adanya perpindahan operasional penerbangan ini, diperlukan adanya dukungan aksesibilitas, seperti kesiapan moda transportasi penumpang masuk dan keluar Bandara YIA.

2. Kondisi Eksisting 2023

Bandar Udara Internasional Yogyakarta yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas lahan \pm 583 hektar dengan fasilitas eksisting antara lain sebagai berikut:

a. Fasilitas Pokok Sisi Udara:

- 1) Landas Pacu (Runway): 3.250 m x 45 m (dilengkapi *shoulder* dengan lebar 15m),
Critical aircraft: Boeing-777.
- 2) Landas Parkir (Apron): 1.051 m x 167 m,
Apron capacity: 22 narrow body (atau 11 wide body)



Gambar 6.4. Landas Pacu (Runway)



Gambar 6.5. Landas Parkir (Apron)

b. Fasilitas Pokok Sisi Darat:

- 1) Terminal Penumpang: 219.000 m²,
Kapasitas: 4.520 penumpang pada saat *peak hour* atau 20 juta penumpang/tahun.
- 2) Terminal Kargo: 5.852 m², kapasitas 640 ton.
- 3) Fasilitas parkir kendaraan: Gedung Parkir 3 lantai 89.897 m², Parkir *Outdoor* 19.006 m² (1.631 SRP), parkir Bus 8.249 m² (62 SRP), parkir sepeda motor (4.900 SRP) dan sepeda (100 unit).



Gambar 6.6.
Counter check
in & Ruang Tunggu
Keberangkatan



Gambar 6.7. Fasilitas
Parkir Kendaraan

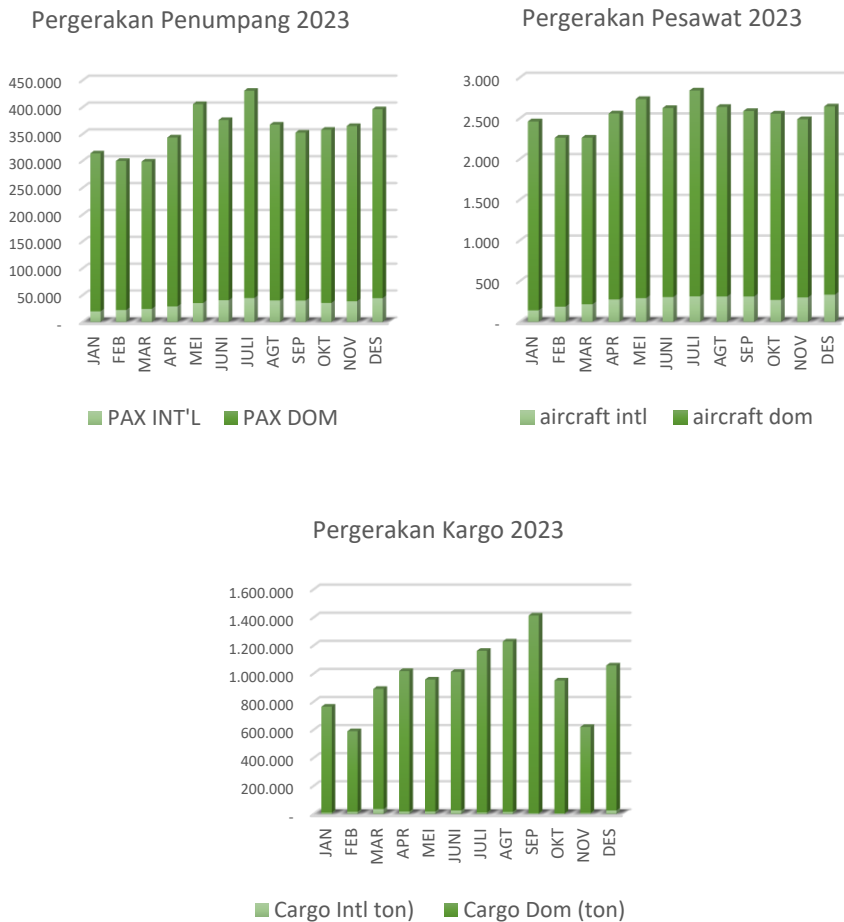


Gambar 6.8. Terminal
Kargo

a. Kondisi Lalu Lintas Angkutan Udara

Setelah masa pandemi Covid-19 berakhir, pergerakan lalu lintas udara di Bandar Udara Internasional Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Yogyakarta pada tahun 2023 pergerakan penumpang mencapai 4.307.410 penumpang yang terdiri dari 3.392.697 penumpang domestik dan 414.713 penumpang internasional (*growth* 34%). Pergerakan pesawat mencapai 30.662 dengan perincian 27.405 pergerakan pesawat domestik dan 3.257 pergerakan pesawat internasional (*growth* 33%). Pergerakan kargo mencapai 11.653.168 ton dengan perincian 11.476.052 ton kargo domestik dan internasional 186.116 ton kargo internasional (*growth* 42%). Adapun *Load factor* penumpang pada tahun 2023 sebesar 75,75%.

Berikut grafik pergerakan lalu lintas udara Bandar Udara Internasional Yogyakarta per bulan pada tahun 2023, berdasarkan data dari PT. Angkasa Pura I Cabang YIA:



Gambar 6.9. Grafik Pergerakan Lalu Lintas Udara di Bandara Internasional Yogyakarta

Pada tahun 2023 terdapat 9 *airline* domestik yang beroperasi di Bandar Udara Internasional Yogyakarta yaitu Air Asia, Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia, Lion Air, Pelita Air, Sriwijaya Air, Super Air Jet, dan Transnusa; melayani 15 rute yaitu: Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Soekarno Hatta-Cengkareng, Halim Perdana Kusuma-Jakarta, Lombok, Makassar, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Palembang, Palangkaraya, Samarinda dan Surabaya. Maskapai penerbangan yang beroperasi pada penerbangan internasional adalah Malaysia Airlines, Scoot, Batik Air dan

Air Asia, melayani rute Singapura dan Kuala Lumpur. Pada bulan Agustus s.d September 2023 terdapat penerbangan langsung ke Jeddah dengan operator Garuda Indonesia.

b. Isu Strategis: Aksesibilitas dari dan ke Bandar Udara Internasional Yogyakarta

Sebagai bandar udara yang relatif baru dan lokasinya cukup jauh dari pusat kota Yogyakarta (± 40 km) pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta menuntut tersedianya prasarana dan sarana ke bandar udara yang efektif dan efisien. Beberapa konsep telah dikembangkan guna meningkatkan akses dari/ke bandar udara, guna melayani masyarakat yang berasal dari DIY maupun luar DIY yang masuk dalam cakupan pelayanan bandar udara.

1) Moda Kereta Api

Konsep integrasi moda kereta api dengan moda udara di Bandara Internasional Yogyakarta diawali pada tanggal 6 Mei 2019 melalui pengoperasian Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport (KA Bandara YIA) berangkat dari stasiun Tugu berhenti di stasiun Wojo kemudian dilanjutkan *shuttle bus*, dan sebaliknya. Saat ini pelayanan KA Bandara Internasional Yogyakarta telah menghubungkan Kota Yogyakarta menuju Bandara Internasional Yogyakarta dan sebaliknya, dengan titik pemberhentian di Stasiun KA Bandara Yogyakarta, Stasiun KA Bandara Wates, dan Stasiun Tugu Yogyakarta. KA Bandara YIA memiliki jarak tempuh ± 40 km dan waktu tempuh 39 menit dengan frekuensi 21 trip/hari. Berdasarkan data dari PT. Railink Cabang Yogyakarta selaku operator KA Bandara, selama tahun 2023 penumpang KA bandara YIA mencapai 2.155.305 penumpang, mengalami pertumbuhan sebesar 125% dari tahun 2022. Okupansi penumpang kereta api bandara tahun 2023 mencapai 75%.

2) Moda Transportasi Darat

Akses dari / ke Bandar Udara Internasional Yogyakarta telah dipadukan dengan moda transportasi darat melalui pelayanan angkutan umum antara lain:

- a) Angkutan sewa masal: Damri, Satelqu;
- b) Angkutan sewa khusus;
- c) Taksi Argo: PRIMKOPAU, PT. JAS, dan KSU Pataga;
- d) Angkutan Premium: Golden Bird dan TRAC.

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan DIY telah menerbitkan rekomendasi teknis guna perpanjangan atau penerbitan Kartu Pengawasan angkutan umum dengan tujuan Bandar Udara Internasional Yogyakarta yaitu: Damri (14 rekomendasi), Taksi (123 rekomendasi) dan angkutan sewa khusus (25 rekomendasi).

3) Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS)

JJLS merupakan salah satu akses penting menuju Bandar Udara Internasional Yogyakarta terutama bagi masyarakat yang berdomisili di sisi selatan DIY. Sebagian ruas jalan di JJLS merupakan jalan provinsi, yang dilengkapi dengan perlengkapan lalu lintas jalan berupa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Alat Penerangan Jalan (APJ), *warning light*, rambu, marka, *delineator* dan lain-lain. Selama tahun 2023 dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan rutin perlengkapan jalan yang merupakan asset Pemda DIY pada ruas JJLS yaitu pada 1 unit APILL, beberapa *warning light* dan \pm 214 unit APJ dan beberapa perbaikan perlengkapan jalan provinsi di ruas JJLS.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas akibat adanya perbaikan jembatan Glagah dilakukan melalui: pe-nonaktif-an sementara APILL yang berlokasi di simpang barat jembatan Glagah, pemberlakuan 1 (satu) arah dari simpang jembatan Glagah ke

utara dan pemasangan rambu batas tonase. Mulai 12 Desember 2023 telah dilakukan pengaktifan kembali APILL tersebut.

Pemda DIY juga mempunyai beberapa kewenangan dalam mendukung pembangunan YIA berbasis fasilitasi ke PU an, diantaranya penyusunan master plan kawasan pendukung bandara (aerotropolis), pembangunan infrastruktur pendukung (akses jalan, aksesibilitas bandara berbasis darat (angkutan jalan), aksesibilitas berbasis rel kereta api, pembangunan VVIP *Room* dan pembangunan SPAM Regional Kamijoro. Berikut ini adalah progres sampai dengan tahun 2023:

1) ***Aerotropolis***

Pembangunan bandara tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan penerbangan, namun juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih luas dan berpengaruh pada perkembangan wilayah di sekitarnya. Dalam rangka perwujudan tujuan tersebut, konsep Aerotropolis—merupakan salah satu konsep yang relevan dalam pengembangan kawasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta. Aerotropolis adalah pengembangan dari konsep *aerocity* yang merupakan konsep paling modern dalam pembangunan dan pengelolaan bandara. Pengembangan kawasan Aerotropolis menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Daerah DIY yang diharapkan dapat mendukung terciptanya dampak optimum dari keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta khususnya bagi DIY dan kawasan selatan Pulau Jawa secara lebih luas.

Pada tahun 2022 dan 2023, Pemda DIY telah menjalin kerjasama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) terkait dengan rencana pembangunan Aerotropolis di Bandar Udara YIA. Adapun bentuk kerjasamanya adalah penandatanganan MOU Layanan Konsultasi Teknis Pembangunan Aerotropolis di kawasan Yogyakarta *International Airport*. Kerjasama dengan JICA ini

menghasilkan desain pengembangan dan penyusunan master plan pengembangan Aerotropolis DIY. *Master plan* harus disusun agar pembangunan terarah sesuai dengan harapan awal dibangunnya YIA. Hal ini dilakukan agar tidak bersifat parsial, sehingga penting untuk dibangun konsep menyeluruh dalam bentuk Aerotropolis. Pengembangan Kawasan Aerotropolis dilakukan melalui Program Prioritas berdasarkan arah kebijakan dan strategi dari Pemda terdiri dari:

- a) *Air-front MICE*, yaitu mewujudkan kawasan MICE (*meetings, incentives, conferences and exhibitions*) yang harmonis antara *aerocity* dan *aerotropolis core*.
- b) *Smart agriculture*, yaitu mewujudkan *Smart Agriculture Center* bagi petani milenial sehingga menarik minat *startup agrotech*, perusahaan pengolahan makanan, dan lain-lain di Kulon Progo dan DIY.
- c) *Smart tourism*, yaitu menciptakan nilai-nilai lokal yang menarik bagi pengunjung untuk menghabiskan waktu menginap yang menyenangkan dengan mengembangkan solusi digital sebagai promosi pariwisata dan pengembangan kawasan yang berbasis IT.
- d) *Science techno city*, yaitu menciptakan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e) *Futuristic town*, yaitu menciptakan perkotaan baru dengan membangun sistem ekonomi sirkular berbasis inovasi pelayanan publik.

2) **Akses Jalan**

Jalan Provinsi DIY yang mendukung aksesibilitas operasional Bandara YIA pada tahun 2023 dilakukan penanganan pada beberapa ruas yaitu pada Ruas Brosot – Toyan sepanjang 3 km dilakukan penanganan melalui dana Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Penanganan pada Ruas Jalan Karangnongko – Nagung – Cicikan sepanjang 3,05 km menggunakan dana Dana Alokasi Khusus (DAK).

3) *Progres Tol*

Dukungan aksesibilitas menjadi hal yang sangat penting karena saat ini Bandara YIA melayani tidak hanya penerbangan domestik akan tetapi juga melayani penerbangan skala internasional. Bentuk dari dukungan tersebut yaitu dengan adanya rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta-YIA Kulon Progo yang terintegrasi dengan ruas tol Trans Jawa. Jalan tol Yogyakarta – YIA Kulon Progo ini nantinya akan terhubung langsung dengan Bandara YIA dengan simpang susun yang berada di sebelah utara jalan nasional Yogyakarta-Purworejo.



Gambar 6.10. Rencana Trase Jalan Tol Pada Kawasan Sekitar Bandara YIA

Sumber: DPUP-ESDM DIY, 2024

Progres Jalan Tol Yogyakarta–YIA Kulon Progo masih dalam tahap pembebasan lahan. Pada akhir tahun 2023 Izin Penetapan Lokasi (IPL) trase Jalan Tol Yogyakarta – YIA telah keluar. Isu strategis saat pelaksanaan terkait Tanah Kas Desa (TKD) dan Sultan Ground (SG) yang berada pada Trase Jalan Tol. Dari Pemerintah DIY, TKD dan SG dapat digunakan untuk jalan tol dengan pemberian Palilah dengan pisungsung ditargetkan 1 tahun setelah terbitnya palilah. Pemerintah Nasional sedang melakukan koordinasi terkait tindak lanjut hal tersebut.

Jalan tol Yogyakarta-YIA dengan panjang ruas 38,57 km dari Junction Sleman-YIA / Batas Purworejo. Sesuai dengan Surat Menteri PUPR RI Nomor BM.0701-Mn/1044 tanggal 25 Mei 2022 perihal Persetujuan Pentahapan Pengusahaan Jalan Tol, tahap konstruksi dilaksanakan pada tahun 2024 (setelah pembebasan lahan selesai). Rencana operasi pada tahun 2026

c. Layanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Menuju Bandara

Pada tahun 2022, Bandara YIA melayani penumpang sebanyak 2.948.888 orang. Jumlah tersebut meningkat 1.549.235 orang disbanding penumpang tahun 2021 sebanyak 1.408.653 orang. Selain itu bandara YIA tercatat melayani penerbangan dan kargo dengan data sebagai berikut:

Tabel 6.9. Data Perbandingan Lalu Lintas Penerbangan Bandara YIA Tahun 2021-2022

Penumpang (Pax)			Penerbangan (Pswt)			Kargo (kg)		
2021	2022	(%)	2021	2022	(%)	2021	2022	(%)
1.408.653	2.948.888	109,34	11.736	21.076	79,58	7.291.814	8.181.938	12,21

Sumber: Dishub DIY, 2023

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas di Bandara YIA, saat ini telah didukung dengan berbagai macam moda baik moda berbasis jalan dan moda berbasis rel. Moda berbasis jalan dilayani oleh Damri dengan rute yang berada di area DIY sebagai berikut:

- 1) Terminal Condong catur-YIA
- 2) Sleman City Hall-YIA
- 3) Bandara Adi Sucipto-YIA
- 4) Titik Nol Kilometer-YIA
- 5) Terminal Palbapang-YIA

Lima rute layanan di atas merupakan layanan angkutan menuju Bandara YIA dengan Jadwal keberangkatan pukul 04.00-15.00 WIB dengan tarif Rp20.000,00. Layanan angkutan menuju Bandara YIA tidak

hanya dari wilayah Kabupaten kota yang berada DIY namun juga terdapat layanan dari Jawa Tengah dengan rute sebagai berikut:

- 1) Purworejo-Bandara YIA
- 2) Borobudur-Bandara YIA

Sedangkan untuk moda berbasis rel dilayani oleh Kereta Api Bandara dengan rute Stasiun Yogyakarta-Stasiun Wates-Bandara YIA. Layanan Kereta Api Bandara menuju Bandara YIA dengan Jadwal keberangkatan pukul 04.02 WIB sampai 18.00 WIB dengan tarif Rp20.000,00.

d. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan

Peningkatan jumlah penumpang harian yang dilayani Bandara YIA telah memberikan kontribusi peningkatan arus lalu lintas kendaraan bermotor di sekitar Bandara YIA. Berdasarkan data IRSMS Ditlantas Polda DIY, pada tahun 2020-2021, kejadian kecelakaan di sekitar Bandara YIA yang paling banyak terjadi di ruas Jalan Karangnongko (perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah)-Toyan sebesar 5,25 kejadian/km pada Tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 3,53 kejadian/km.

Dalam rangka mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas akibat peningkatan jumlah lalu lintas kendaraan bermotor di sekitar Bandara YIA, beberapa usaha yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui *Area Traffic Control System* (ATCS) dan *Intelligent Transportation System* (ITS) untuk mengurangi kemacetan dan tundaan kendaraan di simpang bersinyal pada jalan akses Bandara YIA, antara lain pada Simpang Brosot.
- 2) Melakukan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas bersama instansi terkait di sekitar Bandara YIA.

e. VVIP Room

Salah satu standar nasional fasilitas Bandar udara YIA adalah *VVIP room*. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat transit bagi para tamu *VVIP* dan *VIP*. Rencana pengembangannya *VVIP Room* tersebut sudah tercantum pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1164 Tahun 2013 Tanggal 11 November 2013.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pembangunan *VVIP Room* YIA tahap I berupa pembangunan struktur bawah (pondasi). Kemudian pada tahun 2022 dilakukan pengukuran ulang lahan Gedung *VVIP room* YIA antara Pemda DIY dengan Pihak Angkasa Pura I untuk mengetahui batas-batas lahan dan luasan terbaru setelah pembaruan pembangunan infrastruktur Bandara YIA oleh Angkasa Pura I. Tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah Review DED Pembangunan *VVIP Room* Bandara YIA dilanjutkan dengan Konstruksi Gedung *VVIP room* YIA.

f. SPAM Regional Kamijoro

SPAM Regional Kamijoro mengalami perubahan dari segi skema pembiayaan dan pembangunan. Rencana awal menggunakan skema pembiayaan KPBU, namun saat ini berubah menjadi skema pembiayaan melalui dana APBN dan akan dilaksanakan konstruksi oleh Kementerian PUPR pada tahun 2024. Bentuk penyelenggaraan SPAM Regional Kamijoro juga berubah menjadi SPAM non regional dan diselenggarakan oleh masing-masing kabupaten (Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul). Berdasarkan Kajian Pra Studi Kelayakan Proyek KPBU SPAM Regional Kamijoro tahun 2020, telah disepakati pembagian alokasi air untuk Kabupaten Kulonprogo sebanyak 266 liter/detik dan Kabupaten Bantul sebanyak 189 liter/detik.

Konstruksi SPAM Kamijoro tahap 1 di tahun 2024 akan dilaksanakan untuk sisi Kabupaten Kulon Progo dengan kapasitas sebesar 150 liter/detik dari total perencanaan untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar 266 liter/detik. Pembangunan tahap 1 SPAM Kamijoro

difokuskan untuk memberikan pelayanan air minum di bandara dan sekitar Bandara YIA. Sedangkan sisa kapasitas SPAM Kamijoro sebesar 200 liter/detik untuk Kabupaten Bantul saat ini masih dalam proses penyusunan readiness criteria.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Sejak tahun 2019 Dinas Perhubungan DIY tidak memiliki kewenangan di bidang transportasi udara. Peran Dinas Perhubungan DIY yang terkait dengan pengoperasian bandar udara lebih bersifat dukungan terhadap kelancaran akses darat menuju Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
- 2) Belum adanya kesepakatan tarif air curah pada masing-masing PDAM baik Kabupaten Kulon Progo maupun Kabupaten Bantul dan adanya kebutuhan mendesak pelayanan di sekitar bandara YIA
- 3) Adanya perubahan ukuran lahan dari terminal *VIP Room* Bandara YIA serta belum terselesaikannya pembangunan konstruksi terminal *VIP Room* Bandara YIA sehingga tidak dapat digunakan secara fungsional.
- 4) Masih perlunya peningkatan struktur jalan provinsi yang merupakan aksesibilitas Bandara YIA yaitu Ruas Jalan Brosot-Toyan.

b. Solusi

- 1) Upaya yang telah dilakukan berupa dukungan peningkatan pelayanan angkutan umum dari/ke bandar udara dan peningkatan aspek keselamatan lalu lintas jalan provinsi yang merupakan akses ke bandar udara. Mengacu Keputusan Gubernur DIY nomor: 41/Kep/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, sebagai tindak lanjut diterbitkannya Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional,

beberapa ruas jalan provinsi yang berada di JJLS berubah status menjadi jalan nasional. Perubahan status jalan ini akan diikuti dengan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru. Selain aset jalan perlu juga dilakukan penyerahan aset perlengkapan jalan agar pelaksanaan pengoperasian maupun pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aspek keselamatan lalu lintas tetap terjaga. Solusi yang dilakukan adalah inventarisasi aset perlengkapan jalan berada di jalan provinsi yang sekarang statusnya berubah menjadi jalan nasional serta melakukan koordinasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM DIY, Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah DIY serta Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah DIY Kementerian PUPR.

- 2) Pemda DIY melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan SPAM Kamijoro dan diputuskan untuk SPAM Kamijoro akan dilaksanakan menggunakan skema pembiayaan dari APBN dan akan dibangun untuk tahap 1 di sisi Kabupaten Kulon Progo
- 3) Perlu dilakukan *Review DED* Pembangunan *VIP Room* Bandara YIA dengan menyesuaikan ukuran lahan terbaru. Serta perlu penyelesaian Bangunan Terminal *VIP Room* Bandara YIA berupa pekerjaan struktur atas, arsitektural, mekanikal elektrik, interior dan lansekap.
- 4) Dilakukan perbaikan secara bertahap aksesibilitas jalan menuju bandara YIA, paralel dengan moda transportasi berbasis rel. Telah ada rencana pembangunan jalan Tol Bandara YIA-Yogyakarta guna memperlancar aksesibilitas jalan dari dan menuju bandara YIA.

F. PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI

1. Latar Belakang

Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan simbol dari keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (*Hablumminallah*),

manusia dengan manusia (*Hablumminannas*), dan manusia dengan alam. Dalam kaitannya dengan alam, hal ini termasuk hubungan manusia dengan lima elemen pembentuk alam sekitar yaitu api (dahana) dari Gunung Merapi, tanah (bantala) dari bumi Ngayogyakarta, air (tirta) dari Laut Selatan, angin (maruta), dan angkasa (ether). Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan sebuah sumbu imajiner berupa garis lurus ditarik dari Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Pal Putih (Tugu Golong-gilig).

Sumbu Filosofi DIY telah resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO pada agenda sidang tanggal 18 September 2023, dengan dokumen keputusan WHC 2345.COM 8B.39.



Gambar 6.11. Sertifikat Penetapan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta
Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2023

Dengan adanya penetapan tersebut akan memberikan konsekuensi terhadap segala bentuk penataan, pelestarian dan/atau pengembangan yang dilakukan di seluruh kawasan Sumbu Filosofi.

2. Progres Sampai Dengan Tahun 2023

Penataan Kawasan Sumbu Filosofi, sampai dengan tahun 2023 disampaikan sebagai berikut:

- a. Selama tahun 2023, Pemda DIY telah melakukan kegiatan publikasi dan promosi nominasi warisan budaya dunia, serta pelatihan dan sosialisasi terkait pengelolaan dan pelestarian Kawasan Sumbu Filosofi. Hal tersebut, membuahkan hasil yang nyata karena tanggal 18 September 2023 Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta telah resmi/ sah diterima sepenuhnya dan tanpa sanggahan menjadi warisan budaya dunia UNESCO dan sekaligus menjadi warisan budaya dunia ke enam di Indonesia.
- b. Pasca penetapan, implementasi selanjutnya yaitu penerapan dokumen Rencana Pengelolaan Warisan Dunia (Management Plan) sebagai sistem tata kelola kawasan warisan dunia. Kemudian, tata kelola tersebut distrukturkan dalam agenda SI SUFI JOGJA (Satu Aksi Sumbu Filosofi – Budaya Jogja Mendunia), berupa pengelolaan terpadu berbasis pemberdayaan budaya dan ekonomi masyarakat, yang diwujudkan dalam penyiapan dan penetapan/penerbitan regulasi beserta turunannya dalam kerangka kerja terpadu pengelolaan warisan dunia.

a. Penataan dan Pengendalian Lalu Lintas di Kawasan Semi Pedestrian Malioboro

Untuk memenuhi penerapan jalan semi pedestrian di Malioboro dan mendukung penetapan Sumbu Filosofis sebagai situs warisan dunia oleh WHO, maka diterapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk menjamin keselamatan, kelancaran arus dan kenyamanan bagi pengguna lalu lintas di Kawasan Sumbu Filosofis. Kegiatan yang dilakukan antara lain, penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengaturan moda transportasi tradisional penyediaan dan pengelolaan tempat khusus parkir dan perwujudan kawasan *low Emission zone*.

b. Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas

Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan pada kawasan Sumbu Filosofi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan lalu lintas dalam rangka penerapan Semi Pedestrian di Jalan Malioboro. Hal ini merupakan bentuk pengendalian terhadap penerapan semi pedestrian yang telah diberlakukan mulai tahun 2020 dengan melakukan pengawasan lalu lintas dimulai dari Tugu Jogja (Tugu Pal Putih)-Malioboro-Kraton-Panggung Krapyak dan jaringan jalan sekitar, pengawasan lalu lintas di support dengan 72 personil dengan pelaksanaan pemantauan selama 1 tahun.

Pada tahun 2023 masih terdapat pelanggaran sebanyak 1.996 kendaraan, dengan jenis pelanggaran berupa pelanggaran parkir (740 kendaraan), pelanggaran rambu dan marka (904 Kendaraan) serta *contra flow* 352 Kendaraan)

- 2) Uji Coba Pelaksanaan *Contra Flow*. Sebagai tindak lanjut terhadap dokumen evaluasi kinerja trans Jogja TA 2022 dan dalam rangka mendukung integrasi layanan antarmoda dari moda berbasis rel ke moda berbasis jalan atau sebaliknya. Uji coba dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan dimulai dari bulan Oktober hingga bulan Desember 2023 pada ruas Jalan Pasar Kembang. Selama masa uji coba jumlah penumpang yang terlayani di Tempat Pemberhentian Bus Stasiun Tugu Yogyakarta sebesar 2.692 orang dengan rincian jumlah penumpang yang naik sebesar 1.763 orang dan jumlah penumpang yang turun sebanyak 866 orang.
- 3) Pengadaan prasarana penunjang manajemen dan rekayasa lalu lintas. Pada tahun 2023 telah diadakan pengadaan water barrier sebanyak 91 buah yang digunakan sebagai bentuk uji coba terhadap pelaksanaan *contra flow* dan pembatasan kendaraan pada saat penerapan semi pedestrian, sebagai pemenuhan terhadap kenyamanan bagi pejalan kaki di kawasan sumbu filosofi dilakukan pengecatan marka *zebra cross* 1 titik berada di sekitar

Pasar Beringharjo dan pemasangan *warning light* pada jalan Margoutomo sebanyak 1 titik.

c. Pengaturan Moda Transportasi Tradisional

Sebagai upaya pelestarian moda transportasi tradisional dan tindak lanjut terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang moda transportasi tradisional, pada tahun 2023 dilakukan pengujian dan penilaian pada 14 Prototype Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif dengan tahun produksi tahun 2022 dan berdasarkan hasil penilaian becak milik BLPT DIY memiliki poin tertinggi secara teknis.

Terhadap hasil dokumen penilaian dan pengujian prototype dilakukan proses pengadaan becak kayuh dengan penguat tenaga alternatif sebanyak 50 unit. Becak tersebut direncanakan akan diserahkan kepada koperasi yang memiliki usaha Angkutan darat wisata yang beroperasi di wilayah sumbu filosofi. Kemudian untuk menjaga kondisi unit becak yang telah diproduksi pada tahun 2023 dilakukan pemeliharaan becak berupa sewa Gudang yang berada di wilayah BLPT.

Sebagai pendukung prasarana untuk operasional becak kayuh dengan penguat tenaga alternatif, Pemda DIY membangun stasiun pengisian daya becak di area TKP ketandan, stasiun tersebut difasilitasi dengan kapasitas 4400 VA dan dapat menampung 5 becak dalam satu kali pengisian.

Dalam membentuk ekosistem Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Alternatif pemerintah membentuk kelembagaan untuk penyelenggaraan becak tersebut, pada tahun 2023 telah terbentuk 3 koperasi sebagai operator yang menjalankan becak tersebut. 3 koperasi yang terbentuk meliputi Koperasi Becak Kayuh Yogyakarta, Koperasi Becak Wisata Yogyakarta dan Koperasi Asha Abhyakta Senopati.

d. Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir

Sebagai pemenuhan layanan terhadap kebutuhan ruang parkir yang berada di kawasan sumbu filosofi dilakukan pengelolaan terhadap beberapa ruang parkir yang meliputi Tempat Khusus Parkir (TKP) Ketandan yang berada di Jalan Ketandan dan Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali. Penyelenggaraan operasional TKP Ketandan meliputi sewa lahan antara Pemda DIY dengan pemilik aset. Guna pemenuhan standar pelayanan minimal pengelolaan TKP dilakukan pemeliharaan TKP Ketandan, penyusunan integrasi sistem retribusi perpajakan di kawasan strategis, penyediaan genset, pemasangan pintu keluar masuk, penyediaan tenaga keamanan dan serta kebersihan selama 12 bulan.

Dalam menunjang kawasan sumbu filosofi sebagai *World Heritage City*, pada tahun 2025 mendatang TKP Abu Bakar Ali akan dialihfungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau. Pemda DIY telah melakukan kajian terhadap pemenuhan kebutuhan ruang parkir yang berada di kawasan sumbu filosofi salah satunya dengan penyusunan dokumen kajian kelayakan pemindahan TKP ABA ke TKP Ketandan. Berdasarkan kajian tersebut pemindahan bangunan TKP ABA layak untuk dipindah.

e. Perwujudan Kawasan *Low Emission Zone*

Sebagai upaya mewujudkan Kawasan yang rendah emisi dan di Kawasan sumbu filosofi dan dalam upaya mendukung peraturan presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery Electric Vehicle*) untuk transportasi jalan, Pemda DIY melakukan kajian dan perencanaan salah satunya yaitu kajian perencanaan dan pengelolaan bus listrik dan prasarana pendukungnya di kawasan strategis. Hasil dari perencanaan tersebut terdapat rute Bandara Adi Sucipto – Malioboro – Titik nol merupakan rute yang layak untuk dilayani oleh bus listrik dengan Panjang trayek 20.81 km

Penunjang terhadap operasional bus listrik tersebut berupa SPKL yang berada di area parkir kawasan Bandara Adisucipto dengan kapasitas charger untuk 2 bus. Uji coba operasional bus akan dilaksanakan secara bertahap dari proses pengadaan bus, uji coba operasional selama 6 bulan dan pembangunan SPKL pada tahun 2024

f. **Peningkatan pelayanan Angkutan Umum menuju kawasan sumbu filosofi**

Salah satu parameter keberhasilan layanan angkutan yaitu dengan menyediakan informasi yang akurat seperti jadwal keberangkatan , posisi kendaraan dan informasi lainnya mengenai operasional kendaraan, sebagai langkah untuk memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggara angkutan. Pada tahun 2023 Pemda DIY melakukan pemasangan Public Transport Information System (PTIS) berupa informasi jadwal kedatangan dan posisi bus secara riil. PTIS tersebut dipasang pada 2 lokasi yang berada di Halte Malioboro 2 dan Halte Ngabean.

g. **Perencanaan Jogja Planning Gallery**

Jogja Planning Gallery merupakan bangunan yang akan dibangun di Jalan Malioboro 54-56 Yogyakarta. Ketentuan bangunan yang ada di Kawasan Sumbu Filosofis perlu mewujudkan citra karakter kawasan sebagai bagian dari Sumbu Imajiner berupa garis lurus yang mencerminkan *Sangkan Paraning Dumadi*. Bangunan ini direncanakan sebagai wadah *miniature gallery* perencanaan DIY, rencana penataan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten, sejarah perkembangan Yogyakarta sebagai kota budaya, kawasan cagar budaya, dan memperhatikan kondisi bentang alam dan budaya di Yogyakarta. Selain itu *Jogja Planning Gallery* diharapkan menjadi wadah ruang pameran bagi pelaku seni serta sebagai tempat wisata edukasi dan promosi budaya.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) *Jogja Planning Gallery*. Pada perencanaan ini diperoleh rencana bangunan yang meliputi 7 massa bangunan yang meliputi Bangunan Musholla dan Komersial, Galeri Temporer 1, Galeri Temporer 2 dan Kantor, Galeri Perkotaan, Galeri Kultural, Galeri Sejarah dan Filosofi, Perpustakaan dan bangunan pendukung lainnya. Bangunan yang saat ini ditempati sebagai Gedung Paripurna DPRD DIY yang sekaligus berstatus sebagai bangunan cagar budaya, akan tetap dipertahankan dengan peruntukan sebagai Galeri Sejarah dan Filosofi.

Pada tahun 2023 juga dilaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap rencana pembangunan *Jogja Planning Gallery*. Sebagai bangunan gedung negara yang bertujuan memberikan citra kawasan/*landmark* dengan ide yang kreatif serta manfaat edukasi, *Jogja Planning Gallery* diharapkan memiliki penilaian sebagai bangunan gedung hijau yang ramah dan memenuhi persyaratan pemenuhan lingkungan yang lestari.

h. Pengelolaan Toilet Titik Nol

Seiring dengan banyaknya jumlah pengunjung di kawasan Malioboro, maka sarana prasarana umum perlu dipenuhi salah satunya penyediaan toilet umum. Toilet Titik Nol terletak di Jalan Senopati, yang berada di kawasan Taman Parkir Senopati. Pemda DIY melakukan pembangunan toilet bawah tanah ini pada tahun 2017. Konsep modern, terlihat dari desain fasad di area *entrance* dengan menggunakan material baja dan kaca. Fasilitas toilet yang disediakan berjumlah 12 kubikal toilet untuk wanita, 7 kubikal toilet untuk pria dan 10 urinoir untuk pria, 1 ruang toilet untuk difabel dan 1 ruang laktasi. Untuk menunjang pengelolaan Toilet Titik Nol disediakan jasa kebersihan dengan jumlah tenaga kerja 10 orang. Adapun jam operasional Toilet Titik Nol mulai dari jam 08.00 – 22.00 setiap hari. Selama tahun 2023, telah mencatatkan jumlah pengunjung Toilet Titik Nol sebanyak 246.057 orang, dengan rata-rata setiap harinya sebanyak 674 orang/hari.

i. Pengadaan Tanah Akses Penghubung Tempat Parkiran Beskalan-Teras Malioboro 1

Dalam rangka peningkatan kapasitas jumlah penjual di Teras Malioboro 1 sebagai tempat wisata Belanja dan Kuliner yang tersedia di kawasan Sumbu Filosofi, Pemda DIY telah melakukan pengadaan tanah pada tahun 2022 bertempat di Beskalan RT 006/ RW 002 Kalurahan Ngupasan Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta. Proses penerbitan sertifikat tanah terlaksana pada tahun 2023 dengan luas total 973 m²

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih terdapat beberapa aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kendaraan yang parkir di badan jalan perwakilan. Hal ini terjadi setelah dilakukan penataan bangunan di area kawasan Gedung DPRD yang akan digunakan sebagai *Jogja Planning Gallery* dan penataan ruas jalan Perwakilan.
- 2) Masih terdapat banyaknya juru parkir liar mengarahkan kendaraan wisatawan untuk parkir di jalan perwakilan atau di ruas sirip – sirip lainnya menyebabkan kepadatan lalu lintas semakin sulit untuk terurai.
- 3) Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pada kawasan Sumbu Filosofi yang tidak dapat dilakukan secara paralel (harus runtut), khususnya di Jalan Margo Utomo antara lain, Relokasi Gedung DPRD DIY ke Jalan Kenari, pembangunan *Jogja Planning Gallery*, dan rencana Pembangunan Teras Malioboro, yang waktu pelaksanaannya perlu dikoordinasikan kembali.

b. Solusi

- 1) Melakukan Pengembangan area Teras Malioboro 1 yang terintegrasi dengan TKP Beskalan untuk menampung aktivitas PKL serta peningkatan Kapasitas Ruang Parkir yang berada di sekitar

malioboro TKP Ketandan dan pengembangan *Park and Ride* Ngabean.

- 2) Peningkatan pelayanan angkutan umum meliputi penerapan *bus priority* seperti *contra flow* dan *bus lane* dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi khususnya di kawasan malioboro
- 3) Penyusunan tata kala waktu rencana pembangunan *Jogja Planning Gallery*, Relokasi Gedung DPRD DIY ke Jalan Kenari dan Rencana Pembangunan Teras Malioboro.

G. PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN

1. Latar Belakang

DIY dikenal sebagai kota wisata dan kota pelajar berbasis kebudayaan, mengalami laju perkembangan ekonomi yang cukup signifikan. Semakin berkembangnya beragam objek-objek wisata terutama di daerah selatan atau pesisir selatan maka kunjungan wisatawan semakin meningkat jumlahnya. Hal inilah yang mendorong Pemda DIY membangun infrastruktur Kawasan selatan melalui pembangunan Jalur Jalan Lintas (JJLS). Selain itu, pembangunan JJLS dilatarbelakangi karena jalur lintas pantai utara/pantura sudah mengalami kepadatan/ *over capacity* dan pembangunan JJLS bertujuan untuk memecah arus lalu-lintas trans jawa yang hanya bertumpu di sebelah utara. Pembangunan JJLS di pulau Jawa sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan kesepakatan lima Gubernur yaitu; Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.

Selanjutnya JJLS diharapkan menjadi alternatif pintu masuk DIY, yang semula berada di sisi utara atau di Kabupaten Sleman. Saat ini JJLS diprioritaskan untuk membuka pengembangan di sisi selatan yang melewati 3 (tiga) kabupaten yaitu: Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 6.12. Peta JJLS di Pulau Jawa

Sumber: DPUPESDM DIY, 2024

Dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah selatan Yogyakarta melalui pembangunan jalan baru JJLS telah disepakati beberapa hal antara Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat. Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam hal pembagian tanggung jawab, wewenang dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:

- Pemda DIY termasuk kabupaten setempat sesuai kemampuan keuangan daerah tiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan tanah, tanam tumbuh/ Karang kitri maupun bangunan baik itu tanah hak milik, *Sultan Ground* dan lain-lain.
- Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban membangun fisik konstruksi jalan berikut bangunan pelengkapannya pada lokasi yang tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda DIY.

Program pemerintah pusat dalam mengembangkan jaringan jalan khususnya untuk mengimbangi kepadatan lalu lintas di Pantura, memerlukan percepatan pembangunan jalan di wilayah selatan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengembangan tata ruang khususnya untuk wilayah yang belum tersambung dan daerah terisolir di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DIY. Pengembangan JJLS meliputi yaitu: Gunungkidul (76,34 km), Bantul (16,58 km) dan Kulon Progo (23,15 km).

Rute JJLS di Kabupaten Kulon Progo sepanjang 23,15 km meliputi Congot – Ngremang – Jembatan Pandansimo. Adapun rute JJLS di Kabupaten Bantul sepanjang 16,58 km melalui Pandansimo – Samas-Parangtritis – Girijati.

Sedangkan rute JJLS di Kabupaten Gunungkidul sepanjang 76,34 km, rute yang dilalui yaitu ruas jalan Girijati – Tlogowarak – Klampok – Legundi – Planjan – Tepus – Jerukwudel – Baran – Duwet.

2. Progres Sampai dengan Tahun 2023

Pembebasan lahan dan pelaksanaan konstruksi dalam pembangunan JJLS dilakukan secara bertahap. Pembebasan lahan kurang lebih sebesar 25-35 m, telah dilakukan untuk rencana pembangunan jalan 4 lajur. Pada tahap pelaksanaan konstruksi tahap pertama, telah dibangun jalan dengan tipe jalan 2 (dua) lajur dengan lebar 7-7,5 m. Progres sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu: Pembebasan lahan untuk kebutuhan 2 lajur sudah mencapai 100% (116,07 km) dan pembebasan lahan untuk kebutuhan 4 lajur sudah mencapai 69,08 % (80,19 km).



Gambar 6.13. Progres Pembangunan JJLS pada Sepanjang Wilayah Selatan DIY

Sumber: DPUPESDM DIY, 2024

Pemda DIY telah melaksanakan pembangunan JJLS sepanjang 116,07 km. Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilaksanakan antara lain: sosialisasi kepada instansi terkait dan masyarakat yang terdampak, serta melaksanakan pemberkasan, dan menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

Kemudian dalam tahap persiapan, Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: penetapan tim persiapan, sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak,

konsultasi publik, dan penerbitan IPL oleh Gubernur. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan antara lain: penetapan tim pelaksana pengadaan tanah, inventarisasi dan identifikasi, pengumuman daftar nominatif dan peta bidang, verifikasi dan perbaikan daftar nominatif dan peta bidang, pelaksanaan penilaian harga tanah (*appraisal*), musyawarah bentuk ganti kerugian, pelepasan hak atas tanah, dan pembayaran ganti kerugian. Tahapan terakhir yaitu: proses pensertifikatan yang diserahkan kepada warga yang terdampak jika tanahnya sebagian terkena, dan menjadi aset Pemda DIY jika tanah yang terdampak seluruhnya. Pembiayaan atas semua tahapan pembebasan lahan ini menggunakan sumber dari Dana Keistimewaan (Satuan Ruang Strategis keistimewaan) dan telah dialokasikan dana untuk beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembebasan Lahan untuk Oprit (Jalan Pendekat) Jembatan Pandansimo

Lokasi Jembatan Pandansimo masuk ke dalam 2 segmen yaitu Segmen Ngremang-Pandansimo di Kabupaten Kulonprogo dan Segmen Pandansimo-Samas di kabupaten Bantul. Pada Tahun 2023 terdapat pembebasan pada Segmen Pandansimo – Samas sepanjang 165 Meter dan Segmen Ngremang Pandansimo Sepanjang 642,7 Meter yang berfungsi sebagai Jalan pendekat atau Oprit Jembatan.

b. Pembangunan Jembatan Pandansimo

Dengan selesainya pembebasan lahan di ruas Ngremang-Pandansimo – Samas maka pembangunan Jembatan Pandansimo sepanjang 1,9 km bisa dilaksanakan yang dimulai bulan November 2023.

c. Pembangunan Ruas Jalan Kretek-Girijati

Pembangunan Jalan baru Kretek-Girijati sepanjang 5,64 km berkontrak mulai tanggal 9 November 2023 dengan masa pelaksanaan selama 720 hari Kalender. Nilai Kontrak Rp241.031.298.950,80 .

Selain 3 kegiatan tersebut di atas, Pemda DIY melalui Dana Keistimewaan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan pembebasan lahan dan pembangunan JJLS yaitu:

- 1) Proses Pensertifikatan Tanah JJLS di Gunungkidul.
- 2) Proses Pensertifikatan Tanah JJLS di Bantul.
- 3) Proses Pensertifikatan Tanah JJLS di Kulon Progo.

Tabel 6.10. Progres Pembebasan Lahan JJLS pada Sepanjang Wilayah Selatan DIY

No.	Ruas	Pan-jang (km)	Pembebasan Lahan				Konstruksi		Keterangan
			2 lajur		4 lajur		2 lajur (km)	4 lajur (km)	
			Bebas (km)	Belum Bebas (km)	Bebas (km)	Belum Bebas (km)			
I	Kab. Kulonprogo	23,15	23,15	-	16,10	7,05	23,15	2,00	Pembebasan Segmen Congot-Garongan (2021-2022)
1	Cogot-Ngremang	19,35	19,35	-	12,30	7,05	19,35	2,00	
2	Ngremang-Pandansimo	3,80	3,80	-	3,80	-	3,80	-	
II	KAB. BANTUL	16,58	16,58	-	16,58	-	9,58	2,60	
3	Pandansimo-Samas	6,28	6,28	-	6,28	-	4,58	-	
4	Samas-Parangtritis	5,00	5,00	-	5,00	-	5,00	2,60	
5	Parangtritis-Girijati	5,30	5,30	-	5,30	-	-	-	
III	Kab. Gunungkidul	76,34	76,34	-	46,70	29,64	64,59	0,50	
6	Girijati-Legundi	17,20	17,20	-	-	17,20	17,20	-	
7	Legundi-Planjan	17,14	17,14		4,70	12,44	17,14	-	
8	Planjan-Tepus	13,00	13,00	-	13,00	-	13,00	-	
9	Tepus-Jerukwudel	17,90	17,90	-	17,90	-	6,15	-	Fasekonstruksi 2 lajur: 10,92 km (MYC)
10	Jeruk Wudel-Duwet	11,10	11,10	-	11,10	-	11,10	0,50	

No.	Ruas	Pan- jang (km)	Pembebasan Lahan				Konstruksi		Keterangan
			2 lajur		4 lajur		2 lajur (km)	4 lajur (km)	
			Bebas (km)	Belum Bebas (km)	Bebas (km)	Belum Bebas (km)			
	PANJANG TOTAL	116,07	116,07	-	79,38	36,69	97,32	5,10	
	Persentase Terhadap panjang total		100%	0,00%	68,39%	31,61%	83,85%	4,39%	

Sumber: DPUPESDM DIY, 2024

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Pada pembebasan lahan masih terdapat kendala terkait proses pensertifikatan tanah JJLS antara lain: (a) peta pembebasan tanah sebagai salah satu syarat pensertifikatan belum tersedia dan terjadi pada pembebasan lahan di kurun waktu 2005-2013; dan (b) Proses pensertifikatan membutuhkan waktu yang lama dan birokrasi yang panjang sehingga menyebabkan banyaknya pembebasan tanah yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya menumpuk dan belum terselesaikan.
- 2) Kebutuhan lahan untuk pembangunan JJLS sepanjang 116 km menimbulkan konsekuensi pada kebutuhan anggaran yang besar dan terjadwal tiap tahun. Selain itu pembangunan konstruksinya menuntut perencanaan yang detail dengan tahapan yang berkesinambungan.

b. Solusi

- 1) Untuk menyediakan Peta Pembebasan Tanah yang komprehensif dan valid untuk mendukung proses sertifikasi tanah JJLS, Pemda DIY memerlukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait seperti BPN, Kantor Pertanahan ataupun Dispertaru Kabupaten.
- 2) Untuk penerbitan sertifikat untuk penyelesaian permasalahan sertifikasi tanah, khususnya sertifikasi tanah JJLS dilakukan dengan meningkatkan koordinasi, sinergi dan harmonisasi lintas sektor

Pemda DIY dengan BPN/Kantor Pertanahan yang berwenang. Sedangkan untuk percepatan penyelesaian konstruksi jalan JJLS dengan 4 lajur, perlu adanya program perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan tiap tahun supaya dapat menyelesaikan masalah pembebasan lahan dan percepatan fisik konstruksi.

H. PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY

1. Latar Belakang

Ekosistem kebudayaan secara garis besar didukung oleh tiga hal, yaitu sarana prasarana budaya, event budaya dan sumber daya budaya termasuk didalamnya sumber daya manusia atau talenta budaya. Ketiga hal tersebut saling terkait dan saling mendukung satu dan lainnya. Sarana prasarana budaya yang cukup penting adalah keberadaan venue untuk melaksanakan event atau aktifitas budaya. Salah satu program strategis Gubernur DIY berkaitan dengan hal tersebut adalah pembangunan taman budaya se DIY. Diharapkan di DIY dan setiap kabupaten/kota tersedia taman budaya yang representatif untuk aktivitas kebudayaan di level kabupaten/kota dan DIY. Dengan adanya taman budaya di DIY dan kabupaten/kota, diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas kebudayaan di masing-masing kabupaten/kota dan DIY, yang berdampak pada peningkatan kemajuan pembangunan kebudayaan.

2. Progres sampai dengan Tahun 2023

a. Pembangunan Taman Budaya DIY

Dalam rangka pembangunan Pusat Pengembangan Kebudayaan (PPK) Yogyakarta, telah dilakukan langkah-langkah, antara lain: penyusunan Master Plan Pusat Pengembangan Kebudayaan (PPK) oleh Dinas PU Provinsi DIY pada tahun 2018, dan FGD Rencana Pusat Pengembangan Kebudayaan (PPK) Yogyakarta yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan bidang seni dan budaya Yogyakarta.

Kedua kegiatan tersebut merupakan tahapan proses yang dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran konsep dan arahan-arahan prinsip dalam perencanaan dan pembangunan Pusat pengembangan Kebudayaan (PPK) Yogyakarta. Lebih lanjut diperlukan formulasi yang konkret atas gagasan dan pemikiran tersebut di atas untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan pembangunan Pusat Pengembangan Kebudayaan (PPK) Yogyakarta. Maka pada tahun 2021 dilaksanakan penyelesaian Kajian Materi Teknis Perencanaan PPK Yogyakarta. Dengan adanya pergantian tahun dan perkembangan berbagai kebutuhan maka dilakukan review Materi Teknis Perencanaan PPK Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2023. Review dilaksanakan untuk menguatkan dan memperbaharui konsep, arahan, pedoman (guidelines) dari aspek-aspek strategis yang akan menjadi acuan perencanaan dan pembangunan Pusat Pengembangan Kebudayaan (PPK) Yogyakarta agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

b. Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo (TBK)

Taman Budaya Kulon Progo (TBK) telah operasional sejak tahun 2020, dimana pada saat itu masih dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulonprogo. Pada Tahun 2021, TBK dikelola oleh Lembaga Pengelola Taman Budaya yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya.

Selama tahun 2023 telah terlaksana kegiatan Pengelolaan Taman Budaya selama 12 bulan, Pentas Seni Tradisi sebanyak 32 kali pementasan, Pentas Band sebanyak 5 kali pementasan, Pentas Sendratari sebanyak 2 kali pementasan, Pentas Kethoprak sebanyak 3 kali pementasan, Pentas Musik Kolaborasi sebanyak 1 kali pementasan, Pelatihan *Art For Children* (AFC) sebanyak 20 kali, Pentas Apresiasi *Art For Children* sebanyak 1 kali pementasan, Pelatihan *Art For Millennials* (AFM) sebanyak 20 kali, Pentas Apresiasi AFM sebanyak 1 kali pementasan, Pameran Lukis AFC dan AFM selama 10 hari, Kulon Progo

Maneka Warna sebanyak 1 kali event, Pentas Wayang Wong sebanyak 1 kali pementasan, Pemeliharaan TBK.

Keberadaan TBK juga telah mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemberlakuan tarif pemanfaatan kekayaan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pada tahun 2023 juga telah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Gambar 6.14. Pameran Lukis Art For Children dan Art For Milenial

Sumber: Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo, 2024

c. **Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul (TBG)**

Taman Budaya Gunungkidul (TBG) telah operasional pada tahun 2021. Taman Budaya Gunungkidul dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya Gunungkidul berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul.

Pada tahun 2023 TBG memiliki kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan dan Pengelolaan TBG.
- b. Pentas Seni Sepanjang Tahun di TBG 12 even
- c. Gelar Seni Kolosal 1 even
- d. Pentas Seni Untuk Anak 12 even

TBG juga sudah mendukung penerimaan pendapatan asli daerah dengan pemberlakuan tarif yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pengenaan tarif pemanfaatan kekayaan daerah.



Gambar 6.15. Pentas Seni Sepanjang Tahun: Gedruk Sanggar Mahasura, Kapanewon Patuk

Sumber: Disbud Kabupaten Gunungkidul, 2024

d. Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Sleman (TBS)

Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Sleman (TBS) diinisiasi sejak tahun 2018 melalui Kajian Kelayakan Taman Budaya dan dilanjutkan dengan kajian lalu lintas dan appraisal pengadaan lahan (tahun 2020), pembebasan lahan dan penyusunan DED (tahun 2021) dan penataan lahan (tahun 2022)

Sebagai tindak lanjut Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan AMDAL LALIN serta Penataan dan pematangan lahan pada tahun 2022, maka pada tahun 2023 proses pembangunan TBS dilanjutkan dengan:

- a. Persetujuan Teknis RKL dan RPL sebagai tindak lanjut Penyusunan AMDAL dengan anggaran sebesar Rp82.880.370,-

- b. Rencana Pematangan lahan tahap II belum bisa terlaksana karena sampai akhir tahun tidak mendapatkan pemenang tender dan proses tidak dilanjutkan karena keterbatasan waktu.

Lahan di lokasi pembangunan Taman Budaya Sleman pada tahun 2023 dimanfaatkan untuk menggelar berbagai kegiatan antara lain Festival Upacara Adat tahun 2023 yang diikuti oleh 5 kabupaten/kota se-Provinsi DIY. Disamping itu Lahan Taman Budaya Sleman juga dipergunakan oleh Kalurahan Pandowoharjo untuk event dan kegiatan budaya berupa Merti Desa, dan pentas kesenian Jathilan.



Gambar 6.16. Kondisi Lahan Taman Budaya Sleman Tahun 2023

Sumber: Disbud Kab. Sleman, 2024

e. **Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul (TBB)**

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan Penyusunan DED oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Bantul, Pengajuan AMDAL Pembangunan Taman Budaya Bantul serta Pendaftaran Pengujian AMDAL. Selanjutnya pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pencermatan DED oleh Dewan Warisan Budaya (DWB) Daerah Istimewa Yogyakarta dan menghasilkan rekomendasi agar DED dilakukan penyesuaian.
- 2) Review DED Taman Budaya Bantul dan Pengesahan Hasil Review

- 3) Paparan AMDAL dengan Berita Acara Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan (Nomor:667/31753)
- 4) Pengajuan berkas Tukar Guling Tanah Kalurahan Sendangsari luas 186 m2 ditukar tanah Pengganti seluas 312 m2 hasil Pengadaan Tanah oleh Dinas Kebudayaan Bantul Tahun 2022.

f. Pembangunan Taman Budaya Kota Yogyakarta

Taman Budaya Kota Yogyakarta dibangun di kawasan Embung Giwangan, maka selanjutnya disebut dengan Taman Budaya Embung Giwangan (TBEG). Dibangun di tanah seluas sekitar 3,5 hektar, Taman Budaya Embung Giwangan dikembangkan sebagai wahana dan ruang apresiasi seni dan budaya untuk mengenalkan, menampilkan, melestarikan adat istiadat, tradisi, dan budaya sekaligus memiliki fungsi sebagai konservasi lingkungan. TBEG merupakan sebuah titik ungu utama dalam pengembangan kawasan Jogja Selatan yang dapat menjadi ruang ekspresi pelaku kesenian dan budaya serta mampu menggerakkan perekonomian di sekitarnya dan menjadi penghubung berbagai potensi kawasan lainnya.

Pada Tahun 2023 DPUPKP Kota Yogyakarta melaksanakan tahapan Pembangunan fisik di TBEG berupa Pembangunan *Entrance* dan Panggung Terbuka. Fasilitas ini sudah dapat dioptimalkan untuk kegiatan seni budaya maupun kegiatan lainnya mulai tahun 2024.

Rencana untuk tahun 2024, UPT Pengelolaan Taman Budaya di bawah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta akan mulai mengembangkan layanan di Taman Budaya Embung Giwangan. Sebagai langkah awal dalam rangka pengenalan kepada masyarakat, dilaksanakan kegiatan Bincang Senja Bersama: Gathering Ekspose Potensi Taman Budaya Embung Giwangan.

Kegiatan ini merupakan sebuah langkah awal untuk memperkenalkan potensi dan keberadaan Taman Budaya Embung Giwangan kepada seluruh *stakeholder* yang dilaksanakan pada Jumat, 29 Desember 2023 di Gedung *Entrance* Taman Budaya Embung Giwangan.



Gambar 6.17. *Entrance Taman Budaya Embung Giwangan*

Sumber: Disbud Kota Yogyakarta, 2024

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Pembangunan taman budaya di kabupaten/kota membutuhkan anggaran cukup signifikan sehingga-pembangunan taman budaya dilakukan secara bertahap baik dalam satu kabupaten/kota (pentahapan segmen konstruksi) maupun antar kabupaten/kota (berdasarkan *readiness criteria*).
- 2) Perlu upaya peningkatan minat masyarakat untuk mengapresiasi event budaya di dalam ruangan (indoor) di taman budaya

b. Solusi

- 1) Menetapkan skala prioritas kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan mengutamakan fungsionalitas konstruksi yang dibangun secara bertahap. Sehingga meskipun bangunan taman budaya belum secara fisik selesai 100%, namun sudah dapat dimanfaatkan sebagai venue event seni dan budaya
- 2) Meningkatkan publikasi melalui berbagai media dan meningkatkan kualitas event agar lebih menarik masyarakat untuk mengapresiasi

I. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT RSUD WATES DAN RSUD SAPTOSARI

1. RSUD Wates

Pengembangan dan pembangunan RSUD Wates mendapat dukungan Pemda DIY melalui penyaluran Bantuan Khusus Keuangan pada tahun 2018-2020. Pengembangan dan pembangunan RSUD Wates bertujuan untuk menjadi fasilitas penunjang Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). RSUD Wates berstatus rumah sakit pendidikan tipe B terakreditasi paripurna, dirancang menjadi pusat rujukan yang unggul menuju pelayanan berstandar internasional. Beberapa fasilitas pendukung yang telah dibangun antara lain fasilitas Gedung Medik Terpadu, Gedung Rawat Inap, Asrama dan Apartemen untuk tempat magang dan pelatihan bagi tenaga medis.

Pembangunan RSUD Wates telah berdampak secara signifikan pada peningkatan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah barat DIY dan Jawa Tengah bagian Selatan. Tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit mengalami peningkatan di masa pandemi. Indikator-indikator tersebut dilihat dari capaian *Bed Occupation Rate* (BOR) atau angka keterisian tempat tidur RSUD Wates yang pada tahun 2022 sebesar 28,96% meningkat menjadi 46,72. *Average Length of Stay* (LOS) atau angka rata-rata lamanya pasien dirawat dari 3,57 hari pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,35 hari. Data kunjungan pasien pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan pasien rawat jalan tahun 2022 sebanyak 83.738 meningkat menjadi 98.894. Jumlah kunjungan pasien rawat inap tahun 2023 mencapai 13.223, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan 9.831 kunjungan pasien.

Pada tahun 2023 RSUD Wates melakukan proses pengembangan layanan Prioritas Kementerian Kesehatan RI meliputi layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak.

2. RSUD Saptosari

RSUD Saptosari merupakan rumah sakit tipe D dengan akreditasi paripurna, memiliki kapasitas 55 tempat tidur. RSUD Saptosari Kabupaten Gunungkidul mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemda DIY sebesar Rp27.427,517.771,00 dalam rangka mendukung pengembangan wilayah selatan DIY. Bantuan tersebut telah terealisasi Rp26.349.192.953,00 atau mencapai 96,07%. Pemanfaatan BKK Pemda DIY RSUD Saptosari untuk pengadaan sejumlah alat medis yang diperlukan dalam menunjang pelayanan. Pada tahap pertama dengan nilai pengadaan Rp18.060.000.000,00, digunakan untuk pembelian alat medis berupa: *CT-Scan, Electro Surgical Unit, Emergency Trolley, Instrument Trolley* Untuk Peralatan Bedah, Penyempurnaan Ruang Operasi 2 Maternal Covid-19, Meja Operasi, Lampu Operasi, Mesin Anestesi, *Suction Pump*, dan Vidio Laringoskop. Tahap kedua, senilai Rp9.367.517.771,00 dimanfaatkan untuk pembelian: *Lowterm, Washer, Ventilator*, Pasien Monitor, PACS (Picture Archiving and Communication System), *Defibrillator, Small Fragment Instrument Set, Wire Instrument Set*, Bor Orthopedi, dan *General Instrument Set*.

Dengan adanya penambahan alat penunjang pelayanan, indikator pelayanan di RSUD Saptosari mengalami peningkatan. BOR RSUD Saptosari meningkat menjadi 27,62% di tahun 2023 dari 21,39 % pada tahun sebelumnya. Kunjungan rawat inap pada tahun 2023 sebesar 2.047 meningkat 78,5% dibandingkan tahun 2022 sebesar 1.607 kunjungan. Kunjungan rawat jalan mengalami peningkatan signifikan dari 26.642 di tahun 2022 menjadi 40.717 di tahun 2023.

Peningkatan jumlah kunjungan pasien ini tidak terlepas dari kemampuan rumah sakit dalam melakukan Tindakan diagnosis dan terapi dengan adanya CT Scan, meja operasi dan alat medis lain yang diadakan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, sebanyak 112 pasien telah diberikan pelayanan menggunakan CT scan dan adanya meja operasi meningkatkan pelayanan operasi di rumah sakit yaitu 330 pasien pada tahun 2023 meningkat dari 310 pasien di tahun sebelumnya.

J. PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA REGIONAL PIYUNGAN

Seiring dengan semakin berkurangnya kapasitas/daya tampung sampah di TPA Regional Piyungan, pada Juli 2023 Pemda DIY melakukan kebijakan pembatasan sampah yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota yakni Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. Data mulai tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata harian sampah yang masuk ke TPA Regional Piyungan sebesar 740 ton/hari dan setelah dilakukan pembatasan kuota sampah mulai dari Bulan Juli hingga Desember 2023 rata-rata sampah yang masuk ke TPA Regional Piyungan turun menjadi 563,14 ton/hari.

Pembatasan kuota tersebut dimaksudkan untuk memperpanjang usia pakai TPA Regional Piyungan dan juga memberikan kesempatan yang cukup bagi kabupaten/kota untuk melakukan persiapan pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing sebelum kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah diberlakukan di tahun 2024.

Pada tahun 2023, selain tetap melakukan pelayanan persampahan secara terbatas, Pemda DIY juga melakukan penataan lanjutan dan penutupan *landfill* zona A dan B seluas 10 Ha. Penataan tersebut merupakan kegiatan lanjutan yang dimulai sejak tahun 2020 yang merupakan upaya meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan di sekitar TPA Regional Piyungan.

Sampai dengan tahun 2023, progres pelayanan pengelolaan sampah di TPA Piyungan sebagai berikut:

1. Terealisasi penataan sampah menggunakan model terasering pada Zona A dan B seluas 10 Ha (Juni s.d Desember 2023). Penataan sampah dilakukan mencapai ketinggian sama dengan kondisi eksisting yaitu 134 mdpl. Ketinggian eksisting mengalami penurunan dari awalnya 140 mdpl menjadi 134 mdpl.
2. Terealisasi zona transisi II yang direncanakan menampung sampah selama 7 bulan (Oktober 2023 s.d April 2024) dengan luasan 0,9 Ha dan kapasitas tampung 155.771,58 m³



Gambar 6.18. Kondisi Zona Pasif
TPA pada akhir tahun 2023
Sumber: DLHK DIY, 2024



Gambar 6.19. zona transisi I dan II
Sumber: DLHK DIY, 2024

Pemda DIY telah menyiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk pengelolaan sampah, sebagai berikut:

1. Rencana jangka pendek

Dalam rangka optimalisasi TPA Regional Piyungan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan penggunaan zona transisi II dengan kapasitas/ daya tampung 155.771,58 m³ (± 7 bulan) dengan melakukan penataan sampah dan mengontrol tonase sampah yang masuk melalui penerapan kuota.
- b. Melakukan pemeliharaan pada kawasan zona pasif (Zona A dan B) sebagai upaya untuk meminimalkan dampak resiko ke lingkungan, antara lain melalui penangkapan gas metan, pengumpulan hingga pembakaran gas metana, drainase kawasan, dan pengolahan air lindi.

2. Rencana jangka panjang

- a. Pengelolaan sampah akan dilaksanakan secara desentralisasi ke Kabupaten/Kota. sesuai dengan Surat Gubernur DIY nomor 658/11898 perihal Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/ Kota se DIY.

- b. Pemda DIY akan tetap melakukan pembinaan dan fungsi koordinatif kepada kabupaten/kota agar pelaksanaan pengelolaan sampah dapat terlaksana secara integratif.

1. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Pemberlakuan kuota tonase sampah yang masuk ke TPA berdampak munculnya sampah liar dan luberan di fasilitas penampungan sementara.
- 2) Masih terdapat armada angkutan sampah ke TPA yang tidak memenuhi ketentuan teknis, misalnya armada belum berupa *dump truck*.
- 3) Drainase sering penuh akibat banyaknya sampah yang terbawa angin dan hujan deras, serta tumbuhan liar yang menutupi drainase
- 4) Pengelolaan lindi di TPA masih belum optimal karena debit lindi *overload* (menampung lindi dari zona A, B dan transisi). Masih ada kebocoran lindi pada zona A dan zona B.

b. Solusi

- 1) Koordinasi dan kolaborasi secara intensif bersama Kabupaten/Kota melakukan evakuasi khusus sampah liar dan luberan sampah dan tetap memberikan edukasi secara massif kepada masyarakat setempat terkait pengelolaan sampah.
- 2) Melakukan operasi gabungan untuk penertiban armada sampah dan membangun sistem disinsentif sehingga meminimalisir armada yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis
- 3) Melakukan pembersihan saluran drainase secara rutin.
- 4) Melakukan upaya penanganan lindi melalui proses kimia (penambahan bahan kimia PAC, Kaporit); proses biologis (penambahan bakteri *aerob* dan *anaerob*, *eco enzyme*, nutrisi); dan mekanis (*aerator*, *mixer*). Pembuatan saluran pipa sementara untuk menangkap bocoran air lindi yang masuk ke drainase



Gambar 6.20. Pengumpulan dan Pembakaran Gas Metan

Sumber: DLHK DIY, 2024



Gambar 6.21. Instalasi Pengolahan Lindi

Sumber: DLHK DIY, 2024

K. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan,

sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan, tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Penanggulangan kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan DIY. Tren angka kemiskinan di DIY dari tahun ketahun mengalami penurunan, tetapi masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional.

Kemiskinan sangat berkaitan erat dengan masalah sosial, baik sebagai penyebab maupun dampak sehingga perlu dilakukan secara konvergen dan berkelanjutan serta berkesinambungan. Pemerintah daerah DIY melalui dinas sosial DIY melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan melalui balai sosial, . Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial beserta 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (Balai) yaitu Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, dan Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha.

Pelaksanaan Program/ sub kegiatan yang berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan diantaranya pemberian rehabilitasi sosial dasar kepada Klien Balai meliputi klien eks gelandangan pengemis, eks Psikotik, perempuan rawan sosial ekonomi, penyandang disabilitas, anak terlantar, remaja bermasalah sosial, lansia terlantar. rehabilitasi sosial yang dilakukan seperti penyediaan permakanan; penyediaan sandang; penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti; pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; pemberian pelayanan penelusuran keluarga; pemberian pelayanan reunifikasi keluarga; penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses;

pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari; pemulangan ke daerah asal; penyediaan alat bantu; fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan /atau identitas anak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang merupakan kewenangan provinsi.

Pada tahun 2023 pemerintah daerah melalui dinas sosial memberikan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) dengan total pagu Rp2.781.500.000,00 yang terdiri dari hibah untuk lembaga-lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial seperti Komisi Daerah Lanjut Usia DIY, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) DIY, Lembaga Perlindungan Anak, dan lain-lain dengan jumlah total hibah Rp451.500.000,00.

Untuk Bantuan sosial (bansos) disalurkan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti anak terlantar, lansia terlantar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Selain itu pemerintah daerah memberikan bansos kepada buruh pabrik rokok dari kelompok miskin. Adapun total bansos yang dianggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp2.330.000.000,00. Anggaran bansos kepada PPKS melalui LKS sebesar Rp1.217.813.300,00. sedangkan untuk anggaran bansos buruh pabrik rokok, dari anggaran sebesar Rp1.194.000.000,00 dengan target 1.990 orang tidak semua tersalurkan karena perubahan data penerima (*by name*) karena meninggal, pindah tempat dan lainnya, dengan jumlah penerima berkurang menjadi 1.841 orang atau Rp1.112.186.700,00.

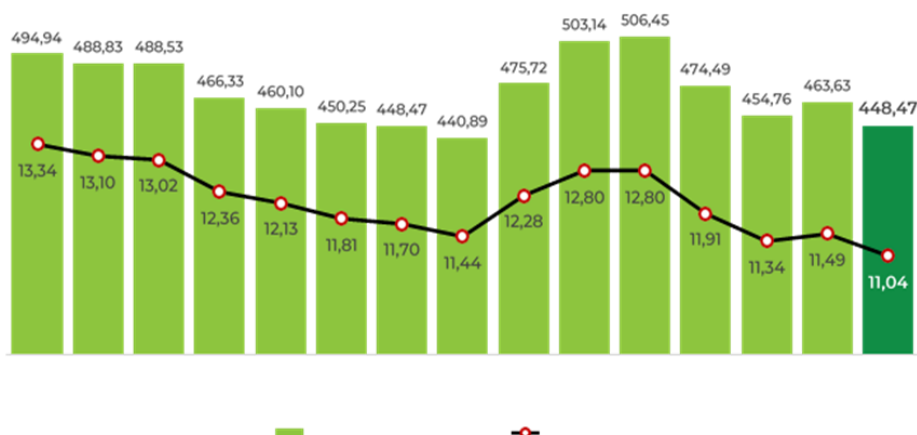
Optimalisasi Bantuan Sosial dengan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Sistem pengolahan data telah diinisiasi oleh Dinas Sosial DIY sebagai upaya untuk melakukan penyandingan data sehingga diperoleh data penerima bantuan sosial yang tepat. Monitoring penyaluran bantuan sosial juga telah dilakukan oleh Dinas Sosial DIY dengan melibatkan Mitra Dinas, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Pendamping Sosial.

Dana Keistimewaan DIY juga berperan dalam penanganan kemiskinan. Dana Keistimewaan melalui Urusan Kebudayaan pada dinas sosial digunakan untuk intervensi pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sejak tahun 2021. Sampai dengan tahun 2023 telah disasar sebanyak 35 kelompok atau sebanyak 350 orang.

2. Capaian Angka Kemiskinan pada tahun 2023

a. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di DIY, Maret 2016-Maret 2023

Secara umum, pada periode Maret 2016 – Maret 2023, tingkat kemiskinan di DIY menunjukkan kecenderungan yang menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun demikian, terdapat beberapa fluktuasi peningkatan kemiskinan. Pada Maret 2020, September 2020, dan Maret 2021 terjadi peningkatan kemiskinan yang diantaranya disebabkan pandemi Covid-19. Pada bulan September 2021 dan Maret 2022 terjadi tren penurunan tingkat kemiskinan. Namun, pada September 2022 kemiskinan kembali mengalami kenaikan. Sedangkan pada Maret 2023 kemiskinan kembali mengalami penurunan. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2016 sampai dengan Maret 2023 disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 6.22. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2016 sampai dengan Maret 2023

Sumber: BPS, 2024

Jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2016 mencapai 494,94 ribu orang. Sampai dengan September 2019, jumlah penduduk miskin telah berkurang sebanyak 54,05 ribu orang. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 475,72 ribu orang pada Maret 2020. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin kembali meningkat sampai dengan Maret 2021. Penduduk miskin pada periode ini tercatat sebanyak 506,45 ribu orang. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan jika dibandingkan September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebanyak 448,47 ribu orang. Jika dibandingkan dengan September 2022, terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 15,2 ribu orang.

b. Perkembangan Kemiskinan Menurut Wilayah, pada periode Maret 22 – Maret 23

Jumlah penduduk miskin secara absolut di DIY paling banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2023, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan DIY tercatat sebanyak 312,83 ribu orang. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan yang banyaknya 135,63 ribu orang. Sementara itu, secara persentase, penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di pedesaan tercatat sebanyak 13,36 persen. Dengan demikian, secara rata-rata terdapat sekitar 13 hingga 14 penduduk miskin diantara 100 orang penduduk yang ada di pedesaan. Sementara itu, pada waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan adalah sebesar 10,27 persen.

Selama periode Maret 2022 – Maret 2023, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin di perkotaan DIY turun sebanyak 2,6 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun sebanyak 3,7 ribu orang. Dengan demikian, dalam setahun terakhir, jumlah penduduk miskin DIY berkurang sebanyak 6,3 ribu orang. Pada periode yang sama, persentase

penduduk miskin perkotaan turun sebanyak 0,29 persen poin. Adapun persentase penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,29 persen poin. Dalam setahun terakhir persentase kemiskinan DIY turun sebanyak 0,30 persen poin.

Tabel 6.11. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, 2022 – Maret 2023

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2022	315,46	10,56
September 2022	321,07	10,64
Maret 2023	312,83	10,27
Perdesaan		
Maret 2022	139,30	13,65
September 2022	142,57	14,00
Maret 2023	135,63	13,36
Total		
Maret 2022	454,76	11,34
September 2022	463,63	11,49
Maret 2023	448,47	11,04

Sumber: BPS, 2024

Berdasar perhitungan data Persentase Angka Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa selama satu dekade antara 2012-2023, DIY berhasil mencatatkan akumulasi penurunan angka kemiskinan tertinggi se-Pulau Jawa dengan penurunan sebesar -5,01%, diikuti oleh Jawa Tengah -4,36%, Jawa Timur -2,91, Jawa Barat -2,11. Ada juga 2 provinsi di Jawa yang mengalami kenaikan yaitu Banten 0,39% dan DKI Jakarta 0,92%.

3. Progres Sampai Dengan Tahun 2023

a. Ulasan kegiatan penanggulangan kemiskinan di DIY

Berbagai program kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan terus dilakukan disertai dengan pembenahan target sasaran sesuai basis data program penanggulangan kemiskinan. Selain itu koordinasi antar pemangku kepentingan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) juga terus ditingkatkan.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan di DIY menjadi upaya pemerintah untuk memperbaiki hidup masyarakat agar menjadi lebih sejahtera (upaya perlindungan sosial). Sedangkan dalam hal program pemberdayaan ekonomi telah dilakukan pemberian bantuan/stimulan permodalan usaha yang dijalankan masyarakat termasuk juga bimbingan *softskill*, dan *hardskill*.

Upaya Pemda DIY dalam penanggulangan kemiskinan melalui berbagai strategi, baik melalui kebijakan fiskal dalam APBD, maupun dengan melibatkan masyarakat miskin itu sendiri. Paradigma yang dikedepankan adalah menjadikan penduduk miskin sebagai subjek bukan sebagai objek sehingga penduduk miskin tidak hanya penerima manfaat program tetapi bisa memberdayakan diri sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Penanggulangan kemiskinan di DIY mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah. Selain itu, diterbitkan juga Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem, Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Wilayah Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024, Keputusan Menko PMK Nomor 30 Tahun 2022 tentang Sumber dan Jenis Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024 dan Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Upaya sinergi lintas sektor diwujudkan di lingkup Pemda DIY maupun dengan pihak-pihak di luar Pemda DIY untuk mengarah kepada 15 lokus kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan. 15 Lokus kapanewon prioritas tersebut diantaranya: Sentolo, Saptosari, Kokap, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Pengasih, Tempel, Seyegan, Tepus, Karangmojo, Prambanan, Samigaluh, dan Imogiri. Penetapan 15 Lokus Kapanewon sasaran lintas sektor yang bersama-sama menjadi sasaran OPD di DIY, Kabupaten/Kota, CSR maupun lembaga lainnya yang sudah disampaikan melalui Surat Edaran Wakil Gubernur Nomor 401/0161 tanggal 5 Januari 2022 tentang penyampaian 15 Lokus Kapanewon Penanggulangan Kemiskinan.

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dalam Perda nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan di DIY ditempuh melalui 4 program yaitu program perlindungan sosial, program rehabilitasi sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan program peningkatan akses terhadap sumber daya.

Secara garis besar program dukungan penanggulangan kemiskinan di DIY yang dilakukan perangkat daerah diantaranya program kewirausahaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi klien pada balai/panti sosial, program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Subsidi pemasangan listrik untuk masyarakat miskin, Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU), Program Padat Karya, subsidi pelaku UMKM, Jambanisasi bagi keluarga miskin, Desa Mandiri Budaya, dan Desa Prima. Berikut adalah realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan pada OPD di DIY tahun 2023:

Tabel 6.12. Rincian Realisasi Program/Kegiatan Yang Dilakukan OPD DIY Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023

No	Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran/ Pagu (Rp)*	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	1	1	1	116.197 .400	115.806 .600	99,66
2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	2	3	4	4.773.537 .900	4.790.842 .633	100,36
3	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	2	2	2	215.000 .000	215.000 .000	100,00
4	Biro Organisasi	1	1	1	61.818 .000	48.527 .440	78,50
5	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	2	2	2	60.797 .800	41.918 .000	68,95
6	Dinas Sosial DIY	7	11	45	20.064.023 .964	19.196.229 .357	95,67
7	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) DIY	1	1	11	2.054.455 .700	1.951.009 .557	94,96
8	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) DIY	1	2	23	5.069.814 .000	4.961.763 .477	97,87
9	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY	1	1	8	1.917.174 .220	1.942.484 .718	101,32
10	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) DIY	1	1	13	2.354.762 .300	2.209.812 .677	93,84
11	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) DIY	1	1	11	2.776.658 .100	2.579.059 .890	92,88

No	Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran/ Pagu (Rp)*	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
12	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) DIY	1	1	9	3.168.366 .700	3.154.142 .076	99,55
13	Dinas Pemndidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY	2	4	4	27.883.500 .000	26.827.000 .000	96,21
14	Balai Pemuda dan Olah Raga (BPO) DIY	1	1	1	406.211 .000	326.889 .000	80,47
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY	2	3	3	1.278.795 .700	1.705.526 .986	133,37
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	2	2	2	1.150.553 .400	1.145.869 .370	99,59
17	Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) DIY	1	1	1	12.451.510 .350	12.111.222 .737	97,27
18	Dinas Pariwisata DIY	1	1	1	6.793.794 .100	6.734.050 .000	99,12
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY	1	1	1	6.271.134 .800	6.184.740 .075	98,62
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	1	1	1	100.750 .000	100.750 .000	100,00
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	1	1	1	4.933.245 .200	4.943.862 .091	100,22
22	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	1	1	1	4.579.331 .400	3.887.558 .320	84,89
23	Dinas Pekerjaan Umum,	3	3	3	118.315.400	106.612.141	90,11

No	Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran/ Pagu (Rp)*	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY				.000	.460	
24	Dinas Kesehatan DIY	1	1	1	1.525.000 .000	1.513.000 .000	99,21
25	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY	1	1	1	84.543.654 .400	47.657.998 .905	56,37
26	Dinas Perindustrian Perdagangan DIY	2	2	2	1.903.519 .800	1.852.669 .773	97,33
27	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	2	2	3	2.841.825 .000	2.796.885 .175	98,42
28	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	4	6	6	6.074.125 .000	5.889.824 .657	96,97
29	Dinas Kebudayaan	1	2	3	21.762.451 .100	21.123.268 .501	97,06
30	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY	1	1	1	252.150 .000	252.150 .000	100,00
JUMLAH		49	61	166	345.699 .557.334	292.872.003 .475	84,72

Sumber: TKPKD DIY, 2024

Keterangan: * anggaran/pagu saat perencanaan

Tabel 6.13. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di DIY Tahun 2023

Kelompok Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran/Pagu (Rp)*	Realisasi (Rp)	Jumlah OPD
Kelompok Perlindungan Sosial	8	11	20	143.738.430.684	104.257.173.818	6
Kelompok Rehabilitasi Sosial	8	12	103	24.653.450.400	23.784.394.511	6
Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	29	34	38	78.099.051.250	76.297.571.216	19
Peningkatan Akses Pelayanan Dasar	4	4	5	99.208.625.000	88.532.863.930	2
Jumlah	49	61	166	345.699.557.334	292.872.003.475	30

Sumber: TKPKD DIY, 2024

Keterangan: * anggaran/pagu saat perencanaan

Dari program/sub kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2023 yang tersebar pada 30 perangkat daerah, tercatat jumlah anggaran sebesar Rp345.699.557.334 dengan realisasi Rp292.872.003.475,00 atau sebesar 84.7% (deviasi 15,3%). Penyebab deviasi anggaran tersebut karena adanya anggaran yang tidak terserap, seperti: penyesuaian dengan jumlah riil target penerima yang sesuai kriteria, adanya sisa pengadaan, efisiensi sewa tempat, penyesuaian belanja terhadap harga pasar, efisiensi pembelanjaan peralatan menyesuaikan kebutuhan/kondisi riil.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Kontribusi kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.14. Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Jumlah OPD
Kulon Progo	67	89	133	230.280.078 .816	313.868.834 .846	22
Bantul	43	64	166	180.535.106 .661	171.480.668 .887	17
Gunungkidul	59	83	189	310.975.741 .020	298.240.458 .954	21
Sleman	28	38	62	166.940.511 .337	161.232.220 .195	12
Kota Yogyakarta	30	32	44	172.841.198 .870	145.227.142 .198	12
Jumlah	227	306	594	1.061.572.636 .704	1.090.049.325 .080	84

Sumber: TKPKD DIY, 2024

b. Penanganan Kemiskinan Ekstrem DIY

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diamanatkan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Dalam pelaksanaan Inpres tersebut, Kemenko Perekonomian terus melakukan koordinasi dengan berbagai K/L untuk memonitoring dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi dan program peningkatan produktivitas untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan tersebut didukung oleh penajaman sasaran melalui pemanfaatan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), konvergensi program, serta perbaikan kualitas implementasi program. Meskipun demikian, masih diperlukan kerja keras untuk mewujudkan target tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada tahun 2024. Untuk itu, kunci sukses upaya

penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu konvergensi program dan perbaikan akurasi penyasaran. Konvergensi program penting dilakukan untuk memastikan agar berbagai program pengurangan beban pengeluaran maupun pemberdayaan ekonomi, dapat menysasar kantong-kantong kemiskinan. Capaian kemiskinan ekstrem Maret 2023 telah dirilis, DIY menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Pulau Jawa tetapi mengalami penurunan yang cukup cepat yaitu 1,17%.

Persentase kemiskinan ekstrem per Maret 2023 di DIY sebesar 1,24%. Capaian ini sudah berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia. Dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem dengan mengacu pada Surat Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Wilayah Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024, DIY mendapatkan 4 prioritas yang berada di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Pemda DIY berkomitmen untuk melaksanakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). Pada tahun 2023 dukungan terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah terealisasi anggaran sebesar Rp233.358.364.923,00. Realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.15. Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DIY dalam upaya percepatan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023

Strategi PPKE	Jumlah OPD	Jumlah Program	Jumlah SubKegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Mengurangi Beban Pengeluaran	12	14	103	102.165.259.020	79.126.369.096
2. Meningkatkan Pendapatan	8	8	9	46.949.401.350	44.098.705.769
3. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	4	6	6	121.858.704.400	110.133.290.058
TOTAL	17	28	118	270.973.364	233.358.364

Strategi PPKE	Jumlah OPD	Jumlah Program	Jumlah SubKegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
				.770	.923

Sumber:TKPKD DIY, 2024

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penanggulangan kemiskinan di DIY:

- 1) Belum optimalnya jangkauan dan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
- 2) Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan mulai dari tahapan perencanaan, sinkronisasi program, pelaksanaan serta sinergitas antar pelaku (pemerintah, swasta dan masyarakat).
- 3) Masih adanya masyarakat miskin yang kurang berinisiatif dan kurang termotivasi untuk memperbaiki kehidupannya untuk mengentaskan dari kemiskinan.
- 4) Belum optimalnya peran CSR dalam bersinergi dengan Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan masyarakat dan mengungkit ekonomi masyarakat miskin maupun rentan.

b. Solusi

Penanggulangan kemiskinan kedepan, diperlukan beberapa upaya percepatan yang pasti diantaranya:

- 1) Memperbaiki dan meningkatkan akurasi data sasaran kemiskinan, dan mengembangkan inovasi dan langkah-langkah kreatif dalam pengentasan kemiskinan melalui partisipasi masyarakat sesuai dengan kondisi aktual masyarakat.

- 2) Mengefektifkan dan optimalisasi jejaring kerjasama lintas sektor Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) baik di tingkat DIY, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa yang telah dibentuk dalam rangka mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan mulai tahapan perencanaan, sinkronisasi program, pelaksanaan serta sinergitas antar pelaku (pemerintah, swasta dan masyarakat). Pemda DIY juga perlu mengoptimalkan kinerja Kader Penanggulangan Kemiskinan untuk meningkatkan akses penduduk/keluarga miskin serta meningkatkan kegotongroyongan/kepedulian sosial untuk membantu keluarga miskin terutama yang miskin absolut.
- 3) Intervensi program penanggulangan kemiskinan selain *hardskill* juga dengan peningkatan kemampuan *soft skill* atau keterampilan non-teknis, mencakup berbagai aspek seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, pemecahan masalah, kreativitas, ketahanan emosional, dan kemampuan adaptasi. Hal ini akan membantu individu tidak hanya untuk keluar dari kemiskinan tetapi juga untuk memiliki kehidupan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
- 4) meningkatkan koordinasi dan pelibatan dunia usaha melalui forum tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (CSR) DIY termasuk dengan dunia akademik untuk berkolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan.

L. REFORMASI KALURAHAN

1. Latar Belakang

Visi dan misi Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 menjadikan Reformasi Kalurahan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh DIY dalam lima tahun ke depan. Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya untuk menjawab

kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang dihadapi di wilayah DIY. Entitas Kalurahan akan menjadi fokus dan lokus bagi upaya-upaya peningkatan ``kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan. Oleh sebab itu, Reformasi Kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan sekaligus upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Secara operasional, Reformasi Kalurahan kemudian diterjemahkan dalam dua pendekatan yakni Reformasi Birokrasi (RB) Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat (RPM) Kalurahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan.

Fokus RB Kalurahan yaitu mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan yang berorientasi kinerja, dan menciptakan budaya pemerintahan dengan Pamong Kalurahan yang profesional. Terdapat 16 kegiatan utama dari RB Kalurahan, seperti: pengembangan SAKIP kalurahan, penguatan digitalisasi kalurahan, penguatan pengelolaan keuangan kalurahan, serta penguatan penugasan urusan keistimewaan di kalurahan. Sementara fokus RPM Kalurahan adalah mendorong peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kalurahan. Terdapat 5 (lima) kegiatan utama dalam RPMKal, yakni: penguatan kegiatan penanganan *stunting*; penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian (melalui BUMKal); dan penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan RB Kalurahan dibentuk melalui tiga (3) Tim, berdasarkan susunan pemerintahannya, yakni Tim Fasilitasi Reformasi Kalurahan DIY, Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten, dan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan. Tim Fasilitasi Reformasi Kalurahan DIY sudah terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 95/TIM/2023

tanggal 18 Oktober 2023 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

RB Kalurahan tidak berarti merubah struktur organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kalurahan karena telah diatur dalam UU Desa dan peraturan turunannya. Reformasi Birokrasi Kalurahan mengacu pada perbaikan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang menekankan pada kegiatan yang sederhana namun memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perubahan diharapkan pada Pemerintahan Kalurahan, yakni meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan dilatarbelakangi oleh empat permasalahan utama tata kelola pemerintahan Kalurahan di DIY, yaitu masalah tata kelola keuangan, masalah sumber daya manusia, masalah regulasi atau aturan main, serta masalah nilai dan budaya.

Sementara itu Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diarahkan pada perbaikan dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

Penjabaran sasaran Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dalam indikator, meta indikator dan target kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.16. Sasaran Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Baseline (2022)	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan	Jumlah Pemerintah Kalurahan yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Kelurahannya	Jumlah Pemerintah Kalurahan yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli dihitung dari Pendapatan Asli	211	241	271	301	331	361

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Baseline (2022)	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027
		Kalurahan tahun- n dikurangi Pendapatan Asli Kalurahan tahun n-1						
	Jumlah Kalurahan yang mengalami penurunan penduduk miskin	Jumlah Kalurahan yang mengalami Penurunan penduduk miskin dihitung dari Jumlah penduduk miskin tahun n dikurangi jumlah penduduk miskin tahun n-1 (pada posisi status kesejahteraan sangat miskin dan miskin) di kalurahan	113	138	163	188	213	238
	Jumlah Kalurahan yang mengalami penurunan anak <i>stunting</i>	Jumlah Kalurahan yang mengalami Penurunan anak <i>stunting</i> dihitung dari jumlah anak <i>stunting</i> tahun n dikurangi jumlah anak <i>stunting</i> tahun n-1 di kalurahan	126	152	178	204	230	256
	Jumlah Kalurahan yang memiliki BUM Kalurahan dengan kategori Maju	Jumlah Kalurahan yang memiliki BUM Kalurahan dengan kategori Maju	39	39	47	55	63	71

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Baseline (2022)	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027
	Kalurahan yang memiliki nilai aspek Ekonomi IDM dengan kategori Kelas 1 (satu) dengan nilai antara 0,8111 sd 1,0000	Jumlah Kalurahan yang memiliki nilai aspek Ekonomi dalam IDM dengan kategori Kelas 1 (satu) dengan nilai antara 0,8111 sd 1,0000	120	150	180	210	240	270
	Kalurahan yang memiliki nilai aspek Lingkungan IDM dengan kategori Kelas 1 (satu) dengan nilai 0,7778-1,0000	Jumlah Kalurahan yang memiliki nilai aspek Lingkungan dalam IDM dengan kategori 1 (satu) dengan nilai 0,7778-1,0000	296	307	318	329	340	351

Untuk mewujudkan sasaran Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, ditetapkan 5 kegiatan utama yang menjadi fokus intervensi. Fokus intervensi merupakan aspek yang akan mendapatkan intervensi dalam Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dengan mempertimbangkan tingkat efektivitas kegiatan yang dapat memberikan kontribusi atau daya ungkit (*leverage*) paling besar terhadap pencapaian sasaran. Rincian kegiatan utama Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 6.17. Kegiatan Utama Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Permasalahan	Kegiatan Utama	Dampak Yang Diharapkan
Masih tingginya permasalahan sosial, ekonomi dan pengembangan kebudayaan di Kalurahan	Penguatan Kegiatan penanganan <i>stunting</i> Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan Penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan pengembangan kebudayaan Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian Penguatan kegiatan untuk penanganan Kemiskinan	Terwujudnya penanganan <i>stunting</i> di kalurahan yang komprehensif Berkembang dan lestariya kebudayaan di kalurahan Terwujudnya kegiatan pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan Peningkatan keberdayaan ekonomi di kalurahan Terwujudnya penanganan kemiskinan di kalurahan yang komprehensif

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

Secara ringkas inisiatif kebijakan reformasi kalurahan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- j. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa;
- k. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- l. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2).

Tujuan

Pemda DIY melakukan fasilitasi terhadap Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan. Reformasi Kalurahan dilaksanakan dengan tujuan terwujudnya Kalurahan yang mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan bagi masyarakatnya. Rumusan tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran pelaksanaan Reformasi Kalurahan yang terdiri atas:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan Kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja;
- 2) Terciptanya budaya pemerintahan dengan pamong kalurahan yang profesional; dan
- 3) Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

Secara tidak langsung reformasi kalurahan tersebut mendukung tujuan Pembangunan Daerah DIY tahun 2023-2026 yakni “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Sosio Kultural Masyarakat” dan “Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good government*)”. Pembangunan DIY yang berfokus pada Kalurahan sangat relevan memperhatikan keragaman potensi yang dimiliki 392 Kalurahan di DIY dalam mengakselerasi pembangunan. Berdasarkan pertimbangan demografis, prioritas intervensi pembangunan pada Kalurahan sudah tepat mengingat 88.32% atau 3.247.940 penduduk dari 3.677.446 penduduk DIY berkedudukan di 392 Kalurahan (data kependudukan DIY Semester II Tahun 2021). Melalui Reformasi Kalurahan, kalurahan menjadi fundamen penting bagi kemajuan DIY di masa yang akan datang. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam kegiatan utama yang menjadi fokus pada reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai. Kegiatan utama ini dapat menjadi pedoman bagi *stakeholder* dalam implementasi reformasi kalurahan.

Tabel 6.18. Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Permasalahan	Kegiatan Utama	Dampak Yang Diharapkan
Akuntabilitas kinerja dan keuangan belum memadai	Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi	Terwujudnya pengelolaan data sebagai dasar perencanaan Kalurahan
	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan	Terwujudnya pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pemerintah Kalurahan
	Penguatan Digitalisasi Kalurahan	Terwujudnya kemudahan dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kalurahan

Permasalahan	Kegiatan Utama	Dampak Yang Diharapkan
	Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kalurahan yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kalurahan	terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan tata nilai dan prinsip-prinsip pengadaan serta mampu mendorong pembukaan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
	Penguatan Pengelolaan Aset Kalurahan/aset yang dikelola Kalurahan	optimalnya pemanfaatan aset dalam meningkatkan pendapatan asli dan nilai aset kalurahan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai
	Penguatan Pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan	optimalnya pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan oleh kalurahan
	Penguatan Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Dinas Pemerintah Kalurahan	terwujudnya tertib arsip kalurahan melalui pengelolaan arsip yang benar yang menjamin kelancaran alam komunikasi dan transaksi informasi, ketersediaan arsip yang cepat dan akurat, serta terselamatkan dan terlestarikannya arsip sebagai bukti sejarah kalurahan yang otentik dan terpercaya serta memori kolektif desa
	Penguatan Pengendalian Gratifikasi	terwujudnya integritas Pemerintahan Kalurahan
Regulasi belum tertata	Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan	meningkatnya kualitas pengawasan kinerja pemerintah Kalurahan
	Penguatan Regulasi Pemerintah Kalurahan	terwujudnya produk hukum Kalurahan yang berorientasi pada melayani kepentingan masyarakat dan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku
Kapasitas SDM, nilai dan budaya kerja belum memadai	Pengisian Pamong Kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	terpenuhinya kebutuhan SDM pamong kalurahan yang integritas, profesional, responsif, dan mampu bekerja dalam tim

Permasalahan	Kegiatan Utama	Dampak Yang Diharapkan
belum optimalnya kualitas pelayanan publik	penguatan Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan	terwujudnya peningkatan kecakapan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan
	Penerapan Budaya Pemerintahan	terwujudnya peningkatan etos kerja dan pengabdian
	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Terwujudnya pelayanan publik prima dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat
	Pengembangan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kalurahan	meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintah kalurahan
KEGIATAN UTAMA REFORMASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN		
PERMASALAHAN	KEGIATAN UTAMA	DAMPAK YANG DIHARAPKAN
Masih tingginya permasalahan sosial, ekonomi dan pengembangan kebudayaan di kalurahan	penguatan kegiatan penanganan <i>stunting</i>	terwujudnya penanganan <i>stunting</i> di kalurahan yang komprehensif
	penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan	berkembang dan lestarnya kebudayaan di kalurahan
	penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial, dan pengembangan kebudayaan	terwujudnya kegiatan pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial, dan pengembangan kebudayaan
	penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian	peningkatan keberdayaan ekonomi di kalurahan
	penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan	terwujudnya penanganan kemiskinan di kalurahan yang komprehensif.

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

2. Progres sampai dengan Tahun 2023

Perumusan kebijakan Reformasi Kalurahan Tanggal 29 September 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan. Di samping perumusan kebijakan, pelaksanaan pada tahun 2023 merupakan penyiapan atau

prakondisi sebelum dilaksanakan secara masif di 392 Kalurahan pada tahun 2024 – 2027 antara lain:

a. Perumusan Rancangan Peraturan Gubernur.

Penyusunan rancangan peraturan gubernur mengenai Reformasi Kalurahan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Dengan tahap perumusan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan;
- 2) Arah Perubahan Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan;
- 3) Kajian Reformasi Birokrasi Terbatas (RBT) Kalurahan;
- 4) Pembahasan Rancangan Gubernur;
 - a) Pembahasan Internal Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
 - b) Pembahasan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten;
 - c) Focus Group Discussion (FGD) Reformasi Birokrasi Kalurahan;
 - d) *Coffee Morning* Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi kalurahan;
 - e) Rapat Ekspose Reformasi Birokrasi Kalurahan;
 - f) Pembahasan Reformasi Birokrasi Kalurahan Tingkat Pimpinan;
 - g) Pra Fasilitas Kementerian Dalam Negeri;
 - h) Konsultasi ke Pusat;

- i) Pembahasan Bersama Kemenpan RB;
 - j) Finalisasi Rancangan Peraturan Gubernur;
 - k) Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Reformasi Kalurahan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Petunjuk Teknis Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Maksud dan tujuan disusunnya petunjuk teknis untuk memberikan panduan secara detail dan operasional mengenai teknis pelaksanaan rencana aksi Reformasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan di DIY agar berjalan secara sinergis dan kolaboratif antar unsur pelaksana yang terdiri Pemda DIY, Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan.



c. Pengembangan Aplikasi SINKAL DIY Menu Kalurahan *Reform Space*.

Dalam memudahkan pelaksanaan setiap tahapan Reformasi Birokrasi Kalurahan, dikembangkan menu Kalurahan Reform Space pada Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL). Kalurahan Reform Space merupakan salah satu infrastruktur penting pelaksanaan RB Kalurahan, disamping dukungan regulasi, petunjuk teknis dan buku panduan. Dengan demikian penting untuk menambahkan menu pada Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) dengan mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kalurahan. RB Kalurahan yang dilaksanakan secara masif di 392 Kalurahan dapat termonitor dengan baik dengan sajian informasi perkembangan yang *up to date* sehingga dorongan dan akselerasi pelaksanaan RB Kalurahan bisa diupayakan.

Maksud dan tujuan pengembangan SINKAL dengan menu Kalurahan *Reform Space* yakni untuk menyediakan instrumen atau alat kerja yang memudahkan pelaksanaan tahapan RB Kalurahan, mulai dari penyusunan asesmen awal, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan penyusunan rencana aksi tindak lanjut. Kemudian dengan adanya Kalurahan *Reform Space*, data dan informasi tersimpan dalam suatu database sehingga pengelolaannya lebih mudah termasuk untuk penarikan data untuk kebutuhan pelaporan.

d. Pelaksanaan *Kick-Off Meeting* Reformasi Kalurahan.

Pengesahan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan pada 29 September 2023 menjadi landasan yang kuat kebijakan Reformasi Kalurahan akan diimplementasikan. Sementara momentumnya diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan *Kick-Off Meeting* Reformasi Kalurahan sebagai tonggak atau milestone dimulainya kebijakan RB Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dalam bingkai Reformasi Kalurahan secara serentak di 392 Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan prosesi *launching* kebijakan Reformasi Kalurahan dalam bentuk *Kick-Off Meeting* Reformasi Kalurahan yakni sebagai tanda dimulainya pelaksanaan misi pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 mengenai Reformasi Kalurahan, sarana sosialisasi/diseminasi awal penyelenggaraan Reformasi Kalurahan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023 tanggal 29 September 2023 pada Masyarakat, serta pembangunan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan sesuai kewenangan.

Penyelenggaraan *Kick-Off Meeting* Reformasi Kalurahan dilaksanakan pada Kamis, 19 Oktober 2023 di Royal Ambarrukmo Yogyakarta dengan mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Desa PDTT, Forkorpimda DIY, Bupati/Walikota, dan seluruh Kepala OPD Pemerintah Daerah DIY, Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kabupaten (Inspektorat, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Dinas Pemerintahan Kalurahan/nomenklatur lain, dan 64 Kapanewon se-DIY), serta 392 Lurah kabupaten se-DIY.

e. Pelaksanaan *Training of Trainers* (TOT) Reformasi Kalurahan.

Penyelenggaraan *Training of Trainers* (TOT) Reformasi Kalurahan merupakan tindak lanjut *Kick-Off Meeting* Reformasi Kalurahan yang menjadi tanda dimulainya pelaksanaan misi pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan tahun 2022-2027 mengenai Reformasi Kalurahan, sekaligus pembekalan bagi unsur pelaksana Reformasi Kalurahan di tingkat Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten. Tujuannya adalah untuk sosialisasi lanjutan pasca *Kick-Off Meeting* Reformasi Kalurahan, memberikan pembekalan pengetahuan mengenai kebijakan Reformasi Kalurahan, dan meningkatkan kapasitas unsur pelaksana Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten dan Kapanewon dalam mengimplementasikan kebijakan Reformasi Kalurahan.

TOT Reformasi Kalurahan diselenggarakan serentak di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman pada tanggal 24 Oktober-1 November 2023. Masing-masing unsur pelaksana Reformasi Kalurahan tingkat kabupaten dibagi menjadi empat angkatan, dimana waktu pelatihan pada setiap angkatan diselenggarakan selama 4 (empat) hari. Pelaksanaan TOT Reformasi Kalurahan melibatkan fasilitator dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, dengan jadwal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan TOT Angkatan I Kabupaten Bantul pada 24, 25, 26, dan 27 Oktober 2023;
 - 2) Pelaksanaan TOT Angkatan II Kabupaten Gunungkidul pada 25, 26, 27, dan 30 Oktober 2023;
 - 3) Pelaksanaan TOT Angkatan III Kabupaten Kulon Progo pada 26, 27, 30, dan 31 Oktober 2023; dan
 - 4) Pelaksanaan TOT Angkatan IV Kabupaten Sleman pada: 27, 30, 31 Oktober dan 1 November 2023.
- f. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Aplikasi SINKAL menu Kalurahan *Reform Space*.

Kegiatan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yakni pelaksanaan bimbingan teknis Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) untuk menu Kalurahan *Reform Space* pada 20-23 November 2023. Bertempat di STPMD "APMD" Yogyakarta, bimbingan teknis selama 4 (empat) hari tersebut menghadirkan perwakilan dari 392 Kalurahan se-DIY yang ditugaskan sebagai *web administrator* SINKAL. Maksud dan tujuan diselenggarakannya bimbingan teknis bagi perwakilan 392 Kalurahan merupakan even sosialisasi lanjutan RB Kalurahan bagi Pemerintah Kalurahan, memberikan pembekalan pengetahuan mengenai kebijakan Reformasi Kalurahan terutama berkaitan ketugasan Pemerintah Kalurahan untuk membentuk Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kalurahan, serta menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi RB Kalurahan Tahun 2024- 2027. Berkaitan dengan

Rencana Aksi RB Kalurahan, penting dipahami bahwa selalu terbuka ruang pengakuan atau rekognisi, bahwa setiap Kalurahan mempunyai cara sendiri-sendiri sesuai keragamannya untuk memajukan dirinya. Dengan demikian, Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan tidak mereduksi keragaman itu, namun memberikan standar baku yang bisa dikembangkan oleh setiap Pemerintah Kalurahan.

Disamping juga pembekalan terutama pada materi pengenalan aplikasi SINKAL menu Kalurahan *Reform Space*. Menu Kalurahan Reform Space yang disampaikan pada bimbingan teknis yakni (1) asesmen yang merupakan basis bagi Kalurahan menyusun rencana aksi; dan (2) menu rencana aksi, yang meliputi menu input rencana aksi tahun 2024-2027, dan menu rencana aksi tindak lanjut untuk perubahan atau penambahan rencana aksi oleh Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kalurahan. *Output* yang diharapkan sebagai hasil pelaksanaan bimbingan teknis yakni 392 Kalurahan telah melakukan input Rencana Aksi RB Kalurahan tahun 2024-2027 pada aplikasi SINKAL.

- g. Penyusunan Kajian Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Tujuan penyusunan kajian antara lain: (1) Memberikan arah kebijakan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan di DIY; dan (2) Peningkatan kualitas implementasi peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten, maupun oleh Pemerintah Kalurahan. Disamping penyusunan standar kompetensi, perlu dirumuskan pula jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh aparatur Pemerintahan Kalurahan dalam meningkatkan kecakapan pelaksanaan tugas jabatannya.

Hasil penyusunan Kajian Pedoman Pengembangan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan menghasilkan keluaran dokumen yang memuat kajian penyusunan standar kompetensi,

pemetaan kebutuhan pelatihan, dan penyusunan materi profiling dan penilaian kompetensi.

h. Penyusunan *Roadmap* dan Petunjuk Teknis

Paralel dengan penyusunan Pergub 40 tahun 2023, maka juga dibahas terkait petunjuk teknis pelaksanaannya, yang dimaksudkan akan lahir secara berurutan sebagai langkah akselerasi pelaksanaannya. Pada 16 Maret 2023 bertempat di Ruang Rapat Srawung Praja Lantai 1 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, dilaksanakan pembahasan antar pimpinan terhadap rancangan Peraturan Gubernur tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 yang disinkronkan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027. Rancangan kemudian bergulir sampai pada dokumen petunjuk teknis pada bulan November 2023. Selain itu, Pemda DIY melalui Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY pada akhir tahun 2023 juga telah memfasilitasi penyusunan Petunjuk Teknis RPMKal serta diseminasi Petunjuk Teknis kepada Tim Reformasi Kalurahan tingkat DIY, Tim Reformasi Kalurahan tingkat kabupaten, dan *stakeholder* terkait.

i. Pembentukan Tim Reformasi Kalurahan di Kabupaten serta Kalurahan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan di Tingkat kabupaten segera dibentuk tim Fasilitasi Reformasi Kalurahan yang terdiri atas perangkat daerah di bidang perencanaan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan, pengawasan, hukum, organisasi, serta kapanewon.

j. Penetapan Nama Personalia Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan {emerintah Daerah DIY berdasarkan Keputusan Sekretaris DIY Nomor 71/SEKD/XII/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/SEKDA/XI2023 tentang Nama Personalia Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Pemerintah Daerah DIY.

- k. Penandatanganan komitmen bersama oleh antara Gubernur DIY dan 4 (empat) Bupati, diketahui oleh para Menteri atau yang mewakili. Komitmen bersama tersebut berisi:
- 1) Mendukung pelaksanaan agenda Reformasi Kalurahan;
 - 2) Mengimplementasikan kewajiban dan hak dalam Penyelenggaraan Reformasi Kalurahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 3) Bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Reformasi Kalurahan;
 - 4) Mendorong kemandirian kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan.
- l. Penyusunan Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Petunjuk Teknis Reformasi Pemberdayaan Masyarakat.
- m. Surat mengenai pelaksanaan reformasi kalurahan tahun 2023 tanggal 21 November dengan nomor surat 140/13184 yang ditujukan pada empat kabupaten yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Adapun dalam surat tersebut berisi amanat untuk:
- 1) Membentuk tim reformasi kalurahan pada tingkat kabupaten
 - 2) Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, asistensi, fasilitasi, dan pemantauan penerapan Reformasi Birokrasi Kalurahan pada seluruh Pemerintah Kalurahan
 - 3) Pemerintah kabupaten melalui Kapanewon untuk melaksanakan asesmen awal untuk memetakan kondisi awal tata kelola Pemerintah Kalurahan yang ada di wilayahnya melalui aplikasi SINKAL (menu Klaurahan Reform Space). Hasil asesmen awal digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun rencana aksi.
 - 4) Menugaskan pada seluruh Lurah untuk membentuk Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan sesuai pasal 6 dalam Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023

- 5) Menugaskan pada seluruh Lurah melaksanakan penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi Kalurahan untuk periode 2024 - 2027 melalui aplikasi SINKAL menu Kalurahan Reform Space.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum adanya kesepakatan antara unsur tim pelaksana Reformasi Kalurahan tingkat Kabupaten dengan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan DIY. Sampai akhir 2023, baru Kabupaten Kulon Progo yang sudah membentuk Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten.
- 2) Kurangnya sosialisasi serta internalisasi terhadap konsep serta petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Kalurahan pada seluruh tingkatan pemerintahan.
- 3) Belum meratanya pembentukan Tim Fasilitasi reformasi Kalurahan pada level Pemerintahan Kabupaten sampai dengan Pemerintahan Kalurahan.
- 4) Belum ada tata laksana terhadap perencanaan dan penganggaran untuk aktivitas penunjang Reformasi Kalurahan bagi semua OPD baik di provinsi, Kabupaten, maupun Kalurahan.
- 5) Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dilaksanakan di 3 level pemerintahan, yaitu Level Pemerintah Daerah DIY, Level Pemerintah Kabupaten, dan Level Pemerintah Kalurahan. Sementara itu 5 kegiatan utama di Level Pemerintah Daerah DIY dan Level Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga membutuhkan koordinasi yang intensif.

b. Solusi

- 1) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan DIY sesuai ketugasannya berupaya melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi secara intensif terkait pembentukan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten.

- 2) Melakukan sosialisasi dan internalisasi pada setiap tingkatan pemerintahan dengan menghadirkan pemateri dari Bappeda, Paniradya Kaistimewan, Biro Tata Pemerintahan serta Biro Bina Pemebredayaan Masyarakat.
- 3) Melakukan koordinasi dan supervisi kepada Pemerintah Kabupaten dalam pembentukan Tim Fasilitasi Reformasi Kalurahan.
- 4) Memmbuat prosedur atau tata laksana perencanaan dan penganggaran dengan jelas dan segera menginformasikan kepada seluruh pelaksana reformasi Kalurahan
- 5) **Diperlukan agenda koordinasi yang intensif antar *stakeholder* pada setiap level pemerintahan maupun antar level pemerintahan. Selain itu diperlukan Kolaborasi pendanaan di setiap level pemerintahan, pendampingan yang optimal kepada pemerintah kalurahan serta pelibatan unsur akademisi, swasta, dan masyarakat dalam rangka implementasi RPMKal.**



Gambar 6.23. Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

M. PEMBINAAN KAWASAN PERBATASAN

1. Latar Belakang

Pengelolaan wilayah perbatasan merupakan tantangan yang dialami oleh pemerintah pada berbagai level. Salah satu tantangan tersebut adalah wilayah perbatasan sering terabaikan dan tidak menjadi fokus pembangunan, hal ini menyebabkan wilayah perbatasan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan dianggap penting untuk mempertegas tanggung jawab pembangunan serta pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan, pembangunan wilayah perbatasan merupakan suatu strategi pengembangan wilayah yang mencakup pengembangan, pemberdayaan, dan peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum, serta fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terpadu.

2. Progres Pelaksanaan

a. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di wilayah perbatasan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY meliputi:

- 1) Penyaluran Beasiswa Kartu Cerdas dan Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus bagi peserta didik jenjang SMA, SMK, dan SLB swasta maupun negeri yang berasal dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiayaan transportasi, perlengkapan sekolah, dan praktik industri khusus bagi siswa SMK. Sebaran penerimaan Beasiswa Kartu Cerdas dan Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus bagi siswa di satuan pendidikan wilayah perbatasan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 6.19. Jumlah Penerima Beasiswa Kartu Cerdas SMA dan SMK di Wilayah Perbatasan

Kabupaten	Kapanewon	Penerima Beasiswa Kartu Cerdas		Penerima Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus
		SMA	SMK	
Kulon Progo	Temon	80	170	-
	Kokap	70	71	31
	Girimulyo	108	35	-
	Samigaluh	31	116	-
	Kalibawang	128	38	50
Sleman	Tempel	36	195	140
	Turi	46	22	46
	Pakem	48	112	124
	Cangkringan	48	222	20
	Ngemplak	124	-	28
	Kalasan	140	16	82
	Prambanan	106	74	83
	Gedangsari	-	189	-
	Ngawen	63	146	46
Gunungkidul	Semin	158	57	59
	Ponjong	66	223	67
	Rongkop	156	131	79
	Girisubo	-	33	-
Total		1.408	1.850	855

Sumber: Disdikpora DIY, 2024

Jumlah penerima Beasiswa Kartu Cerdas SMA dan SMK di DIY pada tahun 2023 adalah sebanyak 6.500 siswa SMA dan 8.000 siswa SMK, dengan demikian sebanyak 21,66% Beasiswa Kartu Cerdas SMA dan 23,13% Beasiswa Kartu Cerdas SMK telah disalurkan bagi para siswa di satuan pendidikan jenjang menengah di wilayah perbatasan. Jumlah penerima Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus SLB di DIY pada tahun 2023 adalah sebanyak 5.054 siswa, dengan demikian sebanyak 16,92% Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus SLB telah disalurkan bagi para siswa di satuan pendidikan khusus di wilayah perbatasan. Diharapkan penyaluran beasiswa ini dapat mengurangi beban ekonomi orangtua siswa yang kurang mampu sehingga siswa tetap dapat menuntaskan pendidikan.

- 2) Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, seleksi penerimaan peserta didik baru di DIY dapat dilakukan melalui jalur Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan maksud memberikan layanan pendidikan yang merata bagi para calon peserta didik pada satuan pendidikan SMA negeri dan SMK negeri di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Pada PPDB tahun 2023, kerjasama ini dilakukan melalui Nota Kesepakatan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY tentang Penetapan Zonasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Ajaran 2023/2024. Dalam Nota Kesepakatan ini Pemda DIY bertanggung jawab untuk memberikan layanan PPDB wilayah perbatasan bagi calon peserta didik dari Provinsi Jawa Tengah dan sebaliknya, sehingga calon siswa yang berdomisili di wilayah perbatasan tetap dapat mengikuti PPDB jalur seleksi zonasi. Berdasarkan seleksi PPDB ini diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6.20. Jumlah Siswa Domisili Wilayah Perbatasan Jawa Tengah yang Diterima

Kabupaten	Kapanewon	Siswa Domisili Jawa Tengah yang Diterima di DIY	
		SMA	SMK
Kulon Progo	Temon	13	3
	Kokap	1	4
	Girimulyo	3	68
	Samigaluh	-	37
	Kalibawang	-	-
Sleman	Tempel	17	-
	Turi	-	-
	Pakem	2	-

Kabupaten	Kapanewon	Siswa Domisili Jawa Tengah yang Diterima di DIY	
		SMA	SMK
Gunungkidul	Cangkringan	5	-
	Ngemplak	3	-
	Kalasan	17	-
	Prambanan	6	-
	Gedangsari	-	64
	Ngawen	-	141
	Semin	-	-
	Ponjong	-	22
	Rongkop	5	-
	Girisubo	-	2
Total		72	341

Sumber: Disdikpora DIY, 2024

- 3) Salah satu upaya peningkatan akses dan penjaminan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. Pada tahun 2023 dilakukan pembangunan, rehabilitasi, dan penyediaan peralatan praktik siswa melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan bagi satuan pendidikan yang berada pada wilayah perbatasan, antara lain:

Tabel 6.21. Data Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kabupaten	Kapanewon	Keterangan
Gunungkidul	Ponjong	SMA Muhammadiyah Ponjong berupa pembangunan ruang laboratorium, rehabilitasi ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, perpustakaan, ruang Bimbingan Konseling, dan jamban
	Semin	SMK Muhammadiyah Semin memperoleh peralatan praktik
	Girisubo	SMKN 1 Girisubo memperoleh peralatan praktik
	Ngawen	SMKN 1 Ngawen memperoleh peralatan praktik
	Rongkop	SMK Muhammadiyah Rongkop berupa rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, laboratorium, dan ruang ibadah
	Kalibawang	SMAN 1 Kalibawang berupa pembangunan ruang OSIS, rehabilitasi ruang kelas dan jamban
Kulon Progo	Temon	SMKN 1 Temon berupa pembangunan ruang laboratorium

Kabupaten	Kapanewon	Keterangan
Sleman	Cangkringan	SMKN 1 Cangkringan berupa pembangunan ruang praktik siswa, laboratorium, ruang OSIS, dan jamban. SMKN 1 Cangkringan juga memperoleh peralatan praktik
	Pakem	SLBN 1 Sleman berupa pembangunan ruang pembelajaran khusus dan jamban. SLBN 1 Sleman juga memperoleh peralatan praktik
	Turi	SMK Muhammadiyah Turi memperoleh peralatan praktik bagi siswa
	Ngemplak	SLBN 1 Marganingsih memperoleh peralatan praktik

Sumber: Disdikpora DIY, 2024

b. Urusan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diselenggarakan secara menyeluruh di wilayah DIY, termasuk 18 kapanewon yang berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah. Penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan dilaksanakan secara komprehensif dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Akses pelayanan Kesehatan cukup memadai dan terjangkau dengan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) primer maupun rujukan di wilayah perbatasan. Terdapat 7 unit Rumah Sakit, 28 unit Puskesmas, 90 unit Puskesmas pembantu, dan 8 unit klinik umum. Seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas di wilayah perbatasan sudah terakreditasi, sehingga mutu pelayanannya terstandar. Mutu pelayanan kesehatan akan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang cukup dan kompeten. Dari sisi pembiayaan kesehatan lebih dari 99% masyarakat di wilayah perbatasan telah tercover jaminan Kesehatan. Berikut adalah daftar fasyankes di wilayah perbatasan:

Tabel 6.22. Daftar Fasyankes di Wilayah Perbatasan

No.	Kab./Kapanewon	Nama Puskesmas	Jumlah Pustu
Kab Kulon Progo			
1	Temon	Puskesmas Temon I dan II	5
2	Kokap	Puskesmas Kokap I dan II	7
3	Girimulyo	Puskesmas Girimulyo I dan II	3
4	Kalibawang	Puskesmas Kalibawang	6
5	Samigaluh	Puskesmas Samigaluh I dan II	6
Kab Gunungkidul			

No.	Kab./Kapanewon	Nama Puskesmas	Jumlah Pustu
6	Rongkop	UPT Puskesmas Rongkop	5
7	Girisubo	Puskesmas Girisubo	6
8	Ponjong	Puskesmas Ponjong I dan II	9
9	Gedangsari	Puskesmas Gedangsari I dan II	5
10	Ngawen	Puskesmas Ngawen I dan II	5
11	Semin	UPT Pusesmas Semin I dan II	7
	Kab Sleman		
12	Prambanan	Puskesmas Prambanan	4
13	Kalasan	Puskesmas Kalasan	2
14	Ngemplak	Puskesmas Ngemplak I dan II	1
15	Tempel	Puskesmas Tempel I dan II	2
16	Turi	Puskesmas Turi	3
17	Pakem	Puskesmas Pakem	4
18	Cangkringan	Puskesmas Cangkringan	4
Jumlah		28 Puskesmas	90 Pustu

Sumber: Dinkes DIY, 2024

c. **Urusan Pekerjaan Umum**

Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah pada pusat-pusat produksi sangat diperlukan penyediaan aksesibilitas jalan terutama yang ada di wilayah perbatasan. Dalam rangka pemenuhan tersebut, Pemda DIY pada tahun 2023 ini melakukan penanganan terhadap ruas jalan di wilayah perbatasan sebagai berikut:

Tabel 6.23. Penanganan Ruas Jalan di Wilayah Perbatasan pada tahun 2023

Ruas Jalan	Lokasi Wiltas	Penanganan
Prambanan – Gayamharjo	Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman	Pembangunan Jalan Baru sepanjang 1.275 km
Dekso – Samigaluh- Pagerharjo	Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo	Rehabilitasi Jalan

Sumber: DPUP ESDM DIY, 2024

Adapun untuk kondisi eksisting ruas jalan di wilayah perbatasan dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut:

Tabel 6.24. Kondisi Jalan Eksisting di Wilayah Perbatasan DIY tahun 2023

Nama Ruas Jalan	Volume		Kondisi Jalan	Lokasi Perbatasan	
	Panjang (km)	Lebar Rerata (m)		Prov. DIY	Prov. JATENG
Nanggulan-Tegalsari	11,75	5,80	Sedang-Rusak Ringan	Kec. Girimulyo (Kulon Progo)	Kec. Kaligesing (Purworejo)
Dekso-Samigaluh-Pagerharjo	9,75	5,80	Sedang-Rusak Ringan	Kec. Samigaluh (Kulon Progo)	Kec. Loano (Purworejo)
Dekso-Klangon	11,38	7,00	Baik	Kec. Kalibawang (Kulon Progo)	Kec. Ngluwar (Magelang)
Tangisan-Blaburan	0,90	5,50	Rusak Ringan-Rusak Berat	Kec. Tempel (Sleman)	Kec. Ngluwar (Magelang)
Korulon-Joholanang	1,90	6,00	Baik	Kec. Ngemplak (Sleman)	Kec. Manisrenggo (Klaten)
Hargomulyo-Watugajah	3,70	6,00	Sedang	Kec. Gedang Sari (GK)	Kec. Gantiwarno (Klaten)
Semin-Bulu	8,41	6,20	Baik-Sedang	Kec. Ngawen (GK)	Kec. Cawas (Klaten)
Pandanan-Candirejo	3,47	6,50	Baik	Kec. Semin (GK)	Kec. Weru (Sukoharjo)
Semin-Blimbing	5,68	6,00	Baik-Sedang-Rusak Ringan	Kec. Semin (GK)	Kec. Manyaran (Wonogiri)
Ponjong-Tambakromo	9,50	6,00	Sedang	Kec. Ponjong (GK)	Kec. Erokomo (Wonogiri)
Bedoyo-Pracimantoro	1,90	6,00	Sedang	Kec. Ponjong (GK)	Kec. Pracimantoro (Wonogiri)

d. Permasalahan

Pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan juga menemui permasalahan dan kendala, berikut adalah beberapa permasalahan yang terjadi:

- 1) Kematian ibu dan bayi, tingginya prevalensi balita *stunting* dan gizi buruk, penyakit menular maupun penyakit tidak menular serta potensi bencana dan kejadian luar biasa masih menjadi permasalahan urusan kesehatan di DIY termasuk di wilayah perbatasan.
- 2) Belum optimalnya puskesmas pembantu sebagai layanan primer terintegrasi, hal ini disebabkan kurangnya tenaga kesehatan bidan dan perawat dan dukungan sarana prasarana lainnya.
- 3) Masih ada beberapa masyarakat yang belum memahami bahwa dirinya memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan ada beberapa peserta JKN yang tidak aktif namun belum memahami bagaimana untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya.
- 4) Kerawanan terhadap lalu lintas ternak berisiko terhadap zoonotic, dan masyarakat yang bekerja mencari pakan ternak di luar wilayah juga berisiko terhadap penyakit leptospirosis, malaria, dan gigitan hewan penular rabies.
- 5) Kerusakan struktur bawah Jembatan Baging (lantai jembatan dan abutment) pada Ruas Jalan Dekso-Samigaluh-Pagerharjo yang berada di Kapanewon Samigaluh – Perbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
- 6) Ruas Jalan Hargomulyo-Watugajah yang memiliki alinyemen vertikal dan horizontal yang cukup ekstrim sehingga berdampak pada kenyamanan dan keamanan pengguna jalan yang berada di Kapanewon Gedangsari-Perbatasan dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

e. Solusi

Berikut adalah beberapa solusi yang sudah ditempuh sebagai upaya penyelesaian permasalahan pembangunan wilayah perbatasan:

- 1) Angka kematian ibu telah mengalami penurunan sangat signifikan, hal ini tak lepas dari keberhasilan dari upaya strategis yang telah dilakukan untuk menekan angka kematian ibu diantaranya adalah terbentuknya jejaring kerja *pentahelix* dalam Audit Maternal

Perinatal Surveilans Respon (AMPSR), kemitraan dengan institusi perguruan tinggi dalam pendampingan ibu hamil, serta Implementasi manual rujukan sesuai Peraturan Gubernur DIY nomor 63 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur DIY nomor 59 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan. Kasus kematian bayi pada tahun 2022 sebanyak 303 kasus, dan pada tahun 2023 turun menjadi 274 kasus. Prevalensi *stunting* pada tahun 2020 sebesar 20,1% turun menjadi 17,3% pada tahun 2021 dan kembali turun menjadi 16,4% pada tahun 2022. Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY pada tahun 2022 sebesar 10,39%, pada tahun 2023 jumlah balita gizi kurang turun menjadi 8,290 balita. Upaya pengendalian Angka Penyakit Menular dan Tidak Menular (PTM) di DIY mengedepankan program promotif preventif dengan mendorong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Skrining atau deteksi dini secara masif dan terpadu terus dilakukan untuk 14 (empat belas) penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer dengan merevitalisasi jaringan dan standardisasi pelayanan di Puskesmas, Posyandu, kunjungan rumah, dan pengembangan laboratorium kesehatan masyarakat. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan sekunder dan tersier dengan pengembangan jejaring pengampuan 6 layanan unggulan (kanker, jantung, stroke, ginjal, KIA), meningkatkan kecukupan dan kualitas SDM kesehatan, serta meningkatkan ketersediaan obat dan alat Kesehatan. Koordinasi dan kerja sama lintas wilayah dan lintas sektor terus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kejadian luar biasa penyakit menular, juga kesiapsiagaan bencana dengan penguatan sistem kegawatdaruratan terpadu.

- 2) Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan sarana prasarana dan SDM kesehatan antara lain: dukungan untuk mendapatkan penganggaran melalui dana alokasi khusus untuk rehab puskesmas dan puskesmas pembantu, sarana prasarana, serta pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif serta dengan optimalisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
- 3) Jaminan pembiayaan kesehatan telah meng-cover lebih dari 99% masyarakat di wilayah DIY. Penyediaan anggaran penyangga melalui Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial untuk pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat kurang mampu yang belum dapat mengakses jaminan Kesehatan dan bantuan pembiayaan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas di wilayah DIY.
- 4) Upaya yang dilaksanakan dalam penanganan penyakit zoonotic di wilayah perbatasan antara lain: pemeriksaan Rapid Diagnostic Test (RDT) malaria, pemetaan reseptif malaria, Penyelidikan Epidemiologi (PE) kasus, survei rodent (leptospirosis), dibuat pedoman antrax untuk DIY dengan melibatkan SKPD terkait.
- 5) Telah dilakukan penanganan berupa perencanaan (DED), penggantian jembatan dan pengawasannya dengan sumber Dana APBD DIY 2023 yang termuat dalam Sub Kegiatan: Rehabilitas Jalan dengan pagu anggaran Rp2.800.000.000. Lingkup pekerjaan berupa penggantian struktur bawah jembatan, pelebaran jembatan, pembangunan dinding penahan tanah serta overlay pada oprit jembatan.
- 6) Pada tahun 2018 telah dilakukan *Feasibility Study* dilanjutkan penyusunan DED pada tahun 2020 dan pada tahun 2023 melalui Dana Keistimewaan DIY dilakukan pembebasan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan dan penyusunan Dokumen Lingkungan melalui Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang SRS Karst Gunung Sewu. Pada Tahun 2024 diusulkan untuk dilaksanakan pekerjaan pembangunan jalan pengganti

N. LAPORAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

1. Latar Belakang

Pembangunan berperspektif gender menjadi agenda penting untuk memastikan pemenuhan hak semua warga negara atas pembangunan tanpa kecuali. Jaminan keadilan dan kesetaraan gender dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusi ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Target Kesetaraan Gender (SDGs 5) adalah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Diskriminasi dan ketidaksetaraan berbasis gender masih menjadi akar penyebab kemiskinan, ketimpangan, stunting, kekerasan dan lainnya. Karena kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia, prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat dan merupakan tujuan itu sendiri sehingga mencapai kesetaraan gender di berbagai level menjadi tujuan utama, dan menjadi perhatian dalam hal inisiatif pembangunan. Tujuan kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyerukan secara langsung untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua bidang masyarakat, serta memerangi segala bentuk diskriminasi yang mereka hadapi atas dasar itulah DIY melalui

Peraturan Daerah DIY Nomor 4 tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 14 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender mengatur bagaimana proses ini dilaksanakan. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dimulai dari perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan bahkan inovasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY untuk memastikan semua masyarakat memiliki akses, partisipasi, kontrol dan menerima manfaat.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DIY tahun 2022-2027, kesetaraan gender berperan dalam mendukung visi misi Gubernur dalam mencapai tujuan terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur tujuan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia terutama Indeks Pembangunan Gender di DIY.

2. Progres

Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan dua model pendekatan. Pertama dengan pendekatan *Gender-Integrated Approaches* yaitu pendekatan ini perspektif gender diintegrasikan ke dalam seluruh program dan fungsi yang sedang berjalan. Kedua yakni *Gender-Targeted Approaches* yaitu pendekatan ini intervensi secara khusus menyasar perempuan dan anak perempuan. Pada tahun 2023 Perangkat daerah telah melakukan perencanaan dengan menggunakan *tools gender analysis pathway* yang diturunkan dalam *gender budget statement* atau pernyataan anggaran gender. Ini menandai komitmen Pemda DIY didalam upaya mengarusutamakan gender melalui anggaran responsive gender serta pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan. Komitmen ini dapat dilihat dengan angka indeks ketimpangan gender di DIY yang angkanya paling baik se

Indonesia bahkan diatas angka nasional. Indeks ketimpangan di DIY paling kecil yakni 0,24 lebih rendah dari nasional yakni 0,459. Indeks ini mengukur capaian pembangunan yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dan laki laki dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, isu kesetaraan gender bersinggungan dengan banyak permasalahan seperti kemiskinan, ketimpangan wilayah, bencana alam, stunting dan banyak isu terhadap perempuan berbasis gender. Untuk upaya ini dilakukan secara lintas sektor dengan memastikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengawasan telah dilakukan dengan mengarusutamakan gender. Ditambahkan dengan inovasi pada masing masing perangkat daerah. Pada persoalan yang langsung terkait dengan perlindungan perempuan, Intervensi yang dilakukan salah satunya dengan berdirinya balai perlindungan perempuan dan anak untuk pemenuhan hak korban kekerasan. Didukung dengan layanan reaksi cepat melalui telepon sahabat anak dan keluarga (TESAGA) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Untuk pembiayaan korban kekerasan dilakukan melalui Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial untuk pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat khusus kekerasan berbasis gender.



BAB VII

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah

LKPJ
Gubernur DIY

Tahun

2023

BAB VII

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

2023

A. KERJA SAMA ANTAR DAERAH

1. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Pusat

a. Sinergi Dengan Pemerintah Pusat

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) telah melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat berupa Nota Kesepakatan sebanyak 9 (sembilan) naskah sinergi yang meliputi 8 (delapan) bidang yaitu bidang pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan, perdagangan, komunikasi & informatika, sosial, perikanan dan kelautan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 7.1. Sinergi Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Pusat Tahun 2023

No	Uraian	No /Tanggal	Jangka Waktu
1	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Universitas Jenderal Soedirman tentang Sinergi Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya	119/01061/2023 dan T/300/UN23/HK.06.00/2023, tanggal 03-04-2023	5 tahun
2	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan UGM tentang Sinergi Dalam Peningkatan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Berbagai Aspek	119/01076/2023 dan 3684/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2023, tanggal 04-04-2023	5 tahun
3	Nota Kesepakatan antara Kementerian Perdagangan RI dengan Pemda DIY tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia Aparatur di Bidang Perdagangan	119/7610/2023 dan 95/SJ-DAG/MoU/07/2023, tanggal 06-07-2023	3 tahun

No	Uraian	No /Tanggal	Jangka Waktu
4	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan PKJN RSJ dr. H Marzoeqi Mahdi tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Jiwa	119/7866/2023 dan HK.03.01/D.XXXV/2273/2023, tanggal 12-07-2023	5 tahun
5	Nota Kesepakatan antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Pemda DIY tentang Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana Serta Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Semua Tingkatan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	119/8962/2023 dan 31/KSM/G2/2023, tanggal 08-08-2023	5 tahun
6	Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemda DIY tentang Sinergi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di DIY	01/PSDKP/KKP/NK/IX/2023 dan 119/10045/2023, tanggal 05-09-2023	5 tahun
7	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Data, Informasi dan Infrastruktur Geospasial untuk Pembangunan di Bidang Agraria/Pertanahan dan tata Ruang	119/13806 dan 10/SKB-34.HP/XII/2023, tanggal 07-12-2023	5 tahun
8	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Kejaksaan Tinggi DIY tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	119/04137/2023 dan 17/M.4/Gs/12/2023, tanggal 08-12-2023	B- 5 tahun
9	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY dan UGM tentang Pelayanan Hukum Sistem Informasi Suluh Praja	119/04138/2023; 19/M.4/Gs/12/2023 dan 14328/UN1.P/Dit-KRG/HK.08.00/2023, tanggal 08-12-2023	B- 5 tahun

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

Adapun tindak lanjut dari Nota Kesepakatan yang telah disepakati telah diterbitkan naskah rencana kerja sebanyak 19 naskah yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengurangan Pengangguran, Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan

Bagi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengembangan Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia Aparatur di Bidang Perdagangan Melalui Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023, Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Teknologi pada Kendaraan Tidak Bermotor (Becak Kayuh) dan Pengembangan Prasarana Angkutan Umum, Sinergitas dan Dukungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi di DIY, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY, Sinergitas pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta akselerasi penurunan *stunting*, Penyediaan data pengukuran ketahanan nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sinergi Pelaksanaan Tugas, Fungsi di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Pembangunan dan Pengembangan Pusat Desain Industri Nasional, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Masyarakat di Wilayah DIY dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 7.2. Daftar Rencana Kerja Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Pemda DIY Dengan Pemerintah Pusat Tahun 2023

No	Uraian	Nomor	Tanggal Ditetapkan	Jangka Waktu
1	Rencana Kerja antara Fakultas Filsafat UGM dengan Pemda DIY tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	119/00509/2023	09 Februari 2023	5 tahun
2	Rencana Kerja antara Fakultas Ilmu Budaya UGM dengan Pemda DIY tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	119/00510/2023	09 Februari 2023	5 tahun
3	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Pelaksanaan	119/6461/2023 dan 584/UN62.14/ PKS/2023	06 Juni 2023	5 tahun

No	Uraian	Nomor	Tanggal Ditetapkan	Jangka Waktu
	Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengurangan Pengangguran			
4	Rencana Kerja BPJS Kesehatan dengan Pemda DIY tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	119/01866/2023 dan 319/KTR/VI-08/0623	27 Juni 2023	5 tahun
5	Rencana Kerja antara Kementerian Perdagangan RI dengan Pemda DIY tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia Aparatur di Bidang Perdagangan Melalui Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023	119/02073/2023 dan 110/SJ-DAG/MoU/07/2023	18 Juli 2023	5 tahun
6	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Sekolah Vokasi UGM tentang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	119/02097/2023 dan 186/UN1.SV/HK/2023	21 Juli 2023	5 tahun
7	Rencana Kerja Pemda DIY dengan UGM tentang Pengembangan Teknologi pada Kendaraan Tidak Bermotor (Becak Kayuh) dan Pengembangan Prasarana Angkutan Umum	119/02116/2023 dan 1182407/UN1/FTK/III/HK.08.00/2023	24 Juli 2023	5 tahun
8	Rencana Kerja antara Komisi Pemilihan Umum DIY dan Pemda DIY tentang Sinergitas dan Dukungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi di DIY	2/PR.08-PKS/34/3/2023 dan 119/02846/2023	18 September 2023	5 tahun
9	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Gadjah Mada tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY	119/08354 dan 664/UN1/PERPUS/Set.Perpus/HK.08.00/2023	19 September 2023	5 tahun
10	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY	119/08355 dan 257/IT4.8/KS/2023	19 September 2023	5 tahun

No	Uraian	Nomor	Tanggal Ditetapkan	Jangka Waktu
11	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY	119/08356 dan 79/UN.34.31/TU/2023	19 September 2023	5 tahun
12	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY	119/08358 dan B-4468/Un.02/L1/PL.14.01/09/2023	19 September 2023	5 tahun
13	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY	119/08360 dan 050/UN62/HK.07.00/2023	19 September 2023	5 tahun
14	Rencana Kerja antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Pemda DIY tentang Sinergitas pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta akselerasi penurunan <i>stunting</i>	5881/HK.03/J.4/2023 dan 119/03087/2023	09 Oktober 2023	5 tahun
15	Adendum Rencana Kerja antara Kementerian Perdagangan RI dengan Pemda DIY tentang adendum rencana kerja nomor 110/SJ-DAG/MoU/07/2023 dan 119/02073/2023 tentang pengembangan kompetensi bagi sumber daya manusia aparatur di bidang perdagangan melalui penyelenggaraan pelatihan aparatur di bidang perdagangan tahun anggaran 2023	150/SJ-DAG/MoU/10/2023 dan 119/03211/2023	18 Oktober 2023	31 Desember 2023
16	Rencana Kerja antara Lembaga Ketahanan Nasional RI dan Pemda DIY tentang Penyediaan data pengukuran ketahanan nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta	PKS/127/X/2023 dan 119/03254/2023	20 Oktober 2023	5 tahun
17	Rencana Kerja antara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas, Fungsi di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	119/03529/2023	13 November 2023	5 tahun

No	Uraian	Nomor	Tanggal Ditetapkan	Jangka Waktu
18	Adendum Rencana Kerja antara Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian dengan Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta tentang Program Pembangunan dan Pengembangan Pusat Desain Industri Nasional	119/03718/2023	22 November 2023	3 tahun
19	Rencana Kerja antara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Masyarakat di Wilayah DIY	RK/3/XI/2023 dan 119/13437/2023	28 November 2023	5 tahun

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

2. Kerja Sama Antar-Daerah

a. Daerah yang Melakukan Kerja Sama

Kerja sama antar daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 yaitu 1 (satu) Kesepakatan Bersama dan 5 (lima) Perjanjian Kerja Sama. Kesepakatan Bersama tersebut yaitu antara Gubernur DIY dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan untuk Perjanjian Kerja Sama yaitu antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi sebagai berikut:

Tabel 7.3. Kerja sama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2023

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tgl Ditetapkan	Jangka Waktu
1	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemda DIY tentang Penilaian Angka Kredit Perencana Pada Pemerintah Kabupaten Bantul	119/00117/2023 dan 01/PK/Bt/2023	09 Januari 2023	1 tahun

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tgl Ditetapkan	Jangka Waktu
	Oleh Tim Penilai Angka Kredit Perencana Pemerintah Daerah DIY			
2	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemkab Kulon Progo, Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Sleman, Pemkot Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu <i>Jogja Library For All</i> di DIY	041/04304; 59/041/V/2023; 14.1/PK/Bt/2023; 000.4.7.2/0399; 35/PK.KDH/D/2023; 11/MOU/DPK/2023	04 Mei 2023	5 tahun
3	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peningkatan Penanaman Modal	119/04413 dan 1784/HK.03.01/DPM PTSP	19 Juni 2023	5 tahun
4	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Andon Penangkapan Ikan	527/3696 dan 3612/IT.01.01/PT	20 Juni 2023	5 tahun
5	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemda DIY tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah	119/8445/2023 dan 013/KSB/OTDA/I/202 3	25 Juli 2023	5 tahun
6	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di DIY	119/03960/2023; 5/PKS.YK/TMT.07/NO P/2023; 37/PK/Bt/2023; 364/814/BPBD.KP/XI/ 2023; 134.1.1/PK/29/2023 dan 178/PK.KDH/D/2023	27 November 2023	5 tahun

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

b. Bidang Kerja sama

Bidang-bidang yang dikerjasamakan oleh Pemda DIY pada tahun 2023 yaitu:

- 1) Pembangunan Daerah;
- 2) Pendidikan;

- 3) Kesehatan;
- 4) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- 5) Koperasi dan UKM;
- 6) Perdagangan;
- 7) Sumber Daya Masyarakat;
- 8) Pemberdayaan Masyarakat;
- 9) Kelautan dan Perikanan;
- 10) Lingkungan Hidup;
- 11) Pariwisata;
- 12) Teknologi Transportasi;
- 13) Politik;
- 14) Sosial;
- 15) Budaya;
- 16) Ekonomi;
- 17) Komunikasi & Informatika.

c. Mitra Praja Utama (MPU)

Mitra Praja Utama berawal dari pembentukan forum silaturahmi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam wadah “Dwi Praja” yang dibentuk pada tahun 1988, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama melalui kemitraan. Pada tahun 1990 Provinsi Jawa Tengah bergabung sebagai anggota sehingga namanya berubah menjadi “Tri Praja”.

Forum ini kemudian berkembang menjadi jalinan kerja sama 6 provinsi se-Jawa dan Bali dan bernama “Sad Praja Utama”. Sad Praja berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata sad yang berarti enam, praja berarti pemerintahan, utama yang utama atau peringkat satu. Sad Praja Utama merupakan forum kerja sama enam Pemerintah Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali untuk menangani masalah-masalah pembangunan di provinsi se-Jawa dan Bali.

Dalam Rapat Kerja Sad Praja Utama IX yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 April 2000 telah ditetapkan bahwa Provinsi Lampung secara resmi diterima menjadi anggota baru Sad Praja Utama, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Gubernur se-Jawa, Bali dan Lampung Nomor 01/SK/MPU/2001 tanggal 13 Oktober 2001. Sejalan dengan penambahan anggota baru, maka nomenklatur Sad Praja Utama berubah menjadi Mitra Praja Utama, yang sekaligus memberikan peluang kepada provinsi lain untuk masuk menjadi anggota Mitra Praja Utama (MPU).

Provinsi lain yang kemudian menjadi anggota Mitra Praja Utama adalah Provinsi Banten, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sehingga saat ini anggota Mitra Praja Utama seluruhnya berjumlah 10 provinsi.

Maksud dari forum kerja sama Mitra Praja Utama adalah untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antar Daerah, dan tujuan dari forum kerja sama Mitra Praja Utama adalah untuk mensinergikan:

- 1) Potensi sumber daya alam unggulan antar Daerah;
- 2) Potensi dan peluang ekonomis antar Daerah;
- 3) Potensi sumber daya manusia non alami;
- 4) Penelitian, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal potensi antar Daerah; dan
- 5) Pemecahan berbagai masalah yang dianggap penting antar Daerah.

Pada tanggal 16 Maret 2023 dilaksanakan Rapat Kerja Gubernur FKD MPU XXIII Tahun 2023 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Jadwal pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur dan Rapat Gabungan FKD MPU Tahun 2024 – 2028 sebagai berikut:
 - a) Rapat Kerja Gubernur tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta;
 - b) Rapat Gabungan tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat;
 - c) Rapat Kerja Gubernur tahun 2025 di Provinsi Bali;
 - d) Rapat Gabungan tahun 2025 di Nusa Tenggara Timur;

- e) Rapat Kerja Gubernur tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah;
 - f) Rapat Gabungan tahun 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - g) Rapat Kerja Gubernur tahun 2027 di Nusa Tenggara Barat;
 - h) Rapat Gabungan tahun 2027 di Banten;
 - i) Rapat Kerja Gubernur tahun 2028 di Lampung;
 - j) Rapat Gabungan tahun 2028 di Provinsi Jawa Timur.
- 2) Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kerja sama antar Provinsi perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, untuk itu perlu disiapkan instrumen evaluasi PKS untuk menjadi acuan Pemerintah Provinsi Anggota FKD MPU;
 - 3) Masing-masing Pemerintah Provinsi Anggota MPU melakukan pemetaan kerja sama sesuai kewenangannya dan hasilnya disampaikan kepada Sekber MPU untuk dilakukan identifikasi kerja sama daerah yang dapat difasilitasi FKD –MPU ke tahun depan;
 - 4) Pemerintah Daerah anggota FKD MPU memasukan program prioritas yang telah ditetapkan melalui Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dapat terimplementasi pada Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing Pemerintah. Sehingga kedepannya sinkronisasi dan sinergi dapat terbangun dalam mengatasi permasalahan kawasan;
 - 5) Sekretariat Bersama FKD MPU menginisiasi penyusunan rencana program jangka menenga dan jangka panjang FKD MPU melalui penyesuaian dengan visi Gubernur Anggota FKD MPU dan atau RPD Provinsi yang selanjutnya menjadi acuan perumusan dan pembahasan kerja sama kawasan guna mendukung kinerja Pemerintah Daerah;
 - 6) Sekretariat Bersama FKD MPU agar menyusun agenda rapat rutin dengan Kementerian terkait untuk membahas isu-isu terkini sebagai upaya penyelarasan program prioritas yang akan dirumuskan dalam FKD MPU;
 - 7) Dalam rangka akselerasi peranan FKD MPU dalam memfasilitasi kerja sama dibidang sosial dan ekonomi, maka perlu disiapkan:

a) *MPU Data Ware House*

Tujuan *MPU data warehouse* adalah untuk membantu organisasi dalam analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan akses cepat dan mudah ke data yang relevan dan terorganisir dengan baik. Keberadaan data *warehouse* sebagai sistem penyimpanan dan pengelolaan terintegrasi, tidak akan menghapus eksistensi pusat data masing-masing provinsi melainkan melakukan sinergi dan kemudian mengolahnya dan memanfaatkannya menjadi kebutuhan Bersama.

b) *MPU Trading House*

MPU Trading house (MTH) dimaksudkan menjadi sebuah sistem terpadu untuk meningkatkan pemasaran produk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sehingga lebih cepat berkembang dengan pasar yang lebih luas. Trading house merupakan suatu wadah perantara antara produsen dan konsumen dan tidak memproduksi barang karena fungsinya hanya membantu promosikan dan menjual produk milik pihak ketiga (UKM) kepada pembelinya. Melalui trading house tersebut, pelaku UMKM akan terus berkreasi dengan meningkatkan mutu dan kualitas produk, sehingga dapat bersaing dan mampu menembus pasar global. Dengan tersedianya data profil UMKM dimaksud, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak terutama bagi UMKM dalam rangka mempercepat dan mempermudah akses pembiayaan dari perbankan atau non-perbankan.

c) *FSVA (Food Security And Vulnerability Atlas) MPU*

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun dalam upaya menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat,

komprehensif, dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, sehingga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ini diamanahkan dalam UU No 18/2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

- d) *PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Care Center*
Penanganan masalah PPKS tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh provinsi, hal ini karena problematika yang melatarbelakangi PPKS sangat kompleks dan penyebarannya lintas batas wilayah. Sehingga keterlibatan lintas daerah membuat koordinasi penyelesaian masalah PPKS menjadi lebih mudah.

d. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)

Pasal 397 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (3) Perpres No. 91 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa untuk duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah perlu adanya unsur Asosiasi Pemerintahan Daerah, disamping Wakil-Wakil Daerah yang dipilih oleh DPRD. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia sepakat untuk membentuk Asosiasi Pemerintah Provinsi sebagai wadah kerjasama antar Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan otonomi daerah.

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam menjalankan fungsinya berlandaskan pada Konstitusi Negara, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjaga serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam lingkungan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, serta bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, percaya diri kreatif dan bertanggung jawab. Asosiasi ini berperan sebagai wadah interaksi kepemimpinan tingkat nasional yang berkomitmen untuk membangun pemahaman yang sama dan tajam tentang tata kelola Pemerintah Provinsi yang baik, serta memberikan arahan untuk mengoptimalkan potensi daerah untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan.

Pada tahun 2023, APPSI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 5 – 6 November di Jambi dengan tema "*Pemilu Damai, Bersih dan Berintegritas untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*". Substansi pembahas dalam Rakernas Jambi tersebut antara lain terkait perihal Loyalitas ASN; Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilukada; Kerjasama Perdagangan antar daerah; Dana Bagi Hasil; dan Etika Pemerintahan.

3. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

a. Pihak Ketiga/Badan/Swasta yang telah bekerjasama

Pada tahun 2023 Pemda DIY telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/swasta sebanyak 8 (delapan) Kesepakatan Bersama dan 14 (empat belas) Perjanjian Kerja Sama dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 7.4. Rincian Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tgl Ditetapkan	Jangka Waktu
1	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Karang Taruna DIY tentang Pengembangan Potensi Daerah di DIY	119/00508/2023 dan 001/KTDIY-MoU/02/2023	09 Februari 2023	5 tahun
2	Kesepakatan Bersama antara Universitas Siber Asia dengan Pemda DIY tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di DIY	119/00541/2023 dan 013/UNSIAMoU/II/2023	13 Februari 2023	5 tahun

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tgl Ditetapkan	Jangka Waktu
3	Kesepakatan Bersama antara Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah	119/00643/2023 dan 007/UKH/MOU/II/2023	20 Februari 2023	5 tahun
4	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Siber Asia dengan Pemda DIY tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	119/00696/2023	27 Februari 2023	5 tahun
5	Kesepakatan Bersama antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Pemda DIY tentang Pengembangan Potensi Daerah Dalam Mendukung Transisi Energi dan Net Zero Emission	119/00877/2023 dan 0017.MoU/HKM.02.01/F01000000/2023	14 Maret 2023	5 tahun
6	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik (STPKat) Santo Fransiskus Asisi tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	119/00972/2023 dan D.1.2/01/PKS/STPKat/II/2023	24 Maret 2023	5 tahun
7	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik (STPKat) Santo Fransiskus Asisi tentang Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Pendidikan Agama Katolik	119/01204/2023 dan D.1.2/02/PKS/STPKat/II/2023	17 April 2023	5 tahun
8	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Dalam Mendukung Digitalisasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	119/6237 dan JRB.R07.Ar.YOG/0497/2023	16 Mei 2023	5 tahun
9	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta tentang Kerja Sama Peningkatan dan Pengembangan	119/01563/2023 dan 355/MoU/A.1/STIPRA M/V/2023	30 Mei 2023	3 tahun

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tgl Ditetapkan	Jangka Waktu
	Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata DIY pada bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat			
10	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (Ikem)	119/02734/2023 dan 432/Dek-FTI/01/FTI/IX/2023	08 September 2023	5 tahun
11	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Universitas Islam Indonesia tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu <i>Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY</i>	119/08357 dan 168/Dir.Perpus/01/Perpus/IX/2023	19 September 2023	5 tahun
12	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Universitas Sanata Dharma tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu <i>Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY</i>	119/08359 dan 07/PUSD/IX/2023	19 September 2023	5 tahun
13	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu <i>Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY</i>	119/08361 dan 036.B.KEP.STAITJOGJ A.IX.2023	19 September 2023	5 tahun
14	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Kartu Tani	119/03318/2023 dan B.60.RO-JOG/USI/10/2023	24 Oktober 2023	5 tahun
15	Kesepakatan Bersama antara Yayasan Wahana Visi Indonesia dengan Pemda DIY tentang Pendayagunaan Potensi Sumber Daya untuk Pembangunan	230/WVI-Kolaborasi/P/X/2023 dan 119/ 03332 /2023	25 Oktober 2023	5 tahun

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tgl Ditetapkan	Jangka Waktu
16	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tentang Kerja Sama Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta/ <i>The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks</i>	119/03371/2023; 3/KB.YK/WND.22/OK T/2023; 18/MoU/Bt/2023 dan 1020/KHPP/Bakdamu Iud.X/JIMAWAL.1957. 2023	28 Oktober 2023	5 tahun
17	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta <i>The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks</i>	119/03456/2023; 34/PK/Bt/2023;	02 November 2023	5 tahun
18	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan Pemda DIY tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)	032.a/UKH/MOA/XI/ 2023 dan 119/03457/2023	02 November 2023	5 tahun
19	Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan Wahana Visi Indonesia dengan Pemda DIY tentang Program Magang Kolaborasi di Daerah Istimewa Yogyakarta	119/03582/2023 dan 036/B- KBF/MoU/XI/2023	16 November 2023	5 tahun
20	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Kamar Dagang dan Industri DIY tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di tempat kerja	119/03961/2023 dan 212/PKS/K.DIY/XI/20 23	27 November 2023	5 tahun
21	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Dalam Mendukung	119/04212/2023 dan UGM/PKS/049/2023	14 Desember 2023	5 tahun

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tgl Ditetapkan	Jangka Waktu
22	Digitalisasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Regional Office Yogyakarta tentang Optimalisasi Kartu Nelayan di Daerah Istimewa Yogyakarta	119/15538/2023 dan B.73 RO-JOG/MCR/USI/12/2023	21 Desember 2023	5 tahun

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

b. Bidang Kerja Sama

Pada tahun 2023 Pemda DIY melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sejumlah 22 (dua puluh dua) naskah kerja sama. Adapun bidang yang dikerjasamakan yaitu:

- 1) Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengkajian serta Pengembangan SDM;
- 2) Perekonomian;
- 3) Teknologi dan Informasi;
- 4) Pembangunan Daerah;
- 5) Komunikasi dan Informatika;
- 6) Penanaman Modal dan Perizinan;
- 7) Pariwisata;
- 8) Sosial budaya;
- 9) Pemerintahan;
- 10) Sarana dan Prasarana;
- 11) Lingkungan Hidup;
- 12) Koperasi dan UKM.

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sehingga belum bisa diketahui efektivitas kerja sama yang dilaksanakan.
- 2) Kurangnya pemahaman tentang aturan pelaksanaan kerja sama bagi perangkat daerah baik di tingkat DIY/ Kabupaten/ Kota.

b. Solusi

- 1) Pemda melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota sehingga kerja sama yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan.
- 2) Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi TKKSD melalui studi banding, studi tiru, ataupun pelatihan.

B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

DIY merupakan wilayah yang dikenal sebagai tempat yang ramah dan terbuka bagi seluruh kalangan dan lapisan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa DIY merupakan wadah yang baik sebagai percontohan kehidupan yang beragam, multikultural, toleran, dan nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Upaya pembinaan kesatuan dan stabilitas politik yang ada di DIY menjadi modal utama dalam membentuk masyarakat madani dan merupakan suatu *benefit* yang dapat mendukung upaya Pemda DIY dalam mewujudkan DIY sebagai pusat budaya, pendidikan, dan tujuan wisata.

Upaya cipta kondusif wilayah DIY pada tahun 2023 menemui berbagai tantangan, seperti situasi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang hampir bersamaan dengan Hari Buruh; Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

yang diprediksi akan banyak wisatawan masuk ke wilayah DIY; Persiapan pesta Demokrasi menjelang Pemilu 2024 sehingga masa kampanye telah dimulai pada akhir tahun 2023. Beranjak dari hal tersebut, Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mewujudkan situasi kondusif wilayah DIY.

Berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Forkopimda dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan guna menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Forkopimda DIY diketuai oleh Gubernur DIY dan beranggotakan unsur-unsur pimpinan DPRD DIY, TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Negara Daerah, dan Pengadilan Tinggi wilayah DIY.

Melalui pelaksanaan program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial diselenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Agenda sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah Idul Fitri 1444 Hijriah dan Natal Tahun 2023.
- b. Antisipasi gangguan keamanan di DIY jelang Idul Fitri 1444 Hijriah, serta Natal dan Tahun Baru Tahun 2023/2024.
- c. Menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, bahan bakar minyak, LPG, dan stok uang tunai selama perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, serta Natal dan Tahun Baru Tahun 2023/2024.
- d. Kesiapan objek wisata dalam mengelola wisatawan yang masuk saat libur Idul Fitri 1444 Hijriah, serta Natal dan Tahun Baru Tahun 2023/2024.
- e. Menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, serta kelancaran mobilitas warga yang datang dan keluar DIY saat libur Idul Fitri 1444 Hijriah, serta Natal dan Tahun Baru Tahun 2023/2024.

- f. Menjaga stabilitas politik serta berpartisipasi dan berperan aktif pada Pemilu 2024 secara jujur, adil, santun, berbudaya dan bermartabat serta mendukung pelaksanaan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.

Jelang Idul Fitri 2023 juga telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah yang menghasilkan beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Survei potensi pergerakan masyarakat selama masa Lebaran 2023 (1444 H) yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT). Berdasarkan hasil survei tersebut, diprediksi pergerakan masyarakat mencapai 123,8 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 14,2% dari prediksi pergerakan masyarakat saat Lebaran 2022 yang hanya berjumlah 85,5 juta orang (31,6%) dan Tahun 2023 yang tercatat sebanyak 123,8 Juta orang (45,8%). Asal pergerakan masyarakat diprediksi telah didominasi oleh masyarakat dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,5% atau 77,3 juta orang.
- b. Secara umum, kondisi pasokan bahan pokok masyarakat masih aman dan cenderung melimpah; volume permintaan masih stabil pada tingkat distributor; distribusi pasokan dari distributor ataupun *supplier* pun sangat aman sehingga dapat dipastikan keamanan dan ketersediaan pasokan (meski terjadi sedikit kenaikan harga di pasaran namun tidak signifikan sehingga perbedaan harga antar wilayah Kabupaten/Kota masih sangat tipis).
- c. Dalam rangka memastikan kesiapan sektor wisata, khususnya destinasi wisata, industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Pemda DIY menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kepariwisataan untuk:
 - 1) Tetap membudayakan cara hidup bersih, sehat, aman dan penanganan sampah yang baik;
 - 2) Melakukan pemantauan dan pengawasan, khususnya di destinasi wisata yang berpotensi mengalami tingkat kunjungan tinggi, rawan bencana, dan memiliki wahana berisiko (termasuk jeep/kendaraan wisata);

- 3) Selalu menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pihak terkait dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.

Rapat koordinasi Forkopimda DIY dalam Deklarasi Pemilu Damai 2024 menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

- a. Seluruh pihak yang terkait dalam Pemilu Serentak 2024 di DIY telah menyatakan komitmennya untuk menciptakan Pemilu yang aman dan damai sebagai cerminan DIY dalam menjunjung tinggi prinsip demokrasi.
- b. Agar Pemilu Damai tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan, tetapi sebagai ikhtiar, untuk menciptakan atmosfer yang kondusif. Menjaga kedamaian selama Pemilu adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali.
- c. Perlu terus melakukan koordinasi yang sinergis dengan penyelenggara dan peserta Pemilu untuk memastikan bahwa seluruh elemen yang terlibat berpartisipasi dan berperan aktif pada Pemilu 2024 secara jujur, adil, santun, berbudaya dan bermartabat serta mendukung pelaksanaan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.

Adapun hasil rapat koordinasi Forkopimda DIY Jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, antara lain:

- a. Berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan, wilayah DIY diprediksi akan mengalami lonjakan kedatangan wisatawan dan arus keluar masuk kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru 2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi yang komprehensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait guna memastikan perayaan hari raya dan libur Natal dan Tahun Baru di DIY dapat terselenggara dengan baik, serta berjalan aman dan lancar.
- b. Perlu adanya pengaturan pola *traffic light* untuk mengurangi kepadatan kendaraan di kota, serta rekayasa lalu lintas agar masyarakat yang masuk ke DIY hanya untuk melintasi (tidak tujuan ke Yogyakarta) diarahkan tidak masuk ke kota, bisa melalui Ring Road.

Demikian juga untuk kendaraan yang dari arah Kulon Progo, bisa diarahkan lewat JJLS, untuk mengurangi beban Kota Yogyakarta.

2. Komite Intelijen Daerah (Kominda)

DIY dengan keanekaragaman etnik, suku, budaya, agama, bahasa dan budaya yang ada, tak pelak membuat situasi toleransi menuai beragam tantangan. Benturan budaya antara kelompok agama puritan dan sinkretis telah mempertegas batas-batas sosial dan menimbulkan ketegangan sosial yang pada tingkat ekstrem dapat berujung pada perpecahan serta konflik sosial di masyarakat.

Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di DIY, perlu dilakukan upaya deteksi dini dan cegah dini potensi kerawanan oleh jajaran intelijen. Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagai forum jajaran intelijen dibentuk dengan tujuan meningkatkan optimalisasi koordinasi antar unsur intelijen sehingga tugas dan fungsi intelijen dapat terlaksana dengan baik. Adapun hasil dari Rapat Koordinasi Kominda, sebagai berikut:

- a. Menjamin kepada seluruh masyarakat DIY untuk bisa mengikuti pemilu dengan aman. Pelaksanaan pemilu 2024 dalam perspektif Intelijen memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Berbagai potensi kerawanan Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) tahapan pemilu 2024 yang perlu menjadi atensi yaitu berkembangnya polarisasi politik dan penyampaian isu sara, perang media, dan konflik antar pendukung Papol/Capres tertentu.
- b. Masa kampanye telah dimulai sejak tanggal 28 November 2023, sementara untuk kampanye terbuka baru dimulai pada tanggal 21 Januari 2024. Namun demikian, potensi mobilisasi massa tetap ada sejak tahapan kampanye dimulai. Oleh karena itu, perlu diwaspadai adanya mobilisasi massa yang tidak lepas dari konvoi yang bisa menjadi potensi gesekan antar massa pendukung.

- c. Tanggal 1 Desember 2023 diperingati sebagai Hari Merdeka OPM dan kemudian tanggal 2 Desember 2023 juga ada aksi dari FPI di Monas. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama oleh jajaran pemangku kepentingan karena akan turut menjadi ancaman tersendiri bagi DIY untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas wilayah.

Dari hasil koordinasi kedua forum tersebut, dapat diperoleh beberapa manfaat, antara lain:

- a. Terjadi pembahasan terkait masalah aktual di wilayah DIY yang berpotensi mengancam stabilitas wilayah, baik yang direkomendasikan oleh Kominda maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja di wilayah Pemda DIY, sehingga potensi konflik sosial dapat dideteksi secara dini dan dapat ditemukan solusi pemecahan masalah secara lebih cepat dan akurat.
- b. Terwujudnya fasilitasi hubungan kerja antara Forkopimda dan Kominda dengan Pemda DIY serta hubungan kerja antar instansi di lingkup Pemda DIY.
- c. Diperoleh rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan Daerah terkait kebijakan yang perlu diambil dalam rangka deteksi dini ancaman stabilitas wilayah di DIY.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Forkopimda

1) *Permasalahan*

Beberapa permasalahan aktual kerap muncul di wilayah DIY yang membutuhkan penanganan yang cepat.

2) *Solusi*

Optimalisasi peran Forkopimda untuk penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah secara cepat melalui pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin, yaitu ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, serta pada situasi-situasi

tertentu guna membahas masalah-masalah aktual di wilayah DIY. Selain itu, penyelesaian masalah aktual dengan cepat juga didukung dengan adanya sistem pelaporan ke Forkopimda kabupaten/kota maupun provinsi secara berjenjang serta perluasan jejaring dengan mitra kerja seperti lintas sektor.

b. Kominda

1) Permasalahan

Masih adanya ego sektoral dalam jajaran Kominda DIY yang menyebabkan kurang cepatnya penyampaian informasi terkini terkait perkembangan situasi terkini di daerah.

2) Solusi

Kominda berperan sebagai forum strategis untuk menyampaikan informasi terdepan dalam upaya deteksi dini dan cegah dini potensi konflik di daerah, sehingga perlu adanya penguatan koordinasi dan komunikasi dengan mengesampingkan ego sektoral.

C. PEMBINAAN BATAS DAERAH

1. Gambaran Umum

Pembinaan batas daerah di DIY mencakup serangkaian kegiatan dan upaya untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah secara definitif telah ditetapkan melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dengan lampiran peta skala 1: 100.000. Sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, Pemda DIY bersama dengan Tim Penegasan Batas Provinsi dan Kabupaten telah aktif melakukan proses sinkronisasi garis batas daerah antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini

juga sejalan dengan Kebijakan Satu Peta Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 mengenai Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Hasil dari sinkronisasi garis batas daerah tersebut menjadi dasar untuk menyusun revisi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Batas Daerah. Adapun progres revisi permendagri sebagai berikut:

Tabel 7.5. Progres Pembahasan dan Penelaahan Segmen Batas Wilayah DIY dan Jateng

No	Segmen Batas		Keterangan
	DIY	Jateng	
1.	Kab. Kulon Progo	Kab. Purworejo	Proses pembahasan dan penyusunan draf Permendagri di tingkat pusat (Kemendagri)
2.	Kab. Sleman	Kab. Klaten	Proses pembahasan dan pencermatan di tingkat pusat (Kemendagri)
3.	Kab. Gunungkidul	Kab. Klaten	Proses pembahasan dan penyusunan draf Permendagri di tingkat pusat (Kemendagri)
4.	Kab. Gunungkidul	Kab. Sukoharjo	Usulan revisi telah disampaikan ke Kemendagri pada November 2022
5.	Kab. Gunungkidul	Kab. Wonogiri	Proses pembahasan di daerah
6.	Kab. Kulon Progo	Kab. Magelang	Proses pembahasan di daerah
7.	Kab. Sleman	Kab. Magelang	Proses pembahasan di daerah

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

2. Program dan Kegiatan Pembinaan Batas Wilayah

Pembinaan batas wilayah di DIY mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola wilayah yang baik dan mewujudkan tertib administratif pemerintahan, berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemda DIY selama kurun waktu tahun 2023:

- a. Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan;
- b. Penyusunan Buku dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Pembinaan serta Pengawasan Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan/Kapanewon/Kemantren;
- d. Penyusunan Peta Batas Daerah pada Kawasan Strategis Suroloyo;

- e. Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Batas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah; dan
- f. Sinkronisasi Garis Batas Daerah Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Selain batas luar dengan Provinsi Jawa Tengah, batas antar Kabupaten/Kota di DIY juga sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan skala lampiran peta yang berbeda-beda yaitu 1:40.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:18.000 dan 1:5.000. Dengan skala peta yang masih kecil tersebut menyebabkan area-area tertentu terutama di wilayah strategis dan berpotensi ekonomi ditemukan permasalahan karena batas daerah yang berdasarkan garis pada peta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
- 2) Garis batas yang diatur dalam Permendagri tersebut juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan juga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, pesatnya pembangunan di wilayah perkotaan membuat garis batas pada peta banyak memotong objek bangunan, baik rumah warga atau bangunan lainnya, sehingga diperlukan strategi khusus dalam menyusun peta yang lebih presisi dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
- 3) Dalam pelaksanaan manajemen batas wilayah, sering ditemui kesulitan dalam pengumpulan data dan dokumen pendukung yang berupa peta digital maupun peta cetak.
- 4) Ketidakpastian garis batas menyebabkan masyarakat yang tinggal di sekitar garis batas mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik yang berbasis wilayah, seperti pengurusan dokumen kependudukan, surat izin mendirikan bangunan (IMB), pengajuan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) serta permasalahan berbasis kewilayahan lainnya.

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi dapat diimplementasikan:

1) Pembaruan Peta dengan Skala yang Lebih Besar

Melakukan pembaruan peta batas antar Kabupaten/Kota dengan skala yang lebih besar, misalnya menggunakan skala 1:5.000 atau lebih detail lagi, agar dapat memperjelas garis batas dan menghindari ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan.

2) Teknologi Pemetaan Terkini

Manfaatkan teknologi pemetaan terkini seperti drone, satelit, dan teknologi pemetaan digital lainnya untuk mendapatkan data yang akurat. Hal ini dapat membantu menyusun peta yang lebih presisi dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

3) Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG)

Mengimplementasikan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memudahkan pengolahan data serta pemantauan dan manajemen batas wilayah, SIG tersebut dapat memberikan data yang akurat.

4) Penggunaan Teknologi untuk Layanan Publik

Memanfaatkan teknologi dalam penyediaan layanan publik seperti pengelolaan dokumen kependudukan, surat izin mendirikan bangunan (IMB), dan pengajuan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Dengan demikian, masyarakat tidak terkendala oleh ketidakpastian garis batas.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan ketepatan dan kejelasan batas wilayah, serta mengurangi dampak negatif terhadap akses masyarakat terhadap layanan publik.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Gambaran Umum

Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan bencana. Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik: perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama dalam 3 tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Program yang akan dilaksanakan pada tahap pemulihan ini sangat tergantung pada hasil kajian kerusakan dan kebutuhan serta kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh daerah yang terdampak. ASEAN telah memberikan panduan untuk manajemen pemulihan pascabencana, antara lain diperlukan kesiapan berupa:

- a. Kebijakan dan Perencanaan untuk pemulihan;
- b. Menetapkan kelembagaan yang akan menangani pemulihan
- c. Pengkajian pascabencana (PDNA)
- d. Pengerahan sumber daya dan pembiayaan untuk pemulihan;
- e. Pelaksanaan, koordinasi, komunikasi dan pemantauan

Secara teknis untuk pelaksanaan pemulihan pasca bencana di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh BNPB, yang terakhir adalah Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Paradigma penanganan bencana berubah dari responsif menjadi preventif, untuk menghilangkan atau mengurangi risiko bencana. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

menghadapi bencana. Kegiatan PRB dapat dilakukan secara fisik/struktural maupun non fisik secara terpadu dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemda DIY dalam rangka pengurangan risiko bencana adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Program SPAB tahun 2023 dengan target 5 SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) yang terdiri dari SMA/SMK Negeri dan swasta. Adapun Sekolah yang *dilaunching* pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1. MA Ali Maksum, Krapyak, Bantul; 2. SLB Citra Mulia Mandiri, Kalasan, Sleman; 3. SMKN 6 Yogyakarta; 4. SMAN 2 Yogyakarta; 5. SMA BOPKRI 1 Yogyakarta.
- b. Pembentukan Desa Tangguh Bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Program Desa/Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu program utama BNPB yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dan terus dikembangkan sampai saat ini. Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana di 5 (lima) kalurahan/kelurahan yang tersebar di semua kabupaten/kota di DIY. Adapun Desa/Kalurahannya adalah sebagai berikut: 1. Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman; 2. Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman; 3. Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo; 4. Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, kabupaten Gunungkidul; 5. Kalurahan Giripanggung, Kapanewon tepus, Kabupaten Gunungkidul.

Proses pembentukan Kaltana dilakukan dengan melibatkan fasilitator dari kabupaten. Hasil praktek dan diskusi selama proses dikemas dalam bentuk dokumen. Dokumen yang dihasilkan oleh setiap Kalurahan antara lain; kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, sistem peringatan dini, rencana evakuasi, pembentukan tim relawan, organisasi pengurangan risiko bencana, rencana kontingensi, dan rencana mitigasi.

c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dilaksanakan melalui aktivitas Pelatihan USAR, HKBN dilaksanakan dalam rangka ARDEX 2023 di Bantul pada bulan Agustus, dan Pelatihan DMB yang dilaksanakan selama 5 Hari. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana melalui pelaksanaan pelatihan USAR dimana Tim USAR Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari lintas sektor yang mempunyai skill keterampilan dan kompetensi dalam menangani keadaan darurat bencana yang membutuhkan penanganan USAR. Adanya mekanisme operasi USAR yang sesuai dengan panduan INSARAG Guidelines 2020 dan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan HKBN di Bantul untuk mendukung kegiatan *Asean Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise/ARDEX 2023* yang dilaksanakan pada 28 Juli – 4 Agustus 2023 dan diikuti oleh lebih dari 100 orang peserta dari BNPB, BPBD DIY, BPBD Kabupaten Bantul dan kru USAR dari Negara-negara ASEAN.

Pelaksanaan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana diselenggarakan oleh BPBD DIY bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tenaga ahli di bidang kebencanaan baik dari FPRB DIY, PSMB UGM maupun praktisi kebencanaan. Pelatihan ini dilaksanakan selama 5 hari pada tanggal 16 November – 24 November 2023 selama 40 Jam di BPBD DIY dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang.

d. Pelatihan Masyarakat Tanggap Bencana

Pelatihan Masyarakat Tanggap Bencana khususnya Daerah Rawan Bencana dikemas dalam bentuk penyampaian Materi/Paparan dan Diskusi kepada Masyarakat sebanyak 16 kali pertemuan di Kabupaten/Kota dengan peserta yang berbeda di setiap pertemuannya. Adapun materi yang disampaikan yaitu: Fungsi DPRD DIY dalam Penanggulangan Bencana; Kebijakan Penanggulangan Bencana di DIY;

Rencana Kontingensi; Rencana Kontinjensi Gempa Bumi; Ancaman Gempa Bumi; Ancaman Gempa Bumi dan Tsunami; Ancaman Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor dan Kekeringan; Ancaman Cuaca Ekstrem dan Kekeringan; Pengurangan Risiko Bencana; Keluarga Tangguh Bencana; Kondisi Gunung Merapi Terkini; Kajian Risiko Bencana Gunung Merapi.

Kegiatan Pelatihan Masyarakat Tanggap Bencana Khususnya Daerah Rawan Bencana dilaksanakan di bulan Mei, Juni dan Juli 2023 yaitu: 1. Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kab Bantul; 2. Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kab Kulon Progo; 3. Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kab Bantul; 4. Kalurahan Argosari, Kapanewon Sedayu, Kab Bantul; 5. Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta; 6. Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kab Bantul; 7. Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta; 8. Kalurahan Bendungan Kapanewon Wates, Kab Kulon Progo; 9. Kalurahan Bendungan Kapanewon Wates, Kab Kulon Progo; 10. Kalurahan Bendungan Kapanewon Wates, Kab Kulon Progo; 11. Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kab Sleman; 12. Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kab Sleman; 13. Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kab Sleman; 14. Kalurahan Bendungan Kapanewon Wates, Kab Kulon Progo; 15. Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Kab Sleman; 16. Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kab Sleman.

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan meliputi:

- 1) Terlaksananya bantuan hibah peralatan penanggulangan bencana kepada Komunitas Relawan Pengurangan Risiko Bencana sebanyak 30 Organisasi Relawan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 2) Meningkatnya kesadaran, kewaspadaan dan Kesiapsiagaan masyarakat, komunitas relawan kebencanaan dalam menghadapi ancaman bencana;
- 3) Komunitas Relawan Pengurangan Risiko Bencana dapat melakukan penanggulangan bencana dengan cepat sesuai dengan kapasitasnya;
- 4) Menurunkan korban atau kerugian yang ditimbulkan pada saat terjadinya bencana.

Peralatan penanggulangan bencana dibagikan kepada 27 Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut: 1. FPRB Hargobinangun; 2. FPRB Kalurahan Ambarketawang; 3. FPRB Kalurahan Bangunkerto; 4. FPRB Kalurahan Candibinangun; 5. FPRB Kalurahan Kalitirto; 6. FPRB Kalurahan Margodadi; 7. FPRB Kalurahan Margorejo; 8. FPRB Kalurahan Merdikorejo; 9. FPRB Kalurahan Purwobinangun; 10. FPRB Kalurahan Sariharjo; 11. FPRB Kalurahan Sendangtirto; 12. FPRB Kalurahan Srimartani; 13. FPRB Kalurahan Wiladeg; 14. FPRB Kelurahan Bausasran; 15. FPRB Kelurahan Brontokusuman; 16. FPRB Kelurahan Gedongkiwo; 17. FPRB Kelurahan Giwangan; 18. FPRB Kelurahan Mantrijeron; 19. FPRB Kelurahan Muja – Muju; 20. FPRB Kelurahan Ngampilan; 21. FPRB Kelurahan Notoprajan; 22. FPRB Kelurahan Purbayan; 23. FPRB Kelurahan Sosromenduran; 24. FPRB Kelurahan Suryatmajan; 25. FPRB Kelurahan Warungboto; 26. Kelompok Tagana Kecamatan Kraton; 27. KTB Lowanu.

2. Potensi Bencana

Pengurangan resiko bencana yang dilakukan menjadi sangat relevan mengingat DIY memiliki 12 jenis potensi bencana yang sudah teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut adalah Banjir, Epidemi dan Wabah Penyakit, Gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kekeringan, letusan gunung api, angin kencang, tanah longsor, kebakaran, kegagalan teknologi dan bencana sosial.

a. Banjir

Faktor alam dan perilaku manusia dapat menjadi potensi penyebab terjadinya bencana banjir. Curah hujan yang tinggi dan daya serap tanah yang rendah merupakan faktor alam yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Selanjutnya potensi terjadinya bencana banjir yang disebabkan oleh perilaku manusia antara lain: membuang sampah sembarangan yang menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal dan terhambat alirannya; semakin rendahnya daya serap tanah terhadap air karena tanah tertutup oleh aspal jalan raya dan bangunan; dan penebangan pohon yang tidak menerapkan sistem reboisasi.

Selama tahun 2023 terdapat 14 kejadian banjir di wilayah DIY dengan angka tertinggi kejadian di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena Cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Gunungkidul mengakibatkan banyak terjadi banjir di sejumlah titik karena tingginya curah hujan di wilayah sekitar. Kondisi di Kabupaten Bantul tidak jauh berbeda.

b. Epidemik dan Wabah Penyakit

Epidemi dan wabah penyakit merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh merebaknya penyakit menular yang berjangkit pada suatu daerah dan waktu tertentu, salah satu pandemi yang pernah terjadi adalah adanya wabah Covid-19. Tercatat tidak terjadi Bencana epidemi dan wabah penyakit di tahun 2023.

c. Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Pada tahun 2007 pernah terjadi bencana gelombang ekstrem abrasi yang mengakibatkan 59 rumah rusak ringan di Bantul, untuk skala yang ringan pernah terjadi beberapa kali. Pada Tahun 2023 tidak terjadi gelombang ekstrem di DIY.

d. Gempa Bumi

Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa gempa bumi yang terjadi di DIY disebabkan adanya gerakan sesar aktif yang kemudian disebut dengan Sesar Kali Opak. Selama tahun 2023 terdapat 15 kejadian Gempa yang dirasakan di wilayah DIY dengan kejadian tertinggi di Kabupaten Kulonprogo.

e. Tsunami

Selama tahun 2023 tidak terjadi kejadian Tsunami di wilayah DIY. Terdapat catatan kejadian tsunami sebelumnya di wilayah pesisir selatan Jawa berkisar antara 3 hingga 10 meter. Kondisi hutan mangrove saat ini sebagai pertahanan alami terhadap tsunami, khususnya di sepanjang pantai wilayah Bantul sudah tidak ada lagi. Cagar alam yang ada saat ini terdiri dari gumuk pasir, laguna dangkalan dengan perlindungan yang sangat terbatas, terutama yang hanya melindungi kawasan/ pemukiman di sisi lain. Pesisir Kabupaten Kulon Progo terbuka sehingga risiko terkena tsunami cukup tinggi. Sudah ada upaya membuat zona hijau secara vegetatif, *green belt* yaitu menanam cemara di pinggir pantai yang jaraknya 200 meter dari bibir pantai. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul dengan pesatnya perkembangan wisata pantai, harus waspada menghadapi kemungkinan tsunami..

f. Kegagalan Teknologi

Salah satu reaktor nuklir yang ada di DIY dinamakan sebagai Reaktor Kartini, yang dimiliki oleh Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Potensi gagal teknologi di DIY selain berupa kecelakaan transportasi juga potensi kegagalan teknologi reaktor nuklir. Selama tahun 2023 tidak terjadi kejadian kegagalan teknologi di wilayah DIY.

g. Kekeringan

Curah hujan yang rendah, tanah karst yang tidak dapat menampung dan menyimpan air menyebabkan Kabupaten Gunungkidul sering mengalami kekeringan. Sumber air satu-satunya yang tersedia adalah

sungai bawah tanah di daerah tersebut. Kekeringan di kabupaten lainnya lebih disebabkan ketidakmampuan permukaan tanah untuk menyerap air hujan, karena hilangnya vegetasi yang ditutupi dengan penutup lapisan kedap air di permukaan tanah dan memperburuk pengambilan air bawah tanah yang berlebihan dan tidak terkendali. Selama tahun 2023 terjadi bencana kekeringan pada seluruh Kabupaten di wilayah DIY yaitu di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman.

h. Letusan Gunung Api

Salah satu gunung teraktif di dunia karena periodesitas letusannya relatif pendek yaitu 3-7 tahun adalah Gunung Merapi yang aliran laharnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sleman. Setiap harinya gunung ini menunjukkan aktivitasnya yaitu guguran kubah lava. Merapi juga merupakan pertemuan persilangan dua buah sesar transversal yang membentangi wilayah tengah Jawa Tengah dan DIY. Pada tahun 2023 telah terjadi satu kali letusan Gunung Merapi di wilayah DIY.

i. Cuaca ekstrim

Bencana alam cuaca ekstrim berupa angin kencang beberapa kali terjadi di DIY berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika. Hal ini disebabkan oleh adanya siklon tropis maupun sering terjadi pada saat pergantian musim. Pada tahun 2023 terjadi kejadian Angin Kencang sebanyak 149 kali di wilayah DIY dengan angka kejadian tertinggi di Kabupaten Kulonprogo.

j. Tanah Longsor

Beberapa titik rawan terjadinya bencana tanah longsor di wilayah DIY karena kondisi tanah curam yang biasanya berada pada dinding sungai dan di sepanjang kawasan pegunungan menoreh sehingga memiliki potensi Tanah Longsor yang sangat tinggi ketika musim penghujan. Selain itu, bencana tanah longsor juga terjadi di kabupaten lain yang memiliki lereng dengan kontur ekstrim dan karena adanya potensi

curah hujan yang tinggi. Selama tahun 2023 terjadi kejadian tanah longsor sebanyak 438 kali di wilayah DIY dengan angka kejadian tertinggi di Kabupaten Gunungkidul.

k. Kebakaran Gedung dan Permukiman

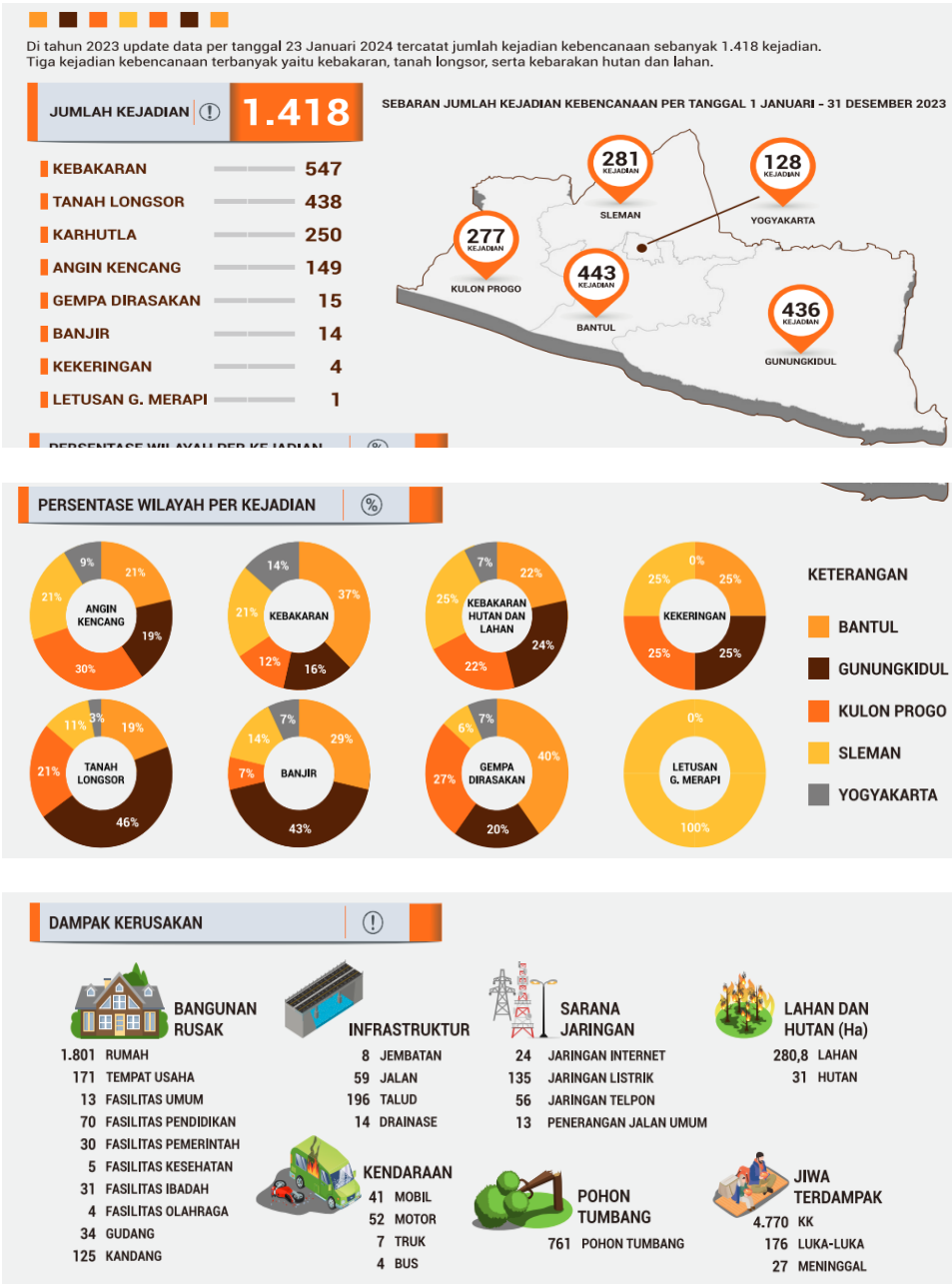
Kota Yogyakarta memiliki potensi tinggi untuk terjadinya kebakaran gedung dan permukiman karena kondisi perumahan yang padat. Kebakaran gedung dan permukiman adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia. Selama tahun 2023 terjadi kejadian Kebakaran hutan dan lahan sebanyak 250 kali di wilayah DIY dengan angka kejadian tertinggi di Kabupaten Sleman.

l. Konflik Sosial

Karakteristik masyarakat DIY yang sangat majemuk, berpotensi munculnya berbagai konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan sebagian masyarakat. Konflik sosial ini sering terjadi di kawasan yang didiami banyak mahasiswa pada suatu wilayah tertentu dan menjadi salah satu prioritas penanganan bencana di DIY.

3. Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2023

Selama tahun 2023, terjadi sejumlah kejadian bencana alam. Pada lima tahun terakhir periode tersebut, tiga kejadian terbanyak adalah bencana alam kebakaran, tanah longsor dan gempa. Berdasarkan data yang masuk ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) DIY, pada tahun 2023 terdapat data kejadian sebanyak 1.418 terjadi di wilayah DIY.



Gambar 7.1. Data Kejadian Bencana di DIY tahun 2023
Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY, 2023 (data diolah)

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Dalam rangka mempercepat capaian kinerja mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada, dibutuhkan strategi dalam pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), serta dalam rangka pengurangan risiko bencana diperlukan peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana (Destana).
- 2) Dibutuhkan sistem peringatan dini bencana karena banyaknya kawasan rawan bencana di DIY.
- 3) Pengelolaan pengurangan risiko bencana yang belum optimal pada kawasan strategis keistimewaan di DIY.
- 4) Belum tersedianya sistem Data dan informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi.

b. Solusi

- 1) Membuat *roadmap* pembentukan dan pengembangan SPAB serta memastikan implementasinya dengan melibatkan seluruh *stakeholder*. Selain itu Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk dikembangkan kapasitasnya.
- 2) Sistem Peringatan Dini yang komprehensif baik yang dimiliki instansi, lembaga maupun masyarakat, serta pemetaan kebutuhan sistem peringatan dini bencana dikelola lebih optimal.
- 3) Melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan pada kawasan strategis keistimewaan dari potensi bencana.
- 4) Menyediakan Sistem Data dan Informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Gambaran Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan status keistimewaannya dalam kerangka NKRI beserta potensi sosial-budayanya menjadi potensi dan daya tarik untuk publik, baik domestik Indonesia maupun dunia internasional. Dengan potensi dan daya tarik tersebut, DIY menghadapi beragam tantangan diantaranya terkait gangguan keamanan dan ketertiban umum yang harus di atasi oleh Pemda DIY bersama *stakeholder*. Gangguan keamanan dan ketertiban umum dapat disebabkan oleh faktor mobilitas penduduk yang cukup tinggi karena aktivitas wisata dan pendidikan. Mobilitas penduduk dari aktivitas wisata dapat berasal dari arus wisatawan domestik dan internasional yang berkunjung ke destinasi dan tinggal dengan waktu lama tinggal tertentu (*length of stay*). Pada aktivitas pendidikan, Yogyakarta sebagai kota pelajar memiliki daya tarik tersendiri bagi pelajar maupun mahasiswa dari seluruh wilayah Nusantara dan dunia untuk melanjutkan studi dan menimba ilmu di daerah ini. Keberagaman asal negara, etnik, suku, agama, budaya dan adat istiadat yang dibawa dari negara/daerah masing-masing akan berinteraksi dengan warga DIY yang memiliki nilai kultural yang masih dipegang teguh. Interaksi ini perlu dikelola dengan baik, agar tidak menimbulkan dampak kerawanan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Mobilitas penduduk di DIY tersebut perlu dikelola dengan baik dalam rangka mencegah masalah baru terhadap pengelolaan keramaian, kerawanan sosial, peningkatan resiko kejahatan dan gangguan keamanan, mencegah terjadinya pelanggaran Perda maupun Perkada.

Untuk mengatasi tantangan DIY tersebut, Gubernur DIY telah menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal itu sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, Satuan Polisi Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengemban tanggung jawab penting dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam rangka mewujudkannya, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya antara lain:

- a. Penegakan 42 Peraturan Daerah dan 2 Peraturan Kepala Daerah melalui Operasi Yustisi dan Non Yustisi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada. Sampai dengan akhir tahun 2023, tercatat 160 kasus pelanggaran Perda dan Perkada, lebih sedikit daripada tahun 2022 sebanyak 382 kasus (turun 57,89%; Dataku, 2024)¹. Hingga akhir tahun 2023, melalui Operasi Yustisi dan Non Yustisi telah terkumpul denda atas pelanggaran Perda dan Perkada total sebesar Rp284.219.000. Selain itu, Pemda DIY telah membentuk Satuan Tugas TKD yang bertugas melakukan operasi Yustisi penertiban Tanah Kas Desa dan dalam rangka menertibkan penggunaan Tanah Kasultanan serta Tanah Kadipaten yang tidak berijin.
- b. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di masyarakat seperti fasilitasi pengamanan unjuk rasa serta pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemda DIY melalui Satpol PP DIY bekerjasama dengan Ditpamobvit Polda DIY melaksanakan pengamanan aset Pemerintah Daerah serta objek vital daerah. Adapun untuk mengatasi tindak kejahatan jalanan yang marak terjadi di DIY, Pemda DIY telah melakukan upaya preemtif berupa pembinaan, penyuluhan dan razia senjata tajam kepada anak-anak usia remaja melalui kegiatan *Satpol PP Goes To School*. Selain itu, telah dilakukan upaya pencegahan dengan patroli wilayah dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan patroli

¹ selengkapnya dapat melihat data pada <https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/> ; diakses pada 1 Februari 2024.

tersebut meliputi Patroli Sumbu Filosofi dan Patroli Kejahatan Jalanan (*Klithih*).

- c. Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat melalui penguatan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Kelompok Jaga Warga (Jaga Warga) maupun Omah Jaga Warga dan Satlinmas Rescue Istimewa (SRI). Kelompok Jaga Warga dan SRI merupakan wujud kearifan lokal yang didukung dengan anggaran Dana Keistimewaan. Dalam rangka melaksanakan tugas Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat tersebut, telah dilaksanakan
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM dengan sosialisasi kepada Satlinmas dan Kelompok Jaga Warga
 - 2) Pemberian hibah barang berupa Rompi Jaga Warga sebanyak 7.878 buah dan alat komunikasi HT sebanyak 7.777 unit bagi kelompok Jaga Warga;
 - 3) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada 41 Kalurahan untuk operasional Omah Jaga Warga masing-masing sebesar @Rp50.000.000.
 - 4) Penguatan kapasitas serta peningkatan sarana dan prasarana operasional Satlinmas Rescue Istimewa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit yang melaksanakan pertolongan pertama dan pencarian korban kecelakaan dan musibah di destinasi wisata.
- d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP DIY melalui Bimbingan Teknis bagi Jabatan Fungsional Satpol PP DIY dengan kegiatan:
 - 1) Pembinaan fisik secara berkala untuk rangka meningkatkan kemampuan keterampilan dan kebugaran personil Satpol PP DIY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
 - 2) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat.

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih rendahnya tingkat kepatuhan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dalam menaati Peraturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang disebabkan oleh pelanggaran Perda dan Perkada, dalam bentuk gangguan kejahatan jalanan oleh anak dan remaja, penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten tanpa surat ijin Gubernur, pelanggaran terhadap Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik (skuter listrik/otoped) di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.
- 3) Belum optimalnya peran Kelompok Jaga Warga sebagai salah satu wujud kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- 4) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibum Linmas yang belum optimal.

b. Solusi

- 1) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat rentan pelanggaran Perda dan Perkada serta menggalakan penertiban melalui operasi yustisi dan non yustisi.
- 2) Melakukan tindakan preemtif (deteksi dini) maupun tindakan preventif (pencegahan) melalui program "*Satpol PP Goes to School*" dengan pembinaan dan pengarahan kepada siswa usia SMP dan SMA. Pembinaan dan pengarahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan razia senjata tajam untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan, patroli wilayah pada jam malam pukul 23.00 hingga pukul 05.00 dini hari untuk mencegah kemungkinan terjadinya aksi kejahatan jalanan pada malam hari. Pemda DIY

telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka melakukan operasi yustisi penertiban tanah kasultanan serta tanah kadipaten yang tidak berizin. Berkenaan dengan pelanggaran terhadap Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 551/4671, telah dilakukan patroli ketertiban wilayah sesuai SE Gubernur DIY Nomor 551/467 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo Kawasan Sumbu Filosofi.

- 3) Mengoptimalkan peran Kelompok Jaga Warga melalui implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga, menguatkan kelembagaan dan kemitraan dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Polisi RW Jaga Warga, serta pemberian fasilitas berupa hibah alat komunikasi HT dan rompi Jaga Warga yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
- 4) Melakukan proses inventarisasi data terhadap SPM Trantibum Linmas yang wajib dilakukan.

F. Tugas – Tugas Umum Pemerintah Lainnya Yang Dilaksanakan Oleh Daerah

1. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY)

a. Narasi Umum

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, Pemda DIY telah melakukan upaya dan memenuhi indikator demokratisasi dengan membentuk lembaga daerah dengan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahannya yaitu melalui LO DIY. Fungsi pengawasan ini dilakukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik oleh aparatur pemerintahan daerah maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan pelayanan di DIY. LO DIY sebagai Lembaga Daerah Non Struktural berdasarkan Pergub DIY Nomor 72 Tahun 2022.

Keanggotaan LO DIY masa jabatan tahun 2021-2024 ditetapkan melalui SK Gub DIY Nomor 14/Kep/2021 tentang Penetapan Anggota LO DIY Masa Jabatan Tahun 2021-2024. LO DIY berjumlah 7 (tujuh) orang yang bersifat kolektif kolegial.

Sebagai lembaga daerah non struktural, LO DIY diberikan mandat untuk melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan badan usaha, pada bidang pelayanan publik. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, LO DIY bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintahan atau dugaan pelanggaran bisnis oleh badan usaha. Namun demikian, LO DIY juga melaksanakan upaya preventif dengan melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan berbagai lembaga, baik aparatur pemerintah maupun badan usaha.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya LO DIY tetap fokus terhadap orientasi menjadi lembaga pengawas yang berkomitmen, berintegritas dan mengikuti perkembangan. LO DIY berupaya untuk tetap melaksanakan tugas dengan optimal dan menyelaraskan pada perkembangan peradaban. Sinergitas dengan jejaring bahkan masyarakat merupakan hal penting yang perlu dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Sinergi yang baik selanjutnya dapat berjalan optimal dengan adanya komitmen dari berbagai pihak secara sistemik untuk peningkatan pelayanan publik.

Pada tahun 2023 LO DIY telah menerbitkan 105 produk akhir yang terdiri dari 47 rekomendasi dan 58 laporan penyelesaian kasus. Selama tahun 2023, LO DIY telah menerima 206 konsultasi aduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan dan praktik badan usaha. Jumlah penerimaan aduan dan konsultasi di LO DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6. Tabel Penerimaan Aduan dan Konsultasi di LO DIY.

No	Nama Bidang	Aduan	Konsultasi
1	Aparatur Pemerintahan	21	92
2	Instansi Swasta	47	104
3	Lainnya		10
Total		68	206

Sumber: LO DIY, 2024

Komposisi konsultasi yang diterima oleh LO DIY apabila diklasifikasikan berdasarkan enam sektor tertinggi yaitu sektor keuangan sebanyak 57 (27,67%) konsultasi, sektor pendidikan sebanyak 34 konsultasi (16,5%), sektor pertanahan 23 konsultasi (11,17%), sektor ketenagakerjaan 18 (8,74%) konsultasi, sektor jasa 13 konsultasi (6,31%) dan sektor properti sebanyak 12 (5,83%) konsultasi. Kasus yang banyak dikonsultasikan antara lain mengenai transparansi pendanaan pendidikan, klaim asuransi, penggunaan ijazah sebagai jaminan dalam model pekerjaan tertentu, jual beli tanah kavling, pembiayaan kepemilikan motor/mobil dan pembagian waris.

Jumlah konsultasi berdasarkan wilayah dapat diklasifikasikan sebagai berikut, sebanyak 73 konsultasi (35,44%) dari Kota Yogyakarta, 62 konsultasi (30,1%) dari Kabupaten Sleman, 53 konsultasi (25,73%) dari Kabupaten Bantul, 6 konsultasi (2,91%) dari Kabupaten Kulon Progo, 3 konsultasi (1,40%) dari Kabupaten Gunungkidul dan sebanyak 9 konsultasi (4,36%) dari wilayah luar DIY.

Konsultasi yang diterima oleh LO DIY yang kemudian ditindaklanjuti sebagai aduan sebanyak 68 aduan. Apabila diklasifikasikan berdasarkan enam sektor tertinggi yaitu sektor keuangan sebanyak 29 (42,65%) aduan, sektor pendidikan sebanyak 10 (14,71%) aduan, sektor properti sembilan (13,24%) aduan, sektor ketenagakerjaan enam (8,82%) aduan, sektor pertanahan empat (5,88%) aduan dan sektor ketertiban umum serta sektor barang dan jasa masing-masing dua (2,94%) aduan. Kasus yang ditindaklanjuti sebagai pengaduan antara lain yaitu keberadaan paguyuban orang tua siswa di sekolah, ketidaksesuaian informasi produk tabungan dan asuransi, wanprestasi pengiriman tenaga magang

ke Jepang oleh LPK, pemanfaatan tanah kas desa, perizinan toko berjejaring, keberadaan tower telekomunikasi/BTS.

Sementara itu, komposisi aduan berdasarkan wilayah adalah sebanyak 25 aduan (36,76%) dari Kota Yogyakarta, 24 aduan (35,29%) dari Kabupaten Sleman, 19 aduan (27,94%) dari Kabupaten Bantul. Tidak ada aduan dari Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

b. Permasalahan dan Solusi pelayanan

Permasalahan dan Solusi pelayanan publik pada bidang pemerintahan dan badan usaha di DIY

1) Keuangan

a) Permasalahan

Proses pembayaran jual beli tanah dengan perusahaan yang tidak sesuai dengan perjanjian; Prosedur penyelesaian kredit kepada koperasi dan lembaga keuangan; Ketidaksesuaian Informasi atas Produk Tabungan dan Asuransi di PT Bank Central Asia (BCA) dan PT AIA Financial; Dugaan Penyimpangan Prosedur Pelayanan Pencairan Klaim Asuransi dan Penutupan Kredit di Bank Syariah; Proses pelunasan pada pembiayaan KPR Syariah di Bank Swasta Syariah; Klaim asuransi yang tidak sesuai dengan kontrak.

b) Solusi

Sebagai upaya untuk menyelesaikan aduan tersebut, telah dilakukan kajian, observasi, klarifikasi, mediasi serta berkoordinasi dengan OPD maupun institusi terkait lainnya untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah.

2) Pendidikan

a) Permasalahan

Transparansi informasi oleh sekolah mengenai penyelenggaraan pendidikan; Transparansi biaya pendaftaran peserta didik baru pada sekolah negeri tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Sleman; Dikembalikannya peserta didik kepada orang tua wali; Alur dan mekanisme perkembangan akademik mahasiswa; Tata kelola dan penegakan aturan kepada Santri Muhammadiyah Boarding School (MBS) Pleret; Proses operasional dan tata kelola manajemen sekolah.

b) Solusi

Dalam upaya penyelesaiannya dilakukan koordinasi dengan sekolah, OPD dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencermatan dan merumuskan kebijakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3) Properti

a) Permasalahan

Pengembalian dana atas pembatalan pembelian perumahan; Proses pembangunan ruko dan villa di Sleman; Permasalahan dengan pengembang terkait pembelian tanah kavling; Penundaan Pengadaan dan Pemasangan jaringan pipa PDAM oleh pengembang; Jual beli perumahan tidak sesuai dengan kontrak.

b) Solusi

Dalam upaya penyelesaiannya dilakukan investigasi, koordinasi dengan OPD terkait serta mengundang para pihak untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan kemudian dilakukan mediasi untuk mendapatkan penyelesaian masalah secara berimbang serta memberikan rekomendasi kepada

para pihak termasuk OPD terkait agar menyusun kebijakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

4) **Ketenagakerjaan**

a) *Permasalahan*

Proses pengembalian ijazah yang ditahan oleh perusahaan pemberi kerja; Pembayaran gaji proporsional kepada tenaga kerja oleh rumah sakit swasta sebagai pemberi kerja; Pemberhentian tenaga kependidikan oleh yayasan pendidikan; *Punishment* oleh distributor kepada *dealer* yang dibebankan *dealer* kepada tenaga kerja; Gaji yang belum dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja.

b) *Solusi*

Dalam upaya penyelesaiannya dilakukan dengan mengundang para pihak untuk klarifikasi hingga mediasi agar diperoleh penyelesaian secara berimbang dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada para pihak sebagai edukasi dan saran perbaikan untuk tata kelola pada masa mendatang.

5) **Pertanahan**

a) *Permasalahan*

Penyalahgunaan pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Maguwoharjo oleh pengembang.

b) *Solusi*

Melakukan tindak lanjut berupa koordinasi kepada pihak-pihak terkait sehingga dapat dijadikan acuan pertimbangan dalam kebijakan.

2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

a. Narasi Umum

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pengertian olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Dalam Pasal 38 disebutkan bahwa pengelolaan olahraga di provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di provinsi. Komite olahraga nasional di provinsi memiliki tugas melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga di tingkat provinsi dan komite olahraga nasional kabupaten/kota dalam pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga, pengembangan bibit olahragawan, pemassalan olahraga, serta membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pekan olahraga provinsi. Sejalan dengan pelaksanaan Program Pemda DIY, komite olahraga nasional di DIY diharapkan mampu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat, membangun karakter bangsa yang tangguh dan berprestasi.

Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KONI DIY) sebagai salah satu unsur pembina olahraga di DIY berkomitmen untuk menjadi penyangga pembinaan prestasi olahraga nasional. Komitmen ini diwujudkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang pada tahun 2023 difokuskan untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024, khususnya untuk pengiriman kontingen pada Babak Kualifikasi PON. Sebagai pendukung keikutsertaan dalam Babak Kualifikasi PON, dilaksanakan pula beberapa kegiatan antara lain pemberian bantuan bagi atlet dan pelatih untuk mengikuti kejuaraan nasional maupun internasional, penyelenggaraan kompetisi bagi para organisasi olahraga, penyelenggaraan uji coba, penyelenggaraan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) selama satu tahun, penyediaan peralatan olahraga,

penyewaan tempat latihan bagi para atlet, pendampingan penguatan mental atlet, pengelolaan data keolahragaan di DIY, serta peningkatan kompetensi pelatih, wasit, dan juri.

Guna mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan KONI DIY pada tahun 2023, Pemda DIY menganggarkan hibah senilai Rp19.544.600.000,00. Hibah tersebut digunakan untuk kegiatan KONI selama 1 tahun dan telah disalurkan seluruhnya.

b. Permasalahan dan Solusi

KONI DIY masih menghadapi beberapa kendala dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, antara lain:

- 1) Masih perlunya pembenahan kelembagaan dalam tata kelola organisasi pembinaan olahraga di DIY
- 2) Program pembinaan atlet jangka panjang secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan belum dapat dilaksanakan secara optimal

Melalui pelaksanaan program dan kegiatannya, KONI DIY berupaya mengatasi hambatan yang dihadapi melalui:

- 1) KONI DIY bekerja sama dengan Pengurus Daerah Cabang Olahraga, KONI Kabupaten/Kota se-DIY, serta Pengurus Kabupaten/Kota Cabang Olahraga untuk melakukan penataan organisasi dan perumusan kebijakan melalui rapat kerja internal di masing-masing organisasi maupun dalam skala besar melalui rapat kerja daerah. Melalui rapat kerja, masing-masing organisasi pembina olahraga dapat merumuskan program kerja yang mendukung optimalisasi pendataan keolahragaan serta peran bidang penelitian dan pengembangan dalam pemanfaatan teknologi untuk pembinaan atlet. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan organisasi olahraga di DIY dimulai dari unit pembinaan terkecil.

- 2) KONI DIY mendukung para Pengurus Daerah Cabang Olahraga untuk mengembangkan pemusatan latihan bagi para atlet secara mandiri. Melalui pemusatan latihan mandiri, diharapkan atlet memperoleh pola pembinaan yang berkelanjutan dan stabil untuk mendukung performa dalam kejuaraan. KONI DIY juga terus mendorong peningkatan jumlah Kelas Khusus Olahraga di sekolah guna membina bibit-bibit olahragawan di DIY.



Gambar 7.2. Salah satu atlet angkat besi DIY dalam Babak Kualifikasi PON 2023

Sumber: KONI DIY, 2024

3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

a. Narasi Umum

Sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan di Indonesia, Gerakan Praja Muda Karana, atau disingkat Pramuka, memiliki tugas pokok untuk mendidik kaum muda Indonesia menjadi insan berkarakter baik, berkecakapan hidup, serta sehat jasmani rohani sebagai modal untuk melakukan perubahan dalam peningkatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan motto Gerakan Pramuka “Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan”. Gerakan Pramuka juga diharapkan mampu mendukung penumbuhan wirausaha baru sesuai program

Pemda DIY demi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Oleh karena itu Kwartir Gerakan Pramuka DIY (Kwarda DIY) sebagai pelaksana pembinaan generasi muda di DIY menjalankan berbagai program dan kegiatan demi mewujudkan Pramuka Istimewa sebagai generasi unggul. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kwarda DIY pada tahun 2023 antara lain:

- 1) Penguatan dan pengembangan pendataan kepramukaan,
- 2) Penyempurnaan kurikulum pengembangan Pramuka Istimewa,
- 3) Keikutsertaan dalam Raimuna Nasional,
- 4) Penyelenggaraan bimbingan teknis pencapaian Pramuka Garuda dan Pramuka Istimewa bagi Anggota Dewasa,
- 5) Penyelenggaraan bimbingan teknis jurnalistik,
- 6) Bimbingan teknis penerapan satuan pendidikan aman bencana di Gugusdepan,
- 7) Pengembangan Kampung Pramuka,
- 8) Perbaikan pedoman pengelolaan keuangan di Kwarda,
- 9) Pembaruan data administrasi aset dan inventarisasi aset.

Pada tahun 2023 Pemda DIY memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan Kwarda DIY yang diwujudkan melalui hibah sebesar Rp1.500.000.000,00. Hibah tersebut bersumber dari APBD dan telah disalurkan seluruhnya dan telah dilaksanakan oleh Kwarda DIY.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam mewujudkan visi, misi, serta tujuan Gerakan Pramuka, Kwarda DIY menghadapi beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Walaupun telah lama diterapkan di Indonesia, Gerakan Pramuka belum secara maksimal dapat menyelenggarakan kegiatan kepramukaan yang menarik bagi para kaum muda sebagai pelengkap pendidikan di keluarga dan sekolah

- 2) Masih kurangnya minat Anggota Dewasa untuk menjadi pendidik atau pembina Gerakan Pramuka. Para pembina Gerakan Pramuka yang telah ada saat ini juga masih memerlukan peningkatan kompetensi dalam mengimplementasikan materi kepada para peserta didiknya

Upaya yang dilakukan Kwarda DIY dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Melaksanakan pengkajian program pendidikan dengan tujuan pemutakhiran program kepramukaan. Titik berat pemutakhiran program kepramukaan ini adalah pengembangan nilai-nilai kepribadian luhur, semangat kebangsaan, cinta perdamaian, kepekaan lingkungan dan jiwa kewirausahaan. Melalui rangkaian kegiatan penyempurnaan kurikulum pengembangan Pramuka Istimewa, disusunlah pedoman kegiatan kepramukaan yang menyenangkan, bermanfaat, dan diharapkan dapat menarik minat peserta didik Gerakan Pramuka. Pada tahun 2023 penyempurnaan kurikulum ini diikuti dengan sosialisasi pedoman Gerakan Pramuka di setiap Kwartir Ranting. Khusus untuk Satuan Karya Pramuka, diharapkan program-program pendidikan yang diterapkan dapat memberikan keterampilan berwirausaha kepada para anggotanya.
- 2) Melakukan rekrutmen pembina Gerakan Pramuka, berkoordinasi dengan Kwartir Cabang yang menjadi pengampu Gerakan Pramuka di tiap Kabupaten/Kota di DIY. Rekrutmen ini bertujuan untuk memenuhi jumlah Pembina Mahir, Pelatih Pembina Pramuka, dan Pamong Saka di DIY. Sejalan dengan rekrutmen tersebut, pendataan yang akurat juga terus dilaksanakan mulai dari Gugus Depan untuk memperoleh data pembina dan peserta didik terdaftar. Diharapkan melalui pendataan ini dapat diwujudkan rasio ideal pembina dan peserta didik sehingga pembinaan Pramuka dapat berjalan lebih efektif. Kwarda DIY juga berupaya meningkatkan kualitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan agar dapat menerapkan uji sertifikasi tenaga pendidik

kepramukaan dan mewujudkan para pembina pramuka yang kompeten dalam menerapkan program-program Gerakan Pramuka.



Gambar 7.3. Peresmian Kampung Pramuka di Girisekar, Panggang, Gunungkidul

Sumber: Kwarda DIY, 2024

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

a. Narasi Umum

Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia memegang peranan krusial dalam menentukan strategi dan arah kebijakan negara setiap lima tahun sekali. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hadir sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran dan tanggung jawab strategis. Peran utama KPU selama pemilu adalah menyelenggarakan proses pemilihan umum secara adil, transparan, dan demokratis. KPU harus memastikan bahwa setiap tahapan pemilu telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Adapun jadwal tahapan pemilu 2024 yang sudah dimulai dari Tahun 2022 dan akan selesai pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Jadwal	Tahapan
14 Juni 2022-14 Juni 2024	Perencanaan Program dan Anggaran
14 Juni 2022-14 Desember 2023	Penyusunan Peraturan KPU

Jadwal	Tahapan
14 Oktober 2022-21 Juni 2023	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
29 Juli 2022-13 Desember 2022	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
14 Desember 2022-14 Februari 2022	Penetapan Peserta Pemilu
14 Oktober 2022-9 Februari 2023	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6 Desember 2022-25 November 2023	Pencalonan DPD
24 April 2023-25 November 2023	Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
19 Oktober 2023-25 November 2023	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
28 November 2023-10 Februari 2024	masa Kampanye Pemilu
11 Februari 2024-13 Februari 2024	Masa Tenang
14 Februari 2024-15 Februari 2024	Pemungutan dan Penghitungan Suara
15 Februari 2024-20 Maret 2024	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota
disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi
1 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
20 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

Sebagai salah satu instansi penanggung jawab penyelenggaraan pemilu, KPU wajib menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu. Netralitas merupakan sebuah kunci penting agar masyarakat percaya bahwa pemilihan dilakukan secara adil tanpa intervensi politik yang merugikan. KPU harus menegaskan independensinya dan komitmen untuk melaksanakan pemilu dengan integritas.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi KPU dalam persiapan Pemilu 2024 yaitu meningkatnya kompleksitas pemanfaatan teknologi dan informasi. Risiko terkait keamanan data, penggunaan media sosial untuk kampanye, dan penyebaran informasi palsu harus di atasi dengan memastikan keamanan dan keandalan sistem teknologi yang digunakan oleh KPU.

Aspek partisipatif dan pendidikan pemilih juga menjadi fokus penting bagi KPU. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu dan dampaknya terhadap masa depan negara harus diprioritaskan. KPU perlu berperan aktif dalam mensosialisasikan informasi terkait proses pemilu, calon peserta, serta hak dan kewajiban pemilih.

Dalam menghadapi dinamika dan tantangan, KPU perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan pemilu dan menjaga kredibilitas demokrasi di Indonesia.

Dalam rapat koordinasi perencanaan dan anggaran tahapan pemilu, KPU DIY mengedepankan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, termasuk partai politik, pemerintah daerah DIY, dan media massa. Langkah-langkah konkret yang telah dilaksanakan, seperti penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah pada September 2023, menjadi bukti nyata kesiapan KPU DIY dalam menghadapi Pemilu 2024.

Kegiatan ekspos logistik dan sosialisasi pelayanan pindah memilih untuk pemilih pemula menunjukkan upaya KPU DIY dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat. Kolaborasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan PPK se-DIY membantu menyamakan persepsi terkait prosedur pemungutan suara.

Dalam upaya menjaga integritas, KPU DIY melibatkan seluruh penyelenggara pemilu dalam rapat koordinasi mitigasi perselisihan hasil pemilihan umum dan penyuluhan kode etik. KPU DIY juga secara aktif memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilu tentang regulasi, praktik, dan kode etik agar Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan penuh integritas.

Pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2024 pada Oktober 2023, KPU DIY turut melibatkan partai politik untuk memastikan proses administrasi dan verifikasi berjalan lancar. Sosialisasi pelayanan pindah memilih dan implementasi teknis pelaksanaannya merupakan langkah konkret KPU DIY untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.

Peran KPU selama pemilu 2024 bukan hanya sebagai penyelenggara teknis, tetapi juga sebagai penjaga kualitas demokrasi. Dengan komitmen pada transparansi, netralitas, dan efisiensi, KPU dapat memastikan pemilu 2024 menjadi tonggak penting dalam membangun masa depan demokratis dan berkeadilan bagi Indonesia.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan:

- a) Kehadiran KPU DIY dalam rapat Pokja Pemilu dan pertemuan koordinasi Pemilu masih belum maksimal sehingga berpengaruh pada belum optimalnya kinerja Pokja atau Tim Pemantau Pemilu di wilayah DIY karena keputusan yang mengikat di masing-masing lembaga. Mengingat tahapan Pemilu 2024 sangat padat, menyita waktu dan tenaga komisioner di KPU DIY.
- b) Potensi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 karena menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga eksekutif dan legislatif.

2) Solusi:

- a) Guna memantau situasi dan kondisi keamanan pelaksanaan tahapan pemilu, Pemda DIY menyelenggarakan kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik dan Posko Pemilu 2024 yang dilakukan bersama Pokja atau Tim Pemantau Pemilu, salah satunya yakni KPU DIY. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data dan informasi terkait situasi politik terkini

di wilayah. Mengingat padatnya kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, kegiatan pemantauan dioptimalkan melalui pembagian tugas pemantauan bersama seluruh anggota Pokja. Dalam pelaksanaannya, seluruh anggota Pokja akan dibagi lagi menjadi kelompok kecil yang akan bertugas ke lima kabupaten/kota di wilayah DIY. Selain itu, proses komunikasi dan koordinasi juga dioptimalkan melalui penggunaan teknologi informasi, seperti pelaksanaan rapat secara daring melalui Zoom Meeting.

- b) Salah satu strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah melalui penguatan kerja sama dengan partai politik dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat akan hak-hak politiknya dalam rangka penciptaan iklim dan semangat demokrasi. Menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih pemula, difabel, kelompok perempuan dan organisasi masyarakat; melaksanakan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah; serta adanya posko pemantauan pemilu yang terus mengawal situasi pemilu sesuai tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan merupakan langkah nyata yang diambil oleh Pemda DIY untuk terus menjaga kondusifitas wilayah dan mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat DIY dalam menyukseskan pemilu serentak 2024.

5. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu)

a. Narasi Umum

Pemilu merupakan pondasi utama bagi sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai negara demokratis, proses pemilu menjadi sarana bagi warga negara untuk menentukan wakil-wakilnya dalam berbagai tingkatan pemerintahan. Namun, untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, bebas, dan jujur, perlu adanya lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh proses tersebut.

Peran utama Bawaslu mencakup pengawasan, pemantauan, penanganan pelanggaran, dan penyelidikan terhadap segala bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan pemilu. Bawaslu juga berperan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti, sehingga dapat memperkuat integritas dan kredibilitas pemilu.

Selama tahun 2023, Bawaslu DIY telah menunjukkan langkah-langkah konkret dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024 melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, kerja sama, dan audiensi. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu DIY telah memastikan keterlibatan berbagai pihak dalam persiapan menjelang Pemilu.

Upaya damai juga menjadi fokus utama Bawaslu DIY. Hal ini terlihat dari komitmen bersama dengan Pemda DIY, KPU DIY, Partai Politik, Ormas dan semua unsur yang terlibat untuk menjaga pemilu damai 2024. Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi langkah proaktif untuk mengantisipasi potensi kerawanan di DIY, dengan melibatkan akademisi dalam pemetaan. Informasi ini menjadi penting sebagai *early warning system* untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan kerawanan dalam Pemilu Serentak 2024.

Kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY dan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024 menandai komitmen bersama dalam menjaga integritas pemilu. Pengawasan verifikasi administrasi bakal calon Anggota DPD dan DPRD DIY menunjukkan ketatnya pemantauan Bawaslu DIY terhadap setiap tahapan pemilu.

Dalam upaya inklusi, Bawaslu DIY memfasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan disabilitas untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Pemetaan kerawanan politisasi SARA tetap menjadi fokus, memberikan acuan bagi Bawaslu dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan penyelewengan. Pemetaan kerawanan politisasi SARA menjadi fokus, dan Bawaslu DIY berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kekerasan

dan konflik serta penggunaan isu SARA dalam kampanye. Bawaslu juga memastikan inklusivitas pada difabel dengan melibatkan Perempuan dalam sosialisasi khusus, karena Bawaslu memandang peran strategis perempuan dalam mitigasi sengketa antar peserta pemilu. Melalui kegiatan sosialisasi, Bawaslu DIY mengajak dan menargetkan perempuan untuk turut serta mengawasi tahapan pemilu dan melibatkan diri sebagai petugas TPS.

Melalui kolaborasi dengan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu DIY mengaktifkan generasi muda sebagai agen pencegahan terhadap kecurangan. Hal ini dilakukan dengan audiensi bersama mahasiswa berbagai kampus di jogja dan generasi muda. Kerja sama dengan KPID DIY dalam pengawasan siaran kepemiluan juga menggarisbawahi pentingnya media dalam membentuk opini masyarakat.

Dengan gugus tugas pengawasan kampanye dan audiensi dengan KPU DIY, Bawaslu DIY juga menegaskan tekadnya untuk menjaga integritas pemilu. Semua langkah ini diarahkan untuk memastikan Pemilu Serentak 2024 di DIY berlangsung damai, bermartabat, dan berintegritas.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan:

- a) DIY termasuk dalam kategori sedang dalam Indeks Kerawanan Pemilu, dimana skor dimensi pelanggaran penyelenggara pemilu merupakan penyumbang poin tertinggi. Penyebab dari tingginya skor ini karena penyelenggara pemilu melanggar aturan administratif yang ada.
- b) Kinerja Bawaslu DIY dirasa masih kurang optimal dalam Pokja Pemantauan Pemilu. Hal tersebut dikarenakan padatnya jadwal tahapan pemilu 2024 yang sudah memasuki masa kampanye pada tahun 2023.

2) **Solusi:**

- a) Bawaslu DIY telah melakukan bimbingan teknis dan melakukan peningkatan intensitas pengawasan. Bimbingan teknis dilakukan karena pelanggaran administrasi yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari penyelenggara. Sementara itu, dengan adanya peningkatan intensitas pengawasan, diharapkan seluruh masyarakat DIY dapat turut andil dalam melakukan pengawasan karena keterbatasan petugas Bawaslu DIY.
- b) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik dan Posko Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Pemda DIY dapat menjadi ajang koordinasi, memperoleh informasi, dan memonitoring kinerja penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. Namun demikian, padatnya kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Pokja memerlukan strategi khusus dalam proses pemantauan tahapan pemilu. Kegiatan pemantauan dioptimalkan melalui pembagian tugas bersama seluruh anggota Pokja. Dalam pelaksanaannya, seluruh anggota Pokja akan dibagi lagi menjadi kelompok kecil yang akan bertugas ke lima kabupaten/kota di wilayah DIY. Selain itu, proses komunikasi dan koordinasi juga dioptimalkan melalui penggunaan teknologi informasi, seperti pelaksanaan rapat secara daring melalui Zoom Meeting.

6. **Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)**

a. **Narasi Umum**

Pemda DIY berkomitmen untuk mewujudkan bebas penularan, bebas kematian dan bebas diskriminasi akibat HIV AIDS serta mewujudkan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban terkait HIV AIDS dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2023 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunodeficiency Syndrome*.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DIY sebagai mitra kerja dalam menanggulangi HIV AIDS sebagaimana tugas fungsinya melaksanakan advokasi lintas sektor, sosialisasi, dan mengakomodasi penyelesaian stigma, menjembatani komunitas ODHIV, populasi kunci, LSM serta memberikan rekomendasi pembiayaan bagi ODHIV yang tidak memiliki jaminan Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan di wilayah DIY.

Rangkaian kegiatan KPA DIY pada tahun 2023 dilaksanakan dengan mengoptimalkan dana hibah APBD DIY tahun 2023, serta sebagian menggunakan pengalihan anggaran hibah sisa tahun sebelumnya.

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS tidak dapat dipisahkan dari keberadaan populasi kunci, sebagai kelompok yang memiliki risiko tertinggi tertular maupun menularkan virus HIV.

Penyampaian informasi tentang HIV dan AIDS pada kelompok disabilitas menjadi tantangan tersendiri, terutama pada disabilitas tunarungu dan disabilitas tunanetra. Untuk itu KPA DIY menggandeng mitra untuk mendukung upaya penyampaian informasi tentang HIV dan AIDS pada dua kelompok disabilitas tersebut.

Pemda DIY memberikan dana hibah kepada KPA DIY pada tahun 2023 sebesar Rp250.000.000,00 untuk pelaksanaan operasional selama satu tahun dengan realisasi keuangan Rp232.511.381,00 tercapai sebesar 93%.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Adanya potensi penambahan kasus HIV dan AIDS di DIY sebagai dampak dari penemuan kasus kehamilan tidak diinginkan pada pekerja seks; pada kelompok rentan; dan kelompok berisiko. (Penambahan kasus baru terbanyak pada tahun 2023 berasal dari luar DIY).

- b) Masih adanya stigmatisasi masyarakat terhadap orang dengan HIV AIDS.
- c) Adanya kendala dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada disabilitas terutama disabilitas tunarungu dan disabilitas tunanetra.

2) **Solusi**

- a) Melibatkan semua pihak dan lintas sektor secara bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan penularan PSM, HIV dan AIDS melalui kegiatan advokasi, sosialisasi dan koordinasi.
- b) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi untuk menghilangkan stigma tentang HIV dan AIDS.
- c) Kolaborasi dengan komunitas Juru Bahasa Isyarat dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DIY.

7. **Palang Merah Indonesia (PMI)**

a. **Narasi Umum**

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi sosial kemanusiaan terbesar di Indonesia melaksanakan fungsi *auxiliary role to government* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019.

Dalam rangka melaksanakan fungsi *auxiliary role to the government*, PMI berkoordinasi dengan Pemerintah, khususnya sektor-sektor yang terkait dengan ketugasan PMI.

PMI DIY dalam melaksanakan program dan kegiatannya menggunakan berbagai sumber dana antara lain: sumber dana dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. PMI DIY terus mengembangkan diri menjadi lembaga yang mandiri dan netral sesuai mandat Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dengan memperluas program kemanusiaan yang lebih luas di antaranya pelayanan penanggulangan

bencana di Wilayah DIY maupun wilayah lain terdampak bencana, pelayanan ambulans, dan meningkatkan kapasitas Posko PMI.

Pemda DIY menyalurkan dana hibah kepada PMI DIY pada tahun 2023 sebesar Rp300.000.000,- untuk pelaksanaan operasional selama satu tahun dengan realisasi keuangan Rp300.000.000 atau tercapai sebesar 100 %. Hibah disalurkan melalui Dinas Kesehatan DIY. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan sarana prasarana operasional dan kegiatan PMI DIY dalam rangka mendukung program Dinas Kesehatan DIY untuk mencapai visi Pemda DIY bagi terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja melalui misi meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Kondisi geografis, geologis, klimatologis menempatkan DIY sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
- b) Wilayah DIY memiliki potensi adanya kejadian luar biasa (KLB) terkait zoonosis.
- c) Kebutuhan akan permintaan darah cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu

2) Solusi

- a) PMI DIY menjalin kerja sama dengan BMKG dan lintas sektor terkait dalam antisipasi dan kesiapsiagaan cuaca ekstrim.
- b) PMI DIY melaksanakan upaya antisipasi dan mitigasi dengan melakukan sosialisasi penyakit berpotensi wabah /kejadian luar biasa bersama Dinas Kesehatan DIY.
- c) Secara periodik PMI melakukan sosialisasi dan kegiatan untuk masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya secara suka rela serta meningkatkan pengelolaan bank darah.

8. Kinerja Tim Penggerak PKK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pengertian PKK merupakan sebuah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi Luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Lebih lanjut, diatur juga dalam regulasi tersebut bahwa Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan pemerintahan Desa melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di wilayahnya.

Dalam kurun waktu tahun 2023 serangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh TP-PKK DIY yang bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkup Pemda DIY. Diantaranya, kegiatan Penguatan Ketahanan Mental Masyarakat dan Penanaman Kembali Nilai-Nilai Pancasila berupa Sosialisasi Penguatan Mental Remaja di Era Digital, Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan, Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Lansia Potensial; Penguatan Ketahanan Ekonomi diantaranya Bimbingan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga dan Bantuan Modal Usaha bagi Kader UP2K; Penguatan Ketahanan Pangan berupa Bimbingan Pemanfaatan Pekarangan, Sosialisasi Menu B2SA, Gemarikan, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; Penguatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Pengadaan Infantometer untuk Posyandu serta Baksos dalam Rangka HUT Kartini 2023.

Kedepannya, diharapkan masing-masing Pokja PKK dapat memunculkan inovasi kegiatan yang membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat DIY. Kerja sama lintas sektor dengan berbagai OPD Pemda DIY yang telah berlangsung dengan baik pun dapat terus diselenggarakan, khususnya terkait berbagai aktivitas yang menyasar langsung kepada masyarakat.

9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan KPI. Semangat yang diusung dalam undang-undang tersebut adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen. Diharapkan semangat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 ini membawa napas berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 pasal 7 disebutkan bahwa “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah. Tuntutan di era demokratisasi saat ini, menempatkan publik sebagai pengendali utama ranah penyiaran.

Mengingat frekuensi merupakan milik publik dan jumlahnya terbatas maka media penyiaran mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial bagi masyarakat, media penyiaran harus dapat memanfaatkan frekuensi bagi kepentingan publik. Dasar fungsi pelayanan informasi yang sehat semacam inilah yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002: *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). KPID DIY terus berupaya mewujudkan sistem penyiaran sehat, berbudaya, serta memperkuat integritas dan karakter kebangsaan sejalan dengan amanat Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Salah satu upaya KPID DIY yaitu melaksanakan sosialisasi sekaligus memberikan literasi media kepada masyarakat dan lembaga penyiaran televisi dan radio terkait penyelenggaraan penyiaran. di samping itu, terdapat tugas rutin diantaranya, membantu proses penyelenggaraan penyiaran yang sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku dan melaksanakan pemantauan kepada lembaga penyiaran televisi dan lembaga penyiaran radio terkait konten siaran atau isi siaran.

a. Pemantauan Isi Siaran Televisi dan Radio

Dalam penyelenggaraan pengawasan penyiaran KPID DIY melakukan pemantauan langsung yang dilakukan oleh tenaga ahli lembaga penyiaran. Selain itu KPID DIY sendiri mempunyai alat *record* untuk memantau seluruh aktivitas penyiaran baik televisi maupun radio di wilayah Yogyakarta selama 24 jam. Sehingga apabila terdapat suatu pelanggaran KPID DIY dapat mengetahui secara cepat dan sangat mudah melalui alat tersebut. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut KPID DIY berpedoman pada amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Merujuk pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 1 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 2 tentang Standar Program Siaran, pada tahun 2023 KPID DIY telah melakukan pengawasan dan pemantauan program siaran dan tidak mengeluarkan teguran kepada lembaga penyiaran. Adapun perbandingan jumlah teguran sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.7. Perbandingan Data Lembaga Penyiaran yang Menerima Teguran Tahun 2021 s/d 2023

No	Lembaga Penyiaran	Jumlah Teguran		
		2021	2022	2023
1	Jogja TV	2	0	0
2	RCTI Yogya	1	0	0
3	ADI TV	1	0	0
4	MNC TV Yogya	0	0	0
5	Global TV Yogya	1	0	0
6	Indosiar Yogya	1	0	0
7	ANTV Yogya	1	0	0
8	Trans TV Yogya	0	0	0
9	Metro TV Yogya	1	0	0
10	SCTV Yogya	1	0	0
11	TV One Yogya	0	0	0
12	Trans 7 Yogya	1	0	0

No	Lembaga Penyiaran	Jumlah Teguran		
		2021	2022	2023
13	RBTv	0	0	0
14	RTV Yogya	1	0	0
15	NET.TV Yogya	1	0	0
16	Kresna TV	0	0	0
17	TVRI Jogja	0	0	0
18	Radio Swarakota	1	0	0
Jumlah		13	0	0

Sumber: KPID DIY, 2024

b. Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)

KPID DIY melakukan pendampingan dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran LPK melalui mekanisme Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) sesuai dengan amanat Pergub DIY Nomor 37 tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). EDP adalah proses identifikasi, klarifikasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. LPK adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Jumlah lembaga penyiaran komunitas sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.8. Perizinan Lembaga Penyiaran Komunitas di DIY

No	Jenis Lembaga Penyiaran Komunitas	Kondisi (Jumlah) s.d. Tahun 2023	Keterangan
1.	TV Komunitas	1	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP Tetap)
2.	Radio Komunitas	25	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP Tetap)

Sumber: KPID DIY, 2024

c. DIY Pasca *Analog Switch Off* (ASO)

Setelah tanggal 3 Desember 2022, siaran televisi analog pada wilayah DIY dan sekitarnya telah resmi beralih ke siaran televisi digital. Sampai dengan tahun 2023, terdapat 37 televisi digital yang bersiaran di wilayah DIY. Beberapa lembaga penyiaran yang beroperasi di wilayah DIY belum menunjukkan IPP kepada KPID DIY karena proses perijinan tidak lagi melalui wewenang KPID DIY. Dengan semakin banyaknya televisi digital yang bersiaran di wilayah DIY, maka diperlukan peningkatan jumlah sumber daya untuk melakukan pemantauan terhadap konten siaran yang semakin banyak hadir di tengah masyarakat. Pada saat ini, KPID DIY hanya memiliki satu (1) orang tenaga pemantau yang berstatus Tenaga Bantu, sehingga dengan semakin bertambahnya Lembaga Penyiaran Televisi Digital yang ada, maka dibutuhkan tenaga pemantauan yang lebih banyak. Adapun televisi digital yang dipantau oleh KPID DIY sebagai berikut:

Tabel 7.9. Televisi Digital Yang Muncul di Alat Pemantauan KPID DIY

No	Nama Udara	Nama Lembaga Penyiaran
1.	TVRI Nasional	Lembaga Penyiaran Publik
2.	TVRI Jogja	Lembaga Penyiaran Publik
3.	TVRI Sport	Lembaga Penyiaran Publik
4.	TVRI World	Lembaga Penyiaran Publik
5.	TVRI Jateng	Lembaga Penyiaran Publik
6.	TATV	PT. Televisi Terang Abadi
7.	TATV Jogja (Sangaji TV)	Terang Abadi TV (TATV) Yogyakarta
8.	ADI TV	PT. Arah Dunia Televisi
9.	Nusantara TV	PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta
10.	Tegar TV	Tegar Televisi Yogyakarta
11.	Inspira TV	Inspira Media Televisi
12.	NET TV	PT. Mitra Televisi Yogyakarta
13.	Trans TV	PT. Trans TV Yogyakarta & Bandung
14.	Trans 7	PT. Trans 7 Yogyakarta & Bandung
15.	SCTV	PT. Surya Citra Nugraha (SCTV Yogyakarta)
16.	Indosiar	PT. Indosiar Lintas Yogya Televisi (Indosiar Yogyakarta)
17.	ANTV	PT. Cakrawala Andalas Televisi Yogyakarta & Ambon
18.	TVONE	PT. Lativi Mediakarya Yogyakarta & Lampung
19.	RCTI	PT. RCTI Dua
20.	MNC TV	PT. TPI Dua

No	Nama Udara	Nama Lembaga Penyiaran
21.	GTV	PT. GTV Dua
22.	iNews	Semesta Matahari Televisi (iNews Yogyakarta)
23.	CNN Indonesia	PT. Detik Tivi Satu
24.	CNBC Indonesia	PT. Trans Berita Bisnisenam
25.	Moji TV	PT. Omni Yogyakarta
26.	Mentari TV	PT. Citaprima Yogya Televisi
27.	RTV	PT. Jogja Citra Nuansa Nusantara Televisi
28.	RBTV (Kompas TV)	PT. Reksa Birama Media
29.	Jogja TV	PT. Yogyakarta Tugu Televisi
30.	Metro TV	PT. Media Televisi Yogyakarta
31.	Magna Channel	PT. Mitra media Digital Satu
32.	BN Channel	PT. Mitra Siaran Digital Satu
33.	E-Channel	-
34.	SportOne	-
35.	TV10	-
36.	Smile TV	-
37.	BTV	-

Sumber: KPID DIY, 2024

d. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Meningkatnya jumlah Lembaga Penyiaran Televisi yang bersiaran di DIY meningkatkan beban pemantauan yang dilakukan sehingga perlu dilakukannya penambahan personil.
- Perpindahan teknologi penyiaran dari analog ke digital saat ini mengakibatkan alat pemantauan yang dimiliki KPID DIY hasil dari hibah KPI Pusat tahun 2013 tidak bisa digunakan dikarenakan alat tersebut hanya bisa digunakan untuk siaran analog dan alat pemantauan yang ada saat ini (pengadaan tahun 2019) memiliki keterbatasan. Dalam hal pemantauan siaran radio di wilayah DIY, KPID melakukan pemantauan 40 siaran radio swasta menggunakan 2 alat pemantauan.

2) **Solusi**

- a) Dalam pemenuhan kebutuhan kekurangan jumlah personil pemantauan siaran saat ini, KPID DIY melakukan pemenuhan melalui tenaga mahasiswa yang melakukan magang/PKL. Dengan strategi tersebut KPID DIY juga tetap membutuhkan penambahan pegawai untuk pemantauan dikarenakan rotasi pegawai magang/PKL tersebut cukup tinggi.
- b) Perlu adanya penambahan alat pemantau siaran yang dapat mengolah siaran digital. Saat ini KPID DIY telah melakukan penambahan STB secara bertahap untuk mengatasi kekurangan alat pemantauan dan melakukan pergantian pemantauan siaran.

10. **Komisi informasi Daerah (KID)**

a. **Narasi Umum**

Pembentukan KID DIY merupakan salah satu amanat Undang-Undang KIP yang diatur dalam Pasal 59 pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Anggota KID DIY periode keempat (2023-2027) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY No. 84/K/DPRD/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Calon anggota Komisi Informasi Daerah DIY masa Jabatan 2023-2027.

Keputusan KID DIY adalah untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi oleh Badan Publik di DIY, menyelesaikan sengketa informasi dan mendorong masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang benar dan tepat. Penyelesaian sengketa informasi melalui proses menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

b. Penyelesaian Sengketa Informasi

Salah satu tugas yang diamanatkan kepada KID DIY dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi dan memastikan Badan publik mengumumkan dan menyediakan informasi, serta melayani permintaan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelesaian Sengketa Informasi.

Pada tahun 2023 menyelesaikan 9 register sengketa informasi yang masuk ke KID DIY. Sengketa informasi yang ditangani berupa objek sengketa informasi, pertanahan dan anggaran. Penyelesaian Sengketa Informasi tersebut menghasilkan 5 putusan adjudikasi dan 4 putusan mediasi. Adapun data penyelesaian sengketa informasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.10. Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2023

No	Register	Informasi Yang Di	Jangka Waktu Penyelesaian	Penyelesaian
1.	001/IV/KIDDIY-PS/2023	Informasi Pertanahan	57 HK	Putusan Adjudikasi
2.	002/V/KIDDIY-PS/2023	Informasi Pertanahan	45 HK	Putusan Adjudikasi
3.	003/VI/KIDDIY-PS/2023	Informasi Pertanahan	14 HK	Putusan Mediasi
4.	004/VII/KIDDIY-PS/2023	Dokumen administrasi kenaikan pangkat /jabatan	12 HK	Putusan Adjudikasi
5.	005/V/KIDDIY-PS/2023	Informasi Pertanahan	22 HK	Putusan Mediasi
6.	006/V/KIDDIY-PS/2023	Informasi Pertanahan	39 HK	Putusan Adjudikasi
7	007/IX/KIDDIY-PS/2023	Informasi Pertanahan	10 HK	Putusan Mediasi
8	008/XI/KIDDIY-PS/2023	Informasi Pertanahan	4 HK	Putusan Adjudikasi
9	009/XII/KIDDIYPS/2023	Pertanahan	13 HK	Putusan Mediasi

Sumber: KID DIY, 2024

c. **Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY didasarkan pada pasal 31 dan 32 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan mandat Komisi Informasi Daerah DIY untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik sesuai peraturan perundang – undangan. Sebagai pedoman teknisnya digunakan Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2021 dan Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2022. Adapun maksud dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 yaitu mendorong percepatan dan peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik di badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun anggaran 2023 , Badan Publik yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi direncanakan sebanyak 397 Badan Publik.

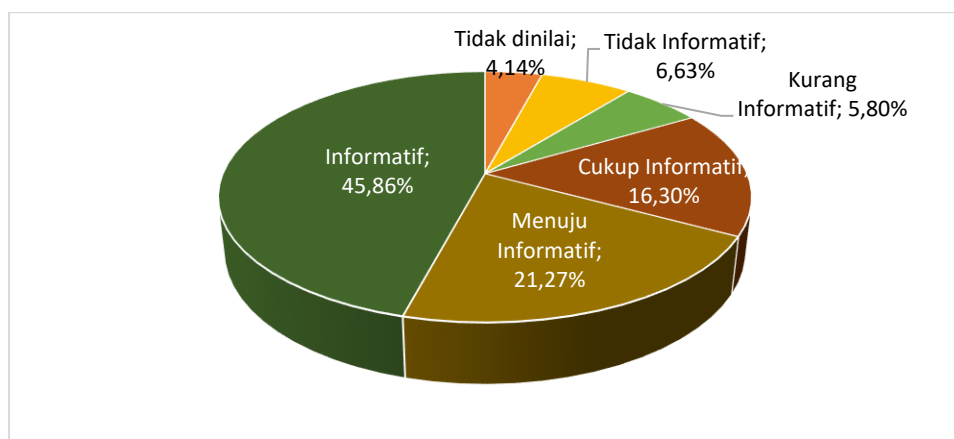
Tahun Anggaran 2023 KID DIY melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi badan publik berkaitan dengan implementasi seluruh kewajiban badan publik seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP dengan metode yang selalu dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur dan akurat. Monev keterbukaan informasi badan publik di DIY tahun 2023, dimaksudkan untuk melakukan pemeringkatan dan kejuaraan keterbukaan informasi badan publik.

Tahapan monev meliputi: Pembentukan Tim, Sosialisasi kepada Badan Publik, Pengisian SAQ, Uji Website, Uji Akses, dan Visitasi kepada Badan Publik. Komisi Informasi Daerah memfasilitasi Badan Publik dalam Pemeringkatan keterbukaan Badan Publik KIP dengan pengelolaan portal e-monev dengan alamat: <http://monev-kid.jogjaprovo.go.id/>. Tabel di bawah merupakan hasil Monev Keterbukaan Badan Publik Tahun 2023.

Tabel 7.11. Klasifikasi Berdasarkan *Cluster* Badan Publik DIY

No	Klaster	Jumlah Badan Publik	Regis-trasi	Infor-matif	Menuju Infor-matif	Cukup Infor-matif	Kurang Infor-matif	Tidak Infor-matif	Tidak dinilai
1	PEM.KAB/KOTA	5	5	5	0	0	0	0	0
2	OPD PEMDA DIY	39	39	16	15	8	0	0	0
3	OPD PEM KAB/KOTA	162	162	97	23	25	10	4	3
4	KAPANEWON/KEMANTREN	78	78	39	17	16	5	1	0
5	PARPOL	10	6	1	0	0	1	1	3
6	LEMBAGA YUDIKATIF	14	12	4	3	3	0	2	0
7	INSTANSI VERTIKAL	45	23	5	3	3	3	6	3
8	LEMBAGA NONSTRUKTURAL	22	19	11	2	1	1	4	0
9	BUMD	17	13	2	0	3	0	5	3
10	SEKOLAH / MADRASAH	5	5	0	0	0	1	1	3
	JUMLAH	397	362	180	63	59	21	24	15

Sumber: KPID DIY, 2024



Gambar 7.4. Persentase Peringkat Tiap Klaster Monev Badan Publik Tahun 2023

Sumber: KPUD DIY, 2024

d. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Masih banyak Badan Publik di DIY yang belum masuk pada *cluster informatif*.
- Masih ada Badan Publik yang tidak melakukan registrasi

- c) Masih adanya laporan terkait sengketa informasi yang masuk dikarenakan kurangnya kesadaran keterbukaan informasi.

2) *Solusi*

- a) Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan di awal dengan metode offline agar instrumen indikator keterbukaan informasi lebih dipahami dan efektif
- b) Perlu penambahan klaster baru, misal Desa/Kalurahan, LSM/CSO, dll
- c) Mendorong instansi vertikal ikut berpartisipasi

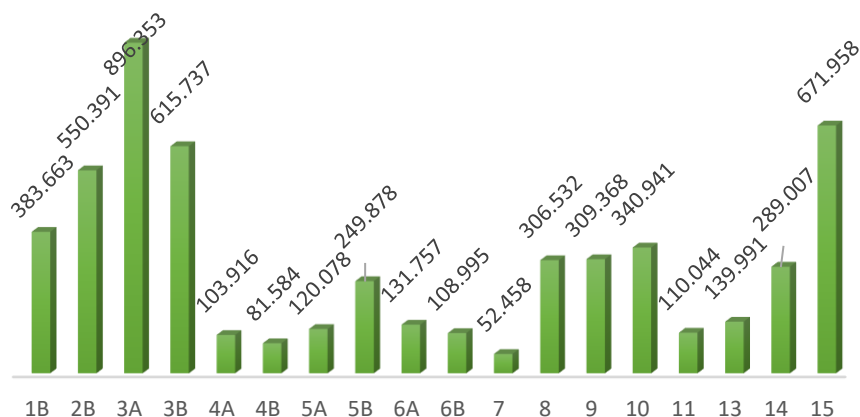
11. Trans Jogja

Pemda DIY sejak 2008 telah menjalankan layanan angkutan umum perkotaan berbasis subsidi dengan beroperasionalnya Angkutan Perkotaan Trans Jogja. Layanan angkutan bersubsidi ini sering disebut dengan Sistem *Buy the Service* (BTS) karena pola subsidinya berbasis pada pembelian pelayanan. Sistem ini masih berjalan hingga sekarang, dengan nama Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.

Sebagian besar dari prinsip-prinsip layanan angkutan umum telah diterapkan antara lain; layanan yang bersifat menyeluruh (jangkauan rute yang melayani di semua kecamatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta), rute yang tetap dan jadwal yang teratur, titik perhentian bus yang bersifat tetap dan dioperasikan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang tertuang didalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan (Dishub) DIY dengan PT Anindya Mitra Internasional (AMI) sebagai operator yang mendapatkan penugasan dari Pemda DIY berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem Buy The Service. Pemda DIY berharap dengan beroperasinya Bus Trans Jogja dapat berperan sebagai sistem layanan angkutan umum yang dapat memberikan fasilitasi mobilitas penduduk di Perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya. Bus Trans Jogja yang beroperasi melayani masyarakat

sebanyak 95 armada siap operasi (SO) sehingga rata-rata *headway* antar bus masih cukup tinggi yaitu 28,47 menit.

Pada tahun 2023, seluruh rute/trayek Trans Jogja sebanyak 18 rute telah dilayani dengan 95 unit armada dan 44 unit armada bus yang disubsidi oleh Pemerintah Pusat melalui Program *Buy The Service* (BTS) dengan cakupan wilayah 25 kecamatan.



Gambar 7.5. Jumlah Penumpang Trans Jogja Berdasarkan Rute/ Trayek

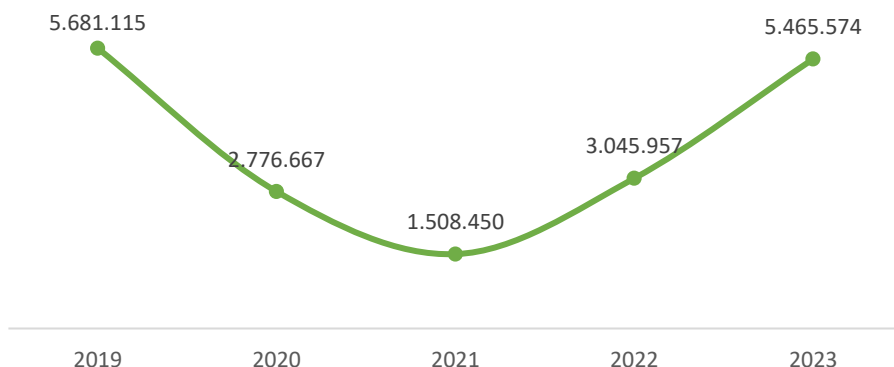
Sumber: Dishub DIY, 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan memberikan layanan angkutan umum di DIY yaitu dengan menyediakan layanan *buy the service* teman bus sejumlah 44 armada, 3 rute dan melayani 3 kecamatan. Hadirnya teman bus di DIY menjadi sangat berarti bagi Pemda DIY, karena dengan adanya teman bus target cakupan wilayah pelayanan angkutan umum sebanyak 25 kecamatan sudah semua terlayani.

Peningkatan layanan lainnya dilakukan oleh Pemda DIY dengan mengintegrasikan informasi layanan Trans Jogja ke dalam aplikasi TRANS JOGJA dan fasilitas *Public Transport Information System* (PTIS). Media ini berfungsi untuk memberikan informasi secara real time tentang informasi kedatangan bus, keberangkatan dan informasi lalu lintas lainnya kepada

penumpang trans jogja di halte sehingga penumpang lebih mudah dalam mengestimasi perjalanan yang akan dilakukan.

Jumlah penumpang Bus Trans Jogja mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring dengan perbaikan kondisi pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, jumlah penumpang meningkat sebesar 79,43% atau meningkat sejumlah 1,2 juta orang dengan rata-rata harian mencapai 14.974 orang.



Gambar 7.6. Jumlah Penumpang Trans Jogja 5 Tahun Terakhir

Sumber: Dishub DIY, 2024

e. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

- a) Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi di Yogyakarta yang mencapai angka 10-12 persen per tahun berkorelasi secara linear terhadap tingginya angka kemacetan lalu lintas di ruas-ruas dan simpang di KPY, termasuk juga hambatan terhadap perjalanan Bus Trans Jogja karena sifat operasinya yang masih bercampur dengan lalu lintas lainnya (*mix traffic*).
- b) Banyaknya permintaan masyarakat terhadap waktu tunggu yang singkat belum dapat dipenuhi hal ini disebabkan jumlah armada yang belum ideal menyebabkan headway yang cukup lama dan belum memenuhi SPM, sehingga menjadi salah satu

faktor penyebab kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan Transjogja.

2) **Solusi**

- a) Dalam menghadapi persoalan terhadap kemacetan lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta, diperlukan kebijakan yang tegas terhadap pengaturan-pengaturan lalu lintas. Pemda DIY dan Pemerintah Kab/Kota harus berkomitmen bersama dalam pengendalian penggunaan kendaraan bermotor di wilayah perkotaan, seperti zonasi terhadap tarif parkir, larangan parkir di badan jalan dan prioritas pemanfaatan angkutan umum sebagai solusi untuk mobilisasi untuk masyarakat menuju perkotaan Yogyakarta.
- b) Pemda DIY terus mengupayakan untuk memenuhi keinginan masyarakat agar Angkutan umum memiliki informasi yang mudah diakses oleh pengguna, salah satunya dengan meningkatkan fitur pada aplikasi dan memasang *Public Transport Information System* (PTIS) di beberapa halte, sedangkan upaya yang dilakukan untuk mempersingkat waktu tunggu penumpang adalah dengan evaluasi jalur dan *rerouting*, sehingga efektif dan efisien .



BAB VIII

Penutup

LKPJ
Gubernur DIY

Tahun
2023

Gubernur DIY Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen Pemda DIY dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pembangunan daerah. Laporan ini telah memuat hasil kinerja pelaksanaan APBD DIY Tahun 2023, tahun pertama RPD DIY Tahun 2023-2026. Hasil kinerja telah tersaji dalam pembahasan mengenai kebijakan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan, keistimewaan DIY, program strategis DIY, dan tugas umum pemerintah. LKPJ ini disusun untuk memenuhi amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan sebagai bahan evaluasi serta pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pembangunan daerah DIY selama tahun 2023. Dokumen LKPJ Gubernur DIY Tahun 2023 telah merepresentasikan refleksi, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun. Capaian pembangunan tersebut telah diukur melalui kontribusi program dan kegiatan yang berkualitas dalam mencapai sasaran pemerintah daerah dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan berorientasi pada hasil. Pelaksanaan program/ kegiatan pada tahun 2023 memiliki kinerja fisik dan keuangan yang cukup optimal yang didukung dengan kolaborasi lintas sektor.

Pelaksanaan pembangunan DIY tahun 2023 memiliki tema "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Produktivitas Sektor Unggulan," sesuai RKPD DIY Tahun 2023. Tema pembangunan tersebut dilaksanakan dalam 6 prioritas pembangunan yakni (1) Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, budaya); (2) Pemulihan Ekonomi; (3) Penurunan Kemiskinan; (4) Pengurangan gap ketimpangan wilayah; (5) Peningkatan kualitas layanan publik; dan (6) Menjaga daya dukung lingkungan. Capaian kualitas SDM, capaian daya dukung lingkungan, dan peningkatan kualitas layanan publik tercapai sampai dengan akhir tahun 2023. Adapun pemulihan ekonomi relatif optimal meskipun sampai angka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dirilis tercapai sekira 94,94 persen dari target. Pada prioritas penurunan kemiskinan dan pengurangan gap ketimpangan wilayah perlu terus dioptimalkan pada tahun perencanaan berikutnya. Inovasi

dan kolaborasi lintas sektor serta kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran daerah serta mengatasi keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Sebagai penutup, penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2023 ini merupakan laporan pelaksanaan yang menjadi titik awal perencanaan strategis pada periode RPJMD DIY 2022-2027. Capaian tahun 2023 ini merupakan pijakan awal yang menjadi acuan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun-tahun selanjutnya. Capaian pertama RPJMD DIY ini masih perlu ditingkatkan dan diberikan catatan kritis terhadap hambatan dan tantangan yang telah dihadapi. Capaian tersebut dapat menjadi mitigasi untuk mengoptimalkan prioritas pembangunan, tematik pembangunan, kolaborasi dan inovasi agar pencapaian sasaran daerah dapat tercapai lebih baik. Akhirnya, kinerja ini merupakan ikhtiar publik untuk “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi,” yang telah termaktub dalam RPJMD DIY 2022-2027.

ⁱ lihat dalam Sejarah Keistimewaan DIY, diakses pada <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/815/Sejarah-Keistimewaan-Yogyakarta> , 21 Februari 2024.



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAPPEDA DIY
@2024**

Kepatihan Danurejan, Telp. 0271 - 562811
(Psw. 1209 - 1220, 1243 - 1246) 511185; Fax. 0274 - 586712
<https://bappeda.jogjaprov.go.id>
Yogyakarta 55213